BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

125 TAHUN BRI MENYELAMATKAN UMKM

Mengubah **Kesulitan Menjadi Ketangguhan**

LAPORAN TAHUNAN **2020**

Keberlanjutan Tema

2015

The Biggest National Payment Bank Dengan Layanan Teknologi Menjangkau Pelosok Negeri Guna Mewujudkan Nawa Cita dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.

2016

Kerja Nyata bagi Negeri Membangun UMKM Unggul di Era Digital

2017

Membangun Negeri Melalui Integrated Banking Solution & Transformasi UMKM

2018

Akselerasi Pertumbuhan UMKM Melalui Digitalisasi Layanan Perbankan Untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2019

Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri

125 TAHUN BRI MENYELAMATKAN UMKM

Mengubah **Kesulitan Menjadi Ketangguhan**

125 tahun sudah BRI mencatatkan perjalanan panjangnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan melayani geliat berkembangnya nasabah dari lapisan masyarakat ekonomi kecil di seluruh pelosok Indonesia. Sepanjang usianya, BRI menunjukkan komitmennya dalam mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI konsisten memberi layanan terbaik pada segmen ekonomi terbesar yang dijalani sebagian besar masyarakat Indonesia dengan membina, memberdayakan dan mendukung mereka untuk mengoptimalkan kompetensi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Konsistensi BRI telah melahirkan sejumlah besar nasabah UMKM yang "naik kelas" dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan di usianya ke-125 tahun, pandemi melanda dan menjadi periode terberat yang mengubah dinamika kehidupan dan perekonomian seluruh lapisan masyarakat. BRI tegak berdiri di depan, memberikan dukungan terbaik bagi seluruh nasabahnya. Terutama bagi nasabah UMKM yang didera penurunan omset karena pembatasan sosial ekonomi.

Mengusung visi menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*" pada tahun 2025, BRI merealisasikan banyak terobosan brilian dalam mengatasi kondisi usaha yang tertekan, yang membatasi mobilitas seluruh pelaku usaha dalam berinteraksi dan mempromosikan produknya. BRI dengan sigap merealisasikan program restrukturisasi kewajiban dan di saat bersamaan mengoptimalkan keunggulan infrastruktur dan produk-produk layanan berbasis teknologi informasi. BRI dengan gencar membentuk ekosistem bisnis berbasis digital teknologi, yang memungkinkan seluruh nasabah pelaku bisnis terkoneksi dengan para konsumennya di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke berbagai manca negara. BRI telah mengubah kesulitan menjadi peluang mengembangkan usaha dan menjadikan kreativitas dalam mengoptimalkan ekosistem digital sebagai ajang unjuk ketangguhan dalam mengatasi seluruh tantangan berusaha.

Konsistensi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM, membuat BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.511,81 triliun dan tingkat permodalan yang kuat. BRI, kini dan ke depan, akan tetap konsisten dengan komitmennya untuk mendukung, membina, memberdayakan, dan terus memberi layanan terbaik kepada segmen UMKM. BRI bertekad untuk terus meningkatkan portofolio UMKM agar dapat memberi kontribusi terbaik kepada sebagian besar masyarakat dan memberi ketangguhan bagi daya tahan perekonomian bangsa.

Untuk Indonesia BRILian

BANGKIT BERSAMA MAJUKAN UMKM INDONESIA

125 tahun berdiri, BRI senantiasa berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pada tahun ini, di tengah kondisi yang menantang akibat pandemi Covid-19 BRI terus melakukan upaya terbaik dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Beberapa capaian sebagai wujud komitmen konsistensi dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM Naik Kelas di masa pandemi Covid-19.

MENJADI YANG TERDEPAN MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL & PENANGANAN COVID-19

1. Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19
- **Rp186,6 triliun**
- **2,8 juta** Nasabah Kredit

b. Penyaluran Kredit UMKM dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan leverage target yang ditetapkan Pemerintah sebesar **Rp45 triliun** (atau 3 kali) dari Penempatan Dana Pemerintah

c. Penyaluran Stimulus Subsidi Bunga Kredit
- **Rp5,46 triliun**
- **8,9 juta** Nasabah Kredit

d. Penyaluran Kredit UMKM dengan Skema Penjaminan Pemerintah
- **Rp8,73 triliun**
- **14.396** Nasabah Kredit

e. Penyaluran KUR Super Mikro
- **Rp8,66 triliun**
- **985 ribu** Nasabah Kredit

f. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
- **Rp18,6 triliun**
- **7,7 juta** Usaha Mikro

g. Penyaluran Subsidi Gaji
- **Rp6,45 triliun**
- **5,3 juta** Rekening

2. Pemberdayaan UMKM

BRI tetap fokus menyelamatkan serta mendukung pemberdayaan UMKM Naik Kelas melalui program:

a. **UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020,** bertujuan agar UMKM juga mampu bersaing di pasar global melalui kegiatan ekspor.
b. **BRIncubator,** Program pengembangan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas secara digital dan berorientasi ekspor.
c. **Desa Brilian,** Desa binaan BRI yang memiliki 4 aspek ekosistem meliputi BUMDes, Digital, *Innovation*, dan *Sustainability*.
d. **Pemuda BRILian,** Program akselerasi bisnis bagi pengusaha muda UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing.
e. **Rumah BUMN,** wadah Pengembangan UMKM, *Basecamp Millennials*, Program PK/BI/KUR, Satgas Bencana, dan *Coworking Space*.

3. BRI Peduli Melawan Covid-19

a. Bantuan Tanggap Darurat BRI Peduli Pencegahan Covid-19 melalui 19 Kantor Wilayah dan 467 Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
b. 8.981 Alat Pelindung Diri untuk Petugas Kesehatan.
c. 1.385.150 Masker untuk Masyarakat & Pedagang Pasar.
d. 6.812 *Hand Sanitizer*.
e. 6.247 spot *wastafel* di seluruh Indonesia.
f. BRI Berbagi 259.633 Paket Sembako Gratis.

BRI juga melakukan kegiatan CSR lainnya yang berfokus pada *Pro People, Pro Planet* dan *Pro Profit* melalui program sebagai berikut:

a. BRI Bersih-bersih Kali di 19 lokasi seluruh Indonesia.
b. Bantuan Sarana Prasarana untuk 1.000 Pasar di seluruh Indonesia.
c. 130 Bantuan Mobil Ambulans.
d. BRI Melihat Dunia, 5.000 Kacamata untuk pelajar.
e. Beasiswa untuk 5.000 pelajar Indonesia.

Tahun Terberat Telah Lewat, BRI Semakin Sehat dan Kuat

Aset tembus Rp1.500 triliun, Kredit Mikro tumbuh *double digit*, dan NPL terjaga dibawah 3%

BRI telah melewati tahun terberat dengan mampu mencatatkan kinerja yang positif berkat strategi yang fokus pada **penyelamatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** serta menjadi mitra utama Pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

1. Total Aset

mencapai Rp1.511,81 triliun atau tumbuh 6,7% *year on year*

2. Kredit

mencapai Rp938,37 triliun atau tumbuh 3,89% *year on year*, yang disumbang oleh segmen UMKM dengan komposisi mencapai 82,13%

3. Dana Pihak Ketiga

mencapai Rp1.121,10 triliun, dengan Dana Murah meningkat menjadi 59,67%

4. Laba Bersih

mencapai Rp18,66 triliun

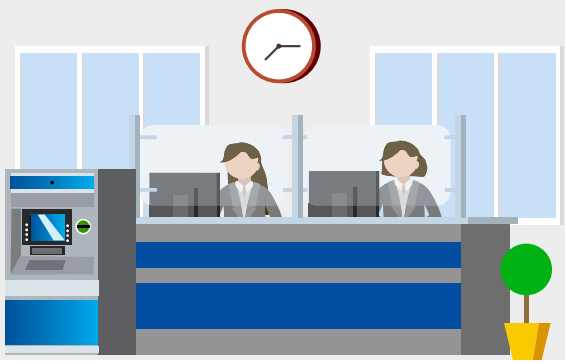

5. Kualitas kredit

terjaga baik dengan pencadangan yang memadai. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) terjaga sebesar 2,99% dan NPL Coverage 237,73%.

6. Kondisi Likuiditas

memadai dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 83,70%

7. Kondisi permodalan

kuat dengan Total CAR sebesar 21,17%

BRI MICRO & SME INDEX (BMSI) Q4-2020:

Optimisme UMKM Di Tengah Tantangan Pemulihan Ekonomi

BMSI merupakan index yang menilai Pelaku UMKM atas aktivitasnya untuk melihat situasi sekarang dan mengukur ekspektasi 3 bulan yang akan datang. Indeks ini telah di *launching* pada November 2020 lalu untuk mengukur aktivitas bisnis UMKM sekaligus merupakan bentuk kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia. Optimisme pelaku UMKM masih tinggi menyambut Q1 - 2021, hal ini tercermin dari indeks ekspektasi di atas level 100, walaupun aktivitas bisnis pada Q4-2020 sedikit menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara QoQ yang juga menurun.

BMSI Bergerak Sejalan dengan Arah Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Aktivitas Bisnis (IAB)

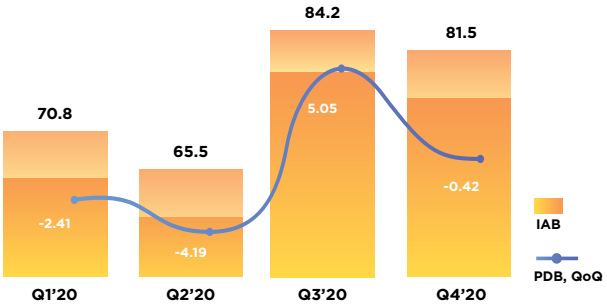

- **Aktivitas UMKM pada Q4-2020 menurun disebab-kan** oleh faktor-faktor :
  - Pengetatan PSBB pada akhir Q3-2020
  - Pembatalan libur panjang
  - Faktor musiman sektor usaha

  Namun **pelaku UMKM masih memiliki optimisme** menyambut **Q1-2021**

Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB)

- Sementara itu **IEAB** berada di level 105,4. Hal ini menunjukkan **pelaku UMKM** masih **optimis** menyambut **Q1 - 2021** dengan index masih >100

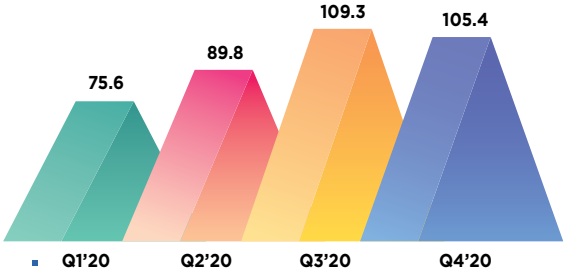

"...UMKM masih menunjukkan optimisme meski menghadapi kondisi yang kurang mendukung di beberapa bulan akhir tahun 2020..."

Awareness dan Kepercayaan Pelaku UMKM Terhadap Program PEN Meningkat

Awareness Pelaku UMKM terhadap Program PEN

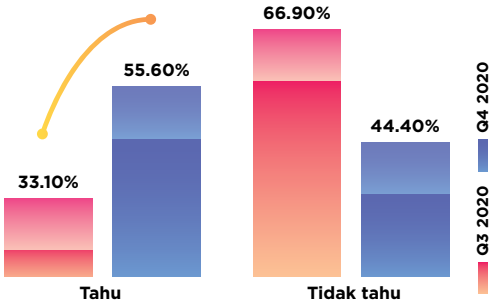

Mayoritas (55,6%) pelaku UMKM mengetahui adanya program PEN, hal ini meningkat dibandingkan periode survei sebelumnya.

Secara Umum Pinjaman yang Diberikan BRI Telah Digunakan Sesuai Tujuan Pemberiannya

Mayoritas pinjaman baru digunakan oleh nasabah untuk keperluan usaha seperti:

- Membeli bahan baku/bibit atau benih/ pupuk dan obat-obatan/barang dagangan (56,7%), terutama kategori usaha kecil dan mikro.
- Membeli peralatan produksi/usaha (25,6%), terutama kategori usaha ritel/ menengah.

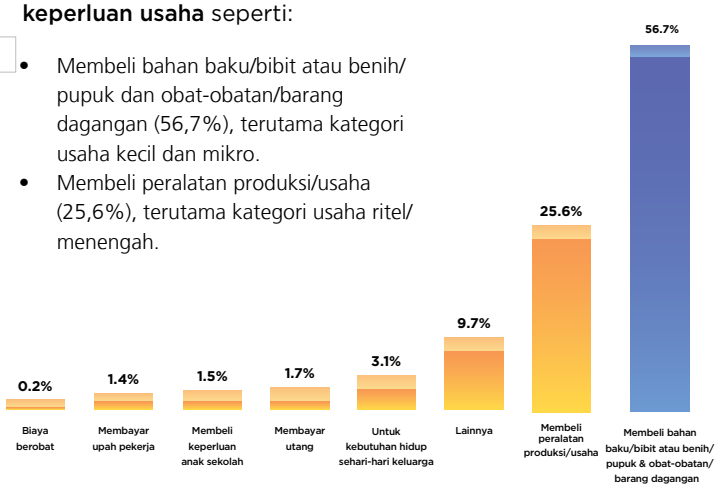

Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM Kepada Pemerintah (IKP)

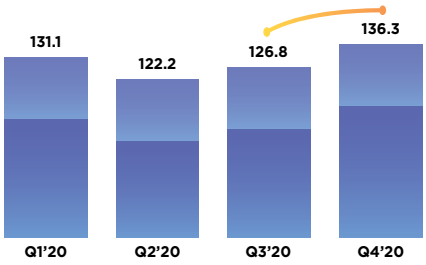

- Mayoritas pelaku UMKM memberikan penilaian yang baik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugasnya.
- Pelaku UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan Pemerintah untuk menciptakan rasa aman dan tentram.

Tentang Survei BMSI: Responden Meningkat Signifikan

Jumlah responden sebesar 5.000 nasabah UMKM (naik 67% dari survey Q3-2020 3.000 nasabah) di 33 Provinsi, dengan metode *sampling: stratified systematic random sampling*

Periode survei: **11 Januari – 4 Februari 2021**

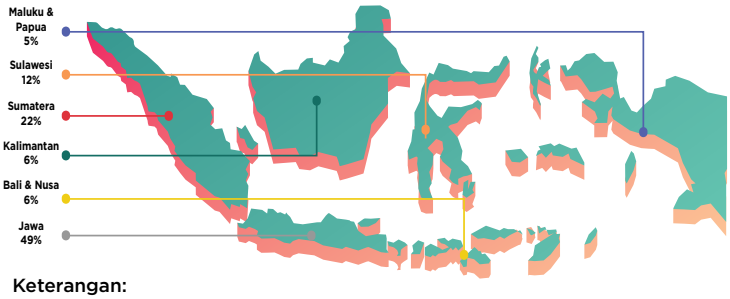

Keterangan:

- **Output berupa indeks** dengan nilai berkisar 0 s/d 200.
- 0 s/d 99 = zona pesimis (persepsi negatif > persepsi positif)
- 100 = zona netral (persepsi negatif = persepsi positif)
- 101 s/d 200 = zona optimis (persepsi positif > persepsi negatif)

Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi Indonesia

BRI berkomitmen untuk terus fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia dan menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Salah satunya dengan mendukung penuh program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga roda perekonomian terus berputar.

Sejak Mei 2020, BRI membuka akses pengajuan KUR melalui *online channel*, hal ini menegaskan komitmen BRI untuk memberikan akses KUR lebih luas kepada UMKM dengan dukungan jaringan serta sumber daya yang dimiliki kepada masyarakat. Pada Kuartal III tahun 2020 BRI kembali dipercaya Pemerintah sebagai bank penyalur terbesar KUR dengan skema baru yaitu KUR Super Mikro yang bertujuan sebagai stimulus pengembangan usaha masyarakat di tengah pandemi KUR Super Mikro dengan tujuan menjadikan stimulus pengembangan usaha berkelanjutan di tengah pandemi.

Hingga akhir 2020, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp138,5 triliun ke lebih dari enam juta pelaku UMKM atau tumbuh sebesar

57,62% dibandingkan dengan penyaluran tahun 2019 sebesar Rp87,9 triliun

UMKM EXPORT

BRILIAN PRENEUR 2020

Menampilkan 573 produk UMKM binaan BRI dan catatkan kontrak pembelian barang >USD57,5 juta

BRI UMKM EXPO(RT) BRILIAN PRENEUR merupakan pameran untuk mempertemukan pengusaha UMKM dengan pembeli potensial dari luar negeri, serta untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengusaha UMKM untuk berorientasi ekspor.

Penyelenggaraan pameran ini dilakukan secara *hybrid* pada 1 - 15 Desember, dengan puncak acara berlangsung pada 10 - 13 Desember 2020 di Jakarta. Pameran dilakukan secara virtual melalui www.brilianpreneur.com dan juga dapat disaksikan secara langsung di JCC-Jakarta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di tengah kenormalan baru.

Pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertaraf internasional ini berhasil memfasilitasi kontrak pembelian barang UMKM senilai lebih dari 57,5 juta dolar AS, dengan melibatkan 99 calon pembeli yang berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Australia. Angka ini meningkat 74% dibanding pencapaian tahun lalu.

Dalam acara ini menampilkan sebanyak 573 produk UMKM binaan BRI, dari berbagai bidang usaha meliputi fashion aksesoris *and beauty, home decor* dan *craft* serta *food and beverage*.

Memberdayakan UMKM Untuk Go Global Melalui BRIncubator

Pada tahun 2020, BRIncubator dilaksanakan dengan tema BRIncubator *Go Global* yang dilakukan secara *online*, dan diikuti oleh 289 UMKM. Pada akhir pelaksanaan BRIncubator terpilih 25 UMKM terbaik yang selanjutnya mendapatkan *reward* untuk pengembangan usahanya dan terus mendapatkan pendampingan dari Ekspertise dan Rumah BUMN agar siap memasuki pasar ekspor. Program BRincubator *Go Global* pada tahun 2020, juga mendapat perhatian serta *support* dari Kementerian Koperasi & UKM, dan Kemenristek/ BRIN.

AgenBRILink
Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor

504.233 Agen BRILink tersebar di seluruh Indonesia

BRI terus mendukung inklusi keuangan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan dengan menghadirkan Agen BRILink **sebanyak 504.233 Agen yang tersebar di lebih dari 54 ribu desa,** atau lebih dari **70%** dari total seluruh desa di Indonesia. **Volume transaksi BRILink mencapai 728 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp843 triliun pada 2020.**

#BRILiaNFightCovid-19

BRI Focus and Strategies

Sejak awal kasus Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemic oleh *World Health Organization* (WHO), BRI segera membentuk *Banking Command Center* yang merupakan langkah mitigasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan BRI dalam menghadapi pandemi dan tantangan kedepan. BRI telah menentukan sejumlah langkah terukur dalam penanggulangan dampak bencana COVID-19 ini, salah satunya dengan mengaktifkan protokol *Business Continuity Management* (BCM). Bank BRI juga menerapkan langkah-langkan pencegahan dan antisipatif untuk mengurangi dampak risiko penularan, khususnya perlindungan nasabah, pekerja dan keluarga pekerja. Salah satu cara mencegah risiko tertularnya virus Covid-19 tersebut adalah dengan membatasi kegiatan diluar rumah *(social distance),* termasuk mengalihkan pekerjaan kantor ke rumah *(work from home)* atau ke beberapa *working space* yang disediakan oleh BRI *(flexy work).* Langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan BRI yaitu:

Health and Safety Protocol

- Banking premises disinfection and sterilization
- Vaccines for employees
- Health care products for employees (masks, hand sanitizers, and vitamins)

Work From Home

- Shorten banking operational hours
- Work From Home
- Flexible office space

Digital Initiatives Optimization

- BRIStars Digital office application
- BRISpot: Digital loan processing
- BRISIM: Daily monitoring Dashboard

1. *Travel Restriction Policy*
2. *Business Trip Policy*
3. Protokol Kesehatan pelayanan kepada nasabah
4. *Social Distancing Policy (training, workshop/*sosialisasi, FPK, *Briefing*)
5. Protokol *Work From Home*
6. *Shifting, Split Operation* Untuk Fungsi Bisnis yang Kritikal
7. Protokol Kesehatan Spesifik Per Fungsi Jabatan
8. Penggunaan presensi online untuk mengurangi kontak dengan EDC
9. Vaksin Influenza & Pneumonia kepada 113.456 Pekerja BRI
10. Penyediaan Vitamin bagi pekerja
11. Bus Antar Jemput Pekerja (BODETABEK & Cibubur)
12. *BRIWORK* (*Alternate Site*)
13. *Change Agent* (CA) Forum dan pengukuhan Covid *Ranger* (berfungsi untuk mengawal protokol kesehatan di unit kerja)

Sustainable Business Growth

Loan portofolio

- Rp562 trillion or 63.9% Sustainable business activities loan portfolio
- Selective Growth
- Loan restructuring program
- Loan relaxion program

Liquidity and Market Activities

- Maintain reserve requirement, SR, LDR, RIM
- Maintain long position on Net Foreign Position
- Maintain Cash Ratio

Good Corporate Governance

GCG Implementation

- The principles of Good Corporate
- Governance remain in place

14. Penyediaan Tempat Cuci Tangan dan *Hand Sanitizer* di Seluruh unit kerja
15. Penyediaan *thermo scanner* di gedung BRI I & II dan Pengukuran suhu setiap memasuki Kantor BRI
16. BRILiaN *Fight Covid* (*Social Movement*)
17. *Campaign* GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
18. *Campaign* Protokol Kesehatan (cek suhu, cuci tangan, WFH, anjuran berjemur, dll)
19. *Campaign Cashless Transaction by Product owner*
20. *Campaign Daily Self Checking*

BRI telah menerapkan langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang menimpa pekerja BRI melalui;

1. Melakukan penerapan protokol kesehatan bagi pekerja yang terpapar Covid-19 dan prosedur penanganan dalam satu unit kerja
2. Penyediaan *Safe House* bagi pekerja positif covid di beberapa kota Besar, antara lain Jakarta, Surabaya dan Malang yang bertujuan agar pekerja tidak menularkan kepada anggota keluarganya dan fokus pada pemulihan

Perjalanan Digital Banking BRI

2017

Teras BRI Kapal Bahtera Seva II (Halmahera) dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III (Labuan Bajo)

2018

Asisten Virtual Perbankan BRI (SABRINA), BRISPOT Mikro, BRIAPI, Indonesia Mall

2016

E-Pasar BRI, BRI Sat

2015

Teras BRI Kapal Bahtera Seva I (Kepulauan Seribu)

2014

BRILink

2013

- *Self Service Banking* (*Hybrid Banking*)
- T-Bank

2012

E-Buzz BRI & BRIZZI

2009

Migrasi sistem dari BDS ke BRINETS Web, pengenalan *Internet banking*

2008

Cash Management System untuk BUMN

2007

Pengembangan *Core Banking* BRINETS

2006

Kartu Kredit BRI

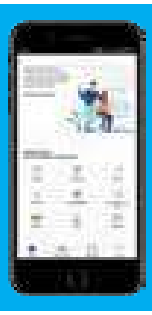

2019

BRImo, BRISPOT Konsumer, Pinang, Ceria, Ekosistem Digital (BRImola, Junio Smart, BRI Bill, BRI Store, dsb.).

2020

Pasar.id

New BRImo

BRI Digital Saving

BRISPOT External

Pasar.id merupakan aplikasi berbasis *website*. *Platform* ini merupakan *market place* yang dikembangkan BRI untuk mempertemukan penjual dan pembeli di pasar-pasar tradisional secara digital.

Web Pasar

4.548 Website Pasar	108.644 Pedagang terdaftar	936.218 Jumlah Transaksi	52 M Nominal Transaksi
Data per 31 Des 2020		Kumulatif Transaksi mulai Bulan Juli 2020	

Medan **232**	Pekanbaru **172**	Palembang **234**	Banjarmasin **212**	Makassar **116**	Manado **51**	Jayapura **44**	Semarang **337**	Padang **149**
B. Lampung **188**	Jakarta 1 **95**	Jakarta 2 **194**	Jakarta 3 **213**	Bandung **612**	Yogyakarta **605**	Malang **542**	Denpasar **309**	Surabaya **243**

BRI DIGITAL
INITIATIVES

Digitizing Core

Digitasi proses bisnis (business process engineering)

- Optimalisasi Jaringan Kerja Eksisting
- Integrated Digitized Operation
- Simplifikasi dan Standarisasi Sistem

AgenBRILink
Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor
Branchless Banking Initiatives for Micro

BRI SPOT
Digital Loan Underwriting System

BRI mo
Advanced Mobile Banking

Boost Productivity & Unleash The Potential

Digital Ecosystem

Membangun digital ekosistem untuk menawarkan produk dan layanan diluar bisnis utama bank:

- *Platform* Digital untuk Transaksi Bisnis
- Mengembangkan Bisnis Model Baru
- *Partnership*/Kolaborasi dengan *Fintech/E-Commerce*

Tap the Untapped Embedded in Customer Life

Strengthening Digital Capability

New Digital Propositions

Mengembangkan dan meluncurkan produk dan layanan digital baru

- Mobile First Channel
- Fully Digital Produk untuk Untapped Market
- Mengembangkan Kapabilitas Digital Baru

AI & Big Data Analytics

The First Bank with ISO Certificate in Big Data

ISO 27001:2013

Digital Loan Products

- traveloka PayLater — BRI x Traveloka Paylater Card
- ceria — Digital Credit Card
- KECE — Digital Ultra Micro Loan
- Pinang — Digital Lending Platform

Tap the Untapped Embedded in Customer Life

Digital Ecosystem Platform

- pasar.id — Online Wet Market
- BRI Smart — B2B2C Integrated Billing System
- School Management System
- BRIMOLA — LPG Gas 3kg Ordering Systerm
- STROBERI — Micro Transaction Ecosystem Solutions

ISO 27001:2013

BRI api

Digital partnership & Collaboration

The First Bank with ISO Certificate in Open API

P2P Partnership

- investree
- amartha

E-Commerce Partnership

- Shopee
- tokopedia

Ride Hailing Partnership

- gojek
- Grab

Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG)

Untuk Bisnis BRI yang Berkelanjutan

BRI telah terbukti mampu menghadapi berbagai krisis ekonomi dan secara konsisten mampu mempertahankan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Kinerja berkelanjutan BRI tersebut didukung oleh komitmen perusahaan dalam menerapkan praktek keuangan berkelanjutan serta mengintegrasikan aspek ESG (*Environment, Social, and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan) ke dalam aktivitas perbankan BRI.

First Mover on Sustainable Finance Indonesia

Sesuai Rencana Jangka Menengah *Road Map* Keuangan Keberlanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2015 – 2019, pada tahun 2018 BRI turut membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) beserta tujuh Bank lainnya yang masuk dalam kelompok '*First Movers on Sustainable Banking.*

Kredit kepada Aktivitas Bisnis Berkelanjutan

BRI telah melakukan pemetaan portofolio kredit kepada aktivitas bisnis berkelanjutan. Portofolio kredit yang dimaksud tercatat naik 14,1% secara YoY dari Rp493 triliun (komposisi 57,3% dari total kredit) di tahun 2019 menjadi Rp562 triliun (komposisi 63,9% dari total kredit) di akhir tahun 2020.

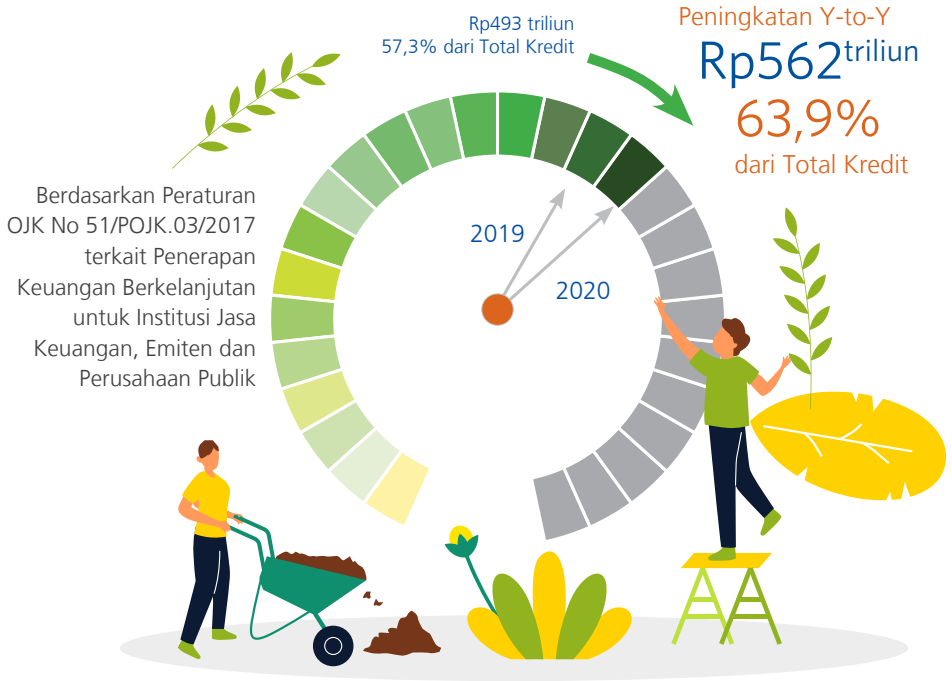

"Portofolio Kredit Usaha Kepada Aktivitas Bisnis Berkelanjutan BRI meningkat 14,1% YoY dengan nilai kredit sebesar Rp562 triliun, paling tinggi diantara institusi jasa keuangan sejenis lainnya"

BRI Sustainability Bond

Di tahun 2019, BRI menerbitkan *Sustainability Bond* senilai USD500 juta sebagai salah satu bukti komitmen BRI dalam mengintegrasikan ESG ke dalam aktivitas pendanaan bank. Seluruh hasil perolehan dana dari penerbitan *Sustainability Bond* tersebut digunakan untuk *Social* dan *Green Projects*.

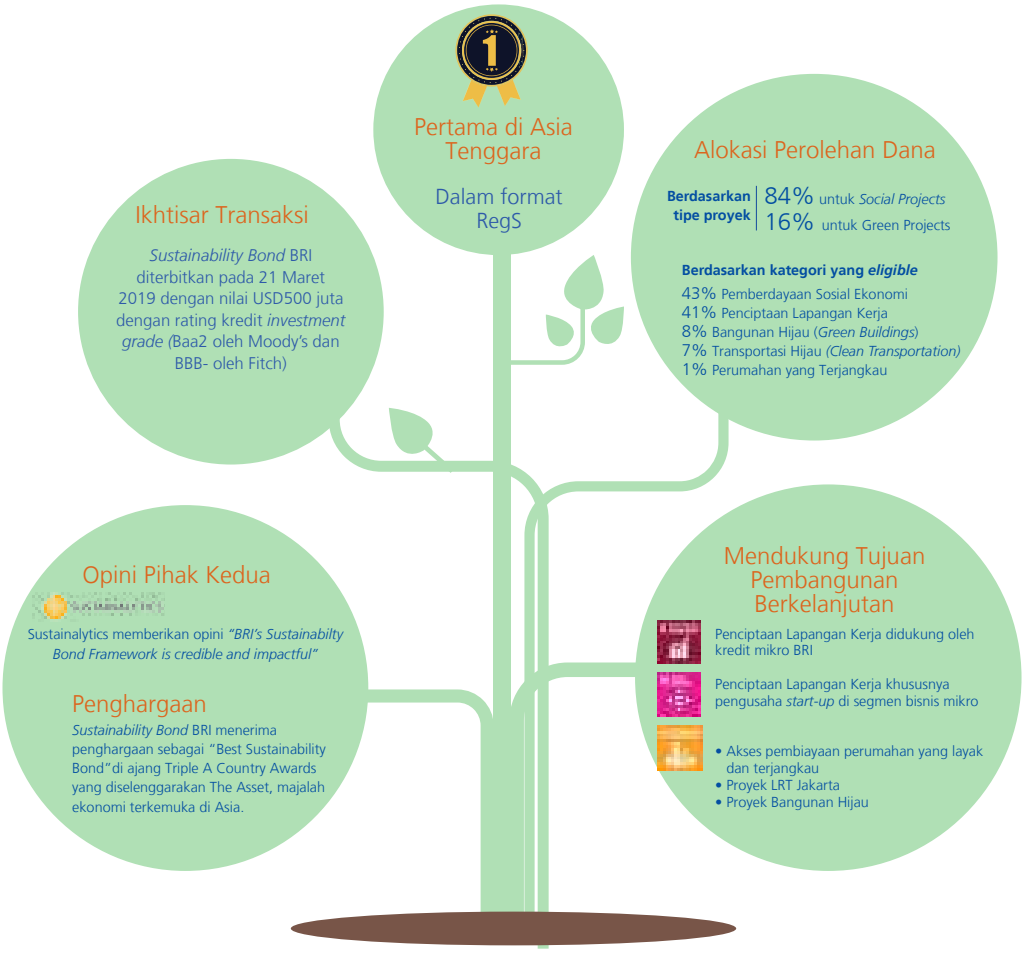

Digitalisasi Bisnis Proses

BRI telah melakukan berbagai inisiatif digitalisasi proses bisnis (*business process reenginering*) yang turut mendukung pelestarian lingkungan. Inisiatif tersebut meliputi BRILink (layanan keuangan tanpa kantor), BRISPOT (*digital loan underwriting system*), BRIStars (*digital office*), BRISMART (aplikasi pendidikan/pelatihan berbasis digital, dll).

Tata Kelola Perusahaan yang diakui secara Internasional

Pada tahun 2020 BRI dinobatkan sebagai Top 3 Indonesian Public Listed Company (PLC) serta ASEAN Asset Class Thresholds oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang menunjukkan bahwa perusahan telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan diakui secara Internasional.

Pemberdayaan Komunitas

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Komunitas (*Community Empowerment*) yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di 5 Rumah Kreatif BUMN (RKB) dengan tema terkait green business.
Total terselenggara 476 pelatihan RKB di berbagai kota, Malang, Jakarta, Jogja, Bandung, Solo, dll.

Training & Capacity Building

BRI telah memberikan *training* dan *capacity building* terkait Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh pekerja dan nasabah terkait sebagai usaha untuk meningkatkan *awareness* dan implementasi praktek keuangan berkelanjutan di BRI.

Daftar Isi

Ikhtisar Kinerja Utama

23 Ringkasan Kinerja 2020
24 Ikhtisar Keuangan
27 Informasi Harga Saham
30 Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar
33 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
34 Informasi Sukuk
34 Informasi Obligasi Konversi
34 Informasi Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Konversi dengan Pelunasan Dipercepat
35 Aksi Korporasi
36 Pembayaran Dividen
36 Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham
38 Peristiwa Penting

Laporan Manajemen

48 Laporan Dewan Komisaris
64 Laporan Direksi
80 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
81 Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Profil Perusahaan

83 Data Perusahaan
84 Makna Logo
86 Riwayat Singkat BRI
90 Riwayat Perubahan Nama Bank Rakyat Indonesia
92 Bidang Usaha
94 Produk dan Jasa
102 Wilayah Operasional
106 Jejak Langkah
110 Struktur Organisasi
112 Visi, Misi & Nilai-Nilai Utama
113 Budaya Perusahaan
120 Profil Dewan Komisaris
130 Profil Direksi
144 Profil *Senior Executive Vice President* (SEVP)
145 Demografi Karyawan
149 Komposisi Pemegang Saham
154 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
160 Struktur Perusahaan
161 Kronologi Pencatatan Saham
165 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
170 Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang
172 Penghargaan dan Sertifikasi
178 BRI *Service Quality Excellence*
180 Sertifikasi
185 Peringkat BRI
186 Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan
188 Informasi Pada *Website* Perusahaan
189 Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
201 Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Analisa dan Pembahasan Manajemen

204 Tinjauan Makro Ekonomi & Industri
209 Tinjauan Industri Perbankan & BRI
214 Rencana Strategis Bank
216 BRI untuk Indonesia
226 Tinjauan Bisnis
228 Segmen Bisnis Mikro
230 Bisnis Mikro
235 Bisnis Kredit Program
238 Bisnis Jasa Layanan Brilink
242 Segmen Bisnis Ritel
243 Bisnis Kecil dan Menengah
249 Bisnis Konsumer
250 Bisnis Kredit Konsumer
255 Bisnis Simpanan Ritel
259 Bisnis Jasa Perbankan Ritel
263 Segmen Bisnis Korporasi
264 Bisnis Korporasi BUMN, Dana Institusi & *Transaction Banking*
265 Bisnis Kredit Korporasi BUMN
268 Bisnis Institusi & Transaction Banking
273 Bisnis Korporasi Non BUMN, Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank
274 Bisnis Kredit Korporasi Non BUMN
277 Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank
280 Bisnis Internasional, *Treasury*, Dan Jasa Penunjang Pasar Modal
283 Bisnis Internasional
290 Bisnis Treasury
293 Investment Services Business
296 Bisnis Entitas Anak
327 Tinjauan Keuangan
331 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
346 Laporan Arus Kas Konsolidasian
389 Pengembangan *Human Capital*
419 Digital, Teknologi Informasi & Operasi
447 Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan
459 Jaringan & Layanan
469 *Change Management & Transformation Office*

Tata Kelola Perusahaan

474 Tata Kelola Perusahaan
479 *Good Corporate Governance*
480 Keterkaitan Tata Kelola Perusahaan Dengan Kinerja BRI
483 Penerapan *Good Corporate Governance*
511 Rencana Peningkatan Tata Kelola Tahun 2021
512 Infrastruktur *Corporate Governance*
513 *Good Corporate Governance System*
516 Rapat Umum Pemegang Saham
519 Penyelenggaraan RUPS 2020
522 Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020
531 RUPS Tahun Buku 2019
537 Dewan Komisaris
563 Komisaris Independen
563 Kriteria Komisaris Independen
565 Direksi
581 Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dekom, dan Pemegang Saham Utama & Pengendali
584 Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
600 Penilaian Penerapan Perusahaan Tahun 2020 Terhadap Dewan Komisaris Dan Direksi
605 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
619 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
651 Organ Pendukung Dewan Komisaris
651 Sekretariat Dewan Komisaris
654 Komite Audit
671 Komite Nominasi dan Remunerasi
688 Komite Pemantau Manajemen Risiko
703 Komite Tata Kelola Terintegrasi
719 Komite Direksi
745 Tata Cara Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko
746 Sekretaris Perusahaan
771 Dividen
772 Hubungan Investor
775 Satuan Kerja Audit Internal
790 Akuntan Publik
792 Fungsi Kepatuhan
797 Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
803 Fungsi Manajemen Risiko
829 Sistem Pengendalian Internal
837 Tata Kelola Teknologi Informasi
839 Kebijakan Perusahaan
845 Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
848 Akses Informasi dan Data Perusahaan
850 Penerapan Kode Etik Perusahaan
853 Informasi Praktik *Bad Corporate Governance*
853 Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
854 Budaya Perusahaan
855 *Whistleblowing System*
861 Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan
866 Benturan Kepentingan
867 Pencegahan *Insider Trading*
868 Pengadaan Barang dan Jasa
874 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
879 Rencana Strategis Bank
881 Tata Kelola Terintegrasi

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

892 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
905 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kelestarian Lingkungan
910 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
916 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
932 Pinjaman Kemitraan
936 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Laporan Keuangan 2020

942 Laporan Keuangan Konsolidasian 2020

IKHTISAR UTAMA

Tahun Terberat Telah Lewat, BRI Semakin Sehat dan Kuat

Pada tahun 2020 BRI mampu mencatat Aset secara konsolidasi sebesar

Rp 1.511,81 triliun

Aset tumbuh positif 6,71% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.416,76 triliun. Hal ini menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang memiliki aset di atas Rp1.500 triliun

Ringkasan Kinerja 2020

Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 BRI secara konsolidasi masih mampu mempertahankan kinerja yang baik, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif pada Kredit dan Dana Pihak Ketiga. BRI juga masih mampu membukukan keuntungan yang positif, diiringi rasio keuangan yang mampu terjaga dengan baik.

Total Kredit tercatat sebesar

Rp938,37 triliun

tumbuh 3,89% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp903,20 triliun, disumbang oleh segmen UMKM yang komposisinya naik menjadi 82,13%.

Total Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar

Rp1.121,10 triliun

tumbuh 9,78% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp1.021,20 triliun, mayoritas disumbang oleh Dana Murah (CASA) yang komposisinya naik menjadi 59,67%.

Tingkat profitabilitas tercatat positif dengan Laba Bersih mencapai Rp18,66 triliun.

Rp18,66 triliun

Kondisi likuiditas memadai dengan **Rasio *Loan to Deposit* (LDR)** terjaga pada level

83,70%

Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing loan/* NPL) BRI terjaga di angka

2,99%

dengan tingkat pencadangan (NPL *Coverage*) yang memadai sebesar 237,73%.

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) terjaga kuat sebesar

21,17%

jauh di atas minimum ketentuan regulator.

Ikhtisar Keuangan

Dalam Rp Juta

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2016	2017*)	2018*)	2019	2020
ASET					
Kas	25.212.226	24.798.037	27.421.625	30.219.214	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	58.155.479	71.159.442	71.416.449	51.530.969
Giro pada Bank Lain - neto	11.280.795	6.132.512	12.677.355	10.237.736	9.060.535
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain - neto	78.248.833	55.156.762	87.018.051	116.854.727	66.521.615
Efek-Efek - neto	132.086.000	186.938.838	184.284.052	195.840.173	327.266.714
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya - neto	11.580.175	17.144.862	33.309.763	34.185.258	26.246.814
Obligasi Rekapitulasi Pemerintah	3.318.434	3.317.840	1.505.273	1.130.306	-
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.557.370	18.011.026	9.396.553	22.582.244	46.818.568
Tagihan Derivatif	103.907	162.912	485.810	210.396	1.576.659
Kredit yang Diberikan - neto	621.286.679	684.046.917	779.626.717	839.067.353	834.293.205
Piutang dan Pembiayaan Syariah - neto	17.256.787	17.287.612	19.681.260	25.021.168	37.466.184
Piutang Sewa Pembiayaan - neto	2.070.300	2.385.483	3.321.846	4.104.096	3.406.164
Tagihan Akseptasi - neto	5.692.583	5.693.425	11.643.003	9.346.063	6.271.176
Penyertaan Saham - neto	11.718	83.100	460.096	745.304	1.489.800
Aset Tetap - neto	24.524.133	24.752.035	26.914.859	31.432.629	32.185.160
Aset Pajak Tangguhan - neto	2.539.713	3.286.732	5.114.653	4.541.298	8.313.545
Aset Lain-Lain - neto	12.396.074	20.093.917	22.877.934	19.824.426	27.195.956
Total Aset	**1.004.801.673**	**1.127.447.489**	**1.296.898.292**	**1.416.758.840**	**1.511.804.628**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Segera	5.410.313	6.584.201	8.462.958	7.549.312	11.845.910
Simpanan Nasabah	737.863.408	821.884.395	923.309.860	996.377.825	1.087.555.173
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2.229.538	5.593.367	9.131.158	17.969.829	23.785.996
Efek-efek yang dijual dengan janji Dibeli Kembali	7.302.398	12.136.684	37.379.394	49.902.938	40.478.672
Liabilitas Derivatif	347.217	200.858	332.343	184.605	407.774
Liabilitas Akseptasi	5.692.583	5.693.425	11.643.003	9.346.063	6.817.436
Utang Pajak	956.553	569.016	153.833	185.443	1.400.638
Surat Berharga yang Diterbitkan	24.800.781	30.619.658	31.190.216	38.620.837	34.489.091
Pinjaman yang Diterima	35.013.680	29.408.694	40.457.429	30.921.771	35.968.985
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	895	2.134	1.222	609.493	3.681.709
Liabilitas Imbalan Kerja	9.479.930	12.194.261	11.789.366	10.662.581	10.397.201
Liabilitas Lain-lain	10.498.804	13.794.513	15.339.787	19.359.607	20.052.299
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	1.008.510	986.450	1.473.515	1.465.366	1.465.392
Total Liabilitas	**840.604.610**	**939.667.656**	**1.090.664.084**	**1.183.155.670**	**1.278.346.276**
Dana Syirkah Temporer					
Giro Mudharabah	-	**139.535**	293.264	4.080.803	1.623.563
Tabungan Mudharabah	983.121	**1.270.484**	1.659.109	2.025.354	6.147.015
Deposito Berjangka Mudharabah	15.679.845	**18.362.036**	19.006.504	18.712.677	25.776.398
Total Dana Syirkah Temporer	**16.662.966**	**19.772.055**	**20.958.877**	**24.818.834**	**33.546.976**
Total Ekuitas	**147.534.097**	**168.007.778**	**185.275.331**	**208.784.336**	**199.911.376**
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	**1.004.801.673**	**1.127.447.489**	**1.296.898.292**	**1.416.758.840**	**1.511.804.628**

*) Setelah reklasifikasi akun

Ikhtisar Keuangan

Dalam Rp Juta

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Bunga & Syariah	94.015.994	102.912.375	111.582.804	121.756.276	116.932.512
Total Beban Bunga dan Syariah	(28.576.804)	(29.894.281)	(33.917.032)	(40.048.971)	(37.722.595)
Pendapatan Bunga dan Syariah Neto	**65.439.190**	**73.018.094**	**77.665.772**	**81.707.305**	**79.209.917**
Pendapatan Premi - neto	278.710	385.414	945.722	1.010.728	881.651
Total Pendapatan Operasional Lainnya	17.287.857	19.271.287	23.425.430	28.439.130	29.463.839
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - neto	(13.700.241)	(16.994.115)	(17.792.693)	(21.556.319)	(30.617.491)
Pembalikan (beban) Penyisihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi - neto	347	(1.239)	912	(608.271)	(2.157.162)
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan - neto	(103.705)	(258.524)	(528.982)	(595.015)	(75.231)
Total Beban Operasional Lainnya	(35.156.837)	(38.614.076)	(41.990.284)	(44.965.625)	(49.931.359)
Laba Operasional	**34.045.321**	**36.806.841**	**41.725.877**	**43.431.933**	**26.774.164**
Beban (Pendapatan) Non Operasional - neto	1.714	216.395	27.817	(67.880)	(49.318)
Laba Sebelum Beban Pajak	**34.047.035**	**37.023.236**	**41.753.694**	**43.364.053**	**26.724.846**
Beban Pajak	(7.761.784)	(7.978.187)	(9.335.208)	(8.950.228)	(8.064.453)
Laba Tahun Berjalan	**26.285.251**	**29.045.049**	**32.418.486**	**34.413.825**	**18.660.393**
Penghasilan Komprehensif Lainnya					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	159.569	61.655	601.819	(1.291.782)	(2.034.087)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(530.727)	(15.414)	(150.455)	322.945	367.922
Surplus revaluasi aset tetap	14.315.527	-	-	3.316.985	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(25.579)	30.709	(4.349)	(64.820)	(39.779)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	1.658.696	2.286.250	(5.141.381)	3.696.914	4.633.561
Cadangan Penurunan Nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	866.461
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(416.966)	(527.459)	1.216.705	(895.470)	(698.692)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	**15.160.520**	**1.835.741**	**(3.477.661)**	**5.084.772**	**3.097.386**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**41.445.771**	**30.880.790**	**28.940.825**	**39.498.597**	**21.757.779**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	26.234.256	28.997.141	32.351.133	34.372.609	18.654.753
Kepentingan non-pengendali	50.995	47.908	67.353	41.216	5.640
Total	**26.285.251**	**29.045.049**	**32.418.486**	**34.413.825**	**18.660.393**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	41.384.558	30.808.443	28.910.721	39.403.628	21.727.515
Kepentingan non-pengendali	61.213	72.347	30.104	94.969	30.264
Total	**41.445.771**	**30.880.790**	**28.940.825**	**39.498.597**	**21.757.779**
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam rupiah penuh)	**214.04**	**236.93**	**264.66**	**281.31**	**151,28**

Ikhtisar Keuangan

RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)	2016	2017*)	2018*)	2019*)	2020
Likuiditas					
LDR	87,77%	88,13%	89,57%	88,64%	83,66%
Kualitas Kredit					
NPL Gross	2,03%	2,10%	2,14%	2,62%	2,94%
NPL Nett	1,09%	0,88%	0,92%	1,04%	0,80%
NPL Coverage	170,34%	195,54%	200,61%	166,59%	247,98%
Profitabilitas					
NIM	8,00%	7,93%	7,45%	6,98%	6,00%
BOPO	68,93%	69,14%	68,48%	70,10%	81,22%
CER	41,26%	41,15%	41,02%	40,26%	46,60%
ROA	3,84%	3,69%	3,68%	3,50%	1,98%
ROE - Tier I	23,08%	20,03%	20,49%	19,41%	11,05%
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR Total)	22,91%	22,96%	21,21%	22,55%	20,61%
Rasio Kecukupan Modal Tier 1 (CAR Tier 1)	21,91%	21,95%	20,15%	21,52%	19,59%

*) Setelah reklasifikasi akun

KEPATUHAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	**6,94%**	**6,52%**	**7,16%**	**6,15%**	**3,19%**
Giro Wajib Minimum (Valas)	**8,03%**	**8,15%**	**8,01%**	**8,07%**	**4,01%**
Posisi Devisa Neto	**6,67%**	**4,22%**	**3,73%**	**1,87%**	**1,07%**

Angka kinerja keuangan tersebut di atas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas anak untuk tahun 2016: PT Bank BRIsyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2017: PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong,
PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; untuk tahun 2018: PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2019: PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur; dan untuk tahun 2020: PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.

Rasio Keuangan menggunakan data bank saja.
*) Pada tahun 2016 dan 2019 terdapat peningkatan nilai aset dan modal karena revaluasi aset dengan nilai masing-masing sebesar Rp14,3 triliun dan Rp3,3 triliun.

Informasi Harga Saham

Harga, Volume, dan Kapitalisasi Pasar Saham BRI tahun 2015 - 2020

Tahun	Harga Lembar/ Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2015	**2.305**	**2.690**	**1.595**	**2.285**		**34.957.535.000**	
Triwulan ke-1	2.305	2.655	2.265	2.655	24.669.162.000	8.290.667.000	327,48
Triwulan ke-2	2.655	2.690	2.010	2.070		9.697.584.500	255,33
Triwulan ke-3	2.070	2.180	1.595	1.730		9.290.696.500	213,39
Triwulan ke-4	1.745	2.340	1.710	2.285		7.678.587.000	281,85
2016	**2.280**	**2.595**	**1.905**	**2.335**		**32.143.440.000**	
Triwulan ke-1	2.280	2.460	2.085	2.285	24.669.162.000	8.417.654.500	281,85
Triwulan ke-2	2.260	2.260	1.905	2.160		8.472.383.500	266,43
Triwulan ke-3	2.180	2.450	2.140	2.440		8.073.172.000	300,96
Triwulan ke-4	2.440	2.595	2.085	2.335		7.180.230.000	288,01
2017	**2.350**	**3.720**	**2.315**	**3.640**		**23.211.823.300**	
Triwulan ke-1	2.350	2.650	2.315	2.595	24.669.162.000	5.965.294.500	320,08
Triwulan ke-2	2.595	3.060	2.485	3.050		5.359.020.000	376,20
Triwulan ke-3	3.000	3.150	2.860	3.055		5.878.135.000	376,82
Triwulan ke-4	3.055	3.720	3.025	3.640	123.345.810.000*)	6.009.373.800	448,98
2018	**3.690**	**3.920**	**2.720**	**3.660**		**28.131.320.100**	
Triwulan ke-1	3.690	3.920	3.530	3.600	123.345.810.000	7.159.651.000	444,04
Triwulan ke-2	3.500	3.660	3.720	2.840		8.999.924.100	350,30
Triwulan ke-3	2.890	3.410	2.830	3.150		7.056.550.400	388,53
Triwulan ke-4	3.150	3.710	2.910	3.660		6.966.375.800	451,44
2019	**3.610**	**4.730**	**3.580**	**4.400**		**26.402.140.700**	
Triwulan ke-1	3.610	4.140	3.580	4.120	123.345.810.000	6.650.751.600	508,18
Triwulan ke-2	4.140	4.730	3.660	4.360		7.125.444.800	537,79
Triwulan ke-3	4.400	4.560	4.000	4.120		5.934.903.000	508,18
Triwulan ke-4	4.120	4.470	3.810	4.400		6.691.041.300	542,72
2020	**4.400**	**4.740**	**2.170**	**4.170**		**48.792.630.368**	
Triwulan ke-1	4.400	4.740	2.440	3.020	123.345.810.000	10.241.247.904	372,50
Triwulan ke-2	3.020	3.300	2.170	3.030		17.486.903.160	373,74
Triwulan ke-3	3.030	3.800	2.990	3.040		10.560.676.448	374,97
Triwulan ke-4	3.040	4.400	3.100	4.170		10.503.802.856	514,35

*) Pada tanggal 10 November 2017, Bank BRI melakukan aksi korporasi dengan memecah jumlah lembar saham (stock split) dengan rasio 1:5. Seluruh harga saham di atas telah disesuaikan dengan harga setelah stock split pada tahun 2017.

Sepanjang tahun 2020, kondisi pasar finansial mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Seiring hal tersebut, kinerja saham BRI pun sedikit terkoreksi.

Pada akhir tahun 2020, Harga BBRI ditutup pada kisaran Rp4.170 per lembar saham, atau menurun 5,23% YoY dibandingkan harga penutupan tahun 2019 yang sebesar Rp4.400/lembar saham.

Meskipun kinerja BBRI mengalami koreksi, namun pencapaian tersebut masih lebih baik dibanding *peers*.

Informasi Harga Saham

Pergerakan Harga dan Volume Transaksi Saham BRI tahun 2020

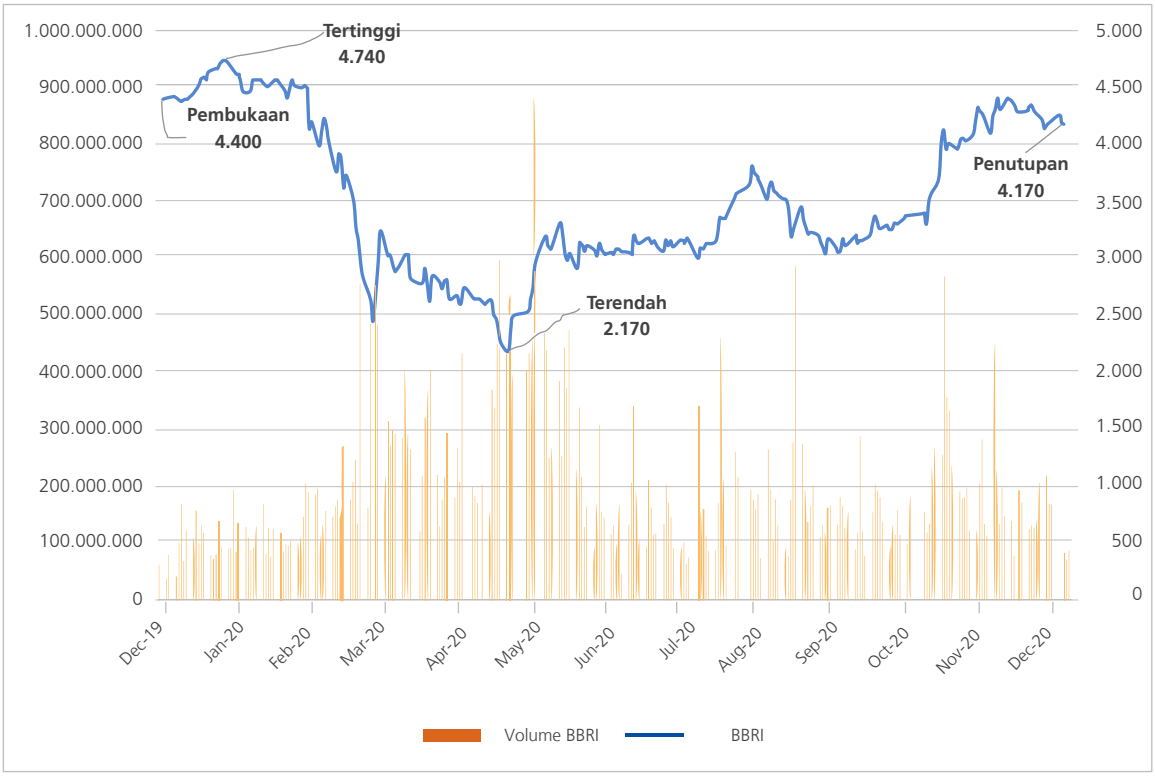

Pergerakan Harga Saham BRI tahun 2019

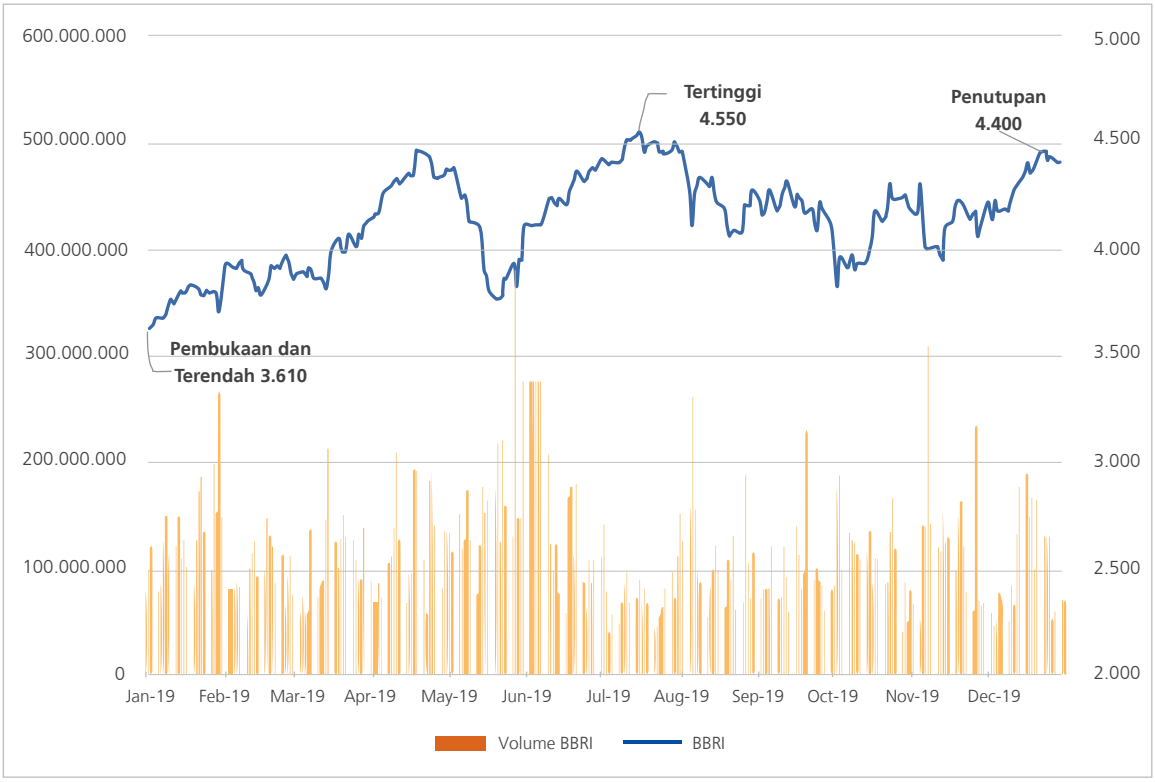

Informasi Harga Saham

Kapitalisasi Pasar Saham BRI tahun 2015-2020

(dalam Rp Triliun)

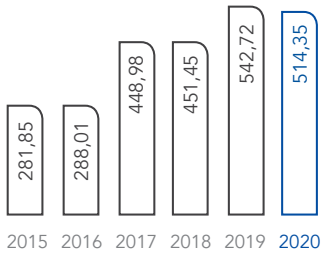

Indikator Kinerja Saham BRI tahun 2015-2020

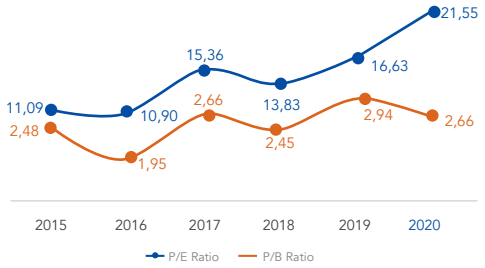

KONDISI PASAR MODAL DAN KINERJA SAHAM BRI TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Pasar Modal, tidak hanya untuk domestik namun juga seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja beberapa sektor ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Seiring itu kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi ke titik terendah pada level 3.911, sebelum kembali meningkat.

Melalui dukungan stimulus UMKM dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah mampu mengurangi dampak Covid, dan memulihkan kondisi ekonomi.

Optimisme pasar meningkat seiring pulihnya kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian domestik yang menunjukan pemulihan pada Kuartal 3.

Pada akhir 2020, IHSG terkontraksi 5,09% YoY mencapai level 5.979,07, menurun dibanding indeks 2019 yang sebesar 6.300.

Seiring dengan kondisi tersebut, kinerja saham BRI pun mengalami hal yang sama. BBRI sempat mengalami penurunan sampai pertengahan Mei 2020. Melalui stimulus dukungan UMKM, dan Program PEN, BRI turut aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi, akselerasi pemberian kredit, subsidi bunga, dan penjaminan kredit. Seiring hal tersebut, kinerja usaha kembali pulih, dan menunjukan peningkatan.

Pada akhir tahun 2020, kinerja BBRI sedikit terkoreksi dan berada pada kisaran harga Rp4.170, atau menurun 5,23% YoY Kapitalisasi pasar BBRI mencapai Rp514,35 Triliun pada akhir tahun 2020. Posisi tersebut menjadikan BRI sebagai BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dan Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara.

Informasi Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi Yang Masih Beredar

Informasi Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (dalam juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Coupon/ Discount Rate (%)	Status Pembayaran	Peringkat	Wali Amanat
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	4-Feb-16	5 tahun	IDR	Rp2.823.500	100%	4-Feb-21	9,60%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	25-May-16	5 tahun	IDR	Rp701.000	100%	25-May-21	8,70%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
3	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	1-Dec-16	5 tahun	IDR	Rp193.000	100%	1-Dec-21	8,20%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	1-Dec-16	7 tahun	IDR	Rp477.000	100%	1-Dec-23	8,65%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	1-Dec-16	10 tahun	IDR	Rp2.350.000	100%	1-Dec-26	8,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	11-Apr-17	5 tahun	IDR	Rp925.000	100%	11-Apr-22	8,30%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11-Apr-17	10 tahun	IDR	Rp1.300.500	100%	11-Apr-27	8,80%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	24-Aug-17	5 tahun	IDR	Rp1.652.500	100%	24-Aug-22	8%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24-Aug-17	7 tahun	IDR	Rp2.517.000	100%	24-Aug-24	8,25%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21-Feb-18	5 tahun	IDR	Rp1.837.000	100%	21-Feb-23	6,65%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21-Feb-18	7 tahun	IDR	Rp605.000	100%	21-Feb-25	6,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
12	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	21-Jun-18	5 tahun	IDR	Rp500.000	100%	26-Jun-23	7,70%	Belum Lunas	idAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
13	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	7-Nov-19	3 tahun	IDR	Rp2.089.350	100%	7-Nov-22	7,60%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
14	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	7-Nov-19	5 tahun	IDR	Rp2.172.800	100%	7-Nov-24	7,85%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
16	Global Bond 2018	20-Jul-18	5 tahun	USD	USD500	99,696%	20-Jul-23	4,625%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
17	Sustainable Bond 2019	28-Mar-19	5 tahun	USD	USD500	99,713%	28-Mar-24	3,950%	Belum Lunas	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	BNY Mellon

Informasi Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi Yang Masih Beredar

Informasi Obligasi yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (Juta)	Jangka Waktu	Coupon/ Discount Rate (%)	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25-Sep-03	30-Oct-13	USD150	120 bulan	7,75	B3	Moodys	Memperkuat Permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	09-Jan-04	09-Jan-14	Rp500.000	120 bulan	13,5	AA+	Pefindo	Memperkuat Permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22-Dec-09	22-Dec-14	Rp2.000.000	60 bulan	10,95	AA+	Pefindo	Memperkuat Permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	USD500	60 bulan	2,95	Baa3	Moodys	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25-Jun-15	07-Jul-16	Rp655.000	370 Hari	8,4	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25-Jun-15	03-Jul-18	Rp925.000	36 bulan	9,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
7	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19-Jan-16	08-Feb-17	Rp808.000	370 Hari	8,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
8	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19-Jan-16	04-Feb-19	Rp1.018.500	36 bulan	9,25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
9	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	04-May-16	30-May-17	Rp1.212.000	370 Hari	7,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
10	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	IDR	7-Nov-19	17-Nov-20	Rp737.850	370 Hari	6,5	idAAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance

Informasi Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi Yang Masih Beredar

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (Juta)	Jangka Waktu	Coupon/ Discount Rate (%)	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
11	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	04-May-16	25-May-19	Rp2.437.000	36 bulan	8,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	02-Dec-16	06-Dec-17	Rp616.000	370 Hari	7,25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	02-Dec-16	01-Dec-19	Rp964.000	36 bulan	8	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12-Apr-17	16-Apr-18	Rp1.131.000	370 Hari	7,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	02-Jul-15	03-Jul-20	Rp1.420.000	60 bulan	9,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	11-Apr-17	11-Apr-20	Rp1.743.500	36 bulan	8,1	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
17	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24-Aug-17	24-Aug-20	Rp980.500	36 bulan	7,6	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Penerbitan *Negotiable Certificate* Deposit (NCD) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri A	24-Jun-20	3 Bulan	IDR	Rp630.000	24-Sep-20	5,35% (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri B	24-Jun-20	6 Bulan	IDR	Rp520.000	23-Dec-20	5,30% (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri C	24-Jun-20	12 Bulan	IDR	Rp850.000	24-Jun-21	5,75% (Diskonto)	Belum Lunas

Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp Juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10-Okt-14	370 Hari	IDR	Rp300.000	15-Okt-15	8,75	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10-Okt-14	24	IDR	Rp60.000	10-Okt-16	9,25	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10-Okt-14	36	IDR	Rp360.000	10-Okt-17	9,50	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24-Des-14	12	IDR	Rp520.000	24-Des-15	8,90	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16-Sep-16	370 Hari	IDR	Rp1.925.000	21-Sep-17	7,40	Sudah Lunas

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah menerbitkan sukuk.

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah menerbitkan obligasi konversi

Informasi Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Konversi dengan Pelunasan Dipercepat

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah memiliki obligasi dengan pelunasan yang dipercepat.

Aksi Korporasi

Penandatanganan Conditional Shares Subcription Agreement (CSSA) antara BRI, FWD Financial Services Pte.Ltd. (FWD) dan BRI Life

Pada tanggal 19 Juni 2020, telah ditandatangani Conditional Shares Subcription Agreement (CSSA) antara BRI, FWD Financial Services Pte.Ltd. (FWD) dan BRI Life untuk kerjasama strategis jangka panjang. Sesuai CSSA FWD akan melakukan tambahan modal melalui saham baru yang diterbitkan BRI Life sehingga menjadi pemegang minoritas, sedangkan BRI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dari BRI Life. Saat ini transaksi sedang dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembelian Kembali Saham (Buyback)

Pada tahun 2020 BRI melakukan aksi pembelian kembali saham (buyback) sebagai respon kebijakan OJK dalam meredam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34. Saat ini sisa *treasury stock* menjadi 750.463.500 lembar saham.

Ringkasan *Buyback* Tahun 2020

No.	Tanggal	Lot	Nominal	Harga Rata-Rata
1	16/03/2020	15.000	5.355.000.000,00	3.570
2	17/03/2020	31.000	10.234.000.000,00	3.301
3	18/03/2020	12.000	3.752.000.000,00	3.127
4	19/03/2020	7.000	2.063.000.000,00	2.947
5	20/03/2020	6.000	1.641.000.000,00	2.735
6	16/04/2020	3.000	777.000.000,00	2.590
7	24/04/2020	1.000	263.000.000,00	2.630
8	28/04/2020	2.000	516.000.000,00	2.580
9	13/05/2020	5.000	1.236.000.000,00	2.472
10	14/05/2020	10.000	2.397.000.000,00	2.397
11	15/05/2020	33.000	7.395.000.000,00	2.241
12	10/06/2020	33.000	9.936.000.000,00	3.011
13	12/06/2020	6.000	1.689.000.000,00	2.815
	Jumlah	**164.000**	**47.254.000.000,00**	**2.881**

Penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan). Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (*surviving entity*) dan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bank Peserta Penggabungan mengumumkan Merger Plan dimana komposi Pemegang Saham (dengan asumsi tidak ada MESOP BRIS dieksekusi) menjadi PT Bank Mandiri (Persero) sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2,1%, PT BNI Life Insurance 0,0%, PT Mandiri Sekuritas 0,0% dan Publik 4,3%.

Pembayaran Dividen

Target RUPS	Tanggal Pembayaran	Tahun	Rasio Pembayaran Dividen (%)	Dividen (Rp Miliar)	Dividen Per Saham*
2004	23 Juli 2004	2003	75	990	8,42
2005	5 Juli 2005	2004	50	1.816	15,29
2006	10 Juli 2006	2005	50	1.904	15,62
2007	2 Juli 2007	2006	50	2.129	17,30
2008	7 Juli 2008	2007	50	2.419	19,63
2009	3 Juli 2009	2008	35	2.085	16,92
2010	15 Juli 2010	2009	30	2.192	13,21
2011	15 Juni 2011	2010	20	2.294	14,01
2012	15 Mei 2012	2011	20	3.017	24,46
2013	15 April 2013	2012	30	5.556	45,05
2014	14 Mei 2014	2013	30	6.348	51,47
2015	22 April 2015	2014	30	7.272	58,96
2016	22 April 2016	2015	40	7.619	62,33
2017	13 April 2017	2016	40	10.478	82,72
2018	4 April 2018	2017	45	13.048	106,75
2019	13 Juni 2019	2018	50	16.176	132,17
2020	18 Maret 2020	2019	60	20.623	168,11

*) Seluruh angka dividen telah disesuaikan dengan *Stock Split* 1: 2 pada Januari 2011 dan 1:5 pada Oktober 2017

Penentuan besaran dividen diputuskan dalam RUPST sebagai organ utama perusahaan. Dalam RUPST 2020 untuk tahun buku 2019, telah diputuskan pembayaran dividen sebesar Rp20.623 miliar atau rasio *Dividend Pay Out*/ DPO sebesar 60%. Dalam proses penentuan DPO tersebut, manajemen berhak untuk mengajukan besaran dividen dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memperhatikan pemenuhan rasio kecukupan modal (CAR). Dengan implementasi Basel III yang dimulai pada Januari 2015 secara bertahap sampai dengan implementasi penuh pada Januari 2019, maka tingkat minimum CAR yang harus dijaga sesuai dengan ketentuan regulator (OJK) sebesar 14,50%.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham

Sampai dengan penerbitan Laporan Tahunan 2020, BRI tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham Perseroan ataupun penghapusan pencatatan saham.

BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

Kunjungi AgenBRILink

Transaksi Lebih Dekat dan Aman

TRANSFER SESAMA BRI | TRANSFER KE BANK LAIN | SETOR DAN TARIK TUNAI | BAYAR LISTRIK | BAYAR PDAM

BAYAR BELANJA ONLINE | BELI PULSA | SETORAN PINJAMAN | TOP UP BRIZZI | INFO SALDO

Sambut semangat baru dengan kemudahan melakukan semua transaksi yang lebih dekat dan aman di AgenBRILink Ada lebih dari 500 ribu AgenBRILink tersebar di seluruh Indonesia yang siap melayani Anda. Jangan lupa tetap memakai masker dan jaga jarak setiap transaksi di AgenBRILink.

#MulaiLagi

Info lebih lanjut kunjungi https://bit.ly/fiturAgenBRILink

LAKU PANDAI

AgenBRILink
Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CONTACT CENTER AgenBRILink 0800-10-14017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @kontakBRI

Peristiwa Penting

1 Januari

BRI Bangun Posko dan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta. BRI mendirikan posko darurat di beberapa titik di Jabodetabek, BRI juga menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana banjir berupa perahu karet, tenda besar darurat, terpal, makanan siap saji, air mineral, makanan ringan, obat-obatan, dan keperluan lainnya.

13 Januari

BRI melakukan *Launching* Program BLDP (BRILiaN Leadership Development Program). BLDP merupakan bentuk implementasi Transformasi HC berupa program pendidikan untuk pengembangan *leadership* bagi pekerja BRI.

16 Januari

BRI kembali menorehkan prestasi dengan raihan penghargaan berskala internasional dari The Asset, majalah ekonomi terkemuka di Asia. Dalam acara tahunannya, Triple A Country Awards, BRI meraih 2 penghargaan sekaligus, yaitu sebagai "Best Issuer for Sustainable Finance" dan "Best Sustainability Bond". Penghargaan tersebut diterima di Hongkong.

29 Januari

BRI beserta perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group yakni Danareksa Investment Management serta Danareksa Sekuritas menggelar BRI Group Economic Forum 2020 yang merupakan wadah pembahasan strategis menyangkut kondisi perekonomian nasional dan global. Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani & Direktur Utama BRI Sunarso

30 Januari

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dengan insan media dan mengkomunikasikan visi BRI kedepan, BRI menyelenggarakan Pemimpin Redaksi Gathering di Kantor Pusat Bank BRI di Jakarta.

21 Maret

BRI menentukan sejumlah langkah terukur dalam penanggulangan dampak Covid-19, salah satunya dengan mengaktifkan protokol *Business Continuity Management* (BCM). Salah satunya adalah dengan mengaktifkan pusat komando atau *Banking Command Center* BRI yang mulai dioperasikan sejak awal Maret 2020.

23 Maret

BRI terus melakukan upaya untuk mendukung Pemerintah menekan penyebaran Virus Corona. Perseroan menyerahkan bantuan CSR berupa sarana dan prasarana penunjang Rumah Sakit Corona Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta (23/03).

Peristiwa Penting

10 Februari

BRIxGoogle Hackaton

BRI menggandeng Google menyelenggarakan event bertajuk BRIxGoogle Hackaton yang dibuka di Jakarta. BRIxGoogle Hackaton dengan tema "Supporting Indonesia Digital Economy based on Small Medium Enterprises (SME) untuk Indonesia BRilian" dilaksanakan selama 2 hari dari 10-11 Februari 2020 di tiga kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya.

26 Februari

BRI berkolaborasi dengan beberapa merchant sneaker ternama mengadakan kegiatan CERIA Sneaker Hype Fest. Kegiatan ini digunakan BRI untuk sarana mempromosikan CERIA sebagai platform digital lending berbasis aplikasi. Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 26 – 28 Februari 2020 ini di buka langsung oleh Wakil Direktur Utama Bank BRI Catur Budi Harto bersama dengan Direktur Konsumer Bank BRI Handayani di Area Taman Kantor Pusat Bank BRI, Jakarta.

26 Februari

BRI Dukung penyelenggaraan CNBC Indonesia Economic Outlook 2020. Pada kesempatan itu Dalam kesempatan itu, Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Direktur Utama BRI bicara soal prospek ekonomi RI di tahun ini.

28 Februari

BRI bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait layanan perbankan dalam pembayaran online surat izin mengemudi (SIM) internasional. Layanan ini akan mempermudah masyarakat membayar tagihan pembuatan SIM internasional. Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Hubungan Kelembagaan serta BUMN Agus Noorsanto dan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Istiono di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso.

27 Maret

Di tengah upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), BRI bergerak cepat dengan memberikan bantuan sembako langsung (BSL) untuk masyarakat kurang mampu ataupun yang terkena dampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jumlah bantuan yang disalurkan sebanyak 50 ribu paket dengan total senilai Rp5 miliar.

Peristiwa Penting

15 Mei

Gerakan sosial pekerja BRI Grup "BRILian Fight Covid-19" telah menghimpun dana bantuan sukarela sebanyak Rp 22,16 Miliar. Tercatat sebanyak 62.000 pekerja BRI Grup telah berpartisipasi menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19. Donasi insan BRILian pekerja BRI Grup juga disalurkan kepada Yayasan BUMN.

16 April

Satu Juta Masker Gratis Bagi Pedagang Pasar di Tengah Pandemi Corona, BRI terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19. Peran aktif tersebut ditunjukkan dengan dengan pemberian 1 juta masker gratis bagi para pedagang yang masih melakukan aktivitasnya di pasar.

15 Juni

BRI bersama delapan perusahaan BUMN lainnya membentuk suatu ekosistem Pasar Digital UMKM yang diberi nama PaDi UMKM. BRI mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk go online sehingga dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

6 Juli

Kemenkop UKM dan BRI Dorong Kebangkitan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Subsidi Bunga KUR. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyampaikan bahwa BRI menerima alokasi dana dari Kemenkop UKM untuk mendukung *program tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)* dan meneruskan subsidi bunga ini kepada UMKM yang masuk dalam kriteria penerima.

7 Juli

BRI teken perjanjian kerja sama dengan PT Askrindo, dan PT Jamkrindo. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari PMK 71/2020 terkait penjaminan kredit UMKM terdampak pandemi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kerjasama ini merupakan tindak lanjut BRI untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggerakkan kembali UMKM. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah BRI Priyastomo dan Disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo

9 Juli

Perkuat Implementasi Transformasi *Culture & Kick off New Way of Working*. BRI selenggarakan BRILiaN Culture Agent Forum secara daring dengan mengambil tema"*Let's Give Impact*"ini merupakan sarana komunikasi dalam menggerakkan transformasi *culture*. Diikuti oleh sekitar 6.000 pekerja BRI yang terdiri dari *Culture Leader & Culture Agent*. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi momen *kick off* BRI *New Way of Working*.

Peristiwa Penting

17 Agustus

BRI Memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia

BRI ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan, dengan mengusung semangat bangkit dan berbagi di tengah pandemi. BRI juga memaknai kemerdekaan dengan mengambil peran mendukung kemajuan bangsa Indonesia melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRI Peduli, berupa pemberian Beasiswa kepada 5.000 pelajar di seluruh Indonesia.

19 Agustus

Press conference kinerja keuangan BRI Triwulan II 2020 secara *daring* di Jakarta. Strategi yang telah diterapkan perusahaan untuk tetap tumbuh di tengah pandemi membuahkan hasil yang positif. Hingga akhir Juni 2020, perseroan mampu mencatatkan laba konsolidasian sebesar Rp10,20 triliun dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.387,76 triliun atau tumbuh 7,73% yoy.

9 Juli

BRI Sabet 7 Penghargaan Sekaligus pada Ajang 9th Anugerah BUMN 2020. Pada kesempatan itu Direktur Utama BRI, Sunarso, dinobatkan sebagai CEO Visioner Perusahaan Tbk Terbaik dan CEO Talent Development Terbaik. BRI juga menyabet beberapa penghargaan, antara lain sebagai BUMN Dengan Strategi Pertumbuhan Terbaik, BUMN Dengan Transformasi Organisasi Terbaik, BUMN Dengan Penerapan GCG Terbaik, BUMN Dengan Pengembangan SDM Unggul Terbaik, dan Best Overall BUMN.

17 Juli

BRI Bersama Bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meluncurkan program Digital Kredit UMKM atau DigiKu, platform penyaluran permodalan bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Melalui program tersebut, Bank BUMN akan menyalurkan bantuan modal hingga Rp4,2 triliun dengan target satu juta unit UMKM sebagai penerimanya.

30 Juli

BRI dan Telkom melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait kolaborasi layanan teknologi berbasis satelit. Nota kesepahaman kedua BUMN tersebut ditandatangani Direktur Utama BRI, Sunarso dan Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, serta disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di Gedung BRI

Peristiwa Penting

1 September

BRI meluncurkan program Britama Festival pada Press Conference Virtual Launching BritAma FSTVL. BRI memberikan kemudahan bagi calon nasabah dengan melakukan pembukaan rekening melalui *platform digital saving* melalui situs resmi atau melalui buka rekening. bri.go.id.

4 September

BRI Memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN) tahun 2020 dengan menggelar acara secara virtual bertajuk "BRI Customer Day 2020". Acara yang dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto itu mempertegas komitmen BRI untuk melakukan percepatan transformasi digital untuk melayani nasabah dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih aman.

10 September

BRI dan PT PP melaksanakan proses *topping off ceremony* pembangunan proyek Menara BRI Gatot Subroto Jakarta. Proyek pembangunan Menara BRI ini ditargetkan dapat selesai pada bulan Juni 2021. Menara BRI Gatot Subroto ini terdiri dari 5 lantai basement, 5 lantai podium dan 32 (tiga puluh dua) lantai tower. Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama BRI Sunarso, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto dan Direktur Utama PTPP Novel Arsyad.

BRI Bersih-Bersih Kali

1 Oktober

BRI melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) "BRIPeduli Konservasi Sungai" melakukan konservasi Sungai Pagarsih yang terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Program ini dimulai pada November 2019 dan telah selesai pada Agustus 2020. Kondisi sungai sebelumnya yang penuh dengan sampah kini sudah bersih dan tertata rapih serta dimanfaatkan masyarakat sekitar. Program BRI Bersih-Bersih Kali yang dilaksanakan di 19 Kantor Wilayah BRI Selindo.

26 Oktober

"BRI Bersih – Bersih Kali" di Sungai Kalisari Kampung Pelangi, Semarang. Kegiatan bersih – bersih di Sungai Kalisari diikuti oleh Direktur Utama BRI Sunarso dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Program CSR ini dilakukan dengan dengan beberapa kegiatan meliputi pembersihan dan penataan sungai, edukasi lingkungan sehat, pemberdayaan dan pengelolahan sampah, pembangunan sarana dan prasarana di pinggir sungai serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peran AgenBRILink. Program BRI Bersih-Bersih Kali yang dilaksanakan di 19 Kantor Wilayah BRI Selindo.

Peristiwa Penting

11 November

Pada pemaparan kinerja BRI kuartal III 2020 secara *virtual* di Jakarta (11/11) Direktur Utama BRI Sunarso menyempaikan Kinerja BRI hingga akhir September 2020, perseroan mampu mencatatkan laba konsolidasian sebesar Rp14,15 triliun dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.447,85 triliun atau tumbuh 10,89% *yoy*. BRI meyakini UMKM akan segera bangkit pada periode selanjutnya, optimisme tersebut didasari oleh hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM-BRI pada Kuartal III-2020 yang mengindikasikan kegiatan usaha UMKM mulai menggeliat dan memiliki optimisme perbaikan lebih tinggi di Kuartal IV-2020. Hasil survei menunjukkan BRI Micro & SME Index (BMSI) naik dari 65,5 menjadi 84,2 di kuartal III-2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi 109,3 untuk kuartal IV-2020.

Launching BRI Micro & SME Index:
BRI Optimistis UMKM Bangkit

18 November

Direktur Utama BRI Sunarso, kembali mendapat apresiasi dengan meraih penghargaan Best CEO of The Year untuk kategori Sustainable Development Goals Contribution pada malam puncak penganugerahan People of The Year 2020 yang dihelat oleh stasiun televisi, Metro TV.

BRI Mendapatkan 14 penghargaan
di ajang ESG Awards 2020

BRI dinobatkan sebagai perusahaan dengan keterbukaan ESG Emiten Sektor Perbankan Terbaik pada ajang ESG Awards 2020. BRI juga memborong 14 penghargaan dalam ajang tersebut.

Keempat belas penghargaan itu di antaranya Keterbukaan ESG Emiten Sektor Perbankan Terbaik, Keterbukaan Environmental Emiten Sektor Perbankan Terbaik, Keterbukaan Social Emiten Sektor Perbankan Terbaik, Keterbukaan Governance Emiten Sektor Perbankan Terbaik, Keterbukaan ESG Bank Kategori Buku IV Terbaik, Keterbukaan Environmental Bank Kategori Buku IV Terbaik, Keterbukaan Social Bank Kategori Buku IV Terbaik dan Keterbukaan *Governance* Bank Kategori Buku IV terbaik

Peristiwa Penting

10 Desember

BRI Gelar UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020

Menyambut perayaan HUT yang ke-125 tahun dan sebagai wujud konsistensi dalam pemberdayaan UMKM Indonesia, BRI kembali menggelar BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020 yang diselenggarakan selama 15 hari mulai tanggal 1 s.d. 15 Desember 2020. Pada acara puncak yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual ini juga dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, Menteri BUMN RI Erick Thohir (online), serta Direktur Utama BRI Sunarso. BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020 ini telah sukses mencatatkan kontrak pembelian barang UMKM lebih dari US$59 juta dan melibatkan 99 buyer dari 24 Negara.

16 Desember

125 Ribu Karyawan dari 5 Negara Peringati HUT ke-125 BRI.

BRI memperingati ulang tahun yang ke-125. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT BRI yang mengambil tema "Untuk Indonesia BRILiaN" ini dilaksanakan secara virtual karena diselenggarakan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Peringatan HUT BRI ini diikuti oleh seluruh jajaran Direksi, Komisaris, dan 125 ribu Pekerja BRI dari 5 Negara.

17 Desember

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2020
BRI Raih Penghargaan Bergengsi

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2020, BRI Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik dan Sunarso Sebagai Top National Banker. BRI kembali meraih berbagai penghargaan bergengsi, kali ini BRI mendapatkan penghargaan sebagai BUMN Terbaik 2020 sektor "keuangan" kategori "perbankan" dan Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai "Tokoh Finansial Indonesia 2020" kategori Perbankan atau sebagai "Top National Banker 2020" oleh Majalah Investor di Jakarta.

21-22 Desember

BRI menyelenggarakan Senior Leaders Forum & Rapat Kerja Nasional BRI

Dalam rangka menutup tahun 2020 dan menyosong tahun 2021, BRI menyelenggarakan *Senior Leaders* Forum & Rapat Kerja Nasional BRI. Kegiatan ini merupakan forum komunikasi jajaran manajemen BRI untuk menyelaraskan visi dan strategi *Board of Manajemen* dengan seluruh Pemimpin Unit Kerja BRI.

LAPORAN MANAJEMEN

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi, BRI berhasil menutup tahun 2020 dengan capaian positif yang membuat fundamental perseroan semakin sehat dan kuat.

Krisis yang kita alami saat ini adalah krisis yang terberat apabila dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Namun BRI Group telah melewati tahun terberat dengan pertumbuhan positif berkat strategi yang fokus pada penyelamatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menjadi mitra utama pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di tahun 2021 dengan kondisi fundamental yang sehat dan kuat, BRI Group makin optimistis bisa memberikan dan men-deliver value kepada seluruh stakeholders dengan tetap menjadi mitra utama pemerintah dalam upaya membangkitkan perekonomian nasional.

Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

"Perseroan berhasil meningkatkan asset menjadi Rp1.511,8 triliun atau naik sebesar 6,7% (yoy) dan berhasil mencatat laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp18,66 triliun. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di tengah perubahan ekonomi yang dinamis, khususnya dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan yang dihadapi dengan terus beradaptasi dan tumbuh berkelanjutan untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi *"The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion"* pada tahun 2025.

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk--untuk selanjutnya disebut "Perseroan atau BRI"-- dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan terus beradaptasi serta tumbuh berkelanjutan sehingga menghasilkan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp18,66 triliun melampaui target yang telah ditetapkan Perseroan dan peningkatan aset sebesar 6,7% (yoy) menjadi Rp1.511,8 triliun.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian kinerja Perseroan tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Perseroan terus menjalankan perannya sebagai *agent of development* dengan baik dengan menjadi rekanan strategis Pemerintah dalam menyalurkan berbagai stimulus dan penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, Perseroan telah mampu memberikan *value added* yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, izinkan kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan kepengurusan usaha Perseroan yang dijalankan oleh Direksi selama tahun buku 2020.

PENILAIAN ATAS KINERJA MANAJEMEN

Penilaian Dewan Komisaris mengenai kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2020 terdiri dari aspek kuantitatif maupun kualitatif atas realisasi dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai kinerja perusahaan masih baik terlihat dari Perseroan tetap dapat membukukan laba dan merealisasikan strategi inisiatif untuk mendukung pencapaian target RBB tahun 2020 meskipun di tengah dinamika perekonomian yang cukup menantang dengan

Laporan Komisaris

adanya pandemi Covid-19.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kondisi perekonomian global yang cukup menantang dengan masih berlangsungnya *US-China Trade War*, diikuti dengan penyebaran virus Covid-19 di berbagai belahan dunia. Hal ini menyebabkan proyeksi perekonomian dunia mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia juga mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan kondisi terburuk tercatat pada kuartal kedua 2020 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -5,32% (negatif), dan beranjak naik secara gradual ditutup pada angka -2,07% pada akhir tahun 2020. Kondisi perekonomian berlangsung membaik didorong oleh permintaan domestik dan distribusi dan akselerasi vaksinasi oleh pemerintah.

Dalam menjalankan aktivitas usaha pada tahun 2020, sesuai dengan fokus portofolio pada segmen UMKM, Perseroan telah tercapai komposisi kredit mikro sebesar 40% dari total baki kredit. Perseroan tetap berkomitmen membantu segmen UMKM yang menjadi *backbone* perekonomian di Indonesia melalui program restrukturisasi pinjaman yang terkena dampak Covid-19, merespon Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020. Angka tertinggi restrukturisasi pinjaman sebesar Rp193,7 triliun pada September 2020 dan membaik menjadi Rp186,6 triliun pada akhir tahun. Perseroan melakukan restrukturisasi dengan selektif dan pengawasan ketat serta menyesuaikan dengan kondisi debitur. Terdapat peningkatan *loan at risk* (LAR) sehingga Perseroan mengupayakan mitigasi risiko dengan cermat. Selain itu, Perseroan juga melakukan pencadangan yang memadai dengan pencapaian *non performing loan* (NPL) *Coverage* sebesar 248% dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas kredit serta upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan terkontraksi sebesar -2,41%. Namun pertumbuhan kredit Perseroan masih tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan. Secara umum, lemahnya permintaan kredit dipengaruhi oleh penurunan tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat selama tahun 2020.

Sedangkan dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Perseroan berhasil mencapai target hingga 102,89%. Posisi Simpanan tahun 2020 *(bank only)* mengalami peningkatan sebesar 8,55% (*yoy*) dengan komposisi *Current Account-Saving Account* (CASA) sebesar 61,00% atau tercapai 102,6% dari RKAP. Perseroan memfokuskan pada penurunan *cost of fund* (CoF). Rasio CoF tahun 2020 sebesar 3,22% turun dari tahun 2019 sebesar 3,58%.

Kondisi permodalan Perseroan juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio/CAR)* mencapai 20,61%, jauh di atas minimal ketentuan regulator dan *Risk Appetite Statement* perusahaan sebesar 17%, serta dapat melampaui target posisi CAR yang telah ditetapkan. Di sisi lain, posisi rasio *Return On Asset* (ROA) sebesar 1,98% saat ini juga menunjukkan bahwa tingkat produktivitas bisnis Perseroan lebih baik dibandingkan industri perbankan.

Pemerintah memberikan berbagai stimulus dan kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Perseroan menjadi mitra utama pemerintah dalam implementasi Program PEN dan menjalankan tugas sebagai *Agent of Development*. Perseroan terus melakukan peningkatan pelayanan dan ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan penuh kepada UMKM. Pada tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada lebih dari 7,5 juta debitur dengan total penyaluran kredit untuk segmen mikro (Kupedes, Kupedes Rakyat dan KUR Mikro) sebesar Rp351,3 triliun. Perseroan juga fokus pada ekspansi KUR dengan skema KUR Super Mikro dengan penyaluran kepada 985 ribu nasabah dan bekerjasama dengan beberapa *E-Commerce* dan *Ride Hailing Application.*

Sebagai salah satu inisiatif *branchless banking,* Perseroan terus menjalankan program inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan memperkuat agen BRILink menjadi 504.233 agen yang tersebar diseluruh nusantara. Agen BRILink memberikan berkontribusi kuat kepada *fee based income* Perseroan sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2020 atau naik

sebesar 47% (yoy).

Perseroan membentuk *digital ecosystem platform* yang menawarkan produk dan layanan dengan *new business model* seperti www.pasar.id untuk platform di pasar-pasar (*online wet market*), BRISmart Billing, Junio Smart untuk pendidikan, BRImola LPG Gas 3 kg Ordering System, *Micro Transaction Ecosystem Solutions* dan *Digital Partnership* & *Collaboration* dalam rangka memanfaatkan peluang baru dan sumber pertumbuhan baru. Adanya pandemi Covid-19, tidak membuat Perseroan patah semangat untuk memberdayakan UMKM *go international*. Dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang diatur oleh Pemerintah, Perseroan menyelenggarakan "BRIlianpreneur UMKM Export 2020" untuk dapat melakukan pembinaan, dukungan dan membuka akses pengusaha UMKM kepada akses internasional yang diikuti lebih dari 500 UMKM selama tiga hari pameran dengan potensial *deal* senilai $59,08 juta dan total transaksi pada bazar sebesar Rp3,5 miliar.

Perusahaan senantiasa berkomitmen, antusias dan berkesinambungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan kondisi masyarakat, lingkungan dan ekonomi dengan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Sosial Responsibility*) yang dikenal dengan nama BRI Peduli dengan tujuh klaster program bina lingkungan berdasarkan sektor bantuan yang diberikan yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari, dan Indonesia Sejahtera telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Pelaksanaan program bina lingkungan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi dan capaian Perseroan oleh berbagai lembaga yang kredibel antara lain penghargaan *Top* CSR *Award* 2020 sebagai *Best* CSR oleh *Top Business*, *Best Issuer For Sustainable Finance* dan *Best Sustainability Bond* oleh The Asset, BUMN dengan penerapan GCG terbaik oleh BUMN Track dan berbagai penghargaan lainnya.

Perseroan dalam kapasitas sebagai Entitas Utama konglomerasi keuangan BRI, melalui tata kelola terintegrasi yang memadai, telah berhasil membawa kinerja semua entitas Perusahaan Anak untuk tumbuh lebih baik. Sepanjang 2020, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan aksi korporasi yang meliputi tambahan penyertaan modal pada perusahaan anak dan rencana strategis lainnya sehingga total aset Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp109,1 triliun. Perseroan akan terus mengoptimalkan kinerja Perusahaan Anak agar meningkatkan kontribusinya kepada Entitas Utama. Konglomerasi keuangan BRI terdiri dari beberapa perusahaan di sektor keuangan yang secara lengkap menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini tentu akan mendorong terwujudnya BRI sebagai "*The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion*" yang didukung dengan kredit mikro dan ultra mikro yang dapat memenuhi bermacam ragam kebutuhan layanan keuangan seluruh nasabah di masa kini dan mendatang.

Pandemi Covid-19 mendorong Perseroan melakukan percepatan strategi inisiatif khususnya pada sistem teknologi informasi yang mengarah pada *digital banking* disemua produk dan aktivitas. Hal ini meningkatkan daya saing Perseroan dalam menghadapi tantangan terutama perubahan kondisi sosial dan perilaku nasabah yang semakin *cashless* dan *social distancing*. Perseroan sebagai lembaga intermediari dan juga penyedia layanan jasa sistem pembayaran yang handal, terpercaya dan efisien. Perseroan juga selalu melakukan inovasi dengan menerbitkan berbagai produk dan aktivitas baru, memperkaya *bussiness model* dan menyempurnakan *bussiness process*, baik dalam rangka mempertahankan *existing customer* maupun menyasar *new customer* pada berbagai kelompok masyarakat termasuk

Laporan Komisaris

kalangan milenial.

Telah dilakukan *culture transformation* pada seluruh jajaran staf dan manajemen dengan penerapan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* dan acuan budaya kerja yang telah di amanahkan oleh Kementerian BUMN. AKHLAK telah diterjemahkan Perseroan dalam "BRILian Ways" sebagai internalisasi nilai-nilai utama pekerja. Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan akan selalu dapat memenangkan persaingan, menghadapi segala tantangan, tumbuh secara berkelanjutan. Perseroan juga telah menetapkan *Employee Value Proposition* yaitu "Memberi Makna Indonesia" yang merupakan *tagline* perusahaan untuk terus fokus pada pengembangan dan penyelamatan pada segmen mikro yang berkontribusi dan berdampak pada makro bagi Indonesia.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENERAPAN STRATEGIS PERSEROAN

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan menyampaikan laporan pengawasan tersebut disampaikan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pengawasan RBB Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020

Sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank BRI, Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan kepada Perseroan antara lain dengan memberikan nasihat maupun pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan dan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan selama tahun 2020. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas RBB Tahun 2020-2022 dan Rencana Kerja Anggaran Perseroan tahun 2021

Dewan Komisaris juga memfokuskan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2020, yaitu beberapa aspek namun tidak terbatas pada aspek perkreditan, operasional, perkembangan teknologi informasi, tata kelola terintegrasi dan budaya perusahaan termasuk pemantauan terhadap implementasi program PEN.

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk empat komite yaitu :

1. **Komite Audit,**
   Komite Audit bertindak secara *independent* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan (*oversight*) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Komite Audit telah memonitor proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perseroan secara baik dalam pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

2. **Komite Pemantau Manajemen Risiko,**
   Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

3. **Komite Nominasi dan Remunerasi,**
   Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi pada setiap tingkatan organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan *talent* kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan atas hasil review kebijakan pengelolaan *human capital* Perseroan.

4. **Komite Tata Kelola Terintegrasi**
   Komite Tata Kelola Terintegrasi telah membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi

dan memastikan tata kelola yang komprehensif dan efektif yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau professional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja. Sepanjang tahun 2020, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui forum rapat komite dengan mengundang Direktorat, Divisi maupun Satuan kerja terkait maupun secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan melaksanakan rapat sebanyak 25 kali.
Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2020, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 26 kali.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2020 dan telah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali.

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2020, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak enam kali selama tahun 2020.

Selain itu Dewan Komisaris dan Komite telah menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan dan Tata Tertib Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawaban. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja dan berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menjaga Perseroan agar lebih *resilient* dalam menghadapi segala tantangan dan memperoleh kinerja terbaik dalam industri perbankan dan keuangan di Indonesia.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*

Pada Tahun 2020, Perseroan telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup GCG, diantaranya pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kebijakan *Whistleblowing System* dan penyempurnaan aplikasi Pelaporan *Whistleblowing System* melalui situs BRI. Selain itu, meskipun dalam masa pandemi Covid-19 yang membatasi Pekerja untuk mendapatkan pendidikan secara tatap muka, BRI juga tetap melakukan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman Pekerja terkait implementasi GCG, pengendalian gratifikasi dan penyuapan serta pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan perbankan lainnya menggunakan sarana *webinar* maupun *e-learning*.

Perseroan dalam melaksanakan evaluasi dan penilaian GCG menggunakan dua pendekatan, yaitu pihak internal yang *mandatory* sesuai POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Pihak Eksternal. Evaluasi dan penilaian dari pihak internal dilakukan secara *self assessment* meliputi *governance structure, governance process* dan *governance outcome* setiap semester. Hasil *self assessment* menjadi bagian penilaian tingkat

Laporan Komisaris

kesehatan bank yang disampaikan kepada regulator. Penerapan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG yang mencakup Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independen (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Dalam penerapannya Perseroan melaksanakan penilaian sendiri *(self assessment)* secara berkala terhadap 11 faktor GCG sebagaimana ketentuan yang diatur oleh regulator.
Pada tahun 2020, penilaian GCG Perseroan juga dilakukan oleh pihak eksternal sebagai berikut:

- ***Corporate Governance Perception Index***
  CGPI diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penilaian CGPI tahun 2020, BRI mendapat skor 93,25 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*). Hasil Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) BRI selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

- ***ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)***
  ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) merupakan satu inisiatif dari *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) yang didukung oleh *Asian Development Bank* (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN berdasarkan prinsip *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS, Perseroan memperoleh penghargaan skor 110,20 dan memperoleh tiga penghargaan pada ACGS *Award*.

Dewan Komisaris menilai, selama tahun 2020 Perseroan telah menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut tercermin pada hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas pelaksanaan GCG menghasilkan Peringkat 2 (Baik). Hal ini mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang secara umum dikategorikan Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris terus melakukan peninjauan atas perbaikan yang terus dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menyempurnakan Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi Perseroan. Kerjasama dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memperoleh penilaian dan masukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pembahasan mengenai kualitas manajemen risiko dan implementasi GCG dilakukan secara berkala dan tidak hanya terbatas di lingkup induk Perseroan tetapi juga dilakukan bersama dengan Perusahaan Anak dalam konteks konglomerasi keuangan BRI.

Dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi maupun terintegrasi, Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yang berisi panduan mengenai implementasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Intern Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Direktur atau SEVP yang membidangi.

Sebagai salah satu strategi mitigasi risiko melalui pengawasan aktif terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penetapan risiko dibahas dan ditetapkan dalam forum *Risk Management Committee*, yang diselenggarakan setiap triwulan dan disampaikan dalam forum rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direktur terkait.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan agar Perseroan terus berkomitmen dalam menerapkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang

berwenang, memastikan bahwa kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan atas setiap aktivitas fungsional Perseroan telah sesuai dengan ketentuan internal dan external, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada setiap level organisasi, mengelola profil risiko kepatuhan agar senantiasa pada tingkat rendah dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Dewan Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan semakin baik di semua jenjang organisasi dan fungsi. Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk meningkatkan budaya kepatuhan yang efektif, konsisten, penuh komitmen dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi. Selain itu pada tahun 2020, Perseroan juga telah mengembangkan dan menyempurnakan *system/tools* untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, melakukan reviu kebijakan serta melakukan sosialisasi kebijakan terkait dengan fungsi kepatuhan secara berkala.
Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap semesteran. Profil risiko kepatuhan Perseroan berada pada peringkat komposit 2 (*Low to Moderate*).

PENGENDALIAN RISIKO

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan baik eksternal maupun internal pada berbagai sektoral. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan kompleksitas risiko terutama pada kegiatan usaha perbankan. Dewan Komisaris menyadari, semakin kompleksnya risiko harus diimbangi dengan peningkatan praktek tata kelola yang baik *(good governance)* serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. Penerapan manajemen risiko yang memadai dan efektif merupakan salah satu hal yang selalu menjadi perhatian Dewan Komisaris pada era pandemi saat ini. Perseroan terus melakukan upaya pengendalian risiko yang bertujuan agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Perseroan maupun yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank.
Belum berakhirnya pandemi Covid-19 membuat Perseroan sangat selektif dalam melakukan penyaluran kredit dan fokus dalam melakukan penyelamatan debitur terutama sektor UMKM. Hal ini merupakan salah satu langkah pengendalian risiko Perseroan serta salah satu bagian dari strategi jangka panjang mempertahankan *sustainability* Perseroan.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko telah diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif oleh Perseroan dengan memelihara tingkat profil risiko selama tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas risiko-risiko utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga pada Triwulan IV/2020 Perseroan tetap menjaga Peringkat Komposit Profil Risiko pada level "*low to moderate*". Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan dari faktor risiko *inheren* pada peringkat *low to moderate* dan faktor kualitas penerapan manajemen risiko pada peringkat *satisfactory.* Tingkat Profil Risiko Perseroan tidak berbeda dengan hasil penilaian profil risiko pada periode-periode sebelumnya, yang menunjukkan Perseroan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan dengan tetap melakukan penerapan pengendalian risiko dengan baik.

Dalam menjalankan penerapan pengendalian risiko, Perseroan memiliki pedoman dan panduan yang tertulis pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang digunakan sebagai pedoman yang bersifat strategis dan komprehensif dalam rangka penerapan serta pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan.
Perseroan juga didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai sehingga ketepatan penilaian parameter pada tiap risiko dapat diyakini, baik penilaian pada faktor risiko inheren maupun faktor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Parameter dan limit yang ditetapkan pada setiap jenis risiko pada tahun 2020 sudah cukup mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur serta dilakukan penyempurnaan beberapa aspek dalam pengelolaan risiko. Perseroan senantiasa mengedepankan upaya untuk memitigasi risiko melalui pengawasan aktif dan pro aktif.

Penetapan risiko dibahas dan ditetapkan dalam forum *Risk Management Committee*, yang diselenggarakan setiap triwulan dan disampaikan dalam forum rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direktur

Laporan Komisaris

terkait.

PENGENDALIAN INTERN

Dalam menjalankan tata kekola perusahaan yang baik diperlukan penerapan fungsi pengendalian intern yang efektif. Pada pelaksanaannya Perseroan telah menerapkan pengawasan tiga lini pada aktivitas bisnis, manajemen risiko dan operasional yaitu kerangka pemisahan fungsi *first line of defence* (Lini Pertahanan Pertama)*, second line of defence* (Lini Pertahanan Kedua) dan *third line of defence* (Lini Pertahanan Ketiga). *First line of defence* melekat pada *risk owner* yaitu unit kerja bisnis ataupun operasional yang langsung bertangung jawab dalam mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang dihadapi. *Second line of defence* mencakup fungsi *Independent Risk Management* dan Kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko pada unit kerja bisnis telah dilakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang memadai. *Third line of defence* merupakan fungsi dari pengendalian intern perusahaan yang memastikan bahwa pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi *(risk appetite)*, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif dan memadai memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern yang berstandar internasional yaitu Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemonitoran.

Hasil temuan audit, baik yang dilakukan oleh regulator, Akuntan Publik maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah ditindaklanjuti dan kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Temuan audit yang belum selesai ditindak lanjuti, terus dipantau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit agar dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan rekomendasi auditor. Temuan audit tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan audit serta digunakan sebagai dasar menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan mengaudit Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah berjalan dengan baik, berfungsi efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Dewan Komisaris menyarankan agar sistem pengendalian internal tetap ditingkatkan yang sejalan dengan semakin meningkatnya tantangan serta kompleksitas usaha.

STRATEGI ANTI FRAUD

Dalam rangka meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan, Perseroan telah memiliki kebijakan Strategi *Anti Fraud.* Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen dari Manajemen dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam sistem pengendalian *fraud* dan merupakan wujud perhatian serius dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak memberikan toleransi *(zero tolerant)* pada setiap bentuk *fraud* baik internal maupun eksternal. Pada kebijakan tersebut diatur mengenai organisasi dan penerapan Strategi *Anti Fraud* di Bank BRI yang didasarkan pada empat pilar sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator yaitu :

1. Pilar 1 : Pencegahan,
2. Pilar 2 : Deteksi,
3. Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, dan
4. Pilar 4 :Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2020, *fraud* yang dilakukan oleh oknum internal Perseroan, eksternal dan kerjasama keduanya memiliki modus yang semakin bervariasi yang dilakukan baik dengan cara konvensional maupun dengan bantuan sarana teknologi informasi dan digital. Frekuensi kejadian dan kerugian yang ditimbulkan menjadi perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan risiko operasional dan reputasi. Perseroan harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat pihak yang disasar dan dirugikan adalah Perseroan dan nasabah Perseroan.

Sebagai wujud perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk pencegahan *fraud* dan upaya pengendalian *fraud* terus dilakukan melalui perbaikan dalam implementasi Strategi *Anti Fraud* pada setiap pilarnya. Perseroan memperkuat pilar pencegahan dengan meningkatkan *awareness* pada

setiap level organisasi dengan melakukan penyusunan Identifikasi Kerawanan, Penyampaian *Risk Awareness* melalui buku *Top Fraud Risk*, sosialisasi, pelaksanaan Pendidikan *E-Learning* mengenai bisnis proses, Budaya Sadar Risiko dan Strategi *Anti Fraud* kepada seluruh unit kerjaserta pengembangan aplikasi *Know Your Customer*. Perseroan juga telah mengembangkan sistem deteksi dini dengan berbagai metodologi pendekatan melalui perangkat teknologi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai profil pekerja Perseroan dan nasabah yang lengkap dan akurat dalam prinsip *Know Your Employee* dan *Know Your Customer.* Dalam waktu bersamaan *low enforcement* disertai dengan *punishment* yang tegas kepada mereka para pelaku *fraud* yang sudah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan saat ini. Pemantauan dan evaluasi kejadian *fraud* juga merupakan salah satu agenda pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang juga dihadiri Direksi terkait. Semua upaya di atas diharapkan dapat mengarah pada *zero fraud*.

Perseroan selalu menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada regulator secara rutin setiap semester dan laporan insidentil atas kejadian *fraud* yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan kejadian *fraud* Semester II 2019, Semester I 2020 dan laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan. Dewan Komisaris memberikan nasehat kepada Direksi dalam penguatan Strategi *Anti Fraud* pada setiap pilarnya, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan dan upaya *recovery atas kejadian fraud*.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perseroan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan BRI dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan BRI dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 Tentang Strategi *Anti Fraud* BRI. Selain itu Perseroan juga telah menyampaikan surat pengumuman larangan memberikan dan menerima gratifikasi kepada seluruh pengurus dan pekerja Perseroan menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, Perseroan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BRI yang menyusun program, memberikan layanan informasi dan pelaporan gratifikasi serta perlu mengembangkan deteksi anti *fraud* yang berbasis *big data.*

Selama tahun 2020, Perseroan telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain:

1. **Pakta Integritas**
   Seluruh Insan Perseroan baik Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang tertuang dalam GCG *Statement*. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa dengan rekanan Perseroan.
2. **Program Pendidikan dan Sosialisasi**
   Unit Pengendalian bekerja sama dengan BRI *Corporate University* telah melaksanakan sosialisasi melalui *e-learning* kebijakan gratifikasi kepada seluruh pekerja.
3. **Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi**
   Selama tahun 2020, Unit Pengendalian Gratifikasi menerima jumlah laporan gratifikasi sebanyak 287 laporan.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

*Whistleblowing System (*WBS) adalah sarana pelaporan bagi insan BRI secara khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau indikasi pelanggaran kode etik, prinsip GCG serta ketentuan yang berlaku baik internal Perseroan maupun perundang-undangan yang dilakukan oleh insan Perseroan. WBS juga merupakan bentuk komitmen manajemen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan Insan BRI yang berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BRI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi

Laporan Komisaris

di lingkungan BRI.

Dewan Komisaris memandang WBS memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pelaporan pelanggaran WBS merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perseroan yang berpengaruh terhadap reputasi Perseroan yang sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi *Anti Fraud* yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator. Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat *independent* dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor. Sarana WBS dapat dilakukan dengan berbagai sarana pengaduan yaitu melalui SMS, *Whatsapp*, Surat Tertulis, *Webmail*, dan *Website*. Laporan yang dikelola dan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola WBS secara independen.

Pada 2020, Dewan Komisaris memberikan arahan dalam penyusunan dan melakukan pengawasan penerapan sistem WBS. SKAI bertugas untuk membantu memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik. Banyak pengaduan dan kasus yang telah ditindaklanjuti bersumber dari pengembangan WBS. Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara periodik dan memastikan WBS berjalan secara efektif, antara lain dengan memanfaatkan laporan dari SKAI dan tindak lanjutnya serta memastikan WBS ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dewan Komisaris meyakini WBS merupakan bagian dari upaya pemeliharaan budaya dan kepedulian yang baik atas lingkungan kerja sekitar.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyarankan agar sosialisasi dan penerapan WBS dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas

RENCANA KERJA 2021

Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Perseroan 2021 yang telah disusun oleh Direksi secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan asumsi makro yang relevan dan mengacu pada angka-angka perkiraan yang dikeluarkan Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK. Dewan Komisaris menilai tepat atas Rencana Kerja Anggaran dan Perseroan 2021 yang mencakup rencana bisnis yang tumbuh secara selektif, meningkatkan *new source of growth* dan dengan memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah yang sejalan dengan peran BRI sebagai agen pembangunan dan agen penciptaan nilai yang fokus pada ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi bisnis dan non-bisnis dengan antara Induk dan Perusahaan Anak.

Dewan Komisaris optimis target kinerja keuangan dan non-keuangan akan tercapai mengingat secara historis Perseroan memiliki inisiatif-inisiatif strategis dalam mencapai target yang ditetapkan. Inisiatif strategis tersebut dibangun sesuai dengan *setiap tahapan* yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya yang merupakan bagian dari tahapan rencana perusahaan dalam kerangka mencapai visi menjadi "*The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion*" di tahun 2025. Dalam jangka pendek, Perseroan menyusun langkah *survival strategy* antara lain:

1. Efisiensi Kinerja Perusahaan. Menjaga efisiensi kinerja perusahaan melalui *re-engineering* proses bisnis dengan pendekatan digital dan perbaikan komposisi dana murah (CASA).
2. Pertumbuhan Kredit yang selektif. Ekspansi kredit terus dilakukan secara cermat dan selektif pada produk *low risk* terutama produk yang berkaitan dengan program pemerintah termasuk program PEN, ekspansi sektor bisnis tidak terdampak Covid-19 dan eksplorasi *new source of growth* diantaranya segmen Ultra Mikro.
3. Perbaikan Kualitas Aset. Fokus memperbaiki kualitas kredit, melakukan *monitoring* atas restrukturisasi kredit bermasalah sehingga dapat menekan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai serta optimalisasi *recovery rate*.
4. Penguatan Sinergi BRI Group. Fokus pada penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan anak perusahaan maupun sesama Perusahaan Anak melalui berbagai program. Perbaikan kapasitas layanan yang mendukung kenyamanan bertransaksi nasabah diharapkan mampu mendorong penghimpunan dana

murah. Rejuvinasi produk yang berdasarkan pada *customer needs* juga dikembangkan khususnya yang menyasar nasabah milenial yang merupakan *tech savvy* dan masyarakat yang belum memanfaatkan jasa layanan perbankan. Dengan demikian target CASA dapat dicapai pada rentang 61%-63%.

5. Mendorong Peningkatan Transaksi. Mendorong transaksi yang lebih masif untuk meningkatkan perolehan *Fee Based Income* sekaligus potensi CASA. Penerapan konsep *value chain management* dan *transaction banking* di seluruh segmen bisnis, implementasi layanan *digital banking* BRI, juga diharapkan dapat mengoptimalkan *Fee Based Income* yang menjadi salah satu fokus sumber pendapatan di tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG pada tahun 2021, Perseroan telah menyusun rencana kerja yang secara umum mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan *Corporate Governance Guideline* BRI.
2. Pengkinian arsitektur tata kelola kebijakan.
3. Pengkinian dan *review* kebijakan & prosedur.
4. Penguatan data *Governance* BRI.
5. Penguatan Teknologi Informasi dan Sekuriti Teknologi Informasi.
6. Penguatan Implementasi *Corporate Value* dan BUMN *Value*.

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil kinerja, evaluasi pada 2020 dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perseroan 2021 serta memperhatikan *outlook* economi secara global dan nasional, dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor industri, perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan *stakeholders* yang semakin kompleks, maka Dewan Komisaris menengarai masih terdapat cukup ruang untuk peningkatan kinerja Perseroan, antara lain dengan cara :

1. Terus berinovasi dan bertransformasi pada *bussiness model*, *bussiness process* dan *business culture* agar dapat menjawab tantangan dan terus beradaptasi dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
2. Fokus terhadap *core competencies* dengan target komposisi segmen mikro 45% pada tahun 2025.
3. Meningkatkan peran aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM sejalan dengan meningkatnya *global awareness* tentang pentingnya penerapan *Environmental, Social and Governance* (ESG) oleh Perseroansehingga dapat membawa kelompok sasaran nasabah naik kelas yang menjadi *new source of growth.*
4. Fokus dalam pengembangan dan transformasi IT yang tangguh dan terintegrasi antara BRI Induk dan Perusahaan Anak sehingga meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa keuangan menjadi lebih aman, efisien, *user friendly* dan lebih bersaing sesuai dengan *road map* yang telah dituangkan dalam *Corporate Plan.*
5. Terus konsisten dan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan *control system* di setiap lini bisnis salah satunya dengan penerapan budaya kepatuhan dan budaya sadar risiko pada setiap level pekerja agar tercipta lingkungan kerja sadar risiko.
6. Fokus dalam pengembangan dan transformasi *human capital* sehingga dapat menarik *top talent* untuk bergabung dengan Perseroan, pemberian remunerasi berbasis kinerja serta menciptakan kesempatan bagi *Top Flyer* untuk jabatan tertentu yang sehingga meningkatkan prestasi dan produktivitas pekerja yang sejalan dengan prioritas Kementerian BUMN.
7. Meningkatkan sinergi antara BRI sebagai Induk dan Perusahaan anak demi terciptanya layanan *Integrated Financial Solution* bagi nasabah dan mendorong kontribusi anak perusahaan melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasi BRI.
8. Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi secara terus menerus dan mengelola risiko-risiko utama pada level risiko yang terukur.
9. Terus tumbuh dengan *selective growth* dengan tetap fokus terhadap penyaluran stimulus pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit program/KUR tepat sasaran dan melampaui target yang telah ditetapkan.
10. Terus mendorong peningkatan aktivitas *transactional banking* utamanya yang berbasis digital khususnya pada nasabah korporasi

Laporan Komisaris

sehingga dapat meningkatkan *fee based income* dan memperbesar pangsa CASA.

11. Lebih selektif dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan tetap menerapkan *prudential banking* sehingga dapat mengurangi Kredit Kualitas Rendah dan percepatan program *recovery* kredit yang telah dihapusbukukan.
12. Menjadikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) semakin efektif dan optimal terutama di sektor Pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan SDM Unggul.

PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020, telah terjadi satu kali perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Februari 2020 mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019 dikarenakan Sdr. Wahyu Kuncoro telah ditetapkan sebagai Wakil Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero). Selanjutnya, memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

a. Sdr. Andrinof A. Chaniago : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen,
b. Sdr. A. Fuad Rahmany : sebagai Komisaris Independen,
c. Sdr. A. Sonny Keraf : sebagai Komisaris Independen,
d. Sdri. Loeke Larasati A. : sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Wahyu Kuncoro, Sdr. Andrinof A. Chaniago, Sdr. A. Fuad Rahmany, Sdr. A. Sonny Keraf, dan Sdri. Loeke Larasati A. atas segala dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris BRI. Pengalaman yang mumpuni dan pengetahuan yang dalam industri jasa keuangan dan perbankan, dari keduanya sangat terasa dalam memberikan pemikiran dan gagasan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai anggota Komite.

Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2020 terdiri dari Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, lima orang Komisaris Independen dan tiga orang Komisaris, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulnahar Usman
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari

PENUTUP

Atas nama Dewan Komisaris, kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perseroan masih dapat terus berjalan berkesinambungan dan optimal dalam penyelamatan UMKM. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh *stakeholder* atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perseroan.

Kepada seluruh pekerja BRI dan Perusahaan Anak yang tersebar di seluruh penjuru negeri, kami memberikan penghargaan disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2020 walau dalam kondisi yang sulit, seluruh pekerja memberikan seluruh daya upayanya dan menjadi tangguh demi memajukan Perseroan agar tetap tumbuh berkelanjutan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Terima kasih.

Jakarta, 3 Maret 2021
Atas Nama Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Komisaris

1 **Kartika Wirjoatmodjo**
Komisaris Utama

2 **Nicolaus Teguh Budi Harjanto**
Komisaris

3 **Hadiyanto**
Komisaris

4 **Dwi Ria Latifa**
Komisaris Independen

5 **Rabin Indrajad Hattari**
Komisaris

6 **Ari Kuncoro**
Wakil Komisaris Utama /Independen

7 **Hendrikus Ivo**
Komisaris Independen

8 **Zulnahar Usman**
Komisaris Independen

9 **Rofikoh Rokhim**
Komisaris Independen

10 **R. Widyo Pramono**
Komisaris Independen

Laporan Direksi

Penyelamatan UMKM menjadi fokus BRI di tengah pandemi Covid-19. Melalui restrukturisasi dan penyaluran berbagai program stimulus dari Pemerintah, BRI menjadi mitra utama Pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kami meyakini bahwa menyelamatkan UMKM adalah sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dan menyelamatkan UMKM berarti sama dengan menyelamatkan BRI. Kerja keras dan berbagai upaya yang telah dilakukan BRI dengan tekad mengubah kesulitan menjadi ketangguhan demi pertumbuhan yang berkelanjutan ini tidak sia-sia, BRI sukses menutup tahun 2020 dengan hasil kinerja yang solid serta fundamental BRI semakin sehat dan kuat.

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mengawali Laporan Direksi ini, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga BRI dapat menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan ditengah tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya proaktif BRI dalam penyelamatan UMKM baik melalui restrukturisasi kredit, akselerasi inisiatif *digital* serta didukung kebijakan Pemerintah dan Regulator yang akomodatif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Komitmen BRI yang hingga di usia nya yang ke-125 tahun tetap tumbuh berkembang bersama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga kami mampu mengubah Kesulitan menjadi Ketangguhan.

Selanjutnya, ijinkan kami untuk dapat menyampaikan Laporan Tahunan BRI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Krisis akibat pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini berbeda dengan krisis keuangan yang telah terjadi sebelumnya. Krisis kali ini tidak hanya berdampak secara langsung pada kondisi perekonomian, namun juga pada aspek kesehatan dan sosial seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan di hampir seluruh negara di dunia untuk menahan penyebaran Covid-19 telah merubah tatanan sosial masyarakat dan memberikan tekanan yang luar biasa bagi perekonomian Dunia dan Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan perekonomian global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan terkontraksi sebesar 3,5% seiring dengan tertekannya aktivitas ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China.

Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Tekanan pandemi Covid-19 mulai ditunjukkan pada Triwulan II-2020 dimana pertumbuhan ekonomi terkontraksi 5,32%. Kekhawatiran dan ketidakpastian akibat pandemi juga menyebabkan tren larinya modal dari pasar saham dan obligasi, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Pada akhir 2020, tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkontraksi 5,09%.

Sunarso
Direktur Utama

Laporan Direksi

Namun demikian, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai ditunjukkan pada Triwulan III dan IV 2020. Meskipun masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi mulai membaik menjadi -3,49% (yoy) pada Triwulan III-2020 dan -2,19% (yoy) pada Triwulan IV-2020. Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga menunjukkan pemulihan ke level sebelum pandemi, yaitu sebesar Rp14.050/USD pada akhir 2020. Posisi cadangan devisa Indonesia juga mampu dijaga dengan baik dimana pada Desember 2020 mencapai US$135,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Di tengah krisis kali ini, kondisi industri perbankan nasional masih mampu terjaga dengan baik. Pada November 2020 rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) masih mampu terjaga pada level 24,25% dengan likuiditas yang secara umum masih sangat memadai dengan *Loan Deposit Ratio* (LDR) sebesar 82,33%. Kualitas kredit yang ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL) juga mampu dijaga pada level 3,18%, dibawah batas ketentuan regulator sebesar 5%.

Tren pemulihan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah dan Regulator yang secara proaktif mengeluarkan berbagai kebijakan *countercyclical* yang untuk menghadapi Covid-19, antara lain:

- Pemerintah menaikkan defisit anggaran menjadi 6,34% sehingga tersedia anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun untuk Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Dukungan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, antara lain Penempatan Dana Pemerintah, Subsidi Bunga Kredit UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Subsidi Gaji.
- BI mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif, antara lain dengan menurunkan BI 7DRR Seven-Day Reverse Repo Rate sebesar 125bps di sepanjang tahun 2020.
- OJK mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, antara lain Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi kredit Terdampak Covid-19 yang membantu upaya penyelamatan Debitur terdampak dan bank dalam mengelola kualitas kredit, Relaksasi Penilaian Kualitas Kredit, Relaksasi Penilaian Kesehatan Bank dan Relaksasi Perhitungan Kecukupan Modal Bank (CAR).

Tren pemulihan ekonomi juga tercermin dari BRI Micro & SME Index (BMSI) baik dari sisi Indeks Aktivitas Bisnis UMKM BRI, Indeks Sentimen Bisnis UMKM BRI, dan Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM Kepada Pemerintah, yang menunjukkan optimisme pelaku UMKM terhadap pemulihan ekonomi.

STRATEGI PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Dalam merespon tantangan dan ketidakpastian akibat Covid-19, BRI fokus pada tiga aspek yaitu *People First*, Pertumbuhan yang Berkelanjutan (*Sustainable Business Growth*), didukung oleh transformasi Digital dan Budaya yang telah diinisiasi Perusahaan pada tahun 2016 melalui BRIVolution.

People's First

Sejak awal penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia, fokus utama BRI tertuju pada keselamatan dan kesehatan pekerja maupun nasabah. BRI telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja maupun nasabah antara lain melalui penerapan protokol kesehatan, implementasi *flexy working* maupun dukungan fasilitas kesehatan seperti penyediaan *safe house* dan vitamin kepada pekerja maupun nasabah.

Fokus pada Pertumbuhan yang Berkelanjutan (*Sustainable Business Growth*)

Segmen UMKM tetap menjadi fokus utama kami di masa pandemi, baik melalui upaya penyelamatan UMKM terdampak pandemi maupun dengan memberikan dukungan modal kerja dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking*.

Selama masa pandemi, BRI fokus dalam upaya penyelamatan UMKM yang telah tumbuh berkembang bersama Perusahaan selama 125 tahun. Sampai dengan akhir 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi Kredit terhadap 2,9 juta pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dengan *outstanding* mencapai

Rp186,6 triliun. Upaya penyelamatan tersebut merupakan komitmen BRI untuk mendukung segmen UMKM, bahkan di masa-masa sulit.

Kami juga tetap fokus tumbuh di segmen UMKM dengan menyalurkan kredit-kredit secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking*. BRI fokus pada penyaluran kredit dengan skema penjaminan Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran kredit dilakukan pada sektor-sektor ekonomi yang tidak terdampak signifikan oleh Pandemi Covid-19, antara lain sektor agribisnis, sektor perdagangan makanan dan minuman serta sektor kesehatan.

Selain itu, salah satu *strategic response* Perusahaan dalam menghadapi pandemi adalah "*Business Follows Stimulus*", dimana dalam rangka menumbuhkan bisnis dan *loan demand,* BRI juga aktif menjadi mitra utama Pemerintah dalam implementasi program PEN. Hal ini telah memberikan dampak positif, tidak hanya kepada nasabah, tapi juga kepada BRI sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Stimulus berupa penempatan Deposito Pemerintah sebesar Rp30 triliun dan telah disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM sebesar Rp45 triliun atau di-*leverage* 3 kali.
2. Stimulus berupa *Government Spending*
   - Penyaluran Stimulus Subsidi Bunga kepada lebih dari 8,9 juta pelaku UMKM sebesar Rp5,47 triliun.
   - Penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp8,66 triliun kepada lebih dari 985 ribu nasabah.
   - Penyaluran BPUM senilai Rp18,64 triliun kepada lebih dari 7,7 juta usaha mikro.
   - Penyaluran Subsidi Gaji senilai Rp6,45 triliun kepada lebih dari 5 juta penerima.
3. Stimulus berupa Penjaminan Kredit UMKM
   - Penyaluran kredit dengan skema penjaminan pada segmen kecil sebesar Rp8,73 triliun kepada lebih dari 14 ribu nasabah;

Di masa pandemi kami juga memastikan perusahaan telah mengelola risiko pasar dan likuiditas dengan baik, antara lain dengan menjaga rasio likuiditas pada level yang memadai dan diatas ketentuan regulator, menjaga *cash ratio* serta posisi devisa *netto* pada *long position*.

BRIVolution 1.0

Pencapaian BRI di tahun 2020 juga tidak terlepas dari transformasi digital dan budaya yang telah kami inisiasi pada tahun 2016 dengan nama BRIVolution.

Transformasi Digital diarahkan untuk digitalisasi proses bisnis agar lebih efisien dan juga untuk menemukan bisnis model yang baru, sehingga dapat menciptakan *value* yang baru. Dalam melakukan Transformasi Digital, BRI menerapkan strategi *hybrid company model* yaitu melalui digitalisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan *operational excellence*, dan digital dengan tujuan menciptakan produk baru dengan fokus pada *customer centric*, inovasi, dan *customer experience*. Strategi *hybrid company* model ini diterjemahkan dalam 3 *framework* yang menjadi acuan BRI dalam melakukan Transformasi Digital, yaitu:

1. *Digitizing Core,* yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan efisiensi serta menciptakan layanan nasabah yang handal, melalui *business process reengineering. S*trategi ini mampu menghasilkan produk dan layanan antara lain BRISPOT, Agen BRILink dan BRIMO.
2. *Digital Ecosystem* yang bertujuan menciptakan *platform* berbasis digital (*Bank As A Platform*) yang mampu menawarkan produk dan layanan baru diluar bisnis utama Bank, antara lain *Digital Ecosystem Platform* (Pasar.id, BRISMART, BRIMOLA, dll), *Partnership* dengan P2P, *E-Commerce* dan *Ride Hailing*, serta BRI API (*Application Programming Interface*).
3. *New Digital Proposition* yang bertujuan menciptakan model bisnis baru, antara lain Pinjaman Digital (Pinang, Ceria, Traveloka Paylater) dan *Big Data Analytics* (BRIBRAIN).

Selain transformasi digital, BRIvolution 1.0 juga menempatkan *corporate culture* sebagai pondasi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Dalam melaksanakan internalisasi dan eksternalisasi budaya kerja yang digunakan di lingkungan BRI Group adalah *Core Value* yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yakni AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai semangat kolaborasi di antara BRI Group, pada tahun 2020 dimulainya pengelolaan budaya perusahaan yang terintegrasi antara BRI Induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terafiliasi yang kemudian disebut dengan BRI One Culture.

Laporan Direksi

Culture transformation juga diarahkan agar *mindset* dan perilaku Human Capital dalam bekerja sesuai dengan kebutuhan di era digital dan fokus kepada kebutuhan nasabah. Di dalam *culture transformation*, Perseroan akan melakukan pengembangan Sistem Organisasi dan *Human Capital* yang baru mulai dari rekrutmen, *development, grooming talent,* sampai dengan penilaian kinerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. *Culture* yang dibentuk akan mengarah kepada *performance driven culture,* dimana setiap individu akan mampu merancang dan merencanakan suksesnya sendiri dan perusahaan bertugas untuk menyiapkan sistem dan kebijakan yang berlaku.

Digital and culture transformation telah membantu Perusahaan mampu melewati tantangan dan perubahan akibat pandemi Covid-19 dengan lebih mudah. Melalui BRIVolution 1.0 kami juga telah menemukan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, antara lain:

1. BRISPOT, secara signifikan mempercepat proses kredit dari 2 minggu menjadi 2 hari.
2. Agen BRILink, sebagai bentuk *sharing ekonomi,* membantu BRI untuk melayani *unbanked population* di Indonesia.
3. BRIMo, memberikan layanan transaksi perbankan secara *mobile* sesuai dengan kebutuhan nasabah di dalam satu *platform*.
4. BRI API, merupakan *open banking platform* agar BRI bisa bekerja sama dengan *fintech & e-commerce* dengan lebih mudah dan cepat.
5. *Digital Ecosystem Platform*, yang bertujuan untuk meningkatkan CASA dan *fee based income*.
6. *Digital Lending & Partnership*, untuk melayani segmen yang belum tersentuh oleh perbankan.

ANALISA KINERJA PERSEROAN

Respon strategi BRI ditengah pandemi Covid-19 mampu membawa BRI mencapai kinerja yang baik di Tahun 2020.

Pada 31 Desember 2020, secara konsolidasi BRI mampu membukukan Total Aset sebesar Rp1.511,81 triliun, meningkat 6,7% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp1.416,76 triliun. Pertumbuhan Aset disumbang oleh Kredit yang mencapai Rp938,37 triliun, atau meningkat 3,89% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp903,19 triliun. Kontribusi terbesar pertumbuhan Kredit adalah Segmen UMKM yang telah menjadi *core business* perusahaan selama 125 tahun. Komposisi kredit UMKM terhadap Total Kredit terus meningkat sehingga mencapai 82,13% di akhir 2020.

Pertumbuhan segmen UMKM disumbang oleh Kredit pada Segmen Bisnis Mikro yang mencapai Rp351,34 triliun atau tumbuh *double digit* 14,17% dibanding tahun 2019 sebesar Rp307,72 triliun. Komposisi Kredit Mikro (Bank Saja) meningkat menjadi 40% pada akhir 2020, lebih cepat dari aspirasi BRI untuk mencapai porsi Mikro menjadi minimal 40% di tahun 2022. Pertumbuhan kredit mikro BRI juga didukung dengan keberhasilan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2020 sebesar Rp138,54 triliun kepada lebih dari 5,39 juta nasabah KUR. Pencapaian tersebut menjadikan BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio 70,5% dari total target penyaluran KUR Nasional 2020 sebesar Rp140,2 triliun.

Sementara itu, Kredit Konsumer pada 2020 mencapai Rp143,68 triliun, tumbuh 2,26% (yoy) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp140,49 triliun. Penyaluran kredit konsumer yang tetap positif di tengah pandemi turut didukung upaya transformasi digital perusahaan, antara lain BRISPOT Eksternal dan *Digital Lending* (Traveloka Paylater & Ceria).

Sementara itu pada Segmen Bisnis Ritel, Kredit Kecil dan Menengah pada tahun 2020 mencapai Rp275,63 triliun, tumbuh 3,88% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp265,34 triliun ditengah pandemi, hal ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk fokus tumbuh pada kredit beresiko rendah antara lain pada produk KUR Kecil dan KMK Tangguh (Kredit dengan Skema Penjaminan). Pada tahun 2020 kami telah menyalurkan KUR Kecil sebesar Rp12,9 triliun dan KMK Tangguh sebesar Rp8,7 triliun.

Pada Segmen Bisnis Korporasi, total kredit mencapai Rp167,73 triliun di tahun 2020 atau turun 11,56% dari tahun 2019 yang sebesar Rp189,64 triliun. Tren penurunan kredit korporasi sejalan dengan strategi Perusahaan untuk fokus tumbuh pada segmen UMKM dan fokus pada profitabilitas segmen Korporasi dengan memperkuat *wholesale funding* dan *transaction banking* seperti *trade finance*, *cash management* dan transaksi forex.

Laporan Direksi

Pertumbuhan Kredit juga disumbang oleh Segmen Bisnis Entitas Anak dimana Kredit pada tahun 2020 mencapai Rp61,32 triliun, meningkat 28,2% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp47,83 triliun. Kenaikan loan entitas anak didukung oleh perluasan pangsa pasar terutama di segmen syariah (BRIS) dan kenaikan di segmen agribisnis serta telah dimulainya beberapa kerjasama dengan Fintech yang bergerak di bidang agribisnis (BRIAgro) di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan upaya BRI untuk tumbuh bersama secara group dengan melakukan *income diversification.*

Pertumbuhan Kredit yang positif di masa pandemi, mampu diiringi dengan kualitas kredit yang terjaga, Hal ini ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* BRI Group yang tercatat 2,99% dengan pencadangan yang memadai dimana NPL *Coverage* mencapai 237,73%. Besarnya pencadangan ini merupakan bentuk strategi perseroan untuk menjaga kinerjanya agar terus tumbuh secara *sustainable* melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Selanjutnya dari sisi pendanaan, pada tahun 2020 BRI mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI dengan nilai mencapai Rp1.121,10 triliun atau meningkat 9,78% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.021,20 triliun. Pertumbuhan DPK disumbang oleh dana murah (CASA) sehingga komposisinya meningkat menjadi 59,67% pada tahun 2020. Kemampuan dalam menghimpun DPK turut mendukung Perusahaan dalam menjaga kondisi likuiditas pada level yang memadai dengan LDR terjaga pada level 83,7% di akhir 2020.

Kuatnya fundamental membuat perseroan masih mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp18,66 triliun meskipun ditengah pendemi dengan rasio profitabilitas yang positif dimana rasio *Return on Asset* (ROA) tercatat sebesar 1,87% dan rasio *Return on Equity* (ROE) 10,48%.

Pencapaian laba bersih didukung oleh upaya efisiensi biaya dana serta diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi *fee based income* dan Pendapatan transaksi *treasury*. Secara *year on year*, rasio biaya dana perusahaan mengalami penurunan sebesar 37 bps seiring dengan kenaikan dana murah (CASA). Sementara itu, *fee based income* (bank saja) tumbuh 6,2% *year on year* mencapai Rp15,18 triliun, sehingga komposisi *fee based income* terhadap pendapatan operasional menjadi 11% di akhir 2020.

Pertumbuhan *fee based income* didukung kenaikan transaksi *digital payment* (BRIMO & Agen BRILink) seiring perubahan perilaku transaksi masyarakat di tengah pandemi. Pada tahun 2020 transaksi BRIMO mencapai 765,8 juta transaksi atau naik 6 kali lipat dibanding tahun 2019 yang sebesar 100,7 juta transaksi. Sementara transaksi pada Agen BRILink mencapai 728 juta transaksi dengan volume mencapai Rp843 Triliun. Agen BRILink juga mampu menyumbang *fee based income* mencapai Rp1,16 triliun atau naik 47,0% *year on year.*

Pada sisi permodalan, BRI mampu menjaga kondisi permodalan pada level yang kuat dengan Total CAR konsolidasi sebesar 21,17%, di atas minimum ketentuan Regulator 14,5% (memperhitungkan implementasi Basel 3) dan *risk appetite statement* perusahaan sebesar 17%. Dengan rasio kecukupan modal yang masih tinggi tersebut, BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta mendukung pertumbuhan bisnis kedepan. Atas hal tersebut, kami menilai penerapan manajemen risiko Perusahaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

Dapat kami sampaikan pula bahwa di tahun 2020 perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi, antara lain:

- Penandatanganan *Conditional Shares Subcription Agreement* (CSSA) antara BRI, FWD Financial Services Pte.Ltd. (FWD) dan BRI Life untuk kerjasama strategis jangka panjang,
- Pembelian kembali saham (*Buyback*) sebagai respon kebijakan OJK dalam meredam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi Covid-19, dan
- Penandatanganan *Merger Plan* dalam rangka Penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BMS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Laporan Direksi

Dengan kinerja yang positif, BRI mampu mempertahankan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp500 triliun atau tepatntya mencapai Rp514,35 triliun pada akhir tahun 2020. Posisi tersebut menjadikan BRI sebagai BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dan Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara.

Pengakuan terhadap kinerja BRI sepanjang tahun 2020 pun datang tak hanya dari tingkat nasional, namun juga regional dan internasional. Tercatat BRI mendapatkan lebih dari 70 penghargaan bergengsi di sepanjang tahun 2020. Beberapa diantaranya yakni Top 1000 *World Banks*: *BRI Ranked 1st in Indonesia dari The Banker, Best of The Best Companies* 2020 dan *1st Indonesia's Largest Public Companies* dari Forbes Indonesia, *The Best Retail Banking in Indonesia* dari The Asian Banker dan Bank Pendukung UMKM Terbaik (kategori Bank Buku 3 & 4) dari Bank Indonesia.

Dengan kondisi fundamental yang sehat dan kuat, BRI optimistis dapat memberikan dan men-*deliver value* yang berkelanjutan kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

PENCAPAIAN TARGET PERSEROAN

Secara umum, pada tahun 2020 BRI mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja 2020 yang telah ditetapkan antara lain pada indikator seperti Aset, Dana Pihak Ketiga, Laba Bersih dan Rasio Keuangan seperti NPL (*Gross*), NPL (*Nett*), NIM, BOPO dan CAR.

Adapun pada beberapa indikator seperti Kredit dan Rasio Keuangan (LDR dan CIR) pencapaian kinerja BRI tercatat masih sedikit dibawah target. Pencapaian target Kredit sebesar 97,56% sejalan dengan tren perlambatan permintaan kredit di tengah pandemi yang menyebabkan tekanan pada pertumbuhan kredit. Meskipun demikian, pertumbuhan Kredit BRI masih jauh di atas pertumbuhan Industri Perbankan sebesar -1,4% (November 2020).

Masih rendahnya permintaan kredit turut menyebabkan pencapaian LDR dan *Cost to Income Ratio* (CIR) sedikit dibawah target.

Pencapaian Target Perseroan Tahun 2020 (bank saja)
(dalam Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Aset	1.413.304,49	1.421.785,02	100,60%
Kredit yang Diberikan	902.688,99	880.674,76	97,56%
Dana Pihak Ketiga	1.023.113,32	1.052.663,88	102,89%
Laba Bersih	13.377,26	18.353,30	137,20%
LDR	88,23%	83,66%	94,82%
NPL (*Gross*)	3,30%	2,94%	112,27%
NPL (*Net*)	1,53%	0,80%	189,69%
NIM	5,56%	6,00%	107,87%
Cost to Income Ratio (CIR)	50,03%	45,40%	90,74%
BOPO	86,16%	81,22%	106,08%
CAR	18,37%	20,61%	112,20%

PENCIPTAAN *SOCIAL VALUE*

Komitmen BRI untuk Tak Pernah Berhenti Menumbuh Kembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri terlihat dari berbagai program UMKM "Naik Kelas" dan dukungan BRI terhadap berbagai Program Pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk *Social Value Creation* yang dilakukan oleh Perseroan dalam memberikan dukungan pada pemberdayaan UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan.

Dukungan Perseroan tercermin dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2015, Perseroan telah menyalurkan KUR sebesar Rp461,9 triliun kepada lebih dari 22 juta pelaku UMKM. Selain itu, BRI juga meningkatkan kapasitas ekonomi para nasabah KUR.

BRI selalu berkomitmen untuk turut mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini tercermin dari infrastruktur sejumlah 9.030 jaringan kerja BRI, 221.531 *e-channel* yang didukung oleh 4 (empat) buah Teras Kapal BRI untuk melayani nasabah di tempat-tempat terpencil, seperti di Kepulauan Seribu, Labuan Bajo, Halmahera Selatan, dan Tanjung Pinang yang terletak di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.

Konsistensi BRI untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada juga terlihat dari jumlah Agen BRIlink yang terus meningkat dan optimal. Tercatat pada Tahun 2020, Agen BRILink sudah mencapai 504.233 agen dengan *sales volume* menembus angka Rp843,2 triliun. Tingginya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa Agen BRILink berhasil meningkatkan *velocity of money* dan menjalankan peran *economic sharing* bagi masyarakat di Indonesia.

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Di tahun 2020 berbagai tantangan dihadapi Perusahaan untuk dapat tetap tumbuh berkelanjutan. Pandemi Covid-19 membuat mobilitas masyarakat terhambat dan hal itu tentunya akan berdampak langsung kepada segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis BRI. Melambatnya perputaran roda perekonomian menyebabkan menurunnya *loan demand* di masyarakat. Rendahnya *loan demand* tentunya akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan kredit.

Berdasarkan hasil kajian internal BRI, faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan kredit adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan kedua faktor tersebut terdapat 2 cara, yang pertama adalah dengan membuka lapangan pekerjaan dan yang kedua adalah melalui program stimulus. Oleh karena itu BRI secara aktif menyalurkan berbagai program stimulus PEN dalam rangka mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli. Kunci keberhasilan BRI dalam menyalurkan berbagai stimulus tersebut adalah karena BRI telah mempersiapkan 3 hal antara lain:

1. Data yang valid terkait penerima stimulus.
2. Sistem yang kredibel dan reliable untuk menyalurkan stimulus.
3. People, atau orang-orang yang bertugas untuk mengkomunikasikan stimulus-stimulus pemerintah tersebut.

Selain itu, kami masih melihat industri perbankan masih akan dihadapkan pada risiko-risiko antara lain tren penurunan margin, peningkatan biaya pencadangan kredit akibat pandemi Covid-19, persaingan yang semakin ketat khususnya dari *fintech*, serta pengelolaan bisnis berwawasan Lingkungan, *Social* dan Tata Kelola atau ESG.

Untuk menghadapi tren penurunan margin, BRI akan melakukan efisiensi terhadap CoF (*Cost of Fund*) dengan cara fokus kepada mikro dan retail payment, peningkatan CASA serta mengoptimalkan perolehan FBI dan kontribusi perusahaan anak serta efisiensi Opex melalui inisiatif digital yang kami miliki.

Laporan Direksi

Menghadapi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat adanya dampak pandemi Covid-19 BRI telah membentuk CKPN yang memadai ditunjukan oleh rasio NPL *Coverage* sebesar 247,98% (bank saja), selain itu kami akan tetap tumbuh secara selektif dan optimalkan fokus kepada kredit dengan penjaminan.

Terkait dengan *Fintech*, BRI dengan akselerasi digital initiative yang dimiliki telah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa fintech serta didukung dengan adanya peran *acquire / acquisition* oleh BRI Ventures untuk semakin menajamkan *partnership* dengan *fintech*.

Ke depan, BRI melalui strategi dan implementasi bisnisnya akan semakin memperkuat dasar-dasar pertumbuhan yang berkelanjutan.

PROSPEK USAHA

Kami melihat ekonomi global dan domestik diproyeksikan akan masuk fase *recovery* di tahun 2021, meskipun belum dapat kembali ke kinerja sebelum pandemi Covid-19. International Monetary Fund (IMF) di dalam kajiannya World Economic Outlook (WEO) per Januari 2021 telah merevisi prediksi kontraksi ekonomi dunia tahun 2020 menjadi -3,50%, atau 90 *basis point* lebih tinggi dibanding WEO per Oktober 2020 yang sebesar -4,40%.

Sejalan dengan perekonomian dunia, Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan berada dalam tahap pemulihan dan kinerja perbankan nasional diyakini dapat tumbuh positif. Ekspektasi pemulihan ekonomi didukung oleh Kebijakan Pemerintah yang akomodatif untuk mendorong permintaan dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mampu mendorong permintaan kredit. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang mulai dijalankan Pemerintah diharapkan dapat menjadi katalis positif akselerasi pemulihan ekonomi.

Membaiknya perekonomian dan perbankan nasional, memperlihatkan bahwa prospek usaha BRI akan lebih baik. Hal ini sejalan dengan tanda-tanda pemulihan yang mulai ditunjukkan perseroan pada Triwulan IV 2020, dimana penyaluran kredit juga mulai meningkat dan tren profitabilitas mulai membeik. Meskipun demikian, BRI tetap waspada terhadap tren kualitas kredit ke depan dengan melakukan monitoring yang ketat serta membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit. Kami optimis dapat tumbuh didukung kekuatan-kekuatan yang dimiliki BRI serta strategi Transformasi BRIVolution 2.0

STRATEGI JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (BRIVOLUTION 2.0)

Memperhatikan tantangan yang masih akan dihadapi Perseroan, serta prospek usaha yang diharapkan membaik, pada tahun 2020 kami juga telah mengkaji kembali program transformasi BRIVolution 1.0. dan mempertajamnya menjadi BRIVolution 2.0.

BRIVolution 2.0 dirancang untuk memperkuat *core* BRI Group dan mengakselerasi *new growth engine* yang akan membawa kami mencapai strategic vision, yaitu menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion*" yang sejalan dengan strategi "Go Smaller, Go Shorter and Go Faster".

The Most Valuable Banking Group In SEA

BRI akan tumbuh bersama secara group, dengan melakukan *spreading risk & income diversification*.

Champion of Financial Inclusion

BRI akan semakin mempertajam strategi "*go smaller, go shorter, go faster*, dan *go cheaper*" untuk mencari sumber pertumbuhan baru. Mentarget nasabah dengan *ticket size* yang lebih kecil, dengan tenor lebih pendek, proses lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau. Ultimate *goals*-nya adalah melayani masyarakat seluas-luasnya dengan biaya yang lebih terjangkau yang sebelumnya belum terlayani.

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN (*ECONOMIC, SOCIAL & GOVERNANCE*/ESG)

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI terus berkomitmen mendukung praktek keuangan berkelanjutan melalui implementasi aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG (*Environment, Social, Governance*).

BRI telah menjadi *First Mover on Sustainable Finance* di Indonesia dan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai strategi implementasi *Sustainable Finance* di setiap aktivitas perbankan BRI, baik di sisi *Assets* dan *Liabilities*, maupun *Human Capital* dan *Operations*.

Dari sisi aset, komposisi kredit pada aktivitas bisnis yang berkelanjutan mencapai Rp562 triliun atau 63.9% dari total kredit. Dari sisi pendanaan, pada tahun 2018 BRI menjadi bank pertama di ASEAN yang menerbitkan *Sustainability Bond* di tahun 2019 dimana seluruh dana yang diperoleh telah digunakan untuk kegiatan yang berwawasan sosial dan lingkungan.

Kemudian dari sisi operasional BRI, inisiatif digital yang dilakukan BRI khususnya melalui *business process reengineering* melalui BRISPOT (*Digital Loan App*), BRIMO (*Mobile Internet Banking*), BRISTARS (*Digital Office*), dan BRISMART (*Digital E-learning System*) mampu mendukung pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon (pengurangan mobilitas atau perjalanan dinas). Kami juga secara aktif menyelenggarakan program-program untuk meningkatkan *awareness* pekerja dan nasabah dalam prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan.

Berbagai strategi perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan telah mendapatkan apresiasi baik secara Internasional maupun nasional, antara lain ditunjukkan dengan kenaikan ESG Score dari Lembaga Rating ESG Internasional, serta penghargaan antara lain *Best Issuer for Sustainable Finance* dan *Best Sustainability Bond* dari The Asset dan ESG Award 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BRI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dikomunikasikan dengan nama BRI Peduli. Program BRI Peduli tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. Per-09/MBU/07/ 2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir yaitu Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020. Secara internal BRI juga mengatur lebih rinci pedoman pelaksanaan Program BRI Peduli melalui Surat Edaran NOSE. S. 36 – DIR/SKP/07/2020, tanggal 24 Juli 2020, perihal Pelaksanaan Program BRI Peduli Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BRI aktif dan telah melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui BRI Peduli. Kegiatan BRI Peduli ini adalah dalam rangka mewujudkan program Bina Lingkungan dan komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya mementingkan bisnis semata, melainkan juga berkontribusi untuk pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Selama tahun 2020, BRI telah menyalurkan bantuan Program BRI Peduli sebesar Rp264,14 miliar atau naik sebesar 16,57% dari tahun 2019 sebesar Rp226,58 miliar.

Pada tahun 2020 BRI telah menerima beberapa penghargaan dan pengakuan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain :

1. Asiamoney 2020 – Indonesia's best bank for CSR 2020 (Penghargaan ini telah diperoleh BRI selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020)
2. Top CSR Award 2020 # Star 5
3. Top CSR Award 2020 – Top Leader On CSR Commitment 2020

Laporan Direksi

Di tahun 2020, kegiatan BRI Peduli juga difokuskan untuk melawan Covid-19 melalui bantuan tanggap darurat pencegahan Covid-19 melalui 10 Kantor Wilayah dan 467 Kantor Cabang BRI di seluruh Indonesia, memberikan 8.981 Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas kesehatan, menyerahkan 1.385.150 masker untuk masyarakat dan pedagang pasar, memberikan 6.812 *hand sanitizer*, menyediakan 6.247 *spot wastafel* di seluruh Indonesia, dan membagi 259.633 paket sembako gratis.

BRI juga telah melakukan kegiatan CSR BRI Peduli lainnya yang berfokus pada *Pro Planet*, *Pro People*, dan *Pro Profit* melalui program BRI bersih-bersih Kali di 19 lokasi seluruh Indonesia, bantuan sarana prasarana untuk 1.000 pasar di seluruh Indonesia, 107 bantuan mobil Ambulans, membagikan 5.000 Kacamata untuk pelajar terkait dengan tema CSR BRI Melihat Dunia, dan memberikan beasiswa untuk 5.000 pelajar Indonesia.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kami meyakini pentingnya Tata Kelola Perusahan yang Baik (GCG) dalam mendukung kinerja bisnis BRI serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Direksi bersama Dewan Komisaris dan seluruh karyawan memiliki komitmen tinggi memujudkan organisasi Perseroan sebagai bank yang berstatus BUMN serta sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran (TARIF).

Dalam mengimplementasikan GCG selama tahun 2020, BRI melakukan beberapa perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (GCG) sesuai dengan standar terbaik dengan mengacu dan berpedoman pada berbagai regulasi yang relevan dan *best practice* terkini dari institusi nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan kualitas mutu GCG di tahun 2020, kami telah melakukan aktivitas pelaksanaan GCG antara lain sebagai berikut:

- Mengesahkan revisi Ketentuan Tata Kelola Perusahaan BRI.
- Mengesahkan revisi Ketentuan *Whisteblowing System*.
- Meluncurkan aplikasi pelaporan *Whistleblowing System* melalui *website* BRI.
- Implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Pelaksanaan *webinar* BRI *E-College* untuk seluruh Pekerja BRI seluruh Indonesia dengan tema Budaya Kepatuhan, penerapan GCG dan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
- Menyelenggarakan program *Governance Risk and Compliance* (GRC) *Culture Carnival*.

BRI juga konsisten menyelaraskan tiga aspek *Governance System* (*Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome*) secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi GCG melalui *Self Assessment* secara komprehensif dan terstruktur. Penerapan *Self Assessment* ini berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil *Self Assessment* GCG BRI selama tahun 2020 mencapai nilai komposit 2 (BAIK). Hasil ini mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas atas perinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.

Selama tahun 2020, BRI telah mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan GCG diantaranya yaitu Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF), predikat "*Most Trusted Company*" dalam *Corporate Governance Perception Index* yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), dan berbagai penghargaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan salah satu bukti dari keseriusan Manajemen BRI dalam melakukan peningkatan implementasi GCG secara berkesinambungan dalam rangka mendukung visi dan misi Perusahaan.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa seluruh Komite dibawah Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank, Direksi BRI dibantu oleh sembilan komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Kesembilan komite tersebut adalah Asset and Liability Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC), Komite Kredit, Komite Capital & Investment, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data, Komite Pengadaan Barang & Jasa, Komite Human Capital, dan Komite Produk.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi BRI di tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan pengurus sebagaimana sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 Februari 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Komposisi Direksi BRI Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 Februari 2020

Komposisi Direksi Perseroan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 Februari 2020 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sembilan) orang Direktur.

Komposisi Direksi Perseroan Sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d 17 Februari 2020

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1	Sunarso	Direktur Utama	3 Januari 2019
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	2 September 2019
3	Handayani	Direktur Konsumer	18 Oktober 2017
4	Supari	Direktur Bisnis Mikro	22 Maret 2018
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	15 Maret 2017
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	22 Maret 2018
7	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	2 September 2019
8	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	19 Maret 2015
9	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	2 September 2019
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	2 September 2019
11	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	23 Maret 2016
12	Azizatun Azhimah*	Direktur Kepatuhan	2 September 2019

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020

Laporan Direksi

Komposisi Direksi BRI Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Komposisi Direksi BRI di tahun 2020 mengalami perubahan pengurus sebagaimana dengan salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 Februari 2020. Hasil keputusan dimaksud adalah memberhentikan dengan hormat Azizatun Azhimah sebagai Direktur Kepatuhan dan Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan.

Selanjutnya, RUPS mengangkat kembali Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan, serta mengangkat Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan. Saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasa Azizatun Azhimah kepada Perseroan selama masa baktinya.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan 18 Februari s/d 31 Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1	Sunarso	Direktur Utama	3 Januari 2019
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	2 September 2019
3	Handayani	Direktur Konsumer	18 Oktober 2017
4	Supari	Direktur Bisnis Mikro	22 Maret 2018
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	15 Maret 2017
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	22 Maret 2018
7	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	2 September 2019
8	Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	19 Maret 2015
9	Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	2 September 2019
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	2 September 2019
11	Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	23 Maret 2016
12	Wisto Prihadi**	Direktur Kepatuhan	18 Februari 2020

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021

**) Dikuatkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam RUPS Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021

PENUTUP

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang yang telah memberikan dukungan penuh kepada BRI dapat melewati seluruh tantangan dan menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Kepada seluruh Nasabah, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya untuk tetap tumbuh berkembang bersama BRI disegala situasi, dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat melayani dengan sepenuh hati.

Kepada pemegang saham kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang telah diberikan kepada Direksi, sehingga pengelolaan bisnis BRI dapat berjalan dengan efektif sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Direksi juga mengucapkan rasa bangga serta terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja atas dedikasi yang tinggi untuk tetap maju bersama sehingga dapat mencapai kinerja tahun 2020 yang baik. Semoga kinerja tahun 2021 ini dapat terus dipertahankan dan semakin kuat di tahun berikutnya. Kedepannya, BRI terus berkomitmen untuk tumbuh berkelanjutan untuk memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Terima kasih

Jakarta, 3 Maret 2021
Atas Nama Direksi

Sunarso
Direktur Utama

Direksi

1 **Sunarso**
Direktur Utama

2 **Agus Noorsanto**
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN

3 **Indra Utoyo**
Direktur Digital & Teknologi Informasi

4 **Supari**
Direktur Bisnis Mikro

5 **Viviana Dyah Ayu Retno K.***
Direktur Keuangan

6 **Ahmad Solichin Lutfiyanto***
Direktur Kepatuhan

7 Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

8 Amam Sukriyanto*
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah

9 Arga M. Nugraha*
Direktur Jaringan dan Layanan

10 Agus Winardono*
Direktur Human Capital

11 Handayani
Direktur Konsumer

12 Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 03 Maret 2021

DEWAN KOMISARIS

Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Ari Kuncoro
Wakil Komisaris Utama /Independen

Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen

Hendrikus Ivo
Komisaris Independen

R. Widyo Pramono
Komisaris Independen

Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen

Zulnahar Usman
Komisaris Independen

Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris

Hadiyanto
Komisaris

Rabin Indrajad Hattari
Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 03 Maret 2021

DIREKSI

Sunarso
Direktur Utama

Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

Supari
Direktur Bisnis Mikro

Agus Noorsanto
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN

Handayani
Direktur Konsumer

Amam Sukriyanto*
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah

Indra Utoyo
Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko

Viviana Dyah Ayu Retno K.*
Direktur Keuangan

Ahmad Solichin Lutfiyanto*
Direktur Kepatuhan

Arga M. Nugraha*
Direktur Jaringan dan Layanan

Agus Winardono*
Direktur *Human Capital*

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

PROFIL PERUSAHAAN

BRI secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik ditengah tantangan dan ketidakpastian akibat Pandemi Covid-19. Hal ini didukung komitmen Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meskipun di masa yang sulit, antara lain melalui Upaya Penyelamatan Kredit UMKM terdampak pandemi serta secara aktif menjadi Mitra Utama Pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memberi dampak positif tidak hanya bagi nasabah namun juga bagi perekonomian Indonesia.

Data Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bidang Usaha
Perbankan

Segmen Usaha
Bisnis Mikro
Bisnis Ritel
Bisnis Korporasi
Bisnis Entitas Anak

Dasar Hukum Pendirian
Undang-Undang No 21 Tahun 1968

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp6.167.290.500.000

Jaringan
- 1 Kantor Pusat
- 19 Kantor Wilayah
- 467 Kantor Cabang (Termasuk Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang Luar Negeri)
- 611 Kantor Cabang Pembantu
- 5.382 BRI Unit
- 547 Kantor Kas
- 1.867 Teras BRI
- 132 Teras BRI Keliling
- 4 Teras BRI Kapal

Tanggal Pendirian
16 Desember 1895

Jumlah Karyawan
88.184 (tidak termasuk pekerja *outsource*)

Komposisi Pemegang Saham
Pemerintah Indonesia: 56,75%
Publik: 43,25%

Modal Dasar
Rp15.000.000.000.000

Bursa Efek
Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.

kode Saham
BBRI

Kantor Pusat
Sentra BRI
Jl Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
No. Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279
No. Fax : (62-21) 250-0077
Website : www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Division
Gedung BRI 1, Lt.15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Email : humas@bri.co.id
Call center
Tel. : (021) 5751966 Fax. : (021) 5700916

Makna Logo

Dalam rangka visualisasi dari *corporate plan* perseroan sebagai BRI Grup menuju *integrated financial solution*, BRI melakukan penyegaran logo perseroan. Logo ini merupakan hasil keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada Desember 2020. Kemudian logo tersebut telah didaftarkan ke Kemenkumham pada tanggal 14 Desember 2020

Adapun logo baru tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan makna logo:

THE LEADER OF CHANGE

Sebagai The Leader of Indonesian Banking Industry, diperlukan peremajaan sistem komponen visual BRI, penggunaan logo dalam materi komunikasi membutuhkan sedikit penyesuaian demi menunjang ketepatan sistem komponen visual secara keseluruhan.

Penyesuaian logo ketika BRI berdiri sebagai Perusahaan Induk pun perlu dilakukan terkait dengan relevansi BRI yang juga menaungi berbagai anak perusahaan yang bukan bergerak di bidang perbankan.

Perubahan Logotype "Bank BRI" menjadi "BRI" sebagai statement bahwa BRI sebagai Induk Perusahaan tidak hanya memiliki berbagai anak perusahaan yang bergerak di dalam bidang perbankan, tetapi jauh lebih luas lagi.

Makna Logo

Melayani Dengan Setulus Hati

Logogram dengan bentuk segi empat sama sisi menandakan keseimbangan. Sementara garis sudut lengkung menggambarkan dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Garis dan bentuk pada Huruf "BRI" terbentuk dari bentuk garis lurus yang menggambarkan bahwa BRI memiliki ketegasan untuk selalu hadir dan melayani seluruh masyarakat Indonesia, dan garis lengkung yang mencerminkan layanan BRI juga dapat bersifat fleksibel karena selalu mengedepankan keamanan & kenyamanan para nasabah BRI (*Consumer Centric*).

Garis, bentuk, dan pewarnaan (*bold*) secara tegas, sederhana, serta terukur pada logo merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan, maupun keamanan.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan ketelitian dan ketepatan terkait dengan manajemen modern dalam suatu kegiatan usaha nasional dengan wawasan internasional dan berlandaskan semangat pembaharuan.

Garis, bentuk, dan pewarnaan ditampilkan secara lugas dan sederhana tetapi mantap mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan.

Filosofi Tagline:

"Melayani Dengan Setulus Hati"

Kalimat ini menggambarkan semangat serta visi dan misi BRI yang selalu dengan tulus memberikan pelayanan terbaik. Kalimat ini adalah komitmen BRI untuk selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Riwayat Singkat BRI

Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana.

Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, Hulp en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan UU No. 21 tahun 1968.

Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRIsyariah.

Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRIsyariah (BRIsyariah) pada 1 Januari 2009 dan kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 BRI mengakuisisi saham PT Agro Niaga Tbk dari Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menjadi pelopor *microfinance* di Indonesia. Komitmen ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama di segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 15 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis.

Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui BRI *Hybrid Banking* pada tahun 2013.

Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Di tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRIsat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, BRI memiliki ATM hingga 16,880 unit, jumlah mesin EDC sebanyak 198,785 unit, serta jumlah mesin CRM sebanyak 5,809 unit, termasuk 504.233 agen BRILink. Jaringan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut menjadi bukti konsistensi BRI dalam menjangkau yang tidak terjangkau Perluasan jaringan juga terus dilakukan. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global, BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong. Pada tahun 2017, BRI membuka unit kerja di Timor Leste.

Riwayat Singkat BRI

Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan, BRI mempunyai target untuk menjadi *integrated financial service group*, yaitu satu grup perusahaan yang menyediakan berbagai layanan atau jasa keuangan kepada nasabahnya, baik layanan perbankan, asuransi, remitansi, maupun layanan keuangan lainnya.

Elaborasi di segmen asuransi dan pembiayaan kian terlihat pada tahun 2015, BRI menambah anggota baru yang bergerak di bidang asuransi dengan mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) dan disusul pada tahun 2016 BRI menambah penyertaan saham pada PT BTMU- BRI Finance dari 45% menjadi 99% sehingga BRI menjadi pemegang saham pengendali. Dengan selesainya proses tersebut, PT BTMU BRI Finance kemudian berganti nama menjadi PT BRI Multifinance Indonesia.

Setiap langkah korporasi dan rencana kerja yang dijalankan adalah bagian dari upaya memberikan layanan perbankan yang lengkap bagi para nasabah, terutama sektor UMKM. Dengan kehadiran BRisat, BRI dapat memaksimalkan layanan digital banking. Berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi di tahun 2016, mulai dari pembangunan Teras BRI Digital, pengembangan e-Pasar, sampai pembukaan *co-working space*. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2018 dengan meluncurkan Indonesia Mall dan mengadakan *Cowork Festival*. Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital.

Selain itu pada tahun 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste. BRI juga resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera.

Pada tahun 2017 BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2017 yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

Guna memajukan sektor UMKM, BRI terus berkomitmen memberikan kemudahan layanan perbankan utamanya melalui inovasi perbankan digital. Oleh karena itu, BRI sejak tahun 2017 telah meluncurkan BRISPOT dan terus dikembangkan di tahun 2018. BRISPOT adalah sebuah aplikasi *mobile-based* dengan konsep *one stop service* bagi *Account Officer* untuk proses kredit *end to end*.

Pada tahun 2018, dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI *New Assistance* yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.

Selain itu, Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas. BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.

Sebagai entitas, BRI Group merupakan sebuah grup keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap, mulai dari layanan perbankan konvensional maupun syariah, asuransi dan multifinance. Hal ini sesuai dengan rencana jangka panjang BRI 2018-2022 untuk mencapai aspirasi sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasi.

Untuk mencapai aspirasi tersebut, pada bulan Desember 2018 BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan PT Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM).

BRI Venture akan dikembangkan menjadi Corporate Venture Capital

Riwayat Singkat BRI

(CVC) untuk melakukan strategic investment terutama kepada perusahaan *growth-stage startup* yang memiliki potensi sinergi dengan BRI Group dan/atau potensi capital gain.

Pada tahun 2019, Bank BRI terus melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam digital banking di Indonesia. Beberapa produk *digital banking* yang diluncurkan antara lain PINANG (melalui BRI Agro) yang merupakan Digital Lending Perbankan Pertama di Indonesia. Kemudian adalah BRImo yang merupakan aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (*user interface/ user experience*) dan fitur-fitur terbaru. Yang terbaru, Bank BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA.

Untuk mewujudkan *integrated financial solution*, Bank BRI melakukan langkah strategis perseroan dengan melengkapi layanan keuangan, yakni dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur atau BRINS.

Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 8 (delapan) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRI Syariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures), Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas) dan General Insurance (BRI Insurance).

Pada tahun 2020, BRI secara aktif menjadi mitra utama Pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Debitur yang sebagian besar UMKM, tetapi juga bagi BRI. Selain itu, sebagai upaya penyelamatan debitur terdampak Covid-19, Sampai dengan Desember 2020, Perseroan telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur, dimana sebesar 95% merupakan debitur segmen Mikro, Konsumer, Kecil dan Menengah.

Guna mendukung adaptasi kebiasaan baru dan akselerasi layanan digital, BRI telah meluncurkan inovasi-inovasi perbankan digital. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi di tengah pandemi. Inovasi digital tersebut antara lain:

- Peluncuran BRImo New Look
- Peluncuran Pasar.id
- Peluncuran lembaga sertifikasi profesi perbankan di Indonesia (BRISLP)
- Peluncuran BRI Micro & SME Index
- Peluncuran Digital Saving. Bank BRI meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui Platform Digital Saving yang dapat diakses melalui channel bank BRI ataupun pihak ketiga yang bekerjasama, dengan menggunakan 2 teknologi yaitu face recognition dan digital signature, nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank untuk bertatap muka dengan petugas. Platform tersebut juga memudahkan nasabah dalam bertransaksi, sebab nasabah sudah langsung terhubung dengan BRImo.

New BRImo dikembangkan dengan memperbarui tampilan dan layanan mobile banking BRI, agar BRImo, dapat lebih user friendly dengan menggabungkan beberapa fungsi layanan perbankan dalam satu genggaman. New BRImo memiliki tampilan yang semakin *easy to use* dan *hi-tech* dengan menggabungkan fungsi *internet banking, mobile banking,* dan *electronic money* dalam satu genggaman. BRImo dinilai akan menjadi dunia masa depan yang lebih dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan aman dan real time online.

Tahun 2020, BRI juga terus berinovasi khususnya dalam era digitalisasi dengan menggunakan kecerdasan buatan di teknologi perbankannya. Dengan berbasis big data dan *artificial intelligence* (AI), BRI memperkenalkan BRIBrain, sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan BRI untuk menyimpan, memproses, dan mengonsolidasikan segala informasi dari berbagai sumber. BRIBrain menjadi 'otak' bagi BRI dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat dan presisi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi yang dikembangkan BRI.

BUMN UNTUK INDONESIA
BRI
Temukan BEYONDmo
Pake BRImo
BRImo WORLD
BRImo sekarang makin seru dengan
fitur-fitur baru siap bantu kamu masuk
ke keseruan setiap urusan perbankanmu.
Download BRImo sekarang!
BUKA SEKARANG DIGITAL SAVING
REGISTRASI INTERNET BANKING
FAST MENU
TRANSAKSI RESTRUKTURISASI
PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT
PAYMENT BY QR CODE
Scan QR untuk Download
App Store
Google Play
BRI mo
#Yuk RakaiMasker
#MulaiLagi #CovidSafeBUMN #BEYONDmo #SemuaPakaiBRImo
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

Riwayat Perubahan Nama Bank Rakyat Indonesia

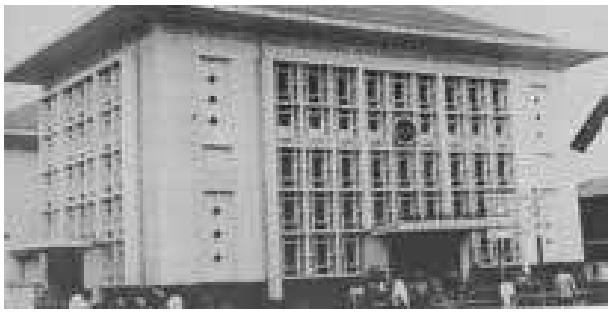

1895

De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden

Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen

De Poerwokertosche Hulp Spaaren Landbouw Credietbank atau Volksbank

1912

Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene

1934

Algemene Volkscredietbank (AVB)

1942

Syomin Ginko

No	Perihal	Akta/peraturan Terkait	Tanggal	Notaris
1	Pendirian BRI	PP Nomor 1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia	22 Februari 1946	
2	Pendirian BRI	UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia	18 Desember 1968	
3	Penyesuaian bentuk hukum Persero	PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan	29 April 1992	
4	Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	Akta Nomor 133 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	31 Juli 1992	Muhani Salim, S.H.
5	Initial Public Offering	Akta Nomor 7 tentang Status Perusahaan & Penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal	3 Oktober 2003	Imas Fatimah, S.H

Perubahan Nama Perusahaan

2003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10 November 2003

1992
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

1968
Bank Rakyat Indonesia (Bank Umum)

1960
Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN)

1946
Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bidang Usaha

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183 BRI adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar	2020	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu	Sudah	
b. Memberikan kredit	Sudah	
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang	Sudah	
d. Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 1) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah	
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah	Sudah	
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya	Sudah	
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga	Sudah	

Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar	2020	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga	Sudah	
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak	Sudah	
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek	Sudah	
k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya	Sudah	
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat	Sudah	
m. Menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang	Sudah	
n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang	Sudah	
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang	Sudah	
p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang	Sudah	
q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan	Sudah	
r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Sudah	

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/ penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk dan Jasa

Produk Simpanan

Tabungan BRI BritAma

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Umum, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAma Muda, BritAma Mitra, BritAma TKI, BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.

PENJELASAN PRODUK SIMPANAN BRITAMA

Tabungan BRI BritAma Umum
Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dana *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki Gratis *Cover* asuransi kecelakaan, Fitur *E-banking* dan suku bunga kompetitif.

Tabungan BRI BritAma Bisnis
Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis, dengan didukung fasilitas *e-banking* dana system real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki Gratis *Cover* asuransi kecelakaan, Fitur *E-banking* dan suku bunga kompetitif dan pencatatan transaksi lebih detail pada buku Tabungan dan pengiriman rekening koran melalui email.

Tabungan BRI BritAma Muda
Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dana *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak- anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.

Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *Internet Banking* dan *Mobile Banking*. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes TKI, Simpedes Impian dan Simpedes Usaha.

Selain itu BRI memiliki produk tabungan lainnya yaitu:

1. Tabunganku dan Tabunganku BSA
2. Tabungan BRI Simpel
3. Tabungan BRI SiMuda
4. Deposito (Rupiah dan Valas)
5. Giro (Rupiah dan Valas)

Terdapat produk Giro dengan varian produk yaitu:

1. Giro BRI Rupiah
2. Giro BRI Valas

Terdapat produk Deposito dengan varian produk yaitu:

1. DepoBRI Rupiah
2. DepoBRI Valas
3. Deposito On Call
4. Deposito On Call Valas

Produk dan Jasa

Produk Pinjaman

Pinjaman Mikro

Kupedes

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.

Varian produk kupedes yaitu:

1. Kupedes Modal Kerja
2. Kupedes Investasi
3. KECE
4. Kupedes Cash Coll / Kupedes Agunan Kas

Kupedes Rakyat:

1. Kupedes Rakyat Modal Kerja
2. Kupedes Rakyat Investasi
3. Kupedes Rakyat TKI

KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula.

Varian produk KUR Mikro:

1. KUR Mikro BRI
2. KUR Super Mikro
3. KUR Mikro TKI

Pinjaman Program
Program Kemitraan

Kredit Program Non KUR

1. S-SRG (Skema Subsidi Resi Gudang)
2. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)
3. KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan)
4. KMKP

KUR Kecil

1. KI KUR Khusus
2. KMK KUR Khusus
3. KUR Linkage
4. KUR Kecil KI
5. KUR Kecil KMK

Kredit Pangan

1. Kredit Pangan KI
2. Kredit Pangan KMK

Pinjaman Cash Coll BRI
Pinjaman Ritel Komersial

KMK Ritel Komersial
1. KMK Ritel Komersial
2. KMK Dinamis Ritel Komersial
3. KMK Mitra Ritel Komersial
4. KMK Konstruksi Ritel Komersial
5. KMK SPBU Ritel Komersial
6. KMK Pengembang/Developer
7. KMK Angsuran Tetap
8. KMK Waralaba Ritel Komersial
9. KMK Valas Ritel Komersial
10. KMK Executing Ritel Komersial

KI Ritel
1. KI Ritel Komersial
2. KI Mitra Ritel Komersial
3. KI SPBU Ritel Komersial
4. KI Waralaba Ritel Komersial
5. KI Angsuran Tetap

Pinjaman Menengah

KMK Menengah
1. KMK Menengah
2. KMK Dinamis Menengah
3. KMK Mitra Menengah
4. KMK Ekspor Menengah
5. KMK Executing Menengah
6. KMK Impor Menengah
7. KMK SPBU Menengah
8. KMK Konstruksi Menengah
9. KMK Valas Menengah

KI Menengah
1. KI Menengah
2. KI Mitra Menengah
3. KI SPBU Menengah
4. KI Valas Menengah
5. KI Waralaba Menengah

KMK Korporasi
1. KMK Korporasi
2. KMK Impor Korporasi
3. KMK Ekspor Korporasi
4. KMK Valas
5. KMK WA Konstruksi Korporasi

KI Korporasi
1. KI Korporasi
2. KI Valas Korporasi
3. KI Waralaba Korporasi

Pinjaman Konsumtif

Briguna Karya
1. Briguna Karya
2. Briguna Talangan
3. Briguna Profesi
4. Briguna Pendidikan
5. Briguna Smart

Briguna Pra Purna
1. Briguna Pra Purna
2. Briguna Smart

Briguna Purna
1. Briguna Purna
2. Briguna Profesi

KPR
1. KPR
2. KPR Subsidi

KKB
1. KKB Kerjasama

Ceria

Kartu Kredit
1. BRI Touch
2. BRI Infinite
3. BRI Easy Card
4. BRI Mastercard Platinum
5. BRI World Access
6. BRI Business Card
7. BRI Corporate Card
8. Kartu Kredit Pemerintah

BRI JCB Platinum

1. Cobranding Wonderful Indonesia
   a. Edisi Borobudur
   b. Edisi Gunung Bromo
   c. Edisi Mandalika
   d. Edisi Danau Toba
   e. Edisi Labuan Bajo
2. Cobranding BRI Agro
3. Cobranding TravelokaPaylater Card

Produk dan Jasa

Jasa

Cash Management System

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas online. Juga menyediakan fasilitas *national pooling, added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan borrowing berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas corporate virtual account berupa layanan tambahan virtual account yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi (*Integrated Banking Solution*), serta berbagai layanan cash management lainnya.

Jasa Kelembagaan

1. SIM (Surat Izin Mengemudi) - *Online*
2. MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
3. E-Tax (*Electronic Tax*)
4. *Hospital Online*
5. SPP-*Online* Mahasiswa
6. *Visa on Arrival* (VoA)
7. Layanan terkait Nasabah Instasi Kerja Sama (NIK)
8. Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9. Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
10. Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
11. KTA Elektronik
12. E-Samsat
13. E-Tilang (Tilang *Online*)
14. PDAM *Online*
15. BPJS-TK *Service Point Office*

Jasa Bisnis dan Keuangan

1. Bank Kliring
2. *Bill Payment*
3. Penerimaan Setoran
4. Transaksi *Online*
   a. Automatic Fund Transfer (AFT)
   b. Automatic Grab Fund (AGF)
   c. Account Sweep
   d. New Account Sweep (NAS)
   e. Salary Crediting
   f. Mass Debet
   g. Auto Payment
   h. Auto debet
5. Transfer LLG (Lalu Lintas Giro)
6. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Agen BRILink

E-Banking

1. ATM BRI
2. Mobile Banking (SMS Base)
3. Internet Banking BRI
4. CRM BRI
5. EDC BRI
6. BRIZZI (Electronic Money BRI)
7. BRImo
8. iBBIZ BRI
9. Kartu Debit BRI
10. BRIVA
11. E-Pay BRI
12. Corporate Billing Management
13. BRICams
14. BRIStore
15. E-Tax
16. BRIMola
17. BRI Smart Billing
18. BRI Smart Junio
19. Stroberi
    a. Stroberi Kasir
    b. Stroberi Tagihan
    c. Stroberi Order

Jasa Layanan Bisnis Internasional

Bank Garansi
1. Tender/Bid Bond
2. Advance Payment Bond
3. Performance Bond
4. Maintenance Bond
5. Financial Bond
6. Bond Payment
7. Bea Cukai
8. BG Akhir Tahun

Collection
1. Document Against Payment
2. Document Against Acceptance

Domestic Documented Credit Letters (SKBDN)

Letter of Credit (LC)
1. Sight
2. UPAS
3. Usance

Back to Back LC

Standby LC (SBLC)
1. Bid Bond Standby
2. Advance Payment Standby
3. Commercial Standby
4. Performance Bond Standby
5. Direct Pay Standby
6. Counter Standby
7. Financial Standby

Negosiasi LC / SKBDN / Non LC / Non SKBDN

SCF
Forfaiting Non Bank
Shipping Guarantee
Receivable Financing
Demand Guarantee
Pembayaran Pajak Impor
PIB
Counter Guarantee Bank
Risk Participation (Bank Risk)

LCS (Local Currency Settlement)

UCL dan Bank Line Management

Refinancing LC (BRI as Borrower / Lender)
1. Pre Import Financing
2. Post Import Financing

Bilateral Loan (Bank Risk)
Confirming Bank Business
SWIFT
Pengelolaan Nostro & Vostro
Forfaiting (Bank Risk)
Relationship Manager Aplication (RMA)-SWIFT
BRI Money Changer

BRIfast Remittance

BRIfast Remittance adalah layanan remittance BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan Remittance BRI meliputi fitur outgoing remittance ke 144 currency di seluruh dunia, fitur incoming remittance credit to BRI account (kiriman masuk ke rekening BRI) dan credit to other bank account (kiriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur incoming remittance cash pick-up (kiriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI di Indonesia secara real time online.

Jasa Layanan Treasury

BRIefx (Foreign Exchange Product)
1. Today
2. FX Tommorow
3. FX Spot

Foreign Exchange Derivative Product
1. FX Forward
2. FX Par Forward
3. FX Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)
4. FX Swap
5. FX Option
6. Cross Currency Swap (CCS)
7. Interest Only Swap (IOS)
8. Principal Only Swap (POS)

Interest Rate Derivative Product
1. Forward Rate Agreement (FRA)
2. Interest Rate Swap (IRS)

Structured Product
1. Call Spread Option (CSO)
2. BRI Swap Deposit
3. Bond Option
4. Overnight index Swap (OIS)

Interest Rate Product
1. Jual/Beli Surat Berharga Pada Pasar Primer
2. Jual/Beli Surat Berharga Pada Pasar Sekunder
3. Repo/Reverse Repo Surat Berharga
4. Placement/Borrowing
5. Term deposit
6. Deposit / lending Facility

Produk dan Jasa

Jasa Investment Service

BRI Kustodian
1. Jasa Kustodian Reksadana
2. Jasa Kustodian Efek Beragun Aset
3. Jasa Kustodian General Safekeeping
4. Jasa Kustodian Surat Berharga Global
5. Jasa Kustodian Tapera
6. Jasa Kustodian Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund)

BRI Trust
1. Payment Agent
2. Escrow Agent
3. Investment Agent
4. Security Agent

Wali Amanat BRI
1. Wali Amanat
2. Agen Pemantau
3. Agen Pembayar
4. Agen Jaminan

BRI Future Investment (BRIFine)
1. PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti)
2. Program Manfaat Lain

Bank Pembayaran KSEI
Bank Administrator RDN

BRI Prioritas

Layanan Wealth Management dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan konsep one stop financial solution dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan Wealth Management BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk Bancassurance.

Produk Lainnya antara lain:

Dana Sejahtera
1. Dana Investasi Sejahtera (Davestara)
2. Dana Sehat Sejahtera (Dasetera)
3. Dana Investasi Sejahtera Proteksi
4. Dana Investsi Sejahtera Optima

Provest Saving Plan
Provestara
1. Provestara Ultima Link
2. Provestara Assurance Link
3. Provestara Smart Health

Telepro
1. Telepro Sehat Optima
2. Telepro Beasiswa Berjangka
3. Telepro Tanggap Prima
4. Telepro Jiwa

Asuransi Mikro (AM)
1. Asuransi Mikro – Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM)
2. Asuransi Mikro – Cepat, Mudah, Murah (AM-CAMAR)

Asuransi Jiwa Kredit KPR
Asuransi Lengkap Ekonomis Nyaman Sejahtera (Lentera)
Asuransi Kerugian Kredit Kendaraan Bermotor
Asuransi Kredit

Agen Penjual Reksadana
1. Sucorinvest Money Market Fund
2. Ashmore Dana Progresif Nusantara (All)
3. BNP Paribas Pesona Syariah (All)
4. Manulife Dana Saham (All)
5. Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (All)
6. Reksa Dana Dana Ekuitas Prima (All)
7. Reksa Dana Danareksa Indeks Syariah (All)

Produk dan Jasa

8. Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10 (All)
9. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas (All)
10. Reksa Dana Kresna Indeks 45 (All)
11. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas (All)
12. Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (All)
13. Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (All)
14. Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund (All)
15. Syailendra Equity Opportunity Fund (All)
16. Trim Kapital (All)
17. Manulife Obligasi Negara Indonesia II (All)
18. Manulife Pendapatan Bulanan II (All)
19. Reksa Dana Bahana Makara Prima (All)
20. Reksa Dana BNP Paribas Prima Utama USD (All)
21. Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Utama (All)
22. Reksa Dana MRS Bond Kresna (All)
23. Reksa Dana Schroder USD Bond Fund (All)
24. Reksa Dana Bahana Dana Likuid (All)
25. Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (All)
26. Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (Reguler)
27. Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II (All)
28. Reksa Dana Schroder Dana Likuid (Reguler)
29. Reksa Dana Schroder Dana Likuid (All)
30. Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (All)
31. Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (Reguler)
32. Reksa Dana Syailendra Dana Kas (All)
33. Reksa Dana Syailendra Dana Kas (Reguler)
34. Reksa Dana Trim Kas 2 (Reguler)
35. Reksa Dana Trim Kas 2 (All)
36. BNP Paribas Spektra (All)
37. BNP Paribas Spektra (Reguler)
38. Manulife Dana Campuran II (All)
39. Manulife Dana Campuran II (Reguler)
40. Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (Reguler)
41. Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (All)
42. Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel (All)
43. Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel (Reguler)
44. Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang (All)
45. Reksa Dana Kresna Flexima (All)
46. Reksa Dana Kresna Flexima (Reguler)
47. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (Reguler)
48. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (All)
49. Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (All)
50. Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (Reguler)
51. Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (All)
52. Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (Reguler)
53. Schroder Dana Kombinasi (All)
54. Schroder Dana Kombinasi (Reguler)
55. Sucorinvest Flexi Fund (All)
56. Sucorinvest Flexi Fund (Reguler)
57. Trim Kombinasi 2 (Reguler)
58. Trim Kombinasi 2 (All)
59. Reksa Dana Danareksa Balanced Regular Income Fund
60. Reksa Dana Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap
61. Reksa Dana Hpam Syariah Ekuitas

Agen Penjual Obligasi negara Retail Indonesia (ORI)
Agen Penjual Sukuk Retail
Agen Penjual Saving Bonds Retail
Agen Penjual Saving Sukuk

Safe Deposit Box (SDB) BRI
Layanan Cash Pick Up Nasabah
Surat Referensi Bank

Wilayah Operasional

Unit Kerja

Outlets	2016	2017	2018	2019	2020
Kantor Pusat	1	1	1	1	**1**
Kantor Wilayah	19	19	19	19	**19**
Kantor Cabang	467	468	468	467	**467**
Kantor Cabang Pembantu	609	610	609	611	**611**
BRI Unit	5.380	5.382	5.381	5.382	**5,382**
Kantor Kas*	984	992	964	952	**547**
Teras BRI	2.545	2.536	2.069	2.049	**1.867**
Teras BRI Keliling	638	638	133	133	**132**
Teras BRI Kapal	3	3	3	4	**4**
Total	**10.646**	**10.649**	**9.647**	**9.618**	**9.030**

* Untuk Kantor Kas terdapat perubahan status SSB (di OJK tercatat sebagai Kantor Kas) menjadi Payment Point dengan mekanisme Buka-Tutup sebanyak 384

E-Channel

E-Channel	2016	2017	2018	2019	2020
ATM	24.292	24.684	24.684	19.184	16.880
EDC	257.712	302.921	284.426	204.386	198.785
CRM	1.392	1.992	2.609	3.809	5.809
E-Buzz	57	57	57	57	57
Total	**283.453**	**329.654**	**309.776**	**227.436**	**221.531**

Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan *E-Channel*

Jaringan Kantor Wilayah Indonesia

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.030 unit kerja, 221.531 jaringan e-channel dan 504.233 agen BRIlink yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

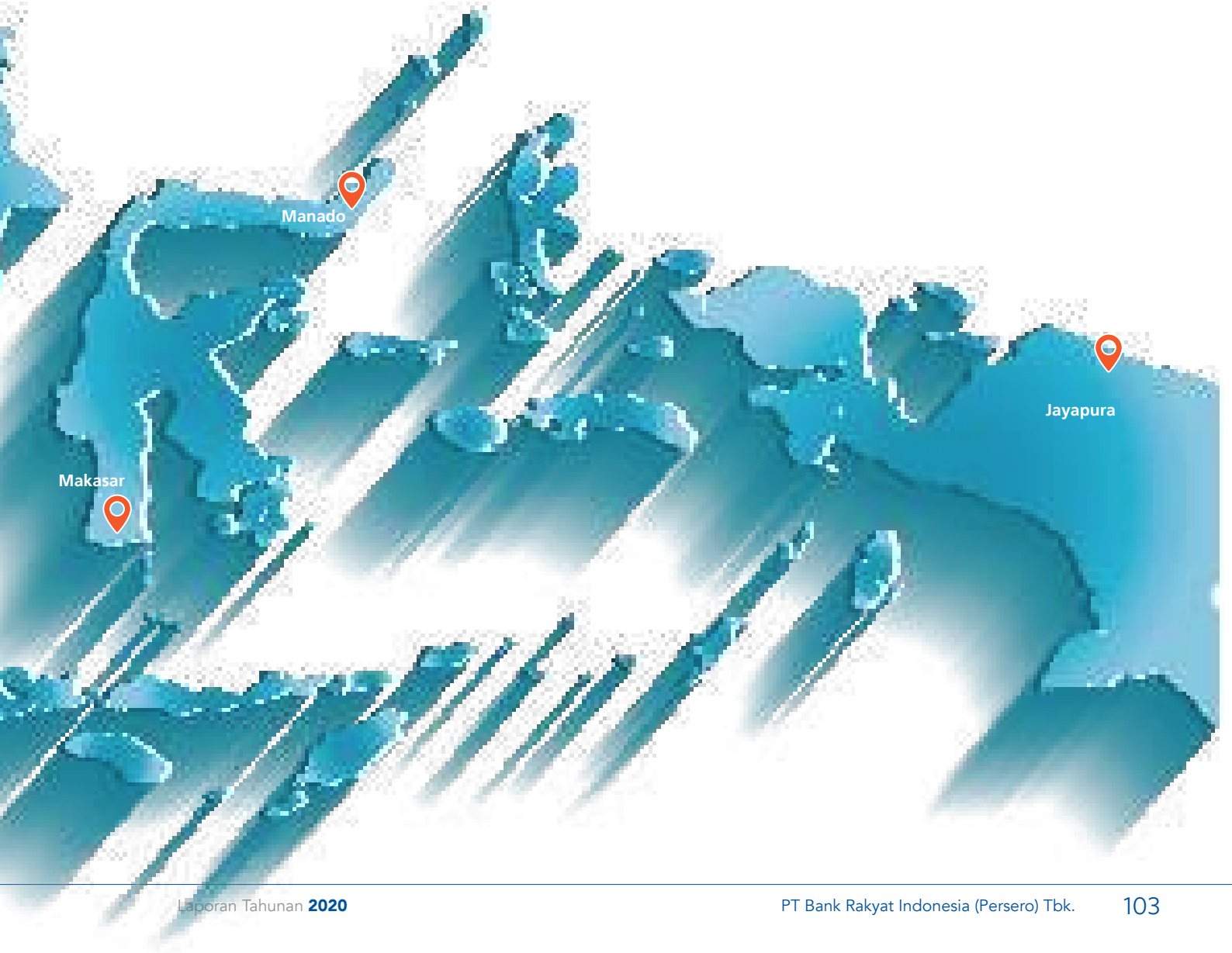

Wilayah Operasional

Jaringan Kantor Per Wilayah

KANTOR WILAYAH	OUTLET							
	KW	KC	KCP	BRI UNIT	KK	TERAS BRI	TERAS BRI KELILING	TERAS KAPAL
BANDA ACEH	1	11	15	141	5	2	-	-
BANDAR LAMPUNG	1	14	16	188	12	57	-	-
BANDUNG	1	30	45	608	55	216	26	-
BANJARMASIN	1	31	31	290	21	117	7	-
DENPASAR	1	31	27	298	19	150	4	1
JAKARTA 1	1	25	54	96	67	64	-	-
JAKARTA 2	1	31	69	191	67	59	21	-
JAKARTA 3	1	36	55	260	42	101	-	1
JAYAPURA	1	13	13	86	10	27	1	-
MAKASSAR	1	36	28	348	21	127	-	-
MALANG	1	24	36	528	20	205	5	-
MANADO	1	18	17	205	15	51	43	1
MEDAN	1	24	34	270	27	97	15	-
PADANG	1	14	8	157	11	54	-	-
PALEMBANG	1	21	29	234	13	79	-	-
PEKANBARU	1	22	20	171	19	100	1	1
SEMARANG	1	22	38	421	41	97	-	-
SURABAYA	1	25	39	290	22	120	8	-
YOGYAKARTA	1	33	34	600	56	144	1	-
KCK	-	1	-	-	4	-	-	-
TOTAL	**19**	**462**	**608**	**5.382**	**547**	**1.867**	**132**	**4**

E-Channel Per Wilayah

KANTOR WILAYAH	E-CHANNEL			
	ATM	EDC	CRM	E-BUZZ
BANDA ACEH	446	5,070	62	1
BANDAR LAMPUNG	459	5,855	186	2
BANDUNG	1.002	9,344	604	4
BANJARMASIN	1.016	5,617	312	3
DENPASAR	893	9,125	332	3
JAKARTA 1	975	3,892	281	3
JAKARTA 2	1.774	4,817	407	4
JAKARTA 3	1.823	6,679	362	4
JAYAPURA	405	2,057	115	1
MAKASSAR	1.088	11,924	325	3
MALANG	953	10,240	445	3
MANADO	532	5,066	181	3
MEDAN	1.085	8,572	286	3
PADANG	416	4,589	133	2

Wilayah Operasional

KANTOR WILAYAH	E-CHANNEL			
	ATM	EDC	CRM	E-BUZZ
PALEMBANG	676	7,264	230	3
PEKANBARU	562	6,836	213	3
SEMARANG	835	10,144	414	3
SURABAYA	781	7,701	370	3
YOGYAKARTA	1.114	11,135	532	4
KCK	45	269	19	2
CHAIN		17,872		
KANINS		12		
KANPUS		4,845		
SENDIK		15		
PROGRAM PEMERINTAH		39,845		
TOTAL	**16.880**	**198,785**	**5.809**	**57**

Jaringan Kantor Luar Negeri

No	Kantor Perwakilan BRI di Luar Negeri	Jenis Kantor Perwakilan	Alamat	Kontak Informasi	Core Business	Potensi Bisnis	Status
1	BRI New York Agency	Agency	140 Broadway, 36th Floor, New York, NY, 10005	Telepon +1 (212) 379 3840 Fax +1 (212) 379 3850 Website http://www.brinya.com	Wholesale Banking	Pinjaman korporasi, DPK Valas, Trade Finance, Depcorr, Remitansi, Treasury	Beroperasi
2	BRI Cayman Island Branch	n/a	190 Elgin Avenue Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands	n/a	Wholesale Banking (lisence B)	Pinjaman Korporasi	Beroperasi
3	BRI Singapore Branch	Full Branch Office	50 Collyer Quay *08-06, OUE Bayfront, Singapore 049321	Telepon +65 68050686 Fax +65 65091742 Website http://bankbri.com.sg/	Wholesale Banking	Pinjaman korporasi, DPK Valas, Trade Finance, Depcorr, Remitansi, Treasury	Beroperasi
4	BRI Colmera (Timor-Leste) Branch	Full Branch Office	Grand Diocese Colmera Complex, Rua Nicolau Doc Reis Lobato Colmera Dili, Timor-Leste	Telepon +670 3311372 / 3310198	Full Banking	Pinjaman Ritel, Pinjaman Konsumer, DPK, Ritel, Treasury	Beroperasi
5	BRI Futuhada	Sub Branch Office (supervisi BRI Timor-Leste)	AV. Presidente Nicolau Lobato, Andevil, Bairo Pite, Dom Aleixo, Dili Timor-Leste	Telepon +670 3310436	Full Banking	Pinjaman Ritel, Pinjaman Konsumer, DPK, Ritel	Beroperasi
6	BRI Hudilaran	Sub Branch Office (supervisi BRI Timor-Leste)	Rua De Hudi Laran, Bita-Ba, Bairro Pite, Dom Aleixo, Dili Timor -Leste	Telepon +670 3311378	Full Banking	Pinjaman Ritel, Pinjaman Konsumer, DPK, Ritel	Beroperasi
7	BRI Audian	Sub Branch Office (supervisi BRI Timor Leste)	Rua 12 De Novembro, Audian, Santa Cruz, Nain Feto, Dili Timor Leste	Telepon +670 3311208	Full Banking	Pinjaman Ritel, Pinjaman Konsumer, DPK, Ritel	Beroperasi
8	BRI Hongkong Rep. Off	Representative Office	Room 1115, 11/F. Lippo Centre Tower II 88 Queensway, Hong Kong	Kontak Informasi Telepon +852 2527 0905 Fax +852 2861 3071	Potential Relationship & Business Insight	Pinjaman Korporasi untuk dibuku di UKLN lain	Beroperasi

Jejak Langkah

1895

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi Syomin Ginko (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).

2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan *ticker* "BBRI". Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

2009

Interkoneksi *real time online* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

2011

- Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1: 2.
- Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self- service banking* yang pertama di Indonesia.

2014

- Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan *Space System/ Loral* (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

2015

- Pada tahun 2015 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Singapura serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life)
- Pada tanggal 4 Agustus 2015 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan.
- BRI juga meresmikan BRI *Corporate University* sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja.

Jejak Langkah

2016

- Tanggal 18 Juni 2016, pukul 18.38 Waktu Kourou, Guyanan Prancis, satelit milik BRI, BRIsat meluncur dengan sukses. BRIsat menjadi infrastruktur penunjang layanan digital Bank BRI.
- BRI Mengakuisisi BTMU Finance yang bergerak di bidang *multifinance*. BTMU Finance berubah nama menjadi BRI Finance.
- Meluncurkan layanan *full-digital branch* di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan juga program digitalisasi untuk UMKM seperti e-Pasar, Teras BRI Digital. 1 Juta Domain Gratis Untuk UMKM dan Rumah Kreatif BUMN.

2017

- Pada tanggal 14 Maret 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste
- Pada tanggal 24 Februari 2017 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

2018

- Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI New Assistance yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.
- Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan startup-startup market place sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.
- BRI menerbitkan beberapa surat berharga berikut:
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1.837.000.000.000 dan coupon/discount rate sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605.000.000.000 dan coupon/discount rate sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 21 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500.000.000.000 dan coupon/discount rate sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.
- BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan PT BRI Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM). Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 8 (delapan) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRIsyariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas) dan General Insurance (BRI Insurance).
- BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau National *Capacity Building* di segmen UMKM.

Jejak Langkah

2019

- BRI melalui perusahaan anak BRI Agro meluncurkan PINANG, *Digital Lending* Perbankan Pertama di Indonesia. Dengan mengkombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat proses pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap muka secara langsung. Melalui proses yang cepat, murah, dan aman, serta plafon yang bersaing, PINANG akan memberikan kemudahan ekstra kepada nasabah untuk mengajukan pinjaman.
- BRI melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS), akuisisi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menjadi integrated financial solution yang akan semakin melengkapi layanan keuangan yang dimiliki oleh BRI Group.
- Pada tanggal 28 Maret 2019 BRI menerbitkan obligasi berkelanjutan (Sustainability Bond) dengan nominal sebesar USD500.000.000 (angkapenuh) untuk jangka waktu 5 tahun. Penerimaan dari penerbitan obligasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*
- Guna memberikan kemudahan dan keamanan layanan transaksi perbankan, BRI kembali meluncurkan terobosan digital banking terbarunya. Yang terbaru, BRI meluncurkan aplikasi BRImo, aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (user interface/ user experience) dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh nasabah maupun non nasabah BRI tanpa perlu datang ke kantor cabang dengan pilihan sumber dana giro, tabungan dan Uang Elektronik untuk setiap fitur-fiturnya. BRImo memiliki berbagai keunggulan menarik, yakni kemudahan dalam pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, login aplikasi menggunakan finger print maupun face id Recognition, cek mutasi rekening hingga 1 tahun kebelakang, penggunaan alias rekening serta akses info promo BRI. Pengguna BRImo hingga Desember 2019 telah mencapai 2,96 juta pengguna.
- Pada 12 Desember 2019, BRI melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam digital banking di Indonesia. Yang terbaru, BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA. Melalui peluncuran ini, BRI menjadi bank BUMN pertama yang memiliki aplikasi pinjaman online.
- Selain berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk digital banking, selama periode tahun 2019 BRI juga terus melakukan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran KUR senilai Rp 87,9 Triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM. Dari total KUR yang disalurkan selama tahun 2019 oleh BRI tersebut, Rp75,7 Triliun atau 86,1% diantaranya disalurkan khusus di segmen mikro. Dengan demikian, sejak tahun 2015, BRI telah berhasil menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp 323,4 Triliun kepada lebih dari 16,6 juta pelaku UMKM diseluruh Indonesia.

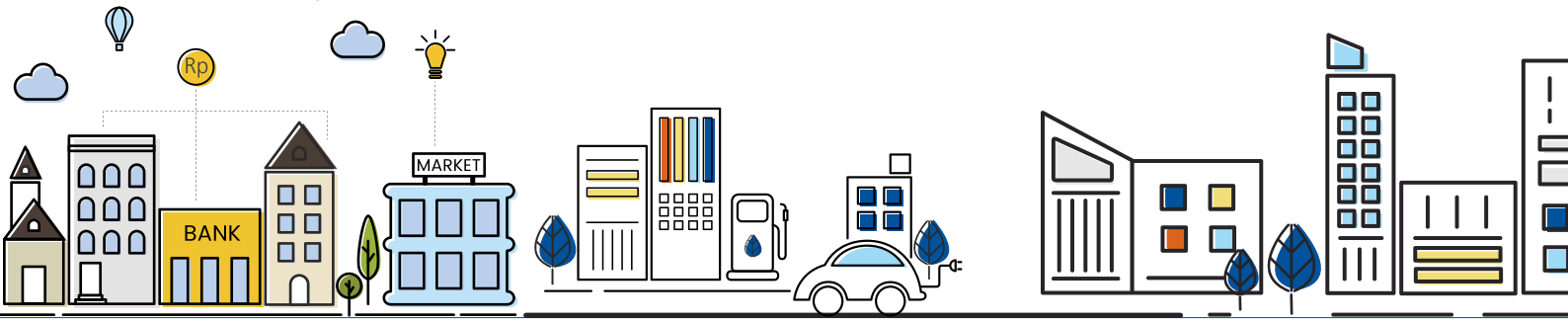

Jejak Langkah

2020

BRI secara aktif menjadi mitra utama Pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Debitur yang sebagian besar UMKM, tetapi juga bagi Perseroan. Sampai dengan Desember 2020, program PEN yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit UMKM dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp45 triliun (3 kali) dari Penempatan Dana Pemerintah;
2. Penyaluran kredit dengan skema penjaminan pada segmen kecil dan ritel sebesar Rp8,73 triliun kepada lebih dari 14 ribu Debitur;
3. Penyaluran Subsidi Bunga Kredit UMKM sebesar Rp5,47 Triliun kepada lebih dari 8,9 juta penerima;
4. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp18,64 triliun kepada lebih dari 7,7 juta usaha mikro;
5. Penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp8,66 triliun kepada lebih dari 985 ribu debitur;
6. Penyaluran subsidi gaji sebesar Rp6,45 triliun kepada lebih dari 5 juta penerima.

Selain itu, sebagai upaya penyelamatan debitur terdampak Covid-19, Sampai dengan Desember 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur, dimana sebesar 95% merupakan debitur segmen Mikro, Konsumer, Kecil dan Menengah.

- Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi di tengah pandemic, BRI menghadirkan inovasi-inovasi digital sebagai berikut:
  - Peluncuran BRImo New Look
  - Peluncuran Pasar.id. Adanya social distancing & PSBB menyebabkan aktivitas pasar menjadi terbatas, sehingga pedagang mengalami omzet. BRI membantu "Survival Mode" Pasar Tradisional dengan memperkenalkan belanja online (baik melalui WA, Website, Mobile Apps, maupun kerjasama dengan start up).
  - Peluncuran Digital Saving. BRI meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui Platform Digital Saving yang dapat diakses melalui channel Bank BRI ataupun pihak ketiga yang bekerjasama, dengan menggunakan 2 teknologi yaitu face recognition dan digital signature, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank untuk bertatap muka dengan petugas.
- Peluncuran lembaga sertifikasi profesi perbankan di Indonesia (BRISLP)
- Peluncuran BRI Micro & SME Index (BMSI). Peluncuran BMSI merupakan kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi. BMSI menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

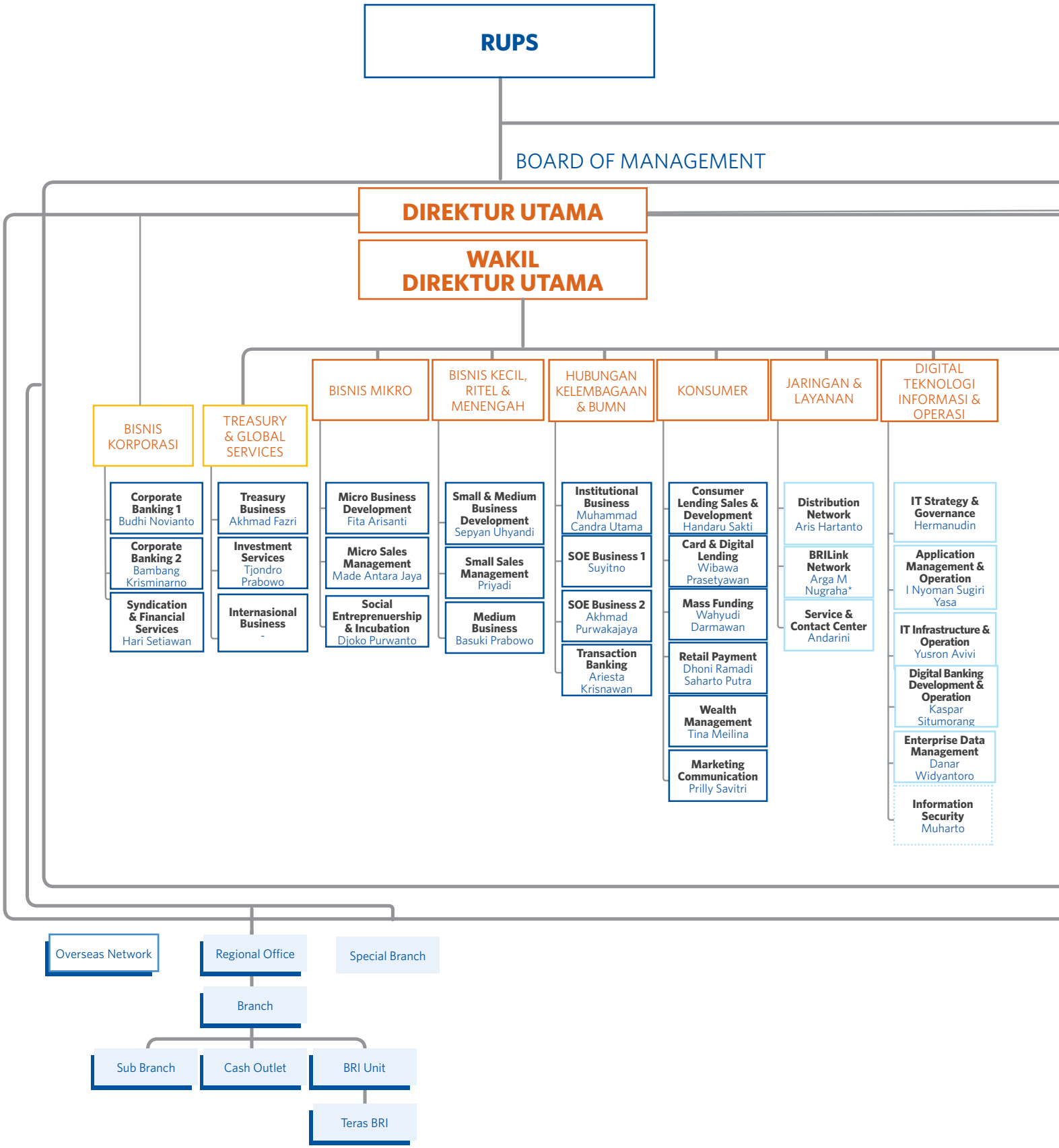

*) Diangkat menjadi Direktur BRI pada RUPS LB 21 Januari 2021

Struktur Organisasi

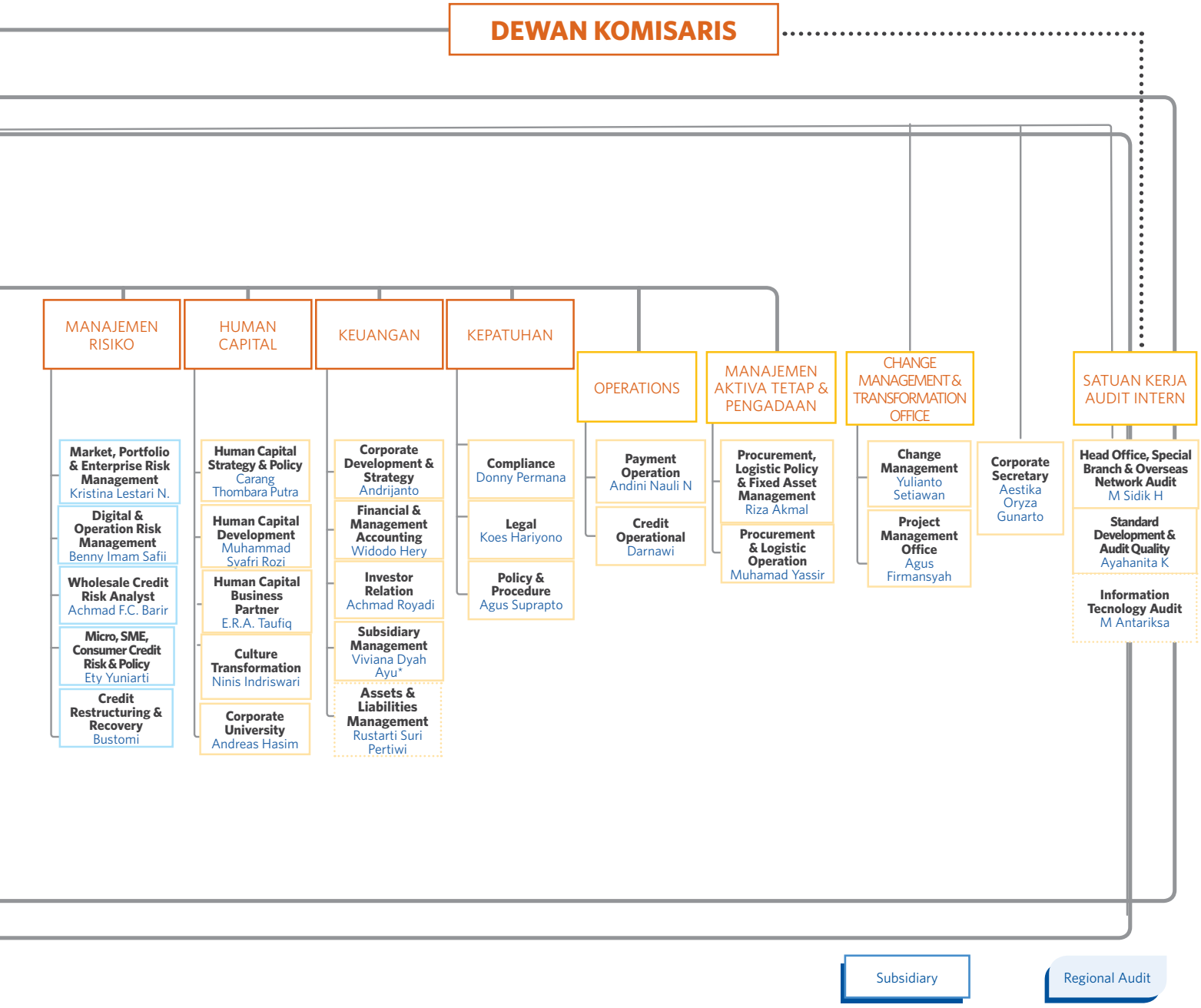

Direktur
SEVP
Bisnis
Penunjang Bisnis
Support

Komite Dewan Komisaris	: Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantau Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi
Komite Direksi	: Asset and Liability Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC), Komite Kredit, Komite Capital & Investment, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komite Tata Kelola Data, Komite Pengadaan Barang & Jasa, Komite Human Capital, Komite Produk

Visi, Misi & Nilai-Nilai Utama

VISI

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent

Misi

- Memberikan Yang Terbaik

  Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- Menyediakan Pelayanan Yang Prima

  Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan *risk management excellence*.

- Bekerja dengan Optimal dan Baik

  Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

Review Visi

Beragam tantangan selama tahun 2020, baik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, perkembangan teknologi yang sangat cepat, maupun tantangan pertumbuhan internal mendorong BRI untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana jangka panjang hingga strategi pencapaian kinerja. Untuk itu, BRI melakukan *review* dan menyusun *Corporate Plan* 2021-2025 yang kemudian disebut sebagai BRIVolution 2.0. Hasil dari *review* tersebut, BRI melakukan penyesuaian pada visi BRI menjadi sebagai berikut:

VISI

2025

Become the Most VALUABLE Banking Group in Southeast Asia & Champion of FINANCIAL INCLUSION

US$75 Billion Market Cap	Home to the "Best Talent"	"Digital First" DNA	90% Financial Inclusion	"Agile & Entrepreneurial" Mindset

Budaya Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki *corporate culture* yang berbeda-beda, di BRI Group bernama BRI *One Culture*.

BRI One Culture: Definisi & Arsitektur

BRI One Culture dijadikan pedoman melaksanakan dan membangun budaya perusahaan yang kuat untuk mencapai visi perusahaan. BRI One Culture terdiri dari *Core Values* Akhlak, BRILiaN *Belief*, dan BRILiaN *Ways* sebagai perilaku kunci yang mampu mendorong pencapaian kinerja perusahaan.

Arsitektur BRI One Culture

Perilaku

Pengelolaan budaya kerja bertujuan untuk membentuk sikap perilaku setiap insan BRILiaN sesuai dengan nilai-nilai pokok BRI One Culture.

- Keteladanan Culture Leader
- Culture Agent (CA) Coordinator & CA Forum 8 BRILiaN Ways
- 8 BRILiaN Ways

Simbol (Symbol)

Penggunaan simbol budaya kerja bertujuan untuk mengefektifkan proses internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai pokok budaya kerja melalui penggunaan media atau sarana komunikasi.

- Community Based
- Culture Activation Program
- Program Komunikasi

Sistem (System)

Penggunaan sistem budaya kerja bertujuan untuk mengukur implementasi budaya kerja dengan menggunakan pola aturan tertentu.

- Mekanisme Kerja Culture Leader & Culture Agent
- Rewards & Recognition System
- Indikator & Alat Ukur Budaya Kerja

BRI One Culture terdiri dari

- *Core Values* AKHLAK
- BRILiaN *Belief*
- BRILiaN *Ways*

Budaya kerja yang digunakan di lingkungan BRI Group / BRI One Culture terdiri dari AKHLAK, BRILiaN Belief, dan BRILiaN Ways.

AKHLAK

CORE VALUES DAN PANDUAN PERILAKU

Core Value & 18 Perilaku **AKHLAK** terimplementasi sesuai ketentuan KBUMN

BRILiaN

BELIEF

Prinsip-prinsip yang **diyakini oleh Insan BRILiaN** dalam bersikap dan berperilaku

BRILiaN Ways

PERFORMANCES DRIVEN BEHAVIOURS

Perilaku utama Insan BRILiaN untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik (performance driven behaviour)

Core Values Akhlak bersama panduan perilakunya menaungi BRILiaN Belief dan BRILiaN Ways yang merupakan perilaku kunci untuk mendukung pencapaian Kinerja Perusahaan.

Core Values: AKHLAK

Core Values AKHLAK adalah nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi pondasi Corporate Culture BRI. Core Values AKHLAK memiliki 6 nilai pokok (values) dan diterjemahkan menjadi 6 kata kunci dan 18 perilaku.

AKHLAK

AMANAH **K**OMPETEN **H**ARMONIS
LOYAL **A**DAPTIF **K**OLABORATIF

Value	Amanah	Kompeten
Kata Kunci	Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya	Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya
Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Perilaku	1. Memenuhi janji dan komitmen ; 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan & tindakan yang dilakukan ; 3. Berpegang teguh kepada nilai moral & etika	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

Value	Harmonis	Loyal
Kata Kunci	Peduli (*caring*), perbedaan (*diversity*)	Komitmen, dedikasi (rela berkorban), kontribusi
Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Perilaku	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN & Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum & etika

Value	Adaptif	Kolaboratif
Kata Kunci	Innovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif	Kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik
Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahaan	Kami mendorong kerjasama yang sinergis
Perilaku	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik ; 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi ; 3. Bertindak proaktif	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BRILiaN Belief

Brilian Belief merupakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh insan BRILiaN dalam bersikap dan berperilaku

"Insan BRILiaN senantiasa menjaga integritas dan bersikap Professional dalam menjalankan tugasnya dengan saling respek (*Trust*) untuk menghasilkan jasa dan layanan BRI Group yang inovatif berlandaskan semangat *Customer Centric* yang memberikan nilai tambah bagi nasabah, masyarakat, dan stakeholders"

BRILiaN Ways

1. BRILiaN jujur, tulus dan patuh pada peraturan
2. BRILiaN cakap dan handal, terus belajar, mengembangkan diri dan orang lain (*continous learner*)
3. BRILiaN bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab berorientasi pada kinerja terbaik
4. BRILiaN membangun kolaborasi yang produktif
5. BRILiaN terbuka dan menghargai kemajemukan (*respect to diversity*)
6. BRILiaN proaktif, adaptif, inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan
7. BRILiaN berempati memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan melebihi harapan
8. BRILiaN peduli terhadap masyarakat dan lingkungan

BRILiaN Ways dapat ditambah oleh perusahaan Anak / Perusahaan terafiliasi sesuai dengan jenis industri dan strategi perusahaan.

BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

BRI THE NEW WAY OF WORKING

THE PATH TOWARD NEW NORMAL

01 PRODUCTIVE EVERYWHERE

TEAM BASED WORKING, AGILE ORGANIZATION & CONTINUOUS PRODUCTIVITY TOOLS

02 GO DIGITAL

ONLINE LEARNING, ONLINE MEETING & ONLINE ACTIVITY

03 HEALTH PROTOCOL

PHYSICAL DISTANCING, HEALTHY LIFESTYLE & DISCIPLINE HEALTH PROTOCOL

04 FLEXIBLE WORKING

FLEXIBLE WORKING (TIME & PLACE), ALTERNATE WORKING SITE, CO-WORKING & OPEN SPACE

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan peserta penjaminan LPS LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CONTACT **BRI 14017 / 1500017** | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

Profil Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 47 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (tahun 1996)
- Master of Business Administration, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (tahun 2001)

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II (2019-sekarang)
- Komisaris Utama Bank Mandiri (2019-2020)
- Direktur Utama Bank Mandiri (2016-2019)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Komisaris Utama BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.46/KDK.03/2020 tanggal 03 Juli 2020

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2020 - 2025

Rangkap Jabatan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II (2019-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya. Namun memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Ari Kuncoro

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 59 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (tahun 1986)
- Master of Arts University of Minnesota, USA (tahun 1990)
- Ph.D. in Economics, Brown University, USA (tahun 1994)

Riwayat Pekerjaan

- Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang)
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan keputusan RUPST BRI tahun 2020.
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.70/ KDK.03/2020 tanggal 15 September 2020

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2020 - 2025

Rangkap Jabatan

- BOD East Asian Economist Association (2013-sekarang)
- Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Rabin Indrajad Hattari

Komisaris

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 45 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi & Matematika, University of Georgia, USA (tahun 1996)
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (tahun 2001)
- Ph.D. in Economics, George Mason University, USA (tahun 2008)

Riwayat Pekerjaan

- Staff Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (Januari 2021 - sekarang)
- Staf Khusus V Kementerian BUMN (2020 -2021)
- Senior Economist Asian Development Bank (2010 - 2020)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Komisaris BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.54/ KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1

Periode Menjabat

2020-2025

Rangkap Jabatan

Staff Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (2021 - sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya. Namun memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

R. Widyo Pramono

Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 63 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret (tahun 1984)
- Magister Manajemen, STIE IPWI (tahun 2001)
- Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (tahun 2007)
- Doktor, Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran (tahun 2012)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Bank Mandiri (2017-2020)
- Jaksa Agung Muda Pengawasan (2015-2017)
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2013-2015)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Komisaris BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.59/KDK.03/2020 tanggal 07 Agustus 2020

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2020 - 2025

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Rofikoh Rokhim

Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 50 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (tahun 1993)
- Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tahun 1994)
- Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (tahun 2000)
- D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (tahun 2002)
- Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (tahun 2005).
- Pendidikan Profesional: Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics and Political Science (LSE), Said Business School-University of Oxford, Chicago Booth School of Business, Stanford Graduate School of Business, Wharton Business School, INSEAD, Harvard Business School, Harvard Kennedy School.

Riwayat Pekerjaan

- Tim Task Force/Satgas Desa Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (2016-2017)
- Kinerja Organisasi dan SDM di BPJS Ketenagakerjaan (2016-2017)
- Komite Pelayanan dan Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan (2015-2017)
- Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017)
- Tim Task Force/Satgas Migas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2014-2015)
- Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT POS Indonesia (Persero) (2012-2015)
- Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008-2013)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-15/ D. 03/2018 tanggal 24 Januari 2018

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2017-2022

Rangkap Jabatan

Saat ini aktif sebagai Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Indonesia (2006-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Hendrikus Ivo

Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 62 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara (tahun 1982)
- Magister Manajemen, STIE IPWI (tahun 2000)

Riwayat Pekerjaan

- Advisor Senior Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2018)
- Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017)
- Deputi Komisioner Penyidikan & APU PPT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016)
- Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015)
- Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014)
- Kepala Kantor Regional 6 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan hasil RUPST BRI Tahun 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-41/KDK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3

Periode Menjabat

2019-2024

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 47 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada (tahun 1996)
- Master of Arts, Ohio University, USA (tahun 2003)
- Ph.D, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Northern Illinois University, USA (tahun 2010).

Riwayat Pekerjaan

- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016 - sekarang)
- Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2016-2017)
- Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015-2019)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPST BRI Tahun 2017
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-140/ D. 03/2017 tanggal 19 Juli 2017

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2017-2022

Rangkap Jabatan

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

816.300 lembar

Hadiyanto

Komisaris

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 58 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran (tahun 1986)
- Master of Law, Harvard University Law School, USA (tahun 1993)
- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (tahun 2012)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris PT Telkom Indonesia (2012-2018)
- Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (2011-2015)
- Dewan Pengawas Gelora Bung Karno (2010-2011)
- Dewan Direktur Indonesia LPEI (Eximbank) (2009-2015)
- Komisaris PT Tuban Petro Indonesia (2007-2013)
- Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2007-2012)
- Komisaris Utama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (2007-2009)
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan (2006-2015)
- Komisaris PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (2006-2008)
- Alternate Executive Director World Bank, Washington DC (2003-2005)
- Kepala Biro Hukum & Humas Departemen Keuangan (1993-2003)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 22 Maret 2018
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.30/KDK.03/2018 tanggal 18 September 2018

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
- Certificate International Tax Program Harvard University

Periode Menjabat

2018-2023

Rangkap Jabatan

- Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (2015-sekarang)
- Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016-sekarang)
- Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

625.800 lembar

Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 54 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Pancasila (tahun 1990)
- Alumni Lemhanas-40 (tahun 2007)
- Magister of Science, Universitas Gadjah Mada (tahun 2012)

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Cairo (2016- 2020)
- Anggota DPR-RI (2014-2019)
- Anggota DPR-RI (2000-2004)
- Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners (1992-sekarang)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 2/ KDK.03/2021 Tanggal 20 Januari 2021

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2020-2025

Rangkap Jabatan

Kantor Pengacara Rialatifa & Partner (1992-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Zulnahar Usman

Komisaris Independen

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 57 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti (tahun 1989)

Riwayat Pekerjaan

- President Director / CEO PT. Trans Borneo Gas (2019-2020)
- Anggota Komite Ekonomi dan Industri Republik Indonesia (KEIN R.I) (2016-2019)
- Ketua Pokja Energi dan Sumber Daya Mineral KEIN R.I (2016-2019)
- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN INDONESIA) (2015- 2020)
- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) Bidang Infrastruktur, (2014-2015)
- Ketua Komite Tetap Infrastruktur Energi dan Migas, Bidang Infrastruktur KADIN INDONESIA (2012-2014)
- Wakil Ketua Komite Tetap Industri Penangkapan Hasil Laut, Bidang Kelautan dan Perikanan KADIN INDONESIA (2010-2012)
- Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kelautan dan Teknologi KADIN INDONESIA (2005-2010)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Komisaris Utama BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.68/KDK.03/2020 tanggal 07 September 2020

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Periode Menjabat

2020-2025

Rangkap Jabatan

- Anggota Badan Pertimbangan Organisasi HKTI (2020-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Profil Direksi

Sunarso

Direktur Utama

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 57 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (tahun 1988)
- Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (tahun 2002)
- Pendidikan Profesional:
  1) Geopolitic Risk Related to Asia, International Risk Management Refreshment Program, National Chengchi University, Taipei Taiwan and IBI and UGM (tahun 2018)
  2) Systemic, Operational, and Infrastucture Risk Management, Universita Commerciale Luigi Bocconi, Italy and Erasmus University (tahun 2016)
  3) Decision Making for Leaders - Melbourne University, Australia (tahun 2014)
  4) Leadership,Strategy and Implementation - Kellog School Of Management, Northwestern University -Evaston,Illinois-USA (tahun 2013)
  5) High Performance Leadership - The IMD - Lausanne, Switzerland (tahun 2012)
  6) Strategic Business Leadership: Engagement, Performance & Execution - University of Chicago – Graduate School of Business, USA (tahun 2011)
  7) Market Driving Strategies -London Business School, UK (tahun 2009)
  8) Creative Strategic Thinking for Innovation - Australian Graduates School of Management, University of New South Wales, Sydney Australia (tahun 2008)

Achievement

- Top National Banker 2020 (Tokoh Finansial Indonesia 2020 - Majalah Investor)
- The Best CEO in Banking Transformation (CNBC Award 2020)
- Best CEO of The Year untuk kategori Sustainable Development Goals Contribution (People of The Year 2020 - Metro TV)
- CEO Inovatif Terbaik (IDX Channel – Anugerah Inovasi Indonesia 2020)
- CEO Visioner Terbaik Perusahaan Tbk (Anugerah BUMN 2020, BUMN Track)
- CEO Talent Development Terbaik (Anugerah BUMN 2020, BUMN Track)
- The Best CEO BUMN: Talent Development (Anugerah BUMN 2018, BUMN Track)
- The Best CEO BUMN: The Best Good Corporate Governance & Service (7sky Media, 2018)
- The Best CEO: The Best Transformative Leader (7sky Media, 2018)
- The Best SME Banker 2013 in Asia Pacific: The Triple A Awards (The Asset Magazine, Hong Kong)
- The Most Influential People in Southeast Asia – Leading Corporate & Commercial Bankers (Alpha Southeast Asia Magazine, 2012)

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Direktur Utama BRI (2019)
- Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017-2019)
- Wakil Direktur Utama BRI (2015-2017)
- Direktur Comercial & Business Banking Bank Mandiri (2010-2015)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat sebagai Direktur Utama pada RUPSLB pada tanggal 02 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.56/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2019-2024

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

1.008.000 lembar

Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 57 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (tahun 1986)
- Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya (tahun 2002)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI (2017-2019)
- Direktur BTN (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Executive Vice President (SEVP) BRI (2016)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 02 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.57/ KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Cerfitified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers' Association

Periode Menjabat
2019-2024

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham
329.200 lembar

Supari

Direktur Bisnis Mikro

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 54 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya (tahun 1989)
- Magister Sains, Universitas Gadjah Mada (tahun 2005).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Bisnis Ritel dan Menengah BRI (2018-2019)
- SEVP Transformation BRI (2017-2018)
- SEVP Manajemen Jaringan BRI (2017-2017)
- SEVP UKM Konsumer BRI (2016-2017)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: KEP-34/KDK.03/2018 tanggal 04 Desember 2018

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2018-2023

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

1.242.250 lembar

Amam Sukriyanto*

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 52 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya (tahun 1991)
- Master of Business Administration, the University of Adelaide, Australia (tahun 2006)

Riwayat Pekerjaan

- SEVP Fixed Assets Management & Procurement Directorate BRI (2020-2021)
- EVP Corporate Secretary Division BRI (2020)
- EVP Bisnis Internasional BRI (2018-2020)

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2021-2026

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

65.500 lembar

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Handayani

Direktur Konsumer

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 55 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga (tahun 1988)
- Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran (tahun 2001)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Consumer Banking BTN (2016-2017)
- Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Tbk (2014-2016)
- Direktur Marketing & Alternate Distribution PT AXA Mandiri (2013-2014)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur Konsumer BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. KEP-44/D.03/2018 tanggal 14 Maret 201

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2017-2022

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

1.602.500 lembar

Viviana Dyah Ayu R.K.*

Direktur Keuangan

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 42 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (tahun 2001)
- Master of Business Administration, University of Rochester, USA (tahun 2010)

Riwayat Pekerjaan

- EVP Subsidiary Management Division, BRI (2019)
- VP Subsidiary Management Desk, BRI (2018-2019)
- AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy, BRI (2017-2018)
- AVP Planning, Corporate Development & Strategy, BRI (2016-2017)

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certified Financial Planner (FPSB)

Periode Menjabat

2021-2026

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

28.500 lembar

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Indra Utoyo

Direktur Digital & Teknologi Informasi

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 59 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung (tahun 1985)
- Magister Communication and Signal Processing, Imperial College, London, UK (tahun 1994)
- Doctor Strategic Management Universitas Indonesia (tahun 2019)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi BRI (2018-2021)
- Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi BRI (2017-2018)
- Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom Group PT Telkom (2012-2017)
- CEO CFU Digital Service Telkom Group PT Telkom (2016-2017)
- Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009-2016)
- Direktur IT Solution & Supply PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2012)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. Kep-141/ D. 03/2017 tanggal 19 Juli 2017

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2017-2022

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

1.726.400 lembar

Ahmad Solichin Lutfiyanto*

Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 50 tahun
Domisili: Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (tahun 1990)
- Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM/Adger Collage University Norway (tahun 1999)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Jaringan & Layanan BRI (2019-2021)
- Direktur Kepatuhan BRI (2018-2019)
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital BRI (2017-2018)
- Kepala Divisi Transaction Banking BRI (2016-2017)
- Wakil Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel BRI (2012-2016)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan BRI pada RUPSLB 21 Januari 2021

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2018-2023

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama
anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

1.819.400 lembar

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Agus Winardono*

Direktur Human Capital

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 55 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Krisna Dwipayana (tahun 1988)
- Magister Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (tahun 2001)

Riwayat Pekerjaan
- CEO of PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (2020)
- Head of Regional Internal Audit BRI (Padang, Lampung, Jakarta 2) (2018-2020)
- EVP PT Bringin Karya Sejahtera (2016-2018)

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Cerfitified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers' Association
- Qualified Internal Auditor

Periode Menjabat
2021-2026

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham
65.100 lembar

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Agus Sudiarto

Direktur Manajemen Risiko

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 56 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (tahun 1988)
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (tahun 2004)

Riwayat Pekerjaan

- SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (2017-2019)
- Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (2014-2017)
- Group Head Special Asset Management Bank Mandiri (2010-2014)

Riwayat Penunjukan

- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

2019-2024

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

294.600 lembar

Agus Noorsanto

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 56 tahun
Domisili: Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (tahun 1988)
- Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (tahun 1999)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Utama BRI Agro (2017-2019)
- SEVP Bussiness Small, Medium & Consumer BRI (2016)
- Senior Executive Vice President Jaringan dan Layanan BRI (2016-2017)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat
2019-2024

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham
380.800 lembar

Arga M. Nugraha*

Direktur Jaringan dan Layanan

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 40 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara (tahun 2003)
- Master of Science, Carnegie Mellon University, USA (tahun 2011)

Riwayat Pekerjaan

- EVP Brilink Network Division, BRI (2020-2021)
- VP E-Banking, Retail Payment Division, BRI (2018-2020)
- AVP Cash Management, Transaction Banking Division, BRI (2017-2018)

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certification IS Auditor (NP)

Periode Menjabat

2021-2026

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Kepemilikan Saham

20.000 lembar

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Profil Direksi

Periode per 31 Desember 2020

Adapun profil Direksi yang pada saat penyampaian laporan tahunan ini sudah tidak menjabat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 21 Januari 2021.

Haru Koesmahargyo

Direktur Keuangan

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 54 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989)
- MBA, Investment Banking, Emory University, Amerika Serikat (2000)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Keuangan BRI (2018-2021)
- Direktur Strategi Bisnis & Keuangan, BRI (2017-2018)
- Direktur Strategi & Keuangan BRI (2017)
- Direktur Keuangan BRI (2015-2017)
- Presiden Komisaris PT BTMU BRI Finance (2014-2015)
- Kepala Divisi Treasury BRI (2014-2015)
- General Manager, Kantor Cabang New York, BRI (2011-2014)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-109/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Priyastomo

Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 57 tahun
Domisili: Tangerang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987)
- Magister Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Bisnis kecil, Ritel dan Menengah, BRI (2018-2021)
- Direktur Kredit Mikro dan Ritel BRI (2017-2018)
- Direktur Human Capital BRI (2017)
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRI (2016)
- Pemimpin Wilayah Bandung BRI (2016)
- Pemimpin Wilayah Yogyakarta BRI (2015-2016)
- Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah BRI (2014-2015)
- Pemimpin Wilayah Jayapura BRI (2012-2014)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Profil Direksi
Periode per 31 Desember 2020

Herdy Rosadi Harman
Direktur Human Capital

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 57 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum, dari Universitas Padjadjaran (1986)
- Master of Business Administration (MBA), Asian Institute Management Philippines, Institute Management Bandung (TELKOM University) (1993)
- Master of Law (LLM Program), American University, Washington College of Law (1998)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Human Capital BRI (2019-2021)
- Staf Khusus V Menteri BUMN Bidang Pengembangan SDM, Kementerian BUMN (2019)
- Direktur Human Capital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2014-2019)
- Direktur human Capital Management PT Telekomunikasi Seluler (2012-2014)
- VP Regulatory Management PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2012)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

Wisto Prihadi*
Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan: Indonesia
Umur: 61 tahun
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi, dari Universitas Kristen Indonesia (1986)
- Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (2002)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Kepatuhan BRI (2020)
- Direktur Utama PT BRI Multifinance Indonesia (2018-2020)
- Direktur Utama PT Bringin Indotama Sejahtera Majmur (2018-2018)
- Direktur Pemasaran PT Bringin Sejahtera Makmur (2017-2018)
- Inspektur, Kantor Inspeksi BRI Jakarta 1 BRI (2016-2016)
- Inspektur, Kantor Inspeksi BRI Bandung BRI (2014-2016)
- Kelapa Divisi Logistik, Manajemen Aktiva Tetap BRI (2012-2014)
- Pj. Inspektur, Kantor Inspeksi BRI Medan BRI (2011-2012)

Riwayat Penunjukan
- Diangkat berdasarkan RUPST tanggal 18 Februari 2020

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama

*) Dikukuhkan pemberhentiannya terhitung mulai tanggal 11 November 2020 pada RUPSLB 21 Januari 2021

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)

Listiarini Dewajanti
SEVP Treasury & Global Services

54 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pekerjaan/Jabatan
Menjabat sebagai SEVP Treasury & Global Services BRI, sejak Juli 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Development and Strategy BRI, General Manager BRI New York Agency, dan Kepala Desk Hubungan Investor BRI.

Riwayat Pendidikan
Meraih Sarjana Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989), dan Master of Business (Banking and Finance), Monash University, Melbourne, Australia (1999).

Hari Siaga Amijarso
SEVP Satuan Kerja Audit Intern

54 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pekerjaan/Jabatan
Sejak Juli 2019 menjabat sebagai SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Wilayah Jakarta 1, Yogyakarta dan Corporate Secretary BRI.

Riwayat Pendidikan
Meraih Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, Malang (1989).

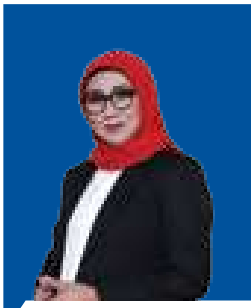

Lina Sari
SEVP Corporate Banking

54 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pekerjaan/Jabatan
Menjabat sebagai SEVP Corporate Banking BRI, sejak November 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Agribisnis dan Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit BRI.

Riwayat Pendidikan
Meraih Sarjana Pertanian, Universitas Andalas, Padang (1989), dan Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2001).

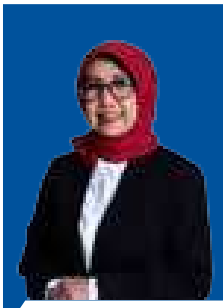

Retno Wahyuni Wijayanti
SEVP Change Management & Transformation Office

55 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pekerjaan/Jabatan
Menjabat sebagai SEVP Change Management & Transformation Office BRI sejak 1 Agustus 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Project Management Office BRI, Chief Learning Officer BRI Corporate University BRI, Kepala Divisi Corporate Development & Strategy BRI.

Riwayat Pendidikan
Meraih Sarjana Agribisnis IPB (1988), MBA in Organization and HRM Drexel University Philadelphia USA (1997).

Demografi Karyawan

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2018	2019	2020
Senior Executive Vice President	4	4	5
Executive Vice President	103	109	102
Vice President / Senior Vice President	198	177	192
Assistant Vice President	353	345	386
Senior Manager	766	788	841
Manager	1.320	1.532	1.629
Assistant Manager	5.599	5.277	5.125
Officer	11.945	12.574	13.169
Assistant	69.656	70.814	66.735
Total	**89.944**	**91.620**	**88.184**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	2018	2019	2020
≤ SLTA / Setingkat	2.308	1.952	1.529
Diploma	10.595	10.825	10.926
Strata 1	75.797	77.509	74.196
Strata 2	1.238	1.325	1.527
Strata 3	6	9	6
Grand Total	**89.944**	**91.620**	**88.184**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2018	2019	2020
Pekerja Kontrak	28.970	29.899	25.696
Pekerja Tetap	60.947	61.449	62.388
Trainee	27	272	100
Grand Total	**89.944**	**91.620**	**88.184**

Demografi Karyawan

Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia

Usia	2018	2019	2020
20-24	4.635	5.930	3.280
25-29	33.340	28.252	22.798
30-34	27.384	31.638	34.397
35-39	9.783	10.577	11.890
40-44	4.716	5.645	6.653
45-49	4.261	3.810	3.631
50-54	4.889	4.812	4.560
>54	936	956	975
Grand Total	**89.944**	**91.620**	**88.184**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Generasi

Generasi	2018	2019	2020
Baby Boomers	1.902	979	98
Gen X	16.779	16.267	13.830
Gen Y	70.718	71.494	71.039
Gen Z	545	2.880	3.217
Grand Total	**89.944**	**91.620**	**88.184**

Jumlah Pekerja Penyandang Difable

Masa Kerja	Keterangan
≤ 1 tahun	8
> 1 tahun	1
> 2 tahun	21
> 3 tahun	23
> 4 tahun	18
Grand Total	**69**

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tahun 2020, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sebanyak 5.274.114 peserta dengan komposisi 94.9% pendidikan E-Learning, 3.0% pendidikan Enhancement, 1.3% FPK/FGD, 0.6% Sosialisasi dan 0.2% Development dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	2018	2019	2020
1	*Development*	9.895	13.350	8.018
2	*Enhancement*	2.799.661	115.961	160.571
3	E - Learning	-	3.802.672	5.003.522
4	FPK/FGD	109.762	122.889	68.087
4	Sosialisasi	67.963	112.096	33.916
	Total	**2.987.284**	**4.166.964**	**5.274.114**

Catatan:
Untuk program Pendidikan *Enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *e-Learning*. Sedangkan untuk Pendidikan development termasuk Pendidikan *master degree*/S2.

BIAYA PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Biaya pendidikan dan pengembangan human capital BRI di tahun 2020 tercatat sebesar Rp342 miliar. dengan biaya per pekerja sebesar Rp65.000 per peserta melalui implementasi teknologi (*e-learning*). Berikut rincian biaya pendidikan human capital BRI tahun 2020:

Rupiah (Juta)

Program	2020
Development	90.014
Enhancement	145.432
Total Development & Enhancement	235.447
FPK/FGD	62.815
Sosialisasi	3.951
E-Learning	23.731
Literasi	0
Support	16.135
Total FPK, Sosial, Literasi, & Support	106.632
Total Biaya	**342.079**

Demografi Karyawan

Orang

Program	2019	2020	%
Development	13.350	8.018	-39,9%
Enhancement	115.961	160.571	38.5%
Enhancement	3.802.672	5.003.522	31.6%
Total Development & Enhancement	**3.931.983**	**5.172.111**	**31.5%**
FPK/FGD	122.889	68.087	-44.6%
Sosialisasi	112.092	33.916	-69,7%
Total FPK, Sosial & Literasi	**234.981**	**102.003**	**-56.6%**
Total Peserta	**4.166.964**	**5.274.114**	**26.6%**

Rupiah (Juta)

Program	2019	2020	%
Development	10.359	11.227	**-8%**
Enhancement	96,5	906	**73%**
E-Learning	-	5	**0%**
Biaya per Peserta I	133	50	**62%**
FPK/FGD	1.256	923	**27%**
Sosialisasi	43	116	**-171%**
Literasi	-	-	-
Biaya per Peserta II	**721**	**655**	**9%**
Total Biaya per Peserta I & II	**167**	**65**	**61%**

Terdapat efisiensi sebesar 61% pada tahun 2020 dibandingkan realisasi tahun 2019, yang dipengaruhi oleh program pendidikan yang didominasi oleh *e-learning*, sehingga menyebabkan biaya per peserta yang lebih murah.

Learning Effectiveness

Selama tahun 2020 BRI telah melakukan program pendidikan development, dan enhancement kepada 5.274.114 peserta pendidikan. Hasil dari evaluasi terhadap efektivitas pendidikan BRI mencapai 86,82.

Program	*Learning Evaluation*	*Total Evaluation*	
	Level 1	Level 2	Level 3
Development	93,22	86,85	83,33
Enhancement (Inc. E-learning)	90,51	86,61	81,43
Average	**90,66**	**86,63**	**81,53**

Catatan:
Tingkat Kelulusan 77,5
Level 1: *Student Reaction & Satisfaction* (30%)
Level 2: *Student Learning Result (Skill & Knowledge Improvement)* (50%)
Level 3: *Student Learning Behaviour (Application)* (20%)

Komposisi Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham BRI pada akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 281.161 pemegang saham yang terdiri dari 278.957 pemodal nasional dan 2.204 pemodal asing.

Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 56,75%. Masyarakat atau publik memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 43,25% dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek.

Pemodal nasional memiliki porsi kepemilikan 66,53% dan sisanya pemodal asing dengan porsi kepemilikan 33,47%.

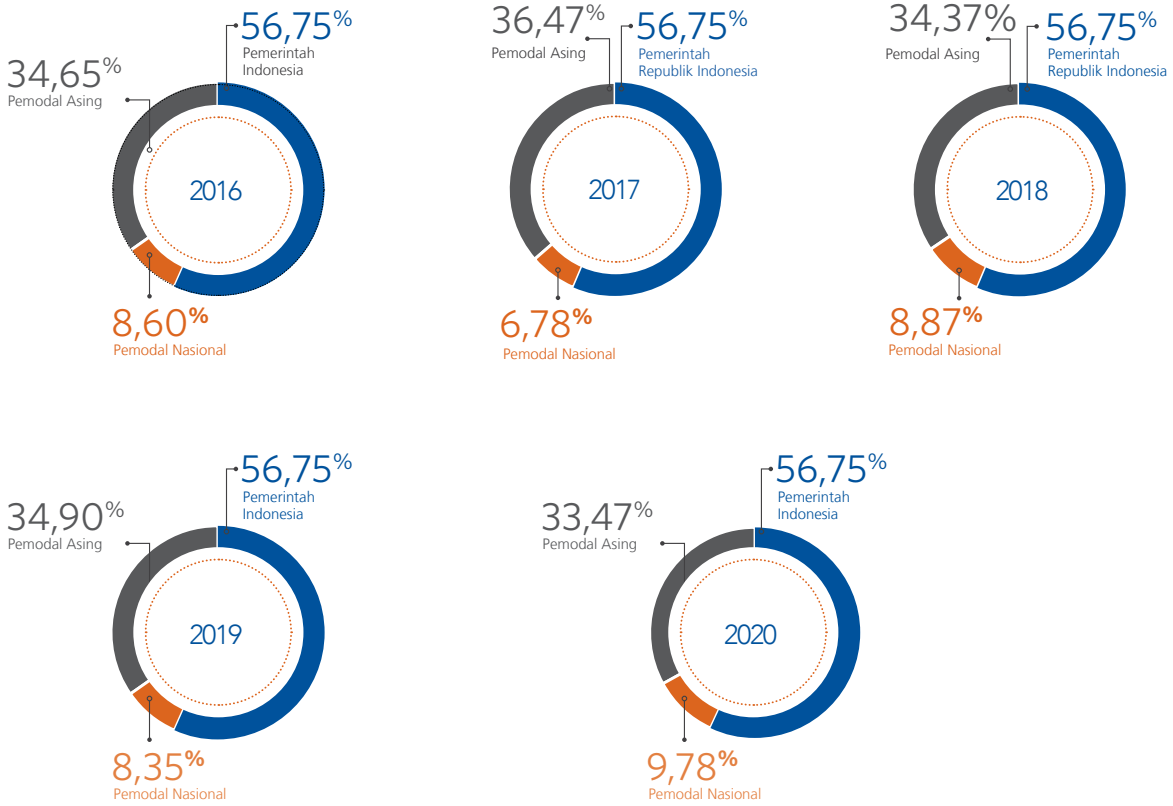

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham BRI Posisi 31 Desember 2020

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%) Kepemilikan
PEMODAL NASIONAL			
Negara RI	1	70,000,000,000	56.75%
Publik	281,160	53,345,810,000	43.25%
Pemodal Nasional	278,956	12,059,436,774	9.78%
Perorangan	216,601	2,238,474,024	1.81%
Karyawan	61,449	244,250,900	0.20%
Pemerintah Daerah	1	1,590,000	0.00%
Bank	7	894,073,600	0.72%
Koperasi	13	2,727,152	0.00%
Yayasan	28	203,779,900	0.17%
Dana Pensiun	148	2,468,756,800	2.00%
Asuransi	112	2,795,561,900	2.27%
Perseroan Terbatas	246	209,807,849	0.17%
Reksa Dana	351	3,000,414,649	2.43%
Pemodal Asing	**2,204**	**41,286,373,226**	**33.47%**
Perorangan	355	35,802,300	0.03%
Badan Usaha Asing	1,849	41,250,570,926	33.44%
Total	**281,161**	**123,345,810,000**	**100.00%**

Komposisi Pemegang Saham

20 Pemegang Saham Terbesar BRI Posisi 31 Desember 2020

No	Nama Investor	Status	Saham	Kepemilikan (%)
1	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	70,000,000,000	56.75
2	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Asuransi	1,156,560,800	0.94
3	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	Badan Usaha Asing	1,124,954,772	0.91
4	JPMCB NA RE-EUROPACIFIC GROWTH FUND	Badan Usaha Asing	1,032,412,900	0.84
5	JPMBL SA UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	798,913,430	0.65
6	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	767,030,328	0.62
7	JPMBLSAA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	696,635,900	0.56
8	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	691,903,558	0.56
9	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNI-TIES FUND	Badan Usaha Asing	629,334,300	0.51
10	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	606,232,300	0.49
11	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY Rp	Asuransi	537,840,300	0.44
12	JPMBL SA UCITS CLT RE-NORDEA 1 SICAV	Badan Usaha Asing	484,916,480	0.39
13	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHI-NA-2039845393	Badan Usaha Asing	476,207,500	0.39
14	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY	Badan Usaha Asing	444,622,315	0.36
15	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MAR-KETS ETF-2144613424	Badan Usaha Asing	435,400,800	0.35
16	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	427,056,500	0.35
17	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	410,269,900	0.33
18	HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE CO LTD	Badan Usaha Asing	363,495,300	0.29
19	SSB SWV4 S/A CALIFORNIA PUBLIC EMP RETIREMENT SYS-2144618013	Badan Usaha Asing	316,337,810	0.26
20	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	308,343,350	0.25

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Posisi 31 Desember 2020

Kategori	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	**1**	70.000.000.000	56,75102

Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5% Posisi 31 Desember 2020

Kategori	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
PEMODAL NASIONAL			
PERORANGAN INDONESIA	**216.556**	2.238.474.024	1,81480
PEMERINTAH DAERAH	1	1.590.000	0,00129
KARYAWAN	61.449	244.250.900	0,19802
KOPERASI	12	2.727.152	0,00221
YAYASAN	28	203.779.900	0,16521
DANA PENSIUN	148	2.468.756.800	2,00149
ASURANSI	112	2.795.561.900	2,26644
BANK	7	894.073.600	0,72485
PERSEROAN TERBATAS	237	209.807.849	0,17010
Jumlah Pemodal Nasional	278.902	**82.059.436.774**	**66,527**
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	355	35.802.300	0,02903
Badan Usaha Asing	1.848	41.250.570.846	33,44303
Jumlah Pemodal Asing	**2.203**	**41.286.373.146**	**33,472**
Total	**281.105**	**123.345.808.331**	**100,00000**

Komposisi Pemegang Saham

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi Posisi 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2019		31 Desember 2020	
		Lembar Saham (%)		Lembar Saham (%)	
DEWAN KOMISARIS					
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama/Komisaris	-	-	-	-
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	-	-	-	-
Hendricus Ivo	Komisaris Independen	-	-	-	-
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	-	-	-	-
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	-	-	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	386,700	0.000314%	816,300	0.000662%
Hadiyanto	Komisaris	201,200	0.000163%	625,800	0.000507%
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	-	-	-	-
DIREKSI					
Sunarso	Direktur Utama	-	-	1,008,000	0.00082%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	-	329,200	0.00027%
Haru Koesmahargyo*	Direktur	944,400	0.0007657%	1,835,600	0.00149%
Agus Noorsanto	Direktur	46,800	0.0000379%	380,800	0.00031%
Supari	Direktur	351,100	0.0002846%	1,242,300	0.00101%
Indra Utoyo	Direktur	835,200	0.0006771%	1,726,400	0.00140%
Priyastomo*	Direktur	944,400	0.0007657%	1,835,600	0.00149%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur	928,200	0.0007525%	1,819,400	0.00148%
Wisto Prihadi**	Direktur	-	-	-	0.00000%
Agus Sudiarto	Direktur	-	-	294,600	0.00024%
Handayani	Direktur	522,300	0.0004234%	1,602,500	0.00130%
Herdy Rosadi Harman*	Direktur	-	-	311,900	0.00025%

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021
**Dikuatkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam RUPS Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Bank Umum Syariah
Tanggal Penyertaan BRI	19 Desember 2007
Jumlah Aset	Rp57.716 miliar
Kepemilikan %	71,64%
Mulai Beroperasi	16 Oktober 2008, Masih Beroperasi Per 01 Februari 2021, Efektif bergabung dengan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)
Alamat	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta 10160
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Dewan Komisaris** Eko Suwardi, Komisaris Independen Sutanto, Komisaris **Direksi** Ngatari, Direktur Utama Kokok Alun Akbar, Direktur Fidri Arnaldy, Direktur Fahmi Subandi, Direktur Yana Soeprianan, Direktur **Dewan Pengawas** KH. Didin Hafidhuddin, Ketua M. Gunawan Yasni, Anggota

Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Bank Umum Swasta Nasional
Tanggal Penyertaan BRI	3 Maret 2011
Jumlah Aset	Rp28.006 miliar
Kepemilikan %	87,10%
Mulai Beroperasi	27 September 1989, Masih Beroperasi
Alamat	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Dewan Komisaris** Budi Satria, Komisaris Utama Anna Maria Tjiadarma, Komisaris Independen I.B.K. Suamba Manuaba, Komisaris A.Y. Soepadmo, Komisaris Independen **Direksi** Ebeneser Girsang, Direktur Utama Sigit Murtiyoso, Direktur Arif Wicaksono, Direktur Herry Prayudi, Direktur Ernawan, Direktur

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Remittance
Tanggal Penyertaan BRI	16 Desember 2011
Jumlah Aset	Rp8,48 miliar
Kepemilikan %	100,00%
Mulai Beroperasi	7 April 2005, Masih Beroperasi
Alamat	Lippo Centre, Tower II 22nd Floor
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Manajemen Eksekutif** Muhammad Adli Yusrizal, Non-Executive Director Gigieh Perkasa, Executive Director

Nama Perusahaan	PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Jiwa
Tanggal Penyertaan BRI	29 Desember 2015
Jumlah Aset	Rp13.043 miliar
Kepemilikan %	91,00%
Mulai Beroperasi	28 Oktober 1987, Masih Beroperasi
Alamat	Graha Irama Lt. 2,5,7,11 & 15, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2, Jakarta 12950
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Dewan Komisaris** Muhammad Syafri Rozi, Komisaris Utama Premita Fifi Widhiawati, Komisaris Independen Mulabasa Hutabarat, Komisaris Independen Eko Wahyu Andriastono, Komisaris Independen **Direksi** Iwan Pasila, Direktur Utama Khairi Setiawan, Direktur Danny Cahya Rukmana, Direktur Anik Hidayati, Direktur **Dewan Pengawas** KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH, Ketua M Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS, Anggota Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH, Anggota

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Pembiayaan
Tanggal Penyertaan BRI	7 Desember 1983
Jumlah Aset	Rp4.043 miliar
Kepemilikan %	99,88%
Mulai Beroperasi	7 Desember 1983, Masih Beroperasi
Alamat	Gedung Lippo Kuningan, Lt 11 dan GF, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan Jakarta 12920
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Dewan Komisaris** I Komang Sudiarsa, Komisaris Utama Ngalim Sawega, Komisaris Sumantri Soewarno, Komisaris Independen **Direksi** Azizatun Azhimah, Direktur Utama Primartono Gunawan, Direktur Ari Prayuwana, Direktur Willy Halim Sugiarda, Direktur

Nama Perusahaan	PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI DS)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
Tanggal Penyertaan BRI	21 Desember 2018
Jumlah Aset	Rp1.095 miliar
Kepemilikan %	67,00%
Mulai Beroperasi	1 Juli 1992, Masih Beroperasi
Alamat	Gedung BRI II Lantai 23 Jl. Jend Sudirman No 44 – 46 Jakarta 10210
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 | As of 31 December 2020 **Dewan Komisaris** Soehandjono, Komisaris Sumihar Manullang, Komisaris Independen **Direksi** Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama Budi Susanto, Direktur Santi Suryandari, Direktur Boumediene Samurung Halomoan, Direktur

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Modal Ventura
Tanggal Penyertaan BRI	20 Desember 2018
Jumlah Aset	Rp1.823 miliar
Kepemilikan %	99,97%
Mulai Beroperasi	22 Januari 1998, Masih Beroperasi
Alamat	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 **Dewan Komisaris** Hadi Susanto, Komisaris Utama | President Commissioner Arip Tirta, Komisaris Independen | Independent Commissioner Agoosh Yoosran, Komisaris Independen | Independent Commissioner **Direksi** Nicko Widjaja, Direktur Utama | President Director Yosephine Ajeng Sekar Putih, Direktur | Director William Gozali, Direktur | Director

Nama Perusahaan	PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)
Jenis Usaha/Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Umum
Tanggal Penyertaan BRI	26 September 2019
Jumlah Aset	Rp2.957 miliar
Kepemilikan %	90,00%
Mulai Beroperasi	17 April 1989, Masih Beroperasi
Alamat	Graha BRINS Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790
Pengurus Perusahaan	Per 31 Desember 2020 | As of 31 December 2020 **Dewan Komisaris** Darnawi, Komisaris Utama Alfonso Napitupulu, Komisaris Independen Imam Sundoro, Komisaris Independen **Direksi | Board of Directors** Fankar Umran, Direktur Utama Arif Suhirman, Direktur Sony Harsono, Direktur Adi Setyanto, Direktur Ade Zulfikar, Direktur **Dewan Pengawas Syariah** Hj. Nilmayetty Yusri, Ketua Muhammad Syukhandri, Anggota

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Kepemilikan	Mulai Beroperasi	Alamat
1	PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Perusahaan Modal Ventura	21 November 2017	35,00%	5 Agustus 1992 Masih Beroperasi	Wisma Prima Lantai 5, Jl. Kapten P. Tendean No. 34, Jakarta Selatan 12790
2	PT Danareksa Investment Management (DIM)	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	20 Desember 2018	35,00%	9 Oktober 1992 Masih Beroperasi	Plaza BP Jamsostek Lt 11 Jl HR. Rasuna Said No 112 Blok B Jakarta 12910
3	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Lembaga Penyelesaian Efek	5 Desember 1997	3,00%	11 November 1998 Masih Beroperasi	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, JL. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
4	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Perusahaan Pemeringkat Efek	15 Juni 1995	0,21%	21 Desember 1993 Masih Beroperasi	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Jakarta 12220

BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

Wujudkan Mimpi Sambil Rebahan

Kini pengajuan KPR BRI dan Kredit BRIguna BRI lebih mudah, cepat dan nyaman dengan aplikasi BRIspot.

- Tanpa Bolak-Balik ke Bank
- Proses Tracking
- Simulasi Kredit

Scan di sini untuk download

#MulaiLagi #CovidSafeBUMN

Info lebih lanjut kunjungi promo.bri.co.id

*Syarat dan ketentuan berlaku

KPR BRI | KREDIT BRIGUNA BRI | BRI SPOT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

Struktur Perusahaan

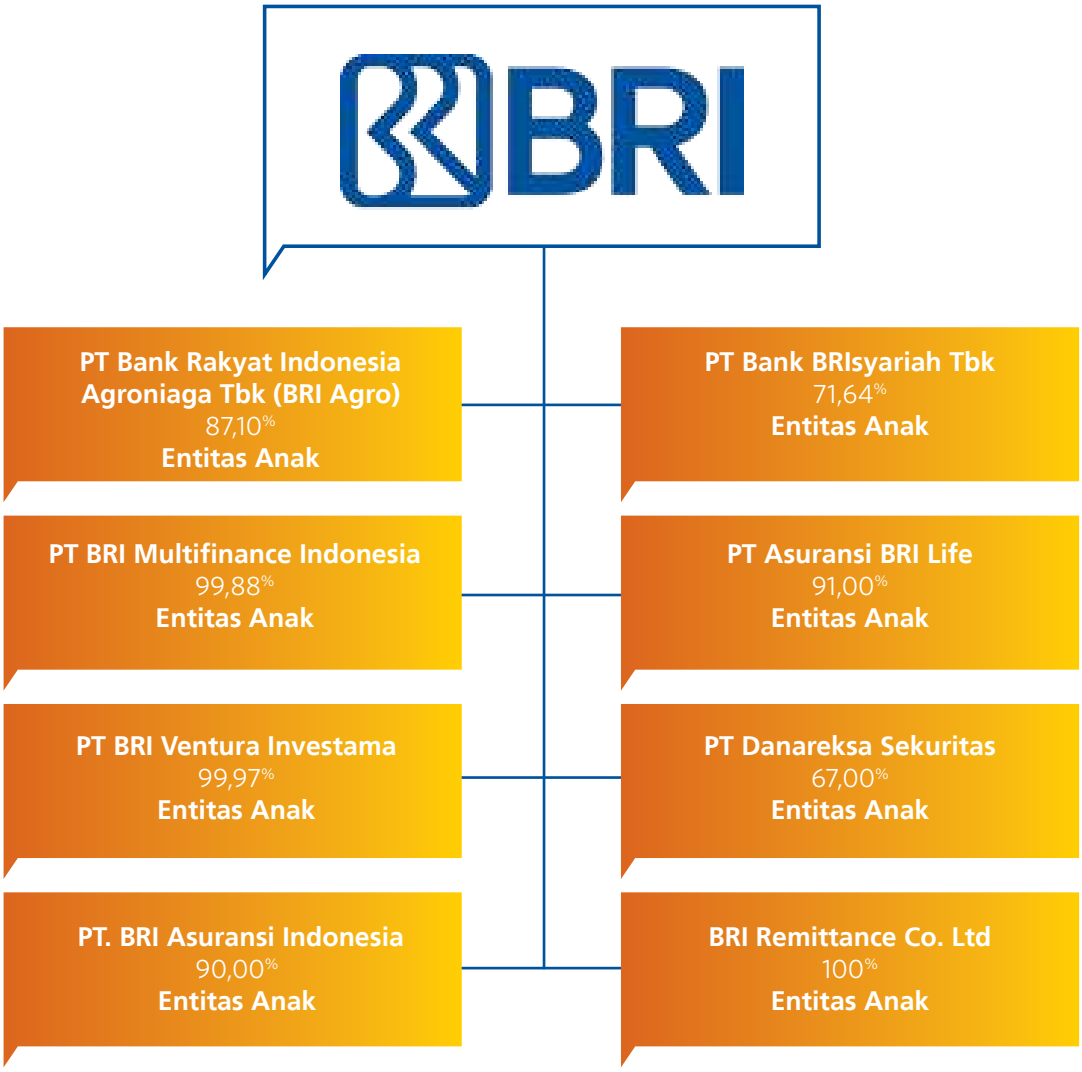

Entitas Asosiasi

PT Bahana Artha Ventura
35,00%
Entitas Asosiasi

PT Danareksa Investment Management
35,00%
Entitas Asosiasi

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3,00%
Entitas Asosiasi

PT Pemeringkat Efek Indonesia
0,21%
Entitas Asosiasi

Kronologi Pencatatan Saham

2003

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*/IPO)

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam - sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003). Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

2004-2010

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI MANAJEMEN (*MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM*/MSOP)

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (Management Stock Option Plan/ MSOP).

Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa exercise MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No.Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Saham MSOP yang telah di-exercise sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa exercise, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-exercise yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III.

Dengan berakhirnya exercise MSOP pada tahun 2010 maka komposisi kepemilikan saham pemerintah berubah dari 59.07% di tahun 2004 menjadi 56,75% di tahun 2010.

2011

STOCK SPLIT 1:2

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham (Rasio 1:2).

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp9.300,00 pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp4.800 pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya stock split dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan stock split adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Kronologi Pencatatan Saham

Pelaksanaan *Stock Split* Tahun 2011

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum *Stock Split*	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah *Stock Split*	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

2015-2016

STOCK BUY-BACK

BRI melakukan *Stock buy-back* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.
Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi penjatahan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Pelaksanaan *Buy Back* Saham di tahun 2015-2016

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
221.718.000 lembar	Rp 10.910/lembar	Rp9.5/lembar

*sebelum *stock split* 1:5

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi, Perseroan mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:

- Undang-undang (UU) RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK (POJK) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan.
- Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan *buyback* ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi *buy back* telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja BRI

Kronologi Pencatatan Saham

2017

STOCK SPLIT 1:5

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5).

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *Stock Split* Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum *Stock Split*	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah *Stock Split*	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000

2019

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (*EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM*/ESOP)

Berdasarkan Putusan RUPS tanggal tgl 23 Maret 2016 pada Agenda 5 yakni Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna, serta memperhatikan Surat Kementrian BUMN yang berisi bahwa mendukung implementasi kepemilikan saham bagi Pekerja BRI/Employee Stock Ownership Program (ESOP), BRI pada tahun 2019 telah melaksanakan ESOP dalam bentuk Bonus Saham untuk tahap I. Saham Tresuri yang telah dipakai untuk ESOP tahap I tersebut dan telah dilimpahkan kepada masing-masing Pekerja pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019 dalam bentuk Script Saham sebanyak 143.415.500 lembar saham. Pelimpahan saham tresuri untuk ESOP dimaksud telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Mei 2019.

Kronologi Pencatatan Saham

2020

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM/ESOP)

Pada tahun 2020, BRI telah melaksanakan distribusi program kepemilikan saham Pekerja atau Employee Stock Allocation (ESA) dengan total 231.111.000 lembar saham, yang terdiri dari ESA Tahap 1 sebesar 4.396.700 lembar saham dan ESA Tahap 2 sebesar 226.714.300 lembar saham.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

Pada tahun 2020 BRI melakukan aksi pembelian kembali saham (buyback) sebagai respon kebijakan OJK dalam meredam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34. Saat ini sisa treasury stock menjadi 750.463.500 lembar saham.

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham 2013 - 2020

Tahun	Aksi Korporasi	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)
		Pemerintah		Masyarakat				
		Jumlah	%	Jumlah	%			
2003	Penawaran Umum Saham Perdana	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50	500	11.764.705.000	5.882.353
2004	Exercise MSOP 85.385.500	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93	500	11.850.090.500	5.925.045
2005	Exercise MSOP 185.610.000	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84	500	12.035.700.500	6.017.850
2006	Exercise MSOP 250.721.000	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03	500	12.286.421.500	6.143.211
2007	Exercise MSOP 31.379.000	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17	500	12.317.800.500	6.158.900
2008	Exercise MSOP 7.499.000	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21	500	12.325.299.500	6.162.650
2009	Exercise MSOP 4.553.000	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23	500	12.329.852.500	6.164.926
2010	Exercise MSOP 4.728.500	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000	6.167.291
2011	Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2015	*Stock Buy-Back* sebanyak 221.718.000 lembar saham	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2016		14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2017	Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291
2019	Exercise ESOP 143.415.500	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291
2020	Exercise ESA 231.111.000	70.000.000.000	56.75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291
2020	Stock Buy-Back sebanyak 16.400.000 lembar saham	70.000.000.000	56.75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Informasi Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (dalam juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Coupon/ Discount Rate (%)	Status Pembayaran	Peringkat	Wali Amanat
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	4-Feb-16	5 tahun	IDR	Rp2.823.500	100%	4-Feb-21	9,60%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	25-May-16	5 tahun	IDR	Rp701.000	100%	25-May-21	8,70%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
3	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	1-Dec-16	5 tahun	IDR	Rp193.000	100%	1-Dec-21	8,20%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	1-Dec-16	7 tahun	IDR	Rp477.000	100%	1-Dec-23	8,65%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	1-Dec-16	10 tahun	IDR	Rp2.350.000	100%	1-Dec-26	8,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	11-Apr-17	5 tahun	IDR	Rp925.000	100%	11-Apr-22	8,30%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11-Apr-17	10 tahun	IDR	Rp1.300.500	100%	11-Apr-27	8,80%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	24-Aug-17	5 tahun	IDR	Rp1.652.500	100%	24-Aug-22	8%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24-Aug-17	7 tahun	IDR	Rp2.517.000	100%	24-Aug-24	8,25%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21-Feb-18	5 tahun	IDR	Rp1.837.000	100%	21-Feb-23	6,65%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21-Feb-18	7 tahun	IDR	Rp605.000	100%	21-Feb-25	6,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
12	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	21-Jun-18	5 tahun	IDR	Rp500.000	100%	26-Jun-23	7,70%	Belum Lunas	idAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
13	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	7-Nov-19	3 tahun	IDR	Rp2.089.350	100%	7-Nov-22	7,60%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
14	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	7-Nov-19	5 tahun	IDR	Rp2.172.800	100%	7-Nov-24	7,85%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
16	Global Bond 2018	20-Jul-18	5 tahun	USD	USD500	99,696%	20-Jul-23	4,625%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
17	Sustainable Bond 2019	28-Mar-19	5 tahun	USD	USD500	99,713%	28-Mar-24	3,950%	Belum Lunas	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	BNY Mellon

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Informasi Obligasi yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (Juta)	Jangka Waktu	Coupon/ Discount Rate (%)	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25-Sep-03	30-Oct-13	USD150	120 bulan	7,75	B3	Moodys	Memperkuat Permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	09-Jan-04	09-Jan-14	Rp500.000	120 bulan	13,5	AA+	Pefindo	Memperkuat Permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22-Dec-09	22-Dec-14	Rp2.000.000	60 bulan	10,95	AA+	Pefindo	Memperkuat Permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	USD500	60 bulan	2,95	Baa3	Moodys	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25-Jun-15	07-Jul-16	Rp655.000	370 Hari	8,4	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25-Jun-15	03-Jul-18	Rp925.000	36 bulan	9,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
7	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19-Jan-16	08-Feb-17	Rp808.000	370 Hari	8,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
8	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19-Jan-16	04-Feb-19	Rp1.018.500	36 bulan	9,25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
9	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	04-May-16	30-May-17	Rp1.212.000	370 Hari	7,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
10	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	IDR	7-Nov-19	17-Nov-20	Rp737.850	370 Hari	6,5	idAAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (Juta)	Jangka Waktu	Coupon/ Discount Rate (%)	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
11	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	04-May-16	25-May-19	Rp2.437.000	36 bulan	8,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	02-Dec-16	06-Dec-17	Rp616.000	370 Hari	7,25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	02-Dec-16	01-Dec-19	Rp964.000	36 bulan	8	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12-Apr-17	16-Apr-18	Rp1.131.000	370 Hari	7,2	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	02-Jul-15	03-Jul-20	Rp1.420.000	60 bulan	9,5	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	11-Apr-17	11-Apr-20	Rp1.743.500	36 bulan	8,1	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance
17	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24-Aug-17	24-Aug-20	Rp980.500	36 bulan	7,6	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Penerbitan *Negotiable Certificate* Deposit (NCD) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri A	24-Jun-20	3 Bulan	IDR	Rp630.000	24-Sep-20	5,35 (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri B	24-Jun-20	6 Bulan	IDR	Rp520.000	23-Dec-20	5,30 (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri C	24-Jun-20	12 Bulan	IDR	Rp850.000	24-Jun-21	5,75 (Diskonto)	Belum Lunas

Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp Juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10-Okt-14	370 Hari	IDR	Rp300.000	15-Okt-15	8,75	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10-Okt-14	24	IDR	Rp60.000	10-Okt-16	9,25	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10-Okt-14	36	IDR	Rp360.000	10-Okt-17	9,50	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24-Des-14	12	IDR	Rp520.000	24-Des-15	8,90	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16-Sep-16	370 Hari	IDR	Rp1.925.000	21-Sep-17	7,40	Sudah Lunas

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Ringkasan *Buyback* Tahun 2020

No.	Tanggal	Lot	Nominal	Harga rata-rata
1	16/03/2020	15.000	5.355.000.000,00	3.570
2	17/03/2020	31.000	10.234.000.000,00	3.301
3	18/03/2020	12.000	3.752.000.000,00	3.127
4	19/03/2020	7.000	2.063.000.000,00	2.947
5	20/03/2020	6.000	1.641.000.000,00	2.735
6	16/04/2020	3.000	777.000.000,00	2.590
7	24/04/2020	1.000	263.000.000,00	2.630
8	28/04/2020	2.000	516.000.000,00	2.580
9	13/05/2020	5.000	1.236.000.000,00	2.472
10	14/05/2020	10.000	2.397.000.000,00	2.397
11	15/05/2020	33.000	7.395.000.000,00	2.241
12	10/06/2020	33.000	9.936.000.000,00	3.011
13	12/06/2020	6.000	1.689.000.000,00	2.815
	Jumlah	**164.000**	**47.254.000.000,00**	**2.881**

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah menerbitkan sukuk.

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah menerbitkan obligasi konversi

Informasi Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Konversi dengan Pelunasan Dipercepat

Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI tidak pernah memiliki obligasi dengan pelunasan yang dipercepat.

Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang

Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower - Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia Tel : (62-21) 7278 2380 Fax : (62-21) 7278 2370 *Website* : www.pefindo.com Email : -	**Fitch Ratings Indonesia** Prudential Tower 20th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 79 Jakarta 12910, Indonesia Tel : (62-21) 5795 7755 Fax : (62-21) 5795 7750 *Website* : www.fitchratings.co.id Email : -	**Moody's Investors Service** 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel : 65 6398 8339 Fax : 65 6398 8301 *Website* : www.moodys.com/indonesia Email : clientservices@moodys.com	**SnP Global Rating** Singapore 12 Marina Boulevard 018982 Singapura Head of Sales, Asia-Pacific Tel : (0852) 2533-3522
Jasa yang diberikan: Pemeringkatan Perusahaan	Jasa yang diberikan: Pemeringkatan Perusahaan	Jasa yang diberikan: Pemeringkatan Perusahaan	Jasa yang diberikan: Pemeringkat Perusahaan
Fees: Rp165. 000.000 untuk periode 2020	Fees : Rp632.250.000* untuk periode 2020	Fees : Rp1.995.100.000* untuk periode 2020	Fees : Rp1.039.700.000* untuk periode 2020
	*Kurs USD per 31 Desember 2020 Rp14.050	*Kurs USD per 31 Desember 2020 Rp14.050	*Kurs USD per 31 Desember 2020 Rp14.050

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham	Kantor Akuntan Publik	Biro Administrasi Efek
PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel : (62-21) 5150515 Fax : (62-21 5)154153 *Website* : www.idx.co.id Email : listing@idx.co.id	**Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)** Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp. (62-21) 5289 5000 Fax. (62-21) 5289 4100 www.ey.com/id	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Tel : (62-21) 3508077 Fax : (62-21) 350 8078 *Website* : www.datindo.com Email : dm@datindo.com
Jasa yang diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan Saham	Jasa yang diberikan: Audit Laporan Keuangan	Jasa yang diberikan: Jasa Administrasi Saham Pasar Sekunder
Fees: Rp160.416.667* untuk periode 2020	Fees : Rp15.523.800.000* untuk periode 2020	Fees: Rp46.420.000 untuk periode 2020 - 2021
*Diskon biaya pencatatan tahunan/pengurangan ALF Proporsional tahun 2021 sesuai surat BEI No:S-00143/BELLPPU/01-2021	*) Biaya audit laporan keuangan tahun buku 2020	

Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang

Kustodian	Notaris
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel : (62-21) 5152855 Fax : (62-21) 52991199 *Website* : www.ksei.co.id Email : helpdesk@ksei.co.id	**Notaris & PPAT Fathiah Helmi** Graha Irama Lantai 6C, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, KAV 1& 2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Jasa yang diberikan: Pengelolaan administrasi efek (saham dan obligasi) dan *Paying Agent*	Jasa yang diberikan: pembuatan akta keputusan RUPS dan Anggaran Dasar
Fees: Rp165.000.000 untuk periode 2020	Fees : Rp50.000.000 untuk periode 2020

Penghargaan dan Sertifikasi

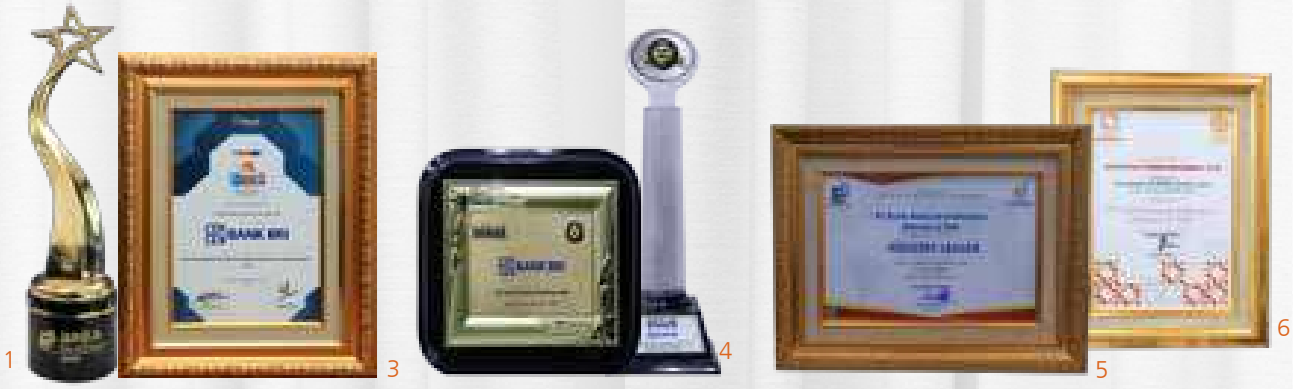

PENGHARGAAN NASIONAL

1 BUMN Performance Excellence Award 2020
BPEA
Perbankan
Jakarta

2 Indonesia Digital Innovation Brand 2020
12 Februari 2020
Warta Ekonomi
Perbankan
Jakarta

3 Innovative Company For Embracing Stratup Collaboration For Digital Ecosystem
12 Februari 2020
Digital Innovation Award 2020
Perbankan
Jakarta

4 Satisfaction Loyalty Engagement Awards- The Best Pelayanan dan Keamanan Perbankan
20 Februari 2020
Infobank
Perbankan
Jakarta

5 Industry Leader
04 Maret 2020
State Owned Enterprises Performance Excellence (KPKU)
BUMN
Jakarta

6 The 5th PR Indonesia Awards (PRIA) 2020- The Best Owned Media
2 April 2020
PR Indonesia
Perbankan
Semarang

7 The 5th PR Indonesia Awards (PRIA) 2020- The Best Kanal Digital
2 April 2020
PR Indonesia
Perbankan
Semarang

8 The 5th PR Indonesia Awards (PRIA) 2020- The Best Tata Kelola Kehumasan
2 April 2020
PR Indonesia
Perbankan
Semarang

9 TOP Corporate Performance In Banking Industry
29 April 2020
ITECH/BPPT
Perbankan
Jakarta

10 This Acknowledgement Is Proudly Presented By Iconomics For The Excellence In Corporate Public Relations
14 Mei 2020
Indonesia Corporate Branding PR Award 2020
Perbankan
Jakarta

11 Iconomics Corporate Branding PR Award 2020 - Corporate Branding PR Kategori Perbankan
14 Mei 2020
Iconomics
Perbankan
Jakarta

12 Bank Dengan Merek Paling Bernilai di Indonesia
25 Mei 2020
Brand Finance
Perbankan
Jakarta

13 HR Excellence Award 2020 - The Best HR Technology
4 Juni 2020
Majalah SWA
Perbankan
Jakarta

14 Most Valuable Indonesian Brand 2020 With A Brand Value Of US$3,531 and AAA Rating
06 Juni 2020
SWA
Perbankan
Jakarta

15 TOP CSR Awards 2020 - Best CSR
21 Juni 2020
TOP Business
CSR
Jakarta

16 Customer Journey Reimagination 2020 : Think About Unbundling The Value Chain (Ceria)
23 Juni 2020
Infosys Finacle
Perbankan
Jakarta

17 The Best CEO Visioner
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

18 The Best CEO Talent Development
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

19 Strategi Pertumbuhan Terbaik
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

20 BUMN Dengan Transformasi Organisasi Terbaik
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

21 BUMN Dengan Penerapan GCG Terbaik
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

22 BUMN Dengan Pengembangan SDM Unggul Terbaik
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

23 The Best Overall BUMN (BUMN Terbaik)
09 Juli 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

24 Best 5 ide inovasi dalam Millenial Innovation Summit (BRI sebagai satu-satunya BUMN Keuangan)
30 Juli 2020
Kementerian BUMN RI

25 Best of the Best Companies 2020 (Rank: 19th)
Agustus 2020
Forbes Magazine Indonesia
Multinational Company
Indonesia

26 Best Bank Awards 2020: Bank Dengan Modal Inti di atas Rp 30 Triliun
25 Agustus 2020
Investor Awards
Perbankan
Jakarta

27 Best Bank Awards 2020: Bank Nasional dengan Pangsa Kredit UMKM Terbesar dengan Modal Inti di atas Rp 30 Triliun (Penghargaan Khusus)
25 Agustus 2020
Investor Awards
Perbankan
Jakarta

28 Best Bank Award 2020: 50 Best Bank 2020 (Rank: 1st)
25 Agustus 2020
Investor Awards
Perbankan
Jakarta

29 Inovasi Ekosistem Ekonomi Digital untuk UMKM
27 Agustus 2020
Anugerah Gatra
Corporate
Jakarta

30 CEO Inovatif Terbaik
2 September 2020
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia
Corporate
Jakarta

31 Terbaik dalam Kategori Internal dengan Inovasi BRI BRAIN
2 September 2020
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia
Corporate
Jakarta

32 Most Popular Leader in Social Media 2020
9 September 2020
Jambore PR Indonesia
CEO BUMN
Jakarta

33 Best Bank for SMEs
Oktober 2020
Asiamoney Best Bank Awards
Corporate
-

34 Best Bank for CSR
Oktober 2020
Asiamoney Best Bank Awards
Corporate
-

35 BUMN Branding & Marketing Award 2020: Best Brand Award
5 November 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

22 23 33 34 35 36

36 BUMN Branding & Marketing Award 2020: Best Corporate Award
5 November 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

37 BUMN Branding & Marketing Award 2020: Best Overall Award
5 November 2020
BUMN TRACK
BUMN
Jakarta

38 Indonesia Financial Awards 2020: Social Economy Contribution
12 November 2020
Iconomics
Perbankan
Jakarta

39 Keterbukaan ESG Emiten Sektor Perbankan Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

40 Keterbukaan Environmental (E) Emiten Sektor Perbankan Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

41 Keterbukaan Social (S) Emiten Sektor Perbankan Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

42 Keterbukaan Governance (G) Emiten Sektor Perbankan Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

43 Keterbukaan ESG Bank Kategori Buku IV Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUKU IV
Jakarta

44 Keterbukaan Environmental (E) Bank Kategori Buku IV Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUKU IV
Jakarta

45 Keterbukaan Sosial (S) Bank Kategori Buku IV Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUKU IV
Jakarta

52

53

54

55

56

46 Keterbukaan Governance (G) Bank Kategori Buku IV Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUKU IV
Jakarta

47 Keterbukaan Governance (G) BUMN Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
BUMN
Jakarta

48 Keterbukaan ESG Bank BUMN Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUMN
Jakarta

49 Keterbukaan Environmental (E) Bank BUMN Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUMN
Jakarta

50 Keterbukaan Social (S) Bank BUMN Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUMN
Jakarta

51 Keterbukaan Governance (G) Bank BUMN Terbaik
17 November 2020
Beritasatu
Bank BUMN
Jakarta

52 Emiten LQ45 - ESG
17 November 2020
Beritasatu
Corporate
Jakarta

53 People of The Year 2020: Best CEO of The Year 2020
18 November 2020
MetroTV
Sustainable Development Goals
Jakarta

54 TOP BUMN 2020: Best CEO BUMN 2020
30 November 2020
Bisnis Indonesia
Perbankan
Jakarta

55 TOP BUMN 2020: The Most Resilient BUMN 2020
30 November 2020
Bisnis Indonesia
Perbankan
Jakarta

56 TOP BUMN 2020: Best CFO BUMN 2020
30 November 2020
Bisnis Indonesia
Perbankan
Jakarta

57 Bank Pendukung UMKM Terbaik (Bank BUKU 3 & 4)
3 Desember 2020
Bank Indonesia
Perbankan
Jakarta

60 62 65

68 69

58 Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T)
3 Desember 2020
Bank Indonesia
Perbankan
Jakarta

59 Forbes Best of The Best 50 High Performing Public Listed Company
5 Desember 2020
Forbes Indonesia
All Industry
Jakarta

60 Forbes Golden Award
5 Desember 2020
Forbes Indonesia
All Industry
Jakarta

61 Indonesia Best CFO 2020 (Silver)
10 Desember 2020
Majalah Swa
Perbankan
Jakarta

62 Top 20 Financial Institution: Best CFO
10 Desember 2020
The Finance Infobank
All Industry
Jakarta

63 CNBC Indonesia: The Best CEO in Banking Transformation
10 Desember 2020
CNBC Indonesia
Perbankan
Jakarta

64 BUMN Terbaik 2020
17 Desember 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

65 Tokoh Finansial Indonesia 2020 (Bapak Sunarso)
17 Desember 2020
Beritasatu
Perbankan
Jakarta

66 2nd The Best - Indonesia Operational Excellence (Platinum Award. Score A)
18 Desember 2020
Economic
Bank BUKU IV - SOEs Listed Company
Jakarta

67 Indonesia Most Amired CEO 2020 - Outstanding Leadership in Encouraging Organizational Transformation for Best Banking Services
18 Desember 2020
Warta Ekonomi
Conventional Bank
Jakarta

68 The Best CEO & GRC Leader 2020
29 Juli 2020
Bisnis News Indonesia
Perbankan
Jakarta

69 The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2020
29 Juli 2020
Bisnis News
Perbankan
Jakarta

1

2

6

PENGHARGAAN INTERNASIONAL

1 Best Issuer For Sustainable Finance
16 Januari 2020
The Asset
Perbankan
Hongkong

2 Best Sustainabillity Bond
16 Januari 2020
The Asset
Perbankan
Hongkong

3 Top 1000 World Banks: BRI ranked 1st in Indonesia
30 July 2020
The Banker
Perbankan

4 Top 1000 World Banks: BRI ranked 112th in the global ranking (Highest in Indonesia)
30 July 2020
The Banker
Perbankan

5 1st Indonesia's Largest Public Company
Agustus 2020
Forbes Magazine
Multinational Company
Asia

6 Global 2000 : The World's Largest Public Companies (Rank: 347th, Highest in Indonesia)
Agustus 2020
Forbes Magazine
Multinational Company
Asia

7 The Best Retail Banking in Indonesia
25 Agustus 2020
The Asian Banker
Perbankan
Singapura

BRI Service Quality Excellence

Pada Tahun 2020 BRI telah memperoleh penghargaan di bidang kualitas layanan dan contact center adalah sebagai berikut:

- Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):
  1. Peringkat 3 dari 7 bank untuk Customer Loyalty Index (CLI)
  2. Peringkat 3 dari 7 bank untuk Satisfaction, Loyalty, and Engagement Index (SLE Index)
- Customer Experience Service Quality Index (CX-SQI) 2020 by Carre:
  1. Peringkat 1 dalam kategori Brand Usage (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi transfer dana di kantor cabang BRI.
  2. Peringkat 2 dalam kategori Brand Usage (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi setor-tarik tunai di kantor cabang BRI.
  3. Peringkat 2 untuk Customer Experience Service Quality Index (CX-SQI).
- Bank Service Excellece Monitor (BSEM) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):
  1. Peringkat 1 untuk Internet Banking
  2. Peringkat 3 untuk Convenient Branch Experience
  3. Peringkat 3 untuk Overall E-Banking
- Penghargaan bidang contact center sebagai berikut:
  1. Wow brand award kategori Call Center peringkat ke 2
  2. Top brand award kategori Call Center peringkat ke 4
  3. Marketing Research Indonesia (MRI) kategori Call Center Peringkat ke 4
  4. Contact Center World (CCW) Region Asia Pacific Category :
     a. Best Sales Professional Silver Winner
     b. Best IT Support Professional Bronze Winner
     c. Green Contact Center Bronze Winner
     d. Best Self Service Technology Bronze Winner
     e. Best Sales Campaign Bronze Winner

BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

PANEN HADIAH Simpedes

Nabung Sekarang
Panen Hadiah Kemudian

Menang Itu Menyenangkan!

4	10	467	4270	2421	2367	7642
RUMAH	LOGAM MULIA	MOBIL	SEPEDA MOTOR	LEMARI ES	MESIN CUCI	TELEVISI

Sertifikasi

ISO 9001:2015

Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan ruang lingkup "Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control, and Corporate Financial & Tax Compliance" dari Lembaga Sertifikasi PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi AMK selalu melakukan peningkatan kualitas penyusunan dan pengawasan Kebijakan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder BRI dalam rangka menjamin kewajaran Laporan Keuangan.

Divisi Asset & Liabilities Management berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 6 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2021 dengan ruang lingkup Preparation of Data for Financial Statement dan Provision of External Report (Laporan Bulanan Bank Umum). Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas dalam penyiapan data untuk laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BRI dapat semakin baik.

Divisi Sentra Operasi BRI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan 8 (delapan) ruang lingkup meliputi: "Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, Payment System Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and e-Banking Settlement, Cash and Trade Finance" dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 13 Januari 2018 Sampai dengan 9 Desember 2020 terkait dengan "Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

BRI Corporate University berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register yang berlaku sejak 25 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2019. Adapun sertifikasi ini mengakui management System Standard BRI Corporate University dalam hal "Provision of Banking Training Services". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI Corporate University selalu melakukan peningkatan kualitas operasional pendidikan dan mengutamakan kepuasan peserta didik.

Divisi Bisnis Internasional berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 Dengan sertifikasi ini management System Standard Divisi Bisnis Internasional diakui dalam hal "Provision of Trade Processing Centre Service Including Supporting Function of Policy and Development & Monitoring Trade Finance". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas operasional sehingga menjadi perantara perdagangan yang terpercaya.

Divisi Operasional Human Capital BRI telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 19 September 2018 sampai dengan 9 November 2021. Hal ini menunjukkan bukti komitmen BRI dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada Pekerja. Sertifikat ISO ini diberikan untuk sistem manajemen mutu di bidang pengelolaan data, komunikasi, dan pembayaran kompensasi dan benefit Human Capital dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat.

Divisi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan Properti telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 26 November 2018 sampai dengan 25 November 2021 terkait dengan "Provision of Establishment Strategy and Policy of AT Management Division & Property Procurement Including Vendor Management". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

Desk Estimasi telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 29 November 2018 sampai dengan 28 November 2021 terkait dengan "Provision of Cost Estimation Processes". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

Divisi Marketing Communication telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 23 Oktober 2019 sampai dengan 22 Oktober 2022, dengan ruang lingkup pekerjaan "Marketing Plan & Database Analysis". Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi Marketing Communication selalu melakukan peningkatan kualitas komunikasi yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan Bisnis Bank BRI.

Satuan Kerja Audit Intern telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 20 Mei 2018 sampai dengan 4 Desember 2020. Sertifikasi tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Divisi Pengembangan Standar Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan 19 Audit Intern Wilayah BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI menjadi strategic business partner yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi benchmark of best practice bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

ISO 27001:2013

Divisi Digital Center of Excellence juga telah memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 yang berlaku sejak 14 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2021 dari Lembaga BSI dengan ruang lingkup *the management of information security in provision of big data* dan *analytics*. Hal tersebut menunjukkan keseriusan BRI untuk mengembangkan teknologi big data yang akan mendukung strategi pengembangan bisnis BRI ke depan.

Sertifikasi

No	Divisi	Sertifikat	Masa Berlaku	Keterangan	Penerbit Sertifikat
1	Payment Operation Division	ISO 9001:2015	12 Desember 2020 – 11 Desember 2023	Provision of payment system including RTGS & Clearing, Remittance & Collection, Settlement Treasury & E Banking, Cash Operation, ATM Cash Operation, Card Perso, ATM/CRM Cash Reconciliation 1, ATM/CRM Cash Reconciliation 2, Payment System Reconciliation, Trade Processing Center Jakarta, Trade Processing Center Surabaya and Quality Assurance	PT. Lloyd's Register Indonesia
2	Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division	ISO 9001:2015	26 November 2018 - 25 November 2021	Provision of Establishment Strategy and Policy of AT Management Division & Property Procurement Including Vendor Management.	PT. Lloyd's Register Indonesia
3	Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division	ISO 9001:2015	29 November 2018 - 28 November 2021	Provision of Cost Estimation Processes	PT. Lloyd's Register Indonesia
4	Information Security Desk	ISO 27001:2013	02 September 2020 - 02 Desember 2020	Had conducted Stage 2 Audit on November 16th – 17th 2020 and had been recommended for ISO/IEC 27001:2013 certification number IS 735538 and currently certified according to the above standards for the scope The information security management system of managing event and cyber threat monitoring. Sertifikat ISO 27001: 2013 belum keluar dari BSI, dijadwalkan terbit di bulan februari 2021. Untuk saat ini baru diberikan surat keterangan rekomendasi ISO 27001:2013	PT. BSI Group Indonesia
5	IT STRATEGY & GOVERNANCE DIVISION	IT Maturity Assessment Direktorat DTO Bank BRI	30 Desember 2020 - 30 Desember 2021	This certificate attests the Maturity Level of the Information Technology Governance through as assessment based on COBIT 4.1	PT. Sharing Vision Indonesia
6	IT STRATEGY & GOVERNANCE DIVISION	ISO 20000:2018 Service Management System	7 oktober 2020 - 7 Januari 2020	The Service Management System of Digital, Information Technology & Operation Directorate that delivers BRINets Express Service for internal business unit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. This is accordance with the latest Service Catalogue. Sertifikat ISO 20000:2018 belum diterbitkan dari BSI, dijadwalkan terbit di bulan februari 2021. Untuk saat ini baru diberikan surat keterangan rekomendasi ISO 20000:2018.	PT. BSI Group Indonesia

Sertifikasi

No	Divisi	Sertifikat	Masa Berlaku	Keterangan	Penerbit Sertifikat
7	Payment Operation Division	ISO 27001:2013	13 November 2019 - 12 November 2022	The Management of information security in personalize debit card	PT. BSI Group Indonesia
8	Divisi INF	ISO 27001:2013	29 Agustus 2019 - 28 Agustus 2022	The Management of information security in provision of spacecraft operation by Division of Satellite and Telecommunication Network	PT. BSI Group Indonesia
9	Divisi INF	ISO 27001:2013	22 Desember 2020 - 21 Desember 2023	The information security management system of Data Center Facility BRI Ragunan Site and Tabanan Site	PT. BSI Group Indonesia
10	Divisi DCE	ISO 27001:2013	10 April 2019 - 09 April 2022	The Management of information security in provision of BRIAPI platform by Digital Center of Excellence Division	PT. BSI Group Indonesia
11	Divisi DCE	ISO 27001:2013	14 Desember 2018 - 13 Desember 2021	The Management of information security in provision of Big Data & Analytic by Digital Center of Excellence Division	PT. BSI Group Indonesia
12	Divisi ISG	ISO 20000-1:2018	18 Oktober 2020 - 17 Oktober 2023	The service management system of Digital , Information Technology & Operation Directorate that deliver BRINets Express application for internal business unit at BRI	PT. BSI Group Indonesia
13	Divisi Enterprise Data Management	ISO 27001:2013	14 Desember 2018 - 13 Desember 2021	The management of information security in provision of Big Data Advanced Analytics by Enterprise Data Management Division	PT. BSI Group Indonesia
14	Divisi INF	Tier III Certification of Design Documents	07 November 2020	Design documents submitted for Tier Certification of Design Documents shall reflect the intended construction and implementation on Data Center Facilities. Thus, the design drawing package shall reflect phasing and capacities.	Uptime Institute, Inc.
15	Divisi INF	Tier III Certification of Data Center Design	27 Juni 2020 - 27 Juni 2022	Data Center Design Certification that rates our Data Center with 99.982% uptime and operation.	Uptime Institute, Inc.
16	Divisi INF	ISO 14644-1	17 November 2020 - 17 November 2021	Provision of air cleanliness in terms of the number of particles expressed as a concentration in air volume from our Data Center and its Infrastructures.	PT Data Clean Indonesia
17	Divisi INF	ISO 9001:2015	22 Desember 2020 - 22 Desember 2023	Provision of quality management and workflow processes of Data Center Infrastructure	PT BSI Group Indonesia
18	BRI Corporate University	ISO 9001:2015	30 Desember 2019 - 24 Desember 2022	Provision of Banking Training Services	PT. Lloyd's Register Indonesia
19	BRI Corporate University	Corporate Learning Improvement Process (CLIP) Accreditation oleh EFMD	12 November 2020	Akreditasi kualitas sebuah *corporate university* berdasarkan 8 area yaitu : *Strategic Positioning, Marketing, External suppliers, The Corporate Learning Team, Programmes, Services & Activities, Innovation & Development, Physical Resources & Administration dan Global Outreach.*	European Foundation for Management Development (EFMD)

Sertifikasi

No	Divisi	Sertifikat	Masa Berlaku	Keterangan	Penerbit Sertifikat
20	Divisi PSKA	ISO 9001 : 2015	12 Desember 2020 s.d 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT. SGS Indonesia
21	Audit Intern Kantor Pusat	ISO 9001 : 2015	12 Desember 2020 s.d 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT. SGS Indonesia
22	Audit Intern Teknologi Informasi	ISO 9001 : 2015	12 Desember 2020 s.d 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT. SGS Indonesia
23	1. Procurement & Logistic Operation Division 2. Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division	ISO 37001:2016	10 Agustus 2020 s.d 9 Agustus 2023	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Sucofindo
24	Divisi FMA	ISO 9001 : 2015	21 Januari 2018 s.d 21 Januari 2021	Quality Management System (QMS) untuk Divisi AMK BRI: Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control. And Corporate Financial & Tax Compliance Catatan: Sertifikat ISO 9001:2015 Sudah keluar dari PT SGS Indonesia, dijadwalkan terbit di bulan Februari 2021. Untuk saat ini baru diberikan Surat Keterangan rekomendasi ISO 9001:2015	PT. SGS Indonesia
25	Divisi Marketing Communication	ISO 9001 : 2015	23 Okt 2019 s.d 22 Okt 2022	Quality Management System (QMS) Sertifikat ISO 9001: 2015 Sudah keluar dari PT. Lloyd's Register Indonesia, Untuk fungsi Provision of Marketing Communication Support. No. Approval ISO 9001/00022513/ Llyod's Register	PT. Lloyd's Register Indonesia
26	Divisi Human Capital Development	Brandon Hall Group Acknowledgement in Human Capital	2020	Human Capital Organization Assessment (HCOA)	Brandon Hall Group

Peringkat BRI

FITCH	
Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	BB-
National Long-Term Rating	AA+ (idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-

Standard and Poor's	
Outlook	Negative
Issuer Credit Rating	BBB-
Stand-Alone Credit Profile (SACP)	bbb-

PEFINDO	
National Rating	id AAA, Stable Outlook

MOODY'S	
Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa2/P-2
Baseline Credit Assessment	baa2
Adjusted Baseline Credit Assessment	baa2
Counterparty Risk Assessment	Baa1 (cr)/P-2(cr)

JAPAN CREDIT RATING AGENCY, Ltd	
Long Term Foreign Currency	BBB
Outlook	Stable
Long Term Local Currency	BBB+
Outlook	Stable

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

ALAMAT JARINGAN KANTOR

KANTOR PUSAT

Gedung BRI I dan II,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Tel. : (021) 2510244, 2510254, 2510264
Fax. : (021) 2500065, 2500077

KANTOR WILAYAH

Banda Aceh
Jl. Cut Meutia No. 17, Kel. Kampung Baru,
Kec. Baiturrahman
Kota Banda Aceh, Aceh 23242
Tel. : (0651) 22822
Fax. : (0651) 23487, 22352

Bandar Lampung
Jl. Raden Intan No.51, Kel. Tanjung Karang
Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung
Lampung 35118
Tel. : (0721) 259340
Fax. : (0721) 259397

Bandung
Gedung Menara BRI Lt.4, Jl. Asia Afrika 57 - 59,
Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung 40111
Tel. : (022) 4200363, 4207977
Fax. : (022) 4236710

Banjarmasin
Jalan Jend A. Yani KM 3,5 No 151 Banjarmasin
Tel. : (0511) 3252056, 3257057, 3251647, 3251649
Fax. : (0511) 3252992, 32521649

Denpasar
Jalan Hayam Wuruk No 123, Denpasar
Tel. : (0361) 228715
Fax. : (0361) 225402

Jakarta 1
l. Veteran No.8, Jakarta Pusat
Tel. : (021) 3840802
Fax. : (021) 3453685

Jakarta 2
Jl. Gatot Subroto Kav.9-11
Gedung Mulia Lt.2 No. 72,
Jakarta Selatan 13330
Tel. : (021) 52920581,52920585
Fax. : (021) 52920586, 52920587

Jakarta 3
Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav CBD II No.I,
Kel.Lengkong Gudang, Kec.Serpong
Tel. : (021) 29703751 ex 52
Fax. : (021) 7255732

Jayapura
Gedung BRI
Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II, Kel.
Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,
Papua 99112
Tel. : (0967) 524652, 524453
Fax. : (0967) 524862, 537191

Makassar
Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 4, Kel.Karuwisi Utara,
Kec.Panakukkang, Kota Makassar
Tel. : (0411) 312498, 323507
Fax. : (0411) 312731

Malang
Jl. Laksmana Martadinata 80 Lt. 4, Malang
Tel. : (0341) 555422, 555425, 555620, 555423,
555420
Fax. : (0341) 555421

Manado
Jl. Sarapung No.4-6, Manado
Tel. : (0431) 863592, 863378
Fax. : (0431) 862779, 866966

Medan
Jalan Putri Hijau No 2A, Medan
Tel. : (061) 45256666, 4528323
Fax. : (061) 4536082

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

Padang
Jl Bagindo Azis Chan No. 30 Padang
Tel. : (0751) 7052111, 7052528 / (Sementara) (0751) 71045, 778910 892311, 892312
Fax. : (0751) 7054995 / (0751) 72653

Palembang
Jl. Kapten A. Rivai No.15, Palembang
Tel. : (0711) 310173, 310178
Fax. : (0711) 312343

Pekanbaru
Jl. Jenderal Sudirman No. 11-11A
Rt. 01/RW 01 Simpang Tiga, Pekanbaru
Tel. : (0761) 8011100 , 8011110
Fax. : (0761) 7865019

Semarang
Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang
Tel. : (024) 8311110
Fax. : (024) 8318436

Surabaya
Jalan Jend Basuki Rahmat No 122-138 Gedung BRI Tower Lt 20, Surabaya
Tel. : (031) 5324230

Yogyakarta
Jl. Cik Di Tiro No.3 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Tel. : (0274) 510850,520268
Fax. : (0274) 514166, 584883

KANTOR CABANG KHUSUS

Gedung BRI II
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta Pusat
Tel. : (021) 5709060
Fax. : (021) 5713181

Informasi Pada Website Perusahaan

Sebagai perusahaan terbuka, Bank BRI memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh stakeholder melalui situs web resmi Bank BRI dengan alamat www.bri.co.id yang berdasar pada peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. POJK tersebut mewajibkan web perusahaan emiten untuk mencantumkan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi, secara garis besar, website BRI berisi:

1. Informasi Perusahaan
   a) Tentang Kami yang memuat Informasi Perusahaan, Struktur Organisasi, Manajemen, Unit Kerja Luar Negeri, Infografis, dan Karir

Website BRI juga memenuhi standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mencakup:

- Part A. Rights of Shareholders
- Part B. Equitable Treatment of Shareholders
- Part C. Role of Stakeholder
- Part D. Disclosure & Transparancy
- Part E. Responsibilities of the Board

Secara keseluruhan, Website BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.

Informasi pada situs perusahaan terdiri dari:

- Informasi umum tentang BRI yang terdiri dari: Sejarah BRI, Visi dan Misi, Informasi Umum Emiten, Manajemen, dan Informasi Bagi Investor.
- Informasi tentang produk Simpanan, yang terdiri dari: Tabungan, Deposito dan Giro BRI.
- Informasi tentang produk Pinjaman, yang terdiri dari: Pinjaman Mikro, Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah, serta BRIGuna.
- Informasi tentang produk Internasional, yang terdiri dari: BRI Trade Finance & Services, BRIFast Remittance, Financial Institution, BRI Money Changer, Unit Kerja Luar Negeri.
- Informasi tentang Jasa Bank, yang terdiri dari: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Kelembagaan, E-Banking, dan Treasury.
- Informasi tentang Produk Konsumer, yang terdiri dari: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Informasi tentang Investasi Perbankan, yang terdiri dari: DPLK, ORI & SR, Jasa Wali Amanat, Jasa Kustodian.
- Informasi tentang Layanan Prioritas, yang terdiri dari: Produk Layanan & Privileges, Reksadana, Kartu BRIPrioritas, Outlet, Kriteria Nasabah.
- Informasi tentang Info Lelang, yang terdiri dari: Lelang Aset, Lelang Pengadaan
- Informasi tentang GCG, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar, Struktur dan Kebijakan GCG, Kode Etik, Asean Corporate Governance Scorecard, Komite Audit termasuk Piagam Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Whistleblowing System, dan Hak-hak Pemegang Saham.
- Pada bagian Karir, BRI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi karyawan melalui menu e-recruitment BRI.
- Sementara bagian Hubungan Investor menjelaskan mengenai overview, Informasi Keuangan, GCG, Layanan bagi Pemegang Saham, Event, dan Berita.
- Selanjutnya pada bagian perusahaan anak memberikan informasi umum mengenai perusahaan anak dan dapat disambungkan dengan website masing-masing perusahaan anak.
- Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Website BRI telah memuat, Struktur Grup Perusahaan, Profl Dewan Komisaris dan Direksi, serta Informasi bagi Pemegang Saham.

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pendidikan Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris

Nama	Program	Tanggal	Penyelenggara	Lokasi
Hadiyanto	Leadership Forum Tahun 2020	6/3/20 - 8/3/20	BRI Corporate University	Denpasar
Rofikoh Rokhim	Seminar Online LPPI "Strategi Manajemen Portofolio Kredit"	11/6/20	BRI Corporate University	Jakarta
	Seri 1 - Strategi Menyusun Revisi RBB	20/5/20		Online
	Seminar Online LPPI "Strategi Pengelolaan Aset dan Liabilitas"	4/6/20		Online
	Webinar Online LPPI "Strategi Restrukturisasi"	18/6/20		Online
	Webinar Online "Mengelola Risiko Hukum Restrukturisasi"	25/6/20		Online
	Seminar Online "Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN"	5/8/20		

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Direksi

Nama	Program	Tanggal	Penyelenggara	Lokasi
Indra Utoyo	Leadership Forum Tahun 2020	6/3/20 - 8/3/20	BRI Corporate University	Denpasar
Listiarini Dewajanti	Executive Coaching Program	1/12/19 – 31/05/20		Jakarta
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Perpanjangan Pendidikan BSMR	9/4/20		Online
Retno W. Wijayanti	Training Online "Outstanding Mentality"	2020		Online
	Training Online "Transformational Leadership"	27/7/20 - 28/7/20		Online
Herdy Harman	Training Online "Transformational Leadership"	27/7/20 - 28/7/20		Online
	Seminar "2020 Reinveting Digital Transformation & Organization Agility	10/11/20 – 11/11/20		

Pendidikan Senior Executive Vice President

Nama	Program	Tanggal	Penyelenggara	Lokasi
Dedi Sunardi	BRILiaN Leader Development Program (BLDP)-1 Tahun 2020	13/1/20 - 24/1/20	BRI Corporate University	Hotel
	Leadership Forum Tahun 2020	6/3/20 - 8/3/20	BRI Corporate University	Denpasar
Hari Siaga Amijarso	IHT Kepala Audit Intern Selindo dan Perusahaan Anak BRI Tahun 2020	6/2/20 - 7/2/20	BRI Corporate University	Bri microfinance
	In House Training Special Request Root Cause Analysis Kepala Audit Intern dan Wakil Kepala Audit Intern	20/7/20 - 21/7/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
	Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	22/9/20 - 23/9/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
	Peran Auditor Internal Dalam Mengawal Proses Perubahan Organisasi Menuju E-Business & E-Goverment Pada Era Digital & Pandemi COVID-19	17/4/20 - 17/4/20	BRI Corporate University	Jakarta
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	15/10/20 - 16/10/20	BRI Corporate University	Workstation masing-masing

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Nama	Program	Tanggal	Penyelenggara	Lokasi
Lina Sari	Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	22/9/20 - 23/9/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
Listiarini Dewajanti	Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	22/9/20 - 23/9/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
Retno Wahyuni Wijayanti	BRILiaN Leader Development Program (BLDP)-1 Tahun 2020	13/1/20 - 24/1/20	BRI Corporate University	Hotel
	BRILiaN Shine "Agile Leadership For The New Normal"	24/6/20 - 24/6/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
	Continous Performance Management Pejabat Level EVP VP BRI	4/6/20 - 5/6/20	BRI Corporate University	Jakarta selatan
	Leadership Forum Tahun 2020	6/3/20 - 8/3/20	BRI Corporate University	Denpasar
	LHC - In House Training Assessment Center Assessor Certification (ACAC)	19/1/20 - 23/1/20	BRI Corporate University	Corpu
	Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	2/7/20 - 17/7/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
	Public Course Training Online ESQ DigiWorld	4/5/20 - 4/5/20	BRI Corporate University	Jakarta online
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	15/10/20 - 16/10/20	BRI Corporate University	Workstation masing-masing
	Sosialisasi BRI Corporate University	31/1/20 - 31/1/20	BRI Corporate University	Ruang aula lt. 2 BRI Corporate
	Sosialisasi BRI CorporateUniversity	29/5/20 - 29/5/20	BRI Corporate University	Jakarta
	Sosialisasi BRI CorporateUniversity	31/8/20 - 31/8/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University
	Talkshow Webinar Talent Management	23/6/20 - 3/7/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing
	Webinar BRISHINE Security Awareness Pekerja BRI	16/6/20 - 17/6/20	BRI Corporate University	Work station masing-masing

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pendidikan Sekretariat Perusahaan

UNIT KERJA DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Program	Tanggal Date	
Brilian Leader Development Program (BLDP) 5 Tahun 2020	16/9/20	9/10/20
BRILiaN Shine " Agile Leadership For The New Normal"	24/6/20	24/6/20
BRILiaN Shine "Membaca Ekspresi Wajah Dan Bahasa Tubuh" by Poppy Amalya	2/3/20	2/3/20
Brilian Shine Memperingati Hari Lahir Pancasila "Pancasila Di Mata Generasi Muda Indonesia"	5/6/20	8/6/20
Continous Performance Management Pejabat Level EVP VP BRI	4/6/20	5/6/20
Data Analytics Training Program Divisi EDM	12/10/20	27/10/20
In House Training Protokoler & Kehumasan Tahun 2020	28/9/20	3/10/20
BRILiaN Leader Development Program (BLDP) 2 Tahun 2020	5/8/20	11/9/20
	4/3/20	23/3/20
Mitigasi Risiko Bisnis Dampak Krisis Covid-19	6/5/20	6/5/20
Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	2/7/20	17/7/20
Pendidikan Dasar Coaching Mentoring dan Pendidikan Coaching Mentoring Bagi Pejabat BRI Eselon 2 dan 3 Tahun 2020	4/8/20	4/8/20
	5/8/20	5/8/20
	6/8/20	6/8/20
	7/8/20	7/8/20
	3/9/20	3/9/20
Pendidikan Enhancement Sekretaris Divisi, Desk, Kantor Wilayah, Kantor Audit Intern Wilayah	21/9/20	30/9/20
Pendidikan Enhancement Special Request Protokoler & Kehumasan Kanwil Selindo Tahun 2019	26/9/20	3/10/20
Pendidikan Enhancement Special Request Training Master of Ceremony (MC) 2020	26/10/20	27/10/20
Sales & Marketing	11/3/20	13/3/20
Brilian Leader Development Program (BLDP) 3 Tahun 2020	5/8/20	11/9/20
Brilian Leader Retirement Program (BLRP) For Officer s/d Assistant Manager Tahun 2020	20/10/20	23/10/20
Sosialisasi Audit Intern	18/8/20	18/8/20
	25/8/20	25/8/20
Sosialisasi Kanwil Semarang	18/9/20	18/9/20
Sosialisasi Kanwil Yogyakarta	26/2/20	26/2/20
Webinar Retired Not Expired	8/5/20	8/5/20
Zoom Webinar Ngobrol Seru ORI017	1/7/20	8/7/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

UNIT KERJA DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Nama	Program	Tanggal		Penyelenggara Organizers	Lokasi
Arief Suripto	Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	6/2/20	8/2/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University
Bakhtiar Rahmat Imawan				BRI Corporate University	BRI Corporate University
Mohamad Bagoes Adityo				BRI Corporate University	BRI Corporate University
Riskha Dwi Puspitasari		12/3/20	14/3/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University
Ery Wicaksono	Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	10/9/20	12/9/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University
Andreas Hassim	Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	12/3/20	14/3/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University
Dinne Shovia Tresna Amalia		12/3/20	14/3/20	BRI Corporate University	BRI Corporate University

UNIT KERJA SKAI, PSKA, AIW

Program	Tanggal	
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)	14/5/20	14/5/20
Audit & Internal Control	7/1/20	9/1/20
	18/2/20	20/2/20
	10/3/20	12/3/20
	17/3/20	19/3/20
	20/7/20	23/7/20
BRILiaN Leader Development Program (BLDP) 4 Tahun 2020	16/9/20	9/10/20
BRILiaN Leader Development Program (BLDP) 1 Tahun 2020	5/8/20	11/9/20
	13/1/20	24/1/20
	5/8/20	12/8/20
BRILiaN Shine " Agile Leadership For The New Normal"	24/6/20	24/6/20
BRILiaN Shine "Membaca Ekspresi Wajah Dan Bahasa Tubuh" by Poppy Amalya	2/3/20	2/3/20
Brilian Shine Memperingati Hari Lahir Pancasila "Pancasila Di Mata Generasi Muda Indonesia"	5/6/20	5/6/20
	8/6/20	8/6/20
BRISHINE "best practiceâ€™/principles for â€˜strategic measurement in a digital transformation era" untuk BRI dan BRI Grup.	3/3/20	3/3/20
BSDP 1 For Petugas IT	10/8/20	12/8/20
BSDP 1 For PPO (Petugas Penunjang Operasional)	13/8/20	16/8/20
	7/9/20	9/9/20
	10/9/20	12/9/20
	24/9/20	26/9/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
BSDP 1 For Sekretaris	6/8/20	8/8/20
	1/10/20	3/10/20
BSDP 1 For SPO (Supervisor Penunjang Operasional)	10/8/20	12/8/20
Certified Information System Auditor (CISA)	31/8/20	4/9/20
Certivication in Risk Management Assurance (CRMA Review Course Online)	19/10/20	23/10/20
Continous Performance Management Pejabat Level EVP VP BRI	4/6/20	5/6/20
	11/6/20	12/6/20
	15/6/20	16/6/20
CREDIT RECOVERY PROGRAM	7/1/20	9/1/20
Entering The New Normal	5/6/20	5/6/20
IHT Diklat Enhancement Audit Intern Wilayah BRI Terkait Qanun Aceh Tahun 2020	22/1/20	23/1/20
IHT Enhancement Kredit Ritel for RAK	19/5/20	19/5/20
	20/5/20	20/5/20
	22/5/20	22/5/20
IHT Kepala Audit Intern Selindo dan Perusahaan Anak BRI Tahun 2020	6/2/20	7/2/20
	10/2/20	10/2/20
IHT Pendidikan KLS(Kantor Layanan Syariah) untuk jajaran operasional BRI Selindo non Kanwil BRI Aceh.	8/7/20	10/7/20
IHT Virtual BRILiaN Shine Antisipasi, Pandemik Covid-19 - Divisi HCBP	22/10/20	22/10/20
In House Training (IHT) Diklat Lanjutan Pekerja Jajaran Mikro Kanwil BRI Aceh dalam Rangka Qanun Aceh	3/1/20	3/1/20
	4/1/20	4/1/20
	13/1/20	13/1/20
	5/1/20	5/1/20
	6/1/20	6/1/20
In House Training Akuntansi Brinets, MR dan APU-PPT Untuk Auditor	26/8/20	26/8/20
	27/8/20	27/8/20
	31/8/20	31/8/20
	1/9/20	1/9/20
	10/9/20	10/9/20
In House Training Akuntansi Brinets, MR dan APU-PPT Untuk Group Head dan Senior Auditor	28/8/20	28/8/20
In House Training Aspek Hukum Perkreditan & Operasional dan Trade Finance Untuk Group Head dan Senior Auditor	31/8/20	31/8/20
	9/9/20	9/9/20
In House Training Bridex, PDE dan Monitoring Berkala	5/6/20	5/6/20
In House Training FRD dan Teknik Investigasi Untuk Audito	29/9/20	29/9/20
In House Training Job Evaluation - Divisi HCS	22/9/20	23/9/20
In House Training Kredit Konsumer Untuk Group Head dan Senior Auditor	30/9/20	30/9/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
In House Training Kredit Ritel untuk Auditor Selindo	10/6/20	10/6/20
	12/6/20	12/6/20
	16/6/20	16/6/20
	17/6/20	17/6/20
	17/6/20	17/6/20
In House Training Logistik Untuk Group Head dan Senior Auditor	13/10/20	13/10/20
In House Training Machine Learning Specialization	7/9/20	23/9/20
In House Training Pelatihan Perpajakan Selindo	3/9/20	4/9/20
	7/9/20	8/9/20
	8/9/20	12/9/20
	14/9/20	15/9/20
	16/9/20	16/9/20
	16/9/20	17/9/20
	17/9/20	18/9/20
	21/9/20	22/9/20
	24/9/20	25/9/20
	5/10/20	6/10/20
	6/10/20	7/10/20
In House Training Pengelolaan CRM, Layanan dan Laporan BI Untuk Auditor	26/8/20	26/8/20
	27/8/20	27/8/20
	28/8/20	28/8/20
	31/8/20	31/8/20
	1/9/20	1/9/20
	11/9/20	11/9/20
	17/9/20	17/9/20
In House Training Pengelolaan CRM, Layanan dan Laporan BI untuk RAU	3/8/20	3/8/20
	4/8/20	4/8/20
	6/8/20	6/8/20
	7/8/20	7/8/20
	10/8/20	10/8/20
	11/8/20	11/8/20
	13/8/20	13/8/20
	14/8/20	14/8/20
	18/8/20	18/8/20
In House Training Special Request Fraud Auditing	7/9/20	10/9/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
In House Training Special Request Root Cause Analysis	24/6/20	25/6/20
	29/6/20	30/6/20
	1/7/20	2/7/20
	7/7/20	7/7/20
	3/7/20	4/7/20
In House Training Special Request Root Cause Analysis Kepala Audit Intern dan Wakil Kepala Audit Intern	20/7/20	21/7/20
Leadership Forum Tahun 2020	6/3/20	8/3/20
	25/3/20	25/3/20
BRILiaN Leader Development Program (BLDP) 2 Tahun 2020	4/3/20	23/3/20
	5/8/20	11/9/20
	4/3/20	23/3/20
LHC - TOT Manajemen Risiko (MR) Level 3	13/4/20	14/4/20
Market Risk Management: Risk Measurement and Portfolio Management	16/9/20	29/9/20
Mitigasi Bisnis Perbankan Ditengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya Dengan Risiko Pasar	23/9/20	23/9/20
No Guts No Gain	20/5/20	20/5/20
Pelatihan Assessor Internal BRI	13/5/20	15/5/20
	27/5/20	29/5/20
Pelatihan Wawancara Kompetensi BBOP Tahun 2020	12/10/20	12/10/20
	13/10/20	13/10/20
	14/10/20	14/10/20
	15/10/20	15/10/20
	16/10/20	16/10/20
Pembekalan Risk & Compliance Officer (RCO)	8/6/20	12/6/20
Pendidikan Bridex dan Monitoring Berkala	23/7/20	24/7/20
	26/7/20	27/7/20
Pendidikan Coaching & Mentoring Executive Class Tahun 2020	2/7/20	17/7/20
Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	20/2/20	22/2/20
	5/3/20	7/3/20
	12/3/20	14/3/20
	3/9/20	5/9/20
Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	13/1/20	15/1/20
	10/2/20	12/2/20
	20/2/20	22/2/20
	5/3/20	7/3/20
	12/3/20	14/3/20
Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	27/1/20	29/1/20
	20/2/20	22/2/20
	12/3/20	14/3/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	13/2/20	15/2/20
	5/3/20	7/3/20
	22/6/20	26/6/20
Pendidikan Dasar Coaching Mentoring dan Pendidikan Coaching Mentoring Bagi Pejabat BRI Eselon 2 dan 3 Tahun 2020	4/8/20	4/8/20
	5/8/20	5/8/20
	6/8/20	6/8/20
	7/8/20	7/8/20
Pendidikan Enhancement Special Request Kredit Mikro untuk RAU	29/5/20	29/5/20
	8/6/20	8/6/20
Pendidikan Enhancement Special Request Training Master of Ceremony (MC) 2020	26/10/20	27/10/20
Pendidikan In-House Training (IHT) Bidang Satellite Service Operation (SSO) Divisi INF.	5/10/20	6/10/20
Pendidikan Modul Electronic Working Paper (EWP) pada Aplikasi Brisma versi 2.0	14/4/20	15/4/20
	16/4/20	17/4/20
	20/4/20	21/4/20
	22/4/20	23/4/20
	27/4/20	28/4/20
	29/4/20	30/4/20
Pendidikan Pembekalan Lateral Joiner	24/2/20	28/2/20
	15/6/20	26/6/20
	28/9/20	9/10/20
Pendidikan Special Request In House Training Akuntansi Brinets, MR dan APU-PPT Untuk RAU	1/7/20	3/7/20
	2/7/20	2/7/20
	3/7/20	3/7/20
	6/7/20	6/7/20
	7/7/20	7/7/20
	13/7/20	13/7/20
	14/7/20	14/7/20
	15/7/20	15/7/20
Pendidikan Special Request Materi Compliance Skill and Knowledge Upgrade (College) Program tahun 2020	24/6/20	24/6/20
	25/6/20	25/6/20
	7/7/20	15/7/20
	14/7/20	14/7/20
	24/7/20	24/7/20
Pengelolaan Dana Pensiun dan Sertifikasi Managemen Risiko Dana Pensiun	16/3/20	20/3/20
Pilot Project A Pembekalan Jabatan BRC: Leadership dan Communication	21/10/20	27/10/20
Pilot Project B Pembekalan Jabatan BRC: Leadership dan Communication	21/10/20	27/10/20
Pilot Project C Pembekalan Jabatan BRC: Leadership dan Communication	21/10/20	27/10/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
Public Course Dalam Negeri Materi Audit	4/2/20	7/2/20
Public Course Dalam Negeri Materi Ke-SDM-an	7/1/20	9/1/20
RCA- Pendidikan Pre Development Program tahun 2019	17/2/20	19/2/20
Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak COVID-19	21/4/20	22/4/20
Review Penulisan Laporan Audit	3/8/20	4/8/20
	5/8/20	6/8/20
	10/8/20	11/8/20
	26/8/20	27/8/20
	30/8/20	31/8/20
Risk Based Auditing	18/8/20	19/8/20
	24/2/20	25/8/20
	24/8/20	25/8/20
	31/8/20	1/9/20
Risk Management Refreshment Program "Implementasi Operational Risk Management (ORM) Pada Periode Covid-19" (Analisa Kondisi Situasional & Compliance Review)	21/7/20	21/7/20
Seminar Daring Retired Not Expired "Memahami Aspek Non Finansial Persiapan Pensiun"	15/7/20	15/7/20
BRILian Leader Development Porgram (BLDP) 4 Tahun 2020	16/9/20	9/10/20
BRILian Leader Development Porgram (BLDP) 5 Tahun 2020	16/9/20	16/10/20
	17/10/20	17/10/20
Brilian Leader Development Program (BLDP) 3 Tahun 2020	5/8/20	11/9/20
Brilian Leader Retirement Program (BLRP) For Manager s/d AVP Tahun 2020	20/10/20	4/11/20
Brilian Leader Retirement Program (BLRP) For Officer s/d Assistant Manager Tahun 2020	20/10/20	23/10/20
Pendidikan Coaching Dan Mentoring Bagi Pejabat Eselon 2 dan 3 BRI Tahun 2020 Tahap Certified Profesional Coach (CPC)	8/10/20	22/10/20
	12/10/20	27/10/20
Sosialisasi Audit Intern	18/8/20	18/8/20
	25/8/20	25/8/20
Sosialisasi IT Strategy & Governance	26/8/20	18/9/20
	27/8/20	18/9/20
	28/8/20	18/9/20
	31/8/20	18/9/20
	1/9/20	18/9/20
	2/9/20	18/9/20
	3/9/20	18/9/20
	4/9/20	18/9/20
Sosialisasi KANINS Bandar Lampung	31/1/20	29/2/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
Sosialisasi KANINS Denpasar	7/1/20	7/1/20
	3/3/20	3/3/20
Sosialisasi KANINS DKI 1	30/1/20	29/2/20
	31/1/20	29/2/20
	11/2/20	29/2/20
	25/2/20	31/3/20
Sosialisasi KANINS DKI 2	5/2/20	5/2/20
Sosialisasi KANINS DKI 3	19/10/20	24/10/20
Sosialisasi KANINS Jayapura	16/10/20	16/10/20
Sosialisasi KANINS Medan	14/1/20	14/1/20
	17/2/20	17/2/20
Sosialisasi KANINS Padang	24/1/20	24/1/20
Sosialisasi KANINS Semarang	28/2/20	28/2/20
	28/8/20	28/8/20
	19/10/20	19/10/20
Sosialisasi KANINS Yogyakarta	6/3/20	6/3/20
Sosialisasi KANWIL Banda Aceh	5/3/20	5/3/20
Sosialisasi KANWIL Bandung	19/3/20	24/3/20
Sosialisasi KANWIL Bandung KANCA Sumedang	15/1/20	30/1/20
Sosialisasi KANWIL DKI 2 KANCA Jakarta Saharjo	23/1/20	23/1/20
Sosialisasi KANWIL Palembang	14/9/20	14/9/20
Sosialisasi KANWIL Semarang	5/10/20	5/10/20
Sosialisasi KANWIL Yogyakarta KANCA Solo Sudirman	3/2/20	3/2/20
	7/4/20	7/4/20
	15/9/20	15/9/20
Talkshow Webinar Talent Management	23/6/20	23/6/20
Teknik Investigasi Kasus Fraud Pada Industri Perbankan	22/7/20	22/7/20
The Power of You	6/5/20	6/5/20
TOS - Associate Auditor AA Compentency Development Program	13/1/20	20/2/20
	19/2/20	21/4/20
TOS - Pendidikan Enhancement Special Request Training For Assessor 2019	10/1/20	10/1/20
TOS - Pendidikan RAU (Resident Auditor Unit) Development Program Tahun 2019	18/8/20	10/10/20
TOT Kebijakan Human Capital Tahun 2020	10/3/20	10/3/20
	11/3/20	11/3/20
	18/3/20	18/3/20
	12/3/20	12/3/20
	13/3/20	13/3/20
	17/3/20	17/3/20

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Program	Tanggal	
Training Penulisan Laporan Audit	27/7/20	28/7/20
	29/8/20	30/7/20
Webinar BRISHINE Security Awareness Pekerja BRI	16/6/20	16/6/20
	17/6/20	17/6/20
Webinar Retired Not Expired	8/5/20	8/5/20
Workshop Perpajakan New E-Filling dan Desentralisasi NPWP	2/3/20	2/3/20
	3/3/20	3/3/20
Zoom Webinar Ngobrol Seru ORI017	1/7/20	8/7/20

Daftar Keanggotaan Dalam Asosiasi Industri Atau Lainnya dan Organisasi advokasi nasional atau internasional termasuk yang berkaitan dengan keberlanjutan

No.	Nama Lembaga/Asosiasi	Lingkup Asosiasi		Status Keanggotaan	
		Nasional	Internasional	Anggota Biasa	Pengurus
1	Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI)	v		v	
2	Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)	v	v	v	
3	International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R)		v	v	
4	The European Foundation for Management Development (EFMD)		v	v	
5	Ikatan Auditor Bank Indonesia (IAIB)	v			v
6	Institute of Internal Auditor (IIA)		v	v	
7	Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI)	v			v
8	Chartered Institute for Securities and Investment		v	v	
9	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)	v		v	
10	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	v		v	

Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris Level 1 pada Tahun 2020

Nama	Sertifikasi / Refreshment MR	
	Lembaga Sertifikasi	Tanggal
Zulnahar Usman	BSMR	13/03/20

Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris Level 2 pada Tahun 2020

Nama	Sertifikasi / Refreshment MR	
	Lembaga Sertifikasi	Tanggal
R. Widyo Pramono	LSPP	13/03/20
Zulnahar Usman	BSMR	20/03/20

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Laba Bersih BRI tercatat sebesar

Rp18,66 triliun*

CAR

21,17%*

Kondisi permodalan yang kuat

mampu mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga kemampuan dalam mengantisipasi risiko dalam pengelolaan bank

*) Konsolidasi

Ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 yang memberikan tantangan dan ketidakpastian bagi perekonomian Global dan Domestik, BRI mampu menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen BRI untuk tetap tumbuh berkelanjutan pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta dukungan kebijakan Pemerintah dan Regulator yang akomodatif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Nasional.

Pada akhir 2020, secara konsolidasi BRI memecahkan rekor jumlah aset terbesar sepanjang sejarah perusahaan, yakni Rp1.511,81 triliun, tumbuh 6,71% dari Rp1.416,76 pada akhir 2019. Pertumbuhan Aset disumbang oleh kenaikan Kredit sebesar 3,89% *year on year* sehingga mencapai Rp938,38 Triliun, yang bersumber dari segmen UMKM sehingga komposisinya telah mencapai 82,13% pada akhir 2020. Pertumbuhan kredit yang positif dimasa pandemi mampu diiringi dengan kualitas yang terjaga dengan baik. dimana rasio *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* sebesar 2,99%, dibawah maksimum ketentuan Regulator.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga BRI secara konsolidasi mencapai Rp1.121,10 triliun atau tumbuh 9,78% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.021,20 triliun, dengan penyumbang utama Dana Murah (CASA), sehingga komposisinya telah mencapai 59,67% pada akhir 2020.

BRI masih mampu menjaga kondisi permodalan yang kuat dengan *Total Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 21,17%, jauh di atas minimum ketentuan regulator, sehingga mampu mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga kemampuan Perusahaan dalam mengantisipasi risiko dalam pengelolaan bank.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI & INDUSTRI

EKONOMI GLOBAL

Di tahun 2020, dunia dikejutkan oleh pandemi Covid-19 yang bermula di Tiongkok dan kemudian menyebar secara luas dan cepat ke banyak negara lain di dunia. Covid-19 mengubah tatanan perilaku dan melemahkan perekonomian dunia. Covid-19 menimbulkan kepanikan, yang kemudian ditanggapi dengan penutupan aktivitas ekonomi serta pembatasan kegiatan sosial yang berdampak pada perlambatan aktivitas bisnis masyarakat.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan berada pada level –3,5%, sedangkan di tahun 2021 diproyeksikan meningkat menjadi 5,5%, kenaikan tersebut diperkirakan didukung oleh pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)

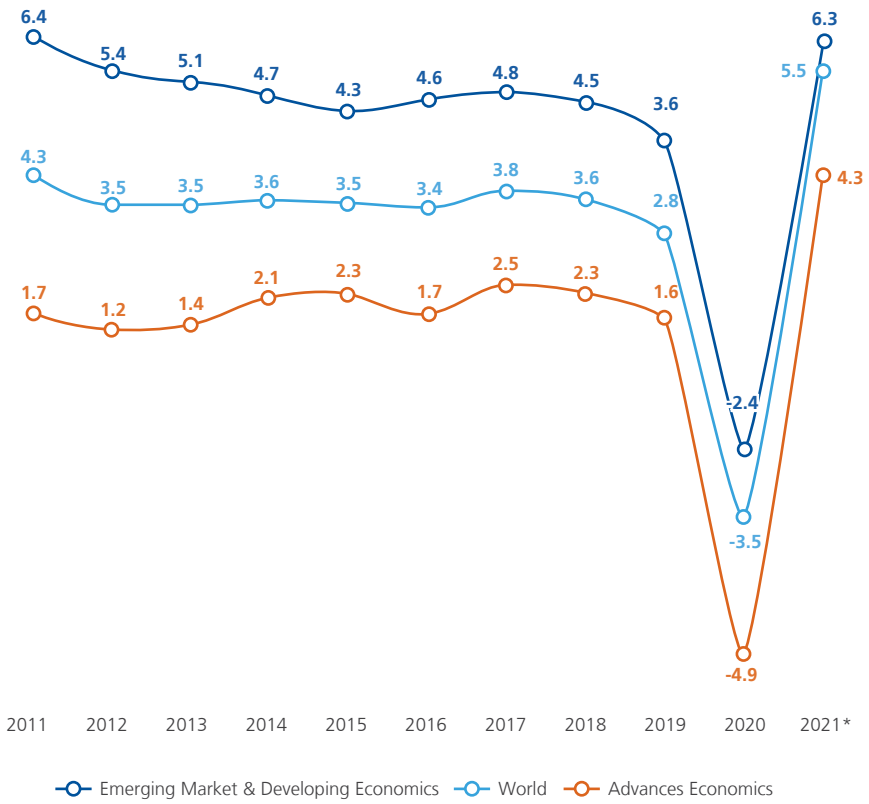

* Proyeksi
Sumber: IMF, World Economic Outlook Update, Januari 2021

Kehadiran vaksin Covid-19 yang memiliki tingkat efektivitas tinggi seperti Pfizer, Sinovac dan Moderna memberikan sentimen positif bagi perkembangan ekonomi global. Namun, adanya pandemi gelombang kedua di berbagai negara Eropa dapat menjadi ancaman bagi perekonomian global di masa datang.

Guna menopang perekonomian di masing-masing negara, baik negara maju dan berkembang mengadopsi kebijakan fiskal *counter-cyclical* dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan memberikan insentif pajak. Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral AS (The Federal Reserve) dan Eropa (ECB) menurunkan tingkat suku bunga dan mempertahankan suku bunga rendah. The Fed, misalnya mempertahankan suku bunga pada rentang 0% - 0,25%.

EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kekhawatiran dan ketidakpastian akibat pandemi menyebabkan tren keluarnya modal dari pasar saham dan obligasi, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Secara riil, permintaan domestik juga terdampak oleh implementasi PSBB, sedangkan kontraksi pada permintaan global berpengaruh pada penurunan volume ekspor Indonesia. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi mulai ditunjukkan pada Triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32%.

Namun demikian, dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Regulator yang akomodatif dimasa pandemi, kondisi perekonomian domestik mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara *year on year* mulai membaik menjadi -3,49% pada Triwulan III-2020 dan -2,07% pada Triwulan IV-2020.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga menunjukkan pemulihan ke level sebelum pandemi, yaitu sebesar Rp14.050 USD pada akhir 2020.

Posisi cadangan devisa Indonesia juga mampu dijaga dengan baik dimana pada Desember 2020 mencapai US$135,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Indikator	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDB (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07
Nominal PDB (USD Miliar)	1.015,29	1.042,68	1.119,13	1.059,30
PDB/Kapita (USD)	3.885	3.945,29	4.192	3.917
Ekspor (USD Miliar)	168,88	180,01	167,68	163,31
Impor (USD Miliar)	150,07	188,71	171,27	141,56
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	18,81	-8,7	-3,59	21,75
Cadangan Devisa (USD Miliar)	130,20	120,65	129,2	135,9
Suku Bunga Acuan – BI 7 Day Reverse Repo (%)	4,25	6,00	5,00	3,75
Inflasi (%)	3,61	3,13	2,59	1,68
IHSG (nilai riil)	6.356	6.194	6.299	5.979

Sumber: BPS, BI, IMF, Kemendag

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

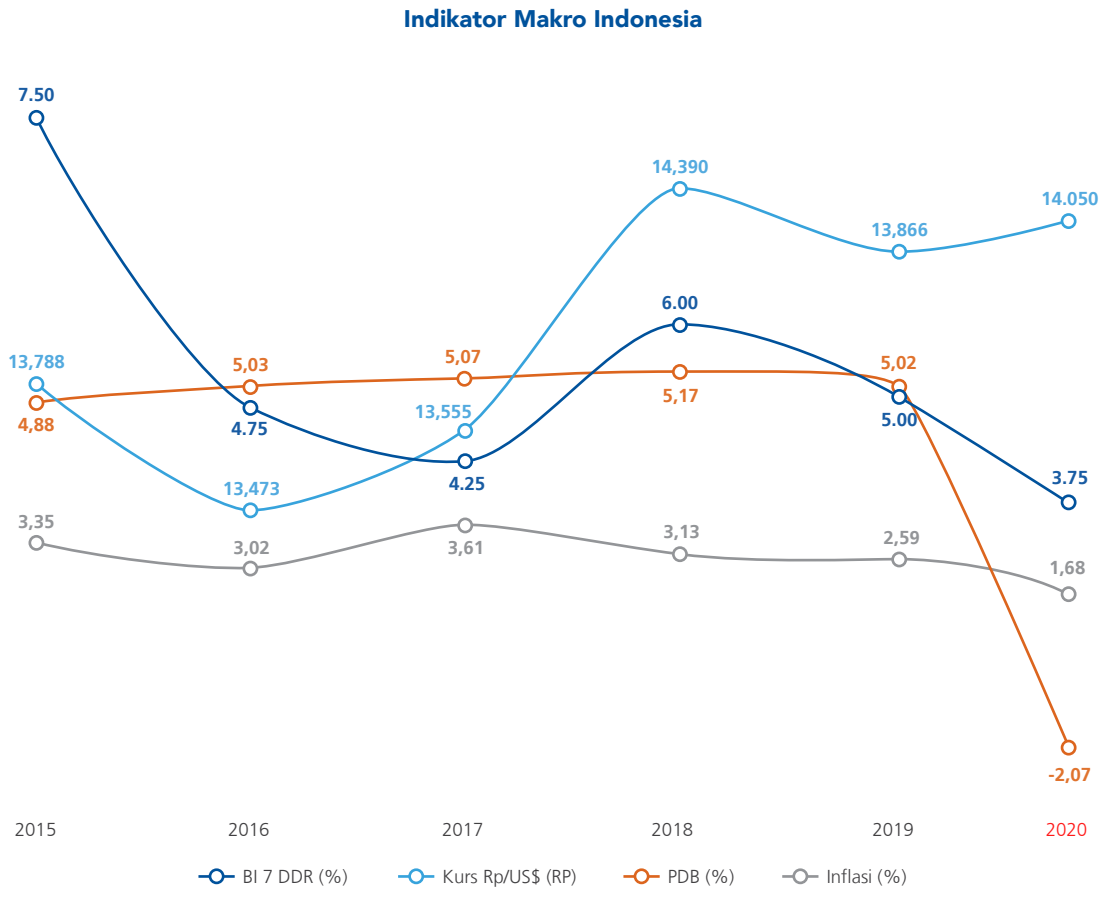

Kebijakan Pemerintah Regulator di masa Pandemi Covid-19

Untuk menahan dampak Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan *countercyclical*, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana Bank BRI juga turut berperan didalamnya. Didalam program pemulihan tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus diantaranya melalui POJK 11 yang memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak Covid-19, PMK 70 dan 104 mengenai penempatan dana pemerintah, PMK 71 yang berisi penjaminan kredit yang ditanggung pemerintah, dan PMK 138 yang memberikan subsidi bunga kredit. Sementara itu, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI7DRR) dari 5% di awal tahun menjadi 3,75% di akhir 2020. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan *quantitative easing* dengan melakukan pembelian obligasi pemerintah melalui pasar primer maupun sekunder.

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN REGULATOR DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Proyeksi Perekonomian Indonesia Tahun 2021

Otoritas fiskal dan moneter memperkirakan perekonomian Indonesia akan meningkat menjadi 5,5% pada tahun 2021, atau lebih baik dibanding tahun 2020 yang terkontraksi. Beberapa sentimen positif yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 yaitu relaksasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh beberapa provinsi sehingga dapat mengembalikan aktivitas ekonomi, serta berlanjutnya program dan kebijakan Pemerintah maupun Regulator yang akomodatif. Selain itu juga, kemunculan vaksin Covid-19 memberikan sinyal positif bahwa aktivitas perekonomian dapat bergerak kembali.

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

Proyeksi Perekonomian Indonesia 2021 | Indonesian Economy Projections in 2021

No.	Asumsi	APBN 2021	IMF	WORLD BANK	ASIAN DEVELOPMENT BANK	BRI*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	4,8	4,8	5,3	3,1 - 4,2
2	Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	7,29	-	-	-	5,8 - 6,3
3	Inflasi (%)	3,0	1,6	-	-	2,1 - 3,1
4	Nilai Tukar Rp/US$ (Rp)	14.600	-	-	-	14.150 - 14.600

*) Grup Economist & Corporate Research BRI, APBN 2021.
Catatan: mulai 2021, pemerintah menggunakan suku bunga SBN 10 tahun sebagai asumsi dasar ekonomi makro, menggantikan penggunaan SPN 3 bulan.

Analisis Industri Perbankan Nasional

Ditengah kondisi yang menantang dan penuh ketidakpastian akibat pandemi covid-19, kondisi industri perbankan Indonesia masih mampu terjaga dengan baik. Berdasarkan data OJK per November 2020 rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) masih mampu terjaga pada level 24,25%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 23,77%. Kondisi likuiditas industri perbankan secara umum juga sangat memadai ditunjukkan dengan Loan Deposit Ratio (LDR) sebesar 82,33%.

Dari sisi pertumbuhan, pada November 2020 perbankan nasional mencatat pertumbuhan aset yang positif sebesar 7,64% year on year sehingga mencapai Rp9.053 Triliun. Namun demikian, pertumbuhan kredit bank umum masih mengalami tekanan atau turun 1,4% *year on year* menjadi Rp5.447 Triliun, seiring dengan masih lemahnya permintaan kredit akibat pandemi Covid-19. Kualitas kredit yang ditunjukkan oleh rasio Non Performing Loan (NPL) mampu dijaga pada level 3,18%, dibawah batas ketentuan regulator sebesar 5%.

Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat *double digit* 11,55% *year on year* menjadi Rp6000 Triliun. Tren ini turut disumbang oleh kondisi pandemi dan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi.

Pada profitabilitas, sampai dengan November 2020 perbankan nasional masih mampu mencatat Laba Bersih sebesar Rp98 Triliun dengan rasio profitabilitas yang positif, ditunjukkan oleh Rasio Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,41% dan Rasio *Return on Assets* (ROA) sebesar 1,64%.

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

Indikator Keuangan Utama Perbankan Indonesia

Indikator	2017	2018	2019	Nov. 2020
Aset (Rp Triliun)	7.388	8.068	8.563	9.053
Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (Rp Triliun)	4.738	5.295	5.617	5.447,49
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	5.289	5.630	5.997	6.634,99
Laba Setelah Pajak (Rp Triliun)	131	150	156	98
CAR (%)	23,01	22,89	21,18	24,25
NPL (%)	2,59	2,37	2,50	3,18
NIM (%)	5,15	5,00	5,26	4,41
ROA (%)	2,38	2,50	2,81	1,64
BOPO (%)	79,28	78,33	76,39	86,04
LDR (%)	89,57	94,04	94,17	82,33

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN & BRI*

Ditengah pandemi covid-19, BRI masih mampu mencatat kinerja keuangan yang positif serta lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan.

1. Kredit

   Pada akhir tahun 2020, BRI mampu mencatat Total Kredit sebesar Rp880,68 Triliun atau tumbuh 2,5% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp859,56 Triliun. Pertumbuhan kredit BRI jauh lebih baik dibandingkan Industri yang terkoreksi -1,4% *year on year* (Nov '20). Kinerja pertumbuhan kredit yang secara konsisten lebih baik dari Industri, mampu mendorong kenaikan market share kredit BRI dibandingkan Industri, yaitu dari 15,3% di tahun 2019 menjadi 16,1%.

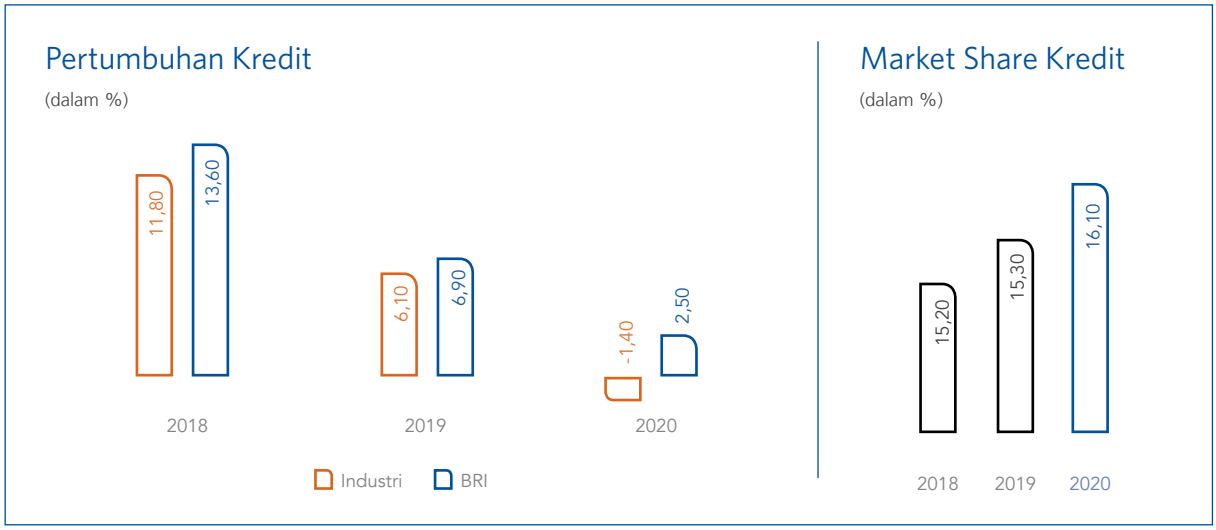

*Angka BRI menggunakan Bank Only

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada akhir 2020, BRI mencatat total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.052,66 Triliun atau tumbuh 8,6% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp969,75 Triliun. Pertumbuhan DPK BRI berada sedikit dibawah pertumbuhan industri sebesar 11,55% *year on year*. Market share DPK BRI tercatat sebesar 15,7% (Nov'20). Meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding akhir 2019, namun BRI masih mampu mempertahankan market share DPK tertinggi di industri perbankan.

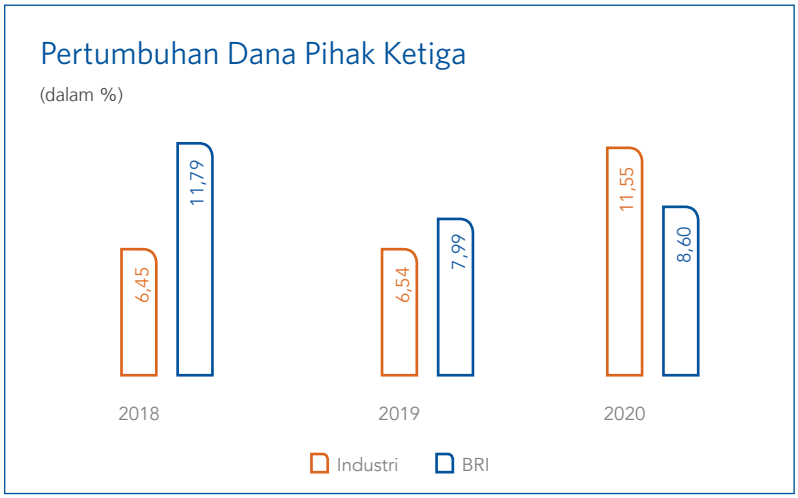

*Angka BRI menggunakan Bank Only

Pertumbuhan DPK BRI disumbang oleh kenaikan Dana Murah (CASA), sehingga komposisi CASA naik dari 56,86% menjadi 61% pada akhir 2020, lebih tinggi dari Industri Perbankan yang tercatat sebesar 57,7% (Nov'20).

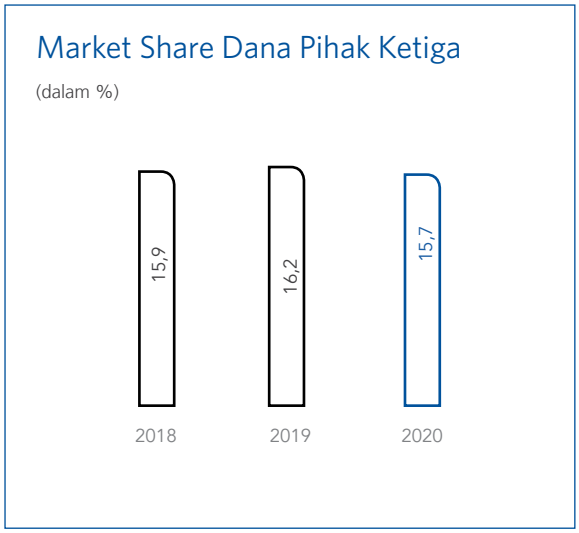

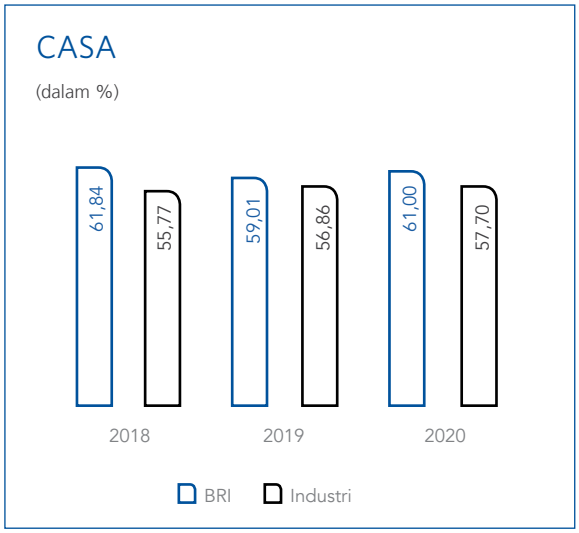

*Angka BRI menggunakan Bank Only

3. Laba Bersih

Pada tahun 2020 BRI mampu mencatat Laba Bersih sebesar Rp18,35 Triliun. Secara *year on year*, laba bersih turun 46,1% year on year, lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata industri yang tercatat turun 30,90% *year on year*. Kondisi ini salah satunya disebabkan restrukturisasi kredit yang secara proaktif dilakukan oleh BRI sebagai upaya penyelamatan kredit khususnya di segmen UMKM yang paling terdampak Covid-19, sehingga memberikan tekanan pada pendapatan bunga. Adapun faktor-faktor pendorong pertumbuhan Laba Bersih BRI dibandingkan Industri adalah sebagai berikut:

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

Kinerja	Pertumbuhan *year on year*	
	BRI (posisi 31 Desember 2020)	Industri Perbankan (posisi November 2020)
Pendapatan Bunga	-4,9%	-4,3%
Beban Bunga	-6,1%	-6,1%
Pendapatan Bunga Bersih	-4,3%	-2,2%
Fee Based Income	6,2%	-6,9%
Total Pendapatan Operasional	-3,4%	2,3%
Beban Operasional Selain Bunga	22,7%	21,0%
Laba Operasional	-39,1%	-28,6%
Laba Bersih	-46,1%	-30,9%

*Angka BRI menggunakan Bank Only

4. Rasio Likuiditas

Secara umum, ditengah pandemi covid-19 kondisi likuiditas BRI dan Industri Perbankan dapat dijaga pada level yang memadai. Pada akhir 2020 Loan to Deposit Ratio (LDR) BRI mampu dijaga pada level 83,66% sementara LDR Industri sedikit lebih rendah di level 82,33%. Tren likuiditas BRI maupun industri mengalami penurunan dibanding 2019 disebabkan masih lemahnya permintaan kredit akibat dampak perlambatan ekonomi di masa pandemi covid-19.

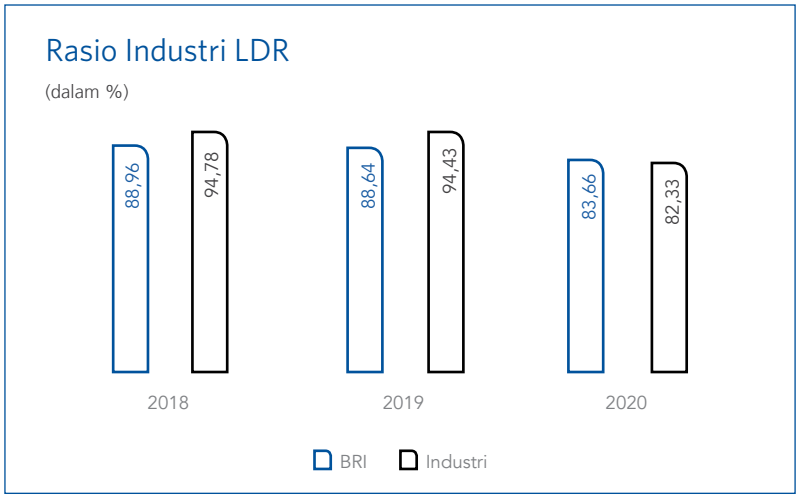

*Angka BRI menggunakan Bank Only

Sementara itu, rasio intermediasi makroprudential (RIM) BRI juga mampu dijaga dengan baik pada level 80,03%, masih berada pada kisaran yang diatur oleh regulator sebesar 80%-92%. Tren yang sama juga dicatat oleh Industri perbankan sebesar 82,33%.

5. Rasio Non Performing Loan (NPL)

Pada akhir 2020, BRI mencatat rasio Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 2,94%, dibawah batas maksimum yang diatur regulator sebesar 5%. BRI juga secara konsisten mampu menjaga kualitas kredit dibawah maksimum ketentuan regulator sebesar 5% dan lebih baik dari rata-rata industri yang tercatat sebesar 3,18% (Nov '20).

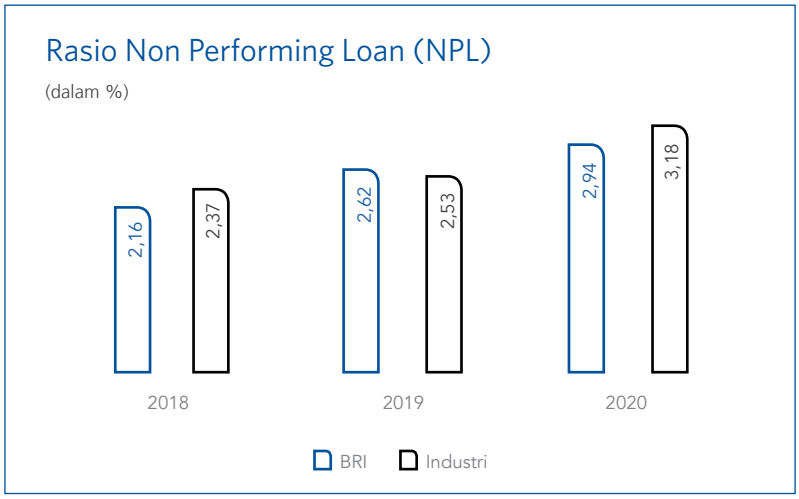

*Angka BRI menggunakan Bank Only

Tinjauan Makro Ekonomi & Industri

6. Rasio Net Interest Margin (NIM)

Pada akhir 2020, BRI mencatatkan rasio Net Interest Margin (NIM) sebesar 6% lebih tinggi dari rata-rata industri yang sebesar 4,41% (Nov. 2020). Baik BRI maupun industri perbankan mencatat tren penurunan NIM, disumbang oleh perlambatan pertumbuhan kredit dan kenaikan restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19.

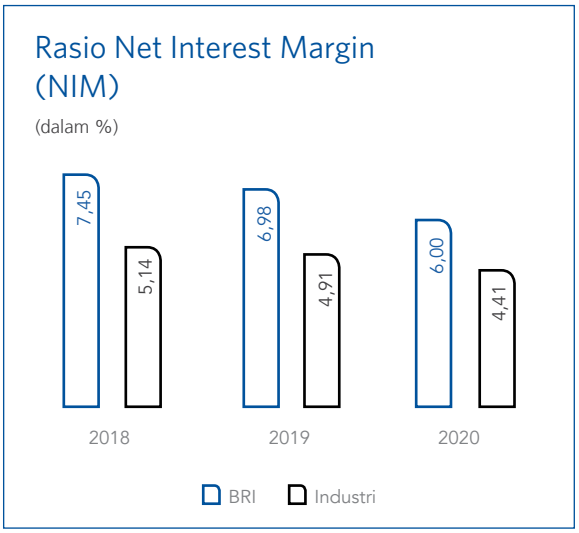

*Angka BRI menggunakan Bank Only

7. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Pada akhir 2020, BRI mencatat rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,22%, lebih baik dibanding rata-rata industri sebesar 86,04% (Nov'20). Hal ini menunjukkan BRI mampu lebih baik dalam menjaga tingkat efisiensi bisnis dibandingkan industri perbankan pada umumnya. Baik BRI maupun industri perbankan mencatat tren kenaikan rasio BOPO yang disumbang oleh tekanan pada Pendapatan Bunga Bersih akibat perlambatan pertumbuhan kredit dan kenaikan restrukturisasi kredit, serta kenaikan Biaya Pencadangan sebagai upaya dalam memitigasi pemburukan kualitas kredit akibat pandemi Covid-19.

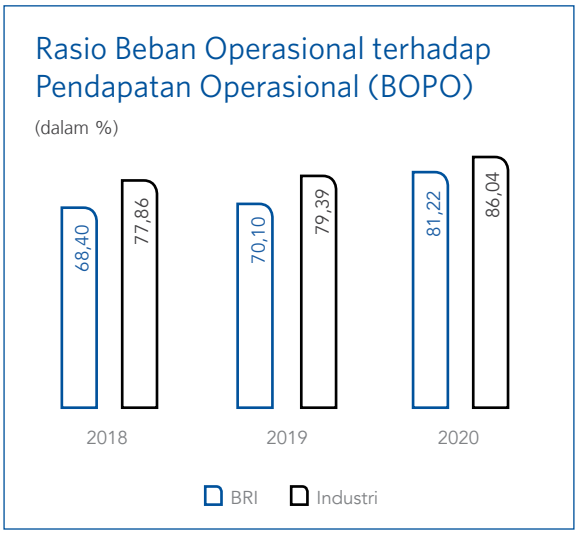

*Angka BRI menggunakan Bank Only

8. Return on Asset (ROA)

Pada akhir 2020, BRI mencatat rasio Return on Asset (ROA) sebesar 1,98%, lebih baik dibandingkan Industri sebesar 1,64% (Nov '20). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat produktivitas bisnis BRI labih baik dibandingkan industri perbankan. Tren rasio ROA BRI maupun industri mengalami penurunan secara year on year disumbang masih adanya tekanan pada Laba Bersih ditengah kondisi pandemi.

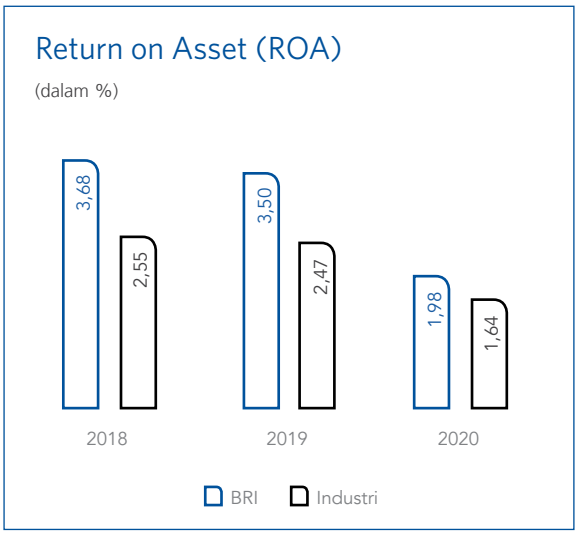

*Angka BRI menggunakan Bank Only

9. Kondisi Permodalan

Pada akhir 2020, kondisi permodalan BRI mampu dijaga dengan sangat baik. Total Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI tercatat sebesar 20,61%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang sebesar 24,25% (Nov '20), level Total CAR BRI lebih rendah, namun jauh diatas minimum ketentuan regulator sebesar 12% dan *risk appetite* perusahaan sebesar 17%.

.

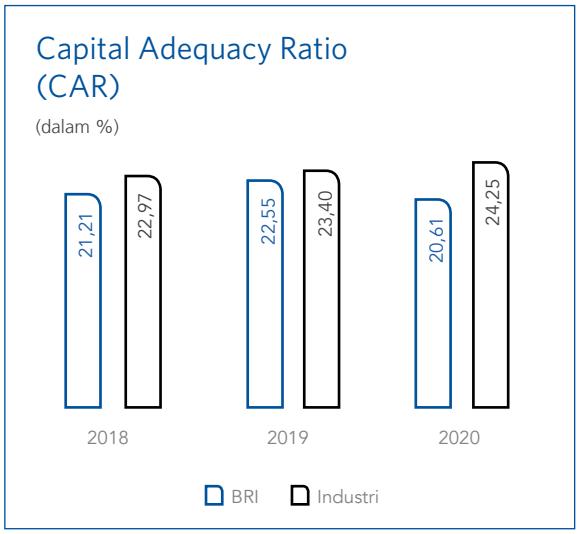

*Angka BRI menggunakan Bank Only

PROYEKSI KINERJA PERBANKAN NASIONAL TAHUN 2021

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan berada dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19 sehingga kinerja perbankan nasional diyakini dapat tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan kredit akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, sementara DPK cenderung tumbuh moderat. Kondisi tersebut disebabkan oleh proyeksi aktivitas ekonomi yang akan semakin membaik serta perilaku konsumtif dari masyarakat menengah ke atas. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan moneter yang dilakukan yaitu penurunan suku bunga dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

	2018		2019		2020		2021 Proyeksi	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK	10%-12%	8%	12%-14%	14%	-2,41%	11%	6%-7%	11%-12%
BI	10%-12%	9%-11%	10%-12%	10% - 12%	8%-10%	8%	5%-7%	7%-9%
LPS	10%-12%	10%-12%	10,5%	11,5%	8,4%	7,4%	11,5%	8,4%

BRI mendukung sepenuhnya arah kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan pada tahun 2021 seperti kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang difokuskan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya UMKM. Sebagai bentuk dukungan dan wujud komitmen BRI untuk dapat menjalankan *economic* dan *social value*, maka BRI akan tetap berkomitmen tumbuh di segmen UMKM dan menjadi mitra Pemerintah dalam implementasi Program PEN dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking.*

RENCANA STRATEGIS BANK

RENCANA JANGKA PENDEK BRI TAHUN 2021

Disrupsi pandemic Covid-19 tidak hanya berdampak pada aktivitas perekonomian nasional temasuk pula industri perbankan. Sebagai entitas bisnis, BRI turut berperan dalam menopang ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas layanan perbankan yang diberikan. BRI telah melakukan review atas rencana bisnis yang telah dipersiapkan guna mengakomodasi dampak lanjutan dari pandemic Covid-19. Untuk mewujudkan tema tahunan yang telah ditetapkan di tahun 2021 yaitu menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Indonesia",* BRI telah memperkuat fondasi melalui rumusan strategi perusahaan. Transformasi digital yang dilakukan BRI serta pengembangan sistem pendukung *mobile* dan digital *banking services* diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, BRI menyusun langkah *survival strategy* antara lain:

1. Efisiensi
   Menjaga efisiensi perusahaan melalui *re-engineering* proses bisnis dengan pendekatan digital, perbaikan komposisi CASA dan penurunan COF.

2. Pertumbuhan Kredit yang selektif
   Ekspansi kredit terus dilakukan secara cermat dan selektif pada produk *low risk* terutama produk terkait program pemerintah, ekspansi sektor bisnis tidak terdampak *negative* Covid-19 dan eksplorasi *new source of growth* diantaranya segmen *Ultra Micro.*

3. Perbaikan Kualitas Aset
   Fokus memperbaiki kualitas kredit, melakukan *monitoring* atas restrukturisasi kredit bermasalah sehingga dapat menekan biaya CKPN serta optimalisasi *recovery rate*.

4. *Strengthening* Sinergi BRI Group
   Fokus pada penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan Anak Perusahaan maupun sesama Perusahaan Anak melalui berbagai program.

5. Mendorong Peningkatan Transaksi
   Mendorong transaksi yang lebih masif untuk meningkatkan perolehan FBI sekaligus potensi CASA. Pengembangan bisnis *value chain* dan *transaction banking* di seluruh segmen bisnis serta implementasi layanan *digital banking* diharapkan dapat mengoptimalkan *fee-based income* yang menjadi salat satu fokus sumber pendapatan tahun 2021.

Program Jangka Pendek tersebut merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI serta faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut, antara lain:

1. Dinamika pandemi Covid-19 serta penanganannya yang memberikan tekanan pada perekonomian dunia.
2. Penerapan kebijakan pemerintah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Ketidakpastian perekonomian Indonesia menyebabkan perlambatan pertumbuhan kredit, peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL), namun menyebabkan peningkatan dana (CASA) secara umum.
4. Perkembangan teknologi dan pola perilaku nasabah yang cepat berubah sebagai akibat penggunaan teknologi serta perkembangan produk dan fitur memberikan ancaman atas produk pengganti di industri perbankan.

RENCANA JANGKA MENENGAH

Recana jangka menengah BRI merupakan *milestone* untuk pencapaian visi dan misi bank BRI. Guna menjaga pertumbuhan bisnis BRI yang sustain ditengah disrupsi pandemi Covid-19, telah dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi target jangka menengah BRI baik yang tertuang dalam sasaran kualitatif dan kuantitatif.

Dalam jangka menengah BRI fokus pada beberapa hal berikut:

1. *Financial*
   Pada aspek finansial, BRI fokus pada efisiensi melalui perbaikan komposisi CASA maupun penurunan suku bunga spesial, melakukan eksplorasi *new source of growth*, peningkatan *recovery rate* serta pengembangan bisnis sejalan dengan stimulus Pemerintah.

2. *Customer*
   Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah, BRI melakukan optimalisasi *value chain* nasabah menengah dan korporasi, pengembangan *omni channel* yang *customer centric*, pengembangan ekosistem *micro payment*, dan *cross selling* produk layanan BRI Group.

3. *Product & Process*
   Guna memberikan layanan yang optimal, BRI melakukan digitalisasi produk maupun proses bisnis, meningkatkan *realibility* IT, perbaikan *risk scoring system*, serta optimalisasi *big data analytics.*

4. *Channel*
   Bertujuan memberikan pelayanan yang prima, BRI melakukan penataan jaringan kerja, optimalisasi BRILink Agent, dan pemanfaatan BRI API (*Application Program Interface*) sebagai *channel* Kerjasama dengan pihak ketiga.

5. *Culture*
   Mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, BRI melakukan transformasi *culture* yang berbasis kinerja.

RENCANA JANGKA PANJANG

Beragam tantangan selama tahun 2020, baik yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, perkembangan teknologi yang sangat cepat, maupun tantangan pertumbuhan internal mendorong BRI untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana jangka panjang hingga strategi pencapaian kinerja. Untuk itu, BRI telah melakukan *review* pada *Corporate Plan* 2021-2025 BRI yang kemudian disebut sebagai BRIVolution 2.0. Hasil dari *review* tersebut, BRI melakukan penyesuaian pada visi BRI tahun 2025 yaitu menjadi *"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion"*.

BRI UNTUK INDONESIA

BRI secara aktif menjadi mitra Pemerintah dalam implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif bagi Debitur yang sebagian besar di segmen UMKM.

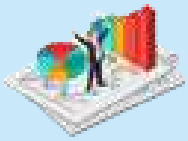

Sebagai upaya penyelamatan kredit UMKM terdampak pandemic Covid-19, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit dengan outstanding mencapai Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta Debitur yang sebagian besar di segmen UMKM.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) BRI naik menjadi Rp15 triliun di 2020 dari Rp13,3 triliun di tahun 2019.

Bansos Sembako telah disalurkan kepada 7.5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 272 Kabupaten/Kota sebesar Rp14,8 triliun pada 2020.

Bantual Sosial Tunai Non-Sembako telah disalurkan kepada 499 ribu KPM (diluar penerima Bansos PKH & Sembako) di 488 Kota/Kabupaten dengan total nominal bantuan sebesar Rp1,6 triliun.

BRI telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai KPM Sembako Non PKH kepada 3 juta KPM dengan nominal sebesar Rp1.5 triliun.

BRI Untuk Indonesia

Saat ini jumlah rekening BUMDes 2020 tercatat sebanyak 24.733 Rekening.

BRI mendukung Program Perhutanan Sosial melalui penyaluran dana KUR sebesar Rp201.2 miliar kepada 3.661 petani penerima SK Perhutanan Sosial.

Terdapat lebih dari 348.863 UMKM yang telah mendaftar sebagai anggota Rumah BUMN, dan BRI telah memfasilitas pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 5.600 kali.

Pada tahun 2020, BRIncubator dilaksanakan dengan tema BRIncubator Go Global yang dilakukan secara online, dan diikuti oleh 289 UMKM pada saat seleksi dan kurasi, dan pada akhir pelaksanaan BRIncubator terpilih 25 UMKM terbaik.

Jumlah Kartu Tani yang tercetak sebanyak 5.117.792 dan yang sudah diterima petani sebanyak 3.703.521 atau sebesar 72,37% dari total kartu tercetak.

BRI SEBAGAI MITRA UTAMA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PEMERINTAH

BRI secara aktif menjadi mitra Pemerintah dalam mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Debitur yang sebagian besar di segmen UMKM, tetapi juga bagi bisnis Perusahaan. Sampai dengan Desember 2020, Program PEN yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit UMKM dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp45 triliun (atau 3 kali) Penempatan Dana Pemerintah.
2. Penyaluran kredit dengan skema penjaminan pada segmen kecil sebesar Rp8,73 triliun kepada lebih dari 14 ribu Debitur;
3. Penyaluran Subsidi Bunga Kredit UMKM sebesar Rp5,47 Triliun kepada lebih dari 8,9 juta penerima;
4. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp18,64 triliun kepada lebih dari 7,7 juta usaha mikro;
5. Penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp8,66 triliun kepada lebih dari 985 ribu debitur;
6. Penyaluran subsidi gaji sebesar Rp6,45 triliun kepada lebih dari 5 juta penerima.

BRI Untuk Indonesia

DUKUNGAN BRI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT UMKM TERDAMPAK COVID-19

Sejak awal pandemi, BRI telah secara proaktif melakukan upaya penyelamatan kredit terdampak Covid-19. Sampai dengan 31 Desember 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit dengan outstanding sebesar Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta Debitur. Mayoritas debitur merupakan Debitur di segmen Mikro, Konsumer, Kecil dan Menengah atau 95,5% dari total yang di restrukturisasi.

BRI MENJADI AGENT OF DEVELOPMENT MELALUI EKONOMI KERAKYATAN

Sebagai *agent of development,* BRI berkomitmen dalam menyukseskan program pemerintah utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilyah pedesaan. Hal ini dilakukan melalui investasi yang terus menerus, suatu aspek yang sama pentingnya dengan berinvestasi pada masa depan bisnis perusahaan.

Program-program yang dilaksanakan fokus pada akses terhadap Pengentasan Kemiskinan (Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan Masyarakat Desa (melalui BUMDes), Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kewirausahaan Pertanian), dan akses terhadap Inklusi Keuangan, serta kegiatan sosial lainnya.

Berikut ringkasan dari program BRI untuk Indonesia:

BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI

Sejak Bulan November tahun 2016, BRI menjadi salah satu BUMN yang ditunjuk menyalurkan program Bantuan Sosial dari Kemensos RI. Setiap bantuan sosial disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai dan menggunakan sistem perbankan, untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di mana pencairannya melalui agen bank dan e-channel bank sebagai penyalur bantuan. Melalui program tersebut BRI turut berperan dalam peningkatan inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Berpatisipasi menyukseskan PKH dengan penyaluran kepada 3,8 juta KPM di 267 Kabupaten/Kota. Penyaluran PKH BRI naik dari Rp13,3 triliun di tahun 2019 menjadi Rp15 triliun di 2020.

Bantuan Sosial Sembako

Sejak tahun 2020 Bansos BPNT berganti nama menjadi Bansos Sembako yang telah disalurkan kepada 7.5 juta KPM yang tersebar di 272 Kabupaten/Kota sebesar Rp14,8 triliun pada 2020.

Bantuan Sosial Tunai Non Sembako

Sejak bulan April 2020 pemerintah membuat program bantuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin imbas pandemi Covid-19 yaitu program BST yang disalurkan melalui BRI. Telah disalurkan kepada 499 ribu KPM (diluar penerima Bansos PKH & Sembako) di 488 Kota/Kabupaten dengan total nominal bantuan sebesar Rp1,6 triliun.

Bantuan Sosial Tunai KPM Sembako Non PKH

Bantuan Sosial tunai ini khusus diberikan kepada KPM Sembako yang belum menerima bantuan PKH dengan nominal bantuan Rp500.000 untuk sekali penyaluran pada bulan Agustus 2020. BRI telah menyalurkan kepada 3 juta KPM dengan nominal sebesar Rp1.5 triliun.

PROGRAM DESA BRILIAN & BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam hal BUMDes, Bank BRI bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan BUMDes dengan azas simbiosis mutualisme meliputi:

1. Memberikan edukasi literasi keuangan
2. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan
3. Melakukan pendampingan dan sosialisasi tata cara pendirian BUMDes
4. Menjadikan BUMDes sebagai Agen BRILink

Kerjasama ini secara efektif dimulai sejak Januari 2017 dan telah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2017 rekening BUMDes yang terakuisisi sebanyak 7.153 rekening bertambah menjadi 17.545 rekening pada tahun 2018 dan 22.654 pada tahun 2019. Saat ini jumlah rekening BUMDes 2020 sebanyak 24.773 Rekening Rekening. Adapun BRILink BUMDes mencapai 11.209 di tahun 2020 meningkat dari 8.662 di tahun 2019 dan 3.020 di tahun 2018 serta 1.319 di tahun 2017.

Adapun pola pendampingan BRI pada Desa dan BUMDes dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Desa BRilian
Selain menjadikan BUMDes sebagai Agen BRILink yang merupakan bisnis rintisan dari BUMDes, Agen BRIlink BUMDes juga dapat meningkatkan literasi keuangan desa.

Sebagai wujud pemberdayaan BRI kepada Masyarakat Desa, pada tahun 2020 BRI menyelenggarakan Program Desa BRilian Desa Brilian adalah Desa yang penuh prestasi dan inspirasi, desa-desa yang tanggap, tangguh dan inovatif di masa pandemi, dan layak jadi percontohan desa-desa lain.

Program Desa BRILian diselenggarakan BRI untuk mendukung kondisi perekonomian desa di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Selama program berlangsung, BRI menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memulihkan perekonomian desa, memberi literasi dan pelatihan, serta menilai kecakapan desa-desa terpilih atas upayanya untuk tetap maju dan berinovasi selama pandemi.

Awalnya, ada 531 desa yang diseleksi BRI untuk terlibat dalam Program Desa BRILian 2020. Dari jumlah tersebut, terpilih 125 desa yang memenuhi empat kriteria di atas. Ratusan desa ini kemudian mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul.

Kesepuluh desa terpilih kemudian akan mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerjasama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Kesepuluh desa tersebut antara lain Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Desa Tebara Kecamatan Waikabukak Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur; Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau; Desa Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, Bali; Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Desa BRILian diharapkan jadi percontohan bagi desa lainnya karena dianggap tanggap, tangguh dan tetap berinovasi di masa pandemi. Mereka bisa menginspirasi desa lainnya untuk maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Selama program berlangsung, ratusan desa mendapat literasi dasar, digital, dan bisnis dengan melibatkan para aparat, tokoh masyarakat, serta BUMDes di masing-masing desa.

Desa-desa terpilih nantinya diikutkan pendampingan khusus lewat Program Inkubasi BRIncubator Goes To Desa BRILian yang diharapkan dapat membantu mendapatkan inspirasi, tambahan wawasan, dan peningkatan kinerja. Untuk itu penilaian tidak hanya

BRI Untuk Indonesia

dimaksudkan untuk mencari pemenang. Lebih dari itu, proses penilaian ini akan membantu desa-desa BRILian mengetahui titik-titik lemah dan bagaimana agar upaya perbaikan terus dilakukan.

Sebuah desa bisa disebut sebagai Desa BRILian jika memenuhi empat kriteria yakni memiliki BUMDes dan kaya akan inovasi untuk memecahkan masalah sosial. Selain itu,desa itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (*sustainability*) serta telah menerapkan digitalisasi dalam kesehariannya.

Melalui pelaksaaan Program Desa BRILian, diharapkan ada empat optimisme yang bisa menyebar ke seluruh kawasan pedesaan di Indonesia. Keempat hal positif tersebut adalah inovasi desa, ketangguhan desa, digitalisasi desa, dan berkesinambungan (*sustainability*).

Desa harus berdaya dan segera bangkit dari masa sulit akibat pandemi karena posisinya begitu penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sesuai pengelompokkan isu penting selama pandemi yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni bagaimana caranya agar kita bisa mempercepat pemulihan ekonomi dari desa selama pandemi, menjamin ketahanan pangan dengan membuat korporasi pertanian, serta memulai transformasi ekonomi kawasan pedesaan menuju digitalisasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat melalui BUMDes sebagai Agen BRILink yang mencapai 24.773 rekening, 11.209 agen dan 12,03 juta transaksi. Nominal transaksi BUMDes mencapai lebih dari Rp 12,3 triliun.

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Program Perhutanan Sosial ini merupakan Proyek Sinergi BUMN yang memberikan manfaat kepastian lahan garapan dan hak garap kepada petani sekitar hutan, akses perbankan melalui pendanaan KUR dari Bank, dukungan subsidi sarana produksi pertanian dan pembinaan pengelolaan lahan hutan yang lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sampai tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial, dalam bentuk lima skema yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. BRI turut mendukung Program Perhutanan Sosial tersebut melalui penyaluran dana KUR sebesar Rp201.2 miliar kepada 3.661 petani penerima SK Perhutanan Sosial.

Selain itu, BRI juga turut serta memberikan bantuan sarana alat produksi seperti traktor tangan, perontok gabah, pemipil jagung, alat kemas, tandon dan pompa air. Pemberian bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan biaya beban usaha tani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi petani. Salah satunya bantuan Alat Penyulingan Minyak Kayu Putih ini diberikan kepada Kelompok Tani Hutan di Desa Wonoharjo, Kec. Kemusu, Boyolali. Kelompok ini beranggotakan 404 petani dan mengelola lahan kawasan Program Perhutanan Sosial seluas 433 ha. Melalui penambahan alat penyulingan minyak kayu putih ini, petani hutan dapat lebih produktif usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan lebih sejahtera.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan Program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh BRI selama tahun 2020 antara lain:

1. Bantuan dan Pelatihan Pengolahan Rotan dan Bambu di Desa Selat Kabupaten Bukleleng Bali
2. Bantuan Sarana dan Bibit untuk Perhutanan Sosial di Desa Panji Kabupaten Buleleng
3. Bantuan Sarana Perbaikan Taman dan FAsilitas Wisata di Desa Sebudi Kabupaten Karangasem.
4. Bantuan Sarana Rumah Produksi Kopi Sunda Purwa di Purwakarta
5. Literasi dan Inklusi Keuangan (pembiayaan) di Desa Loa dan Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
6. Pelatihan dan Inklusi Keuangan Desa Aie Dingin Kabupaten Solok
7. Pelatihan Online Pelaku Usaha Kopi di 30 Lokasi Perhutanan Sosial
8. Pelatihan dan Pendampingan Petani Kopi di Kabupaten Subang
9. Pelatihan dan Webinar Rutin bersama IPB University setiap hari Jumat dari Bulan Agustus Hingga Desember 2020 sebanyak 20 kali

Program Perhutanan Sosial 5.733 Petani

31.519 Hektar lahan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi
Merupakan program sinergi BUMN yang bertujuan memberi kepastian lahan garapan, hak garap petani sekitar hutan, serta penyediaan akses layanan perbankan. Baik itu melalui pendanaan KUR, subsidi sarana produksi pertanian, maupun pembinaan pengelolaan lahan hutan lebih intensif agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

RUMAH BUMN (RB)

Rumah BUMN, yang sebelumnya disebut Rumah Kreatif BUMN, merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Rumah BUMN akan diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM. Saat ini jumlah RB BRI sebanyak 56 unit, Rumah BUMN yang terakhir dibangun adalah RB Purwokerto.

Tujuan utama dari Rumah BUMN adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM sehingga dapat terwujud UKM Indonesia yang berkualitas melalui Go Modern (adalah pelatihan untuk mempersiapkan dan membina UKM dalam peningkatan kualitas produk, branding dan Packaging), Go Digital (adalah pelatihan lanjutan dari Modul Go Modern, berisi materi terkait penggunaan aplikasi digital dan otomasi dalam proses bisnis dan pemasaran), Go Online (adalah pelatihan mengenai perluasan akses pasar secara online melalui market place yang sudah disediakan dengan Blanja.com, atau e-commerce lainnya.

Selain fungsi untuk mendukung pemeberdayaan kepada UMKM, fungsi Rumah BUMN ke depan akan difungsikan sebagai Satgas Bencana, Co-working Space, Basecamp Millenials, dan Sosialisasi Program Bina Lingkungan/ CSR.

Untuk mendukung fungsi pemberdayaan UMKM maka dibutuhkan learning material dan knowledge management di semua RB, maka dilakukan standarisasi kurikulum pelatihan. RB juga bekerjasama/ partnership dengan berbagai instansi dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan anggota RB diharapkan membentuk komunitas sesuai bidang usahanya untuk lebih me-empowering usahanya.

Ke depan, para UMKM anggota RB akan disertifikasi sesuai dengan tingkatan pelatihan di RB, yakni Pelatihan Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Pada Desember 2020, terdapat lebih dari 348 ribu UMKM yang telah mendaftar sebagai anggota Rumah BUMN, dan BRI telah memfasilitas pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 5.992 kali.

RKB	2017	2018	2019	2020
Jumlah RKB	52	53	54	56
Jumlah Anggota	286.330	302.942	329.969	348.863
Pelatihan	908	2.220	4.133	5.992

Sampai sekarang jumlah Rumah BUMN yang dibangun oleh seluruh BUMN mencapai 247 unit, dan jumlah RB BRI sebanyak 56 unit. Keterlibatan BRI dalam mendukung program Rumah BUMN (RB) mendapatkan apresiasi dari kementerian BUMN.

BRI Untuk Indonesia

Rumah BUMN (RB)

Jumlah Anggota RB 348.863 orang | Jumlah Pelatihan 5.992

Kolaborasi BUMN membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM. BRI memiliki 56 RKB di seluruh Indonesia.

BRINCUBATOR GO GLOBAL

BRIncubator Go Global adalah program pengembangan atau kegiatan kompetisi antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang potensial untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM untuk naik kelas termasuk secara digital dan fokus pada validasi ekspor (export validation).

BRIncubator pertama dilaksanakan pada tahun 2018 di 5 Kota, yaitu Padang, Bandung, Solo, Malang, dan Makassar dengan peserta sebanyak 500 UMKM yang merupakan anggota Rumah BUMN BRI.

Pada tahun 2019 BRIncubator kedua dilaksanakan di 5 Kota, yaitu Jakarta Pusat, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo dan Gianyar dengan total peserta sebanyak 500 UMKM yang merupakan anggota Rumah BUMN BRI yang kemudian diseleksi menjadi 250 UMKM untuk mengikuti proses BRIncubator yang terdiri dari Workshop, Coaching dan Mentoring oleh pengajar bersertifikasi nasional. Selanjutnya UMKM tersebut diberikan bimbingan dan pendampingan usaha oleh mentor selama 6 bulan dari Juni s.d. Desember 2019 dengan perbandingan maksimal 5 UMKM didampingi oleh 1 mentor, sehingga proses pendampingan usaha dapat berjalan dengan maksimal.

Pada tahun 2020, BRIncubator dilaksanakan dengan tema BRIncubator Go Global yang dilakukan secara online, dan diikuti oleh 289 UMKM pada saat seleksi dan kurasi, dan pada akhir pelaksanaan BRIncubator terpilih 25 UMKM terbaik yang selanjutnya para UMKM terbaik tersebut mendapatkan reward untuk pengembangan usahanya dan terus mendapatkan pendampingan dari Ekspertise dan Rumah BUMN agar siap memasuki pasar ekspor. Program BRincubator Go Global pada tahun 2020, juga mendapat perhatian serta support dari Kementerian Koperasi & UKM, dan Kemenristek/BRIN.

BRIncubator

Mendukung UMKM Naik Kelas

Pendampingan, pemberdayaan dan modernisasi kelompok UMKM, sehingga mampu mendorong produktivitas pelaku UMKM, menciptakan teknopreuneur dan mendorong UMKM untuk naik kelas.

UMKM EXPORT

BRILian Prenerur 2020 Catatkan Kontrak Pembelian Senilai US$ 57,5 juta

Ajang pertemuan para pelaku bisnis UMKM dan Business Matching yang dilakukan secara Hybrid pada tanggal 1 – 15 Desember 2020, dan pameran produk-produk UMKM pada tanggal 10-13 Desember 2020 di Assembly Hall JCC Jakarta. Acara dimeriahkan dengan Art Installation, Online Talk Show, Online Business Matching, dan Festival Musik secara daring.

KARTU TANI

Kartu Tani merupakan kartu debet *co-branding* antara Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kartu ini diantaranya berfungsi sebagai identitas petani, membaca kuota pupuk bersubsidi, transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap, dan transaksi perbankan melalui electronic channel.

Kartu Tani BRI pertama kali diinisiasi di provinsi Jawa Tengah pada 4 Maret 2015. Kemudian pada 20 Februari 2017, Menteri Pertanian bersama dengan Menteri BUMN menginstruksikan Bank HIMBARA untuk melaksanakan uji coba program Kartu Tani di Pulau Jawa. BRI mendapat tugas membagi Kartu Tani di 19 provinsi antara lain Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya), Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan (14 kabupaten/kota), Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (5 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, Kartu Tani diberikan kepada Petani yang tergabung di kelompok tani dan melakukan usaha tani dengan luasan lahan maksimal 2 Ha untuk sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perternakan serta maximal 1 Ha untuk sektor Perikanan Budidaya. Petani bersama Kelompok tani wajib membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi) yang akan diunggah di sistem E-RDKK Kementerian Pertanian oleh Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan. Selanjutnya Bank akan membuka rekening dan menerbitkan Kartu Tani bagi Petani yang sudah terdaftar di E-RDKK Kementan.

Setiap transaksi pembelian pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani dapat dimonitor oleh pemerintah secara real-time online melalui dashboard yang disediakan BRI, sehingga pemerintah dapat memastikan penyaluran pupuk bersubsidi telah tepat sasaran (*by name by address*). Selain itu *dashboard monitoring* membantu produsen pupuk dalam memperoleh data sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi dan data sumber penagihan subsidi biaya produksi pupuk ke pemerintah. BRI juga memanfaatkan data petani penerima Kartu Tani sebagai pipeline pinjaman untuk meningkatkan skala usaha budidaya petani.

Penggunaan Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap yang juga berperan sebagai agen Lakupandai, merupakan bentuk literasi dan inklusi keuangan bagi ekosistem pertanian Indonesia. Dengan adanya Kartu Tani, Petani mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga kegiatan budidaya tidak terganggu. Selain itu petani yang datanya sudah terdaftar di sistem berkesempatan mendapatkan manfaat tambahan seperti bantuan sarana produksi pertanian lainnya, penyerapan hasil panen dari perusahaan *off-taker*, pendaftaran asuransi pertanian, dan pembiayaan dari perbankan.

Hingga posisi Desember 2020, jumlah Kartu Tani yang tercetak sebanyak 5.117.792 dan yang sudah diterima petani sebanyak 3.703.521 atau sebesar 72,37% dari total kartu tercetak.

Dari sisi akuisisi Kios Pupuk Lengkap (KPL), telah dilakukan pemasangan EDC dan akusisi menjadi agen BRILInk kepada 7.044 KPL.

Jumlah transaksi penebusan pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tela mencapai 571.785 Ton atau sebesar Rp1,02 triliun

BRI Untuk Indonesia

LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Kegiatan inklusi dan literasi keuangan adalah kegiatan berupa sosialisasi ataupun edukasi terkait pengenalan berwirausaha, pengembangan usaha, dan produk atau layanan perbankan BRI. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

Clustering UMKM

Penyusunan perencanaan clustering debitur UMKM BRI guna membantu nasabah dalam mengakses pasar, berpromosi, dan mencarikan pembeli. Selain itu, tujuan dari pembentukan clustering UMKM adalah juga untuk *financial close system*, dimungkinkan adanya *off taker/avalist*, serta pembinaan dan pengembangan yang lebih fokus sesuai segmen. BRI membagi *clustering* UMKM berdasarkan sektor ekonomi dan atau komoditas, wilayah, kesamaan usaha, serta latarbelakang pelaku UMKM.

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN

Bank BRI ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai salah satu perintis Program Kewirausahaan Pertanian. Program ini bertujuan mendorong petani untuk berkelompok menjadi wirausaha baru melalui dukungan sarana prasarana modern dan modal kerja. Dengan target bisa memberi nilai tambah bagi petani agar makin sejahtera, program kewirausahaan pertanian dijalankan bersama oleh Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, bersama petani dan badan usaha milik desa (BUMDES). Kolaborasi yang terbangun diwujudkan dengan membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN). Sampai dengan Juli 2020, seluruh program yang berada di bawah tanggung jawab Himbara, telah terlaksana dengan baik.

Bersama dengan Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lain, setelah proyek Tasikmalaya, pada tahun 2020, Bank BRI menyiapkan tiga inisiatif proyek baru yaitu di Demak, Subang dan Ngawi. Ketiga proyek ini akan menjadi *benchmarking* dalam menumbuhkan dan mengembangan 350 korporatisasi petani hingga tahun 2024 yang telah direncanakan Kementerian Pertanian. Bank BRI berperan memberikan KUR dan kredit mikro lainnya kepada petani serta memberikan pendampingan dan bimbingan manajemen usaha program mewirausahakan petani. Dari output tersebut, *outcome* yang diharapkan bagi Bisnis Mikro BRI adalah terciptanya *customer base bisnis mikro* masa kini dan masa yang akan datang.

Peran Bank BRI sebagai perbankan modern yang pro rakyat

BRI sebagai perbankan sudah pasti mendukung penuh penyaluran modal kerja kepada petani, namun tidak hanya itu peran pendampingan pemberdayaan kepada petani terus dilakukan. Salah satunya dengan *business matching*, yaitu mempertemukan *offtaker* potensial kepada kelompok-kelompok tani. Sebagai contoh, kewirausahaan pertanian di Demak dan Subang, saat ini tengah dikembangkan dengan pola business matching. Hasil identifikasi di dua wilayah tersebut menunjukkan bahwa praktek produksi petani sebagian besar tidak mengalami kendala, namun dalam pemasaran khususnya harga jual produk, masih kalah bersaing. Kedekatan BRI Unit dengan petani adalah kunci utama keberhasilan program ini. Program intensifikasi Kerja Mantri atau yang dikenal dengan nama Revitalisasi Mantri sangat banyak membantu program ini berjalan dengan baik. Baik dari sisi identifikasi, implementasi sampai dengan *reporting*.

Business matching diharapkan dapat meningkatkan margin petani dalam ekosistem kewirausahaan pertanian, sehingga diharapkan petani nanti dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Selanjutnya, diharapkan menjadi langkah BRI untuk semakin dekat dengan petani sehingga ke depan dapat menjadi harapan baru bagi keberlanjutan bisnis mikro BRI.

Adapun enam langkah Kewirausahaan Pertanian adalah sebagai berikut:

Modernisasi Proses Produksi
Mengubah proses pertanian dari tradisional menjadi modern

Penguatan Kelompok
Jika dimungkinkan kelompok menjadi badan usaha atau bahkan menjadi badan hukum

Inklusi Keuangan
Memberikan akses kepada petani terhadap layanan perbankan

Penguatan Petani
Petani dalam skala ekonomi tertentu yang layak dikembangkan tidak lagi bekerja secara individu namun berkelompok

Penguatan Kelembagaan
Lembaga (Badan Usaha/Badan Hukum) menjadi offtaker hasil petani

Kesejahteraan Petani
Ekosistem ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu ke hilir

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
Upaya akselerasi pemulihan perekonomian melalui stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus dilakukan Pemerintah. Salah satu program terbaru adalah Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang digulirkan bagi pelaku usaha mikro yang diberikan satu kali dalam bentuk uang sebesar Rp 2,4 juta.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mulai disalurkan sejak bulan Agustus 2020 lalu sebagai bagian program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu bank yang ditunjuk dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Program BPUM ini diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro, agar tetap bertahan di masa pandemi seperti saat ini.

Hingga tanggal Desember 2020, BRI sebagai mitra utama pemerintah dalam program PEN telah menyalurkan BPUM kepada 7,76 juta penerima dengan nilai bantuan Rp 18,6 triliun.

Dalam upaya percepatan pemanfaatan dana BPUM oleh penerima, Bank BRI melakukan inovasi dengan memberikan kemudahan layanan terutama dalam mengakses informasi. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam masa pandemi, masyarakat dapat mengakses website https://eform.bri.co.id/bpum untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh bantuan tersebut atau tidak.Selanjutnya jika terdaftar, penerima BPUM dapat mendatangi Unit Kerja BRI terdekat untuk melakukan pencairan dana setelah melengkapi dokumen.

Dalam melaksanakan pelayanan pencairan BPUM, Unit Kerja BRI senantiasa berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, termasuk dalam mengatur jumlah layanan maksimal per hari sesuai rekomendasi Satgas Covid-19 setempat, pemerintah setempat, serta pihak berwajib lain untuk mengatur kegiatan pelayanan BPUM agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

TINJAUAN BISNIS

STRUKTUR BISNIS

SEGMEN BISNIS MIKRO

- BISNIS MIKRO
- BISNIS PROGRAM
- BISNIS JASA LAYANAN BRILINK

Segmen Bisnis Mikro ditujukan untuk melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan nasabah individual dan pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat.

SEGMEN BISNIS RITEL

- BISNIS KECIL & MENENGAH
- BISNIS KREDIT KONSUMER
- BISNIS SIMPANAN RITEL
- BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Segmen Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain melalui produk dan layanan perbankan konsumer dan komersial.

Tinjauan Bisnis

SEGMEN BISNIS KORPORASI

- BISNIS KREDIT KORPORASI BUMN
- BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING
- BISNIS KREDIT KORPORASI NON BUMN
- BISNIS SINDIKASI & JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
- BISNIS INTERNASIONAL
- BISNIS TREASURY
- BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Segmen Bisnis Korporasi BRI melayani korporasi besar dan institusi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN yang memberikan *value chain business* bagi segmen UMKM, dengan menyediakan rangkaian lengkap produk kredit dan simpanan serta jasa perbankan meliputi layanan *cash management, trade finance,* layanan perbankan internasional, *treasury* dan jasa penunjang pasar modal. Selain itu segmen bisnis ini melakukan pinjaman sindikasi dan pemberian fasilitas *limit committed* dan *uncommitted* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam negeri.

SEGMEN BISNIS ENTITAS ANAK

- PT Bank BRI Syariah Tbk (BRI Syariah)
- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
- BRI Remittance Co. Ltd (BRI Remittance)
- PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
- PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
- PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas)
- PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
- PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Segmen Bisnis Entitas Anak meliputi perbankan konvensional dan syariah, layanan pembiayaan, layanan remitansi, asuransi jiwa, asuransi umum, modal ventura dan sekuritas.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA

SEGMEN BISNIS MIKRO

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT BISNIS MIKRO

Pada tahun 2020, selama masa pandemi Covid-19, kinerja Bisnis Mikro BRI secara umum tetap mampu mencatat pertumbuhan positif. Baik itu dari sisi Kredit maupun Dana Pihak Ketiga Mikro. Hal ini menunjukkan bahwa Bisnis Mikro BRI mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada lingkup bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu, penerapan program dan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi juga menjadi salah satu kunci BRI dapat melalui tahun 2020 dengan baik.

Program dan strategi BRI untuk meningkatkan Bisnis Mikro pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Business *process re-engineering.*
2. Peningkatan *market share.*
3. Peningkatan CASA.
4. Peningkatan loyalitas debitur Mikro yang terdampak Covid-19 dengan pemberian relaksasi pemenuhan kewajiban melalui program restrukturisasi kredit.
5. *Selective growth,* serta ekspansi bisnis secara cermat dan selektif dengan fokus pada optimalisasi potensi bisnis di daerah non-Zona Merah.
6. Menjalankan strategi inisiatif *"Road to Micro-Business Sustainable Growth".*

Meskipun masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 masih berlangsung, BRI tetap optimis dapat mencapai target komposisi kredit Mikro sebesar 40% dari total kredit di tahun 2021. Hal ini didukung oleh pengalaman BRI melayani segmen Mikro, ribuan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, proses bisnis yang semakin baik dan didukung dengan kapabilitas digital yang andal, serta sumber daya manusia BRI yang berkualitas.

Segmen Bisnis Mikro

RINGKASAN KINERJA

Laba Bisnis Mikro
(Rp Triliun)

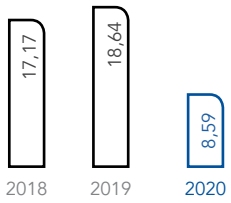

Laba Bisnis Mikro pada tahun 2020 mencapai

Rp8,59 triliun

Kredit Bisnis Mikro pada tahun 2020 mencapai

Rp351,36 triliun,

meningkat 14,17% dibanding tahun 2019 sebesar

Rp307,75 triliun

Debitur Mikro
(Juta)

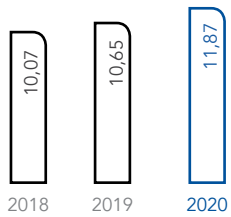

Kredit Bisnis Mikro
(Rp Triliun)

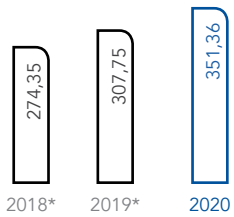

Debitur Bisnis Mikro mencapai

11,87 juta debitur

meningkat **11,44%** dibanding tahun 2019 sebesar

10,65 juta debitur.

Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro
(Rp Triliun)

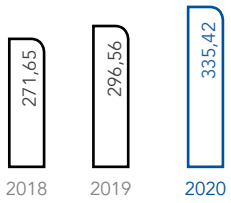

Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro pada tahun 2020 mencapai

Rp335,42 triliun,

meningkat 13,11% dibanding tahun 2019

sebesar **Rp296,56 triliun**

Rekening Simpanan Mikro
(Juta)

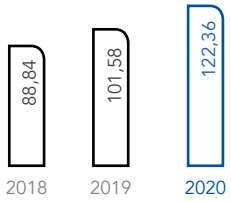

Rekening Simpanan Bisnis Mikro mencapai

122,36 juta rekening,

meningkat 20,46% dibanding tahun 2019 sebesar

101,58 juta rekening

*) Angka kredit setelah Reklasifikasi Segmen

Segmen Bisnis Mikro

BISNIS MIKRO

Segmen Mikro yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia akan selalu menjadi bisnis utama BRI. Sebab BRI telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada segmen Mikro sejak berdiri di tahun 1895, atau sudah 125 tahun per tahun 2020. Memiliki kompetensi profesional di Bisnis Mikro, BRI konsisten dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro yang diselaraskan dengan perkembangan kebutuhannya.

Pada tahun 2020, konsep BRIVolution 1.0 yang mengimplementasikan transformasi dan budaya digital telah memasuki fase keempat dari lima fase untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to the Best Talent*. Fokus fase keempat BRIVolution 1.0 adalah meningkatkan penetrasi segmentasi kredit Ultra Mikro dan sistem transaksi *micropayment* di tengah masyarakat.

Keberadaan sektor Usaha Mikro merupakan bagian dari DNA-nya BRI. Oleh karena itu BRI berkomitmen untuk memperbesar dukungan dan pemberdayaan segmen Ultra Mikro di tahun 2020, yang dikemas dengan semangat transformasi digital yaitu *go smaller*, *go shorter*, *go faster*. Sehingga pelayanan keuangan BRI seperti proses penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan biaya yang lebih terjangkau (*affordable*). Melalui pinjaman ringan ini, pelaku usaha Ultra Mikro diharap bisa mempertahankan usahanya dan segera pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

BRI kini juga telah memiliki Indeks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama BRI Micro & SME Index (BMSI) guna mengukur aktivitas bisnis, sentimen, serta ekspektasi pelaku Usaha Mikro terhadap kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data terkini BMSI, terlihat kondisi usaha serta optimisme pelaku UMKM terhadap pemulihan ekonomi ke depannya semakin meningkat.

Terkait sistem transaksi *micropayment*, upaya BRI untuk meningkatkan penetrasinya selama tahun 2020 antara lain yaitu mengajak dan menjalin kerja sama para pedagang agar bertransaksi secara non-tunai (*cashless*) lewat instrumen *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) BRI. Selain mempermudah perhitungan arus kas, manfaat yang ditawarkan BRI kepada para pedagang dari penggunaan QRIS ini juga untuk mendukung program Pemerintah meminimalisir potensi penularan Covid-19 selama pandemi masih berlangsung.

Untuk menyediakan fasilitas transaksi berbasis QRIS di tahun 2020, BRI memberikan bantuan kepada para pedagang seperti gawai berbasis Android yang bisa digunakan sebagai sarana menerima notifikasi pembayaran setelah transaksi berlangsung, membuat mural pada dinding tempat berjualan pedagang, serta secara rutin mengadakan pertemuan dengan para pedagang untuk mendukung keberlansungan bisnis mereka.

BRI akan terus mendorong pengetahuan masyarakat terkait transaksi non-tunai khususnya QRIS, agar transaksi menggunakan sistem terpadu ini terus meningkat. BRI meyakini dengan sistem pembayaran yang simpel dan aman melalui QRIS, bisnis para pelaku Usaha Mikro dapat terbantu untuk semakin tumbuh besar. Pertumbuhan ini akan berujung pada semakin positifnya laju perekonomian nasional, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, produk-produk pinjaman Bisnis Mikro yang ditawarkan kepada nasabah Mikro adalah Kupedes, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUR Kecil, KUR Super Mikro, dan KUR TKI. Sedang produk-produk simpanan Bisnis Mikro yang tersedia yaitu Tabungan BRISimpedes dengan berbagai varian seperti Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian, dan Simpedes Usaha.

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS MIKRO

Kupedes

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.

KUR Super Mikro

KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp 10 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.

KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman maksimal sebesar Rp 50 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.

KUR TKI

KUR TKI merupakan fasilitas pembiayaan yang berlaku khusus bagi TKI dengan penempatan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp25 juta.

Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian, Simpedes Usaha dan Simpedes Kredit Pangan. Selain itu Bisnis Mikro BRI juga memiliki produk simpanan lainnya yaitu:

1. Tabunganku
2. SimPel (Simpanan Pelajar)
3. Deposito

PROGRAM DAN STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2020

Di tengah tantangan pandemi Covid-19 di hampir sepanjang tahun 2020, BRI telah melakukan beberapa adaptasi pada program dan strategi yang telah disusun. Program dan strategi BRI untuk meningkatkan Bisnis Mikro pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

1. *Business process re-engineering* melalui program kerja *road to digitalization*, *big data insight* dan *enhancement* BRISpot.
2. Peningkatan *market share* melalui program kerja optimalisasi (*referral* dan edukasi finansial) dan peningkatan produktivitas Agen BRILink, kerja sama dengan *fintech* dan *e-commerce*, literasi & inklusi kepada segmen Mikro, program debitur naik kelas, serta *Leveraging Social* Media sebagai strategi *marketing* produk Mikro.
3. Peningkatan CASA melalui program kerja *pipeline management system*, program akuisisi dan pemasaran khusus melalui kantong Teman Simpedes dan akuisisi pasar tradisional.
4. *Product innovation & differentiation* melalui pengembangan model bisnis Pinjaman Ultra Mikro dan optimalisasi *closed payment system* di Pasar Tradisional.
5. Peningkatan loyalitas debitur Mikro yang terdampak Covid-19 dengan pemberian relaksasi pemenuhan kewajiban melalui program restrukturisasi kredit.
6. *Selective growth* melalui penyesuaian target bisnis Mikro dengan kondisi perlambatan ekonomi, serta ekspansi bisnis secara cermat dan selektif dengan fokus pada optimalisasi potensi bisnis di daerah non-Zona Merah.
7. Menjalankan strategi inisiatif "*Road to Micro-Business Sustainable Growth*" yang terbagi menjadi empat inisiatif sebagai berikut:
   a. Inisiatif Produk;
   b. Inisiatif Proses Bisnis;
   c. Inisiatif Sumber Daya Manusia Mikro;
   d. Inisiatif Pemberdayaan

Segmen Bisnis Mikro

KINERJA BISNIS MIKRO TAHUN 2020

Pada tahun 2020, selama masa pandemi Covid-19, kinerja Bisnis Mikro BRI secara umum tetap mampu mencatat pertumbuhan positif. Baik itu dari sisi Kredit maupun Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro. Hal ini menunjukkan Bisnis Mikro BRI mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada lingkup bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu, penerapan program dan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi juga menjadi salah satu kunci BRI dapat melalui tahun 2020 dengan baik.

Kinerja Bisnis Mikro BRI Periode 2018 - 2020

Periode	Laba (Rp Triliun)	Jumlah Debitur (dalam Juta)	Kredit (Rp Triliun)	Rekening Simpanan (dalam Juta)	Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)
2018	17,17	10,07	274,35	88,84	271,64
2019	18,64	10,65	307,75	101,58	296,55
2020	8.59	11,87	351,36	122,36	335,42

Kinerja Kredit Mikro

Pada akhir tahun 2020, Kredit Bisnis Mikro BRI telah mencapai Rp351,36 triliun atau tumbuh 14,17% (*yoy*) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp307,75 triliun. Peningkatan tersebut di dukung juga dengan bertambahnya jumlah debitur Kredit Mikro, dari sebelumnya 10,65 juta debitur menjadi 11,87 juta debitur. Tren pertumbuhan Kredit Mikro mampu mendorong kenaikan komposisi Kredit Mikro terhadap Total Kredit dari sebelumnya 35,8% pada 2019 menjadi 39,9% pada 2020.

Pertumbuhan Kredit Bisnis Mikro yang kuat mampu diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga baik. Hal ini terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang terjaga di level 0,83% pada 2020, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,18%.

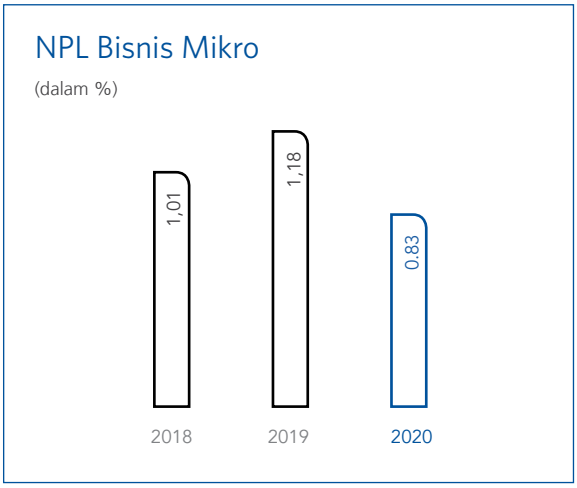

Kinerja Dana Pihak Ketiga Mikro

Pada 2020 Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro BRI mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp296,55 triliun di tahun 2019 menjadi Rp335,42 triliun per Desember 2020, atau bertumbuh 13,11% *year-on-year*. Demikian pula halnya dengan rekening simpanan Bisnis Mikro yang jumlahnya naik dari 101,58 juta rekening menjadi 122,36 juta rekening.

Tren kenaikan Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro BRI pada 2020 disumbang oleh Dana Murah (CASA) yang tumbuh 15,72% (yoy). Sehingga porsi CASA BIsnis MIkro menguat dari 84,60% pada 2019 menjadi 86,56% pada 2020.

Segmen Bisnis Mikro

Jaringan Bisnis Mikro

Untuk melayani kebutuhan produk dan layanan perbankan para nasabah Bisnis Mikro, BRI telah menyediakan jaringan sebanyak 7.385 *outlet* Mikro per tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 5.382 BRI Unit, 1.867 Teras BRI, 132 Teras Mobile, dan 4 Teras Kapal. Selain itu, BRI juga memiliki 504.233 Agen BRILink yang memberikan layanan Bisnis Mikro semakin mudah di akses oleh para pelaku Usaha Mikro, serta untuk tetap dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan walau di tengah masa pandemi Covid-19.

Inovasi Bisnis Mikro

Peningkatan kinerja Kredit dan Dana Pihak Ketiga Bisnis Mikro selama tahun 2020 tak lepas dari upaya BRI yang telah melakukan berbagai inovasi. Inovasi-inovasi dimaksud antara lain:

- **Kredit Ekstra Cepat (KECE).** Pada tahun 2020, BRI memperkirakan terdapat 15 juta pengusaha *Lower* Mikro dan jumlahnya akan terus bertambah kedepannya. BRI berharap pengusaha *Lower* Mikro ini bisa tumbuh dan naik kelas menjadi pengusaha Mikro dengan peran aktif dari perbankan. Dengan potensi database (*pipeline*) sebesar itu, maka salah satu strategi inisiatif BRI dalam menggarap segmen Lower Mikro adalah dengan meluncurkan produk **KECE**. Sampai dengan Desember 2020, BRI berhasil menyalurkan KECE kepada lebih dari 36.000 debitur dengan total plafon sebesar Rp113 miliar.

- **Desa BRILIan.** Di tengah kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, BRI tetap menebar optimisme pemulihan ekonomi dengan memberikan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program Desa BRILIan. Kriteria Desa BRILian adalah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kaya akan inovasi untuk memecahkan masalah sosial, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (*sustainability*), dan telah menerapkan digitalisasi dalam kesehariannya.

- Selama tahun 2020, BRI bersama BUMDES.id telah bersinergi melakukan seleksi dengan empat kriteria tadi terhadap 531 desa. Hasilnya terdapat 125 desa yang lolos seleksi menjadi Desa BRILian dan dapat lanjut mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum di nilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Sepuluh Desa yang terpilih lalu akan mendapat pendampingan khusus melalui program Inkubasi BRIncubator Goes To Desa BRILian yang diharapkan dapat meningkatkan level managerial, level wawasan, dan level kinerja masing-masing desa.

- **Integrasi Platform Penjualan Asuransi Mikro.** Pertumbuhan positif Bisnis Mikro selama tahun 2020 menjadi peluang BRI bersinergi bersama Entitas Anak BRI dengan melakukan *cross selling* produk dan layanan. Pada tahun 2020, BRI telah melakukan integrasi pemasaran produk asuransi BRINS. Pengembangan produk dan layanan dilakukan secara digital melalui platform pemasaran terintergasi Bisnis Mikro (BRISPOT) untuk mendapatkan *seamless customer experience*. Integrasi produk asuransi BRINS dilakukan dengan fokus pada dua bisnis model yaitu Asuransi Mikro BRINS : Rumahku dan Asuransi Mikro BRINS : Kerusakan Tempat Usaha dengan mengusung konsep SMES (Sederhana, Mudah, Ekonomis, & Segera). Terbukti, bisnis model ini diterima dengan baik oleh nasabah dan menghasilkan lebih dari 4 juta polis asuransi umum yang tentunya mendukung pendapatan BRINS dan peningkatan *Fee Based Income* BRI dan BRINS.

- **Kolaborasi Bisnis Mikro BRI dengan *E-Commerce* & *Fintech Company*.** Untuk meningkatkan jangkauan pemasaran pinjaman produktif segmen Mikro, BRI telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah *E-Commerce* dan *Fintech* ternama seperti Amartha, Modalrakyat, Grab, Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan di tahun 2020, kolaborasi ini telah berhasil menyalurkan pinjaman produktif segmen Mikro kepada lebih dari 525 debitur.

Segmen Bisnis Mikro

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Keberadaan Bisnis Mikro BRI juga merupakan dukungan BRI dalam menyukseskan program pemerintah, baik dalam hal peningkatan literasi dan inklusi keuangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Untuk meningkatkan literasi dan Inklusi keuangan, Bisnis Mikro BRI telah memasarkan produk *Basic Saving Account* (BSA) untuk masyarakat. Produk dimaksud adalah Tabunganku dan tabungan Simpanan Pelajar.

Di masa pandemi Bisnis Mikro juga berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan menjadi mitra utama Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), al:

1. Melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit terdampak pandemi Covid-19.
2. Menyalurkan Subsidi Bunga Kredit
3. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro
4. Menyalurkan Subsidi berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2021

Target Bisnis Mikro pada tahun 2021 adalah memperkuat dan mempertahankan BRI sebagai *market leader* Bisnis Mikro di Indonesia. BRI menyadari bahwa kompetisi di Bisnis Mikro semakin ketat kedepannya. Sebab persaingan tidak hanya dengan perbankan lain, melainkan juga dengan *fintech company*.

Meskipun masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 masih berlangsung, BRI tetap optimis dapat mencapai target komposisi kredit Mikro sebesar 40% dari total kredit di tahun 2021. Hal ini didukung oleh pengalaman BRI melayani segmen Mikro, ribuan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, proses bisnis yang semakin baik dan didukung dengan kapabilitas digital yang andal, serta sumber daya manusia BRI yang mumpuni. Oleh karenanya, strategi Bisnis Mikro BRI di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Efficiency* melalui perbaikan CASA dan efisiensi operasional proses bisnis.
2. *Assets Quality* melalui perbaikan *recovery* pinjaman.
3. *Selective Growth* melalui ekspansi di produk *low risk* dan eksplorasi *new source of growth.*
4. *Community Development* melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas nasabah Bisnis Mikro.
5. Menjalankan "SOLID *Survival Strategy*" yaitu dengan cara Meningkatkan *Fee Based Income*, Memperkuat *Recovery* dan *New Source of Growth*.
6. Menjalankan strategi inisiatif "*Gaining Sustainable Micro Business*" yang terbagi menjadi empat inisiatif sebagai berikut:
   a. Inisiatif Produk;
   b. Inisiatif Proses Bisnis;
   c. Inisiatif SDM Mikro;
   d. Inisiatif Pemberdayaan.

BISNIS KREDIT PROGRAM

Selama pandemi Covid-19 berlangsung di tahun 2020, BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berperan aktif menjadi mitra Pemerintah untuk melaksanakan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BRI telah terlibat dalam program pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19, penyaluran dana PEN tahap I dan II, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran subsidi bunga kredit serta pemberian dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap jutaan pelaku UMKM.

Pada tahun 2020 dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat akibat dampak Covid-19 Pemerintah mengeluarkan skema baru terkait KUR yaitu KUR Super Mikro. KUR Super Mikro ditujukan kepada nasabah ultra mikro, korban PHK ataupun ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif dengan memenuhi persyaratan seperti mengikuti program pendampingan, tergabung dalam kelompok usaha.

Plafon maksimal KUR Super Mikro sebesar Rp10 juta dengan suku bunga bunga sebesar 6%. Sampai dengan akhir tahun 2020, Pemerintah memberikan tambahan stimulus berupda subsidi bunga sebesar 6% kepada debitur KUR Super Mikro sehingga sepanjang tahun 2020 debitur tidak perlu membayar angsuran bunga pinjaman.

Selain demi membantu pemulihan kondisi ekonomi nasional yang terdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, keberadaan KUR Super Mikro turut mendukung pendalaman penetrasi layanan perbankan ke masyarakat Indonesia. Kedepan KUR Super Mikro akan terus dioptimalkan BRI sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha Mikro khususnya Ultra Mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan nominal dan suku bunga yang terjangkau.

DATA PERKEMBANGAN KUR

Tahun	Target (Rp Miliar)				
	Mikro	Kecil	TKI	Super Mikro	Total
2018	69.880	10.140	224	-	80.244
2019	75.649	12.100	222	-	87.971
2020	117.000	13.000	200	10.000	140.200

Tahun	Penyaluran (Rp Miliar)				
	Mikro	Kecil	TKI	Super Mikro	Total
2018	69.885	10.073	220	-	80.178
2019	75.710	12.009	181	-	87.900
2020	116.921	12.922	41	8.660	138.544

Tahun	Pencapaian				
	Mikro	Kecil	TKI	Super Mikro	Total
2018	100,01%	99,34%	98,44%	-	99,92%
2019	100,08%	99,25%	81,61%	-	99,92%
2020	99,93%	99,40%	20,33%	86,60%	98,82%

*) KUR Super Mikro mulai direalisasi pada Bulan September 2020

Segmen Bisnis Mikro

PENYALURAN KUR TAHUN 2020

Penyaluran KUR	31 Desember 2020		Target	Pencapaian
	Jumlah Debitur	Jumlah (Rp Miliar)	Penyaluran 2020 (Rp Miliar)	(%)
KUR Mikro	4.351.148	116.921	117.000	99,93%
KUR Kecil	54.883	12.922	13.000	99,40%
KUR TKI	3.036	41	200	20,33%
KUR Super Mikro	985.189	8.660	10.000	86,60%
Total	5.394.256	138.544	140.200	98,82%

Peningkatan KUR BRI di tahun 2020 didominasi dari penyaluran KUR Mikro BRI yang mencapai Rp116,92 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur, KUR Kecil BRI yang mencapai Rp 12,92 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 54.883, dan KUR Super Mikro BRI sebesar Rp8,66 triliun yang diberikan kepada 985.189 debitur.

Penyaluran KUR BRI dilakukan dengan strategi *selective growth,* mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari KUR yang disalurkan BRI tetap terjaga kualitasnya dengan rasio NPL (Non Performing Loan) KUR BRI tercatat di bawah satu persen di tahun 2020.

Faktor lain yang membuat BRI dapat menyalurkan KUR secara cepat dan tepat sasaran yakni adanya aplikasi BRISPOT. BRISPOT merupakan inisiatif digital yang dimiliki oleh BRI yang mampu mempermudah dan menyederhanakan proses bisnis khususnya pada penyaluran kredit. Dengan adanya BRISPOT ini para tenaga pemasar mikro atau mantri BRI mampu meningkatkan rasio kelolaan debiturnya dan mempercepat proses pinjaman sehingga berujung naikknya produktifitas pekerja, kedepan *enhancement* dan inovasi BRISPOT akan terus dilakukan dalam menunjang proses bisnis dan memperoleh *new source of growth*.

PENYALURAN BPUM TAHUN 2020

	Progress Penyaluran	
	Jumlah Penerima	**Nominal (Rp Juta)**
BPUM	7.765.843	18.638.023

*) Penyaluran setiap nasabah sebesar Rp 2.4 juta

BPUM merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkat produktifitas para pelaku usaha mikro.

Terkait kinerja penyaluran program dana BPUM, BRI telah menyalurkannya sebanyak Rp18,6 triliun kepada 7,76 juta penerima di berbagai daerah di tahun 2020. BRI menjadi lembaga penyalur BPUM terbesar di Indonesia. Penyaluran BPUM yang dilakukan BRI telah mengandalkan teknologi dan telah mengimplementasikan protokol kesehatan, sehingga menjamin keamanan serta kenyamanan penerima.

Dalam mengakselerasi penyaluran BPUM, BRI mengoptimalkan reliabilitas data yang dimiliki sebagai hasil dari transformasi digital. Data tersebut terkait rekening nasabah dengan kriteria saldo tabungan kurang dari Rp2 juta dan tidak sedang mendapat kredit. Data tersebut dikirim ke Kementerian UMKM dan Koperasi untuk di validasi. Syarat utamanya adalah calon penerima bantuan menyatakan sanggup menggunakan dana bantuan Rp2,4 juta untuk usaha produktif.

BISNIS JASA LAYANAN BRILINK

RINGKASAN KINERJA

Jumlah Agen BRILink mencapai
504.233 Agen meningkat
19,44% dibanding tahun 2019 sebanyak
422.160 Agen.

Jumlah Agen BRILink

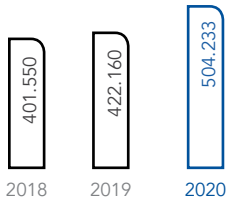

Volume transaksi
Finansial BRILink mencapai
Rp843 triliun
meningkat **25,33%** dibanding tahun 2019
sebesar **672,61 triliun.**

Volume Transaksi
(Rp Triliun)

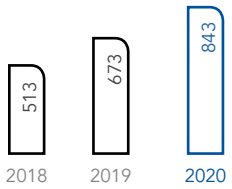

Fee Based Income BRILink mencapai
Rp1,16 triliun
meningkat **47,04%** dibanding tahun 2019
sebesar **Rp788,71 miliar.**

Fee Based Income
(Rp Miliar)

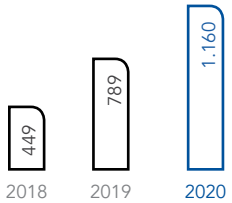

CASA BRILink mencapai
Rp13,30 triliun
meningkat **57,77%** dibanding tahun 2019
sebesar **Rp8,43 triliun.**

Casa BRILink
(Rp Triliun)

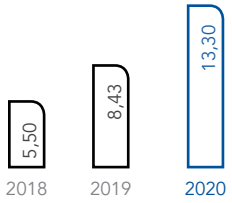

Jumlah transaksi BRILink mencapai
728 juta
meningkat **39,65%** dibanding tahun 2019 sebesar
521,32 juta.

Jumlah Transaksi BRILink
(Juta)

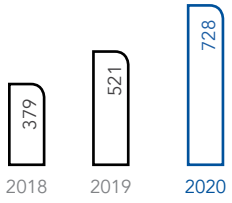

Mendukung program Pemerintah antara lain inklusi keuangan di daerah
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Penyaluran Kartu Tani, Sinergi Agen BRILink dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Penyaluran BPNT.

BRILINK

BRILink merupakan layanan *branchless banking* BRI untuk mendukung penuh Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital), serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan seperti melakukan transaksi perbankan.

BRI bekerja sama dengan para nasabah untuk menjadi Agen yang dapat melayani transaksi perbankan secara *online* dengan menggunakan berbagai *device* seperti *Electronic Data Capture* (EDC) maupun ponsel pintar. Agen BRILink memberikan layanan transaksi perbankan seperti transfer, setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan *referral* pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, dan transaksi lainnya.

LAYANAN BRILINK

Bisnis Jasa Layanan BRILink

Peran Agen BRILink begitu penting terutama di tengah pandemi Covid-19 dan era kenormalan baru di tahun 2020. Melalui kemudahan akses layanan perbankan, BRILink dapat menjangkau masyarakat lebih dekat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Saat ini, Agen BRILink telah melayani masyarakat di 54,6 ribu desa, atau lebih dari 70% jumlah desa di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya wilayah yang telah dijangkau, BRI dapat memberikan inklusi layanan keuangan yang makin luas kepada masyarakat terutama yang *unbankable* disekitarnya.

STRATEGI BRILINK TAHUN 2020

Pada tahun 2020, BRILink telah menerapkan strategi perluasan *delivery channel* dengan fokus terhadap kualitas Agen BRILink dengan memanfaatan teknologi BRIsat. Sehingga dapat menjangkau daerah yang belum didukung layanan *provider* dan melakukan standarisasi perangkat Agen berbasis Android. BRI juga melakukan beberapa inisiatif strategis termasuk pengembangan ekosistem digital demi meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien terutama pada nasabah Mikro.

Dengan kemudahan dalam pembukaan rekening simpanan dan *referral* pinjaman pada Aplikasi BRILink, Agen BRILink sebagai solusi ekosistem finansial Mikro dapat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran yang lengkap bagi pelaku Usaha Mikro. BRI berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan *availability* layanan perbankan ke seluruh desa di Indonesia melalui BRILink dengan menambah fitur produk dan memaksimalkan kolaborasi kerja sama dengan *Startup* yang memiliki layanan dan produk bernilai jual serta dibutuhkan masyarakat seiring penetrasi bisnis digital. Dalam standarisasi perangkat Agen berbasis android akan dilakukan implementasi standar perangkat baru EDC Android.

KINERJA BRILINK TAHUN 2020

Pada tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak aspek kehidupan, BRILink mampu menunjukkan kinerja positif dan bertumbuh dengan signifikan. Hal ini tercermin antara lain dari jumlah Agen BRILink yang terus bertambah dari sebelumnya 422.160 agen di tahun 2019 menjadi 504.233 agen atau tumbuh 19,44% (*yoy*). Jumlah dan volume transaksi BRILink juga mengalami peningkatan masing-masing menjadi 728 juta transaksi dan Rp843 triliun, atau bertumbuh 39,65% dan 25,33% (*yoy*).

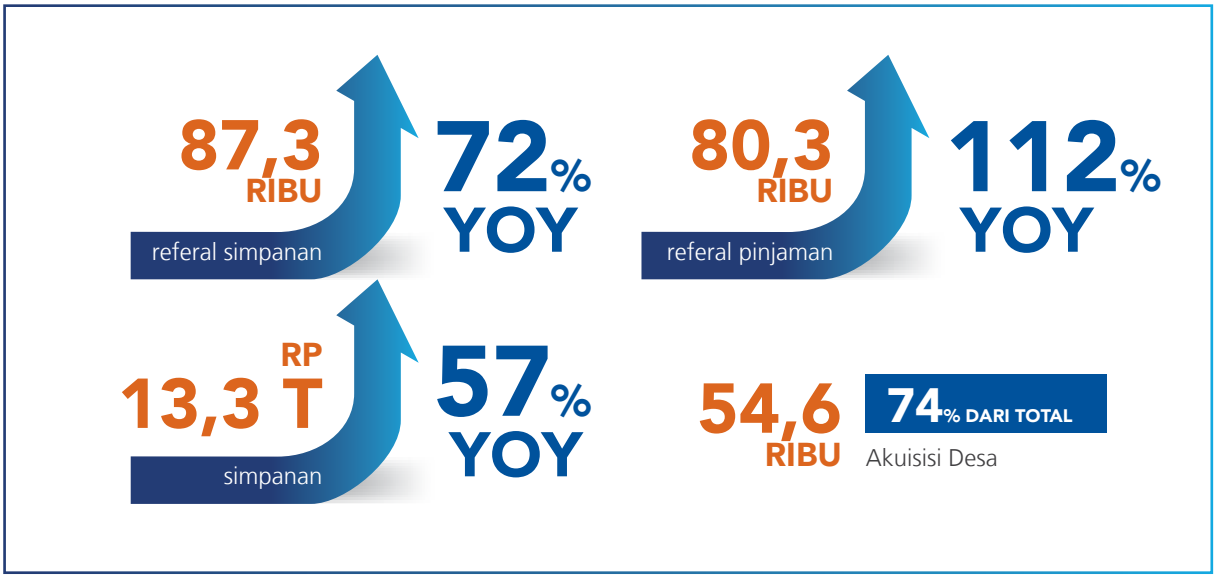

Kontribusi *Fee Based Income* dari BRILink juga terus meningkat mencapai Rp1,16 triliun di tahun 2020, dari sebelumnya Rp788,71 miliar di tahun 2019 atau tumbuh 47,04% (*yoy*). Selain itu, BRILink juga meningkatkan perolehan CASA menjadi Rp13,30 triliun atau naik 57,77% dibanding tahun 2019 sebesar Rp8,43 triliun. Seluruh pencapaian tersebut tidak lepas dari peran Agen BRILink yang telah mencapai 504.233 Agen di seluruh Indonesia, serta adanya langkah-langkah perbaikan manajemen agen dan struktur insentif yang tepat oleh BRI selama tahun 2020.

STRATEGI BRILINK TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bisnis BRILink fokus terhadap kualitas Agen BRILink dalam meningkatkan FBI dengan memanfaatkan EDC Android pada penerapan klasifikasi Agen. Perluasan *delivery channel* pada Agen BRILink merupakan wujud nyata peran Agen BRILink dalam ekosistem finansial mikro yang dapat menjadi *pipeline* nasabah simpanan dan pinjaman dari BRI sekaligus mitra BRI dalam memasarkan produk-produk perbankan.

Peningkatan kualitas Agen menjadi pondasi dalam mendukung pencapaian target BRILink di tahun 2021 ini. BRI terus berkomitmen dalam meningkatkan ketersediaan layanan perbankan dan keuangan dengan *coverage* Desa paling tidak sebesar 75,6% dari total Desa di Indonesia.

Dengan kemudahan dalam pembukaan rekening simpanan dan referral pinjaman, Agen BRILink sebagai solusi ekosistem finansial mikro juga tentunya dapat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran yang lengkap bagi masyarakat khususnya untuk segmen mikro. Terdapat kerjasama antara BRI, Pegadaian dan PNM sebagai integrasi BUMN dalam pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui distribusi produk Ultra Mikro (UMi) di Agen BRILink, pertukaran data untuk memperkuat *analytics* dan *co-location* untuk meningkatkan *coverage* serta *cross-selling* produk melalui *digital platform.* Selanjutnya, BRILink juga akan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menambah fitur produk/layanan dan memaksimalkan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (*startups*) yang memiliki layanan dan produk bernilai jual serta dibutuhkan masyarakat seiring dengan penetrasi bisnis digital. Selain itu, BRI juga melakukan standarisasi perangkat Agen BRILink berbasis Android yang tentunya memiliki lebih banyak keunggulan dan kemudahan yang mendukung bisnis secara digital.

SEGMEN BISNIS RITEL

RINGKASAN KINERJA

- Laba Bersih Bisnis Ritel di tahun 2020 mencapai Rp5,94 triliun
- Kredit Bisnis Ritel di tahun 2020 mencapai Rp360,34 triliun, sedikit turun 0,1% dibanding tahun 2019 sebesar Rp360,69 triliun
- Dana Pihak Ketiga Bisnis Ritel di tahun 2020 mencapai Rp410,30 triliun, meningkat 9,57% dibanding tahun 2019 sebesar Rp374,45 triliun
- *Fee Based Income* Bisnis Ritel di tahun 2020 mencapai Rp8,14 triliun, meningkat 3,36% dibanding tahun 2019 sebesar Rp7,88 triliun.

Laba Bisnis Ritel

(Rp Triliun)

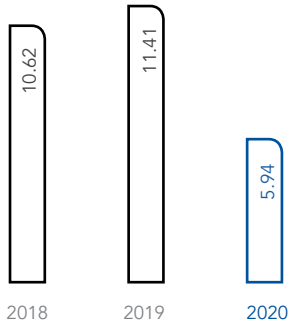

Kredit Bisnis Ritel

(Rp Triliun)

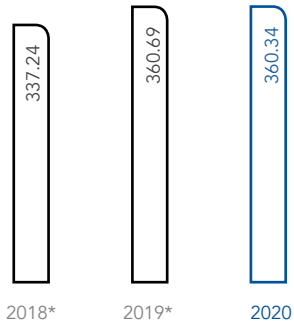

Dana Pihak Ketiga Bisnis Ritel

(Rp Triliun)

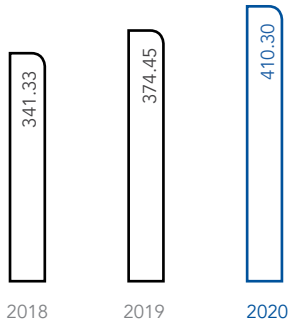

Fee Based Income Bisnis Ritel

(Rp Triliun)

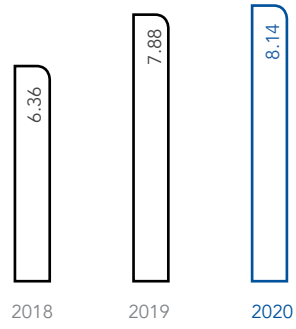

*) Angka kredit setelah reklasifikasi segmen

BISNIS KECIL DAN MENENGAH

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT BISNIS KECIL & MENENGAH

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru dalam pengembangan Bisnis Kecil & Menengah BRI di tahun 2020. Di tengah perlambatan pertumbuhan bisnis, segmen SME mengimbanginya dengan tetap menjaga kualitas kredit melalui restrukturisasi Covid-19 sesuai ketentuan dan menyalurkan berbagai stimulus demi menyelamatkan serta membangkitkan UKM. BRI telah menjadi mitra utama Pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program dan strategi BRI dalam mengembangkan Bisnis Kecil dan Menengah di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi platform digital *Loan Invoice Financing*, BRISpot Ritel, dan aplikasi *Sales Planning System*.
2. Implementasi otomatisasi kolektibilitas.
3. Menjalankan program pemasaran sesuai kondisi persaingan bisnis.
4. Optimalisasi *value chain business*.
5. Disiplin implementasi forum *pipeline management*.
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar, serta *partnership* dengan perusahaan *P2P lending*.
7. *Clustering* komoditas pertanian.

Untuk mengembangkan dan menguatkan Bisnis Kecil dan Menengah kedepannya, BRI akan memperkuat *positioning* dengan mencari sumber pertumbuhan baru, memperkuat ekosistem digital, *business follow* stimulus, menjaga kualitas kredit dengan *selective growth*, *value chain based loan*, dan meningkatkan *transaction based* serta tetap mendukung program UKM naik kelas. BRI meyakini UKM tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik mengingat jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan berkontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis Kecil dan Menengah

RINGKASAN KINERJA

1. Kredit Kecil mencapai Rp197,22 triliun sedikit turun 0,71% dibanding tahun 2019 sebesar Rp198,63 triliun miliar.
2. Meskipun Kredit Kecil secara total mengalami penurunan, Kredit KUR Kecil mampu tumbuh sebesar 20,56% menjadi sebesar Rp26,30 triliun.
3. Kredit Menengah mencapai Rp19,36 triliun turun 10,27% dibanding tahun 2019 sebesar Rp21,58 triliun. Penurunan kredit ini sejalan dengan penurunan kondisi ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 dimana menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dan *demand* kredit.

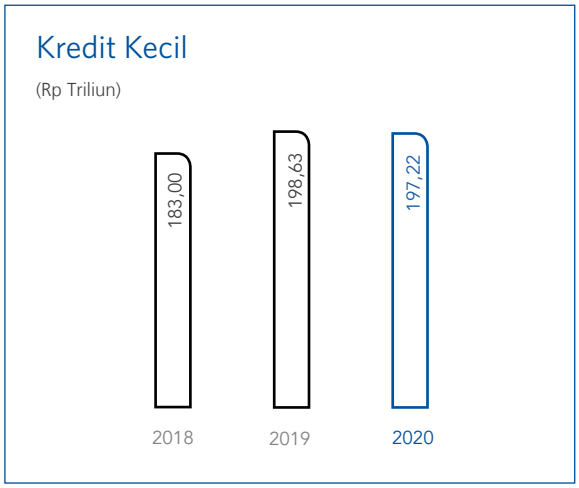

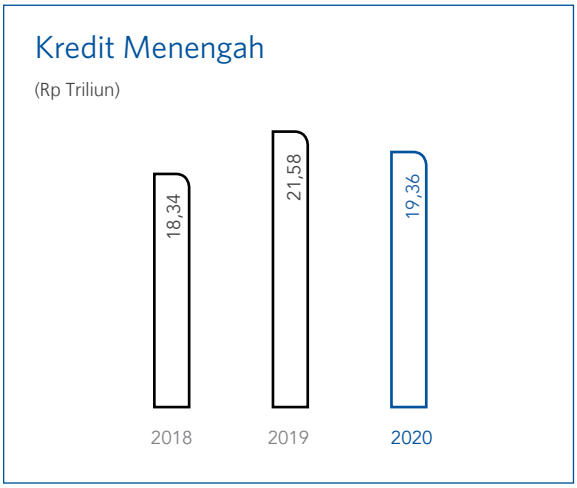

Situasi di era pandemi Covid-19 selama tahun 2020, menuntut Bisnis Kecil dan Menengah BRI cepat beradaptasi dengan menerapkan strategi ekspansi yang selektif dan tetap mengutamakan kehati-hatian (*prudent*). Di masa pandemi, Bisnis Kecil & Menengah menerapkan protokol ekspansi secara selektif sesuai zona wilayah pembiayaan dan sektor industri terdampak Covid.

Zona tersebut dibagi menjadi tiga yaitu zona hijau, kuning, dan merah. Zona tersebut juga untuk memetakan signifikansi sektor-sektor yang terdampak pandemi, sehingga memudahkan pengaturan putusan di masing-masing zona wilayah. Dengan adanya protokol ekspansi bagi tenaga pemasar, bertujuan agar Bisnis Kecil & Menengah dapat tetap tumbuh dengan kualitas kredit yang terjaga.

BRI terus menunjukkan komitmen untuk menyelamatkan dan membangkitkan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM). Kondisi sulit yang dihadapi pelaku UKM di masa pandemi Covid-19 mendorong BRI melakukan restrukturisasi dan menyalurkan berbagai stimulus, agar kondisi usaha pelaku UKM dapat bertahan dan segera bangkit. Dalam pelaksanaan restrukturisasi dan penyaluran berbagai stimulus, BRI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

POJK dan PMK yang dimaksud adalah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK 11), dan diperpanjang dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN (PMK 85); dan PMK Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 71), sebagai landasan Bisnis Kecil dan Menengah BRI menerbitkan Kredit Modal Kerja (KMK) Tangguh yang merupakan kredit dengan penjaminan Pemerintah..

Bisnis Kecil dan Menengah

Sepanjang tahun 2020, Bisnis Kecil & Menengah telah melakukan restrukturisasi pinjaman terhadap 140.040 debitur terdampak Covid-19 dengan *Outstanding* sebesar Rp87,70 triliun sebagai bentuk dukungan kepada debitur di tengah kondisi pandemi. Skema restrukturisasi yang diberikan Bisnis Kecil & Menengah bervariasi diantaranya skema restrukturisasi dengan penyesuaian suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, penundaan pembayaran pokok dan atau bunga .

Selain itu Bisnis Kecil & Menengah juga telah menyalurkan kredit dengan skema penjaminan sesuai PMK 85 untuk membiayai modal kerja dalam rangka pemulihan dan pengembangan usaha Debitur akibat terdampak pandemi Covid-19 dengan nama produk KMK Tangguh dengan plafond maksimal 10 Miliar. Total Penyaluran KMK Tangguh selama tahun 2020 sebesar Rp8,7 triliun disalurkan kepada 14.396 Debitur dengan sektor ekonomi tertinggi di Perdagangan Besar & Eceran sebesar 79%, diikuti Pertanian, Perburuan & Kehutanan sebesar 5,8% dan Industri & Pengolahan sebanyak 5,1%. BRI menjadi perbankan dengan market share penyaluran terbesar dengan lebih dari 80% jika dibandingkan dengan perbankan Nasional lainnya.

PRODUK BISNIS KECIL & MENENGAH

BRI melalui Bisnis Kecil dan Menengah memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, antara lain:

1. Kredit Modal Kerja
   Fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha dalam rangka proses produksi atau tambahan modal kerja. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis debitur; dan *New Account Sweep*.

2. Kredit Investasi
   Fasilitas kredit produktif dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, atau penggantian biaya perolehan (*refinancing*) barang modal. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.

3. Kredit Mitra/*Supply Chain Financing*
   - KMK *Pre-Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - KMK *Post Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai pengambilalihan piutang atas tagihan penyelesaian proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - KMK Distributor (*Distributor Financing*) adalah fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/agen, khusus untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - Kredit Investasi Mitra adalah fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, termasuk refinancing aktiva tetap dalam rangka mendukung operasional bisnis mitra Perusahaan Inti rekanan BRI.

   Produk-produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan antara lain:
   - Suku bunga dan biaya kredit menarik.
   - Relaksasi agunan dan Sharing Dana Sendiri.
   - Operasionalisasi secara digital melalui Modul *Supply Chain* pada *Cash Management System* BRI.

4. Kredit Dinamis
   Kredit Dinamis adalah Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi dengan fitur berupa insentif suku bunga kredit yang berubah dinamis secara otomatis setiap bulan, berdasarkan penyaluran transaksi keuangan dan performance Giro BRI debitur pada bulan sebelumnya. Keunggulannya memiliki suku bunga kredit yang lebih menarik dibanding kredit konvensional dan *New Account Sweep*.

Bisnis Kecil dan Menengah

5. Kredit Ritel Dengan Pola Angsuran Tetap
   Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen ritel dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap. Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:
   - Jangka waktu kredit hingga 5 tahun.
   - Maksimal angsuran adalah 80% dari RPC.

6. Invoice Financing melalui Platform Investree (Fintech Peer To Peer Lending)
   BRI melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology* (fintech) antara lain dalam penyaluran invoice financing dengan skema kerjasama yang dilakukan melalui platform online
   - Prosedur pelayanan kredit secara digital dan cepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   - Biaya kredit relatif murah
   - Tanpa agunan tambahan

STRATEGI BISNIS KECIL & MENENGAH TAHUN 2020

Pada tahun 2020, untuk mengembangkan Bisnis Kecil dan Menengah, strategi yang diterapkan BRI antara lain mengoptimalkan dan mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan lebih dinamis. Adapun strategi Bisnis Kecil dan Menengah BRI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi Platform Digital *Loan Invoice Financing*.
2. Pengembangan sistem notifikasi *point to point* bagi RM pada Aplikasi BRISpot Ritel untuk menjaga kualitas pinjaman.
3. Implementasi otomatisasi kolektibilitas.
4. Pengembangan aplikasi *Sales Planning System* dalam bisnis proses kredit menengah.
5. Optimalisasi penggunaan BRISpot Ritel untuk meningkatkan produktifitas pinjaman Ritel Komersial.
6. Menjalankan aktivitas program pemasaran Bisnis Pinjaman Kecil & Menengah yang disesuaikan dengan kondisi persaingan bisnis.
7. Optimalisasi *value chain business* khususnya dengan nasabah Korporasi potensial.
8. Disiplin implementasi forum *pipeline management* dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit yang berkualitas.
9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar (RM & BM) melalui program pendidikan dan pelatihan.
10. Melakukan kerjasama *partnership* dengan perusahaan *peer to peer (P2P) lending*.
11. *Clustering* komoditas pertanian.
12. Implementasi Fitur SMS *dunning* kepada nasabah segmen Kecil.
13. Produk/*scheme initiatives/customized* percepatan pemberian kredit untuk debitur dengan *invoices* Perseroan.

KINERJA BISNIS KECIL & MENENGAH TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Kredit Kecil dan Menengah mencapai Rp216,59 triliun, sedikit turun 1,65% yoy dibanding tahun 2019 sebesar Rp220,21 triliun.

Tren ini disebabkan oleh masih lemahnya permintaan kredit khususnya pada kredit kecil dan menengah (Non-KUR) akibat pandemi Covid-19.

Ditengah pandemi, fokus pertumbuhan Bisnis Kecil dan Menengah dilakukan dengan penyaluran kredit yang memiliki risiko rendah, seperti Kredit dengan skema Penjaminan Pemerintah (KUR Kecil dan KMK Tangguh). Pada tahun 2020 Bisnis Kecil dan Menengah mampu mencatat pertumbuhan yang signifikan pada Kredit KUR Kecil sebesar 20,65% dari Rp21,79 triliun pada 2019 menjadi Rp26,29 triliun pada 2020.

Selain itu, Bisnis Kecil dan Menengah juga telah menyalurkan KMK Tangguh sebesar Rp8,7 triliun kepada lebih dari 14 ribu debitur. KMK Tangguh adalah kredit dengan skema penjaminan pemerintah dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah.

Kredit SME BRI yang diberikan berdasarkan wilayah dan sektor di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bisnis Kecil dan Menengah

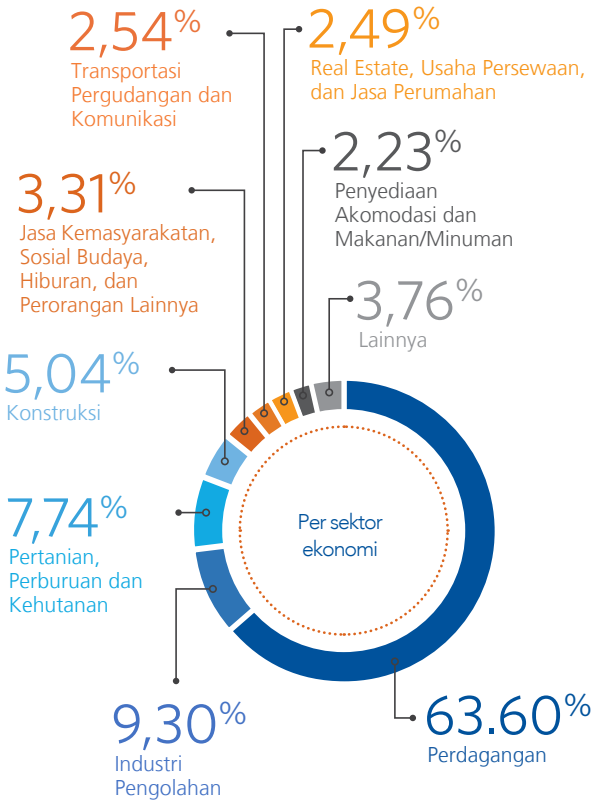

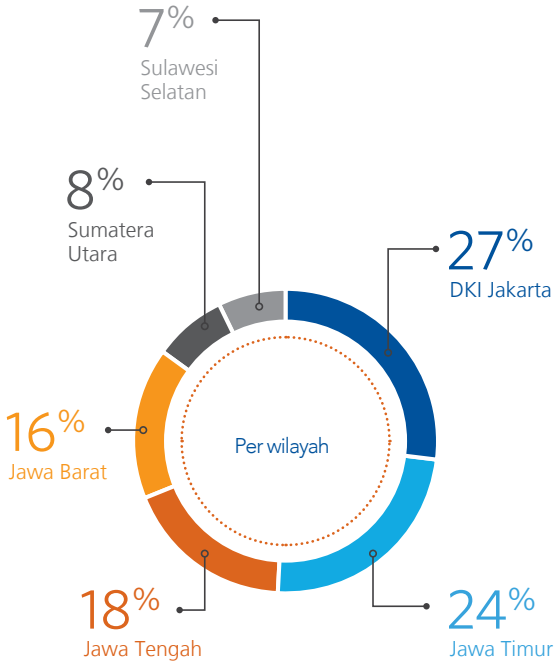

Pada Maret 2020, Direktorat Bisnis Kecil & Menengah membentuk *Value Chain Department* untuk menangkap potensi bisnis yang berasal dari bisnis *value chain* nasabah korporasi dan kelembagaan. Adapun realisasi volume pinjaman *value chain* sampai akhir tahun 2020 mencapai Rp21,53 triliun dengan jumlah rekening pinjaman *value chain* sebanyak 3.314 rekening.

Selain itu, *Value Chain Department* membuka potensi bisnis baru selama tahun 2020 melalui penambahan kerja sama dengan 10 *principal* Mitra (Pelindo 3, Pelindo 2, AKR Corporindo, Perusahaan Gas Negara (PGN), Central Proteina Prima (CPP), Semen Indonesia Group, Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI & BNPB, Unilever, Apical, serta Charoend Pokphand Indonesia). Sampai akhir tahun 2020, realisasi dari penambahan kerjasama tersebut menghasilkan volume pembiayaan Rp1,87 triliun dengan OS sebesar Rp650 miliar.

BRI juga telah melakukan sinergi dengan Fintech dalam bentuk P2P *partnership*. BRI melakukan kerjasama dengan *Fintech Investree* dengan volume penyaluran mencapai Rp436,94 miliar pada akhir 2020.

Bisnis Kecil dan Menengah

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Melalui pembiayaa Kecil & Menengah, BRI turut serta mendukung program pemerintah terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengusaha dan meningkatkan akses pengusaha-pengusaha kecil, ritel dan menengah kepada kebutuhan tambahan modal usaha, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Di masa pandemi, BRI juga turut mendukung implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain dengan melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit terdampak pandemi Covid-19, serta dengan menyalurkan Kredit Kecil dengan Skema Penjaminan Pemerintah (KMK Tangguh) yang mencapai Rp8,7 triliun kepada lebih dari 14 ribu debitur.

BRI telah mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan jumlah pengusaha kelas menengah, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

STRATEGI BISNIS KECIL & MENENGAH TAHUN 2021

Ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi segmen SME di tahun 2021, selain pemulihan sektor terdampak dan masih belum pulihnya permintaan konsumsi. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih baik dibanding 2020, didukung dengan masih berjalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021, segmen SME optimis bahwa di tahun 2021 masih akan menciptakan banyak peluang bisnis. Terdapat beberapa strategi di segmen Kecil & Menengah di tahun 2021 untuk mendukung pengembangan bisnis dengan kualitas kredit yang tetap terjaga, sebagai berikut:

1. *Selective Growth*, dengan fokus ekspansi pada sektor ekonomi yang masih sehat dan tumbuh dalam rangka menjaga kualitas kredit.
2. Bisnis Follow Stimulus, dengan fokus pembiayaan pada *Guaranteed loan* dan bersubsidi.
3. Optimalisasi bisnis *value chain*, dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.
4. Peningkatan *transaction based* dengan penguasaan CASA dan *operating account* debitur di BRI.
5. Enhancement digitalisasi *business process* di BRIspot Ritel, *Loan Invoice Financing,* dan *Sales Planning System.*
6. Optimalisasi penggunaan BRIspot Kredit Kecil untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas pinjaman.
7. Peningkatan kapasitas tenaga pemasar melalui program peningkatan kompetensi RM dan Pinca.
8. Perluasan Kerjasama partnership dengan perusahaan *peer to peer lending*.
9. Mendukung UKM naik kelas melalui SME *Boosters programs.*

BISNIS KONSUMER

KINERJA DIREKTORAT KONSUMER

Pandemic Covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat terutama yang dilakukan secara tatap muka, hal tersebut tentunya ikut merubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi perbankan, sehingga kebutuhan akan produk dan layanan yang mudah diakses melalui perangkat *mobile* dan *internet based* sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Merespon perubahan perilaku masyarakat tersebut, yang dengan cepat menyerap adaptasi digital, bank mempercepat transformasi ke dalam model bisnis baru, antara lain (1) Menyiapkan ekosistem perbankan yang saat ini sudah meluas fungisnya ke dalam 3 level, yaitu *core business, banking ecosystem, non-banking ecosystem* (2) Menjadikan bank sebagai financial supermarket (3) *Mobile first* menjadi *mobile only.*

Model bisnis tersebut dibangun di atas preferensi pelanggan (1) Bank sebagai *partner* dalam sebuah ekosistem, (2) Layanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, personalisasi dan pengalaman di setiap *touch points* nasabah (3) Mampu mengintegrasi layanan fisik dan digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat Konsumer mempercepat transformasi digital di tahun 2020 yang berfokus kepada:

1. Edukasi nasabah menggunakan produk berbasis digital (*digital onboarding*),
2. Pengembangan produk dan layanan digital,
3. Digitalisasi proses bisnis,
4. Peningkatan kompetensi pekerja agar memiliki data mindset dan digital mindset.

Sejalan dengan 3 fokus utama bisnis konsumer dalam menghimpun dana murah, ekspansi yang selektif pada kredit konsumsi dengan yield yang tinggi, dan menumbuhkan fee income yang bersumber dari transaksi, Direktorat Konsumer meluncurkan berbagai inovasi dan aktivitas di tahun 2020.

Bisnis Konsumer

BISNIS KREDIT KONSUMER

RINGKASAN KINERJA

- Kredit BRIGuna tahun 2020 mencapai Rp101,34 triliun, meningkat 0,02% dibanding tahun 2019 sebesar Rp101,32 triliun
- KPR tahun 2020 mencapai Rp35,73 triliun, meningkat 10,57% dibanding tahun 2019 sebesar Rp32,32 triliun
- KKB tahun 2020 mencapai Rp3,00 triliun, menurun -27,48% dibanding tahun 2019 sebesar Rp4,14 triliun
- Kartu Kredit & Konsumer Lainnya mencapai Rp3,61 triliun, meningkat 32,47% dibanding tahun 2019 sebesar Rp2,72 triliun

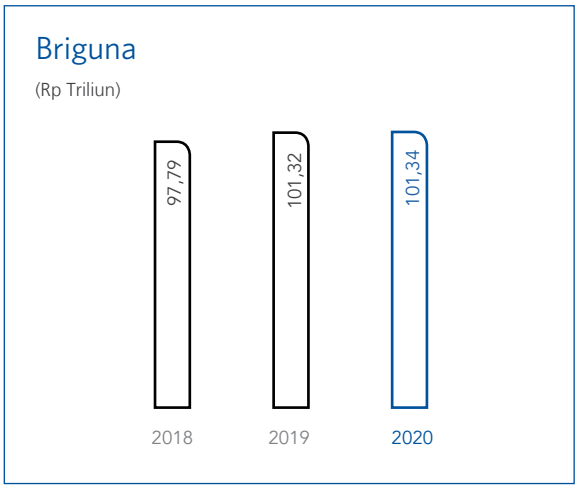

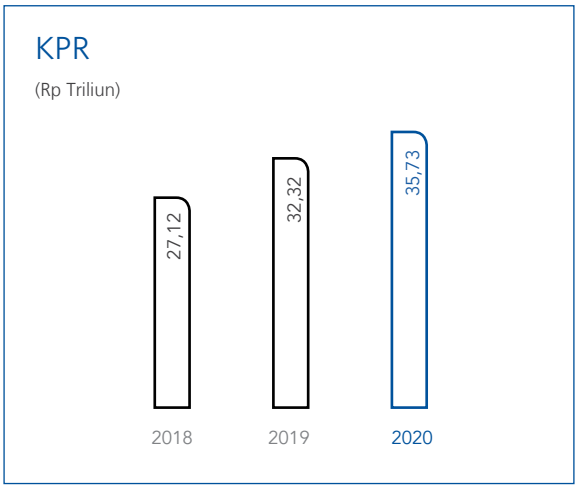

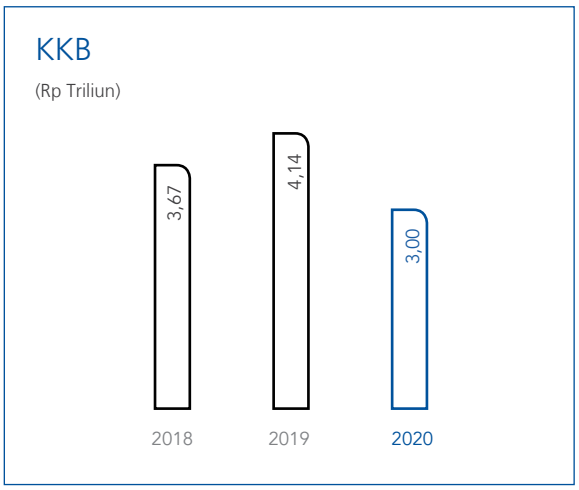

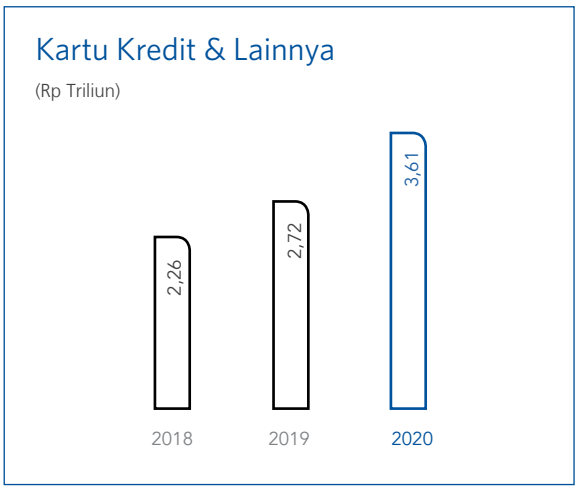

PRODUK KREDIT KONSUMER

Bisnis Pinjaman Konsumer BRI menawarkan produk yang memudahkan nasabah individu memperoleh berbagai kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, dan barang konsumsi lainnya. Pinjaman Konsumer BRI memberikan suku bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Produk-produk Pinjaman Konsumer BRI yang tersedia di tahun 2020 yaitu:

1. BRIGuna

   Kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap, dengan jenis antara lain BRIGuna Karya, BRIGuna Purna, BRIGuna Umum, BRIGuna Pendidikan, dan BRIGuna Talangan.

   BRIGuna Karya adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari BRI yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji). BRIGuna Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga non produktif. Misalnya pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

   BRIGuna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (uang pensiun). Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

   BRIGuna Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif antara lain pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

   BRIGuna Pendidikan merupakan BRIGuna khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah memiliki upah atau penghasilan tetap.

2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

   KPR merupakan kredit konsumtif perumahan baik untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan obyek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Terdapat beberapa jenis KPR yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah, yaitu:

   a. KPR Khusus ASN, TNI, dan POLRI adalah KPR Reguler BRI Non-Subsidi yang telah disesuaikan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada ASN, TNI, dan POLRI.
   b. KPR Subsidi (KPRS) dan KPR Guru & Tenaga Kependidikan, merupakan program pemberian fasilitas KPP dan KPR Sejahtera (FLPP) dari BRI kepada kalangan guru dan tenaga kependidikan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan diantaranya bebas administrasi dan biaya provisi serta suku bunga yang kompetitif.
   c. KPRS ASRI merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk didalamnya ASN, TNI, dan POLRI dengan batasan gaji pokok maksimal Rp4 juta. Produk KPRS ASRI mempunyai sejumlah keunggulan antara lain suku bunga kompetitif, bebas administrasi dan biaya provisi, uang muka minimal sesuai ketentuan *Loan to Value* (LTV), dan tenor maksimal 20 tahun atau mencapai usia pensiun.
   d. KPRS atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada MBR dengan batasan gaji pokok maksimal sebesar Rp4 juta.

3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

   KKB merupakan kredit dalam rangka pembiayaan kendaraan roda dua, roda dua premium dan roda empat yang dilakukan melalui pola langsung maupun pola kerjasama.

Bisnis Konsumer

4. Kartu Kredit
   Kartu kredit merupakan kredit tanpa agunan berbasis kartu yang memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi di merchant-merchant yang bekerja sama.

Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dalam bekerja dari rumah (*Work From Home* atau WFH) di tahun 2020, BRI juga telah memberikan kemudahan fasilitas pinjaman melalui beberapa inisiatif layanan digital yaitu produk pinjaman digital CERIA dan Paylater Card.

DIGITAL LENDING

CERIA merupakan aplikasi di *smartphone* yang memberikan nasabah kemudahan memperoleh pembiayaan yang ditransaksikan melalui *e-commerce* dengan limit maksimal hingga Rp20 juta. Produk yang telah menggunakan teknologi *digital verification*, *credit scoring*, dan *digital signature* ini dalam hal prosesnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit dengan tenor yang fleksibel sampai dengan 12 bulan, serta pengajuan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang maupun bertatap muka dengan pegawai bank.

Sedangkan Traveloka *Paylater Card* adalah sinergi BRI dengan Traveloka *Paylater* yang menciptakan ekosistem pembayaran digital secara komprehensif. Registrasi Traveloka *PayLater Card* bisa dilakukan dengan mudah oleh nasabah dari rumah dan didukung dengan verifikasi yang cepat. Persetujuan atas aplikasi dilakukan melalui proses penilaian kredit yang efisien dan canggih.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2020

Secara keseluruhan, BRI berencana menerapkan sejumlah strategi untuk pengembangan Bisnis Kredit Konsumer pada tahun 2021. Strategi tersebut antara lain:

BRIGuna

- Penawaran Briguna dengan metode *Pre-Approval*
- Pemasaran Briguna Purna melalui kerjasama dengan tenaga *Fronting*
- Pengembangan *Dashboard* Mitra Kerjasama
- Perbaikan dan mitigasi risiko dengan *New Scoring* untuk Instansi dan individu/calon debitur
- Pengembangan fitur Briguna Smart
- Pengembangan kerjasama dalam bentuk Briguna Koperasi
- *Take Over* Bank Yudha Bhakti

KPR dan KKB

- Pengembangan Sistem *Collection* KPR dan KKB
- Sinergi KKB BRI dan BRIFinance
- Penyaluran KPR Bersubsidi (FLPP, BP2BT, dan SSB)

Kartu Kredit & Digital Lending

- Optimalisasi *leads management database*
- Optimalisasi akuisisi database *merchant/partner* kerjasama
- Akuisisi *database indicative income* dengan *digital signature*
- Kartu Kredit Pemerintah untuk Satuan Kerja LN dan APBD
- *Corporate card* untuk *distributor financing*
- *Cobranding* Traveloka *Pay Later*, program *Affinity Card* (*Goes To University*)
- Akuisisi *merchant* dan nasabah untuk *digital lending* Ceria

KINERJA BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2020

Pada tahun 2020, kinerja Bisnis Pinjaman Konsumer BRI mampu tumbuh positif di tengah pinjaman konsumsi Bank Umum yang mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Bisnis Pinjaman Konsumer BRI tercatat naik menjadi Rp140,68 triliun dari sebelumnya mencapai Rp136,36 triliun di tahun 2019, atau bertumbuh 3,17% (*yoy*). Pencapaian tersebut tak lepas dari adanya pertumbuhan di hampir semua jenis pinjaman konsumer BRI.

Kualitas Pinjaman Konsumer juga dapat dijaga dengan baik oleh BRI. Hal ini terefleksi dari *Non Performing Loan* (NPL) Pinjaman Konsumer yang masih berada di level aman, meski mengalami sedikit peningkatan dari sebelumnya 1,12% di tahun 2019 menjadi 1,41% di tahun 2020.

Ada pun kinerja Bisnis Pinjaman Konsumer BRI berdasarkan jenis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BRIGuna

Outstanding Kredit BRIGuna mencapai Rp101,34 triliun, meningkat 0,02% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp101,32 triliun. Dengan capaian tersebut, Kredit BRIguna tetap menjadi pemimpin bisnis *Salary Based Loan* dengan *market share* tercatat sebesar 27,4%. Selain itu, BRIGuna juga masih menjadi kontributor terbesar pinjaman konsumer BRI dengan porsi mencapai 70,53%. NPL BRIGuna pun dapat di jaga di bawah 1%, tepatnya sebesar 0,93%.

Pada tahun 2020 proses pengajuan Briguna telah berjalan 100% secara digital melalui platform digital yang telah terintergrasi dan dapat diakses oleh calon debitur yaitu melalui BRISPOT Eksternal.

Untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pensiun, BRI juga telah bersinergi dengan Taspen menghadirkan BRIGuna Kios Warga di tahun 2020. BRIGuna Kios Warga yang merupakan fasilitas pembiayaan dengan syarat mudah dan ringan ini turut disertai program pelatihan, sehingga usaha nasabah dapat tumbuh dengan baik dan mendukung sektor Mikro sebagai penopang ekonomi nasional.

KPR

Outstanding KPR BRI telah mencapai Rp35,73 triliun, meningkat 10,61% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp32,32 triliun. Pertumbuhan dua digit tersebut turut mendorong porsi KPR terhadap Pinjaman Konsumer dari sebelumnya 23,00% di tahun 2019 meningkat menjadi 24,87%, serta sekaligus menguatkan *market share* KPR BRI di industri menjadi lebih dari 7%, sedangkan kualitas KPR BRI tetap berada di level yang terjaga dengan baik yakni 2,63%.

Di tahun 2020, KPR BRI juga telah tercatat sebagai pionir akad kredit massal secara *online* untuk penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain sebagai wujud mendukung penuh program Pemerintah, upaya tersebut juga sebagai tekad BRI untuk selalu melakukan inovasi utamanya dalam kondisi *social distancing* di masa pandemi. Langkah strategis ini menjadi kebanggan tersendiri bagi BRI karena telah dijadikan contoh oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada bank penyalur FLPP lainnya. Selain itu, BRI aktif menyelenggarakan kegiatan Webinar Series berkelanjutan mulai dari edukasi investasi hingga tips memiliki rumah untuk milenial.

Saat ini, KPR juga sudah dapat diajukan melalui aplikasi BRISPOT, sehingga nasabah semakin mudah untuk melakukan pengajuan KPR. Hasil usaha BRI untuk terus melakukan inovasi selama masa pandemi mampu ditunjukkan melalui angka pertumbuhan kredit KPR YoY di tahun 2020 sebesar 10,57%.

KKB

Outstanding KKB BRI mencapai Rp3,00 triliun, menurun -27,48% dibanding tahun 2019 yang tercapai Rp4,14 triliun. Penurunan ini lebih disebabkan per 1 Oktober 2020 BRI telah menunjuk BRI Finance sebagai penyalur kredit KKB Langsung dalam rangka sinergi dengan perusahaan anak, serta terjadinya kelesuan penjualan kendaraan bermotor di hampir sepanjang tahun 2020, yang dipicu turunnya permintaan karena pandemi. Dampak pandemi juga berpengaruh pada NPL KKB BRI yang menjadi 2,03% atau meningkat dibanding tahun 2019, sebagaimana NPL KKB Bank Umum yang tengah mengalami tekanan kenaikan sejak pandemi terjadi di triwulan pertama tahun 2020.

Kartu Kredit

Outstanding Kartu Kredit BRI tercatat sebesar Rp3,52 triliun, tumbuh melesat hingga 31,41% dibanding tahun 2019 yang masih sebesar Rp2,68 triliun. Peningkatan ini antara lain didukung adanya inisiatif

Bisnis Konsumer

BRI yang menguatkan layanan digital yaitu produk pinjaman digital CERIA dan Traveloka Paylater Card, di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah selama tahun 2020.

Digital Lending

Performa Pinjaman Konsumer Digital BRI melalui aplikasi CERIA telah menunjukkan perkembangan signikan di tahun 2020. *Outstanding*-nya tercatat mencapai Rp21,2 miliar dengan volume penjualan dan jumlah penggunanya masing-masing sebesar Rp61 miliar dan 11.676 pengguna.

Sedangkan *outstanding* Pinjaman Konsumer Digital BRI via Traveloka *Paylater Card* tercapai Rp342,2 miliar dengan volume penjualan sebesar Rp680,1 miliar. Untuk pengguna yang telah memanfaatkan Traveloka *Paylater Card* jumlahnya telah mencapai 44.819 pengguna per tahun 2020.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI senantiasa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program Pemerintah adalah mengatasi kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan perumahan (backlog). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan perumahan dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). BRI turut mendukung langkah tersebut dengan menyalurkan kredit FLPP ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri.

Selain itu, Bisnis Konsumer juga mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain dengan melakukan upaya restrukturisasi Kredit yang terdampak pandemi Covid-19.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2021

Di tahun 2021, Bisnis Kredit Konsumer akan terus meningkatkan pertumbuhan kredit yang sehat dengan strategi antara lain:

- Penguatan Briguna sebagai *market leader salary based loan* melalui *Digital Onboarding*
- Peningkatan *market share* KPR di wilayah *suburban*
- *Fully digital product & digitalization* proses bisnis (BRISPOT *Consumer for Customer*)
- Kerjasama Co-Brand *Credit Card* untuk melayani berbagai segmen
- Penetrasi CERIA yang lebih agresif sebagai produk *Digital Lending*

BISNIS SIMPANAN RITEL

RINGKASAN KINERJA

- Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Ritel mencapai 30,25 juta rekening, meningkat 8,89% dibanding tahun 2019 sebesar 27,78 juta rekening
- Dana Pihak Ketiga Ritel mencapai Rp410,30 triliun meningkat 9,57% dibanding tahun 2019 sebesar Rp374,45 triliun
- CASA Ritel mencapai Rp239,97 triliun, meningkat 9,35% dibanding tahun 2019 sebesar Rp219,44 triliun
- Giro Ritel mencapai Rp70,11 triliun, meningkat 8,33% dibanding tahun 2019 sebesar Rp64,71 triliun
- Tabungan Ritel mencapai Rp169,91 triliun, meningkat 9,81% dibanding tahun 2019 sebesar Rp154,73 triliun

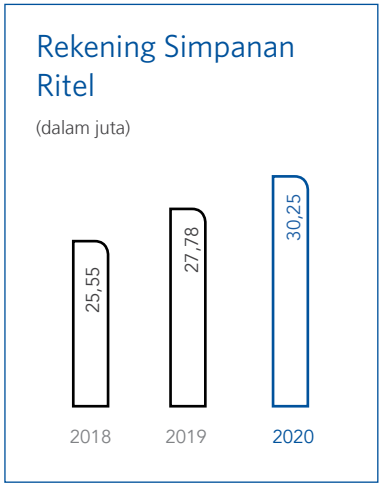

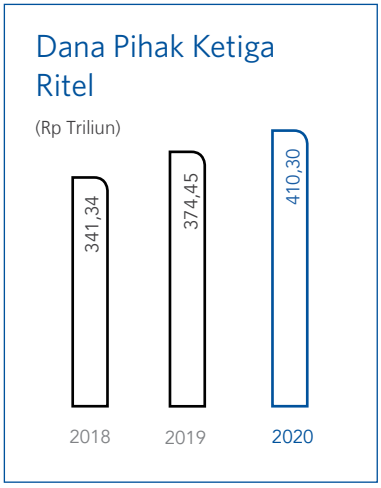

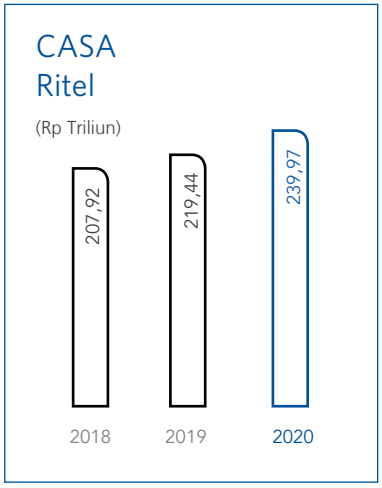

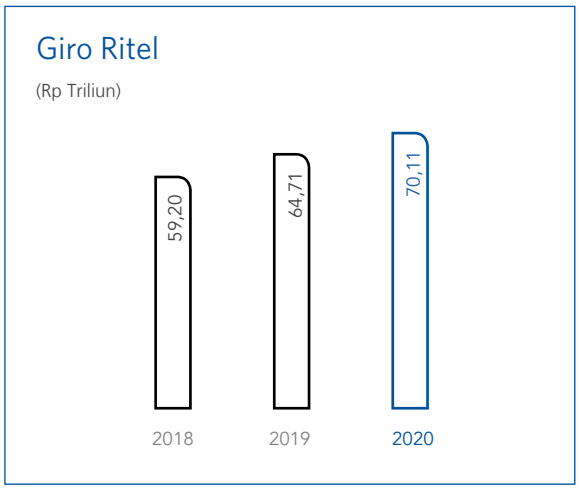

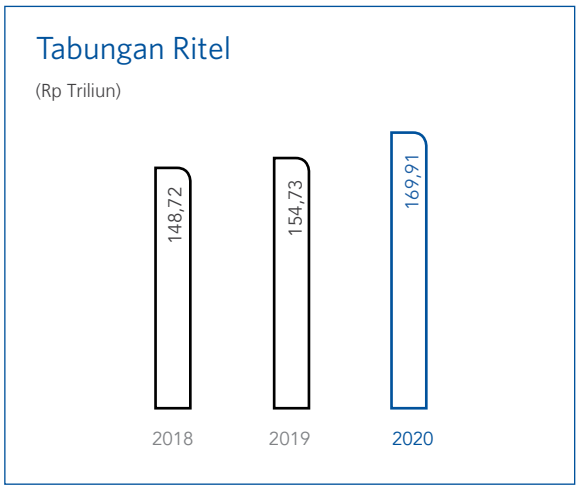

Bisnis Simpanan Ritel

PRODUK BISNIS SIMPANAN RITEL

BRI memiliki produk Simpanan Ritel yang beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah. Pada tahun 2020, produk Simpanan Ritel antara lain:

Tabungan BRI BritAma Umum

Produk Tabungan BritAma Umum memberikan nasabah beragam kemudahan bertransaksi perbankan dengan dukungan fasilitas *e-banking* dan *system real time online*, sehingga memungkinkan nasabah bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Tabungan BritAma Umum ini juga menyediakan gratis perlindungan asuransi kecelakaan, fitur *e-banking* yang lengkap, dan suku bunga yang kompetitif.

Tabungan BRI BritAma Bisnis

Produk Tabungan BritAma Bisnis memberikan nasabah beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis, dengan di dukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Tabungan BritAma Bisnis juga memiliki gratis perlindungan asuransi kecelakaan, fitur *e-banking* yang mumpuni, suku bunga yang kompetitif, serta pencatatan transaksi lebih detil pada buku Tabungan dan pengiriman rekening koran melalui *email*.

Tabungan BRI BritAma Muda

Produk Tabungan BritAma Muda memberikan desain kartu debit khusus yang elegan untuk segmen anak muda, serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang di dukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online*. Sehingga akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Selain ketiga produk simpanan diatas, BRI juga memiliki produk simpanan yang kompetitif pada segmennya seperti :

1. Tabungan BRI Junio dan Junio Rencana
2. Tabungan BritAma Rencana
3. Tabungan BritAma Mitra
4. Tabungan BritAma TKI
5. Tabungan BritAma Valas (USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR)
6. Tabungan SiMuda
7. Dan Tabungan Haji

DEPOBRI (Deposito BRI)

Deposito BRI sebagai pilihan investasi bagi nasabah tersedia dalam berbagai pilihan mata uang, baik Rupiah maupun valas dengan suku bunga yang kompetitif. Produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan produk tabungan. Untuk kemudahan pembukaan rekening, nasabah diberikan pilihan pembukaan melalui unit kerja BRI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia atau melalui *Internet Banking*.

Dengan setoran awal yang terjangkau, nasabah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih mekanisme pemberian bunga, baik langsung diberikan melalui rekening ataupun ingin ditambahkan ke dalam komponen pokok deposito (*add on*). BRI telah mengembangkan produk Deposito *Scriptless* untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang memiliki banyak bilyet. Deposito *Scriptless* merupakan deposito yang bukti penempatan dananya berupa *email* notifikasi agar para nasabah dapat mengelola rekening depositonya lebih efektif dan efisien.

STRATEGI BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2020

Pada tahun 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI difokuskan pada perolehan dana murah yaitu Giro dan Tabungan (*Current Account Saving Account* atau CASA). Aktivitas pemasarannya dilakukan dengan berpedoman pada tiga pilar strategi, yaitu akuisisi, retensi, dan *maintenance*. BRI dalam pengembangan Bisnis Simpanan Ritel juga telah melakukan terobosan mutakhir, yaitu BRI *Digital Saving* yang merupakan platform pembukaan rekening BRI secara *fully digital*. BRI *Digital Saving* telah ditempatkan di berbagai Channel BRI, serta di sejumlah aplikasi/website pihak ketiga yang bekerjasama dengan BRI seperti Traveloka, Grab, Link Aja, BliBli, OVO dan Bukalapak.

BRI juga membangun platform digital, sebagai solusi yang ditawarkan untuk berbagai ekoistem, seperti BRIMOLA bagi para pelaku usaha LPG 3 kg, Smart billing bagi para pelaku usaha real estate, property dan usaha retail lainnya serta Junio Smart bagi sekolah, orang tua, dan murid yang juga berdampak pada

peningkatan CASA Ekosistem, dimana pada posisi Desember 2020 menghasilkan Rp24,73 triliun

Sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah, BRI telah meluncurkan *program loyalty* terbaru yaitu BritAma FSTVL di tahun 2020. Program tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kesetiaan dan loyalitas seluruh nasabah tabungan BritAma untuk dapat berkesempatan memenangkan ratusan hadiah menarik dengan Hadiah *Grand Prize* Toyota Velfire.

Sejalan itu, BRI juga telah melaksanakan berbagai program, baik di tingkat lokal maupun program nasional. Program yang dijalankan menyasar kepada fokus strategi seperti *Focus Ecosystem Payment*, Optimalisasi *Database*, dan *Managing Sales Force*. Ada pun beberapa program yang dijalankan selama tahun 2020 antara lain:

1. Program Giro RTGS Out
2. BritAma FSTVL
3. BRI Poin
4. Merchant Program
5. Program IBBIZ
6. RM Investasi
7. RM Digital Ambasador

Selain program pemasaran, upaya meningkatkan CASA juga dilakukan melalui aktivitas *cross selling* khususnya dengan nasabah pinjaman ritel, menengah, konsumer, dan *Value Chain* korporasi.

KINERJA BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Dana Pihak Ketiga Ritel BRI mengalami peningkatan 9,57% (*yoy*) menjadi Rp410,30 triliun dari sebelumnya sebesar Rp374,45 triliun di tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah rekening Bisnis Simpanan Ritel yang mencapai 30,25 juta rekening, atau tumbuh 8,89% dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 27,80 juta rekening.

Berdasarkan jenis simpanan ritel, Giro Ritel BRI meningkat menjadi Rp70,11 triliun atau tumbuh 8,33% (*yoy*) dibanding tahun 2019 sebesar Rp64,71 triliun. Tabungan Ritel BRI juga mengalami peningkatan menjadi Rp169,91 triliun, meningkat 9,81% dibanding tahun 2019 sebesar Rp154,73 triliun. Peningkatan kedua sumber dana murah tersebut membuat CASA Ritel BRI mencapai Rp239,97 triliun, meningkat 9,35% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp219,44 triliun.

Adapun performa layanan ***Digital Saving*** BritAma selama enam bulan pertama sejak diluncurkan BRI pada 7 Juli 2020, disambut dengan dengan baik. Hal ini tercermin dari jumlah pembukaan rekening baru melalui *Digital Saving* tercatat telah mencapai lebih dari 172 ribu rekening per Desember 2020. Nilai simpanan per rekeningnya juga terus menunjukkan peningkatan, di mana per Desember 2020 tercatat sebesar Rp3,2 juta per rekening.

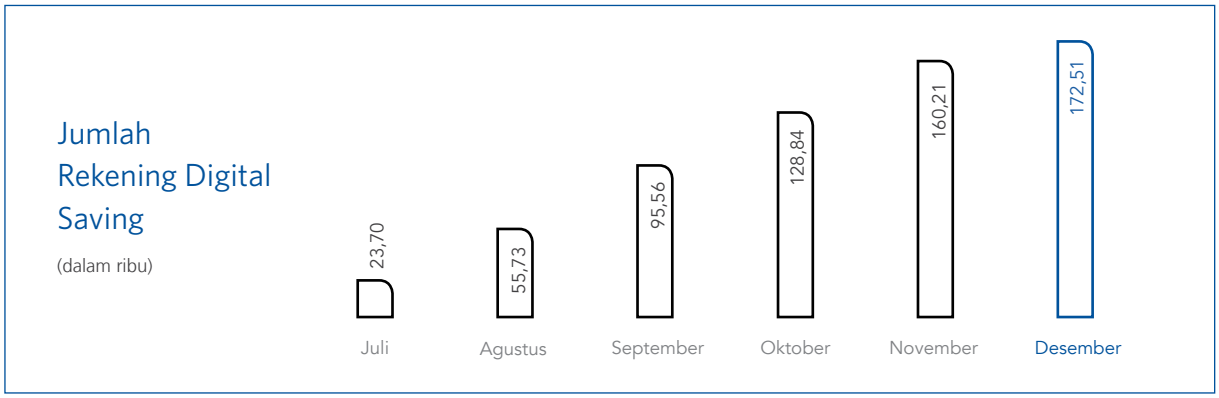

Bisnis Simpanan Ritel

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu ditunjukkan antara lain melalui produk tabungan BRI SiMuda yang mendukung program OJK untuk melaksanakan literasi keuangan serta memberikan edukasi dalam mengenalkan instrumen asuransi dan investasi reksa dana kepada pemuda.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bisnis Simpanan Ritel akan tetap fokus meningkatkan penghimpunan CASA dengan memanfaatkan teknologi digital. Strategi pengembangan Bisnis Simpanan Ritel 2021, antara lain:

1. Digitalisasi onboarding yang berkelanjutan untuk memudahkan pembukaan rekening Tabungan, dengan pengembangan *Digital Saving* menggunakan teknologi *face recognition* dan *digital signature*.
2. Memperluas akses pembukaan rekening secara digital pada *platform* Internal BRI, platform Perusahaan anak, dan bekerjasama dengan *platform e-commerce*, fintech dan platform digital pihak ketiga lainnya.
3. *Solution selling*, dengan mengedepankan *bundling offer product* sebagai solusi atas kebutuhan nasabah dalam upaya membangun *ecosystem* payment di emerging *ecosystem*.
4. Meluncurkan program *loyalty* dengan *campaign* yang menarik seperti Britama FSTVL dan BRI Point.
5. Memperkuat *cross selling culture* di lingkungan pekerja dan RM Dana
6. Mengembangkan platform *digital ecosystem* dalam upaya membangun eksosistem *payment* di lingkungan sekolah, Universitas, Hunian dan Retailer

BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

RINGKASAN KINERJA

- Fee Based Income Ritel mencapai Rp7,63 triliun meningkat 8,73% dibanding tahun 2019 sebesar Rp7,01 triliun
- Jumlah transaksi internet banking mencapai 2,72 miliar meningkat 132,2% dibanding tahun 2019 sebesar 1,17 miliar

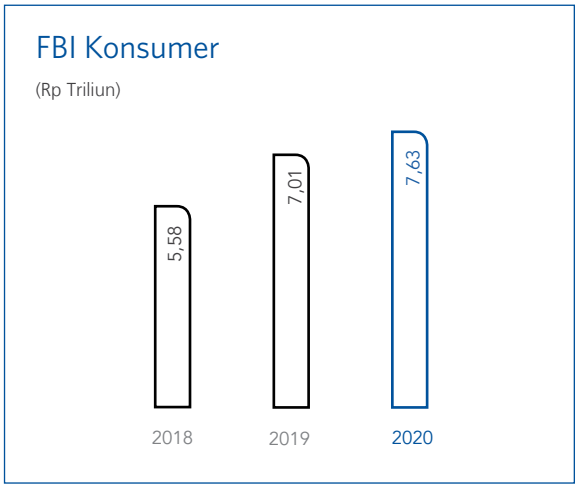

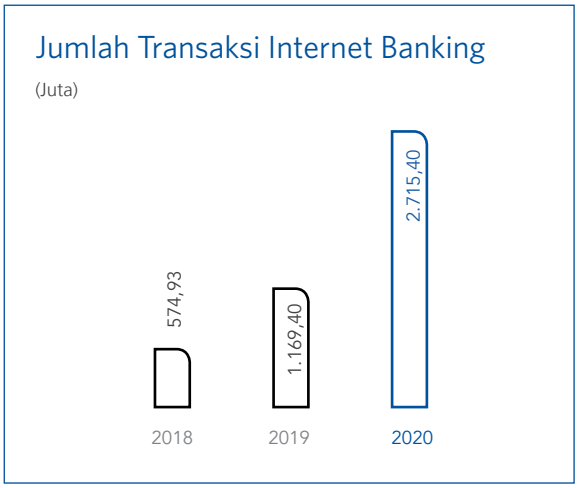

PRODUK BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi momentum BRI mengakselerasi tranformasi digital untuk melayani nasabah dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih aman. Transformasi digital dilakukan dengan menghadirkan produk dan inovasi digital sebagai jawaban terhadap kebutuhan nasabah di era kenormalan baru. Platform digital yang mengedepankan *customer centric* dan *customer experience* yang telah dihadirkan BRI kepada nasabah di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Internet Banking BRI

Merupakan salah satu Fasilitas perbankan yang dapat dipergunakan nasabah untuk mengakses rekening simpanan melalui jaringan internet. Internet banking BRI memiliki beragam keunggulan seperti mudah dipahami dan digunakan, nasabah bisa bertransaksi perbankan dengan aman dan setiap saat.

SMS Banking BRI

Layanan *e-banking* BRI yang satu ini dapat digunakan untuk mengakses rekening simpanan nasabah melalui ponsel. SMS banking BRI akan melayani kebutuhan transaksi perbankan nasabah dengan dua jenis layanan, yakni berbasis menu dan *plain text*. SMS berbasis menu yaitu layanan SMS *Banking* yang menggunakan menu sebagai perintah transaksinya. Sementara *plain text* merupakan layanan SMS *Banking* dengan mengirimkan perintah transaksi yang akan dilakukan ke nomor 3300.

BRImo

BRImo merupakan aplikasi keuangan digital BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi dengan *user interface* dan *user experience* (UI/UX). Fitur-fitur menarik lainnya seperti *online opening account*, tarik tunai tanpa kartu, alias rekening, info promo, login dengan *fingerprint* /

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

face id, dan mutasi rekening sampai dengan 12 bulan. Tahun 2020, telah dilakukan perubahan pada tampilan dan beberapa penambahan fitur untuk melengkapi kebituhan nasabah yang saat ini terus berkembang. Kedepannya diharapkan Brimo dapat menjadi *one stop solution* untuk seluruh customer BRI.

BRIZZI

Merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lainnya yang disediakan oleh penyedia barang atau jasa. Semua transaksi BRIZZI dapat dilakukan di seluruh merchant dengan menggunakan mesin EDC BRI. Isi ulang (*top up*) BRIZZI saat ini juga mudah dan dapat dilakukan di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan BRI, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Yomart, dan lain-lain. Selain itu, kartu BRIZZI juga dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran jalan tol, KRL, parkir, maupun transportasi umum lainnya seperti Transjakarta.

Wealth Management

Wealth Management BRI memiliki beragam produk investasi untuk memudahkan nasabah yang ingin meningkatkan nilai aset yang dimilikinya. Produk investasi *Wealth Management* BRI antara lain Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, Surat Berharga Negara (SBN) yang diritelkan Valas (INDON & INDOIS), SBN yang diritelkan Rupiah, *Swap Deposit*, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Selain produk investasi tersebut, BRI bekerja sama dengan Manajer Investasi terpercaya dan terkemuka yang memiliki beragam varian produk Reksa Dana, antara lain Reksa Dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan Reksa Dana terproteksi.

BRI memiliki produk investasi *Bancassurance* dengan *selling point* tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Portofolio nasabah *Bancassurance* BRI terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen mikro, ritel, dan prioritas.

Layanan BRI Prioritas memberikan pelayanan dan jasa perbankan bagi Pribadi Terpilih BRI Prioritas, yang tidak hanya mencakup pelayanan dan jasa perbankan secara umum, namun juga jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*Bancassurance*), serta perencanaan dana pensiun.

STRATEGI BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2020

Beberapa program dan strategi yang dilakukan BRI untuk mengembangkan Bisnis Jasa Perbankan Ritel di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pertumbuhan *Fee Based Income*.
2. Meningkatkan *service excellence* terutama pada peningkatan reliabilitas dan koneksi jaringan sistem dengan pengelolaan *database* yang lebih baik.
3. Fokus peningkatan pengguna kartu debit dan fitur SMS notifikasi, serta sekaligus *bundling* dengan peningkatan jumlah pengguna BRImo sebagai *super-apps*.
4. Fokus akuisisi *merchant* sesuai segmen MIWON (*Millenial*, *Women*, *and Netizen*).
5. Perluasan kerjasama dengan *merchants e-commerce*.
6. Ekosistem transaksi melalui produk-produk BRI.
7. Perluasan akseptasi BRIZZI.

KINERJA BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2020

Selama tahun 2020, jumlah transaksi **Internet Banking BRI** (termasuk BRImo) tercatat tumbuh 132,20% (*yoy*) menjadi 2,72 miliar dibanding tahun 2019 sebanyak 1,17 miliar transaksi. Sedang jumlah transaksi **BRImo** sendiri melesat hingga 660,48% (*yoy*), dari sebelumnya 100,70 juta transaksi di tahun 2019 menjadi 765,80 juta transaksi. Sehingga secara kontribusi, jumlah transaksi BRImo terhadap jumlah transaksi Internet Banking BRI turut mengalami peningkatan pesat dari 8,61% di tahun 2019 menjadi 28,20% di tahun 2020.

Launched in 2019, BRIMo is Internet-based digital financial application using newest UI/UX, providing attractive features e.g online opening account, Card-less cash with drawal, and fingerprint / face ID login

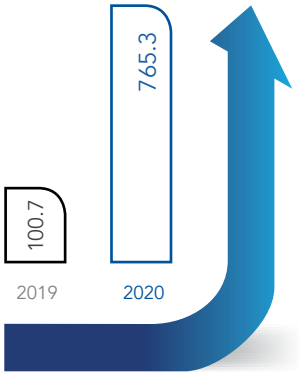

(dalam Juta)

660,5%
YOY

Sementara dari sisi pengguna Internet Banking BRI (termasuk BRImo), jumlahnya juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 25,92 juta pengguna atau tumbuh 33,17% (*yoy*) (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Terjadinya tren peningkatan transaksi dengan berbagai platform digital mempengaruhi transaksi *e-banking* konvensional seperti **ATM** mengalami perlambatan pertumbuhan. Per tahun 2020, jumlah transaksi ATM BRI hanya bertumbuh 0,59% (*yoy*), dari sebelumnya 3,72 miliar transaksi di tahun 2019 menjadi 3,75 miliar transaksi.

Perkembangan kinerja **BRIZZI** juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2020. Hal ini terefleksi dari jumlah kartu BRIZZI yang bertambah menjadi 19,34 juta kartu atau tumbuh 15,20% (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan kinerja ***Wealth Management*** BRI juga mencatatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19 selama tahun 2020. Dana kelolaan atau *Asset Under Management* (AUM) pada *Wealth Management* BRI mencapai Rp131,77 triliun atau tumbuh sebesar 13,42% pada November 2020). Peningkatan ini terutama disebabkan nasabah mengatur ulang

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

perencanaan keuangannya kembali agar tetap stabil dan mencegah atau mengurangi risiko finansial di masa pandemi. Seiring peningkatan AUM, *Fee Based Income* dari produk investasi dan *bancassurance* BRI juga meningkat siginifikan hingga 28,46% (*yoy*).

Instrumen investasi yang menjadi andalan untuk ditawarkan ke nasabah atau investor melalui layanan *Wealth Management* BRI di tahun 2020 adalah SBN, karena merupakan salah satu instrumen investasi aman yang diterbitkan pemerintah. Penjualan SBN oleh BRI meningkat hampir dua kali dari penjualan tahun sebelumnya, yakni sebesar 185% (*yoy*) dengan *market share* penjualan mendekati 12%. Sebagai mitra distribusi, BRI mencatat total penjualan SBN Ritel pada *primary market* sebesar Rp9 triliun selama tahun 2020. Selain itu, bisnis *bancassurance* juga menunjukkan peningkatan khususnya produk Asuransi Jiwa dan Kesehatan di era pandemi.

Untuk meningkatkan layanan *Wealth Management* di tahun 2020, BRI telah melakukan beberapa upaya antara lain memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada nasabah, serta mempersiapkan *Relationship Manager (*RM) yang handal dan profesional dari Sentra Layanan BRI Prioritas untuk dapat memberikan layanan *advisor*. RM tersebut dapat bertindak sebagai *Financial Advisor* bagi nasabah dan memberikan referensi produk-produk bank atau non-bank apa saja yang sesuai dengan profil risiko nasabah. Hal tersebut akan sangat membantu Milennials yang belum terlalu paham terkait bagaimana cara berinvestasi.

Bisnis Konsumer berkontribusi sebesar 50,2% terhadap total FBI BRI di tahun 2020 dengan pencapaian sebesar Rp7,63 triliun, tumbuh secara positif sebesar 8,7% (YoY) dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7,01 triliun. Perolehan FBI yang berasal dari transaksi sebesar 60,1% dari total FBI Konsumer di tahun 2020.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen penuh mendukung program Pemerintah termasuk yang terkait dengan peningkatan literasi keuangan dan penyediaan alat pembayaran elektronik. Dukungan BRI terhadap peningkatan penggunaan alat pembayaran elektronik diantaranya dilakukan melalui BRImo yang merupakan aplikasi keuangan digital berbasis data internet dan kartu BRIZZI yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran seperti jalan tol, belanja, dan lain sebagainya.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bisnis Jasa Perbankan Ritel akan terus meningkatkan penghimpunan fee khususnya berbasis transaksi digital, dengan strategi antara lain:

1. Mendukung visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 melalui produk pembayaran untuk menciptakan *closed payment transaction*
2. *Reinventing* bisnis *Wealth Management*
3. *Sistem Penunjang Layanan Nasabah Prima*
4. *BRImo Super Apps*
5. *Global Payment Collaboration*
6. *Cross selling* produk BRI Group melalui *sales culture program*
7. Memperkuat p*ayment ecosystem* mikro dan ritel

SEGMEN BISNIS KORPORASI

RINGKASAN KINERJA

- Laba Bisnis Korporasi pada tahun 2020 mencapai Rp1,14 triliun, meningkat 126,95% dibanding tahun 2019 sebesar Rp500,99 miliar
- Kredit Bisnis Korporasi pada tahun 2020 mencapai Rp168,99 triliun, menurun 11,57% dibanding tahun 2019 sebesar Rp191,09 triliun.
- Dana Pihak Ketiga Bisnis Korporasi pada tahun 2020 mencapai Rp306,94 triliun, meningkat 2,75% dibanding 2019 sebesar Rp295,73 triliun
- Fee Based Income Bisnis Korporasi pada tahun 2020 mencapai Rp2,32 triliun, meningkat 7,31% dibanding tahun 2019 sebesar Rp2,16 triliun

Laba Bisnis Korporasi

(Rp Miliar)

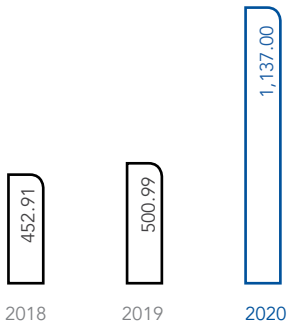

Kredit Bisnis Korporasi

(Rp Triliun)

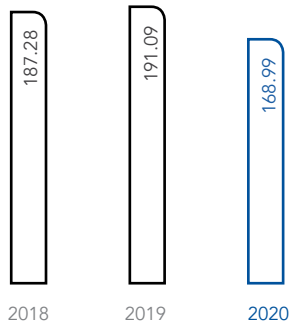

Dana Pihak Ketiga Bisnis Korporasi

(Rp Triliun)

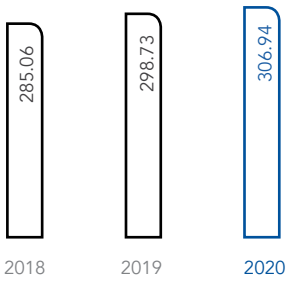

Fee Based Income Bisnis Korporasi

(Rp Triliun)

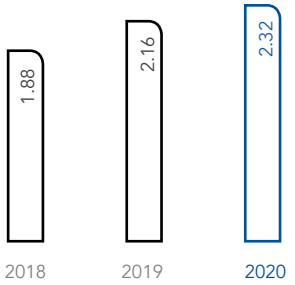

BISNIS KORPORASI BUMN, DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN & BUMN

Kondisi ekonomi dunia dan Indonesia yang melemah akibat pandemi Covid-19, menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan nasional, tidak terkecuali BRI maupun para *customer* di Bisnis BUMN, dana institusi, dan *transaction banking*. Persaingan yang semakin ketat di perbankan, juga menambah tantangan dan dinamika di tahun 2020. Meski demikian, Direktorat Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI telah dapat melalui tantangan tersebut dengan kinerja yang terjaga. Hal ini tak lepas dari upaya BRI dalam menerapkan berbagai program dan strategi yang tepat. Secara garis besar, program dan strategi Bisnis BUMN, Dana Institusi dan Transaction Banking di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan pinjaman secara selektif.
2. Meningkatkan kualitas aset.
3. Meningkatkan *fee based income* & pendapatan operasional lainnya melalui *transaction banking*.

Direktorat Hubungan Kelembagaan dan BUMN juga telah mengambil langkah inisiatif untuk memastikan bisnisnya tetap berkembang dengan baik di tahun 2020. Beberapa langkah inisiatif yang telah ditempuh antara lain mengakselerasi transformasi organisasi dan *Human Capital*, serta peningkatan layanan kepada nasabah yang termasuk didalamnya penyempurnaan dari sisi produk dan platform yang berbasis digital.

Selain melanjutkan beberapa strategi dan inisiatif tahun 2020 yang masih efektif untuk memperkuat kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, Direktorat Hubungan Kelembagaan dan BUMN juga akan menerapkan sejumlah strategi lain. Diantaranya meningkatkan rasio CASA melalui layanan transaksi dan optimalisasi *value chain* agar menaikkan profitabilitas; menjadikan bank garansi sebagai salah satu produk unggulan di tahun 2021; meningkatkan bisnis *trade finance*; serta *enhanchement* platform *cash management system*, *trade finance*, *supply chain*, dan bank garansi, baik dari sisi kelengkapan fitur maupun reliabilitas.

BISNIS KREDIT KORPORASI BUMN

RINGKASAN KINERJA

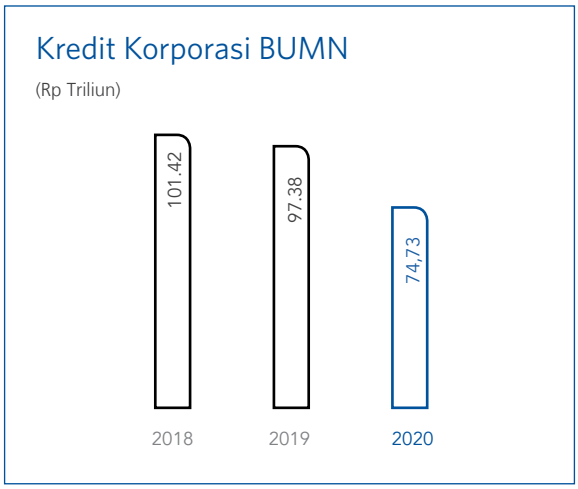

- Kredit Korporasi BUMN mencapai Rp74,73 triliun, atau menurun 23,26% dibanding tahun 2019 sebesar Rp97,38 triliun.

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS KORPORASI BUMN

Cakupan produk dan layanan Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di BRI meliputi pengelolaan simpanan, pemberian berbagai jenis fasilitas pembiayaan, serta pelayanan beragam *transaction banking* dan layanan jasa perbankan bisnis. Sektor-sektor usaha yang dilayani oleh Bisnis Korporasi BUMN antara lain sektor infrastruktur, konstruksi, komoditi dari hulu ke hilir beserta bisnis pendukungnya, manufaktur, transportasi, energi, dan sektor jasa.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, di tengah tantangan pandemi Covid-19 pengembangan Bisnis Korporasi BUMN yang dilakukan BRI difokuskan pada penyaluran kredit yang lebih selektif; perbaikan kualitas kredit dengan menyusun *exit strategy* bagi debitur yang bermasalah, penyempurnaan sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran kredit serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan optimalisasi profitabilitas bisnis dengan meningkatkan transaksi bisnis nasabah melalui pengembangan sistem layanan yang terintegrasi.

Bisnis Kredit Korporasi BUMN

Ada pun inisiatif strategi BRI lainnya dalam upaya pengembangan Bisnis Korporasi BUMN tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan implementasi *client service team* sebagai pendekatan terintegrasi dalam melayani nasabah korporasi.
2. Melakukan tinjauan proses kredit (*simplified* & *regularly review*) terhadap kondisi terkini nasabah.
3. Mengoptimalkan penggunaan *Dashboard* Korporasi.
4. Melakukan implementasi *Fraud Detection System*.
5. Mengembangkan *tools Early Warning System* (EWS) Korporasi.
6. Mengoptimalkan kegiatan yang mengacu pada *Building World Class Wholesale Bank* (*Industry Specialist*, *Enhance in Wider Business Perspective*, *Benchmarking*, *Negotiating and Advisory Skill*, IRA).

KINERJA BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2020

Selama tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang luar biasa pada dinamika perekonomian dunia dan Indonesia. Kinerja Bisnis Korporasi BUMN di BRI pun turut terkena dampaknya. Hal ini tercermin dari *outstanding* kredit Bisnis Korporasi BUMN yang mengalami kontraksi menjadi Rp74,73 triliun dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp97,38 triliun.

Tren penurunan kredit pada segmen korporasi, sejalan dengan strategi BRI di masa pandemi yang selektif melakukan penyaluran kredit, dan lebih fokus pada pertumbuhan pada segmen UMKM.

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan outstanding disumbang oleh Sektor Oil And Gas, Sektor Manufaktur, dan Sektor Agribisnis. Sementara sektor ekonomi yang mengalami peningkatan antara lain Sektor Transportasi, Infrastruktur dan Sektor Konstruksi.

Kredit Korporasi BUMN berdasarkan Sektor Ekonomi

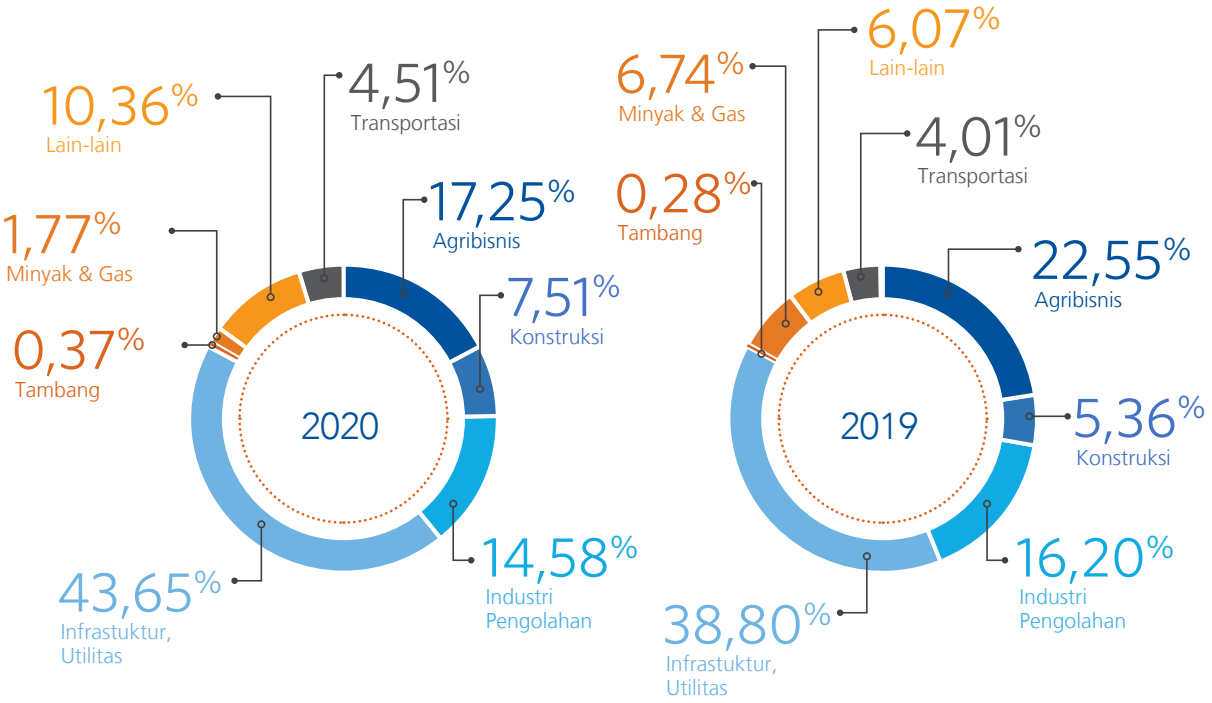

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Sepanjang tahun 2020, Bisnis Korporasi BUMN berperan aktif dalam mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah, antara lain pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, BUMN terlibat dalam pengerjaan proyek mulai dari pembiayaan sampai pelaksanaan teknis.

BRI sebagai salah satu BUMN di sektor jasa keuangan, memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut melalui pembiayaan sindikasi maupun skema lainnya. Selain itu BRI juga ikut serta dalam pembiayaan terhadap BUMN untuk mendukung transaksi-transaksi ekspor dan impor dalam mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Selama tahun 2020, Divisi BUMN memberikan dukungan terhadap program pemerintah yaitu sbb. :

1. Pembiayaan kepada sektor infrastruktur yang termasuk Proyek Strategis Nasional diantaranya pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, pembangkit listrik, pelabuhan , bandara dengan skema bilateral maupun sindikasi dengan bank lain.
2. Pembiayaan kepada sektor energi yaitu pemberian kredit melalui PLN dalam rangka penyelesaian proyek 35.000 MW.
3. Pembiayaan kepada sektor transportasi yaitu pemberian kredit melalui KAI dalam rangka pembangunan LRT Jabodebek.
4. Pengadaan Vaksin Covid-19.
5. Berperan aktif dalam penyelamatan perekonomian melalui restrukturisasi di segmen korporasi.
6. Selain itu BRI juga ikut serta dalam pembiayaan terhadap BUMN untuk mendukung transaksi-transaksi ekspor dan impor dalam mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2021

Pada tahun 2021, upaya BRI untuk mengembangkan Bisnis Korporasi BUMN tetap berfokus pada peningkatan kredit yang dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan kualitas kredit, dan memaksimalkan profitabilitas terutama dari lini bisnis *transaction banking*. Adapun strategi BRI lainnya dalam upaya pengembangan Bisnis Korporasi BUMN di tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan implementasi *client service team* sebagai bentuk pelayanan *integrated banking solution* kepada nasabah korporasi.
2. Melakukan *Loan Review* terhadap kondisi terkini nasabah sebagai bahan EWS dan Rencana Ekspansi Divisi.
3. Penggunaan *Dashboard* korporasi sebagai sarana untuk mendukung implementasi *client service team*.
4. Meningkatkan profitabilitas melalui *transaction based* (memperkuat *transaction banking*) dan mengoptimalkan sinergi dengan BRI Group.
5. Melakukan implementasi *early warning system*.
6. Mengimplementasikan kegiatan yang mengacu pada *Building World Class Wholesale Banking*.

BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

RINGKASAN KINERJA

- Dana Pihak Ketiga Bisnis Institusi mencapai Rp306,94 triliun, meningkat 2,75% dibanding tahun 2019 sebesar Rp298,73 triliun.
- *Fee Based Income Cash Management System* mencapai Rp54,25 miliar, meningkat 6,54% dibanding tahun 2019 sebesar Rp50,92 miliar.
- Jumlah *Client Cash Management System* mencapai 29.955 *Client*, meningkat 24,97% dibanding tahun 2019 sebanyak 23.970 *Client*.

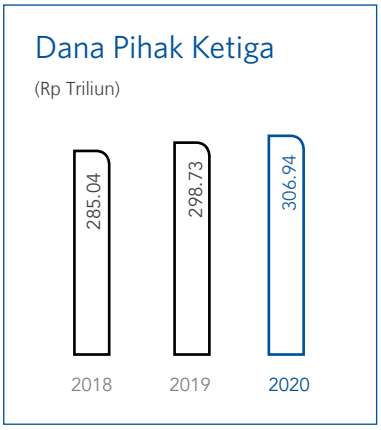

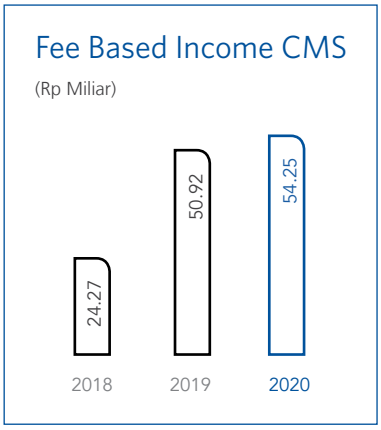

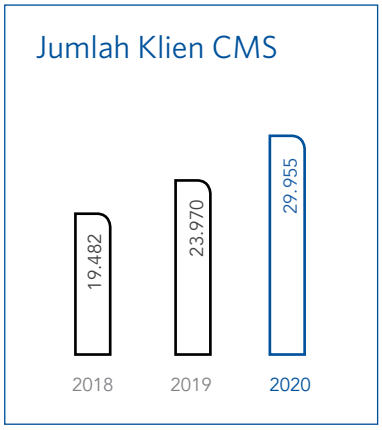

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

Bisnis Institusi

BRI memiliki peran besar di bisnis institusi untuk menyediakan produk dan jasa layanan perbankan bagi lembaga atau institusi Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Solusi perbankan yang diberikan meliputi, pengelolaan layanan simpanan, *cash management system* (CMS), penyaluran bantuan sosial, penyaluran gaji dan tunjangan kinerja PNS dan pelayanan jasa perbankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan lembaga atau institusi, termasuk layanan digital banking serta *value chain* sehingga BRI melayani ekosistem bisnis secara keseluruhan. Nasabah yang di layani bisnis institusi adalah Kementerian Lembaga Pemerintah, TNI/Polri, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Bisnis *Transaction Banking*

Bisnis *Transaction Banking* telah memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama untuk menjaga kelansungan usaha BRI di tahun 2020 maupun di masa mendatang. Sebab peran besar Bisnis *transaction banking* adalah mengakselerasi penghimpunan dana dan meningkatkan perolehan *fee based income*. Sasaran segmen Bisnis *transaction banking* yaitu perusahaan dan atau instansi yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan kompleks dan tetap dapat mengelolanya sendiri.

Selain terdapat *host to host* yang berkolaborasi dengan Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Institusi, Divisi Bisnis Kecil dan Menengah, serta Divisi Bisnis Internasional, produk dan jasa yang ditawarkan Bisnis *transaction banking* diantaranya sebagai berikut:

1. **Aplikasi *Cash Management System* BRI**, merupakan solusi layanan keuangan perbankan berbasis internet dengan *User Interface* dan *User Experience* (UI/UE) yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keunggulan CMS BRI antara lain sangat mudah di akses secara *mobile*, *user friendly*, *real time*, fitur keamanan yang memadai, serta dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi yang mendukung kebutuhan transaksi keuangan pada umumnya atau dapat disesuaikan (*customized*) terhadap kebutuhan nasabah.
2. **Giro BRI**, merupakan produk yang melayani kebutuhan transaksional nasabah, dengan fasilitas penarikan melalui warkat (Cek/Bilyet Giro) serta dapat dilakukan melalui ATM atau secara digital melaui CMS BRI.
3. **Trade Finance BRI**, merupakan layanan ekspor secara komprehensif dan terintegrasi bagi eksportir/importir baik melalui *Letter of Credit* (L/C) ataupun Non L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
4. **Bank Garansi BRI**, merupakan layanan kebutuhan penjaminan Bank melalui Fasilitas Bank Garansi.

STRATEGI BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2020

Bisnis Institusi

Kompetisi perolehan Dana Pihak Ketiga Institusi semakin ketat dari tahun ke tahun. Untuk itu BRI telah menyiapkan sejumlah strategi tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan komposisi CASA melalui *closed payment system* berbasis digital banking. Fitur produk perbankan dan anak perusahaan juga diselaraskan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga, serta pengelolaan penyaluran APBN Kementerian hingga satuan kerja (satker) daerah.
2. Bisnis Institusi akan berfokus pada peningkatan utilisasi dan optimalisasi penggunaan *Dashboard Value Chain* dan *Account Planning*. Sebab hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas segmen korporasi dan membentuk bisnis *value chain* yang baru.
3. BRI akan meningkatkan pengembangan platform kerjasama dengan beberapa institusi agar dapat mendukung profitabilitas perusahaan dari sisi *fee based income*.
4. Bisnis Institusi BRI akan menerapkan beberapa program kerja antara lain *Smart Sim*, Aplikasi Digital-Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Kartu Pintar NPWP dengan Platform Kartin1 (Kartin One), Pengembangan sistem pembayaran SPP *online* untuk Universitas kelolaan Bisnis Institusi, Pengembangan sistem pembayaran PNBP *online*, Pengembangan Aplikasi Pembayaran Pensiun (Digitalisasi), Pengembangan Aplikasi KTA/e-KTA, dan Pengembangan Aplikasi Penyaluran Gaji (Digitalisasi).

Bisnis *Transaction Banking*

Pada tahun 2020, Bisnis *Transaction Banking* fokus pada perluasan pangsa pasar dan penyediaan *fully integrated banking services*. Perluasan pangsa pasar telah dilakukan melalui ekstensifikasi *customer base* dengan memperkuat kapabilitas *Transaction Banking* melalui optimalisasi *digital channel* untuk transaksi CMS, Giro, *Trade Finance*, dan Bank Garansi.

1. Strategi *Cash Management System* BRI
   Beberapa strategi yang telah dilakukan BRI untuk mengembangkan CMS menjadi bagian dari *Integrated Financial Solutions* di tahun 2020 adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi platform CMS *end to end* (BRICaMS).
   b. Fokus peningkatan *Fee Based Income* pada *Transaction Banking* dengan meningkatkan utilitas fitur *cash management*.
   c. Meningkatkan transaksi nasabah dalam satu ekosistem bisnis melalui fitur *Corporate Billing Management* (CBM) yang ada di dalam CMS guna meningkatkan layanan transaksi Vendor *Financing* dan Distributor *Financing*.

2. Strategi Giro BRI
   a. Marketing & Product Development.
   Mengoptimalkan potensi *value chain* melalui program akuisisi *value chain* nasabah korporasi pada sektor bisnis tertentu seperti *consumer good* guna meningkatkan transaksi Giro melalui BRI.

Bisnis Institusi & Transaction Banking

b. **System & Monitoring Strenghtening**. Monitoring akuisisi melalui aktivitas aliran dana pada masing-masing segmen dan pemanfaatan *dashboard* monitoring Giro.
c. **Culture Development**. Memperkuat *Funding Structure*, *Cross Selling* untuk *transaction based* (CMS dan BRIVA).

3. Strategi Trade Finance BRI
   a. ***Customer/Marketing Growth***. Akuisisi calon nasabah baru *trade finance* dengan optimalisasi limit/skema *insurance* (***Customer Acquisition***), dan *re-mapping* nasabah eksisting dan *re-focusing pipeline* sebagai *database* pemasaran nasabah eksportir dan importir (***Customer Retention***).
   b. **Policy & Product Development**. Review Ketentuan dalam proses bisnis *trade finance*.
   c. **Business Improvement Process**. Mengimplementasikan *digital channel* untuk transaksi *trade finance* melalui CMS Trade BRI.

4. Strategi Bank Garansi BRI
   a. **Marketing Growth**. *Relationship manager* fokus sebagai pengelola dan pemasaran bank garansi, dan menambah kerja sama dengan pihak Perusahaan Asuransi terkait penjaminan bank garansi.
   b. **Business Improvement Process**. Mengimplementasikan *digital channel* untuk transaksi bank garansi melalui *New Platform* bank garansi, menjaga kecepatan SLA penerbitan, perbaikan proses bisnis terkait kewenangan memutus bank garansi, dan adanya *counter* pelayanan bank garansi.

KINERJA BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2020

Bisnis Institusi

Pada tahun 2020, Bisnis Dana Institusi BRI dapat menghimpun dana dengan capaian sebesar Rp306,94 triliun atau meningkat 2,73% dari tahun 2019 yang sebesar Rp298,73 triliun.

Bisnis *Transaction Banking*

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang selaras dengan tantangan di tahun 2020, Bisnis *Transaction Banking* dapat mencatat pencapaian kinerja yang positif sebagaimana tercermin dalam hal pencapaian *fee based income*.

1. Kinerja Cash Management System
   Performa CMS BRI secara keseluruhan menunjukkan peningkatan di tahun 2020. Jumlah klien tercatat mencapai 29.955 klien atau tumbuh 24,25% (*yoy*) dibanding tahun 2019 sebanyak 23.970 klien. Bertambahnya jumlah klien tersebut disebabkan jumlah klien Korporasi dan Ritel secara bersamaan mengalami peningkatan.

   Sedang frekuensi transaksi CMS BRI meningkat signifikan menjadi 51,47 juta transaksi di tahun 2020, atau tumbuh 24,25% (*yoy*) dibanding tahun 2019 yang sebesar 41,43 juta transaksi. Segmen Ritel menyumbang kenaikan terbesar dengan pertumbuhan 28,38% (yoy).

   Sementara volume transaksi pada 2020 sebesar Rp2.924 triliun, atau meningkat 11,39% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.625 triliun. Kenaikan volume transaksi terbesar disumbang oleh segmen ritel yang tumbuh 33,42% (yoy). Hal ini menunjukkan peningkatan pemanfaatan platform transaksi oleh nasabah sejalan dengan kondisi pandemi di tahun 2020. Sedangkan jumlah klien CMS tumbuh cukup besar, yakni bertambah 5.985 klien, baik nasabah umum maupun dari instansi dan kelembagaan, seiring dukungan BRI terhadap program restrukturisasi rekening Kementrian Keuangan.

Bisnis Institusi & Transaction Banking

Kinerja *Cash Management System* BRI

Segmen	Performa	2018	2019	2020	Δ (yoy)
Korporasi	Jumlah Client (Satuan)	3.040	4.493	7.178	59,76%
	Frekuensi Transaksi (Ribu Trx)	6.379	9.570	10.573	10,48%
	Volume Transaksi (Rp Triliun)	1.096	1.804	1.829	1,37%
Ritel	Jumlah Client (Satuan)	16.442	19.477	22.777	16,94%
	Frekuensi Transaksi (Ribu Trx)	32.982	31.859	40.900	28,38%
	Volume Transaksi (Rp Triliun)	502	821	1.095	33,42%
Total	Jumlah Client (Satuan)	19.482	23.970	29.955	24,97%
	Frekuensi Transaksi (Ribu Trx)	39.361	41.429	51.474	24,25%
	Volume Transaksi (Rp Triliun)	1.598	2.625	2.924	11,39%

Dari sisi *Fee Based Income*, CMS BRI berhasil memperoleh sebesar Rp54,25 miliar di tahun 2020 atau naik 6,53% (*yoy*) dibanding tahun 2019 sebesar Rp50,92 miliar. Kenaikan ini menunjukkan BRI mampu terus menumbuhkan *Fee Based Income* CMS selama tiga tahun terakhir, meski ditengah dampak pandemi Covid-19.

Kinerja *Fee Based Income - Cash Management System* BRI

Keterangan	2018	2019	2020	Δ (yoy)
Fee Based Income CMS BRI (Rp Juta)	24.271	50.922	54.249	6,53%

2. Kinerja Giro BRI
   Pada tahun 2020, performa Giro BRI mengalami pertumbuhan sebesar 14,19% (*yoy*), atau menjadi Rp183,3 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada segmen Korporasi yang tumbuh 9,31% menjadi Rp111,98 triliun.

Kinerja Giro BRI

(dalam Rp Miliar)

Segmen	2018	2019	2020	Δ (yoy)
Korporasi	117.125	102.446	111.725	9,06%
Non Korporasi	59.293	65.436	71.277	8,93%
Total	176.418	167.842	183.002	9,03%

3. Kinerja *Trade Finance* BRI
   Performa volume transaksi *Trade Finance* BRI secara total mencapai Rp291 triliun di tahun 2020. Perolehan *Fee Based Income* untuk Trade Finance BRI pada tahun 2020 sebesar Rp1,49 triliun.

Kinerja *Trade Finance* BRI

(dalam Rp Miliar)

Keterangan	2018	2019	2020	Δ (yoy)
Volume Transaksi	182.561	268.772	291.721	8,54%
Fee Based Income	1.323	1.661	1.495	-9,99%

Bisnis Institusi & Transaction Banking

4. Kinerja Bank Garansi BRI
   Selama tahun 2020, kinerja volume transaksi Bank Garansi BRI mengalami kenaikan siginifikan sebesar 45,37% (*yoy*), atau menjadi sebesar Rp43,3 triliun. Seiring dengan hal tersebut, perolehan *fee base income* pun meningkat sebesar 16,99% (yoy) menjadi Rp221 miliar.

Kinerja Bank Garansi BRI

(dalam Rp Miliar)

Keterangan	2018	2019	2020	Δ (yoy)
Volume Transaksi	30.926	29.787	43.302	45,37%
Fee Based Income	98	189	221	16,99%

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui Bisnis Dana Institusi mengelola dana-dana yang bersumber dari APBN dengan dukungan teknologi digital. Hal itu sejalan dengan program Pemerintah dalam meningkatkan *cashless society* untuk mendukung peningkatan efisiensi ekonomi.

STRATEGI BISNIS INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2021

Di tahun 2020 Bisnis Institusi & Transaction Banking akan terus fokus pada penghimpunan dana murah (Giro) dan fee transaction banking dengan mengoptimalkan teknologi digital, dengan strategi antara lain:

1. Mendukung program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, selain itu juga melakukan akselerasi pengembangan digital banking untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transpransi pengelolaan keungan negara.
2. Peningkatan komposisi CASA berbasis *digital banking*, sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga.

BISNIS KORPORASI NON BUMN, BISNIS SINDIKASI & JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT CORPORATE BANKING

Direktorat Corporate Banking melayani kebutuhan nasabah di segmen korporasi non BUMN dan lembaga keuangan non bank dengan menawarkan solusi perbankan terintegrasi. Baik itu kebutuhan dari sisi layanan pengelolaan dana, pemberian fasilitas pinjaman, maupun kebutuhan transaksi keuangan yang dapat diandalkan. Dari sisi internal, Direktorat Corporate Banking juga memiliki andil dengan kompetensinya dalam menjaga pertumbuhan bisnis BRI di tahun 2020.

Program dan strategi BRI dalam mengembangkan Bisnis Korporasi Non BUMN, Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank di tahun 2020 antara lain adalah:

1. Memperbaiki kualitas kredit melalui program relaksasi dan restrukturisasi, penguatan sistem manajemen risiko, dan selektif dalam proses penyaluran kredit.
2. Meningkatkan profitabilitas bisnis melalui pengembangan sistem layanan yang terintegrasi agar transaksi bisnis nasabah terus tumbuh secara berkelanjutan.
3. Memprioritaskan penyaluran kredit untuk proyek infrastruktur, agribisnis, kelistrikan dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Menciptakan *Value Added* melalui pengembangan *Value Chain* di lingkup bisnis nasabah.
5. Melakukan peningkatan sinergi dengan entitas anak, Bank Umum lainnya, Lembaga Pembiayaan, serta institusi Keuangan lainnya.

Dengan didukung daya tahan kinerja *Corporate Banking* yang baik di tahun 2020, dan adanya sinyal ekonomi nasional akan berangsur pulih seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang telah memasuki fase penggunaan vaksin, maka prospek bisnis *Corporate Banking* diharapkan akan turut menjadi lebih baik pada tahun 2021.

BISNIS KREDIT KORPORASI NON BUMN

RINGKASAN KINERJA

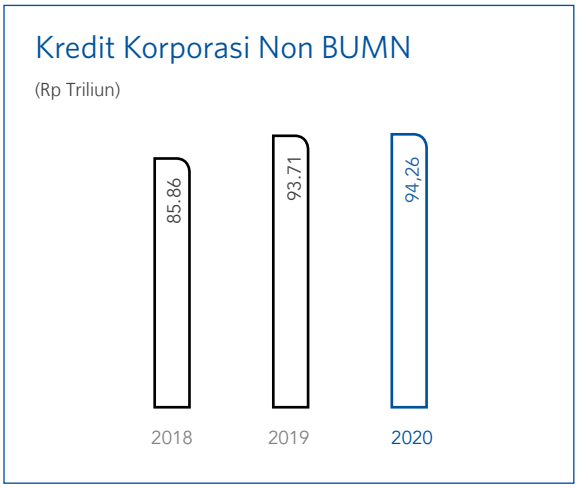

- *Outstanding* Kredit Korporasi Non BUMN mencapai Rp94,26 triliun, relatif stabil dibanding tahun 2019 sebesar Rp93,71 triliun.

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS KORPORASI NON BUMN

Bisnis Korporasi Non BUMN melayani nasabah korporasi Non BUMN beskala besar dengan memberikan solusi produk dan layanan keuangan terpadu, baik untuk kebutuhan fasilitas pinjaman dengan plafon besar secara jangka panjang, maupun penempatan dan pengelolaan dana. Dalam memberikan fasilitas pinjaman, Bisnis Korporasi Non BUMN juga berupaya mengoptimalkan peluang dari sisi *value chain business* dan *cross selling*. Sehingga segmen Bisnis Kecil dan Menengah atau pun Bisnis Konsumer BRI dapat turut bertumbuh.

Segmen agribisnis dan non-agribisnis merupakan target pasar dari Bisnis Korporasi Non BUMN. Pengembangan kredit agribisnis memprioritaskan pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan segmen non-agribisnis menyalurkan kredit ke sejumlah industri seperti industri pengolahan, infrastruktur dan utilitas, serta industri minyak dan gas.

STRATEGI BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2020

Upaya BRI menumbuhkembangkan Bisnis Korporasi Non BUMN di tengah pandemi Covid-19 selama tahun 2020 adalah dengan menjaga level pertumbuhan yang moderat, serta fokus kepada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.

1. Memperbaiki kualitas kredit
   Upaya perbaikan kualitas kredit yang telah dilakukan antara lain menyusun *exit strategy* bagi debitur yang terdampak pandemi seperti memberikan relaksasi dan restrukturisasi, penyempurnaan sistem manajemen risiko dan lebih selektif dalam proses penyaluran kredit, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

2. Meningkatkan Profitabilitas Bisnis
   Peningkatan profitabilitas bisnis difokuskan dengan membesarkan transaksi bisnis nasabah melalui pengembangan sistem layanan yang terintegrasi, dan mengimplementasikan manajemen profitabilitas di setiap nasabah.

KINERJA BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, *outstanding* kredit Bisnis Korporasi Non BUMN mencapai Rp94,24 triliun, atau relatif stabil dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp93,71 triliun. Portofolio kredit Bisnis Korporasi Non BUMN mayoritas berada di Industri Pengolahan sebanyak 32,26% dan Industri Agribisnis sebesar 30,87%.

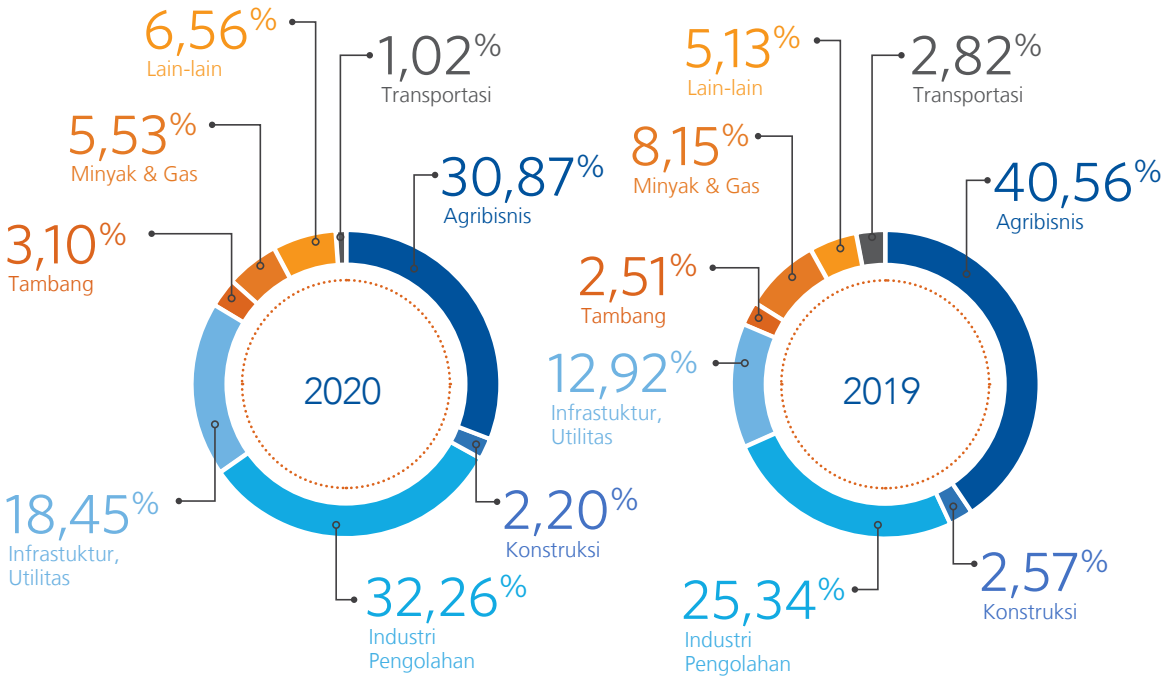

Bisnis Kredit Korporasi Non BUMN

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Untuk mendukung program Pemerintah, BRI melalui Bisnis Korporasi Non BUMN di tahun 2020 telah mendukung pembiayaan sektor usaha produktif berorientasi ekspor. Misalnya, komoditas kelapa sawit, dan korporasi yang terkait dengan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan transportasi.

STRATEGI BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2021

1. Ekspansi selektif pada sektor usaha yang tidak terdampak Covid-19, antara lain industri berbasis pangan yaitu *Agriculture* dan *Food Processing*.
2. Mengutamakan pemberian fasilitas dalam bentuk sindikasi, untuk menjaga proporsi segment korporasi serta *spreading risk.*
3. Fokus kepada pemberian fasilitas kepada perusahaan besar yang memberikan *value chain* berupa kredit turunan kesegmen UMKM.
4. Focus kepada pemberian fasilitas transaksi, *non cash loan* dan *uncommitted line* kepada perusahaan besar yang bisa memberikan *value chain* untuktransaksi dan volume dana.
5. Menjaga portofolio *asset eksisting* dengan memberikan relaksasi, yang berdampak pada kualitas aset kelolaan *corporate banking* yang sehat.

BISNIS SINDIKASI & JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

RINGKASAN KINERJA

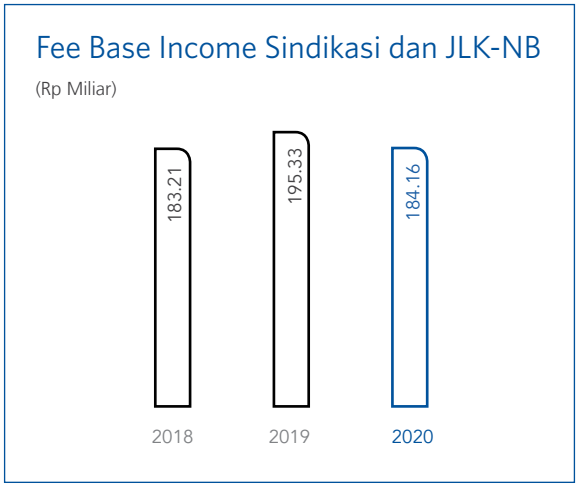

- *Fee Based Income* Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank BRI mencapai Rp184,16 miliar, turun dibanding tahun 2019 sebesar Rp195,33 miliar

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank yang dimiliki BRI melayani pemberian fasilitas pinjaman sindikasi, dan penyediaan limit fasilitas yang bersifat *Committed* maupun *Uncommitted* kepada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Pinjaman sindikasi diperuntukkan bagi nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan di dukung lebih dari satu kreditur. BRI telah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menangani kredit sindikasi yang meliputi fungsi *arranger*, agen fasilitas, *agen escrow* dan jasa agen jaminan. Sektor-sektor usaha yang pernah ditangani BRI antara lain infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, migas, perdagangan/perhotelan/restoran, perkebunan, pertambangan dan sektor properti.

Terkait bentuk pelayanan yang diberikan BRI untuk nasabah IKNB meliputi *security line*, *forexline*, fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *Intraday*, bank garansi dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan. Sedangkan IKNB yang menjadi target BRI dalam menyalurkan pinjaman BRI mencakup perusahaan pembiayaan (*Multifinance*), Perusahaan Asuransi Jiwa dan Umum, Sekuritas, Lembaga Keuangan Khusus, dan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya.

Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2020

Di tahun 2020, BRI melalui Bisnis Sindikasi memprioritaskan penyaluran kredit untuk proyek infrastruktur, agribisnis, kelistrikan dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain penyaluran kredit, Bisnis Sindikasi BRI juga berupaya menciptakan penambahan nilai (*Value Added*) melalui *Value Chain* di bisnis nasabah Sindikasi dan mendukung pertumbuhan segmen turunannya terutama yang terkait erat dengan lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2020, Bisnis Sindikasi BRI berupaya menjaga kualitas aset dengan melaksanakan program relaksasi dan restrukturisasi yang sesuai dengan aturan berlaku dari Pemerintah dan Regulator. Selain itu, Bisnis Sindikasi BRI juga aktif melakukan sinergi dengan entitas anak BRI, Bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Asing, dan Lembaga Pembiayaan. Penguatan kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan *Fee Based Income* BRI secara keseluruhan.

Sedangkan strategi Bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non Bank untuk meningkatkan *Fee Based Income*, BRI fokus memberikan fasilitas penjaminan dan Bank Garansi kepada perusahaan Asuransi, fasilitas *intraday* kepada Perusahaan Sekuritas dan *security line*, serta memperluas kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka optimalisasi peluang bisnis khususnya yang menyediakan bisnis *value chain* ke segmen bisnis BRI lainnya.

KINERJA BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK TAHUN 2020

Performa Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank di BRI secara umum tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan yang luar biasa di tahun 2020. Hal ini tercermin dari perolehan fee based Income sebesar Rp184,16 miliar. Secara year on year FBI sedikit turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp195,33 miliar. Pelemahan ini tak lepas dari kondisi makroekonomi yang terimbas pandemi Covid-19, sehingga turut mempengaruhi pendapatan *Fee Based Income* dari proyek-proyek Sindikasi tahun berjalan. Selain itu, fokus BRI di tahun 2020 juga lebih kepada relaksasi dan restrukturisasi fasilitas pinjaman sindikasi dan menjaga kualitas aset eksisting.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Sepanjang tahun 2020, berperan serta dalam proyek sindikasi untuk pembangunan jalan tol, *refinery* untuk Program B30 dan B50, Pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari *fasttrack* 35.000 MW, dan pembiayaan pada infrastruktur LRT.

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2021

1. Melakukan reposisi fokus bisnis melalui *value chain*, proyek-proyek Pemerintah, dan pembiayaan pada *green sector.*
2. Pengembangan Sistem IT yang terintegrasi untuk operasional sindikasi kredit.
3. Kolaborasi dengan bank asing dalam kancah sindikasi internasional.
4. Peningkatan akuisisi dana investasi asuransi (deposito) dengan tetap menjaga *contribution margin* yang optimal bagi BRI.

Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

5. Optimalisasi fee dan transaksi dari produk *transaction banking solution*.
6. Mensukseskan program kerja di dalam strategi inisitatif ekosistem pasar modal.
7. Meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi pendapatan fee dan transaksi dari fasilitas intraday dan bank garansi khusus perusahaan sekuritas.
8. Ekspansi bisnis pada fasilitas *executing* dan *transction banking solution* untuk meningkatkan pendapatan dan aset BRI.
9. Meningkatkan utilisasi fasilitas *joint financing* dengan tetap prudent dan selektif.

BISNIS INTERNASIONAL, TREASURY, DAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT TREASURY DAN GLOBAL SERVICES

Direktorat Treasury & Global Services (TGS) mencakup tiga segmen bisnis utama yaitu *treasury business*, *international business*, dan *investment services.* Selaras dengan visi BRI untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia in* 2025, di tahun 2020 Direktorat TGS mengusung fokus strategi *Strong Presence of Treasury & Global Services in Indonesia* dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap kinerja PT Bank Rakyat Indonesia baik melalui peningkatan pendapatan (bunga dan non-bunga) maupun melalui peningkatan efisiensi. Kontribusi Direktorat TGS terhadap total kinerja BRI tercatat meningkat menjadi 11,45% untuk pendapatan bunga dan 14,93% untuk pendapatan non-bunga sepanjang tahun 2020. Berikut kinerja Direktorat TGS dalam tiga tahun terakhir:

(Rp miliar)

Komponen	2018	2019	2020	Growth (yoy)
Total Pendapatan Non-Bunga	1.812	2.139	4.284	102%
Treasury Business	1.367	1.599	3.764	
International Business	269	331	282	
Investment Services	176	209	238	
Total Pendapatan Bunga	11.377	11.551	12.596	9%
Treasury Business	11.310	11.500	12.505	
International Business	67	51	91	
Total	13.189	13.690	16.880	23%

Kinerja Direktorat TGS mengalami pertumbuhan secara signifikan khususnya untuk kategori pendapatan non-bunga yang meningkat sebesar 102% secara *year-on-year* di tahun 2020 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan BRI. Melalui fokus strategi tersebut, Direktorat TGS terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar di masing-masing segmen bisnis yaitu:

Bisnis Internasional, Treasury, dan Jasa Penunjang Pasar Modal

1. *Treasury Business*, fokus pada peningkatan pendapatan dan pangsa pasar melalui aktivitas di pasar surat berharga dan transaksi *foreign exchange*. Pada tahun 2020, *Treasury Business* berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 138,71% *year-on-year.* Peningkatan pendapatan dikontribusi oleh peningkatan *capital gain* baik *realized* maupun *unrealized* sebesar 81,31% secara *year-on-year* dan pendapatan transaksi *forex & derivative* baik *realized* maupun *unrealized* sebesar 716,20% secara *year-on-year.* Selain itu, *Treasury Business* juga aktif menghimpun pendanaan selain DPK dengan suku bunga yang efisien untuk mendukung ekspansi bisnis BRI. Di pasar surat berharga, *Treasury Business* BRI berhasil mendapatkan penghargaan sebagai "Dealer Utama Terbaik" selama 3 (tiga) tahun berturun-turut sejak 2017 dalam kegiatan tahunan Dealer Utama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pencapaian tersebut merupakan salah satu bukti komitmen BRI untuk meningkatkan *presence* BRI di bisnis treasury nasional. Pertumbuhan aktivitas *Treasury Business* juga didukung oleh peningkatan transaksi dengan klien asing baik bank maupun institusi keuangan lainnya yang tercatat meningkat sebesar 175% *year-on-year* di tahun 2020.

2. *International Business*, fokus dalam melakukan digitalisasi sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas di tahun 2020. Hasil dari strategi yang dilakukan dalam International Business salah satunya tercermin pada peningkatan pangsa pasar bisnis remitansi yang mencapai 24,50% di tahun 2020 dari sebelumnya di *level* 18,89% di tahun 2019. Saat ini BRI memiliki *Remittance Representative* untuk mengoptimalkan potensi transaksi remitansi di beberapa negara yaitu Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uni Arab Emirat. Peningkatan kinerja bisnis juga didukung oleh aktivitas *networking* ke instansi perbankan yang dilakukan walaupun di tengah kondisi pandemi. Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan salah satu fokus target pasar International Business di 2020. Terdapat 27 BPD yang telah bekerjasama dengan BRI di tahun 2020 dengan 187 produk BRI yang ditawarkan.

3. *Investment Services*, fokus pada pengembangan layanan penunjang investasi kepada klien yang memiliki, memperdagangkan, menyimpan dan menerbitkan surat berharga, termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

   BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu bank kustodian, wali amanat dan *trustee*, serta bank pembayar & bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Selama tahun 2020, *Assets Under Custody* (AUC) bank kustodian BRI tumbuh sebesar 14,3%. Peningkatan performa Kustodian BRI tersebut antara lain ditunjang oleh kenaikan jumlah nasabah yang mencapai 10,7%, diantaranya berasal dari kerjasama dengan Manajer Investasi dalam layanan pengelolaan aset. Selain itu, dengan ditunjuknya BRI sebagai Bank Kustodian Tunggal oleh BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat), bank kustodian BRI fokus pada pengembangan infrastruktur layanan jasa kustodian untuk pengelolaan dana Tapera. Jasa wali amanat dan *trustee* melengkapi layanan penunjang investasi, terutama bagi klien yang melakukan *corporate action* seperti penerbitan surat berharga dan *merger & acquisition*. Aktivitas lain untuk menunjang ekosistem pasar modal adalah layanan bank pembayar & Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN), yang pertumbuhannya cukup signifikan. Selama tahun 2020 jumlah RDN tumbuh 78%, lebih tinggi dari pertumbuhan RDN secara nasional sebesar 60%.

   BRI juga memiliki Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi nasabah melalui produk BRIFINE (BRI Future Investment). Melalui produk ini, BRI dapat membantu nasabah, baik korporasi maupun individu, untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purna karya. DPLK BRI pada tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan *Assets Under Management* (AUM) sebesar 25.7%, diatas pertumbuhan industri sebesar 12,9%. Pertumbuhan angka AUM DPLK di tahun 2020 terutama berasal dari kenaikan jumlah nasabah baik korporasi maupun ritel. *Market share* DPLK BRI juga mengalami peningkatan dari 13,9% di tahun 2019 menjadi 15,4% di tahun 2020.

Bisnis Internasional, Treasury, dan Jasa Penunjang Pasar Modal

4. Unit Kerja Luar Negeri (UKLN), fokus sesuai dengan segmen bisnis di masing-masing negara. Saat ini BRI memiliki beberapa unit kerja di luar negeri yang meliputi BRI New York Agency, BRI Singapore Branch, BRI Timor Leste Branch, BRI Hong Kong Representative Office, dan BRI Cayman Island. Salah satu fokus UKLN adalah melakukan *business matching* antara pembeli atau penjual di negara masing-masing dengan nasabah BRI di Indonesia, baik untuk transaksi ekspor maupun impor. Kerja sama yang dilakukan dengan *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)* di Amerika Utara berhasil mendukung program UMKM Naik Kelas melalui pemasaran produk pada *marketplace* Amazon.

Serangkaian transformasi dilakukan oleh Direktorat TGS melalui *Triple Transformation* yang mencakup *Business Development & Process Transformation, Digital Transformation,* dan *Human Capital Transformation. Triple Transformation* dilakukan untuk terus meningkatkan produktivitas kinerja Direktorat yang diharapkan dapat menjadi *sustainable contributor* terhadap pertumbuhan kinerja BRI sesuai dengan *tagline* Direktorat TGS di tahun 2020, yaitu *"Contributing More".*

Human Capital Transformation melalui *Culture Activation Program* yang dilakukan di Direktorat TGS memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas pekerja yang didorong oleh program-program dalam menumbuhkan *employee engagement.* STAR TREK (Strategic Alignment to Raise Treasury & global services' contribution through Exploring & capturing unexplored marKets) merupakan filosofi *Human Capital Transformation* yang terinspirasi dari serial Star Trek yang memiliki misi menemukan dan mengeksplorasi dunia baru. Begitu pula dengan Direktorat TGS yang tidak hanya berkomitmen dalam optimalisasi potensi namun juga dalam mencari potensi-potensi baru yang selama ini belum tereksplorasi (*exploring the new frontiers*).

Di tahun 2021, Direktorat TGS memiliki visi untuk menjadi *The Most Profitable Treasury & Global Services in Indonesia* dengan terus mengoptimalkan *Triple Transformation* yang di dalamnya termasuk strategi inisiatif yang dirumuskan dalam rangka peningkatan kontribusi Direktorat TGS terhadap BRI. Strategi inisiatif tersebut meliputi lima *key initiattive points,* yaitu efisiensi operasional melalui transformasi digital dan bisnis proses; perluasan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dengan pendalaman pasar secara komprehensif; pengembangan produk dan pelayanan berdasarkan kebutuhan nasabah (*customer-driven products*); pengelolaan aset secara aktif dengan berpedoman pada *investment policies*; dan peningkatan kolaborasi dengan anak perusahaan untuk mewujudkan visi BRI menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia in 2025.*

BISNIS INTERNASIONAL

RINGKASAN KINERJA

- Total Pendapatan Bisnis Internasional pada tahun 2020 mencapai Rp374,68 miliar, masih tetap mencatatkan pendapatan yang positif di tengah perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

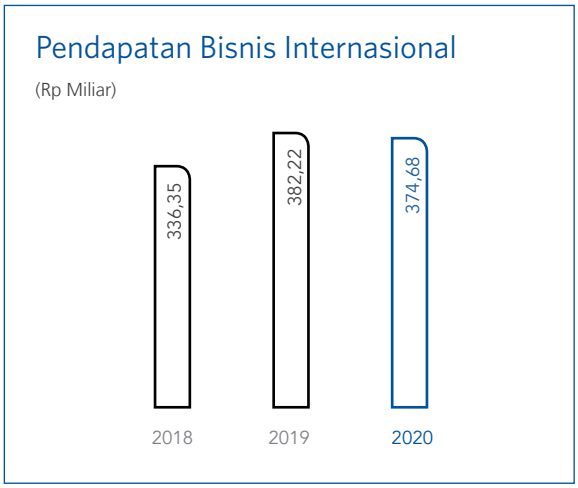

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS INTERNASIONAL

BRI melalui Divisi Bisnis Internasional memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam melayani kebutuhan aktivitas keuangan nasabah akan produk dan jasa di bidang bisnis bank koresponden, bisnis Remitansi dan bisnis *banknotes*. Semua bidang bisnis tersebut telah berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan pendapatan dari sisi *interest income*, *fee-based income*, dan atau berpotensi besar dalam meningkatkan penghimpunan dana maupun *trickle down* bisnis BRI lainnya.

Layanan Bisnis Internasional BRI didukung oleh kehadiran Unit Kerja Luar Negeri yang berada di New York, Cayman Island, Singapura, Hongkong, Timor-Leste dan menurut rencana akan tersedia juga di Taipei pada tahun 2021. Selain itu, terdapat pula *Remittance Representatives* BRI untuk meningkatkan layanan bisnis Remitansi di koridor Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hongkong dan Jepang.

Bisnis Internasional BRI turut didukung pekerja profesional yang telah memiliki sertifikasi internasional seperti *Certified Documentary Credit Specialist (CDCS)*, *Certified Specialist for Demand Guarantee (CSDG)*, *Certified International Trade Finance (CITF),* dan *Certified Trade Finance Professional (CTFP)* yang terus diperbaharui secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki komitmen penuh untuk menjadi rekan bisnis terpercaya dan bisa diandalkan, guna menyediakan layanan Bisnis Internasional yang terbaik dan sejalan dengan perkembangan bisnis nasabah.

Bisnis Internasional BRI telah bekerja sama dengan kurang lebih 1.279 Bank Koresponden di seluruh dunia dengan 16 mata uang asing, 85 *Remittance Company*, serta didukung Unit Kerja seluruh Indonesia. BRI juga melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam 22 jenis mata uang asing di unit kerja operasional di seluruh Indonesia secara *real-time online*.

Perkembangan bisnis internasional BRI didukung oleh *Correspondent Banking Business Team*, *Remittance Business Team*, *Banknotes Business Team*, *Overseas Channel Management & Development Team*, dan *Bank Line Management Team*. Adapun produk dan layanan dari masing-masing Tim tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasabah adalah sebagai berikut:

Bisnis Internasional

1. Correspondent Banking Business Products

a. ***Bank Guarantee Issuance Under Counter Guarantee***, yaitu Penerbitan Bank Garansi Lokal kepada *Bouwheer* yang diterbitkan atas dasar *Counter Guarantee* yang diterima dari Bank Koresponden.

b. **LC/SKBDN *Refinancing Business***, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh BRI kepada Bank (*issuing bank*) atas dasar *underlying trade transaction* berupa LC/SKBDN.

c. **LC / SKBDN *Confirmation Business***, yakni jaminan tambahan dari BRI yang diberikan kepada *beneficiary* atas LC/SKBDN yang diterbitkan oleh *counterpart bank* (*issuing bank*).

d. ***Risk Participation Business***, ialah pengambil-alihan sebagian atau keseluruhan risiko tagihan (*bank risk* atau *country risk*) dengan *underlying trade* yang mengacu pada ketentuan dalam *Banker's Association Finance and Trade* (BAFT).

e. ***Banker Acceptance***, merupakan fasilitas likuiditas jangka pendek yang diberikan BRI sebagai *lender* atau *funding bank* dengan *underlying trade* LC/Non-LC.

f. ***Bank to Bank Forfaiting Business***, adalah pengambilalihan tagihan (*payment claim*) tanpa hak *regress* dengan *underlying Trade Transaction* yang mengacu pada *Uniform Custom Rules for Forfeiting* (URF).

2. Remittance Business Development Products

Remittance (*Fund Transfer*) dapat didefinisikan sebagai suatu pergerakan/perpindahan dana dari pengirim (*The Originator of Payment*) kepada penerima (*The Beneficiary of Payment*). Produk ini meliputi ***BRIfast Remittance Incoming*** (Kerjasama & Non Kerjasama) dan ***BRIfast Remittance Outgoing.***

a. ***BRIfast Remittance Incoming* (Kerjasama & Non Kerjasama)**
   - Brifast Incoming Kerjasama merupakan layanan pengiriman uang ke dalam negeri menggunakan aplikasi Brifast dengan menggunakan *channel Counterpart* Kerjasama BRI yang ada di luar negeri, umumnya transaksi ini bersumber dari remitansi TKI.
   - Brifast Incoming Non-Kerjasama merupakan layanan penerimaan dana dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan *platform* SWIFT, umumnya transaksi ini merupakan tranaksi yang memiliki *underlying trade* (ekspor-impor).

b. **BRIfast *Remittance Outgoing***
   Merupakan layanan transfer dengan tujuan luar negeri menggunakan mata uang valas termasuk transfer dana antar bank didalam negeri menggunakan mata uang valas.

3. Banknotes Business Products

a. **Pembelian & Penjualan *Banknotes*,** yaitu transaksi pembelian & penjualan Uang Kertas Asing (UKA) secara fisik. Negosiasi harga kurs *banknotes* dilakukan melalui RTB Kanwil atau *Banknotes Business Team, International Business Division*.

b. **Tarik & Setor Tunai Banknotes**, yaitu penarikan maupun penyetoran *Banknotes* dari dan ke rekening simpanan valas nasabah dikenakan provisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilayani di unit kerja operasional BRI.

4. Overseas Channel Management and Development

Daftar Unit Kerja Luar Negeri BRI:

a. **BRI NEW YORK AGENCY**
   Berdiri tahun 1988, BRINYA menjadi Unit Kerja Luar Negeri Pertama BRI untuk *following customer business* atau menjawab kebutuhan bisnis nasabah BRI dalam memfasilitasi transaksi *international trade* serta *payment & settlement* dalam mata uang USD. Bisnis di BRINYA meliputi *Loan, Trade Finance, Treasury & Wire Transfer.*

b. **BRI CAYMAN ISLAND BRANCH**
   Berdiri tahun 1992 sebagai Unit Kerja Luar Negeri Ketiga, BRI Cayman Island memiliki lisensi tipe B dari Cayman Island Monetary Authority. Pendirian BRI Cayman Island ditujukan untuk mengakomodasi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan atas proyek-proyek pemerintah Republik Indonesia. Aktivitas bisnis termasuk pinjaman, *trade finance* dan *treasury*.

c. **BRI HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE**
   Berdiri tahun 1989 sebagai Unit Kerja Luar Negeri Kedua, BRI HKRO memiliki lisensi sebagai *Representative Office* dan didirikan untuk menindaklanjuti likuidasi BRIFL. Peran BRI HKRO adalah sebagai perwakilan dari Kantor Pusat

BRI di Hong Kong dalam berkomunikasi dengan seluruh *stakeholders* (nasabah, pemegang saham, regulator, dll). Saat ini BRI HKRO sedang dalam proses peningkatan menjadi BRI Hong Kong Branch.

d. BRI SINGAPORE BRANCH

BRISG berdiri pada tahun 2015 sebagai *Offshore Wholesale Banking* serta menjadi *Trade-Hub* antara Indonesia dan Asia. Pembukaan Kantor Cabang BRI di Singapura juga merupakan langkah BRI dalam upaya *following customer business.* Aktivitas bisnis BRI Singapore Branch meliputi layanan *loan, trade finance* & *treasury* kepada nasabah

e. BRI TIMOR LESTE COLMERA BRANCH

BRITL memiliki Lisensi Level B dari Banco Central de Timor-Leste (BCTL) dan resmi beroperasi sejak tanggal 14 Maret 2017. Pendirian BRI Timor Leste ditujukan untuk memperluas *retail market* BRI dengan menawarkan produk berupa pinjaman, simpanan, aktivitas *treasury*, *remittance, trade finance*, penyampaian jasa referensi kredit & konsultan finansial. Transaksi transaksi yang dilakukan bersifat *multi-currencies*. Operasional BRI di Timur Leste juga didukung oleh keberadaan 3 Kantor Cabang Pembantu yaitu: Futuhada *Sub-Branch Office*, Hudilaran *Sub-Branch Office* dan Audian *Sub-Branch Office.*

5. Bank Line Management

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Analisis kondisi makro dan risiko negara *counterpart*
b. Prakarsa, analisis, rekomendasi dan review fasilitas *uncommitted credit line* (UCL) untuk Bank Koresponden
c. *Due diligence* terhadap *counterpart* dalam rangka menjalin hubungan koresponden, rekening nostro dan analisis *credit line*
d. Penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan/ketentuan, produk dan layanan fungsi *Bank Line Management*

STRATEGI BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2020

Divisi Bisnis Internasional BRI terus berupaya melakukan digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas di tengah pandemi dan menjaga kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah yang dinamis. Divisi Bisnis Internasional BRI juga berkomitmen meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan melalui peningkatan volume transaksi baik Bank Koresponden, bisnis Remitansi maupun bisnis *Banknotes*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bisnis Internasional BRI tahun 2020 memiliki strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing
   a. Meningkatkan keahlian dan kapabilitas pekerja terkait Bisnis Internasional.
   b. Meningkatkan eksistensi dan jaringan BRI di luar negeri melalui Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).
   c. Meningkatkan *brand awareness* Bisnis Internasional BRI terhadap *counterparts*.

2. Pengembangan Produk
   a. Melakukan inovasi produk sesuai dengan perkembangan pasar.
   b. Membuat kajian ketentuan atas produk-produk yang dipasarkan.

3. Peningkatan Efisiensi Proses Bisnis
   a. Melakukan otomasi dalam proses operasional transaksi.
   b. Melakukan pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung bisnis (*digital banking*).

4. Peningkatan Kualitas Layanan Nasabah
   a. Pemberian *reward program* untuk pekerja, *counterparts* dan nasabah.

5. Optimalisasi Organisasi Bisnis Internasional
   a. Klasifikasi unit kerja berdasarkan potensi sebagai dasar penetapan target dan KPI.
   b. *Mapping* fungsi *Relationship Manager*, *Remittance Representatives* dan *monitoring* efektivitas UKLN.

Bisnis Internasional

KINERJA BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2020

Pada tahun 2020, total pendapatan Bisnis Internasional BRI mencapai Rp374,68 miliar atau turun sedikit 1,97% (*yoy*) dibanding tahun 2019 sebesar Rp382,22 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh bisnis *Banknotes* yang pada tahun 2018 dan 2019 menjadi motor pertumbuhan utama mengalami pelemahan atau turun sebesar – 63.35% menjadi Rp99,59 miliar di tahun 2020 secara *yoy*. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan dibidang pariwisata sehingga terjadi penurunan permintaan mata uang asing menjadi penyebab turunnya bisnis *Banknotes* 2020.

Namun di sisi lain, bisnis Bank Koresponden dapat mengalami pertumbuhan signifikan hingga 66,50% (*yoy*) menjadi Rp122,48 miliar. Demikian pula halnya dengan bisnis Remitansi yang bertumbuh 4,31% (*yoy*) menjadi Rp152,36 miliar.

Komposisi Pendapatan Bisnis Internasional

(Rp Miliar)

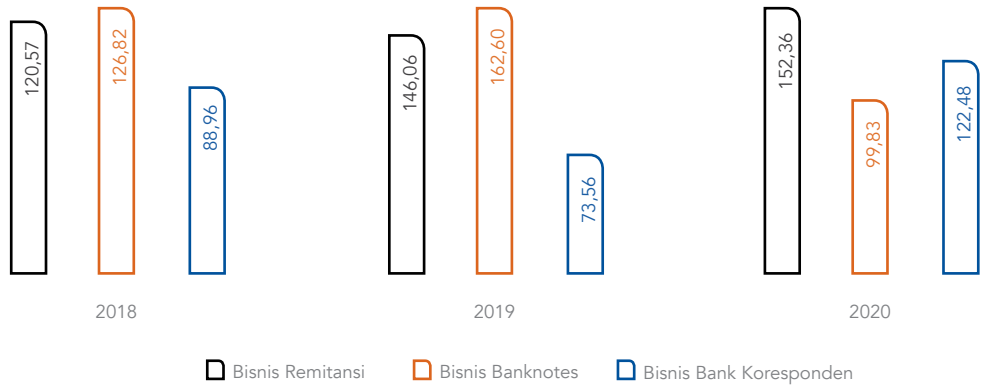

Kinerja Bisnis Bank Koresponden

Komposisi Pendapatan Bisnis Bank Koresponden

(Rp Miliar)

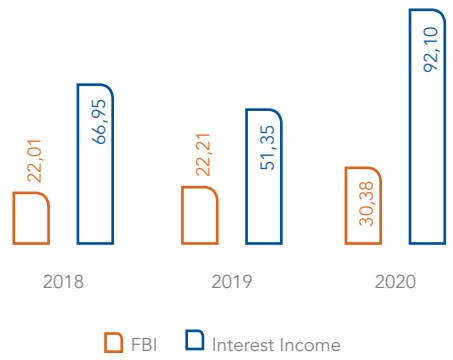

Pertumbuhan pesat pendapatan bisnis Bank Koresponden di tahun 2020 terutama ditopang dari *Guarantee Products* dan *Risk Participation Business*. Sedang secara komposisi, pendapatan bisnis Bank Koresponden utamanya diperoleh dari *Interest Income* yang mencapai Rp92,10 miliar atau tumbuh tinggi hingga 79,36% (*yoy*) dibanding tahun 2019. Pendapatan dari *Fee Based Income* pada bisnis Bank Koresponden juga mengalami pertumbuhan pesat yakni 36,78% (*yoy*) menjadi Rp30,38 miliar. Sementara volume transaksi bisnis Bank Koresponden dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berurut yaitu USD305 juta, USD571 juta, dan USD458 juta.

Bisnis Internasional

Kinerja Bisnis Remitansi Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja Bisnis Remitansi BRI secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan positif baik dari sisi volume transaksi, jumlah transaksi, maupun *fee based income*. Di mana masing-masingnya naik menjadi Rp 1.340 triliun, 8,12 juta transaksi, dan Rp152,36 miliar atau bertumbuh 17,96%; 3,31%; dan 4,31%.

Keterangan	2018	2019	2020	YoY
Volume Transaksi (Rp Triliun)	1.251	1.136	1.340	17,96%
Jumlah Transaksi (Juta)	7,03	7,86	8,12	3,31%
Fee Based Income (Rp miliar)	120,57	146,06	152,36	4,31%

Pada tahun 2020, market share bisnis remitansi bank BRI untuk segmen remitansi TKI mencapai 24,53% dimana BRI menjadi *market leader* di beberapa koridor diantaranya koridor Taiwan (37,16%), Malaysia (26,83%), Korea (35,53%), UAE (52,90%), Jepang (44,23%) dan Hongkong (32,53%).

Kinerja Bisnis Banknotes

Pada tahun 2020, Bisnis *Banknotes* BRI menghadapi tantangan yang begitu dinamis dari pandemi COVID-19 sehingga sangat mempengaruhi performanya secara umum. Ada pun potret kinerja Bisnis *Banknotes* BRI selama tiga tahun terakhir tertera dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	2018	2019	2020
Volume Transaksi (Rp Triliun)	18,804	22,851	18,378
Jumlah Transaksi	769.798	735.418	163.489
Fee Based Income (Rp miliar)	126,82	162,60	99,83

Pencapaian Lainnya tahun 2020

1. BRI telah memiliki lisensi untuk pembukaan Unit Kerja baru di Taipei, Taiwan, yang dikeluarkan oleh otoritas setempat pada Agustus tahun 2020.
2. BRI telah melakukan akuisisi *counterpart remittance* dan kerja sama baru sebanyak 15 *counterpart*.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH TAHUN 2020

1. BRI melalui UKLN New York Agency secara aktif mendukung peningkatan eksposur produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia di Amerika Utara, Amerika Latin dan Amerika Serikat melalui kerjasama yang didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) dan Konsulat Jenderal RI Republik Indonesia (KJRI) masing-masing negara. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan *business matching* yang dinamakan Archipelago untuk mendorong aktivitas perdagangan UMKM Indonesia melalui *marketplace* terbesar dunia, yakni Amazon. Produk-produk yang dipasarkan antara lain adalah makanan dan minuman, kesehatan dan kecantikan serta akan ekspansi untuk produk handicraft, fashion, furniture, dan lain-lain. Adanya kolaborasi bernama Archipelago ini merupakan wujud komitmen BRI untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan volume ekspor.

2. BRI melalui BRI Hong Kong Representative Office (BRI HKRO) berpartisipasi dalam salah satu Event Tahunan *Hong Kong Trade & Development Council* (HKTDC) yang bertajuk "*Autumn Sourcing Week*". Dalam acara yang digelar secara virtual tersebut, BRI HKRO mempromosikan dan mendukung produk UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar

Bisnis Internasional

internasional melalui kegiatan *business matching* yang menghadirkan calon pembeli baru dari berbagai negara. Acara ini menghubungkan lebih dari 2.600 pemasok dengan sekitar 27.000 pembeli melalui lebih dari 9.000 pertemuan virtual dengan berbagai macam kategori mulai dari mainan dan *games,* elektronik hingga *Eco Technology*.

3. BRI melalui *event* BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020 dan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI aktif mendorong aktivitas perdagangan dan peningkatan ekspor serta daya saing produk Indonesia dengan mempertemukan (*business matching*) antara pembeli atau penjual potensial yang berada di luar negeri dengan pelaku usaha di Indonesia. Pameran bertaraf internasional ini sukses menarik animo masyarakat dengan pengunjung virtual yang menyaksikan pameran produk-produk UMKM pilihan secara *daring* mencapai 104.755 orang serta ratusan pengunjung yang antusias hadir secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, pagelaran ini berhasil membukukan peningkatan nilai transaksi dan kesepakatan dagang yang signifikan dibanding acara tahun sebelumnya.

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan dukungan kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh wilayah Indonesia dengan konsep kolaborasi secara komprehensif baik secara bisnis, operasional, teknologi dan *capacity building*. Dengan dukungan tersebut, BRI dapat mendukung Bank Pembangunan Daerah untuk dapat terus mengembangkan bisnis sehingga mampu menopang perekonomian di daerahnya masing-masing.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bisnis Internasional BRI fokus untuk menjadi "*Fully-Digitalized International Banking Services in Indonesia*". Oleh karena itu, strategi yang disusun BRI untuk Bisnis Internasional pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Correspondent Banking Business Strategy
   a. **Otomasi transaksi Correspondent Banking System**
   Digitalisasi dan sentralisasi pada administrator untuk proses operasional bisnis atas produk *Correspondent Banking* melalui aplikasi terintegrasi dengan TiPlus sehingga proses bisnis tidak lagi dilakukan secara manual.
   b. **Digitalisasi Dashboard Produk Correspondent Banking**
   Pengembangan *dashboard* terintegrasi dengan TiPlus dan/atau CORBAS sebagai *tools monitoring* dan evaluasi *performance* bisnis *correspondent banking* baik secara tim maupun tiap RM untuk tiap produk dan *account*. Selain itu, pengembangan juga dilakukan untuk *monitoring* proyeksi pendapatan *interest* di masa datang (berdasarkan data *accrual interest* yang akan berjalan sampai jatuh tempo).
   c. **Sinergi Bank Pembangunan Daerah – BRI**
   Kolaborasi dengan Divisi terkait dalam rangka kerjasama dengan BPD untuk menjadikan BRI sebagai *one stop financial solution*.
   d. **Penyediaan sumber data CBB secara global melalui Kerjasama dengan SWIFT**
   Onboarding pada platform SWIFT *Watch* agar memperoleh akses data *Correspondent Banking Business* secara global untuk mendapatkan *market insight* serta dapat melakukan *performance benchmark* dengan pesaing.
   e. **Pemasaran Produk Bank *Loan***
   Pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek Bank Buku II dan Buku III untuk dapat meningkatkan *interest income* dan *arrangement fee*.
   f. **Eksplorasi potensi diversifikasi portfolio aset di Indonesia**
   Diversifikasi *portofolio assets* dengan melakukan penjualan produk *Correspondent Banking* kepada *counterparty bank* sebagai bentuk resiprokal bisnis sekaligus meningkatkan *revenue correspondent banking business*.
   g. **Diversifikasi pengembangan pasar *trade finance asset* melalui platform *marketplace trading asset***
   Onboarding trading platform marketplace untuk *trade finance asset* sebagai bentuk pengembangan potensi *correspondent banking market* secara *global*.

2. Banknotes Business Strategy

a. **New Banknotes Business**
Integrasi seluruh aktivitas *banknotes business* yang terakomodasi dalam aplikasi *money changer* dengan penambahan aktivitas baru (transaksi jual/beli *same currency banknotes*).

b. **Money Changer on Wheels**
Layanan *Money Changer Mobile* (menggunakan mobil terling) di lokasi-lokasi wisata unggulan seperti Denpasar, Malang, Danau Toba, dan Lampung.

c. **Implementasi layanan *Money Changer Machine* (MCM) di Batam.**

d. **Pembukaan Gerai *Offsite* BRI *Money Changer*** di Gili Trawangan, Entikong dan Mandalika – Lombok.

e. **Kerjasama dengan *e-commerce* untuk jual beli *banknotes*.**

3. Remittance Business Development Strategy

a. **Inisiatif sumber dan optimalisasi pendapatan bisnis *Remittance***
Optimalisasi pendapatan bisnis *remittance* selain pendapatan *fee income* diantaranya *fx spread*, *rebates* bank koresponden dan sumber-sumber pendapatan lain yang berorientasi pada pertumbuhan *revenue* bisnis *remittance* Bank BRI.

b. **Pengembangan BRIFast *Outgoing Mobile***
Layanan transfer dana ke luar negeri (*outgoing remittance*) melalui integrasi antara aplikasi BRIfast dengan BRIMO *Super Apps*.

c. **Pengembangan skema *White Labeling* BRIfast *Incoming Mobile***
Layanan transfer dana dari luar negeri (*incoming remittance*) melalui kerja sama skema *white labeling* antara BRI dengan *counterpart*.

d. **Kerja sama dengan *global remittance company* di luar negeri**
Menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan remitansi global dengan tujuan untuk pertumbuhan *revenue* bisnis *remittance* yang *sustainable*.

4. Overseas Channel Management & Development Strategy

a. ***Grand Opening* Kantor Cabang BRI Taipei pada Q1 2021.**

b. **Inisiasi Awal Pembukaan *Representative Office*** di salah satu negara di ASEAN ke Dewan Direksi BRI dan OJK: Vietnam/Philippine/Thailand

5. Bank Line Management Strategy

a. ***Bank Line Approval System* (BLAST)** putusan *Vice President* atau *Executive Vice President* UCL *One Day Approval* untuk peningkatan SLA.

b. ***Dashboard Bank Line Management* (BLM)**
Penyediaan data utilisasi secara instan untuk efisiensi proses bisnis dan peningkatan produktivitas.

c. **Penyusunan *Country Profile***
Analisis kondisi makro dan risiko negara *counterpart*.

BISNIS TREASURY

RINGKASAN KINERJA

1. Keuntungan *Capital Gain* (realized) mencapai Rp2,51 triliun, meningkat sebesar 67,79% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,50 triliun
2. Aset Produktif selain kredit dan penyertaan mencapai Rp454,93 triliun, meningkat sebesar 25,82% dibanding tahun 2019 sebesar Rp361,59 triliun.
3. Volume transaksi *marketable securities* BRI mencapai Rp681,01 triliun, meningkat sebesar 52,10% dibanding tahun 2019 sebesar Rp447,75 triliun, dengan frekuensi transaksi meningkat sebesar 82,89%.

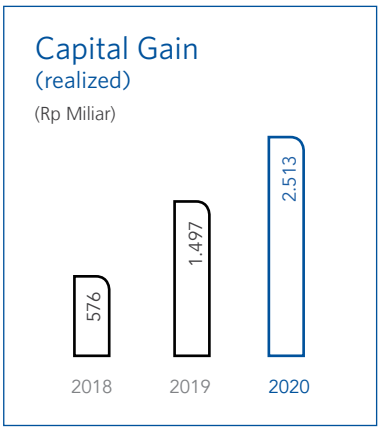

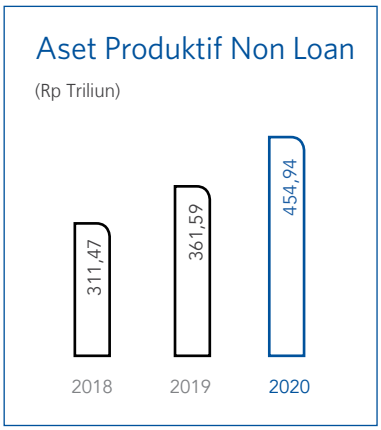

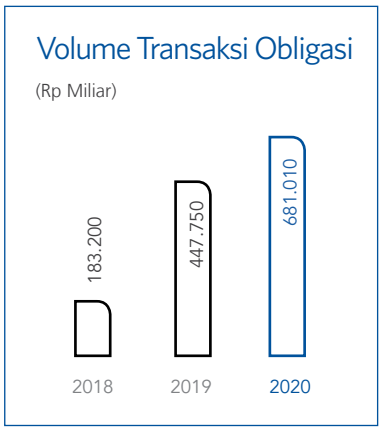

JASA LAYANAN BISNIS TREASURY

BRI senantiasa berupaya menjadi penyedia solusi perbankan *Treasury* yang reliabel dan berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah individu, korporat, ataupun nasabah institusi keuangan. Keperluan nasabah tersebut diantaranya adalah melakukan transaksi *Foreign Exchange* (*Forex*), *Money Market*, *Fixed Market*, dan transaksi terkait produk derivatif. Penjelasan dari masing-masing jasa layanan Bisnis *Treasury* BRI tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Foreign Exchange*
   Perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan waktu penyerahan pada suatu tanggal tertentu. Di mana untuk melakukan transaksi ini, nasabah antara lain perlu melakukan minimum negosiasi senilai USD2.500 atau ekuivalen, dan memiliki *underlying* transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. *Money Market*
   Tempat terjadinya transaksi pinjam meminjam dana sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas maupun memanfaatkan *idle money* jangka pendek. Jenis *money market* yang tersedia di Bisnis Treasury BRI antara lain *interbank call money*, jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan negosiasi suku bunga deposito *on call*.

3. *Fixed Income*
   Layanan perdagangan surat hutang atau obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan swasta atau korporasi.

4. Produk Derivatif
   Transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga dan nilai tukar, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

STRATEGI BISNIS TREASURY TAHUN 2020

Pada tahun 2020, fokus Bisnis *Treasury* BRI yaitu menjaga pertumbuhan pendapatan dan pangsa pasar melalui peningkatan aktivitas di pasar surat berharga dan transaksi *Forex.* Manajemen likuiditas yang *agile* terhadap perubahan kondisi likuiditas di perbankan juga menjadi perhatian besar Bisnis *Treasury* BRI di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang sangat dinamis. Tujuannya untuk memastikan BRI dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Peningkatan aktivitas dengan klien asing dan bisnis di luar negeri merupakan salah satu strategi Bisnis *Treasury* BRI di tahun 2020. Selain untuk meningkatkan pangsa pasar, hal ini juga dilakukan untuk mendukung BRI dalam mencapai *milestone* sebagai *The Most Valuable Bank in Southeast Asia*. Serangkaian transformasi dilakukan pula oleh BRI di Bisnis *Treasury* melalui *Triple Transformation* yang mencakup *Business Development & Process Transformation, Digital Transformation,* dan *Human Capital Transformation. Triple Transformation* ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Bisnis *Treasury* yang diharapkan dapat menjadi *sustainable contributor* terhadap pertumbuhan kinerja BRI secara keseluruhan.

Sedangkan program dan strategi Bisnis *Treasury* lainnya yang ditetapkan berdasarkan tantangan yang harus dihadapi BRI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Bisnis *Treasury* untuk memperoleh profitabilitas paling tinggi di Indonesia dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang andal dan terukur.
2. Memiliki portofolio investasi di reksa dana maupun instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat memberikan imbal hasil optimum dengan risiko yang terukur.
3. Memperluas jangkauan pasar *Treasury* dan basis jumlah klien.
4. Menjadi penyedia dan partner transaksi surat berharga Negara terbesar di Asia Tenggara.
5. Memiliki jaringan yang luas untuk mendukung operasional transaksi *Treasury* serta sejalan dengan kebutuhan dan pertumbuhan bisnis nasabah.
6. Mempercepat proses pra-transaksi *Treasury* utamanya terkait dengan kegiatan administratif.
7. Melakukan transformasi sumber daya manusia agar memiliki tim yang didukung dengan kompetensi pengetahuan yang luas dan berpola pikir global.
8. Memaksimalkan Tim Pemasaran Regional serta cabang luar Negeri guna meningkatkan transaksi *forex* dan obligasi.
9. Melakukan pemasaran secara langsung kepada klien asing.
10. Melakukan sinergi antar divisi di internal BRI maupun entitas anak BRI dalam memasarkan produk dan layanan *Treasury*, seperti Divisi *Wealth Management*.
11. Menyempurnakan proses transaksi spot.

Adapun sasaran dari program dan strategi bisnis treasury BRI di tahun 2020 yaitu "Treasury Digital Services for Everyone" dengan tujuan untuk:

1. Memiliki pangsa Pasar Valas Nasional sebanyak 10%.
2. Menjadi *The Best Fixed Income Treasury* di Indonesia.

Bisnis Treasury

KINERJA BISNIS TREASURY TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Bisnis *Treasury* BRI mampu menumbuhkan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. Secara garis besar, pertumbuhan kinerja yang berkembang dengan baik tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Volume transaksi *marketable securities* BRI mencapai Rp681,01 triliun, meningkat sebesar 52,10% dibanding tahun 2019 sebesar Rp447,75 triliun, dengan frekuensi transaksi meningkat sebesar 82,89%. Volume transaksi *marketable securities* di pasar primer dan pasar sekunder masing-masing meningkat 21,05% dan 68,67% dibandingkan tahun 2019.
2. Volume dan frekuensi transaksi *foreign exchange* untuk keperluan *client* masing-masing meningkat 10,15% dan 27,32%.
3. Aset produktif selain kredit dan penyertaan mencapai Rp454,93 triliun, meningkat 25,82% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp361,59 triliun.
4. Keuntungan *capital gain* mencapai Rp 2,51 triliun, meningkat sebesar 67,79% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,50 triliun.
5. Transaksi dengan klien asing, baik bank maupun institusi keuangan lainnya tercatat meningkat sebesar 175%.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

1. BRI melalui Bisnis *Treasury* turut aktif dalam membantu pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk penyelamatan dan menumbuhkan kembali usaha para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Bisnis *Treasury* BRI mendukung pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui layanan *private placement* obligasi Pemerintah Indonesia.

STRATEGI BISNIS TREASURY TAHUN 2021

Visi Bisnis Treasury BRI di tahun 2021 adalah untuk dapat memiliki posisi yang lebih kuat dan menjadi *The Most Profitable Treasury & Global Services in Indonesia*. Beberapa upaya yang akan dilakukan Bisnis *Treasury* untuk dapat terus meningkatkan kontribusi terhadap bisnis BRI secara keseluruhan di antaranya melalui program dan strategi sebagai berikut:

1. Mengakselerasi implementasi *Triple Transformation*
2. Top 3 *Treasury* paling menguntungkan di Indonesia.
3. Menjadi bank yang memiliki layanan *Forex* terbaik di Indonesia.

INVESTMENT SERVICES BUSINESS

RINGKASAN KINERJA

1. *Fee based income* jasa Investment services mencapai Rp237,83 miliar, meningkat 13,80% dibanding tahun 2019 sebesar Rp208,99 miliar
2. Aset kelolaan kustodian mencapai Rp440,40 triliun, meningkat 14,07% dibanding tahun 2019 sebesar Rp386,07 triliun
3. Aset kelolaan DPLK BRI mencapai Rp16,69 Triliun, meningkat 25.7% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13.27 triliun

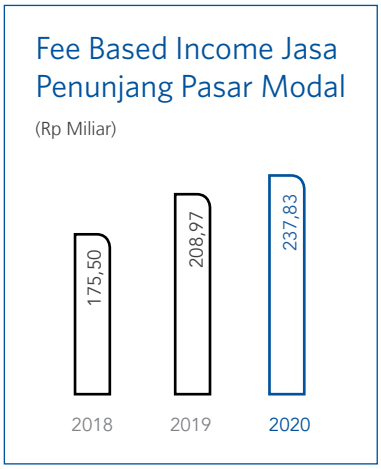

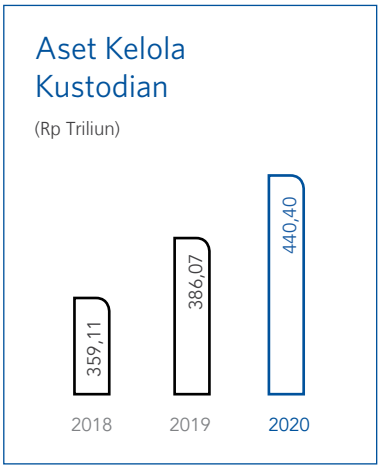

INVESTMENT SERVICES BUSINES

Investment Services Busines fokus dalam pengembangan jasa penunjang investasi pada dua ekosistem bisnis, yaitu: Ekosistem Human Resources bagi nasabah dan Ekosistem Penunjang Investasi Pasar Modal. Pada ekosistem Human Resources, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui produk BRIFINE (BRI Future Investment) membantu nasabah baik korporasi maupun individu untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purnakarya. Pada ekosistem penunjang investasi pasar modal, BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu Jasa Bank Kustodian, Trustee & Wali Amanat, serta Bank Pembayar & Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

1. DPLK BRI

   Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) DPLK BRI mulai beroperasi sejak tahun 2006. BRI memiliki jenis investasi DPLK yang cukup beragam dengan 5 pilihan instrument investasi yang ditawarkan, antara lain:

   a. DPLK BRI Pasar Uang
   b. DPLK BRI Pendapatan Tetap
   c. DPLK BRI Saham
   d. DPLK BRI Pasar Uang Syariah
   e. DPLK BRI Berimbang Syariah.

Investment Services Business

DPLK BRI menawarkan 3 program pengelolaan dana,antara lain:

a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
b. Program Pengelolaan Dana Pesangon (PPDP)
c. Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan

DPLK BRI tidak hanya menarget pasar korporasi, tetapi juga menawarkan PPIP kepada nasabah individual.

2. Jasa Wali Amanat

BRI telah berpengalaman dalam bertindak sebagai wali amanat dan telah mendapat kepercayaan dari berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan dan korporasi lainnya dalam hal penerbitan obligasi dan Medium Term Notes (MTN). BRI memahami betul tugasnya sebagai Jasa Wali Amanat dengan mewakili dan melindungi kepentingan para pemegang obligasi atau MTN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian perwaliamanatan.

3. Jasa Trustee

Bank BRI merupakan Bank Pertama di Indonesia yang memperoleh Pertujuan Prinsip (Surat BI No.15/19/DPB1/PB1-3) dan Surat Penegasan (Surat BI No.15/30/DPB1/PB1-3) dari Bank Indonesia untuk dapat menjalankan Layanan Jasa Trust pada bulan Maret 2013. Jasa yang disediakan oleh BRI Trust antara lain :

a. *Payment Agent* (Agen Pembayaran)
b. *Investment Agent* (Agen Investasi)
c. *Borrowing Agent* (Agen Pinjaman)

4. Jasa Kustodian

BRI telah menjalankan usaha sebagai Bank Kustodian sejak Tahun 1996 dan menjadi lima Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Pelayanan Kustodian BRI adalah jasa penitipan dan administrasi surat-surat berharga. Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki. Keuntungan yang diberikan kepada Nasabah oleh BRI dari Jasa Kustodian tersebut adalah:

a. ***Customization***, layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah termasuk dalam hal laporan yang dapat diseleraskan dengan kebutuhan.
b. ***One Stop Service***, layanan terpadu satu pintu melalui *relationship officer* yang memberikan kenyamanan bagi nasabah.
c. ***Reliable***, didukung dengan sistem Teknologi Informasi yang andal oleh tim *accounting*, *tax and reporting*, *settlement*, dan *compliance* yang berpengalaman.
d. ***Experienced***, berpengalaman mengelola berbagai jenis efek, Reksa Dana, *Unit Link*, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Efek Beragun Aset dan *Private Placement*.
e. ***Global Network***, terhubung dengan jaringan International *Central Securities Depository Euro clear* untuk transaksi efek global.
f. ***Competitives Fees***, imbalan Jasa Kustodian yang disesuaikan dengan kompleksitas layanan.
g. **Jaringan Kerja Luas**, Kustodian BRI bekerjasama dengan MI terpercaya dan juga dengan seluruh jaringan kerja BRI yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri yang siap untuk membantu menemukan solusi kebutuhan investasi nasabah.

STRATEGI BISNIS INVESTMENT SERVICES TAHUN 2020

1. Meningkatkan pangsa DPLK BRI Secara Nasional.
2. Meningkatkan total *Asset Under Management* (AUM) Kustodi, khususnya AUM Kustodi Reksa Dana.
3. 100% Cakupan Nasabah Korporasi BRI.
4. DPLK BRI Dimana Saja Kapan Saja.
5. Mitra Bisnis Koperasi & Tepercaya.
6. Pengembangan sinergi bisnis dengan *E-Commerce* dan *Asset Management Company* untuk produk Reksa Dana yang dipasarkan secara retail.
7. Pengembangan sinergi bisnis dengan *E-Commerce* dan Perwakilan *Remittance Branches* Luar Negeri untuk Menjual Produk DPLK.
8. Imbalan Perusahaan Efek yang mencapai target dari BRI.
9. Menjual produk dan atau program Dana Pensiun kepada Agen BRILink.

KINERJA BISNIS INVESTMENT SERVICES TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Bisnis *Investment Services* mampu mencatatkan peningkatan pangsa pasar berdasarkan *asset under management* (AUM) maupun berdasarkan *asset under custody* (AUC). *Market share* DPLK secara AUM dibandingkan dengan AUM industri DPLK secara nasional tumbuh menjadi 15,18% dari sebelumnya 13,90% di tahun 2019. AUM DPLK BRI tumbuh 25.7% secara year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan AUM DPLK industri yang tumbuh 7% (yoy). *Market Share* Bank Kustodian secara *asset under custody* juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 15,6% dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,3%.

Aset kelolaan Kustodian juga meningkat menjadi Rp440,40 triliun, atau tumbuh 14,07 % (*yoy*) dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp386,07 triliun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang terkontraksi sebesar -10%. Asset Kelolaan DPLK BRI mencapai Rp16,69 Triliun, meningkat 25.77% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13.27 triliun.

Selain itu, dari sisi *fee based income* jasa *Investment services* tercatat mencapai Rp237,83 miliar, atau meningkat 13,70% (*yoy*) dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp208,99 miliar.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

DPLK BRI berkomitmen untuk menyediakan produk yang membantu masyarakat meningkatkan kesiapan finansial dalam mempersiapkan pendapatan yang berkelanjutan. Sebagai Agen Pengembangan, DPLK BRI bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui beberapa kegiatan seperti program penjualan langsung dan edukasi keuangan ke segmen Mikro (Agen BRILINK, PMI, Pelanggan Mikro Lainnya), serta memberikan bantuan literasi persiapan keuangan untuk para Mahasiswa.

STRATEGI BISNIS INVESTMENT SERVICES TAHUN 2021

Pada tahun 2021 Bisnis Jasa *Investment services* fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi-inovasi digital seperti:

1. Efisiensi Business Process melalui Digitalisasi
2. Penambahan variasi Product *Investment Services*
3. Perluasan pasar dengan menarget segmen-segmen baru

BISNIS ENTITAS ANAK

BRI adalah induk usaha dari kelompok perusahaan jasa keuangan yang terdiri dari:

1. PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIsyariah)
2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
3. BRI Remittance Co. Ltd (BRI Remittance)
4. PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
5. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
6. PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas)
7. PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
8. PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Bisnis Entitas Anak

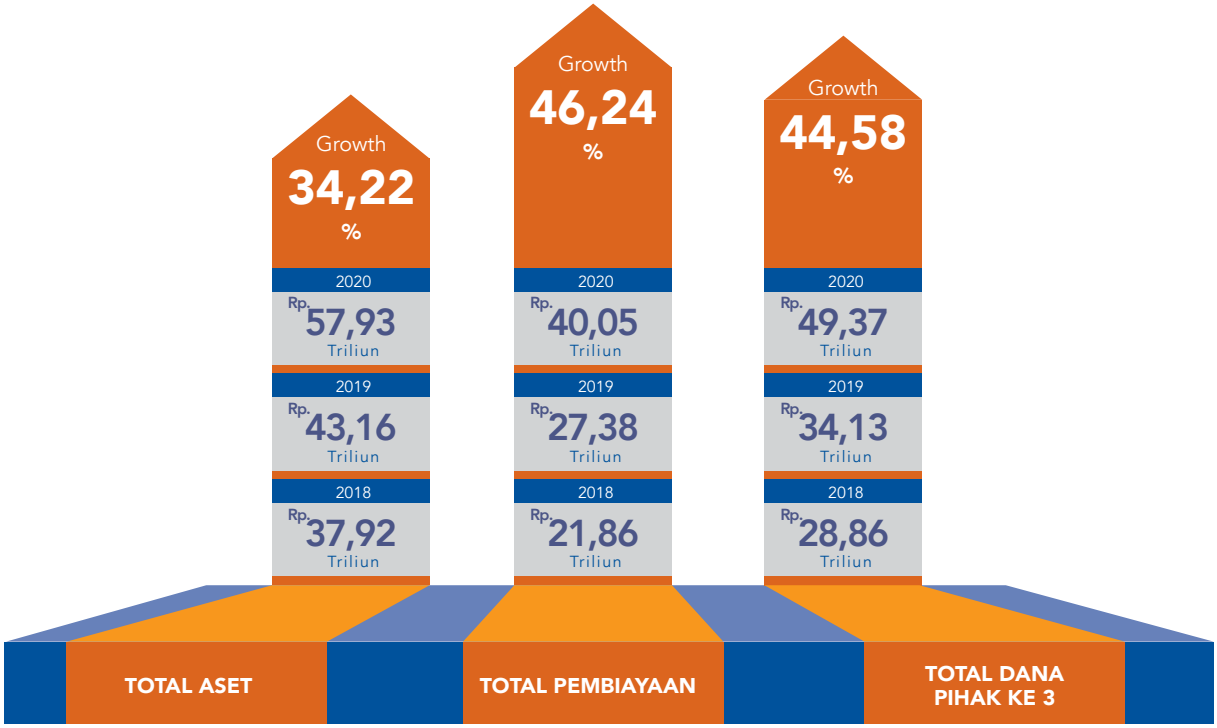

A. PT BANK BRISYARIAH TBK (BRI SYARIAH)

Profil Perusahaan

Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk (selanjutnya disebut BRIsyariah atau Bank) tidak terlepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008, BRIsyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan Penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRIsyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menentramkan. BRIsyariah terus tumbuh secara positif. BRIsyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRIsyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Bisnis Entitas Anak

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRIsyariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk menumbuhkan *brand equity* BRIsyariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank Syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRIsyariah menjadi bank Syariah pertama yang menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp58,1 milar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. BRIsyariah juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRIsyariah mengambil Langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.

BRIsyariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRIsyariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRIsyariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BRIsyariah sebagai berikut:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Eko Suwardi	Komisaris Independen | Independent Commissioner
Sutanto	Komisaris | Commissioner

Direksi | Board of Directors	
Ngatari	Direktur Utama | President Director
Kokok Alun Akbar	Direktur | Director
Fidri Arnaldy	Direktur | Director
Fahmi Subandi	Direktur | Director
Yana Soeprianan	Direktur | Director

Dewan Pengawas |Sharia Supervisory Board	
KH. Didin Hafidhuddin	Ketua DPS | Chairman
M. Gunawan Yasni	Anggota DPS | Member

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRIsyariah membukukan total aset sebesar Rp57,93 triliun naik 34,22% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp43,16 triliun. Sebagian besar aset merupakan aset produktif pembiayaan yang sebesar Rp40,05 triliun. Komposisi aset produktif terhadap total aset pada 2020 mencapai 96,10%.

BRIsyariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun 2020 sebesar Rp49,37 triliun, tumbuh 44,58% dari tahun 2019 yang sebesar Rp34,13 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

JUL

21 Juli
Akad Serentak 2.500 KPR FLPP di 40 Kota di Indonesia secara virtual

22 Juli
Penandatanganan PKS BRIsyariah dengan LAZIS NU

28 Juli
Sinergi Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di 170 Pondok Pesantren antara BRIsyariah dengan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

SEP

01 September
Penandatanganan PKS BRIsyariah dengan UNSIYAH untuk layanan perbankan Syariah

14 September
Peresmian Kanwil BRIsyariah di Banda Aceh

OKT

12 Oktober
Penandatanganan CMA (*Conditional Merger Agreement*)

16 Oktober
Penandatanganan Kerjasama Digitalisasi Kartu Santri/ Pelajar

NOV

05 November
RUPSLB BRIsyariah

06 November
Penandatanganan Rencana Penggabungan Bank Syariah (BRIS, BSM dan BNIS)

11 November
Penandatanganan Kerjasama antara BRIsyariah dengan ITB untuk layanan perbankan Syariah

17 November
HUT BRIsyariah sekaligus peluncuran QRIS BRIsyariah, Salam Digital, dan 6 Penandatanganan Kerjasama antara BRIsyariah dengan ITB untuk layanan perbankan syariah 5 KCP BRIsyariah secara serentak di Aceh

25 November
Penandatanganan PKS BRIsyariah dengan Badan Wakaf Indonesia

26 November
Kerjasama BRIsyariah dengan Flip.id

DES

15 Desember
RUPSLB BRIsyariah

16 Desember
Penandatanganan Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah Milik Himbara

18 Desember
Penandatanganan PKS BRIsyariah dengan PP Muhammadiyah

Bisnis Entitas Anak

Penghargaan Tahun 2020

Peringkat I Loyalty Index, Peringkat I Engagement Index, Peringkat I Customer Influence Index, Peringkat I Customer Purchase Index, Peringkat I Customer Knowledge Index, Peringkat I Customer Referal Index pada Infobank 3rd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2020

Top Brand Award for Sharia Savings oleh Majalah Marketing & Top Brand

i-Kurma, Aplikasi Digital Untuk Memproses Pembiayaan Mikro dan KUR, sebagai Top Innovation Choice Award oleh Infobrand

20 Pilar Finansial Indonesia Award 2020 oleh Iconomics Research

Bank Syariah Terbaik sektor UMKM/KUR Syariah pada Anugerah Syariah Republika 2020

Bank Syariah Terbaik pada Bisnis Indonesia Award

Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2021

Pada tahun 2021, BRIsyariah akan melakukan merger dengan 2 Bank Umum Syariah (BUS) Perusahaan Anak BUMN lainnya yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank BNI Syariah (BNIS). BRIsyariah akan menjadi *Surviving Entity*. Nama dari penggabungan ketiga BUS ini akan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Fokus bisnis dari Bank Hasil Penggabungan ini adalah di sektor *Wholesale* dan Konsumer. Visi dari Bank Hasil Penggabungan ini adalah "**Menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Kedepan**".

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

- Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)
- Asosiasi Emiten Indonesia
- Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
- Keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

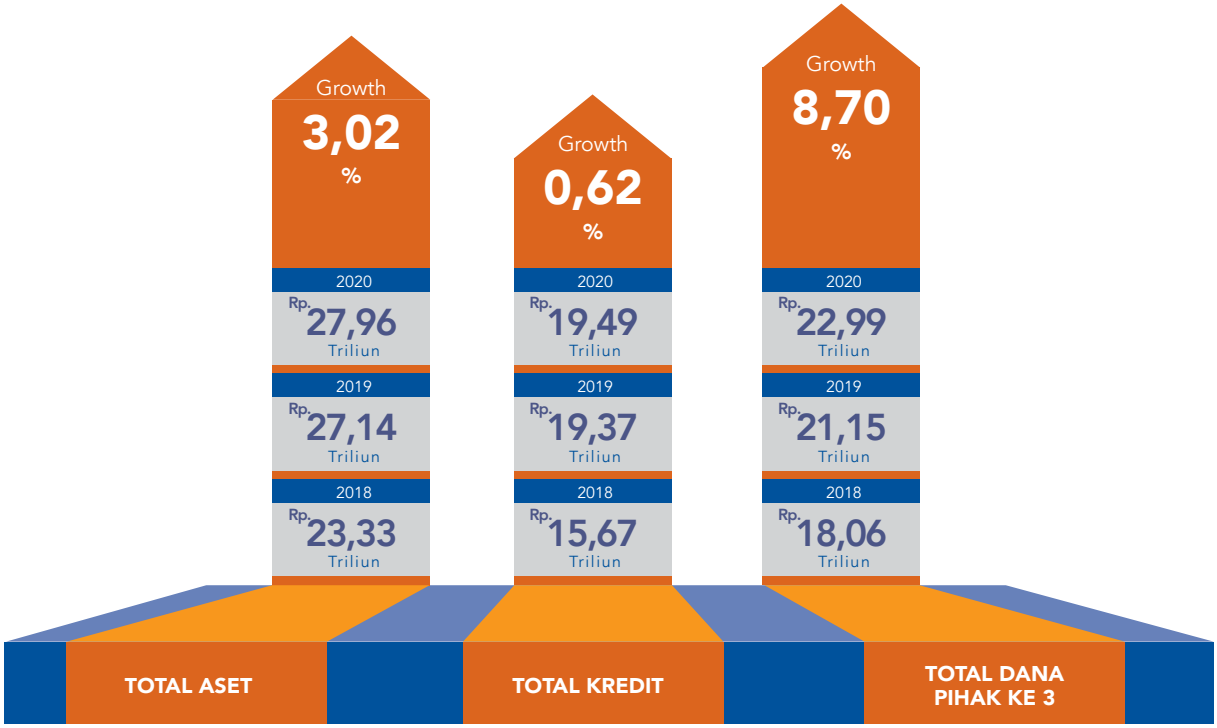

B. PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI AGRO)

Profil Perusahaan

BRI Agro didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) pada tanggal 27 September 1989, dengan nama Bank AGRO yang punya peran penting dan strategis dalam perkembangan sektor agrobisnis di Indonesia. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan agrobisnis, sejak berdiri hingga saat ini portofolio kredit Bank AGRO sebagian besar (antara 50% - 70%) disalurkan di sektor agrobisnis, baik *on farm* maupun *off farm.* Bank AGRO didirikan dengan Akta Notaris Rd. Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989. Pada tanggal 11 Desember 1989 memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/UPPS/PSbD tanggal 26 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Pada tahun 2003, Bank AGRO menjadi Perusahaan Publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga Tbk, dan pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2007, saham Bank AGRO dengan kode AGRO sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2006, Bank AGRO meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Bisnis Entitas Anak

Pada tanggal 3 Maret 2011 ditandatangani Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan Dapenbun di Jakarta. BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk. Sebagai wujud komitmen bersama dalam sinergi bersama BRI, pada tahun 2012 bersamaan dengan ulang tahun ke-23, Bank AGRO berganti nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, dengan nama komersial BRI Agro. BRI Agro semakin mantap melangkah bersama BRI untuk melayani dengan sepenuh hati. Untuk menunjukkan keseriusannya, Perseroan terus melakukan sinergi dengan BRI. Seluruh nasabah Perseroan dapat menggunakan kartu ATM Perseroan secara gratis untuk segala transaksi di seluruh jaringan ATM BRI yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tanpa melupakan fokus awal Perseroan, sektor agribisnis tetap menjadi pilar utama bisnis Perseroan, tetapi Perseroan juga menyediakan layanan penyaluran kredit secara digital melalui produk PINANG.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRI Agro sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Budi Satria	Komisaris Utama
Anna Maria Tjiadarma	Komisaris Independen
I.B.K. Suamba Manuaba	Komisaris
A.Y. Soepadmo	Komisaris Independen

Direksi	
Ebeneser Girsang	Direktur Utama
Sigit Murtiyoso	Direktur
Arif Wicaksono	Direktur
Herry Prayudi	Direktur
Ernawan	Direktur

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Agro membukukan total aset sebesar Rp27,96 triliun naik 3,02% dibanding 31 Desember 2019 senilaiRp27,14 triliun. Adapun penyaluran kredit meningkat sebesar 0.62% dari tahun 2019. BRI Agro berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun 2020 sebesar Rp22,99 triliun, tumbuh 8,70% dari tahun 2019 yang sebesar Rp21,15 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

JAN

03 – 04 Januari
Program CSR bantuan korban banjir di Ciledug dan Jakarta Barat

09 Januari
Penandatangananan Kerjasama dengan Investree

09 – 10 Januari
Pelaksanaan Rakernas BRI Agro

15 Januari
Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan bersama Dirjen Dukcapil

FEB

14 Februari
Pelaksanaan Kejutan Poin Agrotama

19 Februrari
Pelaksanaan RUPS Tahunan

27 Februrari
Program CSR bantuan korban banjir di Jakarta Barat

MEI

19 Mei
Program CSR APD Covid-19 di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dan RS Annisa Cikarang

30 Mei
Program CSR pemberian sembako di 15 kota

JUL

07 Juli
Penandatangananan Kerjasama dengan Jamkrindo

07 Juli
Program CSR pemberian hewan qurban di Jakarta

AGS

26 Agustus
Pelaksanaan Public Expose tahun 2020

SEP

24 September
Program CSR Digital Learning di Jakarta Selatan

28 September
HUT BRI Agro dan Launching produk "BRI Agro Digital"

OKT

23 Oktober
Program CSR Smart Village di Bogor

NOV

05 November
Penandatangananan Kerjasama dengan Modal Rakyat

26 November
Penandatangananan Kerjasama dengan Restock

DES

05 Desember
Penandatangananan Kerjasama dengan Payfazz

Bisnis Entitas Anak

Penghargaan Tahun 2020

Digital Innovation for Excellent Performance dan Top Smart Operation in Banking Industry 2020 oleh IT Tech 2020 pada tanggal 29 April 2020.

Strategi Pengembangan Bisnis

Dalam 5 tahun ke depan, BRI Agro akan melakukan tranformasi model bisnis menjadi "*Become a Digital Attacker Bank for Agri and Beyond*". Dengan model bisnis baru tersebut, BRI Agro akan menjadi Digital Attacker bagi BRI Group dan melengkapi model bisnis yang dimiliki BRI sebagai entitas induk. BRI Agro ke depan akan memiliki kapabilitas baru dalam aspek teknologi maupun Sumber Daya Manusia dengan melakukan kolaborasi Bersama Kelompok Tani dan Koperasi Tani serta *Agri Ecosystem* Fintech.

Di saat yang bersamaan, BRI Agro juga akan melakukan *revamp* atas *existing business* yang ada saat ini, terutama dari sisi jaringan kerja, Sumber Daya Manusia dan portfolio bisnis menjadi lebih sehat.

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

Tidak ada

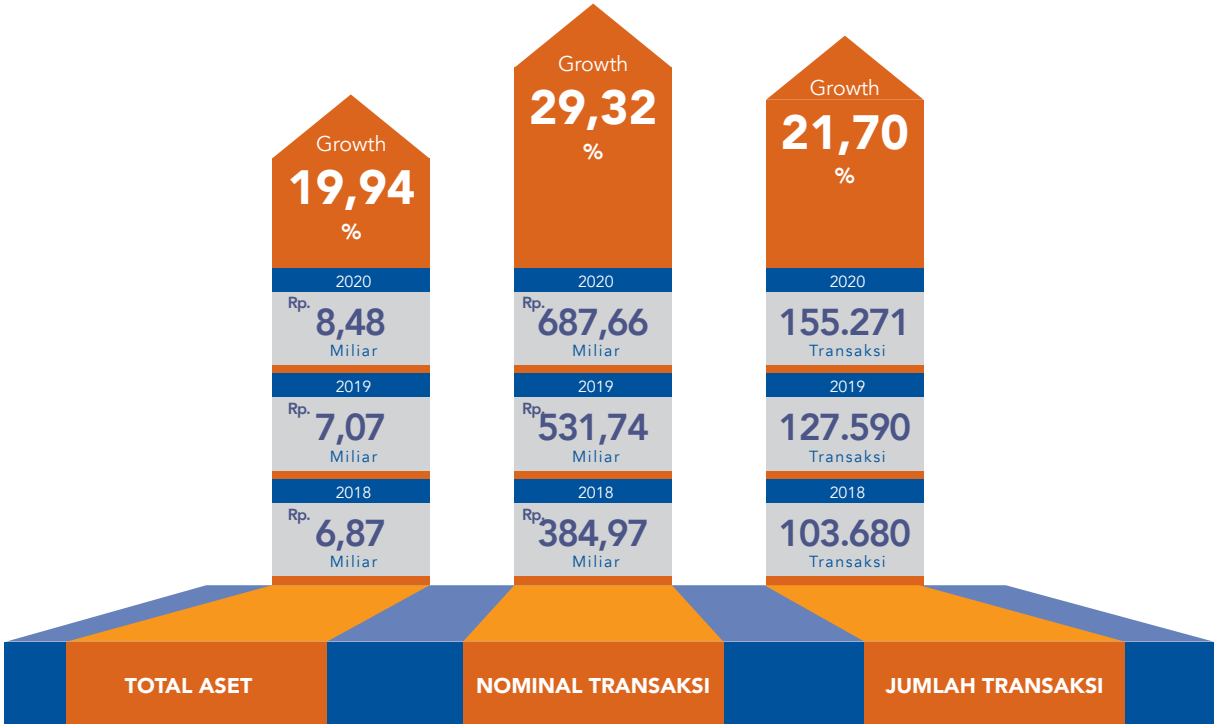

Keterangan: Asumsi Kurs 31 Des 2020: 1.812,30

C. BRI REMITTANCE CO. LTD. (BRI REMITTANCE)

Profil Perusahaan

BRI Remittance didirikan pada Tanggal 7 April 2005 di Hong Kong dengan nama BRIngin Remittance Company Ltd, pada tanggal 16 Desember 2011, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Instrument of Transfer dan Bought and Sold Notes untuk mengakuisisi 100% saham BRIngin Remittance yang dimiliki oleh PT.BJS. Pada tanggal 11 Oktober 2012 nama Perusahaan secara resmi diganti menjadi BRI Remittance Co.Ltd dengan status Perusahaan menjadi Perusahaan Anak yang sahamnya 100% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 28 September 2020 BRC memperoleh persetujuan perpanjangan ijin usaha yang wajib diperbaharui tiap tahun oleh Regulator Hong Kong sampai dengan tahun 2022.

BRI Remittance merupakan entitas bisnis yang memperoleh ijin usaha sebagai *Money Service Operator* dari Hong Kong Custom & Excise Department selaku regulator, dengan ijin usaha tersebut BRI Remittance fokus pada bisnis remitansi (pengiriman uang) yang umumnya dilakukan oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong & Macau serta layanan operasional lain sesuai dengan ketentuan. Saat ini BRI Remittance memiliki 5 kantor cabang dan agent kerjasama yang tersebar di seluruh wilayah Hong Kong dan Macau untuk memperluas jangkauan bisnis dan layanan kepada warga negara Indonesia di Hong Kong.

Bisnis Entitas Anak

Susunan Manajemen

BRI Remittance Hong Kong dipimpin oleh 1 (satu) orang *Executive Director* dan 1 (satu) orang *Non-Executive Director,* yaitu:

Manajemen Eksekutif	
Muhammad Adli Yusrizal	Non-Executive Director
Gigieh Perkasa	Executive Director

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, total Aset BRI Remittance sebesar HKD 4.680.213. Jumlah transaksi remitansi di BRI Remittance adalah sebesar 155.271, meningkat sebesar 21,70% dibandingkan tahun 2019 sebesar 127.590 transaksi.

Untuk Nilai Transaksi Remittance di BRI Remittance adalah sebesar HKD 379.440.315. Nilai tersebut mengalami peningkatan 27,22% dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar HKD 298.264.838.

Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi utama untuk pengembangan Bisnis di tahun 2021 difokuskan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Tetap fokus pada bidang bisnis remitansi untuk meningkatkan *market share* dengan meneruskan dan meningkatkan kegiatan pemasaran dengan proses digitalisasi;
2. Melakukan ekspansi network kerjasama di Hong Kong maupun di koridor negara lain yang potensial;
3. Melakukan diversifikasi pendapatan melalui aktivitas usaha lainnya yang diperbolehkan oleh regulasi Hong Kong;
4. Perbaikan system dan operasional melalui digitalisasi;

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

BRI Remittance terdaftar sebagai anggota Indonesian Club/BUMN Club di Hong Kong

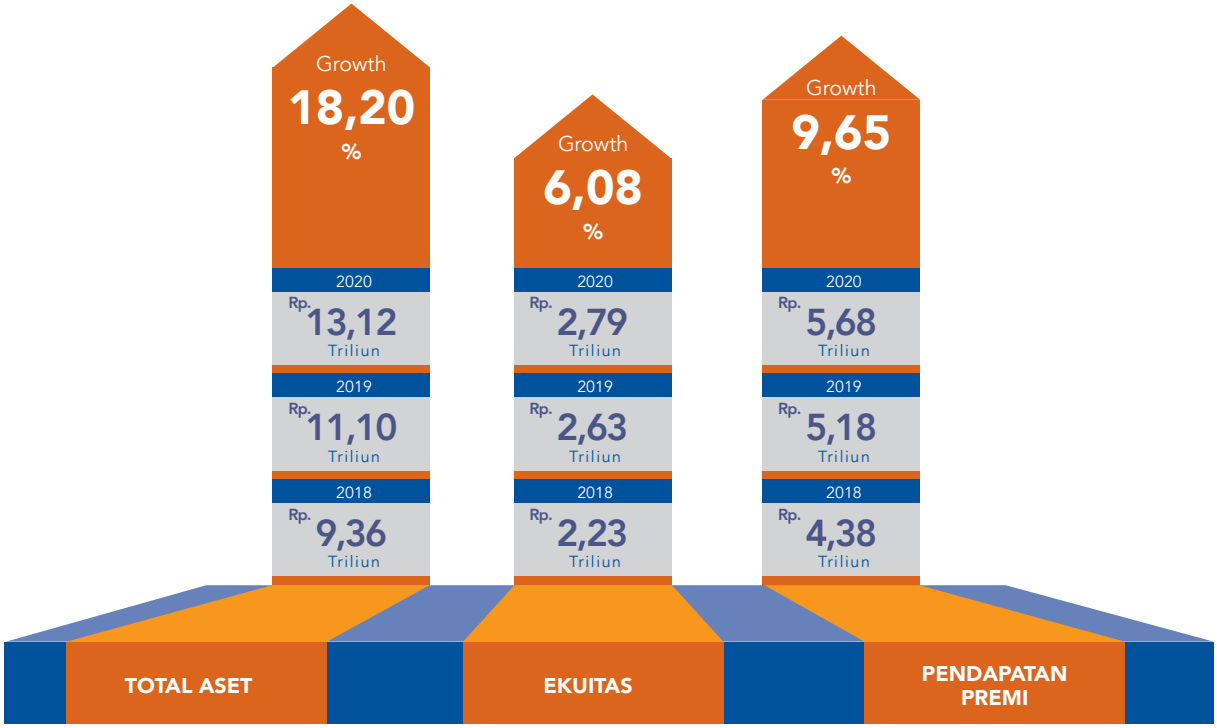

D. PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Profil Perusahaan

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) yang semula bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1987 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

Pada akhir Desember 2015, telah dilakukan akuisisi atas PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 91% dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life) pada tanggal 23 Februari 2017. Pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHUAH.01.03-0000524 tanggal 06 Januari 2016.

Kiprah BRI Life semakin dikenal luas sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang telah melayani lebih dari 9,2 juta nasabah melalui program-program asuransi unggulan yang bermanfaat dan menguntungkan. BRI Life juga didukung dengan beragam produk asuransi BRI Life yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi produk: AJK, Individu, Korporasi, Syariah, Bancassurance dan Mikro. Per Desember 2020, BRI Life beroperasi di 1 kantor pusat, 6 kantor Customer Care Center, 29 kantor Customer Care.

Bisnis Entitas Anak

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BRI Life sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Muhammad Syafri Rozi	Komisaris Utama
Premita Fifi Widhiawati	Komisaris Independen
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
Eko Wahyu Andriastono	Komisaris Independen

Direksi	
Iwan Pasila	Direktur Utama
Khairi Setiawan	Direktur
Danny Cahya Rukmana	Direktur
Anik Hidayati	Direktur

Dewan Pengawas	
KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua DPS
Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota DPS
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota DPS

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Life membukukan total aset sebesar Rp13,12 triliun meningkat 18,20% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp11,10 triliun. Pendapatan Premi BRI Life pada tahun 2020 sebesar Rp5,68 triliun, tumbuh 9,65% dari tahun 2019 yang sebesar Rp5,18 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

JAN

09 & 15 Januari
Program CSR BRI Life Peduli Banjir di Lebak Banten dan Bogor Jawa Barat

16 – 17 Januari
Sales Kick Off & Awarding Night

FEB

06 Februari
Program CSR Bantuan Perbaikan Panti Asuhan Kristen "Parapattan"

MEI

15 – 20 Mei
Program CSR Bansos Anak Yatim & Dhuafa Ramadhan

JUN

19 Juni 2020
Penandatanganan Conditional Share and Subscription Agreement (CSSA) antara BRI, BRI Life, dan FWD Financial Services. Pte. Ltd. terkait strategic partnership pengembangan BRI Life.

OKT

06 Oktober
Talkshow "Mengelola Finansial dan Asuransi di Masa Pandemi"

16 Oktober
Talkshow "Milenial Melek Finansial dan Asuransi"

NOV

3 November
Hari Ulang Tahun BRI Life

7 November
The 4th National Economic Management Olympiad (NEMO) Webinar Get Closer with IPB

25 November
Sponsorship Beasiswa Sekolah Vokasi UGM

Penghargaan Tahun 2020

- Innovative Company for Integrated Digital & Information System with Holding Company oleh Warta Ekonomi
- Indonesia Most Popular Digital Financial Brand's (Milennial'S Choice) oleh Iconomics
- Financial Performa full of year 2019 oleh Infobank
- Top 20 Financial Institution 2020 & The best Performing Life Insurance 2020 Based on Financial Performance 2018 – 2020 oleh Infobank The Finance
- Perusahaan dengan CSR Terbaik oleh Baznas Award 2020
- Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh SWA & ICG

Bisnis Entitas Anak

Strategi Pengembangan Bisnis

Pada tahun 2021 BRI Life akan fokus kepada penguatan fondasi bisnis meliputi *people, product,* dan *process* termasuk mengoptimalkan kanal pemasaran. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengakselerasi hal ini adalah bekerjasama dengan partner international sehingga *expertise* dan kapital yang dimiliki oleh *partner* akan lebih memperkuat perusahaan untuk bersaing di pasar.

Selain hal diatas BRI Life berencana memperkuat *market share* nya yang saat ini unggul dari sisi jumlah nasabah. Karena itu, pada tahun 2021 perusahaan berencana mengembangkan beberapa produk terkait *micro insurance*, *priority banking*, dan *credit insurance* yang merupakan *core-business* perusahaan. Untuk mendukung ekspansi yang efektif dan efisien, perusahaan akan melakukan *enhancement* pada beberapa sistem, perbaikan beberapa proses bisnis termasuk melakukan otomasi atau digitalisasi.

Untuk bisnis Syariah, BRI Life sedang mempersiapkan *spin off* unit usaha syariah yang secara regulasi harus sudah di spin off selambatnya tahun 2024. Persiapan saat ini pada area pengembangan dan support distribusi, pengembangan organisasi dan SDM serta kanal penjualan digital. Secara historis bisnis Syariah tumbuh cukup tinggi sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi perusahaan.

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Bisnis Entitas Anak

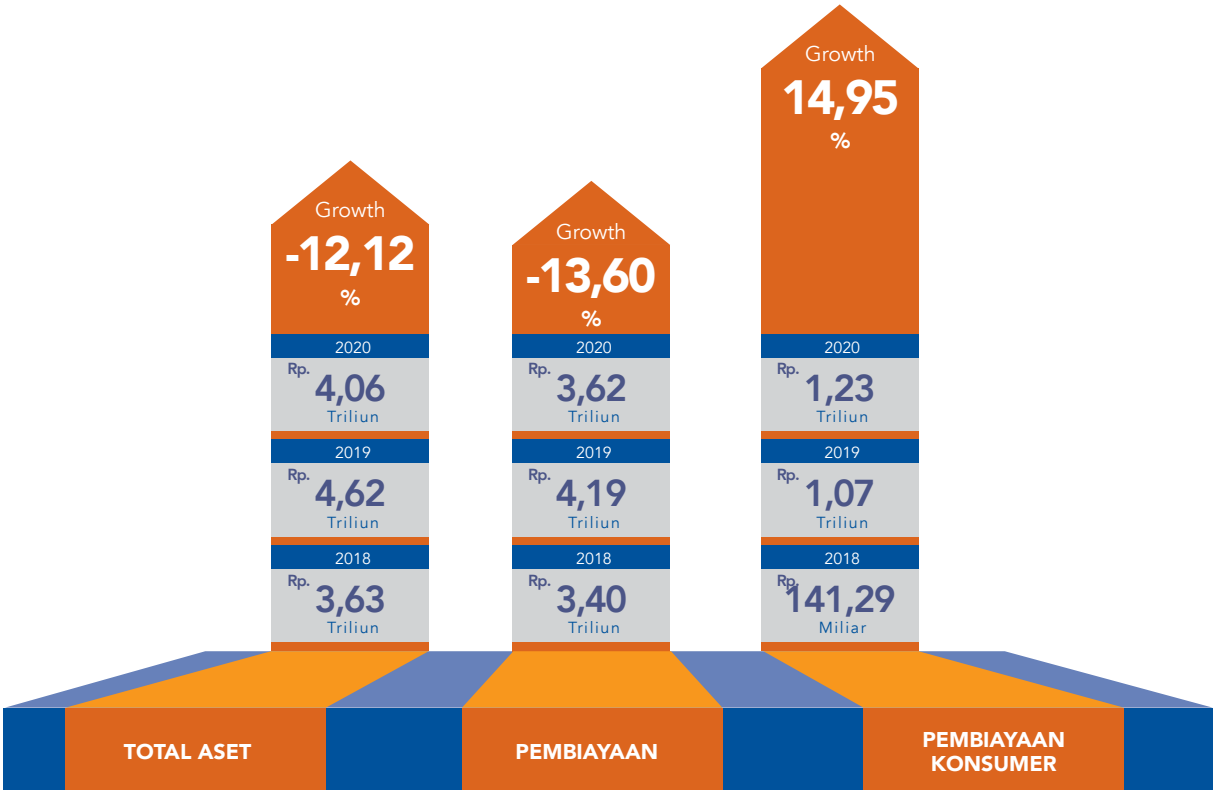

E. PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

Profil Perusahaan

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang multifinance, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,88%. Pada mulanya BRI Finance berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nama perusahaan PT Sari Usaha Leasing. PT Sari Usaha Leasing adalah salah satu perusahaan perintis untuk industri pembiayaan di Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-465/KM.11/1983. Pada tahun yang sama, BRI Finance melakukan perubahan nama menjadi PT Sanwa-BRI Leasing.

Di tahun 1991, BRI Finance mendapatkan izin usaha untuk menjalankan bisnis multi-finance sehingga melakukan penamaan ulang menjadi PT Sanwa-BRI Finance. Seiring dengan terjadinya proses merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Jepang menjadi The UFJ Bank Ltd, Jepang, nama BRI Finance disesuaikan menjadi PT UFJ-BRI Finance di tahun 2002 dan menjadi PT BTMU-BRI Finance di tahun 2008.

Bisnis Entitas Anak

Pada 30 September 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham BRI Finance dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jepang. Kepemilikan saham Perusahaan resmi dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia sebesar 1%. Seiring dengan peralihan saham, PT BTMU-BRI Finance mengubah namanya PT BRI Multifinance Indonesia dengan merk dagang BRI Finance. Perubahan ini menjadikan BRI Finance sebagai bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia. Pada tanggal 11 November 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan penambahan modal disetor sebesar Rp195.000.000.000 (Seratus sembilan puluh lima Miliar Rupiah) kepada BRI Finance sehingga terjadi peningkatan kepemilikan saham dari sebesar 99,78% menjadi sebesar 99,88% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 0,12%.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRI Finance sebagai berikut:

Dewan Komisaris*	
I Komang Sudiarsa	Komisaris Utama
Ngalim Sawega	Komisaris
Sumantri Soewarno	Komisaris Independen

* Seluruh pengurus telah lulus *Fit & Proper Test*

Direksi	
Azizatun Azhimah*	Direktur Utama
Primartono Gunawan*	Direktur
Ari Prayuwana*	Direktur
Willy Halim Sugiardi	Direktur

*) menunggu persetujuan *fit & proper test* dari OJK

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Finance membukukan total aset sebesar Rp4,06 triliun turun 12,12% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp4,62 triliun. Hal ini disebabkan penyaluran pembiayaan BRI Finance pada tahun 2020 turun 13,60% dari tahun 2019.

Namun demikian Pembiayaan Konsumer BRI Finance pada tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun, naik 14,95% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1,07 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2020

19 Mei 2020

Pergantian susunan manajemen berdasarkan RUPSLB BRI Finance.

9 November 2020

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor melalui penambahan penyertaan modal Bank BRI pada BRI Finance sebesar Rp195.000.000.000.

Bisnis Entitas Anak

Penghargaan Tahun 2020

Trusted Company based on
Corporate Governance Perception Index (CGPI) – Desember 2020

Strategi Pengembangan Bisnis

Untuk mengembangkan bisnis di tahun 2021, BRI Finance akan melakukan *joint marketing campaign* dan *scale up* program referral dengan Bank BRI dan *business agent*. Fokus BRI Finance ke depan adalah penetrasi pembiayaan konsumer khususnya KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) dengan menjadi *Single Gateway Autoloan* BRI Group, meningkatkan pembiayaan multiguna melalui produk fasilitas dana serta fokus penyaluran pembiayaan komersial bagi *supply chain* BRI Group. BRI Finance akan mengembangkan *re-engineering* proses internal (MyBRIF & Scoring AI), pengembangan *predictive tools risk management*, pengembangan dan implementasi *HR management system* serta penyusunan strategi diversifikasi pendanaan guna mendukung proses bisnis yang lebih efisien. Perluasan bisnis BRI Finance akan dilakukan dengan mengembangkan pembiayaan *durables* dan melakukan kajian pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

- Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- Anggota PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO)
- Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)

Bisnis Entitas Anak

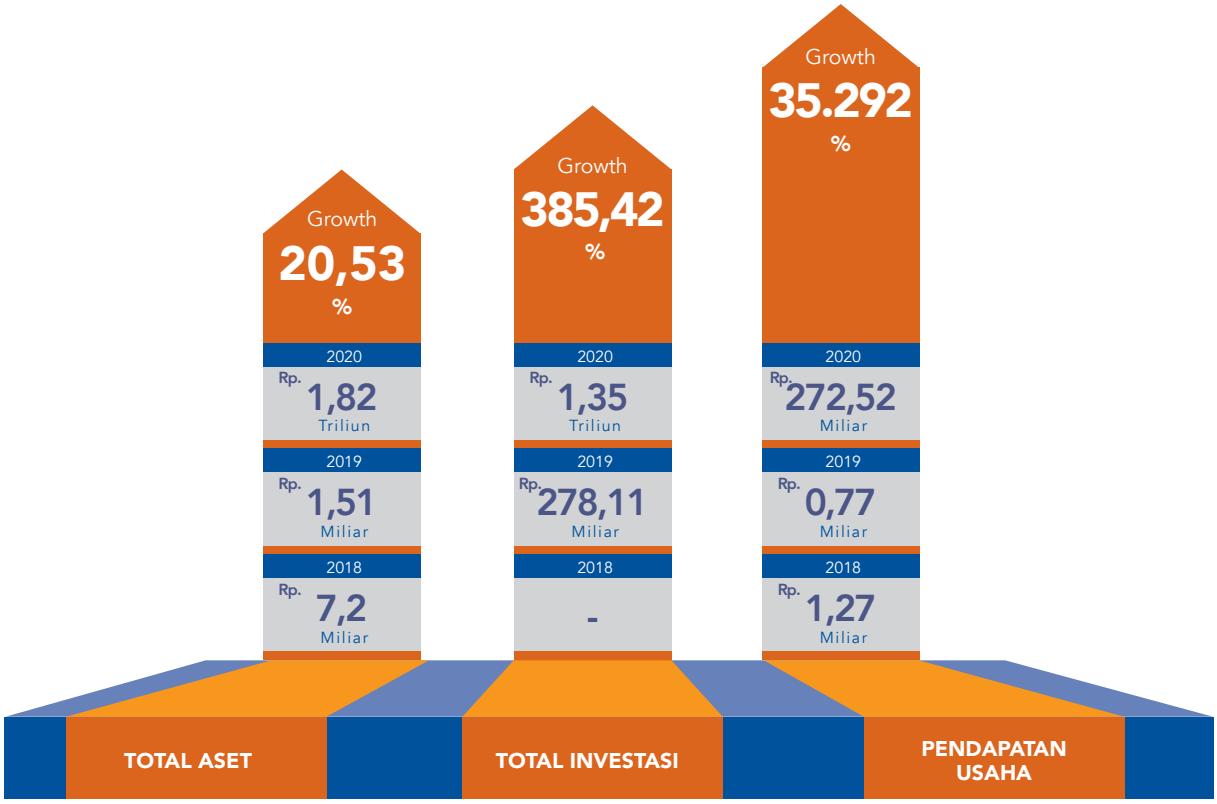

F. PT BRI VENTURA INVESTAMA (BRI VENTURES)

Profil Perusahaan

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures atau Perusahaan) adalah entitas anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) yang bergerak di bidang modal ventura, kepemilikan saham oleh Bank BRI pada BRI Ventures adalah sebesar 99.97% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. Sementara 0.03% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BRI Ventures saat ini mempekerjakan 24 orang karyawan terdiri dari (17 orang karyawan di Kantor Pusat Jakarta dan 7 orang karyawan di Kupang, NTT). Dengan masuknya Bank BRI, fokus Perusahaan bergeser menjadi *Corporate Venture Capital* bagi BRI Group.

Bisnis Entitas Anak

BRI Ventures diarahkan menjadi *Corporate Venture Capital* melalui investasi di perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi (*startup*), dengan potensi pasar yang luas, manajemen risiko yang solid serta *founder* yang memiliki pengertian yang cukup dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini selaras dalam membantu BRI Group mengembangkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna (*customer-centric*). BRI Ventures akan melakukan investasi pada perusahaan teknologi baik di dalam lingkup jasa keuangan (*Fintech*) maupun sektor bisnis lainnya (*Non-Fintech*).

BRI Ventures telah memperoleh persetujuan pengelolaan dana ventura dari OJK sesuai dengan Surat OJK No. S-2094/NB.111/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Persetujuan Bagi PT BRI Ventura Investama Untuk Mengelola Dana Ventura. Sehubungan dengan itu, Kontrak Investasi Bersama (KIB) antara BRI Ventures dan Bank Kustodian telah ditandatangani dan dituangkan dalam Akta notariil No. 12 tanggal 2 Juli 2020 dengan dana ventura yang bernama, Dana Ventura BVI Saham Alokasi Sembrani Nusantara (Dana Ventura Sembrani Nusantara). Saat ini BRI Ventures telah melakukan penyertaan saham melalui Dana Ventura Sembrani Nusantara kepada perusahaan-perusahaan pada sektor bisnis *Non-Fintech* dan telah merilis program accelerator untuk para *founders* yang ingin mengembangkan *startup*-nya.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Ventures sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Hadi Susanto	Komisaris Utama
Arip Tirta	Komisaris Independen
Agoosh Yoosran	Komisaris Independen

Direksi	
Nicko Widjaja	Direktur Utama
Yosephine Ajeng Sekar Putih	Direktur
William Gozali	Direktur

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Ventures membukukan total aset sebesar Rp1,82 Triliun, meningkat 20,53% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp1,51 Triliun. Pendapatan Usaha BRI Ventures di tahun 2020 tercatat sebesar Rp272,52 Miliar, meningkat 35.292,21% dari tahun 2019 yang sebesar Rp776 Juta.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

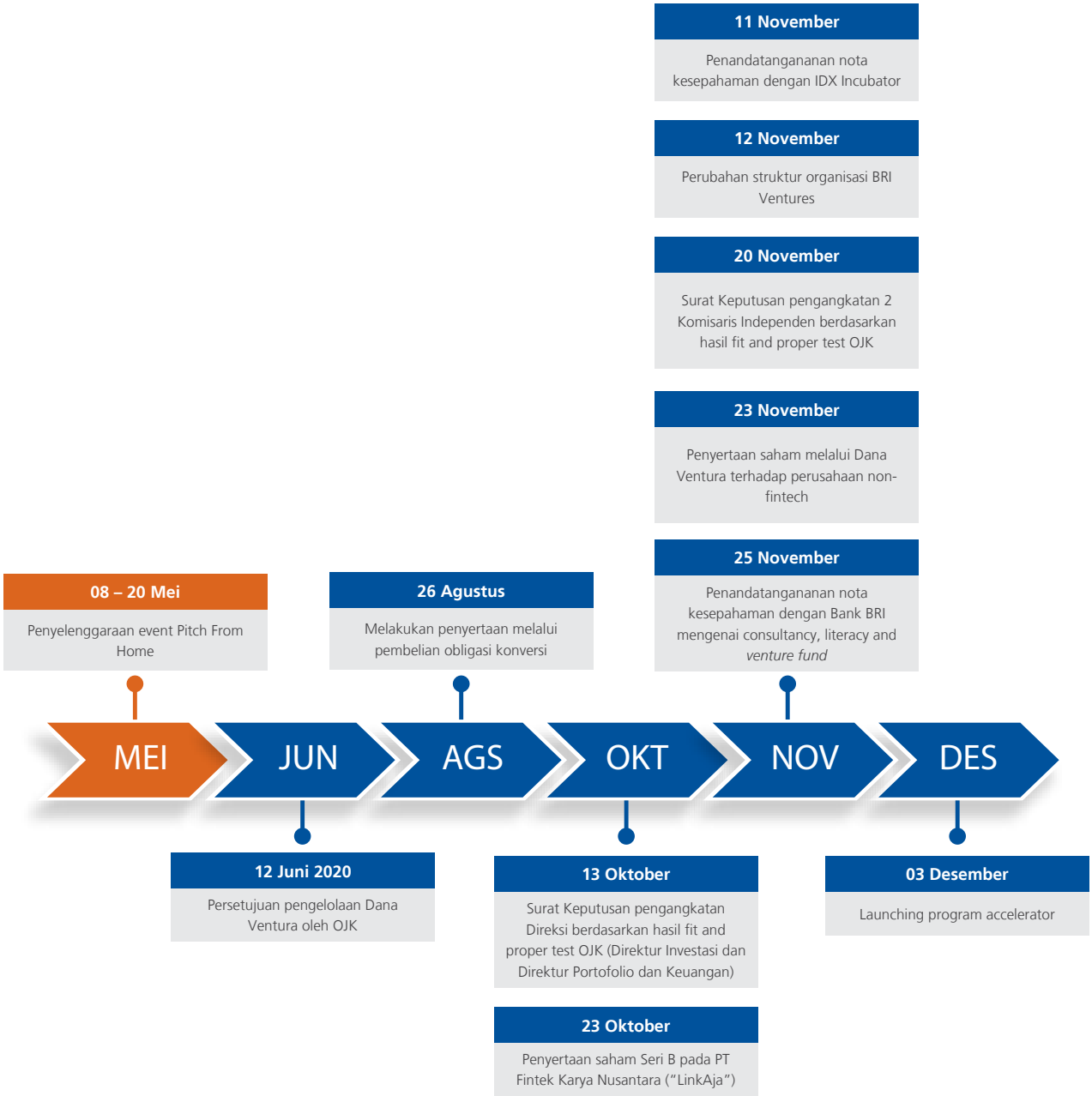

Penghargaan Tahun 2020

-

Strategi Pengembangan Bisnis

Fokus pengembangan bisnis BRI Ventures tahun 2021 adalah *Building Capability* :

- BRI Ventures fokus membangun *network investor dan startup digital;*
- *Co-invest* dengan leading Venture Capital;
- Kerjasama dengan unit bisnis BRI untuk realisasi *strategic benefits*;
- Berperan sebagai GP dan mencari investor eksternal untuk Dana Ventura Sembrani Nusantara.

Bisnis Entitas Anak

Fokus investasi BRI Ventures kepada startup dalam fase pertumbuhan, yaitu perusahaan rintisan yang sudah memiliki produk dan *revenue* yang bertumbuh pesat. Sedangkan, area investasi BRI Ventures adalah kepada perusahaan inovatif yang berpotensi meningkatkan kapabilitas, berdampak positif terhadap bisnis, dan membuka akses untuk ekosistem baru bagi Bank BRI dan grup usaha. Ada tiga segmen investasi, yaitu *fintech* (*payment, lending, remittance*), *fintech enabler (insurance, wealth management)*, dan *beyond fintech*. Sementara melalui Dana Ventura, akan digunakan oleh BRI Ventures untuk berinvestasi pada *digital startups* dengan kegiatan usaha utama yang tidak berada dalam sektor keuangan, antara lain di sektor "EARTH", yakni (e)ducation, (a)gro maritim, (r)itel, (t)ransportasi, (h)ealth. Hal ini dilakukan untuk diversifikasi investasi dan perluasan jangkauan BRI Ventures sebagai perpanjangan tangan Bank BRI untuk mempercepat laju inovasi produk keuangan ke depan.

Untuk pembiayaan usaha produktif yang selama ini menjadi fokus bisnis, dalam tahun 2021, Perusahaan akan melanjutkan aktivitas pembiayaan eksisting dengan memperhatikan kualitas pembiayaan yang lebih sehat dan menguntungkan.

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

- Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (AMVESINDO)
- Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI)

Bisnis Entitas Anak

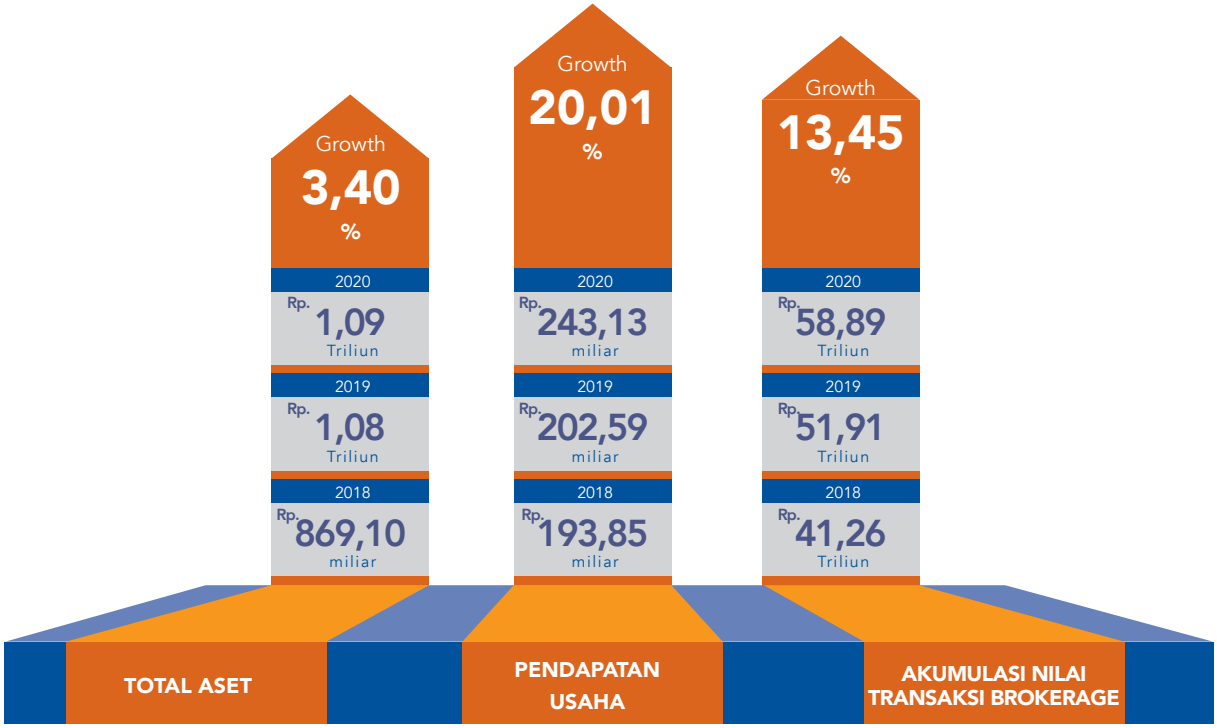

G. PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (BRI DANAREKSA SEKURITAS)

Profil Perusahaan

PT BRI Danareksa Sekuritas (Perusahaan) dahulu bernama PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 25 tanggal 1 Juli 1992. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7284.HT.01.01. Th. 92 tanggal 3 September 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 5392/1992 tanggal 27 Oktober 1992.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, serta kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perusahaan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.

Bisnis Entitas Anak

Sebagai bagian dari izin usaha yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penata laksana (*Arranger*) MTN, NCD, Hybrid Product seperti Perpetuity Notes, pinjaman sindikasi, GMTN, Global Bond dan Penasihat Keuangan (Financial Advisory) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

Pada tanggal 21 Desember 2018, BRI melakukan akuisisi saham PT Danareksa Sekuritas dari PT Danareksa (Persero) sebanyak 67,00%. Dengan demikian sejak saat itu BRI menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Danareksa Sekuritas. Perubahan susunan Pemegang Saham ini sebagaimana dituangkan dalam akta notaris Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., No. 52 tanggal 21 Desember 2018 yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHUAH. 01.03-0279737 tanggal 26 Desember 2018.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRI Danareksa Sekuritas sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Soehandjono	Komisaris
Sumihar Manullang	Komisaris Independen

Direksi	
Friderica Widyasari Dewi	Direktur Utama
Budi Susanto	Direktur
Santi Suryandari	Direktur
Boumediene Samurung Halomoan	Direktur

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Danareksa Sekuritas membukukan total aset sebesar Rp1,09 triliun meningkat 3,40% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp1,08 triliun. Pendapatan Usaha Gross BRI Danareksa Sekuritas di tahun 2020 tercatat sebesar Rp243,13 miliar, naik 20,30% dari tahun 2019 yang sebesar Rp201,96 miliar.

Akumulasi nilai transaksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp58,89 triliun, naik 13,44% dari tahun 2019 yang sebesar Rp51,91 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

FEB

13 Februari
Pengangkatan Friderica Widyasari Dewi sebagai Direktur Utama dan Sumihar Manullang sebagai Komisaris Independen

MEI

22 Mei 2020
Pengangkatan kembali Budi Susanto sebagai Direktur

OKT

1 Oktober
Perubahaan Struktur Organisasi

9 Oktober
Perubahan Nama Perseroan menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas

19 Oktober
Launching Gadai Saham (Kerja sama dengan Pegadaian)

DES

7 Desember
Launching Sistem Online Trading Syariah (D'One Syariah)

7 Desember
Launching Nama dan Logo Baru

Penghargaan Tahun 2020

- Indonesia Most Popular Digital Finance Brands - Millennial's Choice oleh The Iconomics
- 2nd Rank Securities Company oleh Majalah Infobank
- Best Equity House in Indonesia oleh Alpha Southeast Asia
- Best Sukuk – Infrastructure oleh The Asset
- Best Sukuk – Utility oleh The Asset
- Excellent in Brand Awareness Brand Image Category : Sekuritas oleh Economics

Bisnis Entitas Anak

Strategi Pengembangan Bisnis

Perusahaan akan berfokus pada peningkatan ritel bisnis melalui beberapa strategi seperti :

- Pembaharuan retail *online trading system* yang lebih stabil, *reliable* dan sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas tim ritel untuk mendukung kegiatan bisnis, termasuk transformasi digital dalam seluruh aspek layanan nasabah dengan memanfaatkan *platform* digital;
- Kerja sama dengan Sentra Layanan Prioritas BRI di kota-kota besar di Indonesia;
- Kerja sama *office space* di BRI untuk cabang-cabang BRIDS.

Perusahaan tetap akan mendorong pertumbuhan bisnis institusi melalui peningkatan kerja sama dengan grup BRI dan nasabah institusi lainnya yang selama ini telah terjalin baik. BRIDS juga akan melakukan ekspansi bisnis *underwriting, advisory* dan meningkatkan *research coverage*. Dari sisi *back office*, efisiensi proses bisnis masih akan dilakukan melalui integrasi sistem di seluruh aspek, salah satunya adalah pengembangan sistem dalam proses monitoring risiko. Penguatan jaringan infrastruktur IT juga menjadi salah satu pilar untuk menjamin keberlangsungan bisnis Perusahaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat saat ini.

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

- Anggota Bursa Efek Indonesia (AB)
- Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
- Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)
- Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Program Penjaminan di Pasar Modal)

Bisnis Entitas Anak

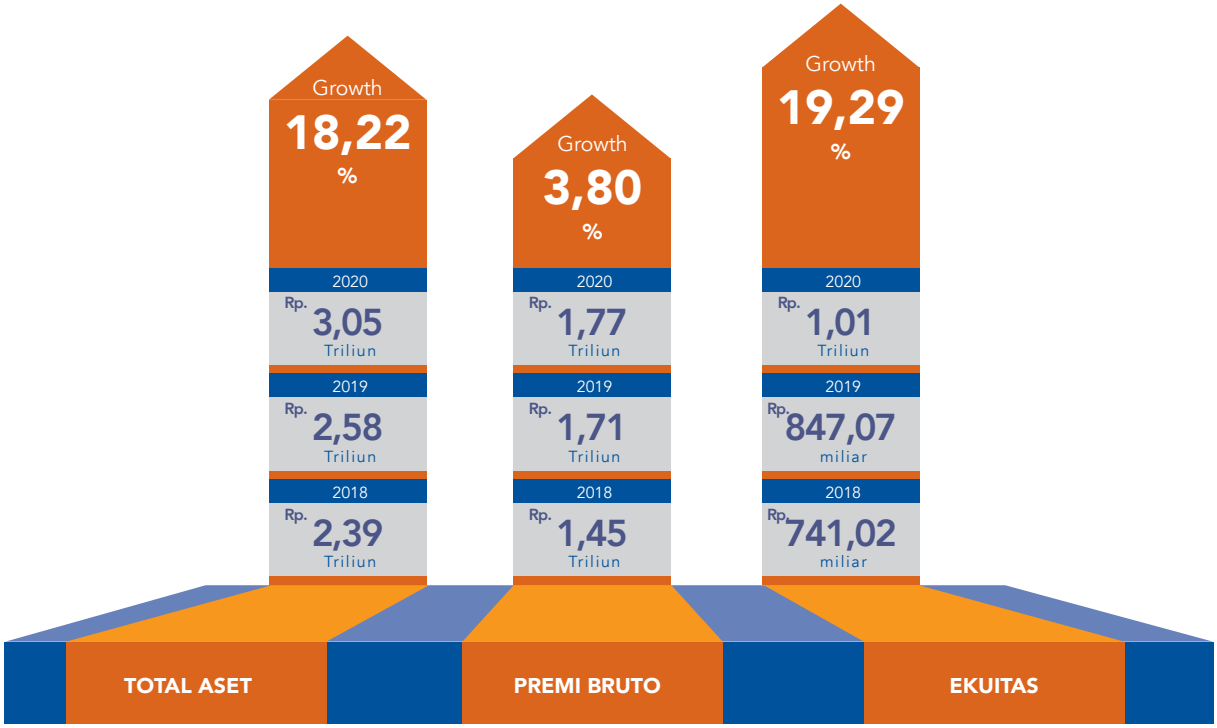

H. PT BRI ASURANSI INDONESIA (BRI INSURANCE)

Profil Perusahaan

PT BRI Asuransi Indonesia yang sebelumnya bernama PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur adalah sebuah perusahaan asuransi umum nasional yang didirikan oleh Yayasan Dana Pensiun BRI pada tanggal 17 April 1989 berdasarkan akta notaris Muhaini Salim SH di Jakarta dengan No. 121 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 3 Mei 1989 No. C2.4160.HT.01.01 tahun 1989. Perseroan memperoleh izin lisensi Dagang dari Menteri Keuangan RI dengan pengesahan No.KEP128/KM.13/1989 tanggal 26 Agustus 1989.

Pada tanggal 26 September 2019, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi mengakuisisi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) dengan membeli 90% saham perusahaan yang semula dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun BRI. Sejak tanggal 31 Januari 2020 PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur berganti nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia, perubahan nama perusahaan diiringi dengan *rebranding* logo dari BRINS menjadi BRI Insurance. *Rebranding* resmi diluncurkan pada saat BRI Insurance merayakan ulang tahun nya yang ke-31 pada tanggal 17 April 2020.

Bisnis Entitas Anak

Per Desember 2020 telah memiliki jaringan kerja di seluruh Indonesia yang terdiri dari 22 Kantor Cabang Konvensional, 1 Kantor Cabang Syariah, 8 Marketing Representative Office, 2 Representative Office Syariah, 45 Marketing Channel dan 11 Marketing Office Syariah.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BRI Insurance sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Darnawi	Komisaris Utama
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
Imam Sundoro	Komisaris Independen

Direksi	
Fankar Umran	Direktur Utama
Arif Suhirman	Direktur
Sonny Harsono	Direktur
Adi Setianto	Direktur
Ade Zulfikar	Direktur

Dewan Pengawas Syariah	
Ibu Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua DPS
Bapak Muhammad Syukhandri	Anggota DPS

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, BRI Insurance membukukan total aset sebesar Rp3,05 triliun meningkat 18,22% dibanding 31 Desember 2019 senilai Rp2,58 triliun. Premi bruto BRI Insurance di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,77 triliun, naik 3,80% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1,71 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting Tahun 2020

JAN

04 Januari
Program CSR Bantuan Korban Banjir Jakarta Posko bersama BRI

31 Januari
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk pengesahan perubahan susunan pengurus Perseroan

FEB

17 April
Hari Ulang Tahun BRI Insurance ke 24 , pemberian penghargaan pekerja 25 tahun, Launching Logo BRI Insurance & Launching BRINS Mobile Versi 2

22 April
Program CSR Bantuan APD Hazmat RSUD Tangerang, RS Siloam Karawaci, RS Sulianti Saroso

MEI

13 Mei
Program CSR Bantuan Paket Sembako Pundi Amal Bukti Ummat & Yayasan Dulur Salembur (YDS)

JUL

30 Juli
Penandatanganan kerjasama layanan penutupan asuransi agunan debitur Bank DKI

SEP

13 Agustus
Literasi Keuangan Webinar Goes To Campus

24 Agustus
Webinar Insurance Industry Challenges: The Future of Insurance Sector after Covid-19 Infobank

OKT

20 Oktober
Pembicara oleh Direktur Utama dalam kegiatan Dies Natalis UNHAS dengan tema ' BRI Insurance dukung UMKM demi pemulihan ekonomi nasional'

22 Oktober
Literasi Keuangan Webinar Goes To Campus

27 Oktober
Exclusive Interview 'The Strongest General Insurance' pada program Closing Bell CNBC Indonesia

27 Oktober
Webinar Mitigasi Resiko UMKM merespon Disrupsi dampak Pandemi Covid-19

NOV

17 November
Penandatanganan kerjasama dengan PT Lifepal Technologies Indonesia, PT Anugrah Atma Adiguna, dan PT Interspace Indonesia

20 November
Exclusive Interview 'Strategi Kolaborasi BRINS Di Masa Pandemi' pada program Metro Pagi Primetime di Metro TV – 20 November 2020

DES

3 Desember
Peresmian Pembukaan Kantor Syariah Cabang Aceh

10 Desember
Exclusive Interview 'Tinjauan Perkembangan Industri Asuransi Tahun 2021' pada program Berita Satu Media

11 Desember
Penandatanganan kerjasama dengan PT Artha Bina Bayangkara

Bisnis Entitas Anak

Penghargaan Tahun 2020

- Indonesia's Most Popular Financial Brands (Millennials' Choice) – Iconomics Media
- Top 20 - Most Innovative Insurance Companies Award 2020 – Iconomics Media
- Financial Performance Full Year 2019 with Predicate "Excellent" – Infobank
- Insurance Market Leader Award 2020 – Media Asuransi
- Asuransi Terbaik 2020 – Kategori Asuransi Umum Aset Di Atas Rp 1 Triliun s/d Rp 5 Triliun – Investor
- Best Financial Performance General Insurance with Assets Between IDR 2-10 Trillion – Thinknovate
- Best General Insurance 2020 Kelompok Ekuitas Rp500 Miliar s/d Rp1,5 Triliun – Media Asuransi
- The Strongest General Insurance – CNBC Indonesia
- Best Brand Image Financial Awards Millennial's Choice – Iconomics Media
- Top Financial Institution as The Best General Insurance Premi 1T s/d dibawah 2,5T – The Finance
- The Fastest Growing Company – The Finance

Bisnis Entitas Anak

Strategi Pengembangan Bisnis

Aspirasi korporasi BRI Insurance adalah untuk menjadi perusahaan asuransi umum terbaik sesuai dengan kelas ekuitas industri dengan fokus pada bisnis mikro dan retail, pengembangan teknologi yang unggul, serta berorientasi pada layanan kepada pelanggan.

Untuk merealisasikan aspirasi tersebut, BRI Insurance fokus pada empat pilar bisnis yaitu mikro, ritel, korporasi dan syariah. Empat pilar ini sebagai dasar pengembangan bisnis dan penentuan langkah- langkah strategis yang ditopang dengan diversifikasi saluran distribusi, kualitas produk dan layanan, optimalisasi dan digitalisasi proses bisnis, budaya kepatuhan dan pengelolaan eksposur risiko, kompetensi dan kinerja pekerja, dan implementasi budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan.

Pada tahun 2021 BRI Insurance menargetkan menjadi perusahaan terdepan dalam memasarkan produk asuransi mikro dengan melakukan diversifikasi produk dan saluran distribusi melalui digital serta ekspansi produk asuransi mikro ke pasar *non-captive* dan syariah.

Daftar Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
- Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
- Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) an Bpk. Alfonso Napitupulu – Komisaris Independen.

TINJAUAN KEUANGAN

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT KEUANGAN

Direktorat Keuangan mempunyai peran sentral dalam pengembangan perusahaan dan strategi BRI secara keseluruhan serta manajemen aset dan liabilitas yang optimal. Ketersediaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang andal akan memudahkan proses pengawasan kinerja, serta manajemen aset dan liabilitas BRI yang baik akan mendukung pencapaian strategi perusahaan.

KINERJA DIREKTORAT KEUANGAN TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun ke-3 transformasi yang dilakukan oleh BRI melalui BRIvolution untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia dan Home to The Best Talent* pada tahun 2022. Direktorat Keuangan berperan dalam menerjemahkan aspirasi tersebut melalui 6 peran utama, yaitu:

1. Corporate Strategy, Research, & Performance Management
   Corporate Development & Strategy Division bertanggung jawab terhadap formulasi strategi perusahaan yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan menjadi arah strategi perusahaan dalam 3 tahun ke depan. Strategi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi strategi bisnis wilayah melalui peran *Regional Decision Support* (RDS) di setiap Kantor Wilayah BRI dan juga strategi bisnis Direktorat melalui peran *Directorate Decision Support* (DDS) di masing-masing Direktorat. Dalam mengukur pencapaian implementasi strategi perusahaan, Direktorat Keuangan juga bertanggung jawab terhadap penetapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta *Key Performance Indicator* (KPI) dengan mempertimbangkan aspirasi perusahaan yang akan dicapai. Selain itu, Corporate Development & Strategy Division juga mengelola portofolio produk dan jasa BRI melalui forum Komite Produk yang dilaksanakan secara berkala.

2. Balance Sheet Management
   Asset & Liabilities Management Desk berperan dalam pengelolaan *balance sheet* BRI yang optimal dengan penerapan *risk management* melalui forum ALCO (Asset & Liabilities Committee). Efektifitas dari forum ALCO tersebut salah satunya dapat terlihat dari pada penurunan *cost of fund* BRI di Tahun 2020 menjadi 3,22%, turun dari 3,58% pada tahun 2019. Penurunan *cost of fund* tersebut berdampak positif untuk menjaga profitabilitas BRI terutama di situasi yang menantang akibat pandemic Covid-19 sepanjang tahun 2020.

3. Investor Communication & Advisory
   Pengelolaan hubungan investor dilakukan oleh **Investor Relations Division**, dimana kualitas, efektivitas, serta kuantitas komunikasi dengan para stakeholder di pasar modal, terutama dengan pemegang saham, terus diupayakan untuk ditingkatkan. Di tahun 2020, Investor Relation Division telah melakukan kegiatan komunikasi dengan investor dengan memanfaatkan teknologi virtual dalam berbagai kegiatan seperti *Analyst Meeting, Virtual Field Visit, Webinar,* dan *Virtual Public Expose*. Kegiatan komunikasi tersebut berdampak positif pada sentimen investor terhadap BRI yang tercermin pada *market capitalization* BRI periode 31 Desember 2020 yang telah mencapai Rp514,35 triliun.

Tinjauan Keuangan

4. Subsidiary Management
   Subsidiary Management Division bertugas untuk mengelola perusahaan anak BRI. Sebagai wujud dari *destination statement* BRI di tahun 2020 untuk menyediakan layanan keuangan terintegrasi (*integrated financial solution*), Subsidiary Management Division secara aktif mengoptimalkan sinergi dengan 8 perusahaan anak sebagai salah satu pilar pertumbuhan BRI melalui kebijakan Pengelolaan Sinergi BRI Group. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan *value* bagi perusahaan diantaranya dalam hal peningkatan kontribusi pendapatan (*revenue enhancement*) dan efisiensi biaya *(cost reduction*). Di tahun 2020, aset perusahaan anak BRI mampu tumbuh sebesar 19,9% dengan kontribusi laba perusahaan anak terhadap laba konsolidasi BRI 2020 sebesar 5,7%.

5. Financial Compliance, Accounting, and Data Analytics
   Financial & Management Accounting Division berperan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, dimana pada tahun 2020 terdapat penyesuaian terhadap perubahan regulasi akuntansi yaitu PSAK 71 (instrument keuangan), 72 (pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan), dan 73 (sewa), dengan tetap mempertahankan kualitas penyusunan laporan keuangan BRI. Selain itu, kemampuan *analytical* dari informasi keuangan BRI terus disempurnakan melalui implementasi BRIFIRST (BRI *Financial Enterprise System*) yang dikelola oleh **Tim BRIFIRST**. BRIFIRST merupakan inisiatif strategis Direktorat Keuangan untuk menciptakan "*IT Future Ready*" dengan melakukan modernisasi *Core Banking System* (CBS) BRI melalui implementasi *New Finance System*. BRIFIRST diharapkan dapat meningkatkan kemampuan *performance profitability analysis* BRI dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan tingkat keyakinan yang tinggi dan berbasis data.

Dalam mendukung tercapainya aspirasi BRI di tahun 2022, Direktorat Keuangan telah melakukan beberapa inisiatif strategis sepanjang tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 71
   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 71: Instrumen Keuangan merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan dan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards/ IFRS 9: Financial Instruments dan menggantikan standar akuntansi sebelumnya, yakni PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Salah satu penyebab terbitnya IFRS 9 adalah respon atas krisis keuangan tahun 2008 yang dinilai "*too little too late*" dalam pembentukan pencadangan risiko. Penerapan PSAK 71 dapat memberikan sinyal *early warning* yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan atas kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

2. Multiple Fund Transfer Price (FTP)
   Multiple FTP merupakan *journey* pengembangan metodologi FTP yang diterapkan mulai 2020 dengan penambahan diferensiasi tarif berdasarkan klasifikasi segmen & tenor. Multiple FTP tersebut menjadi jembatan dari milestone FTP sebelum penerapan metode yang lebih *advanced* dan *The Best in Class* yaitu *Matched Maturity* FTP. Multiple FTP dalam penerapannya memberikan fleksibilitas bagi unit kerja BRI dalam mengelola aset dan liabilitas untuk mencapai profitabilitas yang optimal dan komprehensif.

3. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh
   Inisiatif strategis Implementasi Qanun LKS Aceh merupakan penerapan terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Qanun LKS ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh termasuk BRI wajib mengimplementasikan ketentuan Qanun LKS ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun LKS diberlakukan. Pada dasarnya, Qanun LKS Aceh memperkuat sinergi antara BRI dengan BRI Syariah dimana sampai dengan 31 Desember 2020 BRI telah berhasil mengalihkan Rp12,2 triliun portofolio pinjaman dan Rp7,2 triliun

simpanan kepada BRI Syariah. Sinergi yang terjadi juga semakin optimal dengan pendirian 11 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu, dan 105 Kantor Unit BRI Syariah melalui skema *co-location* dengan BRI untuk membantu BRI Syariah dalam memberikan layanan keuangan syariah di seluruh wilayah Aceh.

4. Project Amanah

   Dalam rangka meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki aspirasi untuk melakukan integrasi Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN untuk memperkuat kapabilitas Bank Syariah tersebut, baik dari sisi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang optimal.

   Rencana integrasi Bank Syariah milik Bank BUMN ini dinamai Project Amanah yaitu rencana penggabungan Bank Syariah milik BUMN; yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Berdasarkan Ringkasan Rencana Penggabungan maka Bank Hasil Penggabungan adalah BRISyariah. Pasca penggabungan maka struktur pemegang saham menjadi BRI 17,29%, Bank Mandiri 50,95%, BNI 24,91%, dan Publik sebesar 6,85%. Atas penggabungan Bank Syariah milik BUMN tersebut, Bank Mandiri akan menjadi pengendali Bank Hasil Penggabungan.

   Penggabungan Bank Syariah milik BUMN tersebut memiliki potensi sinergi bisnis dan penambahan nilai yaitu kapabilitas finansial yang lebih kuat, akses jaringan yang semakin luas, basis nasabah yang lebih besar serta sistem teknologi informasi maupun produk yang lebih baik. Hal tersebut akan berpotensi meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing Bank Hasil Penggabungan sehingga diharapkan dapat mencapai BUKU 4 sebelum tahun 2025 dan dapat masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar industri perbankan syariah global.

5. Project Garuda

   Project Garuda merupakan bentuk inisiatif strategis Direktorat Keuangan untuk mengakselerasi bisnis BRI Life dengan menjalin kerjasama dengan *strategic partner* international. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat bisnis BRI Life baik di pasar *captive* maupun *non-captive* melalui peningkatan kapabilitas dari sisi *people, product*, dan *process*. Pada tanggal 19 Juni 2020 telah ditandatangani *Conditional Share Subscription Agreement* antara BRI, FWD, dan BRI Life dimana rencana kerjasama tersebut akan diimplementasikan setelah memperoleh persetujuan dari regulator.

6. BRI Micro & SME Index (BMSI)

   BRI Micro & SME Index (BMSI) merupakan indikator yang khusus mengukur aktivitas UMKM di Indonesia. Sebagai Bank yang berfokus pada UMKM dimana 80% portofolio berada pada segmen tersebut, BRI berkepentingan terhadap pengembangan UMKM yang saat ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dimana segmen UMKM berkontribusi terhadap sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. BMSI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder terutama bagi pembuat kebijakan publik.

Di tahun 2021, Direktorat Keuangan terus berupaya untuk berkontribusi terhadap laju pertumbuhan BRI melalui beberapa inisiatif strategis, diantaranya yaitu:

1. BRICore

   BRICore merupakan sistem performance management di BRI yang dikembangkan untuk mewujudkan performance driven culture, merupakan improvement dari konsep penyusunan KPI dan Individual Performance Management saat ini. BRICore bertujuan untuk menyelaraskan sasaran unit kerja dengan target pencapaian individu & memastikan seluruh target dan sasaran dapat termonitor dengan baik.

2. Pemisahan segmen PSO (public service obligation) dan komersial

   Sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham 2021, BUMN diharapkan menyiapkan infrastruktur untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan segmen: (a) komersial, dan (b) segmen Public Service Obligation (PSO) dan diharapkan laporan

Tinjauan Keuangan

segmentasi menjadi bagian dari Catatan Atas Laporan Keuangan yang diaudit untuk tahun 2021. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja segmen bisnis BRI yang mencerminkan peran BRI sebagai commercial entity dan *agent of development* yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintah (Public Service Obligation).

3. Desain otomasi performance management
   Inisiatif strategis ini merupakan pengembangan aplikasi *performance management* untuk otomasi penyusunan KPI (dari level Korporat sampai dengan UKO) serta otomasi *performance review*, dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses *performance management*.

Bab Tinjauan Keuangan ini mengulas analisis dan pembahasan kinerja keuangan BRI selama tahun 2020. Penyusunan dan penyajiannya disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Seluruh materi uraian ini disusun berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja-Ernst & Young (PSS-EY) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No.00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2021 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian BRI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI tersebut juga disampaikan sebagai lampiran dalam laporan tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

Total aset BRI mencapai Rp1.511,81 triliun di akhir tahun 2020, atau tumbuh 6,71% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1.416,76 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari Kredit yang Diberikan (termasuk Piutang Sewa Pembiayaan) BRI naik 3,81% menjadi Rp941,99 triliun, atau komposisinya menjadi 62,31% dari Total Aset.

Rp juta

Ringkasan Neraca	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Komposisi		Komposisi		Komposisi		2019-2020
	Nominal	(%)	Nominal	(%)	Nominal	(%)	
Kas	27.421.625	2,11	30.219.214	2,13	32.161.564	2,13	6,43
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	5,49	71.416.449	5,04	51.530.969	3,41	-27,84
Giro dan Penempatan pada bank lain - netto	99.695.406	7,69	127.092.463	8,97	75.582.150	5,00	-40,53
Efek-Efek, Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	226.990.368	17,50	252.607.675	17,83	400.332.096	26,48	58,48
Obligasi Rekapitulasi Pemerintah	1.505.273	0,12	1.130.306	0,08	-	0,00	-100,00
Kredit, Piutang Syariah dan Pembiayaan	838.141.014	64,63	907.388.986	64,05	941.993.104	62,31	3,81
CKPN kredit -/-	-35.511.191	-2,74	-39.196.369	-2,77	-66.827.551	-4,42	70,49
Tagihan derivatif - netto	485.810	0,04	210.396	0,01	1.576.659	0,10	649,38
Tagihan akseptasi - netto	11.643.003	0,90	9.346.063	0,66	6.271.176	0,41	-32,90
Penyertaan - netto	460.096	0,04	745.304	0,05	1.489.800	0,10	99,89
Aset tetap - netto	26.914.859	2,08	31.432.629	2,22	32.185.160	2,13	2,39

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Ringkasan Neraca	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Komposisi		Komposisi		Komposisi		2019-2020
	Nominal	(%)	Nominal	(%)	Nominal	(%)	
Aset Pajak Tangguhan	5.114.653	0,39	4.541.298	0,32	8.313.545	0,55	83,07
Aset lain	22.877.934	1,76	19.824.426	1,40	27.195.956	1,80	37,18
Total Aset	1.296.898.292	100,00	1.416.758.840	100,00	1.511.804.627	100,00	6,71

Kas dan Giro Pada Bank Indonesia

Posisi Kas BRI pada 31 Desember tahun 2020 tercatat sebesar Rp32,16 triliun, meningkat 6,43% dibandingkan akhir tahun 2019 yang sebesar Rp30,22 triliun. Kenaikan Kas sejalan dengan strategi Perusahaan dalam mengelola likuiditas dalam menjalankan operasional bisnis. Sedangkan saldo Giro pada Bank Indonesia (BI) mencapai Rp51,53 triliun di tahun 2020, atau turun 27,84% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp71,42 triliun sejalan dengan Kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan batas minimal GWM primer dari 6% (Rupiah) dan 8% (Valas) di tahun 2019, menjadi 3% (Rupiah) dan 4% (Valas) di tahun 2020. Pada tahun 2020, GWM Primer Rupiah dan Valas tercatat masing-masing 3,19% dan 4,01%.

Giro pada Bank Lain serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Giro pada Bank lain serta Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain turun 40,53% pada tahun 2020 menjadi Rp75,58 triliun dari Rp127,09 triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut dalam rangka optimalisasi dana yang dimiliki BRI guna dialihkan ke aset yang memiliki *yield* yang lebih optimal (*yield enhancement*)

Efek-efek, Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya, serta Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek, Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya, serta Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali BRI naik 58,48% dari Rp252,54 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp400,33 triliun pada tahun 2020. Kenaikan tersebut terutama dalam rangka optimalisasi *excess* likuiditas BRI akibat perlambatan pertumbuhan kredit selama tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder. Pada tahun 2020, Obligasi Rekapitalasi Pemerintah seluruhnya telah jatuh tempo sehingga bersaldo nihil.

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan

Penyaluran Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan BRI pada tahun 2020 mencapai Rp941,99 triliun atau naik 3,81% dari tahun 2019 yang sebesar Rp907,39 triliun. Peningkatan Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan paling besar bersumber dari segmen mikro yang mampu tumbuh 14,17% menjadi Rp351,36 triliun. Komposisi Mikro (bank saja) menjadi 39,89% atau naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 35,80% hal ini juga turut mendorong kenaikan komposisi UMKM secara konsolidasi menjadi 82,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 79,00%, sejalan dengan komitmen BRI untuk fokus pada penyaluran kredit UMKM.

Peningkatan Kredit yang Diberikan BRI di tahun 2020 tak terlepas dari adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR BRI (bank saja) pada tahun 2020 mencapai Rp138,54 triliun dengan outstanding sebesar Rp148,10 triliun, atau masing-masing tumbuh 57,62% dan 71,41%. Pada 2019, penyaluran dan outstanding KUR BRI masih sebesar Rp87,97 triliun dan Rp86,40 triliun. Peningkatan KUR BRI di tahun 2020 terutama didukung dari KUR Mikro yang mana didalamnya terdapat skema baru yaitu KUR Super Mikro, dimana porsi penyaluran dan outstanding KUR

Mikro BRI dibandingkan total kredit masing-masing mencapai 14,26% dan14,39%. Kesuksesan program penyaluran KUR BRI merupakan hasil dari komitmen penuh BRI dalam memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan Berdasarkan Mata Uang

Rp juta

Segmen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Mikro*	274.353.923	307.748.304	351.356.224	14,17
Rupiah	274.353.923	307.748.304	351.356.224	14,17
Valas	-	-	-	-
Ritel*	347.837.709	380.086.668	380.505.596	0,11
Rupiah	333.288.639	364.117.502	366.405.304	0,61
Valas	14.549.070	15.909.166	14.100.292	-11,37
Korporasi	192.361.135	189.596.221	167.596.386	-11,60
Rupiah	122.254.317	122.748.327	101.281.928	-17,49
Valas	70.106.818	66.847.894	66.314.358	-0,80
Total Kredit Non Pembiayaan dan Piutang Syariah	814.552.767	877.431.193	899.458.206	2,51
Rupiah	729.896.879	794.674.133	824.698.495	3,78
Valas	84.655.888	82.757.060	74.759.711	-9,66
Pembiayaan dan Piutang Syariah	20.178.401	25.766.197	38.915.673	51,03
Piutang Sewa Pembiayaan	3.409.846	4.191.596	3.619.224	-13,66
Total Kredit yang disalurkan	838.141.014	907.388.986	941.993.104	3,81
CKPN	(35.511.191)	(39.196.369)	(66.827.551)	70,49
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	802.629.823	868.192.617	875.165.553	0,80

*) Angka kredit setelah reklasifikasi segmen

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan Berdasarkan Segmen Operasi

Rp juta

Segmen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Ritel*	347.837.709	380.086.668	380.505.596	0,11
Mikro*	274.353.923	307.748.304	351.356.224	14,17
Korporasi	192.361.135	189.596.221	167.596.386	-11,60
Pembiayaan dan Piutang Syariah	20.178.401	25.766.197	38.915.673	51,03
Piutang	3.409.846	4.191.596	3.619.224	-13,66
Total Kredit yang Disalurkan	**838.141.014**	**907.388.986**	**941.993.104**	**3,81**

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Segmen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
CKPN	(35.511.191)	(39.196.369)	(66.827.551)	70,49
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	802.629.823	868.192.617	875.165.553	0,80

*) Angka kredit setelah reklasifikasi segmen

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Rp juta

Segmen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Kupedes	274.265.895	307.717.343	351.337.165	14,18
Modal Kerja	239.061.282	239.200.458	221.667.456	-7,33
Konsumer	131.665.922	141.624.146	144.588.039	2,09
Investasi	139.994.285	147.317.788	140.436.362	-4,67
Program	19.794.242	35.139.821	35.879.902	2,11
Sindikasi	9.737.049	6.408.790	5.362.649	-16,32
Karyawan Kunci	34.092	22.847	186.633	716,88
Pembiayaan dan Piutang Syariah	20.178.401	25.766.197	38.915.673	51,03
Piutang	3.409.846	4.191.596	3.619.224	-13,66
Total Kredit yang disalurkan	**838.141.014**	**907.388.986**	**941.993.104**	**3,81**
CKPN	(35.511.191)	(39.196.369)	(66.827.551)	70,49
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	802.629.823	868.192.617	875.165.553	0,80

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk sebagai mitigasi atas potensi kerugian yang mungkin muncul akibat terjadinya penurunan nilai aset produktif. Perhitungan penilaian CKPN kredit menggunakan pendekatan secara *individual impairment* dan *collective impairment*. Metode individual impairment digunakan untuk kredit yang secara *individual* memiliki nilai signifikan yaitu Rp5 miliar ke atas dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Sedang *collective impairment* untuk kredit yang memiliki nilai di bawah Rp5 miliar serta kredit dengan nilai Rp5 miliar ke atas tetapi tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai.

CKPN BRI pada tahun 2020 sebesar Rp66,82 triliun, naik 70,49% dari tahun 2019 sebesar Rp39,20 triliun. Kenaikan CKPN ini disebabkan oleh adanya implementasi PSAK 71 (IFRS 9) per 1 Januari 2020 serta sebagai bentuk mitigasi atas potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak Pandemi Covid-19. Posisi CKPN ini merupakan kebijakan BRI dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakomodasi tekanan terhadap kualitas aset, khususnya ditengah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan peningkatan CKPN ini, Rasio Kecukupan Atas Kredit Bermasalah (NPL Coverage Ratio) tetap terjaga pada kisaran 237,73% (konsolidasi) di tahun 2020.

Dalam melakukan mitigasi risiko kredit, selain membentuk CKPN yang memadai, BRI juga memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit serta kondisi dan proyeksi ekonomi makro. BRI memperhitungkan

agunan sebagai arus kas masa datang apabila kredit tersebut *collateral dependent* atau pelunasan kredit berasal dari agunan atau pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas peningkatan agunan. Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah di antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala. BRI telah memiliki prosedur untuk memastikan eksekusi agunan, jaminan atau asuransi kredit dilakukan pada nilai yang wajar. Metodologi perhitungan CKPN yang lebih detil dibahas di bagian Manajemen Risiko.

Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali (Pendapatan Recovery)

Hingga tahun 2020, BRI melakukan penghapusan aset kredit sebesar Rp13,66 triliun (bank saja), turun 19,69% dibanding pada 2019 sebesar Rp17,01 triliun. Penghapusan Kredit merupakan langkah terakhir yang dilakukan perusahaan setelah berbagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit telah dilakukan, antara lain restrukturisasi kredit, penagihan maupun penjualan agunan. Penghapusan Kredit dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *prudential banking.*

Penghapusan aset kredit sebagian besar terjadi di segmen mikro dan ritel, namun selalu diimbangi dengan perolehan pendapatan *recovery* yang baik, tercatat *recovery rate* segmen mikro dan ritel sebesar 72,82% dan 51,27%. Secara keseluruhan pendapatan recovery tercatat sebesar Rp7,16 triliun (bank saja) pada tahun 2020, naik 2,35% dibandingkan 2019 sebesar Rp6,99 triliun, atau mencapai *recovery rate* sebesar 52,43%. Rincian Pendapatan *Recovery* dibahas pada bagian Laporan Laba Rugi.

Penyertaan Saham

Hingga tahun 2020, Penyertaan Saham BRI sebesar Rp1,49 triliun, tumbuh sebesar 99,89%dibanding tahun 2019 sebesar Rp745,30 miliar. Peningkatan ini terjadi karena BRI melakukan tambahan investasi pada PT. Fintek Karya Nusantara sebesar Rp315 miliar dan investasi di beberapa perusahaan penyelenggara teknologi finansial (fintech company) sebesar Rp425 Miliar, melalui BRI Ventures (entitas anak). BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai. Pada tahun 2020, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

Pada tahun 2020, BRI telah menerima dividen tunai dari dari PT Danareksa Investment Management (entitas anak) sebesar Rp5,53 miliar. BRI Agro (entitas anak) juga telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT. Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp6 juta, Rp5 juta, dan Rp11 juta. Sedangkan PT. Danareksa Sekuritas (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp1 miliar. Kemudian PT BRI Insurance (entitas anak) telah menerima dividen tunai sebesar Rp1 miliar. Hingga tahun 2020, jumlah cadangan kerugian nilai atas penyertaan saham yang dibentuk sebesar Nihil.

Penyertaan Saham

Rp juta

Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Persentase Kepemilikan 2020 (%)	Nilai tercatat		
			2018	2019	2020
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan Efek	35,00	372.271	377.770	380.198
PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	35,00	72.607	74.206	74.396
PT Fintek Karya Nusantara	Perusahaan Finansial Teknologi	13,22	-	250.000	565.245
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara teknologi finansial	4,01	-	-	146.457
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara teknologi finansial	1,63	-	-	78.560

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Persentase Kepemilikan 2020 (%)	Nilai tercatat		
			2018	2019	2020
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara teknologi finansial	3,67	-	-	120.480
Nium Pte Ltd	Penyelenggara teknologi finansial	1,29	-	-	48.255
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara teknologi finansial	2,44	-	-	28.580
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,88	-	28.110	31.437
PT Pemeringkatan Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	8,01	7.978	7.978	7.970
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50	3.500	3.500	3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan Surat Berharga	4,30	1.275	1.275	1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	SRO	2,00	1.000	1.000	1.000
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan Kesehatan	1,68	220	220	211
Bursa Efek Indonesia	SRO	0,80	135	135	135
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non Bank	8,00	536	536	221
PT Menara Proteksi Indonesia	Properti	2,00	200	200	0
BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	77	77	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00	77	77	66
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	66	66	50
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana Olahraga	0,64	50	50	35
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75	35	35	25
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana Olahraga	0,24	25	25	23
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13	23	23	20
PT Aplikanusa Lintasarta	Non Bank	0,03	20	20	1
PT Danareksa Finance	Financial Institution	0,01	1	1	0
Investasi lain	Konsorsium Asuransi Risiko Khusus	0,00	-	0	1.717
Total			460.096	745.304	1.489.800

Tinjauan Keuangan

Aset Tetap

Pada tahun 2020, jumlah aset tetap-neto BRI mencapai Rp32,18 triliun, naik 16,79% dibanding tahun 2019 sebesar Rp31,43 triliun. Peningkatan ini karena adanya penambahan nilai buku bersih Rp668,96 miliar. terutama dari nilai hak atas tanah, komputer dan mesin, serta perlengkapan kantor akibat adanya implementasi PSAK 73 terkait sewa di BRI pada tahun 2020

Program revaluasi aset tetap pertama kali dilakukan BRI pada tahun 2016. Pada tahun 2019, BRI kembali melakukan kegiatan revaluasi aset tetap. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah sebesar Rp3,22 triliun dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,32 triliun, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp101,53 miliar, diakui dalam laporan laba rugi pelaporan berjalan. Revaluasi atas tanah dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain BRI hingga Desember tahun 2020 sebesar Rp27,19 triliun, meningkat 37,18% dibanding tahun 2019 sebesar Rp19,82 triliun. Kenaikan Aset Lain-Lain terutama disebabkan komponen tagihan terkait dengan transaksi E-Channel & E-Banking (ATM dan kartu kredit) dari tahun 2019 sebesar Rp1,19 triliun menjadi sebesar Rp4,18 triliun serta peningkatan tagihan kepada pemerintah terkait penyaluran KUR pada tahun 2019 sebesar Rp2,21 triliun menjadi sebesar Rp3,87 triliun.

Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer

Pada tahun 2020, Total Liabilitas BRI mencapai Rp1.311,89 triliun, naik 8,60% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.207,97 triliun. Peningkatan liabilitas ini terutama didorong oleh naiknya pertumbuhan Simpanan Nasabah menjadi Rp1.121,10 triliun, atau naik 9,78% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1.021,19 triliun.

Liabilitas

Rp juta

Ringkasan Neraca	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	2019-2020
Simpanan Nasabah*	944.268.737	84,95	1.021.196.659	84,54	1.121.102.149	85,46	9,78
Giro	180.669.095	16,25	174.927.804	14,48	193.077.994	14,72	10,38
Tabungan	387.179.625	34,83	414.332.525	34,30	475.848.207	36,27	14,85
Deposito	376.420.017	33,86	431.936.330	35,76	452.175.948	34,47	4,69
Liabilitas Segera	8.462.958	0,76	7.549.312	0,62	11.845.910	0,90	56,91
Simpanan dari Bank lain	9.131.158	0,82	17.969.829	1,49	23.785.996	1,81	32,37
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.379.394	3,36	49.902.938	4,13	40.478.672	3,09	-18,89
Pinjaman diterima	40.457.429	3,64	30.921.771	2,56	35.968.985	2,74	16,32
Surat Berharga yang diterbitkan	31.190.216	2,81	38.620.837	3,20	34.489.091	2,63	-10,70
Liabilitas lainnya	40.733.069	3,66	41.813.158	3,46	44.222.449	3,37	5,76
Total liabilitas	1.111.622.961	100,00	1.207.974.504	100,00	1.311.893.252	100,00	8,60

*) termasuk Dana Syirkah Temporer

Liabilitas Segera

Liabilitas Segera antara lain terdiri dari kewajiban BRI sebagai bank penerbit kartu ATM dan Kartu Kredit, kiriman uang, dana setoran cek, titipan deposito, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BRI, dan penampungan bantuan sosial. Liabilitas Segera pada periode Desember tahun 2020 sebesar Rp11,85 triliun, naik 56,91% dibanding tahun 2019 sebesar Rp7,55 triliun. Komponen Liabilitas Segera yang mengalami kenaikan terbesar adalah titipan *advance payment*,titipan ATM dan Kartu Kredit dan liabilitas lain-lain

Tinjauan Keuangan

Simpanan Nasabah

Jumlah simpanan nasabah BRI (termasuk dana syirkah temporer) yang mencapai Rp1,121 triliun ini terutama ditopang kenaikan giro sebesar 10,38% atau menjadi Rp193,08 triliun. Sementara produk tabungan dan deposito naik masing-masing 14,85% dan 4,69% atau menjadi Rp475,85 triliun dan Rp452,18 triliun. Struktur simpanan nasabah terdiri dari perolehan dana murah, giro dan tabungan (CASA) sebesar 59,67% dan deposito berjangka sebesar 40,33%. Penghimpunan CASA yang lebih tinggi dibanding Deposito Berjangka sejalan dengan kebijakan BRI untuk fokus pada pertumbuhan CASA dan upaya dalam efisiensi biaya dana. Perolehan dana murah ditopang oleh keberadaan 9.618 unit kerja (bank saja) BRI yang tersebar hingga ke pelosok Nusantara. Selain itu, didukung oleh inisiatif branchless banking BRI yaitu agen BRILink yang sebanyak 504.233 agen (bank saja) yang telah berada lebih dari 74% Desa di Indonesia yang ikut berperan dalam meningkatkan kemudahan nasabah BRI untuk menabung melalui agen BRILink.

Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer mencapai Rp33,55 triliun ini terutama ditopang kenaikan Tabungan Mudharabah dan Deposito Berjangka Mudharabah masing-masing sebesar 203,50% dan 37,75%, atau menjadi Rp6,15 triliun dan Rp25,78 triliun.

Rp juta

Simpanan Nasabah	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Giro	178.097.981	168.826.135	185.151.229	9,67
Giro wadiah	2.277.850	2.020.866	6.303.202	211,91
Giro Mudharabah	293.264	4.080.803	1.623.563	-60,21
Tabungan	379.918.705	405.355.483	460.453.588	13,59
Tabungan Wadiah	5.601.811	6.951.688	9.247.604	33,03
Tabungan Mudharabah	1.659.109	2.025.354	6.147.015	203,50
Deposito Berjangka	357.413.513	413.223.653	426.399.550	3,19
Deposito Berjangka Mudharabah	19.006.504	18.712.677	25.776.398	37,75
Total Simpanan Nasabah	944.268.737	1.021.196.659	1.121.102.149	9,78
Komposisi Giro dan Tabungan/CASA	60,14%	57,70%	59,67%	3,40
Komposisi Deposito	39,86%	42,30%	40,33%	-4,64

Total Simpanan Nasabah

(Rp triliun)

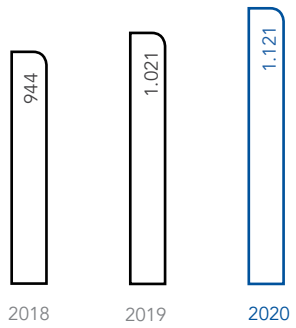

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Simpanan dari bank Lain dan lembaga keuangan lainnya digunakan sebagai salah satu fasilitas pendanaan jangka pendek antar bank (*interbank call money*) dan bagian dari strategi manajemen likuiditas. Simpanan yang masuk dalam pos ini yaitu giro, tabungan, deposito berjangka, *interbank call money*, dan *deposit on call*. Pada tahun 2020, pos ini mencapai Rp23,79 triliun, naik 32,37% dibanding tahun 2019 sebesar Rp17,97 triliun.

Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Pada tahun 2020, jumlah efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mencapai Rp40,48 triliun, turun 18,89% dibanding tahun 2019 sebesar Rp49,90 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kebutuhan likuiditas di 2020 telah tercukupi dari liabilitas yang bersumber dari dana pihak ketiga.

Surat Berharga yang diterbitkan

Pada akhir tahun 2020, surat berharga yang diterbitkan mencapai Rp34,49 triliun, turun 10,70% dibanding tahun 2019 sebesar Rp38,62 triliun. Penurunan Surat Berharga ini sejalan dengan kondisi likuiditas BRI yang sangat memadai di tahun 2020. Surat berharga yang diterbitkan BRI pada tahun 2020 adalah: *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020 pada 29 Juni 2020, dengan nilai pokok sebesar Rp2 triliun dalam tiga seri dengan jatuh tempo masing-masing pada 28 September 2020, 23 Desember 2020, dan 24 Juni 2021. Penerimaan neto dari penerbitan NCD BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas rupiah.

Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2020, jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp35,97 triliun, naik 16,32% dibanding tahun 2019 yang masih sebesar Rp30,92 triliun. Pinjaman yang diterima pada tahun 2020 antara lain berasal dari pinjaman sindikasi *club loan* dengan total pinjaman USD1 juta atau sebesar Rp14,05 triliun. Penerimaan dana sebagai upaya *matching maturity* dan digunakan untuk pembiayaan pinjaman yang bersifat jangka panjang.

Liabilitas Lain-lain

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, liabilitas imbalan kerja, pinjaman dan surat berharga subordinasi, serta liabilitas lain-lain. Pada tahun 2020, liabilitas lain-lain mencapai Rp44,22 triliun, turun 5,76% dibanding tahun 2019 sebesar Rp41,81 triliun. Penurunan ini terutama karena turunnya liabilitas lain-lain, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas utang bunga.

EKUITAS

BRI mencatat ekuitas sebesar Rp199,91 triliun, turun 4,25% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp208,78 triliun. Penurunan ekuitas disebabkan oleh penerapan PSAK 71 yang mempengaruhi saldo laba ditahan sebesar Rp12,39 triliun. Disisi lain BRI membayar dividen sebesar 60% atas laba tahun 2019 lebih tinggi dari dividen di tahun sebelumnya yang sebesar 55%.

Pada tahun 2020, BRI telah melakukan excersice Progran saham Pekerja atau Employee Stock Allocation (ESA) dengan total 231.111.000 lembar saham kepada 54.527 pekerja, yang terdiri dari ESA tahap 1 sebesar 4.396.700 lembar saham dan ESA Tahap 2 sebesar 226.714.300 lembar saham, untuk meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang pada pekerja sehingga diharapkan mampu secara konsisten mendorong peningkatan produktifitas dan pencapaian kinerja jangka panjang Perusahaan. Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan. Program ESA III dan IV masing-masing akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2021 dan akan dibayarkan dengan saham BRI.

Rp juta

Komponen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	-
Tambahan modal disetor - bersih	2.692.663	2.900.994	3.411.813	17,61
Surplus revaluasi aset tetap-bersih	13.824.692	17.099.207	17.099.207	-
Selisih Kurs karena penjabaran				
laporan keuangan dalam mata uang asing	49.850	-14.970	-54.749	265,71

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Komponen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Opsi Saham	10.971	22.409	72.894	225,29
Cadangan Kompensasi atas Saham Bonus	426.670	21.796	1.228.805	5537,75
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi				
atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang				
tersedia untuk dijual -bersih	-2.070.378	715.770	5.598.941	682,23
Keuntungan pengukuran kembali				
program imbalan pasti - bersih	1.154.343	189.519	-1.469.726	-875,50
modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	-2.418.948	-2.106.014	-1.649.076	-
Total Saldo Laba	163.130.389	181.327.431	166.972.167	-7,92
Total ekuitas yang dapat didistribusikan				
kepada Pemilik Induk	182.967.543	206.323.433	197.377.567	-4,34
Kepentingan Non Pengendali	2.307.788	2.460.903	2.533.809	2,96
Total Ekuitas	185.275.331	208.784.336	199.911.376	-4,25

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Di tengah krisis ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 BRI masih mampu membukukan laba bersih positif sebesar Rp18,66 triliun di tahun 2020, meskipun turun 45,78% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp34,41 triliun. Penurunan pertumbuhan laba ini terbesar disumbang oleh turunnya pendapatan bunga sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh BRI dalam rangka penyelamatan UMKM serta kenaikan biaya pencadangan asset produktif (CKPN) sebagai salah satu mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas asset di tengah pandemic Covid-19.

Rp juta

Komponen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Pendapatan Bunga	108.458.358	118.379.729	112.584.087	-4,90
Pendapatan Bagi Hasil -Syariah	3.124.446	3.376.547	4.348.425	28,78
Dikurangi : beban bunga dan syariah	-33.917.032	-40.048.971	-37.722.595	-5,81
Pendapatan bunga dan bagi hasil - netto	77.665.772	81.707.305	79.209.917	-3,06
Pendapatan Premi	4.178.213	5.373.757	6.208.716	15,54
Biaya klaim	-3.232.491	-4.363.029	-5.327.065	22,10
Pendapatan Premi - netto	945.722	1.010.728	881.651	-12,77
Pendapatan Operasional lainnya	23.425.430	28.439.130	29.463.839	3,60

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Komponen	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian Penurunan Nilai atas keuangan dan non keuangan - netto	-17.792.693	-21.556.996	-30.617.491	42,03
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontingensi -netto	912	-608.271	-2.157.162	254,64
Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset - non keuangan - netto	-528.982	-595.013	-75.231	-87,36
Dikurangi : Beban Operasional Lainnya	-41.990.284	-44.965.625	-49.931.359	11,04
Laba operasional	41.725.877	43.431.933	26.774.164	-38,35
Pendapatan Non Operasional -netto	27.817	-67.880	-49.318	-27,34
Laba sebelum pajak	41.753.694	43.364.053	26.724.846	-38,37
Beban Pajak	-9.335.208	-8.950.228	-8.064.453	-9,90
Laba bersih sebelum pos luar biasa	32.418.486	34.413.825	18.660.393	-45,78
Laba Bersih	32.418.486	34.413.825	18.660.393	-45,78

Pendapatan Bunga

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Kredit yang diberikan	96.224.941	86,24	104.766.326	86,05	97.244.105	83,16	-7,18
Obligasi Rekap Pemerintah	100.364	0,09	75.694	0,06	20.994	0,02	-72,26
Surat berharga yang dimiliki	9.082.912	8,14	9.600.291	7,88	11.643.981	9,96	21,29
Penempatan pada BI dan bank lain	1.113.603	1,00	1.814.686	1,49	1.204.311	1,03	-33,64
Giro pada Bank Indonesia	100.677	0,09	249	0,00	2.325	0,00	833,73
Lainnya	1.835.861	1,65	2.122.484	1,74	2.468.371	2,11	16,30
Pendapatan syariah	3.124.446	2,80	3.376.547	2,77	4.348.425	3,72	28,78
Total Pendapatan Bunga	111.582.804	100,00	121.756.276	100,00	116.932.512	100,00	-3,96

Tinjauan Keuangan

Pendapatan serta Beban Bunga dan Syariah

Pos Pendapatan merupakan kontributor utama untuk meningkatkan profitabilitas Perseroan. Pendapatan BRI sebagian besar dikontribusi dari pendapatan bunga, syariah dan premi yang berasal dari penyaluran kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan maupun aset produktif non kredit lainnya. Sementara beban bunga dan syariah pertumbuhannya sejalan dengan penghimpunan dana yang dilakukan BRI.

Pendapatan Bunga dan Syariah

Sejalan dengan komposisi kredit, piutang Syariah dan pembiayaan yang mendominasi 62,31% dari total aset yang dimiliki oleh BRI, maka pendapatan bunga yang berasal dari kredit, piutang Syariah dan pembiayaan juga tercatat sebesar 83,16% dari total pendapatan bunga BRI. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kredit dan pendapatan bunga non kredit. Sepanjang tahun 2020 total pendapatan bunga dan syariah turun 3,96% pada tahun 2020, dari Rp121,76triliun di tahun 2019 menjadi Rp116,93 triliun. Penurunan terbesar disumbang oleh pendapatan bunga kredit yang turun 7,18% menjadi Rp97,24 triliun setelah sebelumnya tercatat sebesar Rp104,77 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BRI dalam rangka penyelamatan UMKM terdampak pandemic Covid-19, serta adanya tren perlambatan pertumbuhan kredit akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir Desember 2020 BRI telah melakukan restrukturisasi kredit dengan outstanding sebesar Rp186,6 Triliun atau 21,19% (bank saja) kepada lebih dari 2,8 juta debitur dimana 95% komposisi merupakan debitur UMKM.

Beban Bunga dan Syariah

BRI berhasil melakukan efisiensi beban bunga dengan mencatatkan penurunan sebesar 5,81% *year on year* dimana total beban bunga dan syariah turun dari Rp40,05 triliun di tahun 2019 menjadi Rp37,72 triliun. Penurunan tersebut terutama dipacu dari kenaikan nominal CASA yang tumbuh 13,52% *year on year* serta secara komposisi menjadi 59,67% atau naik dibanding tahun 2019 sebesar 57,50% , disamping itu selama tahun 2020 BRI melakukan efisiensi biaya dana hal tersebut mampu menurunkan beban bunga dari dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp652,56 miliar. BRI juga berhasil melakukan penghematan beban bunga non simpanan sebesar Rp1,67 triliun, dengan demikian selama tahun 2020 BRI berhasil melakukan efisiensi biaya dana sebesar Rp2,33 triliun.

Beban Bunga

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Deposito	17.957.244	52,94%	22.037.730	55,03%	21.684.118	57,48%	-1,60
Tabungan	3.014.237	8,89%	3.173.253	7,92%	2.839.409	7,53%	-10,52
Giro	2.636.745	7,77%	3.446.824	8,61%	3.481.717	9,23%	1,01
Simpanan dari Bank lain & LK lainnya	814.364	2,40%	1.187.757	2,97%	609.329	1,62%	-48,70
Surat berharga yang diterbitkan	2.378.334	7,01%	2.480.591	6,19%	2.550.853	6,76%	2,83
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.057.039	3,12%	942.983	2,35%	717.219	1,90%	-23,94
Pinjaman yang diterima	1.570.122	4,63%	1.439.455	3,59%	856.051	2,27%	-40,53
Pinjaman Subordinasi	-	0,00%	45.965	0,11%	47.184	0,13%	2,65

Tinjauan Keuangan

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Lain-lain	3.113.310	9,18%	3.917.280	9,78%	3.404.891	9,03%	-13,08
Beban syariah	1.375.637	4,06%	1.377.133	3,44%	1.531.824	4,06%	11,23
Total Beban Bunga	33.917.032	100,00%	40.048.971	100,00%	37.722.595	100,00%	-5,81

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Sejalan dengan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BRI dalam rangka penyelamatan UMKM di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pendapatan bunga dan Syariah – bersih tercatat sebesar Rp79,20 triliun atau turun 3,06% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp81,70 triliun

Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini antara lain terdiri dari Provisi dan Komisi lainnya (Fee Based Income), penerimaan kembali atas aset yang telah dihapusbukukan, keuntungan transaksi mata uang asing dan keuntungan hasil penjualan dan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah.

Pada tahun 2020, pendapatan operasional lainnya mencapai Rp29,46 triliun, naik 3,60% dibanding tahun 2019 sebesar Rp28,44 triliun. Peningkatan terutama disebabkan meningkatnya Fee Based Income dan keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah.

Pertumbuhan Fee Based Income didominasi oleh jasa transaksi e-channel dan e-banking tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp5,71 triliun, tumbuh 16,25% dari tahun 2019 sebesar Rp4,91 triliun, kenaikan ini didorong oleh meningkatnya volume transaksi E-Channel khususnya BRIMO yang tumbuh 660,5% *year on year* serta hasil dari optimalisasi layanan Agen BRILink yang mampu mencatatkan perolehan fee sebesar Rp1,16 triliun tumbuh 47,0% *year on year* di tahun 2020

Total Pendapatan Operasional Lainnya

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Fee Based Income	12.018.941	51,31%	14.505.762	51,01%	15.122.682	51,33%	4,25
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	6.209.435	26,51%	7.065.981	24,85%	7.239.896	24,57%	2,46
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekap Pemerintah - Netto	338.097	1,44%	80.980	0,28%	342.351	1,16%	322,76
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah - Netto	534.952	2,28%	1.839.341	6,47%	2.860.653	9,71%	55,53
Keuntungan Selisih Kurs - Netto	951.009	4,06%	154.157	0,54%	1.257.984	4,27%	716,04
Lain-lain	3.372.996	14,40%	4.792.909	16,85%	2.640.273	8,96%	(44,91)
Total Pendapatan Operasional Lainnya	23.425.430	100,00%	28.439.130	100,00%	29.463.839	100,00%	3,60

Tinjauan Keuangan

Fee-Based Income

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Jasa Administrasi Simpanan	3.841.412	31,96%	4.023.542	27,74%	4.177.135	27,62%	3,82
Jasa Transaksi Non E-Channel	768.884	6,40%	814.635	5,62%	996.641	6,59%	22,34
Jasa Transaksi E-Channel dan E-Banking	3.267.891	27,19%	4.912.839	33,87%	5.711.361	37,77%	16,25
Jasa CMS	24.271	0,20%	50.922	0,35%	65.755	0,43%	29,13
Jasa Perkreditan	1.683.441	14,01%	1.674.155	11,54%	1.528.815	10,11%	(8,68)
Jasa Trade Finance	1.265.042	10,53%	1.602.887	11,05%	1.447.478	9,57%	(9,70)
Jasa Transaksi Bisnis Internasional	179.960	1,50%	231.998	1,60%	180.566	1,19%	(22,17)
Jasa Kartu Kredit	250.878	2,09%	333.002	2,30%	224.920	1,49%	(32,46)
Jasa Investment Services	201.693	1,68%	239.381	1,65%	291.112	1,92%	21,61
Jasa Produk Asuransi	373.594	3,11%	362.052	2,50%	455.579	3,01%	25,83
Jasa Lainnya	161.875	1,35%	260.349	1,79%	43.320	0,29%	(83,36)
Total	12.018.941	100,00%	14.505.762	100,00%	15.122.682	100,00%	4,25

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan (Pendapatan Recovery)

Pendapatan recovery tercatat sebesar Rp7,24 triliun, naik 2,46% dibanding tahun 2019 sebesar Rp7,04 triliun. Peningkatan pendapatan recovery yang cukup baik menunjukkan keberhasilan BRI dalam upaya penagihan kredit yang telah dihapus buku meskipun ditengah pandemi Covid-19, melalui berbagai upaya antara lain akselerasi penjualan agunan bekerja sama dengan pihak ketiga maupun melalui lelang agunan.

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - neto

Pembentukan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tercatat sebesar Rp30,62 triliun, naik 42,03% dibanding tahun 2019 sebesar Rp21,56 triliun. Peningkatan biaya provisi tersebut sebagai mitigasi atas kemungkinan pemburukan kualitas kredit di masa depan akibat dampak pandemi Covid-19.

Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional Lainnya terdiri dari tenaga kerja dan tunjangan, umum dan administrasi, dan lain-lain. Pada tahun 2020, total beban operasional lainnya tercatat sebesar Rp49,93 triliun, naik 11,04% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp44,97 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan biaya tenaga kerja dan tunjangan menjadi Rp26,32 triliun, atau naik 8,57% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp24,24 triliun. Peningkatan biaya tenaga kerja pada tahun 2020 karena adanya pemberian ESA (Employee Stock Allocation) yang bersumber dari *buyback* saham yang dilakukan pada tahun 2015-2016 sebagai salah satu komitmen BRI untuk meningkatkan *engagement* pekerja dengan perusahaan serta diharapkan mampu meningkatkan produktifitas kerja yang berujung pada tingkat profitabilitas perusahaan.

Tinjauan Keuangan

Beban Operasional Lainnya

Rp juta

Keterangan	2018		2019		2020		Pertumbuhan (%)
	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	Nilai	Komposisi	2019-2020
Tenaga Kerja dan Tunjangan	22.423.271	53,40%	24.243.276	53,92%	26.319.791	52,71%	8,57
Umum dan Administrasi	14.364.278	34,21%	15.366.752	34,17%	17.269.844	34,59%	12,38
Lain-lain	5.202.735	12,39%	5.355.597	11,91%	6.341.724	12,70%	18,41
Total Beban Operasional Lainnya	41.990.284	100,00%	44.965.625	100,00%	49.931.359	100,00%	11,04

Beban Pajak

Pada tahun 2020, beban pajak sebesar Rp8,06 triliun, turun 9,90% dibanding tahun 2019 sebesar Rp8,95triliun. Penurunan beban pajak ini diakibatkan karena penurunan laba sebelum pajak sebesar 38,30% apabila dibandingkan 2019. Tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada BRI adalah sebesar 19%, BRI mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 3% karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta dimiliki lebih dari 300 orang yang masing-masingnya hanya boleh memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%. BRI telah melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dimana mengatur Tarif PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Laba Bersih

Perolehan Laba bersih BRI tercatat sebesar Rp18,66 triliun atau turun 45,78% dibanding tahun 2019 sebesar Rp34,41 triliun. Penurunan laba ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dari Rp118,38 triliun di 2019 menjadi Rp112,58 triliun di tahun 2020 selain itu karena adanya peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai mitigasi atas kemungkinan pemburukan kualitas kredit di masa depan akibat dampak pandemi Covid-19.

Penghasilan Komprehensif

BRI mencatatkan penghasilan komprehensif sebesar Rp3,10 triliun pada tahun 2020, menurun dibanding tahun 2019 yang membukukan penghasilan komprehensif sebesar Rp5,08 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya surplus atas revaluasi aset tetap di tahun 2019 yang tidak lagi terdapat di tahun 2020.

Total Laba Komprehensif

Pada tahun 2020, total laba komprehensif tercatat sebesar Rp21,76 triliun, menurun dibanding tahun 2019 sebesar Rp39,50 triliun. Selain karena penurunan laba bersih, penurunan ini disebabkan penurunan penghasilan komprehensif BRI dari Rp5,08 triliun di tahun 2019 menjadi Rp3,10 triliun di akhir 2020.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Posisi Kas dan Setara Kas BRI akhir tahun 2020 sebesar Rp21,76 triliun, turun 42,82% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp39,50 triliun. Penurunan Kas dan Setara Kas disebabkan meningkatnya kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi khususnya kepada surat-surat berharga dalam rangka *yield enhancement*.

Rp juta

Deskripsi	2018	2019	2020
Kas Bersih yang diperoleh dari Kegiatan Operasi	57.355.295	44.582.937	66.689.187
Kas Bersih yang digunakan untuk Kegiatan Investasi	-27.010.844	-5.188.301	-116.007.831
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-1.152.743	-18.085.104	-19.981.772
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	29.191.708	21.309.532	-69.300.416
Pengaruh Perubahan Kurs	(52.076)	(160.251)	(352.878)
Kas dan Setara Kas awal tahun	186.617.516	215.757.148	236.906.429
Kas dan Setara Kas akhir tahun	215.757.148	236.906.429	167.253.135

Arus Kas Dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2020, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi tercatat Rp66,69 triliun. Jumlah kas dari operasi (sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi) sebesar Rp54,56 triliun, turun jika dibanding tahun 2019 sebesar Rp55,40 triliun

Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp116,01 triliun. Kenaikan ini disebabkan kenaikan dari efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi di tahun 2020 sebesar Rp112,64 triliun, lebih besar dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,27 triliun.

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2020, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan Pendanaan sebesar Rp19,98 triliun, naik dibanding tahun 2019 sebesar Rp18,08 triliun. Kenaikan pengeluaran kas untuk pendanaan terutama akibat meningkatnya pembayaran dividen dari Rp16,18 triliun di tahun 2019 menjadi Rp20,62 triliun, dan pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo dari Rp4,42 triliun di tahun 2019 menjadi Rp6,29 triliun.

RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan berikut dihitung dari kinerja keuangan entitas induk.

Rasio Keuangan

(%) (Bank Saja)

	URAIAN	2018	2019	2020
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,21%	22,55%	20,61%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,41%	1,74%	1,82%
3	Aset prduktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,62%	1,98%	1,81%
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,26%	3,36%	5,42%
5	NPL Gross	2,16%	2,62%	2,94%
6	NPL Net*	0,92%	1,04%	0,80%
7	Return on Asset (ROA)	3,68%	3,50%	1,98%
8	Return on Equity (ROE)	20,49%	19,41%	11,05%
9	Net Interest Margin (NIM)	7,45%	6,98%	6,00%
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	68,40%	70,10%	81,22%
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,96%	88,64%	83,66%
12	Credit Cost Nett	1,51%	1,62%	2,46%
13	Cost to Income Ratio (CIR)	40,38%	40,03%	45,40%
	Kepatuhan (*Compliance*)	**2018**	**2019**	**Des-20**
1	a. Persentase pelanggaran BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
	ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
	b. Persentase pelampauan BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
	ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
2	Giro Wajib Minimum (GWM)			
	a. GWM Utama Rupiah (rata-rata)	7,16%	3,15%	3,19%
	b. GWM Valuta Asing (harian)	8,01%	8,07%	2,00%
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3,73%	1,87%	1,07%

Tinjauan Keuangan

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam membayar utang dapat dilihat dari berbagai rasio keuangan sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (loan to deposit *Ratio* atau LDR). Rasio LDR BRI 2020 sebesar 83,66% (bank saja), menunjukkan kondisi likuiditas masih dapat terjaga dengan baik ditengah kondisi pandemi Covid-19. Secara *year on year,* tren LDR yang menurun tidak terlepas dari masih lemahnya *demand* kredit di masa pandemi dan masyarakat lebih memilih untuk menahan konsumsi.

Rasio Intermediari Makroprudensial (RIM)

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, Perbankan harus menjaga rasio RIM sebesar 84% sampai 94%. Dalam perhitungan RIM, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh KSEI dan tidak dimiliki oleh bank minimal 2 bulan sebelum tanggal laporan dan obligasi korporasi yang dimiliki. Perhitungan RIM disempurnakan juga dengan PBI nomor 21/12/PBI/2019 yang berlaku pada 2 Desember 2019 dengan memperhitungkan *offshore loan* sebagai komponen pendanaan, rasio RIM BRI sebesar 80,03% (bank saja) menurun dibanding RIM tahun 2019 sebesar 85,31%.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang merupakan rasio antara high quality liquid asset (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 hari kedepan. Pada tahun 2020, LCR BRI sebesar 239,06% (bank saja). Dengan pencapaian LCR tersebut, BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas jauh di atas batas minimal sebesar 100%.

RASIO RENTABILITAS

Pada industri perbankan, rasio rentabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (Return on Assets atau ROA), imbal hasil terhadap ekuitas (Return on Equity atau ROE) dan marjin pendapatan bunga bersih (NIM). BRI mampu membukukan kinerja rentabilitas positif selama tahun 2020.

Rasio Rentabilitas

(%) (Bank Saja)

	2018	2019	2020
ROA	3,68	3,50	1,98
ROE	20,49	19.41	11,05
NIM	7,45	6,98	6,00

Return On Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) BRI sebesar 1,98% (bank saja) di tahun 2020, atau menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 3,50% (bank saja). Penurunan ROA tidak terlepas oleh turunnya pendapatan bunga perseroan sejalan dengan masifnya restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19 serta kenaikan biaya pencadangan aset produktif (CKPN) sebagai mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak pandemi Covid-19

Return on Equity (ROE)

Pada tahun 2020, Return on Equity (ROE) BRI sebesar 11,05% (bank saja), atau menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 19,41% (bank saja). Penurunan ROE tidak terlepas oleh turunnya pendapatan bunga perseroan sejalan dengan masifnya restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19 serta kenaikan biaya pencadangan aset produktif (CKPN) sebagai mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak pandemi Covid-19

Net Interest Margin (NIM)

Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) BRI pada tahun 2020 sebesar 6,00% (bank saja) atau lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 6,98% (bank saja). Penurunan NIM tidak terlepas oleh turunnya pendapatan bunga perseroan sejalan dengan restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19 dan perlambatan pertumbuhan kredit akibat pandemi Covid-19.

RASIO EFISIENSI

Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)

Pada tahun 2020, Rasio Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) BRI sebesar 81,22% (bank saja), naik dari tahun 2019 yang sebesar 70,10% (bank saja). Kenaikan pada BOPO lebih kepada tekanan terhadap pendapatan bunga sejalan dengan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh Perseroan serta kenaikan biaya pencadangan aset produktif (CKPN) sebagai mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak pandemic Covid-19

Rasio Efisiensi

(%) (Bank Saja)

	2018	2019	2020
BOPO	68,40	70,10	81,22

Capital Ratio - Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio kecukupan permodalan (CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk memitigasi risiko. Pada tahun 2020, CAR BRI tercatat sebesar 20,61% (bank saja), turun dari tahun 2019 yang sebesar 22,55% (bank saja). Rasio CAR tersebut masih jauh di atas rasio minimal yang harus dijaga BRI sebesar 14,75% atau sebesar 12,00% jika memperhitungkan relaksasi CCB (*Capital Concervation Buffer*) sampai dengan Maret 2021, dengan sudah memperhitungkan implementasi Basel 3. Dengan rasio kecukupan modal yang masih tinggi tersebut, BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta pengimplementasian Basel 3.

RASIO KEPATUHAN

Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tahun 2020, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah terhadap modal. Pada tahun 2020, rasio PDN sebesar 1,07% (bank saja), turun dari tahun 2019 sebesar 1,87% (bank saja). Angka PDN tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, yaitu sebesar 20% dari modal.

Tinjauan Keuangan

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kolektabilitas piutang dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau Non-Performing Loan (NPL). Di masa pandemi Covid-19, BRI masih mampu menjaga kualitas kredit dengan sangat baik hal ini terlihat dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2020 sebesar 2,99%, masih jauh di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5%. BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas asetnya.

Kolektabilitas Kredit

Rp juta

	2018	2019	2020
Kredit	834.731.168	903.197.389	938.373.880
Lancar	784.755.220	842.166.910	883.196.258
Dalam Perhatian Khusus	30.922.563	35.737.908	27.156.025
Kurang Lancar	2.443.989	4.397.703	2.479.943
Diragukan	2.376.436	3.404.717	3.751.019
Macet	14.232.959	17.490.151	21.790.635
NPL	19.053.384	25.292.571	28.021.597
NPL (%)	2,28%	2,80%	2,99%

TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI DERIVATIF

BRI melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Dalam hal ini, BRI tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Transaksi spot dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah.

Sepanjang tahun 2020, BRI melakukan transaksi spot dan transaksi derivatif dalam bentuk swap mata uang dan suku bunga, swap suku bunga, option, pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing, *Swap* mata uang asing, pembelian dan penjualan spot mata uang asing. Secara rinci transaksi *spot* dan *derivatif* yang dilakukan BRI (Konsolidasian) termuat dalam tabel berikut:

Rp juta

Transaksi	Tagihan Derivatif			Liabilitas Derivatif		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Swap mata uang asing	276.071	139.081	1.177.679	56.195	34.341	195.687
Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing	72.275	21.976	142.912	94.922	21.943	35.799
Swap suku bunga	69.307	19.264	110.358	91.211	74.114	158.856
Option saham	16.468	17.306	-	-	-	-
Option mata uang	23.951	9.092	-	20.774	21.424	1.851
Swap mata uang dan suku bunga	25.671	3.151	144.151	67.944	32.338	14.421
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	2.067	527	1.559	1.297	445	1.160
Total	485.810	210.397	1.576.659	332.343	184.605	407.774

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang inheren dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Hingga tahun 2020, BRI memiliki CAR sebesar 20,61%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menyebutkan bahwa profil risiko level 2 *(satisfactory)* memiliki minimal CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Diluar ketentuan minimal CAR tersebut, sebagai bagian dari penerapan Basel 3, BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)* yang terdiri dari:

1. Capital Conservation Buffer Sebesar 2,50% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dapat tidak diperhitungkan sesuai relaksasi dari OJK sampai dengan Maret 2021.
2. Countercyclical Buffer sebesar 0,00% dari ATMR.
3. Capital Surcharge untuk Bank Sistemik sebesar 2,50% dari ATMR.

Sehingga total CAR minimum BRI berada di level 11,76%-13,32% maka CAR BRI pada tahun 2020 yang sebesar 20,61% (bank saja) dan 21,17% (konsolidasian) telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, hingga tahun 2020, BRI memiliki modal inti (Tier-1) sebesar Rp188,65 triliun dan Modal Pelengkap (Tier-2) sebesar Rp10,16 triliun. Sedangkan rasio Tier-1 mencapai 20,09% atau di atas ketentuan minimal rasio Tier-1 sebesar 6%. Tier-1 BRI terdiri dari CET-1 karena sumber utama modal BRI adalah laba ditahan. Oleh karena itu, Rasio CET-1 BRI sebesar 20,09%, atau jauh di atas ketentuan minimum sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

Rp juta

KONSOLIDASIAN			
Struktur Permodalan	**2018**	**2019**	**2020**
Modal Inti (Tier 1)	172.358.004	197.219.352	188.648.185
Modal Inti Utama (CET 1)	172.358.004	197.219.352	188.648.185
Modal Pelengkap (Tier 2)	10.029.307	10.160.078	10.160.456
Total Modal Tersedia	**182.387.311**	**207.379.430**	**198.808.641**
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	690.764.915	726.179.371	746.749.522
ATMR untuk Risiko Pasar	11.229.322	14.004.256	4.837.024
ATMR untuk Risiko Operasional	152.229.031	170.666.840	187.566.487
Total ATMR	**854.223.268**	**910.850.467**	**939.153.033**
Rasio CAR	21,35%	22,77%	21,17%
Rasio CET 1	20,18%	21,65%	20,09%
Rasio Tier 1	20,18%	21,65%	20,09%
Rasio Tier 2	1,17%	1,12%	1,08%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,53%	9,61%	9,50%

Tinjauan Keuangan

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2020, BRI melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak untuk investasi barang modal, yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020, yaitu:

Objek	Nilai (Rp Juta)
Pengadaan Managed Service CRM RBB	990.724
Sewa Saluran Komunikasi	260.899
Managed Service Hub and Remote VSAT Fase-3 Integrasi BRIsat	181.776

Sumber pendanaan dari ikatan material tersebut seluruhnya berasal dari dana internal Perseroan. Adapun denominasi mata uang yang digunakan adalah dalam bentuk Rupiah, sehingga BRI tidak melakukan perlindungan risiko kurs.

Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2020, BRI melakukan investasi barang modal yang terdiri dari :

Rp juta

Belanja Barang Modal	KONSOLIDASI		
	2018	2019	2020
Tanah dan Bangunan	2.555.168	4.580.996	2.194.862
Meubelair dan Inventaris	248.210	215.046	260.159
Kendaraan	88.353	115.754	115.583
Komputer dan Perangkat Lunak	1.243.266	1.413.248	573.173
Total	4.134.997	6.325.044	3.143.777

KEBIJAKAN LINDUNG NILAI

BRI telah menerapkan prinsip lindung nilai sebagai upaya meminimalkan risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

Kebijakan Umum

Transaksi lindung nilai (*hedging*) meliputi transaksi yang dilakukan dalam rangka melindungi nilai aset keuangan, kewajiban keuangan, pendapatan dan biaya serta arus kas baik secara *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dari risiko suku bunga dan / atau risiko nilai tukar untuk posisi *banking book* dan *trading book*.

Pelaksanaan transaksi lindung nilai berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif tindak lanjut dan mitigasi risiko apabila terjadi pelampauan limit moderate pada parameter profil risiko pasar.
2. Transaksi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi perubahan kondisi ekonomi makro yang dianggap dapat menimbulkan kerugian, yang ditunjukkan antara lain oleh tren perubahan variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar.
3. BRI dilarang memelihara posisi atas transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh pihak terkait.
4. BRI wajib meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada bank lain yang bukan pihak terkait.

Teknik Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Transaksi lindung nilai dapat dilakukan baik secara makro (*macro hedging*) atau mikro (*micro hedging*).

Macro Hedging

Teknik ini digunakan untuk memitigasi dampak risiko ekonomi terhadap seluruh portofolio BRI. *Macro hedging* dilakukan melalui usulan *Assets and Liabilities Management Desk* untuk diputus oleh ALCO.

Micro Hedging

Micro hedging dilakukan BRI pada level transaksi secara individual. Transaksi ini dapat dilakukan sendiri oleh Divisi Treasury tanpa usulan divisi bisnis pengelola portofolio terkait, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta kemampuan untuk kontrol atas transaksi lindung nilai yang dilakukan.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Deskripsi	2018	2019	2020
Komitmen			
Tagihan Komitmen	16.316.902	5.455.188	3.078.534
Pembelian Spot dan Mata Uang Asing	16.316.902	5.455.188	3.078.534
Liabilitas Komitmen	158.089.597	171.246.654	189.569.678
Fasilitas Kredit yang Diberikan kepada Debitur yang Belum Digunakan	130.854.091	131.345.624	124.558.239
L/C yang Tidak Dapat Dibatalkan yang Masih Berjalan dalam Rangka Impor	8.693.691	6.459.481	8.974.190
Penjualan Spot dan Mata Uang Asing	18.476.485	33.296.005	55.418.797
Fasilitas Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur yang Belum Digunakan	65.330	145.544	618.452
Komitmen - Neto	-141.772.695	-165.791.466	-186.491.144
Kontinjensi			
Tagihan Kontinjensi	112.273	126.871	144.901
Tagihan Bunga dalam Penyelesaian	112.273	126.871	144.901
Liabilitas Kontinjensi	44.886.051	45.051.365	44.684.497
Garansi yang Diterbitkan dalam Bentuk			
Standby L/C	13.535.519	15.848.438	8.752.803
Garansi Bank	31.350.532	29.202.927	35.931.693
Kontinjensi - Neto	-44.773.778	-44.924.494	-44.539.595

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak berdasarkan prinsip syariah) dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Pada tahun 2020, jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp3,6 triliun. Jumlah liabilitas komitmen sebesar Rp189,56 triliun pada tahun 2020, meningkat 10,70% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan dikarenakan naiknya penjualan spot dan berjangka mata uang asing dan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan. Dalam periode yang sama, liabilitas kontinjensi menurun sebesar 0,81% yang dipengaruhi oleh menurunnya Standby L/C dari Rp15,85 triliun di 2019 menjadi Rp8,75 triliun di akhir 2020.

Tinjauan Keuangan

SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH

Secara umum Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, serta komponen profit margin dari penyaluran kredit. Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Untuk itu, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR). Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun demikian, Bank Indonesia menyerahkan klasifikasi kredit tersebut sesuai dengan kriteria internal bank. Di tengah tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19 Bank Indonesia telah menetapkan strategi kebijakan moneter sehingga selama tahun 2020 BI secara agresif menurunkan suku bunga acuan BI7DRR sebanyak 125bps. Hal ini berpengaruh terhadap pada penyesuaian suku bunga simpanan lebih cepat dibandingkan suku bunga pinjaman. Untuk meresponses kebijakan BI tersebut, BRI sepanjang tahun 2020 telah menurunkan suku bunga dasar kredit utamanya segmen UMKM berkisar antara 15-75bps.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
TMT 31 Desember 2020	9,95%	9,75%	16,50%	9,90%	12,00%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan / atau website www.bri.co.id.

PENCAPAIAN DAN TARGET 2020

Rp Juta

	Target 2020	Realisasi 2020	Pencapaian (%)
Aset	1.413.304,49	1.421.785,02	100,60%
Laba Bersih	13.377,26	18.353,30	137,20%
Kredit yang Diberikan	902.688,99	880.674,76	97,56%
Dana Pihak Ketiga	1.023.113,32	1.052.663,87	102,89%
BOPO	86,16%	81,22%	106,08%
LDR	88,23%	83,66%	94,82%
NPL (Gross)	3,30%	2,94%	112,27%
NPL (Net)	1,53%	0,80%	189,69%
NIM	5,56%	6,00%	107,87%
CAR	18,37%	20,61%	112,20%
Credit Cost Nett	2,43%	2,46%	98,91%
Cost to Income Ratio (CIR)	50,03%	45,40%	90,74%

*) Bank Saja

Tinjauan Keuangan

	Per 31 Desember 2020 (Rp triliun)
Kapitalisasi pasar IHSG	6.906,06
Kapitalisasi pasar BBRI	514,35
Kapitalisasi pasar Sektor Keuangan	2.467,34
Kapitalisasi pasar Perbankan	2.257,07

Secara umum, BRI masih mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja 2020 yang telah ditetapkan, seperti target Aset, Dana Pihak Ketiga maupun Rasio-Rasio Keuangan. Hal ini didukung fokus strategi BRI di tengah pandemi yang mampu menavigasi perusahaan dalam melewati kesulitan.

Pada beberapa indikator seperti Kredit dan Rasio Keuangan LDR, CIR dan *Credit Cost*, pencapaian kinerja BRI tercatat masih dibawah target.

Pencapaian target Kredit sebesar 97,56% dikarenakan masih rendahnya permintaan kredit di tengah pandemi yang menyebabkan tekanan pada pertumbuhan kredit BRI khususnya di segmen Korporasi. Kondisi perlambatan pertumbuhan kredit juga menyebabkan pencapaian kinerja LDR maupun *Cost to Income* (CIR) Ratio yang sedikit dibawah target.

Meskipun demikian, pada tahun 2020 BRI masih mampu mencatat pertumbuhan segmen Mikro yang kuat (double digit) sejalan dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh di segmen UMKM.

Ditengah kesulitan akibat pandemi, BRI mampu mencatat nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp514,35 Triliun, menjadikan BRI sebagai BUMN dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia.

TARGET 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Dengan adanya sejumlah indikator perekonomian menunjukkan pemulihan pada kuartal IV/2020, perekonomian tahun 2021 diharapkan tumbuh pada kisaran 3%-5%. Secara internal, tim riset dan ekonomi BRI memperkirakan perekonomian negara tumbuh pada rentang 3,1%-4,2%. Kendati demikian, diperlukan upaya ekstra dalam membangkitkan kembali perekomian dengan mengembalikan kemampuan daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor sejati pertumbuhan. Faktor lain yang juga perlu jadi perhatian adalah kesiapan pemerintah dalam mengeksekusi pelaksanaan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Dengan berbekal vaksin, perekonomian diharapkan bergerak ke level sebelum pandemi dengan lebih cepat.

Pada skala korporasi, BRI menargetkan pertumbuhan kredit pada tahun 2021 tumbuh pada kisaran 6%-7%. Penggerak serapan kredit masih tetap berasal dari segmen nasabah mikro dan kecil. Fokus BRI lebih jauh adalah menjangkau pengusaha skala mikro dan super mikro baru, yang belum tersentuh oleh layanan perbankan nasional. BRI bakal memudahkan persyaratan pengajuan kredit bagi nasabah dari segmen ini antara lain pengalaman menjalankan usaha cukup enam bulan, sementara plafon kredit bagi pengusaha segmen mikro dan super mikro ditetapkan sebesar masing-masing Rp50 juta dan Rp10 juta. Untuk itu, BRI menyediakan kuota kredit sebesar Rp110 triliun dan Rp40 triliun untuk nasabah segmen mikro dan super mikro.

Berdasarkan data perusahaan, segmen pasar ini terbukti mampu memberikan pertumbuhan di atas 10%. Pada 2020, pengucuran kredit mikro BRI mencapai Rp351,3 triliun, tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya Rp307,7 triliun. Jumlah simpanan dari nasabah segmen mikro pun tumbuh 13% menjadi Rp336,0 triliun dari tahun sebelumnya Rp297,3 triliun. Penetapan fokus bisnis BRI ke segmen ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

BRI juga berharap upaya digitalisasi yang telah dilaksanakan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir dapat membantu pertumbuhan pendapatan berbasis jasa (*fee-based income*) pada kisaran 8%.

Tinjauan Keuangan

Oleh karena itu, target finansial BRI yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Kredit 6% - 7%
- Posisi LDR dijaga pada level ±85%
- Pertumbuhan *fee-based income* ±8%
- Pertumbuhan Biaya Operasional ±8%
- Rasio kecukupan modal dijaga diatas kebutuhan minimum

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI (entitas induk) pada tanggal 21 Januari 2021, pemegang saham menyetujui perubahan pengurus, adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan, terhitung sejak tanggal 11 November 2020.
2. Memberhentikan dengan hormat Priyastomo sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah, Herdy Rosadi Harman sebagai Direktur Human Capital dan Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
3. Mengangkat Agus Winardono sebagai Direktur Human Capital, Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Jaringan & Layanan, Amam Sukriyanto sebagai Direktur Bisnis Kecil & Menengah dan Viviana Dyah Ayu Retno K. sebagai Direktur Keuangan, serta pengalihan tugas Ahmad Solichin Lutfiyanto menjadi Direktur Kepatuhan.

Penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan). Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity) dan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bank Peserta Penggabungan mengumumkan Merger Plan dimana komposi Pemegang Saham (dengan asumsi tidak ada MESOP BRIS dieksekusi) adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Jumlah saham (lembar)	Nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.378	10.452.609.689.000	51,2
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4
DPLK BRI – saham syariah	841.296.000	420.648.000.000	2,1
PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0
Publik	1.782.055.843	891.027.921.500	4,3
Total	40.846.813.743	20.423.406.871.500	100

Komposisi pemegang saham di atas adalah komposisi pemegang saham per tanggal 30 September 2020 dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham minoritas Bank yang menerima penggabungan yang menggunakan haknya untuk meminta BRI dan/atau Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI untuk membeli saham-saham mereka dan belum ada Opsi MESOP BRIS yang di-exercise.

Pernyataan penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS telah disetujui oleh OJK pasar modal dan OJK perbankan masing-masing melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021. Penggabungan usaha tersebut direncanakan akan berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2021 dan bank hasil penggabungan usaha akan menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham pengendali dari BSI sehingga laporan keuangan BSI akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri sejak tanggal efektif penggabungan usaha.

PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan oleh International Monetary Fund (IMF) berada pada level -3,5%, peningkatan diperkirakan terjadi di 2021 sebesar 5,5%. Pemulihan ekonomi tersebut salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di negara berkembang serta penemuan vaksin Covid-19.

Kondisi perekonomian nasional oleh Bank Indonesia diproyeksikan membaik dalam rentang 4,3%-5,3% pada tahun 2021. Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemulihan ekonomi dunia, kecepatan penyerapan anggaran pemerintah dalam mendorong ekonomi, pemulihan aktivitas ekonomi maupun berlanjutnya restrukturisasi dan subsidi bunga kredit yang dapat mendorong permintaan kredit, serta pendistribusian vaksin Covid-19.

Prospek Industri Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sementara likuiditas tetap memadai. Proyeksi tersebut sejalan dengan penurunan suku bunga dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Prospek Usaha BRI

Proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 didorong oleh distribusi vaksin dan program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik yang akan menunjang ekspansi bisnis BRI.

Bisnis Mikro

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar mikro sebagai fokus bisnis, BRI meneruskan upaya transformasi digital guna mendukung penyaluran kredit dan mencari sumber pertumbuhan baru. BRI menilai peranan Perusahaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi potensi untuk menciptakan sumber penyaluran kredit. Pertumbuhan mikro BRI akan mengikuti stimulus pemerintah, sejalan dengan fungsi BRI untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi. Program ini juga membuka peluang bagi BRI untuk dapat melakukan penetrasi ke pasar *ultra micro* di Indonesia yang mampu memberikan imbal hasil yang bersaing dan risiko yang terukur.

Bisnis Konsumer

Di masa pandemi Covid-19, segmen konsumsi akan tetap tumbuh dengan selektif kepada nasabah yang berpenghasilan tetap melalui produk unggulan Briguna, optimalisasi rantai bisnis dan penjualan simultan dengan segmen Korporasi dan BUMN baik untuk produk KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) maupun KKB (Kredit Kendaraan Bermotor).

Dana Murah

Agar sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Mikro dan Konsumer tersebut maka harus diimbangi dengan kemampuan BRI menjaga pertumbuhan dana murah. Upaya tersebut didukung melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama melalui program *Digital Saving* serta optimalisasi Agen BRILink. Pandemi Covid-19 mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih banyak berdiam diri di rumah dan melakukan segala sesuatunya termasuk bertransaksi dari rumah, karena itu BRI berupaya meningkatkan kualitas transaksi digital guna membantu masyarakat menghadapi tren perubahan tersebut.

Operasional Bisnis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengakuan atas kepuasan pelanggan, BRI melaksanakan transformasi digital. Berbagai inisiatif terus dilakukan, diantaranya *business process re-engineering*, membangun *big data* dan *artificial intelligence* serta pengembangan platform digital. Untuk mempertahankan kualitas layanan dan

Tinjauan Keuangan

mendukung pertumbuhan bisnis, BRI akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, optimalisasi BRISpot, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, otomasi dan terus melakukan percepatan proses bisnis.

Kualitas Aset

BRI terus berupaya menjaga kualitas kredit dengan strategi pertumbuhan terseleksi, melaksanakan pengawasan terutama terhadap kredit yang direstrukturisasi pada masa Covid-19, serta merancang ulang model risiko kredit dengan turut mengembangkan model bisnis.

Sinergi Group

Dalam rangka mewujudkan komitmen solusi keuangan terintegrasi yaitu peningkatan kontribusi anak usaha, BRI menyusun strategi yang meliputi tiga pilar yaitu penetapan bujet, manajemen kinerja serta sinergi.

ASPEK PEMASARAN

Aspek pemasaran adalah faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan bagi BRI dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Dengan strategi pemasaran yang tepat BRI mampu memetakan pangsa pasar dan mengidentifikasi kebutuhan pasar serta mengembangkan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Aktivitas komunikasi pemasaran dikelola oleh Divisi *Marketing Communication*. Sebagai divisi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas komunikasi pemasaran produk-produk BRI, Divisi *Marketing Communication* bertugas untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan aktivasi produk, jasa, dan layanan serta program yang dimiliki oleh BRI baik kepada para nasabah lama dalam hal meningkatkan loyalitas maupun calon nasabah dalam meningkatkan keinginan untuk mulai menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

Melalui penerapan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi, dengan menggunakan media yang efektif dan efisien diharapkan dapat tercapai tingkat kesadaran yang optimal serta pemetaan posisi yang tepat dan relevan untuk masing-masing target konsumen di tiap segmen. Hal ini perlu dalam meningkatkan nilai merek bagi BRI.

Sebagai bank terbesar dan tersebar di Indonesia, BRI senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap nasabah. Dalam melaksanakan beragam program pemasaran dan promosi produk, BRI selalu menggelar riset pasar guna memahami segmentasi dan kesukaan nasabah, sehingga program yang ditawarkan selalu kompetitif, terbaru dan *customer centric*.

BRI terus mengoptimalkan strategi pemasaran *Above-The-Line*, *Below-The-Line*, *Out-of-Home Media* guna meningkatkan keterikatan perusahaan kepada para nasabah maupun calon nasabah. Di samping itu, BRI juga telah merambah strategi komunikasi pemasaran melalui media digital dengan platform media sosial BRI pada akun resmi: Instagram (@bankbri_id), Twitter (@promo_BRI, @BANKBRI_ID, @KontakBRI), Facebook (Bank BRI) dan Kanal Youtube (Bank BRI); serta penempatan konten-konten di media digital seperti pasar digital (*marketplace*), dan kanal-kanal layanan video daring yang saat ini digemari masyarakat.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh industri karena adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sejak memasuki triwulan II 2020, BRI adaptif terhadap kondisi di pasar dengan dominan melaksanakan strategi pemasaran yang menerapkan kebiasaan hidup baru yakni menggunakan media digital secara optimal. Berikut sejumlah proyek kampanye yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2020:

1. Live Stream Fest (LSF)
   Live Stream Fest (LSF) adalah kegiatan BRI bekerjasama dengan video.com bertajuk **Live Stream Fest** Vol. 4 yang mengangkat brand BRImo untuk memberikan informasi edukatif mengenai bertransaksi aman di masa pandemi melalui aplikasi BRI, yaitu BRImo dan BriSpot. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juni 2020 yang dikemas melalui live streaming konser musik dari berbagai musisi terbaik Tanah Air serta *talkshow* dari narasumber yang berpengalaman yang bertujuan untuk dapat menginspirasi dan menghibur masyarakat di masa transisi menuju kebiasaan hidup baru.

2. Nusantara Fashion Festival (NUFF)
   Nusantara Fashion Festival (NUFF) adalah kegiatan *fashion show* virtual yang sukses diselenggarakan Bank BRI, yang merupakan bagian dari kampayne pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini yaitu "Bangga Buatan Indonesia (BBI)". Tujuan utama dari program NUFF adalah untuk menjembatani UMKM khususnya di sektor industri *fashion* dengan para konsumen potensial untuk kemudian melakukan pembelian menggunakan layanan transaksi digital yang disediakan oleh Bank BRI.

   NUFF 2020, yang menghadirkan fashion show virtual terbesar pertama di Indonesia, dilaksanakan sepanjang bulan Agustus 2020 yang bertepatan juga dengan dengan momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan Hari kemerdekaan Indonesia ke-75, NUFF 2020 mempersembahkan peragaan mode virtual yang melibatkan 75 kolaborator perancang busana dengan reputasi internasional yang menampilkan ragam produk mode buatan Indonesia, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, fabrik, kerajinan tangan dan riasan, yang dibalut dengan konser virtual, dan kegiatan Charity virtual.

3. Pesta Rakyat Simpedes (PRS) Virtual
   Dengan kondisi new normal di tahun 2020 ini, Bank BRI untuk pertama kalinya menggelar satu agenda pemasaran penting yaitu Pesta Rakyat Simpedes (PRS) secara virtual. PRS 2020 tetap meneruskan tradisi melalui konsep 6P (Panggung, Pasar, Pawai, Panen, Pojok Xsis, Peduli) yang merupakan trademark Pesta Rakyat Simpedes.

   Pesta Rakyat Simpedes yang hadir secara virtual mulai dari 12 September s.d 20 Desember 2020 Live di Vidio.com atau Facebook Liputan 6, menampilkan kegiatan *inspirational talkshow* di bisnis UMKM, *workshop*, konser virtual dari band populer, serta puncaknya pengundian hadiah utama seperti Mobil dan Motor.

   Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tujuan dari rangkaian kegiatan PRS virtual ini adalah selain untuk meningkatkan loyalitas nasabah eksisting terhadap produk mikro BRI, juga untuk meningkatkan jumlah nasabah baru untuk menggunakan layanan dan produk mikro BRI. Berdasarkan hasil riset berjalan yang dilakukan oleh team Nielsen di setiap episodenya, PRS virtual BRI memperlihatkan grafik yang positif dimana jumlah penonton maupun sentimen positif mengalami peningkatan di setiap penayangan.

   Berikut ini adalah rangkaian program Pesta Rakyat Simpedes Virtual yang dimulai dari tanggal 12 September 2020 sebagai berikut:

Tinjauan Keuangan

Bangga Buatan Indonesia, tanggal 12 September 2020

Millenial Membangun Negeri, tanggal 19 September 2020

Budaya Kesenian, tanggal 26 September 2020

Solidaritas Era Digital, tanggal 10 Oktober 2020

Berani Jadi Pengusaha, tanggal 24 Oktober 2020

UMKM Go International, tanggal 07 November 2020

Pendidikan Formal, tanggal 21 November 2020

Kuliner Lokal, tanggal 5 Desember 2020

Surga tersembunyi, tanggal 12 Desember 2020

Pesta Rakyat Simpedes, Indonesia BRILIAN tanggal 20 Desember 2020

4. BritAma FSTVL
   Program BritAma FSTVL adalah suatu program yang memberikan banyak pilihan hadiah untuk dipersembahkan kepada nasabah setia Bank BRI dengan menggunakan pola program hadiah undian. Program ini merupakan kolaborasi dari konsep Akuisisi, Retensi, dan Loyalty yang menitikberatkan pada upaya peningkatan saldo rata-rata Tabungan BritAma. Program ini dapat diikuti oleh nasabah baik yang membuka rekening BritAma secara konvensional maupun digital serta dapat mengumpulkan poin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah yang lebih besar.

5. Launching Digital Saving
   "Buka Rekening Jaman Now segampang ngelike foto gebetan" merupakan salah satu tagline "kekinian" yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye pemasaran layanan digital saving BRI, dimana masyarakat cukup melakukan scan QR code pada gambar atau klik bukarekening.bri.co.id. Dengan adanya platform digital yang didukung oleh teknologi Face Recognition dan Digital Signatures tersebut membuat calon nasabah yang ingin membuka rekening tidak perlu lagi datang ke kantor cabang BRI.

6. KPR Virtual Expo
   KPR Virtual Expo merupakan penyelenggaraan pameran perumahan dan penjualan KPR secara virtual. Event ini digelar oleh BRI untuk mendukung dan membangkitkan industri properti di Indonesia, dengan melibatkan lebih dari 100 pengembang properti di Indonesia.

   Program yang diadakan bertepatan dengan momen HUT BRI ini sekaligus bertujuan untuk mempopulerkan kepada masyarakat akan aplikasi BRISPOT, dimana dalam proses pengajuan KPR, nasabah bisa mengajukan secara mudah melalui aplikasi tersebut.

7. UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020
   BRI menggelar UMKM Export BRILianpreneur 2020 yang berlangsung pada 1-15 Desember 2020 dengan konsep *Hybrid,* yaitu event yang dapat dinikmati secara langsung maupun Virtual dengan menghadirkan lebih dari 400 UMKM pilihan dari empat kategori berbeda yaitu Fashion, Accessories & Beauty, Home Decor & Craft, dan Food & Beverage.

   Fokus utama BRIlianpreneur adalah selain untuk "meningkatkan kelas" para peserta UMKM, juga untuk meningkatkan penyerapan ekspor bagi pelaku usaha UMKM, dengan cara pelaksanaan *Business Matching virtual* antara para pembeli internasional dengan UMKM yang di-lead oleh Bank BRI.

8. Young On Top (YOT) Series
   BRI bekerjasama dengan Young On Top untuk menggelar seminar kepada generasi muda memperkenalkan dunia enterpreneur. Young on Top merupakan komunitas di Indonesia yang mendorong untuk dapat meraih kesuksesan di usia muda dengan motto "jika kesuksesan dapat diraih di masa muda mengapa harus menunggu sampai tua".

   Komunitas ini dibentuk oleh Billy Boen yang berawal dari penerbitan bukunya yang berjudul 'Young on Top'. Saat ini, komunitas Young on Top sudah tersebar di puluhan kota- kota besar di Indonesia dengan anggota mulai dari mahasiswa hingga para pekerja / wirausahawan muda.

EVENT/AKTIVASI PRODUK BRI

Selain kegiatan tersebut, pada sepanjang tahun 2020, Perusahaan juga menggelar berbagai kegiatan aktivasi produk BRI lainnya yaitu sebagai berikut:

Webinar

Berbagai webinar yang dilakukan untuk mengedukasi nasabah-nasabah BRI secara virtual antara lain:

Tinjauan Keuangan

WEBINAR
IG Live
Keuntungan Berinvestasi

WEBINAR
The Luxury Goods Investment "Fashion & Art"

WEBINAR
Positive Social Media Marketing

WEBINAR
Marketeers Hangout

WEBINAR
Literasi Keuangan Goes to Campus Trisakti

WEBINAR
Keuntungan Berinvestasi Pada Sukuk Negara Ritel

WEBINAR
Mari berinvestasi ORI 017

WEBINAR
Cara asik tanpa panik Investasi pakai ORI 018

WEBINAR
"GEMAR" Generasi Miliki Rumah

WEBINAR
Sosialisasi kenormalan baru sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

WEBINAR
tetap ceria saat pandemi, belanja apa aja anti panik

WEBINAR
IG Live
Kartu Kredit BRI untuk Staycation tanpa worry

WEBINAR
Dear to dream: saatnya memulai usaha bersama ceria

WEBINAR
Healthy Body & Mind For Indonesia Unity

WEBINAR
K-Talk
What Financial Changes to Expect in the New Normal

Tinjauan Keuangan

WEBINAR
Future Financial Festival, Investing in Food & Beverage Business (Restaurant Group & Catering Business)

Vlog
Baim Wong
Digital saving

WEBINAR
Financial Planning "New Normal"

WEBINAR
Turn Your Hobby into Business

WEBINAR
Jajan Sehat: Belanja Ceria di masa new normal

WEBINAR
Semarak literasi keuangan

WEBINAR
IG Live
Tips & Trick menjadi Usaha di Tengah Pandemi

WEBINAR
IG Live
Cinta dan Cita: menebar kebaikan dan semangat di tengah pandemi

WEBINAR
Financial Planning from investment perspective with Danareksa Sekuritas

WEBINAR
Be a Young Entrepreneur

WEBINAR
Follow you dream with fun learning

WEBINAR
Future Financial Festival 2020

WEBINAR
IG Live
Bisik with Rossa

Tinjauan Keuangan

Digital Activation

Indonesia Mall Shop & Selfie Challenges

IndonesiaMall

Comic Strip Competition

Independence Day Cake Competition

Challenges Puisi Kemerdekaan

Hari Ayah #TerusBukaJalan

Unboxing Happiness with BritAma FSTVL

Spesial hari Pahlawan: Terimakasih Pahlawan

Kuis #dirumahaja

#PotretKelompokUMKM

Agen BRILink Berhadiah

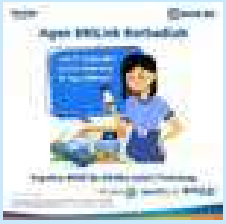

Dance Cover Challenges PRS

Tebak Potongan Gambar di IG

Adu Pantun Buka Tabungan

BRImo QR Challenges

Event Online

Jakarta Marketing Weeks

Wow Brand festive day

Launching Aplikasi pinjaman Digiku - digital umkm

Ideafest 2020

Event BRI-X

Indonesia Brand Forum

Seremonial penyerahan donasi kepada Dekranas

PANGSA PASAR BRI (BANK SAJA)

Pangsa pasar BRI dalam hal aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap industri terus menunjukkan peningkatan. Berikut pangsa pasar BRI dalam tiga tahun terakhir.

Pangsa Kredit

(%)

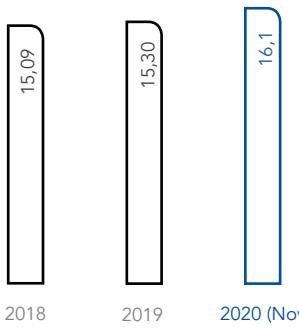

Pangsa Dana Pihak Ketiga

(%)

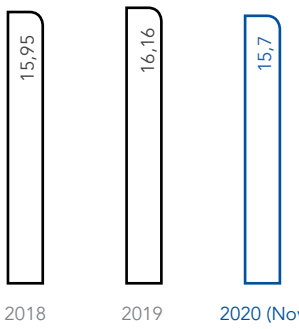

Tinjauan Keuangan

Strategi Pemasaran 2021

Dalam rangka mencapai visi Bank BRI di tahun 2022 menjadi "*The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to The Best Talent*" diperlukan dukungan aktifitas pemasaran yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dari produk, jasa serta program yang dimiliki oleh Bank BRI, namun juga untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *activation* kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) dan calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*) agar bisnis Bank BRI dapat tetap berkembang dan berkelanjutan. Strategi pemasaran BRI di tahun 2021 akan tetap fokus pada implementasi *integrated marketing communication* dengan pemanfaatan *digital channel* sejalan dengan perubahan perilaku nasabah khususnya ditengah pandemi Covid-19. Beberapa strategi pemasaran BRI, antara lain:

1. Pemanfaatan *digital channel* dalam pemasaran produk dan jasa BRI Group (*social media*, *digital platform partnership*, *virtual event*)
2. Peningkatan program *cross-selling*
3. Penguatan standarisasi design dan material komunikasi pemasaran
4. Optimalisasi *database marketing communication* dan *marketing intelligence*

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Dalam memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, BRI memerhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor sustainable tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun ke depan. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Jumlah Dividen yang Dibagikan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2020, BRI telah membagikan dividen sebesar Rp20,62 triliun atau 60% dari Laba Tahun 2019 yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Bank BRI tahun 2019 sebesar Rp34,37 Triliun. Pemegang saham menyetujui peningkatan rasio pembayaran dividen dari 50% dari laba bersih pada tahun 2018 menjadi 60% dari laba bersih pada tahun 2019. Jumlah dividen tunai per saham sebesar Rp168,20 dan dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2020 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2020.

Tabel Pembayaran Dividen BRI

Keterangan	2018	2019	2020
Jumlah Dividen (miliar Rupiah)	13.048,44	16.175,57	20.623,56
Dividen perlembar Saham (Rupiah)	106,75	131,17	168,11
Rasio Dividen	45% dari laba bersih tahun 2017	50% dari laba bersih tahun 2018	60% dari laba bersih tahun 2019
Tanggal Pengumuman	22 Maret 2018	15 Mei 2019	28 Februari 2020
Tanggal Pembayaran	25 April 2018	13 Juni 2019	18 Maret 2020

KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Seiring dengan pertumbuhan usaha BRI telah berkontribusi bagi negara baik secara tidak langsung maupun langsung. Kontribusi tidak langsung yang telah diberikan BRI adalah turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit maupun layanan perbankan lainnya. BRI juga turut terlibat dalam berbagai program pemerintah terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan antara lain penyaluran KUR dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, BRI turut menjaga kedaulatan bangsa dengan memberi layanan perbankan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) yang didukung teknologi satelit BRISat.

Adapun kontribusi langsung BRI bagi negara adalah dalam bentuk setoran pajak serta pembayaran dividen kepada Pemerintah RI sebagai pemegang saham utama BRI. Berikut kontribusi Pajak dan dividen yang telah dilakukan BRI selama 2018 hingga 2020:

Tinjauan Keuangan

Kontribusi Pajak dan Dividen

Rp juta

No	Jenis Pajak	2018	2019	2020
1	PPh Pasal 21	1.319.719	1.893.956	2.066.891
2	PPh Pasal 22	19.541	32.087	27.960
3	PPh Pasal 23	170.931	210.712	235.505
4	PPh Pasal 26	1.102.587	1.242.532	1.378.848
5	PPh Final pasal 4 ayat (2)	4.197.500	5.329.602	5.138.719
6	PPN & PPnBM	82.515	83.215	105.850
7	Bea Materai	74.132	18.970	46.871
	Sub Jumlah Pajak Potput	6.966.925	8.811.074	9.000.644
8	PPh Badan (Corporate Tax)	9.845.709	8.572.307	7.611.026
11	Dividen	7.472.281	9.179.798	11.774.153
	Jumlah (Pajak + Dividen)	24.284.915	26.563.179	28.385.823

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan manajemen, BRI mengadakan program kepemilikan saham untuk manajemen dan/atau Pekerja. Pada tahun 2019, sesuai dengan Putusan RUPS tanggal tgl 23 Maret 2016, BRI memberikan Long Term Incentive (LTI) berupa program kepemilikan saham oleh karyawan yang telah dibayarkan untuk Program ESA I BRI Tahap 1 sebesar 143.415.500 lembar saham untuk 50.775 pekerja pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 BRI melaksanakan Program ESA I BRI Tahap 2 sebesar 4.396.700 lembar saham untuk 173 pekerja dan pembayaran program ESA II sebesar 226.714.300 lembar saham kepada 54.527 pekerja dilakukan pada tahun 2020, sedangkan Program ESA III dan ESA IV yang masing-masing didistribusikan kepada +/- 57.111 pekerja dengan estimasi jumlah saham untuk setiap program mencapai 237.000.000, dimana distribusi kedua program dimaksud akan dilakukan pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, BRI telah melaksanakan distribusi program kepemilikan saham Pekerja yang terdiri dari Employee Stock Allocation (ESA) tahap 1 dan tahap 2, dengan rincian sebagai berikut:

	ESA I	ESA II
Tanggal Grant	31 Desember 2016	2 Januari 2020
Akhir Periode Vesting	Vesting 2 : 31 Desember 2019	31 januari 2020
Jumlah Saham	4.396.700 lembar	226.714.300 lembar

Sehingga total saham yang didistribusikan atas program tersebut adalah sebesar 231.111.000 lembar saham yang didistribusikan kepada +/- 54.000 orang Peserta.

Program kepemilikan saham merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk memberikan insentif jangka panjang kepada Pekerja. Program ini diberikan berdasarkan penilaian individu dan kinerja Perseroan, dengan tujuan semakin meningkatkan sense of belonging pekerja dengan Perseroan, sehingga diharapkan mampu secara konsisten mendorong peningkatan produktifitas dan pencapaian kinerja jangka panjang Perseroan, sehingga Pekerja yang berhak mengikuti program ini adalah Pekerja yang memiliki kinerja baik sehingga memenuhi persyaratan *grant* dan dapat mempertahankan kinerja tersebut selama periode vesting.

PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

BRI melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering atau IPO) pada 10 November 2003. Sesuai dengan penjelasan pada prospektus IPO, perincian penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yakni sebesar Rp1,47 triliun adalah sebagai berikut:

Total Perolehan Dana	Rencana Penggunaan Dana	Rincian Penggunaan Dana	Total Penggunaan Dana	Saldo Dana
Rp 1,47 triliun	Sekitar 60% digunakan untuk pengembangan Core Banking dan IT System	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 883,27 miliar	Rp 1,47 triliun atau 100% dari rencana penggunaan dana	Nihil
	Sekitar 30% digunakan untuk ekspansi jaringan kerja	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 441,63 miliar		
	Sekitar 10% digunakan untuk riset dan pengembangan produk	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 147,21 miliar		

Selama periode penggunaan dana penawaran umum tahun 2004-2009, tidak melakukan perubahan rencana penggunaan dana.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

BRI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam kegiatan normal usaha. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Rincian transaksi pihak berelasi tersedia di Catatan 45 di Laporan Keungan pada Laporan Tahunan ini.

Transaksi Signifikan

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dalam tabel di Catatan 45 di Laporan Keungan pada Laporan Tahunan ini.

Tinjauan Keuangan

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Pada 12 Oktober 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS. Berdasarkan perjanjian tersebut, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan, sedangkan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bank Peserta Penggabungan mengumumkan *Merger Plan* yang memuat komposisis Pemegang Saham dengan porsi kepemilikan BRI pasca penggabungan menjadi minimal 17,4% (dengan asumsi tidak ada MESOP BRIS dieksekusi). Adapun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB BRIS tanggal 8 Januari 2018, terdapat Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen BRIS (MESOP) yang apabila seluruh Opsi tersebut didistribusikan dan di *exercise*, maka porsi kepemilikan BRI di Bank Hasil Penggabungan akan menjadi minimal 17,2%.

Pada tanggal 15 Desember 2020, BRIS telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dimana para pemegang saham menyetujui rencana penggabungan BRIS, BNIS, dan BSM menjadi Bank Hasil Penggabungan, termasuk Rancangan Penggabungan, Akta Penggabungan, dan perubahan & penyesuaian Anggaran Dasar BRIS. RUPSLB juga menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRIS dan mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank Hasil Penggabungan yang berlaku efektif pada tanggal efektif penggabungan. Atas penggabungan tersebut, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS tidak termasuk ke dalam Konglomerasi Keuangan BRI dan Bank Hasil Penggabungan akan masuk sebagai anggota Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

Atas pemegang saham BRIS yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB BRIS tersebut di atas terkait penggabungan akan diberikan kesempatan meminta sahamnya dibeli oleh BRI dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI dengan nilai pasar wajar yang telah ditetapkan.

Transaksi penggabungan usaha tiga bank BUMN syariah ini telah mendapat persetujuan dari OJK Pasar Modal dan OJK Perbankan masing-masing melalui surat No.S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan N. 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021. Informasi terkait dapat dilihat pada bagian Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Periode Laporan.

Restrukturisasi Utang dan/atau Restrukturisasi Modal

Dengan kondisi perekonomian yang resesi sebagai dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam mencicil maupun melunasi pinjamannya. Guna menjaga stabilisasi industri keuangan, OJK mengeluarkan regulasi bagi bank, asuransi dan lembaga pembiayaan untuk merelaksasi utang nasabah khususnya segmen UMKM.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, BRI merestrustrukrisasi kredit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp42,64 triliun dan Rp51,87 triliun. Skema restrukturisasi secara umum dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Adapun jumlah kredit yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp194,88 triliun dengan skema perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penundaan pokok dan penundaan bunga. Langkah ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan PJOK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.11 tersebut di atas.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 32/ POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum		Penyusunan Kebijakan internal terkait BMPK di BRI
2	Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 20/4/ PADG/2018 Tanggal 5 April 2018	Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	Pokok pengaturan yang berubah dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait kewajiban Peserta untuk menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana; 2. Pengaturan mengenai mekanisme antrean dan penggunaan FLI untuk pelaksanaan setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS; 3. Pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam Pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum dalam Sistem BI-RTGS dilakukan secara tersentralisasi; 4. Penyempurnaan pengaturan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan serta harmonisasi dengan ketentuan penyelenggaraan sistem lain di Bank Indonesia seperti BI-SSSS, Sistem BI-ETP, dan SKNBI antara lain: • batas waktu kewajiban pelaksanaan security audit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan system teknologi informasi internal Peserta Sistem BI-RTGS; • kewajiban untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara. Hal ini ditujukan agar Peserta berkomitmen mengikuti uji coba untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran.	1. BRI harus menyususn prosedur baru tentang penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS 2. BRI wajib melakukan security audit paling lambat 6 bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal peserta sistem BI-RTGS 3. BRI wajib untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
3	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/15/ PADG/2018 Tanggal 30 Juli 2018	Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)	1. Latar belakang penerbitan PADG tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem BI-RTGS antara lain untuk mengatur mengenai kewajiban penyediaan dana pada saat pengiriman instruksi setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS, mekanisme antrean, dan penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum maka pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam penyelenggaraan BI-RTGS, dilakukan secara tersentralisasi. 2. Pokok pengaturan yang berubah dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement adalah sebagai berikut: a. Pengaturan terkait kewajiban Peserta untuk menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana; b. Pengaturan mengenai mekanisme antrean dan penggunaan FLI untuk pelaksanaan setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS; c. Pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam Pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum dalam Sistem BI-RTGS dilakukan secara tersentralisasi; d. Penyempurnaan pengaturan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan serta harmonisasi dengan ketentuan penyelenggaraan sistem lain di Bank Indonesia seperti BI-SSSS, Sistem BI-ETP, dan SKNBI antara lain: • batas waktu kewajiban pelaksanaan security audit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta Sistem BI-RTGS; • kewajiban untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara. Hal ini ditujukan agar Peserta berkomitmen mengikuti uji coba untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. 3. PADG Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali ketentuan mengenai: i. instruksi setelmen dana; ii. grup prioritas; iii. mekanisme antrean; dan iv. fasilitas pengelolaan likuiditas.	1. BRI wajib memenuhi ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam PADG dimaksud 2. BRI wajib melakukan security audit paling lambat 6 bulan sejak terjadi peribahan sistem teknologi informasi internal peserta sistem BI-RTGS 3. BRI wajib untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
4	Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 20/26/ PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018	Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini diterbitkan dalam rangka penyelarasan terhadap kebijakan perizinan terpadu oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/13/PBI/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PBI PPTBU). 2. PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mengatur kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain persyaratan dan tata cara menjadi Peserta, perubahan data kepesertaan, status kepesertaan, dan perubahan status kepesertaan dalam SKNBI. 3. Selain itu, dalam rangka penyelarasan terhadap kebijakan perizinan terpadu sebagaimana angka 1, terdapat penyesuaian pengaturan penyampaian permohonan dan informasi mengenai kepesertaan SKNBI sebagai berikut: a. Penyampaian permohonan dan informasi ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran untuk: i. Permohonan menjadi Peserta yang diajukan oleh Bank yang baru didirikan atau Bank sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar sebagaimana PBI PPTBU; ii. Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI dan perubahan status kepesertaan sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar serta perubahan data kepesertaan yang mempengaruhi data Peserta di Bank Indonesia; dan iii. Penyampaian informasi mengenai perubahan alamat dan Pimpinan Peserta. b. Permohonan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran untuk: i. Permohonan menjadi Peserta yang diajukan oleh Bank selain sebagaimana dimaksud dalam butir a.i) dan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, perubahan data kepesertaan; dan ii. Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI selain sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii). 4. PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mencabut ketentuan Bab III huruf A sampai dengan huruf G Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/7/ DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016. 5. Ketentuan dalam PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Sebagai peserta kliring nasional BRI wajib mengikuti ketentuan baru dimaksud dan melaporkan laporan-laporan yang diatur pada PADG BRI No. 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
5	POJK Nomor 34/ POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018	Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	1. Pihak Utama di BRI yang tunduk pada ketentuan dalam POJK ini meliputi: • Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP (adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian); • anggota Direksi; • anggota Dewan Komisaris; dan • Pejabat Eksekutif (pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank); 2. BRI wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi dan disampaikan pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku (28 Februari 2019). Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili, BRI dapat menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu. 3. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi telah disampaikan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor B.21-KPT/ BNP/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. 4. Selanjutnya, BRI juga wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham mengenai status Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus yang dilakukan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.	1. BRI wajib melakukan pengkinian data pihak utama dan menyampaikan ke OJK paling lambat 1 bulan sejak ketentuan ini berlaku 2. BRI juga wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham mengenai status Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus yang dilakukan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/ POJK.04/2019 tanggal 19 Februari 2019	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk	1. Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk baik untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah penyimpan 2. Pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran 3. Sertifikat kompetensi profesi treasury dimaksud, digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran. 4. Bank dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk (PPE EBUS) wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 5. Laporan kegiatan berkala wajib disampaikan secara bulanan paling lambat setiap hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya. 6. Laporan insidental wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.	Dampak dari POJK tersebut bagi BRI adalah: 1. Menyusun ketentuan internal dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk 2. Membuat prosedur dan mekanisme pengawasan dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk 3. Memastikan sertifikat kompetensi profesi treasury dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran bagi Pekerja BRI yang ditunjuk

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
7	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/7/PBI/2019 tanggal 15 Mei 2019	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 20/10/PBI/2018 Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward	1. Seluruh Transaksi Domestic Non-Del iverable Forward (DNDF) wajib memiliki Underlying Transaksi. 2. Kewajiban kepemilikan Under lying Transaksi dikecual ikan untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing. 3. Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung atau dibuktikan dengan dokumen Underlying transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung. 4. Dokumen Underlying Transaksi wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF. 5. Bank waj ib memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen Underlying transaksi valas terhadap Rupiah. 6. Sebagaimana diatur pada PBI tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, Dokumen Under lying Transaksi yang bersifat perkiraan berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui: a. dokumen tambahan; b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan c. rekam jejak Nasabah atau Pihak Asing. 7. Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan: a. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; dan/atau b. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.	1. Mengubah batas waktu pemrosesan pengiriman DKE Transfer Dana melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; 2. Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen; 3. Pengiriman DKE Pembayaran melalui Layanan Pembayaran Reguler wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; dan 4. Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Pembayaran Reguler yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen.

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
8	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/11/ PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019	Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	1. Cakupan pengaturan PADG Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini meliputi: a. ketentuan umum; b. batas nilai nominal transaksi melalui sistem BI-RTGS; c. batas nilai nominal transaksi melalui SKNBI; d. pengumuman; dan ketentuan penutup. 2. Dalam PADG ini menyempurnakan ketentuan mengenai batas nilai nominal maksimal transaksi melalui SKNBI, yaitu: a. Maksimal Rp 1 miliar untuk Layanan Transfer Dana; b. Maksimal Rp 500 juta untuk Layanan Kliring Warkat Debit; c. Maksimal Rp 1 miliar untuk Layanan Pembayaran Reguler; d. Maksimal Rp 500 juta untuk Layanan Penagihan Reguler. 3. Seluruh peserta sistem BI-RTGS dan SKNBI harus mengumumkan batas nilai nominal transaksi yang diproses melalui sistem BI-RTGS dan SKNBI kepada nasabah. Pengumuman dilakukan dengan menempatkan informasi tersebut pada setiap kantor dan pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah. 4. PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Dampak dari PADG tersebut bagi BRI adalah: 1. BRI telah mengubah batas maksimal nilai nominal transaksi melalui layanan SKNBI untuk layanan transfer dana yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu muliar rupiah) per DKE transfer dana; dan 2. BRI telah mengubah batas maksimal nilai nominal transaksi melalui layanan SKNBI untuk layanan transfer dana yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per rinican DKE pembayaran.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
9	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/10/ PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019	Standar Layanan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Cakupan pengaturan PADG Standar Layanan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini meliputi: 1. ketentuan umum; 2. standar layanan nasabah dalam layanan transfer dana, tata cara pengisian perintah transfer dana, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; 3. standar layanan nasabah dalam layanan kliring warkat debit, tata cara pengisian perintah transfer dana debit, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; 4. standar layanan nasabah dalam layanan pembayaran regular, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; 5. standar layanan nasabah dalam layanan penagihan regular, tata cara pengisian perintah transfer debit, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; 6. tata cara pengenaan sanksi administratif; 7. ketentuan penutup.	Dampak dari PADG tersebut maka BRI harus melakukan hal-hal sbb: 1. Mengubah batas waktu pemrosesan pengiriman DKE Transfer Dana melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; 2. Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen; 3. Pengiriman DKE Pembayaran melalui Layanan Pembayaran Reguler wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; dan 4. Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Pembayaran Reguler yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen.

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019.	Tata Kelola Dana Pensiun	1. Terdapat perluasan definisi dari Dana Pensiun yakni Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. 2. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 3. Pengaturan atas jumlah, komposisi, kriteria dan indenpendensi pengurus diatur dengan lebih jelas yakni untuk pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota yang disesuaikan dengan kompleksitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan memenuhi kriteria serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut. 4. Mayoritas Pengurus DPPK dan Mayoritas Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama pengurus dan Dewan Pengawas serta memiliki benturan kepentingan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun. 5. Pengaturan atas jumlah, komposisi, kriteria dan indenpendensi pengurus diatur dengan lebih jelas yakni untuk Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota 6. Dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Dana Pensiun wajib membentuk fungsi sebagai berikut: a. Audit Internal; b. Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan. Pembentukan fungsi tersebut bagi DPPK dilakukan oleh pengurus dan bagi DPLK dilakukan oleh Pelaksana Tugas Pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada pendiri DPLK. 7. Dana pensiun wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang didasarkan pada Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 8. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut dapat dikenai sanksi administrarif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola; dan/ atau c. Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengurus DPPK. 9. Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan/ atau DPS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan yakni diundangkan di tanggal 12 Juni 2019 dan mulai berlaku efektif di tanggal 12 Desember 2019.	Dana Pensiun BRI wajib menyusun Pedoman Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 30 Agustus 2019	Pengelolaan Uang Rupiah	Materi pokok yang diatur di dalam PBI tentang Pengelolaan Uang Rupiah meliputi: 1. Macam Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam, termasuk Uang Rupiah Khusus (URK); 2. Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah, pecahan Uang Rupiah, ciri Uang Rupiah, desain Uang Rupiah, dan bahan baku Uang Rupiah; 3. Bank Indonesia melakukan perencanaan Uang Rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor yang mempengaruhi; 4. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah, termasuk Uang Rupiah Khusus dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa 5. Kewajiban penyampaian laporan oleh Bank dan PJPUR kepada Bank Indonesia. 6. Bank Indonesia melakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung kepada Bank dan PJPUR, serta pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan. 7. Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah, serta kerja sama dengan badang yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah palsu dan/atau instansi berwenang dalam rangka mendukung penanggulangan Uang Rupiah palsu. 8. Pengenaan sanksi administratif kepada Bank dan PJPUR.	BRI wajib membuat ketentuan internal tentang penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, baik berkala dan laporan incidental, maka agar dibuat ketentuan yang mengatur terkait Unit Kerja yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan dan koreksi laporan apabila ada koreksi
12	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No 35/ POJK.05/2018 Tahun 2018	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	Substansi POJK ini mencakup antara lain sbb: 1. Kegiatan Usaha Pembiayaan 2. Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor 3. Kerja Sama Pembiayaan 4. Strategi Anti Fraud 5. Sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama 6. Penyertaan 7. Pendanaan 8. Larangan 9. Rasio Utang Pembiayaan 10. Ekuitas 11. Tingkat Kesehatan Keuangan 12. Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan dan Pelayaran 13. Penyampaian Laporan Berkala 14. Sanksi	Dampak bagi BRI adalah, BRI telah menyusun ketentuan internal yang mengatur mengenai Pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan POJK dimaksud

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
13	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2019	Pinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	Substansi POJK ini mencakup antara lain sbb: 1. Ketentuan Umum 2. Aktivitas Bank Dalam Sekuritisasi Aset 3. Batas Maksimum Pemberian Fasilitas 4. Pelaporan 5. Sanksi	Dampak bagi BRI antara lain: 1. BRI telah mengajukan izin untuk aktivitas sekuritisasi aset kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila dikemudian hari BRI akan melakukan kegiatan sekuritisasi aset. 2. BRI membuat pedoman Manajemen Risiko terkait Prinsip Kehati-hatian Aktivitas Sekuritisasi Aset dan dibuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Kredit atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah apabila akan melakukan kegiatan Sekuritisasi Aset Kredit Kepemilikan Rumah. 3. BRI membuat perjanjian terkait masing-masing kegiatan Aktivitas Sekuritisasi Aset.
14	POJK Nomor RI Nomor : 16/ POJK.05/2019	Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Substansi POJK ini mencakup antara lain: 1. Struktur Organisasi Perusahaan PNM 2. Batas rasio produktivitas Perusahaan 3. Pemenuhan Tingkat Kesehatan Keuangan 4. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 5. Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif 6. Kepatuhan pelaporan Laporan Tahunan 7. Penerapan Strategi Anti Fraud 8. Larangan-larangan Perusahaan PNM	Dampak POJK tersebut bagi BRI yaitu BRI akan menyusun prosesur monitoring terhadap perusahaan PNM sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada POJK Nomor : 16/POJK.05/2019

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
15	Analisa Dampak Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 45 Tahun 2019	Barang Dilarang Ekspor	Pada Peraturan Menteri ini telah ditetapkan barang dilarang ekspor ke dalam 4 (empat) bidang usaha, yaitu sebagai berikut: 1. Bidang Pertanian : Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip, dan lain-lain. 2. Bidang Kehutanan : Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut; bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu, dan lain-lain. 3. Bidang Pertambangan : Pasir alam dari segala jenis; Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas; Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang; Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 4. Cagar Budaya : Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, palaeontologi, etnografi atau numismatika; dan barang antik yang umumnya melebihi 100 tahun.	BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan Loan Portfolio Guidelines (LPG) Tahun 2018 khususnya terkait dengan list barang dilarang ekspor.
16	Analisa Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Pokok Pengaturan dalam PERMA antara lain sbb: 1. Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini disusun untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara eksekusi. a. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. b. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500 juta. c. Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institut penggugat.	BRI telah melakukan penyesuain terkait syarat gugatan sederhana

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
17	Analisa Dampak Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2019	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	Pokok Pengaturan dalam Permen Agraria antara lain sbb: 1. I. Latar Belakang Peraturuan ini dibuat sebagai landasan hukum untuk meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi secara elektronik. II.Terkait mekanisme pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik diatur hal-hal sebagai berikut : a. Pengguna Terdaftar mengajukan permohonan layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el yang disediakan oleh Kementerian. b. Pemohon membuat Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data Dokumen Elektronik yang diajukan dalam bentuk Dokumen Elektronik (format terlampir). c. Persyaratan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitor. d. Asli dokumen persyaratan permohonan wajib disimpan oleh pemohon. e. Dalam hal permohonan layanan berupa pendaftaran Hak Tanggungan, persyaratan pemohonan yang berupa APHT disampaikan oleh PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Sistem HT-el. f. Permohonan layanan yang telah diterima oleh Sistem HT-el diberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem paling sedikit memuat : 1. Nomor berkas pendaftaran permohonan; 2. Tanggal pendaftaran permohonan; 3. Nama pemohon; dan 4. Kode pembayaran biaya layanan. g. Setelah mendapat bukti pedaftaran sebagaimana dimaksud pada butir f diatas, pemohon melakukan pembayaran biaya melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Jika dalam batas waktu belum melakukan pembayaran maka permohonan dinyatakan batal.	BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan tentang agunan kredit beserta perubahannya serta melakukan penyusunan Juknis (Petunjuk Teknis) dan hal-hal yang dilarang dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2019

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			h. Permohonan diproses setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem elektronik. Jika tidak terkonfirmasi oleh sistem, pemohon dapat melakukan konfirmasi secara langsung ke Kantor Pertanahan atau Layanan Pengaduan. Terkait pencatatan Hak Tanggungan diatur hal-hal sebagai berikut : 1. Layanan Hak Tanggungan diproses dengan melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh Kepala Kantor Pertanahan. 2. Pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dapat dilakukan oleh Kreditor dengan mencetak catatan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el. 3. Kreditor melekatkan hasil cetakan catatan sebagaimana dimaksud butir b diatas, pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Tanggungan.	

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
18	Analisa Dampak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 11/PRT/M/2019	Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah	I. Latar Belakang Peraturuan ini dibuat sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 1. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sistem PPJB yang terdiri dari Pemasaran dan PPJB. Sistem PPJB berlaku untuk Rumah Umum Milik dan Rumah Komersial berbentuk Rumah Tunggal, Rumah Deret, dan Rumah Susun. Pelaku Pembangunan dalam Sistem PPJB terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum. 2. Terkait pemasaran diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pelaku Pembangunan dapat melakukan pemasaran Rumah Tunggal atau Rumah Deret pada saat dalam tahap proses pembangunan atau sebelum pembangunan dilaksanakan. b. Pelaku Pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan Agen Pemasaran atau Penjualan untuk melakukan Pemasaran. c. Pelaku Pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan Agen Pemasaran atau penjualan. d. Pemasaran harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada. Informasi Pemasaran kepada masyarakat memuat paling sedikit : • nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota; • nomor sertipikat hak atas tanah atas nama Pelaku Pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan; • surat dukungan dari bank/bukan bank; • nomor dan tanggal pengesahan untuk Pelaku Pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk Pelaku Pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pembangunan; • nomor dan tanggal penerbitan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan; • rencana tapak perumahan atau Rumah Susun; • spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah Sarusun; • harga jual Rumah atau Sarusun;	BRI telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan tersebut

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			• informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum yang dijanjikan oleh Pelaku Pembangunan; dan • informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah Susun. 3. Terkait PPJB diatur hal-hal sebagai berikut : PPJB dilakukan setelah Pelaku Pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah (dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat Penandatangananan PPJB); b. hal yang diperjanjikan, paling sedikit terdiri atas: • kondisi rumah; • prasarana, sarana, dan utilitas umum; • penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; • status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan (disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat Penandatangananan PPJB); d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan (dibuktikan dengan terbangunnya prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase, lokasi pembangunan sarana sesuai peruntukan; dan surat pernyataan Pelaku Pembangunan mengenai tersedianya utilitas umum berupa sumber listrik dan sumber air); e. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk rumah susun (dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pelaku Pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama); f. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: • untuk Rumah Tunggal atau Rumah Deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan; atau • untuk Rumah Susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah Susun yang sedang dipasarkan.	

Tinjauan Keuangan

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
19	Hasil Analisa Dampak atas PBI Nomor 21/13/ PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/8/ PBI/2018	Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Pokok Pengaturan dalam PBI antara lain sbb: I. Latar Belakang 1. bahwa dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga maka diperlukan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif melalui relaksasi kebijakan khususnya terkait rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor; 2. bahwa sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan upaya mendorong ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) diperlukan dukungan bank sentral melalui kebijakan rasio loan to value, rasio financing to value, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi properti berwawasan lingkungan dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; Tata cara penilaian agunan diatur sebagai berikut: 1. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan 2. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independent.	Dampak dari terbitnya PBI tersebut maka BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan internal megancu pada PBI Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/8/PBI/2018
20	Undang - Undang No.11 Tahun 2020 Tanggal 2 November Tahun 2020	Cipta Kerja	Berdampak signifikan karena terdapat perubahan pada beberapa undang - undang antara lain terkait: 1. Penyederhanaan Perizinan 2. Persyaratan Investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM 5. Kemudahan Berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintah 8. Pengadaan Lahan 9. 9.Investasi dan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi	Harus dilakukan penyusunan dan penyesuaian kembali Kebijakan Internal BRI yang terdampak ketentuan UU Cipta Kerja

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
21	POJK No. 15/ POJK.04/2020 Tanggal 20 April Tahun 2020	Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	1. Regulator berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS). 2. Penambahan ketentuan terkait pihak yang dapat mengusulkan RUPS semula hanya Pemegang Saham dan Direksi, menjadi Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.	BRI sebagai Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal 20 April 2020. Penyesuaian pada Anggaran Dasar Perseroan sedang dalam tahap penyusunan dan akan dimintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar pada RUPS terdekat.
22	POJK No. 16/ POJK.04/2020 Tanggal 20 April Tahun 2020	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	Pada ketentuan ini diatur terkait penyelenggaran RUPS secara elektronik dengan rinci, antara lain: 1. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik; 2. Penyedia e-RUPS; 3. Pengguna e-RUPS ; 4. Pemberian Kuasa secara Elektronik; dlsb	Penyesuaian pada Anggaran Dasar Perseroan sedang dalam tahap penyusunan dan akan dimintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar pada RUPS terdekat.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan Terhadap BRI
1	PSAK 71	Terdapat 2 (dua) perubahan signifikan di PSAK 71 jika dibandingkan PSAK 55 yang diterapkan di BRI, yaitu: Klasifikasi dan Pengukuran (Classification and Measurement/C&M) dan Penurunan Nilai (Impairment)	CKPN aset keuangan dibentuk menggunakan konsep forward looking (dibentuk tanpa harus terjadi penurunan kualitas aset keuangan), atau Memperhitungkan probabilitas terjadinya penurunan nilai di masa mendatang (tanpa harus terdapat bukti obyektif penurunan nilai saat ini)
2	PSAK 73	Mengakui single accounting model untuk seluruh sewa dengan mengakui asset hak guna dan liabilitas terkait, dengan 2 pengecualian yaitu aset pendasar bernilai rendah dan sewa jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan karena kebanyakan sewa mekanisme pembayarannya lunas di awal sehingga sudah tercatat sebagai kelompok asset lain-lain.

Tinjauan Keuangan

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Ancaman kelangsungan usaha BRI bisa bersumber dari potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam (*natural disaster*), manusia (*man made disaster*), teknologi dan gangguan terkait infrastruktur. Untuk mengantisipasi dampak dari potensi gangguan tersebut, Direksi BRI mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Business Continuity Management (BCM) yang diatur dalam Surat Edaran BRI NOSE: S.26-DIR/DMR/12/2016. Tujuan kebijakan BCM antara lain melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan stakeholders lainnya yang berada di lingkungan Unit Kerja Operasional BRI sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sudah dimiliki, serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Saat ini tantangan dari BCM selain dari ke 4 (empat) faktor diatas adalah terkait adanya Pandemi Covid-19 di era New Normal serta Digitalisasi Perbankan dan Sistem Keuangan yang dapat menimbulkan banyak disrupsi gangguan salah satunya adalah Gangguan Cyber Attack.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Struktur Organisasi BCM yang terdiri dari Tim Pemelihara Manajemen Kelangsungan Usaha (TPMKU) dan Tim Manajemen Krisis, penyusunan Call Tree dan penetapan alternate sites. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman Emergency Response Plan (ER Plan) dan kebijakan Business Continuity Plan (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritikal. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER Plan dan BC Plan dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI, termasuk pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Penanganan Covid-19 dilakukan dengan melakukan langkah-langkah 3 T (*tracing*, *testing* dan *treatment*) di unit kerja.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge, dan POJK Nomor 14/PONK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, BRI sebagai salah satu Bank Sistemik telah menyusun Dokumen Rencana aksi (*Recovery Plan*).

Rencana aksi merupakan tahapan rencana yang akan dilakukan apabila Bank Sistemik mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Oleh karenanya Rencana Aksi yang disusun BRI telah memuat skenario yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan dan/atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha BRI.

Dokumen Rencana Aksi BRI telah memuat hal-hal yang ditetapkan di dalam POJK Rencana Aksi meliputi skenario dan opsi-opsi pemulihan yang akan dilaksanakan BRI berdasarkan indikator yang mencakup aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek rentabilitas, dan aspek kualitas aset.

Pada tahun 2020, BRI sebagai Bank Sistemik telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap Rencana Aksi BRI sebagai tindak lanjut atas pemenuhan POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik. Berdasarkan hasil evaluasi, sepanjang tahun 2020 tidak terdapat trigger level Recovery Plan BRI yang terlampaui sehingga tidak diperlukan aktivasi atas *Recovery Plan* BRI. Hal tersebut sejalan dengan kinerja BRI yang mampu mempertahankan kecukupan rasio Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset di atas trigger level pencegahan *Recovery Plan* BRI ditengah penurunan kondisi perekonomian nasional.

Dokumen Rencana Aksi BRI Tahun 2020-2021 telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BRI dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK No. S-4/PB.3/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) 2020-2021.

PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Selama tahun 2020, pengelolaan *talent* di BRI yang dikenal dengan nama BRILiaN menjadi salah satu fokus strategi inisiatif perusahaan untuk menjawab aspirasi Bank BRI menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent.* Secara khusus BRI membentuk BRILiaN *Development Centre* untuk mengawal penyiapan sistem dan digitalisasi proses bagi Insan BRILiaN, sehingga dapat berkembang secara maksimal & optimal, menjadi *Great Talent & Great Leader.*

Human Capital Development

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT HUMAN CAPITAL

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT HUMAN CAPITAL 2020

Sepanjang 2020, BRI telah melakukan beberapa inisiatif dan internalisasi budaya kerja melalui pengembangan yang sesuai dengan framework BRI One Culture.

BRI bersama Taskforce Covid-19 merespon kondisi pandemi melalui inisiasi budaya bekerja dengan cara yang baru "*New Way of Working*". Pekerja dimungkinkan bekerja dan belajar *from anywhere* dan *anytime* melalui dukungan digitalisasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses bisnis di bidang *human capital* dan mendukung penekanan penyebaran pandemi Covid-19, BRI telah mengembangkan BRILian Apps, yaitu aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh seluruh Insan BRILiaN untuk memilih lokasi tempat kerja saat Insan BRILiaN melakukan remote working dan update kegiatan BRI Community. BRILiaN Apps hadir untuk mendukung terciptanya work-life integration dan menjaga produktivitas pekerja. BRI pun terus melakukan *enhancement* otomasi pada aplikasi-aplikasi yang bersifat *self-service*.

Integrasi sistem BRI *Human Capital* induk dengan Perusahaan Anak juga menjadi pengembangan yang dilakukan dalam rangka mendukung sinergi perusahaan BRI *as a group*. Dalam pengembangan tahap pertama ini, pengelolaan data pekerja BRI induk dan Perusahaan Anak akan tersentralisasi, sehingga informasi data pekerja menjadi lebih akurat.

Pada tahun 2020, BRI telah membuka rekrutmen *BRILiaN Future Leader Program* dengan total pekerja yang telah resmi bergabung menjadi Insan BRILiaN sebanyak 95 orang. BRI juga membuka rekrutmen *BRILiaN Next Leader Program* bagi para pekerja *internal* BRI dengan total pekerja yang lolos sebanyak 45 orang. Melalui program-program tersebut BRI mencari bintang yang memiliki karakter hebat dan kompetensi yang siap untuk masa depan. Selain rekrutmen *BRILiaN Next Leader Program*, BRI menyelenggarakan rekrutmen *BRILiaN Banking Officer Program* bagi para pekerja *internal* BRI dengan jumlah bekerja yang lolos sebanyak 303 orang.

BRI juga telah melaksanakan pembukaan *BRILiaN Scholarship Program* untuk mendapatkan kandidat pekerja potensial sejak dini yang dapat dimonitor performanya sejak masa kuliah serta mengajak Talent tersebut untuk bergabung menjadi Pekerja BRI dengan program dan benefit yang menarik. Melalui program ini, BRI telah memberikan Beasiswa BRILiaN pada 48 Mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi Indonesia.

Kinerja lain yang dicapai Direktorat Human Capital selama tahun 2020, mencakup tingkat kepuasan (*satisfaction*) Pekerja BRI terhadap pengelolaan Human Capital BRI yang salah satunya diukur dari tingkat turnover. Pada tahun 2020, tingkat turnover mencapai sebesar 1.73% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 2,29% serta lebih rendah dari tingkat turnover secara industri yang mencapai 12%. Angka turnover tersebut menunjukkan bahwa upaya BRI untuk *retention* Pekerja telah menunjukkan hasil yang positif.

Human Capital Development

Employee Engagement Survey tahun 2020 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 93,30% Pekerja menyatakan terikat (*engaged*) dengan Perusahaan. Hasil tersebut meningkat dibandingkan survey tahun 2019 sebesar 83,99%. Sedangkan untuk tingkat satisfaction di tahun 2020, 98,40% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Adapun Net Promoter Score tahun 2020 berada pada nilai 48,4, naik dari tahun sebelumnya sebesar 37.

Pada tahun 2020, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari Earning per Employee (EPE) mencapai Rp285 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini turun dibandingkan pencapaian EPE tahun 2019 yang sebesar Rp556.16 juta per pekerja tetap. Produktivitas menurun karena kinerja bisnis bank terdampak pandemic Covid-19 sehingga Earning BRI turun dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas human capital BRI untuk mendukung pencapaian kinerja unggul, pada tahun 2020, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan. Realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 5,274,114 peserta dengan komposisi 94.9% pendidikan E-Learning, 3.0% pendidikan enhancement, 1.3% Forum Peningkatan Kinerja, 0.6% Sosialisasi dan 0.2% Development.

STRATEGI 2020 & STRATEGI 2021

Pengelolaan HC selama tahun 2020 di BRI bertujuan mewujudkan aspirasi korporasi, yakni menjadi *the Most Valuable Bank in South East Asia dan Home to the Best Talent*. Untuk itu disusunlah kerangka strategi atau arsitektur pengelolaan HC BRI yang praktik dan sistem pengelolaannya berstandar kelas dunia (*becoming a world class human capital system & practices*), yang ditopang oleh 3 pilar, yakni pilar *People,* pilar *Culture*, dan pilar *Organization*.

Untuk tahun 2021 pengembangan Human Capital tetap fokus pada 3 fokus utama pengelolaan Human Capital yaitu *People (Grooming Talent and Great Leader), Culture (Internalizing Brilian Values & Build Digital Culture)* dan *Organization (Leveraging Organizational Competence).* Beberapa milestone yang akan dilakukan yakni:

1. Penguatan *employer brand* BRI untuk meng-*attract* dan me-*retain talent*;
2. Menjaga posisi BRI sebagai pilihan tempat berkarir bagi para profesional muda yang memiliki kompetensi unggul;
3. Peningkatan *employee engagement* dengan sistem *reward* dan *career path* yang jelas.
4. Penggunaan *people analytics* serta data *driven* untuk mendukung putusan pengelolaan *Human Capital.*

Human Capital Development

Pertumbuhan bisnis yang didukung dengan perkembangan teknologi yang cepat dan kompetitif memerlukan human capital (HC) atau talent unggul yang merupakan salah satu faktor penting agar mampu membawa Bank BRI mencapai pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi era digitalisasi peran HC sangatlah penting, dan sejalan dengan pandangan bahwa HC merupakan aset terbesar dan memegang peran penting dalam pencapaian Visi perusahaan.

TATA KELOLA HUMAN CAPITAL

STRUKTUR PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Produktivitas pekerja perlu didukung oleh pengelolaan human capital yang berstandar internasional. Untuk mendukung hal tersebut, sejak tahun 2020, BRI mengesahkan model organisasi terbaru dalam mengelola human capital. Organisasi tersebut terdiri dari Divisi Human Capital Strategy & Policy, Human Capital Development, Human Capital Business Partner, Divisi Human Capital Partnership Management, Divisi Culture Transformation dan BRI Corporate University.

Secara garis besar, Divisi Human Capital Strategy & Policy bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan human capital, pengembangan organisasi, penilaian kinerja individu, kebijakan *rewards* dan employee relations sementara Divisi Human Capital Development fokus pada pengelolaan kebijakan manajemen karir, *people development*, *talent*, *recruitment* dan *assessment*.

Sesuai dengan namanya Divisi Human Capital Business Partner mengelola aktivitas HC sebagai partner bagi seluruh divisi lain di BRI dalam mendukung bisnis Perusahaan, serta mengelola HC Information System dan HC Operations. Sementara Divisi HC Partnership Management fokus pada pengelolaan pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja magang/internship, serta kemitraan.

BRI Corporate University bertanggung jawab mengelola aktivitas pendidikan dan pelatihan dengan konsep corporate university, sementara untuk memastikan berjalannya proses *culture transformation*, BRI membentuk divisi khusus, yakni Divisi *Culture Transformation* yang bertanggung jawab mengelola aktivitas *culture transformation policy, culture activation & human capital communication.*

KEBIJAKAN DAN STRATEGI/ROADMAP HUMAN CAPITAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan, BRI memiliki visi Human Capital (HC) untuk menjadi Perusahaan yang memiliki sistem dan menjalankan HC *practices* kelas dunia (*becoming a world class human capital system & practices*). Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah sebuah kerangka strategi atau arsitektur pengelolaan HC di BRI sebagai berikut:

Pengelolaan HC di BRI bertujuan mewujudkan aspirasi korporasi, yakni menjadi the Most Valuable Bank in South East Asia dan Home to the Best Talent. Untuk itu disusunlah kerangka strategi atau arsitektur pengelolaan HC BRI yang praktik dan sistem pengelolaannya berstandar kelas dunia (becoming a world class human capital system & practices), yang ditopang oleh 3 pilar, yakni pilar *People,* pilar *Culture*, dan pilar *Organization*.

Human Capital Development

THE MOST VALUABLE BANK IN SOUTH EAST ASIA & HOME TO THE BEST TALENT

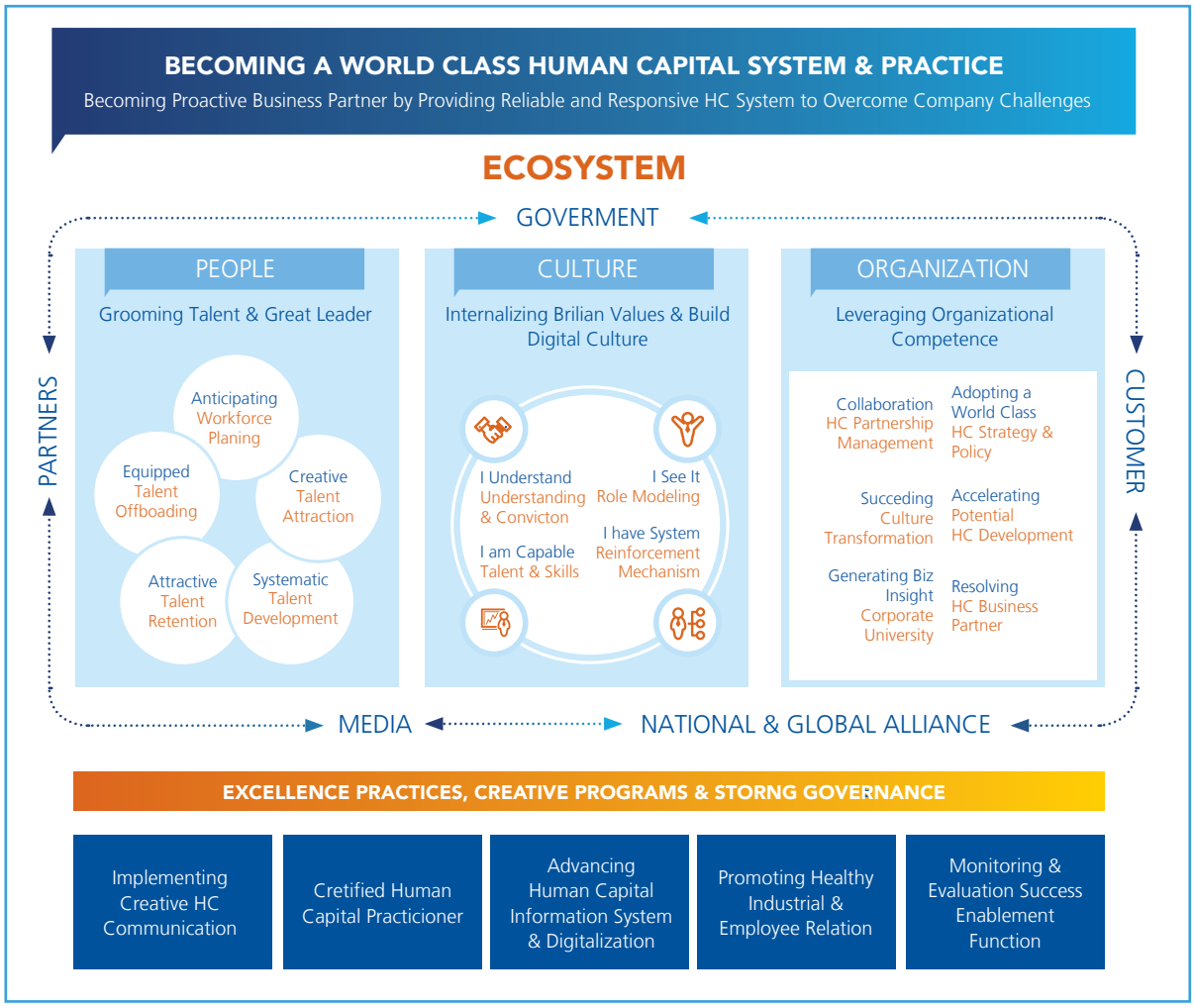

Ke-tiga pilar ini dikelola dalam kerangka ekosistem penting yang saling terkait dalam pengelolaan HC. Ekosistem tersebut yakni, *Employee*, *Customer*, *Government*, *National* & *Global Alliances*, Media serta Partners. Lebih jauh, pilar dan ekosistem tersebut ditopang pula oleh pondasi yang menjadi pendukung suksesnya sebuah sistem dan *practices* HC, yakni HC *Communications*, *Certified* HC *Practitioners*, HC *Information System* dan *Healthy Industrial Relations.*

Human Capital Development

CORPORATE CULTURE

BRIvolution yang menjadi framework transformasi BRI menempatkan Budaya Perusahaan sebagai pondasi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

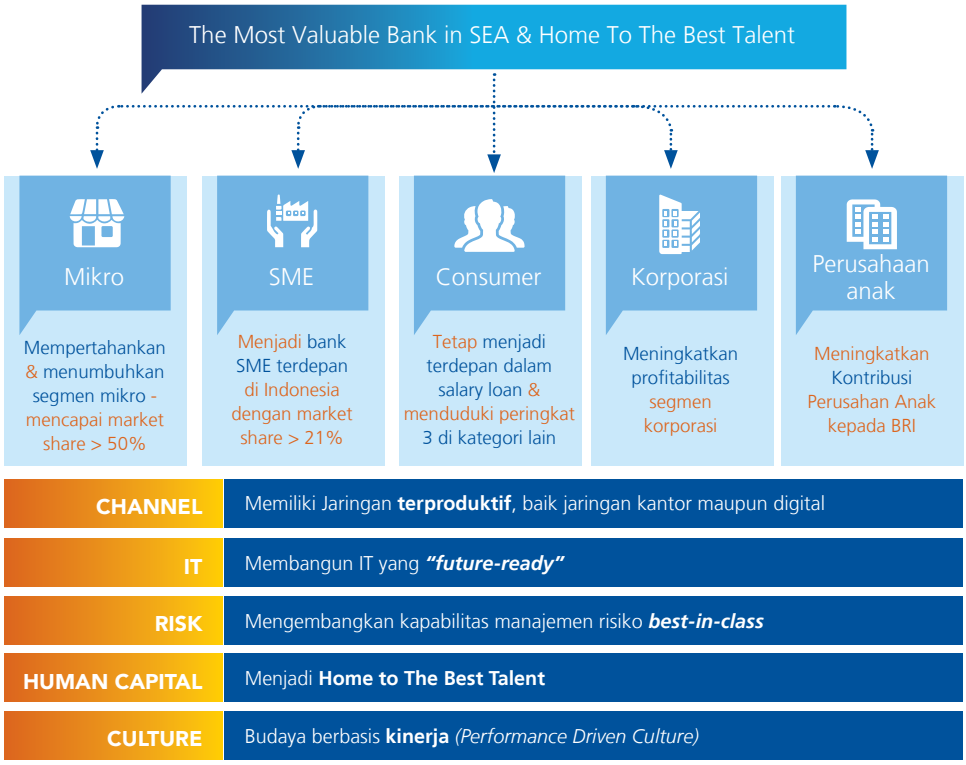

Menyadari pentingnya untuk membentuk karakter dan perilaku pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan dinamis serta dalam rangka mendukung transformasi BRI yang sistematis, konsisten dan terukur maka sejak tahun 2020, BRI membentuk Divisi Culture Transformation di bawah Direktorat Human Capital.

Implementasi AKHLAK

Dalam melaksanakan internalisasi dan eksternalisasi budaya kerja yang digunakan di lingkungan BRI Group adalah Core Value AKHLAK yakni merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kata kunci dan pedoman perilaku disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri BUMN No: SE-7/MBU/07/2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Amanah	Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan & tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh kepada nilai moral & etika

Human Capital Development

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Kompeten	Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya.	4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 5. Membantu orang belajar. 6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Harmonis	Peduli (caring), perbedaan (diversity).	7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 8. Suka menolong orang lain 9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Loyal	Komitmen, dedikasi (rela berkorban), kontribusi	10. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN & Negara 11. Rela berkorban untuk untuk mencapai tujuan yang lebih besar 12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum & etika

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Adaptif	Inovasi, antusias terhadap Perubahan, proaktif	13. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 14. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 15. Bertindak proaktif

Core Values	Kata Kunci	Perilaku BRILiaN
Kolaboratif	Kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik	16. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 17. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 18. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sebagai semangat kolaborasi di antara BRI Group, pada tahun 2020 dimulainya pengelolaan budaya perusahaan yang terintegrasi antara BRI Induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terafiliasi yang kemudian disebut dengan BRI One Culture.

Human Capital Development

Arsitektur Tata Kelola Budaya Kerja BRI

Arsitektur BRI one Culture terdiri dari 3 elemen utama yaitu, *behavior, system dan symbol.*

Sebagai strategi internalisasi Budaya Kerja, BRI memiliki arsitektur pengelolaan Budaya Kerja yang terdiri dari :

1. ***Strengthening Core Values*** yakni setiap Insan BRILiaN mengerti dan memahami *core values* perusahaan dan perilaku-perilakunya. BRI fokus terhadap internalisasi dan penguatan Nilai-Nilai Utama serta artefak budaya kerja. Dengan adanya Internalisasi Nilai-Nilai Utama diharapkan setiap Unit Kerja dan Para Pekerja dikawal oleh *leader* yang *concern* terhadap aktivitas yang bertujuan untuk internalisasi nilai budaya kerja BRI, sehingga membentuk tindakan dan perilaku yang sesuai dengan Core Values BRI.
2. ***Promoting Role Model*** dengan jumlah *Culture Agent Coordinator* mencapai 620 orang pekerja, *Culture Agent* sebanyak 3.200 pekerja dan dipimpin oleh seluruh pemimpin Unit Kerja sebagai *Culture Leader* BRI memberikan pelatihan dan diharapkan Pekerja tersebut mampu menjadi *role model* serta menjadi contoh dan teladan bagi seluruh Pekerja. BRI memastikan di setiap level pimpinan Unit Kerja mampu merancang dan menjalankan ide kreatif culture activation program di Unit Kerjanya masing-masing.
3. ***Competence & Skill Development*** merupakan pengembangan skill dan kompetensi Pekerja dan Materi terkait Internalisasi Budaya Kerja yang terintegrasi dalam setiap Program Pengembangan Pekerja (BFLP, BLDP, BGLP, dan lain-lain). BRI fokus terhadap upaya pengembangan kompetensi dan skill, untuk memastikan kompetensi pimpinan dan pekerja selaras dengan Budaya Kerja BRI (Culture Fit).
4. ***Management System*** yaitu perusahaan menyediakan *tools* dan sistem monitoring dalam hal pengelolaan Budaya Kerja agar lebih tersistematis. Fokus BRI adalah dalam upaya membangun *culture system management*, baik itu dalam sisi kebijakan, proses bisnis, sistem pengendalian, maupun sistem pengukuran kinerja. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat mendorong insan BRI ke arah perilaku yang sesuai dengan *Core Values* BRI.

Implementasi Inisiatif dan Internalisasi Budaya Kerja

Sepanjang 2020, BRI telah melakukan beberapa inisiatif dan internalisasi budaya kerja melalui pengembangan yang sesuai dengan *framework* BRI One Culture. Di antaranya adalah :

Human Capital Development

BRIlian Ways

Implementasi & Internalisasi AKHLAK, BRILiaN Belief, dan BRILiaN Ways

Budaya kerja yang berlaku di lingkungan BRI Group terdiri dari (1) AKHLAK sebagai core values dan panduan perilaku setiap Insan BRILiaN; (2) BRILiaN Belief sebagai prinsip dan falsafah yang diyakini oleh setiap Insan BRILiaN, dan (3) BRILiaN Ways sebagai performance driven behaviour yaitu perilaku utama yang melekat dan senantiasa ditunjukkan oleh Insan BRILiaN dalam berkinerja.

Human Capital Development

Adapun *performance driven behaviour* (BRILiaN Ways) dimaksud adalah:

- BRILiaN jujur, tulus, dan patuh terhadap peraturan;
- BRILiaN cakap dan handal, terus belajar, serta mengembangkan diri dan orang lain (continuous learner);
- BRILiaN bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kinerja terbaik;
- BRILiaN membangun kolabirasi yang produktif;
- BRILiaN terbuka dan menghargai kemajemukan (respect to diversity)
- BRILiaN proaktif, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan;
- BRILiaN berempati memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan melebihi harapan;
- BRILiaN peduli terhadap masyarakat dan lingkungan

Employee Value Proposition

Dalam upaya mencapai visi perusahaan menjadi Home to The Best Talent, manajemen BRI telah merumuskan dan menetapkan atribut unik yang dapat memberikan gambaran dan nilai jual bekerja di BRI Group (Employer Value Proposition). Adapun Employer Value Proposition (EVP) yang ditetapkan adalah "Memberi Makna Indonesia" dimana atribut tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan living values, attractive values, dan ideal values yang hidup dan berkembang di BRI.

Secara lebih detail, EVP BRI dapat diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) aspek yang lebih mendetail yaitu (1) BRI merupakan tempat belajar dan berkembang bagi setiap Insan BRILiaN, membentuk pribadi unggul yang tangguh, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman (LEARN); (2) Bagi setiap Insan BRILiaN, merancang masa depan bukan hanya sekedar harapan. Peluang meraih karier di BRI terbuka luas bagi setiap Insan BRILiaN yang mampu menunjukkan kinerja unggul secara konsisten (GROW); dan (3) BRI menciptakan insan pembawa perubahan, para bintang kehidupan yang mengubah kehidupan ekonomi masyarakat dengan semangat tanpa menyerah. Bersama, berkarya, membuat hidup lebih bermakna.

Culture Activation Program

Dalam mengimplementasikan budaya berbasis kinerja (*Performance Driven Culture*) maka selama tahun 2020, seluruh Unit Kerja BRI telah merancang dan mengimplementasikan *Culture Activation Program* berupa program inisiatif terkait Budaya Kerja yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja di masing-masing Unit Kerja. *Culture Activation Program* diinisiasi dan dirancang oleh masing-masing Unit Kerja dan merupakan komitmen bersama di Unit Kerja. Di akhir periode penilaian kinerja, implementasi *Culture Activation Program* menjadi salah satu penilaian kinerja Unit Kerja.

The New Way of Working

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BRI bersama taskforce Covid -19 melakukan inisiasi New Way of Working dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan Pekerja dengan tetap menjaga tingkat

produktivitas. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan seperti pemberlakukan dan sosialisasi protocol kesehatan di Unit Kerja, pengadaan vaksin, pengadaan rapid test secara berkala, monitoring self-checking kesehatan harian pekerja, pemberlakuan *Working From Home* dan Remote Working, culture campaign terkait e-learning BRISMART, *pilot project* terkait *productivity tools,* fasilitas armada bus antar jemput pekerja untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum, serta penyediaan fasilitas *Remote Working* di kota-kota satelit bernama BRIWORK untuk mendukung fleksibiltas kerja. BRI juga melakukan inisiasi berupa *safe house* untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpapar Covid-19 tanpa gejala.

BRI Excellence Awards

BRI Excellence Awards merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan BRI kepada pekerja dan Unit Kerja BRI yang secara konsisten memberikan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan pekerjaan utamanya dan berperan aktif diluar pekerjaan utamanya dengan maksud agar pekerja dan Unit Kerja dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong agar lebih berprestasi secara terus menerus dari tahun ke tahun.

Di tahun 2020, dalam proses penentuan pemenang kategori *best innovation awards* telah dikumpulkan sebanyak 14.209 ide inovasi yang diinisiasi dari setiap individu Pekerja, yang kemudian disaring beberapa tahap hingga menjadi ide inovasi terbaik. Setiap ide dinilai dan ide yang lolos di tingkat Unit Kerja, disaring di tingkat Regional dan disaring lagi menjadi 20 ide inovasi terbaik di tingkat Nasional.

Monitoring Implementasi Budaya Kerja Perusahaan

Implementasi Budaya Kerja BRI, dimonitor dan diukur secara periodik melalui

1. Nilai *Organizational Culture Health Index* (OCHI) yang merupakan pencerminan tingkat toxic yang diukur di setiap Unit Kerja. Hasil OCHI dipergunakan Culture Leader dan Culture Agent sebagai salah satu input penerapan Culture Activation Program Unit Kerja.
2. Nilai BRI *Employee Engagement Survey* (EES) yang merupakan hasil survei atau input dari seluruh Pekerja yang menggambarkan sikap, perilaku dan hubungan antara Pekerja dengan pekerjaan dan perusahaannya.

Human Capital Development

INTEGRATION OF HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM

BRI memiliki *Information System Management* dalam pengelolaan *Human Capital* berbasis Teknologi Informasi (IT) dalam mendukung pilar Sumber Daya Manusia perusahaan, mulai dari perencanaan (*Planning*) sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (*Offboarding*). Otomasi dan penyempurnaan dalam setiap tahap secara kontinyu dilakukan guna menghasilkan informasi yang akurat dan proses yang efisien. Tahapan pilar adalah sebagai berikut :

1. *Strategic Planning & Analytics*
2. *Talent Attraction*
3. *Talent Development*
4. *Talent Retention*
5. *Talent Offboarding*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses bisnis di bidang *human capital* dan mendukung pencegahan penyebaran pandemi covid-19, BRI telah mengembangkan BRILian, aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara mobile yang digunakan oleh seluruh insan brilian dalam memilih tempat kerja yang telah ditentukan (*co-working space*) dan komunitas-komunitas yang beranggotakan seluruh pekerja BRI termasuk fitur lain guna mendorong produktivitas pekerja. BRI juga terus melakukan *enhancement* otomasi terhadap aplikasi-aplikasi yang bersifat *self-service*.

Integrasi sistem BRI *Human Capital* induk dengan Perusahaan Anak juga menjadi pengembangan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung sinergi perusahaan *as a group*. Dalam pengembangan tahap pertama ini, pengelolaan data pekerja BRI induk dan Perusahaan Anak akan tersentralisasi, sehingga informasi data pekerja menjadi lebih akurat.

PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL TAHUN 2020

Pengelolaan talent di BRI yang dikenal dengan nama BRILiaN menjadi salah satu fokus strategi inisiatif perusahaan untuk menjawab aspirasi Bank BRI menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent*. Secara khusus BRI membentuk *BRILiaN Development Centre* untuk mengawal penyiapan sistem dan digitalisasi proses bagi Insan BRILiaN, sehingga dapat berkembang secara maksimal & optimal, menjadi *Great Talent & Great Leader*. Mulai dari saat melamar, bekerja sampai dengan pensiun.

Diawali dengan mengidentifikasikan kandidat terbaik putra-putri terbaik Indonesia, BRI memiliki *Talent Attraction* yang di implementasikan melalui berbagai program atraktif melalui pola *multi source* rekrutasi seperti:

BRILiaN Scholarship Program (BSP)

Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 yang memiliki kriteria tertentu dalam rangka Rekrutmen Pekerja BRI.

BRILiaN Creativity Contest Program (BCCP)

Program kompetisi bagi para peserta eksternal dan internal BRI menuangkan ide-ide inovasi brilliant, baik dalam bentuk kolaborasi tim maupun individu yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum dan BRI pada khsusnya.

BRILiaN Get Talent Program (BGTP)

Program pencarian kandidat / talent scouting yang memiliki prestasi unggul berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang.

Human Capital Development

BRILiaN Internship Program (BIP)

Program pemagangan yang dibuka oleh BRI sebagai wujud mensukseskan program Pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan pengalaman kerja fungsi Administrasi dan Frontliner.

BRILiaN Excellent Internship Program (BEIP)

Program perekrutan yang dibuka oleh BRI guna menjaring kandidat-kandidat yang saat ini sedang menempuh semester 8 atau baru menyelesaikan masa studinya (fresh graduate) di Perguruan Tinggi Negeri terbaik sehingga memiliki bekal pengalaman kerja yang cukup untuk menjadi calon Pemimpin di masa depan.

Sumber talenta terbaik di atas dapat bergabung melalui *multi channel* rekrutasi, yaitu:

1. *BRILiaN Future Leader Program* (BFLP)
   Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial sumber **eksternal** serta memberikan Pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI Group di masa depan.
2. *BRILiaN Next Leader Program* (BNLP)
   Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial sumber **internal** serta memberikan Pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI di masa depan.
3. *BRILiaN Banking Officer Program* (BBOP)
   Program perekrutan sekaligus Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level *Corporate Title Assistant* agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.

MULTI SOURCE & MULTI CHANNEL RECRUITMENT

MULTI SOURCE

Talent Scounting

- Internship
- Creativity Contest
- Get Talent
- Scholarship

Regular

- National Recruitment
- Regional Recruitment

MULTI CHANNEL

Attactive Talent Recruitment

BFLP

BNLP

BBOP

by using Multi Source and Multi Channel Recruitment
with inclusivity & diversity principles

Human Capital Development

Pada tahun 2020, BRI telah membuka rekrutmen *BRILiaN Future Leader Program* dengan total pekerja yang telah resmi bergabung menjadi Insan BRILiaN sebanyak 231 orang. BRI juga membuka rekrutmen *BRILiaN Next Leader Program* bagi para pekerja *internal* BRI dengan total pekerja yang lolos sebanyak 45 orang. Melalui program-program tersebut BRI mencari bintang yang memiliki karakter hebat dan kompetensi yang siap untuk masa depan.

Selain rekrutmen *BRILiaN Next Leader Program*, BRI menyelenggarakan rekrutmen *BRILiaN Banking Officer Program* bagi para pekerja *internal* BRI dengan jumlah bekerja yang lolos sebanyak 747 orang.

Selain itu BRI juga telah melaksanakan pembukaan *BRILiaN Scholarship Program* untuk mendapatkan Talent potensial sejak dini yang dapat dimonitor performanya sejak masa kuliah serta mengajak Talent tersebut untuk bergabung menjadi Pekerja BRI dengan program dan benefit yang menarik. Melalui program ini, BRI telah memberikan Beasiswa BRILiaN pada 48 Mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi Indonesia.

Sebagai bagian dari BUMN, BRI juga terlibat aktif dalam program perekrutan bersama yang dijalankan oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Program Perekrutan Bersama BUMN Putra-Putri Papua dan Papua Barat. Dari program tersebut sebanyak 26 putra-putri Papua dan Papua Barat telah bergabung dengan BRI.

Para kandidat Insan BRILiaN yang lolos melalui seluruh tahapan rekrutmen dan memenuhi kriteria seleksi meliputi *intellectual capital, psychological capital*, dan *social capital* akan terus dibekali dengan *Systematic Development Program* yang telah disiapkan oleh *BRILiaN Development Centre & Corporate University* sebagai *Center of Professional Excellence* BRI. Mengasah BRILiaN menjadi *future great leader*. *Systematic Development Program* dirancang dengan mengacu pada konsep pengembangan "*three prongs*", yaitu:

1. Pengembangan *technical/ functional competencies*, yang merujuk kepada tugas spesifik di tiap jabatan sesuai bidang pekerjaan.
2. Pengembangan *professional competencies,* yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk memastikan Insan BRILiaN sukses melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang dan jenjang jabatannya.
3. Pengembangan *leadership competencies,* yang mengasah peran Insan BRILiaN sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab managerial.

Keseluruhan pengembangan tersebut dilakukan bersama *Character Shaping* melalui penguatan nilai-nilai budaya perusahaan.

TALENT DEVELOPMENT CONCEPT

CHARACTER SHAPHING
Ex. Nationalism, Corporate Culture (BUMN / BRI Values) & Social Need Orientation

Role of the Leader

Technical / Functional Copetencies

Ex: Data Scientist, IT Services, IT Security, Big Data Analytics, General Banking, Audit, Treasury, Wealth Management, Lending, Human Capital, Compliance, Funding and Lecture & Designer.

Culture

Professional Competencies

Ex: Achievment Orientation, Adaptability, Innovation & Creativity, Customer Services Orientation, Data Driven, & Digital Literacy.

Talent Management Strategy

Leadership Competencies

Ex: Change Leadership, Developing Others, Holding People Accountable, Visionary Leadership, Managing Diversity, Strategic Orientation, & Team Leadership

Sejalan dengan konsep pengembangan tersebut, para Insan BRILiaN akan melalui serangkaian pendidikan untuk mengembangkan potensi diri menjadi seorang *Great Talent & Great Leader* sesuai dengan *BRILiaN Development Journey*, yaitu:

1

BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)

Program Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level Corporate Title Assistant agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.

2

BRILiaN Future Leader Program (BFLP)

Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber eksternal di level Corporate Title Officer agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI Group.

Human Capital Development

3

BRILiaN Next Leader Program (BNLP)

Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber internal di level Corporate Title Officer agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.

4

BRILiaN Leader Development Program (BLDP)

Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja menjadi Great Leader melalui pengembangan leadership yang berkelanjutan dan komprehensif yang memberikan penekanan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan bisnis/ perbankan, serta wawasan teknologi.

5

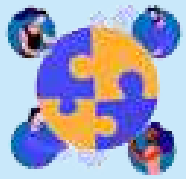

BRILiaN Specialist Development Program (BSDP)

Program pendidikan pengembangan kompetensi teknis (Technical Competency) berkelanjutan dan komprehensif dengan memberikan penekanan pada pengetahuan dan ketrampilan spesifik sesuai kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu yang disesuaikan denfan kebutuhan perusahaan.

6

BRILiaN Global Development Program (BGLP)

Program pengembangan khusus untuk mrempersiapkan para Top Talent yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 3 (Corporate Title setingkat Assistant Vice President/ Senior Manager) dan Band 4 (Corporate Title setingkat Manager) sebagai calon Global Leader yang memiliki kompetensi dan wawasan bisnis global.

7

BRILiaN Society Elite Program (BSEP)

Program pengembangan khusus untuk mrempersiapkan para Top Talent yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 2 (Corporate Title setingkat Vice President) dan Band 1 (Corporate Title setingkat Executive Vice President/Senior Vice President) dalam mempersiapkan diri untuk bertindak pada peran Leader yang lebih kompleks.

8

BRILiaN Bright Scholarship Program (BBSP)

Program pendidikan bagi Pekerja Tetap BRI untuk menempuh Pendidikan ke S2 di Luar Negeri yang dibiayai oleh Perusahaan.

Human Capital Development

9

BRILiaN Leader Retirement Program (BLRP)

Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensioun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun.

BRILIAN DEVELOPMENT JOURNEY

Job Title	Corporate Title	Job Grade	Program Pendidikan Berdasarkan Kelompok Job Title							
			BBOP BOP	BFLP BNLP	BLDP	BSDP	BGLP	BSEP	BBSP	BLRP
BOD - 1	SVP-EVP-SEVP	17 sd 21			BOD - 1	BOD - 1		BOD - 1	BOD - 1	BOD - 1
BOD - 2	VP	15 sd 16			BOD - 2	BOD - 2	BOD - 2	BOD - 2	BOD - 2	BOD - 2
BOD - 3	SM-AVP	11 sd 14			BOD - 3	BOD - 3	BOD - 3		BOD - 3	BOD - 3
BOD - 4	Manager	10			BOD - 4	BOD - 4	BOD - 4		BOD - 4	BOD - 4
BOD - 5	Ast Manager	08 sd 09			BOD -5	BOD -5			BOD -5	BOD -5
BOD - 6	Officer	06 sd 07		BOD - 6	BOD - 6	BOD - 6				BOD - 6
BOD - 7	Assittant	03 - 05	BOD - 7			BOD - 7				BOD - 7

BOD:

Special Program for BRILiaN Society Member (BSM)

Program for All Employees

Keterangan:

BBOP: BRILiaN Banking Officer Program
BOP: BRILiaN Officer Program
BFLP: BRILiaN Future Leader Program
BNLP: BRILiaN Next Leader Program
BLDP: BRILiaN Leader Development Program
BSDP: BRILiaN Specialist Development Program
BGLP: BRILiaN Global Leader Program
BSEP: BRILiaN Society Elite Program
BBSP: BRILiaN Bright Scholarship Program
BLRP: BRILiaN Leader Retirement Program

Pendidikan *BRILiaN Leader Development Program* (BLDP), telah berjalan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini. Pendidikan ini telah diikuti oleh 874 Insan BRILiaN, sedangkan untuk Pendidikan *BRILiaN Specialist Development Program* (BSDP), telah diikuti oleh 74.623 Insan BRILiaN. Adapun pendidikan khusus untuk *Top Talent* tersebut akan dikembangkan professional dan *leadership competency* serta wawasan bisnis global melalui pendidikan BRILiaN *Society Elite Program* (BSEP) dan pendidikan BRILiaN *Global Leader* Program.

BRI juga mendukung para Insan BRILiaN yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan S2 dengan memberikan Beasisawa S2 Luar Negeri. Adapun sebanyak 22 orang yang berhak menerima Beasiswa ini.

Para Insan BRILiaN yang mendapatkan beasiswa ini memberikan kontribusi lebih kepada BRI atas wawasan dan pengetahuan yang telah didapatkan selama masa pendidikan.

Untuk memberikan pembekalan para Pekerja yang akan memasuki masa pensiun, BRI telah menyelenggarakan *BRILiaN Leader Retirement Program* (BLRP), yang diikuti sebanyak 359 orang selama tahun 2020.

Selain mengacu pada konsep pengembangan "*three prongs*", seluruh program *Systematic Development Program* juga mengacu pada *Set of Competencies* yang telah disusun oleh *BRILiaN Development Centre*, yang terdiri dari:

Human Capital Development

1. Kamus Kompetensi (SK Direksi BRI No.S.303-DIR/HCD/04/2020 tanggal 27 April 2020): Suatu dokumen mengenai seperangkat kompetensi yang memuat Nama, Definisi, dan Indikator Perilaku untuk setiap Kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.
2. Keluarga Jabatan dan Fungsi Jabatan (SK Direksi BRI No. S.398-DIR/HCD/06/2020 Tanggal 17 Juni 2020):
   a. Keluarga Jabatan: sekelompok Jabatan yang melakukan proses bisnis atau aktivitas pekerjaan pada bidang pekerjaan yang sama sehingga mensyaratkan seperangkat *Soft Competency* tertentu.
   b. Fungsi Jabatan: sekelompok Jabatan yang melakukan serangkaian proses bisnis atau aktivitas pekerjaan pada sub bidang pekerjaan yang sama sehingga mensyaratkan seperangkat pengetahuan dan *Hard Competency* yang sejenis di sub bidang keilmuan tertentu, dan seperangkat *Soft Competency* tertentu, dimana kesamaan *Soft Competency* masih merujuk pada karakteristik aktivitas/proses bisnis pada bidang pekerjaan yang sama.
3. Profil Kompetensi Jabatan (SK Direksi BRI No. 489-DIR/HCD/07/2020 Tanggal 20 Juli 2020): Sekumpulan Kompetensi (*Soft Competency*) yang dipersyaratkan oleh suatu Jabatan.
4. Persyaratan Pengetahuan dan Keterampilan Jabatan (SK Direksi No.582-DIR/HCD/09/2020 Tanggal 01 September 2020): Pengetahuan dan Keterampilan minimal yang ditetapkan untuk setiap Jabatan, agar pemegang Jabatan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Selain berkonsentrasi pada program pengembangan BRI juga melakukan *Assessment* kepada seluruh pekerja, untuk menggali dan mengukur kompetensi pekerja serta menilai kesesuaiannya dengan persyaratan kompetensi pada jabatan saat ini dan jabatan yang akan dituju. Selain itu, dengan diadakannya *Assessment*, dapat sebagai alat diindentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan Insan BRILiaN.

Serangkaian *Systematic Development Program* disiapkan BRI sehingga Insan BRILiaN dapat merancang karirnya sendiri melalui *BRILiaN Development Plan* (BDP) yaitu rencana individu Insan BRILiaN untuk mencapai tujuan karir mereka dengan mempersiapkan pengembangan pribadi untuk meningkatkan *performance* individu dan perusahaan. Dengan adanya *BRILiaN Development Plan* (BDP) yang didukung melalui aplikasi BRILliance, Insan BRILiaN dapat menyampaikan aspirasi bagi pengembangan karir & kompetensinya, berdiksusi dengan coach & mentor -nya, termasuk memanfaatkan Learning Wallet untuk memilih program pengembangan dan pelatihan agar lebih kompeten di posisi saat ini dan persiapan target posisi berikutnya. Semuanya dievaluasi secara berkesinambungan selama Insan BRILiaN berada di BRI.

Pada *BRILiaN Development Plan* (BDP) terdapat sesi *coaching* dan *mentoring yang* merupakan bentuk pengawalan yang diperlukan dalam membangun rangkaian program pengembangan Pekerja yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Sesi ini akan membantu para Insan BRILiaN dalam mendapatkan arahan dan saran oleh para *coach* dan *mentor* dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui kegiatan *Professional Coach Certification Program* yang diselenggarakan oleh *BRILiaN Development Centre* bekerja sama dengan BRI Corporate University, terdapat 204 kandidat *Professional Coach* dan 108 orang diantaranya telah selesai mengikuti sertifikasi, 96 orang masih berjalan proses sertifikasi.

Systematic Talent Development

Dalam rangka mempersiapkan talent specialist, maka BRI harus terus mempersiapkan program program untuk peningkatan kompetensi Pekerja. BRI selalu berusaha mengembangkan kompetensi Pekerjanya baik yang bersifat hard competency maupun soft competency.

Pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Pekerja dengan kerangka 70-20-10 *model for learning development*. Selain itu, BRI juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja dalam pengembangan karir. Hal ini dilakukan dengan cara menambah jenis kewenangan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari level saat ini (*job enrichment*) atau dengan cara menambah jumlah tugas dan tanggung jawab Pekerja di level yang sama di luar tugas dan tanggung jawab saat ini (*job enlargement*). Program pengembangan karir juga dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunity*, dimana setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan Perusahaan, job family jabatan yang dituju, kemampuan Pekerja (*capability*), predikat kinerja, talent classification, ketersediaan jabatan, dan persyaratan lainnya.

Talent Mapping & Deployment

Guna menampung aspirasi karir dan aspirasi pengembangan kompetensi (bidang keahlian) Pekerja, saat ini BRI telah mengembangkan aplikasi BRILLIANCE. Aplikasi ini ditujukan untuk Pekerja Tetap BRI baik yang bertugas di BRI maupun di Perusahaan Anak BRI. Aspirasi Pekerja yang tercatat dalam sistem BRILLIANCE akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir dan pengembangan kompetensi Pekerja. Kesesuaian aspirasi Pekerja dengan kebutuhan Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas.

Strategic Workforce Planning

Untuk menghadapi talent war dan menjaga sustainability talent di masa depan, BRI berkomitmen mempersiapkan talent-talent terbaik yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis menuju Home to the best talent. Saat ini Direktorat Human Capital sedang melakukan Strategic Workforce Planning untuk memproyeksikan kebutuhan dan suistanibility talent di masa depan. Dengan metode ini akan diperoleh kompetensi baru atau keahlian yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan baru dan memprediksi jabatan yang akan hilang ataupun penggabungan jabatan-jabatan yang ada dengan tujuan lebih efisien (re-skill atau up-skill jabatan). Proses Strategic Workforce Planning yang dilakukan BRI terdiri dari understanding strategy and business process analysis, reinventing jobs, Demand planning, Supply planning, dan Action Plan.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bahwa BRI senantiasa memiliki komitmen yang tinggi terhadap Pekerja dengan menjadikan Pekerja sebagai aset dalam mencapai tujuan Perusahaan. Keberadaan Pekerja merupakan jantung kesuksesan Perusahaan. Oleh karena itu, BRI selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka dan positif. Melalui program-program internalisasi budaya kerja, Pekerja diberikan wadah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja. Selain itu adanya kegiatan *focus group discussion* (FGD) dapat meningkatkan budaya keterbukaan bagi Pekerja dan Perusahaan sehingga terjaga kondusivitas hubungan industrial antara Pekerja dan Perusahaan. Dalam menjalin hubungan dengan Pekerja, BRI senantiasa menjunjung prinsip dasar pengelolaan hubungan industrial sebagai berikut:

Menjunjung Kebebasan Berserikat

Pekerja BRI diperkenankan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapatnya. Pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Serikat Pekerja dapat menjadi saluran komunikasi terbaik untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak Pekerja BRI.

Di BRI terdapat 1 Serikat Pekerja yang mewakili mayoritas pekerja untuk menyampaikan aspirasi pekerja ke Perusahaan. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Perusahaan selalu memberikan support baik secara materiil maupun non materiil setiap kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja baik di tingkat regional maupun skala nasional.

Beberapa hal yang dilakukan Perusahaan untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial di antaranya diwujudkan dengan:

1. Pelaksanaan Forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai sarana mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru, sebagai sarana menampung segala aspirasi/ usulan dari Pekerja, dan juga sebagai sarana koordinasi antara manajemen Perusahaan dengan Pekerja sehingga perselisihan atau permasalahan yang mungkin timbul di Unit Kerja dapat dideteksi lebih dini.
2. Pelaksanaan pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen Tingkat Pusat.
3. Support kegiatan Serikat Pekerja antara lain Rakernas, Rapimnas, Munas, Muswil dan Muscab.
4. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* Pekerja terhadap Perusahaan dan melakukan bentuk komunikasi lain seperti dalam kegiatan ibadah, sosial, olah raga, seni, dan kegiatan lain yang melibatkan Pekerja.

Human Capital Development

Menerapkan Kebijakan Anti-Diskriminasi

BRI selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di setiap fungsi pengelolaan human capital, baik dalam aspek pengembangan karier, remunerasi maupun aspek-aspek pengelolaan human capital lainnya. Salah satu bentuk penerapan asas kesetaraan di Perusahaan adalah dengan dibukanya kesempatan bekerja bagi Pekerja disabilitas, dengan posisi dan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing Pekerja disabilitas. Hal ini disebabkan karena BRI paham betul untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas dapat memiliki dampak positif pada semangat kerja pegawai, memberikan keragaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas dan sekaligus meningkatkan produktivitas Pekerja untuk bekerja dalam keberagaman.

Monitoring Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

Sebagai bagian dari upaya untuk penguatan *good corporate governance* (GCG), BRI memfasilitasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh Pekerja melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yang langsung dimonitor oleh manajemen BRI. Manajemen BRI senantiasa berkomitmen untuk menegakkan disiplin Pekerja di Perusahaan sebagai usaha mempertahankan suasana dan etos kerja yang baik. Saat ini, melalui aplikasi Portal Hubungan Industrial, progress penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di seluruh Unit Kerja BRI dapat dimonitor oleh manajemen di Kantor Pusat BRI.

Hak Asasi Manusia

BRI berkomitemen selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua ketentuan tentang pekerja di BRI telah mengikuti UU Ketenagakerjaan. Salah satu bentuk wadah dalam penerapan hak asasi manusia adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sekali yang bertujuan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban dari Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja, mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja, menerapkan asas-asas hubungan industrial.

Program Keberagaman

Sebagai salah satu BUMN Kebanggaan Negeri dengan Unit Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, demografi insan BRI sangat beragam. BRI meyakini bahwa keberagaman yang ada merupakan nilai tambah yang dapat membantu Perusahaan untuk tetap menjadi yang terbaik. BRI mempekerjakan pekerja dengan berbeda latar belakang, agama, suku, dan ras.

Health & Well-being

BRI senantiasa berkomitmen kepada pekerja demi terciptanya work life balance. Dalam mendukung adanya *worklife balance* Pekerja, sejak 25 April 2018 BRI membentuk BRILiaN Community yang merupakan kumpulan komunitas yang dibentuk oleh Pekerja BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas ataupun kegiatan yang sama. Semua Pekerja diberikan akses yang sama terhadap komunitas melalui aplikasi BRILiaNApps. Saat ini BRI telah memiliki 24 komunitas yang dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh para anggotanya, mencakup berbagai kegiatan dan aktivitas, antara lain:

1. BRI *Bikers Community*
2. BRICCO
3. *Aerobic Club*
4. BRI *E-Sport Community*
5. BRI Futsal *Community*
6. BRI *Badminton Community*
7. BRI Fotografer *Community*
8. BRI *Basketball Community*
9. BRIPALA
10. BRI *Band Community*
11. BRI *Football Community*
12. BRILiaN *Voice*
13. BRI *Golf Community*
14. BRI *Runners Community*
15. BRITAC
16. Persatuan Tenis Meja BRI
17. BRI *Tennis Community*
18. BRI *Volleybal Community*
19. BRI *Dance Community*
20. BRI *Fishing Community*
21. BRI *Dive*
22. BRI *Martial Art Community*
23. BRI *Bowling Community*
24. BRI Srikandi

BRI mempunyai tempat yang dikhususkan untuk mengembangkan talenta pekerja, menyalurkan hobi pekerja, maupun untuk melakukan program-program *work life balance* yaitu BRILIAN CENTRE.

Selain itu, BRI juga secara rutin mengadakan event-event dan seminar dalam mendukung worklife balance pekerja serta peningkatan health and well-being pekerja dengan mendatangkan pembicara-pembicara

dari kalangan praktisi, motivator, psikolog, maupun influencer yang sudah dikenal luas.

BRI juga memberikan wadah untuk melakukan konseling bagi para pekerja, yaitu kegiatan konsultasi/ bantuan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pribdai pekerja yang berdampak kepada kinerja.

Dalam rangka meningkatkan *Health & Well-being* bagi pekerja, BRI mewajibkan *block leave* bagi pekerja yaitu kebijakan untuk mengambil cuti selama 5 hari kerja berturut-turut dalam 1 tahun.

BRI tidak hanya memberikan *maternity leave* kepada pekerja wanita sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun juga *paternity leave* pekerja laki-laki yg istrinya melahirkan dan jumlah hari yang diberikan lebih baik dibandingkan *paternity leave* yang dipersyaratkan Undang-Undang.

Untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi pekerja wanita yang mempunyai anak balita, BRI juga memberikan fasilitas berupa *child care facilities* berupa Day Care di lingkungan kantor.

Program Pensiun

Untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, BRI menyiapkan program pemberian *benefit* setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
3. Program Tunjangan Hari Tua (THT)
4. Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan
5. Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
6. Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens) dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan BPJS Kesehatan

Dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun. Selama pensiun Pekerja masih terlindungi oleh program pemeliharaan kesehatan Prospens dan BPJS Kesehatan.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI & LEMBAGA PELATIHAN KERJA BRI

Sesuai Visi menjadi *The Most Valuable Bank In South East Asia & Home To The Best Talent*, memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini juga sejalan dengan cita-cita Presiden Indonesia yaitu "SDM Unggul Indonesia Maju".

Bank BRI pada tanggal 23 September 2020 menyelenggarakan Talkshow bertajuk "SDM Unggul, BRI Maju", dengan narasumber Kartika Wirjoatmojo (Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara), Indarto Budiwitono (Direktur Pengawasan 3, Departemen Pengawasan Bank 1), Kunjung Masehat (Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Sunarso (Direktur Utama BRI). Talkshow tersebut dihadiri oleh seluruh Pekerja BRI Group, selain dikarenakan tema dan Narasumber yang menarik, acara tersebut diselenggarakan sebagai Launching "BRILSP" Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pertama yang dimiliki oleh Bank.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BRI tersebut saat ini telah diakui dan dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nokep : 0351/BNSP/11/2020 tanggal 21 Februari 2020, tentang Lisensi Kepada LSP BRI. Sehingga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP BRI telah diakui secara Nasional dan Asia Tenggara.

BRILSP memiliki 22 skema uji kompetensi, dimana sejak September 2020 telah melakukan Uji Kompetensi kepada 800 Pekerja BRI. Jumlah tersebut masih jauh dari target Peserta uji sebanyak 33.046 hingga tahun 2023, dimana jumlah tersebut akan bisa bertambah sesuai dengan pengembangan Skema Sertifikasi dan Target peserta dari semua BRI Group. Dengan target sebesar itu, BRILSP memiliki kekuatan Asesor sebanyak 31 orang, dimana jumlah ini akan terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai Kompetensi dan Pedoman BNSP. Maka, hadirnya BRILSP diharapkan menambah kekuatan BRI dalam megembangkan SDM yang kompeten dan ahli dalam setiap bidang tugasnya.

Human Capital Development

KEBIJAKAN REKRUTMEN

Creative Talent Attraction

Dalam rangka menarik perhatian para talent terbaik dalam talent war masa kini, BRI senantiasa melakukan inovasi dalam bidang rekrutmen untuk mendapatkan talent-talent terbaik. Proses rekrutmen dilakukan melalui *multi channel* dan dilakukan pula kerja sama antara BRI dengan lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia dalam bentuk partisipasi pada job fair maupun campus hiring serta *outreach recruitment* program. Selain itu, sejak tahun 2013 pun BRI telah meluncurkan aplikasi e-recruitment yang bertujuan untuk memperluas cakupan penjaringan kandidat-kandidat Pekerja terbaik di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari BUMN, BRI juga terlibat aktif dalam program perekrutan bersama yang dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Kesetaraan dan kesempatan kerja

Lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari:

1. Pelaksanaan program ketenagakerjaan (implementasi keseteraan gender dalam kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, keseteraan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan maupun dalam mendapatkan remunerasi yang fair, kebebasan berserikat, mekanisme pengaduan dan program pensiun.
2. Program pemberian fasilitas kesehatan (Club Fitness, Klub Olahraga dan pemberian Asuransi BPJS), dan
3. Program keselamatan kerja (inspeksi/pemeriksaan berkala terhadap APAR dan pelatihan kondisi darurat).

Kesetaraan Gender Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank menjamin tidak terdapat diskriminasi dalam hal gender, suku, agama, serta ras. Pekerja tetap wanita boleh menanggung keluarga tanpa syarat apapun. Kesempatan kerja dan pengembangan karir dilakukan dengan memerhatikan kompetensi setiap individu melalui metode yang terukur. Komitmen ini dapat dilihat dari perbandingan pekerja wanita dan pria di BRI, yang menunjukkan angka sebesar 42,36% wanita (2019: 42,92%) dan 57,64% pria (2019: 57,08%) dari total 88.184 pekerja (2019: 91.620 pekerja).

KINERJA PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Tingkat Turnover

Kepuasan (*satisfaction*) Pekerja BRI terhadap pengelolaan Human Capital BRI salah satunya diukur dari tingkat turnover. Pada tahun 2020, tingkat turnover sebesar 1,73%, lebih rendah dari tingkat turnover secara industri yang mencapai 15%. Angka turnover tersebut menunjukkan bahwa upaya BRI untuk *retention* Pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan BRI untuk menjaga tingkat turnover tersebut di antaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, benefit yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, jenjang karier yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

Tingkat Keterikatan

Employee Engagement Survey tahun 2020 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 93,30% Pekerja menyatakan terikat dengan Perusahaan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat dibandingkan survey tahun 2019 sebesar 83,99%. Sedangkan untuk tingkat satisfaction di tahun 2020, 98,40% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Adapun Net Promoter Score tahun 2020 berada pada nilai 48,4, naik dari tahun sebelumnya sebesar 37. Perusahaan meyakini bahwa keterikatan yang dinyatakan Pekerja tersebut merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif di bidang pengelolaan human capital BRI. Untuk selanjutnya, BRI akan tetap berkomitmen menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan engagement Pekerja terutama Pekerja generasi Y sebagai mayoritas Pekerja di BRI yang mencapai 80% dari total Pekerja.

Tingkat Produktivitas

Pada tahun 2020, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari Earning per Employee (EPE) mencapai Rp285 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini menurun dibandingkan pencapaian EPE tahun 2019 yang sebesar Rp556.16 juta per pekerja tetap. Produktivitas menurun karena kinerja bisnis bank terdampak pandemi Covid-19 sehingga Earning BRI turun dari tahun sebelumnya.

KESEJAHTERAAN SDM

Remunerasi

Struktur remunerasi Pekerja didasarkan beberapa faktor seperti penilaian kinerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Salah satu kunci untuk memenangkan persaingan dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi Pekerja terbaik (*talent war*) di Perusahaan adalah melalui sistem pengelolaan remunerasi yang baik. Pengelolaan sistem remunerasi di BRI dilaksanakan dengan asas adil secara internal, kompetitif secara eksternal, sejalan dengan strategi Perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Remunerasi di BRI tidak membedakan *gender* (pekerja laki-laki maupun wanita), tidak membedakan ras, agama, dan suku. Penerapan strategi remunerasi di BRI dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, *prevalent practices* industri, dan kemampuan Perusahaan.

Secara umum, implementasi sistem remunerasi BRI meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), tunjangan cuti tahunan, dan tunjangan cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 6 tahunan.

BRI juga memberikan Insentif jangka Pendek khusus bagi Tenaga pemasar secara Triwulan secara otomasi melalui sistem. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi Tenaga Pemasar khususnya untuk mencapai dan melebihi target.

Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi Pekerja dan anggota keluarganya, yang meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, persalinan, rawat gigi, *general medical check up,* tunjangan penggantian kacamata serta program kesehatan pensiunan yang dapat digunakan saat purna tugas.

BRI juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel kepada Pekerja di antaranya tunjangan premium yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tunjangan jabatan khusus, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, Insentif Jangka Pendek serta program *long term incentive* dalam bentuk kepemilikan saham BRI oleh Pekerja. Sedangkan untuk menunjang kedinasan, BRI memberikan fasilitas kedinasan meliputi bantuan sewa rumah, rumah dinas, dan kendaraan dinas sewa serta Program Kepemilikan Kendaraan.

Jenis Kompensasi dan Benefit

Kompensasi dan benefit bagi Pekerja BRI, yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
2. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.
3. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BRI memberikan fasilitas berupa *benefit* kepada Pekerja. *Benefit* ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri perbankan.
4. Untuk meningkatkan *engagement* pekerja dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan untuk memberikan motivasi/ insentif jangka panjang agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI pada tahun 2020 telah memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI yang dikemas dalam 2 program, yaitu:
   a. *Employee Stock Allocation* (ESA)
      Program kepemilikan saham dalam bentuk Stock Allocation Program ini diberikan kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria (diperkirakan sebanyak 54.000 Peserta) yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.
   b. *Employee Stock Option Plan* (ESOP)
      Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus. Program ini diberikan kepada para Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI dan memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential.*

Kenaikan Kompensasi

BRI menerapkan strategi merit increase dalam penerapan pemberian kompensasi Pekerja. Artinya Pekerja yang memiliki kinerja tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi pula. Atau bisa dibilang kenaikan upah berbanding lurus dengan kinerja Pekerja. Pada tahun 2019 BRI juga melakukan penyesuaian besaran kompensasi upah serta formula tunjangan kinerja yang lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya, terutama bagi para tenaga pemasar yang merupakan ujung tombak Perusahaan.

Human Capital Development

Pensiun dan Pemutusan Hubungan Kerja - Smooth Landing Offboarding

Perbankan dan jasa keuangan merupakan industri berbasis kepercayaan di mana setiap aspek dalam bisnis ini diatur secara ketat (*highly regulated*) dalam setiap aspeknya. Dalam aspek pengelolaan human capital, Perusahaan senantiasa memastikan seluruh ketentuan hubungan ketenagakerjaan yang diberlakukan telah sesuai dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BRI memastikan bahwa hak dan kewajiban kepada Pekerja dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa jenis PHK yang berlaku di BRI di antaranya adalah:

1. Atas Permintaan Sendiri
2. Pekerja Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (Mangkir)
3. Tidak Cakap
4. Kelebihan Tenaga Kerja
5. Mencapai Usia Pensiun
6. Ditahan Pihak Yang Berwajib
7. Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan
8. Dikenakan Hukuman Disiplin
9. Alasan Kesehatan
10. Meninggal Dunia

Adapun rincian data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi selama tahun 2020 di BRI adalah sebagai berikut:

Jenis PHK	Pria	Wanita
Mencapai Usia Pensiun	562	252
Alasan Kesehatan	13	1
Atas Permintaan Sendiri	561	391
Meninggal Dunia	121	29
Lain-lain	244	55
Subtotal	1,501	728
Jumlah	2,229	

SERTIFIKASI PEKERJA

Pendidikan Sertifikasi Bagi Pekerja

Dalam rangka peningkatan kualitas human capital BRI untuk mendukung pencapaian kinerja unggul, pada tahun 2020 BRI telah melakukan pembaruan kebijakan Pendidikan Sertifikasi bagi Pekerja. Dalam kebijakan ini Pekerja didorong untuk lebih mudah mengambil sertifikasi di bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga keahlian atau kompetensi Pekerja di bidang tersebut telah memenuhi standar industri atau diakui oleh lembaga/institutisi bidang keahilan tersebut.

Pada tahun 2020, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 5,274,114 peserta dengan komposisi 94.9% pendidikan E-Learning, 3.0% pendidikan enhancement, 1.3% FPK, 0.6% Sosialisasi dan 0.2% Development dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program Pendidikan	2018	2019	2020
1	Development	9,895	13,350	8,018
2	Enhancement	2,799,661	115,961	160,571
3	E-Learning	-	3,802,672	5,003,522

Human Capital Development

No.	Program Pendidikan	2018	2019	2020
4	FPK/FGD	109,762	122,889	68,087
5	Sosialisasi	67,963	112,092	33,916
Total		2,987,281	4,166,964	5,274,114

Catatan:
Untuk program pendidikan enhancement termasuk pendidikan sertifikasi dan public course. Sedangkan pendidikan development termasuk pendidikan master degree/S2.

Penilaian Kinerja dan Remunerasi

BRI mendasarkan penilaian kinerja pada 2 (dua) hal, yaitu pencapaian kinerja Pekerja berdasarkan *key performance indicator* (KPI) yang disepakati dan pemenuhan atau peningkatan kompetensi Pekerja.

Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan kinerja Pekerja selaras dengan kinerja Perusahaan, mendorong, memotivasi, dan mengarahkan Pekerja untuk selalu meningkatkan kinerjanya, mewujudkan hubungan yang jelas antara pencapaian rencana kinerja dengan pengembangan karier Pekerja (promosi jabatan), dan predikat hasil penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kompensasi dan benefit serta penentuan talent class Pekerja.

Dalam rangka menciptakan iklim *performance driven culture* di Perusahaan, BRI melakukan penajaman pada aspek penilaian kinerja, di antaranya ditempuh dengan cara standardisasi konten Sasaran Kinerja Objektif (SKO) Pemimpin Unit Kerja, Pekerja di jabatan struktural, dan tenaga pemasar. BRI telah melakukan otomasi pencapaian target KPI untuk Jabatan Tenaga Pemasar dan mengimplementasikan monitoring pencapaian KPI dengan siklus Performance Appraisal per triwulan. BRI secara konsisten melakukan standardisasi konten KPI untuk seluruh Jabatan di Perusahaan (kecuali Staff dan Petugas Administrasi), hal ini dimaksudkan untuk mempertajam penilaian kinerja sehingga objektivitas dan keadilan penilaian kinerja dapat terjaga.

Penajaman juga dilakukan dengan menarik dan mengunci nilai Sasaran Kompetensi (SK) di awal sebelum periode evaluasi SKO dan penerapan 360° *competency review.* Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja tidak hanya berasal dari 1 arah yakni atasan bawahan, tetapi juga sesama Pekerja dan bawahan dapat melakukan penilaian kinerja. Dalam menetapkan KPI pada proses Sistem Manajemen Kinerja (SMK), BRI selalu mengintegrasikan target Perusahaan kepada seluruh pekerjanya, sehingga KPI Individu dan KPI Perusahaan dapat sejalan. Oleh karena itu, penilaian kinerja berbasis kompetensi diharapkan mendapatkan hasil yang objektif dan fair.

Struktur remunerasi Pekerja didasarkan beberapa faktor seperti penilaian kinerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Demografi SDM - Jumlah Pegawai Penyandang Difabel

Saat ini BRI memiliki 69 Pekerja Disabilitas yang ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta dan 18 Kantor Wilayah seluruh Indonesia dengan masa kerja sebagai berikut:

No.	Masa Kerja	Keterangan
1.	≤ 1 tahun	8
2.	> 1 tahun	1
3.	≥ 2 tahun	21
4.	≥ 3 tahun	23
5.	≥ 4 tahun	16
Total Pekerja		69

Human Capital Development

Selain itu, sebagai wujud dukungan BRI kepada Pekerja disabilitas agar dapat bekerja dalam kondisi nyaman, fasilitas/ prasarana kantor BRI juga telah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti toilet khusus disabilitas, tangga khusus disabilitas, dll.

Dalam upaya menjaga harmonisasi antar Pekerja, BRI juga memberikan jenis pekerjaan yang sama terhadap para penyandang disabilitas dan melibatkan mereka dalam kerjasama tim seperti hal nya Pekerja lainnya. Hal ini membuat Pekerja nyaman bekerja karena tidak ada diferensiasi Pekerjaan dan dibuktikan dengan masa kerja di BRI.

Biaya Pengembangan Human Capital

Biaya pendidikan dan pengembangan human capital BRI di tahun 2020 tercatat Rp342 miliar. BRI berhasil melakukan efisiensi biaya pendidikan sebesar 61% dengan biaya per pekerja sebesar Rp65 ribu per peserta melalui implementasi teknologi *(e-learning)*. Berikut rincian biaya pendidikan human capital BRI tahun 2020:

Rupiah (Juta)

Program	2019	2020
Development	138,293	90,014
Enhancement	384,395	145,432
Total Development & Enhancement	522,688	235,447
FPK/FGD	154,335	62,815
Sosialisasi	4,771	3,951
E-Learning	-	23,731
Literasi	200	0
Support	14,799	16,135
Total FPK, Sosial, Literasi, & Support	174,106	106,632
Total Biaya	696,793	342,079

(Orang)

Program	2019	2020	%
Development	13,350	8,018	-39.9%
Enhancement	115,961	160,571	38.5%
E- Learning	3,802,672	5,003,522	31.6%
Total	3,931,983	5,172,111	31.5%
FPK/FGD	122,889	68,087	-44.6%
Sosialisasi	112,092	33,916	-69.7%
Total	234,981	102,003	-56.6%
Total Peserta	4,231,199	5,128,762	26.6%

Rupiah (Ribu)

Program	2019	2020	% Efficiency
Development	10,359	11,227	-8%
Enhancement	3,315 3,315	906	73%
E-Learning		5	0%
Biaya per Peserta I	133	50	62%
FPK/FGD	1,256	923	27%
Sosialisasi	43	116	-171%
Literasi	-	-	-
Biaya per Peserta II	721	655	9%
Total Biaya/Peserta	167	65	61%

RENCANA PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL TAHUN 2021

Tahun 2021 pengembangan Human Capital tetap fokus pada 3 fokus utama pengelolaan Human Capital yaitu *People (Grooming Talent and Great Leader), Culture (Internalizing Brilian Values & Build Digital Culture)* dan *Organization (Leveraging Organizational Competence).* Beberapa milestone yang akan dilakukan yakni:

1. Penguatan *employer brand* BRI untuk meng-*attract* dan me-*retain talent*;
2. Menjaga posisi BRI sebagai pilihan tempat berkarir bagi para profesional muda yang memiliki kompetensi unggul;
3. Peningkatan *employee engagement* dengan sistem *reward* dan *career path* yang jelas.
4. Penggunaan People Analytics serta data driven untuk mendukung putusan pengelolaan Human Capital.

Peningkatan kualitas kinerja di tahun 2021 turut menjadi *concern* utama dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat serta dalam upaya pemulihan setelah dampak Covid-19. Oleh karena itu, BRI perlu membentuk sistem pengelolaan human capital yang lebih advance dan terintegrasi sehingga dapat menjadi World Class Human Capital System & Practices. Disamping itu, guna mendukung kinerja bisnis, Human Capital BRI selalu berupaya untuk menjadi *strategic business* partner melalui penyediaan sistem yang reliable dan responsive terhadap setiap tantangan yang dihadapi Perusahaan.

Sejalan dengan berbagai disrupsi yang dihadapi, transformasi budaya merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan human capital BRI. Oleh karenanya, transformasi budaya dilakukan secara konsisten agar tercipta internalisasi budaya kerja di setiap level Pekerja.

Human Capital Development

DEMOGRAFI HUMAN CAPITAL

Human Capital BRI saat ini didominasi oleh Generasi Y dengan komposisi sebanyak 80,56%, Generasi X sebanyak 15,68%, Generasi Z sebanyak 3,65%, dan Baby Boomers sebanyak 0,11%. Dominasi generasi Y atau generasi 'tech savvy' pada komposisi Pekerja BRI menunjukan bahwa Perusahaan telah berhasil bertransformasi ke *digital banking*.

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Komposisi Pekerja BRI menurut level organisasi adalah sebagai berikut:

Level Organisasi	2018	2019	2020
Senior Executive Vice President	4	4	5
Executive Vice President	103	109	102
Vice President / Senior Vice President	198	177	192
Assistant Vice President	353	345	386
Senior Manager	766	788	841
Manager	1320	1532	1.629
Assistant Manager	5599	5277	5.125
Officer	11945	12574	13.169
Assistant	69656	70814	66.735
Total	89.944	91.620	88.184

Prosentase Pekerja Wanita dan Pria untuk Level Jabatan

Jabatan	2018				2019				2020			
	Female		Male		Female		Male		Female		Male	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SEVP	1	25%	3	75%	2	50%	2	50%	3	60%	2	40%
EVP	10	10%	93	90%	13	12%	96	88%	13	13%	89	87%
VP & SVP	25	13%	173	87%	24	14%	153	86%	31	16%	161	84%
Pinca & Pincapem	140	14%	876	86%	150	15%	847	85%	158	15%	873	85%
Manager Setingkat (MP, MO, Wakabag)	123	29%	302	71%	117	21%	435	79%	102	22%	358	78%

Human Capital Development

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada tahun 2020 status Pekerja BRI umumnya adalah Pekerja tetap sebanyak 62.388 orang, Pekerja kontrak sebanyak 25.696 orang, dan *Trainee* 100 orang. Adapun komposisi Pekerja BRI menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Status	2018	2019	2020
Pekerja kontrak	28.970	29.899	25.696
Pekerja Tetap	61.010	61.768	62.388
Trainee	27	272	100
Grand Total	89.944	91.620	88.184

Jumlah Pekerja Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas Pekerja BRI berdasarkan tingkat pendidikan merupakan lulusan Strata-1 dan Diploma. Profil komposisi Pekerja BRI menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan	2018	2019	2020
< SLTA / Setingkat	2.308	1.952	1.529
Diploma	10.595	10.825	10.926
Strata 1	75.797	77.509	74.196
Strata 2	1.238	1.325	1.527
Strata 3	6	9	6
Grand Total	89.944	91.620	88.184

Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia

Profil komposisi Pekerja BRI menurut usia adalah sebagai berikut:

Usia Pekerja	2018	2019	2020
20-24	4.635	5930	3.280
25-29	33.340	28252	22.798
30-34	27.384	31638	34.397
35-39	9.783	10577	11.890
40-44	4.716	5645	6.653
45-49	4.261	3810	3.631
50-54	4.889	4812	4.560
>54	936	956	975
Grand Total	89.944	91620	88.184

Human Capital Development

Jumlah Pekerja Berdasarkan Generasi

Komposisi Pekerja BRI dilihat dari generasi mayoritas merupakan Generasi Y yaitu sebesar 80,56% atau sebanyak 71.039 orang Pekerja.

Generasi	2018	2019	2020
Baby Boomers	1.902	979	98
Gen X	16.779	16.267	13.830
Gen Y	70.718	71.494	71.039
Gen Z	545	2.880	3.217
Grand Total	89.944	91.620	88.184

Jumlah Pekerja Berdasarkan Gender

Dukungan BRI terhadap kesetaraan gender terlihat dalam praktik penerimaan pekerjanya dengan komposisi yang cukup seimbang antara Pekerja wanita 42,36% dan Pekerja pria 57,64% dengan rincian sebagai berikut:

Gender	2018	2019	2020
Wanita | Female	38.663	39.323	37.354
Pria | Male	51.281	52.297	50.830
Total	**89.944**	**91.620**	88.184

DIGITAL, TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI

Peran Teknologi sangat diandalkan untuk mendukung proses bisnis dan mempercepat proses Transformasi Digital Bank BRI. Khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 di mana keterbatasan ruang gerak mengarahkan nasabah untuk menggunakan layanan digital perbankan. Layanan digital perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya transaksi finansial menjadi semakin cepat, mudah, aman dan efisien yang semakin reliabel agar dapat memberikan pengalaman yang positif bagi nasabah BRI.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

KINERJA DIREKTORAT DIGITAL, TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT DIGITAL, TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI TAHUN 2020

2020 merupakan tahun IT Future Ready, berbagai inisiatif dilakukan untuk mencapai hal tersebut, antara lain BRI terus melakukan innovasi-innovasi Digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan, di sisi Resilience IT BRI terus mengimplementasikan Next Gen Infrastruktur dan melakukan modernisasi Core Banking. Dalam era Digital ini *cyber security* menjadi hal yang sangat penting untuk di kembangkan, dengan program Enforce Digital Trust, BRI terus melakukan pengembangan dalam meningkatkan keamanan dari system BRI. BRI Juga memiliki fungsi/ bagian khusus terkait Security Operation Center (SOC) yang melakukan monitoring terhadap *cyber threat* secara kontinu (24-jam, setiap minggu, selama 365 hari). Dalam melakukan *monitoring cyber security*, BRI juga melakukan monitoring secara proaktif melalui layanan *threat intelligence service* dari *provider* yang berskala internasional. Selain itu, untuk memonitor dan memitigasi ancaman *brand abuse*, BRI memiliki program *brand protection* yang bertugas untuk memonitor penyalahgunaan brand di sosial media

Selama tahun 2020 BRI juga terus meningkatkan kemampuan pengelolaan Big Data inisiatif di antaranya Implementasi Master data Management & BRIOneData. Selain itu Perseroan BRI secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM yang difokuskan pada bidang-bidang yang sesuai kebutuhan Perusahaan. Sampai dengan Desember 2020 tercatat ada 1.844 orang jumlah Sumber Daya Manusia pada 6 divisi dibawah Direktorat Digital Teknologi Informasi & Operasi.

Untuk terus meningkatkan kemampuan SDMnya BRI telah menyelenggarakan 7 bidang pelatihan dan menghasilkan 622 sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM TI. Dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tersebut, diharapkan SDM BRI telah memiliki kompetensi khususnya bidang TI sesuai dengan standar indutri.

STRATEGI 2020 & STRATEGI 2021

Untuk mencapai Strategic Perusahaan tahun 2018-2022, Direktorat Digital, Teknologi Informasi dan Operasi menetapkan Strategi inisiatif dan Program Kerja Utama TI BRI menetapkan arahan Roadmap strategis TI (*IT Strategic Directions*) berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional yaitu: *Groom Breakthrough Innovation*, *Resilience IT Platform, Excel Data-driven Organization, Agile Governance*, dan *Transform Digital Talent*.

Pada tahun 2021, Direktorat Digital, IT & Operation tetap mengacu pada 5 *Strategy Groom Breakthrough Innovation*, *Resilience IT Platform, Excel Data-driven Organization, Agile Governance, dan Transform Digital Talent*. Dengan mengusung Tema: **Doing More With Less | through Data-driven Culture & 10x-Automation**

Dengan fokus pada tahun 2021 inisiatif akan fokus pada *Groom Breakthrough Innovation* dimana BRI mencanangkan menjadi Financial Supermarket & *Excel Data-driven Organization* dimana BRI mencanangkan *Decision-Driven Data Analytic*.

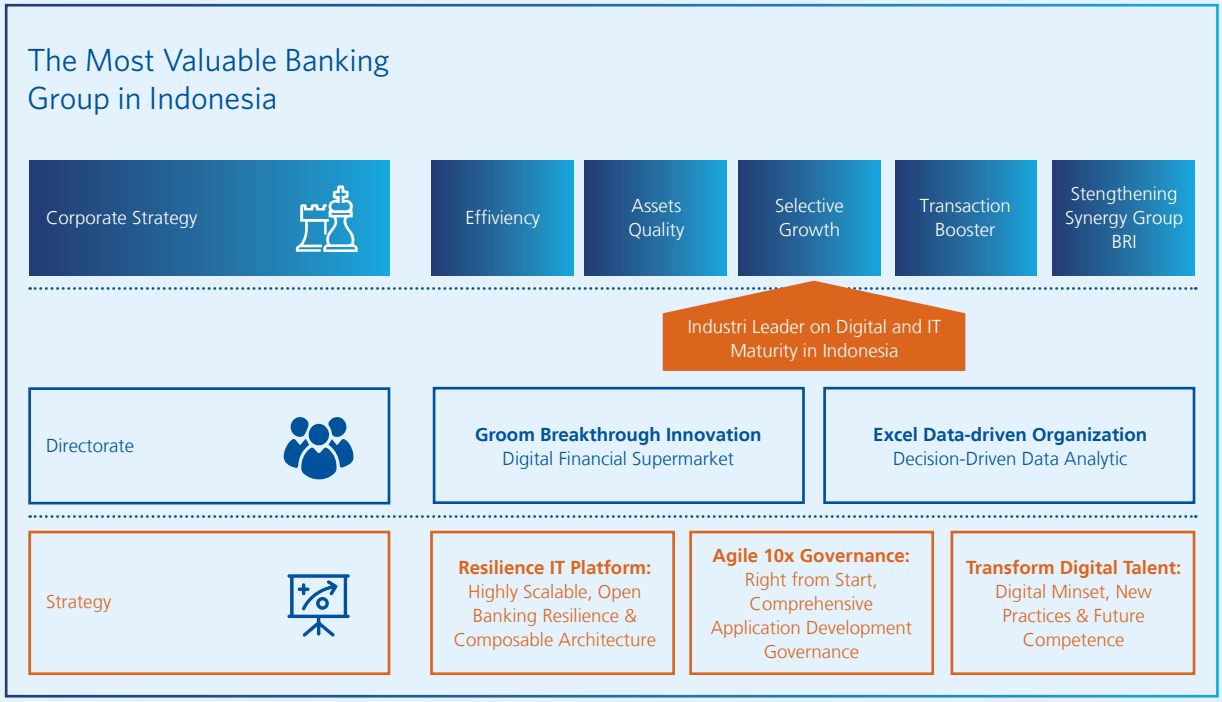

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Sesuai dengan dokumen IT Strategy Plan 2018-2022 dan perkembangan perbankan saat ini, ada beberapa tantangan yang sekaligus dapat menjadi peluang baru bagi perbankan, antara lain sebagai berikut :

DISRUPSI RANTAI NILAI PERBANKAN

Meningkatnya persaingan non-tradisional menyebabkan tekanan dan disrupsi penentuan harga.

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI

Tren makro ekonomi yang semakin menantang berpotensi menyebabkan pertumbuhan perbankan melambat.

PERUBAHAN REGULASI

Dengan meningkatnya tantangan pada pengelolaan profitabilitas dan likuiditas perbankan, regulator senantiasa melakukan penyesuaian regulasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan.

PERUBAHAN PREFERENSI NASABAH

Ada potensi terjadinya perubahan preferensi nasabah dengan cepat, sehingga memiliki potensi perkembangan nasabah yang semakin paham digital dan meningkatnya perkembangan teknologi nasabah korporasi.

PERTUMBUHAN SEGMEN BARU.

Perkembangan segmen pertumbuhan baru dengan adanya peluang-peluang pertumbuhan baru yang sesuai dengan bisnis bank.

STRUKTUR PENGELOLAAN DIGITAL, TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI BRI

Transformasi Digital dan IT di BRI perlu didukung dengan pengelolaan Platform Digital, dan Infrastruktur TI yang berstandar internasional dan dikelola dengan standar best practice. Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 2020 BRI mengesahkan model organisasi dalam mengelola platform digital dan IT. Organisasi Digital dan IT di BRI sebagai berikut: IT Strategi & Governance, Application Management & Operation, IT Infrastrukture & Operation, Digital Development & Operation, Enterprise Data Management & Desk Information Security.

Secara garis besar, Divisi IT Strategi & Governance bertanggung jawab menyusun strategy dan melakukan governance terkait dengan Digital dan IT di BRI, Divisi Application Management & Operation bertanggung jawab melakukan pengembangan dan operasional terhadap seluruh aplikasi BRI, Divisi IT Infrastrukture & Operation bertugas membanntu menyediakan next gen infrastructure untuk menunjang petumbuhan aplikasi BRI. Dalam hal innovasi Digital, Divisi Digital Development & Operation bertanggung jawab untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan *digital banking*. Dalam hal pengelolaan Data, dimana BRI memiliki data yang cukup besar, Divisi Enterprise Data Management memiliki tanggung jawab untuk mengelola big data dan terus meningkatkan kemampuan data analytic di BRI. Kemudian pada era digital dimana cyber security menjadi perhatian penting, Desk Information Security bertanggung jawab menjaga cyber security yang ada di BRI.

ROADMAP DAN PROGRAM KERJA UTAMA TI

Dalam merealisasikan visi dan misi TI BRI Periode Tahun 2018-2022, Roadmap dan Program Kerja Utama TI BRI menetapkan arahan Roadmap strategis TI (*IT Strategic Directions)* berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional yaitu:

1. *Groom Breakthrough Innovation*
2. *Resilience IT Platform*
3. *Excel Data-driven Organization*
4. *Agile Governance*
5. *Transform Digital Talent*

Grand Strategy: Great 2020

Industry Leader on Digital & IT Maturity in Indonesia

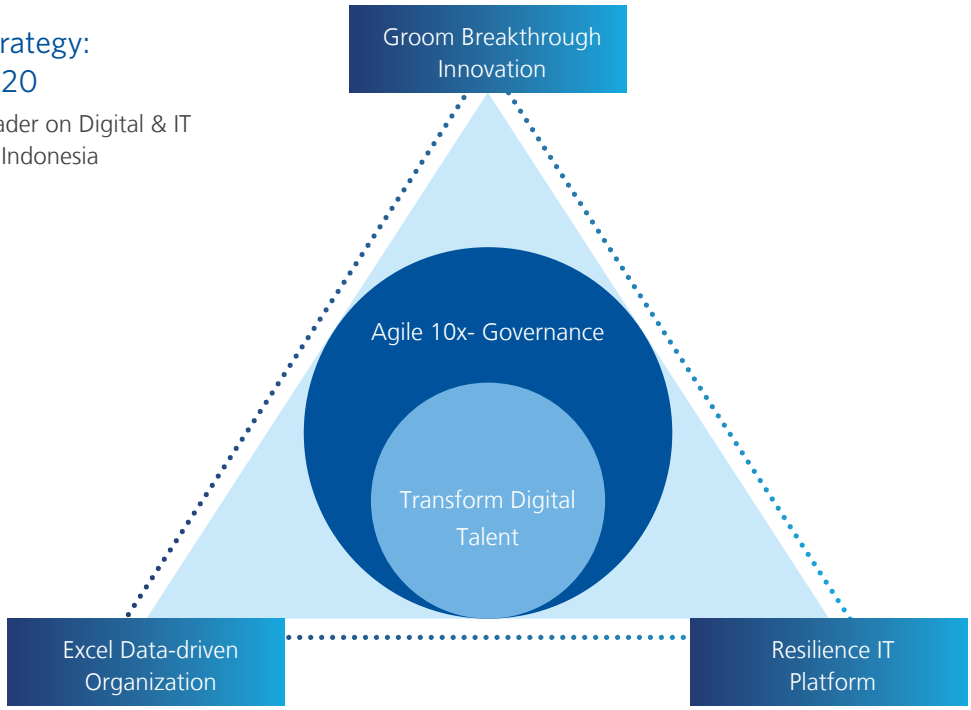

GRAND STRATEGY: GREAT 2020	2020	2021	2022
Groom Breakthrough Innovation	Innovative Digital & Open Financial Solution	Digital Financial Supermarket	The Most Innovative Digital Financial Ecosystem in Southeast Asia
Resilience IT Platform	Robust & Secured Digital Architecture & Infrastructure	Highly Scalable, Open Banking Resilience & Composable Architecture	World-Class Digital Infrastructure
Excel Data-driven Organization	Improved Data Management Process & Big Data Analytics	Decision-Driven Data Analytic	World-Class Data Company
Agile Governance	Effective Agile & DevSecOps to Support Business & IT	Comprehensive Application Development Governance	Mature Agile IT Governance
Transform Digital Talent	Digital Talent Center of Excellence	Nurture and Engage World-Class Digital Talent	Home to the Best Digital Talent & Mature Digital Dexterity (Holding & Subsidiaries)

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

1. *Groom Breakthrough Innovation*

Dalam melakukan transformasi digital, BRI menerapkan strategi *hybrid company model*:

Digitalisasi: tentang bagaimana meningkatkan *operational excellence* dan fokus pada efisiensi.
Digital: tentang menciptakan produk baru dengan fokus pada *customer centric*, inovasi, dan *customer experience*.

Strategi *hybrid company model* ini diterjemahkan dalam 3 *framework* yang menjadikan acuan BRI dalam melakukan Transformasi Digitalnya:

Digitalisasi:

- Pertama: *Digitize Core* adalah bagian dari *digitization*, menciptakan layanan yang lebih handal dan memperbaiki *business process* seperti BRISPOT dan BRImo.

Digital:

- Kedua: *Build Digital Ecosystem* adalah dalam rangka menciptakan *Open Banking* (*Bank As A Platform*) dengan *Mobile* dan *API First Strategy* dengan BRI telah memiliki BRIAPI.
- Ketiga: *New Digital Proposition* adalah tentang menciptakan *business model* baru dengan *new digital proposition* untuk mendukung (pinang dan ceria).

BRI Digital Transformation Framework

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

2. *Resilience IT Platform*

BRI terus meningkatkan kemampuan teknologi IT-nya agar lebih *scalable, reliable & secured* untuk menopang pertumbuhan bisnis BRI dengan melakukan:

- *Next gen Infrastructure*: Dimana data center BRI telah mendapat standar tier 3 Data Center. Selain itu infrastruktur BRI telah mengakomodasi teknologi terbaru seperti virtualisasi dan privat cloud.

BRI menyadari bahwa bisnis perbankan selalu dihadapkan dengan risiko operasional yang mungkin terjadi akibat ketidak cukupan proses internal, sumber daya manusia, sistem ataupun dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini bisa dikelola dengan lebih efektif dengan optimalisasi Teknologi Informasi, seperti Big Data Analytics dengan fitur *Fraud Detection System* dan *Early Warning System* yang mengantisipasi perilaku *fraud* secara proaktif dan untuk kemudian dilakukan tindakan pencegahan.

- *Enforce Digital Trust*: Dimana terus meningkatkan *capability IT security* salah satunya dengan terus melakukan pengembangan *Fraud Detection System* berbasis *big data* dan AI.

3. *Excel Data-driven Organization*

Dalam era digital, *data is the new oil*, oleh sebab itu BRI terus meningkatkan kapabilitasnya di bidang *big data* dan AI. Dalam hal ini BRI menjalankan beberapa inisiatif untuk mencapai *excel data-driven organization*, antara lain dengan melakukan Implementasi master data management yang tidak lain untuk memperkuat *capability* BRI dalam mengelola *big data* secara BRI Group. Selain itu BRI juga terus memperkuat penggunaan data dengan terus membangun *intelligent data analysis for business development* dengan memanfaatkan teknologi big data dan AI.

4. *Agile Governance*

Dalam era digital saat ini mantranya adalah kecepatan, untuk menjawab hal tersebut BRI dituntut untuk dapat men-*deliver* sebuah produk atau layanan dengan cepat dan berkualitas. Dengan mengadopsi metode DevSecOps diharapkan Bank BRI dapat mendeliver produk dengan cepat, berkualitas dan *secure*. Dalam *agile governance* ini proses pengembangan dilakukan dengan pendekatan produk-produk *centric* yang terdiri dari *squad-squad* produk yang pengembangannya dilakukan secara *agile* dan diarahkan oleh *collaboration tools* dan *automation*.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

IT & DIgital Capabilities: Agile Governance

Governance for Agile & DevSecOps Method for 'Security -Driven Apps'

Infusing Risk into Dev Sec Ops Initating Risk Based Cyber Security

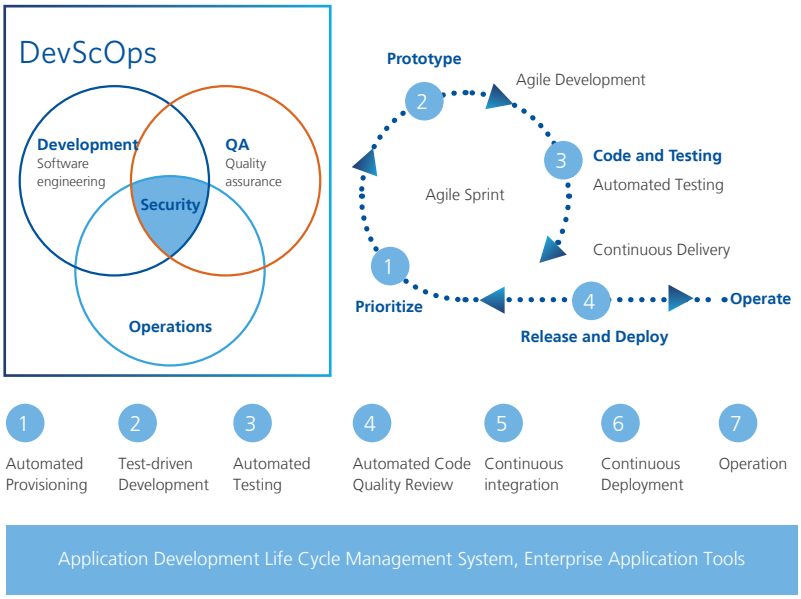

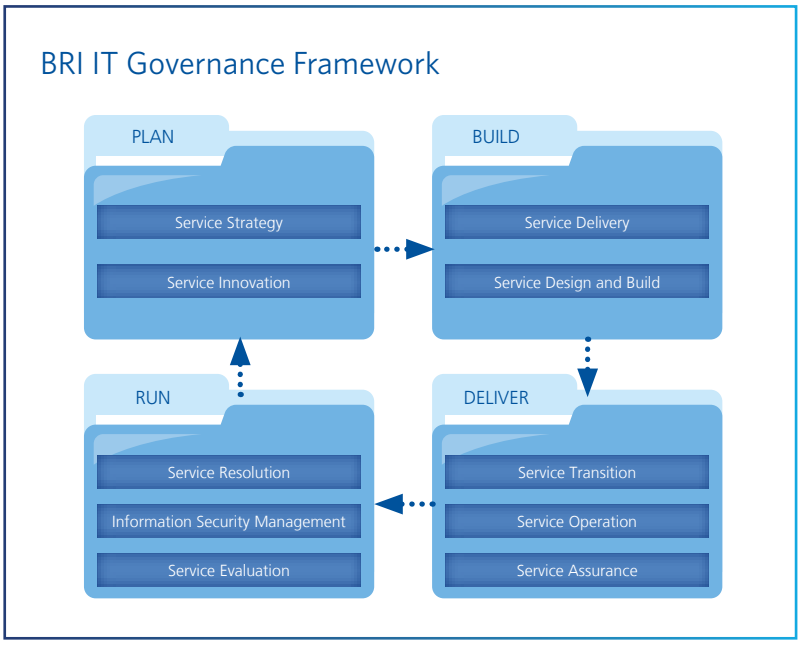

2020
- BRI's Structural Organization - Combining Development and Operation Team into single Organization
- DevScOps

2019
- Tools for collaboration, development, & automation
- Tribes for Business & Development Collaboration, QA & Operation

2018
- Agile Developement Policy
- Agile Concept Training

Selain itu untuk terus meningkatkan kualitas dan mengimplementasikan *Agile Governance*, BRI melakukan *Assessment IT Maturity* berdasarkan pada **COBIT 4.1.** sedangkan untuk mengukur *Digital Transformation* yang dilakukan BRI, BRI juga melakukan *Digital Maturity* dan melakukan berbagai Sertifikasi ISO untuk terus memberikan kualitas TI.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Hasil pencapaian IT Maturity Certification 2020:

Hasil Pencapaian Digital Maturity Certification 2021:

Hasil pencapaian sertifikasi ISO 2020:

ISO Certification - BRI Pursue Worldwide Standard Ensure Best Practices Achieved

2019:
- Big Data
- BRIAPI
- Satelite Operations (SOC)

2020:
- Cyber Intelligence & Analysis Center
- IT Security Operations
- IT Data Center Infrastructure
- Satelite Operations (GCS & PAC)

Payement Application Data Security Standard

2020:
- BRIAPI

#The First in Asean Region

2019:
- IT Data Center Operations
- IT Infrastructure Operations
- IT HelpDesk Operations
- IT Network Operations
- IT Quality Assurance Dept

2020:
- OSP
- Data Center Infrastructure
- Network Operation Center
- Network Quality Assurance
- Core & Host Application Services
- IT Service Desk
- Application Integration Testing
- Knowledge Management
- Application Portfolio Quality
- Application Engineering Support

2020:
Overall IT Sevice Management for Applications:
- BRINETS Express operated in approx 9.621* Uker BRI
- Pinang
- Ceria

Data Center

*Posisi TW III 2020

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

5. *Transform Digital Talent*

   Kompetensi keunggulan profesional yang tinggi dari setiap pekerja menjadi persyaratan utama, khususnya mengingat lingkungan bisnis yang kini sangat dinamis dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Oleh sebab itu penyiapan talent-talent digital perlu dilakukan secara berkesinambungan agar terus relevan dengan perkembangan. Untuk menjawab hal tersebut BRI mempersiapkan digital talentnya dengan berbagai kompetensi dan sertifikasi.

IT GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan kebijakan untuk pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Tata kelola TI BRI menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI.

BRI berkomitmen membangun perilaku yang sesuai dengan standar etika BRI dalam rangka menerapkan manajemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaanya, BRI senantiasa mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai *GCG*, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

Selain itu untuk terus meningkatkan kualitas dan mengimplementasikan agile governance, BRI memperkuat IT *governance* (tata kelola TI) dengan menunjukkan nilai maturity 4.44 dari skala 5 yang diperoleh melalui proses *assessment Maturity* TI berdasarkan pada Framework COBIT 4.1 sedangkan peningkatan kapabilitas transformasi digital ditunjukan dengan nilai maturity 72.7 dari skala 100 yang menunjukan BRI berada pada level digital leader dari *assessment digital maturity* berdasarkan framework Digital Quotient®.

BRI juga melakukan adopsi standar-standar internasional yang demi meningkatkan keamanan informasi dan siber, sistem manajemen kualitas dan sistem kualitas layanan yang setara dengan standar industri internasional.

Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

Rincian Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

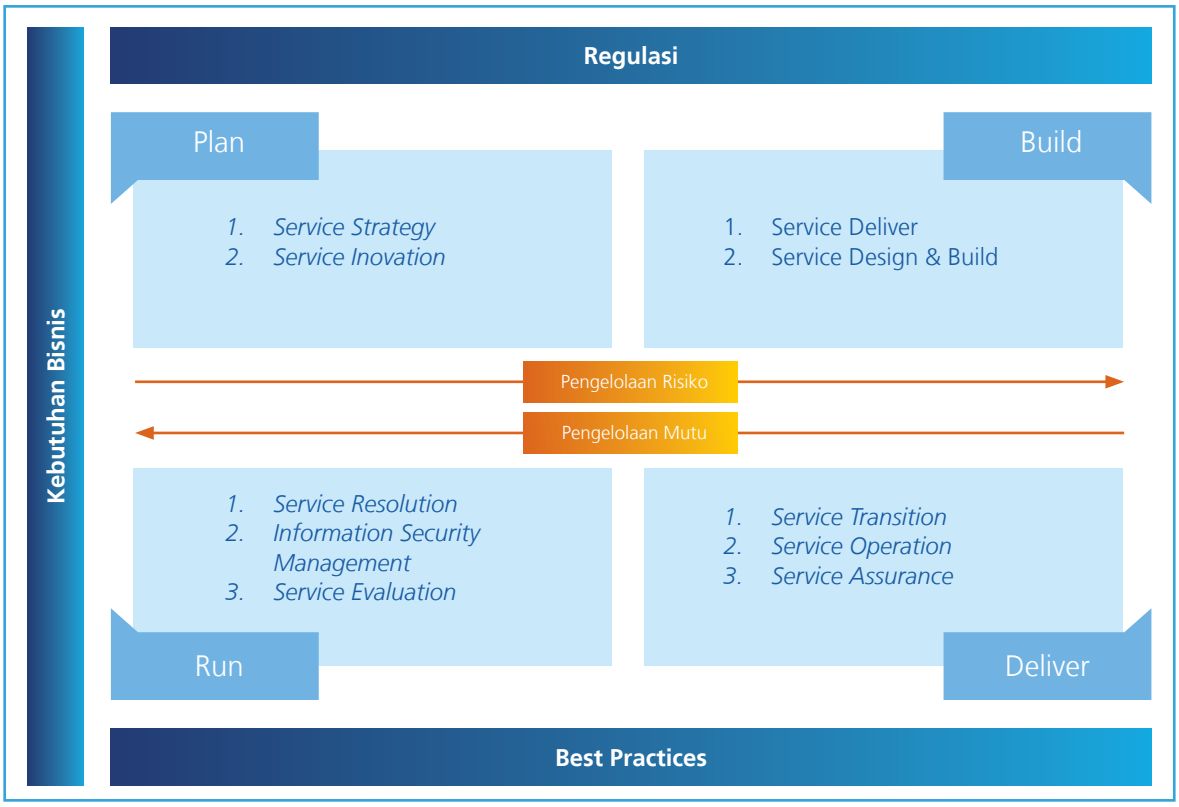

PERKEMBANGAN SDM TI

Untuk mendukung implementasi TI sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan Perseroan, BRI secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM yang difokuskan pada bidang bidang yang sesuai kebutuhan Perusahaan. Sampai dengan Desember 2020 tercatat ada 1.844 orang jumlah Sumber Daya Manusia pada 6 Divisi dibawah Direktorat Digital Teknologi Informasi & Operasi terdiri dari:

No	Divisi/Desk	Organik	Insource	Outsource	Total
1	Divisi IT Strategy & Governance	34	13	-	47
2	Divisi Application Management & Operation	240	133	243	616
3	Divisi IT Infrastructure & Operation	146	60	594	800
4	Divisi Digital Development & Operation	79	77	81	237
5	Divisi Enterprise Data Management	55	36	2	93
6	Desk Information Security	34	6	11	51
	Total	588	325	931	1.844

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

TRAINING DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TI

Dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM TI, BRI terlebih dulu melakukan riset terhadap materi-materi pelatihan yang dibutuhkan. Terkait pelatihan dalam rangka pengembangan serta peningkatan kompetensi khususnya bidang Digital & TI, BRI telah melakukan mapping kebutuhan pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja yang bersifat teknis, non teknis serta manajerial pekerja sesuai kebutuhan. Pelatihan dan Sertifikasi selama tahun 2020 yang telah diikuti maupun dimiliki antara lain sebagai berikut:

A. Pelatihan & Sertifikasi Talent Digital & IT

Data Distribusi Pelatihan & Sertifikasi pada masing-masing Divisi di Jajaran Direktorat Digital Teknologi Informasi & Operasi tahun 2020 sebagai berikut :

BIDANG	APP	DDB	INF	ISC	ISG	EDM	Jumlah Sertifikasi
Data Specialist	51	22	2	0	6	19	100
Software Engineering	56	16	2	1	0	0	75
UI/UX Design Specialist	0	6	0	0	2	0	8
IT Infrastructure Specialist	18	42	33	1	13	0	107
IT Architecture Specialist	1	0	0	0	18	19	38
IT Security Specialist	0	0	11	72	0	2	85
IT Product Manager	0	3	0	0	0	0	3
Other IT Certification	28	116	20	11	10	21	206
TOTAL							622

Sertifikasi Bidang: Data

No	SERTIFIKASI
1	CDSM (Certificate Data Science For Manager)
2	In House Training : Big Data
3	Implementing a Datawarehouse with Microsoft SQL Server
4	Certified Data Science For Manager - CDSM
5	Machine Learning form Data to Dessions
6	Digital Marketing Analytics
7	Advance Credit Scoring Using Machine Learning
8	Data Science For Business
9	Certified Data Science Specialist - CDSS Certification
10	Pelatihan Data Management & Analytics Conference di Luar Negeri
11	Business Analytics
12	Credit Risk Modeling in R
13	Learning Digital Business Analysis
14	Learning Data Analytics

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

No	SERTIFIKASI
15	Data Analytics for Business Professionals
16	Fraud Detection in R
17	Anomaly Detectiion in R
18	Bracketology Club: Using March Madness to Learn Data Science
19	Machine Learning
20	Implementing Data Warehouse with Microsoft SQL Server
21	Tableau 2020 A-Z:Hands-On Tableau Training For Data Science
22	Metadata Management Fundamentals
23	RHEL Adminstration I
24	Microsoft Certified Professional: Implementing a Data Warehouse
25	ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Awarenes
26	IBM Product Training MDM
27	Machine Learning Specialization
28	Python for Data Science
29	DevOps Foundation v3.0
30	Certified Data Science for Programmer (CDSP)

Sertifikasi Bidang : Software Engineering

NO	SERTIFIKASI
1	Pemrograman Android (2015)
2	DevOps Test Engineer (2020)
3	DevOps Foundation
4	Certified International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester
5	Foundations of Postgress Administration
6	API Design and Fundamentals of Google Clouds Apigee API Platform
7	Api security on google clouds apigee api platform
8	Api development on google clouds apgiee api platform
9	Microservices with Docker
10	Developing ASP.NET MVC Web Application
11	Certified Secure Programmer .NET
12	Certified DevOps by DevOps Institute
13	Certified Secure Programmer .NET
14	DevOps Test Engineering (DTE) Certification
15	Getting Started wirh Google Kubernetes Engineer
16	Search Engine Optimization

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

NO	SERTIFIKASI
17	Microsoft Certified Solutian Associate (MCSA) : SQL 2016 Database Administrator
18	TOS - In House Training Web Method Development Software AG
19	WebMethods Advanced Integration Workshop and Certification
20	Certified WebMethods Integration Developer
21	Certified Secure Programmer .NET
22	Exam Certified WebMethods Integration Developer
23	Developing ASP.NET MVC Web Application
24	Certified Data Center Professional (CDCP)
25	Sertifikasi LSP Quality Assurance (QA)
26	Microsoft® Certified Solutions Expert
27	Implementing a Datawarehouse with Microsoft SQL Server

Sertifikasi Bidang: UI/UX Design

NO	SERTIFIKASI
1	User Interface Design Fundamental Training
2	UX Principle, Mobile UX Design, Webpage Design, Design Thinking Principle and UX Heuristic Evaluation & Usability Testing
3	Human Computer Interaction for User Experience Design
4	User Interface Design Fundamental Training
5	HCD 101 Digital User Experience Design
6	General Assembly's User Experience

Sertifikasi Bidang: IT Infrastructure

No	SERTIFIKASI
1	Sertifikasi Disaster Recovery Professional v3
2	ITIL v3 (2012)
3	VMware Certified Professional
4	VMware Certification Profesional (VCP) Data Center Virtualization 2019
5	JNCIA
6	Palo Alto
7	Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
8	Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation
9	Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services
10	Elastic Google Cloud Infrastructure: Scaling and Automation
11	VMware Certification Profesional (VCP) Data Center Virtualization 2019
12	Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

No	SERTIFIKASI
13	Sertifikasi Profesi Telekomunikasi: Drivetest
14	Certified Data Center Professional (CDCP)
15	Certified Data Centre Facilities Operations Manager (CDFOM)
16	CICPE : Certified IT Capacity Planning Expert
17	IT Infrasturucture Library
18	Certified Data Center Professional (CDCP)
19	Certified IT Capacity Planning Exprert (CICPE)
20	Red Hat RHCSA & RHCE
21	ITIL Certification
22	ITIL Foundation
23	ITIL Service Strategy
24	ITIL Service Operation
25	Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals
26	Openshift Enterprise Development
27	Certified Data Center Specialist (CDCS)
28	Accredited Tier Specialist
29	CCNA
30	Satellite Communication System Engineering
31	Katalon Studio
32	Finacle Digital Core Banking
33	Sertifikasi LSP Network Engineer

Sertifikasi Bidang: IT Architecture

NO	SERTIFIKASI
1	IT Architecture (TOGAF 9.1)
2	Fundamental Arsitektur Data untuk IT Governance Pada Industri Perbankan
3	BITAF
4	Aplikasi E- Server Orbus
5	IBM Product Training MDM
6	Archimate 3.0
7	TOGAF 9 Certified, Level 1 & 2
8	iServer Orbus
10	ITIL 4 Foundation Training Program
11	ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
12	ISO/IEC 27001:2013 Information Security Manajemen System Awareness

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Sertifikasi Bidang: IT Security

NO	SERTIFIKASI
1	Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (2007)
2	CISA (2017)
3	CISO
4	Certified Ethical Hacker (CEH)-2009
5	Certified Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) -2009
6	Certified Security Analyst (ECSA) - 2010
7	Certified Network Security Administrator (ENSA) -2010
8	ISO/IEC 27001:2013 ISMS Lead Auditor (2020)
9	Assessor of Competency BNSP
10	Certified Cisco Network Associate Cyber Ops – CCNA Cyber Ops (2018)
11	Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - 2015
12	Certified Ethical Hacking (CEH) - 2014
13	ISO 27001:2005 Lead Auditor
14	CEH V.11 (2018)
15	CAST 612 (2017)
16	Certified Incident Handler v.2 (2020)
17	OFCE (Oxygen Forensics Certified Examiner) - 2019
18	Certified Ethical Hacker (CEH) v.10 - (2020)
19	Certified Incident Handler v.2 (2020)
20	Completion Encase Computer Forensic I - DF120
21	Completion Encase Computer Forensic II - DF210
22	Certified Ethical Hacker (CEH) - 2017
23	ISO 27001:2013 Lead Auditor (2020)
24	DevOps Fundamental (2019)
25	Certified Incident Handler v.2(2020)
26	ISO 27001 Lead Implementer (2018)
27	ISO 27001 Lead Auditor (2018)
28	CCNA (Certified Cisco Network Associate) - 2002
29	FCNSA (Fortinet Certified Network Security Administrator) - 2008
30	CSCP (Cyber Security Certified Professional) - 2018
31	CEH v7 (2013)
32	ECSA v4 (2013)

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

NO	SERTIFIKASI
33	CHFI v8 (2014)
34	ENSA v4 (2015)
35	Certified CyberArk Defender (2020)
36	Certified Ethical Hacker (CEH) - 2019
37	CEH (2013)
38	CHFI (2014)
39	ENSA (2015)
40	CPISI (2019)
41	MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) - 2018
42	MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer - 2018
43	DevOps Test Engineer (2020)
44	CHFI EC Council (2013)
45	CyberArk Defender (2019)
46	Certified Ethical Hacker (2018)
47	Certified Network Defender (2019)
48	Certified Ethical Hacker v10 (2019)
49	Certified Secure Computer User (CSCU) - 2017
50	CEH (2017)
51	CCNA (Certified Cisco Network Associate)
52	Juniper Service Provider Routing and Switching Professional (JNCIP-SP, JN0-662)
53	Certified Secure Computer User v2
54	Certified Ethical Hacker (CEH)-2013
55	Sertifikasi Computer Hacking Forensic Investigator v8 (CHFI) - 2014
56	Certified Network Security Specialist (CNSS)
57	Network Security Associate (NSE1)
58	Network Security Associate (NSE2)
59	Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200-301
60	ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Awareness

Sertifikasi Bidang: Product

NO	SERTIFIKASI
1	Product Manager
2	Training Agile Tim Product Development

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

REALISASI PROGRAM KERJA TI 2020

GREAT 18 Strategic Initiatives

Grand Strategy	No	18 Strategic Initiatives 2020	Action Work	Realisasi 2020
Groom Breakthrough Innovation	1	Establish Corporate-Startup Ecosystem	Build Embrio Management	Telah terbentuknya Manajemen Inovasi BRI (emBRIo)
	2	Integration Financial Solution Innovation	Develop BRI Phone platform	Tersedia MVP BRIPhone
			Implement M-Habs	Tersedia konsep & analisis biaya implementasi M-Habs
			Enhancing BRImo Super Apps	Live: Account Opening Personal Financial Manager Cross Border QRIS
			Propel Open Banking Solution(Marketplace API)	Live: 200 Partnership BRIAPI & 10 Services
	3	Digital Ecosystem Innovation	Implement Emerging Ecosystem Platform : 1. MSME Platform (Stroberi Kasir) 2. Establish Traditional Market Platform 3. Agri-tech Ecosystem Platform	Live Stroberi Kasir (Total User = 15629, Total Transaction = 44330, Sales Volume = 26,4 M) Live Stroberi Tagihan (Total User = 3619, Total Transaction = 25254, Sales Volume = 1,9 M) Live Dashboard Panen sudah 100% dari target (Jumlah User : 1109)
Resilience IT Platform	4	Architecture for Next-gen Platform	Enrich Digital Enterprise Architecture Tools	DEA (Digital Enterprise Architecture) Tools telah tersedia & digunakan
			Enforcing Standard IT Architecture Framework	Telah dilakukan standarisasi aplikasi
			Project Satelite Diversity	Project telah dilaksanakan 100%, telah tersedia Hub & Satellite Ready for Service
	5	Modernisasi Core Banking	Brinets Tactical Enhancement	Pencapaian sesuai dengan time line project
			New Delivery System	Telah diimplementasikan 36 fitur monetary & 98 fitur non-monetary
			BRI New Finance System	Pencapaian sesuai dengan time line project
			Enterprise Service Bus	Live dengan Jumlah Fitur: 206

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Grand Strategy	No	18 Strategic Initiatives 2020	Action Work	Realisasi 2020
	6	Create Next-gen Infra	Implementing Offsite Data Center	Implementasi Aplikasi Digital pada ODC 100%
			Eliminates Single Point of Failure LAN DC	Kegiatan migrasi seluruh segmen DC GTI Ragunan dan DC Tabanan sudah selesai
			Sertifikasi Tier 3 Facility (GTI dan TAB)	Implementasi dan Sertifikasi Tier 3 Facility telah selesai dilaksanakan.
	7	Orchestrate Automation Operation	Implementation Robotic Process Automation	PoC RPA Batch 2 telah selesai 100%
			Implementing Automation Tools for Disaster Recovery (Regulatory Farm Server)	A. POC Implementasi Automation tools for Disaster Recovery. Telah dilaksanakan 100% B. Backup Solution tersedia 100%
			Implementation AIOps Platform	Tersedia tools monitoring dan sistem operasional IT AIOps Platform
			Enforce Self Service User Management	100% terimplementasi
	8	Enforce Digital Trust	Implementation of IT Security Solutions for Zero IT Security Incidents	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
			Zero Trust Endpoint & Network Security	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
			Reinforcing Multi Fraud Detection System (BRIForce++)	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
Excel Data-driven Organization	9	Master Data Management	Implementation MDM	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020 (Live Operasional Tahap 1 selesai bulan Maret. Development Tahap 2 selesai di Sept 2020)
			Data Awards	Data Awards telah terlaksana
	10	Intelligent Data Analysis	Building Intelligent Data Analysis for Business Development	1. Dashboard telah disediakan sesuai dengan target waktu dan kebutuhan. 2. Tersedianya self-service analytics untuk Direktorat Konsumer

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Grand Strategy	No	18 Strategic Initiatives 2020	Action Work	Realisasi 2020
Excel Data-driven Organization	11	Enterprise Data Warehouse	Enrichment Enterprise Data Warehouse	Telah tersedia di BRISIM untuk mengakses report dan dashboard.
	12	BRIOneData	Implementation: BRIOneData (BRI & Subsidiaries) BRIOne Data Developer Page and Data Governance Hackathon One BRI Data (BRI & Subsidiaries)	1. Data Hackathon sudah terlaksana 2. Data Perusahaan anak sudah masuk dalam environment Big Data.
Agile 10x-Governance	13	Enhancing Business IT Alignment	Maintain IT - Business Alignment	100% Project Started dalam Rencana Pengembangan TI BRI 2020.
	14	Effective Bimodal IT Governance	Increased IT Maturity & Digital Maturity Plan	Telah dilaksanakan sertifikasi IT Maturity & Digital Maturity
			Implementasi & Governance Disaster Recovery Plan	Implementasi dilaksanakan sesuai dengan Timeline
			ISO Certification	2020:ISO 27001 (5), ISO 9001:2005 (10), ISO 20000 (3), PA-DSS (1)
			Security Policies Updates	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
			Establish Bank-Wide Data Governance	Telah tersedia Kebijakan Tata Kelola Data yang terbaru
			Service Management System Implementation	Service Management System Implementation pada aplikasi utama
	15	Enforcing DevSecOps Practice	Creating Standardized QA Environment	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
			Implementation Testing Automation	Realisasi 100% Sesuai dengan target 2020
			Enrichment of DevSecOps Practices	Implementasi DevSecOps (Static Application Security Testing)
			Intensify DevSecOps practices	Implementasi DevSecOps pada pengembangan Aplikasi

Grand Strategy	No	18 Strategic Initiatives 2020	Action Work	Realisasi 2020
Transform Digital Talent	16	Talent Access	IT Branding Program	BRILian Shine Impactful Simplicity BRING IT ON Series (3 event) Hackathon One BRIAPI DevOps Days Jakarta 2020 BRIAPI Awards
			Initiate Flexi Workspace	Establish piloting remote working
	17	Talent Development	Certified IT Professional	667 IT & Digital Professional Certification
	18	Talent Engagement & Deployment	BRI Engineering Awards Program	Terlaksananya BRI Engineering Awards Program
			IT Business Partner Program	Terlaksananya IT Business Program

INVESTASI DAN EKSPLOITASI TI

Pada tahun 2020, BRI telah melakukan alokasi terhadap anggaran sebesar Rp6,256 Triliun dengan anggaran investasi TI sebesar Rp4,289 Triliun dan anggaran Eksploitasi IT sebesar Rp1,967 Triliun yang meliputi 25 proyek dari 14 Divisi inisiasi sampai dengan Bulan Desember 2020.

Beberapa proyek yang menggunakan alokasi anggaran investasi IT dan eksploitasi sebagai berikut:

No	Divisi	Proyek
1	Divisi Jaringan Kantor	Roadmap Jaringan Kerja (New Delivery Channel Transformation) BRIBOX
2	Desk E-Channel	Outlet Expansion CRM Tahun 2020 Outlet Expansion EDC Tahun 2020 (EDC RBB 2020 dan Replacement)
3	Divisi Application Management & Operation	Modernisasi Middleware (Enterprise Service Bus) Modernisasi Core Banking (BRINETS Tactical Enhancement) New Delivery System
4	Divisi Enterprise Data Management	Enterprise Data Warehouse (EDW) Master Data Management (MDM) Basic Data Setup- Operational Data Store
5	Divisi Transaction Banking	Akuisisi Platform CMS Fitur Korporasi End to End
6	Divisi Layanan Contact Center	Sistem Complaint Handling Terintegrasi Pengembangan sistem Contact Center
7	Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	BRI Collection System Tahap 1 (BRIGUNA, Ritel) BRI Collection System Tahap 2 (KPR dan KKB)
8	Divisi Bisnis Internasional	Pembukaan UKLN BRI Taiwan
9	Divisi Akuntansi dan Manajemen	Implementasi IFRS 9 (PSAK 71)
10	Divisi Bisnis Program dan Kemitraan (BPM)	Kartu Tani & KUSUKA

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

No	Divisi	Proyek
11	Divisi Investment Services	Sistem Aplikasi Tapera New SI DPLK (BRIFINE Webs System)
12	Divisi Wealth Management	Pengembangan Sistem Wealth Management (Private Banking) WM Platform
13	Divisi Corporate Transformation	Sales Planning Bisnis Menengah Aplikasi Sistem Informasi Ekstrakomptabel Digital Lending
14	Tim BRIFIRST	New Finance System
15	Divisi IT Infrastructure & Operation	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat-perangkat Data Center dan Network yang bersifat rutin.
16	Divisi Application Management & Operation	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan pengembangan aplikasi yg bersifat rutin.
17	Divisi IT Strategy & Governance	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan terkait riset dan development baik hardware maupun software.
18	Desk Information Security	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan terkait perangkat IT Security baik hardware maupun software yang bersifat rutin.
19	Divisi Enterprise Data Management	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan terkait pengelolaan data.
20	Divisi Digital Banking Development & Operation	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan terkait implementasi digital banking atau digital development.
21	Divisi Bisnis Internasional	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan hardware dan software terkait Unit Kerja Luar Negeri.
22	Divisi Sentra Operasi	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan hardware yang mendukung kegiatan sentra operasi.
23	Divisi Jaringan Kantor	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat IT Operasional untuk seluruh unit kerja BRI,
24	Desk E-Channel	Kegiatan IT non proyek yang meliputi pemenuhan kebutuhan terkait perangkat echannel (CRM, EDC, ATM, dll)

DATA PRIVACY DAN SECURITY

Bank BRI telah mengadopsi dan menerapkan serangkaian kebijakan dan pedoman operasional pengamanan privasi data nasabah di seluruh operasional unit kerja kami melalui berbagai Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Informasi yang meliputi panduan proses pengelolaan, penggunaan, pemusnahan, pemantauan, evaluasi, pelaporan informasi dan tindak lanjut atas insiden keamanan informasi. Melalui penerapan Pedoman Pelaksanaan ini, privasi dan keamanan nasabah dapat terjaga dengan baik.

Bank BRI sangat berkomitmen untuk meningkatkan keamanan informasi data yang dikelola. Berikut prinsip-prinsip dalam pengamanan dan pengelolaan data nasabah yang dituangkan dalam berbagai regulasi internal.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Pelaksanaan Kebijakan Pendukung Data Privacy & Security di BRI

BRI sangat berkomitmen untuk meningkatkan keamanan informasi data yang kami kelola. Kami telah melaksanakan prinsip - prinsip di dalam pengamanan dan pengelolaan data nasabah yang dituangkan dalam beragam regulasi utama perusahaan.

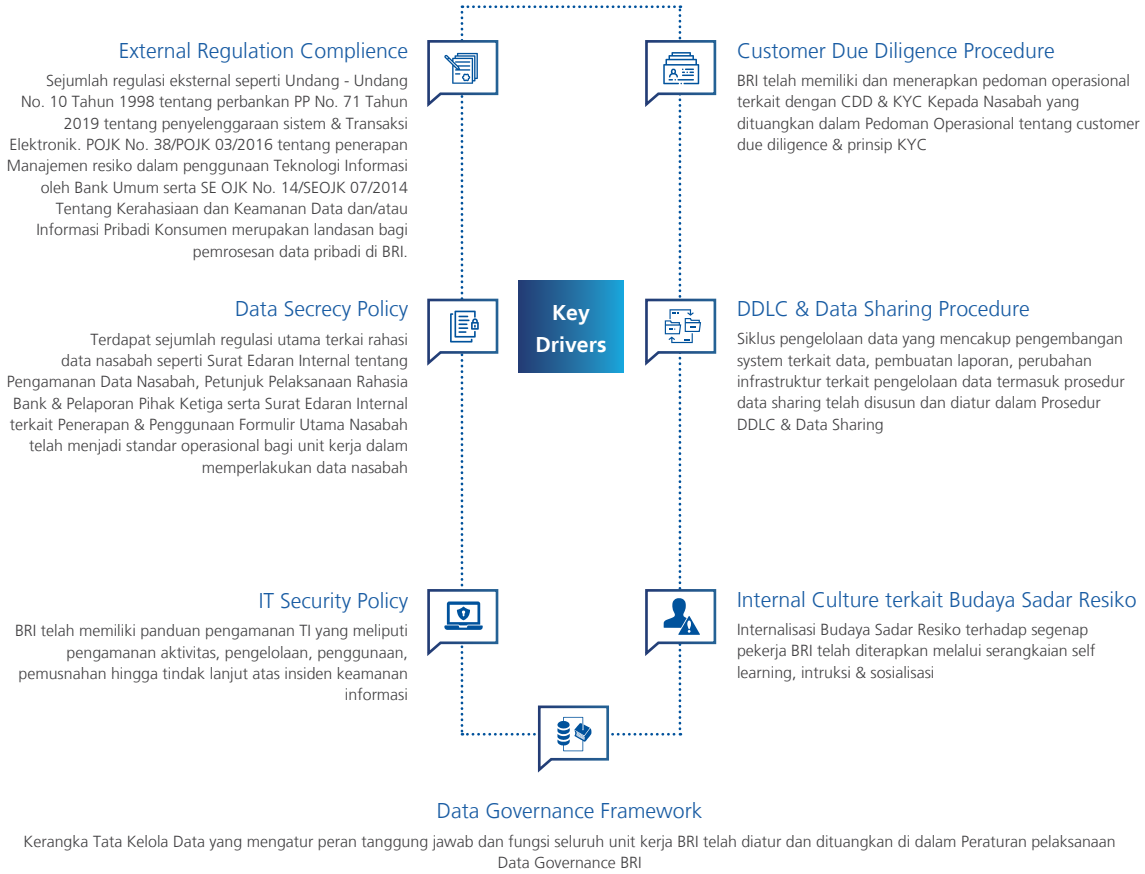

1. *External Regulation Compliance* : sejumlah regulasi eksternal terkait seperti Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, PP no 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum serta SE OJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen merupakan landasan bagi pemrosesan data pribadi di Bank BRI.

2. *Data Secrecy Policy* : Kami menerjemahkan sejumlah regulasi eksternal dari otoritas tersebut diatas melalui sejumlah regulasi utama internal dan turunannya terkait rahasia data nasabah, diantaranya seperti Prosedur Internal Pengamanan Data Nasabah (Perlindungan data nasabah di seluruh tahap siklus perolehan data mulai dari perolehan/pengumpulan, pengolahan & penganalisisan, penyimpanan, pemindahan/ pengiriman, pembukaan akses hingga pemusnahan data) termasuk juga dengan bagaimana prosedur untuk enkripsinya, Petunjuk Pelaksanaan mengenai Rahasia Bank, penundaan Transaksi dan pelaporan Pihak Ketiga serta Prosedur Internal tentang

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Penerapan & penggunaan Formulir Utama Nasabah. Beberapa kebijakan internal ini telah menjadi standar operasional bagi unit kerja Bank BRI dalam mengelola data nasabah.

3. *IT Security Policy* : Bank BRI telah memiliki panduan pengamanan TI dengan berpedoman pada prosedur atau standar best practice industri yang mengacu SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017, Standar ISO/IEC 27001:2013 tentang Teknologi Informasi-Teknik keamanan-Sistem Manajemen keamanan Nasional-Persyaratan serta PCI DSS Versi 3.2 tahun 2016 Requirement 12.1 Establish, Publish, Maintain, Disseminate Security policy. Hal ini dituangkan di dalam Panduan Utama pedoman pelaksanaan pengamanan Informasi meliputi pengamanan aktivitas, pengelolaan, penggunaan, pemusnahan hingga tindak lanjut atas insiden keamanan informasi (PP 08/ISC/09/2020).

4. *Data Governance Framework* : Bank BRI telah menetapkan dan mengadopsi Kerangka Tata Kelola Data yang mengatur peran, tanggung jawab dan fungsi seluruh unit kerja Bank BRI telah diatur dan dituangkan dalam Prosedur Internal tentang Pedoman pelaksanaan Data Governance.

5. *Customer Due Diligence Procedure* : Bank BRI mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap seluruh nasabah maupun calon nasabah kami. Menindaklanjuti hal ini, Bank BRI telah memiliki dan menerapkan pedoman operasional terkait dengan *Customer Due Diligence Procedure* (CDD) & Know Your Customer (KYC) kepada nasabah yang dituangkan dalam Buku pedoman Operasional yang dilaksanakan dan menjadi standar bagi seluruh unit kerja Bank BRI.

6. *Data Development Life Cycle* (DDLC) & *Data Sharing Procedure* : siklus pengelolaan data yang mencakup pengembangan sistem terkait data, pembuatan laporan, perubahan infrastruktur terkait pengelolaan data termasuk prosedur data sharing telah disusun dan diatur dalam prosedur internal mengenai DDLC & Prosedur Data sharing.

7. *Internal Culture* terkait Budaya Sadar Risiko : Kami memahami bahwa serangkaian prosedur diatas harus diikuti oleh internalisasi budaya kerja bagi segenap manajemen dan pekerja Bank BRI. Oleh karena itu Internalisasi Budaya Sadar Risiko terhadap segenap pekerja Bank BRI telah diterapkan melalui serangkaian self-learning rutin, instruksi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Bank BRI berkomitmen melindungi informasi/data nasabah, sebagai bentuk kepatuhan atas beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah acuan peraturan perundang-undangan dan penjelasan dari peraturan internal Bank BRI terkait perlindungan informasi atau data nasabah.

1. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. PP no 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.
6. Dan berbagai aturan terkait lainnya

Bank BRI telah mengadopsi aturan-aturan di atas melalui penerbitan ketentuan internal tentang pengaduan nasabah, yakni Surat Keputusan Tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Melalui prosedur ini, setiap keluhan terkait pelanggaran kerahasiaan nasabah akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu ada juga ketentuan yang menegaskan perlindungan data dan/atau informasi nasabah pada Surat Edaran Tentang Pengamanan Data Nasabah.

Dalam proses pembukaan rekening, Bank BRI telah meminta persetujuan (*consent*) dari calon nasabah terkait ijin penggunaan data calon nasabah untuk keperluan penawaran produk-produk dan jasa perbankan baik oleh Bank BRI ataupun Grup BRI. Seiring dengan perjalanan program data *privacy* di BRI, aktivitas *consent* ini akan diperluas sesuai dengan *data subject* yang diatur dalam *framework data privacy management* yang ditetapkan Bank BRI.

Selain itu, Bank BRI juga memiliki Petunjuk Pelaksanaan Rahasia Bank, Penundaan Transaksi dan Pelaporan kepada Pihak ketiga, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang rahasia bank pada umumnya serta prosedur langkah – langkah ketat yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembukaan, penundaan transaksi, penghentian sementara, penyitaan, pemblokiran dan pelaporan terkait data nasabah yang memuat pengertian dan ketentuan, wewenang dan tanggung jawab, alur dan uraian pekerjaan serta *flowchart*.

2. Prosedur ini juga mengatur bagaimana pembukaan rahasia bank dalam hal :
   - Kepentingan Perpajakan
   - Kepentingan Peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya
   - Tukar menukar informasi Bank
   - Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah secara tertulis
   - Pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia

Bank BRI juga telah memiliki dan menerapkan peraturan internal terkait Prosedur Penyediaan Data Sharing untuk Kebutuhan Pihak Ketiga. Di dalam prosedur ini telah diatur apa saja dokumen yang harus dilengkapi dalam hal permintaan data. Hal ini tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan bank. Selain itu di dalam prosedur ini juga telah diatur tentang tingkat klasifikasi data yang dimiliki oleh Bank BRI sehingga jelas mekanisme pemenuhannya dari masing – masing tingkat klasifikasi data. Permohonan permintaan data juga wajib mendapatkan otorisasi sesuai dengan tingkat klasifikasi datanya.

Bank BRI juga melakukan prinsip kehati – hatian dalam hal menyerahkan atau menerima data dari Pihak Ketiga untuk melindungi datanya, maka pertukaran data dengan pihak ketiga, Bank BRI selalu meminta pihak ketiga untuk sepakat atas Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) baik sebagai pengungkap data ataupun di antara para pihak yang saling mengungkapkan data

CYBER SECURITY

Pada tahun 2018 sesuai perkembangan digitalisasi BRI dan seiring dengan trend perkembangan serangan cyber, BRI membentuk unit kerja di bawah Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi yang secara khusus menangani keamanan informasi. Unit kerja keamanan informasi bertanggung jawab untuk melakukan:

1. penyusunan security arsitektur,
2. operasional *security*,
3. *cyber risk* dan *cyber intellegence,*
4. *data loss & fraud prevention,*
5. *identity & access management,*
6. program management, investigasi & forensik, dan
7. *security governance.*

Unit kerja keamanan informasi dipimpin oleh seorang Chief Information Security Officer (CISO) yang memiliki pengalaman terkait security dan sertifikasi antara lain CISA (Certified Information System Auditor) dan CISSP (Certified Information Systems Security Professional). BRI telah menyusun Enterprise Security Architecture yang menggunakan framework NIST Cyber Security yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan cyber security di BRI.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

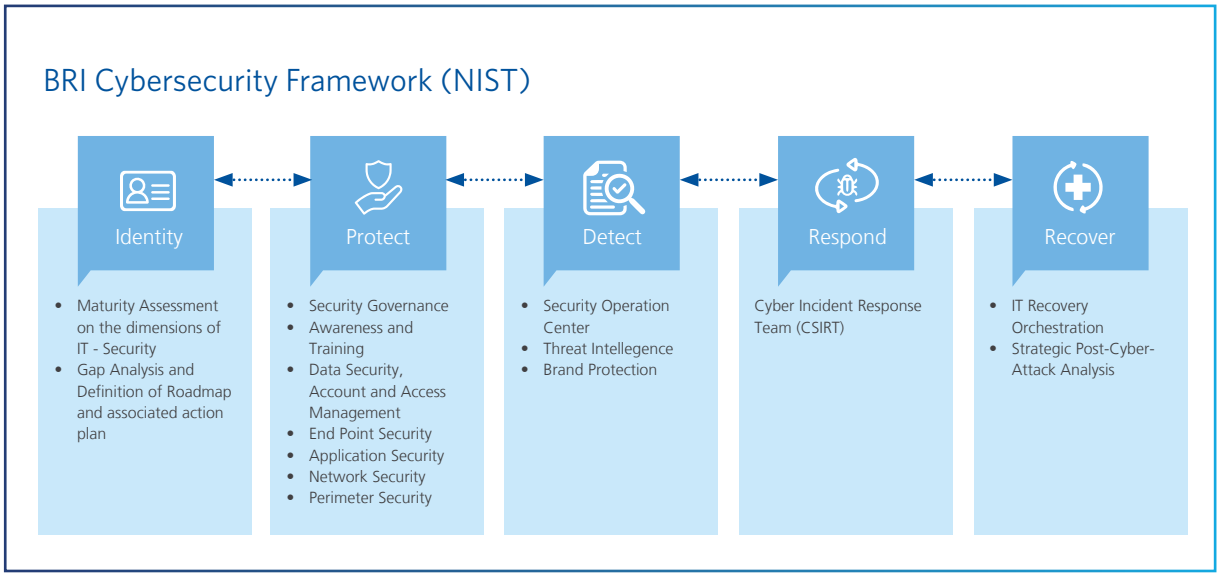

BRI telah memiliki kebijakan *cyber security* yang mengatur terkait keamanan informasi BRI secara *bank wide*. Kebijakan *cyber security* ini disusun berdasarkan standar internasional ISO27001:2013, PCI DSS dan kebijakan regulator POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

BRI memiliki prosedur penanganan insiden keamanan informasi dan tim tanggap insiden siber (CSIRT) yang sejalan dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Bussiness Continuity Plan* (BCP) BRI. BRI bekerjasama dengan *international security experts* yang memiliki pengalaman global dalam tanggap insiden untuk membantu BRI dalam menangani *insiden cyber*.

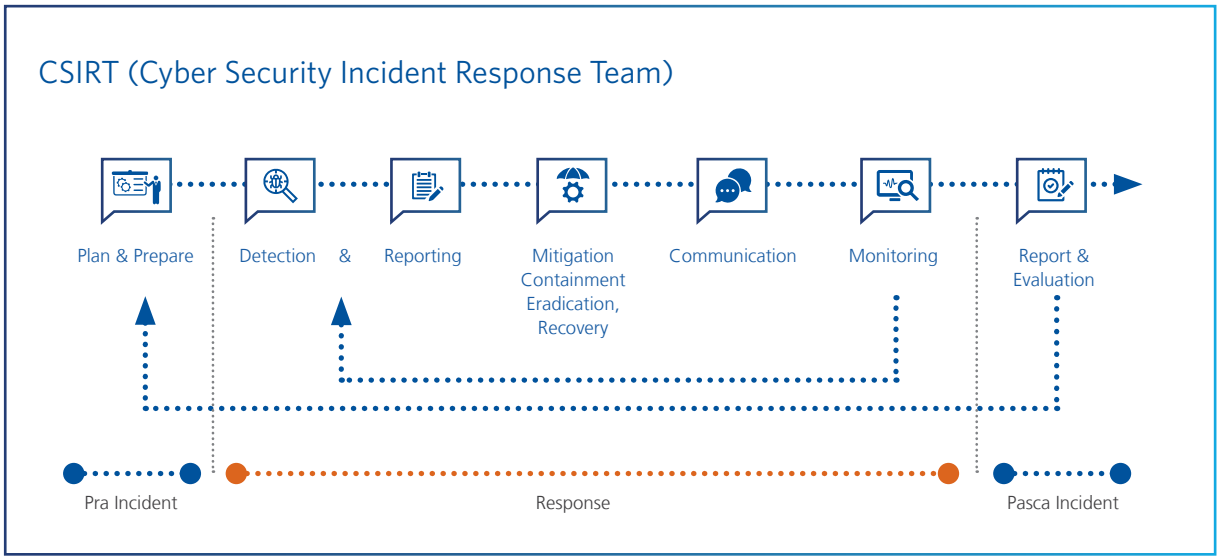

Untuk memastikan keamanan sistem BRI, maka aspek *security* wajib dimasukkan dalam setiap proses pengembangan aplikasi (*Software Development Life Cycle* - SDLC) baik pada tahap desain, pengembangan, dan pengujian aplikasi.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

Security in Every Stage of the DevOps Process

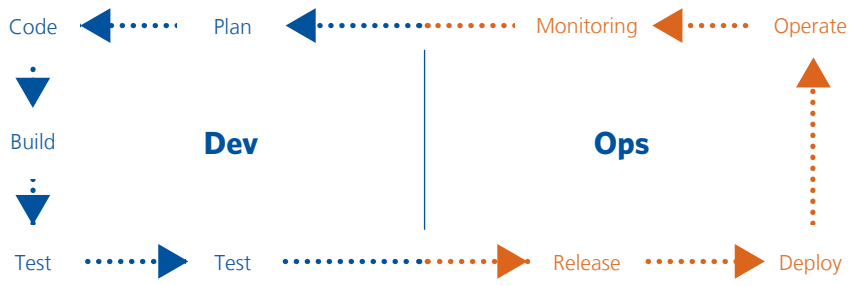

BRI memiliki fungsi/bagian khusus terkait Security Operation Center (SOC) yang melakukan monitoring terhadap *cyber threat* secara kontinu (24 jam, setiap minggu, selama 365 hari). Dalam melakukan monitoring keamanan cyber, BRI juga melakukan monitoring secara proaktif melalui layanan *threat intelligence service* dari provider yang berskala internasional. Selain itu, untuk memonitor dan memitigasi ancaman *brand abuse,* BRI memiliki program *brand protection* yang bertugas untuk memonitor penyalahgunaan brand di sosial media. Hal ini membuat BRI sejak tahun 2019 belum pernah terjadi adanya data breach.

BRI juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan identifikasi kerentanan sistem BRI dan review terhadap keamanan informasi BRI secara independen berupa *vulnerability assessment*, penetration test dan *cyber-attack simulation (red team)*.

Budaya Keamanan Informasi

Dalam rangka meningkatkan kepedulian pekerja BRI terhadap pengamanan informasi, BRI secara rutin melakukan program peningkatan kepedulian melalui berbagai bentuk dan media antara lain:

1. poster dan publikasi internal BRI,
2. e-learning kepada seluruh pekerja BRI,
3. webinar kepada seluruh pekerja BRI, dan
4. email phising campaign.

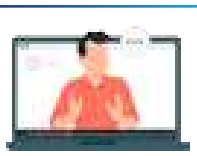
Video/Animasi

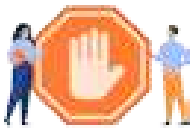
Poster

Webinar

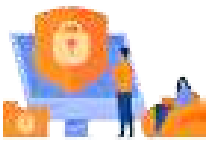
Cyber Drill

Security Campaign

Sebagai bentuk komitmen penegakan terhadap tata kelola keamanan informasi, BRI menerapkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran keamanan informasi yang menyebabkan dampak terhadap bisnis bank.

Digital, Teknologi Informasi & Operasi

BRI Cyber Security Talent Roadmap

Untuk meningkatkan kapabilitas BRI dalam menangani cyber security, BRI memiliki cyber security talent roadmap yang memastikan seluruh talent di bidang security sudah terstandarisasi dan tersertifikasi, dan memiliki skill sesuai standar internasional. BRI juga melakukan rekrutmen tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan sertifikasi di bidang cyber security. Sertifikasi information security internasional yang sudah dimiliki antara lain CEH, CHFI, ECIH, ECSA, ENSA, OFFICE, ISO 27001 Lead Auditor, ISO27001 Lead Implementer, CISSP, dll.

Dalam rangka memastikan governance terhadap keamanan informasi dan internasional standar pada proses di BRI, maka dilakukan sertifikasi ISO 27001:2013 antara lain pada ruang lingkup Big Data, BRIAPI Platform, Managing Event & Cyber Threat Monitoring, Card Production, Satellite Service Operation Department dan Data Center Infrastructure.

BRI juga aktif melakukan koordinasi dan kerjasama terkait cyber security dengan berbagai institusi negara dan komunitas antara lain dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), CSSP-SP Bank Indonesia, Forum Himbara, dan Forum Perbanas.

MANAJEMEN AKTIVA TETAP & PENGADAAN

Dengan jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 120 juta disertai dengan jumlah jaringan kantor lebih dari 9.000 kantor dan jumlah pekerja yang mencapai 125 ribu maka BRI memiliki skala operasional bisnis yang sangat besar. Untuk itu, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan bertanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan pengadaan operasional di BRI dan tercapainya pengelolaan aktiva tetap dan logistik BRI yang baik

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

KINERJA DIREKTORAT MANAJEMEN AKTIVA TETAP & PENGADAAN

RINGKASAN KINERJA & STRATEGI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan melaksanakan transformasi organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penataan peran/fungsi dalam Unit Kerja yang dibawahkan, dengan lebih mengedepankan governance yaitu memisahkan peran kebijakan dan operasional.

Pada tahun 2020 Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan mampu melaksanakan *cost efficiency*, dengan rata-rata sebesar 17,33 % atau sebesar Rp954,89 miliar.

Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan secara berkesinambungan juga meyempurnakan sistem informasi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada BRI serta yang paling utama melakukan Penyusunan Konsep Desain *Roadmap e-Procurement* BRI menuju *fully digital*.

STRATEGI 2021

Di tahun 2021, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan akan terus melanjutkan strategi terkait *cost efficiency* dan penyempurnaan sistem informasi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan.

BRI telah menetapkan 5 *Corporate Strategy* BRI tahun 2021 yaitu: *Asset Quality, Operational Efficiency, Selective Growth, Transaction Boost, Synergy* BRI *Group*. Dengan mengacu pada corporate strategy BRI 2021 tersebut, fokus strategi dan rencana kerja Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan tahun 2021 dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. *Data Quality: Cleansing Data Assets*, Optimalisasi BRIsmile, *Review* Ketentuan Kearsipan, Pengembangan aplikasi *Estimation Data Management*, Standardisasi Harga Perkiraan Sendiri;
2. *Operational Efficiency*: Mendorong penggunaan Aplikasi PaDI, Digitalisasi Bisnis Proses Kelogistikan, Optimalisasi Fungsi Koordinator Anggaran, Perbaikan Prosedur dan Metode Estimasi;
3. *Synergy* BRI *Group*: *Review* Ketentuan mengenai Kebijakan AT & Logistik yang dapat diaplikasikan di BRI Group, Optimalisasi Kerjasama dengan Perusahaan BRI Group baik di Bidang Pengadaan ataupun Pemanfaatan Aset BRI, *Benchmark* BRI Group untuk informasi kelogistikan dan standardisasi perhitungan HPS, Pemanfaatan Menara Gatsu oleh BRI Group, Integrasi Sistem Aplikasi Klaim Manajemen Asuransi dengan Perusahaan Anak.

TRANSFORMASI ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan ini semula terdiri dari 3 Unit Kerja yang dibawahkan yaitu Divisi Pengadaan Barang & Jasa, Divisi MAT & Pengadaan Properti dan Desk Estimasi menjadi 2 Unit Kerja yaitu *Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division* dan *Procurement & Logistic Operation Division*.

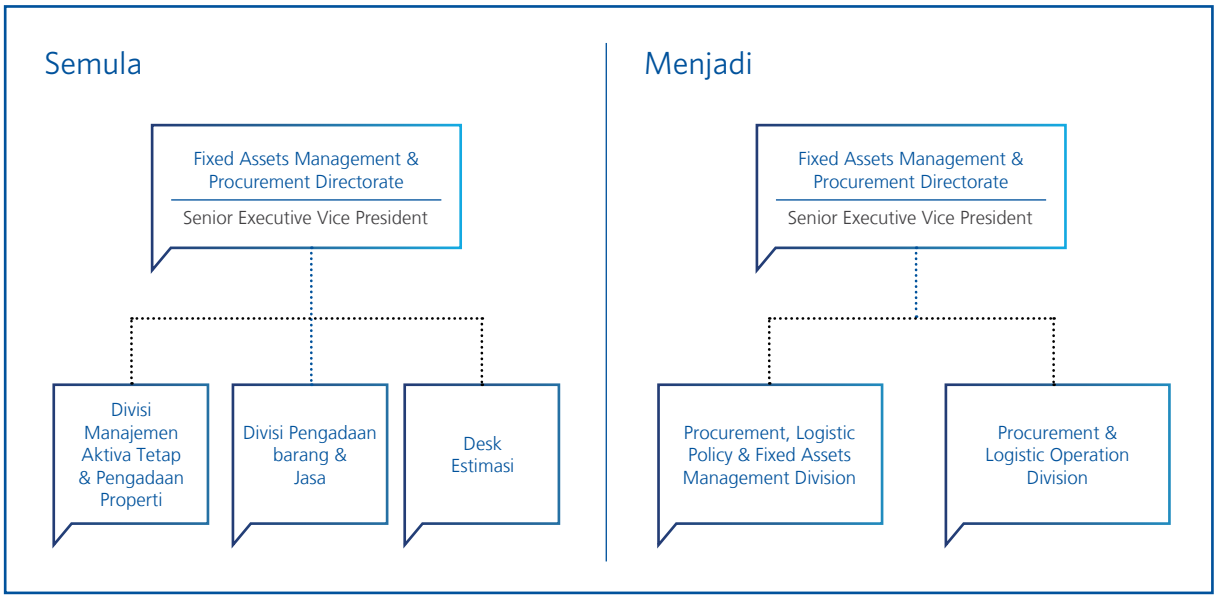

KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan Anggaran

Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan bertanggungjawab mengelola anggaran investasi dan eksploitasi non teknologi informasi (Koordinator Anggaran). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan berkolaborasi dengan Sub Koordinator Anggaran.

Realisasi dan RKA Investasi (Capex) dan Eksploitasi (Opex) Non TI yang dikelola oleh Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan 2018-2020:

Keterangan	2018		2019		2020	
	Realisasi	RKA	Realisasi	RKA	Realisasi	RKA
Capex (Rp juta)	2.371.220	4.764.317	1.215.188	5.153.804	1.909.951	4.319.838
Opex (Rp juta)	5.659.499	6.450.903	5.896.778	6.770.324	5.871.495	5.952.495
Total (Rp juta)	11.215.220	8.030.719	7.111.965	11.924.129	7.773.446	10.272.333

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Cost Efisiensi Pengadaan Barang & Jasa (target 10% terhadap anggaran)

Efisiensi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, BRI selalu berupaya untuk melakukan *cost efficiency* yang merupakan salah satu penerapan dari strategi *value for money*. Pada tahun 2020 Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan dapat melaksanakan *cost efficiency*, dengan rata-rata sebesar 17,33 % atau sebesar Rp954,89 miliar.

Jenis Pengadaan	2018		2019		2020	
	% Cost Efficiency	Rp Miliar	% Cost Efficiency	Rp Miliar	% Cost Efficiency	Rp Miliar
Barang & Jasa	22,11	848,8	16,46	1.170,6	17,16	950,10
Fasilitas Penunjang Gedung	20,88	4,8	17,25	4,4	17,50	4,79
Total	21,50	853,6	16,86	1.175	17,33	954,89

KINERJA NON KEUANGAN

Program kerja tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan yaitu:

1. Implementasi strategi pengadaan melalui kontrak payung untuk barang/jasa.
2. Implementasi strategi pengadaan melalui *multi vendor*.
3. Implementasi strategi pengadaan melalui *repeat order*.
4. Implementasi strategi pengadaan melalui *design and build* untuk renovasi gedung.
5. Penyempurnaan aplikasi pendaftaran rekanan *online* (berbasis *Website*).
6. Penyempurnaan metodologi dan standarisasi estimasi harga.
7. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Estimasi (*versioning*).
8. Pengembangan *new function* perhitungan biaya premi asuransi aktiva tetap seluruh unit kerja BRI pada BRISMILE
9. Migrasi *modular BRISMile* dari portal *SSO* ke *PN-based*
10. Penyusunan *blueprint* pengembangan aplikasi Bank Data Estimasi
11. Konsep Desain Arsitektur Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan
12. Penyusunan Konsep Desain Roadmap *e-Procurement BRI* menuju *fully digital*

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa dan Manajemen Aktiva Tetap

Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan secara berkesinambungan meyempurnakan sistem informasi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan (*versioning*) sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada BRI antara lain:

1

Unit kerja BRI dapat melakukan monitoring atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara online sehingga potensi terjadinya selisih pencatatan aktiva tetap dapat kendalikan.

2

Unit kerja BRI dapat melakukan pengelolaan aktiva tetap secara desentralisasi.

3

Unit kerja BRI dapat memonitoring progress klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap secara online.

4

Unit kerja BRI dapat melakukan secara mandiri proses penghapusbukuan aktiva tetap.

5

Unit kerja BRI dapat melakukan monitoring atas progress setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.

6

Unit kerja BRI dapat menyusun kebutuhan dan penganggaran secara sistem dan realisasi dapat dimonitor secara optimal.

7

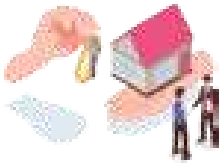

Unit kerja BRI dapat melakukan usulan sewa/ beli properti secara system

PENGELOLAAN AKTIVA TETAP & PENGADAAN BRI

Kebijakan Umum

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk merupakan pedoman dalam melakukan pengelolaan aktiva tetap dan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank BRI sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan BRI mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diberlakukan terhitung mulai bulan Maret tahun 2020. Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/ MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI memuat tata kelola aktiva tetap dan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dari disusunnya Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI adalah:

- Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
- Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.

Penyempurnaan terhadap Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan, perkembangan bisnis serta regulasi yang ada. Dengan demikian dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Pelaksanaan Pengelolaan Aktiva Tetap

Dalam melaksanakan pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta Pedoman Pelaksanaannya.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Kode Etik dalam Pengadaan Barang & Jasa

Kode etik pengadaan barang dan/atau jasa sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BRI dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BRI
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi:

1

Efisien

Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

2

Efektif

Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

3

Kompetitif

Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4

Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.

5

Terbuka

Pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

6

Adil dan Wajar

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.

7

Akuntabel

Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

8

Standardisasi Barang dan/atau Jasa

Barang dan/atau jasa yang akan diadakan berpedoman pada standardisasi barang dan/atau jasa dan/atau sudah digunakan oleh bank/perusahaan lain.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

9

Sentralisasi

Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Procurement & Logistic Operation Division, apabila dilaksanakan oleh unit kerja lain, maka harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip dari Pejabat yang Berwenang.

10

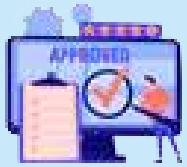

Desentralisasi

Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilimpahkan kepada unit kerja selain Procurement & Logistic Operation Division sampai pada batas kewenangan yang diberikan. Pelampauan terhadap kewenangan yang diberikan harus dimintakan persetujuan kepada Pejabat yang Berwenang.

11

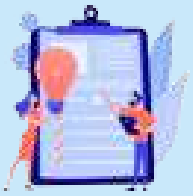

Ditentukan dalam DRP dan/atau RKAP

Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan apabila sudah tercantum/ditentukan dalam DRP dan/atau RKAP yang telah disetujui Komisaris. Dalam hal rencana pengadaan barang dan/atau jasa tidak tercantum dslam DRP dan/atau RKAP, maka pengadaannya dapat dilakukan setelah ada revisi DRP dan/atau RKAP atau realokasi anggaran (switching) atas persetujuan Pejabat yang Berwenang.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kegiatan pengadaan dengan prinsip-prinsip diatas, maka Bank BRI mengimplementasikannya melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi dan Independensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Senantiasa patuh terhadap regulasi internal dan eksternal
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan serta serta pengendalian risiko.
4. Senantiasa berpedoman pada Budaya Perusahaan bank BRI yang berlandaskan pada nilai-nilai:
   a. AKHLAK BUMN (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
   b. BRILIAN (*Integrity, Profesionalism, Trust, Innovation, Customer Centric*);
   c. *Good Corporate Governance*; dan
   d. Kode Etik Perusahaan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Prosedur/Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:

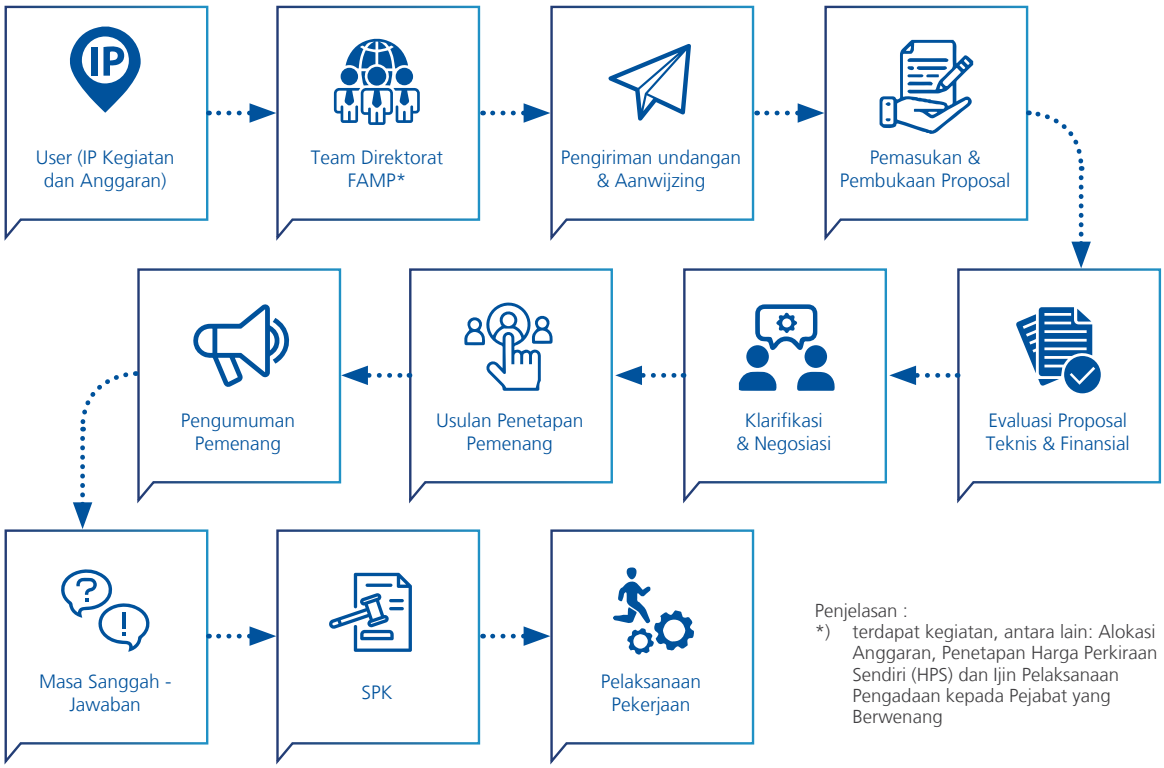

Penjelasan :
*) terdapat kegiatan, antara lain: Alokasi Anggaran, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Ijin Pelaksanaan Pengadaan kepada Pejabat yang Berwenang

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan dibutuhkan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan. Sejak tahun 2017, BRI telah membentuk Unit Kerja Estimasi, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.

Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.

Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.

Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.

Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menetapkan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah Good Corporate Governance.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Pengelolaan Rekanan

1. Pengelolaan rekanan mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon rekanan, monitoring dan evaluasi kinerja rekanan hingga penetapan daftar hitam rekanan, sehingga dengan adanya pengelolaan rekanan diharapkan BRI mempunyai database penyedia barang/jasa yang siap dan mampu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI.
2. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/ atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) BRI. SKT adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/ jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.
3. Penerbitan SKT dilakukan secara selektif kepada calon rekanan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak dibatasi dalam sektor kegiatan usaha tertentu sepanjang produk/jasa yang dihasilkan diperlukan oleh BRI.
4. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/ jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa tersebut lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Evaluasi dilakukan terhadap rekanan dengan variable penilaian meliputi *procurement process*, *quality*, *delivery*, *responsiveness*, dan *maintenance period*.
6. BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan SKT yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (SKT Online), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai dengan penerbitan SKT BRI melalui Aplikasi SKT Online.

Program Edukasi pada Mitra/rekanan (Vendor *Gathering*)

Pada tahun 2020, BRI telah melakukan *Vendor Gathering* melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Rekanan/Pemasok Bank BRI. Adapun pemaparan materi dari kegiatan vendor gathering yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Sharing* mengenai visi dan misi Bank BRI ke depan.
2. Sarana untuk mempererat jalinan kerjasama yang harmonis antara BRI dengan mitra kerja Bank BRI.
3. Forum komunikasi untuk mendapatkan masukan dari rekanan untuk perbaikan proses pengadaan di BRI.
4. Sosialisasi ISO 37001:2016 serta evaluasi terhadap rekanan.

Index Kepuasan Pelanggan Eksternal/Rekanan

Dalam rangka untuk meningkatkan standar kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Bank BRI, Bank BRI pada tahun 2020 telah melakukan survey kepada rekanan penyedia barang jasa dengan skor hasil survey sebesar 3.13 (skala maksimal 4).

Pendidikan & Sertifikasi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan maka perlu dilakukan penguatan pada mutu dan kualitas SDM. Penguatan ini dilakukan melalui pendidikan dan sertifikasi. Pendidikan-pendidikan tertentu wajib dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan antara lain: *supply chain manajement*, *negotiation skill*, tata cara estimasi, dll. Selanjutnya Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan akan melaksanakan sertifikasi profesi (sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasa, sertifikasi profesi estimasi, sertifikasi kearsipan, dan sertifikasi lainnya) secara ter-program baik sertifikasi nasional maupun internasional.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Penerapan ISO

Sertifikasi **ISO**

ISO 37001:2016	Anti Bribery Management System	Standar internasional mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Register No.SAB 00019 • Expired date 9 Agustus 2023
	Provision of Establishment Strategy and Policy (Inc. Vendor Mgt.)	Standar Internasional di bidang sistem manajemen mutu strategi dan kebijakan (incl. mgt, vendor) • Register No.10156337 • Expired date 25 November 2021
ISO 9001:2015	Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service	Standar Internasional di bidang sistem manajemen mutu persediaan, pembayaran, dan pengarsipan • Register No.10107144 • Expiry date 9 Desember 2020
	Provision of Cost Estimation Processes	Standar Internasional di bidang sistem manajemen mutu proses estimasi • Register No.10162162 • Expiry Date 28 November 2021

Laporan Pengadaan Barang & Jasa 2020

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka untuk pengadaan barang dan jasa dalam batas nilai tertentu, diterapkan mekanisme pengambilan keputusan bersama oleh para Pejabat Pemutus Pengadaan dalam suatu forum Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan adanya Putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan putusan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan secara lebih seksama, akuntabel dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Berikut data Komite Pengadaan Barang dan Jasa di BRI selama tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan (Rupiah penuh)	Jumlah Pengadaan
1	Komite Pengadaan I	1,251,622,516,000	3
2	Komite Pengadaan II	291,776,630,000	2
3	Komite Pengadaan III	1,636,457,658,359	31
4	Komite Pengadaan IV	1,520,381,761,583	107
Total		4,700,238,565,942	143

Audit Pengadaan Barang & Jasa

Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, Bank BRI senantiasa melakukan audit secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal BRI.

JARINGAN & LAYANAN

Perubahan era menjadi era digital disertai dengan kondisi pandemi Covid-19, menyebabkan transaksi nasabah mulai beralih dari Unit Kerja fisik ke mobile atau digital channel. Menghadapi hal tersebut, BRI terus melakukan optimalisasi Unit Kerja, baik Unit Kerja fisik maupun Digital Channel, termasuk mengoptimalkan peran Agen BRILink di seluruh Indonesia. Perubahan format Unit Kerja juga akan terus dilakukan dengan memperhatikan segmen dan profil nasabah, sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah juga semakin meningkat.

Jaringan & Layanan

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN TAHUN 2020

Untuk mendukung visi dan misi Perusahaan yaitu "*Integrated Financial Solution*" di tahun 2020, BRI melalui Direktorat Jaringan & Layanan menetapkan roadmap strategis yang bertemakan *Digital Transformation, Capturing New Business Model, serta Improving Digital Capabilities.*

Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, sebagai bagian dari digitalisasi bisnis proses dan transformasi di Unit Kerja, BRI telah melakukan optimalisasi Unit Kerja dengan mengalihkan layanan Unit Kerja fisik ke *digital channel* serta mengoptimalkan peran agen branchless banking BRI. Hal ini tercermin dengan adanya penurunan jumlah Unit Kerja fisik dengan CAGR sebesar 5% sejak tahun 2017, disertai dengan adanya pertumbuhan jumlah *digital channel* seperti penambahan 2000 CRM dan 44.685 EDC di tahun 2020, serta pertumbuhan Agen BRILink menjadi sebesar 504.233 Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari layanan Agen BRILink, transaksi finansial yang dihasilkan pun tumbuh sekitar 39,57% dari 521,32 juta transaksi di tahun 2019 menjadi 727,62 juta transaksi di tahun 2020, dengan sales volume transaksi BRILink mencatatkan nilai Rp843,21 triliun. Dari transaksi tersebut, BRI memperoleh *fee-based income* dari Agen BRILink sebesar Rp1,16 triliun di akhir Desember 2020. Nilai tersebut tumbuh 47,04% dari periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp788,71 miliar. Peningkatan ini berdampak positif terhadap pendapatan BRI secara keseluruhan. Selain itu, Agen BRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp13,27 triliun, tumbuh 57.49% dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp8,4 triliun.

Tidak hanya dari sisi pengembangan channel, BRI juga terus meningkatkan kualitas layanan dan operasional di Unit Kerja. Untuk memonitor dan mengetahui progres kualitas layanan, BRI melakukan survey pengukuran kualitas layanan, baik secara internal maupun oleh pihak ketiga, yaitu Pengukuran Konsistensi Kualitas Layanan Unit Kerja BRI dengan metode *Mystery Shopping*, serta *Survey* Kepuasan Nasabah. Di sisi operasional pengelolaan kas, Bank BRI menoreh prestasi terbaru sepanjang sejarah di tahun 2020 dimana *Cash Ratio* pada posisi Desember 2020 mencapai 1,98% yang berarti efektivitas pengelolaan kas sangat baik. Pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya proses handover pengelolaan ATM Kantor Wilayah ke CRO Terpusat, pengembangan sistem dan strategi membuka operasional layanan di hari libur lebaran.

Selain itu BRI telah meningkatkan keamanan sistem informasi terutama menjaga data nasabah melalui Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Badan Sertifikasi BSI. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

STRATEGI 2020 & STRATEGI 2021

Dalam merealisasikan visi dan misi Perusahaan, Roadmap dan Program Kerja Utama BRI di Direktorat Jaringan & Layanan menetapkan arahan Roadmap strategis yang bertemakan *Digital Transformation, Capturing New Business Model*, serta *Improving Digital Capabilities*. Hal ini tercermin dari optimalisasi dan transformasi layanan Unit Kerja dari channel fisik ke digital channel.

Di tahun 2021, BRI akan melanjutkan kembali transformasinya dengan menerapkan inisiatif-inisiatif strategis seperti, *End-To-End Branch Operating Model, Customize Branch Formats, Optimize Distribution Network Footprints, Automate & Digitize Business Processes, Accelerate Migration Of ATM/CRM To Cross-Industry Utility, Enhance Digital Sales & Marketing Capabilities,* serta pengembangan Brilink 2.0. Di sisi kualitas layanan, BRI juga akan menerapkan inisiatif *WeAreShine Service* dan *Automate and Digitize Complaint Management.*

Jaringan & Layanan

URAIAN PENCAPAIAN DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN 2020

Direktorat Jaringan dan Layanan BRI merupakan salah satu Direktorat yang mempunyai fungsi vital, diantaranya memastikan seluruh aktivitas dan layanan operasional di seluruh jaringan Unit Kerja berjalan dengan baik, termasuk layanan Agen BRILink. Untuk mendukung visi dan misi Perusahaan yaitu ***"Integrated Financial Solution"*** di tahun 2020, Direktorat Jaringan & Layanan menetapkan roadmap strategis yang bertemakan *Digital Transformation, Capturing New Business Model,* serta *Improving Digital Capabilities*. Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Jaringan & Layanan di-*support* oleh 5 (lima) Divisi yaitu, Distribution Network Division, Services & Contact Center Division, Brilink Network Division, Payment Operation Division, Credit Operation Division.

Tren Komposisi Transaksi Jaringan Kerja

(% terhadap Total Transaksi BRI)

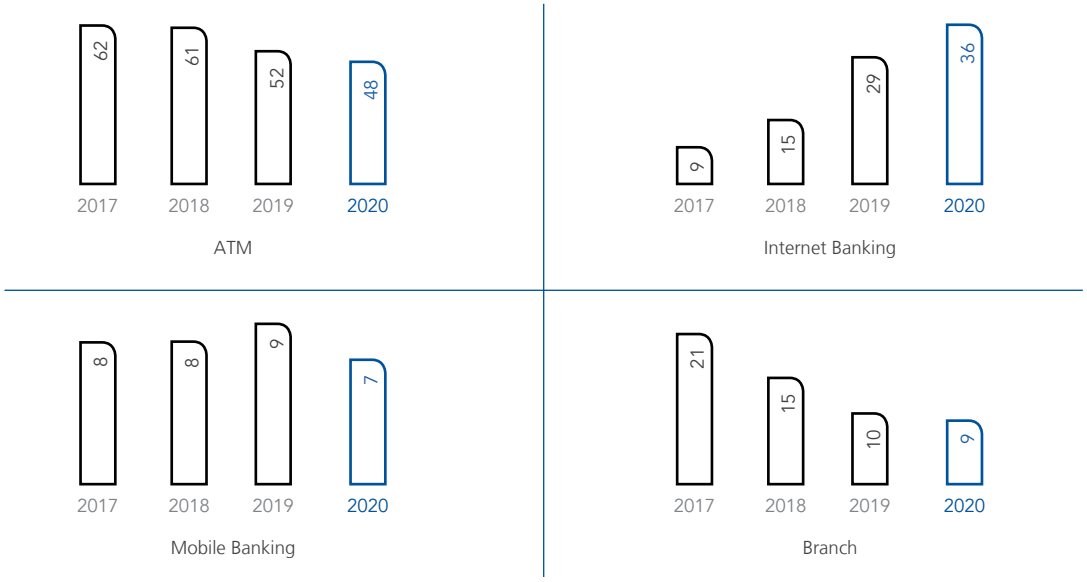

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan adanya perubahan pola transaksi pada nasabah. Hal iIni tercermin dengan adanya migrasi transaksi nasabah dari Unit Kerja (*Branch*) ke Digital Channel seperti ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking.*

Untuk merespons hal tersebut, BRI sejak tahun 2017 telah melakukan optimalisasi Unit Kerja. Sampai dengan Desember 2020, jumlah Unit Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Jaringan & Layanan

Jumlah Outlet*

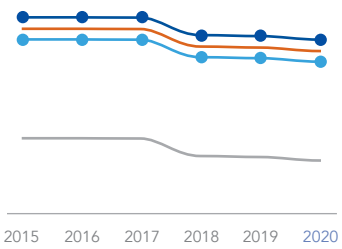

Retail Channels
- 467 Branches**
- 611 Sub Branches**
- 547 Cash Offices
- 120 Temporary Outlets
- 397 Payment Point
- 57 E-Buzz

Micro Channels
- 5,382 BRI Units
- 1,867 Teras BRI
- 132 Teras Keliling
- 4 Teras Kapal
- 504,233 BRILink Agents

E-Channels
- 16,880 ATMs
- 5,809 CRMs
- 198,785 EDCs
- 20 Hybrid Machines
- 100 Self-Service Banking Machines

*) As of Des 2020
**)Include overseas

Dalam pengelolaan E-Channel, BRI juga fokus terhadap *reliability* perangkat e-channel untuk mendukung produktivitas. Hingga bulan **Desember 2020**, pencapaian *reliability e-channel* adalah sebesar **104,31% (ATM 100%, CRM 105,29%, EDC 105,98%)** dan pencapaian produktivitas e-channel adalah sebesar **100,43% (ATM 100%, CRM 101,29%, EDC 100%).**

Jumlah E-Channel
(dalam ribu)

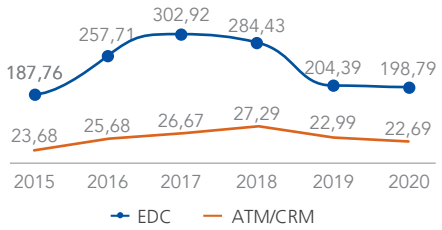

Dalam hal kuantitas E-Channel, Direktorat Jaringan & Layanan juga melakukan *Outlet Expansion* CRM dan EDC dengan penambahan perangkat CRM sebanyak 2.000 unit dan penambahan perangkat EDC sebanyak 44.685 unit yang terdiri dari 25.000 EDC BRILink serta 19.685 unit EDC untuk Program Pemerintah. Selain itu, dalam rangka peremajaan mesin ATM, juga dilakukan penonaktifan ATM terhadap 2.304 unit perangkat ATM yang sudah tidak layak operasional dimana usia perangkat ATM melebihi 5 tahun.

Dalam rangka layanan *branchless banking*, Direktorat Jaringan dan Layanan juga melakukan pengelolaan Agen BRILink, yaitu Agen *branchless banking* BRI yang merupakan perpanjangan tangan BRI untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Inklusi Keuangan) dan LKD (Layanan Keuangan Digital) serta untuk menjaga kedaulatan Rupiah. Pengelolaan dilaksanakan dengan model kemitraan, sehingga kerja sama yang dilakukan merupakan pola kerja sama yang *win-win-win*: masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan yang dapat diandalkan, para mitra mendapatkan penghasilan tambahan, dan BRI dapat memperluas jaringannya kepada masyarakat *unbanked* secara efisien.

Selama tahun 2020, Program dan Strategi Utama Agen BRILink diantaranya

Jaringan & Layanan

1. Peningkatan Kualitas Agen BRILink
   BRI fokus pada peningkatan profitabilitas dengan menjaga kualitas dan produktivitas para Agen BRILink. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja serta menjaga kelancaran dalam operasional Agen BRILink kepada masyarakat. Langkah yang telah diambil antara lain adalah klasifikasi Agen BRILink berdasarkan tingkat transaksi dan aktivitasnya serta penyesuaian skema insentif berbasis klasifikasi tersebut. Hal ini terbukti telah membantu mendorong Agen BRILink untuk berkompetisi dalam meningkatkan peringkatnya.

2. Perbaikan Layanan Agen BRILink
   Perkembangan teknologi saat ini dengan paradigma *Internet of Things*, Agen BRILink mengedepankan akuisisi agen berbasis Android *mobile platform* yang lebih aman, efisien, dan andal yang disebut dengan BRILink Mobile. BRILink Mobile juga diharapkan dapat menarik minat generasi milenial untuk ikut serta menyukseskan program keuangan inklusif. Melalui *platform* ini, BRI telah melakukan pengayaan layanan serta peningkatan reliabilitas di sisi *back-end*. Layanan-layanan baru dan inovatif yang telah muncul di Agen BRILink antara lain *referral* pinjaman ultra-mikro serta *top-up* tabungan emas, selain layanan dan fitur lainnya.

3. Dukungan terhadap Program Pemerintah
   BRI tetap konsisten dalam peran sertanya mendukung program peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat sesuai dengan program Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan dan LKD Bank Indonesia. Selain itu BRI melalui Agen BRILink juga berpartisipasi aktif dan bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah untuk bersama-sama menyalurkan bantuan pemerintah kepada para penerima manfaat.

Selain strategi di atas, BRI juga memfokuskan perhatiannya pada segmen ultra mikro. Segmen yang sangat berperan dalam perekonomian ini terdampak cukup signifikan akibat pandemi. Oleh karena itu, BRI telah melakukan beberapa inisiatif untuk berkolaborasi dengan beberapa pelaku pembiayaan ultra-mikro lainnya untuk memperluas jalur distribusi produk dan layanan ultra mikro melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, di tengah-tengah komunitas segmen tersebut.

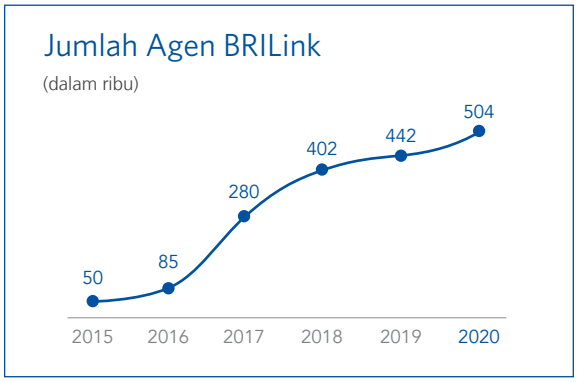

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 504.233 Agen BRILink di penjuru tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 124.720 Agen BRILink EDC dan 379.513 Agen BRILink Mobile. Terjadi peningkatan jumlah Agen BRILink sebesar 19,44% dibandingkan posisi yang sama di tahun 2019. Respon masyarakat sangat besar untuk menjadi Agen BRILink, sejalan dengan manfaat yang akan diperolehnya.

Transaksi finansial Agen BRILink tumbuh 39,57% dari 521,32 juta transaksi di tahun 2019 menjadi 727,62 juta transaksi di tahun 2020. Peningkatan jumlah transaksi finansial ini mencerminkan layanan Agen BRILink yang mudah, dekat dan cepat untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial masyarakat.

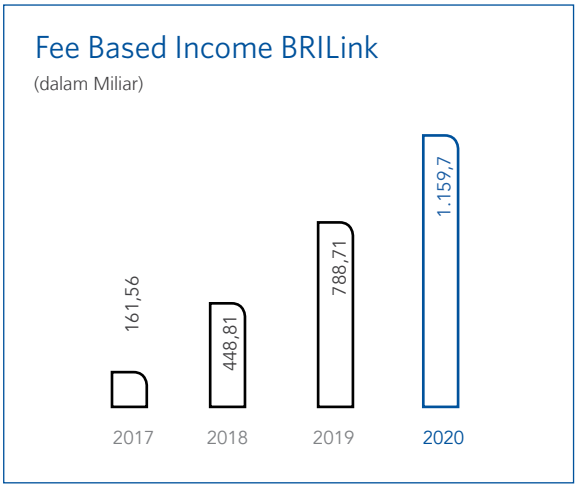

Jaringan & Layanan

Dari kinerja Agen BRILink, BRI memperoleh fee-based income sebesar Rp1,16 triliun di akhir Desember 2020. Nilai tersebut tumbuh 47,04% dari periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp788,71 miliar. Peningkatan ini berdampak positif terhadap pendapatan BRI secara keseluruhan. Selain itu, Agen BRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp13,27 triliun, tumbuh 57,49% dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp8,4 triliun. Sementara itu sales volume dari transaksi BRILink mencatatkan nilai Rp843,21 triliun.

Agen BRILink telah menjangkau lebih dari 54 ribu desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 12 ribu BUMDes telah menjadi Agen BRILink. Luasnya jaringan yang tersebar ini membantu Agen BRILink memberikan dampak positif dalam mempercepat penyaluran kredit UMKM dan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 antara lain, Agen BRILink dapat melayani kredit UMKM melalui sistem referral pinjaman di masyarakat sekitar. Dengan berkoordinasi dengan RT/RW setempat, BRI melalui Agen BRILink membantu masyarakat yang terdampak adanya kondisi Covid-19 melalui penyaluran sembako kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

Selain fokus pada kualitas dan kuantitas jaringan Unit Kerja, Bank BRI juga memberikan perhatian yang serius terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh nasabah pada semua *channel* layanan, khususnya pada *touch point* dimana terjadi interaksi antara nasabah dengan bank. Implementasi nilai *Customer Centric* dilakukan dengan meningkatkan *people capabilities*, memperbaiki *business process*, serta menciptakan *premises* yang lebih nyaman kepada nasabah. Seluruh upaya yang dilakukan bermaksud untuk menciptakan standarisasi layanan serta meningkatkan kepuasan nasabah pada semua channel layanan sehingga mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah rekening (*new account*), meningkatkan penggunaan rekening (*usage*), atau menambah saldo pada rekening (*top-up*) sehingga dampak finansialnya adalah CASA dan *Fee Based Income* BRI.

Pada tahun 2020, juga telah dilakukan berbagai inisitiaf untuk meningkatkan kualitas layanan BRI, yaitu:

- **Peningkatan *People Capabilities***, melalui JakartaSHine, JavaSHIne, dan IndonesiaSHine yang merupakan program peningkatan kualitas layanan dan ops unit kerja pada aspek2 People, Process, Premises dan parameter operasional sehingga nasabah dapat menikmati keseragaman dan konsistensi layanan di seluruh unit kerja BRI.
- **Pengembangan *Service Culture***, melalui BRI Customer Day, yaitu kumpulan aktivitas menyemarakkan layanan unit kerja dalam satu wilayah kerja tertentu diselaraskan dengan tema-tema setempat untuk meningkatkan *customer engagement* nasabah dengan unit kerja BRI tempat nasabah biasa bertransaksi.
- **Peningkatan *Service Process***, melalui *business process reengineering* berupa penyederhanaan prosedur dan pengaturan alur proses layanan di unit kerja untuk mempermudah dan mempercepat waktu layanan kepada nasabah.
- **Peningkatan dan Perbaikan *Premises***, melalui kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sarana infrastruktur unit kerja sehingga nasabah dapat lebih merasakan kenyamanan bertransaksi.

Untuk memonitor dan mengetahui progress kualitas layanan Bank BRI, dilakukan survey pengukuran kualitas layanan, baik secara internal maupun oleh pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Pengukuran Konsistensi Kualitas Layanan Unit Kerja BRI
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Mystery Shopping*, untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas layanan Unit Kerja yang meliputi *People* (CS, Teller, Satpam), *Process*, E-Channel (ATM/CRM), dan *Premises*.
2. Survey Kepuasan Nasabah
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Telephonic Interview* (CATI) terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank BRI (maksimal 3 hari setelah bertransaksi).

Pengukuran ini merupakan bentuk kepedulian BRI terhadap kualitas layanan, termasuk dibandingkan dengan kompetitor. Peningkatan kualitas layanan dilakukan untuk menempatkan layanan BRI selalu berada pada level terbaik di industri perbankan.

Bank BRI juga bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara

Jaringan & Layanan

objektif dengan menggunakan variabel pembanding, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor di industri perbankan, dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 sebagai berikut:

- *Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):*
  a. Peringkat 3 dari 7 bank untuk *Customer Loyalty Index* (CLI)
  b. Peringkat 3 dari 7 bank untuk *Satisfaction, Loyalty, and Engagement Index* (SLE Index)

- *Customer Experience Service Quality Index (CX-SQI) 2020 by Carre:*
  a. Peringkat 2 dalam kategori *Brand Usage* (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi setor-tarik tunai di kantor cabang BRI.
  b. Peringkat 1 dalam kategori *Brand Usage* (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi transfer dana di kantor cabang BRI.
  c. Peringkat 2 untuk *Customer Experience Service Quality Index* (CX-SQI).

- Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):
  a. Peringkat 3 untuk *Convenient Branch Experience*
  b. Peringkat 3 untuk *Overall E-Banking*
  c. Peringkat 1 untuk *Internet Banking*

- Penghargaan bidang contact center sebagai berikut:
  1. Peringkat 2 *Wow Brand Award* kategori *Call Center*
  2. Peringkat 4 *Top Brand Award* kategori *Call Center*
  3. Peringkat 4 *Marketing Research* Indonesia (MRI) kategori *Call Center*
  4. *Contact Center World* (CCW) Region Asia Pacific *Category*:
     a. *Best Sales Professional Silver Winner*
     b. *Best IT Support Professional Bronze Winner*
     c. *Green Contact Center Bronze Winner*
     d. *Best Self Service Technology Bronze Winner*
     e. *Best Sales Campaign Bronze Winner*

Tidak hanya kualitas layanan, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat, BRI senantiasa mengembangkan sistem operasionalnya. Selama tahun 2020, Bank BRI melakukan pengembangan sistem dan operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Kas

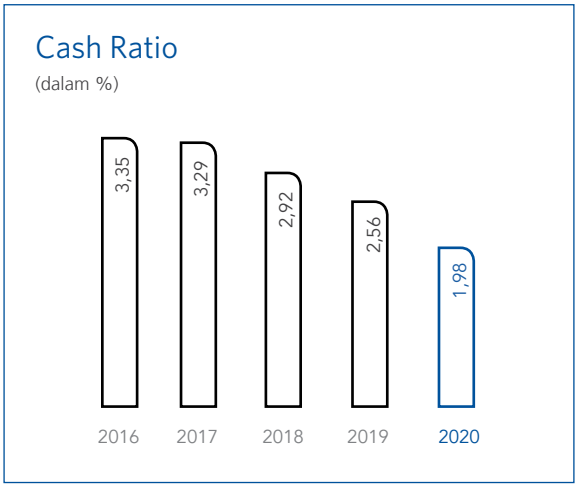

Bank BRI menoreh prestasi terbaru sepanjang sejarah di tahun 2020 dimana *Cash Ratio* pada posisi Desember 2020 mencapai 1,98% artinya efektivitas pengelolaan kas sangat baik. Pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya proses *handover* pengelolaan ATM Kantor Wilayah ke CRO Terpusat, pengembangan sistem dan strategi membuka operasional layanan di hari libur lebaran.

2. Optimalisasi Jaringan dan Infrastruktur *Payment System*

Bank BRI secara rutin meninjau produktivitas dan stabilitas jaringan untuk kegiatan payment system seperti transaksi transfer dana rupiah (RTGS & Kliring), transfer dana mata uang valas (*remittance*) dan settlement treasury serta sentralisasi proses rekonsiliasinya. Langkah strategis yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan dan business *continuity plan*, pada tahun 2020 Bank BRI telah mengimplementasikan infrastuktur baru *back up system* pada jaringan utama (*data center*) dan jaringan sistem cadangan (*Disaster Recovery Plan*).

3. Efisiensi *Over Head Cost*
   Penggunaan biaya lebih fokus pada pengembangan jaringan layanan yang mendukung pertumbuhan transaksi dan pengembangan infrastruktur digital yang lebih efisien dengan memprioritaskan biaya yang digunakan untuk inisiatif strategis yang sejalan dengan strategi jangka panjang. Selama tahun 2020 BRI telah melakukan *re-engineering* bisnis proses kegiatan operasional melalui enhancement sistem yang berdampak pada efisiensi *over head cost* seperti pengelolaan inventori surat berharga & kartu.

4. Operational Excellence
   Operasional BRI sejak tahun 2012 telah memperoleh Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001:2008. Seiring dengan berjalannya waktu, standarisasi kualitas mutu ISO 9001:2008 berubah menjadi Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2017 untuk 10 (sepuluh) ruang lingkup meliputi *Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, E-Banking Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and E-Banking Settlement, Cash Operation, ATM Cash Operation and Trade Processing Centre* dari Badan Sertifikasi PT. Lloyd's Register Indonesia.

   Selain itu BRI telah meningkatkan keamanan sistem informasi terutama menjaga data nasabah melalui Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Badan Sertifikasi BSI. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

Dalam hal fungsi operasional kredit, di tahun 2020 Direktorat Jaringan & Layanan juga fokus untuk menjalankan strategi inisiatif dan program kerja sebagai berikut, seperti:

1. Penambahan fitur/modul baru BRISpot Mikro
2. Penambahan fitur/modul baru BRISpot Konsumer
3. Penambahan fitur/modul baru BRISpot SME
4. *One Gateway Access Insurance Application* dimana melakukan simplifikasi aplikasi asuransi kredit menjadi 1 pintu
5. BRI *Document Management System* (BRIMEN) sebagai strategi inisiatif untuk melakukan digitalisasi dan sentralisasi dokumen kredit.

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Di tahun 2021, Direktorat Jaringan & Layanan akan fokus pada Strategic Inisiatif Utama sebagai berikut:

1. *End-To-End Branch Operating Model*
   Merupakan perubahan bisnis model operasional Unit Kerja secara *end to end*, yaitu

   a. Perubahan pola Unit Kerja dari "*Services*" ke "*Sales*" yaitu dengan memperkenalkan formasi jabatan baru, *Universal Banker*.
   b. Melakukan Migrasi Transaksi dari Unit Kerja ke Digital atau Remote Channel.
   c. Pengembangan Cluster Model Sales dengan mengimplementasikan *Joint Sales Planning* diantara Unit Kerja yang berada di area/wilayah/ *cluster* yang sama.

2. *Customize Branch Formats*
   Yaitu penyesuaian kembali format Unit Kerja berdasarkan segmentasi nasabah dengan memperkenalkan Format Unit Kerja Umum (*General Branch Formats*) dan Format Unit Kerja Khusus (*Specialist Branch Formats*).

3. *Optimize Distribution Network Footprints*
   Yaitu mengoptimalkan Unit Kerja yang ada saat ini sehingga tidak terjadi overlapping area Unit Kerja dengan mempertimbangkan kapasitas dan peluang transaksi ke depan, pertumbuhan nasabah dan kapasitas tenaga pemasar, serta *Micro Market Attractiveness.*

Jaringan & Layanan

4. *Automate & Digitize Business Processes*
   Yaitu melakukan automasi dan digitasi bisnis proses transaksi nasabah di Unit Kerja. Hal ini bertujuan menciptakan *User Experience* nasabah yang baru secara *paperless.*

5. *Accelerate Migration Of ATM/CRM To Cross-Industry Utility*
   Yaitu percepatan migrasi ATM ke utilitas lintas industri yang bertujuan untuk mengurangi biaya pemeliharaan (*maintenance cost*).

6. *Enhance Digital Sales & Marketing Capabilities*
   Yaitu mengembangkan pemasaran berbasis digital sehingga mampu meningkatkan akuisisi nasabah serta melakukan *maintenance* nasabah secara digital.

7. Brilink 2.0
   Yaitu program Pengembangan Agen Brilink untuk terlibat lebih aktif dalam melakukan pemasaran produk BRI yang beragam (seperti menjadi *basic advisory*, melakukan *referral* kepada tenaga pemasar BRI) serta pengembangan kemampuan dan manajemen kinerja yang terstandarisasi dan sistematis.

8. *WeAreShine Service Initiative*
   Inisiatif WeAreShine adalah upaya menjaga kualitas layanan yang merata di setiap touch point yang meliputi Kantor BRI, *Contact Center*, serta *electronic channel*. Kualitas yang dijaga senantiasa mengikuti kebutuhan dan ekspektasi nasabah. Implementasi program WeAreShine adalah berupa *assurance* terhadap aspek *People, Process, Premises*, dan *Operational activities* yang bertujuan memastikan setiap aspek selaras dalam membentuk *excellent customer experience*.

9. *Automate and Digitize Complaint Management*
   Values dari *Service Recovery* yang diberikan Bank BRI kepada nasabah yang mengalami kendala bertransaksi adalah mudah, cepat, dan akurat. Pada saat menyampaikan pengaduan, nasabah disediakan sarana *self-service* melalui *chatbot* Sabrina, mobile app BRImo dan Internet Banking BRI. Selanjutnya otomasi penyelesaian komplain pada tahap analisa transaksi, investigasi, dan proses settlement menghasilkan proses penanganan komplain yang singkat.

CHANGE MANAGEMENT & TRANSFORMATION OFFICE

TRANFORMATION JOURNEY

Hampir tidak ada sektor bisnis termasuk perbankan yang luput dari dampak pandemi yang tak terduga dan masif. BRIvolution menjadi journey sekaligus strategi BRI untuk mewujudkan aspirasi dalam menghadapi tantangan ke depan.

Change Management & Transformation Office

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT CHANGE MANAGEMENT & TRANSFORMATION OFFICE

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Direktorat Change Management & Transformation Office terus mengawal dan menjadi katalisator inisiatif strategis perusahaan. Pada tahun 2020, total terdapat 96 inisiatif strategis yang masuk dalam kawalan Direktorat Change Management & Transformation Office. Seluruh inisiatif strategis tersebut tentunya sebagai kunci keberhasilan untuk terus mewujudkan strategi perusahaan yang dimiliki dan survive dengan berbagai penyesuaian maupun perubahan bisnis global agar BRI menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Direktorat CMT merumuskan BRIvolution 2.0 sebagai aspirasi baru untuk melanjutkan komitmen program transformasi BRI dengan visi menjadi "The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia" dan "Champion of Financial Inclusion".

Divisi Change Management (CMG) terus melalukan proses transformasi secara cepat dan tepat dengan 12 inisiatif strategis yang dimiliki sepanjang tahun 2020 dengan 2 proyek unggulan yaitu World Class Wholesale Banking (WCWB) dan BRIvolution 2.0.

Divisi Project Management Office (PMO) mengawal proses maupun journey implementasi sebuah proyek dan menjadi katalisator inisiatif strategis BRI dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan mulai dari tahap inisiasi sebuah proyek hingga pasca proyek.

STRATEGI 2020 & STRATEGI 2021

Direktorat CMT akan mengusung tema aspirasi strategis *Survival & Growth* dimana strategi untuk periode 2021-2022 adalah "*Strengthening the Core*" dan strategi 2023-2025 "*Accelerating the Growth*" sehingga dapat terus mendorong pencapaian utama dan langkah positif bagi BRI untuk terus memberi makna Indonesia.

Change Management & Transformation Office

PRELIMINARY 2016	BRIVOLUTION 1.0 Aspirasi 2017-2020	BRIVOLUTION Strengthening 2020	GOING TO BRIVOLUTION 2.0 2021-2025

BRI tetap menunjukkan kinerja yang cemerlang selama 3 tahun terakhir sejak dicanangkan BRIvolution. Sebagai perwujudan visi BRI menjadi "*The Most Valuable Bank in Southeast Asia*" dan "*Home to the Best Talent*", Direktorat Change Management & Transformation Office (CMT) memiliki aspirasi BRIvolution 1.0 dengan fokus utama transformasi pada *digital* dan *culture*. Transformasi *digital* dilakukan dengan spirit mengefisiensikan proses bisnis dan mempersiapkan BRI untuk selalu menjadi yang terdepan. Sedangkan transformasi *culture* ditujukan untuk mendorong penciptaan budaya berbasis kinerja.

Upaya untuk mewujudkan Transformasi ini tidak mudah. Berbagai tantangan datang seakan ingin menguji Transformasi yang tengah berjalan. Ketidakpastian ekonomi, langkah inovasi dari *peers* maupun *fintech*, perilaku pasar dan nasabah yang cepat berubah, serta situasi berbisnis yang semakin sulit akibat Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan bagi pencapaian kinerja BRI yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* BRI 2018 – 2022.

Faktanya, saat ini terdapat *gap* pencapaian kinerja yang memaksa BRI untuk meninjau kembali aspirasi BRIvolution 1.0. Manajemen menyepakati untuk merevisi aspirasi BRIvolution 1.0 dengan mulai mempersiapkan BRIvolution 2.0 yang akan dimulai pada tahun 2021. Urgensi untuk mencapai keberhasilan transformasi BRI telah mendorong *Board of Management* (Direksi dan SEVP BRI) bersama *Board of Commisioners* (Dewan Komisaris BRI) mengadakan Board Forum pada tanggal 2 Oktober 2020 di Bandung.

Kegiatan Board Forum membahas tentang refleksi dari *journey* BRIvolution 1.0 (*Look Back*), arah perkembangan perbankan sebagai dampak dari Covid-19 dan implikasinya bagi BRI (*Look Around*), serta pembahasan strategi utama untuk pertumbuhan jangka panjang BRI (*Look Ahead*) dengan fokus kepada *business initiatives* terkait CASA, *Credit*, *Cross-sell, Customer service* dan *New growth engine* serta *Culture & capabilities* sebagai *core enablers*.

Tantangan transformasi yang dihadapi pada tahun 2016 berbeda dengan tantangan transformasi yang dihadapi saat ini, BRI menghadapi lima tren tantangan yang semakin meningkat, yaitu pertumbuhan perbankan yang lebih lambat, profitabilitas dan likuiditas BRI semakin tertekan, perubahan preferensi nasabah dengan bertumbuhnya nasabah yang *digital savvy*, potensi pertumbuhan bisnis pada 14 kota besar dan peningkatan kompetisi non tradisional. Sedangkan pada saat ini kita dihadapkan dengan dampak Covid-19 yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara global, peran sebagai bank BUMN untuk menjalankan tanggung jawab social dari pemerintah, serta tantangan sektor perbankan terhadap dinamika perubahan lingkungan bisnis era '*New Normal*' yang membutuhkan kompetensi dan cara berbisnis yang berbeda.

Change Management & Transformation Office

Direktur Utama BRI, Sunarso menyampaikan hasil peninjauan atas pelaksanaan transformasi. Atas pelaksanaan BRIvolution 1.0 dimana secara umum baik, namun masih belum seluruh program terlaksana sehingga membutuhkan penajaman (*sharpening*) atas Inisiatif Strategis yang ada. Transformasi bisa menjadi suatu dilema jika tidak disikapi dengan *spirit* bahwa transformasi harus difokuskan pada keberlangsungan jangka panjang (*sustainability*) bisnis BRI. Komitmen untuk melanjutkan program transformasi BRI yang telah menjadi Bank dengan 8 perusahaan anak saat ini membutuhkan orkestrasi sumber daya yang dibangun secara sistematis.

Transformasi *digital* dilakukan dengan *spirit* mengefisienkan proses bisnis dan mempersiapkan BRI untuk selalu menjadi yang terdepan. Sedangkan transformasi *culture* ditujukan untuk mendorong penciptaan budaya berbasis kinerja. Hal yang harus dimiliki setiap Individu dan Unit Kerja BRI setidaknya mencakup 3 hal, fokus kepada KPI sebagai target yang harus diraih, menyusun dan menjadikan Inisiatif Strategis sebagai cara-cara untuk menuju pencapaian target, serta membangun *culture* yang mendukung percepatan pencapaian target. Kondisi Covid-19 harus disikapi dengan penetapan strategi *survival* pada tahun 2021 – 2022 yang diawali dengan melaksanakan *business follows (government) stimulus*, sedangkan program transformasi selanjutnya diarahkan untuk BRI tumbuh lebih sehat dan sustain pada 3 tahun berikutnya.

Direktorat CMT akan mengawal dan manjadi katalisator inisiatif strategis BRI. Implementasi inisiatif strategis mendukung peran BRI sebagai *Agent of Development* untuk dapat menciptakan *economic value* dan *social value* serta fokus kepada segmen mikro untuk memperluas akses layanan keuangan formal ke masyarakat. Transformasi berikutnya mengarah pada mesin pertumbuhan baru di segmen ultra mikro, termasuk *micro payment*, peningkatan CASA dan *fee income*, pengendalian biaya, transformasi jaringan, penataan organisasi dan *culture transformation*. BRI perlu melakukan *alignment* strategi bisnis yang terintegrasi dan dijalankan melalui penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang jelas dan *performance management system* terbaik. Direktorat CMT merumuskan BRIvolution 2.0 sebagai aspirasi baru untuk melanjutkan komitmen program transformasi BRI dengan visi menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia*" dan "*Champion of Financial Inclusion*".

Dalam mendukung aspirasi perusahaan, Divisi Change Management (CMG) terus melakukan proses transformasi secara cepat dan tepat dengan 12 inisiatif strategis yang dimiliki sepanjang tahun 2020 dengan 2 proyek unggulan yaitu World Class Wholesale Banking (WCWB) dan BRIvolution 2.0. Insiatif strategi divisi CMG terkonksi dengan aspirasi BRIVolution 2.0 untuk mendukung pilar kredit, *cross-sale customer centricity, create new growth engine* serta *culture and capabilties.* Inisiatif untuk mendukung pilar kredit dilakukan melalui proyek EWS segmen korporasi sales planning bisnis menengah, digital lending dan aplikasi sistem informasi Ekstrakomtable. selanjutnya untuk mendukung pilar *cross-sell to boost fee income* Divisi CMG memiliki proyek BRI-X dan World Class Wholesale Banking (WCWB). Pilar *Customer Centricity* diwujudkan melalui proyek Road to Digitalization, Banking Service on Demand dan BRI Loyalty Point. Pilar *Create New Growth Engine* diwujudkan melalui proyek BRIPhone. Kemudian, untuk mendukung Pilar *Culture & Capabilities*, Divisi CMG memiliki proyek BRIvolution 2.0 dan Establish Innovation Management. Inisiatif strategis tersebut tentunya sebagai kunci keberhasilan untuk terus mewujudkan strategi perusahaan yang dimiliki dan *survive* dengan berbagai penyesuaian maupun perubahan bisnis global agar BRI menjadi nomor satu di Asia Tenggara.

Change Management & Transformation Office

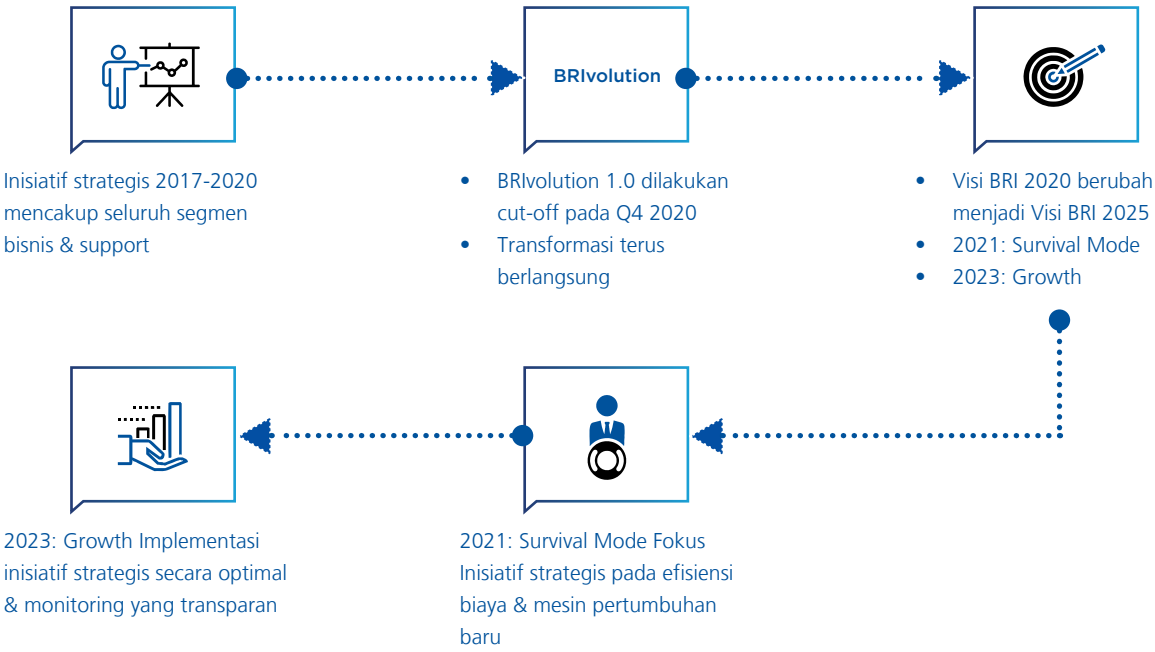

Divisi PMO (Project Management Office) mengawal proses maupun *journey* implementasi sebuah proyek dan menjadi katalisator inisiatif strategis BRI dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan mulai dari tahap inisiasi sebuah proyek hingga pasca proyek. Sepanjang tahun 2020, Divisi PMO telah meningkatkan kapabilitas pengelolaan proyek dan *monitoring* terhadap proyek secara lebih baik dengan adanya kegiatan *Idea Gathering*, *mapping* dan analisa prioritas proyek, *project health check*, Prioritisasi IT Development, dan *screening consultant*. Pada tahap *Pre-Initiating* Divisi PMO melaksanakan kegiatan *Idea Gathering* untuk menggali ide/inisiatif yang dapat menjawab kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi di Unit Kerja dan kegiatan tersebut telah diikuti oleh 8 Direktorat dan 20 Divisi. Selanjutnya sebagai aktivitas utama yang penting dalam proses *Project Management*, Divisi PMO memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan dan pengelolaan proyek kepada *Project Owner* dengan melaksanakan IHT Project Management. Melakukan evaluasi implementasi pada proyek yang telah selesai sesungguhnya menjadi bagian penting bagi Divisi PMO untuk mengawal proses maupun *journey* suatu proyek. Divisi PMO berhasil melakukan kegiatan Post Implementation Report (PIR) sebanyak 14 PIR sehingga mendapatkan *lesson learned* untuk perbaikan/ pengembangan proyek selanjutnya.

Momentum transformasi harus tetap terjaga dan terus dilakukan dengan mempercepat transformasi *digital* dan *culture*, memperbaiki proses bisnis dan cara kerja, serta terus menciptakan hal-hal baru, inovasi yang memberikan ekonomi & *social value* secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholders* BRI Group. Direktorat CMT akan mengusung tema aspirasi strategis *Survival & Growth* yaitu dimana strategi untuk periode 2021-2022 adalah "*Strengthening the Core*" dan strategi 2023-2025 "*Accelerating the Growth*" sehingga dapat terus mendorong pencapaian utama dan langkah positif bagi BRI untuk terus memberi makna Indonesia.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

110.22

SKOR ASEAN Corporate Governance Scorecard

Top 3 PLCs Indonesia

TAHUN 2020

Hasil Penilaian
Corporate Governance Perception Index
Tahun 2020

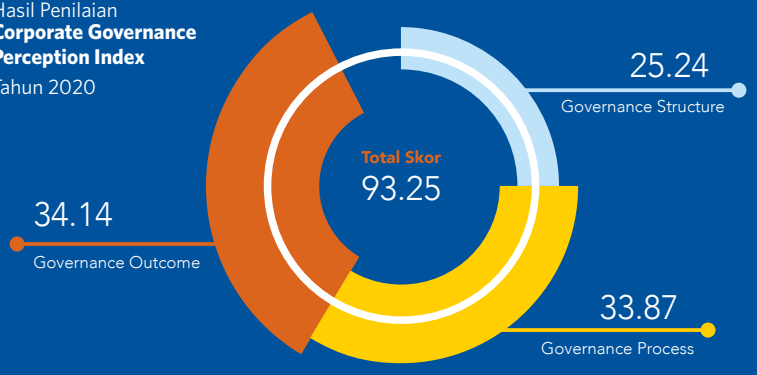

Pada Tahun 2020, BRI telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup *Good Corporate Governance,* diantaranya pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, implementasi ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, dan penyempurnaan aplikasi pelaporan *whistleblowing system* melalui website BRI. Selain itu, meskipun dalam masa pandemi Covid-19 yang membatasi Pekerja untuk mendapatkan pendidikan secara tatap muka, BRI tetap melakukan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman Pekerja terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengendalian gratifikasi dan penyuapan serta pemahaman mengenai ketentuan perbankan lainnya menggunakan sarana webinar maupun e-learning.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT KEPATUHAN

Direktorat Kepatuhan merupakan Satuan Kerja Kepatuhan di BRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang paling sedikit meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedurtelah sesuai dengan ketentuanregulator yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator.

Selain itu, Direktorat Kepatuhan bertanggungjawab atas pengujian kepatuhan & pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan regulator yang berlaku (Compliance Division), pemberian advis hukum & penanganan perkara hukum (Legal Division), serta pengelolaan kebijakan & Prosedur Perusahaan (Policy & Prosedur Division).

Key Performance Indicator Direktorat Kepatuhan

Dalam rangka mendukung aspirasi BRI tahun 2022, Direktorat Kepatuhan menetapkan visi menjadi ***Excellence Compliance for Sustainable Business***. Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Kepatuhan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Pencapaian skor Profil Risiko Kepatuhan pada peringkat low to moderate
2. Penilaian Self Assessment Good Corporate Governance peringkat komposit 2 (baik)
3. Penilaian Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi peringkat komposit 2 (baik)
4. Penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020 dengan kategori "Most Trusted Company" dengan skor 93.25.
5. Top 3 Public Listed Company in Indonesia dalam Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan skor 110,22.
6. Sinkronisasi terhadap 168 kebijakan & prosedur internal.
7. Perkara hukum yang telah in kracht mencapai 98.8% atau 1.735 perkara dari 1.756 perkara.

Program Kerja Direktorat Kepatuhan

Selain itu, untuk mendukung pencapaian KPI di atas, Direktorat Kepatuhan memiliki beberapa Program Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
   BRI telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa di Kantor Pusat BRI.

2. Penilaian Efektifitas Budaya Kepatuhan
   Direktorat Kepatuhan telah memiliki parameter pengukuran efektifitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.

3. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
   Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi perbankan, Bank BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:
   a. Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA).
   b. Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program APU PPT untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teorisme di Sektor Jasa Keuangan.
   c. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran Regional Risk Management & Compliance dan Branch Risk & Compliance.

4. Review Policy & Procedure Governance
   Melakukan review terhadap Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur yang meliputi, Hierarki Kebijakan dan Prosedur, Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur, penyusunan *Corporate Governance Guidelines*, dan mapping aktivitas utama BRI sebagai dasar untuk melakukan omnibus kebijakan dan prosedur.

5. Sinkronisasi Ketentuan Internal
   Melakukan sinkronisasi ketentuan internal sebagai bentuk omnibus kebijakan & prosedur agar lebih efektif dan efisien, tidak tumpang tindih, dapat mengakomodir perubahan yang cepat dan senantiasa selaras antara satu dengan lainnya.

6. Peningkatan Awareness (Budaya Kepatuhan, Legal, *Policy & Procedure*)
   Direktorat Kepatuhan melakukan awareness terhadap implementasi budaya kepatuhan, implementasi program APU PPT, pengetahuan hukum, serta ketentuan-ketentuan baru Perusahaan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. BRI E-College.
   b. Update Legal manual dan ketentuan-ketentuan terkait dengan bidang hukum.
   c. Update Pengetahuan Hukum bersama dengan Ahli Hukum dengan nama program *Coffee Morning.*
   d. Melakukan penyuluhan hukum melalui media webinar.
   e. Melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan baru dengan nama program Policy and Procedure Update.

7. Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas
   Dalam rangka melakukan pemberian bantuan hukum yang berkualitas, Direktorat kepatuhan melalui Legal Division melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Aktif memberikan masukan terhadap ketentuan UU yang akan diterbitkan pemerintah untuk mendukung bisnis BRI.
   b. Ikut serta dalam tim *Project- Project* BRI seperti *Project* Pemulihan Ekonomi Nasional, *Project* Pasar Digital UMKM, Konsolidasi Bank Syariah, *Project Strategic Workforce Planning (Stream Legal), Project Cyperus,* dll.
   c. Melakukan Pembinaan Hukum secara rutin kepada Unit Kerja BRI Seluruh Indonesia;
   d. Aktif melakukan pendampingan hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Kerja sampai dengan penyelesaian permasalahan tersebut secara optimal.

8. Business Processes Reeinginering
   Melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk mendukung efisiensi dan perkembangan bisnis melalui pengembangan system yang antara lain meliputi:
   a. Pengembangan *Data Base Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism* (AML & CFT) Terintegrasi.
   b. Pegembangan sistem pelaporan Go AML.
   c. Merancang proses bisnis yang sederhana untuk meningkatkan layanan dan mitigasi risiko dalam rangka mendukung *project New Delivery System*.
   d. Verifikasi calon nasabah dalam proses pembukaan rekening tabungan menggunakan *Face Recognition*.
   e. Melakukan enhancement pada sistem transaksi *back office* (internal) menggunakan aplikasi BRIPASTI UKO untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis.
   f. Pengembangan aplikasi *Submission* Gugatan Sederhana.
   g. Melakukan enhacement pada *Dashboard* Pengawasan Operasional untuk meningkatkan pengawasan kondisi abnormal dalam kegiatan operasional.
   h. Melakukan pengkinian pada formulir-formulir yang diisi oleh nasabah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN

Sebagai bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sebagai perusahaan publik, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome.*

Governance Structure terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Sedangkan, *Governance Process* merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya, *Governance Outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola.

Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance structure*. Adanya permasalahan pada *Governance structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Pada Tahun 2020, BRI telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup Good Corporate Governance, diantaranya pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, implementasi ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, kebijakan whistleblowing system dan penyempurnaan aplikasi pelaporan whistleblowing system melalui website BRI. Selain itu, meskipun dalam masa pandemi Covid-19 yang membatasi Pekerja untuk mendapatkan pendidikan secara tatap muka, BRI tetap melakukan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman Pekerja terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengendalian gratifikasi dan penyuapan dan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan perbankan lainnya menggunakan sarana webinar maupun *e-learning*.

Selain itu, selama tahun 2020 BRI telah mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya yaitu Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF), predikat "*Most Trusted Company*" dalam Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan berbagai penghargaan lainnya.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

KETERKAITAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DENGAN KINERJA BRI

PENCAPAIAN KINERJA 2020

BRI menjaga kelangsungan usaha melalui penerapan GCG berdasarkan *best practices* di seluruh elemen organisasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG. Hasil penerapan GCG terlihay pada kinerja keuangan BRI yang tetap terjaga dan tumbuh di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, terlihat sebagai berikut:

Pertumbuhan
Kredit sebesar

3,89%

year on year sehingga mencapai

Rp938,38 Triliun.

Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga BRI
secara konsolidasi mencapai

Rp1.121,10 Triliun

Triliun atau tumbuh

9,8%

Secara konsolidasi BRI
memecahkan rekor jumlah
aset terbesar sepanjang
sejarah perusahaan, yakni

Rp1.511,81 triliun,

atau tumbuh

6,71%

Laba Konsolidasi

Rp18,66 triliun

PENGHARGAAN

Selama tahun 2020 BRI telah mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya yaitu:

1

Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF)

2

Predikat "Most Trusted Company" dalam Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG),

3

Keterbukaan Governance Emiten, Keterbukaan Governance Bank (Bank Buku IV Terbaik) dan Keterbukaan Governance Bank BUMN Terbaik dalam ESG Award 2020.

4

Peringkat 3 Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik 2020 Kategori BUMN

5

The Best GRC Overall For Corporate & Performance 2020

6

The Best CEO & GRC Leader 2020

7

The Best COO & GRC Leader 2020

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

HIGHLIGHT AKTIVITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE BRI 2020

FEBRUARI
Direksi BRI mengesahkan Revisi Ketentuan Tata Kelola Perusahaan BRI

MARET
Direksi BRI mengesahkan Revisi Ketentuan Whisteblowing System

JUNI
BRI melaunching Aplikasi pelaporan Whistleblowing System melalui website

AGUSTUS
BRI memperoleh Sertifikat Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat

AGUSTUS - SEPTEMBER
Pelaksanaan Webinar BRI E-College untuk seluruh Pekerja BRI Selindo dengan tema Budaya Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance dan Penerapan APU PPT

OKTOBER - NOVEMBER
BRI menyelenggarakan program Governance Risk and Compliance (GRC) Culture Carnival

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DASAR PENERAPAN

Bank BRI senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan *best practice* implementasi tata kelola perusahaan yang baik oleh institusi nasional maupun internasional.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
6. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
10. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tangal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
13. Surat Edaran Kementrian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
14. Serta peraturan Regulator lainnya yang mengatur terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

BRI juga mengadopsi standar terbaik serta pedoman dan *best practice* terkini dalam meningkatkan kualitas mutu penerapan GCG antara lain:

1. Prinsip-prinsip GCG oleh Organization for Economic Cooperation and Development.
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. Principles for Enhancing Corporate Governance oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Penerapan Good Corporate Governance

TAHAPAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Guna memastikan tercapainya GCG Excellent di BRI, maka implementasi GCG BRI dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait yaitu: perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta pengungkapan implementasi GCG kepada seluruh stakeholder.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PENERAPANNYA

BRI menerapkan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

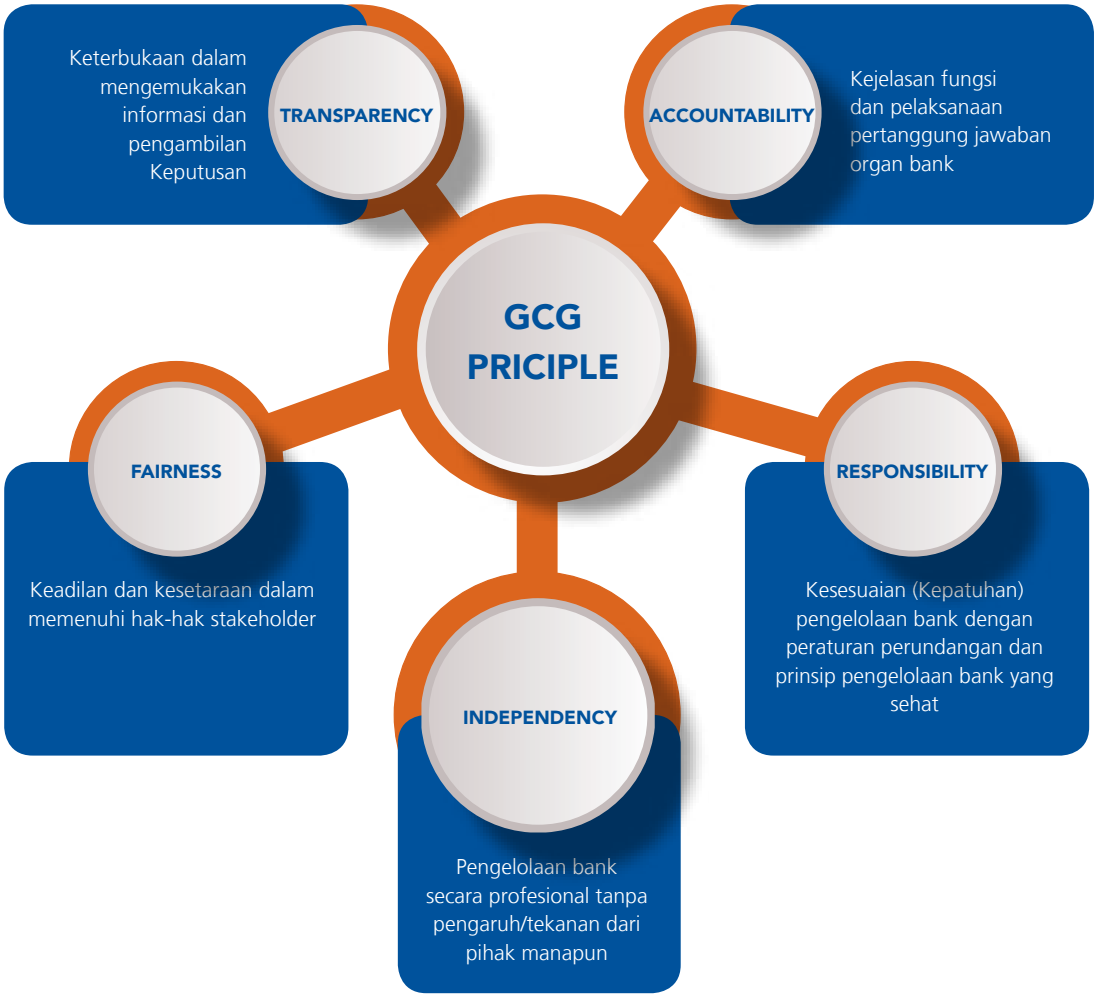

Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas usaha berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Transparansi

1. Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Bank mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi Bank, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Bank.
3. Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Bank dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Good Corporate Governance

Akuntabilitas

1. Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada shareholders dan stakeholders.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
3. Bank menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan stakeholders lainnya sesuai ketentuan berlaku.
4. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
5. Bank memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
6. Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi dan misi Bank.
7. Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tanggung Jawab

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
2. Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam
3. Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Independensi

1. Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
2. Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

1. Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
2. Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

TUJUAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BRI juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara professional
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarka prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.

MONITORING IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Monitoring implementasi GCG Bank BRI dilakukan oleh beberapa organ perusahaan diantaranya:

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Komite Audit

Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (internal control system), efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan

Memiliki fungsi untuk membantu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Satuan Kerja Audit Intern

SKAI memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance.

Fungsi Manajemen Risiko:

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Penerapan Good Corporate Governance

JEJAK LANGKAH IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE BRI

Tahapan mekanisme GCG di BRI dituangkan dalam bentuk Roadmap berkelanjutan yang pada pelaksanannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.Roadmap BRI adalah sebagai berikut:

2000-2001

- Penerapan GCG yang tertuang dalam business plan
- Komitmen manajemen dalam visi misi, core value, dan corporate culture
- GCG policy (*Charter*)

2002-2005

- Kebijakan Kode Etik BRI
- Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi
- Pedoman Sekretariat Perusahaan
- Panduan transparansi dan pengungkapan
- Piagam Komite Audit
- Kebijakan Umum Manajemen Risiko
- Kebijakan Peraturan Disiplin
- Peraturan Ketenagakerjaan
- Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi
- Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi
- Revisi Kebijakan Umum Logistik.

2006-2009

- Panduan Komite Komite Nominasi dan Remunerasi
- Panduan Komite Pengawas
- Manajemen Risiko
- Piagam Audit (*Audit Charter*)
- Arsitektur SDM.

2010-2012

- Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).
- Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan.
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- Kebijakan Strategi Anti Fraud.
- *Standar Service Level Agreement* (SLA).

2013

- Kebijakan Prinsip Mengenal Pekerja (*Know Your Employee*).
- Pelaksanaan Program Bina Lingkungan.
- Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan.

2014

- Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern.
- Pelaksanaan Program Pendampingan Pekerja Baru.
- BPO Penerapan APU dan PPT.
- Pedoman Penilaian peningkatan Kesehatan Bank .
- *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
- Ketentuan Security Teknologi Sistem Informasi BRI

2015

- Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang BRI.
- Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang BRI.
- Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating).
- Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
- Piagam Audit Intern BRI.
- IT Strategic Plan.

- BRI kembali meraih penghargaan:
  8. Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.
  9. The Best Overall dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

2016

- Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi BRI bersama KPK.
- *Disaster Recovery Plan* (DRP) Teknologi Informasi BRI.
- Implementasi aplikasi *Knowledge Management* yaitu *sharing of knowledge* (ketentuan internal dan eksternal, publikasi hasil kajian/ riset, dan training) kepada seluruh pekerja.
- Implementasi *E-learning* ke seluruh pekerja BRI.
-
- BRI kembali meraih penghargaan:
  6. Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.
  7. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

2017

- Pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi BRI.
- BRI kembali meraih penghargaan:
  1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index*.
  2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

2018

- Kebijakan BRI tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Implementasi Recovery Plan bagi Bank sistemik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Review kebijakan Whistleblowing System dan penerapan sarana pelaporan WBS pada website BRI.

2019

- Diseminasi Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi
- Pada Tahun 2019 BRI kembali meraih penghargaan:
  1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index* selama 7 tahun berturut-turut.
  2. *The Best Financial Sector dan Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD)

2020

- Penandatanganan GCG Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi diikuti oleh Seluruh Pekerja BRI Selindo dalam Forum Peningkatan Kinerja
- Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah dilaksanakan 40 (empat puluh) hari kalender sebelum tanggal RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014 dimana paling lambat Pemanggilan RUPS Tahunan dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS Tahunan.
- Pada Pemanggilan RUPS telah disampaikan rincian penjelasan masing-masing mata acara RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.
- Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 sekaligus Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 telah memenuhi ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.
- Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS atau setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS.
- Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Publikasi Anti Gratifikasi pada harian Investor Daily, Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada bulan Mei 2020 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta pada bulan Desember 2020 dalam rangka Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
- Pelaksanaan pendidikan pekerja dengan materi GCG, Anti Fraud, Pengendalian Gratifikasi, APU PPT serta Budaya Kepatuhan kepada seluruh Pekerja BRI melalui webinar maupun e-learning.
- Penyampaian Laporan Tahunan 2019 dilakukan sebelum akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir, telah sesuai dengan POJK No. 29/POJK.04/2016.
- Pelaksanaan Self Assessment GCG Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017.
- Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015
- Penyampaian Laporan fungsi Pelaksanaan Corporate Secretary kepada Direksi yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014
- Revitalisasi sarana pelaporan *Whistleblowing* System pada Website Perusahaan.
- Pengkinian Kebijakan Internal:
  1. *Pengkinian kebijakan Tata Kelola Perusahaan BRI*
  2. *Pengkinian ketentuan Whistleblowing System BRI*
  3. *Pengkinian ketentuan Anti Penyuapan & Pengendalian Gratifikasi BRI*
  4. *Pengkinian Ketentuan LHKPN BRI*
- Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Pelaksanaan GRC Culture Carnival
- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
- Penerimaan Penghargaan Tahun 2020:
  1. Top 3 PLCs Indonesia dengan skor 110.20 dalam pemeringkatan *Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF)*
  2. Predikat *"Most Trusted Company" dengan skor 93.25 dalam Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG),*
  3. Keterbukaan *Governance Emiten,* Keterbukaan *Governance Bank* (Bank Buku IV Terbaik) dan Keterbukaan *Governance Bank BUMN* Terbaik dalam ESG *Award 2020.*
  4. Top 3 Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2020
  5. *The Best GRC Overall For Corporate & Performance 2020*
  6. *The Best CEO & GRC Leader 2020*
  7. *The Best COO & GRC Leader 2020*

Penerapan Good Corporate Governance

EVALUASI DAN PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2020

BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan Good Corporate Goverenance (GCG) secara berkala yang bertujuan untuk menjaga pelaksanaan GCG agar selalu sesuai dengan standar terbaik dan sejalan dengan Roadmap GCG Perseroan, serta sebagai pemenuhan atas komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas mekanisme GCG.

EVALUASI DAN PENILAIAN GCG DARI PIHAK INTERNAL DAN REGULATOR

BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian GCG melalui 2 pendekatan, yaitu penilaian oleh pihak ekternal dan pihak regulator yang mandatory sesuai POJK Tata Kelola bagi Bank Umum.

Evaluasi dari pihak internal dilakukan oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala sesuai prinsip pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi oleh regulator dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran) berdasarkan self assessment yang dilakukan. Sedangkan penilaian dan evaluasi oleh pihak eksternal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk menilai penerapan GCG di BRI sesuai dengan standar best practice dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu penilaian secara *self-assessment* dengan penerapan prinsip GCG berdasarkan standar ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) juga dilakukan dan dikaji untuk senantiasa menuju kearah perbaikan berdasarkan *international best practice*.

Self-Assessment Good Corporate Governance 2020

Berdasarkan POJK No: 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No: 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan Penilaian sendiri (Self Assessment) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek Governance yaitu:

Governance Structure
Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders.

Governance Process
Penilaian bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehigga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders.

Governance Outcome
Penilaian bertujuan untuk menilai outcome yang memenuhi harapan Stakeholders Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian sendiri (Self Assessment) tersebut dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 11 faktor penilaian tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank

Penilaian Self Assessment GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian GCG selama tahun 2020 mencapai nilai komposit 2 (BAIK), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi
2020	PK-2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas atas perinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI

Analisa	
Struktur Tata Kelola	Pelaksanaan Good Corporate Governance pada aspek governance structure secara umum telah memadai dengan telah dimilikinya struktur tata kelola, kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance di BRI. Kelemahan yang terjadi pada governance structure telah ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu kinerja Perusahaan.
Proses Tata Kelola	Pelaksanaan Good Corporate Governance pada aspek governance process secara umum telah berjalan dengan baik, proses bisnis yang dijalankan mengacu pada rencana bisnisyang telah ditetapkan serta setiap organ perusahaan telah menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BRI senantiasa melakukan review dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan governance process dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Hasil	Pelaksanaan Good Corporate Governance pada aspek governance outcome secara umum telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kelemahan dalam pelaporan yang dilakukan, BRI telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan memberikan kemudahan bagi para stakeholder untuk mendapatkan informasi yang akurat.

EVALUASI DAN PENILAIAN GCG DARI PIHAK EKSTERNAL (INDEPENDEN)

Corporate Governance Perception Index

Hasil Penilaian CGPI BRI selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dari keseriusan Manajemen BRI dalam melakukan peningkatan implementasi Good Corporate Governance secara berkesinambungan dalam rangka mendukung visi dan misi Perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance

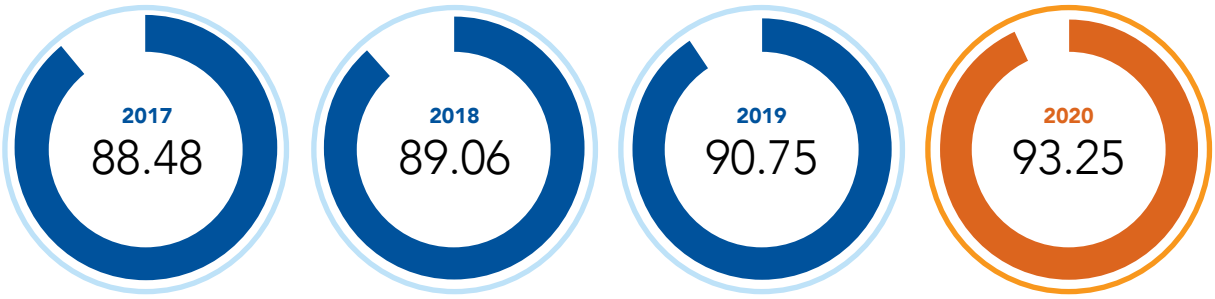

CGPI diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Pada pelaksanaan CGPI tahun 2019 dengan tema "Penguatan Platform Bisnis dalam Kerangka GCG", telah dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

1. Governance Structure meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
2. Governance Process meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
3. Governance outcome meliputi output, outcome dan impact dari proses implementasi GCG.

Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2020 mendapat skor 93.25 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (Most Trusted) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

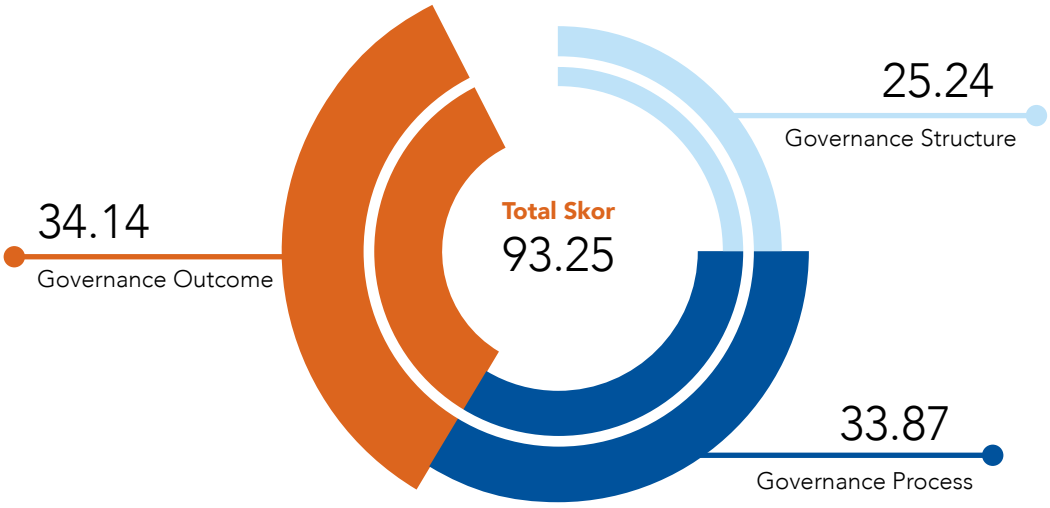

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Salah satu penilaian eksternal yang dilakukan terhadap praktik tata kelola BRI selama beberapa tahun terakhir adalah penilaian berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN dan mempromosikan perusahaan tercatat di ASEAN menjadi *asset class*. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini.

Prosedur Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

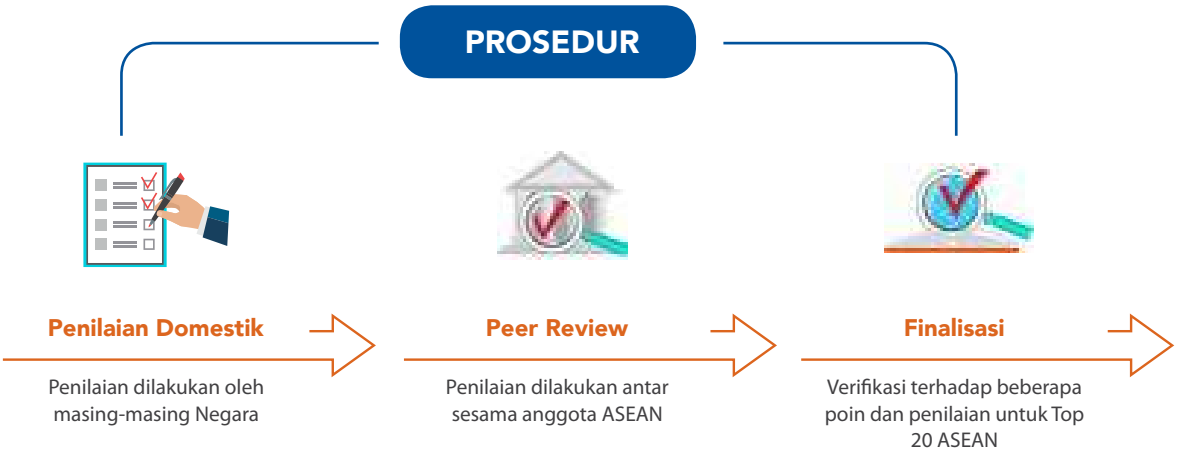

Penilaian atas praktik tata kelola perusahaan tercatat dilakukan dengan me-*review* informasi dalam Bahasa Inggris yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, situs web, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh perusahaan tercatat.
Metodologi penilaian terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu:

1. Tingkat 1: item standar minimum yang diharapkan untuk diterapkan di setiap negara anggota ASEAN dan mencakup peraturan perundangan serta prinsip OECD.
2. Tingkat 2: item bonus yang merefleksikan praktik baik melebihi ekspektasi standar minimum, serta item penalty yang merefleksikan tata kelola yang buruk.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Pihak Yang Melakukan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) melalui Domestic Ranking Body (DRB) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk RSM sebagai DRB untuk Indonesia. Untuk menjaga independensi penilaian, dilakukan pula verifikasi penilaian oleh DRB negara lain, anggota ASEAN.

Hasil Penilaian Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Dari hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS, BRI memperoleh penghargaan dengan Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF) dengan skor **110.22**

Penerapan Good Corporate Governance

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA BAGI EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Pernyataan Rekomendasi Yang Telah Dilaksanakan

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 aspek, 8 prinsip dan 24 rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut:

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-hak Pemegang Saham				
1	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic voting.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (*one vote one share*). Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan Petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir. Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui website perseroan. Prosedur pengambilan suara (voting) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada website Perusahaan. **Keterangan: Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
2		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	RUPST Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi. **Keterangan: Memenuhi**
3		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPS LB dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Risalah rapat dipublikasikan dalam website perseroan 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 19 Februari 2020 untuk RUPST Bank yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun (www.bri.co.id). Selama tahun 2020 tidak diselenggarakan RUPSLB **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya analyst meeting, *public expose* bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui Website Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com). **Keterangan: Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di upload dalam situs web perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com. **Keterangan: Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris				
	Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2020 adalah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri 6 (enam) Komisaris Independen dan 4 (empat) Komisaris non Independen. **Keterangan: Memenuhi**
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI. **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self Assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya Self Assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Charter* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan:Memenuhi**
		Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapankebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan:Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2020 pada Bab Dewan Komisaris. **Keterangan: Memenuhi**
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2020 **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
C. Fungsi dan Peran Direksi				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yangmatang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) Direksi **Keterangan: Memenuhi**
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Penilaian kemampuan & kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
			Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Direktur yang membidangi/membawahi bidang akuntansi atau keuangan di jabat oleh Haru Koesmahargyo memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain: Pendidikan: Meraih gelar MBA, Investment Banking, dari Emory University, Amerika Serikat (2000). Sarjana Teknik Industri Pertanian, dari Universitas Brawijaya, Malang (1989). Pengalaman: Kepala Divisi Treasury, General Manager Kantor Cabang Luar Negeri BRI New York, **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Penilaian Sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan denganrekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam Board Charter sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan:Memenuhi**
		Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2020. **Keterangan: Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada *Board Charter.* Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI. **Keterangan: Memenuhi**
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan				
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan BRI tentang Insider Trading diatur dalam: Kode Etik BRI (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/ BRI/12/ 2013 dan Nomor S.65 DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013). Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02 – KOM/ BRI/05/2012 dan Nokep: S.104- DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012). **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan Strategi Anti fraud di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Strategi Anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut: Pencegahan.Deteksi. Investigasi, pelaporan, dan sanksi,Pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut. Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait praktik korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI No:SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI bersama KPK dalam pencegahan korupsi. **Keterangan: Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor Nomor S.35-DIR/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. BRI memiliki mengembangkan aplikasi manajemen vendor yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE yangmencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, monitoring, pemeliharaan rekanan (Vendor Maintenance) sampai dengan evaluasi performance rekanan sehingga BRI mempunyai database dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI. **Keterangan: Memenuhi**

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur. **Keterangan: Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *Whistleblowing System*	Kebijakan sistem *Whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *Whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *Whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Kebijakan mengenai Whistleblowing System di BRI yang diatur Surat Edaran Direksi Nomor.S.32-DIR/KEP/07/2020. Kebijakan *Whistleblowing System* BRI mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan,perlindungan & kerahasiaan pelapor, serta unit pengelola *Whistleblowing System.* **Keterangan: Memenuhi**

Penerapan Good Corporate Governance

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkankinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaandalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentifjangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengantujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangkapanjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2020. **Keterangan: Memenuhi**
E. Keterbukaan Informasi				

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada Stakeholders melalui media teknologi informasi, selain website Perseroan. Omni Channel BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia yaitu: Tatap muka melalui Customer Service di seluruh Unit kerja operasional BRI Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400 / Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017, SMS 0812 12 14017. Web chat melalui website www.bri.co.id Email callbri@bri.co.id Telegram 0812 12 14017 Internet Banking di https://ib.bri.co.id Twitter di @kontak_bri Facebook di Bank BRI Official **Keterangan: Memenuhi**
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2020 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. **Keterangan: Memenuhi**

Penjelasan Atas Rekomendasi Yang Belum Dilaksanakan, Disertai Alasan dan Alternatif

Seluruh rekomendasi telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan

Penerapan Good Corporate Governance

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI GUIDELINES OF CORPORATE GOVERANCE PRINCIPLES FOR BANKS YANG DITERBITKAN OLEH BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya Perusahaan.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan corporate governance, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantarnaya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek governance yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan Fit and Proper Test. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris	Bank BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Divisi yaitu Market, Portofolio & Enterprise Risk Management Division, Digital & Operation Risk Management Division, dan Micro , SME, Consumer Credit Risk & Policy Division. Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, monitor dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Review dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semesteran.

Penerapan Good Corporate Governance

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Struktur remunerasi Bank BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi Bank BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2020 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan governance dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi Bank BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui website perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Public Expose.

RENCANA PENINGKATAN TATA KELOLA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, maka pada tahun 2021 BRI telah menyusun rencana kerja yang secara umum mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan *Corporate Governance Guidline* BRI
2. Pengkinian arsitektur tata kelola kebijakan
3. Pengkinian dan *review* kebijakan & prosedur
4. Penguatan data *Governance* BRI
5. Penguatan Teknologi Informasi dan Sekuriti Teknologi Informasi
6. Penguatan Implementasi *Corporate Value* dan BUMN *Value*

INFRASTRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

BRI memiliki struktur tata kelola, diantaranya:

1. Anggaran Dasar BRI Nomor: 5 tanggal 3 Desember 2018 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHUAH.01.03-0272183 tanggal 06 Desember 2018.
2. Surat Keputusan Direksi BRI No: KB.2-DIR/KPD/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Arsitektur & Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kode Etik BRI.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris
5. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: B.299-DIR/SKP/04/2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 11-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:12-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:14-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No: 02-KOM/02/2020 dan Nokep .01-DIR/KPT/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep: S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.
13. Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
14. Surat Edaran Direksi BRI No: SE.32-DIR/KEP/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Whistleblowing System
15. Surat Edaran Direksi BRI No:SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
16. Surat Edaran Direksi BRI No: SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti Fraud BRI.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.
18. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.297-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank.
19. Surat Keputusan Nokep: S.296-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
20. SK Direksi Nomor: B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
21. SK Direksi Nomor: B.242-DIR/SKP/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

STRUKTUR TATA KELOLA

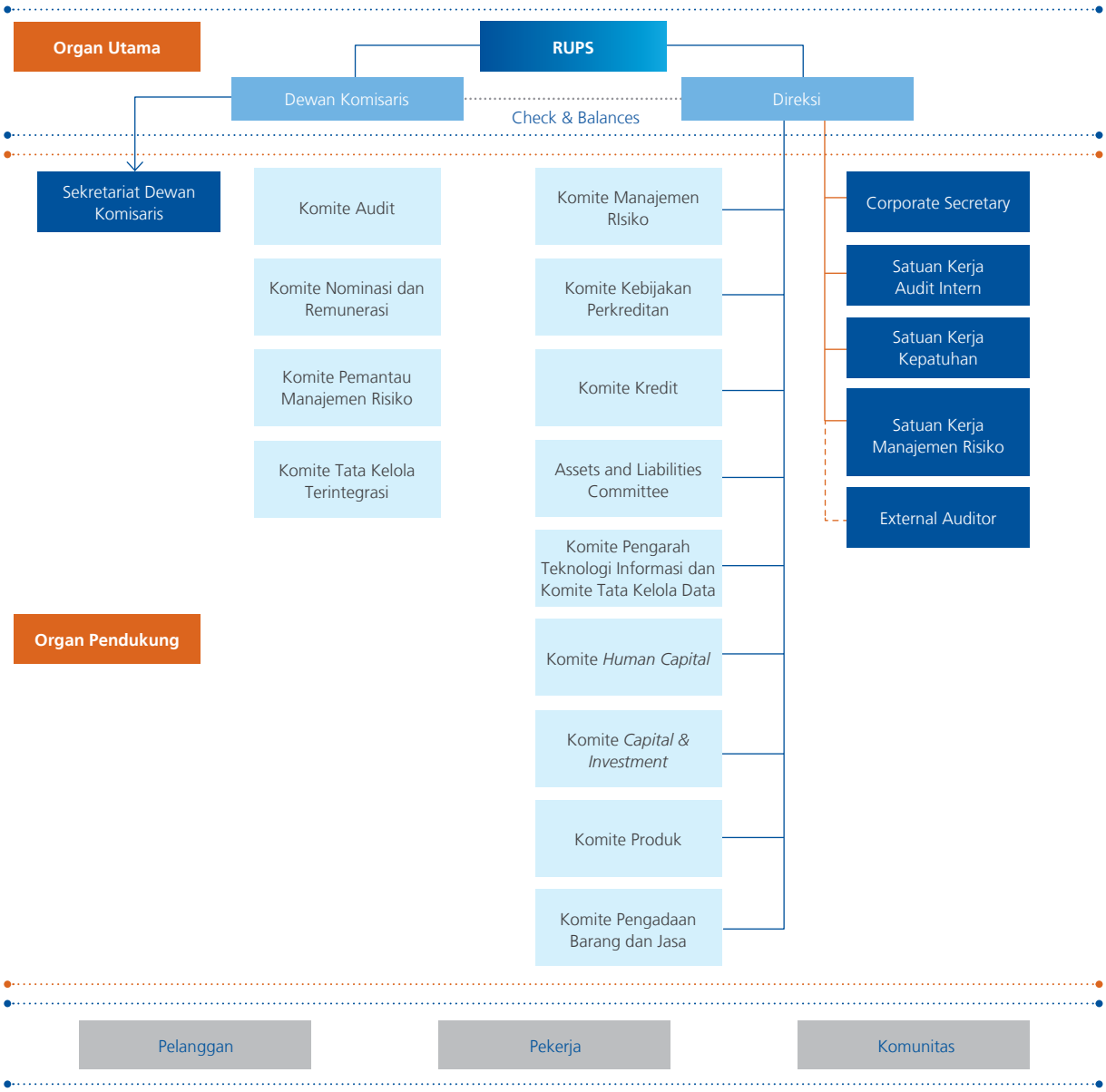

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Organ Perusahaan terdiri atas 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Guna memastikan efektifitas GCG dan menciptakan mekanisme kontrol check and balance, maka Organ Perusahaan BRI dapat digambarkan sebagai berikut:

Good Corporate Governance System

GOVERNANCE MECHANISM

Governance Mechanism merupakan mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wujud dari komitmen dan penerapan struktur tata kelola yang ada, guna mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

RUPS

RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

DIREKSI

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Bank termasuk mewakili Bank dengan pihak ketiga didalam maupun diluar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

ORGAN PENDUKUNG

Komite Dibawah Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pemantau Manajemen Risiko
- Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Komite Dibawah Direksi

- Asset & Liabilities Committee (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kredit
- Komite Capital & Investment
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data
- Komite Human Capital

- Komite Produk
- Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Dewan Komisaris

Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Perusahaan

Merupakan organ pendukung yang bbertanggungjawab kepada Direktur Utama dan berperan untuk membantu Dewan Komisaris serta Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing - masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).

Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM).
Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan
Merupakan Unit kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi kepatuhan di BRI.
Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern

Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Good Corporate Governance System

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat umum Pemegang saham (RUPS) sebagai salah satu organ utama Bank memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BRI. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan mengacu pada batasan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BRI.

DASAR HUKUM RUPS

Pelaksanaan RUPS BRI mengacu dan telah sesuai pada ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Bursa efek Indonesia No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban Penyampaian Informasi.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

Hak Pemegang Saham

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu

1. Saham Seri A Dwiwarna
   Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
2. Saham Seri B.
   Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan asset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
   h. Persetujuan penggunaan laba.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.

2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Diluar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun mealui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
4. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
6. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
7. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
8. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan /aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
9. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
   a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
   a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
   c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Good Corporate Governance System

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Hubungan dengan Pemegang saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dalam bagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Segala komunikasi dengan para Pemegang Saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua Semegang Saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (equitable treatment) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.

PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Investor Relations antara lain melalui interaksi langsung pada acara Public Expose, Non-deal Roadshow, Press Conference, atau 1-on-1 Meeting, Conference Call, dan Email, serta Dokumen yang tersedia pada *website* Perusahaan, *Investor Relations*, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan.
3. Jumlah komisaris independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 5 orang Komisaris dari total 9 orang Komisaris.
4. Pemegang saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank, diantaranya informasi kinerja perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

BRI telah menyediakan akses terhadap Informasi untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya:

1. RUPS, sebagai media di mana Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Pemegang Saham, menyampaikan Informasi mengenai Perseroan dan memungkinkan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
2. Media elektronik seperti Situs web (website) Bursa Efek dan Situs web (website) Perseroan yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dimana tersedia berbagai dokumen, laporan dan publikasi yang dapat dengan mudah diunduh baik oleh Pemegang Saham maupun publik.
3. Email dan Kontak telepon resmi Perseroan untuk menyampaikan dan mengetahui Informasi terkini Perseroan. Media komunikasi lain agar Pemegang Saham dapat terus memperoleh informasi terkini diantaranya conference call, Investor/Analyst meeting, non-deal roadshow, conference, public expose dan Investor/Analyst gathering.

PENYELENGGARAAN RUPS 2020

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelanggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 hari sebelum RUPS melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Pengumuman RIngkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

KETENTUAN KUORUM

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1	Pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2	Persetujuan Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3	Perubahan terkait Direksi, Dewan Komisaris, Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari $^{1}/_{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{3}/_{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPS2020

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
4	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{3}/_{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6	Di luar dari Mata Acara 1 s.d 5 tersebut di atas	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $^{1}/_{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $^{1}/_{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

TATA TERTIB RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Tata tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara RUPS.
3. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/ tanggapan dari pemegang saham.
4. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan/ tanggapan selesai dijawab.Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
5. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

UPAYA MENGAJAK PEMEGANG SAHAM HADIR DALAM RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS.Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarkan secara tepat waktu melalui website Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di website Perusahaan.

KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA RUPS

1. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara yang sedang dibicarakan.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
7. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.
8. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan RUPS, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

PEMUNGUTAN SUARA RUPS MELIBATKAN PIHAK INDEPENDEN

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu: Notaris Fathiah Helmi SH and PT Datindo Entrycom.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN2020

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020, dan telah memenuhi POJK No. 32/ POJK.04/2014, dengan jadual tahapan sebagai berikut:

TAHAPAN RUPS TAHUNAN 18 FEBRUARI 2020

02.01.2020

Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada OJK

Pemberitahuan RUPST kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.

10.01.2020

Pengumuman RUPS Tahunan

Pengumuman RUPST 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily, Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post

27.01.2020

Pemanggilan RUPS Tahunan

Pemanggilan RUPST 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily, Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.

18.02.2020

RUPS Tahunan

RUPST 2019 diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210.

19.02.2020

Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan

Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Investor Daily, Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post)

17.03.2020

Penyampaian Risalah Rapat

Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.

Untuk mata acara 1 sampai dengan mata acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk mata acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

PROSES PERHITUNGAN SUARA & PIHAK INDEPENDEN YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA RUPS TAHUNAN 2020

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah:

1. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp50,00.
2. 108 997 .971.025 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 setiap saham atau seluruhnya sejumlah 108 997.971.026 saham atau lebih kurang sejumlah 89,0647% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara oleh Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 24-01-2020 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan sejumlah 122.380.635,500 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat, dengan demikian kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

MATA ACARA

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Kedua	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Ketiga	Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Keempat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
Kelima	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Penyelenggaraan RUPS Tahunan2020

Pemegang Saham	Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan total jumlah 108.997.971.026 saham setara dengan 89,06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Dewan Komisaris	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen
	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen
	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
	Hadiyanto	Komisaris
	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris
Direksi	Sunarso	Direktur Utama
	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama
	Haru Koesmahargyo	Direktur
	Agus Noorsanto	Direktur
	Priyastomo	Direktur
	Indra Utoyo	Direktur
	Supari	Direktur
	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur
	Azizatun Azhimah	Direktur
	Agus Sudiarto	Direktur
	Handayani	Direktur
	Herdy R. Harman	Direktur

Catatan: RUPS dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI.

KESEMPATAN MENGAJUKAN PERNYATAAN/PENDAPAT DAN PEMUNGUTAN SUARA

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independent (Biro Administrasi Efek). Dalam RUPST jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Opini/Pertanyaan
Kesatu	108.466.980.392 saham (99,51%)	25.470.000 saham (0,004%)	505.520.634 saham (0,46%)	4 (empat) orang
Kedua	108.958.720.336 saham (99,96%)	4.704.800 saham (0,004%)	34.545.890 saham (0,031%)	Tidak Ada
Ketiga	100.586.235.383 saham (92,28%)	5.934.579.391 saham (5,44%)	2.477.156.252 saham (2,27%)	1 (satu) orang
Keempat	103.281.600.691 saham (94,75%)	5.043.792.481 saham (4,62%)	672.577.854 saham (0,61%)	1 (satu) orang
Kelima	74.209.180.289 saham (68,08%)	28.190.817.454 saham (25,86%)	6.597.973.283 saham (6,05%)	1 (satu) orang

Berita Acara RUPST – Akta No. 19 tanggal 18 Februari 2020

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Kesatu	1	Fita Sisiani	4.500 saham	Seberapa dampak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terhadap laba bersih?	Sudah dilaporkan dalam Laporan bahwa jumlah kebutuhan tambahan PSAK adalah Rp14,5 triliun (empat belas koma lima triliun Rupiah) dan itu 100% (seratus persen) diambil dari retained earning. sehingga tidak berpengaruh terhadap laba bers1h Perseroan. terima kasih.
	2	M. Saman selaku Kuasa dari Andry Ansjori	5,000 saham	Mohon pelaksanaan Rapat dapat dilaksanakan tepat waktu agar tidak terJadi diskriminasi terhadap Pemegang Saham Publik dan kuorum kehadiran seharusnya dibaca sebelum agenda Rapat. Berapa pajak yang dibayar atas revaluasi aset sebesar Rp3,3 triliun?	Pihak BRI memohon maaf karena keterlambatan selama 45 menit yang diluar kuasa. Terkait dengan pajak, tidak ada revaluasi, dan akan dijelaskan oleh Direktur Keuangan: revaluasi aset itu dilakukan setiap periode, terhadap yang dilakukan di awal tahun 2016, dan sudah 3 tahun dilakukan revaluasi. Kemudian pajak yang berlaku adalah 10% namun akan dibayarkan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2019 kemarin kita melakukan revaluasi kurang lebih Rp3 T dengan pajak 10% dan akan dibayar pada tahun 2021 atas revaluasi pertama di tahun 2016.
	3	Fajar Anugerah	7,000 saham	Apa Investment Thesis BRI Ventures, Start Up seperti apa. Dalam negeri atau luar negeri juga?	Terkait Investment Thesis BRI Ventures, memang tugas dari BRI Ventures adalah mencari new opportunity dan juga great model yang dibawa oleh taraf-taraf khususnya Fintech. BRI Ventures ini memiliki ijin yang diberikan oleh OJK utamanya adalah yang terkait bidang Fintech, oleh karena itu Investment yang dilakukan oleh BRI Ventures sejauh ini utamanya adalah melengkapi aspek inovasi-inovasi yang breakthrough terkait dengan Fintech baik itu menyangkut lending, ada juga beberapa melengkapi portofolio yang utamanya divisi mikro dan juga ritel kecil. Disamping itu juga BRI Ventures memiliki tugas untuk melengkapi BRI masuk ke value berikutnya yaitu masuk sebagai platform dan juga sebagai Bank as Ecosystem oleh karena itu BRI akan masuk kepada Emerging Ecosystem antara lain seperti Agritech kemudian Foodtech, Maltech, Edutech dan lain sebagainya ada sekitar 7 (tujuh) prioritas Ecosystem Emerging yang akan menjadi fokus dari investasi BRI Ventures.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan2020

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
	4	Rendy Brayen Latuputty	100 saham	Disampaikan bahwa Perseroan cukup baik namun berdasarkan data Laporan Tahunan halaman 490 capaian laba bersih Perseroan Rp34 triliun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp36 triliun. Mohon penjelasan manajemen atas ketidaktercapaian ini. Apalagi tahun 2019 Perseroan melakukan revaluasi aset sebesar surplus Rp3,2 triliun. Bagaimana keuntungan laba bersih, jaga-jaga kalau tidak ada revaluasi, laba bersih tumbuh negatif.	Terima kasih. Memang kita menerbitkan laba sebesar Rp36 triliun, profit kita double digit. Namun kemudian drifer dari laba ini adalah pertumbuhan kredit. Pada saat itu pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan laba, kita proyeksikan double digit, dan realitanya karena berbagai faktor, kredit secara nasional itu hanya tumbuh 6,08%, sehingga BRI juga kreditnya tumbuh 8,3%, masih tumbuh di atas rata-rata industri nasional tetapi secara keseluruhan baik BRI maupun nasional tidak mencapai target pertumbuhan kredit yang double digit. Oleh karena itu kemudian laba kita terkoreksi menjadi Rp36 triliun. Kemudian kita berhasil membukukan laba Rp34,4 triliun yang artinya tumbuh 6,2%. Jadi penyebab utamanya adalah target pertumbuhan kredit yang secara Nasional maupun BRI tidak mencapai target, terima kasih.
Ketiga	1	Rendy Brayen Latuputty	100 saham	Dalam Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris diberi fasilitas keanggotaan Club, bisa dijelaskan anggota Club apa?	Memang Direksi dan Dewan Komisaris diberikan fasilitas Keanggotaan Club supaya sehat, misalnya seperti fitnes. Tempatnya dimana, kami pokkir bisa berbeda-beda. Ada juga club golf, sebagai bagian dari menjaga kesehatan.
Keempat	1	Rendy Brayen Latuputty	100 saham	Apakah penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja mernpertimbangkan kesimpulanOJK atas kasus audit Laporan Keuangan tahun 2016? Kenaikan jasa audit Rp2.5 triliun 2018 – 2019?	Jadi intinya adalah untuk pengadaan semua sesuai dengan aturan dan akan dilihat kredibilitasnya atau independensinya sudah dinilai termasuk semua informasi terkait juga apapun yang regulator pernah berikan berupa teguran, semua sudah masuk pertimbangan. Kenaikan Rp2,5 triliun ini kaitannya dengan apa, mohon maaf saya tidak mengerti, apakah dalam konteks pengadaan KAP.
Kelima	1	Rendy Brayen Latuputty	100 saham	Terkait pengangkatan Pak Tiko saya ingin mengulangi pertanyaan saya dalam RUPST 2019 (halaman 431 Laporan Tahunan) yang sampai saat ini saya belum terima jawaban tertulisnya.	Terima kasih atas pertanyaan nya, kami akan siapkan jawaban tertulis setelah Rapat ini.

Keputusan RUPS Tahunan 18 Februari 2020

MATA ACARA KESATU		
Keputusan	1.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00021/2.1032/AU1/07/1008-3/1/1/2020 tanggal 24-01-2020.
	2.	Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Nomor 00031/2.1032/AU 2/1Oi1008-3/1/1/2020 tanggal 24-01-2020.
	3.	Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Ill Bank BRI Tahap I Tahun 2019.
	2.	Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KEDUA		
Keputusan	1.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsofidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 sebagai berikut: Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Dividen bagian Negara Republik indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham sebesar Rp11.704.082.373.600,20 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*). Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melaku kan: Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pematongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Status	Telah diselesaikan	

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN2020

MATA ACARA KETIGA		
Keputusan	1.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2020.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Sen A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi: besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan gaji/honorarium, tunjangan. fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KEEMPAT		
Keputusan	1.	Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young global limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
	2.	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
	3.	Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan irnbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KELIMA		
Keputusan	1.	Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15-05-2019 terhitung sejak tanggal 18-11-2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Wakil Komisaris Utama Perseroan.
	2.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi: Azizatun Azhimah sebagai Direktur Kepatuhan Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung seJak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
	3.	Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi: Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

MATA ACARA KELIMA	
	4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama/Independen A. Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen A. Sonny Keraf sebagai Komisaris Independen Loeke Larasati A. sebagai Komisaris Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selarna menjabat anggota Dewan Komisaris.
	5. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris: Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen Zulnahar Usman sebagai Komisaris Independen Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
	6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo* Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Ari Kuncoro* Komisaris: Nicolaus Teguh Budi Harjanto Komisaris: Hadiyanto Komisaris: Rabin Indrajad Hattari* Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim Komisaris Independen: Hendrikus Ivo Komisaris Independen: Zulnahar Usman* Komisaris Independen: R. Widyo Pramono* Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa* **Direksi** Direktur Utama: Sunarso Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto Direktur Keuangan: Haru Koesmahargyo Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto Direktur Bisnis Mikro: Supari Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi: Indra Utoyo Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah: Priyastomo Direktur Jaringan dan Layanan: Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Kepatuhan: Wisto Prihadi* Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto Direktur Konsumer: Handayani Direktur Human Capital: Herdy Rosadi Harman

Penyelenggaraan RUPS Tahunan2020

MATA ACARA KELIMA		
	7.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Flt & Proper Test) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Kornisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	8.	Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Millk Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
	9.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
Status	Telah diselesaikan	

REALISASI RUPS

1. RUPS Tahun 2020 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan.
   - Pembayaran dividen tahun buku 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 (tidak melebihi 30 hari kalender sejak laporan hasil RUPS tahun 2020).
2. RUPS Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan.
3. RUPS Tahun 2018 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan.
4. RUPS Tahun 2017 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan.
5. RUPS Tahun 2016: terdapat 1 dari 6 (enam) mata acara pada RUPST tahun 2016 yaitu terkait penyaluran ESOP yang saat ini masih berjalan penyalurannya Employee Stock Allocation (ESA) sampai pada tahap penyaluran, sebagai berikut:
   a. ESA ke-1 tahap I sejumlah 143juta lembar kepada sekitar 50ribu pekerja
   b. ESA ke-1 tahap II sejumlah 4,3juta lembar kepada 173 pekerja
   c. ESA ke-2 sejumlah 226juta lembar kepada sekitar 54ribu pekerja.
   d. ESA ke-3 dan ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang didistribusikan kepada sekitar 57ribu pekerja.

RUPS TAHUN BUKU 2019

Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2019 telah direalisasikan seluruhnya (100%) sehingga tidak ada lagi putusan pada RUPS Tahunan 2019 yang perlu direalisasikan lebih lanjut.

KEPUTUSAN RUPST 15 MEI 2019

MATA ACARA KESATU		
Keputusan	1.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Nomor 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan penawaran umum Obligasi Subordinasi III selama tahun 2018. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan danBina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan Nomor 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/111/2019 tanggal 6 Maret 2019.
	2.	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KEDUA		
Keputusan	1.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018 sebesar Rp32.351.133.341.945 yaitu sebagai berikut: Dividen sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham sebesar Rp9.179.798.381.218 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KETIGA		
Keputusan	1.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2019.

RUPS Tahun Buku 2019

Status	Telah diselesaikan

MATA ACARA KEEMPAT		
Keputusan	1.	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2019 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
	3.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntar Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KELIMA		
Keputusan	1.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Tuan Gatot Trihargo -sebagai Wakil Komisaris Utama 2) Tuan Mahmud -sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
	2.	Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai AnggotaDewan Komisaris Perseroan: 1) Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama 2) Tuan Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen
	3.	Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
	4.	Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama/ Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama, Wahyu Kuncoro Komisaris, Nicolaus Teguh Budi Harjanto Komisaris, Hadiyanto Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim Komisaris Independen, Hendrikus Ivo Komisaris Independen, A. Sony Keraf Komsaris Independen, A. Fuad Rahmany
	5.	Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka "yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
	6.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
Status	Telah diselesaikan	

KEPUTUSAN RUPSLB 3 JANUARI 2019

MATA ACARA KESATU		
Keputusan	1.	Mata Acara Rapat Kesatu bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.
Status	Telah diselesaikan	

MATA ACARA KEDUA		
Keputusan	1.	Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Jefry J. Wurangian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan
	2.	Memberhentikan dengan hormat Kuswiyoto sebagai Direktur *Corporate Banking* dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat pada jabatan tersebut.
	3.	Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama, dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi, yang berada dalam lingkup Direktorat: a) Direktorat Mikro dan Kecil, b) Direktorat Jaringan dan Layanan, c) Direktorat Teknologi Informasi dan Operasi, serta d) Direktorat Hubungan Kelembagaan.
	4.	Mengangkat Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.
	5.	Masa jabatan Wakil Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
	6.	Dengan adanya pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, maka susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: **Anggota Dewan Komisaris** Komisaris Utama/Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama, Gatot Trihargo Komisaris, Hadiyanto Komisaris, Nicolaus T.B. Harjanto Komisaris Independen, A. Fuad Rahmany Komisaris Independen, A. Sonny Keraf Komisaris Independen, Mahmud Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim **Anggota Direksi** Direktur Utama, Suprajarto Wakil Direktur Utama, Sunarso Direktur, Mohammad Irfan Direktur, R. Sophia Alizsa Direktur, Haru Koesmahargyo Direktur, Sis Apik Wijayanto Direktur, Supari Direktur, Indra Utoyo Direktur, Priyastomo Direktur, Osbal Saragi R. Direktur, A. Solichin Lutfiyanto Direktur, Handayani

RUPS Tahun Buku 2019

MATA ACARA KEDUA	
	7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Status	Telah diselesaikan

KEPUTUSAN RUPSLB 2 SEPTEMBER 2019

MATA ACARA KESATU	
Keputusan	1. Mata Acara Rapat Kesatu bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.
Status	Telah diselesaikan

MATA ACARA KEDUA	
Keputusan	1. Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
Status	Telah diselesaikan

MATA ACARA KETIGA	
Keputusan	1. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu: Perubahan Dewan Komisaris Perseroan: 1. Mengangkat Nyonya Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris 2. Masa jabatan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimanadimaksud pada angka 1, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama/Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago • Wakil Komisaris Utama, Wahyu Kuncoro • Komisaris, Nicolaus Teguh Budi Harjanto • Komisaris, Hadiyanto • Komisaris, RR. Loeke Larasati A • Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim • Komisaris Independen, A. Sonny Keraf • Komisaris Independen, A. Fuad Rahmany • Komisaris Independen, Hendrikus Ivo 4. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 - baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

MATA ACARA KETIGA	
	2. Perubahan Direksi Perseroan: 1. Mengukuhkan dengan hormat pemberhentian Suprajarto sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: • Sis Apik Wijayanto, sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan • Osbal Saragi Rumahorbo, sebagai Direktur Jaringan dan Layanan • Mohammad Irfan, sebagai Direktur Manajemen Risiko • R. Sophia Alizsa, sebagai Direktur Human Capital 3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: • Semula Direktur Mikro dan Kecil, menjadi Direktur Bisnis Mikro • Semula Direktur Ritel dan Menengah, menjadi Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah • Semula Direktur Hubungan Kelembagaan, menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN • Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi, menjadi Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi 4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini: • Sunarso, semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama • Priyastomo, semula Direktur Mikro dan Kecil menjadi Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah • Supari, semulaDirektur Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Mikro • Indra Utoyo, semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi • Ahmad Solichin Lutfiyanto, semula Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Jaringan dan Layanan yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2019, RUPS Tahunan Tahun 2016, RUPS Tahunan Tahun 2018 dan RUPS Tahunan Tahun 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengang katan yang bersangkutan.

RUPS Tahun Buku 2019

MATA ACARA KETIGA	
	5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Peseroan: • Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama • Herdy Rosadi Harman, Direktur Human Capital • Agus Noorsanto, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN • Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko • Azizatun Azhimah, Direktur Kepatuhan 6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Anggota Direksi • Direktur Utama, Sunarso • Wakil Direktur Utama, Catur Budi Harto • Direktur Keuangan, Haru Koesmahargyo • Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, Agus Noorsanto • Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah, Priyastomo • Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi, Indra Utoyo • Direktur Bisnis Mikro, Supari • Direktur Jaringan dan Layanan, Ahmad Solichin Lutfiyanto • Direktur Kepatuhan, Azizatun Azhimah • Direktur Manajemen Risiko, Agus Sudiarto • Direktur Konsumer, Handayani • Direktur Human Capital, Herdy Rosadi Harman 8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
Status	Telah diselesaikan

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

DASAR HUKUM

Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan patuh pada ketentuan:

1. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominanasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dewan Komisaris

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
23. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
24. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep:65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
25. Anggaran Dasar BRI dalam Akta Notaris No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta dan telah mendapat persertujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam nomor AHU0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan No. AHU-AH.01.03-027218.
26. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 03-KOM/BRI/02/2020 dan Nokep:01-DIR/KPT/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PEDOMAN & TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan disahkan dalam SK Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 yang memuat diantaranya:

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Memimpin pelaksanaan rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari :
   a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP);
   b. Rencana Bisnis Bank (RBB);
   c. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), dan
   d. Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai peraturan perundangan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Memberitahukan kepada regulator paling lambat tujuh hari sejak ditemukannya :
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan; yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada regulator.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri-A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
9. Menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
11. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain.
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
15. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
16. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
17. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.
18. Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan :
    a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang dua kali dalam satu tahun.
    b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
19. Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:
    t. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    u. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    v. Mengevaluasi dan mengambil keputusan atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
20. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
21. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT.
22. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Anti Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
23. Memantau Tingkat Kesehatan Bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

24. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapanmanajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
25. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
26. Menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh Pengurus, menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya, dan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ;
28. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perseroan setiap triwulan kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
29. Memastikan bahwa komite – komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
30. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Larangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku
2. Memangku jabatan rangkap sebagai :
   a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta.
   b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legistatif dan/atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/ atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
3. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
4. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Memberikan atau menawarkan kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Melibatkan diri pada penjualan atau pembelian atas efek dimana yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam (insider trading).
8. Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan berupa adanya status terpidana dari pihak yang berwenang maka anggota Dewan Komisaris dimaksud wajib mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian

Dewan Komisaris

Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ruang Lingkup Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya yang meliputi:

1. Pengawasan pasif, yaitu melalui telaah atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Manajemen, surat-surat yang diterima dari OJK, Bank Indonesia dan lembaga lain serta informasi lain yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya; dan
2. Pengawasan aktif, yaitu melalui forum rapat Dewan Komisaris embaga Direksi, Rapat Komite Komisaris embaga Direktur dan pejabat terkait, rapat dengan auditor eksternal dan pihak ketiga lainnya, serta melalui kunjungan kerja ke Unit Kerja.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuksewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Etika Dewan Komisaris

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Apabila terdapat suatu benturan kepentingan, maka setiap Anggota Dewan Komisaris secara pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyaikepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara, pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, atau kontrak tersebut.
4. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi kode etik Perseroan.

Waktu Kerja Dewan Komisaris

Waktu kerja Dewan Komisaris adalah saat namun tidak terbatas pada Rapat Dewan Komisaris dan waktu kunjungan kerja Dewan Komisaris.

KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Kriteria, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2015 tantang Komite Nominasi dan Remunerasi, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ketentuan internal Dewan Komsiaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi

Kriteria Dewan Komisaris

Kualifikasi Umum	1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. Dinyatakan pailit. b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Jabatan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu embaga/perusahaan bukan embaga keuangan. b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila: a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya. b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.
Persyaratan Integritas	Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Akhlak dan moral yang baik. 2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Dewan Komisaris

Pemenuhan POJK No. 27/03. POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Pemenuhan SE OJK No. 39/SEOJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya. 2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan. 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Sistem dan Prosedur Nominasi

Sistem dan Prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang dianggap layak selanjutnya direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mencakup aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi, diantaranya :
   a. Memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah menerima sanksi yang dikenakan oleh Bank.
   b. Tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet atau dinyatakan pailit.
   c. Memiliki latar belakang yang baik formal maupun informal yang mendukung pelaksanaan tugas.
   d. Memiliki track record dan prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas.
   e. Memiliki Kemampuan untuk menduduki posisi yang akan dijabat.
4. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan Bakal Calon yang direkomendasikan menjadi Calon anggota Dewan Komisaris.
5. Hasil pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana sebagaimana di atas merupakan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Calon anggota Dewan Komisaris yang terpilih diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Untuk bakal calon Dewan Komisaris yang diajukan di RUPS selain yang diatur pada angka 6 di atas, proses nominasi dilakukan bersama dalam suatu tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan melibatkan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir, Komite dapat diwakili oleh seorang Komisaris Independen.

Prosedur Pengangkatan

Susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPS wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memperoleh persetujuan atas anggota Dewan Komisarisnya, Perseroan mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK meliputi penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka Perseroan melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Prosedur Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.

3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pelaksana	Tanggal Lulus Fit & Proper Test
1	Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	RUPST 18 Februari 2020	OJK	3 Juli 2020
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020	OJK	15 September 2020
3	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	RUPSLB 18 Oktober 2017	OJK	1 Februari 2018
4	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	RUPSLB 15 Mei 2019	OJK	30 Agustus 2019
5	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020	OJK	7 September 2020
6	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020	OJK	7 Agustus 2020
7	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020	OJK	20 Januari 2021*
8	Hadiyanto	Komisaris	RUPST 22 Maret 2018	OJK	21 September 2018
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	RUPST 15 Maret 2017	OJK	19 Juli 2017
10	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	RUPST 18 Februari 2020	OJK	27 Juli 2020

*Posisi Desember 2020 masih dalam proses fit and proper test

Bagi calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Dewan Komisaris

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk 4 komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 komite-komite telah menjalankan tugas dantanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian Key Performance Indicator (KPI) masing-masing komite. Informasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan guna meningkatkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Komite Audit melakukan pemantauan proses perbaikan secara berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan implementasi pada seluruh tingkatan organisasi Perseroan termasuk dalam pengendalian internal dan kecukupan proses laporan keuangan. Selama tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan pelaksanaan fungsi pengawasan diantaranya:

1. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit, laporan keuangan.
2. Penyusunan rekomendasi dan laporan antara lain persetujuan PKBL, penunjukan KAP, evaluasi laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan, penyesuaian *Annual Audit Plan*, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan.
3. Melakukan koordinasi dengan SKAI dan/atau unit kerja terkait untuk melakukan diskusi dan pembahasan terhadap isu-isu terkini yang berdampak terhadap Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali selama periode tahun 2020. Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Memberikan rekomendasi/ usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Usulan susunan pengurus/ manajemen di Perusahaan Anak.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk terhadap penerapan manajemen risiko Perseroan. kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Perseroan. Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali selama periode tahun 2020. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko antara lain:

1. Melakukan evaluasi kecukupan kebijakan manajemen risiko, kebijakan umum perkreditan, APU PPT.
2. Melakukan evaluasi profil risiko Perseroan secara berkala.
3. Review terhadap usulan permohonan kredit yang mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan penyediaan kepada Pihak Terkait, baik permohonan kredit baru, perpanjangan dan suplesi.
4. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Perseroan sesuai profil risiko Perseroan secara menyeluruh,

dan malakukan *review risk appetite* Perseroan.
5. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi korporasi yang meliputi namun tidak terbatas pada tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan modal/akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana strategis Perseroan lainnya.
6. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan
7. Melakukan evaluasi Rencana Aksi (*recovery plan*) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan.
8. Review permohonan lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintergasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Perseroan. Komite Tata Kelola Terintergasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Tata Kelola Terintergasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2020. Pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Melakukan evaluasi pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi SKAI terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap realisasi KPI Perusahaan Anak.
4. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan permodalan, manajemen likuiditas, transaksi intra-group, dan manajemen risiko penyediaan dana.
5. Melakukan evaluasi terhadap penilaian (*Self Assessment*) tata kelola terintegrasi.

KEPUTUSAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Melepaskan/ memindahtangankan dan/ atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/ BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai Batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-udangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

Dewan Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Komposisi Dewan Komisaris ngacu terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Jumlah dan susunan Dewan Komisaris BRI selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris 1 Januari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020

No	Komisaris	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	RUPST 15 Maret 2017
2	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	RUPST 19 Maret 2015
4	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	RUPSLB 18 Oktober 2017
5	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	RUPST 15 Maret 2017
6	Hadiyanto	Komisaris	RUPST 23 Maret 2018
7	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	RUPSLB 2 September 2019

Susunan Dewan Komisaris 18 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 18 Februari 2020, RUPS mengukuhkan pemberhentian Andrinof A. Chaniago, A. Sonny Keraf dan Loeke Larasati Agoestina, dan RUPS mengangkat Kartiko Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama, Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama, R. Widyo Pramono, Zulnahar Usman, Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen, serta Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris sehingga susunan Dewan Komisaris BRI periode 18 Februari 2020 sampai 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1	Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	RUPST 18 Februari 2020
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020
3	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	RUPSLB 18 Oktober 2017
4	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	RUPSLB 15 Mei 2019
5	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020
6	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020
7	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	RUPST 18 Februari 2020
8	Hadiyanto	Komisaris	RUPST 22 Maret 2018
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	RUPST 15 Maret 2020
10	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	RUPST 18 Februari 2020

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pada Bank Umum, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen dimana Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50 persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib menyampaikan pernyataan independensi Komisaris Independen dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ Perseroan tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/ lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan kondisi demikian, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

KEBIJAKAN DAN PENERAPAN RANGKAP JABATAN

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK-03/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

1. Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
2. Lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Berikut adalah pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris selama tahun 2020:

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
1	Andrinof A. Chaniago*)	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19 Juli 2017 – 18 Februari 2020	Dosen/ Pengajar	Universitas Indonesia
2	Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Wakil Menteri BUMN	Kementrian BUMN
3	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Rektor	Univesitas Indonesia
				BOD	East Asian Economist Association
4	A. Fuad Rahmany*)	Komisaris Independen	26 Mei 2017 – 18 Februari 2020	Nihil	Nihil
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2020 – 31 Desember 2020	Dosen dan Peneliti,	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia
6	Sonny Keraf*)	Komisaris Independen	10 Juni 2015 – 18 Februari 2020	Dosen	Universitas Atma Jaya
				Anggota	Dewan Energi Nasional
				Komisaris Independen	PT Gorontalo Sejahtera Mining

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
7	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	29 Agustus 2019 – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil
8	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil
8	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Presiden Direktur	PT Trans Borneo Gas
				Wakil Ketua Umum	Kadin Bidang Infrastruktur dan Energi Terbarukan
9	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Pengacara	Kantor Pengacara Rialatifa & Partner
10	Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018 – 31 Desember 2020	Sekretaris Jenderal	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
				Ketua Dewan Pengawas	RS Dr. Cipto Mangunkusumo
				Dewan Pengawas	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
11	Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017 – 30 Desember 2020	Sekretaris Jenderal	Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
				Staff Khusus Mensetneg Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan	Sekretariat Negara Republik Indonesia
12	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Staff Khusus Menteri	Kementerian BUMN
13	Loeke Larasati Agoestina*)	Komisaris	2 September 2019 – 18 Februari 2020	Nihil	Nihil

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020

KEPEMILIKAN SAHAM & PERUBAHAN TAHUN 2020

Anggota Dewan Komisaris telah menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga melalui Surat Pernyataan. Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Kepemilikan Saham (lembar) Dewan Komisaris BRI Posisi Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Desember 2019	Desember 2020
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	0	0
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama / Independen	0	0
3	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	0	0
4	Handrikus Ivo	Komisaris Independen	0	0

No	Nama	Jabatan	Desember 2019	Desember 2020
5	Hadiyanto	Komisaris	201.200	625.800
6	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komsaris	386.700	816.300
7	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	0	0
8	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	0	0
9	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	0	0
10	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	0	0

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pembidangan atau pembagian tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab serta fungsi Dewan Komisaris sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2020 - 18 Februari 2020

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19 Juli 2017 – 18 Februari 2020	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	26 Mei 2017 – 18 Februari 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Audit
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2020 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Audit
Sonny Keraf*)	Komisaris Independen	10 Juni 2015 – 18 Februari 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Audit

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	29 Agustus 2019 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit
Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017 – 30 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	2 September 2019 – 18 Februari 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Periode 31 Maret 2020 – 12 Agustus 2020

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	29 Agustus 2019 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Audit Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Audit
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017 – 30 Desember 2020	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Periode 12 Agustus 2020 – 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Audit Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	29 Agustus 2019 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Audit Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Audit
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017 – 30 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

PROGRAM ORIENTASI, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan;
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan Bank BRI;
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI;
4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI;
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak Bank BRI;
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI;
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

Program Orientasi Dewan Komisaris Tahun 2020

Peserta	Tempat Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
Kartiko Wirjoatmodjo	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengahdan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Ari Kuncoro	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Peserta	Tempat Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
R. Widyo Pramono	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Zulnahar Usman	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Dwi Ria Latifa	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Rabin Indrajad Hattari	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Seketariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

BRI memiliki Kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI dalam menunaikan tugasnya.

Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis;
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan;
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan governance perusahaan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 tersedia di Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang Manajemen Risiko sesuai syarat minimum standar sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan perubahan Peraturan Bank Indonesia dimaksud dengan No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010.

Memperhatikan hal tersebut dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan syarat sebagai Dewan Komisaris, selain mengikuti berbagai *training* dan *conference*, Dewan Komisaris Perseroan senantiasa membekali diri dengan sertifikasi manajemen risiko yang mendukung tugas nya sebagai Pengawas Perseroan. Adapun sertifikasi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi /Refreshment MR		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun
Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	LSPP	Level 5	2015
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	LSPP	Level 2	2017
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2017
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	BSMR	Level 3	2016
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2020
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2020
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Level 1	2018
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 2	2019
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	LSPP	Level 1	2017

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pengawasan Dewan Komisaris	Realisasi
1	Melaksanakan Proses Nominasi Pengurus Perseroan	a. Top Talent BRI b. Nominasi Pengurus BRI tahun 2020 dalam RUPST tahun 2020
2	Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroarsen yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait	Pelaksanaan Nominasi terhadap Perusahaan Anak diantaranya BRI Insurance, BRI Agroniaga, BRI Remittance, BRI Ventura Investama, BRI Finance, BRI Life dan BRI Syariah.
3	Review dan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Pelakasanaan revieu dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020
4	Evaluasi Kinerja Direksi	Evaluasi terhadap kinerja Direksi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
5	Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	Pelaksanan revieu kebijakan remunerasi Pekerja BRI
6	Penelaahan Laporan Keuangan	Penelaahan laporan keuangan tahun 2019, Triwulan I 2020,Triwulan II 2020,dan Triwulan III 2020
7	Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal	Evaluasi dan kaji kecukupan pengendalian internal Perseroan
8	Evaluasi pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI dan Evaluasi Kinerja DPLK BRI	a. *Kick Off Meeting* Laporan Keuangan DPLK tahun 2019 b. Laporan audit atas laporan keuangan DPLK tahun buku 2019 Pembahasan kinerja dan rencana bisnis DPLK BRI
9	Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Strategis Perkreditan, Kebijakan IT dan Perubahan/ Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	a. Pemaparan Dampak Covid 19 terhadap BRI dan strategi pengelolaan manajemen risiko BRI b. Strategi pengembangan bisnis dan update restrukturisasi kredit kecil ritel dan menengah yang terdampak covid 19 c. Strategi pengembangan bisnis kelembagaan dan BUMN d. Strategi pengembangan branch model dan layanan BRI e. Strategi *Mass Funding* dan FBI BRI f. Strategi likuiditas BRI dan FBI g. Strategi pengembangan bisnis dan update restrukturisasi kredit kecil ritel dan menengah yang terdampak covid 19
10	Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK	Pelaksanaan tata kelola Dewan Pengawas DPLK BRI
11	Review dan Evaluasi Profil Risiko	Pembahasan dan evaluasi profil risiko BRI Triwulan IV tahun 2019, Triwulan I Tahun 2020,Triwulan II Tahun 2020 danTriwulan III Tahun 2020
12	Review dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2019 dan Semester I 2020
13	Review dan Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud	Pembahasan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2019 dan Semester I tahun 2020
14	Review dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program APU PPT	Pembahasan Penerapan APU PTT Semester II Tahun 2019 dan Semester I tahun 2020
15	Review dan Evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Pembahasan laporan penilaian tingkat kesehatan bank Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020

Dewan Komisaris

No	Pengawasan Dewan Komisaris	Realisasi
16	Review dan Evaluasi Portofolio Aktiva Produktif	a. Analisa Portfolio Mikro di Masa Pandemi dan Implementasi PEN b. Update Restrukturisasi Oktober 2020 dan efektivitas restrukturisasi kredit menengah dan kredit korporasi.
17	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	pe Direksi kepada Dewan Komisaris terhadap 26debitur korporasi
18	Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	a. Tambahan Modal BRI Finance Indonesia b. Penyediaan Dana Pihak terkait PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS) c. Pembahasan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait a.n. PT Danareksa Sekuritas d. Penyediaan dana pihak terkait BRILife
19	Aksi Korporasi pada Perusahaan Anak	a. Penyediaan Dana Pihak terkait kepada PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS) b. Penyediaan dana pihak terkait BRILife (Repo) c. Tambahan Modal BRI Finance Indonesia d. Project Amanah Bank Syariah BUMN e. Penyediaan Dana kepada Pihak terkaiit PT Danareksa Sekuritas
20	Laporan Tahunan Dewan Komisaris	Laporan tahunan Dewan Komisaris tahun 2020 merupakan bagian dari Laporan Tahunan BRI 2020 yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS, diantaranya Laporan pengawasan Dewan Komisaris, sambutan Dewan Komisaris dan laporan pelaksanaan GCG.
21	Penelaahan Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik	a. Laporan Keuangan BRI b. Laporan PKBL
22	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit	a. Laporan pokok pokok hasil audit sd triwulan IV 2019 b. Laporan hasil audit triwulan I tahun 2020 c. Laporan hasil audit triwulan II 2020 d. Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Triwulan III 2020 e. Tindak lanjut atas pelaku kejadian *fraud* tahun 2020, review terhadap SOP dan ketentuan terkait tindak lanjut pidana *fraud* BRI
23	Mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangka Audit Laporan Keuangan BRI	a. Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2020 tanggal 11 Februari 2020 b. Usulan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) penyesuaian ruang lingkup jasa audit KAP atas laporan keuangan konsolidasian PKBL BRI Tahun 2020
24	Hasil Review Profil Risiko Terintegrasi	a. Review profil risiko terintegrasi semester I tahun 2019 tanggal 10 Januari 2020 b. Review profil risiko terintegrasi semester II tahun 2019 tanggal 23 Maret 2020 c. Profil risiko terintegrasi dan kinerja konglomerasi keuangan BRI semeter I tahun 2020
25	Evaluasi Penilaian Kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi	a. Laporan fungsi kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan BRI semester II 2019 tanggal 19 Juni 2020 b. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan BRI Semeter I 2020tanggal 20 Oktober 2020

No	Pengawasan Dewan Komisaris	Realisasi
26	Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern secara Terintegrasi	a. Laporan fungsi audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI semester II tahun 2019 tanggal 19 Juni 2020 b. Laporan audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI Semeter I 2020tanggal 20 Oktober 2020
27	Persetujuan dan Pengawasan Rencana Kerja Perseroan	a. Persetujuan atas penyesuaian RBB tahun 2020-2022 dan RKAP tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 b. Persetujuan RBB tahun 2020-2022 (Revisi RKAP tahun 2020) tanggal 24 Juni 2020 c. Persetujuan atas RBB tahun 2021-2023 dan RKAP tahun 2021 tanggal 26 November 2020
28	Review Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik	a. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2019 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY) b. Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2019 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (KAP MSI)
29	Kunjungan Kerja	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 17 kali yaitu kunjungan kerja ke Kantor Wilayah dan unit kerja supervisi nya dan unit kerja luar negeri

JENIS-JENIS KEPUTUSAN YANG MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2020

Selain melaksanakan fungsi pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai rekomendasi dan masukan kepada manajemen berdasarkan atas laporan rutin manajemen ke Dewan Komisaris maupun berdasarkan atas kejadian atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1	8 Januari 2020	Kajian komite audit atas *fresh eye perspective* atas penunjukan KAP yang telah melakukan audit selama periode tahun 2016 sd 2019
2	10 Januari 2020	Review profil risiko terintegrasi Semester I tahun 2019
3	28 Januari 2020	Penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester II tahun 2019
4	30 Januari 2020	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan IV semester II tahun 2019
5	12 Februari 2020	Laporan profil risiko BRI triwulan IV tahun 2019
6	13 Februari 2020	Evaluasi kinerja BRI triwulan IV tahun 2019
7	17 Februari 2020	Konsultasi kredit
8	9 Maret 2020	Tingkat kesehatan bank, pengelolaan risko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, program APU dan PPT Pelaksanaan strategi anti fraud semester II tahun 2019
9	23 Maret 2020	Review profil risiko terintegrasi semester II tahun 2019
10	9 April 2020	Pedoman penetapan debitur dampak penyebaran covid 19
11	17 April 2020	Kinerja BRI Life

Dewan Komisaris

No	Tanggal	Perihal
12	20 April 2020	Laporan hasil penilaian tingkat risiko dan laporan penerapan manajemen risiko DPLK
13	23 April 2020	Laporan hasil penilaian tingkat risiko dan laporan penerapan manajemen risiko DPLK RI
14	4 Mei 2020	Pergerakan NPL dan Loan at risk serta dampak covid 19 terhadap kualitas kredit BRI
15	15 Mei 2020	Laporan pokok pokok hasil audit SKAI triwulan I 2020
16	20 Mei 2020	Profil risiko triwulan I 2020
17	12 Juni 2020	Ketentuan pemberian limit penjaminan kredit kepada pihak terkait atas nama BRINS
18	15 Juni 2020	Kualitas Portofolio kredit BRI NYA
19	17 Juni 2020	Laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI tahun 2020
20	19 Juni 2020	Laporan fungsi audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI semester II tahun 2019
21	19 Juni 2020	Laporan fungsi kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan BRI semester II 2019
22	22 Juni 2020	Tanggapan atas laporan kinerja DPLK BRI posisi tahun 2019 dan triwulan I tahun 2020
23	26 Juni 2020	Evaluasi kinerja BRI
24	30 Juni 2020	Laporan hasil evaluasi Komite Audit DPLK BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2019
25	30 Juni 2020	Tanggapan draft pedoman sistem managemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
26	17 Juli 2020	Konsultasi Kredit
27	21 Juli 2020	Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas tim technical assistance TA Bank Bukopin
28	28 Juli 2020	Tanggapan atas laporan evaluasi implementasi manajemen anti penyuap (SMAP) iso 37001:2016
29	28 Juli 2020	Konsultasi Kredit
30	13 Agustus 2020	Laporan profil risiko BRI triwulan II tahun 2020
31	5 Agustus 2020	Kinerja Kepala SKAI BRI
32	6 Agustus 2020	Laporan pokok pokok hasil audit semester I tahun 2020
33	7 Agustus 2020	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan II semester I 2020
34	25 Agustus 2020	Laporan pengawasan rencanan bisnis semester I 2020 DPLK BRI
35	25 Agustus 2020	Evaluasi kinerja BRI triwulan II tahun 2020
36	17 September 2020	Progress penyaluran program PEN
37	23 September 2020	Tingkat kesehatan bank, pelaksanaan fungsi kepatuhan, APU PPT semester I tahun 2020
38	23 September 2020	Program PEN restrukturisasi kredit dan proyeksi kualitas aset 2020/2021
39	20 Oktober 2020	Laporan audit intern terintegrasi dan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan BRI Semeter I 2020
40	20 Oktober 2020	Penyampaian hasil review atau masukan draft pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan BRI
41	27 Oktober 2020	Profil risiko terintegrasi dan kinerja konglomerasi keuangan BRI semeter I tahun 2020
42	10 November 2020	Pembahasan Usulan Perubahan Logo BRI
43	10 November 2020	Kinerja Keuangan Triwulan II 2020, Realisasi RBB dan RKAP 2020 sd 2022 Triwulan III 2020
44	17 November 2020	Survey Kegiatan Usaha dan sentimen Bisnis UMKM Th 2020 (Update BRI Micro & SME index)
45	24 November 2020	Pembahasan RBB BRI Tahun 2021-2023 dan RKAP tahun 2021

No	Tanggal	Perihal
46	1 Desember 2020	Maturity IT BRI
47	10 Desember 2020	Pembahasan Kinerja dan Rencana Bisnis DPLK BRI
48	15 Desember 2020	Kinerja dan Rencana Pengembangan Perusahaan BRINS
49	29 Desember 2020	Collective Impairment
50	29 Desember 2020	Analisa Portfolio Mikro di Masa Pandemi dan Implementasi PEN

Jenis-jenis Keputusan yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris tahun 2020

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi. Selama Tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1	2 Januari 2020	Pemberhentian dan pengangkatan Kadiv SKP
2	9 Januari 2020	Pelayanan kredit konsumtif kepada Pihak Terkait
3	13 Januari 2020	Perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI tahun 2020
4	15 Januari 2020	SKB Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman GCG
5	17 Januari 2020	Kebijakan penyertaan modal dan pengelolaan Perusahaan Anak BRI Versi 2.0
6	24 Januari 2020	Pengadaan jasa kantor akuntan publik tahun 2020
7	30 Januari 2020	HPS Pengadaan jasa kantor akuntan publik tahun 2020
8	30 Januari 2020	Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Danareksa
9	30 Januari 2020	Pencalonan Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
10	17 Februari 2020	Pencalonan pengurus BRI Agro
11	10 Maret 2020	Pencalonan pengurus BRI Ventura Investama
12	19 Maret 2020	Pengangkatan non-executive Direktur BRI Remittance Co Ltd
13	23 Maret 2020	Perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT
14	24 Maret 2020	Tindak lanjut rekomendasi OJK
15	22 April 2020	Usulan TOR Kaji Ulang fungsi audit intern BRI tahun 2020
16	22 April 2020	Ijin pelaksanaan pengadaan konsultan kaji ulang fungsi audit intern SKAI tahun 2020
17	8 Mei 2020	Pengangkatan pengurus BRI Multifinance
18	29 Mei 2020	Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur (BRINS)
19	3 Juni 2020	Pencalonan komisaris Independen BRI Ventura Investama
20	8 Juni 2020	Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur
21	29 Juni 2020	Pencalonan dewan komisaris dan direksi PT Asuransi BRI Life
22	11 Juni 2020	Penyaluran dana PK Kepada BUMN Khusus
23	11 Juni 2020	Pedoman pelaksanaan layanan nasabah prima
24	13 Juni 2020	Pedoman sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) BRI ISO 37001:2016
25	24 Juni 2020	RBB tahun 2020-2022 (Revisi RKAP tahun 2020)

Dewan Komisaris

No	Tanggal	Perihal
26	24 Juni 2020	Penyediaan dana kepada pihak terkait an Danareksa
27	26 Juni 2020	Perubahan organisasi BRI
28	2 Juli 2020	Pencalonan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
29	3 Juli 2020	Pencalonan Komisaris Utama dan Direktur PT Danareksa Sekuritas
30	9 Juli 2020	Penyedian Dana kepada pihak terkait an Asuransi BRI Life
31	14 Juli 2020	Rencana stratgeic partnership dalam rangka pengembangan asuransi BRI Life (perusahaan anak BRI)
32	28 Juli 2020	Pemberhentian EVP Corporate Secretary BRI
33	5 Agustus 2020	Pengangkatan EVP Corporate Secretary Divisi BRI
34	18 Agustus 2020	Penyesuaian proyeksi keuangan RBB
35	7 September 2020	Addendum perencanaan audit tahunan (PAT)
36	9 September 2020	Tambahan modal kepada BRI Multifinance Indonesia
37	12 Oktober 2020	Perubahan organisasi BRI
38	12 Oktober 2020	penambahan struktur kepemilikan saham BRI di Asuransi BRI Life melalui strategic partnership
39	19 Oktober 2020	Penggabungan Bank Syariah perubahan struktur dan tambahan penyertaan modal ke BRI Syariah
40	29 Desember 2020	Pinjaman Subordinasi kepada PT Danareksa Sekuritas
41	29 Desember 2020	Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI dan Kinerja Dana Pensiun

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi jumlah Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak 10 (sepuluh) anggota dengan 6 (enam) anggota merupakan Komisaris Independen. Jumlah komposisi Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK,03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen								
	AAC*	AK	AFR*	RR	SK*	HI	RWP	ZU	DRL
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komisaris Independen selama periode tahun 2020: Andrinof A. Chaniago (AAC), Ari Kuncoro (AK), A. Fuad Rahmany (AFR), Rofikoh Rokhim (RR), Sonny Keraf (SK), Hendrikus Ivo (HI), R. Widyo Pramono (RWP), Zulnahar Usman (ZU), dan Dwi Ria Latifa (DRL)									

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020

Komisaris Independen

Pernyataan Independen

Seluruh Komisaris Independen BRI secara bersama-sama telah menyampaikan pernyataan sebagai Komisaris Independen.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KOMISARIS INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ari Kuncoro : Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2. Rafikus Rudhiro : Komisaris Independen
3. Kendrikus Ina : Komisaris Independen
4. R. Widya Pramono : Komisaris Independen
5. Zulnahar Usman : Komisaris Independen
6. Dwi Ria Latifa : Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Menyatakan pihak yang independen terhadap pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluarganan, kesamaan suhum dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana dalam ketentuan berlaku dan penerapan Good Corporate Governance.
3. Apabila dikemudian hari, saya diketahui memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia mulai pasar dan digantri sebagai Komisaris Independen.

Demikian pernyataan independensi ini dibuat dengan sebenar benarnya.

JAKARTA, DENIMAKET 2020
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KOMISARIS INDEPENDEN

Ari Kuncoro
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen

Rafikus Rudhiro
Komisaris Independen

Kendrikus Ina
Komisaris Independen

R. Widya Pramono
Komisaris Independen

Zulnahar Usman
Komisaris Independen

Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen

Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Dewan Komisaris Badan usaha Milik negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, Peraturan Direksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar BRI.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOD CHARTER)

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Board charter) Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 11 November 2015. Board charter Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.
Board charter Direksi berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Direksi

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

1. Melaksanakan keputusan RUPS.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja danAnggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerjalainnya serta perubahannya untuk disampaikan gunamendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
3. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan haksuara yang sah.
4. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikansaham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaanlain.
5. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris denganberpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu palinglambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

1. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
2. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
3. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

1. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
2. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemenrisiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
3. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki kewenangan dibawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasansebagaimana yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban

Berdasarkan Anggaran Dasar Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan Rencana Kerja lainnya serta Perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan.
5. Menyusun Laporan Keuangan pada butir 4 diatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
10. Menyimpan ditempat kedudukan Perseroan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
14. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A Dwiwarna,dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Karyawan/ Pegawai, serta organ yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan dan pengabdiannya secara penuh kepada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
20. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
21. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

Direksi

usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

22. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank tempat yang bersangkutan maupun pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
    b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Etika Kerja

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi perseroan maupun anak perusahaannya.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
3. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
    a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
    b. Anggota Dewan Komisaris/ dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
    c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
    d. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislative dan atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
    e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
4. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada perusahaan lain.
5. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Proyek bersifat khusus.
    b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
    c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 1.
6. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perseroan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, pembagian tugas masing-masing Direksi BRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertujuan untuk memastikan agar fungsi pengelolaan Perseroan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Nama | *Name*	Ruang Lingkup Pekerjaan | *Scope of Duties*
Sunarso Direktur Utama	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Catur Budi Harto Wakil Direktur Utama	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Haru Koesmahargyo Direktur Keuangan	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap Corporate Development & Strategy, Akuntansi Manajemen & Keuangan, Assets & Liabilities Management, dan Hubungan Investor; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Agus Noorsanto Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Hubungan Lembaga, Transaction Banking, dan Bisnis BUMN; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Priyastomo Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan Bisnis Kecil, Ritel & Menengah, Bisnis Ritel & Menengah, Small Sales Management, dan Bisnis Pertanian; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Supari Direktur Bisnis Mikro	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan Bisnis Mikro, Micro Sales Management, Bisnis Program & Kemitraan, Social Entrepreneurship & Inkubasi; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Handayani Direktur Konsumer	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Wealth Management, Kredit Konsumer, Kredit Briguna, Kartu Kredit, Mass Funding, Retail Payment dan Marketing Communication; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Jaringan dan Layanan	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Kantor, Jaringan Brilink, E-Channel, Layanan & Contact Center, dan Sentra Operasi; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Direksi

Nama | *Name*	Ruang Lingkup Pekerjaan | *Scope of Duties*
Indra Utoyo Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan IT Strategy & Governance, Application Management & Operation, IT Infrastructure & Operation, Digital Center of Excellence, Kerjasama Teknologi dan Information Security; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Herdy Rosadi Harman Direktur Human Capital	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Human Capital, Culture Transformation serta BRI Corporate University; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Agus Sudiarto Direktur Manajemen Risiko	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio, Manajemen Risiko Operasional & Pasar, Analisis Risiko Kredit, Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Kebijakan Kredit, dan Operasional Kredit; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Wisto Prihadi Direktur Kepatuhan	• Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kepatuhan, Hukum, dan Kebijakan & Prosedur; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

KRITERIA, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Kriteria

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berikut.

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik negara, Badan usaha Milik daerah, badan usaha milik swasta;
   b. Anggota Dewan Komisaris/ dewan Pengawas pada Badan usaha Milik negara;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
   d. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
   e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk

hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan Integritas

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik;
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
4. Tidak termasuk dalam daftar Tidak lulus.

Pengangangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan

Prosedur pengangkatan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Direksi yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan kompetensi terlebih dahulu di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BRI melalui penelurusan pengalaman professional dan riwayat hidup.Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Nota Dinas Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Dewan Komisaris atas dasar Rapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan atas calon anggota Direksi. Hasil putusan rapat Dewan Komisaris tersebut sekaligus menjadi dasar rekomendasi calon Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Calon anggota Direksi kemudian diangkat melalui keputusan RUPS yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu kepada POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.Penilaian OJK dilaksanakan melalui antara lain penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka BRI melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Pengungkapn Kebijakan Direktur Pengganti dan SEVP

Dalam memastikan kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan pada saat Direktur dan SEVP berhalangan hadir, BRI memiliki kebijakan Penetapan Direktur Pengganti yang tertuang dalam SK Direksi BRI No. S.08-DIR/ CDS/12/2020.

Direktur Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan

Direksi

bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.

2. Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur Utama Pengganti I adalah Wakil Direktur Utama.
4. Direktur Utama Pengganti II adalah 2 (dua) Direktur yang ditunjuk, kecuali Dikertur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir dengan tetap *four eyes principle* sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan tentang perkreditan.
5. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka tugasnya dapat dirangkap oleh Direktur Utama dan tidak diperlukan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
6. Wakil Direktur Utama pengganti II adalah 2 (dua) Direktur yang ditunjuk, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir.
7. Direktur Kepatuhan Pengganti harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai berikut:
   a. Direktur lain, kecuali Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
   b. Direktur Kepatuhan Pengganti dilarang membawahkan fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang & jasa, teknologi informasi dan audit intern.
   c. Apabila Direktur Kepatuhan Pengganti membawahkan fungsi-fungsi pada butir 'b' Ayat ini, maka tugas utamanya digantikan oleh Direktur Pengganti.
8. Direktur Pengganti I ditetapkan apabila Direktur tidak ada atau berhalangan hadir.
9. Direktur Pengganti II ditetapkan apabila Direktur dan Direktur Pengganti I tidak ada atau berhalangan hadir.
10. Direktur Pengganti III ditetapkan apabila Direktur, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II tidak ada atau berhalangan hadir.
11. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur Pengganti I s.d III menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur Pengganti.
12. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III, Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.
13. Dalam hal terdapat kondisi selain yang diatur dalam peraturan ini, Direksi dapat menetapkan Direktur pengganti sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu.

SEVP Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan SEVP yang tugasnya diambil alih.
2. Pengambilalihan tugas SEVP berlaku efektif apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurangkurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
4. Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
5. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur I dan Direktur II tersebut menjalankan tugas untuk mengambil alih tugas SEVP, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP.
6. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP dan Direktur Utarna serta Wakil Direktur Utarna tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat mengambil alih tugas SEVP.

MASA JABATAN DIREKSI

BRI patuh pada Peraturan OJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten bahwa 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada BRI.
3. BRI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 12 ayat 7 yang menjelaskan mengenai Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

PENILAIAN KEMAMPUAN & KEPATUTAN

Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 serta Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DIREKSI

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tugasnya, Direksi BRI dapat membentuk komite-komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi. Secara lengkap kinerja komite penunjang Direksi dibahas pada Sub-Bab Komite Direksi.

Direksi BRI membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Hingga 31 Desember 2020, BRI memiliki 9 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)

Direksi

2. Risk Management Committee (RMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Capital & Investment
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komite Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite Human Capital
9. Komite Produk

RENCANA SUKSESI DIREKSI

Suksesi Direksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Pelaksanaan suksesi Direksi mempertimbangkan dari berbagai aspek diantaranya:

1. segi bidang pekerjaan,
2. pengalaman kerja dan
3. kepemimpinan.

Prinsip pelaksanaan Suksesi Direksi didasarkan pada asas Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

BRI memiliki kebijakan *talent pool candidate* untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang potensial untuk menduduki posisi pimpinan di Perusahaan maupun Perseroan BUMN lain. Selain itu perusahaan juga secara berlaka melakukan evaluasi terhadap pejabat eksekutif maupun pejabat dibawahnya untuk dapat menjadi penerus selanjutnya sehingga kepemimpinan dan karakter tetap cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan diperlukan oleh perusahaan.

Kandidat yang terpilih kemudian diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya menjalani prosedur pencalonan Direksi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 beserta perubahannya No.PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2020 DAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2020 terdapat perubahan komposisi Direksi melalui RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020, dimana RUPS tersebut menyetujui, mengangkat dan/atau mengalihkan tugas Direktur BRI, sehingga komposisi menjadi, sebagai berikut:

Sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d 17 Februari 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1	Sunarso	Direktur Utama	3 Januari 2019
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	2 September 2019
3	Handayani	Direktur Konsumer	18 Oktober 2017
4	Supari	Direktur Bisnis Mikro	22 Maret 2018

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	15 Maret 2017
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	22 Maret 2018
7	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	2 September 2019
8	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	19 Maret 2015
9	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	2 September 2019
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	2 September 2019
11	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	23 Maret 2016
12	Azizatun Azhimah*	Direktur Kepatuhan	2 September 2019

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020

Sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1	Sunarso	Direktur Utama	3 Januari 2019
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	2 September 2019
3	Handayani	Direktur Konsumer	18 Oktober 2017
4	Supari	Direktur Bisnis Mikro	22 Maret 2018
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	15 Maret 2017
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	22 Maret 2018
7	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	2 September 2019
8	Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	19 Maret 2015
9	Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	2 September 2019
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	2 September 2019
11	Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	23 Maret 2016
12	Wisto Prihadi**	Direktur Kepatuhan	18 Februari 2020

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021
**) Dikukuhkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam RUPS Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN BERKELANJUTAN

BRI senantiasa berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang secara rutin dijalankan untuk setiap level jabatan sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pekerja dapat dilihat pada sub-bab Human Capital.

Pelatihan dan Pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana pada Bab Pendidikan dan Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA TAHUN 2020

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2020 telah dilaporkan pada masing-masing Ringkasan Kinerja Direktorat di masing-masing Sub Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen, Bab GCG, Sub Bab Manajemen Risiko, Sub Bab Satuan Kerja Audit Intern.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DIREKSI

Keputusan-keputusan Direksi diputuskan melalui forum Komite yang dibentuk oleh Direksi serta Forum Rapat Direksi yang secara detail dilaporkan pada Sub-Bab Rapat Direksi.

INDEPENDENSI DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (Board Charter) BRI mengatur tentang Independensi Direksi dimana Direksi wajib mendahukan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu serta menghindari potensi benturan kepentingan atas transaksi yang dilaksanakan oleh Bank.

Selain proses pengambilan keputusan oleh Direksi wajib terlepas dari tekanan atau intervensi pihak manapun. BRI memastikan adanya independensi Direksi melalui jajaran Direksi yang seluruhnaya anggotanya :

1. tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun dengan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan
2. tidak memiliki jabatan rangkap diluar BRI.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Direksi BRI telah memenuhi ketentuan Rangkap Jabatan sebagaimana terdapat pada Peraturan yang berlaku. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

No	Nama	Rangkap Jabatan					
		Anggota Dewan Komisaris		Direksi		Pejabat Eksekutif pada bank	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Sunarso		√		√		√
2	Catur Budi Harto		√		√		√
3	Handayani		√		√		√
4	Supari		√		√		√
5	Indra Utoyo		√		√		√

No	Nama	Rangkap Jabatan					
		Anggota Dewan Komisaris		Direksi		Pejabat Eksekutif pada bank	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto		√		√		√
7	Agus Noorsanto		√		√		√
8	Haru Koesmahargyo		√		√		√
9	Herdy Rosadi Harman		√		√		√
10	Agus Sudiarto		√		√		√
11	Priyastomo		√		√		√
12	Wisto Prihadi*		√		√		√

*) Dikukuhkan pemberhentiannya sejak 11 November 2020 pada RUPSLB 21 Januari 2021

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Direksi BRI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham (lembar) Anggota Direksi BRI Posisi Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Desember 2019	Desember 2020
1	Sunarso	Direktur Utama	-	1.008.000
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	329.200
3	Handayani	Direktur	522.300	1.602.500
4	Supari	Direktur	351.100	1.242.300
5	Indra Utoyo	Direktur	835.200	1.726.400
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur	928.200	1.819.400
7	Agus Noorsanto	Direktur	46.800	380.800
8	Haru Koesmahargyo	Direktur	944.400	1.835.600
9	Herdy Rosadi Harman	Direktur	-	311.900
10	Agus Sudiarto	Direktur	-	294.600
11	Priyastomo	Direktur	944.400	1.835.600
12	Wisto Prihadi	Direktur	-	-

Direksi

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BRI sepanjang tahun 2020 telah dilaporkan pada Perusahaan dalam 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transaksi atas saham yang dilaksanakan oleh anggota Direksi BRI sepanjang tahun 2020 di laporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Program Kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka tantiem Direksi dan Dewan Komisaris yang ditangguhkan dalam bentuk saham perusahaan (BBRI) untuk tahun buku 2019. Program ini merupakan program kepemilikan saham dalam rangka pemberian porsi tantiem yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan/syarat pencairan yang telah ditetapkan. Program ini hanya berlaku bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen yang menjabat selama periode tahun 2019.

Adapun program tersebut di eksekusi pada tanggal 28 Juli 2020 dengan rincian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (non-Independen) sebagai berikut:

Tabel Tantiem Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (non-Independen) dalam bentuk Saham tahun 2020 atas kinerja tahun 2019

No.	Nama	Jumlah Saham (lembar)
1	Sunarso	1.008.000
2	Suprajarto*	690.500
3	Catur Budi Harto	329.200
4	Sunarso	661.500
5	Haru Koesmahargyo*****	891.200
6	Priyastomo*****	891.200
7	Indra Utoyo	891.200
8	Handayani	891.200
9	Supari	891.200
10	Ahmad Solichin Lutfiyanto	891.200
11	Herdy Rosadi Harman*****	311.900
12	Agus Noorsanto	294.600
13	Agus Sudiarto	294.600
14	Azizatun Azhimah**	294.600
15	Mohamad Irfan*	596.600
16	Sis Apik Wijayanto*	596.600
17	R. Sophia Aliza*	631.700
18	Osbal Saragih R*	596.600

No.	Nama	Jumlah Saham (lembar)
19	Kuswiyoto***	4.700
20	Wahyu Kuncoro**	280.300
21	Gatot Trihargo****	165.300
22	Nicolaus Teguh Budi H	424.600
23	Hadiyanto	424.600
24	Loeke Larasati A**	140.300

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 02 September 2019
**) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020
***) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 03 Januari 2019
****) Diberhentikan dengan hormat pada 15 Mei 2019
*****) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program Orientasi Direksi

Setiap anggota Direksi BRI yang baru bergabung wajib mengikuti Program Orientasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Visi, misi dan strategi Perseroan.
2. Prinsip-prinsip GCG di dalam Perseroan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Pengenalan organ – organ Perseroan beserta tugas dan kewenangannya termasuk Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2020 program orientasi telah dilaksanakan pada minggu pertama setelah Direksi baru diangkat pada RUPS, untuk Direksi BRI yang baru diangkat yaitu Wisto Prihadi, Direktur Kepatuhan.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Pengembangan kompetensi dan pelatihan Direksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Direksi dalam menunaikan tugasnya. Program Pendidikan Pengembangan Kompetensi Direksi selama tahun 2020 sebagaimana telah dilaporkan pada Bab Profil.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi manajemen risiko sepanjang tahun 2020 yang diikuti anggota Direksi adalah sebagaimana tercantum di Bab Profil Perusahaan.

Direksi

PEMANTAUAN EVALUASI DAN STRATEGI BANK

Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas strategi 2020 yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemantauan dan evaluasi strategi 2020 dilaksanakan dalam bentuk:

1. Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas sesuai dengan struktur GCG yaitu fungsi eksekutif dan pengawasan termasuk dalam hal pemantauan dan evaluasi atas strategi Bank. Dalam hal ini baik strategi Bank dalam bentuk RKAP (tahunan), RBB (3 tahunan) serta Corporate Plan (Jangka Panjang).
2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam periode semesteran, evaluasi dilakukan oleh Direksi kemudian selanjutnya dimintakan pendapat dan putusan bersama dengan Dewan Komisaris BRI. Hal ini sudah dilaksanakan rutin dan selanjutnya apabila terdapat Revisi akan dimintakan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEKOM, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA & PENGENDALI

HUBUNGAN AFILIASI

1. Hubungan Keuangan
   Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.
2. Hubungan Keluarga
   Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.

Berikut adalah hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan				Hubungan Kepengurusan	
			BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC	BOD	Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andrinof A. Chaniago*)	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19 Juli 2017 – 18 Februari 2020		√		√		√		√		√		√
Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√	√			√		√		√
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√
A. Fuad Rahmany*)	Komisaris Independen	26 Mei 2017 – 18 Februari 2020		√		√		√		√		√		√
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2020 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√
Sonny Keraf*)	Komisaris Independen	10 Juni 2015 – 18 Februari 2020		√		√		√		√		√		√
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	29 Agustus 2019 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dekom, dan Pemegang Saham Utama & Pengendali

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan				Hubungan Kepengurusan	
			BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC	BOD	Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√
Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018 – 31 Desember 2020		√		√	√			√		√		√
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017 – 30 Desember 2020		√		√	√			√		√		√
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	18 Februari 2020 – 31 Desember 2020		√		√	√			√		√		√
Loeke Larasati Agoestina*)	Komisaris	2 September 2019 – 18 Februari 2020		√		√	√			√		√		√

*) diberhentikan pada RUPST 18 Februari 2020

Berikut adalah hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Direksi selama tahun 2020:

1. Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
2. Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesame anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.

Hingga 31 Desember 2020, tidak ada anggota Direksi yang miliki hubungan afiliasi dengan saham pengendali, maupun dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik secara keuangan, kepengurusan maupun hubungan keluarga.

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dekom, dan Pemegang Saham Utama & Pengendali

Bahwa Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar. Adapun data tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Anggota Direksi														
Sunarso		√		√		√		√		√		√		√
Catur Budi Harto		√		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargyo		√		√		√		√		√		√		√
Agus Noorsanto		√		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√		√
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√		√
Supari		√		√		√		√		√		√		√
Ahmad Solichin Lutfiyanto		√		√		√		√		√		√		√
Azizatun Azhimah*)		√		√		√		√		√		√		√
Agus Sudiarto		√		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√		√
Herdy Rosadi Harman		√		√		√		√		√		√		√
Wisto Prihadi**)		√		√		√		√		√		√		√

*) Berakhir jabatannya pada RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020
**) Diangkat oleh RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020 dan dikukuhkan pemberhentiannya per 11 November 2020

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris.Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, jenis kelamin, usia dan pengalaman. Perseroan memiliki 2 orang Komisaris dengan gender wanita yaitu Rofikoh Rokhim dan Dwi Ria Latifa. Profil masing-masing anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
							Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
Kartiko Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	47	18 Februari 2020	9 Bulan	Pria	S1 Akuntansi -Universitas Indonesia	21 Maret 2016 -25 Oktober 2019	Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25 Oktober 2019 - sekarang	Wakil Menteri BUMN	Banking
						S2 Bisnis, Rotterdam School of Management, Erasmus University	16 Maret 2015 – 21 Maret 2016	Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
							Jan 2014 -2015	Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner LPS			
							Okt 2011 – Des 2013	Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance			
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	58	18 Februari 2020	9 Bulan	Pria	S1 Ilmu Ekonomi – Universitas Indonesia	2017-2020	Komisaris Utama PT BNI (Persero) Tbk	Desember 2019 – Sekarang	Rektor Univesitas Indonesia	Ilmu Ekonomi, Banking
						S2 Ekonomi Pembangunan – University of Minnesota	Maret 2007 – Sekarang	Anggota Forum Komunikasi Riset Kestabilan Sistem Keuangan	Desember 2013 – Sekarang	BOD East Asian Economist Association	
						S3 Ilmu Ekonomi - Brown University					

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
							Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
Rofikoh Rokhim	Komisaris	48	18 Oktober 2017	3 Tahun 2 Bulan	Wanita	S1 / Ekonomi Manajemen UII Yogyakarta	2016 November 2017	Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit	2006 - sekarang	Dosen dan Peneliti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Indonesia	Ekonomi Manajemen Public Administration Finance Research
						S1 / Public Administration Universitas Gadjah Mada	2014-2015	Komite Audit dan Komite Risiko, PT. POS Indonesia			
						S2 / Public Finance French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA), Paris	2014-2015	Satgas Migas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral			
						S2 /D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris	2016-2017	Satgas Migas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral			
						S3 / Economics (Applied Macro and Micro Economics, Development Studies in Finance) Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris	2015-2017	Komisaris Utama, PT Hotel Indonesia Natour (Persero)			

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
							Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	62	15 Mei 2019	1 Tahun 7 Bulan	Pria	S1 / Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara	2007-2008	Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia	-	Tidak Memiliki Jabatan Lain	GCG Perbankan Hukum
						S2 / Magister Manajemen STIE IPWI	2008-2013	Kepala Biro Investigasi Perbankan Bank Indonesia			
							2013-2014	Kepala Pengawasan Perbankan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Bank Indonesia			
Zulnahar Usman	Komisaris Independen	57	18 Februari 2020	9 Bulan	Pria	S1 Teknik Perminyakan – Universitas Trisakti	2016-2019	Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI	2019 - Sekarang	Presiden Direktur -PT Trans Borneo Gas	Industri dan Pertambangan
									2015 – Sekarang	Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Energi Terbarukan	

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
							Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	63	18 Februari 2020	9 Bulan	Pria	S1 Hukum – Universitas Sebelas Maret	21 Agustus 2017 – Februari 2020	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	Tidak Memiliki Jabatan Lain	Ilmu Hukum
						S2 Manajemen – STIE IPWI	23 Oktober 2015 - 31 Agustus 2017	Jaksa Agung Muda Pengawasan - Jaksa Agung RI			
						S2 Hukum – Universitas Gadjah Mada					
						S3 Hukum Pidana – Universitas Padjajaran					
						S3 Hukum Pidana – Universitas Diponegoro					
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	54	18 Februari 2020	9 Bulan	Wanita	S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasila	2014 – 2019	Anggota DPR RI	1992 - Sekarang	Kantor Pengacara Rialatifa & Partner	Ilmu Hukum
						PPRA XL Lemhannas					
						S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada					
Hadiyanto	Komisaris	58	22 Maret 2018	2 Tahun 8 Bulan	Pria	S1 / Ilmu Hukum Universitas Padjajaran	2011-2015	Dewan Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	2015 - Sekarang	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Ilmu Hukum Human Capital Management Keuangan Negara
						S2 / Hukum (LL.M) Harvard University Law of School	2012-2018	Komisaris PT. Telkom Indonesia	2016 - Sekarang	Ketua Dewan Pengawas RS Dr. Cipto Mangunkusumo	
						S3 / Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran			2015 - Sekarang	Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
							Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	48	15 Maret 2017	3 Tahun 8 Bulan	Pria	S1 / Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada	2013-2015	Direktur Eksekutif Populi Center (Public Opinion & Policy Research)	2015 - Sekarang	Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)	Hubungan Internasional Ilmu Sosial Public Communication
						S2 / Ilmu Politik, Ohio University, Athens, Ohio, USA	2013-2016	Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPSI)	2016 - sekarang	Staff Khusus Mensetneg Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Sekretariat Negara Republik Indonesia	
						S3 / Ilmu Politik, Northern Illinois University, USA	2016-2017	Komisaris PT Permodalan Nasional Madani	2012 - 2016	Dosen Universitas Paramadina	
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	45	18 Februari 2020	9 Bulan	Pria	S1 Ekonomi & Matematika – University of Georgia	Maret 2019 – Januari 2020	Senior Economist – Asian Development Bank	Februari 2020 - Sekarang	Staff Khusus Menteri BUMN	Actuarist, Statistik, Banking, Sosial dan Ekonomi
						S2 Acturial Science – Universitas Indonesia	Agustus 2017 – Februari 2019	Coordinating Ministry of Economics Affairs - AIPEG			
						S3 Ekonomi – George Mason University	2008 – 2010	Country Analyst – The World Bank			

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, usia, jenis kelamin, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi.Keberagaman Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan dapat membantu Perseroan dalam mencapai target dan tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka Panjang.

Tabel Data Keberagaman Komposisi Direksi Bank BRI

Usia	Jenis Kelamin	Agama	Latar Belakang Pendidikan/Bidang Studi	Pengalaman Kerja	Pengalaman Kedirekturan/di bidang industri perbankan atau keuangan
Keberagaman usia Direksi mulai dari usia 50 s/d 60 tahun	Terdapat Direksi BRI berjenis kelamin lakilaki dan perempuan	Terdapat keberagaman lebih dari 1 agama	Direksi BRI memiliki latar belakang Pendidikan S1, S2 dan S3 seperti halnya dari beberapa jurusan/ keahlian manajemen bisnis, hukum, Pendidikan akuntansi, MBA, Magister Manajemen, ilmu pertanian, dokter gigi, magister administrasi bisis, Teknik Elektro Komunikasi, Communication and Signal Processing, dan Human Capital.	Pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di bidang keuangan/finansal dan/atau pengalaman di bidang tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan yang jabat saat ini.	Direksi Bank BRI memiliki pengalaman kedirekturan sebelum menjadi Direksi Bank BRI, Direksi Bank BRI memiliki pengalaman di dunia perbankan dan atau bidang tugas yang saat ini diemban oleh yang bersangkutan.

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman Direksi BRI yang menjabat selama periode tahun 2020 sebagaimana tabel terlampir:

Tabel Keberagaman Direksi BRI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin
Sunarso	Direktur Utama	57	09-Sep-19	1 tahun 3 Bulan	Pria
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	56	09-Sep-19	1 tahun 3 bulan	Pria
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	54	23 Maret 2015	5 tahun	Pria

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
S1 Institut Pertanian Bogor – Sarjana Agronomi	Mei 2010 – Maret 2015	Direktur Commercial & Business Banking	-	-	Corporate Banking, Finance & Strategy, Risk Management
S2 Administrasi Bisnis - Universitas Indonesia	Maret 2015 - Oktober 2017	Wakil Direktur Utama BRI			
	Oktober 2017 - Januari 2019	Direktur Utama PT Pegadaian (Persero)			
	Januari 2019 - September 2019	Wakil Direktur Utama BRI			
	September 2019 - Saat ini	Direktur Utama BRI			
S1 Institut Pertanian Bogor – Sarjana Agronomi	Februari 2013 - Maret 2014	Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin	-	-	Banking, Wealth Management, Consumer Banking, Commercial Banking
S2 Magister Manajemen - Prasetya Mulya	Maret 2014 - April 2015	Kepala Divisi Mass Banking BRI			
	April 2015 - Juli 2015	Kepala Divisi Wealth Management BRI			
	Juli 2015 - April 2016	SEVP Jaringan & Layanan BRI			
	April 2016 - Maret 2017	Direktur Bank BTN			
	Maret 2017 - September 2019	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan Bank BNI			
	September 2019 - Saat ini	Wakil Direktur Utama BRI			
S1 Teknologi Industri Pertanian - Universitas Brawijaya	Juli 2011 - Agustus 2014	General Manager BRI New York	-	-	Investment Banking, Finance & Strategy, Banking
S2 Investment Banking - Emory university USA	September 2014 - Maret 2015	Kepala Divisi Treasury BRI			
	Maret 2015 - Januari 2021	Direktur Keuangan BRI			

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin
Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	57	18 Maret 2016	4 Tahun	Pria
Handayani	Direktur Konsumer	55	18 Oktober 2017	3 tahun 3 bulan	Wanita
Supari	Direktur Bisnis Mikro	54	15 Maret 2018	2 tahun 9 bulan	Pria

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
S1 Peternakan - UGM	April 2015 - Desember 2015	Pemimpin Wilayah BRI Jayapura	-	-	Micro & Retail Banking, Banking,
S2 Manajemen Internasional - UGM	Januari 2016 - Maret 2016	Pemimpin Wilayah BRI Bandung			
	Maret 2016 - Mei 2017	Direktur Kepatuhan BRI			
	Mei 2017 - Oktober 2017	Direktur Human Capital			
	Oktober 2017 - Maret 2018	Direktur Kredit Mikro & Kecil			
	Maret 2018 - September 2019	Direktur Kredit Mikro & Kecil			
	September 2019 - Januari 2021	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah			
S1 Kedokteran Gigi - Universitas Airlangga	Januari 2013 - Desember 2014	Direktur PT Axa Mandiri	-	-	Consumer Banking, Retail Banking, Finance
S2 Magister Manajemen - Universitas Padjajaran	Desember 2014 - April 2015	Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.			
	April 2016 - Oktober 2017	Direktur Bank BTN			
	Oktober 2017 - sekarang	Direktur Konsumer BRI			
S1 Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya	Maret 2014 - April 2015	Pemimpin Wilayah BRI Padang	-	-	Micro & Small Banking, Banking, Strategy
	April 2015 - Mei 2016	Pemimpin Wilayah BRI Makassar			
	Mei 2016 - Mei 2017	SEVP UKM & Konsumer BRI			
S2 Magister Manajemen Agribisnis - UGM	Mei 2017 - Oktober 2017	SEVP Manajemen Jaringan			
	Oktober 2017 - Maret 2018	SEVP Transformation			
	Maret 2018 - Sekarang	Direktur Bisnis Mikro			

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin
A. Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	50	15 Maret 2018	2 tahun 9 bulan	Pria
Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	58	15 Maret 2017	3 tahun 9 bulan	Pria

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
S1 Teknologi Hasil Pertanian - Universitas Jember	Agustus 2016 - Oktober 2016	Kepala Project Management Office (Vice President)	-	-	Compliance, GCG, Transaction Banking
S2 Manajemen Pemasaran - UGM & Agder College University, Norway	Oktober 2016 - Juli 2017	Kepala Divisi Transaction Banking			
	Juli 2017 - Maret 2018	Kepala Divisi Pengembangan Human Capital			
	Maret 2018 - September 2019	Direktur Kepatuhan BRI			
	September 2019 - Januari 2021	Direktur Jaaringan & Layanan			
	Januari2021 - Sekarang	Direktur Kepatuhan BRI			
S1 Teknik Elektro Telekomunikasi - ITB	Maret 2012 - Juli 2016	Direktur PT Telekomunikasi Indonesia	-	-	Information Technology, Digital, Satellite
S2 Communication & Signal Processing - Imperial College University of London	Oktober 2014 - Desember 2014	Komisaris Utama PT. Telkom Indonesia			
S3 Strategic Management - Universitas Indonesia	Agustus 2016 - Maret 2017	Komisaris Utama PT Metra Digital Innovation (Telkom MDI)			
	Maret 2017 - Sekarang	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi			

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	56	03-Sep-19	1 tahun 3 Bulan	Pria
Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	56	09-Sep-19	1 tahun 3 Bulan	Pria

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
S1 Hukum Tata Negara - Universitas Indonesi	Mei 2014 - April 2017	Direktur Utama Bank Syariah Mandiri	-	-	Risk Management, Asset & Liability Management, Legal
S2 Magister Manajemen - Universitas Indonesia	April 2017 - September 2019	SEVP Special Asset Management Bank Mandiri			
	September 2019 - Sekarang	Direktur Manajemen Risiko BRI			
S1 Ekonomi Akuntansi - Universitas Padjajaran	Januari 2015 - April 2015	Kepala Divisi Hubungan Lembaga 1 BRI	-	-	Corporate Banking, Finance, Consumer Banking
	April 2015 - Desember 2015	Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2			
	Januari 2016 - April 2016	SEVP Small Medium, & Consumer Bussiness BRI			
S2 Agribisnis - Institut Pertanian Bopgor	Mei 2016 - Desember 2017	SEVP Jaringan & Layanan BRI			
	Desember 2017 - September 2019	Direktur Utama BRI Agro			
	September 2019 - Sekarang	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMn BRI			

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin
Herdy R. Harman	Direktur Human Capital	57	09-Sep-19	1 tahun 3 Bulan	Pria
Wisto Prihadi*	Direktur Kepatuhan	60	18 Februari 2020	10 bulan	Pria

*) Dikukuhkan pemberhentiannya terhitung mulai tanggal 11 November 2020 pada RUPSLB 21 Januari 2021

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pendidikan	Pengalaman Kinerja		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
S1 Hukum Universitas Padjajaran	Juni 2012 - Desember 2014	Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Seluler	-	-	Human Capital Management, Hukum
	Februari 2015 - Januari 2016	Komisaris Utama OT Graha Sarana Duta			
S2 Manajemen - Asian Institute Management Philippines	Januari 2016 - Juni 2019	Komisaris Utama PT Infomedia Nusantara			
S3 Hukum - American University- Washington College of Law, USA	Desember 2014 - Juni 2019	Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Indonesia Tbk			
	September 2019 - Januari 2021	Direktur Human Capital BRI			
S1 Ekonomi - Univesitas Kristen Indonesia	Februari 2018 - Juli 2018	Direktur Utama PT Brimgin Indotama Sejahtera Makmur	-	-	Human Capital, Multifinance
S1 Magister Manajemen Agribisnis - IPB	Julil 2018 - Februari 2020	Direktur Utama PT BRI Multifinance Indonesia			
	Februari 2018 - November 2020	Direktur Kepatuhan BRI			

PENILAIAN PENERAPAN PERUSAHAAN TAHUN 2020 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian kinerja dilakukan atas *Key Performance Indicator* (KPI) kolegial atau KPI bersama dan KPI Direktorat (Individu)

PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

Kinerja Direktorat (Individu) dinilai berdasarkan atas pencapaian target KPI masing-masing Direktorat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Direktur Utama

- Terjaganya kesehatan Bank
- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKAP dan RBB
- Tercapainya pelaksanaan program-program dari Pemerintah
- Tercapainya peningkatan volume bisnis
- Terjaganya kualitas aktiva produktif

2. Wakil Direktur Utama

- Terjaganya kesehatan Bank
- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKAP dan RBB
- Tercapainya pelaksanaan program-program dari Pemerintah
- Tercapainya peningkatan volume bisnis
- Terjaganya kualitas aktiva produktif

3. Direktorat Keuangan

- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKAP dan RBB
- Terjaganya rasio permodalan
- Tercapainya kinerja perusahan anak
- Tercapainya target implementasi *corporateaction*

4. Direktorat Konsumer

- Tercapainya CASA dan simpanan ritel
- Terjaganya kualitas pinjaman segmen konsumer
- Tercapainya target *fee based income* untuk segmen konsumer
- Tercapainya peningkatan penggunaan *Internet Banking* (incl.BRImo)

Penilaian Penerapan Perusahaan Tahun 2020 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

5. Direktorat Bisnis Mikro

- Tercapainya target penyaluran KUR dan bantuan sosial
- Tercapainya target kualitas pinjaman segmen mikro
- Tercapainya target simpanan dan pinjaman segmen mikro
- Tercapainya target *fee based income* segmen mikro

6. Direktorat Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah

- Tercapainya CASA segmen SME
- Tercapainya *volume supply chain*
- Terjaganya kualitas pinjaman segmen SME

7. Direktorat Hubungan Kelembagaan dan BUMN

- Tercapainya target volume bisnis untuk segmen kelembagaan.
- Tercapainya target simpanan dan CASA
- Tercapainya peningkatan *volume trade finance* dan bank garansi

8. Direktorat *Corporate Banking*

- Tercapainya target *fee based income* segmen korporasi
- Tercapainya target pinjaman dan simpanan segmen korporasi
- Tercapainya target volume bisnis segmen korporasi

9. Direktorat *Treasury and Global Services*

- Tercapainya target keuntungan bisnis *treasury*
- Tercapainya target *fee based income & interest correspondent bank*
- Tercapainya kontribusi UKLN

10. Direktorat Manajemen Risiko

- Terjaganya profil risiko bank
- Terjaganya Tingkat Kesehatan Bank
- Terjaganya kualitas pinjaman dan rasio permodalan

11. Direktorat Kepatuhan

- Peningkatan skor *Good Corproate Governance* (GCG)
- Tercapainya target peringkat *Good Corporate Governance* dan tata kelola terintegrasi
- Tercapainya target pengendalian *fraud* internal

12. Direktorat Jaringan dan Layanan

- Tercapainya target produktivitas jaringan kerja
- Terjaganya kepuasan pelanggan
- Tercapainya target bisnis dari *branchless banking* (BRILink)

Penilaian Penerapan Perusahaan Tahun 2020 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

13. Direktorat *Human Capital*

- Peningkatan *Employee Engagement Index*
- Tercapainya target *Organization Culture Health Index*
- Tercapainya prosentase perempuan dan milenial dalam level C-1 (1 tingkat dibawah BOD) dan C-2 (2 tingkat dibawah BOD)

14. Direktorat Digital, Teknologi Informasi dan Operasi

- Tercapainya target IT *maturity level*
- Terjaganya *availability* jaringan dan layanan IT

15. Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan

- Tercapainya target pengelolaan anggaran eksploitasi dan investasi
- Tercapainya target realisasi pekerjaan eksploitasi dan investasi non-IT

16. Direktorat *Change Management & Transformation Office*

- Tercapainya target pengelolaan project Perusahaan
- Tercapainya target *outcome* dari transformasi bisnis dan proses

17. Satuan Kerja Audit Intern

- Terjaganya kerugian akibat kelemahan internal kontrol
- Tercapainya indikator kunci kinerja perusahaan

PENILAIAN KINERJA DIREKSI KOLEGIAL

Penilaian Kinerja Direksi Kolegial tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Adapun kriteria evaluasi kinerja yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang terdiri dari aspek finansial dansosial
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Penilaian Penerapan Perusahaan Tahun 2020 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian kinerja Direksi secara kolegial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perspektif		Bobot	Ukuran
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	Finansial	6.0%	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020
		7.0%	Net Profit After Tax (NPAT) tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020
		2.0%	Capital Adequacy Ratio (CAR) tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020
		5.0%	RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020
		4.0%	Credit Cost tercapai maksimal sesuai RKAP Revisi 2020
	Sosial	8.0%	Penyaluran KUR minimal sesuai 95% dari target kuota Pemerintah
		5.0%	Yield KUR lebih tinggi dibandingkan biaya bunga (COF)
		6.0%	Penyaluran program bantuan sosial minimal 90% dari kuota Pemerintah
Inovasi Model Bisnis		5.0%	Implementation of agreed business model inovation initiatives to create long-term unique value proposition atas rencana inbreng BRI, PNM, Pegadaian sesuai milestone
		7.0%	Pertumbuhan nasabah retail yang menggunakan fasilitas Internet Banking (inc. BRImo) lebih tinggi dari tahun lalu
		5.0%	Hasil survei kepuasan pelanggan oleh surveyor independen lebih baik dari tahun
Kepemimpinan Teknologi		4.0%	Project milestone/progress report completion of planned tech initiatives atas pengembangan ekosistem bisnis
		3.0%	Tidak terdapat insiden IT security (cybersecurity) breach
		3.0%	IT Maturity Level minimal mencapai Level 3
Peningkatan Investasi		5.0%	Implementasi merger BSM, BRIS, dan BNIS sesuai milestone
		5.0%	Good Corp. Governance (GCG) Score lebih baik dari tahun lalu

Penilaian Penerapan Perusahaan Tahun 2020 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Perspektif	Bobot	Ukuran
Pengembangan Talenta	4.0%	% perempuan dalam nominated talent pada level C-1 (1 tingkat dibawah BOD) dan C-2 (2 tingkat dibawah BOD) lebih baik dari tahun lalu
	4.0%	% milenial (<40 tahun) dalam top talent pada level C-1 (1 tingkat dibawah BOD) dan C-2 (2 tingkat dibawah BOD) lebih baik dari tahun tahun lalu
	4.0%	Employee engagement/development index lebih baik dari tahun lalu
	4.0%	Pengesahan pembentukan Klaster/Sub Klaster BUMN Institute
	4.0%	Persetujuan KBUMN untuk Program Pengembangan Talenta lingkup Klaster/Sub Klaster, termasuk program suksesi Direksi dan pengembangan top talent muda (<=40 tahun)
Total Bobot Kesuluruhan	100.0%	

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka Panjang, dan potensi pendapatan di masa yang akan datang. Kebijakan remunerasi berpedoman kepada ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   a. Pasal 113 bahwa honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
   b. Pasal 96 bahwa besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiridari: honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum,bahwa:
   a. Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukan *risk taking prudent* dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan.
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang serta menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
   c. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (MRT).

Berpedoman pada ketentuan diatas, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas evaluasi pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris mengajukan usulan penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Direksi

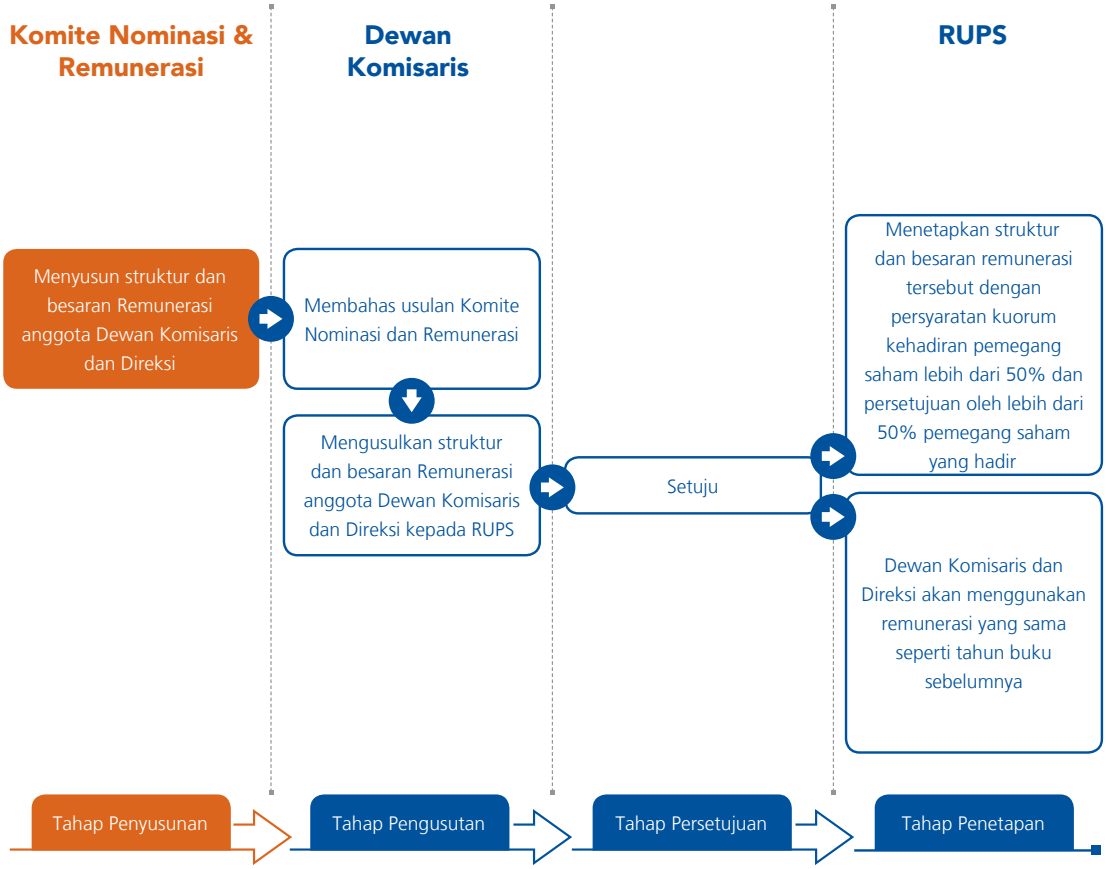

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	**Komite Nominasi dan Remunerasi** Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.
Tahap Pengusulan	**Dewan Komisaris** Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penetapan	**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komsiaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem
   Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan masing-masing sebesar 95% dan 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan
   Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	JENIS	URAIAN
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh
2.	Tunjangan Transportasi	Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana huruf a di atas. Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
3.	Asuransi Purna Jabatan	Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
4.	Keanggotaan pada Club	Diberikan dua keanggotaan Club Profesi.
5.	Pakaian *Corporate*	Diberikan dua stel jas *corporate* dan satu baju batik per Tahun.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

3. Fasilitas
   Fasiltas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Kesehatan	Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal tiga orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 Tahun Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: rawat jalan dan obat; rawat inap dan obat; medical *check up.* Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: Penggantian *Frame* setiap dua Tahun maksimal sebesar Rp15 juta. Penggantian Lensa setiap 1 Tahun. *Medical check up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: *Medical check up* diberikan 1 kali setiap Tahun. *Medical check up*dilakukan di dalam negeri. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping
2.	Fasilitas Bantuan Hukum	Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.

4. Fasilitas Lainnya
   Fasiltas lainnya yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	JENIS	URAIAN
1.	Fasilitas Lainnya	Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya berupa perjalanan dinas, pemberian laptop/ipad dan pengemudi yang diberikan sesuai ketentuan intern perusahaan yang diatur dalam suatu keputusan Direksi.

BESARAN REMUNERASI DAN FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Dewan Komisaris BRI tahun buku 2020

No	Nama	Honorarium	THR *)	Tantiem **)	Tunjangan Transportasi	Premi Asuransi Purna Jabatan	Pakaian Corporate
1	Kartika Wirjoatmodjo	√	-	-	√	√	-
2	Ari Kuncoro	√	-	-	√	√	√
3	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	√	-	√	√	√	√
4	Rofikoh Rokhim	√	-	√	√	√	√
5	Hadiyanto	√	-	√	√	√	√
6	Hendrikus Ivo	√	-	√	√	√	√
7	Rabin Indrajad Hattari	√	-	-	√	√	√
8	R. Widyo Pramono	√	-	-	√	√	√
9	Zulnahar Usman	√	-	-	√	√	√
10	Dwi Ria Latifa	√	-	-	√	√	√
11	Andrinof A. Chaniago ***)	√	-	√	√	-	√
12	Fuad Rahmany ***)	√	-	√	√	-	-
13	A. Sonny Keraf ***)	√	-	√	√	-	-
14	RR. Loeke Larasati A ***)	√	-	√	√	-	-
15	Wahyu Kuncoro ****)	-	-	√	-	-	-
16	Gatot Trihargo ****)	-	-	√	-	-	-
17	Mahmud ****)	-	-	√	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	17.475.758.790		101.233.514.242	3.407.118.000	4.483.957.500	617.994.454

*) tahun 2020 tidak diberikan THRK sesuai dengan Surat Menteri BUMN RI No S-255/MBU//04/2020
**) tantiem sebelum pajak untuk tahun buku 2019
***) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020
****) Dikukuhkan pemberhentiannya pada RUPST 18 Februari 2020
*****) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 15 Mei 2019

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2020)	
	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi:		
Gaji*	14	17,475
Tunjangan Rutin**	11	4,025
Tantiem***	11	109,287
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi ****	14	3,407
Asuransi Purna Jabatan *****	10	4,483
Jenis Remunerasi per Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	0	-
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar*****	10	16,448
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	0	-
Di bawah Rp 500 juta *******	4	987

*) termasuk Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2020 namun diberhentikan pada RUPST 18 Februari 2020
**)Tunjangan terdiri dari THR, Transportasi dan pakaian Corporate pada Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2020
***) Diberikan kepada Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2020
****) Termasuk diberikan kepada Dewan Komisaris yang diberhentikan pada RUPST tanggal 18 Februari 2020
*****) Diberikan pada Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2020
******) Belum dipotong pajak
*******) Termasuk Dewan Komisaris yang diberhentikan pada RUPST tanggal 18 Februari 2020

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris R.43-KOM/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor: S-421/MBU/D5/06/2020 sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95%, gaji Direktur yang membidangi sumber daya manusia sebesar 90% dari Direktur Utama dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
2. Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk didalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus fit and proper test oleh OJK.

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Keanggotaan Klub	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: 2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan Club Financial. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club) 2 (dua) club profesi. Direktur: 1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club). 2 (dua) club profesi	Keanggotaan bersifat untuk pengembangan potensi bisnis dan relasi.
Pakaian corporate	Berupa 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per tahun.	Berupa pakaian untuk kegunaan dinas.
Komunikasi	Biaya pulsa diganti sesuai dengan pemakaian	Diberikan 2 (dua) unit HP yang dapat diganti setiap tahun.

3. Fasilitas

Tipe Types	Penjelasan
Kesehatan	Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Direksi dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: Rawat jalan dan obat; Rawat inap dan obat; Medical check up. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: Penggantian Frame setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp.15 juta. Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun. Medical check up diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Medical check up diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun. Medical check up dilakukan di dalam negeri. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping.
Fasiltitas Bantuan Hukum	Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

BESARAN REMUNERASI DAN FASILITAS ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2020

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Direksi BRI tahun buku 2020

NO	Nama	Upah	THR*	Tantiem**
	DIREKSI BRI			
1	Sunarso	√	-	√
2	Catur Budi Harto	√	-	√
3	Haru Koesmahargyo****	√	-	√
4	Agus Noorsanto	√	-	√
5	Priyastomo****	√	-	√
6	Indra Utoyo	√	-	√
7	Supari	√	-	√
8	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√	-	√
9	Azizatun Azhimah***	√	-	√
10	Agus Sudiarto	√	-	√
11	Handayani	√	-	√
12	Herdy Rosadi Harman****	√	-	√
13	Wisto Prihadi*****	√	-	√
14	Suprajarto******	-	-	√
16	Mohamad Irfan******	-	-	√
17	Sis Apik wijayanto******	-	-	√
18	R. Sophia Aliza******	-	-	√
19	Osbal Saragih Rumahorbo******	-	-	√
20	Kuswiyoto*******	-	-	√
	JUMLAH TOTAL	44.915.200.000,00	-	308.766.485.758

*) Tahun 2020 tidak diberikan THR (sesuai Surat Menteri BUMN RI No: S-255/MBU/04/2020)
**) Tantiem sebelum pajak untuk tahun buku 2019
***) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 18 Februari 2020
****) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021
*****) Dikukuhkan pemberhentiannya terhitung mulai tanggal 11 November 2020 pada RUPSLB 21 Januari 2021
******) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 09 September 2019
*******) Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 03 Januari 2019

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengobatan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Pakaian Corporate
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	-	√	√	-
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
776.534.494	11.434.500.000	3.284.416.667	956.781.000	705.124.379

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2020)	
	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi:		
Gaji*	13	44,915
Tunjangan Rutin***	13	3,989
Tantiem**	19	308,766
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi	13	956
Asuransi Purna Jabatan	13	11,434
Jenis Remunerasi per Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	12	44,425
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar**	0	-
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	1	489

*) termasuk Direksi yang menjabat pada periode 2018 namun tidak menjabat lagi setelah RUPSLB tanggal 03 Januari 2019, RUPSLB 2 September 2019.
**) Termasuk Direksi yang diberhentikan pada RUPSLB tanggal 03 Januari 2019, RUPSLB 2 September 2019.
***) Tunjangan terdiri dari THR, Tunjangan perumahan, Transportasi dan pakaian Corporate

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko.

Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
2. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah 10% dari Tantiem.

Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus).

Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:

1. Terbukti adanya Individual Fraud.
2. Restatement laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
3. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (Moderate to High) atau lebih buruk.

Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perusahaan adalah kompetitif secara eksernal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan bekerjasama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan benchmarking dan/atau Salary Survey sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan jumlah nominalnya.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 tahun.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi yang bersifat Variable meliputi:

1. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel. Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
   a. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan; dan
   b. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
      i. Tunjangan Kinerja.
         Tunjangan Kinerja merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun. Tunjangan Kinerja bertujuan untuk mendorong motivasi Pekerja, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.
      ii. Bonus.
         Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.
2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).
3. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
   a. Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
   b. Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
   c. Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja yang menerima remunerasi bersifat variabel (yang ditangguhkan) selama 1 (satu) tahun atas tantiem tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan

No	Nama	Jabatan	Jenis Remunerasi Variabel (yang ditangguhkan)*
Direksi			
1	Sunarso	Direktur Utama	Saham
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Saham
3	Handayani	Direktur Konsumer	Saham
4	Supari	Direktur Bisnis Mikro	Saham
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	Saham
6	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Saham
7	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	Saham
8	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	Saham

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jenis Remunerasi Variabel (yang ditangguhkan)*
9	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	Saham
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Saham
11	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	Saham
12	Azizatun Azhimah**	Direktur Kepatuhan	Saham
13	Wisto Prihadi***	Direktur Kepatuhan	-
Dewan Komisaris			
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	-
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-
3	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	Saham
4	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	Cash
5	Hadiyanto	Komisaris	Saham
6	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Cash
7	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	-
8	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	-
9	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	-
10	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-
11	Andrinof A. Chaniago ****)	Komisaris Utama/Independen	Cash
12	Fuad Rahmany ****)	Komisaris Independen	Cash
13	A. Sonny Keraf ****)	Komisaris Independen	Cash
14	RR. Loeke Larasati A ****)	Komisaris	Saham
15	Wahyu Kuncoro ****)	Komisaris	Saham
16	Gatot Trihargo *****)	Komisaris	Saham
17	Mahmud *****)	Komisaris Independen	Cash

*) remunerasi yang ditangguhkan dengan presentase tertentu atas pencapaian kinerja tahun buku 2019
**) Berakhir jabatannya pada RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020
***) Diangkat oleh RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020 dan dikukuhkan pemberhentiannya tmt 11 November 2020
****) Diberhentikan den gan hormat pada RUPST 18 Februari 2020
****) masa jabatan sd 2019
*****) Diberhentikan dengan hormat pada RUPST 15 Mei 2019

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi bersifat variabel yang Ditangguhkan dalam Rupiah

Keterangan	Jumlah*	Total Nominal (Rp)
Direksi	18 orang	33.717 juta
Dewan Komisaris	11 orang	11.054 juta
Pekerja**	88.886 orang	5,3 Triliun

*termasuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2019
**Berdasarkan data pekerja yang memperoleh remunerasi variabel pada tahun 2020

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sbb.:

1. Direksi (12 orang)
2. Dewan Komisaris (10 orang)
3. Senior Executive Vice President (SEVP) (4 orang)

Share Option yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

1. Kebijakan *Share Option*
2. Data telah disajikan dalam sub bab *Share Option*
3. Jumlah Saham yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat Eksekutif sebelum diberikan Share Option.
4. Terdapat pada sub bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris BRI.
5. Jumlah Share Option yang diberikan. Jumlah Share Option mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja perusahaan, unit kerja dan individu serta memperhitungkan stock option yang telah dialokasikan untuk kebijakan share option.
6. Jumlah share option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir tahun 2020. Pada tahun 2020, belum dilakukan eksekusi terhadap share option.
7. Harga opsi yang diberikan
8. (Data telah disajikan dalam sub bab Share Option)
9. Jangka waktu berlakunya eksekusi share option
10. (Data telah disajikan dalam sub bab Share Option

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2018	2019	2020
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	36,04	31,24	31,13
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18	1,16	1,18
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,14	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,56	2,60	2,88

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pekerja selama 1 tahun pertama bekerja.

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.
Tidak terdapat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun buku 2020)	
	Tunai (Gross)	Saham (setara rupiah)
Direksi	-	Rp37.717 juta
Dewan Komisaris	Rp6.654 juta	Rp4.400 juta
SEVP	Rp1.783 Juta	106.200 lembar

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu tahun.

1. Remunerasi yang bersifat Tetap atau Variabel.

Deskripsi	Total
Kompensasi yang bersifat tetap	Rp11.124.660 juta
Kompensasi yang bersifat variable	Rp5.337.232 juta

2. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perusahaan.
   a. Upah Bulanan
   b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
   c. Tunjangan cuti
   d. Tunjangan Kinerja
   e. Bonus/Tantiem

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total remunerasi yang masih ditangguhkan baik penyesuaian implisit atau eksplisit.
   Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
2. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan penyeseuaian eksplisit selama tahun 2019.
3. Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
4. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama tahun 2019.
5. Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan & Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Rapat Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Bidang. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan. Inisiatif rapat gabungan ini dapat berasal dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Melalui rapat gabungan ini, didapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional harian Perseroan.

Etika Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan; Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (e-mail) paling lambat lima hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis, dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.
6. Panggilan rapat seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
7. Pedomanpelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut:
   a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
   b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
   c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
   d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
   e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
   f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Materi rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yangberhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksidapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Suara

1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut:
   a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;
   b. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalammenentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
   c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir;
   d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan huruf *b* wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

1. Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direks

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
1	Selasa, 21 Januari 2020	Pembahasan kinerja keuangan tw IV 2019 dan realisasi RBB 2019-2021	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
2	Selasa, 17 Maret 2020	Rencana Strategi BRI Mengantisipasi Dampak Virus Corona	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
3	Selesa, 24 Maret 2020	Pemaparan Dampak Covid 19 terhadap BRI dan strategi pengelolaan manajemen risiko BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
4	Selasa, 12 Mei 2020	Kinerja keuangan tw I 2020 dan evaluasi pencapaian RBB sampai dengan tw I 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
5	Selasa, 19 Mei 2020	Usulan Perubahan Organisasi BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
6	Kamis, 18 Juni 2020	Pembahasan Revisi RBB 2020-2022 dan RKAP 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
7	Selasa, 14 Juli 2020	Update Keikutsertaan BRI sebagai Bank Peserta dalam rangka PMK Nomor 64/PMK.05/2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
8	Selasa, 11 Agustus 2020	Update Penanganan dan Dampak Covid 19 Bagi pekerja BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
9	Selasa, 11 Agustus 2020	Usulan perubahan logo perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
10	Selasa, 18 Agustus 2020	Kinerja Keuangan Tw II 2020, Evaluasi Pencapaian RBB sampai dengan Triwulan II 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
11	Selasa, 10 November 2020	Pembahasan Usulan Perubahan Logo BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
12	Selasa, 10 November 2020	Kinerja Keuangan Triwulan II 2020, Realisasi RBB dan RKAP 2020 sd 2022 Triwulan III 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
13	Selasa, 24 November 2020	Pembahasan RBB BRI Tahun 2021-2023 dan RKAP tahun 2021	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
Total Rapat			**1**	**12**	**12**	**13**	**13**	**12**	**12**	**12**	**1**	**1**	**13**	**13**	**12**	**1**
Total Kehadiran			**1**	**12**	**12**	**13**	**13**	**12**	**12**	**12**	**1**	**1**	**13**	**13**	**12**	**1**
% Total Kehadiran			100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%

Catatan :

AAC : Andrinof A Chaniago
KWA : Kartiko Wirjoatmodjo
AK : Ari Kuncoro
RR : Rofikoh Rokhim
HI : Hendrikus Ivo
RWP : R. Widyo Pramono
ZU : Zulnahar Usman
DRL: Dwi Ria Latifa
AFR : A. Fuad Rahmany
SK : Sonny Keraf
NBH : Nicolaus T. Budi Harjanto
HD : Hadiyanto
RIH: Rabin Indrajad Hattari
LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Fit & Proper Test OJK)

2. Rapat Dewan Komisaris & Direktur Bidang

No	Hari & Tanggal Rapat	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
1	Kamis, 9 Januari 2020	Tindak lanjut hasil audit IT, pengadaan dan kejadian Fraud BRI Tahun 2019	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
2	Selasa, 28 Januari 2020	Rencana strategic partnership BRI Life (Project Garuda)	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	1	-	1
3	Selasa, 28 Januari 2020	Implementasi qonun aceh terkait konversi BRI Kanwil Aceh menjadi BRI Syariah	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	0	-	1
4	Selasa, 3 Maret 2020	Digitalisasi Mikro dan Rencana Kerja Sama BRI dengan PNM dan Pegadaian	-	0	1	1	1	1	1	1	-	-	1	0	0	-
5	Selasa, 10 Maret 2020	Konsultasi rencana buyback saham	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
6	Selesa, 24 Maret 2020	Pembahasan Temuan Audit Signifikan SKAI terkait dengan Pengembangan Kawasan BRI, Kegagalan Topup Linkaja dan Penyaluran Kredit Briguna BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
7	Selasa, 31 Maret 2020	Tindak lanjut temuan signifikan SKAI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
8	Selasa, 28 April 2020	Tindak lanjut hasil temuan SKAI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
9	Selasa, 5 Mei 2020	Monitoring Kredit PEP & Portofolio Kredit korporasi terdampak Covid 19	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
10	Selasa, 19 Mei 2020	Bisnis Proses perkreditan di Unit kerja BRI, Pengelolaan Human capital bidang prekreditan	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
11	Selasa, 2 Juni 2020	Roadmap IT BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No	Hari & Tanggal Rapat	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
12	Selasa, 9 Juni 2020	Strategi mass funding dan fbi BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
13	Selasa, 9 Juni 2020	Usulan hibah danan kemitraan bri ke pt PNM	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
14	Kamis, 11 Juni 2020	Strategi likuiditas BRI dan FBI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
15	Kamis, 11 Juni 2020	Strategic Partnership bri life progress report project garuda 2.0	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
16	Kamis, 18 Juni 2020	Update Progress restrukturirasi kredit	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
17	Selasa, 23 Juni 2020	Strategi pengembangan bisnis kelembagaan dan BUMN	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
18	Selasa, 30 Juni 2020	Strategi pengembangan branch model dan layanan BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
19	Selasa, 7 Juli 2020	a. Permohonan persetujuan rencana partnership BRILIFE b. Penyediaan dana pihak terkait BRILife (Repo)	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
20	Selasa, 14 Juli 2020	Monitoring Implementasi Transformasi di Bidang Human Capital Pengelolaan Human Capital dalam Era New Normal Kebijakan Remunerasi Pekerja BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
21	Selasa, 21 Juli 2020	1. Transformasi Culture Pekerja BRI 2. Program Employee Value Preposition BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
22	Selasa, 11 Agustus 2020	Update Persiapan Launching Superapp	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
23	Selasa, 18 Agustus 2020	Tambahan Modal BRI Finance Indonesia	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
24	Selasa, 1 September 2020	Workforce Planning dan Struktur Pekerja BRI dan Perusahaan Anak BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
25	Senin, 7 September 2020	1. Entry Meeting pemeriksaan OJK Tahun 2020 2. Kick off meeting dalam rangka audit atas laporan keuangan BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
26	Selasa, 8 September 2020	Restrukturisasi Kredit korporasi yang terdampak Covid 19	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
27	Selasa, 8 September 2020	Strategi pengembangan bisnis dan update restrukturisasi kredit kecil ritel dan menengah yang terdampak covid 19	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
28	Senin, 14 September 2020	Pembahasan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Bank periode Semester I 2020, terutama terkait penerapan POJK Stimulus terkait Restrukturisasi Dampak Covid 19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No	Hari & Tanggal Rapat	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
29	Selasa, 15 September 2020	Simulasi stress test terhadap kebijakan penerapan kembali PSBB atas kualitas kredit BRI di Jakarta dan Nasional	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
30	Rabu, 23 September 2020	Pembahasan usulan organisasai SEVP Operation, Update implementasi organisasi risk dan compliance officer RCO	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
31	Rabu, 23 September 2020	Monitoring implementasi pelaksanaan PEN BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
32	Rabu, 23 September 2020	Proyeksi CKPN Tahun 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
33	Selasa, 29 September 2020	Pembahasan Inisiatif dan Strategi Direktorat Change Management & Transformation Office	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
34	Selasa, 6 Oktober 2020	Update perkembangan BRIlink dan Sinergi BRIlink dengan anak perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
35	Selasa, 20 Oktober 2020	Update Pengembangan Bisnis Wealth Management BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
36	Kamis, 22 Oktober 2020	Macro economic Update	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
37	Selasa, 27 Oktober 2020	Update Transformasi IT BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
38	Selasa, 1 Desember 2020	Maturity IT BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
39	Selasa, 29 Desember 2020	Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris atas Pinjaman Subordinasi kepada PT Danareksa Sekuritas	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
40	Selasa, 29 Desember 2020	Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI dan Kinerja Dana Pensiun	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
41	Selasa, 29 Desember 2020	Analisa Portfolio Mikro di Masa Pandemi dan Implementasi PEN	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
Total Rapat			**3**	**38**	**38**	**41**	**41**	**38**	**38**	**38**	**3**	**3**	**41**	**41**	**38**	**3**
Total Kehadiran			**3**	**37**	**38**	**41**	**41**	**38**	**38**	**38**	**3**	**3**	**39**	**39**	**38**	**3**
% Total Kehadiran			100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%

Catatan :

AAC : Andrinof A Chaniago
KWA : Kartiko Wirjoatmodjo
AK : Ari Kuncoro
RR : Rofikoh Rokhim
HI : Hendrikus Ivo
RWP : R. Widyo Pramono
ZU : Zulnahar Usman
DRL: Dwi Ria Latifa
AFR : A. Fuad Rahmany
SK : Sonny Keraf
NBH : Nicolaus T. Budi Harjanto
HD : Hadiyanto
RIH: Rabin Indrajad Hattari
LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Fit & Proper Test OJK)

3. Rapat Dewan Komisaris Dengan Pengurus Perusahaan Anak

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
1	Senin, 27 Januari 2020	Tata Kelola Dewan Pengawas DPLK BRI	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
2	Selasa, 25 Februari 2020	Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2019	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
3	Selasa, 26 Mei 2020	Penyediaan Dana Pihak terkait PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS)	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
4	Selasa, 13 Oktober 2020	Corporate Action BRIS - Project Amanah Merger Bank Syariah BUMN	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
5	Kamis, 10 Desember 2020	Pembahasan Kinerja dan Rencana Bisnis DPLK BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
6	Selasa, 15 Desember 2020	Kinerja dan Rencana Pengembangan Perusahaan BRINS	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
Total Rapat			**1**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**1**	**1**	**6**	**6**	**5**	**1**
Total Kehadiran			**1**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**1**	**1**	**6**	**6**	**5**	**1**
% Total Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan :

AAC : Andrinof A Chaniago
KWA : Kartiko Wirjoatmodjo
AK : Ari Kuncoro
RR : Rofikoh Rokhim
HI : Hendrikus Ivo
RWP : R. Widyo Pramono
ZU : Zulnahar Usman
DRL: Dwi Ria Latifa
AFR : A. Fuad Rahmany
SK : Sonny Keraf
NBH : Nicolaus T. Budi Harjanto
HD : Hadiyanto
RIH: Rabin Indrajad Hattari
LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Fit & Proper Test OJK)

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

4. Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Hari & Tgl Rapat	Agenda	AAC	KWA	AK	RR	HI	RWP	ZU	DRL	AFR	SK	NBH	HD	RIH	LKE
1	Kamis, 2 Januari 2020	Legal opinion PT Minarak Brantas Gas	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
2	Selasa, 4 Februari 2020	Rapat Internal Dewan Komisaris terkait RBB untuk dibahas ke OJK	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
3	Selasa, 11 Februari 2020	Pemaparan Struktur Organisasi Divisi SKP	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
4	Selasa, 25 Februari 2020	Pengenalan Staf Dekom, Komite Dekom, Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dekom yg baru	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
5	Jumat, 8 Mei 2020	Rapat Dengan OJK (prudential Meeting penilaian TKB semester II th 2019, Implementasi POJK Stimulus	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
6	Selasa, 14 Juli 2020	Presentasi Konsep Design/ Layout Ruangan Dewan Komisaris	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
7	Selasa, 28 Juli 2020	Pembahasan Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
8	Selasa, 6 Oktober 2020	Board Structure BRI	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
9	Selasa, 13 Oktober 2020	KPI Direksi dan SEVP BRI - Overview KPI BRI Tahun 2020	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
10	Selasa, 17 November 2020	Survey Kegiatan Usaha dan sentimen Bisnis UMKM Th 2020 (Update BRI Micro & SME index)	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
Total Rapat			**2**	**8**	**8**	**10**	**10**	**8**	**8**	**8**	**2**	**2**	**10**	**10**	**8**	**2**
Total Kehadiran			**2**	**8**	**8**	**10**	**10**	**8**	**8**	**8**	**2**	**2**	**10**	**10**	**8**	**2**
% Total Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan :

AAC : Andrinof A Chaniago
KWA : Kartiko Wirjoatmodjo
AK : Ari Kuncoro
RR : Rofikoh Rokhim
HI : Hendrikus Ivo
RWP : R. Widyo Pramono
ZU : Zulnahar Usman
DRL: Dwi Ria Latifa
AFR : A. Fuad Rahmany
SK : Sonny Keraf
NBH : Nicolaus T. Budi Harjanto
HD : Hadiyanto
RIH: Rabin Indrajad Hattari
LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Fit & Proper Test OJK)

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, setiap awal Tahun melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite (KNR, KPMR, KA dan KTKT), Dewan Komisaris menyusun agenda rapat rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Rutin yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2021	Waktu
1	Pengadaan Auditor Independen (KAP)	Minggu ke IV Januari 2021
2	Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2019	Minggu ke I Februari 2021
3	Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal	Minggu ke III Februari, Mei, Agustus dan November 2021
4	Reviu dan Evaluasi Profil Risiko	Minggu ke I Februari, Mei, Agustus dan November 2021
5	Reviu Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Minggu II Maret dan Agustus 2021
7	Evaluasi Kinerja Direksi dan Dekom	Minggu ke II Februari 2021
8	Pembahasan Proses Nominasi & Remunerasi Direksi	Minggu ke III Februari 2021
9	Pembahasan Laporan Keuangan akhir Tahun 2019	Minggu ke II Februari 2021
10	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2020	Minggu ke III April 2021
11	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	Minggu ke IVJuni 2021
12	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2020	Minggu ke III Juli 2021
13	Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2020	Minggu I Agustus 2021
14	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020	Minggu ke III Oktober 2021
15	Reviu atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu ke IV Oktober 2021
16	Rencana Bisnis Bank 2021-2023	Minggu ke II April 2021
17	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2020	Minggu ke II November 2021

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur didalam Anggaran Dasar BRI Pasal 13 sebagai berikut:

Etika

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.
4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Selain Rapat Direksi yang telah dijadwalkan tersebut, Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau
   b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
6. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada angka (6) hanya dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.

Pemanggilan Rapat

1. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail).
3. Pemanggilan Rapat disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
5. Pemanggilan tertulis untuk rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

Pengambilan Keputusan

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ jumlah anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
6. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Hak Suara

1. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
2. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
5. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama, atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

Kehadiran rapat dihadiri oleh mayoritas (kuorum) anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian berikut:

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
1	7 Januari 2020	Human Capital Transformation – Implementation Report dan Human Capital Policy Mengenai Qanun	1	1	1	1
		Usulan Komite Kredit Bank BRI	1	1	1	1
2	14 Januari 2020	Laporan Hasil Bechmark JP Morgan Chase & Citibank untuk Peningkatan Profitability Corporate Segmen	1	1	1	1
		Penilaian Kinerja dengan Mempertimbangkan Tantangan Unit Kerja dan Orientasi Unit Kerja	1	1	1	1
3	21 Januari 2020	Pembahasan Kinerja Keuangan tahun 2019 dan Concern Analyst/Investor	1	1	1	1
4	28 Januari 2020	Pembahasan Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Penilaian Kinerja dengan Mempertimbangkan Tantangan Kinerja & Orientasi Pemimpin Unit Kerja	1	1	1	1
5	3 Februari 2019	Permohonan Putusan Usulan Dividen Payout Ratio tahun buku 2019	1	1	1	1
		Pemaparan Review Strategi Manajemen Kontrol & Persiapan Presentasi RBB 2020-2022 ke OJK	1	1	1	1
		Pembahasan Proyek Pembangunan Menara BRI Gatot Subroto, Menara BRI Medan, Menara BRI Semarang, Kanwil Malang, dan Update BRIbox	1	1	1	1
		Pemaparan Review Strategi Manajemen Kontrol	1	1	1	1
6	11 Februari 2020	Update Persiapan RUPST 2020	1	1	1	1
		Update & Permohonan Putusan Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Buku Putih BRIsat dan BRIsat Follow-on Project	1	1	1	1
		Update Project IT BRI	1	1	1	1
		Penerapan PSAK 71	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	0	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	0	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	92%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
7	19 Februari 2020	Update dan Permohonan Putusan Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Permohonan Putusan Proyek Pembangunan Menara BRI Gatot Subroto, Kanwil Malang, dan UMKM dTerrace	1	1	1	1
		Usulan Perubahan Pakaian Kerja	1	1	1	1
		Pendidikan Pascasarjana dan Public Course Luar Negeri	1	1	1	1
		Evaluasi BRILian Leader Development Program (BLDP) 1 dan 3 serta konsep pendidikan BLDP 1 s.d 7	1	1	1	1
8	25 Februari 2020	Usulan Perubahan Pakaian Kerja	1	1	1	1
		Framework Organisasi BRI	1	1	1	1
		Penetapan Direktur - Lead Account CST (Client Service Team)	1	1	1	1
		Penyampaian Usulan Pembahasan SIPK	1	1	1	1
9	3 Maret 2020	Usulan Performance Based Reward & Laporan Implementasi Employee Stock Allocation Program (ESA)	1	1	1	1
		Digital Innovation Management dan Toward IT Operational Excellence	1	1	1	1
		Impactful Project Ideas	1	1	1	1
		Stress test terhadap Usaha yang Terdampak Virus nCoV	1	1	1	1
10	10 Maret 2020	Update Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Penyaluran Ultra Mikro Di Agen BRILink	1	1	1	1
		Strategi Pengembangan Bisnis Brilink Kedepan	1	1	1	1
		Usulan Struktur Organisasi Kantor Wilayah	1	1	1	1
		Rencana Buyback Saham	1	1	1	1
		Dashboard Banking Crisis	1	1	1	1
		Update Blueprint SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025	1	1	1	1
11	16 Maret 2020	Penanggulangan Virus Corona untuk BRI Grup	1	1	1	1
12	17 Maret 2020	Persetujuan Penggunan Ruangan di Gedung BRI Gatot Subroto	1	1	1	1
		Sentralisasi Dokumen Kredit	1	1	1	1
		Strategy Peningkatan CASA	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	1	1	1	1	1	0	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	0	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	0	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	0	1	12	12	100%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	0	1	10	12	83%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
13	24 Maret 2020	Permohonan Putusan Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Project Rencana Corporate Action (Permohonan putusan Next step)	1	1	1	1
		Strategi NPL bulan Maret 2020 dan Persetujuan Hapus buku kredit korporasi 2020	1	1	1	1
14	31 Maret 2020	Update Project Qanun	1	1	1	1
		Penetapan Beneficial Owner BRI (Permohonan Putusan)	1	1	1	1
		Optimalisasi Innovation Center	1	1	1	1
15	01 April 2020	Pemberian Bantuan kepada Pensiunan dalam Situasi Penyebaran Covid-19	1	1	1	1
16	07 April 2020	Update dan Permohonan Putusan Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		1. Neraca space bangunan BRI dan Grup 2. Update rencana renovasi koridor lantai 17 dan 18	1	1	1	1
		Desain Logo HUT BRI, Kalender BRI 2021 serta Brand Book	1	1	1	1
		Pembahasan YKP BRI & YBIG	1	1	1	1
		Skenario Operasional Unit Kerja BRI dalam rangka pembatasan Sosial berskala besar (update, tidak masuk agenda)	1	1	1	1
17	14 April 2020	Project Quantum	1	1	1	1
		Increase Salary Plan	1	1	1	1
		Update Komunikasi Dampak Restrukturisasi atas Wabah Covid-19	1	1	1	1
18	20 April 2020	Permohonan Putusan Financial Postur untuk RKAP 2020 (Revisi)	1	1	1	1
		Review Pemberlakuan Klausul Force Majeure dalam Perjanjian BRI	1	1	1	1
		Perpanjangan Branding MRT Jakarta dan Rencana Pelaksanaan BRIlianpreneur 2020	1	1	1	1
		Permohonan Putusan batas usia maksimal kredit Briguna PP BRI dalam rangka restrukturisasi	1	1	1	1
		Laporan dan Tindaklanjut atas Permenko nomor 6 tahun 2020	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
19	27 April 2020	Sinergi BUMN antara BRI dalam ekosistem keuangan mikro	1	1	1	1
		Proyek BUMN Tower	1	1	1	1
		Kesiapan Layanan Operasional selama Idul Fitri	1	1	1	1
		Kajian Perubahan Besaran Stimulus Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid 19	1	1	1	1
20	4 Mei 2020	Update dan Permohonan Putusan Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Update project BRIfirst	1	1	1	1
		Laporan Progress Tindaklanjut Temuan Audit Eksternal	1	1	1	1
21	11Mei 2020	Update BCC mengenai konsep Bantuan Likuiditas Bank	1	1	1	1
		Pinjaman Non DPK Club Loan BRI	1	1	1	1
		Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan I 2020	1	1	1	1
		Menuju Data Driven Organization V 1.0 (MDM, ICM, Perbaikan Kualitas Data Nasabah)	1	1	1	1
		Update BMC	1	1	1	1
22	18 Mei 2020	Update Project BRIfirst	1	1	1	1
		Revisi RKAP Tahun 2020	1	1	1	1
		Implementasi New Normal	1	1	1	1
		Strategi Menjalankan PP 23/2020	1	1	1	1
		Permohonan Putusan Corporate Action	1	1	1	1
23	26 Mei 2020	Penetapan Calon Strategic Partner Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Evaluasi Biaya Pengadaan Konsultan	1	1	1	1
24	2 Juni 2020	Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Konsolidasi Data Debitur Mikro	1	1	1	1
		Post Covid 19 BRIILink Vision	1	1	1	1
		Persetujuan Perubahan RBB 2020 - Outlet Expansion CRM	1	1	1	1
		Corporate Brand Guideline (Brand Book)	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
25	08 Juni 2020	Permohonan Putusan Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Struktur Organisasi Induk BRI (Kanpus)	1	1	1	1
26	09 Juni 2020	Rencana Pengambilalihan Kredit Konsumer - Update Tim Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1	1	1	1
		Evaluasi Biaya Pengadaan Konsultan	1	1	1	1
		Review Buyback Saham BRI	1	1	1	1
		Resegmentasi Bisnis BRI	1	1	1	1
27	16 Juni 2020	Pelaksanaan Umbrella Program Tabungan Britama	1	1	1	1
		Digital Saving, adoption new normal	1	1	1	1
		Pembahasan RBB 2020 - 2022 revisi & RKAP 2020 Revisi	1	1	1	1
28	22 Juni 2020	Strategi BRIMO Super Apps	1	0	1	1
		Putusan Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur BRI	1	0	1	1
		Peran BRI dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)	1	0	1	1
		Rangkaian Event HUT BRI ke-125	1	0	1	1
		Perkembangan Kasus Covid-19	1	0	1	1
29	29 Juni 2020	Update Progress Report Project Amanah & Project Sumatra (Report)	0	1	1	1
		Review dan Strategi Giro	0	1	1	1
		Update Culture Transformation dan The New Way of Working	0	1	1	1
30	6 Juli 2020	Update Progress Project Sumatera dan Project Quantum	1	1	1	1
		Konsep Transformasi BRI Kantor Cabang Khusus	1	1	1	1
		Presentasi Awal Laporan Analisis Industri Beras	1	1	1	1
		Tindak Lanjut Penyaluran Penempatan Dana Pemerintah Dalam Rangka PP 23/2020	1	1	1	1
		Update Alignment antara Core Value BUMN (AKHLAK) dengan Core Value BRI (BRILiaN)	1	1	1	1
31	13 Juli 2020	Review Risk Appetite Bank - 2020	1	1	1	1
		Review dan Strategi Giro	1	1	1	1
		Update Status Proyek Integrasi Layanan dan Konsolidasi Data Mikro	1	1	1	1
		Update PEN: Kesediaan BRI sebagai Bank Peserta	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	1	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	1	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	1	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
1	1	0	1	1	1	1	1	10	12	83%
0	1	1	1	1	1	1	1	10	12	83%
0	1	1	1	1	1	1	1	10	12	83%
0	1	1	1	1	1	1	1	10	12	83%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
32	14 Juli 2020	Rencana Project IT BRI	1	1	1	1
		Usulan Career Journey Pekerja BRI	1	1	1	1
		Project Portofolio in Monitoring PMO Posisi Juni 2020	1	1	1	1
		HUT dan Nusantara Fashion Festival	1	1	1	1
33	20 Juli 2020	Revisi rencana Bisnis Dapen BRI dan Kajian Kondolidasi Dapen BUMN & Pembahasan Program Pensiun	1	1	1	1
		Update Project Distribution Channel Transformation	1	1	1	1
		Implementasi SE Kementrian BUMN mengenai Core Values di perusahaan BUMN & Penyampaian progress pembentukan Employee Value Preposition (EVP) BRI	1	1	1	1
		Ketentuan Pesangon PHK Pensiun sesuai UU Ketenagakerjaan	1	1	1	1
34	27 Juli 2020	Skema Pemberian Insentif bagi Pekerja Tahun 2020	1	1	1	1
		Master Data Management & BRIFirst	1	1	1	1
		Pembahasan LED Gedung BRI 2	1	1	1	1
		Update Kondisi Likuiditas BRI, Risiko konsentrasi, NII dan Non DPK	1	1	1	1
		Update Implementasi Risk & Compliance Officer	1	1	1	1
35	3 Agustus 2020	Permohonan Putusan Review Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan	1	1	1	0
		Pemaparan BRI 2045	1	1	1	0
		Update Penelaahan Terbatas Kinerja Laporan Keuangan TW 2 2020	1	1	1	0
36	10 Agutus 2020	Permohonan Putusan LED BRI 2	1	1	1	1
		Rangkaian Event HUT ke 125 dan Corporate Brand Guideline BRI	1	1	1	1
		Kredit Super Mikro dan PMK 98 (Penjaminan Korporasi)	1	1	1	1
		Update progress Review Laporan Keuangan Juni 2020	1	1	1	1
		Pemaparan Kajian Potensi Ekspansi Bisnis ke Luar Negeri	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
37	18 Agustus 2020	Update Publikasi Laporan Keuangan SMT I	1	1	1	1
		Pencapaian RBB dan Progress Project Rencana Aksi Korporasi	1	1	1	1
		Penetapan Max Capping Rate Simpanan	1	1	1	1
		Update Implementasi Risk & Compliance Officer	1	1	1	1
38	24 Agustus 2020	Update Kondisi Ekonomi Makro dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	1	1	1	1
39	31 Agustus 2020	Usulan Career Journey Pekerja BRI	1	1	1	1
		Analisis Industri Komoditas CPO	1	1	1	1
		Implementasi Penebusan Pupuk Menggunakan Kartu Tani	1	1	1	1
		Rencana tindaklanjut Pemindahan Corpu BRI ke Sentul	1	1	1	1
		Penetapan Max Capping Rate Simpanan	1	1	1	1
		Update Progress Pelaksanaan Konservasi Kawasan Sungai	1	1	1	1
40	07 September 2020	Kajian Perbankan kawasan ASEAN	1	1	1	1
		Permohonan Putusan Penempatan Dana Pemerintah dalam rangka PEN	1	1	1	1
		Update BRIBRAIN	1	1	1	1
		Update Suku Bunga Negosiasi Nasabah	1	1	1	1
		Update Program Culture Activation	1	1	1	1
41	14 September 2020	Akreditasi BRI Corporate University	1	1	1	1
		Laporan Rencana Tindaklanjut Pemeriksaan BRINYA oleh NYSDFS	1	1	1	1
		Framework Change Management & Transformation Office	1	1	1	1
		Rangkaian HUT BRI 125	1	1	1	1
		Perkembangan Pandemi Covid di Lingkungan BRI	1	1	1	1
		Postur RKAP Tahun 2021	1	1	1	1
		Update Program Penyaluran berbagai Stimulus yang ditugaskan kepada BRI	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	92%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
42	21 September 2020	Progress Report Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Laporan Persiapan dan Rencana Kegiatan Brilianpreneur UMKM Export 2020	1	1	1	1
		Update Rangkaian HUT BRI ke-125	1	1	1	1
		Update Nasabah Perkebunan Terdampak Kebakaran Hutan	1	1	1	1
		Update Sistem Keuangan Berkelanjutan	1	1	1	1
43	28 September 2020	Project Quantum: Permohonan Putusan Model Bisnis	1	1	1	1
		Kajian Peluang Perbankan ASEAN	1	1	1	1
		Rencana Riset Evaluasi Program PEN & Progress Tim Task Force	1	1	1	1
		Update Sentralisasi Dokumen Kredit	1	1	1	1
44	29 September 2020	Update Pengembangan Jaringan Kerja dan IT BRI	1	1	1	1
		Update Program Pendidikan ke Luar Negeri	1	1	1	1
45	5 Oktober 2020	Project Amanah: Permohonan Putusan CMA	1	1	1	1
		Update Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang & Jasa	1	1	1	1
		Progress Update Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Update PDWK	1	1	1	1
		Review Mekanisme dan Limit Penjaminan	1	1	1	1
		Update Kualitas Kredit Persiapan Prudential Meeting dengan OJK	1	1	1	1
		RDP Komisi VI	1	1	1	1
46	12 Oktober 2020	Project Rencana Corporate Action: Final Update dan Permohonan Putusan	1	1	1	1
		Project Quantum: Permohonan Putusan Revamp Business Model	1	1	1	1
		Project Rencana Corporate Action BRI	1	1	1	1
47	14 Oktober 2020	Positioning Brilian Values dalam Budaya Kerja BRI Group	1	1	1	1
48	19 Oktober 2020	Review Manfaat Pensiun	1	1	1	0
		Update Rencana Konsolidasi Dapen BUMN	1	1	1	0
		Update Logo	1	1	1	0

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
49	26 Oktober 2020	Update Materi Observasi Corporate Governance Perception Index	1	1	1	0
		Overview UU Cipta Kerja	1	1	1	0
		Reimaging Wealth management	1	1	1	0
50	02 November 2020	Update Brillianpreneur UMKM Export	1	1	1	0
		Laporan Keuangan TW III	1	1	1	0
		Update Materi Observasi Corporate Governance Perception Index	1	1	1	0
		Getting Started on BRIvolution 2.0: Plan for BOM Workshop	1	1	1	0
51	09 November 2020	Update rencana pelaksanaan publikasi kinerja keuangan BRI TW III Tahun 2020, Press conference, dan analyst meeting	1	1	1	1
		Permohonan Putusan RKAP BRI 2021	1	1	1	1
		Permohonan Putusan BRI Group Economic Outlook 2021	1	1	1	1
		Pemaparan Hasil Survey Index Aktivitas Bisnis UMKM dan Rencana Publikasi Hasil Index Aktivitas Bisnis UMKM	1	1	1	1
		Arranger Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Implementasi Qanun Bidang HC	1	1	1	1
52	16 November 2020	Employee Value Propositon (EVP)	1	1	1	1
		BRILiaN Development Plan (BDP)	1	1	1	1
		Pemaparan Hasil Employee Engagement Survey (EES) 2020	1	1	1	1
		Putusan RKAP 2021 (lanjutan) & RBB 2021-2023	1	1	1	1
		Project Portofolio in Monitoring PMO Posisi Agustus 2020	1	1	1	1
		Annual Report 2020	1	1	1	1
53	17 November 2020	Neraca Space Pembangunan Menara Gatsu	1	1	1	1
		Agenda Lain terkait Human Capital	1	1	1	1
54	23 November 2020	Usulan Pendidikan Pinca dengan Update New Way of Learning	1	1	1	1
		Update Progress BUMN Institute	1	1	1	1
		Komunikasi Hak Pensiun dengan Pensiunan BRI	1	1	1	1
		Jadwal Rakernas BRI Untuk Penyusunan RKA 2021	1	1	1	1
		Persetujuan Timeline dan Mata Acara RUPS	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2020

No	Radisi Tanggal	Agenda Edited	Dirut	Wadirut	Dir MR	Dir HC
55	30 November 2020	Update Brilianpreneur	1	1	1	1
		Great Culture for Service Excellence	1	1	1	1
		Update Progress Project Rencana Corporate Action	1	1	1	1
		Update Timeline Project Corporate Action	1	1	1	1
		Update Rakernas	1	1	1	1
56	7 Desember 2020	Analisis Industri untuk Komoditas Gula	1	1	1	1
		BRI Microfinance Center	1	1	1	1
		Reposisi BRI Institute	1	1	1	1
		Update Project Corporate Action BRI	1	1	1	1
57	14 Desember 2020	Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2020	1	1	1	1
		Update HUT BRI ke 125	1	1	1	1
		Prognosa Balance Sheet Akhir Tahun 2020	1	1	1	1
		Update Rakernas	1	1	1	1
58	21 Desember 2020	Prognosa Balance Sheet Akhir Tahun 2020	1	1	1	1
59	28 Desember 2020	Prognosa Balance Sheet Akhir Tahun 2020	1	1	1	1
		Update Kesiapan Layanan Natal dan Tahun Baru 2020	1	1	1	1
		Rencana Implementasi ESOP	1	1	1	1
		Presentasi Materi yang Harus Dikomunikasikan BOM pada Raker Wilayah	1	1	1	1
60	30 Desember 2020	Prognosa Balance Sheet Akhir Tahun	1	1	1	1
	Sub Total		59	59	60	56
	Total Kehadiran		98%	98%	100%	93%

Keterangan:

Dirut : Direktur Utama
Wadirut : Wakil Direktur Utama
Dir MR : Direktur Manajement Risiko
Dir HC : Direktur *Human Capital*
Dir Keu : Direktur Keuangan
Dir HBL : Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN
Dir Ritmen : Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah
Dir TIO : Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi
Dir MIK : Derktur Bisnis Mikro
Dir Jalan : Direktur Jaringan & Layanan
Dir Kep : Direktur Kepatuhan
Dir Kons : Direktur Konsumer

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	Dir JaLan	Dir Kep	Dir Kons	Hadir	total direksi	%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	0	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	92%
57	56	57	60	60	60	48	58			
95%	93%	95%	100%	100%	100%	80%	97%			

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Konsultasi Direksi kepada Dewan Komisaris

Sebagaimana terdapat dalam anggaran BRI, Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam tugas pengawasan dimaksud Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai Perseroan kepada Direksi termasuk kegiatan operasional dalam pemberian kredit dan penjelasan lain yang diminta Komisaris.

1. Kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Komisaris adalah Pemberian kredit berupa kredit direct, kredit contingent (BG/ SBLC, dll) termasuk kredit Sindikasi dengan kriteria sebagai berikut: Pemberian kredit baru dan atau pemberian tambahan kredit/suplesi dengan total eksposure risiko 1 (satu) triliun rupiah ke atas atau ekuivalen dalam valas, dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Komisaris.
2. Penetapan besaran eksposure tersebut di atas didasarkan pada besaran eksposure debitur individual
3. Pemberian kredit diluar butir 1 di atas tidak perlu dikonsultasikan dengan Komisaris, namun setiap 3 bulan Direksi wajib menyampaikan laporan pemberian kredit kepada Komisaris.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2021

Dalam rangka mendukung kinerja dan perencanaan kegiatan setiap awal tahun melalui Rapat Direksi, Direksi telah menyusun agenda rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat tahun 2021	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tahun buku 2020	Minggu ke II Januari 2021
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2021	Minggu ke I April 2021
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2021	Minggu ke I Juli 2021
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2021	Minggu ke II Oktober 2021
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2021	Minggu ke II Januari 2022
6	Evauasi dan rencana Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022	Minggu ke II Juni 2021
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021	Minggu ke IV Juni 2021
8	Aktivitas operasional dan putusan perusahaan yang membutuhkan persetujuan melalui Rapat Direksi	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2020

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

DINI DESVALINA

Sekretaris Dewan Komisaris

Periode: 1 Mei 2019 - 31 Januari 2021

Palembang, 36 Tahun

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. D3 - Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006),
2. S1 - Akuntansi Universitas Indonesia (2009),
3. S2 - Magister Manajemen Keuangan Syariah Universitas Indonesia (2013).

RIWAYAT JABATAN

1. Pengendali Subfungsi Manajemen Kinerja Kementerian BUMN (2020 – sekarang)
2. Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri (2016 – 2019)
3. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2015 – 2020).
4. Kepala Sub Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II B Kementerian BUMN (2014 – 2015)
5. Analis Keuangan Kementerian BUMN (2007 – 2014)

Sekretariat Dwan Komisaris

PEDOMAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Sekretariat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:10-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 yang memuat tugas dan tanggung jawab sekretariat Dewan Komisaris diantaranya:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan rapat-rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif kesekretariaan dan protokoller Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.
5. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *self-assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap semester.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKDEKOM TAHUN 2020

1. Kunjungan Kerja
   Sekretariat Dekom bersama-sama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) amendampingi Dewan Komisaris untuk melakukan kunjungan kerja ke Unit-unit Kerja Perseroan.
   Selama Tahun 2020 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris melakukan sebanyak 17 kali kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah beserta Unit Kerja Supervisinya, Divisi Kantor Pusat, dan Unit Kerja Luar Negeri.

2. Persetujuan & Pengawasan Rencana Kerja Perseroan
   Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama Tahun 2020.
   Selama Tahun 2020 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan Persetujuan, Rekomendasi dan Konsultasi Kredit. Tercatat selama Tahun 2020 Dewan Komisaris telah memberikan Persetujuan sebanyak 41 kali, Rekomendasi sebanyak 50 kali dan Konsultasi Kredit sebanyak 26 kali.

3. Laporan Tahunan Dewan Komisaris
   Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris selama Tahun 2020 yang akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS Tahun 2021.

4. Reviu Kinerja Dewan Komisaris

Dalam rangka melakukan *review* atas realisasi RKA Dekom Tahun 2020 serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Tahun 2021, Sekretariat Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah melakukan reviu RKA Dekom Tahun 2020 dan Penyusunan RKA Dekom Tahun 2021.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka pengembangan kompetensi, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti Pendidikan, Seminar maupun *Conference* untuk mendukung tugasnya. Selama Tahun 2020 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

Tahun	Tempat	Penyelenggara	Judul
2020	Jakarta	LSPMR	Pelatihan dan Sertifikasi Skema Analis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi
2020	Jakarta	One GML	Certified Human Resources Program Executive

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Perseroan. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Perseroan berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Unit Audit Internal pada Bank Umum;
6. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.
7. Surat Keputusan Direksi Nokep: 548-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Audit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit BRI memiliki Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (*Audit Charter Committee*) yang mengatur tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Struktur Komite

Komite Audit merupakan organ Dewan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite

1. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
2. Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai anggota komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.
3. Anggota Komite Audit paling kurang sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang diantaranya:
   a. seorang Komisaris Independen.
   b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
   c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
6. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI tahun 1 Januari 2020 – 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi	Keahlian
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Audit, Banking
2	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Business
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Finance, Economic
4	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Legal, Banking
5	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Banking, Compliance
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
7	Handayani	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI tahun 31 Maret 2020 - 12 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi	Keahlian
1.	Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen	Audit, Banking
2.	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris	Banking, Risk Management
3.	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	Komisaris	Statistic
4.	R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen	Legal
5.	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Finance, Economic
6.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Banking, Compliance
7	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
8	Handayani	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
9	Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit

Komite Audit

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI tahun 12 Agustus 2020-31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Keahlian
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen	Audit, Banking
2	Ari Kuncoro	Anggota	Komisaris Independen	Economic
3	R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen	Legal
4	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Finance, Economic
5	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Banking, Compliance
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
7	Handayani	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
8	Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit

Profil Komite

Profil Anggota Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Hendrikus Ivo Ketua Komite Audit/Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Ari Kuncoro Anggota Komite Audit/Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
R. Widyo Pramono Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Februari 2018 - sekarang	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Rofikoh Rokhim Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Februari 2018 – sekarang	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Pamuji Gesang Raharjo Anggota Komite Audit Pihak Independen	Lahir di Jakarta, 10 April 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Februari 2016. Sebelumnya merupakan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk. Pernah berkarir dalam berbagai posisi pada PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Danahutama; PT Pegadaian (Persero); dan pernah menjabat Direktur Eksekutif Risk Management Center Indonesia (RMCI). Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta (1996), gelar Magister Manajemen bidang kekhususan Manajemen Risiko diperoleh dari Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003), dan meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan memperoleh *Certified of Financial Consultant* (CFC) dari Institute of Financial Consultant, Canada (2013).

Sunuaji Noor Widiyanto Anggota Komite Audit Pihak Independen	Lahir di Yogyakarta, 1 Januari 1960, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Desember 2016. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi BRI Yogyakarta (2014-2016) dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat BRI (2012-2014). Yang bersangkutan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Nasional selama 2 (dua) periode (2006-2012). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1996) dan memperoleh sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2015.
Sahat Pardede Anggota Komite Audit Pihak Independen	Lahir di Balige, 24 Agustus 1963, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak 12 Agustus 2020. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989), dan Master of Business Administration, Saint Mary's University. Sebelumnya berkarir dan menjabat Komisi Pengawas SKK Migas (2013), Anggota Komite Audit (2018), Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat dan Rekan Partner (2001), Financial Expert PT Telekomunikasi Indonesia (2004) dan Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan Bank BNI (2006)

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit, memiliki pemahaman tentang konsep auditing dan mempunyai latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit minimal 10 tahun (sekurang-kurangnya satu anggota).
2. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinisp *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiiasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Sebelum menjabat, anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI.

Komite Audit

No	Kriteria Independensi	HI	AK	RWP	RR	PGR	SNW	SP
1	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota DewanKomisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: Hendrikus Ivo (HI), Ari Kuncoro (AK), R. Widyo Pramono (RWP), Rofikoh Rokhim (RR), Pamuji Gesang Rahardjo (PGR), Sunuaji Noor Widiyanto (SNW) dan Sahar Pardede (SP)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan denganManajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Memantau efektivitas kerja SKAI.
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.

Auditor Independen

1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
   a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
   b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
   a. Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
   b. Ruang lingkup audit;
   c. Imbalan jasa audit;
   d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
   h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi.KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (pre-approval) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
   a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari

Komite Audit

KAP dengan standar audit yang berlaku;
b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atauKAP; dan
e. Hal lainnya.

10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK BRI.

Kepatuhan (*Compliance*)

1. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Pengaduan

Menelaah pengaduan baik yang berkaitandengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.

Lain-Lain

1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Melaksanakan penugasan yang diminta olehKomisaris.

Wewenang

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2020

Indikator atau kriteria kinerja Komite Audit (KA) dikukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KA dalam setiap rapat. Adapun program kerja KA disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksankan proses telaah terhadap laporan keuangan, hasil audit internal dan eksternal (KAP), dan memberikan rekomendasi atas pemilihan KAP.

Secara umum seluruh KPI KA telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KA tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KA yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KA dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2020

Komite Audit Dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Menelaah dan memberikan rekomendasi persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan	Rekomendasi KA terhadap perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI BRI tahun 2020	09 Januari 2020
		Permohonan persetujuan addendum perencanaan audit tahunan (PAT) tahun 2020	07 September 2020
2	Menelaah laporan pokok-pokok hasil audit (LHA) secara triwulan	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sampai dengan trwiulan IV/semester II tahun 2019	30 Januari 2020
		Laporan pokok pokok hasil audit SKAI triwulan I tahun 2020	14 Mei 2020
		Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan II semester I tahun 2020	16 Agustus 2020
		Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan III tahun2020	17 November 2020
3	Penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan Secara Triwulanan.	Progress meeting audit laporan keuangan dan PKBL BRI Tahun 2019	16 Januari 2020
		Penelaahan Laporan Keuangan Triwulan I 2020	5 Mei 2020
		Clossing Meeting Audit Laporan Keuangan BRI 30 Juni 2020	14 Agustus 2020
		Closing Meeting Audit atas Laporan Keuangan Tanggal 30 September 2020	5 November 2020
4	Pengawasan terhadap penerapaan *Whistleblowing System*	Penunjukan pengelolaan Whistleblowing system (WBS) di KA	20 April 2020
		Tindak lanjut dan update temuan audit atau WBS berdampak signifikan	8 Juni 2020
		Laporan whistleblowing system KA BRI	18 Juni 2020
		Perbaikan terhadap aplikasi WBS BRI	11 September 2020
5	Pelaksanaan audit	Pemantauan tindak lanjut laporan fraud skimming pada nasabah BRI	20 Januari 2020
		Pembahasan temuan audit signifikan SKAI	24 Maret 2020
		Temuan signifikan Audit SKAI Tahun 2020	15 April 2020
		Temuan Audit Signifikan SKAI tahun 2020	21 April 2020
		Temuan Signifikan SKAI	11 Juni 2020
		Tindak lanjut temuan Kanca BRI Tanah Abang	27 November 2020
6	Pembinaan KA dalam *In House Trainig*	Pelaksanaan *in house training* di Kanca BRI Tarutung	14 Desember 2020

Komite Audit

Komite Audit dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kajian Komite Audit	Kajian atas fresh eye perspective atas penunjukan KAP yang telah melakukan audit selama periode tahun 2016 sd 2019	7 Februari 2020
		Hasil kaji ulang penilaian POJK dan Maturitas Fungsi Audit Intern SKAI bersama KPMG	20 Oktober 2020
2	Pengadaan jasa audit kantor akuntan publik	Pengadaan dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI Tahun Buku 2020	24 Januari 2020
		Usulan HPS Pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik Tahun 2020	30 Januari 2020
		Rekomendasi kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI tahun buku 2020	11 Februari 2020
		Perubahan ruang lingkup pekerjaan kantor akuntan public dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI tahun buku 2020	26 Juni 2020
		Pengadaan jasa audit kantor akuntan publik untuk laporan keuangan DPLK BRI tahun 2020	19 November 2020
3	Rekomendasi Komite Audit	Rekomendasi atas penunjukan KAP PSS EY untuk audit umum tahun buku 2020	14 Februari 2020
		Rekomendasi atas penunjukan KAP PSS EY untuk audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2020	19 Februari 2020
4	Laporan evaluasi Komite Audit	Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2019 oleh KAP Purwantono Sungkoro dan surja (KAP PSS)	22 Juni 2020

Komite Audit dengan OJK, Bank Indonesia, PPATK dan BPK BRI

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPATK/BPK RI, yaitu antara lain:

No	Perihal	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pemeriksaan OJK	Tindak lanjut pemeriksaan OJK	7 Januari 2020
		Tindak Lanjut surat OJK perihal link aja	19 Februari 2020
		Tindak lanjut kunjungan non-formal ke OJK	26 Februari 2020
		Laporan tindakan perbaikan temuan OJK posisi 31 Maret 2020	19 Mei 2020
		Tindak lanjut pertemuan OJK terkait dengan pelaksanaan program PEN	22 Oktober 2020
2	BUMN	Progress rencana tindak lanjut temuan LAI (Laporan Auditor Independen) tahun buku 2019	18 Agustus 2020

Komite Audit dengan Manajemen

No	Perihal	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengaduan	Permasalahan tuntutan pensiunan BRI	11 Februari 2020
		Surat kementerian BUMN tentang penerusan pengaduan masyarakat kepada Dewan Komisaris PT BRI	19 Februari 2020
		Surat pengaduan yang disampaikan kepada dewan komisaris	17 Maret 2020
		Pengaduan pada PT BRI Insurance	2 Juni 2020
		Surat keberatan atas daftar aset lelang BRI kantor Cabang Bandung Martadinata	10 Juli 2020
		Progress Audit Pengaduan Pada PT BRI Insurance.	21 Juli 2020
		Surat pengaduan terkait pemasalahan hukum kantor cabang BRI Nganjuk Jawa Timur	28 Juli 2020
2	Diskusi dan Pembahasan	Pedoman penetapan debitur dampak penyebaran covid 19	9 April 2020
		Kinerja BRI Life	15 April 2020
		Kualitas portofolio kredit BRI newyork agency (BRINYA)	15 Juni 2020
		Catatan KA terhadap kinerja Sdr Hari Siaga Amijarso	4 Agustus 2020
		Permintaan audit kepatuhan oleh SKAI terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit covid 19 pemberian subsidi bungan/ subsidi margin untuk kredit UMKM dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM	18 Agustus 2020
		Rencana audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	24 Agustus 2020
		Update progress meeting perencanaan audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	7 September 2020
		Pembahasan data PEN (Kriteria PEN pembuatan sricpt dan eksekusi dengan data	16 September 2020
		Keterlibatan SKAI dalam mengkoordinir pelaksanaan audit oleh auditor ekternal	28 September 2020
		Pelaksanaan permenkop no 6 tahun 2020 tentang banpres produktif usaha mikro (BPUM) dan tindak lanjut kasus kasus fraud	28 September 2020
		Update tindak lanjut atas pelaku kejadian *fraud* tahun 2020, Review terhadap SOP dan ketentuan terkait tindak lanjut tindak pidana *fraud* BRI	10 November 2020
		Tindak lanjut surat BI tentang implementasi standar nasional teknologi chip dan penggunaan personal identifikasi number online 6 digit untuk kartu ATM dan atau kartu debet yang diterbitkan di indonesia serta standarisasi proses cleansing kartu	16 November 20

Komite Audit

Komite Audit dengan DPLK BRI

No	Perihal	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Laporan Keuangan	Laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI tahun buku 2019	16 Juni 2020
		Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan bank rakyat indonesia DPLK BRI untuk tahun buku 2019	30 Juni 2020
2	Pengadaan Jasa Audit	Pengadaan jasa audit kantor akuntan publik untuk laporan keuangan DPLK BRI tahun 2020	19 November 2020

Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

No	Perihal	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit kepatuhan program PEN	Rencana audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	24 Agustus 2020
2		Update progress meeting perencanaan audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	7 September 2020

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE AUDIT

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Audit dari unsur Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2020. Pendidikan Anggota Komite Audit Non Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Sunuaji Noor Widiyanto	Webminar Auditor Jaman Now	YPIA	26 September 2020	Jakarta
2	Sunuaji Noor Widiyanto	Webminar Tax Incentive dimasa pandemic dan tax dispute update	Universitas Indonesia	24 September 2020	Jakarta
3	Sunuaji Noor Widiyanto	Peluang baru bagaimana akuntan public mengoptimalkan jasa audit	KPAP	16 Desember 2020	Jakarta
4	Sunuaji Noor Widiyanto	Korupsi tak berhenti di tengah pandemi: siapa yang mampu mencegah?	YPIA	19 Desember 2020	Jakarta
5	Sahat Pardede	Webminar PSAK 8, PSAK 68 dan PSAK 71 serta pertimbangan audit atas standar akuntansi terkait dan pelaporan audit dana pensiun, diperuntukan bagi akuntan public	IAPI dan IAI	29 Juli 2020	Jakarta
6	Sahat Pardede	Webminar Tax Incentive dimasa pandemic dan tax dispute update	Universitas Indonesia	24 September 2020	Jakarta
7	Sahat Pardede	Webminar PPL OJK bank aspek akuntansi dan audit laporan keuangan BPR	PPL OJK Bank	26 November 2020	Jakarta

No	Nama	Pendidikan	Penyelenggara	Waktu	Tempat
8	Sahat Pardede	Webminar aspek akuntansi dan audit dalam aksi korporasi	PPL Pasar Modal OJK	28 Desember 2020	Jakarta
9	Pamuji Gesang Raharjo	Basic User Training Professional Teaching Method Enhancement with Google for Education	LPPI	Maret 2020	Jakarta
10	Pamuji Gesang Raharjo	Ketahanan & Strategi Bisnis Syariah Menghadapi Dampak Covid-19	LPPI	Mei 2020	Jakarta
11	Pamuji Gesang Raharjo	The Future of Banking: The Impacts of Digital Disruption and Pandemic	OJK Institute	Juni 2020	Jakarta
12	Pamuji Gesang Raharjo	Business Resilence and Recovery to Covid-19 for Sustainable Finance	IPMI International Business Scholl	Juni 2020	Jakarta
13	Pamuji Gesang Raharjo	New Normal, New Business Model and New Hope	LPPI	Juni 2020	Jakarta
14	Pamuji Gesang Raharjo	Business Transformation in Digital Era: Strategy & Actions	OJK Institute & Milken Institute	Juni 2020	Jakarta
15	Pamuji Gesang Raharjo	Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik.	IKAI dan IAPI	Oktober 2020	Jakarta
16	Pamuji Gesang Raharjo	Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021	LPPI	Desember 2020	Jakarta

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Setiap pemanggilan Rapat dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, atau dilakukan secara lisan atau media komunikasi lainnya.
4. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
7. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Komite Audit

9. Risalah rapat Komite Audit harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
10. Risalah rapat Komite Audit merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
11. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Jumlah Kehadiran	Keterangan
1	7 Januari 2020	Perencanaan Audit Tahunan 2020, Update Kejadian Fraud tahun 2019, Hasil Audit Pembangunan Taman Kantor Pusat BRI	7 orang (100%)	Kuorum
2	14 Januari 2020	Pembahasan TOR, timeline, dan pembentukan tim pengadaan KAP atas laporan keuangan dan PKBL 2020	7 orang (100%)	Kuorum
3	20 Januari 2020	Kick off meeting laporan keuangan DPLK Tahun 2019	7 orang (100%)	Kuorum
4	20 Januari 2020	Progress Meeting audit laporan keuangan dan PKBL BRI tahun 2019	7 orang (100%)	Kuorum
5	21 Januari 2020	Clossing meeting audit atas laporan keuangan dan PKBL 2019	7 orang (100%)	Kuorum
6	30 Januari 2020	Laporan pokok pokok hasil audit sd triwulan IV 2019	7 orang (100%)	Kuorum
7	21 April 2020	Temuan Audit Signifikan SKAI tahun 2020	9 orang (100%)	Kuorum
8	28 April 2020	Kick off meeting audit laporan keuangan BRI 30 Juni 2020	9 orang (100%)	Kuorum
9	12 Mei 2020	Laporan hasil audit triwulan I tahun 2020 & Penelaahan laporan keuangan triwulan I tahun 2020	9 orang (100%)	Kuorum
10	11 Juni 2020	Temuan Signifikan SKAI	9 orang (100%)	Kuorum
11	15 Juni 2020	Laporan audit atas laporan keuangan DPLK BRI tahun buku 2019	9 orang (100%)	Kuorum
12	7 Juli 2020	Kaji kecukupan pnegendalian intern dengan KPMG	9 orang (100%)	Kuorum
13	21 Juli 2020	Progress Report Audit khusus SKAI atas pengaduan terkait BRI General Insurance BRINS	9 orang (100%)	Kuorum
14	4 Agustus 2020	Laporan hasil audit triwulan II 2020	9 orang (100%)	Kuorum
15	14 Agustus 2020	Clossing Meeting Audit Laporan Keuangan BRI 30 Juni 2020	8 orang (100%)	Kuorum
16	25 Agustus 2020	Perencanaan Audit Kepatuhan atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	8 orang (100%)	Kuorum
17	8 September 2020	Update Progress meeting perencanaan audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	8 orang (100%)	Kuorum
18	17 September 2020	Pembahasan Data PEN: Kriteria PEN, Pembuatan Sricpt dan Eksekusi dengan Data	8 orang (100%)	Kuorum
19	20 Oktober 2020	Hasil kaji ulang penilaian POJK dan Maturitas Fungsi Audit Intern SKAI bersama KPMG	8 orang (100%)	Kuorum
20	3 November 2020	Konsultasi Meeting dengan Delloitte	8 orang (100%)	Kuorum
21	5 November 2020	Closing Meeting Audit atas Laporan Keuangan Tanggal 30 September 2020	8 orang (100%)	Kuorum

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Jumlah Kehadiran	Keterangan
22	10 November 2020	Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Triwulan III 2020	8 orang (100%)	Kuorum
23	17 November 2020	Update Tindak lanjut atas pelaku kejadian fraud tahun 2020, review terhadap SOP dan ketentuan terkait tindak lanjut pidanan fraud BRI	8 orang (100%)	Kuorum
24	1 Desember 2020	Update tindaklanjut temuan audit kantor cabang tanah abang	8 orang (100%)	Kuorum

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
1	Hendrikus Ivo	Ketua	24	24	100%
2	A. Fuad Rahmany	Ketua	6	6	100%
3	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	8	8	100%
4	Ari Kuncoro	Anggota	10	10	100%
5	Rofikoh Rokhim	Anggota	24	24	100%
6	A. Sonny Keraf	Anggota	6	6	100%
7	Nicolous T. Budi Harjanto	Anggota	8	8	100%
8	R. Widyo Pramono	Anggota	18	18	100%
9	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	24	24	100%
10	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	24	24	100%
11	Sahat Pardede	Anggota	18	18	100%
12	Handayani	Anggota	17	17	100%

Tindak Lanjut Rapat Komite Audit

Seluruh hasil kegiatan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh komite Audit di dokumentasikan dalam risalah rapat dan ditindaklanjuti dengan berbagai surat Ke Dewan Komisaris dan pihak terkait.

Komite Audit

REMUNERASI KOMITE AUDIT 2020

Remunerasi bagi angota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE TAHUN 2020

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJKPeraturan KBUMN dan Regulator	Komposisi Anggota KA telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam Komite Audit	Piagam Komite Audit pada Tahun telah dilakukan review sesuai ketentuan	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KA telah lulus *fit & proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KA telah lulus *fit & proper test* OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KA	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetepan Ketua dan Anggota KA BRI, Masa jabtan ketua dan Anggota KA tidak melebihi ketentuan	5	5

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KA pada Tahun 2020 disahkan tahun 2019	RKAP KA pada Tahun 2020 disahkan pada tanggal 28 Desember 201	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Satu bulan sekali (12 kali)	Selama Tahun 2019 dilaksanakan 24 kali Rapat KA	5	5
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT)	setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan tentang Persetujuan Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020	5	5
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	setahun sekali	1. Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2020 dilaksankan sesuai dengan ketentuan. 2. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap KAP dan/ Akuntan Publik telah disampaikan kepada Dewan Komisaris teopat waktu dan sesuai ketentuan	5	5
			Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dekom	sesuai tugas dan arahan Dekom	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	5	5
		Pengawasan	reviu laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalaui Nota Dinas setiap Triwulan	10	10
			reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komsiaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak 3 Kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI	10	10
			Reviu terhadap pengelolaan *Wisthleblower System*	setahun sekali	Komite Audit telah melakukan revieu terhadap pengelolaan WBS melalui surat Komite audit tanggal 11 September 2020. Selama tahun 2020 diterima 123 laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang memuat 236 sub indikasi pelanggaran dengan rincian sbb: a. 91 Laporan Terbukti b. 118 Laporan Tidak Terbukti c. 27 Laporan Dalam Proses	5	5
			Reviu pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI	setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalaui Nota Dinas Komite Audit sesuai dengan ketentuan	10	10
			Reviu tindaklanjut Management Letter dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	setahun sekali	Reviu Management Letter disampaikan melalaui Nota Dinas Komite Audit perihal *Management Letter* atas Audit Umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2019	5	5
			Penelahaan Atas Laporan Kejadian fraud yang diperkirakan Berdampak Signifikan	setahun sekali	Selama tahun 2020 Komite Audit telah menyampaikan Penelahaan Atas Laporan Kejadian fraud yang diperkirakan Berdampak Signifikan	5	5

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI Wajar Tanpa Pengecualian	10	10
Total						**100**	**100**

OPINI KOMITE AUDIT TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

Opini Komite Audit menilai bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertujuan untuk menyusun kebijakan serta membantu pelaksanaan fungsi dan tugas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
10. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.

PEDOMAN/PIAGAM KOMITE

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris No. B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang mengatur diantaranya:

1. Tujuan pembentukan Komite.
2. Keanggotaan Komite.
3. Kewenangan, tugas dan tanggung jawab.
4. Kedudukan Komite
5. Etika kerja.
6. Pelaksanaan rapat.

Komite Nominasi dan Remunasi

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan melalui SK Direksi Nokep: 548-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi BRI adalah sebagai berikut:

1. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*) atau seorang perwakilan pekerja Perseroan, anggota lainnya dapat berasal dari pihak luar Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

4. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
   a. Wajib memenuhi syarat:
      i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
      ii. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
      iii. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
   a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
   b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
6. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
9. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunarasi

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memilikikeahlian di bidang keuangan; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidangmanajemen risiko.
2. Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko,bidang keuangan dan/atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugastugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko;

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.

5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*). Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikutiketentuan:
   a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
   b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahundan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
8. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite periode 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama
2	Wahyu Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
8	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
9	Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris
10	E.R.A. Taufiq	Anggota	*Ex Officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital)*

Susunan Komite periode 31 Maret 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	R. Widyo Pramono	Ketua	Komisaris Independen
2	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama
3	Ari Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
4	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
5	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
6	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris
7	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen
8	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen

Komite Nominasi dan Remunasi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
9	Zulnahar Usman	Anggota	Komisaris Independen
10	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen
11	E.R.A. Taufiq	Anggota	*Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)*

Susunan Komite periode 12 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	R. Widyo Pramono	Ketua	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Komisaris Independen
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama
4	Ari Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
5	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
6	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
7	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris
8	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen
9	Zulnahar Usman	Anggota	Komisaris Independen
10	Dwi Ria Latifa*	Anggota	Komisaris Independen
11	E.R.A. Taufiq	Anggota	*Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)*

PROFIL KOMITE

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

R. Widyo Pramono Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rofikoh Rokhim Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Kartika Wirjoatmodjo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Utama	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Ari Kuncoro Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus Teguh Budi Harjanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hadiyanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rabin Indrajad Hattari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Zulnahar Usman Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Dwi Ria Latifa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
E.R.A. Taufiq Anggota Komite KNR Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	Lahir di Bandung, 13 Mei 1967, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan. Selama bekerja di BRI, menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Karir Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital, Wakil Kepala Divisi Bidang Karir & Culture Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital, dan *Executive Vice President* Divisi Human Capital Business Partner.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan;
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Komite Nominasi dan Remunasi

WEWENANG

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjaga independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan, saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,Anggota KNR terdiri dari 6 (enam) anggota Komisaris Independen yang tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perseroan dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

LARANGAN KOMITE

1. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Menerima penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite.

KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2020

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dikukur dari pencapaian atas program kerja / rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksankan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan.
Secara umum seluruh KPIKNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KNR tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE 2020

Pelaksanaan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2020 sebagai berikut:

Nominasi Direksi dan EVP BRI

No	Tanggal	Agenda
1	2 Januari 2020	Pembahasan Calon Kepala Divisi SKP
2	17 Februari 2020	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020
3	18 Februari 2020	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020
4	28 Juli 2020	Pembahasan usulan EVP Divisi Corporate Secretary dan Nomenklatur & Formasi Direksi BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait.

No	Tanggal	Agenda
1	14 Januari 2020	Nominasi pengurus BRI dan BRINS
2	28 Januari 2020	Nominasi Pengurus BRI Agroniaga
3	4 Februari 2020	Nominasi pengurus BRI Agro, BRI Remittance dan BRI Ventura Investama
4	3 Maret 2020	Nominasi Pengurus BRI Ventura
5	24 Maret 2020	Usulan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi PT BRI Multifinance Indonesia
6	31 Maret 2020	Pembahasan Nominasi Pengurus PT. BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
7	2 Juni 2020	Pembahasan Pencalonan Komisaris Independen PT BRI Ventura Investama (BRI Ventura)
8	29 Juni 2020	Nominasi pengurus BRI Life
9	10 Desember 2020	Pembahasan Nominasi Pengurus PT BRI Syariah

Evaluasi Kinerja Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	23 Januari 2020	Hasil evaluasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penyusunan Kebijakan/Ketentuan Talent Management

No	Tanggal	Agenda
1	10 Maret 2020	Kebijakan pengembangan human capital dan talent managemen system BRI
2	28 April 2020	*Talent Pool* BRI
3	29 April 2020	Lanjutan Talent pool BRI

Revieu Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2020	Remunerasi Direksi dan dewan komisaris
2	27 April 2020	Tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Tahun 2020

Komite Nominasi dan Remunasi

Wawancara Calon Dewan Komisaris dan Direktur

No	Tanggal	Agenda
1	10 Maret 2020	Wawancara calon direktur dan komisaris BRI
2	5 Mei 2020	Wawancara Calon Komisaris BRI Finance
3	26 Mei 2020	Wawancara *Fit n proper test* calon komisaris Independen BRI Life
4	26 Mei 2020	Wawancara *Fit n proper test* calon komisaris Independen BRI Ventura investama
5	15 Desember 2020	Wawancara dengan calon direktur kepatuhan BRI Insurace

Kegiatan lainnya

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris Tahun 2021.
3. Melakukan *revieu* dan kajian atas remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, *size business* dan hasil survei remunerasi industri perbankan.
4. Melaksanakan proses nominasi dan memberikan rekomendasi calon pengurus Perseroan dan anak perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perekrutan termasuk perpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris
6. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Reviu* dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
7. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Reviu* perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
8. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2020

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun 2020 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2020.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai,

atau dengan surat elektronik (e-mail) dan media komunikasi lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

5. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
6. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite.
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan;
10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
11. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
12. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
13. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
14. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
15. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
16. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota KNR	Keterangan
1	2 Januari 2020	Pembahasan Calon Kepala Divisi SKP	10	Kuorum
2	14 Januari 2020	Nominasi pengurus BRI dan BRINS	10	Kuorum
3	21 Januari 2020	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	10	Kuorum
4	28 Januari 2020	Nominasi Pengurus BRI Agroniaga	10	Kuorum
5	4 Februari 2020	Nominasi pengurus BRI Agro, BRI Remittance dan BRI Ventura Investama	10	Kuorum
6	17 Februari 2020	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020	10	Kuorum
7	18 Februari 2020	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020	10	Kuorum
8	3 Maret 2020	Nominasi Pengurus BRI Ventura	10	Kuorum
9	10 Maret 2020	Wawancara calon direktur dan komisaris BRI	10	Kuorum
10	10 Maret 2020	Kebijakan pengembangan human capital dan talent managemen system BRI	10	Kuorum
11	24 Maret 2020	Usulan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi PT BRI Multifinance Indonesia	11	Kuorum
12	31 Maret 2020	Pembahasan Nominasi Pengurus PT. BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	11	Kuorum

Komite Nominasi dan Remunasi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota KNR	Keterangan
13	27 April 2020	Tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Tahun 2020	11	Kuorum
14	28 April 2020	Talent Pool BRI	11	Kuorum
15	29 April 2020	Lanjutan Talen pool BRI	11	Kuorum
16	5 Mei 2020	Wawancara Calon Komisaris BRI Finance	11	Kuorum
17	26 Mei 2020	Wawancara Fit n proper test calon komisaris Independen BRI Life	11	Kuorum
18	26 Mei 2020	Wawancara Fit n proper test calon komisaris Independen BRI Ventura investama	11	Kuorum
19	2 Juni 2020	Pembahasan Pencalonan Komisaris Independen PT BRI Ventura Investama (BRI Ventura)	11	Kuorum
20	29 Juni 2020	Nominasi pengurus BRI Life	11	Kuorum
21	28 Juli 2020	Pembahasan usulan EVP Divisi Corporate Secretary dan Nomenklatur & Formasi Direksi BRI	11	Kuorum
22	10 Desember 2020	Pembahasan Nominasi Pengurus PT BRI Syariah	11	Kuorum
23	15 Desember 2020	Wawancara dengan calon direktur kepatuhan BRI Insurace	11	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat KNR	Kehadiran KNR	% Kehadiran KNR
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	8	8	100%
2	R. Widyo Pramono	Ketua	15	15	100%
3	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	15	15	100%
4	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	15	15	100%
5	Ari Kuncoro	Anggota	15	15	100%
6	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	23	23	100%
7	Hadiyanto	Anggota	23	23	100%
8	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	15	15	100%
9	Hendrikus Ivo	Anggota	23	23	100%
10	Zulnahar Usman	Anggota	15	15	100%
11	Dwi Ria Latifa*	Anggota	15	15	100%
12	Wahyu Kuncoro	Anggota	8	8	100%
13	A. Fuad Rahmany	Anggota	8	8	100%
14	A. Sonny Keraf	Anggota	8	8	100%
15	Loeke Larasati A.	Anggota	8	8	100%
16	E.R.A. Taufiq	Anggota	23	23	100%

Rencana Agenda Rapat Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

No.	Rencana Agenda Rapat Tahun 2019	Target Waktu
1.	Nominasi Direksi dan Komisaris	Minggul Februari 2020
2.	Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu I Maret 2020
3	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak	Tentative Sesuai Usulan Direksi
4	Reviu Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Minggu II Mei 2020
5	Reviu dan penyusunan Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris untuk Tahun 2018	Minggu I Juni 2020
6	Reviu Kebijakan *Human Capital*	Minggu I September 2020
7	Reviu Kebijakan Remunerasi Pekerja	Minggu I September 2020

REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agutus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan POJKPeraturan KBUMN dan Regulator	Komposisi Anggota KNR tertuang dalam SK Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK & Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KNR pada Tahun 2020	Piagam KNR telah di review dan sesuai ketentuan	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus Fit & Propertest OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	9 (Sembilan) Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* OJK dan 1 anggota Dewan Komisaris masih menunggu hasil *Fit and Proper Test* OJK	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetepan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR telah sesuai ketentuan	5	5

Komite Nominasi dan Remunasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP KNR pada Tahun 2020 disahkan pada tanggal 30 Desember 2019	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 bulan	Selama tahun 2020 dilaksankan 23 kali rapat KNR	10	10
			Nominasi pengurus BRI	Minimal sekali dalam setahun	1. Usulan calon Direktur Utama dan bakal calon anggota Direksi BRI disampaikan tanggal 17 Februari 2020. 2. Usulan perubahan Calon Pengurus PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan tanggal 18 Februari 2020.	10	10
			Nominasi pengurus anak perusahaan	Tentative sesuai dengan usulan Direksi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan nominasi pengurus anak perusahaan.	10	10
			Reviu dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 dan tantiem atas kinerja tahun 2019 pada tanggal 21 Januari 2020	10	10
			Mereviu/ menyusun Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR telah melakukan reviu kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan	10	10
		Pengawasan	Review Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Kebijakan pengembangan human capital dan talent managemen system BRI	10	10

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Hasil Evaluasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbktanggal 23 Januari 2020	5	5
			Pelaksanaan penilaian self assesment kinerja Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Dilaksanakan sekali dengan nilai hasil *self assessment* Dekom 101,34%	5	5
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dekom dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Annual Report BRI	5	5
Total						**100**	**100**

OPINI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TERHADAP PELAKSANAAN NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN

Komite Remunerasi dan Nominasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus lulus *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon pengurus Perseroan berdasarkan data *Top talent* BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau Direksi Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani proses *fit and proper test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan untuk Direksi yang dilakukan secara kolektif kolegial saat ini dinilai telah mencukupi. Selain saat ini telah dikembangkan penilaian kinerja individu, khususnya untuk Direksi, yang dapat mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat dibawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang prudent, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh pihak independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

Komite Nominasi dan Remunasi

KEBIKAKAN SUKSESI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-pinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan BRI, Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Sukses Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Umum Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu :
   a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
   b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
   c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
   a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
   b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon;
7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Prosedur Nominasi Direksi dan Komisaris

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunrasi (KNR) menjaring Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
   a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;

b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjaringan ini melibatkan lembaga assessment profesional/ eksternal atau *Professional Search Firm* yaitu yaitu: PPM Manajemen *Assesment Center* Indonesia (ACI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil assessment tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
   i. Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
   ii. Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.

4. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
5. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
6. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk sleanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
7. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. Calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
8. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau peNolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Komite Nominasi dan Remunasi

PROSEDUR NOMINASI CALON DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. KNR melalui Dewan komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai bakal calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent management system* BRI, hasil assesment oleh lembaga independen serta hasil rapat Komite Human Capital BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunrasi (KNR) menjaring Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
   a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjaringan

ini melibatkan lembaga assessment profesional/ eksternal atau Professional Search Firm yaitu yaitu : PPM Manajemen *Assesment Center* Indonesia (ACI) Telkom, DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil assessment tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
   i. Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
   ii. Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.

d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.

6. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk sleanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
9. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. Calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau peNolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Komite dibawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

DASAR HUKUM

1. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

PEDOMAN/PIAGAM KOMITE

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Pedoman Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 mengatur tentang:

5. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab.
6. Pembagian kerja.
7. Waktu dan etika kerja
8. Rapat Komite
9. Struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan melalui SK Direksi Nokep: 547-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2020 – 18 Maret 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Mahmud	Ketua	15 Maret 2017 - 15 Mei 2019	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris Utama / Independen
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Komisaris Independen
6	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris
7	Suindiyo	Anggota	1 Desember 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Sumaryo	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Indrayeti	Anggota	1 Agustus 2014 – 10 Agustus 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
10	Tubagus A. Maulana	Anggota	1 Februari 2015 – 1 Februari 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko

Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Risiko Periode 31 Maret 2020 – 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Ari Kuncoro	Ketua	18 Maret - Sekarang	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
3	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris
4	Dwi Ria Latifa	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Komisaris Independen
6	Suindiyo	Anggota	1 Desember 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
7	Sumaryo	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Bintoro Nurcahyo	Anggota	31 Maret 2020 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
9	A. Sigit Sudahno	Anggota	31 Maret 2020 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 12 Agustus 2020 – 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Ari Kuncoro	Ketua	31 Maret 2020- Sekarang	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
2	Kartika Wijoatmodjo	Anggota	12 Agustus 2020 – Sekarang	Komisaris Utama
3	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	12 Agustus 2020 – Sekarang	Komisaris
4	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris
5	Rofikoh Rokhim	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	31 Maret 2020 – Sekarang	Komisaris Independen
7	Suindiyo	Anggota	1 Desember 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Sumaryo	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Bintoro Nurcahyo	Anggota	31 Maret 2020 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
10	A. Sigit Sudahno	Anggota	31 Maret 2020 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/ atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko;
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
   d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
   e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
   f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
   a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
   b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

PROFIL KOMITE

Profil anggota Komite Pemantau Risiko 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ari Kuncoro Ketua KPMR/ Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Kartika Wirjatmodjo Angota KPMR/ Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rabin Indrajad Hattari Angota KPMR/ Komisaris	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus T. Budi Harjanto Angota KPMR/Komisaris	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rofikoh Rokhim Anggota KPMR/Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Dwi Ria Latifa Anggota KPMR/Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Suindiyo Angota KPMR Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir di Perseroan dalam berbagai posisi antara lain *Executive Vice President* bidang Audit), *Vice President Loan Restructuring and Recovery, Vice President* Administrasi Kredit dan *Vice President* Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan gelar *Master of Business Administration Finance* dari Virginia Polytechnic Institute and State University (1994).
Sumaryo Angota KPMR Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Februari 2016. Sebelumnya berkarir sebagai dosen dan konsultan. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB (1995) dan gelar MBA *Banking and Finance* dari University of Birmingham (2000), MSc Finance dari University of Strathclyde (2001) dan PhD in Finance dari University of Strathclyde (2007).
Bintoro Nurcahyo Angota KPMR Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya berkarir di Perseroan dengan posisi terakhir menjabat sebagai *Executive Vice President* Divisi Risiko *Enterprise* dan Manajemen Portofolio. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari UGM (1988) dan gelar MBA *Banking & Finance* dari The Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University USA (1998)
A. Sigit Sudahno Angota KPMR Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 57 Tahun Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya berkarir sebagai di Perseroan dengan posisi terakhir menjabat sebagai *Vice President* Divisi Kebijakan Risiko Kredit. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UGM (1988) dan gelar Magister Manajemen dari Universtias Padjajadran (2000).

Komite Pemantau Manajemen Risiko

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

Sesuai dengan Pedoman Tata tertib KPMR Anggota Komite paling kurang terdiri dari Seorang Komisaris Independen, Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

1. Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi;
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

No	Kriteria Independensi	AK	KW	RIH	NTBH	RR	DRL	SS	SM	BNC	AS
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: Ari Kuncoro (AA), Kartika Wiirjatmodjo (KW), Rabin Indrajad Hattari (RIH), Nicolaus Teguh Budi Harjanto (NTBH), Dwi Ria Latifa (DRL), Suindiyo (SS), Sumaryo (SM), Bintoro Nurcahyo (BNC), A. Sigit Sudahno (AS).

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan;

Komite Pemantau Manajemen Risiko

2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan;
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan; dan
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2020

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KPMR Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2020.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*), WA paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
6. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen;
8. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan;
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
13. Perbedaan pendapat atau *dissenting* opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
14. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
15. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
16. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Agenda Rapat KPMR tahun 2020

No	Tgl Rapat	Agenda
1	21 Januari 2020	Profil Risiko triwulan IV tahun 2019
2	4 Februari 2020	Konsultasi Kredit dengan 5 Debitur Korporasi
3	11 Februari 2020	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Penerapan APU PTT, dan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2019
4	11 Februari 2020	Konsultasi Kredit Korporasi
5	7 April 2020	Reviu Pergerakan NPL di Segmen UMKM dan Konsumer, Reviu Pergerakan NPL dan Loan at Risk di Segmen Kredit Korporasi
6	5 Mei 2020	Monitoring trigger level recovery plan dan profil risiko BRI tw I 2020
7	26 Mei 2020	Penyediaan Dana Pihak terkait PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS)
8	2 Juni 2020	Pembahasan lanjutan BRINS
9	18 Juni 2020	Pembahasan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait a.n. PT Danareksa Sekuritas
10	30 Juni 2020	Konsultasi Kredit dengan 4 debitur Korporasi
11	7 Juli 2020	Konsultasi kredit korporasi
12	14 Juli 2020	Konsultasi kredit korporasi
13	21 Juli 2020	Konsultasi kredit korporasi
14	28 Juli 2020	Profil risiko triwulan II tahun 2020
15	11 Agustus 2020	Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2020 Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PTT, dan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2020
16	18 Agustus 2020	Update Switch Over As 400
17	1 September 2020	Update Restrukturisasi Kredit terdampak covid 19 dan estimasi kualitas aset BRI Tahun 2020
18	20 Oktober 2020	Konsultasi Kredit dengan 4 Debitur Korporasi
19	3 November 2020	Profil Risiko Triwulan III 2020
20	3 November 2020	Konsultasi Kredit dengan 3 Debitur Korporasi
21	24 November 2020	Pembahasan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan BRI tahun 2021, Review Recovery Plan BRI
22	1 Desember 2020	Update NPL, rencana/anggaran PH dan Recovery kredit BRI.
Kehadiran		
Jumlah Rapat		
Persentase		

Keterangan : Mahmud (MH), A. Fuad Rahmany (AFR), Andrinof A. Chaniago (AAC), Ari Kuncoro (AK), Kartiko Wirjoatmodjo (KW), Rabin Indrajad Hattari (RIH), Nicolous Teguh Budi Harjanto (NTB), Rofikoh Rokhim (RR), Dwi Ria Latifa (DRL), Suindiyo (SS), Sumaryo (SM), Bintoro Nurcahyo (BNC), A. Sigit Sudahno (AS), Indrayeti (ID), Tubagus A. Maulana (TAM).

Komite Pemantau Manajemen Risiko

MH	AFR	AAC	AK	KW	RIH	NTB	RR	DRL	SS	SM	BNC	AS	ID	TAM
1	1	1				1	1		1	1			1	1
1	1	1				1	1		1	1			1	1
1	1	1				1	1		1	1			1	1
1	1	1				1	1		1	1			1	1
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1			1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	4	4	18	7	7	22	22	18	22	22	18	18	4	4
4	4	4	18	7	7	22	22	18	22	22	18	18	4	4
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

No.	Materi	Realisasi	Output
1	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV tahun 2018	7 Februari 2020	Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2020
2	Review Laporan Tingkat Kesehatan, Fungsi Kepatuhan, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Pelaksanaan Program APU PPT Semester II tahun 2019	3 Maret 2020	Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Pelaksanaan FungsiKepatuhan,Laporan ProgramAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) dan Laporan Pelaksanaan StrategiAnti Fraud semester II tahun 2019
3	Perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT	30 Maret 2020	Hasil Revieu kebijakan dan prosedur APU dan PPT
4	Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK	20 April 2020	laporan hasil penilaian tingkat risiko dan laporan penerapan manajemen risiko DPLK BRI tahun 2019
5	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I tahun 2020	19 Mei 2020	Pemaparan Triger Level Recovery Plan dan Profil Risiko Triwulan I 2020.
6	Evaluasi Kinerja DPLK tahun 2019 dan Triwulan I 2020	22 Juni 2020	Penyampaian kinerja DPLK BRI tahun 2019 dan triwulan I 2020
7	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II tahun 2020	28 Juli 2020	Profil risiko triwulan II tahun 2020
8	Review Laporan Tingkat Kesehatan, Fungsi Kepatuhan, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Pelaksanaan Program APU PPT Semester I tahun 2020	11 Agustus 2020	Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PTT, dan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2020
9	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II tahun 2019	11 Agustus 2020	Profil risiko Triwulan II Tahun 2020
10	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	17 Februari 2020 18 Februari 2020 16 Juli 2020 27 Juli 2020 3 Agustus 2020	Konsultasi atas nasabah korporasi dan/atau BUMN
11	Persetujuan atas Pemberian Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	9 Januari 2020 30 Januari 2020 19 Mei 2020 7 Juli 2020	Pelayanan KPR kepada pihak terkait secara kolektif Penyediaan Dana kepada Danareksa Penyediaan Dana kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) Penyediaan Dana kepada BRI Life
12	Review RencanaAksi *(Recovery Plan)*	26 November 2020	Pembahasan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan BRI tahun 2021, Review Recovery Plan BRI

No.	Materi	Realisasi	Output
13	Rencana Aksi Korporasi	26 Mei 2020	Penyediaan Dana Pihak terkait PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS).
		29 Juni 2020	Permohonan Persetujuan Rencana Strategic Partnership Dalam rangka Pengembangan BRI Life
		7 Juli 2020	Penyediaan dana pihak terkait BRILife (Repo)
		18 Agustus 2020	Tambahan Modal BRI Finance Indonesia
		13 Oktober 2020	Project Amanah Merger Bank Syariah BUMN
		29 Desember 2020	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait a.n. PT Danareksa Sekuritas
14	Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko BRI dan Manajemen Risiko Terintegrasi	24 November 2020	Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko BRI (termasuk didalamnya manajemen risiko terintegrasi)

REMUNERASI KOMITE

Remunerasi bagi angota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN No. PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Penetepan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KPMR pada Tahun 2020	Pada Tahun 2020 telah dilakukan reviu dan tidak ada perubahan terhadap piagam KPMR	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2020	Terdapat 1 (satu) Anggota KPMR menunggu hasil *fit & proper test* OJK yaitu Dwi Ria Latifa serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KPMR.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetepan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KPMR pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KPMR pada Tahun 2020 disahkan pada tanggal 30 Desember 2020.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 kali rapat.	Selama Tahun 2020 dilaksanakan 22 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2020 KPMR melakukan review sebanyak 12 kali konsultasi kredit.	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2020 KPMR melakukan review sebanyak 4 kali persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2020 KPMR melakukan review sebanyak 6 kali persetujuan rencana aksi korporasi. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	10	10

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	Review kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan *Recovery Plan*	Sekali setahun	Selama tahun 2020 KPMR melakukan review KUMR dan Recovery Plan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020	5	5
			Review kebijakan umum perkreditan dan Evaluasi portfolio perkreditan/ *portfolio guideline*	sekali setahun	Review Kebijakan Umum Perkreditan portfolio perkreditan/ *Loan portfolio guideline* masih berlaku	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme (APU & PPT). Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	5	5
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya fraud Perseroan	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya fraud Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	sekali setahun	Selama tahun 2020 KPMR melakukan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	5	5

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Selama tahun 2020 KPMR melakukan Evaluasi profil risiko Perseroan setiap triwulan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai kentetuan	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai kentetuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Evaluasi penerapan *Good Pension Fund Governance*.	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan Evaluasi penerapan *Good Pension Fund Governance* secara periodik sesuai kentetuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020.	5	5
Total						**100**	**100**

OPINI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN MANAJAMEN RISIKO

Komite Pemantau Risiko memastikan BRI memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BRI. Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama tahun 2020 melalui rapat, kunjungan kerja, konsultasi dan *review*, komite menyampaikan bahwa Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dari risiko yang diambil telah sesuai dengan *appetite risk* yang ditetapkan (*low to moderate*) sampai dengan triwulan III tahun 2020, tingkat kesehatan Bank yang memperoleh peringkat komposit 2 (Sehat) pada Juni 2020 serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham seiring dengan perkembangan bisnis di era digital ekonomi dan menjadi salah satu dasar pengabilan keputusan manajemen.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu komite yang membantu Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

PEDOMAN/PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Teritentegrasi memiiki pedoman dan tata tertib kerja ini mengatur tentang:

1. Tugas dan tanggung jawab Komite
2. Wewenang Komite
3. Kewajiban Komite
4. Pembagian kerja dan waktu kerja Komite
5. Etika kerja Komite
6. Rapat Komite
7. Struktur organisasi Komite

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Tata Kelola Terintergrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP:06-KOM/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintergrasi (KTKT) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama;
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern Bank.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota.
   b. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.
3. Setiap anggota Komite harus independen dengan pengertian:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
   d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
4. Penunjukkan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:
   a. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
   b. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
6. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 Januari 2020 – 15 Juni 2020 adalah:

No	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Rofikoh Rokhim	Ketua	Komisaris Independen BRI	21 Mei 2019- 15 Juni 2020
2.	Andrinof A. Chaniago*)	Anggota	Komisaris Utama/Independen BRI	19 Juli 2017-18 Maret 2020
3	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	10 Agustus 2019- 15 Juni 2020
4.	Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	21 September 2018 - 15 Juni 2020
5.	Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen BRIsyariah	21 Mei 2019-15 Juni 2020
6.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRIsyariah	19 Mei 2015-15 Juni 2020
7.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017-15 Juni 2020

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
8	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia	27 Maret 2017-15 Juni 2020
9	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen	10 Agustus 2019 - 15 Juni 2020

*) Efektif sampai dengan 18 Maret 2020

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 15 Juni 2020 – 30 Juli 2020 adalah:

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Periode Jabatan
1	Ari Kuncoro	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	15 Juni 2020 - 30 Juli 2020
2	Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	21 September 2018 -30 Juli 2020
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen BRI	21 Mei 2019- 30 Juli 2020
4	Zulnahar Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
5	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
6	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen	10 Agustus 2019 – 30 Juli 2020
7	Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multi Finance	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
8	Imam Sundoro	Anggota	Komisaris Independen Bringin Sejahtera Artamakmur	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
9	Syukhandari	Anggota	DPS Bringin Sejahtera Artamakmur	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
10	Hadi Susanto	Anggota	Komisaris Utama BRI Ventura Investama	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
11	Sumihar Manulang	Anggota	Komisaris Independen Danareksa Sekuritas	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
12	Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen BRIsyariah	21 Mei 2019-30 Juli 2020
13	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRIsyariah	19 Mei 2015-30 Juli 2020
14	Eko Wahyu Andriastono	Anggota	Komisaris Independen BRI Life	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020
15	Anna Maria Tjiadarma	Anggota	Komisaris Independen BRI Agroniaga	15 Juni 2020 – 30 Juli 2020

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi 30 Juli 2020 – 31 Desember 2020 adalah:

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Periode Jabatan
1	Ari Kuncoro	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 Juni 2020 - 31 Desember 2020
2	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	30 Juli 2020 - 31 Desember 2020
3	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris BRI	30 Juli 2020 - 31 Desember 2020
4	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen BRI	21 Mei 2019- 31 Desember 2020
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	21 Mei 2019- 31 Desember 2020
6	Zulnahar Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
7	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Periode Jabatan
8	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen	10 Agustus 2019 – 31 Desember 2020
9	Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen	30 Juli 2020 – 31 Desember 2020
10	Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multi Finance	15 Juni 2020 – 31 Desember2020
11	Imam Sundoro	Anggota	Komisaris Independen Bringin Sejahtera Artamakmur	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
12	Syukhandari	Anggota	DPS Bringin Sejahtera Artamakmur	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
13	Hadi Susanto	Anggota	Komisaris Utama BRI Ventura Investama	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
14	Sumihar Manulang	Anggota	Komisaris Independen Danareksa Sekuritas	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
15	Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen BRIsyariah	21 Mei 2019-31 Desember 2020
16	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRIsyariah	19 Mei 2015-31 Desember 2020
17	Eko Wahyu Andriastono	Anggota	Komisaris Independen BRI Life	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020
18	Anna Maria Tjiadarma	Anggota	Komisaris Independen BRI Agroniaga	15 Juni 2020 – 31 Desember 2020

PROFIL KOMITE

Profil Anggota KTKT per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ari Kuncoro Ketua KTKT/Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Kartika Wirjoatmodjo Angota KTKT/Komisaris Utama BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus Teguh Budi Harjanto Anggota KTKT/Komisaris BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rofikoh Rokhim Anggota KTKT/Komisaris Independen BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo Anggota KTKT/Komisaris Independen BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Zulnahar Usman Anggota KTKT/Komisaris Independen BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Dwi Ria Latifa Anggota KTKT/Komisaris Independen BRI	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Suindiyo Anggota KTKT/Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir di Perseroan dalam berbagai posisi antara lain *Executive Vice President* bidang Audit), *Vice President Loan Restructuring and Recovery*, *Vice President* Administrasi Kredit dan *Vice President* Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitar Jember (1985) dan gelar *Master of Business Administration Finance* dari Virginia Polytechnic Institute and State University (1994).
Bintoro Nurcahyo Anggota KTKT/Pihak Independen	Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai anggota KPMR Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya berkarir di Perseroan dengan posisi terakhir menjabat sebagai Executive Vice President Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari UGM (1988) dan gelar MBA Banking & Finance dari The Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University USA (1998)
Sumantri Suwarno Anggota KTKT/Komisaris Independen BRI Multi Finance	Warga Negara Indonesia, 44 Tahun Pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (2002). Riwayat jabatan terakhir sebagai Komisaris PT Sirius Surya Sentosa dan Komisaris PT IPC TPK.
Imam Sundoro Anggota KTKT/Komisaris Independen Bringin Sejahtera Artamakmur	Warga Negara Indonesia, 58 Tahun Pendidikan Sarjana Ekonomi UPN Veteran (1989). Riwayat jabatan terakhir Inspektur BRI Yogyakarta (2018), Inspektur BRI Jayapura (2017) dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 3 (2016).
Syukhandari Anggota KTKT/DPS Bringin Sejahtera Artamakmur	Warga Negara Indonesia
Hadi Susanto Anggota KTKT/Komisaris Utama BRI Ventura Investama	Warga Negara Indonesia, 61 Tahun Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (1983), dan Magister International Business Temple University (1993). Riwayat Jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan BRI Multifinance Indonesia, Inspektur BRI Jakarta 2, Kepala Divisi Hukum BRI, dan Inspektur BRI Padang.
Sumihar Manulang/ Anggota KTKT/ Komisaris Independen Danareksa Sekuritas	Warga Negara Indonesia, 58 Tahun Pendidikan Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran (1987) dan Magister Manajemen Keuangan Universitas Katolik Atmajaya (2000). Riwayat jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kepatuhan BRI (2018), Kepala Audit Intern Wilayah Medan (2017), Kepala Audit Intern Wilayah Manado (2016), dan Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura (2015).
Eko Suwardi Anggota KTKT/Komisaris Independen PT Bank BRIsyariah Tbk	Warga Negara Indonesia, 62 Tahun Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Gajah Mada Indonesia (1987), S2 Master of Science in Accountancy di California State University, Fresno, USA (1994), S3 Doktor of Philosophy in Business (Accounting) di Queensland University of Technology Australia (2005). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen BRI Syariah (Oktober 2017 - sekarang), Ketua ISEI cabang Yogyakarta (2017 - sekarang), Ketua Forum Dosen Perpajakan Indonesia (2015 - sekarang), Chairman of ASEN University Network: Business and Economics (2017 - sekarang). Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (2016 - 2021), Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB Universitas Gajah Mada (2012 - 2016), Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM FEB Universitas Gajah Mada (2008 - 2012), Kepala Audit Internal Universitas Gajah Mada (2005 - 2008).

Komite Tata Kelola Terintegrasi

M. Gunawan Yasni Angota KTKT Dewan Pengawas BRIsyariah Periode: Juni 2015-Sekarang	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 17 September 1969. Menyelesaikan Strata 1(S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasi Universitas Indonesia (1993) dan meraih gelar Magister Management Keuangan dari Prasetya Mulya pada (1995). Selama berkarir pernah menjadi Manajer PT Pacific 2000 Investindo (Securities Financial Services), *Deputy Head of Product Development* PT Bahana Artha Ventura (Venture Capital) Jakarta (2000), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi SIMAS Syariah (2004ñ2005), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jaminan Kredit Indonesia (2006), Advisor-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2009), Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah (2008-sekarang) dan aktif sebagai konsultan dan pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan (Pasca Sarjana). Sertifikasi yang dimiliki antara lain sebagai *Certified Islamic Financial Analyst* dari Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia, Fellow di Islamic Insurance Society (FIIS) dan pemegang Sertifikasi Level Lanjutan (Level IV) Manajemen Risiko Perbankan dan Memiliki izin Bapepam sebagai Investment Manager, Underwriter & Broker-Dealer.
Eko Wahyu Andriastono / Angota KTKT/ Komisaris Independen BRI Life	Warga Negara Indonesia, 62 Tahun Pendidikan Sarjana Agronomi Universitas Jember (1984) dan Magister Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran (2000). Riwayat Jabatan terakhir sebagai Direktur Utama PT BRINS (2014), Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 3 (2012), Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta (2010), Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin (2009), Pemimpin Wilayah BRI Manado (2008) dan Inspektur BRI Palembang (2007).
Anna Maria Tjiadarma/ Angota KTKT/ Komisaris Independen BRI Agroniaga	Warga Negara Indonesia, 59 Tahun Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan Magister Internasional Business Ceram School of Management Sophia Antipolis. Riwayat Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Investment Service BRI.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengamalaman
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan entitas anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinisp Good Corporate Governance (GCG)
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota

INDEPENDENSI KOMITE

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

No	Kriteria Independensi	AK	KW	NTB	RR	HI	ZU	DRL	SU	BN	SS	IS	SY	HS	SM	ES	MGY	EWA	AMT
1.	Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan : Ari Kuncoro (AK), Kartika Wirjoatmodjo (KW), Nicolaus Teguh Budi Harjanto (NTB), Rofikoh Rokhim (RR), Hendrikus Ivo (HI), ZulnaharUsman (ZU), Dwi Ria Latifa (DRL), Suindiyo (SU(, Bintoro Nurcahyo (BN), Sumantri Suwarno (SS), Imam Sundoro (IS), Syukhandari (SY), Hadi Susanto (HS),Sumihar Manulang (SM), Eko Suwardi (ES), M. Gunawan Yasni (MGY), Eko Wahyu Andriastono (EWA), dan Anna Maria Tjiadarma AMT)

Komite Tata Kelola Terintegrasi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi *(Self Assessment)* setiap semester kepada Direksi BRI.
5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

WEWENANG

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengendalian intern secara terintegrasi.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2020

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KTKT Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2020.

KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2020

Indikator atau kriteria kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dikukur dari pencapaian atas program kerja / rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dna tingkat kehadiran Anggota TKT dalam setiap rapat. Adapun program kerja KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan memberikan masukan/saran dalam hal pengelolaan manajemen risiko terintegrasi, Funngi kepuahn terintegrasi dan audit terientegrasi pada entitas utama dan entitas anak.

Secara umum seluruh KPI Komite Tata Kelola terintegrasi telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KTKT tahun 2018 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KTKT yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KTKT dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas inisiatif seorang atau lebih anggota Komite dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Rapat Komite yang terjadwal harus dilakukan pemanggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama, sedangkan rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mendesak atau tidak terjadwal dapat dilakukan pemanggilannya secara lisan atau komunikasi melalui *video conference*.
4. Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
5. Setiap rapat Komite dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
8. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
9. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Agenda Rapat KTKT tahun 2020

No	Tgl Rapat	Agenda
1	28 Januari 2020	Update proses konversi Kanwil BRI Aceh menjadi BRI Syariah dalam rangka implementasi kebijakan Qonun Aceh
2	25 Februari 2020	Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2019
3	14 April 2020	Evaluasi kinerja perusahaan anak BRI Triwulan I Tahun 2020 dan dampak covid 19 terhadap Bisnis perusahaan anak BRI
4	21 April 2020	Evaluasi kinerja perusahaan anak dan pemaparan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI, Update posisi likuiditas dan strategi likuiditas serta progress restrukturisasi kredit BRI dan perusaan anak, pembahasan kinerja Dapen dan YKP BRI
5	28 April 2020	Agenda 1 Evaluasi Kinerja perusahaan anak dan pemaparan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI (BRIF, BRINS, BRI Ventura). Agenda 2: Update posisi dan strategi likuiditas serta progress restrukturisasi kredit
6	25 Agustus 2020	Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Anak BRI, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2020, Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2020
7	15 September 2020	Profil Risiko Terintegrasi BRI
8	15 Desember 2020	Kinerja dan Rencana Pengembangan Perusahaan BRINS
Kehadiran		
Jumlah Rapat		
% Kehadiran		

Keterangan : Andrinof A Chaiago (AAC), Ari Kuncoro (AK), Kartika Wirjoatmodjo (KW), Nicolaus Teguh Budi Harjanto (NTB), Rofikoh Rokhim (RR), Hendrikus Ivo (HI), ZulnaharUsman (ZU), Dwi Ria Latifa (DRL), Suindiyo (SU(, Bintoro Nurcahyo (BN), Sumantri Suwarno (SS), Imam Sundoro (IS), Syukhandari (SY), Hadi Susanto (HS),Sumihar Manulang (SM), Eko Suwardi (ES), M. Gunawan Yasni (MGY), Eko Wahyu Andriastono (EWA), dan Anna Maria Tjiadarma AMT)

Komite Tata Kelola Terintegrasi

	AAC	AK	KW	NTB	RR	HI	ZU	DRL	SU	BN	SS	IS	SY	HS	SM	ES	MGY	EWA	AMT
	1				1	1			1							1	1		
	1				1	1			1							1	1		
					1	1			1							1	1		
					1	1			1							1	1		
					1	1			1							1	1		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	3	3	3	8	8	3	3	8	3	3	2	2	2	2	7	7	2	2
	2	2	3	3	8	8	3	3	8	3	3	2	2	2	2	8	8	3	3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%	67%	67%	**88 %**	**88%**	**67%**	**67%**

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintergrasi Tahun 2020

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
1.	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	Review terhadap usulan anggota KTKT dari LJK dilakukan 2 kali selama tahun 2020	Perubahan Anggoa KTKT melalui SK Dewan Komisaris Nokep: 06-KOM/BRI/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 Nokep: 06-KOM/BRI/07/2020 tanggal 30 Juli 2020
2.	Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak	14 April 2020 21 April 2020 28 April 2020 25 Agustus 2020 15 Desember 2020	Kinerja Perusahaan anak (BRI Life, danareksa sekuritas) dan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI Kinerja perusahaan anak (BRI Finance, Bri Insurace, BRI Ventura) dan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI Kinerja perusahaan anak (BRI Finance, Bri Insurace, BRI Ventura) dan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Anak BRI, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2020, Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2020 Kinerja dan Rencana Pengembangan Perusahaan BRINS
3	Evaluasi dan rekomendasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	21 Oktober 2020	Hasil Review draft revisi kebijakan pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan BRI
4	Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi. Dilakukan semesteran dengan memberikan saran/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/penyempurnaan	Evaluasi fungsi pengendalian intern dengan setiap LJK atas audit internal (organisasi SKAI, pelaksanaan audit, hasil audit dan tindak lanjut audit) telah dilakukan untuk: Semester II tahun 2019 Semester I tahun 2020	Rapat KTKT tanggal 20 Februari 2020 Rapat KTKT tanggal 18 Agustus 2020
5	Laporan Semesteran Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	14 Oktober 2020 27 Oktober 2020	Hasil Review Laporan hasil audit terintegrasi semester I 2020 dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi semester I 2020 Hasil Review Laporan profil risiko terintegrasi semeter I tahun 2020 dan kinerja perusahaan anak triwulan II tahun 2020

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
6	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran dan memberikan saran/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/penyempurnaan Semester II/2019 dan Semester I/2020	23 Maret 2020 27 Oktober 2020	Hasil review profil risiko terintegrasi semester II 2019 Hasil Review Laporan profil risiko terintegrasi semeter I tahun 2020 dan kinerja perusahaan anak triwulan II tahun 2020
7	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK	Hasil Review laporan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan BRI tahun 2019 pada tanggal 16 Juni 2020
8	Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap Semester	13 Februari 2020 25 Agustus 2020	Penilaian *self assessment* tata Kelola terintegrasi Semester II tahun 2019 dengan Peringkat Komposit 2 (Baik) Penilaian *self assessment* tata Kelola terintegrasi Semester I tahun 2020 dengan Peringkat Komposit 2 (Baik)

REMUNERASI KOMITE

Remunerasi bagi angota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

PENILAIAN KINERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KTKT sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 06-KOM/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI.	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Reviu Piagam KTKT pada Tahun 2019	Piagam KTKT Nokep Dekom No: 14-KOM/11/ 2018 Tentang Pedoman tata Tertib KTKT telah dilakukan reviu dan masih berlaku	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KTKT telah lulus Fit & Proper test OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KTKT dari Dewan Komisaris dan Pihak Independen memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KTKT.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 06-KOM/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI, masa jabatan ketua dan Anggota KTKT sesuai ketentuan.	5	5
		Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Dewan Komisaris	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	Seluruh tugas dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.	5	5
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KTKT pada Tahun 2020 dibuat dan disahkan pada tahun 2019	RKAP KTKT pada Tahun 2020 dibuat dan sahkan pada tanggal 30 Desember 2019.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 2 kali	Selama Tahun 2020 dilaksanakan 4 kali Rapat KTKT.	10	10
			Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Satu kali	Selama tahun 2019 KTKT melakukan review Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tanggal 10 Maret 2020	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Kajian disampaikan minimal 14 hari kerja sejak surat diterima	Selama tahun 2020 KTKT melakukan review Evaluasi rencana aksi korporasi sebanyak 6 kali.	10	10

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	Reviu penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi	Setiap semster	Selama tahun 2020 KTKT melakukan review Laporan Tahunan penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuaio ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2020.	10	10
			Reviu kebijakan umum Manajemen risiko (KUMR) terintegrasi	Sekali	Revieu kebijakan KUMR terintegrasi dilakukan bersamaan dengan review kebijakan KUMR BRI tanggal 24 November 2020	5	5
			Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2020 KTKT melakukan Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2020.	5	5
			Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan	Minimal sekali dalam setahun	Selama tahun 2020 KTKT melakukan Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan sesuai ketentuan berlaku.	5	5
			Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik	Setiap semester	Selama tahun 2020 KTKT melakukan Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.	10	10
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko teritegrasi secara periodik sesuai ketentuan	setiap semester	Selama tahun 2020 KTKT melakukan Evaluasi profil risiko teritegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.	5	5
			Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi sesuai ketentuan	setiap semester	Selama tahun 2020 KTKT melakukan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi SM II 2019 dan SM 1 2020 dengan hasil penilaian dengan peringkat 2 (Baik).	5	5
Total						**100**	**100**

Komite Tata Kelola Terintegrasi

OPINI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BRI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian KTKT terhadap bahwa penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* yang memperoleh peringkat 2 (baik) pada semester II/2019 dan semester I/2020. Komite menilai terdapat beberapa kelemahan pada aspek struktur dan proses penyesuaian prosedur internal terkait penerapan manajemen risiko BRI dan LJK KK BRI masih berjalan. Selain itu, pengelolaan SDM pada Entitas Utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan perlu mendapat perhatian agar risiko operasional dapat diturunkan. Oleh karenanya, pada tahun mendatang Komite secara berkelanjutan akan memastikan perbaikan kelemahan dan memperkuat struktur dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan (*outcome*) Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.

KOMITE DIREKSI

Direksi BRI membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Hingga 31 Desember 2020, BRI memiliki 9 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management Committee (RMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Capital & Investment
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite Human Capital
9. Komite Produk

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Struktur Keanggotaan

Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota Tetap)	√
Vice President Assets & Liabilities Management Division	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Bisnis Mikro	Anggota Tetap	√
Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	Anggota Tetap	√
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Anggota Tetap	√
Direktur Konsumer	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP Treasury & Global Services	Anggota Tetap	√
SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Anggota Tetap	√

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	√
SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-
EVP Corporate Banking 1 Division	Anggota Tetap	√
EVP Corporate Banking 2 Division	Anggota Tetap	√
EVP SOE Business 1 Division	Anggota Tetap	√
EVP SOE Business 2 Division	Anggota Tetap	√
EVP Syndication and Financial Services Division	Anggota Tetap	√
EVP Institutional Business Division	Anggota Tetap	√
EVP Transaction Banking Division	Anggota Tetap	√
EVP Social Enterpreneurship& Incubation Division	Anggota Tetap	√
EVP Wealth Management Division	Anggota Tetap	√
EVP Consumer Lending Sales & Development Division	Anggota Tetap	√
EVP Card & Digital Lending Division	Anggota Tetap	√
EVP Mass Funding Division	Anggota Tetap	√
EVP Retail Payment Division	Anggota Tetap	√
EVP Treasury Business Division	Anggota Tetap	√
EVP Investment Services Divisiom	Anggota Tetap	√
EVP Internasional Business Divisiom	Anggota Tetap	√
EVP Micro Sales Management Division	Anggota Tetap	√
EVP Small Sales Management Division	Anggota Tetap	√
EVP Small & Medium Business Development Division	Anggota Tetap	√
EVP Medium Business 1 Division	Anggota Tetap	√
EVP Medium Busines 2 Division	Anggota Tetap	√
EVP Micro, SME, Consumer Credit Risk & Policy Division	Anggota Tetap	√
EVP Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division	Anggota Tetap	√
EVP Wholesale Credit Risk Analyst Division	Anggota Tetap	√
EVP Credit Restructuring & Recovery Division	Anggota Tetap	√
EVP Corporate Development & Strategi Divison	Anggota Tetap	√
EVP Financial & Management Accounting Division	Anggota Tetap	√
EVP Change Management Division	Anggota Tetap	√
EVP Project Management Office	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 1	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 2	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 3	Anggota Tetap	√
Pemimpin Kantor Cabang Khusus	Anggota Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Asset and Liability Committee (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset and liability* yang optimum dengan memperhatikan *potential risk, optimum yield generation* dan *cost efficiency*.
   b. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), *fund transfer price* (FIP) dan pricing lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest income* (NII).
   c. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga khusus simpanan, pinjaman danlatau produk bank lainnya.
   d. Menentukan kebijakan *net open position* (NOP).
   e. Memonitor bahwa pengelolaan *asset and liability* di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

2. Fungsi Assets & Liabilities Management, Assets & Liabilities Management Desk sebagai ALCO *Supporting* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan analisa dan merekomendasikan strategi pengelolaan *Asset and Liability* yang optimal sebagai dasar penetapan strategi oleh *Asset and Liability Committee* (ALCO) dengan mengacu kepada target kinerja Perusahaan.
   b. Menyusun dan mengembangkan skenario tingkat suku bunga simpanan, pinjaman dan produk bank lainnya.
   c. Bersama dengan Unit Kerja terkait, melakukan analisa dan menyusun rekomendasi altematif dalam penetapan harga/*pricing* sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar dan kondisi makro ekonomi.
   d. Bersama dengan Unit Kerja terkait, menyusun *funding strategy* berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA) bank, kondisi di pasar dan/atau acuan lainnya.
   e. Melakukan analisa dan monitoring terhadap *net open position* (NOP).
   f. Melakukan analisa dan menyediakan data sesuai kebutuhan ALCO.
   g. Mengoordinir penyelenggaraan Rapat ALCO sesuai ketentuan dan rencana kerja yang ditetapkan.
   h. Mendistribusi dan mengadministrasikan hasil putusan Rapat ALCO serta melakukan monitoring tindak lanjut dari Unit Kerja yang terkait.

Pedoman Kerja

1. Rapat ALCO sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti sesuai urutan.
3. Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO.
4. Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO.
5. Dalam hal sekretaris ALCO berhalangan hadir, maka posisinya dijalankan oleh AVP Assets & Liabilities Management.
6. Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat VP atau sekurangnya setingkat AVP.
7. Sekretaris ALCO dapat mengundang peserta yang relevan untuk mengikuti ALCO sesuai dengan topik pembahasan di dalam ALCO.
8. Dalam hal kondisi yang sangat mendesak (*contingency*) untuk dilaksanakan ALCO, namun Ketua dan/atau Ketua Pengganti berhalangan untuk memimpin rapat, maka Ketua ALCO dapat melakukan pendelegasian kepada salah satu Direktur untuk memimpin ALCO yang surat keputusannya disetujui oleh Ketua ALCO dan ditatakerjakan oleh Sekretaris ALCO.

Rapat ALCO Terbatas

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO) secara insidentil dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas pengelolaan *asset and liability* yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat isu khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.
2. Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu surat undangan tersendiri.
3. Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO sebagaimana yang diatur.

Komite Direksi

Rapat Komite

Pada tahun 2020, ALCO telah mengadakan Rapat sebanyak 12 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal | Date	Agenda
1.	20.01.2020	Economic Briefing Kinerja Assets & Liabilities Perkembangan Saham BRI Putusan Rapat ALCO Economic Briefing of Assets & Liabilities Performance BRI Shares Development Based on ALCO Meeting Decision
2.	21.02.2020	
3.	20.03.2020	
4.	16.04.2020	
5.	15.05.2020	
6.	18.06.2020	
7.	16.07.2020	
8.	13.08.2020	
9.	16.09.2020	
10.	14.10.2020	
11.	12.11.2020	
12.	12.12.2020	

Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuandari 50% dari jumlah anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah 1 orang anggota ALCO, termasuk Direksi yang salah satunya ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Keanggotaan Komite

1. Risk Management Committee (RMC)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua pengganti/ Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
EVP Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Terkait	Anggota tidak tetap	-

2. Risk Management Terintegrasi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti/Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur Utama BRI Syariah	Anggota Tetap	√
Direktur Utama BRI Agro	Anggota Tetap	√
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	√
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	√
Direktur Utama BRI Ventura	Anggota Tetap	√
Direktur Utama Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan BRI Syariah	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan BRI Agro	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan BRI Life	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan BRI Finance	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan BRI Ventura	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	√
EVP Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Terkait	Anggota tidak tetap	-

Tugas dan Tanggung Jawab

Risk Management Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Risk Management Committee (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
   c. Merekomendasikan penetapan limit dan perubahannya.
   d. Menyampaikan laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta apabila diperlukan rekomendasi perubahan.
2. *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.
   b. Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan kepada Direksi BRI dan Direksi Perusahaan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Direksi

c. Menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi, laporan Tata Kelola Terintegrasi, laporan Audit Terintegrasi, laporan Profil Risiko Individual Perusahaan Anak serta hasil pemantauan risiko kepada Direksi BRI.
d. Menyampaikan analisa permodalan terintegrasi serta rencana penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
e. Menyampaikan simulasi stress testing terintegrasi dan/atau individual serta contingency plan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal kepada Direksi BRI.

Pedoman Kerja

RMC dan RMC Terintegrasi memiliki pedoman kerja organisasi sebagai berikut:

1. Rapat RMC diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per triwulan, Rapat RMC Terintegrasi diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat RMC dan RMC Terintegrasi dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat isu terpenting dan mendesak, antara lain:
   a. Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran limit risiko internal atau faktor lain.
   b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
   c. Terjadi kondisi *force majeur* yang disebabkan faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal dan faktor disruptif lain.
   d. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan rapat RMC dan RMC Terintegrasi.
3. RMC dan RMC Terintegrasi membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud di antaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
4. Rapat RMC dan RMC Terintegrasi dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko. Dalam hal Direktur Manajemen Risiko berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sesuai urutan sebagaimana telah diatur.
5. Rapat RMC dan RMC Terintegrasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
6. Hasil keputusan pada RMC dan RMC Terintegrasi dapat dianulir oleh Direksi melalui Rapat Direksi.
7. Koordinasi penyelenggaraan Rapat RMC dan RMC Terintegrasi menjadi tanggung jawab sekretaris RMC dan RMC Terintegrasi.
8. Kehadiran Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Rapat Komite

Pada tahun 2020, Risk Management Committee (RMC) telah mengadakan Rapat sebanyak 4 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kegiatan Activities	Jadwal Pelaksanan Date	Agenda
1	RMC I 2020	18 Maret 2020	• Update perkembangan dampak viros corona • Stress Test risiko kredit terkait dampak dan penyebaran virus corona • Stress Test debitur korporasi terkait dampak dan penyebaran virus corona • Stress Test bank wide terkait dampak dan penyebaran virus corona • Loan Portofolio Guidline terkait dampakvirus corona • Progress tindak lanjut RMC IV 2019 terkait risiko kredit • Analisis permodalan • Monitoring trigger recovery plan BRI • Highlight profil risiko BRI TW IV 2019 • Highlight evaluasi strategi bisnis mikro • Stress Test risiko pasar& likuiditas terkait dampak virus corona • Dashboard kualitas kredit Februari 2020 • Rekomendasi putusan RMC I 2020
2	RMC II 2020	11 Juni 2020	• The New Normal Era • Profil risiko BRI • Analisis bank wide (permodalan, Monitoring trigger recovery plan BRI, stress test, loan portofolio guidline) • Risk Issue (restrukturisasi kredit, discontinue LIBOR, dampak covid bagi pekerja BRI) • Rekomendasi & putusan RMC II 2020
3	RMC III 2020	13 Agustus 2020	• Mitigasi ancaman resesi • The new ERM concept • Profil risiko BRI • Highlight ketentuan terkini RAS & TKB • Analisis bank wide (analisis permodalan, loan portofolo guidline, stress test, highlight performance and risk pada portofolio surat berharga
4	RMC IV 2020	4 November 2020	• Profil Risiko BRI • Pengelolaan portofolio surat berharga berdasarkan forecast arah market yield • Stress test market & liquidity • Analisis permodalan • Recovery plan • Stress Test bank wide • Progres new concept ERM • Proyek maturity assessment penerapan manajemen risiko

Komite Direksi

No	Kegiatan Activities	Jadwal Pelaksanan Date	Agenda
5	RMC Terintegrasi	6 Mei 2020	• Review & tindak lanjut profil risiko terintegrasi SM II 2019 • Profil risiko terintegrasi TW I 2020 • Profil risiko BRI TW I 2020 • Analisis konglomerasi (likuiditas, permodalan, stress test permodalan terintegrasi, kinerja keuangan, benchmark Perusahaan Anak, Captive market Perusahaan Anak, Key Risk Perusahaan Anak) • Pembahasan profil risiko & risk issue Perusahaan Anak • Rekomendasi dan putusan RMC Terintegrasi I 2020

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE KREDIT

Merupakan Komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Struktur Komite

1. Komite Kredit di tingkat Direksi, yaitu
   a. Komite Kredit BRI.
   b. Komite Kredit Direksi 1
   c. Komite Kredit Direksi 2
2. Komite Kredit di tingkat Divisi
3. Komite Kredit Regional Commercial Business (RCB)
4. Komite Kredit di Kantor Wilayah/ Kantor cabang Khusus
5. Komite Kredit Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Tanggung Jawab

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Commmittee* (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.
3. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
4. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
5. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite kredit.

Benturan Kepentingan

Dalam pemberian putusan kredit, Komite Kredit tetap berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan terlepas dari benturan kepentingan terhadap Komite Kredit dan individual, dengan mekanisme yang diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal anggota pemutus Komite Kredit BRI memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), maka putusan kredit dilakukan oleh seluruh Direksi dan SEVP yang memiliki kewenangan memutus, kecuali anggota Komite Kredit BRI yang memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dimaksud. Pengambilan keputusan diambil secara *unanimous* dari seluruh anggota Pemutus.
2. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada anggota Komite Kredit selain Komite Kredit BRI, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pemutus kredit individual, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sehingga putusan kredit dilaksanakan sebagaimana butir 2 dan 3 diatas, maka hal tersebut harus disampaikan dalam notulen rapat komite kredit.

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kredit hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% total anggota + 1 dari seluruh anggota Komite Kredit.
2. Anggota Komite Kredit yang tidak dapat hadir dalam Rapat Komite karena sedang tidak berada ditempat (namun tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja) maka tidak dapat diperhitungkan dalam penetapan quorum pelaksanaan rapat Komite Kredit.
3. Pelaksanaan Komite Kredit dilaksanakan dalam forum rapat Komite Kredit dengan Unit Kerja Analisis Risiko Kredit sebagai Sekretaris Komite.

Rapat Komite

Pada tahun 2020, Komite Kredit telah mengadakan Rapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali.

KOMITE CAPITAL & INVESTMENT

Komite Permodalan dan Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Struktur Komite

Dalam melaksanakan tugas, Komite Capital & Investment didukung oleh Tim Penunjang Komite.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
EVP Subsidiary Management Division	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur atau SEVP terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur atau SEVP Pembina Bisnis Perusahaan Anak	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Komite Direksi

Tanggung Jawab

1. Melakukan review atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
2. Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
3. Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk key performance indicator dan rencana deviden Perusahaan Anak.
4. Melakukan review kinerja dan menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak.
5. Mengevaluasi dan merekomendasikan langkah korporasi Perusahaan Anak BRI untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi maupun secara sirkuler.
6. Menetapkan putusan apabila terjadi deadlock inisiatif sinergi Perusahaan Anak BRI yang bersifat strategis.

Pedoman Kerja

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
3. Penyelenggaraan rapat komite minimal 1 (satu) kali per triwulan.
4. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% dari seluruh anggota komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti. Rapat dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
5. Rapat komite dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
6. Ketua Komite memimpin rapat komite capital & investment dan mempunyai hak suara.
7. Sekretaris komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan rapat komite capital & investment.
8. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah anggota tetap dengan hak suara.

Rapat Komite

Program dan Pelaksanaan Kegiatan Komite 2020		Kuorum
16 Januari 2020	Usulan Dividen Payout Ratio Tahun buku 2019	Kuorum
11 Maret 2020	Pembahasan BMPK & Pipeline BRIS, BRI Agro, & BRIF	Kuorum
23 Maret 2020	Penyertaan modal kepada PT. BAV dan PT. DIM	Kuorum
22 April 2020	Pembahasan Kinerja Perusahaan Anak BRI TW 1 2020	Kuorum
03 Juni 2020	Pembahasan Revisi RKAP dan RBB BRI Agro dan BRI Finance	Kuorum
19 Juni 2020	Pembahasan Revisi RKAP dan Rencana Bisnis BRI Ventures	Kuorum
25 Juni 2020	Pembahasan Revisi dan RBB BRI Syariah	Kuorum
22 Juli 2020	Pembahasan Kinerja Perusahaan Anak Periode Juni 2020	Kuorum
12 Agustus 2020	Komite Capital Project Cyperus	Kuorum
2 September 2020	Pembahasan Transformasi Perusahaan Anak (Project Quantum)	Kuorum

Program dan Pelaksanaan Kegiatan Komite 2020		Kuorum
07 Oktober 2020	Pembahasan Rencana Spin off BRINS Syariah, BRIL Syariah dan segmentasi BRISMA dan BRINS	Kuorum
13 Oktober 2020	Pengelolaan Perusahaan Anak BRI dalam Rangka Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Anak	Kuorum
21 Oktober 2020	Pengelolaan Perusahaan Anak BRI dalam Rangka Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Anak	Kuorum
22 Oktober 2020	Performance Review Perusahaan Anak TW III 2020	Kuorum
9 November 2020	1. Pembahasan RKAP BRI Finance 2. Pembahasan Project Quantum BRI Agro	Kuorum
18 November 2020	1. Pembahasan RKAP PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") 2. Pembahasan Update Project Quantum BRI Agro	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Rekomendasi danlatau putusan Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua dan seluruh anggota Komite. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka rekomendasi danlatau putusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Struktur Komite

Organisasi Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Direktur Utama	Ketua
EVP Micro, SME, Consumer Credit Risk & Policy	Sekretaris (merangkap anggota)
Wakil Direktur Utama	Anggota
Direktur Bisnis Mikro	Anggota
Direktur Bisnis Kecil, Ritel, & Menengah	Anggota
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Anggota
Direktur Konsumer	Anggota
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Direktur Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Keuangan	Anggota
SEVP Bisnis Korporasi	Anggota
SEVP Treasury & Global Services	Anggota
EVP Wholesale Credit Risk Analyst	Anggota
EVP Credit Restructuring & Recovery	Anggota
EVP Micro Business Development	Anggota
EVP Micro Sales Management	Anggota
EVP Social Entrepreneurship & Incubation	Anggota
EVP Small & Medium Business Development	Anggota
EVP Small Sales Management	Anggota
EVP Medium Business	Anggota
EVP Consumer Lending Sales & Development	Anggota
EVP Corporate Banking 1	Anggota
EVP Corporate Banking 2	Anggota
EVP SOE Business 1	Anggota
EVP SOE Business 2	Anggota
EVP Syndication & Financial Services	Anggota
EVP Treasury Business	Anggota
EVP International Business	Anggota
EVP Investment Services	Anggota
EVP Credit Operation	Anggota
EVP Corporate Development & Strategy	Anggota
EVP Policy& Procedure	Anggota

Tanggung Jawab

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK.
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
3. Melakukan review berkala Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI minimal 3 tahun sekali.
4. Melakukan evaluasi terhadap:
   a. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana.
   b. Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit, dari kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
   c. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

   d. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
   e. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
   f. Kecukupan penyisihan cadangan kerugian karena penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan.
   g. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus.
5. Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan berkala minimal 1 tahun sekali dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan/tindasan kepada Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
   b. Hasil evaluasi hal yang berhubungan dengan Pasal 3 ayat 1.d.
7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

Pedoman Kerja

1. Perubahan atas revisi Kebijakan Perkreditan Bank wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. Komite Kebijakan Perkreditan wajib melakukan rapat pembahasan final draft perubahan atau revisi kebijakan perkreditan bank sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
2. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi kebijakan perkreditan bank maupun terkait isu penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari Perusahaan.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) maka unit kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) untuk melakukan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
4. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sesuai ketentuan.
5. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan sah apabila dihadiri sekurangnya 2/3 dari anggota KKP yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Direktur.
6. Apabila EVP yang menjadi anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berhalangan hadir maka Penggantinya dapat ditunjuk.
7. Terhadap setiap perubahan isi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRIyang tidak bersifat rnateriil, agar dapat dilakukan secara sirkuler keseluruh Direktur dan untuk selanjutnya disarnpaikan secara tertulis kepada seluruh anggota Kornite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Rapat Komite

Rapat KKP telah dilaksanakan 1 (satu) kali di tahun 2020, yaitu pada tanggal 16 November 2020 secara daring dengan agenda Perubahan Kebijakan PDWK dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 anggota KKP (kuorum).

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah bila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang hadir ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Direktur Utama, Direktur Bidang Bisnis terkait d EVP, Credit Operation.

Komite Direksi

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITE TATA KELOLA DATA

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional teknologi informasi.

Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti (meranggkap Anggota Tetap)	√
VP IT Strategy & Governance	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	Anggota Tetap	√
EVP, IT Strategy & Governance	Anggota Tetap	√
EVP, Application Management &Operation	Anggota Tetap	√
EVP, IT Infrastructure &Operation	Anggota Tetap	√
EVP, Digital Banking Development	Anggota Tetap	√
EVP, Enterprise Data Management	Anggota Tetap	√
EVP, Distribution Network	Anggota Tetap	√
EVP, Information Security	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur/SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi rencana strategik teknologi informasi jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan*dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam IT SP BRI.
2. Merumuskan kebijakan, standar, prosedur teknologi informasi yang utama.
3. Memastikan kesesuaian antara proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan IT SP BRI.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan proyek-proyek teknologi informasi agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati *(Project Charter).*

5. Melakukan evaluasi kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis bank.
6. Memantau efektivitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang teknologi informasi agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap peneapaian tujuan bisnis BRI.
7. Memantau performa sistem teknologi informasi dan memberlkan rekomendasi upaya peningkatannya.
8. Memberi rekomendasi upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna teknologi informasi dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, tepat waktu.
9. Memberi rekomendasi dalam rangka memastikan keeukupan atas alokasi *resources* yang dimiliki BRI.

Pedoman Kerja

1. Komite Pengarah teknologi informasi mengadakan rapat berkala sedikitnya 2 (dua) kali per tahun.
2. Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sekurangnya dihadiri oleh:
   a. Ketua Komite
   b. Sekretaris Komite
3. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite yang diundang dan terkait dengan agenda pembahasan Rapat Komite.
4. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
5. Ketua Komite memimpin Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi serta mempunyai hak suara.
6. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi menjadi tanggung jawab
7. Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
   a. Mempersiapkan dan mengundang rapat.
   b. Menyusun dan mempresentasikan materi rapat.
   c. Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.
   d. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindak-lanjuti di Uker Kerja yang terkait.
8. Kehadiran Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Rapat Komite

Pada tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Aplikasi	Kuorum
1	25 Februari 2020	Pelaporan kesiapan switch over dan switch back host Brinets AS/400	Host Brinets AS/400	Kuorum
2	9 Maret 2020	Pelaporan kesiapan switch over & switch back host Brinets AS/400 Pembahasan mekanisme putusan prosedur penggunaan PSW stand in pada saat pelaksanaan SO AS/400	Host Brinets AS/400	Kuorum
3	17 Maret 2020	Pelaporan kesiapan switch over & switch back host Brinets AS/400 Pelaporan risk review dan mitigasi. Pembahasan putusan rekomendasi jadwal kegiatan switch over host brinets AS/400 terkait pencegahan covid-19	Host Brinets AS/400	Kuorum

Komite Direksi

No	Tanggal	Agenda	Aplikasi	Kuorum
4	2 April 2020	Persetujuan deployment pengembangan pada aplikasi kritikal severity-1 yaitu aplikasi: Brinets Express Proswitching Host Brinets AS/400	Brinets Express Proswitching Host Brinets AS/400	Kuorum
5	17 Juni 2020	Pelaporan kesiapan deployment project Brinets Tactical Enhancement (BTE) release 1 dan release 2 Pembahasan putusan kegiatan deployment project Brinets Tactical Enhancement (BTE) release 1 dan release 2	Host Brinets AS/399	Kuorum
6	8 Juli 2020	Pelaporan kesiapan switch over & switch back Host Brinets AS/400 Pelaporan risk review dan mitigasi	Host Brinets AS/400	Kuorum
7	17 September 2020	Pelaporan kesiapan deployment project Brinets Tactical Enhancement (BTE) release 2.5 Pelaporan risk review dan mitigasi Pembahasan putusan deployment project Brinets Tactical Enhancement (BTE) release 2.5	Host Brinets AS/401	Kuorum
8	8 Desember 2020	Pelaporan kesiapan rollout BRImo V2 (pelepasan whitelist user) Pembahasan putusan kegiatan rollout BRImo V2 (pelepasan whitelist user)	BRImo V2	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data adalah suatu forum yang memberikan arahan terkait *data governance,* serta memberikan putusan terkait dengan *leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *DataOwners* dan *Data Stewards* maupun di level *Data Management Office.*

Struktur Komite Tata Kelola Data

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Ketua	√
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (meranggkap Anggota Tetap)	√
VP Enterprise Data Management	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Konsumer	Anggota Tetap	√
EVP Enterprise Data Management	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kebutuhan data seluruh stakeholder BRI dapat dipenuhi.
2. Memastikan proteksi terhadap data sebagai asset stratejik Perusahaan.
3. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan & standar data untuk menegakkan kerangka kerja proses *data governance* yang baik, dan kualitas data secara *enterprise*.
4. Memastikan aspek privasi dan kerahasiaan data Nasabah dan Perusahaan terlindungi.
5. Memastikan tidak adanya akses data yang illegal, manipulasi data serta penggunaan data dan informasi yang tidak sesuai.
6. Memastikan data agar dapat digunakan secara efektif serta mendatangkan *value* bagi Perusahaan.
7. Mengarahkan dan memutuskan solusi dari masalah-masalah yang dieskalasi ke Komite.

Pedoman Kerja

1. Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala sedikitnya 2 (dua) kali per tahun.
2. Pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Data sekurangnya dihadiri oleh:
   a. Ketua Komite
   b. Sekretaris Komite
3. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite yang diundang dan terkait dengan agenda pembahasan rapat Komite.
4. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka rapat Komite Tata Kelola Data dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
5. Ketua Komite memimpin rapat Komite Tata Kelola Data serta mempunyai hak suara.
6. Koordinasi penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola Data menjadi tanggung jawab
7. Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
   a. Mempersiapkan dan mengundang rapat.
   b. Menyusun dan mempresentasikan materi rapat.
   c. Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Tata Kelola Data
   d. Memonitor putusan Komite Tata Kelola Data yang ditindak-lanjuti di Uker Kerja yang terkait.
8. Kehadiran Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Komite Direksi

Rapat Komite
Selama Tahun 2020 Komite Tata Kelola Data belum melaksanakan Rapat Komite.

Pengambilan Keputusan
Keputusan rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang Human Capital.

KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Struktur Komite

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
EVP Human Capital yang membidangi Kebijakan	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direksi atau Senior Executive Vice President Bidang terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Tanggung jawab

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas human capital BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRI.
2. Menetapkan kebijakan strategis di bidang human capital.

Rapat Komite

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	23 April 2020	Review Peraturan Disiplin Pekerja	Kuorum
2	24 Juni 2020	Review Peraturan Disiplin Pekerja	Kuorum
3	31 Agustus 2020	Review Kebijakan Career Journey BRI	Kuorum

KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG HUMAN CAPITAL PLANNING

Struktur Komite

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Executive Vice President Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
EVP Divisi Jaringan Kantor	Anggota Tetap	√

Tanggung jawab

Menetapkan perencanaan jumlah Formasi Jabatan dan strategi pemenuhan Formasi Jabatan

Rapat Komite

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	21 Juli 2020	Kick-off Project Strategic Workforce Planning BRI	Kuorum

KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG TALENT DAN BIDANG ETIK

Struktur Komite

Bidang Talent 1 (untuk Pejabat level Executive Vice President)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Executive Vice President Human Capital Business Partne	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	√

Bidang Talent 2 (untuk Pekerja level Vice President dan Pemimpin Cabang Kelas 1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Executive Vice President Human Capital Business Partne	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	√

Komite Direksi

Bidang Talent 3 (untuk Pekerja level Assistant Vice President dan Senior Manager di luar Pemimpin Cabang Kelas 1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Executive Vice President Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur atau SEVP sesuaiBidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tetap	√

Bidang Etik

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti	
Executive Vice President Human Capital yang membidangi hubungan industrial	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait	Anggota Tetap	-

Rapat Komite

Bidang Talent 1

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	29 Sept 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-1	Kuorum
2	10 Agustus 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-1	Kuorum
3	03 Agustus 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-1	Kuorum
4	24 Juli 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-1	Kuorum
5	23 Juni 2020	Penetapan Brilian Society Member Level BOD-1	Kuorum

Bidang Talent 2

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	30 Oktober 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-2	Kuorum
2	20 Oktober 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-2	Kuorum
3	19 Oktober 2020	Penetapan Brilian Society Member Level BOD-2	Kuorum
4	24 September 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-2	Kuorum
5	15 September 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-2	Kuorum
6	7 September 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-2	Kuorum

Bidang Talent 3

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	2 November 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-3	Kuorum
2	14 Oktober 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-3	Kuorum
3	17 September 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-3	Kuorum
4	14 Agustus 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-3	Kuorum
5	6 Agustus 2020	Mutasi Pekerja Level BOD-3	Kuorum

Bidang Etik

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	15 September 2020	Pelanggaran Disiplin Pekerja	Kuorum
2	28 Mei 2020	Pelanggaran Disiplin Pekerja	Kuorum
3	28 Mei 2020	Pelanggaran Disiplin Pekerja	Kuorum

KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG MANAJEMEN KINERJA DAN PENETAPAN SKO

Struktur Komite

Bidang Manajemen Kinerja

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti	
EVP Human Capital yang membidangi Manajemen Kinerja	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP sesuaiBidang/Pembina terkait	Anggota Tetap	√

Bidang Penetapan SKO

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
EVP Human Capital yang membidangi Manajemen Kinerja	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
EVP Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota Tetap	√

Tanggung Jawab

1. Menetapkan penilaian kinerja Pekerja untuk level Executive Vice President dan Vice President
2. Menetapkan Standar SKO untuk level Executive Vice President dan Vice President Rapat Komite

Komite Direksi

Rapat Komite

Bidang Manajemen Kinerja

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	5 Februari 2020	Penetapan Predikat Kinerja dengan mempertimbangakan Tantangan	Kuorum
2	13 Februari 2020	Penetapan predikat Kinerja EVP dan VP mempertimbangkan Orientasi Leader	Kuorum

Bidang Penetapan SKO

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	21 April 2020	Penetapan SKO EVP & VP Tahap 1	Kuorum
2	30 April 2020	Penetapan SKO EVP & VP Tahap 2	Kuorum
3	15 Mei 2020	Penetapan SKO EVP & VP Tahap 3	Kuorum
4	16 Juni 2020	Penetapan SKO EVP & VP Tahap 4	Kuorum
5	10 Juli 2020	Penetapan SKO EVP & VP Tahap 5	Kuorum

KOMITE HUMAN CAPITAL BIDANG EVALUASI JABATAN

Struktur Komite

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
VP/AVP Human Capital Planning & Organization Development, Human Capital Strategy & Policy	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
EVP, Human Capital Strategy & Policy	Anggota Tetap	√
EVP, Corporate Development & Strategy Status keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan bersifat ex-officio.	Anggota Tetap	√

Tanggung Jawab

1. Mereview Golongan Jabatan
2. Merekomendasi Golongan Jabatan
3. Menetapkan Golongan Jabatan

Rapat Komite

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	20 Januari 2020	Penetapan Golongan Jabatan (Job Grade)	Circuler Kuorum (Direktur Keuangan, Direktur Human Capital, Direktur Manajemen Risiko)
2	15 Januari 2020	Penetapan Golongan Jabatan (Job Grade)	Circuler Kuorum (Direktur Keuangan, Direktur Human Capital, Direktur Manajemen Risiko, Kepala Divisi Corporate Development & Strategy, Kepala Divisi Human Capital Strategy & Policy)
3	10 Februari 2020	Penetapan Golongan Jabatan (Job Grade)	

KOMITE PRODUK

Komite Produk adalah komite di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan produk dan jasa existing, penghentian produk dan jasa existing, memutus produk dan jasa bundling di atas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk & jasa.

Struktur Komite

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Ketua Pengganti 1 (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti 2 (Merangkap Anggota Tetap)	√
EVPCorporate Development & Strategy	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP/Direktorat Bidang Pemilik Produk	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Tanggung Jawab

1. Memberikan putusan atas usul pengembangan produk/jasa baru atau pengembangan produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
2. Memberikan putusan atas penghentian produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
3. Memberikan putusan atas produk dan/atau jasa bundling, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan/atau jasa.

Komite Direksi

Pedoman Kerja

1. Rapat komite produk diselenggarakan bekala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
2. Rapat selain rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan
   b. Terjadi perubahan organisasi yang membutuhkan respon Perusahaan
   c. Faktor lainnya.
3. Rapat komite produk dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua Komite. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite dapat digantikan oleh Ketua Pengganti 1.
4. Dalam hal Ketua Komite dan Ketua Komite Pengganti 1 berhalangan hadir, maka rapat komite produk dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti 2.
5. Kehadiran anggota dengan hak suara di dalam rapat komite produk tidak dapat diwakilkan, apabila anggota dengan hak suara berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan ketentuan.
6. Rapat komite produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri Ketua Komite dan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) anggota dengan hak suara dengan salah satunya adalah Direktur.
7. Apabila pada saat rapa komite tidak dihadiri oleh Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, maka rekomendasi rapat komite akan dilaporkan oleh Ketua Komite Pengganti kepada rapat Direksi untuk mendapat putusan Direksi.
8. Koordinasi penyelenggaraan rapat komite produk menjadi tanggungjawab sekretaris komite.

Rapat Komite

No	Tanggal Date	Agenda	Kuorum
1	Rabu, 4 Maret 2020	Pengelolaan Dana Korporasi di UKO dan Service Transfer Price Pengelolaan Fungsi Trade Finance Pengelolaan Fungsi Foreign Exchange Pengelolaan Giro	Kuorum
2	Rabu, 8 April 2020	Update PAB TW I 2020 Review Ownership Produk Paparan Platform Stroberi – Solusi Transaksi Elektronik BRI	Kuorum
3	Kamis, 30 Juli 2020	Update Strategi Bisnis Briguna Usulan Kuota Suku Bunga Khusus Briguna s.d Desember 2020 Usulan Rekomendasi Ownership Produk dan/atau Aktivitas 2020 Usulan Review Suku Bunga Britama	Kuorum
4	Kamis 10 September 2020	Review KMK Tangguh dan Kredit SME Usulan Perubahan Pengelolaan KKB	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepatakan, maka keputusan rapat komite dianggap sah dengan perstujuan 50% jumlah anggota komiteyang memiliki hak suara ditambah 1 anggota komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PENGADAAN BARANG & JASA

Komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Struktur Komite

Komite Pengadaan 1

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
EVP Procurement & Logistic Operation	Sekretaris	
Seluruh Anggota Direksi BRI kecuali Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan 2

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
EVP Procurement & Logistic Operation	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	-
Direktur Bisnis Mikro/Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah/irektur Jaringan dan Layanan/Direktur Digital, TeknologiInformasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur/SEVP User terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan 3

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur & SEVP User terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Keuangan/Direktur Bisnis Mikro/Direktur Bisnis Kecil, Ritel, Menengah/Direktur jaringan dan Layanan, Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Direksi

Komite Pengadaan 4

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur & SEVP User terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, Jujur, bertanggung jawab, obyektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atas usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite.
5. Memberikan putusan pengadaan, melalui :
   a. Risalah Rapat Direksi, atau
   b. Risalah Rapat Komite Pengadaan, atau
   c. Nota Dinas Sirkuler.

Pedoman Kerja

1. Keputusan Komite Pengadaan diambil di dalam suatu rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara *unanimous* dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan hak suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak di dalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Dalam hal rapat Komite Pengadaan tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Pengadaan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah diputus oleh Direksi melalui Rapat Direksi, maka putusan dimaksud dipersamakan dengan putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan Risalah Rapat Direksi.
6. Tugas dan tanggung jawab fasilitator untuk rapat Komite dilaksanakan oleh Sekretaris Komite Pengadaan antara lain:
   a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
   b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
   c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
   d. Membuat Risalah Rapat dan Berita Acara Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
   e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja terkait.

Rapat Komite

No.	Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan	Jumlah Pengadaan
1	Komite Pengadaan I	1,991,616,146,001	3
2	Komite Pengadaan II	238,677,110,000	3
3	Komite Pengadaan III	1,681,104,435,915	27
4	Komite Pengadaan IV	1,059,357,771,268	76
Total		4,970,755,463,184	109

Posisi: 13 November 2020

TATA CARA PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL, DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

1. *Pool of Candidate* calon *Corporate Secretary* melalui *Talent Committee* (Komite Human Capital).
2. Pengusulan Calon *Corporate Secretary* oleh Direksi
3. Pembahasan Calon Kepala Divisi SKP (*Corporate Secretary*)
4. Pembahasan usulan EVP *Corporate Secretary Division* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5. Persetujuan oleh Dewan Komisaris

Tata Cara Pengangkatan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal (SEVP Satuan Kerja Audit Intern)

1. *Pool of Candidate* calon Kepala Unit Audit Internal (SEVP Satuan Kerja Audit Intern) melalui *Talent Committee* (Komite Human Capital).
2. Pengusulan Calon Kepala Unit Audit Internal oleh Direksi
3. Pembahasan Calon Kepala Unit Audit Internal (SEVP Satuan Kerja Audit Intern).
4. Pembahasan usulan SEVP Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5. Rekomendasi oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
6. Persetujuan oleh Dewan Komisaris

Tata Cara Pengangkatan Pengangkatan Manajemen Risiko

1. *Pool of Candidate* calon Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui *Talent Committee* (Komite Human Capital)
2. Pembahasan atas Usulan Talent calon Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko oleh Direksi
3. Persetujuan Direksi atas Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam website serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Per 31 Desember 2020, Sekretaris Perusahaan BRI dijabat oleh Aestika Oryza Gunarto.

Profil Sekretaris Perusahaan

AESTIKA ORYZA GUNARTO
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Usia 53 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 2 September 2020 berdasakan Keputusan Direksi No. Nokep: 140.e-DIR/KHC/07/2019 22 Juli 2020 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.20-KOM/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.

Riwayat Pendidikan

STRATA 1, S Ekonomi Perusahaan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
STRATA 2, MM, Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran Bandung

Riwayat Jabatan

- Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara, Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Jakarta 1 (01-06-2014 s/d 30-11-2015)
- Pj. Kepala Biro Direksi, Biro Direksi Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2015 s/d 30-11-2016)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2016 s/d 31-12-2017)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-01-2018 s/d 30-04-2019)

- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Makassar, Kantor Wilayah Makassar (01-05-2019 s/d 31-10-2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-11-2019 s/d 31-05-2020) Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kecil Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-06-2020 s/d 05-08-2020)
- Pj. Executive Vice President, Corporate Secretary Division Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-08-2020 s/d 05-11-2020)
- Executive Vice President, Corporate Secretary Division Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-11-2020 s/d Sekarang)

Riwayat Pelatihan

16-01-2020 s/d 16-01-2020: Excellence Performance Leadership, Semarang
24-06-2020 s/d 26-06-2020: BRILiaN Shine " Agile Leadership For The New Normal", e-Learning
03-07-2020 s/d 06-10-2020: Ujian Sertifikasi CWM (Level 1-7), e-Learning
03-07-2020 s/d 19-09-2020: Pembekalan Ujian Sertifikasi CWM (Level 1-7), e-Learning

DASAR HUKUM

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY DIVISION

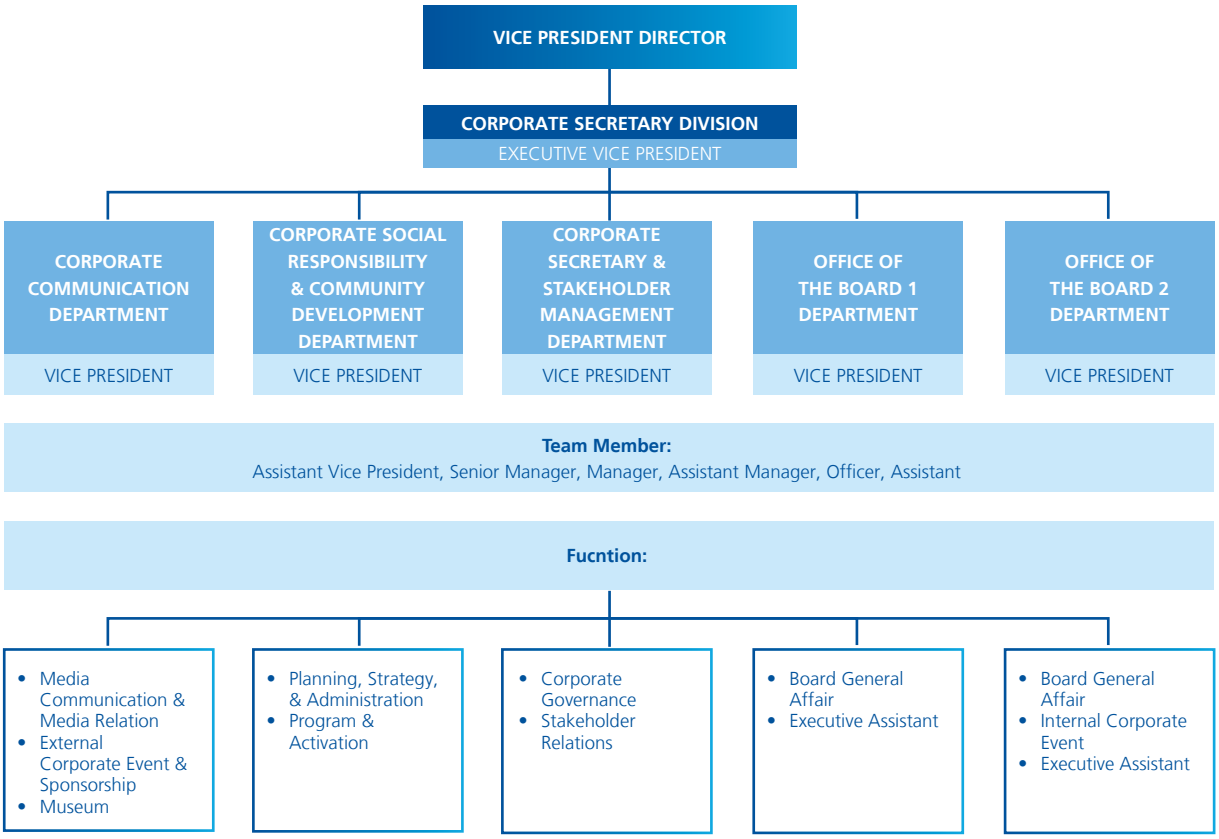

Sekretaris Perusahaan memimpin unit kerja *Corporate Secretary Division* dalam melaksanakan fungsinya dengan jabatan setingkat *Executive Vice President*. *Corporate Secretary Division* berada dibawah binaan Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama.

Organisasi *Corporate Secretary Division* membawahkan:

1. *Corporate Communication Department* yang mengelola fungsi:
   a. Corporate Communication & Media Relation;
   b. Eksternal *Corporate Event & Sponsorship;*
   c. Museum Perusahaan.
2. *Corporate Social Responsibility & Community Development Department* yang mengelola fungsi:
   a. Planning, Strategy & Administration;
   b. Program & Activation.
3. *Corporate Secretary & Stakeholder Department* yang mengelola fungsi:
   a. Corporate Governance;
   b. Stakeholder Relations.
4. *Office of the Board 1 Department* yang mengelola fungsi:
   a. Board General Affair (Dewan Komisaris);
   b. Executive Assistant.
5. *Office of the Board 2 Department* yang mengelola fungsi:
   a. Board General Affair (Direksi dan SEVP);
   b. Internal Corporate Event;
   c. Executive Assistant.

KUALIFIKASI

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Sekretaris Perusahaan diantaranya:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan GCG;
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;
5. Berdomisili di Indonesia;
6. Memiliki kompetensi sesuai dengan Kamus Kompetensi serta Persyaratan Pengetahuan dan Keterampilan Jabatan Perusahaan.

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama menjabat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi, antara lain:

Tugas dan Tanggung Jawab Umum

1. Sekretaris Perusahaan paling kurang:
   a. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi dan penerapan GCG.
   b. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
   c. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
   d. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
   e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
   f. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan GCG Perusahaan yang meliputi:
      - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan.
      - Penyampaian laporan kepada regulator tepat waktu.
      - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris (dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris).
      - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
   g. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan *stakeholders*.
   h. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta RUPS.
   i. Melakukan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan *corporate image* Perusahaan, termasuk melaksanakan program *event* eksternal, pemberian *sponsorship* Perusahaan dan pengelolaan museum Perusahaan;
   j. Mengelola fungsi penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan, serta publikasi Laporan Keuangan dan informasi/laporan penting lainnya di media cetak, media elektronik dan Situs Web Perusahaan kepada pihak terkait/regulator sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   k. Menyelenggarakan RUPS dan *public expose*.
   l. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang diperlukan dalam rangka *corporate action*.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan tugasnya, Sekertaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Komunikasi

1. Mengelola fungsi penyusunan kebijakan, implementasi dan evaluasi strategi komunikasi/ publikasiPerusahaan.
2. Mengelola *brand image* dan *brand positioning* Bersama dengan unit kerja yang mengelola *marketing communication*.

Sekretaris Perusahaan

3. Membina hubungan baik dengan media cetak maupun media elektronik, lembaga/instansi/ institusi, dan pihak eksternal lainnya.
4. Mengelola fungsi penyediaan materi komunikasi terkait Perusahaan.
5. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis konsep jawaban/ tanggapan/naskah, termasuk dalam memberikan tanggapan/*press conference* yang berkaitan dengan isu Perusahaan yang muncul di media massa berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
6. Mengelola Situs Web dan media sosial Perusahaan bersama dengan unit kerja yang membidangi fungsi layanan dan unit kerja yang membidangi fungsi *marketing communication*.
7. Mengelola Museum BRIPurwokerto.

CSR dan *Community Development*

1. Mengelola kegiatan pemetaan sasaran komunitas penerima program CSR & Community Development.
2. Mengelola kegiatan pelaksanaan program CSR & *Community Development*.

Kesekretariatan dan *Stakeholder Management*

1. Mengelola kepatuhan yang terkait dengan ketentuan regulator, pasar modal dan lain-lain.
2. Mengelola aktivitas kesekretariatan, administrasi dan dokumentasi Perusahaan.
3. Pengelolaan *stakeholder management*.
4. Mengelola administrasi dan dokumentasi Direksi.

Protokoler dan Pelayanan Intern Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP

1. Mengelola kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
2. Mengelola fungsi komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan.
3. Mengelola fungsi pelaksanaan pemberian hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
4. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis materi pidato, makalah, dengar pendapat, presentasi, wawancara dan materi pendukung lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
5. Mengelola fungsi penatakerjaan agenda Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
6. Mengelola pelaksanaan dan evaluasi protokoler dan sekretaris Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.

Rapat

1. Memastikan Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Memastikan Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Memastikan Dewan Komisari dan Direksi mengadakan Rapat Direksi – Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Memastikan Rapat dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Rapat dan ketentuan lainnya.
5. Menjadi penghubung bagi Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam berkoordinasi perihal agenda Rapat rutin maupun insidentil.
6. Memastikan bahwa agenda Rapat membutuhkan pengambilan keputusan atau hal-hal yang berdampak besar bagi kesejahteraan Perusahaan.
7. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa setiap Rapat pembahasan akan difokuskan terutama pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
8. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa tingkat kewenangan untuk hal-hal yang didelegasikan benar dan dipatuhi.
9. Memastikan bahwa Risalah Rapat ditatakerjakan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Memastikan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir atau menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
2. Memastikan rangkaian penyelenggaraan dan administrasi RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan penunjukan Pemimpin RUPS sebelum penyelenggaraan RUPS.
4. Memastikan bahwa kegiatan RUPS telah meliputi pengambilan keputusan untuk setiap pokok pembahasan (mata acara).

5. Berkoordinasi dengan pihak independen terkait (Notaris dan Biro Administrasi Efek) untuk kelancaran pelaksanaan RUPS.
6. Berkoordinasi dengan divisi terkait perihal rumusan dan skenario dalam mata acara RUPS.
7. Memastikan pengumuman dan pemanggilan RUPS telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Pendalaman Pengetahuan

1. Memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima program pengenalan (orientasi) yang memadai pada kesempatan pertama dan selanjutnya berdasarkan kebutuhan. Sasaran program ini bertujuan untuk memberikan wawasan secara ringkas kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Perusahaan agar para anggota baru dapat sesegera mungkin memberikan kontribusi kepada Perusahaan. Khusus bagi anggota Dewan Komisaris baru, program pengenalan ditentukan oleh Komisaris Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, untuk anggota Direksi baru, program pengenalan ditentukan oleh Direktur Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Direksi. Apabila terdapat kondisi Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama adalah anggota baru, maka penentuan program orientasi ditentukan oleh Wakil Komisaris Utama atau Wakil Direktur Utama atau 2 (dua) Komisaris atau 2 (dua) Direktur sesuai ketentuan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Informasi atau pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh setiap anggota Sekretaris Perusahaan paling kurang:
   a. Informasi atau pengetahuan intern, antara lain:
      - Anggaran Dasar;
      - Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
      - Visi, Misi dan tujuan Perusahaan;
      - Rencana strategis Perusahaan;
      - Kinerja keuangan Perusahaan;
      - Segmentasi usaha, produk dan jasa Perusahaan;
      - Manajemen risiko bank, profil risiko, penilaian dan pemantauan risiko;
      - Struktur Organisasi Perusahaan;
      - Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern;
      - Informasi relevan lainnya yang dapat membatu tugas dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
   b. Informasi atau pengetahuan ekstern, antara lain:
      - Perkembangan ekstern yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi, dsb.
      - Posisi Perusahaan diantara pesaing, nasabah dan *stakeholders* lainnya.
      - Peran dan hubungan dengan pihak yang berwenang di pemerintahan di bidang moneter, serta badan berwenang lainnya.
      - Peraturan perundang-undangan yang relevan.
      - Informasi ekstern lainya yang relevan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

   c. Dokumen yang perlu disiapkan atau dibagikan selama masa pengenalan/orientasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru diangkat, antara lain:
      - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
      - Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.
      - Laporan Tahunan terbaru.
      - Kontrak Manajemen dan rencana Perusahaan terakhir.
      - Struktur Organisasi Perusahaan.
      - Dokumen lainnya, sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Membahas kebutuhan pengembangan diri yang berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan dan membuat perencanaan untuk program pelatihan bersama dengan unit kerja terkait.
4. Mengumpulkan informasi mengenai pelatihan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan informasi dan kerjasama dengan divisi terkait.
5. Menentukan/merekomendasikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi atau berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Program orientasi/pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya

Sekretaris Perusahaan

yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Pelaksanaan pendidikan/pelatihan mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku di BRI *Corporate University*.

Daftar Pemegang Saham dan Kepemilikan

1. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi untuk mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Khusus Saham (Seri A Dwiwarna),
2. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan terbuka ≥5% dari modal disetor perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila atas kepemilikannya pada perusahaan terbuka terdapat perubahan ≥0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam perusahaan, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka tersebut.

Koordinasi Persiapan Laporan Tahunan

1. Laporan Tahunan diantaranya paling sedikit meliputi Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, Profil Perusahaan, Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, GCG, Informasi Keuangan dan informasi lainnya yang dianggap relevan sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* terkini.
2. Laporan Tahunan paling lambat diselesaikan maksimal bulan ke-4 (ke-empat) setelah akhir tahun buku berjalan dan selambat-lambatnya diterima oleh pemegang saham sebelum RUPS.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan pada RUPS dan harus ada dalam salah satu mata acara RUPS.
4. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan *(Annual Report)*.

Pasar Modal

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya mengenai peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
3. Sebagai pihak yang dapat dihubungi mewakili Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Lainnya

1. Mengelola implementasi manajemen risiko di *Corporate Secretary Division*.
2. Menyusun Rencana Kerja Fungsional (RKF) dan Renca Kerja & Anggaran (RKA) di *Corporate Secretary Division*.
3. Mengelola *Human Capital*, memenuhi kebutuhan Pekerja, meningkatkan kompetensi dan mendorong kinerja agar pengelolaan *Human Capital* berjalan sesuai kebijakan yang berlaku di *Corporate Secretary Division*.
4. Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di *Corporate Secretary Division*.
5. Membuat laporan-laporan di tingkat Divisi/Department agar sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain atau instansi terkait.
6. Mengelola logistik dan kesekretariatan di tingkat Divisi/Department, termasuk penggunaan biaya-biaya terkait logistik dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengelola pengembangan platform/sistem aplikasi berkoordinasi dengan divisi terkait.
8. Melakukan penyempurnaan kebijakan/ketentuan terkait *output* (hasil kerja) *Corporate Secretary Division* dan unit kerja lain (termasuk antara lain: *Service Level Agreement*/SLA, Buku Prosedur Operasional/BPO, dll).
9. Melakukan koordinasi dan kerja sama di tingkat Divisi/Department, serta membina hubungan baik dengan unit kerja lain, lembaga atau instansi atau instansi atau pihak ketiga, termasuk antara lain pengadaan dan pelaksanaan Perjajian Kerjasama (PKS) yang terkait bidang tugas *Corporate Secretary Division*.

PEMBATASAN

1. Sekretaris Perusahaan dan Pekerja *Corporate Secretray Division* yang ikut membantu menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan.
2. Sekretaris Perusahaan dan Pekerja *Corporate Secretray Division* yang ikut membantu menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

KEKOSONGAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Direksi wajib mengangkat penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Selama terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan, jabatan Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan/kualifikasi Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Panduan Sekretaris Perusahaan ini.

PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Sekretaris Perusahaan/Direksi yang merangkap Sekretaris Perusahaan/Pekerja yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
2. Sekretaris Perusahaan/Direksi yang merangkap Sekretaris Perusahaan/Pekerja yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan memuat dalam Situs Web Perusahaan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagai mana dimaksud poin 1 dan apabila terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan.
3. Pelaporan dan pengungkapan sebagaimana dimaksud angka 2 butir di atas disertai informasi pendukung.
4. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud 2 butir di atas pada bagian ini, disertai informasi pendukung dan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.
5. Sekretaris Perusahaan membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Sekretaris Perusahaan mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikutinya dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY DIVISION TAHUN 2020

Hubungan dengan Media Massa

Pelaksanaan komunikasi korporat dilakukan dengan melibatkan berbagai media sebagai *strategic partner* yang meliputi media cetak, elektronik, maupun *online*. Komunikasi dilakukan melalui penerbitan *press release* yang selama tahun 2020 telah mencapai sejumlah 361 siaran pers oleh perusahaan.

Selain itu Corporate Secretary juga bertindak sebagai *spoke person* untuk menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan, mendampingi jajaran Direksi BRI dalam kegiatan wawancara bersama media, menyelenggarakan kegiatan *press conference* untuk meningkatkan citra perusahaan, serta melakukan monitoring hingga klarifikasi terhadap pemberitaan negatif atau isu-isu yang dapat menurunkan reputasi Bank BRI.

Kegiatan dengan Media Massa Tahun 2020

1. Buka puasa bersama bersama dengan pewarta media dilakukan secara virtual pada Maret 2020
2. Bank BRI mengadakan *Media Visit* secara rutin yang dilakukan sepanjang 2020. Selama periode ini tercatat 6 kali media visit ke ke kantor media nasional bersama dengan manajemen BRI.
3. Untuk menjalin hubungan baik,berbagai kegiatan informal dilakukan dengan mengajak awak media seperti *lunch* atau nongkrong bareng dengan redaktur ekonomi media nasional.
4. BRI juga mengadakan Pemimpin Redaksi *Gathering* yang dilakukan secara virtual pada tahun 2020 tepatnya di bulan Juni 2020. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Manajemen BRI dengan Pemimpin Redaksi.
5. Sebagai bagian dari anggota Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), BRI juga menginisiasi Pemimpin Redaksi Gathering dengan HIMBARA untuk mempererat hubungan dengan media nasional. Acara ini digelar pada Desember 2020.

Transparansi Penyampaian Laporan

Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah	Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan	Tahunan	1	OJK dan BEI
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak	Triwulan	4	OJK, BI Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Hutang Valas	Bulanan	12	OJK
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Keterbukaan Informasi	Insidentil	7	OJK dan Bursa Efek Indonesia

Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS oleh Sekretaris Perusahaan BRI sebagaimana dilaporkan pada sub bab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Selama tahun 2020 telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 kali, yaitu RUPST pada tanggal 18 Februari 2020.

Keterbukaan Informasi

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melakukan Laporan Keterbukaan Informasi, Laporan Rutin lainnya dan atau permintaan data oleh Regulatos sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Tabel Data Laporan Sekretaris Perusahaan BRI tahun 2020

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	R.01-DIR/SKP/01/2020	2/01/2020	Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank BRI Tahun 2020
2	R.02-DIR/SKP/01/2020	2/01/2020	Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank BRI Tahun 2020
3	R.03-DIR/SKP/01/2020	2/01/2020	Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank BRI Tahun 2020
4	B.04-SKP/KSK/01/2020	2/01/2020	Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian dan Pengumuman Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Pengakhiran Masa Jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI
5	B.05-SKP/KSK/01/2020	3/01/2020	Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information
6	B.07-SKP/KSK/01/2020	9/01/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Desember 2019
7	B.08-SKP/KSK/01/2020	9/01/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Desember 2019
8	B.09-SKP/KSK/01/2020	9/01/2020	Data hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Desember 2019
9	B.11-SKP/KSK/01/2020	10/01/2020	Laporan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020
10	B.14-SKP/KSK/01/2020	22/01/2020	Informasi Terkait Pemenuhan POJK 8/POJK.04/2015
11	B.15-SKP/KSK/01/2020	23/01/2020	Tanggapan Konfirmasi atas Pemberitaan Media
12	B.16-SKP/KSK/01/2020	27/01/2020	Konfirmasi Kehadiran Undangan Klarifikasi Anggota Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang Diangkat Berdasarkan RUPSLB BRI tanggal 02 September 2019
13	B.17-SKP/KSK/01/2020	27/01/2020	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2019
14	B.18-SKP/KSK/01/2020	27/01/2020	Laporan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Januari 2019
15	B.19-SKP/KSK/01/2020	27/01/2020	Laporan Bukti Iklan Pemanggilan RUPST Bank BRI Tahun 2020

Sekretaris Perusahaan

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal
16	B.21-SKP/KSK/02/2020	3/02/2020	Laporan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
17	B.22-SKP/KSK/02/2020	4/02/2020	Tanggapan Konfirmasi atas Pemberitaan Media
18	B.23-SKP/KSK/02/2020	5/02/2020	Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019
19	B.24-SKP/KSK/02/2020	7/02/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Januari 2020
20	B.25-SKP/KSK/02/2020	7/02/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Januari 2020
21	B.26-SKP/KSK/02/2020	7/02/2020	Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Januari 2020
22	B.27-SKP/KSK/02/2020	7/02/2020	Pemenuhan Data Posisi Hutang Luar Negeri BRI 2019
23	R.103-DIR/SKP/02/2020	13/02/2020	Penyampaian Usulan Putusan Pelaksanaan RUPST Bank BRI Tahun 2020
24	R.107-DIR/SKP/02/2020	13/02/2020	Pelaporan Pengangkatan Efektif Sdri. Loeke Larasati Agoestina sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
25	R.01-SKP/KSK/02/2020	13/02/2020	Penetapan Tanggal Efektif Komisaris BRI a.n. Loeke Larasati Agoestina
26	R.123-DIR/SKP/02/2020	20/02/2020	Pelaporan Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
27	B.31-SKP/KSK/02/2020	20/02/2020	Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Pelaksanaan Pembayaran Deviden Tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
28	B.32-SKP/KSK/02/2020	24/02/2020	Konfirmasi Ketidakhadiran Direktur Kepatuhan BRI dalam RDP Komisi VI DPR RI
29	B.34-SKP/KSK/02/2020	28/02/2020	Laporan Dividen Per-Lembar Saham dan Pengalihan Treasury Stock untuk Keperluan Program Alokasi Saham oleh Pekerja
30	B.38-SKP/KSK/03/2020	6/03/2020	Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan
31	B.41-SKP/KSK/03/2020	10/03/2020	Laporan Struktur Kepemilikan saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Februari 2020
32	B.42-SKP/KSK/03/2020	10/03/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Februari 2020

Sekretaris Perusahaan

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal
33	B.43-SKP/KSK/03/2020	10/03/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Februari 2020
34	B.427-DIR/SKP/03/2020	13/03/2020	Keterbukaan Informasi/Disclosure of Information Buy Back Saham
35	B.73-SKP/CSM/05/2020	8/05/2020	Laporan Struktur Kepemilikan saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan April 2020
36	B.74-SKP/CSM/05/2020	8/05/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan April 2020
37	B.75-SKP/CSM/05/2020	8/05/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan April 2020
38	R.76-SKP/CSM/05/2020	14/05/2020	Undangan Analyst Meeting Kementerian BUMN
39	B.82-SKP/CSM/06/2020	9/06/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Mei 2020
40	B.83-SKP/CSM/06/2020	9/06/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Mei 2020
41	B.84-SKP/CSM/06/2020	9/06/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Mei 2020
42	B.91-SKP/CSM/06/2020	19/06/2020	Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information
43	B.92-SKP/CSM/06/2020	23/06/2020	Pemenuhan Data Frekuensi Transaksi & Usulan Ketentuan Tambahan Threshold BUMN Perbankan
44	R.10-SKP/CSM/07/2020	2/07/2020	Surat Pengantar
45	B.95-SKP/CSM/07/2020	10/07/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Juni 2020
46	B.96-SKP/CSM/07/2020	10/07/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Juni 2020
47	B.97-SKP/CSM/07/2020	10/07/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Juni 2020
48	B.100-SKP/CSM/07/2020	17/07/2020	Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
49	B.111-SKP/CSM/08/2020	6/08/2020	Laporan Penunjukan Sekretaris Perusahaan Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
50	B.113-SKP/CSM/08/2020	8/08/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Juli 2020
51	B.114-SKP/CSM/08/2020	8/08/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Juli 2020
52	B.115-SKP/CSM/08/2020	8/08/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Juli 2020
53	B.116-SKP/CSM/08/2020	11/08/2020	Undangan Analyst Meeting Publikasi Kinerja Keuangan BRI Q2 Tahun 2020
54	B.117-SKP/CSM/08/2020	11/08/2020	Tanggapan atas Permintaan Data Jasa Telekomunikasi BRI

Sekretaris Perusahaan

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal
55	R.467-DIR/SKP/08/2020	13/08/2020	Pemenuhan Persyaratan Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Pengurus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
56	B.119-SKP/CSM/08/2020	18/08/2020	Pemberitahuan Rencana Public Expose Tahun 2020 PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
57	B.120-SKP/CSM/08/2020	18/08/2020	Laporan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
58	B.121-SKP/CSM/09/2020	4/09/2020	Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham Anggota Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
59	B.122-SKP/CSM/09/2020	8/09/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Agustus 2020
60	B.123-SKP/CSM/09/2020	8/09/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Agustus 2020
61	B.124-SKP/CSM/09/2020	8/09/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Agustus 2020
62	R.552-DIR/SKP/09/2020	30/09/2020	Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
63	R.553-DIR/SKP/09/2020	30/09/2020	Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
64	B.131-SKP/CSM/10/2020	6/10/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan September 2020
65	B.132-SKP/CSM/10/2020	6/10/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan September 2020
66	B.133-SKP/CSM/10/2020	6/10/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan September 2020
67	B.134-SKP/CSM/10/2020	13/10/2020	Keterbukaan Informasi/Disclosure Information
68	B.135-SKP/CSM/ CGC/10/2020	27/10/2020	Pemberitahuan Audit atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
69	B.136-SKP/CSM/10/2020	6/11/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Oktober 2020
70	B.137-SKP/CSM/10/2020	6/11/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Oktober 2020
71	B.138-SKP/CSM/10/2020	6/11/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Oktober 2020
72	B.139-SKP/CSM/10/2020	10/11/2020	Undangan Analyst Meeting Publikasi Kinerja Keuangan BRI Q3 Tahun 2020
73	B.143-SKP/CSM/10/2020	13/11/2020	Pemberhentian Sementara Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
74	B.140-SKP/CSM/ CGC/11/2020	11/11/2020	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 30 September 2020

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal
75	B.141-SKP/CSM/ CGC/11/2020	11/11/2020	Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information
76	B.142-SKP/CSM/ CGC/11/2020	13/11/2020	Tanggapan Permintaan atas Pemberitaan di Media Massa
77	B.1854-DIR/SKP/ CSM/11/2020	20/11/2020	Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
78	R.659-DIR/SKP/ CSM/12/2020	1/12/2020	Pemberitahuan Rencana RUPSLB BRI Tahun 2021
79	B.147-SKP/CSM/12/2020	7/12/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan November 2020
80	B.148-SKP/CSM/12/2020	7/12/2020	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan November 2020
81	B.149-SKP/CSM/12/2020	7/12/2020	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan November 2020
82	B.152-SKP/CSM/12/2020	15/12/2020	Laporan Bukti Iklan Pegumuman RUPSLB BRI Tahun 2021

Selain keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan juga melakukan konfirmasi serta tanggapan/jawaban atas pemberitaan di media massa yang terkait dengan rencana aksi atau berita yang menyangkut aksi korporasi yang simpang siur atau yang memerlukan kepastian kebenarannya.

Press Release Bank BRI Tahun 2020

Selama tahun 2020, Coporate Secretary BRI telah menerbitkan Press Release sejumlah 361 berita yang terdiri dari berita online maupun konvensional.

Tabel *Press Release* Bank BRI Tahun 2020

No	Tanggal	Judul
1	1/01/2020	BRI Bangun Posko dan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta
2	2/01/2020	Operasional Bank BRI Tetap Berjalan Normal Usai Banjir Jakarta
3	3/01/2020	Bank BRI Berikan Pengobatan Gratis Untuk Korban Banjir Jakarta
4	2/01/2020	Terjun Langsung, BRI Community Salurkan Bantuan Makanan Siap Saji Bagi Korban Bencana Banjir
5	3/01/2020	Peduli Banjir, BRI Beri Pengobatan Gratis kepada 500 Kepala Keluarga di Tambun-Bekasi
6	4/01/2020	Tangani Dampak Pasca Banjir, BRI Kembali Salurkan Bantuan di Tangerang
7	5/01/2020	BRI Siap Salurkan KUR Senilai Rp 120,2 Triliun dengan Bunga 6%
8	7/01/2020	Bank BRI Salurkan KUR Sektor Produksi Lebih dari 50%
9	10/01/2020	290 Ribu Penikmat KUR BRI Naik Kelas Sepanjang Tahun 2019
10	15/01/2020	Bank BRI Dukung Kelestarian Lingkungan Melalui "BRI Poin Pohon Toleransi"
11	14/01/2021	Agen Bank Kian Diminati, Setiap Hari 56 Orang Menjadi Agen BRILink
12	15/01/2020	Dorong Milenials Berwirausaha, BRI Garap BRILink Xpress
13	21/02/2020	Langkah Nyata Bank BRI Dorong Penerimaan Pajak

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
14	16/01/2020	BRI Berikan Layanan Keuangan Terintegrasi Bagi Anggota KORPRI (unblasted)
15	16/01/2020	Bank BRI Sabet 2 Penghargaan Internasional Triple A Country Awards
16	18/01/2020	BRI Ikut Semarakkan Festival Keimigrasian 2020
17	21/01/2020	BRI Akselerasi Implementasi Penggunaan PIN untuk Transaksi Kartu Kredit
18	22/01/2020	Dana Keloaan DPLK BRI Tumbuh 21%
19	23/01/2020	Mengandalkan Digitalisasi Bisnis Mikro, BRI Bukukan Laba Rp 34,41 Triliun
20	26/01/2020	Transaksi Setahun Capai Rp 673 Triliun, Berikut Data Mencengangkan Agen BRILink
21	29/01/2020	BRI Group Economic Forum 2020 Indonesias Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown
22	29/01/2020	Menkeu Sri Mulyani Apresiasi BRI Fokus Kembangkan UMKM
23	30/01/2020	Sunarso Bank BRI Menciptakan Nilai, Tidak Semata Mengejar Keuntungan
24	3/02/2020	Bank BRI Tunjuk Amam Sukriyanto Sebagai Corporate Secretary
25	4/02/2020	BRI dan BRI Syariah Akselerasi Implementasi Qanun
26	6/02/2020	Tak Hanya Keuntungan, Agen BRILink Berperan Langsung Menanggulangi Kemiskinan
27	10/02/2020	Dorong UMKM Go Digital, BRI Gandeng Google
28	8/02/2020	Dalam 5 Tahun BRI Berhasil Salurkan KUR Senilai Rp 15,4 Triliun
29	10/02/2020	Agen BRILink Ini Buktikan Bahwa Masyarakat Perkotaan Membutuhkan Kehadiran Agen Bank
30	11/02/2020	Bank BRI Gandeng Kemenkes RI, Budayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
31	11/02/2020	Gara-Gara Agen BRILink, Masyarakat Makin Jarang Pergi Ke Kantor Bank
32	13/02/2020	Agen BRILink Dorong BRI Makin Efisien
33	14/02/2020	BRI Buka Kantor Bank Terintegrasi Coworking Space Pertama di Indonesia
34	12/02/2020	Melalui Sustainability Bond, Bank BRI Ciptakan Ratusan Ribu Entrepreneur Baru
35	16/02/2020	Akselerasi Literasi Keuangan, BRI Bidik 500.000 Agen BRILink
36	19/02/2020	BRISPOT, Jurus BRI Mendigitalisasi Penyaluran Kredit Mikro
37	18/02/2020	BRI Bagikan Dividen Rp 20,6Triliun
38	21/02/2020	BRI Ajak UMKM Binaan Sarinah Go Global
39	19/01/2020	BRI Bersama KKP Terus Dorong Literasi Keuangan Terhadap Nelayan
40	24/02/2020	Jemput Bola ke Nasabah, BRI Bekali Tenaga Pemasar dengan Fitur Cash Pick Up
41	20/02/2020	Smart Agent E-Tax BRI, Terobosan Transparansi dan Optimalisasi Pajak Daerah
42	27/02/2020	Liburan ke Eropa, Kunjungi BRI Europe Travel Fair!
43	26/02/2020	Ribuan Sneakerhead Padati CERIA Sneaker Hype Fest
44	25/02/2020	Tanggap Bencana Banjir, BRI Dirikan Posko dan Pastikan Layanan Tetap Beroperasi
45	27/02/2020	Wow! Pengajuan Kredit Mikro tak Perlu ke Kantor Bank
46	1/03/2020	Proses Kredit Cepat, Usaha Nasabah BRI Tumbuh Pesat
47	28/02/2020	Gandeng Pegadaian dan PNM, BRI Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
48	3/03/2020	Upaya Sistematis BRI Terapkan Prosedur Keselamatan Bagi Pekerja
49	4/03/2020	Pertama di Indonesia, Bayar SIM Internasional Hanya Lewat BRI
50	5/03/2020	Raih Predikat Industry Leader, BRI Kembali Buktikan Diri Sebagai BUMN Unggul
51	5/03/2020	Seri Pertama Sukses di Tonton 4,3 Juta Kali, BRI Luncurkan Web Series Pakai Hati Season 2
52	8/03/2020	Genjot Ekonomi Kerakyatan, BRI Galakkan Perhutanan Sosial di Bali
53	10/03/2020	Sinergi BRI dan Lazada Express Mudahkan Kurir Miliki Rekening Bank
54	10/03/2020	Di Perusahaan ini, Pekerja Bebas Mengekspresikan Hobinya
55	11/03/2020	Ini Cara Unik BRI Ajak Masyarakat Hindari COVID-19
56	12/03/2020	Gelar DevOpsDay Jakarta 2020, Upaya BRI Cari Talenta Terbaik di Bidang IT
57	13/03/2020	Begini Cara Mendorong 30 Ribu Pelaku UMKM Go Online
58	15/03/2020	Warga di Kaki Gunung Tangkuban Perahu Kini Tak Lagi Susah Akses Layanan Perbankan
59	17/03/2020	Jualan Bakso, Dari Modal Rp 4 Juta Kini Nardi Raup Omset Rp 700 Juta Per Bulan
60	16/03/2020	Buyback Saham Rp 3 Triliun, Ini Strategi BRI
61	18/03/2020	Terapkan Social Distancing, BRI Instruksikan Pekerjanya Work From Home
62	22/03/2020	(Unblasted) Upaya Lindungi Pekerjanya dari Corona, Bank ini Sediakan Layanan Antar Jemput
63	19/03/2020	Nabung Tanpa ke Bank, Pedagang di Pasar Manfaatkan BRISPOT
64	18/03/2020	Study From Home, BRI Berikan Solusi Pintar Melalui Aplikasi Junio Smart
65	20/03/2020	Kurangi Interaksi, Saatnya Manfaatkan Kemudahan Belanja dari Rumah
66	21/03/2020	Peran BRI Dukung ASN KemenPANRB Tetap Produktif Bekerja di Rumah
67	22/03/2020	Bentuk Pusat Komando Krisis, ini Langkah Mitigasi Bisnis BRI
68	22/03/2020	Pastikan Operasional Berjalan Normal, BRI Sesuaikan Jam Layanan Kantor Cabang
69	23/03/2020	BRI Beri Fasilitas Extra Bagi Masyarakat, ini bentuknya
70	24/03/2020	BRI Salurkan Bantuan Lawan Pandemi Corona
71	26/03/2020	Transaksi E-Channel dan E-Banking BRI Melonjak Imbas Corona
72	23/03/2020	BRI Bantu Sarana Penunjang Untuk RS Corona Wisma Atlet Kemayoran
73	24/03/2020	Hadapi Corona, BRI Siapkan Ramuan Jitu Untuk UMKM
74	26/03/2020	Jokowi Instruksikan Bank Beri Penundaan Cicilan Bagi Pelaku UMKM, Ini Respon BRI
75	27/03/2020	Lindungi Pekerja dan Nasabah, BRI Alihkan Sementara Operasional Beberapa Kantor di Wilayah Terdampak Penyebaran Covid-19
76	30/03/2020	Strategi BRI Agar UMKM di Luar Jawa Ikut Kebanjiran Order
77	27/03/2020	BRI Salurkan Bantuan Sembako Langsung Melalui Agen BRILink Senilai 5 Miliar
78	2/04/2020	#dirumahaja, BRI Gratiskan Biaya Top Up GoPay
79	31/03/2020	Solusi Physical Distancing, Uang Pensiun Bisa Diambil di Dekat Rumah
80	31/03/2020	Dukungan Physical Distancing dari Perbankan, BRI Maksimalkan Limit Transaksi
81	2/04/2020	Ini Syarat dan Ketentuan Nasabah BRI Yang Bisa Dapat Keringanan Pinjaman

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
82	3/04/2020	BRI Ikut Berdayakan Petani Indonesia Lewat TaniGroup
83	3/04/2020	Tak Hanya Relaksasi, BRI Punya Banyak Program Bantu UMKM Terdampak Covid-19
84	7/04/2020	BRI Beri Relaksasi 134 Ribu Pelaku UMKM Terdampak Covid-19 dengan Pinjaman Mencapai Rp 14,9 Triliun
85	6/04/2020	Kumpulkan 1,5 Miliar, Insan BRILian Turun Tangan Perangi Covid-19
86	8/04/2020	Physical Distancing, BRI Mudahkan Transaksi LPG Lewat Brimola
87	7/04/2020	Gandeng BRI,Kakorlantas Polri Cegah Covid 19 Dengan Gunakan Drone
88	8/04/2020	BRISPOT Dorong Kredit Mikro BRI Tumbuh Selektif di Tengah Pandemi Covid
89	9/04/2020	Smart Billing BRI Bantu Pelaku Bisnis Untuk Lebih Praktis
90	13/04/2020	Direktur Utama BRI Beberkan Skema Relaksasi UMKM Terdampak Covid-19
91	12/04/2020	Tak Betah Dirumahkan Karena Covid-19, Wayan Buka Usaha Delivery Telur Eggo!
92	27/04/2020	Jeli Lihat Peluang, Pembuat Boneka Ini Kini Memproduksi Masker
93	19/04/2020	Alih Profesi Jadi Perajin Masker, Ini Sosok Herwadi yang Bertahan di Tengah Wabah Covid-19
94	16/04/2020	Berkah di Tengah Pandemi Corona, Penjualan Online Jamu Vio Link Naik Signifikan
95	14/04/2020	Dapat Relaksasi Kredit, Pedagang Kue di Jakarta Ini Merasa Terbantu
96	15/04/2020	KUR BRI Terus Mengucur di Tengah Pandemi Covid-19
97	15/04/2020	Gandeng BRI, Polri Luncurkan Program Keselamatan
98	17/04/2020	Strategi BRI Akselerasi Keringanan Kredit UMKM
99	18/04/2020	Kelas Online Bank BRI Dampingi Petani Kopi Perhutanan Sosial Untuk Naik Kelas
100	20/04/2020	Satu Juta Masker Gratis Bagi Pedagang Pasar di Tengah Pandemi Corona
101	21/04/2020	Cara BRI Jaga Likuiditas di Tengah Pandemi
102	22/04/2020	Curahan Hati Pengusaha Money Changer di Bali yang Terdampak Covid-19
103	27/04/2020	Kerja Sama Dengan Indonesia In Your Hand, BRI Ekspor Produk UMKM ke Australia
104	21/04/2020	Kartini Dari Malang, Cerita Roos Nurningsih Yang Menginspirasi Millenial Lewat Jamu
105	24/04/2020	"BRILian Fight Covid-19" Terkumpul Rp 7,2 Miliar, BRI Salurkan Bantuan
106	29/04/2020	Aplikasi Wirausaha BRILIAN, BRI Beri Kemudahan Pelaku UMKM untuk Pengembangan Usaha
107	25/04/2020	BRI Umumkan Penyesuaian Jam Operasional Selama Ramadhan
108	26/04/2020	BRI Ajak Insan BRILiaN Muda Berinovasi Di Millennial Innovation Summit 2020
109	30/04/2020	Perjuangan Lince Rawi, Agen BRILink Wanita di Muara Wahau yang Menginspirasi
110	28/04/2020	Cara Unik BRI Ajak Pekerjanya Berdonasi Untuk Penanggulangan Covid-19
111	28/04/2020	Semakin Produktif, BRI Hadirkan Virtual Coaching Bagi Pelaku UMKM di Seluruh Indonesia
112	28/04/2020	125 Ribu Debitur KUR Telah Mendapat Restrukturisasi Dari BRI
113	4/05/2020	Pedagang Tempe Ikut Menikmati Relaksasi Kredit UMKM
114	5/05/2020	Transaksi di Mobile Banking BRI (BRImo) Menjadi Favorit Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19
115	4/05/2020	BRI Pastikan Kelancaran Layanan Operasional Perbankan Menjelang Lebaran

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
116	30/04/2020	Kementerian Sosial RI Tunjuk BRI, Salurkan Bantuan Sosial Tunai Rp.316 Miliar Bagi 528 Ribu KPM
117	4/05/2020	1,1 Juta Pelaku Usaha Mikro Terdampak Covid-19 Dapatkan Relaksasi Pinjaman Dari BRI
118	6/05/2020	Transaksi Agen BRILink Tumbuh Pesat di Tengah Pandemi
119	8/05/2020	Tok!BRI Turunkan Bunga Kartu Kredit, Ini Penjelasannya
120	18/04/2020	Agen BRILink BRI Lizawati, Dari Tulang Punggung Keluarga Hingga Jadi Penyalur Bantuan CSR BRI Peduli
121	11/05/2020	Pengusaha EO yang Dapat Relaksasi Kredit dan Tetap Memberi THR Bagi Karyawannya
122	19/05/2020	Tips Aman Bertransaksi dengan Bank BRI di Tengah Pandemi Covid-19
123	12/05/2020	BRI Punya Banyak Program Agar Nasabah Makin Betah Transaksi Digital
124	13/05/2020	Tak Hanya Transaksi, Pinjaman Digital BRI Ikut Tumbuh Signifikan Di Tengah Pandemi
125	11/05/2020	Peduli Covid-19, Bank BRI Salurkan Bantuan Sembako Bagi 250 Panti Asuhan di Indonesia
126	18/05/2020	Omset Anjlok 70% karena Corona, Pedagang Baju di Bali Tertolong Relaksasi Kredit
127	14/05/2020	Kinerja Stabil di Tengah Pandemi, BRI Fokus Penyelamatan UMKM
128	13/05/2020	BRI Capai Komitmen Pinjaman Luar Negeri USD 1 Miliar di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia
129	15/05/2020	Jaga Keberlangsungan Hidup Pelaku UMKM dan Pekerja Sektor Informal, BRI Bersama Gojek dan Grab luncurkan Fasilitas Pinjaman Bunga Ringan Bagi Mitra Gojek & Grab
130	15/05/2020	Minat Peserta Meningkat, Kemenkop dan BRI Beri Kelas Online Bagi Pelaku Usaha
131	15/05/2020	Dukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, BRI Gandeng Platform Online Salurkan KUR Digital
132	15/05/2020	"BRILian Fight Covid" Terkumpul Dana Rp 22,16 Miliar, BRI Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Terkena Dampak
133	18/05/2020	172 Kantor Bank BRI Tetap Buka Operasional Terbatas Selama Periode Libur Laran
134	17/08/2020	BRI Antisipasi "The New Normal" Dengan Terapkan Protokol Penanganan Covid-19
135	26/05/2020	Hadapi New Normal, Bank BRI Bantu Berdayakan Pedagang Pasar di Kota Malang Dengan Teknologi
136	19/05/2020	Mudahkan Ibadah Dari Rumah, BRI Hadirkan Layanan Pembayaran Zakat Secara Daring
137	20/05/2020	BRI Ajak Pasar Tradisional Berjualan Online
138	26/05/2020	Dari Pinjaman Digital Hingga Layanan Virtual Assistant, BRI Mudahkan Adaptasi Masyarakat Hadapi The New Normal
139	27/05/2020	Yuk Intip Suasana! The New Normal di Bank BRI
140	28/05/2020	Adaptasi Skenario The New Normal, BRI Bersiap Evaluasi Jumlah & Peran Kantor
141	29/05/2020	Pinjaman Bunga Ringan Bantu Kurangi Beban Finansial Pengemudi Ojek Online di Tengah Pandemi
142	2/06/2020	Apresiasi Pinjaman Bunga Ringan, Pengemudi Ojek Online Berharap Program Terus Diperluas
143	28/05/2020	Cerita Pengelola Pasar yang Berhasil Mengubah Pasar Dinoyo Menjadi Pasar Online
144	27/05/2020	Ditaksir Senilai Rp 52,4 Triliun, BRI Jadi Merek Bank Paling Bernilai di Indonesia
145	4/06/2020	Website Pasar Bank BRI, Topang Penjualan Pedagang Pasar Tradisional di Makassar
146	3/06/2020	Berangsur Pulih, 85% Kantor BRI Telah Beroperasi Dengan Protokol "The New Normal"
147	5/06/2020	Ditunjuk Jadi Bank Kustodian, BRI Siap Sukseskan Program Tapera

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
148	5/06/2020	Strategi BRI Hadapi The New Normal Transformasi
149	8/06/2020	Hadapi New Normal Era, BRI Beri Pelatihan Standarisasi Produk APD
150	15/06/2020	Website Pasar BRI Beri Lapangan Kerja Baru Bagi Tukang Ojek
151	9/06/2020	Penyaluran KUR On Track, BRI Optimistis Capai Target
152	10/06/2020	KIOS WARGA, Sinergi Taspen dan BRI Tingkatkan Kesejahteraan ASN
153	11/06/2020	Pekan UKM Internasional, Peran Digitalisasi UKM Menghadapi New Normal
154	12/06/2020	Upaya Nyata BRI Dukung Ketahanan Pangan di Era The New Normal
155	12/06/2020	Kian Transparan, Tata Kelola Perusahaan BUMN Diakui Dunia Internasional
156	17/06/2020	Ingat! Belanja dengan Kartu Kredit Harus Pakai PIN 6 Digit
157	16/06/2020	9 Perusahaan BUMN Keroyokan Bangun Ekosistem Digital Bagi UMKM
158	17/06/2020	BRI Siap Memberikan Technical Assistance Kepada Bank Bukopin
159	19/06/2020	Indonesia Masih Menjadi Destinasi Investasi Pilihan, BRI Berhasil Mengundang Mitra Internasional Untuk BRI Life
160	20/06/2020	Safari Kerakyatan, BRI Dukung Petani dan Peternak di Wilayah Malang Melalui BRI Peduli (unblasted)
161	18/06/2020	Transaksi Digital Tumbuh Signifikan, Bank BRI Terus Dipercaya Masyarakat
162	19/06/2020	BRI Gelar Akad Kredit Massal Program Rumah Murah KPR Sejahtera FLPP
163	21/06/2020	BRI Dukung "The New Normal" di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
164	20/06/2020	Dukung Ketahanan Pangan, BRI Hadir di Tengah-tengah Petani Jeruk di Malang
165	21/06/2020	Lagi! Perkuat Ketahanan Pangan di Kediri, BRI Dukung Peternak Sapi Perah dengan KUR dan CSR BRI Peduli
166	24/06/2020	CERIA Raih Penghargaan Customer Journey Reimagination 2020
167	23/06/2020	Pemerintah dan BRI Dorong Pedagang Bertransaksi Secara Digital
168	27/06/2020	Gerakan Pakai Masker, Bank BRI Dukung Aktivitas Ekonomi Pasar Tradisional
169	25/06/2020	Bantu UMKM, Pengajuan KUR BRI Bisa Secara Online
170	26/06/2020	Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi Indonesia
171	25/06/2020	Penempatan Dana Dari Pemerintah Bikin BRI Makin Fokus Selamatkan UMKM
172	26/06/2020	Tim Technical Assistance Bank BRI Telah Aktif Bekerja Membantu Bank Bukopin
173	1/07/2020	Subsidi Bunga KUR Cair, BRI Salurkan ke 214 Ribu Nasabah
174	30/06/2020	Perjuangan Pemasar Mikro BRI Bantu Restrukturisasi KUR Pedagang Pasar Purwokerto
175	10/11/2019	Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Gelar Pelatihan di 100 Kota
176	6/07/2020	Kisah Pemasar Mikro BRI Yang Selektif Salurkan KUR di Tengah Pandemi
177	1/07/2020	BRI dan Polri Beri Layanan SIM Gratis di HUT ke -74 Bhayangkara
178	2/07/2020	Gandeng Google Cloud, BRI Makin Canggih Berdayakan UMKM
179	4/07/2020	BRI Cairkan Asuransi Kepada Keluarga Serma Rama Wahyudi Yang Gugur di Kongo
180	1/07/2020	BRI dan Kemenkeu Terus Akselerasi Serapan Tambahan Subsidi Bunga pada UMKM

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
181	6/07/2020	Kemenkop UKM dan BRI Dorong Kebangkitan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Subsidi Bunga KUR
182	8/07/2020	Bank BRI Sinergi dengan Askrindo dan Jamkrindo Soal Jaminan Kredit UMKM
183	8/07/2020	Lebih Dekat ke Nasabah, BRI Luncurkan Platform Digital Saving "BRI Buka Rekening"
184	9/07/2020	Pedagang Alat Masak asal Cililitan Bantuan Subsidi Bunga KUR Meringankan Beban
185	9/07/2020	KUR Online BRI Bantu Pengusaha Konveksi Tingkatkan Skala Usaha
186	10/07/2020	Transformasi di Tengah Pandemi, Dirut BRI Dinobatkan Sebagai CEO Paling Visioner
187	10/07/2020	Buku Penjualan ORI017 Tertinggi, BRI Sebut Masyarakat Indonesia Sudah Melek Investasi
188	13/07/2020	BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan UMKM
189	14/07/2020	Dalam Tiga Pekan BRI Berhasil Salurkan 77% Penempatan Dana PEN Dari Pemerintah
190	13/07/2020	Jadi Inspirasi di Lingkungan Kerja, BRI Beri Asuransi Davestara Untuk Dua Petugas KRL
191	22/07/2020	Dapat Kucuran KUR Online BRI, Omzet Pelaku Usaha Ini Makin Stabil Raup Dobel Digit
192	15/07/2020	Terserap 100% di Juli, BRI Dapat Tambahan 2.000 unit FLPP di 2020
193	17/08/2020	Begini Perkembangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah BRI di Aceh
194	21/07/2020	BRI Sinergi dengan Kemenparekraf RI Dukung Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
195	15/07/2020	Langkah Nyata BRI Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Kebangkitan UMKM
196	16/07/2020	2 Juta Nasabah UMKM BRI Disiapkan Menerima Stimulus Subsidi Bunga Bulan Ini
197	4/06/2020	Ciptakan Pemimpin Masa Depan, BRI Berikan Beasiswa BRILian Scholarship Program
198	20/07/2020	BRI Bangun Posko dan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Masamba
199	19/07/2020	BRI Bantu 5 Miliar Untuk Akomodasi Penginapan Petugas Kesehatan Penanganan Covid-19
200	10/08/2020	Capai Target, Penyaluran Dana PEN BRI Tembus Rp 30 Triliun
201	10/08/2020	Berkat Tambahan Modal, Pelaku UMKM di Lampung Pulihkan Usaha dan Buka Bisnis Baru
202	25/07/2020	Tak Perlu Repot, Kini Beli Tiket Kapal Bisa Lewat Agen BRILink
203	23/07/2020	Akselerasi Digitalisasi UMKM, BRI Sinergikan Tiga Ekosistem
204	24/07/2020	Tepati Janji Kepada Pemerintah, Sebulan BRI Salurkan Pinjaman Penempatan Dana PEN Dua Kali Lipat
205	29/07/2020	Nusantara Fashion Festival 2020
206	4/08/2020	Tetap Bertumbuh di Tengah Pandemi AgenBRILink Layani Lebih dari 52 Ribu Desa
207	5/08/2020	Manfaatkan Kupedes Bangkit BRI, Pelaku Usaha Mikro Ini Mampu Bertahan dan Perluas Usaha
208	29/07/2020	Terapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik BRI Borong 3 Penghargaan di Ajang GRC & Performance Exellence Award 2020
209	30/07/2020	BRI Mengambil Peran Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
210	6/08/2020	Kala UMKM Mulai Menggeliat
211	7/08/2020	Restrukturisasi Kredit Makin Landai, BRI Mulai Ekspansi Bisnis
212	6/08/2020	Peduli Atasi Pandemi, BRI Telah Salurkan Bantuan 106,9 Miliar
213	11/08/2020	Kisah Bayu, Mantri BRI Dampingi Pedagang Pasar Dinoyo Malang 'Melek' Digital

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
214	12/08/2020	Bisnis Wealth Management BRI Melesat di Tengah Pandemi
215	14/08/2020	BRI Ajak Pelaku UMKM Naik Kelas Lewat Event BRILIANPRENEUR UMKM Export 2020
216	17/08/2020	Perayaan HUT ke 75 Kemerdekaan RI Momentum Menggapai Indonesia Maju dan Semangat Berbagi di Tengah Pandemi
217	13/07/2020	Pandemi Menjadi Penguat Komitmen BRI Berdayakan UMKM
218	26/06/2020	Dari Pinjaman Digital Hingga Layanan Virtual Assistant, BRI Beri Kemudahan Layanan ke Masyarakat
219	17/08/2020	Sasar Segmen Ultra Mikro (UMi), BRI Optimalkan BRIBrain
220	17/08/2020	Akselerasi Inklusi Keuangan, 434 Ribu AgenBRILink Layani Negeri
221	18/08/2020	Bank BRI Tunjuk Aestika Oryza Gunarto Sebagai Corporate Secretary
222	19/08/2020	Fokus Penyelamatan UMKM, Bisnis BRI Tetap Tumbuh
223	31/08/2020	Dorong Produktivitas Usaha, BRI Gelar Pelatihan Virtual Ketahanan Pangan Keluarga
224	24/08/2020	Miliki 3 Kekuatan (Data, System & Jangkauan), BRI Sukseskan Penyaluran Program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro, Kemenkop UKM tahap I
225	24/08/2020	Pedagang Pecel Ini Terima Banpres Produktif Dari Presiden Jokowi
226	19/08/2020	Jadi Penyalur Terbesar, Ini Strategi BRI Sukseskan Program Banpres Usaha Mikro
227	25/08/2020	Forbes Kembali Nobatkan BRI Sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia Untuk 6 Tahun Berturut-turut
228	25/08/2020	BRI Raih Penghargaan Bergengsi The Best Retail Banking dari Asian Banker
229	27/08/2020	BRI Group Siap Jadi Strategic Partner Nasabah dalam Pengelolaan Keuangan di Tengah Pandemi
230	27/08/2020	Kontribusi BRI dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
231	27/08/2020	BRI Berhasil Menjaga Pertumbuhan Bisnis Yang Sustainable Di Tengah Upaya Penyelamatan UMKM
232	1/09/2020	Nasabah BRI Siap-siap dapat Kejutan Dari BRI, Lewat Program BritAma FSTVL
233	31/08/2020	Pedagang Batik Dapat Banpres Produktif
234	30/08/2020	BRI Sukseskan Banpres Produktif Usaha Mikro di Yogyakarta
235	1/09/2020	Alasan Mengapa Harus Beli Saham BBRI
236	2/09/2020	Bangun Ekosistem Digital, BRI Pertegas Posisi Fokus di Segmen UMKM
237	4/09/2020	Transformasi Bikin Investor Ritel Saham BRI Melesat Enam Kali Lipat Dalam Dua Tahun
238	3/09/2020	BRI BRAIN Dorong Sunarso Jadi CEO Inovatif Terbaik
239	4/09/2020	Melalui Transformasi Digital, BRI Jadikan Semangat HPN 2020 untuk Memberikan Solusi Kemudahan Bertransaksi di Masa Pandemi
240	6/09/2020	BRIPeduli Konservasi Sungai, Langkah Nyata Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
241	7/09/2020	Siapkan Program Cicilan Menarik, BRI Berikan Kemudahan Kepada Peserta JKN – KIS
242	10/09/2020	Pesta Rakyat Simpedes BRI 2020 Digelar Virtual untuk Pertama Kalinya
243	8/09/2020	4 Hal Yang Didambakan Milenial dan Gen-Z Dalam Bekerja
244	17/08/2020	Lebih dari 450 Ribu AgenBRILink Layani Pelanggan Hingga Pelosok Negeri
245	9/09/2020	Investor Millenial Mulai Dominasi Pembelian SR013, Bank BRI Tembus Rp 371 Miliar

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
246	14/09/2020	BRI Selesaikan Konservasi Kali Semarang Jadi Bersih dan Lestari
247	14/09/2020	NUFF 2020 - Siaran Pers - Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Nusantara Fashion Festival 2020 Sukses Digelar dan Disaksikan oleh 2.208.266 Penonton
248	17/09/2020	Adaptasi Cepat Masa Pandemi, BRI Luncurkan 6 Produk Fintech
249	17/09/2020	Tak Terbendung Pandemi, BRI Siapkan UMKM Go Global Lewat BRIncubator
250	20/09/2020	"Bersih-bersih Sungai Kemuning" Jadi Ikon Wisata Lokal di Kota Banjarmasin
251	23/09/2020	BRI Berikan Layanan Terbaik bagi Kementerian Pertahanan RI
252	23/09/2020	Ciptakan SDM Unggul dan Berdaya Saing Global, Bank BRI hadirkan BRILSP
253	24/09/2020	Perkuat Kerja Sama dengan Startup Unicorn, BRI Akselerasi Penyaluran KUR Digital
254	24/09/2020	BRI Bank Pelat Merah dengan Catatan Penjualan SR013 Tertinggi
255	30/09/2020	Jaga Sungai Jaga Kehidupan, BRI Kembalikan Sungai Sebagai Penyangga Kehidupan
256	5/10/2020	Dukung Peningkatan SDM Indonesia, BRI Akselerasi Penyaluran Dana PIP
257	7/10/2020	BRI Raih Dua Penghargaan Bergengsi Dari Asiamoney
258	28/09/2020	Siap –Siap! Pelaku UMKM Muda Akan Go Global Lewat Program Pengusaha Muda BRILian
259	9/10/2020	BRI Dukung Perluasan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro di Kalteng
260	12/10/2020	"Sampah Jadi Uang", BRI Kembalikan Fungsi Sungai dan Dorong Ekonomi Masyarakat
261	12/10/2020	Kolaborasi BRI, Perbanas dan Bank Buku IV Perangi Kejahatan Siber di Industri Perbankan
262	14/10/2020	BRI Salurkan KUR Rp 90,1 Triliun Hingga Kuartal III 2020
263	13/10/2020	BRI Sambut Baik Status BRIsyariah Sebagai Surviving Entity di Merger Bank Syariah Milik BUMN
264	16/10/2020	Punya DNA Mikro, BRI Akselerasi Penyaluran KUR Super Mikro
265	15/10/2020	Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional, BRI Gencarkan Transaksi Keuangan Masyarakat Lewat Agen BRILink
266	19/10/2020	BRI Berpotensi Kembali Turunkan Suku Bunga Kredit
267	18/10/2020	Bersih-bersih Sungai Tukad Empelan, BRI Edukasi Masyarakat Jaga Sungai dan Alam Sekitar
268	20/10/2020	BRI Permudah Masyarakat Terima Bantuan BPUM Dari Pemerintah
269	13/10/2020	BRI Perbesar Pasar Perbankan Syariah Via BRIS yang Jadi Surviving Entity
270	21/10/2020	OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit, Ini Respon BRI
271	22/10/2020	Gandeng Google Cloud, BRI Akselerasi Layanan & Inklusi Keuangan
273	19/10/2020	Semangat Pemuda Memulai Bisnis Pengusaha ini Raup Omzet Miliaran di Bisnis Fashion
274	23/10/2020	Dorong Ekonomi Mikro, BRI Berdayakan Pelaku UMKM Hingga Siapkan Desa BRILian
275	25/10/2020	Bersih-bersih di Sungai Kalisari Dorong Kelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
276	27/10/2020	Graduation BRIncubator Go Global Lahirkan UMKM Siap Bersaing di Pasar Internasional
277	27/10/2020	Mudahkan Masyarakat Saat Long Weekend, BRI Beri Layanan Terbatas dan Weekend Banking
278	28/10/2020	Pengusaha Muda BRILian, Sulap Logam Jadi Cuan
279	29/10/2020	Sekolah Pasar dan UMKM, Cara Baru BRI Tingkatkan Literasi Keuangan Pelaku UMKM

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
280	31/10/2020	Punya Teknologi BRIBrain, BRI Hadirkan Simplifikasi Layanan
281	1/11/2020	Akselerasi Transformasi Digital, BRI Alokasikan Capex Hingga 4% dari Total Pendapatan
282	15/10/2020	Bebas dari Sampah dan Banjir, Sungai Bendung jadi Percontohan Bagi Masyarakat Kota Palembang
283	2/11/2020	Strategi Transformasi Human Capital BRI Menjadi Home to The Best Talent
284	4/11/2020	Pendekatan Digital BRI Bantu Akselerasi Inklusi Keuangan Sektor Mikro
285	4/11/2020	Penerapan Nilai Sosial dan Ekonomi Beriringan Mampu Jaga Kinerja BRI
286	5/11/2020	BRI Dukung Benihbaik.com Salurkan 4.320 Bibit Pohon Durian Bawor Kepada warga Banyumas
287	7/11/2020	BRI Gencarkan Kolaborasi Tingkatkan Edukasi Pengelolaan Keuangan Sejak Dini
288	9/11/2020	Bersih-bersih Sungai Sukarame, Beri Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Kota Lampung
289	9/11/2020	Yovy Trijayanti, Pejuang UMKM yang Bertahan di Tengah Badai Pandemi
290	10/11/2020	Hari Pahlawan, BRI Beri Bantuan Beasiswa Bagi Putra-i TNI dan POLRI
291	11/11/2020	Launching BRI Micro & SME Index BRI Optimistis UMKM Bangkit
292	12/11/2020	Berjuang Bak Pahlawan, Pengusaha Coklat Ini Sukses Berdayakan Petani Kakao
293	12/11/2020	BRI Micro & SME Index Bisa Jadi Acuan Pengembangan UMKM di Indonesia
294	13/11/2020	Tingkatkan Soliditas Pelaku Pasar Keuangan BRI Gelar Virtual Gathering Bersama Perbankan dan BPD
295	13/11/2020	IIAIS 2020, BRI Perkenalkan BRIBrain "Otak" Dibalik Semua Kecanggihan Teknologi BRI
296	13/11/2020	Momentum Tingkatkan Kesadaran Berinvestasi dan Berasuransi, BRI Gelar Acara Puncak Semarak Literasi Keuangan
297	16/11/2020	"Desa BRILian", BRI Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Desa di Tengah Pandemi
298	17/11/2020	Dorong Kebangkitan UMKM, BRI Cermat Terapkan Risk Management
299	17/11/2020	Fantastis, BRI Salurkan KUR Super Mikro Rp 6 Triliun Dalam 2 Bulan
300	18/11/2020	Fokus Pada Sustainabilitas Kinerja, BRI Borong 14 Penghargaan ESG Awards 2020
301	24/11/2020	Dirut BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai Best CEO of The Year
302	19/11/2020	Dukung Pemerintah, BRI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan OVO Untuk Pinjaman Modal Digital Bagi UMKM
303	17/11/2020	Fantastis, BRI Salurkan KUR Super Mikro Rp 6 Triliun Dalam 2 Bulan
304	20/11/2020	IFS 2020, BRI Dukung Fintech Menjadi Partner Kolaborasi Bisnis Perbankan
305	20/11/2020	BRI Corporate University Raih Akreditasi Global
306	20/11/2020	Di Tengah Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR BRI Tetap Terjaga
307	20/11/2020	Bantu Guru Honorer, BRI Bangun Sistem Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah
308	24/11/2020	Jadi Korban PHK, Maulana Yusuf Bangkit dan Kembangkan Usaha Kuliner Lewat KUR Super Mikro BRI
309	24/11/2020	KUR Super Mikro Selamatkan Usaha Penjual Peyek di Tengah Pandemi
310	26/11/2020	Perkuat Digital Security, BRI Bermitra dengan Element & Peruri
311	4/12/2020	"BRI Data Hackathon 2021", Dorong Transformasi Digital dan Literasi Data Bagi Masyarakat Luas
312	1/12/2020	BRI Kembali Gelar BRILIANPRENEUR Untuk Mendorong UMKM Bangkit

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
313	27/11/2020	BRI Pacu UMKM untuk Berkembang dan Wujudkan SDGs di Indonesia
314	27/11/2020	Ini Jadwal Pengundian BritAma FSTVL
315	1/12/2020	Tingkatkan Penetrasi Bisnis Pembiayaan, BRI Jalin Kerjasama dengan BRI Ventures
316	30/11/2020	BRI Gandeng Kemendag Pacu Ekspor Produk UMKM ke Amerika Serikat
317	30/11/2020	Sambut Tarif GSP, Ini Gerak Cepat BRI
318	30/11/2020	Kembali Meraih Penghargaan Bergengsi, BRI Dinobatkan Sebagai The Most Resilient BUMN, The Best CEO, dan The Best CFO
319	2/12/2020	Desa BRILian Tebar Optimisme Kebangkitan Ekonomi Desa
320	13/12/2020	Peluang Pasar Produk Pangan UMKM Dengan Local Wisdom Masih Sangat Besar
321	2/12/2020	Creativepreneur Kerajinan Limbah dari Jogja Gali Potensi Ekspor di BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020
322	11/12/2020	Kompetisi dan Kurasi Jadi Momentum Wastraloka Makin Berkembang
323	18/12/2020	Bisnis UMKM Kian Menarik dan Kreatif
324	14/12/2020	BRI Antar UMKM Langsung ke Jantung Pasar Ekspor Dunia
325	10/12/2020	Sejumlah Langkah BRI Antar UMKM Naik Kelas
326	6/12/2020	UMKM di Era Digital Harus Melek Design & Brand
327	6/12/2020	Kesiapan UMKM Sektor Pariwisata Menghadapi The Future of Travelling
328	7/12/2020	Kampung Coklat UMKM Binaan BRI dari Blitar Menuju Global
329	6/12/2020	UMKM The Kilisuci, Mengusung Kain Tradisional Kembali Ke Pentas Global
330	7/12/2020	BRI Terus Prioritaskan Alokasi Sumber Daya Untuk Bangun Desa Jadi Sentra Produksi
331	7/12/2020	Terus Menjaring Peluang, Asep Sasar Pasar Global Lewat UMKM Export BRI
332	8/12/2020	BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 Goes Virtual to Connect Indonesia's Leading MSMEs with International Buyers
333	14/12/2020	BRI Terus Dorong Pelaku UMKM Masuk Bisnis Daring
334	11/12/2020	Konsisten Dorong UMKM, BRI Selenggarakan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020
335	1/12/2020	Gelar UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, BRI Dorong 400 UMKM Go Global
336	10/12/2020	Lebih dari 108 Ribu Pedagang Pasar Kini Berjualan Secara Daring Melalui Pasar.id Milik BRI
337	14/12/2020	Transaksi Ekspor UMKM di BRILIANPRENEUR 2020 Melesat
338	17/02/2020	BRI Optimalkan BRILink, Tingkatkan Literasi & Inklusi Keuangan Segmen Mikro
339	11/12/2020	Produk Kerajinan Tangan UMKM Unggulan Ekspansi ke Pasar Dunia
340	12/12/2020	Pemberdayaan UMKM di Era New Normal, BRI Beri Bantuan Sarana Prasarana bagi 1000 Pasar
341	12/12/2020	Produk Food & Beverage UMKM Kian Agresif Rambah Pasar Mancanegara
342	13/12/2020	Dirut BRI Sunarso Kembali Torehkan Prestasi, Dinobatkan Sebagai The Best CEO in Banking Transformation
343	13/12/2020	Digelar di Tengah Pandemi, BRILIANPRENEUR 2020 Catatkan Peningkatan Signifikan Transaksi Ekspor Pelaku UMKM

Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Judul
344	14/12/2020	Dorong Akselerasi UMKM Go Global, Business Matching BRI Catatkan Nilai Kontrak Pembelian US$59 Juta
345	15/12/2020	Fashion dan Aksesoris Unggulan Berpotensi Mendulang Devisa
346	13/12/2020	Melalui Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Pasar di Rumah
347	16/12/2020	125 Ribu Karyawan dari 5 Negara Ikuti Peringatan HUT BRI Ke-125 Secara Virtual
348	18/12/2020	Pengusaha Muda BRILiaN Dorong Kelahiran Wirausahawan Unggul
349	18/12/2020	Produk UMKM BRI Kian Beragam, Ekonomi Kreatif Berkembang
350	21/12/2020	Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2020, BRI Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik dan Sunarso Sebagai Top National Banker
351	18/12/2020	Dominasi Pasar Perdana dan Sekunder, BRI Borong Tiga Penghargaan Sebagai Dealer Utama Dari Kemenkeu
352	21/12/2020	BRI (BBRI) Pede Laba Tahun Depan Tumbuh Berkat Faktor-Faktor Ini
353	23/12/2020	Pastikan Libur Nataru Lancar, BRI Siapkan Rp 29 Triliun dan Siagakan 122 Unit Kerja
354	23/12/2020	Pertama di Indonesia, OJK dan BI Setujui Kolaborasi BRI dan Alipay
355	28/12/2020	Wealth Management BRI Catat Pertumbuhan Positif Year on Year
356	28/12/2020	Dana Nasabah Kelas Premium Bank BRI Tembus Rp132 Triliun
357	25/12/2020	Salurkan BPUM Kepada 7,8 Juta Penerima, BRI Terapkan Protokol Kesehatan
358	27/12/2020	Kolaborasi, BRI dengan OVO Luncurkan Produk Co-brand Credit Card
359	24/12/2020	Hadapi Era VUCA, HIMBARA Siapkan BUMN Finance Institute Bagi Talenta Perbankan
360	24/12/2020	Brett King "the King of Disruptors" Beri Tips Hadapi Revolusi Digital Perbankan
361	29/12/2020	Dorong Transaksi Micropayment, BRI Fasilitasi Pedagang di Jakarta

DIVIDEN

KEBIJAKAN

Dalam memutuskan pemberian Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham, Bank BRI memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor sustainable tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Bank BRI kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Bank BRI memiliki kebijakan pemberian Dividen kepada pemegang saham dengan rasio pemberian secara historis kisaran 40% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

HUBUNGAN INVESTOR

Divisi Hubungan Investor BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, Divisi Hubungan Investor BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

ACHMAD ROYADI
Head Investor Relations

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, Achmad Royadi memperoleh gelar MBA Finance pada tahun 2009 dari A.B Freeman School of Business, Tulane University, USA dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjdjaran, Bandung pada tahun 1998. Beberapa sertifikasi yang telah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Treasury Dealer.

Menjabat sebagai Head of Investor Relations sejak Juni 2018, dan memulai karier di BRI pada tahun 1999.

Dalam perjalanan karirnya, beliau sempat menjabat sebagai Vice President Corporate Development & Strategy, Head of Economist Group, Group Head of Global Market, serta Kepala Bagian Manajemen Likuiditas Divisi Treasury.

CONTACT INVESTOR RELATION

Nama : Achmad Royadi
Alamat : Gedung BRI II lantai 7
Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta Pusat 10210
Telp. : +62 21 575 2019
Fax : +62 21 575 2010
Email : ir@bri.co.id
Website : www.ir-bri.com

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab utama *Head of Investor Relations* BRI adalah merumuskan strategi dan melakukan fungsi komunikasi terkait kinerja dan strategi perusahaan kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI.

Dalam rangka memenuhi tangung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, Divisi Hubungan Investor BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

Analyst Meeting
Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas yang bertujuan agar analyst/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan report dengan data terkini kepada para investor.

Company Visit - Field Visit
Menerima kunjungan dari investor/ analyst yang ingin mengupdate kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.

Conference Call
Melakukan kegiatan tele-conference untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/ analyst dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

Investor Newsletter
Update informasi terkini melalui penerbitan newsletter pada website hubungan investor BRI.

Investor Conference dan Non-deal Roadshow
Melakukan kegiatan komunikasi melalui 1-on-1 meeting maupun group meeting dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama pada kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.

Rating Review
Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch Rating, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).

Pengelolaan Website Hubungan Investor
Melakukan pengelolaan informasi pada website hubungan investor agar pemegang saham, pemegang surat hutang, analis, lembaga pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. Website yang dikelola oleh Divisi Hubungan Investor tersebut juga terkoneksi dengan website perusahaan yaitu www.bri.co.id.

Advisory Report
Melakukan penyusunan materi advisory yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi gap antara intrinsic value dan target price analis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasi secara internal kepada Board of Management.

Market Update Advisory
Melakukan penyusunan materi berupa update kondisi pasar saham, harga saham BRI dan peers untuk dikomunikasikan secara internal kepada Board of Management.

Financial Update
Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/perusahaan sekuritas pada kegiatan Analyst Meeting.

Financial Brief
Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.

BBRI *News*
Melakukan penyusunan materi terkait issue terupdate yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada Board of Management ataupun pekerja BRI.

Hubungan Investor

PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Head of Investor Relation dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh Head of Investor Relations adalah:

1. Pendidikan Executive Education Program- Driving Profitable Growth, Harvard Business School, 2020
2. Pendidikan Leadership Executive Transformation, ASK Leadership, 2019
3. Pendidikan Strategic Marketing in Digital Age, University of Michigan, 2020.

Selain itu, beberapa pelatihan juga diikuti oleh Kepala Bagian dan staff Divisi Hubungan Investor pada tahun 2020 diantaranya:

1. Basic ALCO
2. Kelas Keuangan Berkelanjutan Transisi Energi dan Investasi Energi Terbarukan
3. Digitization of Retail and The Urban Experience
4. Fintech at the Crossroad
5. Strategic Business Analysis

PELAKSANAAN KEGIATAN 2020

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2020 meliputi:

1. Penyelenggaraan Analyst Meeting yang dilaksanakan setiap triwulan
2. Kegiatan komunikasi berupa 22 company visit, 202 Virtual Meeting, 9 Virtual field visit, 25 Virtual Conference/Non Deal Roadshow.
3. Penyelenggaran BRI BISA (Bincang Saham) kepada pekerja BRI
4. ESG Rating
5. Penyelenggaraan Annual Rating Reviewuntuk Fitch, Moodys, S&P serta Pefindo.
6. Penyelenggaraan Public Expose, RUPS, RUPSLB dan Investor Newsletter.
7. Pengelolaan informasi terkini pada website Investor Relations (www.ir-bri.com) meliputi:
   a. Informasi Perusahaan.
   b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
   c. Corporate Governance.
   d. Informasi Terkait RUPS.
8. Disclosure (Regulatory Filings, Events Calender, Release.KinerjaSaham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

PROFIL SEVP SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

HARI SIAGA AMIJARSO
SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Lahir di Surabaya, 9 Oktober 1965. Lulusan Universitas Brawijaya tahun 1989.

Pengalaman Profesional:

1. SEVP SKAI (Juli 2019 – saat ini)
2. Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 (Juli 2018 – 1 Juli 2019)
3. Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta (Januari 2018 – Juni 2018)
4. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2015-2017)
5. Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan (Agustus 2012-Oktober 2015)
6. Pemimpin Cabang BRI Gresik (2010-2012)

Dan sejak 2 Juli 2019 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President Satuan Kerja Audit Intern.

Training:
Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar diantaranya Pendidikan dan Uji Sertifikasi QIA di Jakarta (2019), Management (BMSR) di London (2017), Uji Sertifikasi CFra di Jakarta (2020).

Sertifikasi:
Beliau telah memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (2019), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan *Certified Forensic Auditor* (2020).

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Satuan Kerja Audit Internal

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung *strategic business objective* melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang efektif dan sesuai dengan arah serta strategi perusahaan. Pelaksanaan fungsi SKAI yang efektif dapat memberikan jaminan kepada perusahaan terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko serta sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mendukung aspirasi perusahaan sebagai *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to the Best Talent* pada tahun 2022 yang diterjemahkan ke dalam *destination statement* tahun 2021 sebagai *Most Valuable Banking Group in Indonesia*, maka SKAI menerapkan pendekatan audit yang lebih lincah (*agility*) agar dapat meningkatkan kinerja, kualitas dan memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools audit* yang *agile*. SKAI juga senantiasa meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line* & *2nd line* melalui koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang teratur dan efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik.

KEDUDUKAN SKAI

Secara struktural SKAI BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SKAI dipimpin oleh SEVP Satuan Kerja Audit Intern.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEVP SKAI

SEVP Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan SEVP SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PIAGAM AUDIT INTERN

SKAI memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:05-KOM/BRI/05/2019 dan Nokep S.348-DIR/SAI/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan mengacu pada *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) dari The Institute of Internal Auditors (IIA). Piagam Audit Intern BRI merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), inisiasi komunikasi SKAI dengan unit kerja yang diperiksa, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan SKAI dalam mengakses catatan, dokumen, dan dan fisik asset bank. Dalam hal fungsi SKAI terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, SKAI memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman utama tata kelola terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua SKAI LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independent dan jumlah serta kompetensi Auditor yang memadai. SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang membawahi Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan 19 (Sembilan belas) Audit Intern Wilayah. Berikut adalah Struktur Organisasi SKAI:

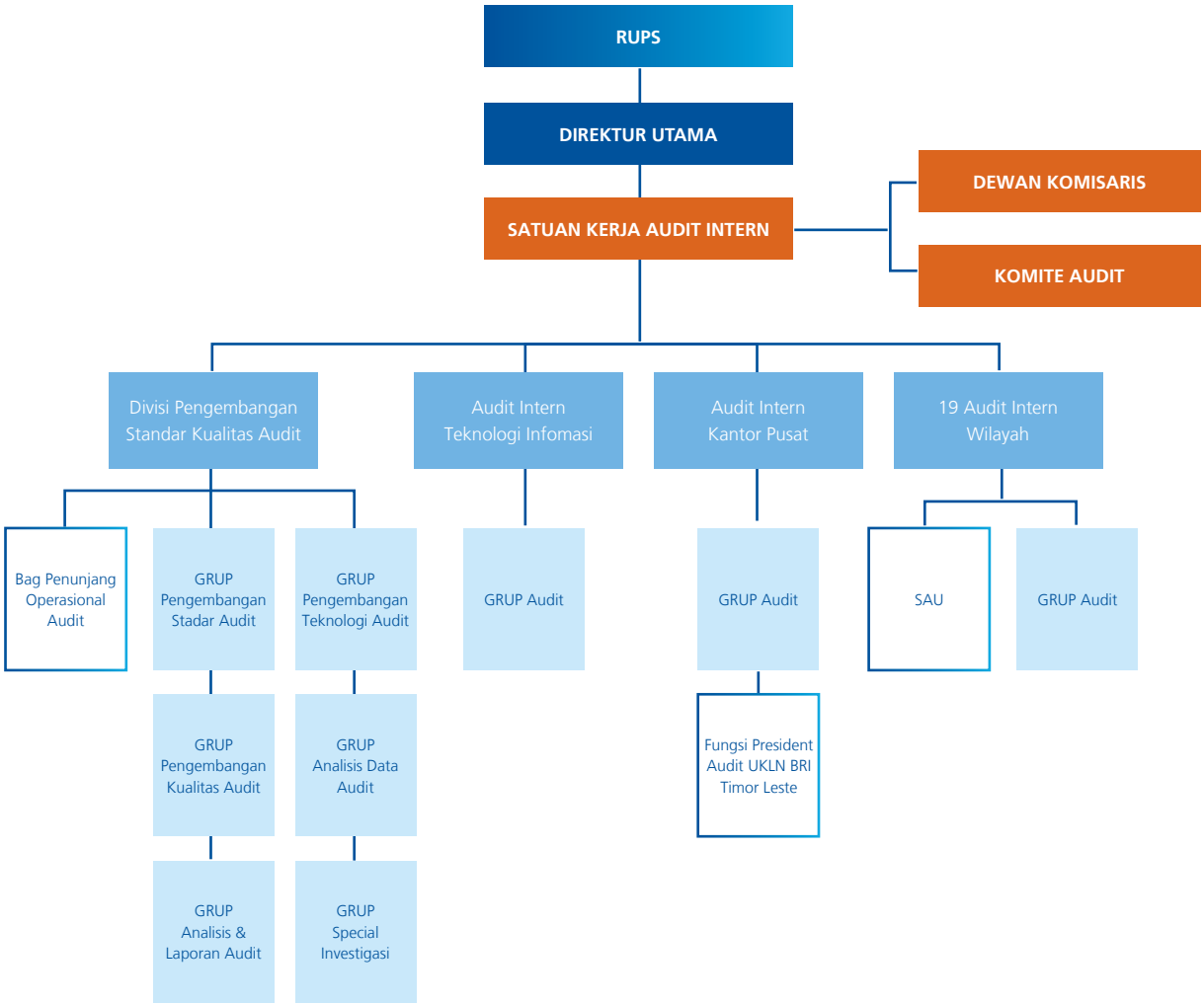

SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan unit kerja yang melaksanakan pengembangan Standar & Kualitas Audit sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit sebagai berikut:
   a. Audit Intern Wilayah
      Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Layanan Prioritas, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit di wilayah kerjanya.

Saat ini BRI memiliki 19 (Sembilan Belas) Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan 19 Kantor Wilayah BRI. Keberadaan Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan Kantor Wilayah merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* dan fungsi *assurance* dapat lebih efektif dan efisien mengingat struktur

Satuan Kerja Audit Internal

organiasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.

b. Audit Intern Kantor Pusat
Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari 50%. Audit Intern Kantor Pusat juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Manajemen Risiko, Strategi Anti *Fraud,* dan APU PPT.

c. Audit Intern Teknologi Informasi
Melaksanakan kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap terhadap unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking;* operasional infrastruktur TSI pada *Data Center*, *Disaster Recovery Center* & seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi & kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI (pengelolaan aset & logistik, pengadaan barang dan jasa IT yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BRI) serta *End User Computing*).

d. Grup Spesial Investigasi
Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. Grup Spesial Investigasi berada di bawah SEVP Satuan Kerja Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada SEVP Satuan Kerja Audit Intern.

2. Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit melakukan penyusunan visi, misi & strategi SKAI, melaksanakan evaluasi kualitas audit oleh jajaran SKAI, pihak independen maupun *internal quality assurance* terhadap SKAI perusahaan anak, melaksanakan pengkajian dan perancangan *software* maupun *hardware* untuk mendukung pelaksanaan audit, melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil audit serta melakukan pengembangan dan pengelolaan *analytical tools* data audit.

Berikut adalah posisi 19 (Sembilan belas) Audit Intern Wilayah BRI yang tersebar di Seluruh Indonesia:

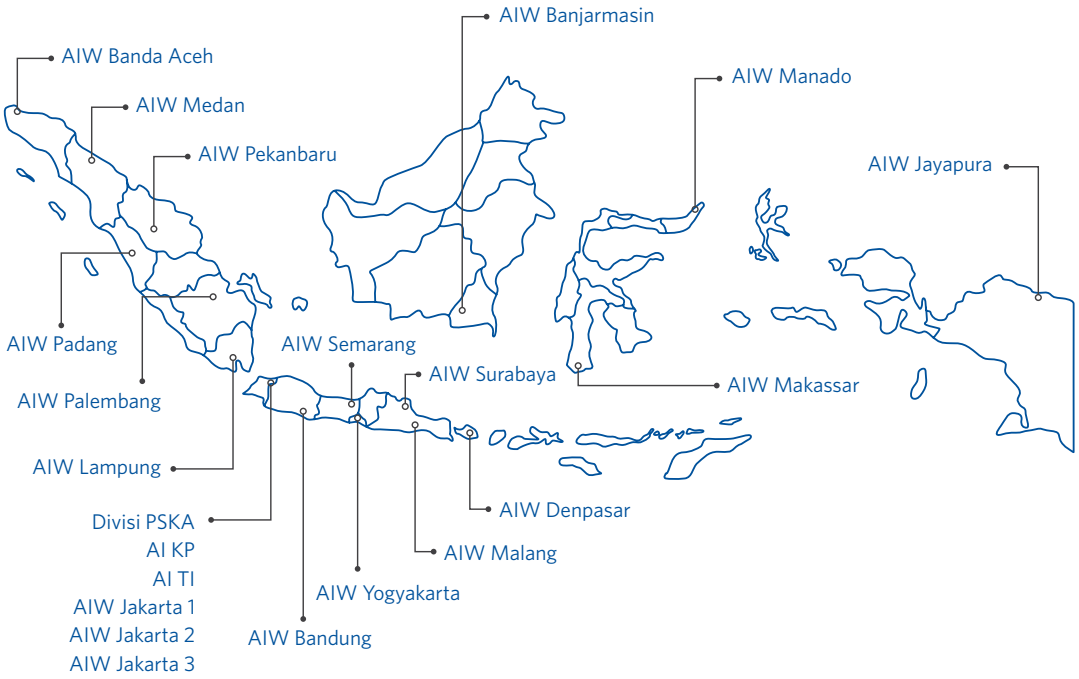

WEWENANG SKAI

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, dll.

TUGAS POKOK SATUAN KERJA AUDIT INTERN

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional,dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi Liason *Officer* bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit.

TANGGUNG JAWAB KEPALA SKAI

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
3. Memastikan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.
4. Memastikan seluruh Kegiatan asurans dan konsultansi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
5. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
6. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
7. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
8. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern, memastikan bahwa:
    a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dengan

Satuan Kerja Audit Internal

mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
   b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
   c. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank.
13. SKAI BRI sebagai perusahaan induk:
   a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak
   b. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
14. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada jajaran SKAI, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi.
15. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak eksternal (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan Divisi Hukum atau Legal Officer.

KODE ETIK AUDIT INTERN BRI

SKAI BRI memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 prinsip, yaitu:

1. *Integrity principle*
   Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern dalam melaksanakannya tugas & tanggung jawabnya.
2. *Objectivity principle*
   Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan;
   Auditor Internal harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.
3. *Confidentiality principle*
   Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi;
4. *Competency principle*
   Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

INDEPENDENSI SKAI BRI

SKAI sebagai 3rd *line* secara struktural telah independen terhadap fungsi 1st *line* (Unit Kerja Operasional) dan fungsi 2nd *line* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan). Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit). Hal tersebut mendukung independensi & objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala.

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI AUDIT

SKAI memiliki Sistem Manajemen Informasi Audit yang memadai dikenal dengan **BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)**. BRISMA merupakan sebuah ***suite application*** dalam bidang Manajemen Audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai dari tahap Perencanaan hingga Monitoring. BRISMA digunakan oleh jajaran SKAI sejak tahun 2012, dan pada tahun 2020 dilaksanakan *enhancement* aplikasi BRISMA Versi 2 meliputi pengembangan modul *electronic working paper*, *reference*, *monitoring*, *catalog*, *plan* dan *human resource*. Pengembangan tersebut mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit jajaran SKAI.

METODOLOGI AUDIT

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan metode *risk based audit* (RBA) dalam melaksanakan fungsi audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan *risk based audit*, SKAI menggunakan *Computer Assissted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools* audit untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Disamping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko melalui kegiatan *monitoring off site* yang dilaksanakan Unit Kerja Audit. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja. Pelaksanaan *monitoring off site* didukung dengan pengembangan indikator risiko melalui teknologi *big data*.

Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide & masukan untuk penyempurnaan draft dan kebijakan; melakukan forum komunikasi antara Audit Intern Wilayah dan Kantor Wilayah; Program Auditor Mengajar; kegiatan konsultasi; dan *sharing knowledge*; khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh level unit kerja.

SERTIFIKASI SKAI

Satuan Kerja Audit Intern telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia bertujuan untuk mengevaluasi proses audit sesuai mutu kualitas yang telah ditetapkan, yang berlaku sejak 04 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2020 dan akan dilakukan resertifikasi pada Februari 2021. Sertifikasi tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Divisi Pengembangan Standar Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan 19 Audit Intern Wilayah BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

Satuan Kerja Audit Internal

PROFIL PERSONIL SKAI

SKAI terus berkomitmen mengembangkan kualitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Auditor melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dalam rangka penguatan 2nd line, pada bulan Oktober 2020 terdapat *shifting* Wakil Kepala Audit Intern Wilayah menjadi RRM (*Regional Risk Manager*) sebanyak 16 orang dan peralihan Resident Auditor menjadi BRC (*Branch Risk Compliance*/ URC (*Unit Risk Compliance*) sebanyak 2.153 orang. Berikut disajikan data jumlah Auditor jajaran SKAI:

1. Jumlah Auditor & Jabatannya

No	Jabatan	Jumlah
1	SEVP	1
2	Kepala Divisi	1
3	Kepala Audit Intern Wilayah	19
4	Wakil Kepala Divisi	1
5	Wakil Kepala Audit Intern Wilayah	7
6	Kepala Desk	1
7	Group Head	82
8	Kepala Bagian	1
9	Auditor (Senior Auditor s/d Associate Auditor)	559
Total		672

2. Sertifikasi Profesi SKAI
   Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:

A. Sertifikasi Internasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Fraud Examiner (CFE)	14
2	Certified Information System Auditor (CISA)	8
3	Certified Ethical Hacker (CEH)	2
4	Certified Data Center Professional (CDCP)	1
5	Certified Financial Planer (CFP)	1
6	Certified Wealth Management (CWM)	1
7	Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	3
8	COBIT 5 Foundation Certificate	2
9	Certified Statement Analysis	2
10	Certified Blockchain Business Foundations (CBBF)	1

B. Sertifikasi Nasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Qualified Internal Auditor (QIA)	13
2	Certified Bank Internal Audit (CBIA)	45
3	Certified Forensic Auditor (CFrA)	15
4	Sertifikasi LSP BRI Level Auditor	38
5	Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Approved	2
6	Big Data Administrator	4
7	Kepatuhan Level 1	2
8	Lead Auditor ISO 27001:2013 and ISO 19011:2011	1
9	Certified Forensic Security Specialist (CFSS)	1
10	Certification in Risk Management Assurance	1
11	Sertifikasi Treasury Dealer level Basic	1
12	Certified Data Center Specialist	1
13	Business Continuity Certified Planner	1
14	Data Science Professional Certificate	1
15	Certified Blockchain Solution Architect	1
16	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	82
17	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	60
18	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	17
19	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	15

3. Kualifikasi Pendidikan Formal Jajaran SKAI

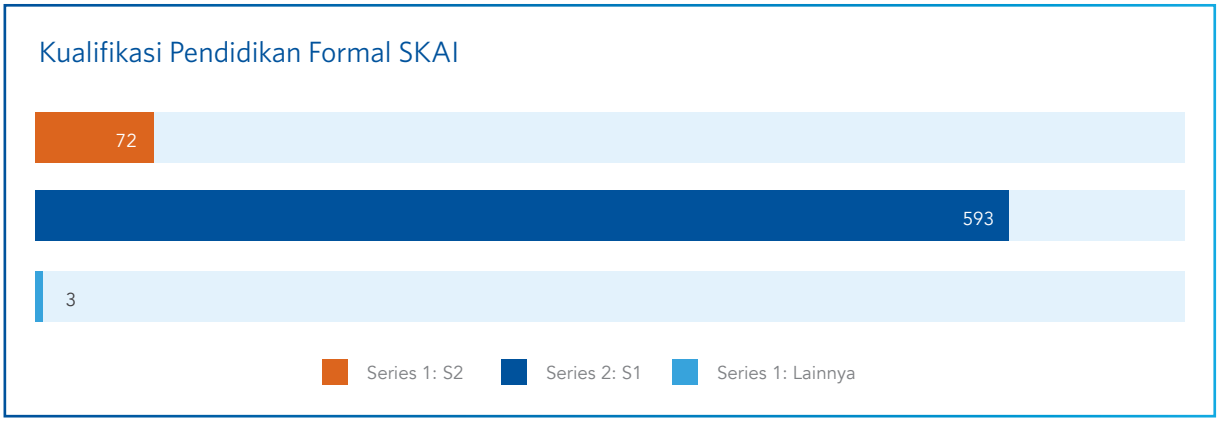

Satuan Kerja Audit Internal

4. Pendidikan & Pengembangan Kompetensi Audit Intern BRI
   Selain itu dilakukan pendidikan berkelanjutan melalui *on the job training*, pendidikan *development* dan *enhancement* (*Inclass, In House Training, Public Course* dan Seminar) dan sertifikasi profesional Auditor. Adapun Pendidikan diberikan kepada 10.150 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Peserta Pendidikan, Seminar dan Workshop

No	Nama Kegiatan Pendidikan	Jumlah Peserta
1	Enhancement Materi Audit	6,746
2	Enhancement Materi Non Audit	2,525
3	Public Cource Dalam Negeri	270
4	Development	387
5	Pendidikan Sertifikasi	161
6	Pendidikan Bagi Perusahaan Anak BRI	61
Total Peserta		10,150

5. Partisipasi dalam Asosiasi Profesi Audit Internal
Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional audit internal, SKAI telah berpartisipasi dalam asosiasi profesi audit internal salah satunya dengan keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal, antara lain:

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan
Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	SEVP SKAI BRI sebagai Ketua Dewan Pengawas IAIB.
	Senior Manager Divisi PSKA SKAI BRI sebagai Anggota Bidang Training, Edukasi & Sertifikasi; Anggota Bidang Komunikasi; Anggota Bidang Standar, Etika, Riset & Pengembangan; Anggota Bidang Keanggotaan.,

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI SKAI

1. Program Kerja SKAI
   Pada tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai program kerja yang mendukung pelaksanaan audit jajaran SKAI, antara lain:
   a. Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern
   b. Penyusunan Prosedur Audit terhadap Perusahaan Anak
   c. Pengkinian program audit
   d. Pengkinian *Risk & Control Matrix*
   e. Pengembangan BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)
   f. Pengembangan *tools audit* seperti BRI Data Extractor (BRIDEX) V.4.
   g. Pengembangan *continuous monitoring* dengan menggunakan teknologi big data.
   h. Pelaksanaan *Quality Assurance Review* di seluruh Unit Kerja Audit termasuk Perusahaan Anak.
   i. Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)
   j. Pengembangan SDM jajaran SKAI melalui program pendidikan dan sertifikasi.
   k. Pelaksanaan SKAI Terintegrasi

2. Pelaksanaan Kegiatan/Tugas Audit
   Kegiatan audit dilaksanakan sesuai Perencanaan Audit Tahun yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama serta berdasarkan hasil *assessment* terhadap potensi risiko. Selama tahun 2020, realisasi kegiatan audit SKAI telah mencapai target yang ditetapkan melalui kegiatan audit reguler, audit khusus (*special audit*) dan audit tematik. Dalam rangka merespon kondisi pandemi saat ini, SKAI melakukan penyesuaian atas pelaksanaan audit dengan menerapakan kombinasi pelaksanaan *onsite* dan

offsite audit. Pelaksanaan tersebut tetap memperhatikan efektivitas fungsi audit intern termasuk menjaga kualitas hasil audit dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Secara terperinci, realisasi kegiatan audit yang telah dilaksanakan meliputi:

a. Audit reguler
Objek kegiatan audit reguler SKAI terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: Unit Kerja, Jaringan Elektronik (*electronic channel*) dan project Teknologi Informasi. Realisasi kegiatan audit reguler terhadap Unit Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Terhadap Unit Kerja

No	Objek Audit	Reguler Audit
1	Divisi	5
2	UKLN	1
3	Perusahaan Anak	4
4	Kantor Wilayah	19
5	Kantor Cabang Khusus	1
6	Kantor Cabang	461
7	Kantor Cabang Pembantu	609
8	Kantor Kas	348
9	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	2.111
10	Seksi Administrasi Umum Kantor AIW	19

Posisi s.d 31 Desember 2020

Realisasi kegiatan audit reguler terhadap jaringan elektronik (electronic channel) sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Terhadap Jaringan Elektronik

No	Objek Audit	Target	Realisasi	%
1	Electronic channel	35.070	63.776	181,9%

Posisi 31 Desember 2020

Realisasi kegiatan audit reguler bidang teknologi informasi terhadap objek audit aplikasi dan non aplikasi sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Intern Teknologi Informasi terhadap Aplikasi dan Non Aplikasi

No	Objek Audit	Target	Realisasi	%
1	Aplikasi	19	19	100%
2	Non Aplikasi	13	13	100%
3	TI Perusahaan Anak	2	2	100%

Satuan Kerja Audit Internal

1. Audit khusus (*special audit*)
   Audit khusus (special audit) dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu terutama terkait pemenuhan ketentuan regulator. Pada tahun 2020 SKAI telah melaksanakan special audit di 1.451 unit kerja.

No	Objek Audit	Special Audit
1	Divisi	5
2	Perusahaan Anak	-
3	Kantor Wilayah	33
4	Kantor Cabang	357
5	Kantor Cabang Pembantu	149
6	Kantor Kas	18
7	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	888
8	SAU	-

2. Audit tematik
   Audit tematik dilaksanakan untuk mendapatkan profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh. Pada tahun 2020 dilaksanakan 13 (tiga belas) audit tematik di level Kantor Pusat dan 2 (dua) audit tematik yang bersifat nasional.

EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERN TAHUN 2020

1. Pelaksanaan Tugas Audit

SKAI BRI melaksanakan program *review* untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh jajaran SKAI BRI guna melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

2. Review Intern

SKAI melaksanakan *review* secara berkesinambungan atas kualitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit BRI. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya target sasaran mutu yang telah ditetapkan. *Review* dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yakni *Quality Assurance* (QA), *Peer Review* dan Supervisi:

a. Kegiatan QA dilakukan pada seluruh Unit Kerja Audit.
b. Penilaian *peer review* yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan antar tim audit.
c. Supervisi yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan oleh atasan auditor pada setiap project audit.

Penilaian kualitas pelaksanaan audit tersebut merupakan salah satu *Key Performance Indicator* dalam penilaian kinerja.

3. Review Ekstern

ISO 9001:2015

SKAI berhasil mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan telah dilaksanakan *surveillance* untuk Unit Kerja Audit Seluruh Indonesia. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat major.

HASIL KAJI ULANG PIHAK INDEPENDEN TERHADAP FUNGSI SKAI

Pelaksanaan kaji ulang oleh pihak ekstern yang independent terhadap aktivitas internal audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hasil kaji ulang yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan ruang lingkup kaji ulang penerapan fungsi audit intern periode 1 Agustus 2017 – 30 Juni 2020 diperoleh hasil bahwa aktivitas internal audit yang dilaksanakan oleh SKAI ***"Generally Conform"*** pada 4 (empat) peraturan dan standar yang berlaku, dan **tidak terdapat** aktivitas yang bersifat "*Does Not Conform*" dan "*Partially Conform*".

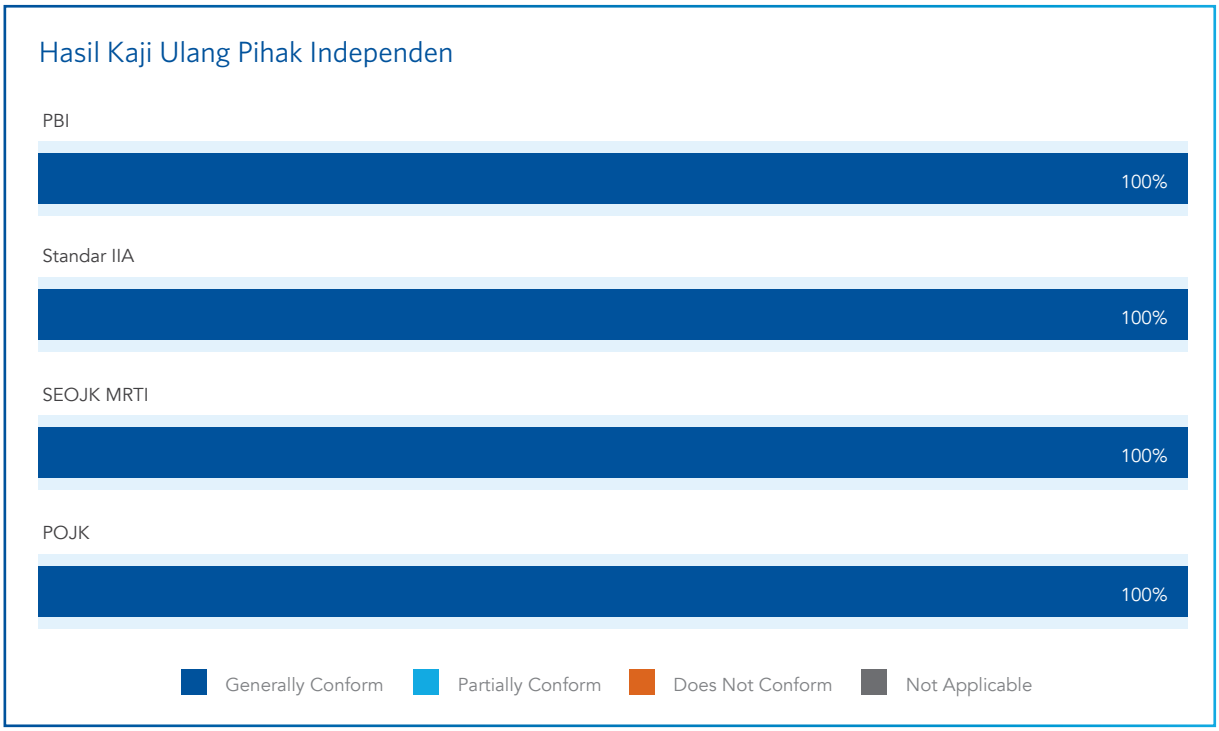

Adapun rincian peraturan dan standar yang menjadi acuan penilaian kaji ulang terhadap fungsi SKAI, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
   Kaji ulang dilakukan untuk menilai kepatuhan fungsi SKAI BRI atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Hasil kaji ulang terhadap fungsi SKAI BRI selama periode 1 Agustus 2017 – 30 Juni 2020, adalah 24 aktivitas/aspek (100%) ***generally conform*** dengan POJK No.1/POJK.03/2019.
2. POJK dan SE Otoritas Jasa Keuangan
   Evaluasi kepatuhan fungsi SKAI BRI atas POJK No.38/POJK.03/2016 termasuk didalamnya SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (MRTI). Hasil kaji ulang terhadap fungsi SKAI BRI selama periode 1 Agustus 2017 – 30 Juni 2020, adalah 5 aktivitas/aspek (100%) ***generally conform*** dengan SEOJK No.21/SEOJK.03/2017.
3. Standar IIA
   Evaluasi kepatuhan fungsi SKAI BRI periode 1 Agustus 2017 – 30 Juni 2020 terhadap Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dengan hasil 43 aktivitas/aspek (100%) %) ***generally conform***.

Satuan Kerja Audit Internal

4. PBI Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
   Evaluasi kepatuhan fungsi SKAI BRI terhadap Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 perihal Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dengan hasil 41 aktivitas/aspek (100%) ***generally conform.***
5. Customer Satisfaction Survey (CSS)
   Pelaksanaan fungsi audit intern sesuai sistem manajemen mutu tetapberfokus pada kepuasan pelanggan/*stakeholders.* Salah satu pelanggan utama SKAI adalah pihak Auditee. Karenanya kepuasan Auditee tetap akan menjadi salah satupertimbangan dalam menilai kualitas pelaksanaan audit. Rata-rata nilai CSS (Audit Intern Wilayah, Audit Intern Kantor Pusat & Audit Intern Teknologi Informasi) sebesar 80,29 (target score tahun 2020 adalah 79). Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan auditee terhadap pelaksanaan audit SKAI adalah **baik**.
6. Wujud Koordinasi dengan Eksternal dan Komite Audit
   Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, SKAI berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

   SKAI BRI sebagai *Liason Officer* bagi Auditor Eksternal dan Pihak Eksternal yang berkaitan dengan kegiatan audit melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan
   b. Pemenuhan data sesuai permintaan (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
   c. Pendampingan terhadap Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
   d. Menindaklanjuti setiap tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan).
   e. Monitoring tindak lanjut perbaikan atas temuan Pihak Eksternal secara memadai.

   Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI, maka SKAI BRI melakukan komunikasi secara berkala dengan Komite Audit dalam bentuk penyampaian Laporan Triwulanan SKAI.

SINERGI DENGAN ASSURANCE PROVIDER

SKAI melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsi pengendalian lainnya terutama dalam hal pemetaan cakupan asurans (meliputi risiko signifikan, pihak yang melakukan asurans dsb). Hal tersebut dilakukan untuk membantu mengidentifikasi *gap* dan duplikasi cakupan asurans serta membantu SKAI untuk mengevaluasi kecukupan jasa asurans di masing-masing risiko. Hasil pemetaan tersebut didiskusikan dengan fungsi pengendalian lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai koordinasi kegiatan dalam meminimalkan duplikasi pekerjaan, memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas cakupan *assurance*.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

SKAI secara rutin melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern serta memberikan opini kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakanakan manajemen. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel Hasil Monitoring Komitmen Manajemen

No	Hasil Monitoring RPM	Posisi S.d 31 Desember 2020
1	Memadai	97,67%
2	Tidak Memadai	0,01%
3	Masih Dalam Proses Pemantauan	2,32%
Total		100,00%

Keterangan: Status masih dalam proses pemantauan merupakan komitmen tindak lanjut perbaikan yang jatuh tempo pada Semester I Tahun 2021.

Disamping pemantauan terhadap tindak lanjut temuan SKAI, dilakukan pemantauan *progress* tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan temuan Auditor Eksternal dan Pengawas. Hasil pemantauan komitmen manajemen terhadap temuan Auditor Eksternal dan Pengawas sebagai berikut:

Tindak Lanjut Atas Temuan Auditor Eksternal

No	Lembaga Pemeriksa	∑ Rekomendasi	Tindak Lanjut s.d TW IV/2020			
			Selesai	%	Dalam Pemantauan	%
1	Otoritas Jasa Keuangan	456	435	95,4%	21	4,6%
2	Badan Pemeriksa Keuangan RI	256	229	89,5%	27	10,5%
3	Bank Indonesia	85	85	100%	0	0%
4	KAP Ernst & Young	281	268	95,4%	13	4,6%
Total		1.078	1.017	94,3%	61	5,7%

AKUNTAN PUBLIK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengatur bahwabank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan.

PROSEDUR PENUNJUKKAN AUDIT EKSTERNAL

Prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

1. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS ,dan Tim Pengadaan.
2. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator TimTeknis, Tim Penyusunan HPS ,dan Tim Pengadaan serta bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
3. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Fee Jasa Audit

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Perusahaan

Nama Akuntan Perusahaan:
Drs.Hari Purwantono (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0684)/Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681)

Alamat Kantor:
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 52895000
Fax. (62-21) 52894100

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Publik

Nama Kantor Akuntan Publik:
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)

Alamat Kantor Akuntan Publik:
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2,Lantai 7
Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Telp. (62-21) 52895000
Fax. (62-21) 52894100 www.ey.com/id

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Nama Akuntan Publik	Nama Akuntan	Fee
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	7.300.000.000,-
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	8.200.000.000,-
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	10.700.000.000,-
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	15.523.800.000,-

Fee Jasa Lainnya

Jasa audit lainnya yang digunakan adalah review atas laporan keuangan konsolidasian PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan entitas anak pada 30 Juni 2020 sebesar Rp8.330.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan entitas anak pada 30 September 2020 sebesar Rp13.100.000.000 (tiga belas miliar seratus juta rupiah).

Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan BRI selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuanganonsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

FUNGSI KEPATUHAN

BRI selalu konsisten dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan, *Compliance Division* Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan di kantor wilayah BRI yang berada di bawah Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan Kantor Wilayah serta fungsi kepatuhan Unit Kerja Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi *Compliance Division* Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat *Independent* dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI.

STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN BRI

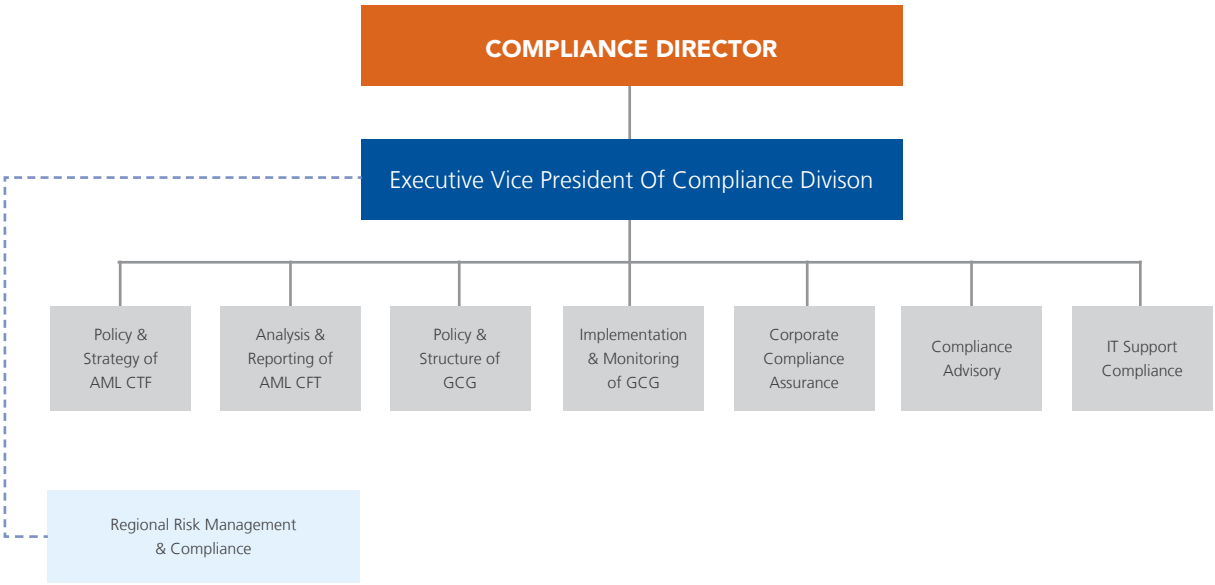

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

Direktur Kepatuhan BRI dijabat oleh R. Wisto Prihadi yang menjabat sejak 18 Februari 2020 (sesuai pengangkatan saat RUPS), menggantikan Azizatun Azhimah yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 2 Septeber 2019.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Bank Umum, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal BRI;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI;
6. Melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

INDEPENDENSI DIREKTUR KEPATUHAN

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
   a. Bisnis dan operasional.
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
   c. Treasury.
   d. Keuangan dan Akuntansi.
   e. Logistik dan pengadaan barang & jasa.
   f. Teknologi dan informasi.
   g. Audit intern.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat stement dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak professional dan objektif.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun sistem-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BRI pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuai kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan *review* (kaji ulang) dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan

b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh insan BRI mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.

c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

PROFIL KEPALA DIVISI KEPATUHAN BRI

RUSLINA HARSONO

Pgs. Kepala Divisi Kepatuhan BRI

Lahir di Bangkalan, 6 Juni 1966. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

Pengalaman Profesional :

1. Kepala Bagian Administrasi Kredit Kantor Wilayah BRI Padang (2011 - 2012)
2. Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah BRI Palembang (2012 - 2013)
3. Kepala Bagian Kebijakan Perkreditan Divisi Kebijakan Risiko Kredit BRI (2013 – 2017)
4. Kepala BagianKebijakan & Metodologi Risiko Kredit Ritel dan Menengah Divisi Kebijakan RIsiko Kredit BRI (2017 – 2018)
5. Vice President Compliance Division BRI (2018 – sekarang)

Pada tahun 2020 menjabat sebagai Pgs. Kepala Divisi Kepatuhan

Training :

1. In House Training Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)
2. Pendidikan dan UjiSertifikasi Manajemen Risiko Level 3 tahun 2019
3. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1 tahun 2019

Sertifikasi:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Level 2, danLevel 3
2. Sertifikasi Kepatuhan Level 1

PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, BRI telah memiliki pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di BRI yang tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*). Ruang lingkup Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) antara lain:

1. Fungsi Kepatuhan Bank dan Ketentuan umum mengenai Jajaran Kepatuhan, diantaranya Independensi Jajaran Kepatuhan, Kewenangan Jajaran Kepatuhan dan Kedudukan Jajaran Kepatuhan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.
3. Pelaporan Fungsi Kepatuhan.

PENDIDIKAN/PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2020, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

1. Pelaksanaan *training*, *short course*, seminar dan/atau *workshop* dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
2. Pelaksanaan *virtual training* kepada jajaran fungsi kepatuhan Kanwil.
3. Pelaksaan sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP).

SERTIFIKASI KEPATUHAN

Selama Tahun 2020, 18 Jajaran Fungsi Kepatuhan BRI telah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan untuk meningkatkan kompetensi jajaran fungsi kepatuhan yang baru.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN 2020

1. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
   BRI telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa di Kantor Pusat BRI.
2. Penilaian Efektifitas Budaya Kepatuhan
   Direktorat Kepatuhan telah memiliki parameter pengukuran efektifitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.
3. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
   Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi perbankan, Bank BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:
   a. Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA).
   b. Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program APU PPT untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teorisme di Sektor Jasa Keuangan.
   c. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.
4. Peningkatan *Awareness*
   Direktorat Kepatuhan melakukan *awareness* terhadap implementasi budaya kepatuhan, implementasi program APU PPT melalui program BRI *E-College* (BRI *Electronic Compliance Skill and Knowledge*) dan *e-learning*.
5. Digitalisasi Proses Bisnis
   Melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk mendukung efisiensi dan perkembangan bisnis melalui pengembangan sistem yang antara lain meliputi:
   a. Pengembangan *Data Base Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism* (AML & CFT) Terintegrasi
   b. Pegembangan sistem pelaporan Go AML.

Fungsi Kepatuhan

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan meliputi:

1. *Review* dan pengkinian kebijakan internal bank dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Identifikasi risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan putusan Direksi tidak menyimpang dari peraturan OJK/ regulator/perundang-undangan yang berlaku melalui pengujian prinsip kehati-hatian.
3. Pengukuran dan pemantauan risiko berdasarkan data Manajemen Insiden atas terjadinya pelanggaran ketentuan.
4. *Monitoring* dan tindak lanjut kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada pihak regulator dan/atau pengawas lainnya yang berwenang.

PELAKSANAAN AKTIVITAS KEPATUHAN LAINNYA

Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian

Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengujian

Merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengujian Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan untuk memastikan kembali bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).

Tanggapan Aspek Kepatuhan

Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta hal lain yang memiliki *issue* terkait dengan risiko kepatuhan.

Resume Kebijakan Eksternal

Baik resume maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.

Analisa Dampak Kebijakan Eksternal

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka untuk memperoleh persetujuan regulator dilakukan secara satu pintu melalui Divisi Kepatuhan.

Pemantauan Komitmen

Pemantauan terhadap komitmen BRI terhadap regulator/otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Divisi Kepatuhan memantau pemenuhan seluruh komitmen dari unit kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko APU dan PPT yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan regulator, Perseroan melakukan Penerapan Program APU dan PPT secara memadai.

DASAR HUKUM

Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Kepala PPATK), dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala Bapeten), Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta (DPPSPM) atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum Dalam DPPSPM.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT).
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Jo. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

(PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/ PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Ketentuan Internal

1. Surat Keputusan Direksi BRI No. PP.01-DIR/KPT/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) BRI.
2. Surat Keputusan Nomor: BP.13-DIR/KPD/05/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) *Customer Due Diligence* (CDD)
3. Surat Edaran Nomor: SE.09-DIR/KPT/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Petunjuk Teknis No. JN.03-KPD/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Aplikasi *Risk Based Approach* (RBA) APU dan PPT.

Pengelola APU-PPT

Penanggung jawab Penerapan Program APU dan PPT dilaksanaan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Kepatuhan KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU-PPT di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU-PPT Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dijabat oleh Staff Kepatuhan Kantor Wilayah, dimana pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan KP BRI.

STRUKTUR ORGANISASI APU-PPT

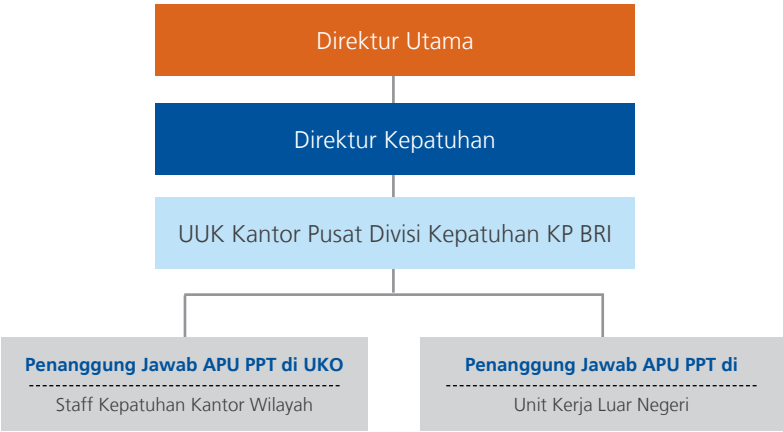

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA APU-PPT

Tugas dan Tanggung Jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL);
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9. Melakukan koordinasi pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
10. Memantau rekening efek dan pelaksanaan transaksi nasabah kustodian;
11. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek;
12. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan regulator;
13. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*;
14. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
15. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan

program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja;
17. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri untuk disampaikan kepada PPATK;
18. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
19. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan
20. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional adalah:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan Tunai.
3. *Memonitor* pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
4. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan Anti *Tipping-Off*.
5. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit kerja operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
6. Menerima, dan memverifikasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
7. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pekerja unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
8. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

SOSIALISASI APU-PPT

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi secara online dengan media Webinar kepada pekerja BRI dan perusahaan anak baik dari jajaran operasional maupun pemasaran terkait dengan materi APU PPT.
2. Pelaksanaan self-learning dengan materi APU PPT selama 2 kali dengan materi *Know Your Customer*(KYC).

IMPLEMENTASI APU-PPT 2020

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   a. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
      - Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
      - Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
      - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
      - Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT;
      - Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
      - Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT;
      - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
      - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
      - Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Divisi Kepatuhan KP BRI atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator;
      - Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti *frontliner*, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.
   b. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
      - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi;
      - Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
      - Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko BRI.
2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
   a. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terkait dengan Nasabah, negara/

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
b. Uji Tuntas Nasabah/ *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk In Customer* (WIC);
c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
d. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
e. Pengkinian dan pemantauan;
f. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
g. Pelaporan kepada PPATK.

3. Pengendalian Intern
a. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT; dan
c. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
a. Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT
b. Aplikasi Penilaian *Risk Based Approach* (RBA) untuk menilai kategori risiko Nasabah dan Unit Kerja Opersional BRI terkaitt APU dan PPT.
c. Sistem APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (TKL).
d. Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
e. Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi.
f. Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer* (WIC).
g. Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) dan *Cash Transaction Report* (CTR) WIC online.
h. Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI wajib melakukan:
Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

PELATIHAN

1. Pelatihan terkait Penerapan Program APU dan PPT sebagai materi wajib (*mandatory*) dalam pelaksanaan pendidikan terhadap pekerja baru di BRI.
2. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui pertemuan tatap muka.
Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan oleh BRI dengan materi tertentu pada setiap tahun. Pada tahun 2020, telah melaksanakan *e-learning Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Dilligent* (CDD).

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO

BRI melakukan pengelolaan risiko secara proaktif dan prudent pada setiap pilar bisnis dan operasional untuk mencapai visi perusahaan "*The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to The Best Talent*". Dalam mengelola bisnis dan operasional perbankan sebagaimana tertuang dalam BRI *Strategic Framework*, diperlukan manajamen risiko dengan kapabilitas "*best in class*" sebagai salah satu pilar *enabler* pencapaian aspirasi BRI. Untuk itu telah disusun BRI Risk Management Framework dengan aspirasi "*Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellent, and Banking Resilience*". Manajemen Risiko hadir di setiap lini bisnis dan operasional perbankan termasuk IT & digital untuk seluruh risiko perbankan dan konglomerasi keuangan sehingga dalam melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian dan monitoring dapat dilakukan secara komprehensif dan terkelola secara baik.

Look Around: "What did we do in 2020?"

Pandemi Covid-19 yang menginfeksi seluruh dunia memberikan pengalaman luar biasa bagi seluruh industri begitu pula pada sektor keuangan dan perbankan. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam merespon peluang dan risiko yang muncul untuk mampu mempertahankan bisnis dan senantiasa tumbuh secara berkelanjutan. Dalam menyediakan jasa dan produk perbankan perusahaan dituntut memperhatikan protoKol kesehatan, keselamatan dan keamaan yang berlaku.

Keterbatasan interaksi sosial secara fisik mengakibatkan pergesaran perilaku masyarakat menjadi *digital minded*. Pertumbuhan transaksi digital perbankan menandai pergesaran perilaku ini sehingga dalam pengelolaan risiko operasional dan digital, BRI secara khusus membentuk Digital and Operational Risk Division. Di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat dan *demand shock* akibat Covid-19 meningkatkan potensi risiko kredit khususnya segmen UMKM. Diperlukan strategi dan pengelolaan risiko portfolio kredit BRI yang baik dan terukur untuk membantu nasabah terdampak covid *survive* dan segera *recover*.

Walaupun terjadi penurunan bisnis pada banyak sector, masih terdapat potensi/ trend positif untuk sektor-sektor tertentu. Sehingga strategi BRI dalam pertumbuhan kredit ialah tetap tumbuh secara sehat dan selektif dengan memperhatikan sektor unggulan, bonafiditas debitur dan *supply chain*nya. Untuk itu dari tahun 2018 BRI telah menyusun *Loan Porfolio Guideline* sebagai panduan dalam mengembangkan bisnis secara *prudent*.

Kondisi market yang tidak pasti dan cendrung *volatile* mengakibatkan *yield enhancement* dan meningkatkan potensi kerugian atas *trading asset*. Memperhatikan hal tersebut telah dibentuk divisi Market, Portfolio & *Enterprise Risk* untuk memperkuan fungsi pengawasan transaksi di *middle office* dan *forward looking of market & lliquidity* termasuk *outlook, stress testing* dan *forecasting*.

Kemudian sebagai bentuk penyelamatan debitur BRI di tengah situasi ini, BRI telah melakukan *mapping* debitur terdampak covid, menetapkan kriteria debitur terdampak covid dan skema restrukturisasinya, serta melakukan restrukturisasi kredit secara masif walaupun hal ini dapat mengakibatkan konstraksi dari sisi pendapatan. Namun demikian BRI tetap berkomitmen dalam mencapai target di 2020 dan bersama-sama dengan insan Briliant, *stakeholder*, kostumer, dan seluruh masayarakat untuk dapat keluar dari krisis ini.

BRI menyadari bahwa diperlukan penguatan dan kepanjangan tangan di kantor-kantor wilayah dalam pengelolaan risiko khususnya di masa pandemi ini, untuk itu telah di bentuk fungsi *Regional Risk Management* (RRM) di seluruh wilayah BRI yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses manajemen risiko unit kerja di wilayahnya.

Fungsi Manajemen Risiko

Look Around: What have been we achieved in 2020?

Atas berbagai kondisi tersebut dan dengan upaya yang telah dilakukan, BRI mampu *survive* di tengah pandemi Covid-19 dengan kinerja keuangan yang masih solid yaitu NPL terjaga di level 2,99% (gross), *recovery income ekstrakomtable* yang berhasil diperoleh mencapai Rp7,42 tirliun Triliun atau masih tumbuh positif sebesar 2,46%, profil risiko Bank yang terjaga di level "*low to moderate*", Penerapan Manajemen risiko terintegrasi di Peringkat Komposit 2 (dua), dan nilai Tingkat Kesehatan Bank yang "sehat". Berbagai pencapaian tersebut merupakan keberhasilan BRI dalam menerapkan manajemen risiko yang proaktif dan *prudent* sesuai dengan aspirasi manajemen risiko BRI yaitu ***Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellent, and Banking Resilience.***

Look Ahead: More Challenges in 2021 and what Risk Management are going to do?

Dengan berbagai pencapaian BRI di tahun 2020 tersebut dan berbekal pengalaman dalam penerapan manajemen risiko yang baik di tahun 2020 membuat apa yang dilakukan BRI dalam menyelamatkan UMKM, pada akhirnya dapat mengubah kesulitan menjadi ketangguhan. Berbagai tantangan yang sama masih akan dihadapi perbankan di tahun 2021. Tantangan tersebut mulai dari pandemic covid yang masih ada, ruang pertumbuhan kredit yang masih terbatas, portofolio restrukturisasi kredit yang masih tinggi, kecepatan pertumbuhan transaksi digital yang meningkatkan profil *digital risk*, volatilitas market, dan pengolalaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan anak perusahaan.

Kedepan manajemen risiko BRI akan tetap proaktif dan *prudent* dengan keterlibatan manajemen risiko disetiap lini bisnis dan operasional sehinga dapat men-*support* pertumbuhan yang berkelanjutan melalui *asset quality specific business and specific risk management*, serta *balancing business and risk policy*. Manajemen risiko BRI juga akan selalu mengembangkan diri melalui *capacity building* di seluruh jajaran *risk management* dan meningkatkan *risk awareness* diseluruh insan Brilliant.

Pengembangan teknologi untuk mengelola risiko juga dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan *monitoring*. Selain itu BRI juga memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan penerapan *sustainable finance* untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Perbankan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik dan melakukan inovasi produk/layanan lingkungan hidup yang ramah lingkungan hidup; Selain itu perbankan juga agar lebih ***pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment***.

Sebagai perusahaan perbankan tarbesar dan tersebar di indonesia, BRI telah mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* di seluruh lingkungan perusahaan, tidak terkecuali di anak perusahaan baik yang bergerak di sektor perbankan maupun non perbankan. BRI sebagai Entitas Utama menyadari bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi juga oleh eksposur risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perusahaan Anak. Terkait hal tersebut, BRI telah mengimplementasikan sistem konsolidasi/integrasi manajemen risiko dengan Perusahaan Anak, termasuk Perusahaan Anak yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. BRI terus membangun *Integrated Risk Management* dengan memperbaiki akuntabilitas pada manajemen risiko terintegrasi mulai dari kebijakan, prosedur, penetapan limit (*Risk Appetite Statement*, Profil Risiko dan *Key Risk Indicator* di perusahaan anak) dan melakukan Forum *Risk Management* Induk dan anak perusahaan secara periodik. Adapun Perusahaan Anak Bank BRI adalah Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, BRI Finance, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Life, BRI Ventures, BRI Insurance, dan BRI Remittance.

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal didukung satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/ POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Surat Keputusan Nokep: 72 DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating)* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terinterigrasi (SK Direksi BRI Nokep: S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), dan telah dikaji ulang pada tahun 2019 sesuai dengan Surat Kaji Ulang KUMR Nomor B.1598-DIR/EMP/10/2019, Tanggal 31 Oktober 2019.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
   a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
   b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
   c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
   d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.
   e. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Enterprise Risk Management

Fungsi Manajemen Risiko

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Prinsip dan Penerapan Manajemen Risiko

Pilar 1 Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 21 Januari 2020, 5 Mei 2020, 28 Juli 2020 dan 3 November 2020.

Pengawasan Direksi

1. *Risk Management Committee* dilaksanakan secara triwulanan dan *Risk Management Committee* Terintegrasi telah dilaksanakan selama periode 2020 meliputi :
   a. RMC I tanggal 18 Maret 2020
   b. RMC II tanggal 11 Juni 2020
   c. RMC III tanggal 13 Agustus 2020
   d. RMC IV tanggal 4 November 2020
   e. RMCT I tanggal 6 Mei 2020
   f. RMCT IItanggal 29 Desember 2020

2. *Forum* ALCO terkait dengan pembahasan ekonomi makro serta kondisi dan pencapaian *asset & liability* yang dilakukan minimal 1 bulan sekali atau sebanyak 12 kali selama periode tahun 2020.
   a. ALCO I tanggal 20 Januari 2020
   b. ALCO II tanggal 21 Februari 2020
   c. ALCO III tanggal 20 Maret 2020
   d. ALCO IV tanggal 16 April 2020
   e. ALCO V tanggal 15 Mei 2020
   f. ALCO VI tanggal 18 Juni 2020
   g. ALCO VII tanggal 16 Juli 2020
   h. ALCO VIII tanggal 13 Agustus 2020
   i. ALCO IX tanggal 16 September 2020
   j. ALCO X tanggal 14 Oktober 2020
   k. ALCO XI tanggal 12 November 2020
   l. ALCO XII tanggal 10 Desember 2020

3. *Business Performance Review* (BPR) kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BRI secara nasional, kinerja seluruh unit kerja bisnis (Kantor Wilayah dan KCK serta seluruh Divisi Bisnis Kantor Pusat) serta program-program kerja strategis lainnya yang dilakukan secara bulanan dalam rangka pencapaian kinerja yang melibatkan Direksi, SEVP, Pemimpin Wilayah, Inspekstur, Kepala Divisi dan Kepala Desk. Pelaksanaan BPR selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:
   a. BPR I tanggal 18 Maret 2020
   b. BPR II tanggal 15 April 2020
   c. BPR IV tanggal 13 Mei 2020
   d. BPR V tanggal 16 Juni 2020
   e. BPR VI tanggal 15 Juli 2020
   f. BPR VII tanggal 14 Agustus 2020
   g. BPR VII tanggal 15 September 2020
   h. BPR VIII tanggal 15 Oktober 2020
   i. BPR IX tanggal 11 November 2020
   j. BPR X tanggal 8 Desember 2020

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit (SEBI 15/15)

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan yang ditetapkan dalam Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk.

Pilar 3 Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaporan Manajemen Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan.
b. Laporan memuat informasi mengenai total eksposur risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan limit, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.

2. Manajemen Data Risiko
   Manajemen data risiko merupakan pengelolaan data risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersediaan, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen Risiko.

Sistem Informasi diantaranya meliputi: BRINETS, Cognos, BRISIM, *Dashboard Loan Portfolio Guideline* (LPG), BRIOPRA, Dashboard Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan *Dashboard* Profil Risiko Per Kantor Wilayah, *Early Warning Indicator,* dan *Dashboard Employee Risk Profile*.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI diterapkan dengan menggunakan konsep *Three Line of Defense,* dengan rincian sebagai berikut:

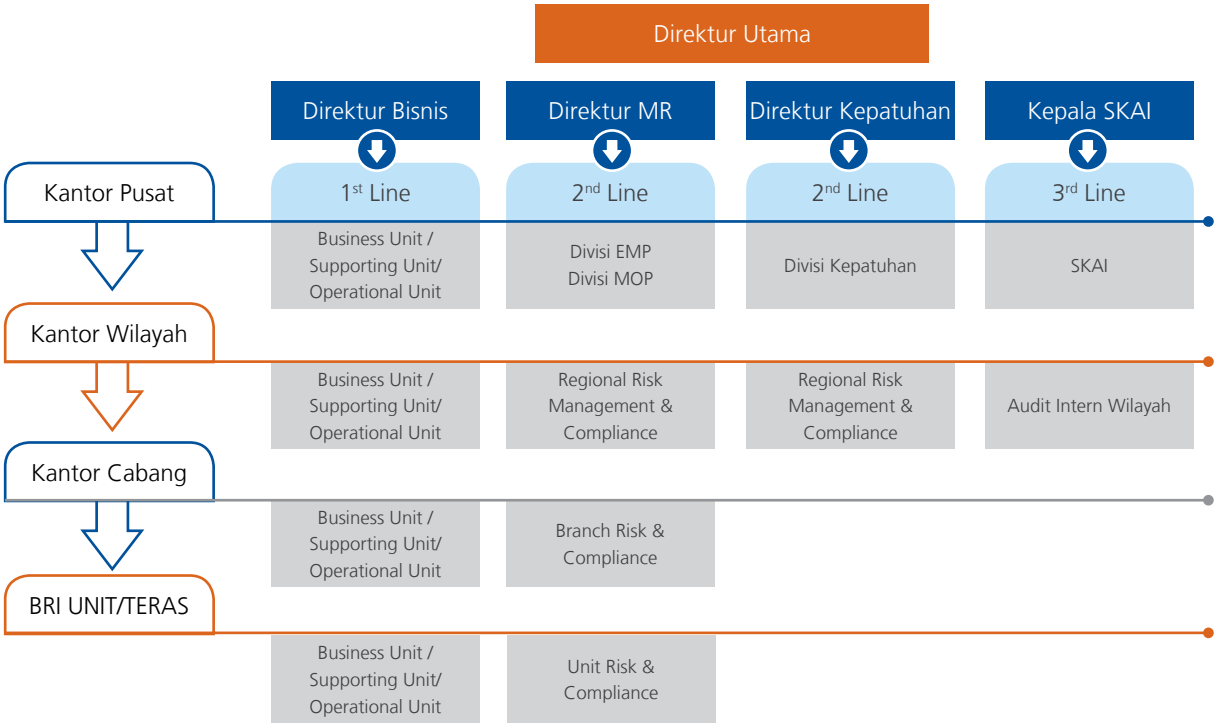

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI

Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi meliputi:

1. Ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi BRI baik risiko keseluruhan maupun per jenis risiko.
2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Ketersediaan informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan BRI sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Fungsi Manajemen Risiko

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2020, struktur fungsi Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Manajemen Risiko dengan rincian data sebagai berikut :

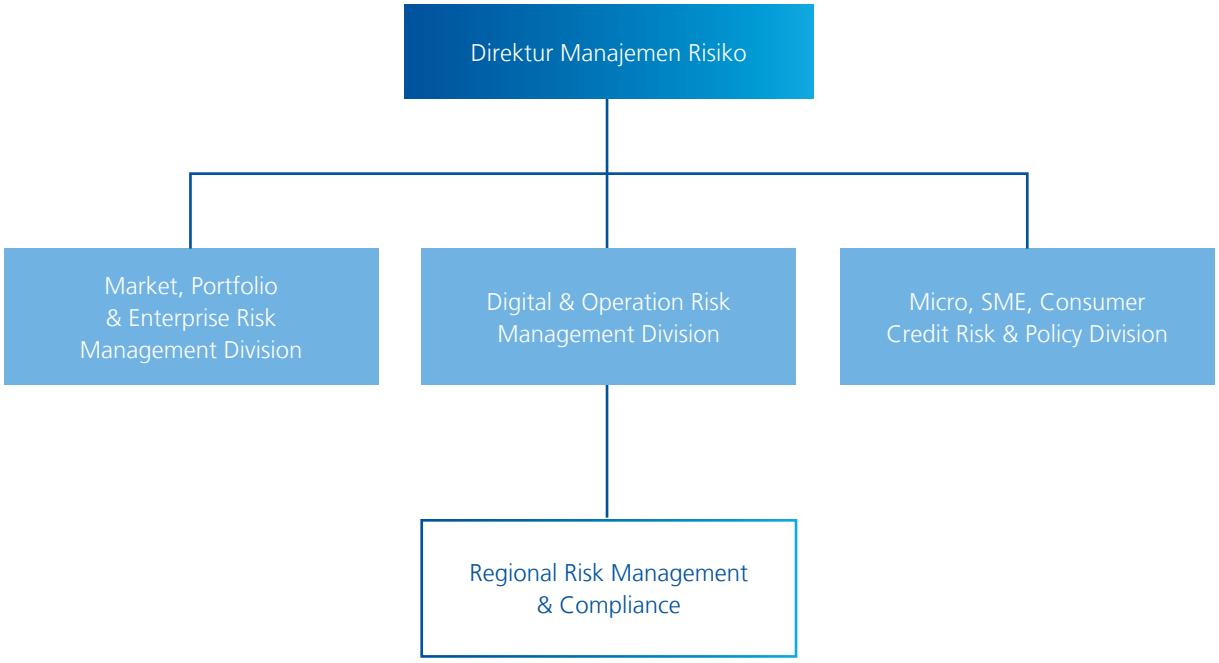

*Struktur Organisasi MOP telah berubah menjadi Digital & Operation Risk Management Division terdiri dari Operational Risk Management Department, Digital Risk Management Department.

Operational Risk Management terdiri dari *Operational Risk & Methodology Team*, *Operational Risk Implementation Team, Business Continuity Management & K3 Policy Team.*

Digital Risk Management Department terdiri dari *Digital Strategy & Governance Risk Team, Digital Application Management & Operation Risk Team, Digital Infrastructure & Operation Risk Team, Transaction Banking Risk Team, Digital Application Management & Operation Risk Team.*

PROFIL PEMIMPIN UNIT KERJA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

KRISTINA LESTARI N.

EVP Market, Portofolio & Enterprise Risk Management Division

Lahir di Jakarta 5 Maret 1965 lulusan S 1 Fakultas Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor tahun 1988,dan S2 MBA J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, Alanta, Georgia - USA 1998, serta S3 Doktor Manajemen Stratejik, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2017.

Pengalaman Profesional :

1. Wakil Kepala Divisi Bisnis Korporasi BRI
2. WakilPimpinan Wilayah Bisnis, Kantor Wilayah BRI Bandung
3. Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis, KantorWilayah BRI Jakarta 3
4. Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1
5. Kepala Divisi Transaksional Banking BRI
6. Direktur Keuangan, Human Capital dan Logistik PT Bringin Gigantara
7. Kepala Divisi Corporate Development dan Strategy BRI

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Market, *Portofolio &Enterprise Risk Management* dan sebagai ahli tata kelola Risiko Terintegrasi

Training :

1. Corporate Credit and Cash Flow Analysis, Euromoney, London UK
2. Valuation, Euromoney, Dubai, United Emirat Arab
3. SIBOS Global Payment, Toronto, Canada
4. Sespibank LPPI Jakarta

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Level 2, Level 3 dan Level 4 di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP
2. Sertifikasi *General Banking* level 3, LPPI
3. Sertifikasi *Certified Risk Governance Proffesional* (CRGP)

Fungsi Manajemen Risiko

BENNY IMAM SAFII

Kepala Digital & Operation Risk Management Division

Lahir di Surabaya, 19 Juli 1966, memperoleh gelar S1 Sarjana Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1990 dan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada tahun 2008

Pengalaman Profesional

1. Kepala BRI Unit Ampera, Kanca Jakarta Krekot
2. Marketing and Lending Officer Kanca BRI Kebumen
3. Pemimpin Area Mikro BRI Pamekasan
4. Kepala Bagian Pemasaran Divisi Consumer Banking BRI
5. Kepala Bagian Pemasaran Dana dan Jasa Kantor Cabang Khusus BRI
6. Wakil Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap BRI
7. Wakil Inspektur Kantor Inspeksi BRI Yogyakarta
8. Wakil Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta 3
9. Pj. Inspektur BRI Padang
10. Inspektur BRI Medan
11. Inspektur BRI Jakarta 1

Saat ini menjabat Kepala Digital & Operation Risk Management Division BRI sejak tanggal 16 Juni 2020.

Training yang diikuti

1. Seminar *Advance Credit Risk Management*
2. Pelatihan Peningkatan Wawasan Global Pengelola/Analis Kredit
3. Leadership: Senior Executive Forum Series VIII
4. Fundamentals of Internal Auditing
5. Pendidikan dan Uji Sertfikasi QIA (Qualified Internal Auditor) Level Pra Manajerial dan Manajerial
6. Pendidikan Executive Vice President (EVP) Tahun 2019 "Becoming A Leader Of Leaders : Pathways For Success"
7. Executive Education Program: Value Creation and Growth Through Innovative Corporate Finance
8. Profesional Coach Certification Program

Sertifikasi

1. Pendidikan PCP Madya 3 Angkatan 16/2003
2. Pendidikan Internal Audit Tingkat Pra Manajerial
3. Pendidikan Internal Audit Tingkat Manajerial
4. Sespibank Angkatan 67
5. Sertifikasi Perbankan Umum
6. Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Bank Level 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh risk taking unit selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Pada triwulan IV 2020 peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Berikut tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko:

1. Penyusunan metodologi manajemen risiko *enterprise*, manajemen risiko operasional, manajemen risiko pasar, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko terintegrasi
2. Penyusunan dan analisa profil risiko, tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, *credit risk rating & scoring* dan validasi metodologi risiko kredit
3. Penyusunan *Risk Appetite Statement* (RAS)
4. Penyusunan *Recovery Plan* (Rencana Aksi)
5. Penyusunan dan analisa *loan portfolio guideline* (LPG), *sustainability finance, risk based pricing,* dan *stress testing*
6. Menyusun, menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan/ketentuan/prosedur dan metodologi proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian termasuk validasi data, strategi manajemen risiko, profil risiko, *stress testing*, dan memantau risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya) Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/ *Bussiness Continuity Mananagement* (BCM)
7. Menilai kecukupan pengelolalaan risiko atas produk dan/atau aktiva baru yang diusulkan unit kerja
8. Penyelenggaraan *Risk Management Comitee* (RMC) individu dan terintegrasi

PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO PENDIDIKAN/PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2020 sebagai berikut:

1. IHT Special Request BRC : Leadership & Communication
2. Beauty Contest Presentasi Pendidikan In House Training (IHT) Spesial Request Pembekalan Risk & Compliance Officer (RCO): Leadership dan Communication Tahun 2020
3. IHT Special Request Enhancement Electronic - Compliance Skill and Knowledge Upgrade (E-COLLEGE) Tahun 2020
4. BRILiaN Shine dengan tema "Agile Leadership For The New Normal"
5. BRILiaN Shine dengan tema "Peringatan Hari Lahir Pancasila : Pancasila di Mata Generasi Muda Indonesia"
6. BSMR: Sertifikasi Risk Management Updates
7. Pelatihan Trainer (Training On Trainers) Manajemen Risiko Tingkat II
8. Pendidikan Training Of Trainer (TOT) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Tahun 2020
9. Pendidikan Training Of Trainer (TOT) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Tahun 2020
10. Pendidikan Special Request TOT Kebijakan Human Capital
11. Pendidikan BRILiaN Leader Development Program (BLDP)-1 Tahun 2020
12. Pendidikan BRILiaN Leader Development Program (BLDP)-2 Tahun 2020
13. Trainning Strategic Project Management
14. BRILiaN Shine dengan tema: You Cannot Lie To Poppy "Membaca Ekspresi Wajah dan Bahasa Tubuh"
15. BRILIaN Shine dengan tema "best practice'/ principles for 'strategic measurement in a digital transformation era" untuk BRI dan BRI Grup"
16. Pendidikan Special Request Permodelan Ekonometrika Divisi Treasury Business Tahun 2020
17. Training Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)
18. Sertifikasi General Banking 1

Fungsi Manajemen Risiko

19. Seminar Online "The Finance Forum Masih Amankah Menyimpan Uang di Bank: Meminimalisir Risiko Operasional & Risiko Reputasi"
20. Seminar Online "Mitigasi Risiko Bisnis Dampak Krisis Covid-19"
21. Training Risk Beyond: Reimagine the Future
22. Training Certified Associate in Project Management (CAPM)
23. Refreshment Sertifikasi Management Risiko "Peluang dan Tantangan Penyehatan Portofolio Bisnis Utama Perbankan Pada Masa Pemulihan Ekonomi Indonesia Untuk Keluar Dari Dampak Covid-19"
24. Pendidikan IHT Data Analytics Training Program Divisi EDM
25. Pendidikan dan Ujian Certified Fraud Examiner (CFE)
26. Pengantar Manajemen Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko.
27. Basel Capital Requirement, Covering Operational Credit & Market Risk Capital and Internal Capital Assessment Adequacy Process (ICAAP)
28. Aligning Business with Risks and Compliance
29. Management Treasury Risk
30. Strategi, Peluang dan Risiko Perusahaan - Transformasi Digital
31. Derivatif Market Dynamic
32. Implementing GRC
33. Risk Control Self Assessment
34. Aligning Business Strategy with Governance, Risk & Compliance
35. Attachment Manajemen Portfolio & Instrumen Keuangan untk Banking Book, Pasar Uang & Likuiditas BNP Paribas Singapore
36. Pendidikan Special Request In House Training Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)
37. GRI Standard Certified Training Sustainable Report
38. ISO 31000 Enterprise Risk Management Implementing
39. Oportunity & Risk In Digital Banking

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Sertifikasi dan Pejabat yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Level Sertifikasi | Certification Levels	Peserta | Participants
1	1	409
2	2	205
3	3	31
4	4	18
TOTAL		663

JENIS RISIKO DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 Risiko yang dikelola BRI dalam Konglomerasi Keuangan yaitu:

1. RISIKO KREDIT
   Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Proses putusan kredit diatas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris
b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko

c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan, khususnya risiko kredit.
d. Pelaporan profil risiko triwulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Ketentuan *Loan Portfolio Guideline* (LPG)
b. Penentuan limit risiko di level korporat (*risk appetite statement*) mengenai NPL, dan NPL Coverage
c. Ketentuan PDWK berjenjang

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi risiko kredit dilakukan menggunakan sistem *Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (*Credit Risk Rating/ Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur *existing* BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau *review* atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode *back testing*.

b. Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan internal model menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengembangan Internal Rating Based Approach (IRBA). Selain itu, serangkaian Stress Test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi *stress*. *Stress test* tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan *guidance* melalui *Loan Portfolio Guideline (LPG),* sehingga dengan adanya LPG ini akan membuat pemberian kredit menjadi lebih terarah sesuai potensi masing-masing unit kerja.

c. Pemantauan risiko kredit dilakukan melalui proses *monitoring portofolio* kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja *monitoring* risiko kredit di kantor pusat. *Monitoring portofolio* dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, CL, komposisi *Loan at Risk* (LAR), *Credit Cost*, NPL *Coverage Ratio*, PH, *Recovery Income*, dan *Recovery Rate.*

d. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui:
1). Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa Agunan, dimana harus mematuhi ketentuan *minimum loan to value*atau *minimum coverage* terhadap pinjaman
2). Penilaian agunan menjadi lebih terarah melalui aplikasi *Collateral Data Management* (CODAM)
3). Risiko kredit menjadi lebih terkendali melalui *sustainable finance (Green Banking)* yang mengintegrasikan risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola ke dalam aspek ekonomi/bisnis yang selama ini telah berlangsung, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat memperhatikan praktek bisnis yang tidak merusak lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan tata kelola yang baik
4). Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi
5). Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan
6). Prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

a. *Four Eyes Principles*: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
b. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi

Fungsi Manajemen Risiko

c. Penggunaan aplikasi *Loan Approval System* (LAS) yang meliputi identifikasi risko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
d. Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portofolio kredit per segmen.
e. Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

2. RISIKO PASAR

Merupakan risiko kurugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan kondisi pasar. Variabel pasar yang dikelola BRI terdiri dari suku bunga, nilai tukar termasuk transaksi derivatif dan perubahan harga *option*.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko.
b. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dilaksanakan setiap triwulan
c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
d. Forum ALCO sebagai bentuk pengawasan aktif yang dilaksanakan setiap bulan
e. Pelaporan *Dashboard* Profil Risiko Pasar dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (PPPMRP)
b. Perumusan Kode Etik Pasar (*Market Code of Conduct*)
c. Kebijakan, prosedur, dan *limit* risiko pasar yang tertuang dalam Limit Profil Risiko Pasar dan Limit Aktivitas *Treasury* (termasuk Unit Kerja Luar Negeri)
d. Penetapan *Market Risk Conversion Factor* (MRCF)
e. Kebijakan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB)
f. Kebijakan terkait aktivitas *Bisnis Treasury lainnya* melalui Pedoman Pelaksanaan *Aktivitas Treasury, ALM Policy,* Surat Edaran terkait Lindung Nilai *(Hedging)*

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi
   1. Perhitungan Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar menggunakan metode standar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* dan *Banking Book*. Untuk Instrumen yang diklasifikasikan sebagai *Banking Book*, BRI telah menyusun kebijakan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) yang telah disesuakan dengan regulator.
   2. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
      a). Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap penerbit efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
      b). Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
   3. Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN).
   4. Faktor Risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam perhitungan

Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) yaitu :

a). Repricing Risk yaitu Risiko kerugian yang disebabkan adanya perbedaan waktu antara *repricing* aset dan *repricing* liabilitas apabila terjadi perubahan suku bunga.

b). Basis *Risk*

c). Basis risk adalah risiko kerugian karena penggunaan indeks suku bunga yang berbeda antara aktiva dan passiva.

d). Option Risk

e). Option Risk merupakan Risiko yang muncul dari fitur opsi (*option*) posisi derivatif atau komponen pilihan (*optional*) yang melekat pada sebagian besar aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif yang dapat mengubah tingkat dan waktu dari arus kas.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

a). Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.

b). Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial.

c). Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan *arbitrase (locking in arbitrage profit*).

d). Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options,* dan *Forward Rate Agreements*/FRAs.

e). Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan *Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/ Securities Lending*).

f). Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan banking book yang terekspos risiko nilai tukar.

b. Pengukuran

1. Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi *Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII) secara berkala atau setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil *maturity* surat berharga.
2. Valuasi *portofolio trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari *instrument* yang diperdagangkan secara aktif (*mark to market*). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).
3. Melakukan *stress testing* risiko pasar secara berkala atau sesuai dengan keadaan pasar

c. Pemantauan dan Pengendalian

Dalam melakukan proses manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum *Asset & Liability Committee* (ALCO), *Risk Management Committee* (RMC) serta laporan eksposur risiko pasar melalui dashboard profil risiko pasar.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

a. Pemisahan fungsi *front, middle and back office*.

Fungsi manajemen risiko pasar terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi Bisnis *Treasury*), *middle office* (Divisi MOP), dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan sebagai berikut:

Fungsi Manajemen Risiko

1. Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
2. Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau *limit* risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM).
3. Jajaran *back office* melakukan settlement transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan *limit* transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b. BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* and *market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office, middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit nominal transaksi dealer, limit open position, Limit Uncommited Credit Line (UCL), cut loss limit, stop loss limit dan* limit lainnya. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.

c. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Merupakan risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likudi berkualitas tinggi.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pelaksanaan Rapat ad-hoc mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko.
c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
d. Pelaksanaan forum ALCO setiap bulan
e. Pelaporan hasil *monitoring* profil risiko likuiditas dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Tersedianya kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
b. Tersedianya Kebijakan pengelolaan likuiditas yaitu ALM Policy, SE Pengelolaan Risiko Likuiditas, Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Treasury, dan BPO *Treasury*.
c. Petunjuk teknis dan penentuan parameter *limit* risiko *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
d. Petunjuk teknis dan penentuan parameter *limit* risiko *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
e. Penetapan parameter Limit Profil Risiko Likuiditas

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui *dashboard* profil likuiditas harian.
b. Pengukuran risiko likuiditas secara berkala dengan menggunakan proyeksi arus kas, profil maturitas, dan rasio-rasio likuiditas
c. Pengendalian risiko melalui Protokol *liquidity contingency plan* dan pelaksanaan uji coba secara berkala
d. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

a. Sistem *monitoring* posisi likuiditas harian melalui *Dashboard* Profil Risiko Likuiditas
b. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.
c. Evaluasi dan Analisis Strategi Pendanaan yang dilakukan melalui Forum ALCO dan kajian-kajian risiko likuiditas
d. Penetapan kewenangan pejabat dalam melakukan aktivitas pengelolaan likuiditas

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Kejadian Risiko Operasional merupakan kejadian risiko yang melekat pada setiap proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank dan dapat memicu terjadia Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko lainnya apabila tidak dikelola dengan baik.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui Pelaksanaan forum *Risk Management Committee* (RMC) triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan, dalam rangka membahas potensi kejadian risiko, efektifitas kontrol, tindak lanjut, dan mitigasi risiko. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut apabila terjadi pelampauan limit Risiko.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kelancaran aktivitas operasional dan bisnis Bank didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap produk dan aktivitas Bank, termasuk penetapan Limit approval untuk transaksi yang diberikan berjenjang. Pengelolaan Risiko Operasional berpedoman *Risk Appetite Statement* dan limit Risiko yang telah ditetapkan untuk setiap parameter Risiko Operasional.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui penetapan risk issue di setiap aktivitas fungsional Bank yang dilakukan masing-masing Unit Kerja selaku *Risk Owner*.
b. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan baik terhadap historis kerugian atas Risiko Operasional maupun terhadap *predictive risk* ke depan.
c. Pemantauan profil risiko dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja selaku *Risk Owner* terhadap *Key Risk Indicator* dan *Dashboard* Pemantauan Risiko di setiap aktivitas fungsional Bank yang menjadi tanggung jawabnya.
d. Pengendalian Risiko dilakukan antara lain melalui:
   - Penetapan dan *monitoring* Rencana Tindak Lanjut atas setiap kejadian Risiko Operasional
   - *Risk Self Assessment* atas setiap produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh *Product Owner* dan Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko untuk setiap produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   - Protokol *Business Continuity Management* untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Tim Manajemen Krisis (TMK) berperan dan bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam kondisi bencana. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yang meliputi TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, dan TMK Kantor Cabang.

   Dalam rangka mendukung penerapan proses manajemen risiko, BRI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional melalui aplikasi BRIOPRA, dengan cakupan meliputi:
e. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   Merupakan Risk & Control Library atas Risiko Operasional, sekaligus menampilkan Profil Predictive Risk Risiko Operasional di setiap Unit Kerja.
f. Manajemen Insiden (MI)/ *Loss Event Database* (LED)
   Merupakan database insiden/kerugian Risiko Operasional yang bertujuan untuk mengelola Risiko Operasional yang dihadapi beserta pengelolaannya melalui dokumentasi dan pemantauan progress pelaksanaan Rencana Perbaikan yang dilakukan. Sistem Informasi ini juga merupakan sumber data dalam mensimulasikan beban modal untuk Risiko Operasional.
g. *Key Risk Indicator* (KRI)
   Merupakan *Dashboard* Pemantauan Risiko Operasional yang terdapat di setiap Unit Kerja yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi Risiko.

Fungsi Manajemen Risiko

h. Forum Manajemen Risiko
Merupakan dokumentasi atas pembahasan identifikasi, pecegahan, dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja selaku *Risk Owner*.
i. Maturitas Penerapan Manajemen Risiko
Merupakan *tools* untuk melakukan *Risk Self Assessment* terhadap tingkat Maturitas penerapan Manajemen Risiko Unit Kerja.
j. Dashboard Mobile
Merupakan *Dashboard* Profil Risiko Unit Kerja atas hasil pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Operasional.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal Risiko Operasional BRI dilakukan melalui, antara lain:

a. Pemisahan fungsi *Maker-Checker-Signer* dalam aktifitas operasional perbankan, dimana approval sebagian besar proses operasional telah *embedded* dalam *system Core Banking*, *Asset Management* maupun HR MIS.
b. Pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin
c. Kaji ulang terhadap Penerapan Manajemen Risiko Operasional secara rutin.

5. RISIKO KEPATUHAN

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan, antara lain:

a. Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*)
b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terhadap Rencana Kebijakan dan/ atau Keputusan BRI oleh Direktur Kepatuhan dan Jajaran Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
c. Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja
d. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
e. Kebijakan tentang Benturan Kepentingan
f. Kebijakan tentang Kode Etik
g. Kebijakan tentang Program Pengendalian Gratifikasi
h. Kebijakan tentang *Whistleblowing System*
i. Divisi Kepatuhan sebagai koordinator risiko kepatuhan melakukan uji prinsip kehati-hatian terhadap seluruh kebijakan internal BRI yang ditetapkan oleh Direksi
j. Parameter dan limit risiko hukum telah ditetapkan dan di-*review* secara berkala setiap tahun

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Melakukan identifikasi risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah berdasarkan kompilasi dari UKO, kepada Divisi Kepatuhan
b. Proses manajemen risiko kepatuhan didukung dengan sistem informasi yang memadai antara lain:
c. Aplikasi AML (*Anti Money Laundering*) digunakan untuk *monitoring suspicious transaction*.
d. Aplikasi otomasi Pengujian Kepatuhan digunakan untuk melakukan proses pengujian dan *monitoring progress* pengujian
e. Aplikasi GCG Online digunakan untuk pelaporan terhadap komitmen, gratifikasi, kode etik, benturan kepentingan dan *annual disclosure* oleh Unit Kerja.
f. Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT.
g. Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.
h. Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengelola risiko kepatuhan memiliki kompetensi yang memadai dan mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan level jabatan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang *independent* (*independent review*) oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan. Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

6. RISIKO HUKUM

Merupakan risiko yang menyebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan karena adanya tuntutan hukum, dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui Pelaksanaan forum *Risk Management Committee (*RMC) triwulanan yang dapat berupa pembahasan mengenai kasus hukum yang material serta pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya. Selain itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris juga dilakukan melalui Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Divisi Hukum telah menyusun Pedoman Hukum yang disosialisasikan ke seluruh Unit Kerja.
b. Kewenangan pendampingan kasus hukum BRI telah diatur menjadi kewenangan Divisi Hukum Kantor Pusat dan *Legal Officer* di Kantor Wilayah.
c. Parameter dan limit risiko hukum telah ditetapkan dan di-*review* secara berkala setiap tahun

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
b. Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Opersional di Indonesia dilakukan oleh *Legal Officer* di Kantor Wilayah melalui mekasnisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
c. *Legal Officer* di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja Operasional.
d. Sistem Informasi Risiko Hukum dipantau oleh Divisi Hukum dan *Legal Officer* Kantor Wilayah melalui Aplikasi *Legal Database*.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Divisi Hukum secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

a. Divisi Hukum sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
b. Divisi Hukum memberikan advis/ opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/ agreement antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/ agreement ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
c. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai
d. Divisi Hukum bekerja sama dengan *legal Officer* (LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
e. Divisi hukum menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
f. Pembinaan staf pada Unit Kerja Operasional (UKO) di Kantor Wilayah dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam

Fungsi Manajemen Risiko

mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.

g. *Legal Officer* (LO) di Kantor Wilayah memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Hukum.
h. Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Hukum mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi DOR terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil risiko
l. Kaji ulang terhadap Penerapan Manajemen Risiko Hukum dilakukan secara rutin.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Divisi Hukum telah mengeluarkan Kompilasi *Resume* ketentuan yang dikeluarkan Divisi Hukum. Kompilasi tersebut memuat resume ketentuan/ panduan yang dikeluarkan oleh Divisi Hukum yang meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, Legal Manual dan Buku Saku Hukum. Kompilasi tsb dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja operasional untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi BRI dari risiko hukum.

7. RISIKO STRATEJIK

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, monitoring pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulanan.

Materi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi *Corporate Development and Strategy* dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Penyelenggaraan *Joint Planning session* pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat.
b. Penyelenggaraan Workshop Penyelarasan (*Alignment*) Rencana program kerja strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.
c. Penerapan *Performance Management* BRI dengan pendekatan *Balanced Scorecard*, melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.
d. *Monitoring Strategic Initiatives* Perusahaan oleh Unit Kerja *Project Management Office.Strategic Initiatives* yang dimaksud adalah program kerja non rutin yang bersifat sangat strategis dan *critical*, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.
e. Pembentukan Tim *Corporate Plan* dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022.
f. Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & *Performance*

Management yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.

g. *Monitoring* dan *review* pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi *Corporate Development and Strategy* secara berkala. *Review* juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih *behind schedule* akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyelarasan/akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan *support*. Penyelarasan dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi *Corporate Development and Strategy.*

8. RISIKO REPUTASI

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi beserta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Corporate Secretary Division dengan melihat jumlah pemberitaan negative terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, *call center* dan *rating* perusahaan.
b. Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.
c. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Corporate Secretary Division yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan *negative* di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
d. Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Seksi Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
e. Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Corporate Secretary Division melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan Divisi LCC dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan *negative* dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.
f. Parameter dan limit risiko reputasi telah ditetapkan dan di-*review* secara berkala setiap tahun

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang *independent* (*independent review*) oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi.

9. RISIKO TRANSAKSI INTRA GRUP

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Fungsi Manajemen Risiko

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Comitte* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko *Intra-Group* dan Kebijakan Risiko I*ntra-Group* dalam Konglomerasi Keuangan BRI
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelakasanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko *Intra-Group*.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi :

1. Surat Keputusan Nokep : DIR 313 – DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Perusahaan Anak.
2. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero),Tbk.
3. Surat Keputusan *Risk Management Committe* Nokep : 807 – DIR/CDS/11/2019 tanggal 26 November 2019.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko *Intra-Group* secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Pengukuran Risiko *Inheren Intra-Group* dan Kualitas Penerapan ManajemenRisiko *Intra-Group* melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko *Intra-Group* dan rencana tindak lanjutnya
4. Proses manajemen risiko transaksi *Intra-grup* memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi *intra-grup* telah ditunjuk Divisi *Investment Service* sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

1. Efektivitas budaya Sadar Risiko *Intra-Group* pada Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Intra-Group* oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

10. RISIKO ASURANSI

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Comitte* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelakasanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi :

1. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero),Tbk.
2. Surat Keputusan no 807- DIR/CDS/11/2019 tentang *Risk Management Comitte* (RMC)

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Pengukuran Risiko Inheren Asuransi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

1. Efektivitas budaya Sadar Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan BRI
2. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

TARGET DAN PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO 2020

Kegiatan Kerja Program Kerja Risiko

1. Penyusunan *Risk Appetite Statement* (RAS)
   Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan limit Risiko BRI yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengendalian Risiko secara efektif. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BRI secara keseluruhan.

   Risk Appetite ditetapkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidak toleranan (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

   Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

2. Penyusunan *Recovery Plan*
   Sebagai salah satu Bank yang telah ditunjuk sebagai *Domestic-Systemically Important Banks* (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.

   Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat berbagai mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki

Fungsi Manajemen Risiko

kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank-bank Sistemik.

Dalam Gambaran Umum Bank, BRI telah melakukan analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan *scorecard* materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan lini bisnis, peringkat perusahaan anak dan jaringan kantor. Untuk keterkaitan usaha eksternal, BRI melakukan analisis berdasarkan aspek (1) *Intra-financial system assets,* (2) *Intra-financial system liabilities*, dan (3) *securities outstanding* serta 10 (Sepuluh) *counterpart* signifikan (Obligor, Deposan, *Treasury Counterparties*) sesuai dengan *common practice* yang ada. Untuk analisis skenario dampak perubahan sistemik, BRI melakukan aktivitas *Stress Testing* yang dibagi ke dalam 2 (dua) bagian skenario yaitu skenario *Idiosyncratic* serta skenario *Market-wide*. Untuk skenario *Idiosyncratic* BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario *Market-wide,* BRI menggunakan *Regulatory Stress Testing Financial Stress Assessment* Program (atau disingkat dengan FSAP) berdasarkan skenario yang telah ditetapkan oleh FSAP sebagai representasi atas kondisi krisis yang dapat terjadi.

3. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
   Penerapan proses Manajemen Risiko atas setiap rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru (PAB) di BRI dilakukan melalui pelaksanaan *Risk Self Assessment* PAB oleh *Product Owner* dan dimintakan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Direktur Manajemen Risiko BRI dalam rangka mendapatkan persetujuan penilaian kecukupan pengelolaan risiko PAB oleh SKMR.

4. Implementasi Budaya Sadar Risiko
   Penerapan Budaya Sadar Risiko mencerminkan nilai-nilai serta komitmen Direksi BRI dalam rangka peningkatan kesadaran pekerja BRI terhadap pengelolaan risiko. Elemen Budaya Sadar Risiko adalah aspek-aspek dasar Budaya Sadar Risiko yang mendasari penerapan Budaya Sadar Risiko yang terdiri dari; Komitmen, Manajemen Kinerja, Tata kelola Risiko, Komunikasi, Pelatihan dan Pengembangan, Pelaporan dan Pemantauan.

   Budaya Sadar Risiko dimulai dari adanya komitmen manajemen yang tertuang dalam strategi perusahaan, strategi inisiatif, dan strategi risiko dalam bentuk penetapan *Risk Appetite Statement*. Budaya Sadar Risiko tercermin dari adanta penetapan manajemen kinerja berbasis risiko dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*) yang diturunkan dari komitmen manajemen.

   BRI telah memiliki materi pengembangan budaya sadar risiko yang dikemas dalam bentuk permainan interaktif, yang rencananya akan di implementasikan dalam acara Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di Uker Selindo. Selain itu, sistem pelaporan dan *monitoring* risiko melalui perangkat manajemen risiko operasional menciptakan terbentuknya budaya saling memberikan *feedback* yang dapat diterima secara positif untuk membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

5. Otomasi Pengkinian *Bussiness Continuity Management* (BCM)
   Dalam rangka memudahkan Unit Kerja terkait penerapan BCM, telah dikembangkan modul pengkinian dokumen BCM yang *embedded* pada aplikasi Manajemen Risiko Operasional BRIOPRA, yang antara lain meliputi pengkinian *Business Impact Analyisis*, pelaksanaan *Risk and Threat Assessment* (RSA), pelaksanaan *Disaster Assessment*, serta pengkinian *Call Tree* di Unit Kerja.

6. Penyempurnaan Perangkat Manajemen Risiko Operasional yang Terintegrasi
   Pengembangan Perangkat Manajemen Risiko Operasional akan di integrasikan dengan aplikasi *monitoring* risiko yang telah dimiliki oleh BRI sehingga dapat memberikan *feedback* berupa *predictive risk* baik dari sisi *severity* maupun *likelihood*. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan untuk menyediakan *tools* penerapan Manajemen Risiko bagi Unit Kerja yang *user friendly.*

7. Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar
   Persiapan dilakukan melalui perbaikan proses pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian atas Risiko Operasional. Dalam rangka mendukung

hal tersebut, akan dilakukan *joint development* pengembangan *Sub Ledger* untuk pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian atas Risiko Operasional yang terintegrasi dengan *New Financial System* BRI.

8. Pengembangan *Dashboard Employee Risk Profile*
   Pengembangan permodelan ini meliputi modul *Know Your Employee* (KYE) bertujuan untuk mengetahui profil risiko pekerja disetiap unit kerja.

9. Penyusunan Kebijakan *Green Banking*
   Peningkatan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat global dan lokal. Disadari bahwa peran perbankan sangat signifikan untuk mendorong investasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan karena perbankan menyalurkan kredit terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan *Sustainable Finance* (SF) di perbankan atau sering disebut perbankan hijau (*Green Banking)*.

   Alasan penerapan *green banking* Bagi BRI karena penerapan *Green banking* dinilai memiliki dampak positif yaitu :
   a. Merupakan kontribusi nyata peran BRI terhadap dampak ekonomi yang seimbang dengan lingkungan sosial dan kelestarian alam
   b. Meningkatkan reputasi BRI sehingga akhirnyadapat meningkatkan *value* BRI dimata *stakeholders*
   c. Merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan
   d. Membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait *green fund* baik dengan lembaga nasional maupun international

   Roadmap *Green banking* BRI akan diselaraskan kembali sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sesuai POJK tersebut, BRI sebagai Bank BUKU IV wajib menerapkan SF per 1 Januari 2019. *Roadmap* secara umum yaitu: Tahun 2017 merupakan tahap untuk penyusunan kebijakan, peningkatan *capacity building* serta sosialisasi. Tahun 2018 menyesuaikan POJK, penyelarasan ketentuan internal BRI dan menyusun rencana aksi untuk tahun 2019.Tahun 2019 melakukan penyesuaian terhadap kebijakan turunan dan melaksanakan Rencana aksi keuangan berkelanjutan 2019 serta menyusun Laporan Keberlanjutan.

   Dalam rangka menjadi *champion* green banking serta persiapan terhadap penerapan POJK, BRI telah melakukan implementasi SF secara bertahap, antara lain:

   a. Mengikuti pilot project "*First Step To Be A Sustainable Finance*" hasil kerjasama dan WWF Indonesia.
   b. Menyusun kebijakan terkait keberlanjutan yaitu : Kebijakan Umum Keberlanjutan (*Sustainability*).Kebijakan Strategi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
   c. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan
   d. Capacity building bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit
   e. Internal campaign untuk memberikan *awareness* bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya
   f. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/instansi terkait
   g. Mengikuti ajang penghargaan terkait *sustainable finance* antara lain *Sustainable Finance Award* yang diselenggarakan oleh OJK.
   h. Kebijakan Strategi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
   i. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan
   j. Capacity building bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit
   k. Internal campaign untuk memberikan awareness bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya
   l. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/instansi terkait
   m. Mengikuti ajang penghargaan terkait *sustainable finance* antara lain *Sustainable Finance Award* yang diselenggarakan oleh OJK.

Fungsi Manajemen Risiko

10. *Loan Portofolio Guidline*
    Pada tingkat portofolio, pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan mengimplementasikan *Loan Portfolio Guideline* (LPG) dalam setiap prakarsa kredit. Melalui LPG, BRI mengatur arah pertumbuhan portofolio kredit pada sektor industri yang prospektif, dengan tingkat risiko yang dapat diterima serta memelihara diversifikasi portofolio pada tingkat optimal. Untuk memperkuat pengelolaan risiko portofolio kredit, BRI sedang mengembangkan digitalisasi *pipeline management* dan menginisiasi pengembangan *dashboard* LPG guna meningkatkan efektifitas *monitoring* pertumbuhan portofolio kredit di masing-masing wilayah.

11. Penyusunan *Market Code of Conduct* BRI
    Dalam rangka membangun Pasar Keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 19/5/PBI/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Penerapan PBI dan PADG tersebut dimaksudkan agar terdapat peningkatan standar kompetensi Pelaku Pasar, standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; integritas Pelaku Pasar, Direksi, dan Pekerja; dan penerapan prinsip kehati-hatian.

    Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Direksi dan Pekerja BRI harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Treasuri. Kode Etik Pasar menjadi pedoman Direksi dan Pekerja berdasarkan prinsip konvensional yang mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan. Indonesia *Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) sebagai asosiasi profesi di Indonesia telah menerbitkan Kode Etik Pelaku Pasar dalam Buku *Market Code of Conduct* (*Guideline to Market Practices in the Financial Markets*), *3rd Edition*. Berdasarkan hal tersebut, BRI telah menyusun *market code of conduct* dalam aktivitas Tresuri yang bertujuan untuk:

    a. Memberikan panduan berperilaku, bertindak, meningkatkan disiplin dan integritas bagi setiap Manajemen dan Pekerja BRI dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik dan luar negeri, mencakup Manajemen Senior, Manajemen, dan *Dealers* yang terlibat transaksi di pasar keuangan.
    b. Standar minimum perilaku yang dapat dijadikan acuan dalam *market best practices* bagi Manajemen dan Pekerja BRI. Implementasi dari Kode Etik Pasar ini disesuaikan dengan kompleksitas usaha BRI dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

    Market Code of Conduct telah diterbitkan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 disosialisasikan kepada pekerja melalui modul dan *e-leraning* MCO yang bekerjasama dengan BRI Corporate University.

12. Penyusunan *Liquidity Early Warning Indicators*
    Risiko likuiditas merupakan risiko yang sangat berbahaya bagi jantung sebuah bank. Regulator mensyaratkan Bank mampu memiliki *High Quality Liquid Assets* yang mampu meng-*cover net cash outflow* dalam kondisi *stress* minimal selama 30 hari. BRI mengembangkan mekanisme sistem peringatan dini (*early warning indicators*) yang merupakan indikator untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dan memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan, sehingga Bank memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengatasi potensi pengetatan likuiditas dalam waktu mendatang. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan eksternal yang dipantau oleh Divisi *Assets & Liabilites* Manajemen dan Divisi *Treasury* sebagai unit kerja pengelola risiko likuiditas, serta Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar.

    Selain untuk level kantor pusat, *Early Warning Indicator* juga dikembangkan untuk level Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berfungsi sebagai peringatan dini terhadap parameter-parameter likuiditas di unit kerja.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. Permodalan
   Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer, Counter cyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Bank* (D-SIB), di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.
2. Operasional
   Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020,
3. Pasar dan Likuiditas
   a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
   b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan Basel III *Approach*: *Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
   c. Pengukuran *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book).*

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh *risk taking unit* selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2020, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

1. Peringkat Profil Risiko
   Posisi Risiko BRI Triwulan IV-2020 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2020 (*audited*). Secara komposit, Profil Risiko BRI Triwulan IV 2020 mendapatkan peringkat *low to moderate*. Dari 8 (delapan) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *low to moderate* meliputi: risiko kredit, pasar, likuiditas, stratejik dan kepatuhan. Adapun yang mendapatkan peringkat *low* yaitu risiko hukum dan reputasi. Sedangkan yang mendapatkan peringkat *moderate* yaitu risiko operasional.

2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
   Secara komposit, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mendapatkan peringkat *satisfactory*. Dari 8 (delapan) risiko, yang mendapatkan peringkat

Fungsi Manajemen Risiko

satisfactory yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi. Adapun yang mendapatkan peringkat *fair* yaitu risiko operasional.

Analisa

Peringkat Profil Risiko BRI bulan Desember tahun 2020 adalah *Low to Moderate* (Peringkat 2) tidak mengalami perubahan peringkat risiko dibanding tahun Desember 2019 (*Low to Moderate* /peringkat 2).

REVIU EFEKTIFITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menjaga objektivitas dan *independency* penilaian efektivitas sistem manajemen risiko.

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelakasanan tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
   Penyusunan limit risiko dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk* & *Portofolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk&Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* BRI.
2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
   Secara komposit, Profil Risiko Terintegrasi BRI posisi Semester II Tahun 2020 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *low to moderate* meliputi: risiko kredit, pasar, hukum, stratejik, kepatuhan, reputasi, transaksi intra-grup, dan Asuransi. Adapun yang mendapatkan peringkat risiko *low* yaitu risiko likuiditas sedangkan yang mendapatkan peringkat risiko *moderate* yaitu risiko operasional.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BRI adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Selain itu SPI BRI juga mengacu kepada:

1. Kode Etik Perusahaan, Kebijakan GCG, Budaya Kepatuhan, Budaya Sadar Risiko, Strategi Anti *Fraud*, Piagam Audit Intern dan Kebijakan WBS.
2. Struktur Organisasi, Penetapan Formasi & Daftar Uraian Jabatan Seluruh Unit Kerja.
3. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional.
4. Kebijakan & Pedoman Operasional Manajemen Risiko Atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru.
5. Buku Pedoman Operasional.
6. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Organisasi.
7. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang & Rencana Bisnis Bank.
8. Kebijakan Teknologi Informasi BRI
9. Kebijakan Umum & Pedoman Pelaksanaan Kredit.
10. Ketentuan Pembukuan dan Verifikasi Serta Kewenangan *User* di BRINETS

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO

Bank BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO IC *framework (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring).*

1. *Internal Environment*

Elemen pertama dari struktur pengendalian intern BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi BRI telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja.

Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk budaya pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.

2. *Risk Assessment*

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian internal terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko.

Bank BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajamen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

1. Risiko kredit
   Penilaian dilakukan dengan internal model menggunakan model standard yaitu menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian *stress test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress.

2. Risiko pasar
   Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi pendekatan dengan metode standar dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil *maturity* surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas
   Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui *dashboard* profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui *protocol liquidity contigency plan*. Penilaian risiko likuiditas meliputi penilian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan limit risiko likuiditas dan *stress test.*

4. Risiko Operasional
   Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum
   Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

6. Risiko Stratejik
   Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan startegi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.

7. Risiko Reputasi
   Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.

8. Risiko Kepatuhan
   Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

9. Risiko Asuransi
   Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

10. Risiko Transaksi Intra Group
    Menilai risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

    Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap

penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

3. *Control Activities*

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
   a. Penerapan fungsi MCS (*maker, checker, signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
   b. Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
   c. Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
   d. Penerapan *three line of defense* untuk aktivititas pertahanan berlapis.

2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
   a. Pelaksanan Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
   b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
      i. Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapus bukuan kredit bermasalah
      ii. Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan disain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas *output* yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum *Market Risk Management Committee* dan forum *Asset & Liability Committe* (ALCO).
      iii. Pengendalian risiko likuiditas meliputi *Protocol Liquidity Contigency Plan*.
      iv. Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, Protocol *Liquidity Contigency Plan* untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
      v. Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
      vi. Pengendalian risiko strategik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
      vii. Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
      viii. Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjurnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
      ix. Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
      x. Pengendalian risiko *intra grup* dilaksanakan oleh *Desk Subsidiary* yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

4. *Information & Communication*

Bank BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara

internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

5. *Monitoring*
   Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengandalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui *Three line of defence*, yaitu:
   1. *1st line of defense* selaku risk owner yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (a.l.Unit Kerja Operasional)
   2. *2nd line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (a.l.Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
   3. *3rd line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan assurance. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas *monitoring* sistem pengendalian intern.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan *monitoring* SKAI tehadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

ELEMEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain *1stline of defense* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), *2ndline of defense* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan), dan *3rdline of defense* (Jajaran SKAI termasuk Resident Auditor Kanca dan Resident Auditor Unit).

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Implementasi Pengendalian Internal BRI mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017.

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian
   Direksi dan Komisaris telah berperan aktif melakukan pegawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.
   1. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
   2. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

1. BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
2. BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang didalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
4. Melakukan *monitoring* terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
5. Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.
6. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Pelaksanaan Kaji Ulang Sistem Pengendalian Intern.

Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implentasinya meliputi:

1. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, antara lain melalui:
   a. Aplikasi BRIPEDIA
   b. Aplikasi BRISHARE
   c. Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
2. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI, Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
4. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui *risk based audit.* Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko. Pengendalian intern dilaksankan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Review*)
   BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan *top level review* terkait Strategi Anti *Fraud*. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evalusi menyeluruh terkait pilar penerapan strategi anti fraud perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

b. Kaji Ulang Operasional (*Functional Review*)
   Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultansi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindasan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh *Auditee*. Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi Anti *Fraud*.

c. Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi
   Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik-praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:
   i. Hasil penilaian risiko.
   ii. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penaganan risiko.
   iii. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
   iv. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
      - Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
      - Pengendalian intern yang efektif yang

Sistem Pengendalian Internal

dapat memitigasi risiko dalam proses TI.

- Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaran dan penggunaan TI.
- Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
- Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
- Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.
- Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourching*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
- Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

d. Pengendalian Asset Fisik
Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL). KEMAL memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

e. Dokumentasi
Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-*update* secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

f. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:
   i. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan
   ii. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
   iii. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
   iv. Pemisahan fungsi *Maker, Checker,* dan *Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pekerja. Implementasinya meliputi:

a. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
b. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), *Loan Approval System* (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA), Sistem Informasi Human Capital BRISTARS, dll.
c. BRI telah memiliki *Disaster Recovery Plan* dan sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.
d. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* baik pihak ekstern maupun intern dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
   i. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
   ii. Tersedia media komunikasi untuk sosialiasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pusataka SDM).
   iii. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti

Forum *Risk Management Committee, Business Performance Review, Support Performance Review,* Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, *Focus Group Discussion* dan Forum Peningkatan Kinerja.

5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

   BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian intern baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Intern. SKAI telah melaksanakan pemantauan tehadap sistem pengendalian intern yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

6. Review Sistem Pengendalian Internal 2020

   BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh fungsi *1st line of defense* sebagai *risk owner* yang melakukan evaluasi secara terus menerus dalam kegiatan operasional bank, fungsi *2nd line of defense* yakni jajaran Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara berkala memastikan kecukupan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan, serta fungsi *3rd line of defense* yang melakukan kegiatan audit.

   Jajaran Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan evaluasi kecukupan struktur pengendalian intern dilakukan dengan tujuan untuk menilai keandalan sistem pengendalian intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan secara memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Evaluasi kecukupan sistem pengendalian intern dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem atau mekanisme yang dikembangkan BRI dalam rangka mencapai tujuan kepatuhan, tujuan informasi dan tujuan operasional.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum. SKAI memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Manajemen. SKAI telah melaksanakan *review* dan *assurance* secara periodik terhadap aktivitas di seluruh level organisasi termasuk Unit Kerja Luar Negeri dan Perusahaan Anak dengan menerapkan metode *risk based audit*.

Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Adapun pelaksanaan *review* dan *assurance* tersebut dilaksanakan secara independen dengan jalur pelaporan yang memadai dan didukung kompetensi serta keahlian Auditor Intern yang handal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor perbaikannya dalam rangka memastikan sistem pengendalian intern telah berjalan efektif. Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara rutin melakukan telaah terhadap hasil evaluasi sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh SKAI dan memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan sistem pengendalian intern perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama tahun 2020, diperoleh hasil sbb:

1. Kecukupan sistem pengendalian intern yang dilakukan melalui kajian atas kebijakan dan ketentuan internal dengan kesimpulan tidak terdapat kelemahan dalam ketentuan internal yang bersifat major.
2. Efektivitas sistem pengendalian intern secara umum menunjukan bahwa risiko telah dikelola secara memadai, namun demikian tetap diperlukan upaya perbaikan agar efektivitas sistem pengendalian intern di BRI dapat lebih ditingkatkan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL BRI

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan kebijakan untuk pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Tata kelola TI BRI menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI.

Selain itu, BRI berkomitmen membangun perilaku yang sesuai dengan standar etika BRI dalam rangka menerapkan menejemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaanya, BRI senantiasa mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai *GCG*, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

Tata kelola TI memiliki kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. KB.01-DIR/ISG/12/2019 tentang Kebijakan Teknologi Informasi BRI. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dan sistem pengendalian bagi seluruh Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk melaksanakan penatakelolaan dan pengendalian risiko penggunaan TI di BRI.

Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

Tata Kelola Teknologi Informasi

Rincian Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

Rincian Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

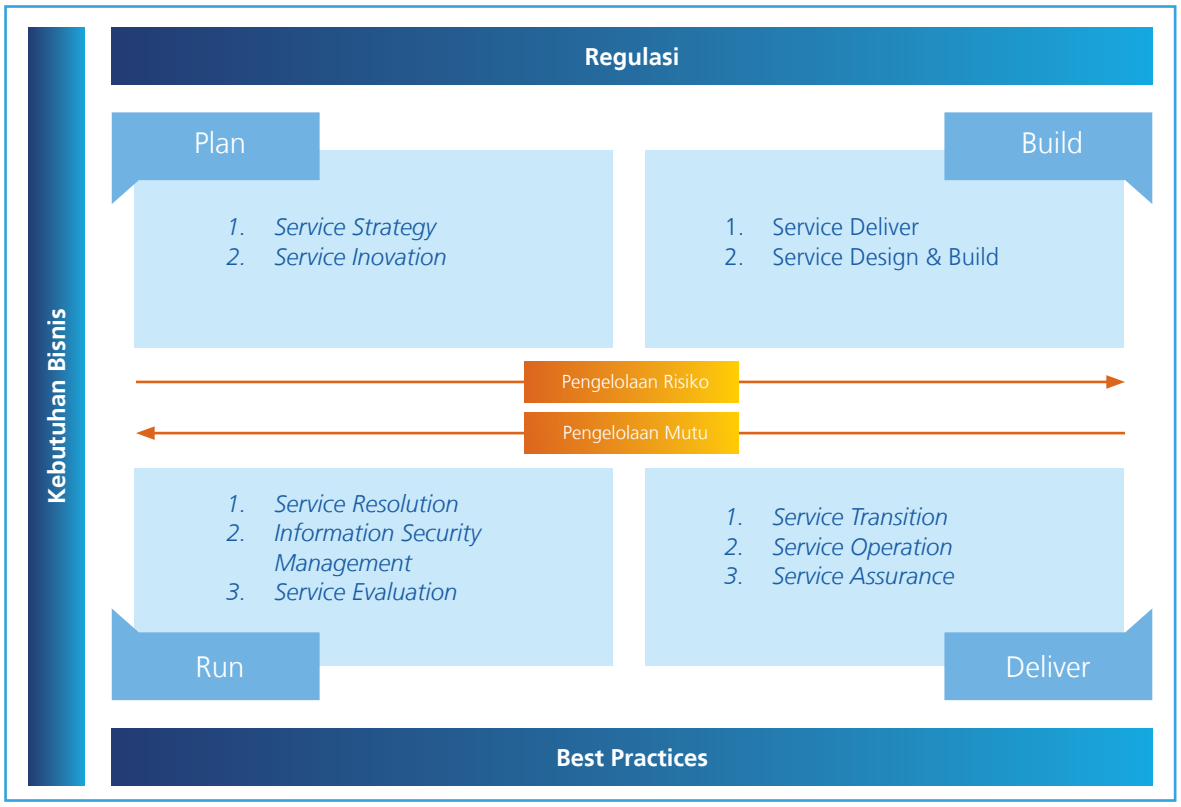

Penjelasan detail mengenai Teknologi Informasi BRI disampaikan pada Bab IV – Digital, Teknologi Informasi & Operasi.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA BANK

Rencana Bank meliputi:

1. Rencana Jangka Panjang (RJP/*Corporate Plan*) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target-target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
3. Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

KEBIJAKAN USAHA

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk Standard Operating Procedure yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank.Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*Three Lines of Defense* yaitu:

1. *First Line of defense* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kualitas *output* dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. *Second Line of defense* merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
3. *Third Line of Defense* merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:

1. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
   a. Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep *three line of defense.*
   b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: *risk assessment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank.
   c. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, dual control dan sebagainya.
   d. Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam *Data Warehouse* (DWH)
   e. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
2. Kebijakan pengawasan internal, antara lain meliputi kebijakan audit Intern, Strategi Anti Fraud, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
3. Kebijakan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Kelola Teknologi Informasi

KEBIJAKAN TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

1. Panduan transparansi dan pengungkapan (*Transparency and Disclosure Guidelines*)
2. Kebijakan Rahasia Bank.
3. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Secara umum, pemenuhan hak-hak kreditur yaitu kepastian pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu, informasi laporan keuangan dapat diakses oleh kreditur, dan kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian pinjaman terpenuhi. Selain hal tersebut, kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur secara ringkas mengatur:

1. Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karateristik produk
2. Hak untuk mendapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui website Bank BRI
3. Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan *e-banking* atau sarana lainnya yang ditetapkan BRI
4. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di BRI
5. Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NASABAH

Dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada konsumen, BRI mengacacu pada beberapa ketentuan di antaranya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha. Selanjutnya BRI juga telah menyusun pedoman kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah melalui Surat Keputusan NOKEP S.1051-DIR/LCC/12/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kebijakan pelayanan kepada nasabah di BRI juga dituangkan dalam sebuah panduan pelayanan yang disebut Budaya Layanan BRI "SMART" yang berarti Sigap, Mudah, Akurat, Ramah dan Terampil. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

SIGAP

1. Melayani transaksi nasabah dengan cepat tanggap dan sigap sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama.
2. Memberikan solusi atas kebutuhan dan permasalahan nasabah dengan sesegera mungkin.

MUDAH

1. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan dalam penyelesaian permasalahan nasabah
2. Segala kebutuhan nasabah terhadap Bank mudah diselesaikan dengan seminimal mungkin persyaratan dan dokumen.

AKURAT

1. Eksekusi dan pencatatan transaksi dilakukan dengan akurat dan benar
2. Menyediakan informasi nasabah dengan dukungan sistem yang terintegrasi

RAMAH

1. Seluruh kebutuhan nasabah dilayani dengan antusias, empati dan bersemangat sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memberikan kesan positif kepada nasabah melalui sikap, tutur kata yang santun dan penampilan menarik yang berdampak pada kenyamanan nasabah.
3. Berkomunikasi dengan penuh keakraban dan profesional
4. Melayani dengan setulus hati melebihi ekspektasi nasabah

TERAMPIL

1. Memiliki pengetahuan mengenai produk yang disampaikan sehingga dapat memahami kebutuhan nasabah.
2. Memiliki ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan seluruh sistem atau tools yang digunakan dalam proses pelayanan nasabah

Dalam pelayanannya kepada nasabah, BRI berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah secara baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan/atau *service level agreement* yang berlaku. Dalam hal penilaian kepuasan pelanggan, BRI rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat terus menjadi evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah yang pada akhirnya berujung pada peningkatan loyalitas nasabah terhadap perusahaan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

BRI memandang setiap pengaduan nasabah merupakan masukan yang penting untuk peningkatan kualitas layanan dan produk. Melalui sistem sentralisasi *complaint handling*, BRI menyediakan sarana bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan dan menjadi rekomendasi perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap keluhan nasabah dapat diidentifikasi dan diketahui secara cepat, saat ini BRI menggunakan media omni-channel, yaitu sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia yaitu:

- Tatap muka melalui Customer Service di seluruh Unit kerja operasional BRI;
- Telepon melalui 14017, dan 1500017/Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017;
- Webchat melalui website www.bri.co.id;
- Email di callbri@bri.co.id;
- Menu layanan pada Internet banking di https://ib.bri.co.id;
- Media sosial Twitter di @BankBRI_ID, @Promo_ID, @kontakbri;
- Media sosial Facebook di Fanpage BANK BRI
- Media sosial Instagram @BankBRI_ID
- Whatsapp, Telegram dan SMS di 0812 12 14017

Tata Cara Pengaduan:

1

Nasabah melaporkan pengaduan yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada BRI melalui Unit Kerja Operasional, maupun contact center Bank BRI

2

Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan sesuai dengan POJK nomor 18/POJK.07/2018 maksimal waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secaratertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

3

Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian financial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui mediasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan operasional bank yang optimal, dibutuhkan suatu pedoman kebijakan akuntansi yang didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Kebijakan akuntansi BRI disusun dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyempurnakan akuntansi BRI untuk disesuaikan dengan ketentuan PSAK, PAPI, dan Peraturan OJK.
2. Memberikan pedoman bagi bank dalam melaksanakan praktik akuntansi yang sehat.
3. Menyeragamkan penerapan perlakuan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
4. Mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan BRI, sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat, serta dapat memberikan informasi yang mudah dipahami bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang memerlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, peraturan dan praktik yang diterapkan bank sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan OJK. Dengan adanya Kebijakan Akuntansi yang dibuat secara tertulis, maka BRI mempunyai pedoman/acuan standar untuk melaksanakan dan menerapkan asas-asas akuntansi yang sehat.

Selanjutnya, sehubungan dengan standar akuntansi keuangan yang terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan, maka BRI pun juga terus melakukan penyempurnaan atas pedoman kebijakan akuntansi agar *comply* terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan Konvergensi PSAK ke IFRS

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, BRI berpedoman pada kebijakan akuntansi yang salah satunya didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dimana DSAK-IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke IFRS secara bertahap dengan dukungan dari para regulator.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku

Tidak terdapat ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku.

Perubahan & Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi 2020

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

1. PSAK No.1 "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi. Mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam koteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material. Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
2. PSAK No. 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Ventura Bersama". Mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38. Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
3. PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi". Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK No. 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*). Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

4. PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan". Mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Perubahan kebijakan akuntansi ini menimbulkan dampak yang signifikan pada entitas dalam hal perubahan metode pengukuran, pengakuan serta penyajian.
5. PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan. Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
6. PSAK No. 73 "Sewa". Menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets)* bernilai rendah. Perubahan kebijakan akuntansi ini menimbulkan dampak yang signifikan pada entitas dalam hal perubahan metode pengukuran, pengakuan serta penyajian.
7. Keseluruhan perubahan di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Tahun 2020

Perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2020 disebabkan oleh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai bentuk adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) efektif per tanggal 1 Januari 2020. Perubahan kebijakan akuntansi mencakup penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" yang mengadopsi IFRS 9, PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mengadopsi IFRS 15, dan PSAK No. 73 "Sewa" yang mengadopsi IFRS 16.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK

BRI telah menetapkan visidalam 5 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (*Corporate Plan*) yaitu menjadi "*The Most Valuable Bank In Southeast Asia* dan *Home to The Best Talent*" pada tahun 2022. Untuk mewujudkan visi tersebut, BRI telah menetapkan Perusahaan Anak sebagai salah satu pilar pertumbuhan BRI. Penguatan Perusahaan Anak dan peningkatan sinergi ibisnis dengan Perusahaan Anak bertujuan untuk menambah nilai Grup BRI secara keseluruhan.

Menindaklanjuti hal tersebut, BRI memandang perlu adanya suatu kebijakan,panduan dan landasan terkait dengan kegiatan penyertaan modal dan pengelolaan Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pertimbangan tersebut, BRI menyusun suatu Kebijakan Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No KB.03-DIR/SBM/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Hal-hal yang diatur dalam KPMPPA meliputi prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan pengelolaan Perusahaan Anak; pengelolaan organisasi dan *human capital*; pengelolaan penyertaan modal; perencanaan dan strategi Perusahaan Anak; sinergi, keselarasan bisnis, dan *joint infrastructure / resource sharing*; pelaporan, pengawasan dan penilaian kinerja Perusahaan Anak; integrasi manajemen risiko, integrasi kepatuhan dan tata kelola dengan Perusahaan Anak; akuntansi dan perpajakan; komunikasi; integrasi audit intern; dan pengelolaan Perusahaan Anak di luar negeri.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perkara hukum material yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1	Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan)	:	279 perkara (69%)
2	Perkara kredit (Non Lelang Agunan)	:	105 perkara (26%)
3	Perkara Operasional & Jasa	:	10 perkara (2.5%)
4	Perkara Support (SDM, Logistik, dll)	:	8 perkara (2%)
5	Perkara Treasury, Trade Finance & IT	:	0 perkara (0%)

Dengan Rincian sebagai berikut:

2020					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	66	41	81	92	280
Kredit Non Lelang	18	25	24	38	105
Ops & Jasa	1	0	3	6	10
Support	3	1	3	1	8
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0

Total Perkara yang telah memperoleh Keputusan Hukum yang tetap/ berstatus (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah sebanyak 50 perkara yang terdiri dari:

1. Perkara Inkracht Menang

Perkara Inkrcaht Menang pada tahun 2020 sebanyak 46 (92%) Perkara yang terdiri dari:

1	Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan)	:	33 perkara (71.74%)
2	Perkara kredit (Non Lelang Agunan)	:	11 perkara (23.91%)
3	Perkara Operasional & Jasa	:	1 perkara (2.17%)
4	Perkara Support (SDM, Logistik, dll)	:	1 perkara (2,17%)
5	Perkara Treasury, Trade Finance & IT	:	0 perkara (0,00%)

Perkara Penting yang dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

2020					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	10	12	10	1	33
Kredit Non Lelang	6	3	0	2	11
Ops & Jasa	0	0	1	0	1
Support	1	0	0	0	1
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0

2. Perkara Inkracht Kalah

Perkara Inkrcaht Kalah pada tahun 2020 sebanyak 4 Perkara (8.00%), yang terdiri dari:

1	Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan)	:	2 perkara (50.00%)
2	Perkara kredit (Non Lelang Agunan)	:	1 perkara (25.00%)
3	Perkara Operasional & Jasa	:	1 perkara (25.00%)
4	Perkara Support (SDM, Logistik, dll)	:	0 perkara (0,00%)
5	Perkara Treasury, Trade Finance & IT	:	0 perkara (0,00%)

2020					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	1	0	0	1	2
Kredit Non Lelang	1	0	0	0	1
Ops & Jasa	0	0	1	0	1
Support	0	0	0	1	0
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Adapun dari 403 perkara hukum tersebut, terdapat 1 (satu) perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan yaitu:

No	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap BRI	Sanksi Administrasi
1	Perkara No.22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Duniatex Group PT. Delta Duniatex (Duniatex Group) memiliki fasilitas kreditpada BRI berupa : Fasilitas Valuta Asing dengan plafond USD70.000.000 Fasilitas Kredit Investasi dengan plafond sebesar Rp23.796.000.000 Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp727.520.000.000 Fasilitas Impor Modal Kerja sebesar USD30.000.000 Fasilitas Jaminan Impor Deferment USD30.000.000 Fasilitas Kredit Trade Line sebesar Rp40.000.000.000 Selanjutnya, PT Dunia Setia Sandang Asli Textile memiliki fasilitas kredit pada BRI berupa pinjaman investasi sebesar Rp700.000.000.000. Pada 10 Desember 2019, Duniatex Group dimohonkan PKPU oleh PT Shine Golden Bridge di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan PKPU dimaksud pada tanggal 30 September 2019. Atas PKPU tersebut di atas, BRI beserta Kreditur Lainnya telah hadir dan memberikan suara pada Rapat Kreditur, Rapat pencocokan Hutang, Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian sehingga pada akhirnya Para Pihak dalam perkara dimaksud sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Juni 2020 .	Perjanjian Perdamaian (Homologasi)	Dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan apabila tidak terjadi Perdamaian antara BRI dan PT Duniatex Group.	-

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2020, tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang menjabat memiliki perkara hukum terkait Perdata dan Pidana dengan kegiatan bisnis BRI.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BRI memiliki kebijakan dalam pengelolaan keterbukaan informasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.08-DIR/SKP/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

KETERSEDIAAN AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Bank BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Sosial Media, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.

Sekretaris Perusahan

AESTIKA ORYZA GUNARTO
Telepon : (+62 21) 575 1966
Faksimil : (+62 21) 570 0916
Email : humas@bri.co.id

Siaran Pers

Siaran pers yang telah dilakukan Bank BRI selama tahun 2020 dapat dilihat pada sub bab pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan dan dapat dilihat pada situs website Perusahaan.

Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Bank BRI
Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 1210, Indonesia
Telp : (+62 21) 251 0244, 251 0254
Fax : (+62 21) 250 0065, 250 0077

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Situs Perusahaan
www.bri.co.id

Call Centre
14017, 1500017, (+62 5798 7400)

Customer Care
callbri@bri.co.id

Media Sosial
Facebook : Bank BRI
Instagram : @bankbri_id
Twitter : @kontakBRI, @promo_BRI, @bankbri_id
Youtube : BANK BRI

Chatbot: Sabrina
Melalui facebook messanger dan whatsapp/telegram: 081-212-14017

Majalah BRI
Bank BRI memiliki majalah internal dalam bentuk full digitalmelalui aplikasi yang bisa di download lewat Android maupun iOS. Majalah ini terbit setiap bulan sejak November 2019 dengan nama BRILian News. Selama tahun 2020 berikut tema-tema yang diangkat dalam BRILian News:

Edisi Bulan	Tema
Januari	Teknologi Untuk Melayani
Februari	Transformasi Bisnis Mikro
Maret	Home To The Best Talent
April	Sentuhan Digital
Mei	Manajemen Risiko Yang Lebih Siap Pada Perubahan
Juni	Transformasi Balance Sheet di Tengah Pandemi
Juli	Mengawal Transformasi dengan GCG
Agustus	Sistem dan Manusia di Tengah Transformasi Off Balance Sheet
September	Brivolution 2.0 Antisipasi Model Bisnis Dunia Baru
Oktober	Implementasi dan Resegmentasi Demi Masa Depan
November	Mewujudkan GCG
Desember	BRI Jujur, Tulus Apa Adanya

Transparansi Penyampaian Laporan

Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah	Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan	Tahunan	1	OJK dan BEI
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak	Triwulan	4	OJK, BI Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	Bulanan	12	OJK
Laporan Hutang Valas	Bulanan	12	OJK
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Bulanan	12	OJK dan BEI
Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12	BEI

PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

DASAR HUKUM

Kode etik BRI merupakan bagian penting dari kerangka kerja GCG BRI dan memberikan pedoman etika bagi insan BRI dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya. Kebijakan yang mengatur mengenai elemen kode etik BRI dan implementasinya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI.

KOMITMEN KODE ETIK

Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

BRI memiliki kode etik yang merupakan nilai dasar bagi seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara professional. Seluruh pekerja BRI selalu menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kode etik setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam kepatuhan terhadap kode etik perusahaan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode etik BRI memiliki 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank
   Komitmen Bank patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.
2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
   a. Etika terhadap Nasabah
      Komitmen Bank memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   b. Etika terhadap Mitra Kerja
      Komitmen Bank dengan Mitra Kerja berdasarkan praktik-praktik usaha yang sah dan wajar dan menjujunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan.
   c. Etika terhadap Pesaing
      Komitmen Bank mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan usahanya, dengan meningkatkan Bank pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja.
   d. Etika terhadap Regulator
      Komitmen Bank memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan otoritas berwenang lainnya.
   e. Etika terhadap Pemegang Saham
      Komitmen Bank dalam upaya meberikan kontribusi positif dan optimal kepada Pemegang saham (*shareholders*).
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
   Komitmen Bank menjunjung nilai-nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya.

4. Hubungan Perusahaan dengan Karyawan Bank
   a. Komitmen Bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan misi Bank.
   b. Komitmen Bank untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan etika sesama pekerja.
5. Kerahasiaan Informasi Bank
   Komitmen Bank melindungi seluruh informasi nasabah dan internal Bank dari pihak luar/tidak berkepentingan.
6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank
   Komitmen insan BRI menyampaikan laporan Bank secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
7. Benturan Kepentingan
   Komitmen insan BRI menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan tidak menempatkan pada kondisi/situasi timbulnya benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, Nasabah, dan Pihak Ketiga yang dapat merugikan perusahaan.
8. Kontribusi dan Aktifitas Politik
   Komitmen insan BRI untuk tidak berkontribusi dalam aktifitas politik atau usaha sejenis lainnya.
9. Larangan Menerima Hadiah
   Insan BRI tidak diperkenenankan meminta dan memnerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

1. Seluruh Insan BRI yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh Insan BRI wajib menyatakan kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Perseroan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Perusahaan telah melakuan komunikasi kebijakan kode etik kepada seluruh Insan BRI (Direksi, Dewan Komisaris dan pekerja BRI) pada tahun 2020, antara lain melalui:

1. Website Perusahaan.
2. Landing Page pada aplikasi BRISTARS.
3. Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perseroan dengan Manajemen Perseroan.
4. Pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja.
5. Poster, video dan media advertising lain pada kantor Perseroan.

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI
   Seluruh Insan BRI wajib mengetahui dan memahami dengan baik serta menyatakan "Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik" setiap tahun.
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI
   Komitmen manajemen dan seluruh Pekerja untuk tidak menerima dan member gratifikasi dalam bentuk uang

Penerapan Kode Etik Perusahaan

dan/atau barang yang berhubungan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya yang dipublikasikan pada media massa dan website Perseroan.

3. Annual Disclosure Benturan Kepentingan
   Seluruh Insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan setiap tahun, serta seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap bulan.
4. Pakta Integritas
   Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh panitia pengadaan, unit kerja *user*, vendor atau rekanan pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa di BRI. Selain itu, setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani GCG *Statement* sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sedangkan seluruh pekerjamenandatangani komitmen anti *fraud* dan pengendalian gratifikasi pada Forum Peningkatan Kinerja yang diselenggarakan setiap tahun.
5. Program *Awareness*
   Salah satu bentuk implementasi kode etik agar menjadi budaya di BRI adalah dengan melakukan penguatan pada *corporate culture* melalui 5 nilai *corporate culture*, 10 perilaku *corporate cultre* dan 20 tindakan yang mencerminkan perilaku *corporate culture*. Selain itu, untuk memastikan & mengawal penerapan kode etik dan *corporate culture* pada setiap pekerja, BRI membentuk *Culture Heroes* (Pemimpin Unit Kerja) dan *Culture Agent* di setiap unit kerja BRI.
6. *Whistleblowing System*
   Seluruh pelanggaran terhadap kode etik BRI dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran kode etik tersebut terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pelanggaran disiplin BRI.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama tahun 2020 terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 51 pekerja organik BRI dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Sanksi	Jumlah
Peringatan Tertulis	4
Teguran Tertulis	2
Turun Jabatan 1	6
Turun Jabatan 2	3
PHK	36
Total	51

Jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan status penyelesaian sebagai berikut:

Pelanggaran Internal	Jumlah Pelanggaran							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pekerja Tetap		Pekerja TidakTetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total	-	-	-	-	283	148	239	48
Telah diselesaikan	-	-	-	-	253	51	239	35
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	30	97	0	13

INFORMASI PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai dengan komitmen Bank BRI untuk menerapkan GCG, hingga akhir tahun 2020, Bank BRI tidak melakukan tindakan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance* sebagaimana di bawah ini:

No	Keterangan	Praktik
1	Laporan atas aktivitas Bank yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan	Nihil
6	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital	Nihil

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank BRI senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank BRI telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank BRI telah dijelaskan (*explained*) dalam *website* Bank BRI.

BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan internalisasi dan eksternalisasi budaya kerja, BRI Group menggunakan core values dari Kementrian BUMN yaitu **AKHLAK** yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Selain itu, terdapat kata kunci dan pedoman perilaku/perilaku BRILiaN sesuai dengan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

AMANAH

Kata Kunci

Integritas, Tulus, Konsisten, Dapat dipercaya

Perilaku BRILiaN

1. Memenuhi janji & komitmen
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
3. Berpegang teguh kepada nilai moral & etika

KOMPETEN

Kata Kunci

Kinerja terbaik, Sukses, Keberhasilan, Learning agility, Ahli di bidangnya

Perilaku BRILiaN

4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
5. Membantu orang belajar
6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

HARMONIS

Kata Kunci

Peduli (*caring*), perbedaan (*diversity*)

Perilaku BRILiaN

7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
8. Suka menolong orang lain
9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

LOYAL

Kata Kunci

Komitmen, Dedikasi, (rela berkorban), Kontribusi

Perilaku BRILiaN

10. Menjaga nama baik sesame karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara
11. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

ADAPTIF

Kata Kunci

Inovasi, Antusias terhadap perubahan, Proaktif

Perilaku BRILiaN

Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam meningkatkan implementasi penerapan *Good Corporate Governance* di BRI, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan *corporate culture.* Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelolasecara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System.*

KEBERADAAN DAN TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana pelaporan bagi insan BRI secara khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya prilaku atau tindakan yang terindikasi melanggar kode etik, prinsip GCG serta ketentuan yang berlaku baik internal BRI maupun perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh insan BRI. *Whistleblowing System* merupakan bentuk komitmen manajemen BRI untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan Insan BRI yang berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BRI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI.

KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Kebijakan *Whistleblowing System* BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.08-DIR/KPT/05/2018 yang mengatur sistem, mekanisme dan prosedur penanganan laporan indikasi pelanggaran yang dikelola secara rahasia dan independen.

PENYAMPAIAN LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sarana pelaporan *Whistleblowing System* dapat dilaporkan melalui:

SMS/Whatsapp dengan nomor 0812 8200 600

Surat tertulis dengan alamat PO BOX 1895 JKP 10900

Webmail dengan alamat whistleblower@corp.bri.co.id

Website dengan alamat www.bri.co.id/whistleblowing-system

Whistleblowing System

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:
1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Menyampaikan materi WBS pada program *development* dan *enhanchement* Pekerja BRI.
3. Sosialisasi WBS secara rutin ke seluruh Unit Kerja.
4. Memasang poster informasi WBS di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
5. Memasang *landing page* pada *dashboard* aplikasi Bristars (portal internal BRI).
6. Melaksanakan *e-learning* WBS untuk seluruh pekerja BRI.
7. Penyampaian informasi WBS melalui website perseroan.

PERLINDUNGAN PELAPOR WHISTLEBLOWING SYSTEM

BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.

PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelolaan laporan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Unit Pengelola WBS yang berada berada dibawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

KRITERIA LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Informasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yaitu:

1. Kecurangan (*fraud*)
2. Penipuan/Penggelapan/Pemalsuan/Pencurian
3. Gratifikasi/Penyuapan/Korupsi
4. Benturan Kepentingan
5. Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan BRI
6. Pelanggaran ketentuan/prosedur perusahaan
7. Pelanggaran etika, antara lain membuka rahasia bank untuk kepentingan pribadi, pelaku insider, perbuatan asusila di dalam dan di luar Perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

KELENGKAPAN LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Laporan indikasi pelanggaran paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang Dilaporkan
   Pokok pelaporan pelanggaran yang terjadi dan jumlah kerugian (apabila diketahui)
2. Pihak yang Terlibat
   Insan BRI dan pihak yang terlibat melakukan indikasi pelanggaran

3. Waktu Terjadinya Pelanggaran
   Periode waktu terjadinya indikasi pelanggaran
4. Tempat Terjadinya Pelanggaran
   Lokasi/tempat unit kerja terjadinya pelanggaran
5. Kronologi Kejadian
   Deskripsi peristiwa/kronologi kejadian sehingga terjadi indikasi pelanggaran
6. Bukti Pelanggaran
   Dokumentasi terjadinya indikasi pelanggaran berupa dokumen, foto, video, dan informasi pendukung lainnya.

MEKANISME PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System*.
2. Pelapor yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran memperoleh kode laporan dan kata kunci untuk melihat proses tindak lanjut laporan pada website *whistleblowing system* (www.whistleblowing-system.bri.co.id).
3. Pelapor yang menyampaikan indikasi pelanggaran melalui sarana selain website (SMS,Whatsapp, Surat dan Email), maka Petugas *Whistleblwoing System* (WBS) memberikan kode laporan dan kata kunci kepada Pelapor yang menyampaikan identitas diri atau surel.
4. Petugas *Whistleblowing System* mencatat seluruh laporan indikasi pelanggaran pada aplikasi *whistleblowing system.*
5. Petugas WBS melakukan analisa awal (verifikasi) laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan *whistleblowing system.*
6. Apabila diperlukan, Petugas WBS dapat meminta informasi tambahan dan konfirmasi kepada Pelapor dalam memenuhi informasi dan data laporan.
7. Pemimpin Unit Pengelola WBS melakukan validasi terhadap hasil verifikasi laporan indikasi pelanggaran dan memutuskan tindak lanjut laporan yaitu:
8. Menindaklanjuti untuk dilakukan investigasi; atau
9. Tidak dilakukan tindak lanjut (laporan ditolak) karena tidak sesuai kriteria laporan WBS.
10. Unit Pengelola WBS menunjuk Unit Kerja Investigasi untuk melakukan investigasi laporan WBS.
11. Unit Pengelola WBS membuat surat penugasan dan menyampaikan surat tugas kepada Unit Kerja Investigasi.
12. Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan) apabila:
    a. Investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) : Laporan investigasi disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Unit Kerja berwenang dengan tindasan Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi.
    b. Investigasi dilakukan oleh konsultan atau pihak independen : Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Pengelola WBS.
13. Laporan tindak lanjut perbaikan diantaranya memuat:
    a. Tindak lanjut terhadap pelaku indikasi pelanggaran dan perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi serta mitigasi risiko yang dilakukan.
    b. Memberikan informasi kepada atasan terlapor dalam rangka menjaga nama baik terlapor apabila laporan WBS tidak terbukti.
14. Unit kerja berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Unit kerja berwenang menyampaikan laporan tindak lanjut perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.

Whistleblowing System

ALUR PENYAMPAIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

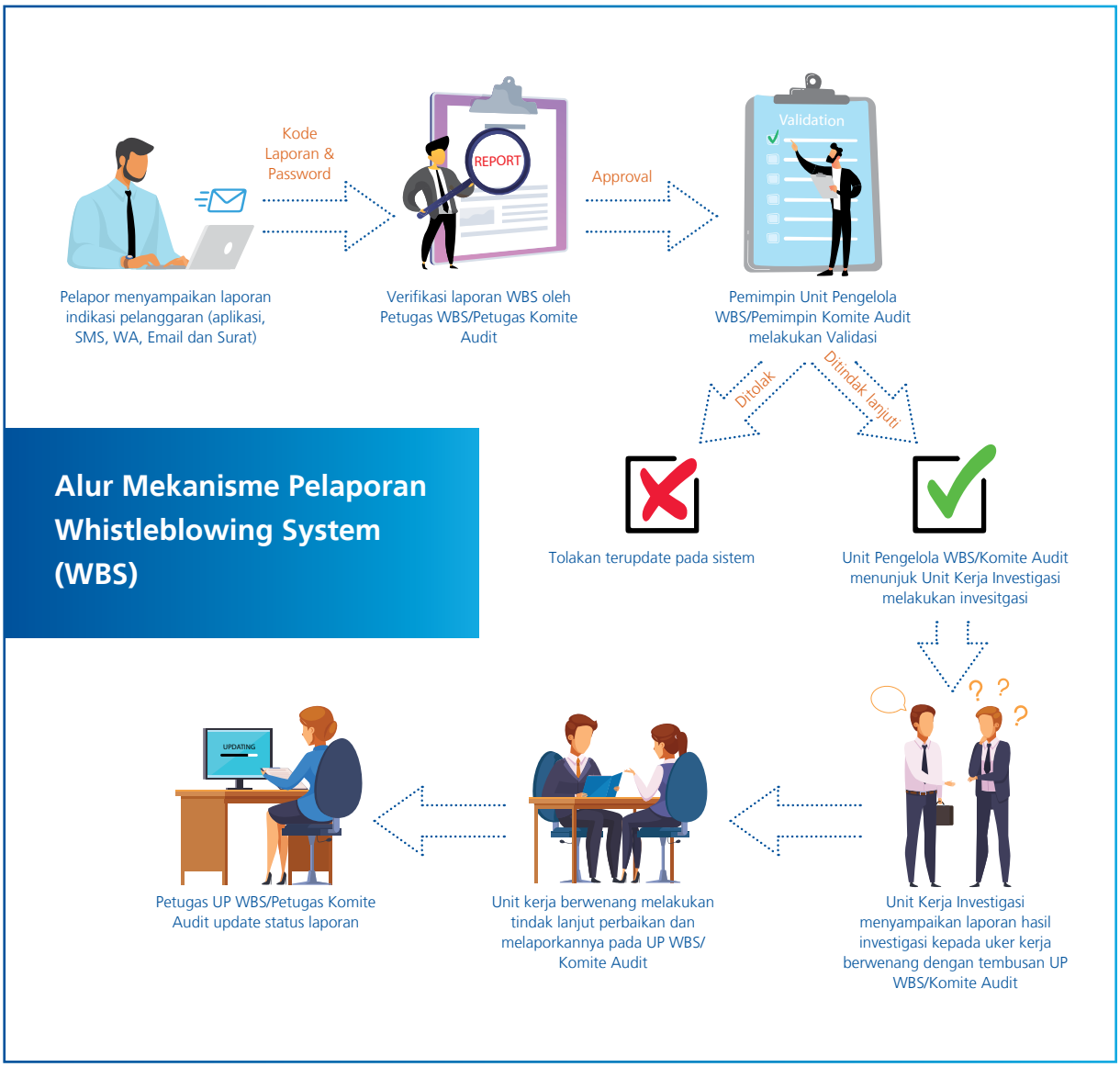

JUMLAH LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Selama tahun 2020 diterima 126 laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang memuat 239 sub indikasi pelanggaran, adapun trend perkembangan laporan WBS 3 (tiga) tahun terakhir sbb:

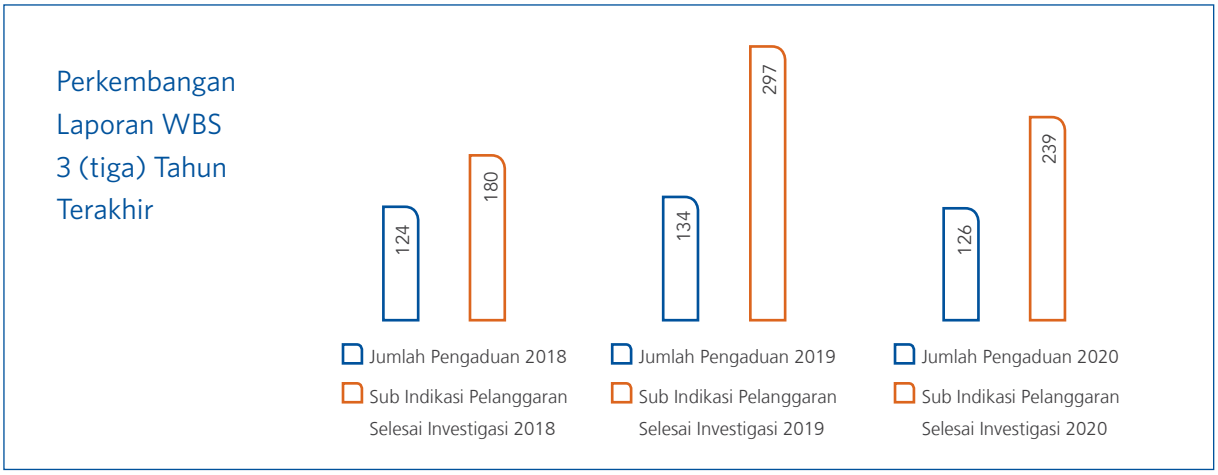

Berdasarkan data tersebut, sub indikasi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan terbukti pada tahun 2020 adalah pelanggaran SOP, indikasi *fraud* dan pelanggaran terhadap kode etik dan GCG sebagaimana data berikut:

Kategori	Pengaduan Diterima	Status		
		Terbukti	Tidak Terbukti	Dalam Proses
Tindakan Fraud	57	25	21	11
Perbuatan Melanggar Hukum	0	0	0	0
Pelanggaran SOP	108	40	59	9
Pelanggaran Kode Etik dan GCG	59	22	31	6
Pelanggaran Etika	11	4	7	0
Perbuatan yang membahayakan	0	0	0	0
Pelanggaran Proses Akuntansi	4	1	1	2
TOTAL	239	92	119	28

Whistleblowing System

Media pelaporan WBS yang paling banyak digunakan selama tahun 2020 adalah melalui website sejumlah 62 pelaporan (48%), SMS sebanyak 24 pelaporan (20%) dan email sebanyak 22 pelaporan (18%). Untuk tujuan mempermudah pelaporan WBS, pada tahun 2020 diimplementasikan media pelaporan melalui aplikasi whatsapp. Tren penggunaan media pelaporan WBS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Trend Media Pelaporan WBS

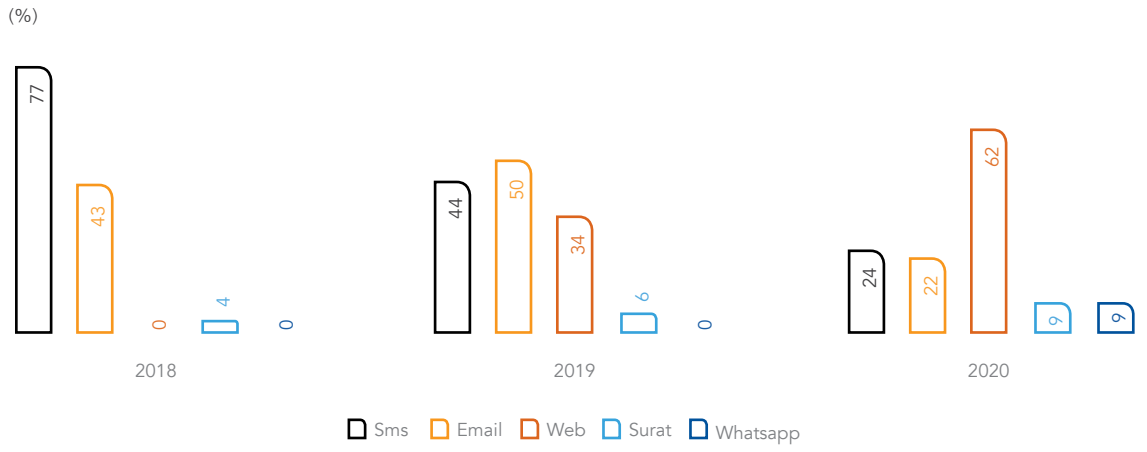

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara hubungan bisnis dan mitra perusahaan, BRI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan guna mendukung upaya pemberantasan korupsi dilingkungan perusahaan.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan dan Anti Korupsi

Sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, Bank BRI telah memperbaharui ketentuan Anti Penyuapan & Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI No:SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020. Selain ketentuan tersebut, ketentuan lain yang mendukung pemberantasan korupsi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Kebijakan Kode Etik BRI.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi di BRI dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk pada tahun 2017 dan melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan BRI, yaitu *Compliance Division* dan *Regional Risk Management and Compliance* (RMC) BRI di Kantor Wilayah dengan rincian sebagaiberikut:

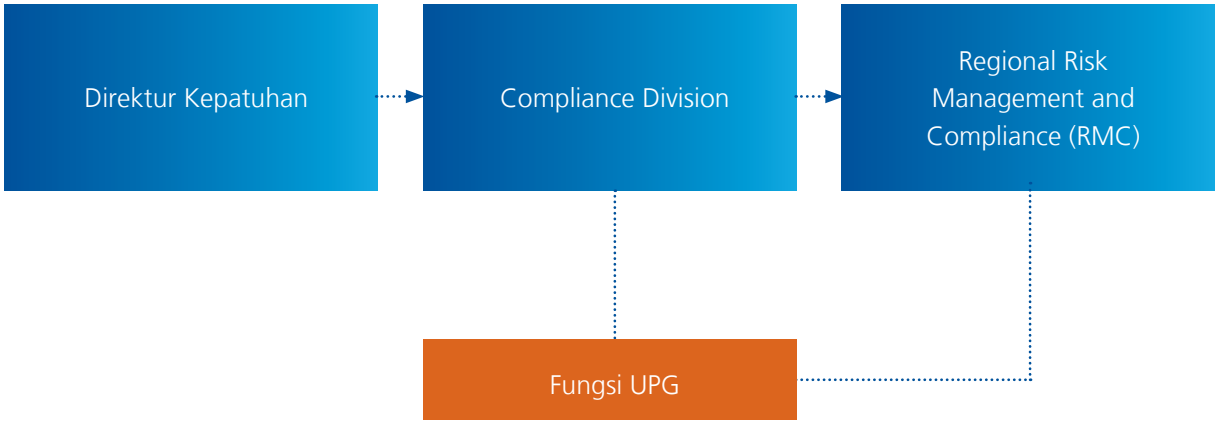

Unit Pengendalian Gratifikasi di *Compliance Division* memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI.
3. Melakukan pengelolaan laporan gratifikasi berupa menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Insan BRI.
4. Menjadi admin aplikasi GCG *Online System* dan Gratifikasi Online KPK.
5. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui sistem gratifikasi online.
6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status terhadap barang gratifikasi dimaksud.

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengendalian gratifikasi.
8. Menyampaikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi kepada Direksi yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
9. Rekapitulasi laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan BRI;
10. Pemetaan area rawan penerimaan gratifikasi.
11. Memastikan tindak lanjut atas laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi telah sesuai dengan ketentuan.
12. Memberikan persetujuan surat penetapan kepemilikan barang gratifikasi apakah menjadi milik Perusahaan atau menjadi milik Penerima Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi di *Regional Risk Management & Compliance* memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Menjalankan program-program pengendalian gratifikasi yang disusun oleh *Compliance Division;*
2. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan pelaporan gratifikasi di Kantor Wilayah dan Unit Kerja Supervisinya melalui GCG *Online System*;
3. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI di Kantor Wilayah;
4. Melakukan konfirmasi kepada Pelapor Gratifikasi terkait laporan gratifikasi.
5. Menyampaikan putusan status gratifikasi dan pengelolaan barang gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi berdasarkan surat dari *Compliance Division*.

Jenis Gratifikasi

BRI mengklasifikasikan gratifikasi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
   Penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan BRI berdasarkan/terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
   Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian yang diterima oleh Insan BRI, tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penerapan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, BRI telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain yaitu:

Pakta Integritas

Sebagai salah satu wujud dukungan BRI dalam menjalankan pengendalian gratifikasi, seluruh Insan BRI baik Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI di seluruh Indonesia melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang tertuang dalam:

1. GCG *Statement* untuk Dewan Komisaris dan Direksi
2. Komitmen Forum Peningkatan Kinerja untuk Pekerja BRI Selindo

Selain komitmen tersebut, penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa BRI dengan vendor/rekanan BRIuntuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Pendidikan dan Sosialisasi Tentang Pengendalian Gratifikasi

Secara rutin Unit Pengendalian Gratifikasi BRI (UPG BRI) telah menyampaikan kebijakan gratifikasi kepada seluruh pekerja melalui media pendidikan, sosialisasi rutin, dan melalui media komunikasi lainnya bekerja sama dengan BRI *Corporate University*, Divisi *Human Capital Bussiness Partner*, Divisi *Culture Transformation*, Divisi Layanan & *Contact Center*, *Corporate Secretary*, dan Divisi *Marketing & Communication*.

Beberapa bentuk pendidikan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh UPG BRI selama tahun 2020, antara lain yaitu:

1. Pendidikan *development & Enchancement* bagi pekerja serta pelaksanaan e-learning untuk mengukur tingkat pemaham pekerja terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi BRI bekerja sama dengan BRI *Corporate University.*
2. BRI *E-College* melalui webinar oleh UPG BRI yaitu C*ompliance Division* dan *Regional Risk Management & Compliance* di Kantor Wilayah kepada pekerja BRI Selindo dan Pekerja di Perusahaan Anak BRI dengan jumlah +/- 30 ribu peserta.
3. Penayangan video anti korupsi dan gratifikasi pada BRI Vision di seluruh unit kerja BRI dan LED Videotron BRI di kota solo, BSD dan Bandung bekerja sama dengan Divisi Layanan & *Contact Center* dan Divisi *Marketing & Communication.*
4. Penanyangan posted digital anti gratifikasi pada *landing page* pada aplikasi BRIStars (portal internal BRI)
5. Pemberian *reward* kepada Unit Kerja melalui event GRC *Culture Carnival*.
6. Penyampaian *reminder* larangan penerimaan/pemberian gratifikasi kepada seluruh Pekerja BRI selindo
7. Publikasi komitmen anti gratifikasi pada media cetak nasional.

Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi

Selain melalui pendidikan dan sosialisasi, salah satu langkah BRI untuk meningkatkan *awareness* pengendalian gratifikasi adalah dengan mewajibkan pelaporan gratifikasi bagi seluruh Insan BRI. Selama tahun 2020, jumlah laporan gratifikasi yang ada di BRI sebanyak 287 laporan.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Dalam melakukan pelaporan gratifikasi, seluruh Insan BRI wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi BRI melalui media pelaporan yang telah disediakan yaitu:

Human Capital System (BRIstars)
GCG Online System

Email: upg.bri@corp.bri.co.id

Surat ke Compliance Division BRI Gedung BRI 2 lantai 10, Jl. Jendral Sudirman kav. 44-46

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan

Penjelasan mekanisme pelaporan gratifikasi di BRI yaitu sebagai berikut:

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

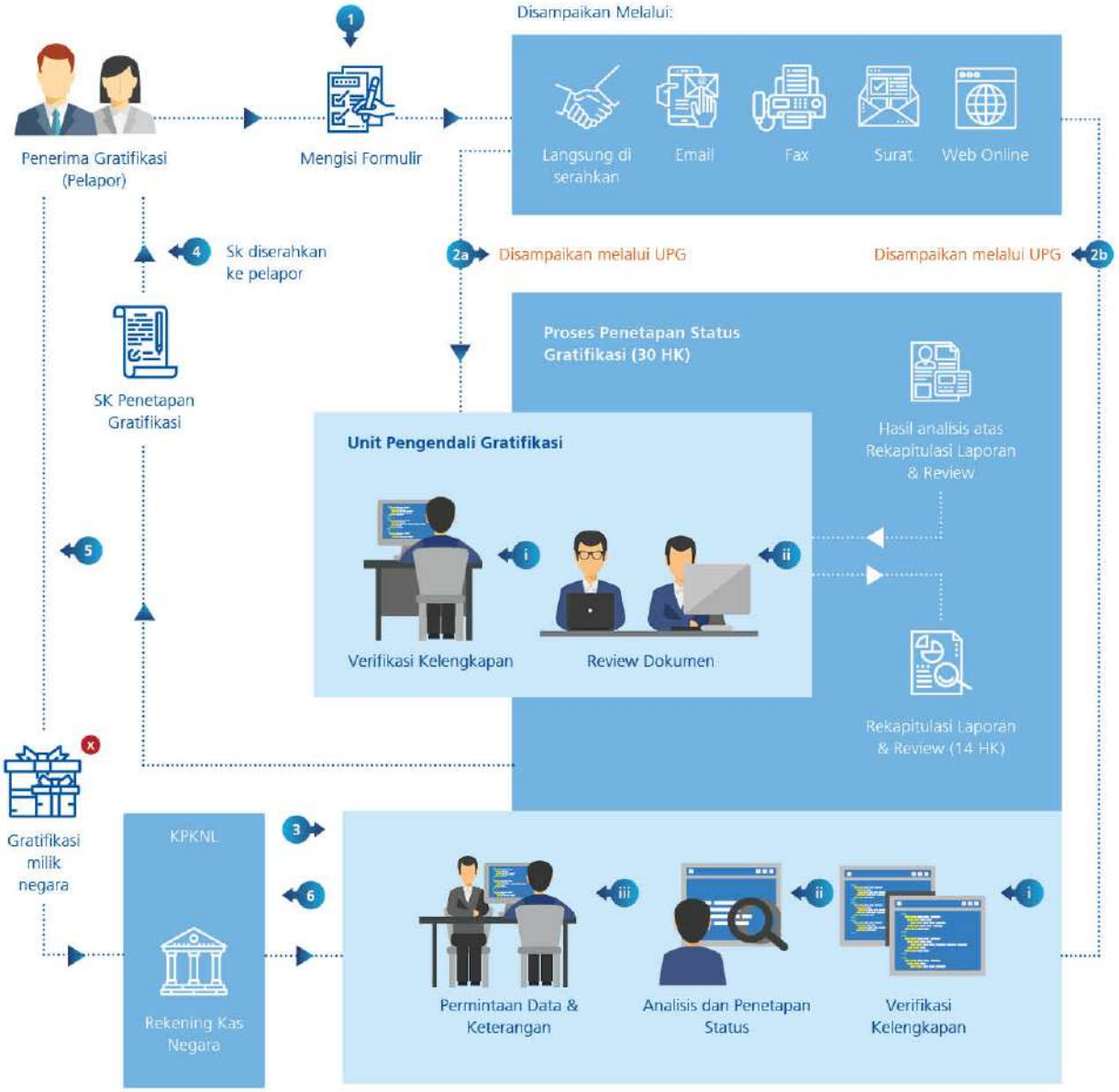

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

1. Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
   Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Edaran Direksi BRI No:SE.65-DIR/KEP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020. Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Koordinator Pelaporan LHKPN
   Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 319 Wajib Lapor LHKPN yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN untuk periode laporan tahun 2019 yang dilaporkan pada tahun 2020 sebagai berikut:

No	Jabatan	Wajib LHKPN	Wajib LKHPN yang telah Melaporkan		Wajib LKHPN yang belum Melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	12	12	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	299	283	94.65%	16	5.35%
	Total	319	303	94.98%	16	5.02%

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

KEBIJAKAN

Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest)* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prinsip dasar penananganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

KOMITMEN

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penangangan benturan kepentingan.

Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

1. Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclousure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

SOSIALISASI

BRI senantiasa melakuan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, kegiatan workshop, In House Training, Pembinaan dan *Monitoring* secara *onsite* ke unit kerja BRI, pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRI, dan pernyataan benturan kepentingan.

LAPORAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN 2020

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

PENCEGAHAN INSIDER TRADING

Insider Trading merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Kebijakan terkait kegiatan *insider trading* mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak tidak terbuka untuk umum.
2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktifitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan *illegal* di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan diatas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi insider trading yang dilakukan oleh insan BRI.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan adalah proses kegiatan dalam rangka memenuhi atau menyediakan kebutuhan barang dan/ atau jasa perusahaan dengan cara membeli atau sewa atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BRI bertujuan untuk mendukung operasional bank dan kinerja bisnis secara umum. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang aman, efektif, dan efisien.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk merupakan pedoman dalam melakukanpengelolaan aktiva tetap danpengadaan barang dan jasa untuk mendukungkegiatan operasional Bank BRI sesuai kualitas, kuantitasdan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaikserta tetap memperhatikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan BRI mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbkyang diberlakukan terhitung mulai bulan Maret tahun 2020.Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan LogistikBRI berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/ MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI memuat tata kelola aktiva tetap dan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dari disusunnya Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
2. Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.

Penyempurnaan terhadap Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan, perkembangan bisnis serta regulasi yang ada. Dengan demikian dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AKTIVA TETAP

Dalam melaksanakan pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta Pedoman Pelaksanaannya.

KODE ETIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode etik pengadaan barang dan/atau jasa di BRI sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaanbarang dan/atau jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjagakerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa untuk mencegahterjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untukmencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkansesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihakyang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaanbarang dan jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BRI dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BRI
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi :

Efisien	Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
Efektif	Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
Kompetitif	Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Transparan	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
Terbuka	Pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Adil dan Wajar	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.

Pengadaan Barang & Jasa

Akuntabel	Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
Standardisasi Barang dan/atau Jasa	Barang dan/atau jasa yang akan diadakan berpedoman pada standardisasi barang dan/atau jasa dan/atau sudah digunakan oleh bank/perusahaan lain.
Sentralisasi	Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Procurement & Logistic Operation Division, apabila dilaksanakan oleh unit kerja lain, maka harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip dari Pejabat yang Berwenang.
Desentralisasi	Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilimpahkan kepada unit kerja selain Procurement & Logistic Operation Division sampai pada batas kewenangan yang diberikan. Pelampauan terhadap kewenangan yang diberikan harus dimintakan persetujuan kepada Pejabat yang Berwenang.
Ditentukan dalam DRP dan/atau RKAP	Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan apabila sudah tercantum/ditentukan dalam DRP dan/atau RKAP yang telah disetujui Komisaris. Dalam hal rencana pengadaan barang dan/atau jasa tidak tercantum dslam DRP dan/atau RKAP, maka pengadaannya dapat dilakukan setelah ada revisi DRP dan/atau RKAP atau realokasi anggaran *(switching)* atas persetujuan Pejabat yang Berwenang.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kegiatan pengadaan dengan prinsip-prinsip diatas, maka Bank BRI mengimplementasikannya melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi dan Independensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Senantiasa patuh terhadap regulasi internal dan eksternal
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan sertaserta pengendalian risiko.
4. Senantiasa berpedoman pada Budaya Perusahaan bank BRI yang berlandaskan pada nilai-nilai:
   a. AKHLAK BUMN (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
   b. BRILIAN (*Integrity, Profesionalism, Trust, Innovation, Customer Centric*);
   c. *Good Corporate Governance*; dan
   d. Kode Etik Perusahaan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

PROSEDUR/MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:

*) terdapat kegiatan, antara lain: Alokasi Anggaran, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Ijin Pelaksanaan Pengadaan kepada Pejabat yang Berwenang

1. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan.Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.
2. Dengan adanya organisasi yang lebih *agile* di Direktorat MAT & Pengadaan, proses pengadaan dapat dilaksanakan lebih cepat dengan dibentuknya *Team Procurement.* Team ini melibatkan fungsi-fungsi di Direktorat MAT & Pengadaan antara lain: Fungsi Anggaran & *Cost Control,* Fungsi Operasional Pengadaan, serta Fungsi Estimasi. Fungsi Estimasi bertugas dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan.Sejak tahun 2017, BRI telah membentuk Unit Kerja Estimasi, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI. Pada organisasi baru Direktorat MAT dan Pengadaan saat ini, Unit Kerja Estimasi atau *Appraisal & Cost Estimation Departement*dibawahkan oleh *Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division*.
3. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.
4. Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.
5. Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.
6. Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menetapkan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah *Good Corporate Governance.*

PENGELOLAAN REKANAN

1. Pengelolaan rekanan mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon rekanan, *monitoring* dan evaluasi kinerja rekanan hingga penetapan daftar hitam rekanan, sehingga dengan adanya pengelolaan rekanan diharapkan BRI mempunyai *database* penyedia barang/jasa yang siap dan mampu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI.
2. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar(SKT) BRI. SKT adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/ jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.
3. Penerbitan SKT dilakukan secara selektif kepada calon rekanan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak dibatasi dalam sektor kegiatan usaha tertentu sepanjang produk/jasa yang dihasilkan diperlukan oleh BRI.
4. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/ jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa tersebut lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Evaluasi dilakukan terhadap rekanan dengan variable penilaian meliputi *procurement process*, *quality*, *delivery*, *responsiveness*, dan *maintenance period*.
6. BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan SKT yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (SKT Online), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai dengan penerbitan SKT BRI melalui Aplikasi SKT Online.

Pengadaan Barang & Jasa

PROGRAM EDUKASI PADA MITRA/REKANAN (VENDOR GATHERING)

Pada tahun 2020, BRI telah melakukan *Vendor Gathering* melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Rekanan/Pemasok Bank BRI. Adapun pemaparan materi dari kegiatan vendor gathering yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Sharing* mengenai visi dan misi Bank BRI ke depan.
2. Sarana untuk mempererat jalinan kerjasama yang harmonis antara BRI dengan mitra kerja Bank BRI.
3. Forum komunikasi untuk mendapatkan masukan dari rekanan untuk perbaikan proses pengadaan di BRI.
4. Sosialisasi ISO 37001:2016 serta evaluasi terhadap rekanan.

INDEX KEPUASAN PELANGGAN EKSTERNAL/REKANAN

Dalam rangka untuk meningkatkan standar kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Bank BRI, Bank BRI pada tahun 2020 telahmelakukan survey kepada rekanan penyedia barang jasa dengan skor hasil survey sebesar 3.13 (skala maksimal 4).

PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan maka perlu dilakukan penguatan pada mutu dan kualitas SDM. Penguatan ini dilakukan melalui pendidikan dan sertifikasi. Pendidikan-pendidikan tertentu wajib dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan antara lain: *supply chain manajement*, *negotiation skill*, tata cara estimasi, dll. Selanjutnya Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan akan melaksanakan sertifikasi profesi (sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasa, sertifikasi profesi estimasi, sertifikasi kearsipan, dan sertifikasi lainnya) secara ter-program baik sertifikasi nasional maupun internasional.

PENERAPAN ISO ISO 37001:2016 DAN ISO 9001:2016

Sertifikasi ISO

ISO 37001:2016	ISO 9001:2016		
Anti Bribery Management System	**Provision of Estabilishment Strategy and Policy (Inc. Vendor Mgt.)**	**Provision of Inventory Purchase Payment and Archiving Service**	**Provision of Cost Estimation Processes**
Standar international mengenai **Sistem Manajemen Anti Penyuapan** • Register No.SAB 00019 • Expired date 9 Agustus 2023	Standar international di bidang Sistem Manajemen mutu **dan kebijakan (incl. mgt. vendor)** • Register No.10156337 • Expiry date: 25 November 2021	Standar international di bidang Sistem Manajemen mutu persediaan, pembayaran dan pengarsipan	Standar international di bidang Sistem Manajemen mutu proses estimasi

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2020

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka untuk pengadaan barang dan jasa dalam batas nilai tertentu,diterapkan mekanisme pengambilan keputusan bersama oleh para Pejabat Pemutus Pengadaan dalam suatu forum Komite Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan adanya Putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan putusan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan secara lebih seksama, akuntabel dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta dalam proses pengadaan barang dan jasa.

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, BRI senantiasa melakukan audit secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal BRI.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi
   a. Visi dan Misi Perusahaan
   b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
   c. Komposisi dan profil Direksi
   d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT & DANA BESAR

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier* 1) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK dan Penyedia Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar *(large exposure*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.36-DIR/KRD/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait, dan hal ini wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris.Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit BRI.

Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank BRI pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar (*market rate*) dan wajar (*arm length basis*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

KEWAJARAN TRANSAKSI KEPADA PIHAK TERKAIT

Berdasarkan ketentuan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", pihak berelasi didefinisikan antara lain:

1. Orang yang:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
   b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
   d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.

MEKANISME PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

1. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank diajukan secara mandiri atau kolektif melalui Divisi Operasional Kredit (OPK) dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Pemberian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib di*review* terlebih dahulu oleh Komite Independen BRI sebelum dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
3. Pemberian Penyediaan Dana (khusus kredit) kepada Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan secara adil dan wajar (*equal treatment*).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Ketentuan tentang pengaturan limit BMPK adalah sebagai berikut:
Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah (aset yang memiliki kualitas kurang lancar,diragukan atau macet dan/atau telah dilakukan restrukturisasi) dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
   a. Pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana; dan/atau
   b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
   a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;

b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3 dan 4.

Pihak terkait meliputi:
1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank.
2. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali.
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana pada poin 1 bertindak sebagai pengendali.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank.
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal.
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3.
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank.
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3. Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Perusahaan yang:
   a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan
   b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3 bertindak sebagai pengendali.
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 9 memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut.
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 9 diatas.
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11.
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11.
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11 kepada bank lain tersebut.
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK SELAIN PIHAK TERKAIT

1. Penyediaan Dana kepada:
   a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
   b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait
2. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.
3. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
4. Penggolongan kelompok Peminjam dengan kriteria:
   a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;

   b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
   c. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
   d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
   e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
5. Penggolongan Kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
   a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
   b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
   c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan.
   d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma.
   e. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

PENYEDIAAN DANA

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.

1. Jenis- Jenis Penyediaan Dana yaitu:
   a. Penempatan
   b. Transaksi Derivatif
   c. Surat Berharga
   d. Tagihan Akseptasi
   e. Kredit
   f. Penyertaan Modal
   g. Transaksi Rekening Administratif.
2. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
3. Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk:
   a. Pengadaan pangan;
   b. Pengadaan rumah sangat sederhana;
   c. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energy lain yang setara;
   d. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
   e. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
   f. Pengadaan dan/atau pengelolaan komoditas yang berorientasi ekspor;
   g. Pengadaan instruktur penunjang transportasi darat, laut dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau
   h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) yang ditetapkan dan diprioritaskan pemerintah pusat.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

PENGECUALIAN DARI PERHITUNGAN BMPK

Penempatan pada setiap Prime Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK dengan ketentuan:
1. Penempatan pada setiap Prime Bank;
2. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank;
3. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
4. Penempatan pada Bank Indonesia;
5. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
6. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia.
7. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan dan Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.
8. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu.
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurangModal.

BMPK	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Tidak Terkait (Kelompok Peminjam)	BUMN
Pelanggaran BMPK	-	-	-	-
Pelampauan BMPK	-	-	-	-

TRANSAKSI KEPADA PIHAK TERKAIT

Pada tahun 2020, transaksi kepada pihak terkait (*Related Party Transaction*) telah dilakukan secara adil, berlaku umum (*normal commercial terms*), wajar (*arm length basis*) dengan rincian sebagai berikut:

Penyediaan dana	Jumlah Debitur	OS (Juta)
Pihak Terkait	614	5.992.379
Individu	50	109.361.728
top 25 BUMN	25	71.231.545
top 25 non BUMN	25	58.646.765
Group	50	152.548.248
Top 25 Group BUMN	25	82.558.723
Top 25 Group Non BUMN	25	68.745.599

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN POLITIK

Selama periode pelaporan, BRI tidak memberikan/menyalurkan dana untuk kegiatan politik.

RENCANA STRATEGIS BANK

RENCANA JANGKA PENDEK BRI TAHUN 2021

Disrupsi pandemic Covid-19 tidak hanya berdampak pada aktivitas perekonomian nasional temasuk pula industri perbankan. Sebagai entitas bisnis, BRI turut berperan dalam menopang ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas layanan perbankan yang diberikan. BRI telah melakukan review atas rencana bisnis yang telah dipersiapkan guna mengakomodasi dampak lanjutan dari pandemic Covid-19. Untuk mewujudkan tema tahunan yang telah ditetapkan di tahun 2021 yaitu menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Indonesia",* BRI telah memperkuat fondasi melalui rumusan strategi perusahaan. Transformasi digital yang dilakukan BRI serta pengembangan sistem pendukung *mobile* dan digital *banking services* diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, BRI menyusun langkah *survival strategy* antara lain:

1. Efisiensi
   Menjaga efisiensi perusahaan melalui *re-engineering* proses bisnis dengan pendekatan digital, perbaikan komposisi CASA dan penurunan COF.

2. Pertumbuhan Kredit yang selektif
   Ekspansi kredit terus dilakukan secara cermat dan selektif pada produk *low risk* terutama produk terkait program pemerintah, ekspansi sektor bisnis tidak terdampak *negative* Covid-19 dan eksplorasi *new source of growth* diantaranya segmen *Ultra Micro.*

3. Perbaikan Kualitas Aset
   Fokus memperbaiki kualitas kredit, melakukan *monitoring* atas restrukturisasi kredit bermasalah sehingga dapat menekan biaya CKPN serta optimalisasi *recovery rate*.

4. *Strengthening* Sinergi BRI Group
   Fokus pada penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan Anak Perusahaan maupun sesama Perusahaan Anak melalui berbagai program.

5. Mendorong Peningkatan Transaksi
   Mendorong transaksi yang lebih masif untuk meningkatkan perolehan FBI sekaligus potensi CASA. Pengembangan bisnis *value chain* dan *transaction banking* di seluruh segmen bisnis serta implementasi layanan *digital banking* diharapkan dapat mengoptimalkan *fee-based income* yang menjadi salat satu fokus sumber pendapatan tahun 2021.

Program Jangka Pendek tersebut merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI serta faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut, antara lain:

1. Dinamika pandemi Covid-19 serta penanganannya yang memberikan tekanan pada perekonomian dunia.
2. Penerapan kebijakan pemerintah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Ketidakpastian perekonomian Indonesia menyebabkan perlambatan pertumbuhan kredit, peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL), namun menyebabkan peningkatan dana (CASA) secara umum.
4. Perkembangan teknologi dan pola perilaku nasabah yang cepat berubah sebagai akibat penggunaan teknologi serta perkembangan produk dan fitur memberikan ancaman atas produk pengganti di industri perbankan.

Rencana Strategis Bank

RENCANA JANGKA MENENGAH

Recana jangka menengah BRI merupakan *milestone* untuk pencapaian visi dan misi bank BRI. Guna menjaga pertumbuhan bisnis BRI yang sustain ditengah disrupsi pandemi Covid-19, telah dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi target jangka menengah BRI baik yang tertuang dalam sasaran kualitatif dan kuantitatif.

Dalam jangka menengah BRI fokus pada beberapa hal berikut:

1. *Financial*
   Pada aspek finansial, BRI fokus pada efisiensi melalui perbaikan komposisi CASA maupun penurunan suku bunga spesial, melakukan eksplorasi *new source of growth*, peningkatan *recovery rate* serta pengembangan bisnis sejalan dengan stimulus Pemerintah.

2. *Customer*
   Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah, BRI melakukan optimalisasi *value chain* nasabah menengah dan korporasi, pengembangan *omni channel* yang *customer centric*, pengembangan ekosistem *micro payment*, dan *cross selling* produk layanan BRI Group.

3. *Product & Process*
   Guna memberikan layanan yang optimal, BRI melakukan digitalisasi produk maupun proses bisnis, meningkatkan *realibility* IT, perbaikan *risk scoring system*, serta optimalisasi *big data analytics.*

4. *Channel*
   Bertujuan memberikan pelayanan yang prima, BRI melakukan penataan jaringan kerja, optimalisasi BRILink Agent, dan pemanfaatan BRI API (*Application Program Interface*) sebagai *channel* Kerjasama dengan pihak ketiga.

5. *Culture*
   Mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, BRI melakukan transformasi *culture* yang berbasis kinerja.

RENCANA JANGKA PANJANG

Beragam tantangan selama tahun 2020, baik yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, perkembangan teknologi yang sangat cepat, maupun tantangan pertumbuhan internal mendorong BRI untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana jangka panjang hingga strategi pencapaian kinerja. Untuk itu, BRI telah melakukan *review* pada *Corporate Plan* 2021-2025 BRI yang kemudian disebut sebagai BRIVolution 2.0. Hasil dari *review* tersebut, BRI melakukan penyesuaian pada visi BRI tahun 2025 yaitu menjadi *"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion"*.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Wujud komitmen penerapan GCG oleh BRI Group dalam penerapan tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulator. BRI sebagai Entitas Utama senantiasa melakukan penilaian sendiri dan melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

BRI sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020 untuk periode semester I dan semester II. Adapun hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Tata Kelola Terintegrasi

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GROUP

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan diberbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group.

Kebijakan transaksi intra group diatur dalam ketentuan internal BRI yang ditetapkan dalam SK Direksi BRI No:S.72- DIR/DMR/12/2016 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi BRI dan Surat Edaran (SE) BRI No. SE.47-DIR/SBM/09/2020 tentang Pengelolaan Sinergi BRI Group. Pengendalian risiko intra group bertujuan agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan ketergantungan LJK baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan.

BRI senantiasa mengawasi kinerja dan risiko bisnis yang timbul pada perusahaan anak dengan memastikan transaksi intra group sesuai aturan dan limit yang ditetapkan oleh regulator.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BRI

Sesuai surat BRI kepada OJK No. B.72-DIR/KPT/GCG/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Struktur Konglomerasi Keuangan BRI per 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR KEPEMILIKAN KONGLOMERASI KEUANGAN BRI

Struktur Kepemilikan sebagaimana dilaporkan pada bab Profil Perusahaan.

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur kepengurusan konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Komite TKT	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
BRIsyariah	√	√	√	√
BRI Agro	√	√	√	√
BRI Life	√	√	√	√
BRI Finance	√	√	√	√
BRI Venture	√	√	√	√
Danareksa Sekuritas	√	√	√	√
BRINS	√	√	√	√

STRUKTUR ORGANISASI ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN BRI

ENTITAS UTAMA

Struktur Organisasi Entitas Utama dibahas dalam BAB Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN BRI

BRIsyariah

Dewan Komisaris	
Parman Nataatmadja *)	Komisaris Utama
Ernie Tisnawati Sule *)	Komisaris Independen*
Eko Suwardi	Komisaris Independen
Sutanto	Komisaris

*) Seluruhnya diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Namun demikian, per 5 November 2020, Sdr Parman Nataatmadja dan Sdri Ernie Tisnawati Sule sudah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris BRI Syariah pada RUPSLB tanggal 5 November 2020.

Tata Kelola Terintegrasi

Direksi	
Ngatari	Direktur Utama
Kokok Alun Akbar	Direktur
Fidri Arnaldy	Direktur
Fahmi Subandi	Direktur
Yana Soeprianan	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH - BRISYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRISyariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRISyariah, namun DPS juga melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Dewan Pengawas	
KH. Didin Hafidhuddin	Ketua DPS
M. Gunawan Yasni	Anggota DPS

*) Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

BRI Agro

Dewan Komisaris| Board of Commissioners	
Budi Satria	Komisaris Utama
Anna Maria Tjiadarma	Komisaris Independen
A.Y. Soepadmo	Komisaris Independen
I.B.K. Suamba Manuaba*	Komisaris

Direksi | Board of Directors	
Ebeneser Girsang	Direktur Utama
Sigit Murtiyoso	Direktur
Herry Prayudi	Direktur
Arif Wicaksono	Direktur
Ernawan	Direktur

BRI Life

Dewan Komisaris| Board of Commissioners	
Muhammad Syafri Rozi *	Komisaris Utama
Premita Fifi Widhiawati **	Komisaris Independen
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
Eko Wahyu Andriastono	Komisaris Independen

Direksi	
Iwan Pasila*	Direktur Utama
Khairi Setiawan	Direktur
Ansar Arifin	Direktur
Danny Cahya Rukmana	Direktur
Anik Hidayati	Direktur

*) Diangkat dalam RUPSLB tanggal 14 Agustus 2020 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
**) Diangkat dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2020 dan telah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per tanggal 10 November 2020

DEWAN PENGAWAS SYARIAH - BRILIFE

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas	
KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua DPS
Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota DPS
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota DPS

BRI Finance

Dewan Komisaris	
I Komang Sudiarsa	Komisaris Utama
Ngalim Sawega	Komisaris
Sumantri Soemarno	Komisaris Independen

Tata Kelola Terintegrasi

Direksi	
Azizatun Azimah	Direktur Utama
Ari Prayuwana	Direktur
Primartono Gunawan	Direktur
Willy Halim Sugiarda	Direktur

BRI Venture

Dewan Komisaris	
Hadi Susanto	Komisaris Utama
Arip Tirta*	Komisaris Independen
Agoosh Yoosran*	Komisaris Independen

Direksi | Board of Directors	
Nicko Widjaja	Direktur Utama
Yosephine Ajeng Sekar Putih	Direktur
William Gozali	Direktur

*) Diangkat dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2020 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Rico Rizal B*	Komisaris Utama
Soehandjono	Komisaris | Commissioner
Sumihar Manullang	Komisaris Independen | Independent Commissioner

*) Diangkat pada 10 Februari 2021 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Direksi | Board of Directors	
Friderica Widyasari	Direktur Utama | President Director
Budi Susanto	Direktur | Director
Santri Suryandari	Direktur | Director
Boumediene Samurung Halomoan	Direktur | Director

BRINS

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Darnawi	Komisaris Utama
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
Imam Sundoro	Komisaris Independen

Direksi | Board of Directors	
Fankar Umran	Direktur Utama
Arif Suhirman	Direktur
Sonny Harsono	Direktur
Adi Setianto	Direktur
Ade Zulfikar	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) - BRINS

Bertugas tidak terbatas hanya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun memastikan aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
Ibu Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua DPS
Bapak Muhammad Syukhandri	Anggota DPS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BRI, Entitas Utama memiliki pedoman untuk mendorong LJK Konglomerasi keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasi pedoman tersebut, seluruh organ entitas utama dan LJK konglomerasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi.

Direksi Entitas Utama

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris Anggota LJK

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris LJK Konglomerasi Keuangan

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Pengawas Syariah BRIsyariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran DPS BRIsyariah

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut.

Dewan Pengawas Syariah BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis di*support* oleh manajemen, terhadap:

1. Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
2. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
3. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
3. Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
4. Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
5. Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
6. Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
8. Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
9. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
10. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10, DPS

wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
4. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Direksi LJK Konglomerasi Keuangan

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.
3. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Mengacu pada POJK tentang Tata Kelola Terintegrasi, POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI dan disetujui oleh Direksi Konglomerasi Keuangan BRI tentang Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI, tertuang tugas dan tanggung jawab SKAI Terintegrasi sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direksi Utama Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam konglomerasi keuangan minimal meliputi:
   a. Laporan kegiatan audit dan laporan pokok-pokok hasil audit perusahaan anak.
   b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian *fraud* signifikan yang terjadi di Perusahaan Anak.
   c. Kualitas SKAI Perusahaan Anak yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, Sumber Daya Manusia (SDM) dan *tools* audit.

Tata Kelola Terintegrasi

3. Melaksanakan audit atau join audit dengan SKAI Perusahaan Anak atau berdasarkan laporan dan internal audit Perusahaan Anak secara independen, objektif dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak setelah mendapat persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.
4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang ditaur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI Perusahaan Anak secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
6. SKAI Teirntegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
8. SKAI terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi pada perusahaan dengan mengedapankan efektivitas fungsi pengendalian.

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2020

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan dua kali rapat bersama LJK Konglomerasi Keuangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2019, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Semester II 2019, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2019, dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester II 2019
3. Fungsi Kepatuhan dan Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I 2020
4. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I 2020

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama tahun 2020 sebagai berikut:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada konglomerasi keuangan.
3. Penilaian *self assessment* TKT pada konglomerasi keuangan BRI.
4. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi *strategic business partner* dalam mendukung tujuan perusahaan dalam konglomerasi keuangan dan untuk memastikan pelaksanaan audit intern di LJK dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, maka selama tahun 2020 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Evaluasi terhadap fokus dan strategi audit SKAI LJK sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2020 masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring, sbb:
   a. Monitoring pencapaian kinerja LJK
   b. Monitoring Laporan Hasil Audit SKAI LJK
   c. Monitoring tindak lanjut temuan signifikan LJK
   d. Monitoring pemenuhan SDM Audit LJK

3. Audit individual terhadap BRI Danareksa Sekuritas dan BRINS.
4. *Joint audit* dengan SKAI LJK BRI Syariah terkait *project* Qanun dan SKAI BRI Agro.
5. Melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* (QAIP) di SKAI LJK dalam rangka mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. QAIP yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi terhadap SKAI LJK dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar, kode etik Auditor dan menilai efisiensi serta efektivitas aktivitas audit internal untuk kemudian diidentifikasi peluang peningkatannya. Selama tahun 2020, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan *Quality Assurance* terhadap seluruh SKAI LJK (BRI Syariah, BRI Life, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Agro, BRI Finance, BRI Insurance)
6. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan melalui penyelenggaran pendidikan dengan melibatkan perwakilan Auditor LJK dengan total peserta 61 orang, sbb:
   a. *In House Training* Kepala Audit Intern (6- 7 Februari 2020): 6 peserta
   b. *Training root cause analysis*: 22 peserta
   c. *Training* Penulisan Laporan Audit: 12 peserta
   d. *Training* Teknik investigasi: 3 peserta
   e. *Training* Review Penulisan Laporan Audit: 10 peserta
   f. *Training Risk Based Audit*: 6 peserta
   g. Panduan Audit Intern Lateral Joiner: 2 peserta
7. Pendampingan pengembangan metodologi & tools:
   a. Penyusunan program audit SKAI BRI Danareksa Sekuritas untuk aktivitas SDM & logistik.
   b. Brainstorming pengembangan audit tools SKAI BRINS.
   c. Pengembangan indikator fraud SKAI BRI Finance
8. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dilakukan setiap semester.
9. *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester. Hasil penilaian sendiri terhadap Faktor 5 Indikator Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi baik meliputi aspek struktur, proses dan hasil adalah 1 (sangat baik). Atas penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum SKAI Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
10. Dalam rangka akselarasi proses *transfer knowledge* dari SKAI BRI kepada SKAI LJK, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI LJK dengan rincian sebagai berikut:
    a. BRI Agro : Kepala SKAI (1 Orang), Wakil Kepala SKAI (1 Orang) , Auditor TI (1 Orang) , Auditor (2 Orang)
    b. BRI Life : KTA (1 Orang), Auditor (3 Orang)
    c. BRI Finance : Group Head (1 Orang), Auditor (2 Orang)

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selama periode tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.
5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.
6. *Stress Test* Terintegrasi

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagi BRI, program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR) merupakan bagian dari strategi keberlanjutan. BRI menjalankannya melalui prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik terbaik GCG. BRI berkomitmen penuh dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai program utama Pemerintah Indonesia dalam pembangunan bangsa. Apalagi BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara sekaligus lembaga keuangan terbesar di Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai *financial intermediary*.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial BRI

Tanggung jawab sosial merupakan perwujudan etika Perusahaan dalam membangun kinerja keberlanjutan. Pertanggungjawaban ini tak hanya sebatas pada pemberian dana bantuan, tapi juga dengan memperhatikan aspek 3P yaitu *Pro People*, *Pro Planet*, dan *Pro Profit* agar dapat berjalan beriringan dengan kinerja Perusahaan. Hal ini sejalan dengan salah satu butir pernyataan Misi Perusahaan, yakni Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik terbaik *good corporate governance*.

Sesuai dengan pernyataan misi, BRI berkomitmen mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik di setiap operasional Bank. SDGs merupakan prakarsa bersama skala global dalam menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek lingkungan, sosial dan ekonomi pada setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan, baik di lingkup pemerintahan maupun dunia usaha, yang dirumuskan dalam 17 tujuan pembangunan bekelanjutan – *Global Goals.* Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya Tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai Bank terbesar di Indonesia, BRI menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No.51/POJK.03/2017.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan perwujudan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, BRI menetapkan berbagai inisiatif strategis, mencakup:

- Pemberian dukungan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, yakni sektor-sektor yang memiliki *multiflier effect* tinggi seperti energi, pertanian, industri pengolahan, infrastruktur, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Penyediaan akses keuangan bagi seluruh masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu dan daerah terpencil.
- Partisipasi aktif dalam mewujukan upaya bersama bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam melestarikan lingkungan.
- Penerapan kebijakan pembiayaan kredit pada sektor-sektor usaha ramah lingkungan dan tersertifikasi pengelolaan analisis dampak lingkungan secara konsisten.
- Pengelolaan operasional yang efisien dan ramah lingkungan.
- Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman kebijakan serta prosedur sosial dan lingkungan serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

FIRST MOVER ON SUSTAINABLE BANKING – INISIATIF BRI DALAM ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE)

BRI bersama enam bank nasional dan satu bank syariah lainnya telah ditetapkan OJK sebagai '*First Movers on Sustainable Banking*' pada tahun 2017. Penetapan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Jangka Menengah Peta Jalan Keuangan Keberlanjutan OJK 2015-2019. Sesuai dengan rencana tersebut, di tahun 2018 BRI bersama ketujuh bank lainnya turut membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). IKBI merupakan forum komunikasi bagi ketujuh bank dalam mendukung penerapan seluruh program dalam peta jalan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017.

Peran BRI di IKBI menunjukkan besarnya dukungan dan komitmen Perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan melalui penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

BRI berupaya mengedepankan program-program strategis, melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan, serta menginisiasi beragam proyek-proyek rintisan dalam rangka mengembangkan model bisnis hijau yang aplikatif.

BRI Initiatives on ESG

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

2020:

Pada Tahun 2020, BRI telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait ESG diantaranya adalah:

1. Program *Capacity Building*
   Selama tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai program *capacity building* dalam bentuk *sharing session*, webinar, maupun pelatihan/*training* kepada pekerja dan Nasabah BRI.
2. Kampanye pengurangan plastik
   Dalam rangka pengurangan limbah, melalui konsumsi air minum kemasan plastik, BRI melakukan kampanye penggunaan tumbler sebagai tempat air minum yang dapat digunakan berulang. Kampanye tersebut dilakukan melalui media sosial BRI kepada seluruh karyawan.
3. *Community Empowerment*
   Program sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada para pengusaha di Rumah Kreatif BUMN yang bertujuan untuk pemahaman terkait ekonomi dan *green business*.
4. *Mapping* portofolio debitur yang memiliki sertifikasi lingkungan
   Pemetaan terhadap debitur yang telah memiliki sertifikasi lingkungan berupa RSPO, ISPO, Proper, Amdal, dll.
5. Kerjasama dengan *merchant* ramah lingkungan
   Kerjasama melalui penjualan produk/barang ramah lingkungan kepada *merchant* yang memiliki *platform digital*.
6. Kebijakan *Green Sector*
   BRI telah meluncurkan kebijakan terbaru yang mengatur tentang *mapping* / klasifikasi produk pinjaman yang termasuk dalam green portofolio.
7. Audit terhadap *sustainable product*
   Pelaksanaan kegiatan audit terhadap produk dan jasa BRI yang termasuk dalam kategori *sustainable product*.
8. *Sustainable Finance Award*
   Pemberian award terhadap unit kerja Kantor Pusat BRI yang memiliki *awareness* dalam menciptakan kepedulian dan implementasi terhadap *sustainable finance*.

2013
- BRI menerbitkan Laporan Keberlanjutan sejak tahun 2013

2015
- Langkah awal Keuangan Keberlanjutan yang diinisiasi oleh OJK

2016
- Implementasi SDG
- BRI meraih penghargaan 1st Place and Best of the Best of Sustainable Finance Award 2016

2017
1. First Mover of Sustainable Finance
2. Kebijakan yang berhubungan dengan ESG
   - Kebijakan Keberlanjutan BRI
   - Kebijakan ESG Risk Management untuk CPO
   - Strategi implementasi Keberlanjutan Aset, Liabilitas & Operasional, & Sumber Daya Manusia

2018
- Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan 2019-2023

2019
1. Penerbitan Sustainability Bond
2. Pemetaan Corporate Bond
3. Program Capacity Building

DUE DILIGENT DAN MITIGASI TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Meskipun Bank bukan industri yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup dan masyarakat, namun Perusahaan sangat menyadari, aktivitas operasional Bank dapat memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan *due diligence* untuk menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan agar Bank dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnis bank.

Pada kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, Perusahaan menyusunnya secara berkesinambungan berdasarkan kebutuhan agar dapat sejalan dengan kepentingan bisnis Bank dan dapat memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini yang kemudian menjadi landasan bagi Bank dalam menyusun kebijakan serta merancang pendekatan yang tepat dalam hal pendistribusian tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, dan efeknya terhadap masyarakat sehingga Perusahaan maupun para pemangku kepentingan dapat memperoleh manfaat jangka panjang atas program-program tanggung jawab sosial yang telah disusun.

Kajian dampak sosial terhadap masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan program CSR yang menyinergikan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat . Sedangkan kajian dampak sosial terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan baik. Untuk mendapatkan *feed-back* atas mitigasi tersebut, BRI melaksanakan survei *engagement* pegawai secara berkala.

Kajian dampak terhadap ekonomi dilakukan dengan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kedua dokumen ini akan menjadi *guideline* bagi BRI dalam menyelaraskan jumlah portofolio pendanaan dan pembiayaan dengan upaya pencapaian SDGs dan meningkatkan persentasi portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan.

Kajian dampak terhadap lingkungan selain dilakukan melalui penyaluran CSR untuk pelestarian lingkungan dan program operasi perbankan yang ramah lingkungan, Bank juga melakukan tanggung jawabnya dalam bentuk penerapan kebijakan kredit yang ramah lingkungan. Kebijakan ini dilakukan untuk menilai kredit dengan memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memutuskan memberi kredit pada suatu proyek. Kebijakan ini dituangkan dalam *Loan Portofolio Guidelines* BRI. Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), AMDAL,
- Kajian/dokumen mengenai mutu/ kriteria baku kerusakan lingkungan,
- Izin lingkungan,
- Dokumen kajian pembuangan air limbah, dan lain-lain.

Selain mensyaratkan dokumen tersebut, persyaratan kredit yang dimiliki Bank juga dilakukan melalui pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa debitur telah memenuhi persyaratan lingkungan. Sebagai contoh, untuk sektor agribisnis dalam hal ini pembiayaan komoditi kelapa sawit terdapat syarat pemenuhan sertifikasi *sustainable palm oil* yaitu ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) maupun RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

BRI juga memberikan dukungan pendanaan bagi organisasi yang bergerak dalam pengembangan energi terbarukan, pembangunan transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan berbagai inisatif efisiensi energi, dan organisasi yang menerapkan konsep keberlanjutan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dengan demikian dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial lingkungan, BRI telah memenuhi prinsip-prinsip:

1. Kontribusi positif pada pencapaian SDGs.
2. Mendukung pemerataan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Melibatkan dan mengedepankan kerja sama harmonis untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memahami dan berempati pada keprihatinan masyarakat global terhadap isu-isu keberlanjutan.
6. Menjadi satu kesatuan dengan seluruh kegiatan usaha BRI.

Kajian dampak terhadap produk/jasa dan konsumen/nasabah dilakukan dengan menerapkan Standar Operasional dan Pedoman (SOP) tentang Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang sudah dimiliki Bank. Langkah ini diikuti dengan upaya untuk meningkatkan *Customer Experience* saat bertransaksi di BRI dilakukan melalui tiga aspek yaitu *People, Business Process, dan IT Process*. Setiap aspek memiliki peran tertentu berdasarkan tahapan *experience* yang dialami oleh *customer*, yaitu:

1. *Customer interaction*, merupakan tahapan ketika *customer* menggunakan produk dan layanan BRI.
   - *People* (*frontliner/agent Contact Center*): menangkap ekspektasi nasabah terhadap produk / layanan dan mengkomunikasikan produk/layanan kepada nasabah BRI
   - *Business Process* dan *IT Process*: memastikan ekspektasi nasabah terpenuhi saat menggunakan produk/layanan BRI dengan prosedur yang efektif dan IT yang handal
2. *Complaint handling* merupakan tahapan ketika muncul ketidakpuasan nasabah terhadap produk / layanan BRI
   - *People*: memulihkan/*recovery* komplain dengan cara penyelesaian dan pemberitahuan hasil komplain
   - *Busines process* dan *IT Process*: mengefisienkan proses penyelesaian komplain dengan strategi otomasi sistem, layanan swadaya/*self-service*, dan pemberdayaan *frontliner*

   Penyebab ketidakpuasan dianalisis dan menjadi *feedback* bagi perbaikan produk/layanan yang digunakan
3. *Dispute resolution* merupakan tahapan ketika hasil penyelesaian komplain tidak diterima/disepakati nasabah
   - *People*: nasabah dapat mengeskalasi permasalahan melalui proses mediasi di OJK, LAPSPI, atau lembaga penyelesaian sengketa komplain lainnya
   - *Business process* dan *IT process*: memastikan prosedur, sistem, dokumen pendukung, dan catatan transaksi yang dibutuhkan lengkap dan akurat untuk menunjang proses penyelesaian sengketa/*dispute* komplain.

Penyebab timbulnya sengketa/*dispute* dianalisis dan menjadi *feedback* bagi perbaikan proses *complaint handling*

Dari tahapan *experience* nasabah, BRI senantiasa menerima dan mengelola masukan yang penting untuk peningkatan kualitas produk dan layanan. BRI menyediakan sarana yang terintegrasi bagi nasabah untuk menyampaikan masukan dan harapan. Melalui media *omni-channel*, BRI menginformasikan mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menerima keluhan nasabah. Adapun penerimaan dan penyelesaian komplain dilakukan melalui saluran yang tersedia sebagai berikut:

Untuk mendukung pengalaman bertransaksi yang berfokus pada *customer centric*, BRI menerapkan budaya layanan SMART. Nilai SMART ini bermakna ***SIGAP*** dalam memberikan layanan, senantiasa memberikan ke**MUDAH**an kepada nasabah, senantiasa memberikan layanan yang **AKURAT** dan ***RAMAH***, serta ***TERAMPIL*** dalam membantu memberikan solusi bagi apapun kebutuhan nasabah.

Selain itu, untuk memonitor implementasi Budaya Layanan SMART dan mengetahui *Customer Satisfaction Index (CSI)* serta *Customer Loyalty Index (CLI)*, BRI melakukan pengukuran yang dilakukan dengan cara survei pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Pengukuran Konsistensi Kualitas Layanan Unit Kerja BRI
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Mystery Shopping* untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas layanan Unit Kerja yang meliputi *People* (CS, Teller, Satpam), *Process*, *E-Channel* (ATM/CRM), dan *Premises.*
2. Survei Kepuasan Nasabah
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Telephonic Interview* (CATI) terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank BRI (maksimal 3 hari setelah bertransaksi).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, Nasabah merasa puas terhadap produk/layanan BRI dan akan menggunakan terus di masa mendatang dengan hasil pengukuran kepuasan (CSI) dan loyalitas (CLI) sebagai berikut:

No	Parameter	Definisi	Skor BRI	Industri Perbankan
1	CSI	Indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan nasabah terhadap BRI	84.57%	78,03%
2	CLI	Indeks yang menggambarkan loyalitas nasabah, atau tingkat kecenderungan nasabah untuk datang kembali menggunakan produk dan jasa BRI	84.36%	60,64 %

Memperhatikan pentingnya hasil survei kepuasan nasabah untuk peningkatan kualitas produk/layanan di masa datang, BRI menindaklanjuti hasil survei kepuasan nasabah ini dengan melakukan *continues improvement.* Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan *Customer Experience* saat bertransaksi di BRI, sekaligus untuk mencapai target Bank BRI menjadi Bank terbaik dalam pengukuran kualitas layanan industri perbankan 2021.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK OLEH ATAU BERPENGARUH PADA KEGIATAN BANK

BRI telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang bertujuan agar Bank mengetahui dengan jelas siapa yang paling berkepentingan dengan Perusahaan secara timbal balik, hubungan apa yang dijalin, serta hal apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana memaksimalkan karakteristik media komunikasi sehingga Bank dapat berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif hingga akhirnya mampu mencapai target yang diharapkan. Selain itu, dengan identifikasi tersebut, Bank mampu mengelola pelibatan pemangku kepentingan sekaligus mengelola isu-isu yang berkembang dalam kelompok pemangku kepentingan.

Berdasarkan *due diligence* yang dilakukan, BRI telah menetapkan pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan Perusahaan, atau memiliki pengaruh dalam kegiatan Perusahaan, yaitu:

- Investor
- Nasabah
- Pekerja dan Serikat Pekerja
- Masyarakat Setempat / Komunitas
- Pemerintah
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sesuai hasil identifikasi dimaksud, BRI mencatatkan 9 (sembilan) topik material dengan dampak signifikansi tinggi terhadap keberlangsungan usaha Bank, sekaligus penting bagi pemangku kepentingan yakni:

- Digitalisasi & Emisi Gas Rumah Kaca
- Kinerja Ekonomi & Inklusi Keuangan
- Perlindungan Informasi Nasabah
- Implementasi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan RAKB
- Anti korupsi
- Ketenagakerjaan
- Tata Kelola Berkelanjutan
- Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung
- Komunitas Lokal

BRI kemudian menyusun inisiatif strategis untuk memitigasi dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan dan merangkumnya ke dalam Inisiatif Strategis Pencapaian Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

- Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca
- Memperkuat Produk & Layanan Bank melalui Digitalisasi
- Peningkatan *Awareness* dan Pemahaman tentang *Sustainable Finance* kepada Nasabah dan Pekerja BRI melalui *capacity building*
- Pembuatan Kebijakan *Green Portofolio* terhadap produk pinjaman
- Pelaksanaan kegiatan audit terhadap *sustainable product*
- Pemberian pelatihan usaha kepada pengusaha mikro terhadap *green business*
- Identifikasi debitur yang telah *comply* terhadap pemenuhan sertifikasi lingkungan

Kemudian dalam aspek Ekonomi, sebagai salah satu Grup Usaha Keuangan terbesar di Indonesia, pengembangan usaha BRI dilakukan dengan mengacu pada konsep keuangan berkelanjutan, yakni:

1. Memiliki kebijakan pemberian yang menegaskan bahwa kredit hanya diberikan pada sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan dan telah tersertifikasi pengelolaan analisis dampak lingkungan.
2. Tidak memberikan pembiayaan kredit pada usaha yang merusak lingkungan.
3. Pengelolaan operasional perusahaan secara efisien, ramah dan tidak merusak lingkungan.
4. Berpartisipasi dalam pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan.

TATA KELOLA DAN STRATEGI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam memastikan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam penerapan RAKB, BRI telah memutuskan Kebijakan Umum Keberlanjutan BRI melalui SK Direksi no.05-DIR/EMP/O&/2018 dan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor S.17-DIR/DMR/04/2017.

Penyusunan RAKB BRI sendiri diawasi langsung oleh Direktur Manajemen Risiko, dengan anggota *Steering Committee* mencakup Direktur Keuangan, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Kepatuhan, dibantu dengan tim keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*/SF) dari Divisi MPE, CDS, SKP, BUMN 2, Agribisnis, Bisnis Ritel dan Menengah, Divisi Kepatuhan, Divisi ARK, Divisi KRD dan Divisi ARK, serta Satuan Kerja Audit Internal BRI. Tim SF dikoordinasikan oleh Divisi Risiko Entreprise dan Manajemen Portofolio.

Sementara untuk kegiatan Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, BRI telah menetapkan unit kerja Small Sales Management Division (SSM) dan Corporate Secretary Division (SKP) sebagai penanggung jawab program. Kegiatan pengembangan masyarakat dalam program CSR dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Perencanaan, pelaksanan dan evaluasi program ini menjadi bagian dari tanggung jawab Divisi SSM dan Divisi SKP.

Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus untuk mendapatkan dukungan masyarakat bagi kesinambungan operasional maupun bisnis unit kerja BRI. Program Bina Lingkungan diwujudkan dengan program khusus BRI Peduli, yang terdiri dari beberapa program pendukung, yakni: Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari dan Indonesia Sejahtera. Program Kemitraan diwujudkan melalui pemberian pinjaman kemitraan dan bantuan hibah pembinaan yang dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Uraian lebih lengkap mengenai Program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan disampaikan pada bagian lain yang relevan dari uraian Bab ini.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Komitmen

BRI berkomitmen untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), baik hak asasi yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Bank mengimplementasikan HAM dalam bentuk jaminan kebebasan berserikat, non diskriminasi, kebebasan beribadah, serta perlakuan tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, dan Ras (SARA) baik kepada pegawai, nasabah, maupun pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dari seluruh karyawannya dijunjung dengan tinggi.

Kebijakan dan Strategi Penerapan

Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Bank di antaranya meliputi penegakan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pemastian mutu produk dan layanan perbankan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan latar belakang SARA, serta hal terkait lainnya.

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnis Bank, BRI menekankan pentingnya hak-hak karyawan terutama yang terkit HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berkembang, dan sebagainya. BRI telah memiliki sejumlah prosedur dan kebijakan yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan prosedur dan kebijakan yang dimiliki Bank agar tetap sejalan dengan prinsip HAM.

Kebijakan dasar pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkup BRI didasarkan pada prinsip HAM yang menekankan asas persamaan dan kesetaraan bagi seluruh pegawai. Strategi pengelolaan Human Capital yang diterapkan BRI mengacu pada Arsitektur *Human Capital* yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh jajaran organisasi dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan bermartabat.

Implementasi Hak Asasi Manusia

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait Hak Asasi Manusia di BRI dilaksanakan melalui pemberian jaminan pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Jaminan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
  Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak dasar karyawan yang dijamin oleh Undang-Undang. BRI sangat menyadari akan hal tersebut. Karena itu, Perusahaan memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat dan berkumpul.

  Sejak bulan Juni 1999 BRI telah memfasilitasi pembentukan Serikat Pekerja yang diberi nama Serikat Pekerja BRI dan telah memperoleh nomor pencatatan yang terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di bawah register No. 357/I/P/V/2005 tanggal 17 Mei 2005. Pembentukan Serikat Pekerja ini dilakukan sebagai wadah komunikasi yang efektif, demokratis, terbuka dan bertanggung jawab antara manajemen Bank dengan seluruh karyawan.

  Sementara guna menciptakan hubungan industrial yang bermartabat dan saling menghormati, BRI telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-9 yang telah disepakati bersama dan telah didaftarkan sejak 18 Desember 2019 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan No.KEP.013/PHIJSK-PK/PKB/I/2020. PKB ini berlaku untuk periode 1 November 2019 sampai dengan 1 November 2021. seluruh karyawan BRI 100% telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

- Kepastian Waktu Kerja
  Mendapatkan kepastian waktu kerja adalah hak dasar karyawan. BRI menjamin hak ini dengan menetapkan waktu kerja sesuai kesepakan dalam PKB. Hal ini dilakukan agar karyawan mendapatkan kehidupan kerja yang seimbang (*work life balance)*, dan untuk menghindari praktik kerja paksa di lingkup Bank. Waktu kerja yang ditetapkan Bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jika terdapat kondisi yang membuat suatu pekerjaan harus diselesaikan

dan dilaksanakan diluar waktu kerja, BRI menjamin hak-hak karyawan untuk mendapatkan kompensasi yang memadai, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Kepegawaian.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BRI bersama *taskforce* Covid -19 melakukan inisiasi *New Way of Working* dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan Pekerja.

Program-program yang dilakukan seperti pemberlakukan dan sosialisasi *protocol* kesehatan di Unit Kerja, pengadaan vaksin, pengadaan rapid test dan Swab Antigen secara berkala, program pemberian masker dan vitamin, pemberian desinfektan ruang kerja secara berkala, *monitoring self-checking* kesehatan harian pekerja, pemberlakuan *Working From Home* (*Remote Working*), *culture campaign* terkait *e-learning* BRISMART, *pilot project* terkait *productivity tools*, fasilitas armada bus antar jemput pekerja untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum, serta penyediaan fasilitas *Remote Working* di kota-kota satelit bernama BRIWORK untuk mendukung fleksibiltas kerja. BRI juga melakukan inisiasi berupa *safe house* untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpapar Covid-19 tanpa gejala.

- Hak Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja
  Cuti merupakan bagian dari HAM karyawan. Bank memberikan cuti kerja, cuti melahirkan dan izin tidak masuk kerja sesuai dengan pengajuan surat permohonan dari karyawan kepada atasan masing-masing Divisi. Terkait Cuti melahirkan, selain *maternity leave*, BRI juga memberikan *paternity leave* yang lebih banyak dibandingkan Undang-Undang. Hak cuti diberikan BRI dengan tetap menanggung hak-hak keuangan pekerja, sesuai butir-butir kesepakatan dalam PKB dan dalam Pedoman Kepegawaian. Adapun jenis cuti dalam tanggungan yang dapat diajukan oleh pekerja, adalah: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Haid, Cuti Melahirkan, Cuti Keguguran dan Cuti Tugas Khusus. Sedangkan jenis izin tidak masuk kerja yang dapat diberikan BRI atas kondisi tertentu mencakup: Pernikahan, Menikahkan anak yang terdaftar pada Perusahaan, Kelahiran anak dari istri yang terdaftar, Khitanan anak yang terdaftar, Kematian anggota keluarga langsung dan sebagainya. Jumlah izin yang diberikan diatur dalam Peraturan Pekerja.

- Menunaikan Kewajiban Beragama
  Menjalankan kegiatan keagamaan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu, BRI menghormati hak pekerja untuk mendapatkan waktu yang memadai guna menunaikan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan ritual ibadah sesuai agama masing-masing. BRI juga dapat memberikan izin bagi karyawan untuk melaksanakan perjalanan suci masing-masing umat beragama, sesuai permintaan karyawan.

- Memberi Kehidupan yang Layak
  Terkait memberi kehidupan yang layak pada seluruh karyawan, BRI memiliki kebijakan untuk remunerasi dan kesejahteraan karyawan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. Kep.208-DIR/SDM/08/2011 Tentang Peraturan Pengupahan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dimana dalam kebijakan tersebut Bank menerapkan sistem remunerasi dan kesejahteraan yang adil secara internal dan kompetitif terhadap pengupahan di pasar berdasarkan pencapaian kinerja dan beban tanggung jawab yang diemban, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kesetaraan *gender*

Jumlah Pekerja 3 Tahun terakhir (Jumlah Pekerja yang menduduki posisi *Leader/Management*)

Jabatan	2018				2019				2020			
	Wanita		Pria		Wanita		Pria		Wanita		Pria	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SEVP	1	25%	3	75%	2	50%	2	50%	3	60%	2	40%
EVP	10	10%	93	90%	13	12%	96	88%	13	13%	89	87%
VP & SVP	25	13%	173	87%	24	14%	153	86%	31	16%	161	84%
Pinca & Pincapem	140	14%	876	86%	150	15%	847	85%	158	15%	873	85%
Manager Setingkat (MP, MO, Wakabag)	123	29%	302	71%	117	21%	435	79%	102	22%	358	78%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen

Sebagai perusahaan publik, BRI diatur dan diawasi oleh banyak lembaga. Karena itu, Bank berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BRI terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi agar dapat memenangkan persaingan secara sehat. Bank melarang segala bentuk tindak pidana korupsi dan gratifikasi, khususnya untuk memenangkan persaingan di era persaingan bebas saat ini. Untuk itu, Bank menerapkan standar etika yang tinggi bagi seluruh karyawan dan senantiasa mematuhi hukum dan peraturan.

Kebijakan

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, termasuk di antaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik, persaingan yang sehat dan adil, dan mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Bank yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Implementasi kebijakan dari operasi yang adil ini tertuang dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan anti korupsi maupun *fraud*, kebijakan persaingan yang sehat, kebijakan benturan kepentingan, Kode Etik, Kebijakan Anti Gratifikasi, dan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).

Implementasi

Tanggung-jawab sosial terkait operasi yang adil diimplementasikan oleh BRI melalui:

- Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan
  Bank memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai kebijakan seleksi pemasok dalam rangka menjamin kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan BRI mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diberlakukan terhitung mulai bulan Maret tahun 2020. Bank selalu mengkaji kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan secara berkala, menyesuaikan perkembangan perusahaan dan industri.

- Anti Korupsi dan *Fraud*
  Bank berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dukungan ini diimplementasikan dengan kebijakan Anti Korupsi dan Anti-*Fraud* Perusahaan dalam SE.18-DIR/MOP/03/2020 tentang Strategi Anti *Fraud* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel *Self Learning* Anti Korupsi

Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Peserta
Fraud Awareness	06 Februari 2020	28 Februari 2020	79.712
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme	09 April 2020	15 Mei 2020	77.080
Kuis Pengantar APU PPT			
Kuis Penerapan APU PPT			76.012
Kuis Aktivitas Penerapan APU PPT			75.801
Kuis Sanksi APU PPT			76.297
Gratifikasi	17 Juli 2020	17 Agustus 2020	77.324
Budaya Kepatuhan	18 Agustus 2020	18 November 2020	71.711
Ujian *e-learning* Video Budaya Kepatuhan			
Ujian *e-learning* Infografis Budaya Kepatuhan			72.276
Quiz Program GRC *Culture* 2020 Divisi DOR	19 Oktober 2020	15 November 2020	66.013
Budaya Sadar Risiko GRC *Culture* 2020			
Strategi Anti Fraud GRC *Culture* 2020			64.580
Tanggap Darurat Bencana GRC *Culture* 2020			64.623

- Persaingan yang sehat dan anti monopoli
  Bank tunduk dan taat terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan daya saing dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat agar dapat memenangkan persaingan.

  Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Perseroan, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

- Pencegahan Benturan Kepentingan
  Seluruh jajaran pengurus maupun pekerja BRI dilarang terlibat didalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan kondisi benturan kepentingan. Apabila ada potensi dimaksud, maka para pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, baik di tingkat manajemen, termasuk manajemen puncak maupun pekerja, dilarang terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

- Kepatuhan terhadap Kode Etik
  BRI mewajibkan seluruh jajaran manajemen dan pekerja membuat Pernyataan Integritas dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan secara berkala. Pernyataan integritas pertama kali dilaksanakan pada saat proses penerimaan sebagai pekerja, setelah mengikuti tahapan induksi mengenai nilai-nilai perusahaan dan butir-butir ketentuan kode etik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Larangan Gratifikasi
  BRI menetapkan larangan pemberian maupun penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja. Untuk memastikan berlakunya larangan ini, BRI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada dalam pengelolaan Direktorat Kepatuhan. Bekerja sama dengan Direktorat Human Capital, unit ini mewajibkan seluruh jajaran manajemen dan pekerja BRI menanda tangani Pakta Integritas sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebagai penegasan kepada pihak eksternal, BRI selalu melakukan publikasi melalui media massa terkait pernyataan pelarangan memberi gratifikasi kepada seluruh pekerja BRI
- Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
  Bank telah membangun *Whistleblowing System* (WBS) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. BRI berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan. Mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di Bank yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image Bank diimplementasikan melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kelestarian Lingkungan

BRI berkomitmen penuh untuk menjalankan kegiatan operasional dengan lebih ramah lingkungan. Selain itu, melalui kegiatan pembiayaan yang dijalankan, BRI juga bertekad untuk mendukung terlaksananya kegiatan perekonomian yang semakin ramah lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kelestarian Lingkungan

KOMITMEN

Sebagai wujud komitmennya, BRI telah membentuk divisi khusus yang mengelola aspek lingkungan yang berada di bawah Procurement, Logistic Policy & Fixed Asset Management Division dan Procurement & Logistic Operation Division. Divisi ini menjalankan fungsi kebijakan, pemantauan, dan pengawasan strategis. Pengelolaan kelestarian lingkungan dalam hal operasional BRI dilakukan terhadap efisiensi air, pemakaian kertas, energi dan sumber daya alam lainnya.

Untuk melaporkan kegiatan dukungan terhadap pelestarian lingkungan, khususnya dan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan yang telah dijalankan secara lebih komprehensif, BRI juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan dengan mengacu pada standar pelaporan internasional, *Global Reporting Initiative* (GRI) secara rutin.

Kebijakan dan Strategi Penerapan

Sesuai dengan amanat POJK No.51/POJK.03/2017 dan mengacu pada undang-undang di bidang lingkungan yang relevan, BRI telah menyusun suatu kebijakan korporasi yang komprehensif, yang mengintegrasikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola ke dalam aspek ekonomi/bisnis yang selama ini telah berlangsung. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Keberlanjutan BRI melalui SK Nokep.S.16-DIR/DMR/04/2017, sebagai Kebijakan tertinggi implementasi *Sustainable Finance* BRI. Melalui kebijakan tersebut BRI menetapkan kerangka integrasi mitigasi risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam proses pelayanan nasabah dan proses assesmen kredit dan termasuk kebijakan sektoral terhadap sektor komoditas yang terekspos risiko lingkungan, termasuk kerusakan hutan. Adapun strategi implementasi kebijakan ini dituangkan dalam SK Nokep.17-DIR/DMR/04/2017), merupakan strategi untuk masing-masing bidang yaitu: *Asset, Liabilities*, Operasional dan *Human Capital*.

BRI juga menerbitkan kebijakan khusus terkait kegiatan perbankan ramah lingkungan, *green banking*, melalui penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sub Sektor Kelapa Sawit (SE Nose.S.27-DIR/DMR/04/2017), mengingat sub sektor ini ditengarai berdampak besar bagi lingkungan hutan tropis Indonesia. Kebijakan ini mengatur Indikator Penerapan LST yang harus dipertimbangkan di sektor kelapa sawit, dan *Checklist* persyaratan dokumen.

Secara keseluruhan, strategi BRI dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan adalah guna memastikan bahwa BRI memiliki bisnis yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Dasar penerapan kebijakan yang dijalankan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengedepankan prinsip penghematan energi, pelestarian lingkungan, perhatian pada aspek sosial dan tata kelola yang baik serta mengutamakan konservasi energi.
2. Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat disusun untuk menunjang kemajuan perusahaan dari segi *corporate image* yang dilakukan dengan efisiensi sumber daya.
3. Menerapkan inisiatif operasional: *paperless*, *e-office*, *green building*, *green IT infrastructure*, *digital operation*, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Program BRI Peduli, *E-Learning*, Penyediaan Parkir sepeda "*Bike to Work*" dan lain-lain.

Kegiatan yang Dilakukan

Realisasi kegiatan yang juga merupakan penerapan dari RAKB pada intinya terbagi kedalam empat kelompok besar, yakni: Pembiayaan Berwawasan Lingkungan, Pendanaan Berwawasan Lingkungan, Program BRI Peduli, dan Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan.

Pembiayaan Berwawasan Lingkungan
BRI berkomitmen menerapkan *Green Banking*, yakni kegiatan pembiayaan yang menekankan pada pemehuhan aspek-aspek kelestarian dari pelaku bisnis yang menerima dukungan pembiayaan dari Bank. BRI telah menyusun kebijakan pembiayaan ramah lingkungan untuk sektor Kelapa Sawit. Selain memperhatikan persyaratan lingkungan, Bank juga memperhatikan aspek sosial dari pembiayaan kelapa sawit, meliputi pemetaan area perkebunan untuk menghindari tumpang tindih dengan masyarakat sekitar dan area konservasi.

Debitur kelapa sawit BRI diwajibkan telah mendaftarkan atau telah tersertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) atau *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Persyaratan ini diberlakukan bagi seluruh debitur korporasi.

Pendekatan yang sama diberlakukan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan sejenis di industri perkebunan lain, maupun di sektor lain yang membutuhkan pengelolaan lahan dalam jumlah yang luas maupun di sektor manufaktur.

BRI juga membuka kesempatan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan, seperti PLTB, PLTA maupun PLTS, termasuk pembangkit-pembangkit *micro hydro* dipemukiman yang dekat dengan kawasan hutan lindung.

Pendanaan Berwawasan Lingkungan
BRI telah menginisiasi penggalangan dana ramah lingkungan, berupa penerbitan *Sustainability Bond* pertama di Indonesia dengan nilai nominal sebesar US$500 juta dan tenor 5 tahun di bulan Maret 2019. Seluruh dana yang diperoleh secara *mandatory* ditujukan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek-proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan keberlanjutan.

Selain melalui penerbitan Obligasi Keberlanjutan, BRI berusaha menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan global yang memiliki empati tinggi terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan.

Inisiatif Operasional Ramah Lingkungan
Beragam inisiatif ramah lingkungan yang dilaksanakan BRI diuraikan dalam pembahasan berikut.

- **Pengelolaan Energi**
  Pengelolaan energi dilakukan dengan prinsip penghematan, sejalan dengan Surat Divisi JBR No.B.612-JBR/KJR/07/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang menghimbau penghematan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah melakukan penghematan konsumsi energi, baik energi listrik maupun BBM. Pengelolaan energi yang optimal akan berarti juga pengurangan potensi emisi gas karbondioksida (gas rumah kaca) yang optimal.

  Penghematan pemakaian listrik dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan, yakni:
  1. Pemakaian lampu LED yang hemat energi
  2. Penerapan budaya kerja untuk mematikan listrik di ruangan jika tidak ada aktivitas kerja.
  3. Pengaturan jam operasional elevator.

  Komitmen BRI dalam menjaga lingkungan yang bersih juga diwujudkan dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk kendaraan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah sejak tahun 2012 yang mengharuskan kendaraan operasional semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi.

  Upaya penghematan konsumsi BBM kendaraan operasional dilakukan dengan membatasi usia pakai kendaraan operasional dan melakukan pemeliharaan berkala, agar konsumsi BBM lebih efisien. Selain itu, BRI juga mewajibkan setiap kendaraan menggunakan jenis BBM non subsidi yang lebih ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka kenaikan volume konsumsi BBM kendaraan operasional dapat dikendalikan.

  Untuk lebih jelasnya, informasi terperinci mengenai konsumsi Listrik dan BBM BRI tahun 2020 dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2020.

- **Pengelolaan Emisi**
  BRI juga turut berpartisipasi mengendalikan emisi karbondioksida (Gas Rumah Kaca/GRK), yakni salah satu gas buang dari hasil penggunaan bahan bakar fosil (BBM, Batubara dan Gas) baik untuk kegiatan pembangkitan pusat tenaga listrik, maupun untuk kegiatan transportasi. Konsumsi listrik, BBM dan intensitas transportasi perjalanan dinas menghasilkan emisi GRK dengan jumlah volume yang berbanding lurus dengan besaran

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kelestarian Lingkungan

konsumsi dimaksud. Oleh karenanya, pendekatan pengelolaan emisi GRK, sama dengan pendekatan yang dilakukan dalam mengelola konsumsi energi tersebut.

Dalam mengelola emisi GRK, BRI menjalankan kebijakan penghematan konsumsi listrik, efisiensi penggunaan kendaraan operasional dan pengelolaan intensitas perjalanan dinas.

Melalui pengembangan sistem komunikasi dan telekomunikasi berbasis teknologi digital via BRISat, Bank berupaya mengurangi intensitas perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dengan kantor-kantor Wilayah maupun Kantor Cabang. Rapat seperti ini, kini digantikan dengan sistem *Teleconference*. Perjalanan dinas kini diprioritaskan hanya dalam rangka kunjungan kepada calon nasabah atau dalam rangka *site visit* kepada nasabah eksisting sebagai langkah pengawasan atas kinerja bisnis mereka.

Untuk lebih jelasnya, informasi terperinci mengenai Pengelolaan Emisi terkait perjalanan dinas yang dilakukan oleh BRI selama tahun 2020 dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2020.

- ***Paperless System***
  BRI berkomitmen meningkatkan efisiensi operasional melalui penghematan pemakaian kertas tentunya dengan dukungan sistem teknologi yang selalu dikembangkan oleh BRI. Sistem Informasi yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan internal BRI dan Nasabah dengan ditunjang aplikasi-aplikasi yang secara implementasi sangat menunjang efisiensi operasional. Berbagai aplikasi *paperless* yang telah diterapkan untuk nasabah BRI adalah:
  1. *e-Tax*, aplikasi pelaporan pajak bagi nasabah. BRI yang pertama di Indonesia;
  2. *e-Form*, *formless* untuk pelayanan *Frontliner* di Unit Kerja BRI;
  3. *e-Statement*, memberikan informasi melalui email yang didaftarkan;
  4. *New account swap* untuk membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro, tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;
  5. ATM 'tanpa bukti cetak' (*print receipt*);
  6. BRISPOT, merupakan aplikasi menggunakan sistem berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinan putusan pinjaman mikro untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*;
  7. MY BRI, merupakan aplikasi yang menggunakan *system* berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinan putusan pinjaman konsumer untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*.

  Berbagai inisiatif kegiatan operasional berbasis *paperless* tersebut membuat konsumsi kertas BRI terus menurun, seperti tampak pada tabel berikut.

- **Pengelolaan Dampak Lingkungan Lainnya**
  BRI juga menjalankan berbagai inisiatif lainnya sebagai wujud dukungan Bank dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain:
  1. Pengelolaan limbah padat bekerja sama dengan perusahaan berizin;
  2. Pemakaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbahan yang ramah lingkungan;
  3. Mengganti *freon* mengandung *chlorofluocarbon* (CFC), dengan *freon* jenis halotron.

Digitalisasi Proses – Penunjang Efisiensi Operasional BRI

Beragam aplikasi berbasis teknologi digital kini telah dikembangkan, sebagai berikut.

1. Intranet dan internet terhubung *real* untuk yang memungkinkan komunikasi secara *real time.*
2. Presensi pekerja BRI dilakukan dengan EDC.
3. Aplikasi terintegrasi BRISTARS yang mengimplementasikan efisiensi operasional, terdiri dari aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
   a. e-Rekrutmen, sarana bagi para calon tenaga kerja yang ingin bergabung dengan BRI, melalui lamaran secara *online*.
   b. Digitalisasi *Assessment*, penilaian kompetensi pekerja dilakukan secara *online*.
   c. e-Mutasi, perpindahan pekerja antar unit kerja BRI yang diproses secara otomasi.
   d. Data pribadi pekerja aplikasi data pribadi secara otomasi.
   e. e-Cuti, untuk pekerja mengajukan permohonan pelaksanaan cuti serta proses persetujuan oleh atasan secara *online*.
   f. e-SPJ, dimana pengajuan perjalanan dinas pekerja BRI tidak lagi menggunakan kertas namun menggunakan aplikasi untuk dokumentasi dan persetujuan pemutus.
   g. e-Fasilitas Pinjaman Pekerja, untuk mengajukan permohonan fasiltas pinjaman secara *online*.
   h. e-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, untuk mengajukan penggantian klaim biaya pengobatan dan proses penggantian secara *online*.
   i. e-Lembur, untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja Lembur secara online dan otomasi pembayaran upah lembur
4. BRIHC (BRI *Human Capital*), untuk mengelola proses bisnis SDM.
5. SMK (Sistem Manajemen Kinerja) *online* untuk *monitoring* kinerja pekerja.
6. Portal Hubungan Industrial, untuk *monitoring* pelanggaran disiplin pekerja.
7. e-Pensiun, untuk informasi *benefit* yang diperoleh untuk masa pensiun normal.
8. *e-Corporate Culture*, untuk *monitoring* implementasi budaya kerja pekerja BRI.
9. Konsultasi dan Informasi SDM, untuk informasi terkini mengenai SDM.
10. *e-Filing*, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai wajib pajak.
11. *Digital Office*, untuk efisiensi dan efektivitas surat menyurat internal.
12. *Survey Online*, survei kepuasan pelanggan dengan responden pekerja/unit kerja BRI.
13. BRISMILE (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik), yang terdiri dari Modul Pengadaan Aktiva Tetap, Modul Pengelolaan Aktiva Tetap, dan Modul Anggaran.
14. BRIPEDIA, merupakan aplikasi tentang ensiklopedia kebijakan dan prosedur BRI.
15. Portal inovasi, aplikasi sebagai wadah ide dan inovasi bagi Pekerja BRI.
16. BRISmart, aplikasi *e-learning management system* untuk Pekerja BRI.
17. BRIShare, aplikasi *knowledge management system* bagi Pekerja BRI.
18. BRISPOT, aplikasi *credit approval system* untuk kredit mikro.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Komitmen

Bank berkomitmen untuk menerapkan *Human Capital* (HC) *practices* kelas dunia (*becoming a world class human capital system & practices*) demi mewujudkan BRI sebagai *Home to the Best Talent.*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Sebagai wujud komitmen tersebut, Bank senantiasa memperbaiki kerangka strategi atau arsitektur pengelolaan HC Bank dengan ditopang oleh 3 pilar, yakni pilar *People,* pilar *Culture*, dan pilar *Organization*. Dengan ketiga pilar ini diharapkan Bank dapat memenuhi hak-hak para karyawan BRI dan mereka memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan dan pengembangan karyawan baik dari sisi peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir maupun pengupahan sehigga lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dapat tercipta, dan seluruh pekerja termotivasi untuk memberikan kemampuan terbaiknya demi mencapai visi misi Bank.

Kebijakan dan Strategi Penerapan

Kebijakan dasar yang diterapkan mencakup ketiga pilar (*people, culture, organization*) yang dikelola dalam kerangka ekosistem penting yang saling terkait dalam pengelolaan HC. Ekosistem tersebut yakni, *Employee*, *Customer*, *Government*, *National* & *Global Alliances*, *Media* serta *Partners*. Lebih jauh, pilar dan ekosistem tersebut ditopang pula oleh pondasi-pondasi yang menjadi pendukung suksesnya sebuah sistem dan *practices* HC, yakni HC *Communications*, *Certified* HC *Practitioners*, HC *Information System* dan *Healthy Industrial Relations.*

Sementara untuk memenuhi tanggung jawab terhadap aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Bank menerapkannya sesuai dengan kesepakan kerja Bersama yang telah ditandatangani antara Bank dengan perwakilan pekerja, dalam hal ini adalah Serikat Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ditinjau berkala dan memiliki masa berlaku 2 tahun dengan maksimum perpanjangan selama 1 tahun.

Selain implementasi PKB, Bank menyusun dan memberlakukan kebijakan-kebijakan internal sebagai pelengkap dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, meliputi:

1. Pengembangan Karir;
2. Kompensasi dan *Benefit*;
3. Manajemen Kinerja; dan
4. Hubungan Industrial.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan terlaksananya butir-butir kesepakatan dalam PKB. Informasi mengenai pengelolaan *Human Capital* ini telah disampaikan secara lengkap pada pembahasan *Human Capital* pada laporan tahunan ini.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari:

- Pelaksanaan program ketenagakerjaan (implementasi Non Diskriminasi, keseteraan gender dalam kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, keseteraan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan maupun dalam mendapatkan remunerasi yang *fair*, kebebasan berserikat, mekanisme pengaduan dan program pensiun.
- Program pemberian fasilitas kesehatan (*Club Fitness*, Klub Olahraga dan pemberian Asuransi BPJS),
- Program keselamatan kerja (inspeksi/pemeriksaan berkala terhadap APAR dan pelatihan kondisi darurat).

Kegiatan yang Dilakukan

Lebih lanjut implementasi dari kebijakan dan lingkup di atas dijelaskan melalui uraian berikut:

Anti-Diskriminasi

BRI selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di setiap fungsi pengelolaan *human capital,* baik dalam aspek pengembangan karier, remunerasi maupun aspek-aspek pengelolaan *human capital* lainnya. Salah satu bentuk penerapan asas kesetaraan di Perusahaan adalah dengan dibukanya kesempatan bekerja bagi Pekerja disabilitas, dengan posisi dan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing Pekerja disabilitas. Hal ini disebabkan karena BRI paham betul untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas dapat memiliki dampak positif pada semangat kerja pegawai, memberikan keragaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas dan sekaligus meningkatkan produktivitas Pekerja untuk bekerja dalam keberagaman.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Komitmen ini terlihat dari perbandingan pekerja wanita dan pria di BRI, yang menunjukkan angka pada tahun 2020 sebesar 42,36% wanita (2019: 42,92%) dan 57,64% pria (2019: 57,08%) dari total 88.184 pekerja (2019: 91.620 pekerja).

Kesempatan Pengembangan Diri

Bank memberi kesempatan setara kepada seluruh pekerja, baik pria maupun wanita untuk mengikuti program pengembangan dan pelatihan serta untuk diberi kesempatan berkarir mencapai jenjang jabatan yang semakin tinggi, sesuai dengan kompetensi dan hasil kinerjanya.

Sejak 2016 BRI mengimplementasikan *Blended Learning*, yaitu metode pendidikan dengan perpaduan *in-class learning* secara tatap muka langsung dan *e-learning*. Bank telah menyelenggarakan berbagai program *training* dengan realisasi jumlah peserta pendidikan pada periode Januari – Desember 2020 sejumlah 5.274.114 peserta (2019: 4.231.199 peserta).

Health & Well-being

BRI senantiasa berkomitmen kepada pekerja demi terciptanya *work life balance*. Dalam mendukung adanya *worklife balance* Pekerja, sejak 25 April 2018 BRI membentuk BRILiaN *Community* yang merupakan kumpulan komunitas yang dibentuk oleh Pekerja BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas ataupun kegiatan yang sama. Semua Pekerja diberikan akses yang sama terhadap komunitas melalui aplikasi BRILiaNApps. Saat ini BRI telah memiliki 24 komunitas yang dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh para anggotanya.

BRI mempunyai tempat yang dikhususkan untuk mengembangkan talenta pekerja, menyalurkan hobi pekerja, maupun untuk melakukan program-program *work life balance* yaitu BRILIAN CENTRE.

BRI juga memberikan wadah untuk melakukan konseling bagi para pekerja, yaitu kegiatan konsultasi/ bantuan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi pekerja yang berdampak kepada kinerja. Dalam rangka meningkatkan *Health & Well-being* bagi pekerja, BRI mewajibkan *block leave* bagi pekerja yaitu kebijakan untuk mengambil cuti selama 5 hari kerja berturut-turut dalam 1 tahun. Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas berupa *child care facilities* berupa *day care* di lingkungan kantor untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi pekerja wanita yang mempunyai anak balita.

Remunerasi dan Benefit

Struktur pengupahan BRI dirancang berdasarkan beberapa faktor seperti penilaian kinerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompensasi yang bersifat tetap terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan, serta kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian kinerja. Selain kompensasi tersebut, Bank juga memberikan fasilitas berupa *benefit* kepada Pekerja. *Benefit* ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri perbankan.

Bank menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula. Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variable sama sekali.

BRI memiliki kebijakan terkait pemberian upah minimum karyawan, di mana upah minimum yang diberikan kepada pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah Perusahaan. Pemberian upah minimum yang layak ini merupakan bentuk komitmen Bank dalam pemenuhan hak-hak pekerja, meskipun memberi dampak pada peningkatan alokasi dana bagi pekerja. Namun demikian, BRI memandang alokasi yang juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pekerja secara komprehensif ini merupakan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Dengan menerapkan kebijakan penetapan imbal jasa tersebut, maka sesuai dengan perkembangan skala usaha dan selaras dengan bertambahnya jumlah karyawan, biaya pengelolaan ketenagakerjaan BRI setiap tahun meningkat secara proporsional, sebagai berikut:

Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan

Komponen	Angka Bank Saja (Rp Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Gaji, Upah, dan Tunjangan	8.542.413	9.096.616	10.590.613	14.061.266	14.351.172
Bonus, Insentif, dan Tantiem	5.816.691	6.234.168	5.874.193	5.926.232	4.120.242
Pendidikan dan Pengembangan	578.568	534.097	603.053	697.354	342.079
Tunjangan Kesehatan	358.918	371.686	397.009	444.399	333.998
Jaminan Jamsostek	522.249	606.823	678.206	758.300	817.676
Pemutusan Hubungan Kerja (Biaya Pesangon - Pekerja Tetap)	153.281	304.976	309.403	310.478	120.846
Pensiun Iuran Pasti	231.105	256.675	291.569	325.460	351.954
Cuti Besar	308.429	289.150	442.565	538.594	284.847
Pensiun Imbalan Pasti	513.384	457.552	744.509	432.692	365.455
Penghargaan Tanda Jasa	150.349	155.894	129.291	267.737	224.901
Biaya Lainnya	472.964	508.695	1.157.543	748.286	4.472.882
Total	**17.648.351**	**18.816.332**	**21.217.954**	**24.510.799**	**25.786.053**

Employee Engagement

Setiap tahun BRI menyelenggarakan survei keterikatan Pekerja yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan Pekerja terhadap Perusahaan. Untuk menjaga independensi dan menghindari *conflict of interest*, survei keterikatan Pekerja di BRI dilaksanakan oleh Unit Kerja di luar Direktorat *Human Capital* yang membidangi riset korporasi.

Employee Engagement Survey tahun 2020 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 93,30% Pekerja menyatakan terikat dengan Perusahaan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat dibandingkan survei tahun 2019 sebesar 83,99%. Sedangkan untuk tingkat *satisfaction* di tahun 2020, 98,40% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Adapun *Net Promoter Score* tahun 2020 berada pada nilai 48,4, naik dari tahun sebelumnya sebesar 37. Perusahaan meyakini bahwa keterikatan yang dinyatakan Pekerja tersebut merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif di bidang pengelolaan *human capital* BRI. Untuk selanjutnya, BRI akan tetap berkomitmen menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan *engagement* Pekerja terutama Pekerja generasi Y sebagai mayoritas Pekerja di BRI yang mencapai 80% dari total Pekerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Tingkat *Turnover*

Kepuasan (*satisfaction*) Pekerja BRI terhadap pengelolaan *Human Capital* BRI salah satunya diukur dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2020, tingkat *turnover* mencapai sebesar 1,73%, lebih rendah dari tingkat *turnover* secara industri yang mencapai 15%. Angka *turnover* tersebut menunjukkan bahwa upaya BRI untuk melakukan *retention* Pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan BRI untuk menjaga tingkat *turnover* tersebut di antaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, *benefit* yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, jenjang karier yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

Kebebasan Berserikat

BRI memberi kebebasan kepada para karyawannya untuk berkumpul dan berserikat serta membentuk Serikat Pekerja yang kemudian bertindak sebagai perwakilan dari seluruh pegawai dalam menetapkan kesepakatan kerja sama yang saling menghormati demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Di BRI terdapat 1 Serikat Pekerja yang mewakili mayoritas pekerja untuk menyampaikan aspirasi pekerja ke Perusahaan. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Perusahaan selalu memberikan *support* baik secara materiil maupun non materiil setiap kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja baik di tingkat regional maupun skala nasional.

Tak hanya itu, Bank juga aktif melibatkan Serikat Pegawai dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia melalui kegiatan *co-creation*. Bank juga memfasilitasi kegiatan forum kemitraan sebagai sarana bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada manajemen BRI.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Bank senantiasa berupaya menangani pengaduan dari para pekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini merupakan bentuk penegasan komitmen BRI dalam menjaga keharmonisan hubungan antara Manajemen dengan seluruh Pekerja. Penegasan komitmen Manajemen terhadap penanganan komplain Pekerja tersebut diwujudkan melalui kebijakan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS).

Selain melalui WBS, BRI pun memiliki saluran komunikasi *Call Center* SDM untuk penanganan komplain Pekerja di bidang SDM. Melalui *Call Center* SDM, pekerja dapat menyampaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan terkait pekerjaan maupun permasalahan pribadi yang membawa dampak secara langsung terhadap pekerjaan. Kedua sarana dan fasilitas komunikasi tersebut menunjukkan komitmen kuat BRI dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Perusahaan dan pekerja.

Program Pensiun

BRI juga memberi perhatian bagi kesejahteraan para pekerja pasca purna bakti. Sebagai wujud komitmen ini, BRI mengikutsertakan para pekerjanya pada program pensiun, dengan pilihan skema manfaat pasti dan iuran pasti. Selain itu, Bank juga menyelenggarakan program persiapan pensiun dengan mayoritas kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan dengan mengundang para pekerja purna bakti yang telah berhasil membuka usaha secara mandiri.

Dampak Kegiatan Ketenagakerjaan

Dampak pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni rendahnya tingkat *turnover*, tingginya tingkat *employee engagement* pekerja dan meningkatnya produktivitas per pekerja.

Pada tahun 2020, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp285 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini menurun dibandingkan pencapaian EPE tahun 2019 yang sebesar Rp556.16 juta per pekerja tetap. Produktivitas menurun karena kinerja bisnis bank terdampak pandemi Covid-19 sehingga *Earning* BRI turun dari tahun sebelumnya.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu risiko operasional yang penting dikelola oleh perusahaan. BRI memiliki strategi dan upaya untuk selalu mengutamakan keselamatan jiwa pekerja serta *stakeholders* BRI baik dalam kondisi normal maupun bencana. Strategi tersebut tertuang di dalam beberapa ketentuan antara lain:
1. Kebijakan *Business Continuity Management*
2. Panduan *Emergency Response Plan*
3. Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja

Upaya upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa pekerja dan *stakeholders* BRI antara lain:
1. Internalisasi Budaya Tanggap Darurat pada pekerja
2. Mengkomunikasikan prosedur tanggap darurat pada *stakeholders* yang berada di lingkungan BRI
3. Menyediakan peralatan tanggap darurat
4. Menyediakan perlengkapan medis di lingkungan tempat kerja
5. Melakukan simulasi tanggap darurat secara berkala
6. Melakukan identifikasi risiko bencana di lingkungan kerja BRI

Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja Di Area Bisnis (*Business Area*)

Di Area Bisnis (*Business Area*)	**Di Luar Area Bisnis (*Non Business Area*)**
Gedung bertingkat, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), maupun unit kerja *mobile* berbasis *e-channel*	Lokasi peninjauan pembangunan proyek dan kegiatan kunjungan nasabah
Pelaksanaan K3 difasilitasi kebijakan pengelolaan gedung	Pelaksanaan K3 difasilitasi pengelola proyek
Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala	Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti *safety induction*
Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran	Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup *personal accident* dan program Jaminan Kecelakaan Kerja
Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung	
Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung oksigen (O2), kotak obat P3K, perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (*exit window*)	
Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diikuti oleh pekerja, sekuriti, dan pengelola gedung	
Penyediaan dua mobil ambulans di kantor pusat dan bekerja sama dengan BRI Medika (anak perusahaan Dapen BRI)	

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Komitmen dan Kebijakan

BRI merupakan bank yang memiliki jaringan unit kerja yang terbesar di Indonesia dan tersebar sampai ke pelosok negeri. Melalui jaringan kerja yang luas tersebut, BRI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dikomunikasikan dengan nama BRI Peduli.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Program BRI Peduli tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. Per-09/MBU/07/ 2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir yaitu Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020. Secara internal BRI juga mengatur lebih rinci pedoman pelaksanaan Program BRI Peduli melalui Surat Edaran No SE S. 36 – DIR/SKP/07/2020, tanggal 24 Juli 2020, perihal Pelaksanaan Program BRI Peduli Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Melalui Program BRI Peduli, BRI berupaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang diharapkan dapat berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan.

Lingkup dan Rumusan Tanggung Jawab Sosial di bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Program BRI Peduli mengacu kepada konsep 3P (*Pro People, Pro Planet* dan *Pro Profit)*

Pro People
Kepedulian BRI kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pro Planet
Kepedulian BRI kepada lingkungan hidup

Pro Profit
Keuntungan Finansial dan/atau Non Finansial yang diharapkan didapat oleh penerima bantuan yang nantinya diharapkan dapat berdampak kepada bisnis perusahaan secara berkelanjutan

Implementasi dari konsep 3P tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sektor bantuan BRI Peduli yaitu:

1. Bantuan untuk korban bencana alam dan bencana non-alam termasuk yang disebabkan oleh wabah, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA PEDULI
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA CERDAS
3. Bantuan peningkatan kesehatan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEHAT
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA MEMBANGUN
5. Bantuan sarana ibadah, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA TAKWA
6. Bantuan pelestarian alam, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA LESTARI
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEJAHTERA

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Kegiatan BRI Peduli 2020

Pada tahun 2020, BRI telah menyalurkan bantuan Program BRI Peduli sebesar Rp264,14 miliar atau naik sebesar 16,57% dari tahun 2019 sebesar Rp226,58 miliar.

Penyaluran Program BRI Peduli 2018-2020

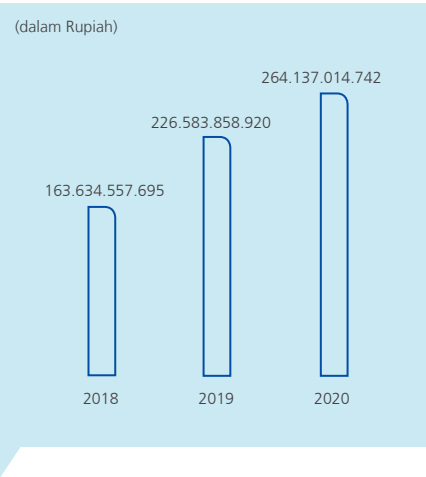

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Bantuan tersebut diwujudkan melalui 7 sektor bantuan BRI Peduli sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Sektor	2018	%	2019	%	2020	%
Indonesia Peduli	6.845.484.366	4,18%	6.336.123.862	2,80%	69.708.958.366	26,39%
Indonesia Cerdas	53.087.712.848	32,44%	70.191.707.124	30,98%	52.606.616.869	19,92%
Indonesia Sehat	22.384.597.948	13,68%	44.759.761.982	19,75%	45.906.885.735	17,38%
Indonesia Membangun	22.895.422.555	13,99%	29.302.833.387	12,93%	32.164.851.423	12,18%
Indonesia Takwa	27.404.110.789	16,75%	43.785.086.953	19,32%	34.947.924.395	13,23%
Indonesia Lestari	722.965.000	0,44%	866.344.000	0,38%	4.432.451.725	1,68%
Indonesia Sejahtera	30.294.264.189	18,51%	31.342.001.612	13,83%	24.369.326.229	9,23%
Total	**163.634.557.695**	**100,00%**	**226.583.858.920**	**100,00%**	**264.137.014.742**	**100,00%**

Prosentase Penyaluran Program BRI Peduli 2020

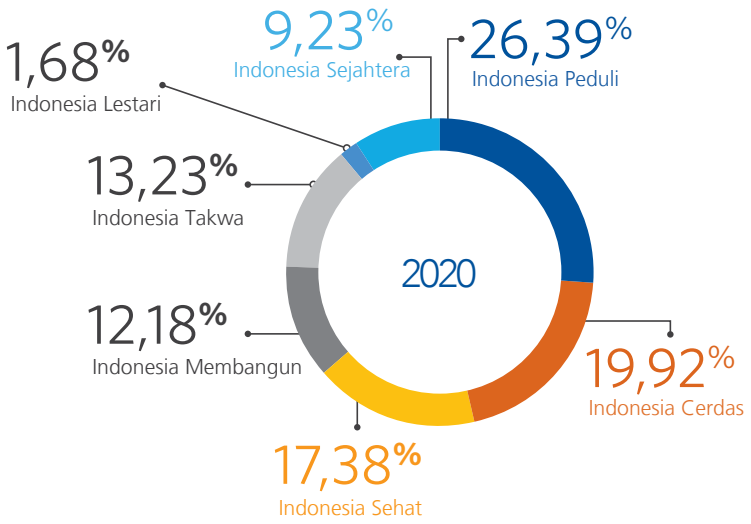

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Penghargaan

Pada tahun 2020 BRI telah menerima beberapa penghargaan dan pengakuan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain:

1. Asia money 2020 – Indonesia's best bank for CSR 2020 (Penghargaan ini telah diperoleh BRI selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020)
2. Top CSR Award 2020 # Star 5
3. Top CSR Award 2020 – Top Leader on CSR Commitment 2020

PROGRAM BRI PEDULI 2020

Program BRI Peduli yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi:

A. INDONESIA PEDULI

Program Indonesia Peduli ini merupakan program bantuan terkait bencana alam dan non alam termasuk yang disebabkan oleh wabah. Pada tahun 2020, wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melanda dunia termasuk Indonesia terutama sejak triwulan I tahun 2020. Pandemi Covid-19 tersebut berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat diantaranya berupa penutupan atau penurunan omset usaha, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ratusan ribu orang terinfeksi bahkan ribuan orang meninggal dunia. Beberapa jenis bantuan BRI melalui Program Indonesia Peduli dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 meliputi bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pembagian masker, *thermogun*, *handsanitizer*, wastafel, bantuan akomodasi penginapan bagi tenaga medis, sembako dan lain-lain.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Selain bencana non alam yang disebabkan oleh wabah Covid-19, berbagai bencana alam juga melanda beberapa wilayah di Indonesia seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan lain-lain. BRI turut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut dengan menyalurkan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, selimut, obat-obatan dan lain-lain.

Total bantuan BRI terkait Program Indonesia Peduli pada tahun 2020 mencapai Rp69,71 miliar antara lain berupa:

A. Bantuan Penanggulangan Wabah Covid-19

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan sembako dalam rangka penanggulangan Covid-19	Melalui 19 Kantor Wilayah BRI Seluruh Indonesia meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	Rp20.576.516.710,-
2	Bantuan masker, APD, *handsanitizer*, sarana penunjang medis dan alat kesehatan	Melalui 19 Kantor Wilayah BRI Seluruh Indonesia meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	Rp17.221.664.588,-
3	Bantuan akomodasi dan penginapan tenaga medis dalam rangka penanggulangan Covid-19	Jakarta, Padang	Rp5.381.461.000,-
4	Bantuan *wastafel* cuci tangan dalam rangka penanggulangan Covid-19	Melalui 19 Kantor Wilayah BRI Seluruh Indonesia meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	Rp2.355.949.558,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

B. Bantuan terkait Bencana Alam

Selain kegiatan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19, BRI juga turut membantu masyarakat korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan lain-lain dengan rincian antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir	Amuntai, Banjar, Bantaeng, Batusangkar, Bondowoso, Bukittinggi, Cianjur, Cibadak, Cibubur, Cilacap, Demak, Dharmasraya, Gorontalo, Jakarta, Kendari, Ketapang, Kotamubagu, Lahat, Limboto, Majalaya, Manado, Masamba, Melawi, Painan, Palangkaraya, Palu, Pamanukan, Pangkalan Bun, Pare-Pare, Pekalongan, Pinrang, Polewali, Poso, Pringsewu, Purwodadi, Rembang, Sengkang, Sidrap, Sijunjung, Sintang, Sukabumi, Tabanan, Tahuna	Rp3.734.375.283,-
2	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan	Boyolali, Brebes, Ciamis, Demak, Purbalingga, Rembang, Wonogiri	Rp257.954.250,-
3	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Erupsi Gunung Berapi	Ambon, Bogor, Cibadak, Lumajang, Manado	Rp188.000.000,-
4	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor	Cianjur, Kotamobagu, Padang Panjang, Palopo	Rp68.677.500,-

B. INDONESIA CERDAS

BRI melalui Program Indonesia Cerdas turut memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Selama tahun 2020, BRI telah memberikan bantuan untuk program ini sebesar Rp52,61 miliar dalam bentuk kegiatan antara lain:

A. Program Bantuan Beasiswa

Pada tahun 2020, BRI melaksanakan program bantuan pendidikan berupa beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi maupun kurang mampu. BRI bekerja sama dengan berbagai sekolah dan perguruan tinggi dalam penyaluran beasiswa tersebut antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Jumlah Penerima
1	Beasiswa untuk Mahasiswa (Kategori umum, difabel, wilayah 3T)	Perguruan tinggi yang bekerja sama dengan 19 Kantor Wilayah BRI di Seluruh Indonesia meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	Rp11.495.610.000,-	2.223
2	Beasiswa untuk Pelajar	SD, SMP dan SMA sederajat yang bekerja sama dengan 19 Kantor Wilayah BRI di Seluruh Indonesia meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	Rp3.454.074.550,-	2.261

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

B. Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan

Demi mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar, BRI juga memberikan bantuan berupa pembangunan/perbaikan gedung sekolah, bantuan perlengkapan pendidikan seperti pengadaan peralatan laboratorium, buku literatur, alat multimedia, komputer, dan bantuan kendaraan pendukung kegiatan pendidikan antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Pembangunan/ Perbaikan Gedung Universitas, Sekolah, Pondok Pesantren dan institusi pendidikan lainnya	- Universitas Negeri Jember - Unversitas Jambi - STIE Indonesia Banking School Jakarta - Universitas Bhayangkara Jakarta - Universitas Suryakancana Cianjur	Rp25.123.415.875,-
		- SMAN 2 Patra Nusa Aceh - MA Ahad Al Ghadier Ponpes Kempek Cirebon - MA Jabal Rahmah Luwuk - SMK Angkasa I Lanud Suryadarma Subang - SMA Sederajat lainnya	
		- SMP I Plus Yaspira Cianjur - SMP Cempaka Jakarta - SMP Al Fatah Bogor - MTs Delima Sigli - SMP Sederajat lainnya	
		- SD Muhammadiyah 4 Jakarta - SDN 15 Kalamalea Poso - SD Mathias 3B Langgur Tual - Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Bogor - SD Sederajat lainnya	
		- Pondok Pesantren Manarul Ulum Ciamis - Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya - Pondok Pesantren Miftahul Huda Brebes - Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Gresik - Pondok Pesantren lainnya	
		- TK Islam Nurul Quran Depok - TK Santa Lusia Tarutung - PAUD Melati Mekar Cianjur - PAUD Aisyiyah Tanjung Balai - TPQ Nurul Huda Brebes - TPQ Al Ikhlas Gresik - Lembaga pendidikan TK/PAUD sederajat lainnya	
2	Bantuan Perlengkapan Pendidikan (Laboratorium, komputer, *meubelair*, *marching band* dan bantuan lainnya)	- SMAN 1 Cibitung Bekasi - MAN 2 Aceh Tamiang - SMK Budi Mulia Karawang - SMP Kawasan Industri Ciampel Karawang - SMP 2 Tanjung Palas Timur Tanjung Selor - SMP Santo Yoseph Tarutung - SD Negeri 1 Banjarsari Lebak Banten - TK Aisyiyah Banga Pinrang - PAUD KB Mutiara Bunda Palembang - Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Pasuruan - Lembaga pendidikan lainnya	Rp6.402.269.915,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
3	Bantuan Kendaraan Penunjang Pendidikan	- Universitas Negeri Malang - Universitas Negeri Padang - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto - Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung - Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone - Universitas Advent Indonesia Bandung - Politeknik Pendidikan Negeri Jember - SMA 3 Taruna Angkasa Madiun - Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap	Rp4.794.725.000,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

C. INDONESIA SEHAT

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp45,91 miliar melalui Program Indonesia Sehat. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program ini antara lain:

A. Bantuan Sarana Penunjang Kesehatan

Pada tahun 2020, BRI memberikan bantuan berupa 130 unit mobil ambulans yang diserahkan kepada berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Rumah Sakit, dan instansi/lembaga lainnya yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. BRI juga memberikan bantuan 1 unit mobil donor darah kepada PMI Lampung Tengah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan kepada masyarakat, BRI juga memberikan bantuan berupa pembangunan/perbaikan rumah sakit/klinik serta peralatan penunjang kesehatan lainnya.

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan 130 Unit Mobil Ambulans	Banda Aceh, Bandung, Bantul, Baturaja, Bekasi, Biak, Binjai, Blitar, Bogor, Bojonegoro, Bontang, Buntok, Cianjur, Cibadak, Cibinong, Cikampek, Ciledug, Cimahi, Ciputat, Demak, Denpasar, Ende, Fak - Fak, Garut, Gorontalo, Jepara, Jakarta, Jayapura, Karang Anyar, Kediri, Kendari, Kupang, Kutoarjo, Limboto, Lubuk Linggau, Lumajang, Magelang, Majalaya, Majalengka, Malang, Medan, Metro, Mojokerto, Muara Bulian, Padang Sidempuan, Palembang, Palu, Pangkalan Bun, Pasuruan, Payakumbuh, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Purworejo, Rangkasbitung, Rengat, Sampang, Selong, Sentani, Serang, Serui, Sibolga, Sidoarjo, Singkawang, Sleman, Soa-Siu, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Takengon, Tanah Grogot, Tasikmalaya, Teluk Kuantan, Watansoppeng, Yogyakarta	Rp39.031.734.199,-
2	Bantuan Pembangunan/ Perbaikan Sarana Kesehatan & Peralatan Penunjang Kesehatan	- RSUD Dr. Soedirman Kebumen Jawa Tengah - RS Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, Medan - RS TNI AU Soemitro Lanud Muljono Surabaya - RS TK II Dr. Soedjono, Kedam IV/Diponegoro, Magelang - RS NU Cilongok Banyumas - RS Bhayangkara Tingkat III Manado - RS dr. Noermir Baturaja - Poliklinik Brigif 7/Rimba Raya Medan - Poliklinik Rindam XVII/Cenderawasih Jayapura - Poliklinik Kesehatan Polres Bireuen - Posyandu Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh	Rp3.189.952.069,-
3	Bantuan 1 Unit Mobil Donor Darah	- PMI Kabupaten Lampung Tengah	Rp890.000.000,-

B. Bantuan Pemeriksaan Kesehatan, Donor Darah dan Kacamata Gratis

Selain bantuan berupa sarana penunjang kesehatan, BRI juga memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu dan kegiatan donor darah. BRI juga memperhatikan Kesehatan pelajar dimasa pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa 5.000 kacamata gratis kepada pelajar SD, SMP dan SMA sederajat yang kurang mampu/berprestasi.

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Donor Darah dan Bantuan Kacamata	Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Batulicin, Jakarta, Kabanjahe, Kupang, Magelang, Metro, Nganjuk, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pematangsiantar, Purwodadi, Purwokerto, Rantau Prapat, Samarinda, Sampit, Tanah Grogot, Tanjung Karang, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Wonosobo, Yogyakarta	Rp2.307.826.114

D. INDONESIA MEMBANGUN

BRI melalui Program Indonesia Membangun turut berkontribusi dalam pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana umum untuk menunjang aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2020, BRI telah menyalurkan dana bantuan untuk program ini sebesar Rp32,16 miliar melalui kegiatan antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Pembangunan *Drainase*, *Landscape*, Balai Serbaguna, Gapura, Halte, Jembatan, Ruang Parkir, Pos Kamling, Tembok Penahan Tebing, Trotoar, Sumur, IPAL, Jalan, Sarana Air Bersih	Balige, Banda Aceh, Bandung, Banjar, Biak, Bitung, Blitar, Bogor, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cimanggis, Cirebon, Demak, Fak-Fak, Gianyar, Gresik, Jakara, Kotamubagu, Kupang, Kuta, Kutacane, Lampung, Luwuk, Madiun, Majenang, Majene, Malang, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Metro, Muara Teweh, Ngawi, Padang, Painan, Palembang, Pangkalan Bun, Pariaman, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pinrang, Ponorogo, Probolinggo, Purwodadi, Purwokerto, Putus Sibau, Rengat, Sampang, Sekayu, Semarang, Sentani, Sigli, Singaraja, Solo, Subang, Sukabumi, Sungai Liat, Tahuna, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarutung, Tasikmalaya, Trenggalek, Wates	Rp11.580.818.678,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
2	Bantuan Papan Rambu Peringatan Bencana, Sarana Perlengkapan Desa, Sarana Duka Cita, Sarana Perlengkapan Pasar, Sarana umum lainnya	Bekasi, Ciledug, Denpasar, Jakarta, Manado, Pamanukan, Sleman, Subang, Tangerang	Rp3.245.475.000,-
3	Bantuan 4 Unit Mobil Jenazah	Bandung, Magelang, Malang	Rp1.059.750.000,-
4	Bantuan Sarana Pengolah Sampah	Amuntai, Bandung, Bukittinggi, Jakarta, Muara Enim, Subang	Rp934.385.255,-

E. INDONESIA TAKWA

BRI melalui Program Indonesia Takwa, turut berperan serta dalam membantu peningkatan sarana dan prasarana peribadatan umat beragama di Indonesia dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp34,95 miliar antara lain melalui:

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Pembangunan/ Perbaikan Rumah Ibadah	Atambua, Banda Aceh, Bandung, Bangkalan, Bangkinang, Bangli, Banjar, Batam, Baturaja, Bekasi, Biak, Bireuen, Blangpidie, Blitar, Bogor, Boyolali, Bukittinggi, Bumiayu, Ciamis, Cianjur, Cilacap, Ciledug, Cimanggis, Cirebon, Depok, Enrekang, Garut, Gianyar, Gresik, Jakarta, Jayapura, Jember, Kabanjahe, Kalabahi, Kalianda, Karawang, Kisaran, Klaten, Kotabaru, Kuala Kapuas, Kuala Simpang, Kuningan, Kupang, Kutacane, Lahat, Langsa, Luwuk, Madiun, Magetan, Makassar, Malang, Malang, Mamuju, Manado, Masohi, Maumere, Medan, Merauke, Meulaboh, Mulyosari, Padang, Palembang, Palopo, Pamanukan, Pangkalan Bun, Pariaman, Pasuruan, Payakumbuh, Pematangsiantar, Pinrang, Poso, Purwakarta, Purwokerto, Rangkasbitung, Rembang, Rengat, Sampang, Sangatta, Saumlaki, Semarapura, Sentani, Sidikalang, Sigli, Solo, Solok, Subang, Sumedang, Sumenep, Tabanan, Tanjung Balai, Tanjung Karang, Tanjung Selor, Tarakan, Tarutung, Tegal, Ternate, Timika, Toli-Toli, Tual, Wates	Rp31.363.756.654,-

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
2	Bantuan Sarana Prasarana Penunjang Ibadah	Abepura, Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjar, Jakarta, Kisaran, Malang, Manado, Ngawi, Palangkaraya, Palembang, Sentani	Rp2.273.965.000,-

F. INDONESIA LESTARI

BRI menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan melaksanakan Program Indonesia Lestari. Sepanjang tahun 2020, BRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp4,43 miliar untuk kegiatan Bersih-Bersih Kali dan penanaman pohon.

Program Bersih-Bersih Kali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi utama sungai dengan *tagline* "Jaga Sungai Jaga Kehidupan". Program ini meliputi kegiatan dengan tema "Bersih-Bersih Kali" berupa normalisasi sungai, pembangunan sarana prasarana fisik, penghijauan, dan edukasi lingkungan sehat kepada masyarakat di sekitar sungai serta kegiatan dengan tema "Sampah Jadi Duit" berupa bantuan alat pengolahan sampah yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Program ini mulai dicanangkan pada tahun 2019 dan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan lokasi di 19 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2020, BRI telah selesai melaksanakan Program Bersih-Bersih Kali di 8 lokasi sungai yang berada di Bandung, Denpasar, Manado, Martapura, Padang, Palembang, Purwokerto, dan Semarang. Untuk 11 lokasi sungai lainnya diproyeksikan akan selesai pada tahun 2021.

Adapun program penanaman pohon dilaksanakan sebagai upaya untuk turut mendukung pelestarian lingkungan hidup.

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Program Bersih-Bersih Kali	Bandung, Denpasar, Manado, Martapura, Padang, Palembang, Purwokerto, dan Semarang	Rp4.297.451.725,-
2	Program Tanam Pohon	Lumajang, Makassar	Rp135.000.000,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

G. INDONESIA SEJAHTERA

Sepanjang tahun 2020, BRI melalui Program Indonesia Sejahtera telah menyalurkan bantuan senilai Rp24,37 miliar untuk bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM berupa bantuan peralatan serta pendidikan dan pelatihan usaha.

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Peralatan Usaha	Amlapura, Banyuwangi, Boyolali, Cianjur, Demak, Denpasar, Indramayu, Jatibarang, Karang Anyar, Klaten, Kutacane, Lamongan, Lampung, Magelang, Malang, Painan, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Sampang, Selong, Singaraja, Subang, Takengon, Tangerang, Tanjung Pinang, Tanjung Selor	Rp4.552.425.700,-
2	Pelatihan 10.000 UMKM (Program lanjutan 2019)	Atambua, Balikpapan, Banda Aceh, Banjarmasin, Banyuwangi, Batusangkar, Bau-Bau, Bengkulu, Bukittinggi, Cikampek, Cirebon, Garut, Gorontalo, Indramayu, Jambi, Jember, Jakarta, Jombang, Karawang, Kediri, Kendari, Kisaran, Klaten, Kolaka, Kudus, Lahat, Lampung, Lubuk Linggau, Madiun, Malang, Merauke, Padang, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Pematangsiantar, Perawang, Pringsewu, Purwodadi, Purwokerto, Raha, Semarang, Solok, Sragen, Sukabumi, Sumbawa Besar, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Ternate, Tulungagung, Yogyakarta	Rp4.767.292.918,-
3	Pelatihan Rumah Kreatif BUMN	Banda Aceh, Bandung, Bangko, Bukittinggi, Bulukumba, Demak, Gianyar, Jakarta, Kalianda, Lahat, Limboto, Malang, Manna, Martapura, Padang Panjang, Pagar Alam, Palangkaraya, Pandeglang, Pangkal Pinang, Pekalongan, Pinrang, Purwakarta, Soe, Semarang, Serang, Singkawang, Tasikmalaya, Yogyakarta	Rp1.202.529.396,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

B. Bantuan Sosial Lainnya

Kegiatan bantuan sosial lainnya yang dilakukan oleh BRI berupa bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembagian sembako dan pembuatan MCK.

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 166 unit	Bandung, Batusangkar, Bengkalis, Bireuen, Bukittinggi, Ciamis, Cibadak, Cibinong, Denpasar, Dumai, Fak-Fak, Jatibarang, Kayu Agung, Kotamubagu, Kuningan, Lhokseumawe, Limboto, Luwuk, Majalaya, Majalengka, Manado, Martapura, Masohi, Meulaboh, Muara Enim, Padang, Painan, Palembang, Pamanukan, Parigi, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Perawang, Prabumulih, Purwakarta, Purwodadi, Purwokerto, Sarolangun, Semarang, Sentani, Sijunjung, Soa-Siu, Soreang, Tanjung Karang, Teluk Kuantan, Toli-Toli, Tondano, Wonogiri	Rp6.121.411.000,-
2	Bantuan Sembako	Ambon, Atambua, Bandung, Cibadak, Cikarang, Cilacap, Cirebon, Jakarta, Jayapura, Kefamenanu, Lamongan, Lampung, Malang, Manado, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pamanukan, Pekanbaru, Soe, Semarang, Serang, Subang, Sunter, Surabaya, Timika, Yogyakarta	Rp3.956.802.330,-
3	Bantuan Pembuatan MCK	Atambua, Banjar, Ende, Kalabahi, Kupang, Manokwari, Sentani, Subang, Tasikmalaya	Rp1.494.797.000,-

Realisasi anggaran Program Bina Lingkungan BRI Peduli 2020

Total realisasi anggaran Program Bina Lingkungan BRI Peduli 2020 mencapai Rp264,14 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,57 % dari tahun 2019 sebesar Rp226,58 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar 26,39% disalurkan untuk bantuan bencana alam dan non alam termasuk yang disebabkan oleh wabah, 19,92% disalurkan untuk bantuan Pendidikan, 17,38% disalurkan untuk bantuan kesehatan, 13,23% untuk bantuan sarana ibadah, 12,18% untuk bantuan sarana umum, 9,23% untuk bantuan sosial kemasyarakatan, dan 1,68% untuk bantuan pelestarian alam.

Pinjaman Kemitraan

Melalui program kemitraan, BRI berupaya meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pinjaman kemitraan diantaranya disalurkan melalui skema pinjaman lunak dan hibah.

Pinjaman Kemitraan

Sebagai BUMN, BRI memiliki tugas dan tanggung jawab sosial terhadap negara untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kemitraan. Program Kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan tersebut pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 beserta perubahannya, pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan salah satunya melalui skema penyaluran Pinjaman Kemitraan.

Sebagai *Agent of Development*, BRI selalu berupaya dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung berbagai kalangan. Salah satu program yang dijalankan yaitu berpartisipasi aktif dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dana Program Kemitraan (PK). Hal ini sebagai wujud atas pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN PER-02-MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pinjaman yang disalurkan digunakan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Penyaluran pinjaman dilakukan oleh tenaga pemasar yang berada di unit kerja operasional BRI. Tujuannya membantu menumbuhkembangkan potensi perekonomian masyarakat sehingga mempunyai kemampuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang dimiliki dan ditekuni.

Sektor usaha yang menjadi sasaran penyaluran dana Pinjaman Kemitraan tersebar pada berbagai sektor, mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan jasa. Persyaratan umum untuk menjadi calon mitra binaan BRI, antara lain:

- Usaha milik warga negara Indonesia.
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar.
- Belum memenuhi persyaratan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
- Memiliki pengalaman usaha minimal 6 bulan.

Oleh karena itu, penyaluran dana Pinjaman Kemitraan yang dilakukan melalui dua skema ini diharapkan dapat menjadikan usaha para Mitra Binaan terus berkembang dan pada akhirnya mampu menjelma menjadi usaha kecil maupun menengah, bahkan skala ekonomi besar sehingga memungkinkan untuk menjadi nasabah komersial BRI yang loyal dan dikenal karakternya sejak awal.

Agar penyaluran dana Program Kemitraaan memberi dampak yang baik dan optimal terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis Perseroan, BRI menerapkan kebijakan umum dalam merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraaan sebagai berikut:

- Kriteria komoditas calon mitra yang diprioritaskan untuk dibantu diantaranya mencakup: komoditas yang mampu memanfaatkan potensi sekitarnya, komoditas yang menjadi unggulan daerah, dan komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja/padat karya.
- Penyaluran pinjaman kemitraan dilaksanakan secara selektif, mempertimbangkan kondisi calon mitra binaan diantaranya karakter, jiwa kewirausahaan yang dimiliki, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- Pemilihan calon mitra binaan dilakukan secara transparan dan obyektif, untuk menjaring usaha kecil baik individu maupun kelompok yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi calon nasabah komersial.
- Dilaksanakan guna membantu perkembangan perekonomian rakyat dan secara umum berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN

Dengan berpegang pada seluruh kebijakan internal tersebut, pada umumnya jenis usaha yang dibantu masih dalam skala kecil, baru mulai berkembang, berkemampuan pemasaran yang masih terbatas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, BRI menyalurkan Program Kemitraan melalui dua skema agar usaha para Mitra Binaan terus berkembang dan pada akhirnya mampu bermigrasi

Pinjaman Kemitraan

menjadi usaha kecil maupun menengah, bahkan besar dengan skala ekonomi yang lebih baik yang memungkinkan untuk menjadi nasabah komersial BRI yang loyal.

Metode Penyaluran Program Kemitraan

Penyaluran dana Pinjaman Kemitraan ke calon mitra binaan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbankan yang terstruktur sebagaimana layaknya pemberian kredit bank. Pengenalan calon mitra binaan dilakukan dari berbagai aspek, meliputi pengenalan produk unggulan, proses kreatif yang dilakukan untuk menambah nilai produk, ketersediaan sekaligus kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mitra Binaan yang telah mendapatkan dana Pinjaman Kemitraan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya juga akan memperoleh dana hibah program pembinaan. Hibah pembinaan diberikan berupa pendampingan dan pembinaan kewirausahaan dari BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk, tanpa biaya. Setelah melewati masa pembinaan dan pendampingan diharapkan para mitra binaan telah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengakses pembiayaan bank dengan skim komersial.

- Penyaluran Dana Program Kemitraan mencapai Rp149,17 miliar

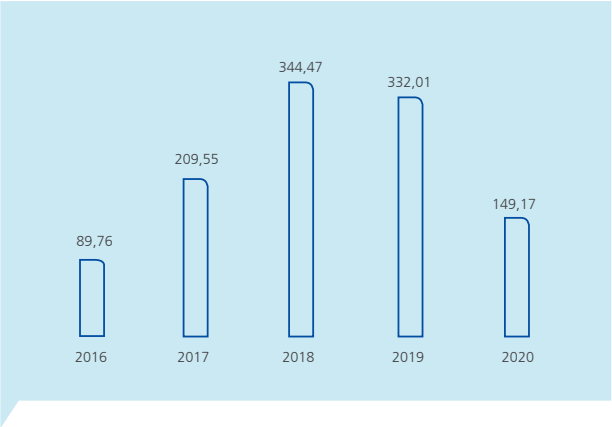

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

Sektor Usaha	Realisasi 2018 Rp (Juta)	%	Realisasi 2019 Rp (Juta)	%	Realisasi 2020 Rp (Juta)	%
Industri	**15.832**	4,60%	**12,299**	4.39%	1.465	0,98%
Perdagangan	**217.970**	63,34%	**132,155**	46.46%	13.703	9,19%
Pertanian	**11.680**	3,39%	**28,128**	9.97%	39.378	26,40%
Peternakan	**34.479**	10,02%	**29,481**	10.44%	17.076	11,45%
Perkebunan	**18.852**	5,48%	**20,221**	7.40%	20.305	13,61%
Perikanan	**7.794**	2,26%	**13,980**	4.99%	16.352	10,96%
Jasa	**33.929**	9,86%	**34,520**	12.41%	24.236	16,25%
Lainnya	**3.615**	1,05%	**10,905**	3.94%	16.655	11,17%
Subtotal	**344.151**	**100,00%**	**281,689**	**100.00%**	**149.171**	**100,00%**
Hibah BUMN	-		50,000			
Dana Pembinaan	**323**		**323**		0	0
Total	**344.474**		**332,012**		**149.171**	

Mitra Binaan Naik Kelas

Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemberian Pinjaman Kemitraan adalah peningkatan jumlah mitra binaan yang naik kelas. Indikator mitra binaan naik kelas dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penambahan tenaga kerja, perluasan pasar, peningkatan permintaan, peningkatan omset dan lainnya yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kebutuhan modal kerja.

Selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa *trend* mitra binaan naik kelas semakin meningkat. Tahun 2020 terdapat 670 mitra binaan yang migrasi dari Pinjaman Kemitraan ke skim pinjaman lain dengan *plafond* yang lebih besar atau meningkat 30% dari posisi tahun 2019.

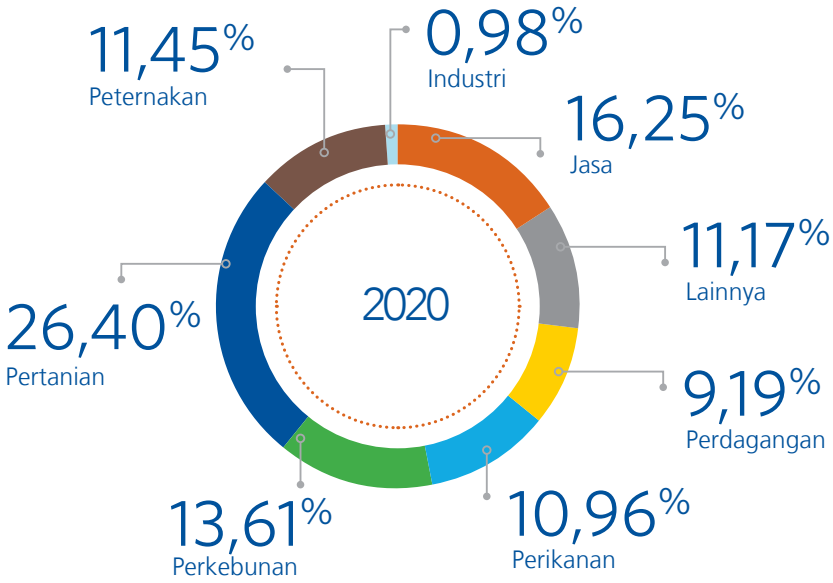

Mitra Binaan Naik Kelas

No.	Segmen	2017	2018	2019	2020
1	Kredit Pangan	16	17	13	13
2	Kupedes	15	19	34	17
3	KUR Kecil	167	227	711	636
4	Ritel Komersial	5	9	0	4
Total Naik Kelas		**203**	**272**	**758**	670
Real Nasabah PK		3.070	5.470	4.476	2.233
Persentase Naik Kelas		6,61%	4,97%	16,93%	30,00%

Segmen pinjaman mitra binaan naik kelas didominasi oleh KUR Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas usaha mitra binaan semakin meningkat mengingat maksimal pemberian KUR Kecil sebesar Rp500 juta dari sebelumnya maksimal menikmati Pinjaman Kemitraan sebesar Rp75 juta.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Target dan Kegiatan yang Direncanakan Manajemen Tahun 2020

BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah yang berbasis *Customer Centric* dengan melakukan peningkatan performa pada jaringan komunikasi dan revitalisasi standar layanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat kualitas layanan BRI di Industri perbankan nasional akan terus meningkat.

Dari hasil *survey service quality* peringkat BRI mengalami peningkatan dan di atas rata-rata industri dalam 3 tahun terakhir.

Hasil Kinerja Pengawasan Layanan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kinerja BRI	4.02	4.00	4.06	4.09	4.10
Industri Perbankan	3.99	3.99	3.99	4.09	4.09

Sumber: Service Quality Index By CAREE

Kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk kepada nasabah selama 2020 adalah sebagai berikut:

Transformasi Nilai Budaya Layanan Yang Berbasis *Customer Centric*

BRI telah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi nilai Budaya Layanan berbasis *Customer Centric* untuk mewujudkan *Service Excellence* dengan menciptakan "*Wow Customer Experience*" yang melebihi harapan nasabah. Adapun transformasi Nilai Budaya Layanan tersebut yakni:

1. SIGAP
2. MUDAH
3. AKURAT
4. RAMAH
5. TERAMPIL

Budaya Layanan SMART tersebut menjadi sebuah *value* yang dapat menggambarkan kualitas layanan Bank BRI di era digital dengan sebutan yang khas, mudah diingat, dan tertanam dalam benak seluruh insan BRI. Implementasi Nilai Budaya Layanan SMART pada seluruh aspek layanan akan memberikan *customer experience* yang lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan Bank BRI.

Perlindungan Hak Konsumen

Terkait dengan perlindungan hak konsumen (nasabah), BRI memiliki kebijakan untuk memenuhi harapan para nasabah. Kebijakan pelayanan nasabah mempertimbangkan 3 (tiga) *critical point*, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, memberikan kenyamanan bagi nasabah, dan tetap memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Bank. Kebijakan BRI terkait dengan pemenuhan hak-hak nasabah mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang perlindungan nasabah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, BRI menyusun dan menerapkan pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan pengaduan nasabah dalam bentuk Surat Keputusan tentang Kebijakan dan Prosedur Pengaduan Nasabah. Terkait dengan kerahasiaan data nasabah, BRI telah memiliki Surat Edaran Pengamanan Data Nasabah.

Informasi dan Keamanan Produk

7 Juli 2020, Bank BRI meluncurkan layanan digitalisasi *on boarding* untuk memudahkan pembukaan rekening tabungan melalui *Platform Digital Saving*, yang menggunakan 2 teknologi yaitu *face recognition* dan *digital signature* sehingga nasabah tidak perlu melakukan kegiatan tatap. *Platform* tersebut juga memudahkan nasabah dalam bertransaksi, sebab nasabah sudah langsung terhubung dengan BRImo.

BRI *Digital Saving* dapat diintegrasikan di berbagai aplikasi lain dalam bentuk *launcher* sehingga memiliki standar secara metode *Know Your Customer* (KYC), alur pembukaan rekening, dan *User Experience*. *Digital Saving* dapat dipergunakan untuk perluasan *channel* pembukaan rekening bank BRI, karena dapat ditempatkan di *website* dan aplikasi Bank BRI sendiri, *Bank Subsidiary*, atau pihak ketiga yang bekerjasama seperti Gojek, Tokopedia, LinkAja, Dana, Bukalapak dan lain lain.

Untuk aspek keamanan dan KYC yang diterapkan, sesuai ketentuan regulator yang berlaku, dimana dalam melakukan verifikasi dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak bank harus memperhatikan minimal 2 faktor keaslian (*authentication factor*). BRI *Digital Saving* melakukan verifikasi kesesuaian data inputan nasabah dengan data Dukcapil dan meminta nasabah untuk mengupload dokumen KTP, NPWP Video rekam wajah dan swafoto bersama KTP yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan di sisi

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

PERURI yang diawali dengan registrasi *digital certificate* untuk pembubuhan tanda tangan pada form AR-01 sehingga anti pemalsuan dan penyalahgunaan serta terdapat *brand protection*. Setelah itu PERURI melakukan pengecekan *liveness* dari video yang diunggah sehingga tidak memungkinkan proses pembukaan rekening digantikan oleh robot, gambar bergerak atau benda mati lainnya yang bukan pemilik NIK sesungguhnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *liveness detection* ini mengecek kedipan mata dan cuap mulut untuk memastikan pembuka rekening adalah manusia.

Kami mengedepankan 3 keuntungan bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui BRI *Digital saving* ini, yaitu:

- ***Simple***
  Karena nasabah tidak perlu datang ke unit kerja BRI, tidak perlu mengunduh aplikasi tersendiri karena BRI *Digital Saving* dapat diakses melalui *website* atau aplikasi yang biasa digunakan nasabah.

- ***Efficient***
  Pembukaan rekening dipandang efisien karena dapat dilakukan tanpa perlu menunggu antrian, tidak boros paket data karena tidak dilakukan *video call* dan proses pembukaan rekening hanya berkisar 5-10 menit. Selain itu, nasabah juga dapat didaftarkan user BRImo secara otomatis dan rekening dapat langsung digunakan untuk bertransaksi finansial.

- ***Secure***
  Pembukaan rekening melalui BRI *Digital Saving* lebih *secure* karena :

1. *Customer driven data* (menghindari *human error* karena diinput orang lain)
2. Data inputan diverifikasi secara *host to host* ke *database* Dukcapil.
3. BRI melakukan verifikasi OTP yang dikirimkan ke nomor HP yang didaftarkan.
4. CDD (*Customer Due Diligence)* dilakukan dengan *Engine Face Recognition*.
5. Menerapkan *Liveness Detection* yaitu mekanisme pengecekan kedipan mata dan cuap mulut nasabah.
6. Penerbitan *Digital certificate* oleh CA (*Certificate Authority*) yang juga kredibel dan telah diaudit oleh KEMKOMINFO.

Dalam hal keamanan produk *Cash Management System* telah dilakukan prosedur *Security* dan *Capability Test* dan tinjauan resiko dan compliance bersama Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan sebelum adanya peluncuran telah dilakukan, setelah dilaksanakannya *launching* diikuti dengan *review* dan evaluasi melalui *Post Implementation Review* (PIR) bersama Divisi *Project Management Office* dan Divisi Kepatuhan dan merupakan bagian dari proses perijinan OJK.

Isu-isu dan Risiko terkait Customer

Digitalisasi *on-boarding* nasabah di era pandemi ini khususnya untuk pembukaan rekening sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan akuisisi rekening nasabah. Pembukaan rekening secara *fully* digital ini merupakan langkah untuk memberikan kepuasan dan kemudahan bagi nasabah dengan tetap diiringi dengan standar keamanan yang tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai upaya mitigasi dan untuk menghindari isu – isu negatif yang akan muncul, layanan Digital *Saving* akan selalu dikembangkan dari sisi teknis dan bisnis, dengan tetap menjaga agar tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Certificate of Excellence Unit Kerja BRI

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan dan Implementasi budaya layanan, BRI mencanangkan "Program Indonesia Shine" yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas layanan melalui *assurance* yang terus menerus dan mewujudkan *customer experience* pada level terbaik di unit kerja, sekaligus dapat mendorong kinerja keuangan unit kerja. Program ini memiliki 5 (lima) parameter yang menjadi fokus utama yaitu *people, process, premises*, kualitas data nasabah dan *service and operation parameter*. Bagi unit kerja yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan akan mendapatkan 5 Bintang dan diberikan plakat yang disebut *Certificate of Excellence* (CoE).

Aktivitas perbankan terutama yang terkait dengan digitalisasi melalui *Cash Management System* merupakan salah satu langkah memberikan kepuasan layanan nasabah. Untuk menghindari dampak negatif, Layanan *Cash Management System* selalu

mengedapankan regulasi terkait KYC, Kerahasiaan Data Nasabah dan Keamanan dalam Bertransaksi tanpa mengurangi layanan yang *excellent* kepada Nasabah.

Mengembangkan *Chatbot Artificial Intelligence* yang diberi nama "Sabrina"

Sabrina merupakan *Chatbot* berbasis *artificial intelligence* yang memberikan layanan informasi produk; promo dan event; lokasi BRI; dan bantuan langsung oleh *Agen Contact Center*. Pengembangan Sabrina memiliki tujuan memiliki tujuan agar nasabah dapat dengan mudah berkomunikasi dan mendapat informasi terkait perbankan.

Mengembangkan Sistem *Complain Handling* yang Terintegrasi

Sistem *complain handling* yang terintegrasi diimplementasikan melalui pemanfaatan aplikasi BRICare dan BRISolutions. Aplikasi BRICare digunakan untuk mencatat mengeskalasi, menyelesaikan, dan melaporkan pengaduan yang diterima Bank BRI dari nasabah eksternal. Dengan sistem penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi maka tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan nasabah menjadi terpantau dan mendukung upaya peningkatan kualitas layanan Bank BRI kepada nasabahnya.

Untuk permasalahan yang dialami oleh internal di Unit Kerja Operasional terkait sistem dan aplikasi, proses pencatatan dan eskalasi atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah melalui aplikasi BRISolutions. Fungsi sentral tim helpdesk dalam memberikan solusi dan penyelesaian setiap permasalahan sistem dan aplikasi, dapat lebih efektif termonitor untuk memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Dengan diimplementasikannya aplikasi BRISolutions maka jajaran Unit Kerja Operasional dalam lebih optimal dalam memberikan layanan ke nasabah.

Penyelenggaraan Bulan Pelanggan (*Best Customer Experience Month*)

Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya untuk senantiasa meningkatkan *customer experience* saat bertransaksi. Sejalan dengan semangat Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 4 September, BRI mencanangkan kegiatan "Bulan Pelanggan" ("*Best Customer Experience Month*") yang akan berlangsung sepanjang tahun di seluruh Unit Kerja Operasional BRI (KC, KCP, KK dan BRI Unit) di seluruh Indonesia secara bergiliran. Melalui kegiatan ini, usaha peningkatan kualitas layanan nasabah diharapkan dapat menjadi habit dan budaya yang melingkupi seluruh aspek bisnis dan operasional unit kerja sepanjang tahun, tidak hanya pada momen Hari Pelanggan Nasional.

Handling Complaint Nasabah

Sepanjang 2020, BRI mencatatkan kenaikan permintaan informasi & pengaduan nasabah. Dari sejumlah keluhan yang masuk ke BRI senantiasa di respon dengan cepat sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Selama tahun 2020 permintaan informasi & pengaduan nasabah yang masih dan telah diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelesaian Keluhan Nasabah	2.931.163	3.488.797	4.239.155	4.698.228

Mekanisme Penyelesaian Komplain :

1. Nasabah melaporkan pengaduan yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada BRI melalui Unit Kerja Operasional, maupun *contact center* Bank BRI.
2. Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan sesuai dengan POJK nomor 18/POJK.07/2018 maksimal waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
3. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui mediasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Survey Kualitas Layanan 2020

Untuk memonitor dan mengetahui Kualitas Layanan Bank BRI, melalui secara internal maupun dilaksanakan *survey* pihak ke-3, adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Konsistensi Kualitas Layanan Unit Kerja BRI
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Mystery Shopping*, untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas layanan Unit Kerja yang meliputi *People* (CS, Teller, Satpam), *Process*, *E-Channel* (ATM/CRM), dan *Premises.*
2. Survei Kepuasan Nasabah
   Dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Telephonic Interview* (CATI) terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank BRI (maksimal 3 hari setelah bertransaksi).

BRI bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara objektif dengan menggunakan variabel pembanding, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor di industri perbankan, hasil yang diperoleh pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- **Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):**
  1. Peringkat 3 dari 7 bank untuk *Customer Loyalty Index* (CLI).
  2. Peringkat 3 dari 7 bank untuk *Satisfaction, Loyalty, and Engagement Index* (SLE Index).

- **Customer Experience Service Quality Index (CX-SQI) 2020 by Carre:**
  1. Peringkat 2 dalam kategori *Brand Usage* (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi setor-tarik tunai di kantor cabang BRI.
  2. Peringkat 1 dalam kategori *Brand Usage* (Bank yang paling banyak dikunjungi) untuk nasabah yang melakukan transaksi transfer dana di kantor cabang BRI.
  3. Peringkat 2 untuk *Customer Experience Service Quality Index* (CX-SQI).

- **Bank Service Excellece Monitor (BSEM) 2020 by Marketing Research Indonesia (MRI):**
  1. Peringkat 3 untuk *Convenient Branch Experience.*
  2. Peringkat 3 untuk *Overall E-Banking.*
  3. Peringkat 1 untuk *Internet Banking.*

- **Penghargaan bidang contact center sebagai berikut:**
  1. Top brand award kategori *Call Center* peringkat ke 4.
  2. Wow brand award kategori *Call Center* peringkat ke 2.
  3. Marketing Research Indonesia (MRI) kategori *Call Center* Peringkat ke 4.
  4. Contact Center World (CCW) Region Asia Pacific Category :
     a. Best Sales Professional Silver Winner.
     b. Best IT Support Professional Bronze Winner.
     c. Green Contact Center Bronze Winner.
     d. Best Self Service Technology Bronze Winner.
     e. Best Sales Campaign Bronze Winner.

BUMN UNTUK INDONESIA

BANK BRI

#PunyaRumahAutoKeren

Jadi Keren dengan Punya Rumah Sendiri

Saatnya #MulaiLagi menjadi keren dengan miliki rumah sendiri.
Punya rumah idaman kini semakin mudah melalui BRISPOT.
Download di Google Play dan *apply* segera!

CEPAT | MUDAH | TERJANGKAU | DI SELURUH KOTA

Scan di sini
untuk download

KPR BRI

BRI SPOT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

LAPORAN KEUANGAN 2020

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

Model 54

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRI
Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sunarso
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. At Taqwa II No. 4 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta barat
   Nomor Telepon : 021 - 575 1761
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Handayani
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 1 Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021 - 575 1711
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Januari 2021
Atas nama dan mewakili Direksi

Sunarso	Handayani
Direktur Utama	Direktur

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	948 - 951
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	952 - 953
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	954 - 955
Laporan Arus Kas Konsolidasian	958 - 959
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	960 - 1255
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	1256 - 1258
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk	1259 - 1260
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk	1261 - 1262
Laporan Arus Kas - Entitas Induk	1263 - 1264
Catatan atas Informasi Keuangan Entitas Induk	1265 - 1270

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681
29 Januari 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Kas	2a,2c,3	32.161.564	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	51.530.969	71.416.449
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d, 2e,2f,5,45	9.154.378	10.237.736
Cadangan kerugian penurunan nilai		(93.843)	-
		9.060.535	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	2a,2c,2d, 2e,2g,6,45	66.539.685	116.854.727
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18.070)	-
		66.521.615	116.854.727
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,45	327.615.655	195.840.931
Cadangan kerugian penurunan nilai		(348.941)	(758)
		327.266.714	195.840.173
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	2c,2d,2e, 2i,8,45	27.573.004	34.317.499
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.326.190)	(132.241)
		26.246.814	34.185.258
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2c,2d,2h 9,45	-	1.130.306
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2d,2u, 10,45	46.818.568	22.582.244
Tagihan Derivatif	2c,2ak,11	1.576.659	210.396
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,12,45	899.458.207	877.431.193
Cadangan kerugian penurunan nilai		(65.165.002)	(38.363.840)
		834.293.205	839.067.353

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET (lanjutan)			
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2c,2d,2e, 2k,13,45	38.915.673	25.766.197
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.449.489)	(745.029)
		37.466.184	25.021.168
Piutang Sewa Pembiayaan	2c,2d,2e,2*l*, 14,45	3.619.224	4.191.596
Cadangan kerugian penurunan nilai		(213.060)	(87.500)
		3.406.164	4.104.096
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,15,45	6.817.436	9.346.063
Cadangan kerugian penurunan nilai		(546.260)	-
		6.271.176	9.346.063
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2n,16,45	1.489.800	745.354
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(50)
		1.489.800	745.304
Aset Tetap	2d,2o,2p, 17,45		
Biaya perolehan		46.837.964	44.075.680
Akumulasi penyusutan		(14.652.804)	(12.643.051)
Nilai buku - neto		32.185.160	31.432.629
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ak,39c	8.313.545	4.541.298
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 18,2aa	27.195.956	19.824.426
TOTAL ASET		**1.511.804.628**	**1.416.758.840**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,19	11.845.910	7.549.312
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,45		
Giro	20	185.151.229	168.826.135
Giro *Wadiah*		6.303.202	2.020.866
Tabungan	21	460.453.588	405.355.483
Tabungan *Wadiah*		9.247.604	6.951.688
Deposito Berjangka	22	426.399.550	413.223.653
Total Simpanan Nasabah		1.087.555.173	996.377.825
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2t, 23,45	23.785.996	17.969.829
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u, 7,24,45	40.478.672	49.902.938
Liabilitas Derivatif	2c,2aj,11	407.774	184.605
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m, 15,45	6.817.436	9.346.063
Utang Pajak	2ak,39a	1.400.638	185.443
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,25	34.489.091	38.620.837
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w, 26,45	35.968.985	30.921.771
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,2ao, 27,45	3.681.709	609.493
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ae, 28,43,45	10.397.201	10.662.581
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2z, 2ae,29,46b	20.052.299	19.359.607
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,30	1.465.392	1.465.366
TOTAL LIABILITAS		**1.278.346.276**	**1.183.155.670**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)			
DANA *SYIRKAH* TEMPORER			
Giro *Mudharabah*		1.623.563	4.080.803
Tabungan *Mudharabah*		6.147.015	2.025.354
Deposito Berjangka *Mudharabah*		25.776.398	18.712.677
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER		**33.546.976**	**24.818.834**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	1,32a	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	32b	3.411.813	2.900.994
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,17	17.099.207	17.099.207
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ai,32c	(54.749)	(14.970)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2h	4.623.064	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	975.877	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	2h	-	715.770
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2ae	(1.469.726)	189.519
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	(1.649.076)	(2.106.014)
Opsi saham	2af, 31	72.894	22.409
Cadangan kompensasi atas saham bonus	32f	1.228.805	21.796
Saldo laba	32d,32e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		163.949.482	178.304.746
Total Saldo Laba		166.972.167	181.327.431
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		197.377.567	206.323.433
Kepentingan non-pengendali		2.533.809	2.460.903
TOTAL EKUITAS		**199.911.376**	**208.784.336**
TOTAL LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		**1.511.804.628**	**1.416.758.840**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	**2020**	**2019**
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Syariah	33		
Pendapatan bunga	2z	112.584.087	118.379.729
Pendapatan syariah	2k,2ab	4.348.425	3.376.547
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		116.932.512	121.756.276
Beban Bunga dan Syariah	34		
Beban bunga	2z	(36.190.771)	(38.671.838)
Beban syariah	2ab	(1.531.824)	(1.377.133)
Total Beban Bunga dan Syariah		(37.722.595)	(40.048.971)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		79.209.917	81.707.305
Pendapatan premi	2ac	6.208.716	5.373.757
Beban klaim	2ac	(5.327.065)	(4.363.029)
Pendapatan premi - neto		881.651	1.010.728
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	15.122.682	14.505.762
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		7.239.896	7.065.981
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah neto	2h,7,9	2.860.653	1.839.341
Keuntungan transaksi mata uang asing neto	2ah,2ai	1.257.984	154.157
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	342.351	80.980
Lain-lain		2.640.273	4.792.909
Total Pendapatan Operasional lainnya		29.463.839	28.439.130
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,35	(30.617.491)	(21.556.319)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2an,27b	(2.157.162)	(608.271)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(75.231)	(595.015)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ae,36, 43,45	(26.319.791)	(24.243.276)
Umum dan administrasi	2o,37	(17.269.844)	(15.366.752)
Lain-lain		(6.341.724)	(5.355.597)
Total Beban Operasional lainnya		(49.931.359)	(44.965.625)
LABA OPERASIONAL		26.774.164	43.431.933
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	38	**(49.318)**	**(67.880)**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**26.724.846**	**43.364.053**
BEBAN PAJAK	2ak,39b,39c	**(8.064.453)**	**(8.950.228)**
LABA TAHUN BERJALAN		**18.660.393**	**34.413.825**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	**2020**	**2019**
Penghasilan komprehensif lainnya:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(2.034.087)	(1.291.782)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		367.922	322.945
Surplus revaluasi aset tetap	17	-	3.316.985
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj	(39.779)	(64.820)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	4.633.561	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	868.461	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2h	-	3.696.914
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(698.692)	(895.470)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		**3.097.386**	**5.084.772**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**21.757.779**	**39.498.597**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		18.654.753	34.372.609
Kepentingan non-pengendali		5.640	41.216
TOTAL		**18.660.393**	**34.413.825**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		21.727.515	39.403.628
Kepentingan non-pengendali		30.264	94.969
TOTAL		**21.757.779**	**39.498.597**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	2ah,50		
Dasar		152	281
Dilusian		151	281

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Opsi saham	Saldo Laba		Total ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
											Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		**6.167.291**	**2.692.663**	**49.850**	**(2.070.378)**	**1.154.343**	**(2.418.948)**	**426.670**	**13.824.692**	**10.971**	**3.022.685**	**160.107.704**	**182.967.543**	**2.307.788**	**185.275.331**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.372.609	34.372.609	41.216	34.413.825
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2aj	-	-	(64.820)	2.786.148	(964.824)	-	-	3.274.515	-	-	-	5.031.019	53.753	5.084.772
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(64.820)	2.786.148	(964.824)	-	-	3.274.515	-	-	34.372.609	39.403.628	94.969	39.498.597
Pembagian laba	32d														
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.175.567)	(16.175.567)	(18.819)	(16.194.386)
Saham bonus	32f	-	208.331	-	-	-	312.934	(404.874)	-	-	-	-	116.391	-	116.391
Opsi saham	31	-	-	-	-	-	-	-	-	11.438	-	-	11.438	3.765	15.203
Kontribusi modal dari kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500	31.500
Perubahan kepentingan non pengendali akibat akuisisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.700	41.700
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		**6.167.291**	**2.900.994**	**(14.970)**	**715.770**	**189.519**	**(2.106.014)**	**21.796**	**17.099.207**	**22.409**	**3.022.685**	**178.304.746**	**206.323.433**	**2.460.903**	**208.784.336**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Opsi saham	Saldo Laba		Total Ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		**6.167.291**	**2.900.994**	**-**	**(14.970)**	**715.770**	**189.519**	**(2.106.014)**	**21.796**	**17.099.207**	**22.409**	**3.022.685**	**178.304.746**	**206.323.433**	**2.460.903**	**208.784.336**
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No.71	52	-	-	111.385	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.386.452)	(12.275.067)	(52.327)	(12.327.394)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian		6.167.291	2.900.994	111.385	(14.970)	715.770	189.519	(2.106.014)	21.796	17.099.207	22.409	3.022.685	165.918.294	194.048.366	2.408.576	196.456.942
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.654.753	18.654.753	5.640	18.660.393
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2aj	-	-	864.492	(39.779)	3.907.294	(1.659.245)	-	-	-	-	-	-	3.072.762	24.624	3.097.386
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	864.492	(39.779)	3.907.294	(1.659.245)	-	-	-	-	-	18.654.753	21.727.515	30.264	21.757.779
Pembagian laba																
Dividen	32d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(20.623.565)	(3.614)	(20.627.179)
Saham bonus	32f	-	510.819	-	-	-	-	504.285	1.207.009	-	-	-	-	2.222.113	-	2.222.113
Opsi saham	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.485	-	-	50.485	94.548	145.033
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	-	(47.347)	-	-	-	-	-	(47.347)	-	(47.347)
Perubahan kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.035	4.035
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		**6.167.291**	**3.411.813**	**975.877**	**(54.749)**	**4.623.064**	**(1.469.726)**	**(1.649.076)**	**1.228.805**	**17.099.207**	**72.894**	**3.022.685**	**163.949.482**	**197.377.567**	**2.533.809**	**199.911.376**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	2019
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Pendapatan yang diterima			
Penerimaan bunga dan investasi		109.112.566	117.464.011
Pendapatan syariah		4.348.425	3.376.547
Pendapatan premi		6.208.716	5.373.757
Beban yang dibayar			
Beban bunga		(36.190.771)	(38.666.742)
Beban syariah		(1.531.824)	(1.377.133)
Beban klaim		(5.327.065)	(4.363.029)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		7.239.896	7.065.981
Pendapatan operasional lainnya		25.210.072	22.213.637
Beban operasional lainnya		(49.474.810)	(46.257.369)
Pendapatan (beban) non operasional - neto		(84.532)	(68.021)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(4.953.877)	(9.357.307)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**54.556.796**	**55.404.332**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain		264.550	(2.854.149)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(11.940.401)	(12.637.154)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		6.744.495	(6.172.212)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(24.236.324)	(13.185.691)
Kredit yang diberikan		(35.685.632)	(74.427.400)
Piutang dan pembiayaan syariah		(13.149.476)	(6.025.669)
Piutang sewa pembiayaan		572.372	(803.779)
Aset lain-lain		(11.322.226)	6.655.602
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		4.296.598	(913.645)
Simpanan:			
Giro		16.325.094	(9.271.846)
Giro *Wadiah*		4.282.336	(256.984)
Tabungan		55.098.105	25.436.778
Tabungan *Wadiah*		2.295.916	1.349.877
Deposito berjangka		13.175.897	55.810.139
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		5.816.167	8.838.671
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		(9.424.266)	12.523.543
Liabilitas lain-lain		291.044	1.252.567
Kenaikan (penurunan) dana *syirkah* temporer		8.728.142	3.859.957
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Operasi		**66.689.187**	**44.582.937**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	**2020**	**2019**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil Penjualan aset tetap		35.214	141
Penyertaan saham		(280.175)	(228.110)
Penerimaan dividen	16	6.649	5.857
Perolehan aset tetap		(3.129.034)	(3.695.364)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		-	(1.270.825)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi		(112.640.485)	-
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Investasi		**(116.007.831)**	**(5.188.301)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima		4.935.803	(9.592.989)
Pembagian laba untuk dividen		(20.623.565)	(16.175.565)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	25	1.998.840	12.102.950
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	25	(6.292.850)	(4.419.500)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan		**(19.981.772)**	**(18.085.104)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(69.300.416)**	**21.309.532**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		**(352.878)**	**(160.251)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**236.906.429**	**215.757.148**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**167.253.135**	**236.906.429**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:	2a		
Kas	3	32.161.564	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	4	51.530.969	71.416.449
Giro pada bank lain	5	9.154.378	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	63.732.017	113.800.580
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	10.674.207	11.232.450
Total Kas dan Setara Kas		**167.253.135**	**236.906.429**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 5 tanggal 3 Desember 2018, mengenai perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 6 Desember 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 9).

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham *(Stock Split)*

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering* (IPO)) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan “S”) dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 32b).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham *(Stock Split)* (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp50 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

BRI melalui surat No. R.224-DIR/DIS/09/2015 tanggal 25 September 2015 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp5.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-101/PB.31/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000 melalui surat No. B.695-DIR/SKP/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, antara tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 221.718.000 lembar saham sebelum *stock split*. Ketika *buyback* 2016 harga perolehan rata rata persahamnya Rp10.944 dengan dana yang digunakan Rp 2.418.947.067.500 (nilai penuh). Sehingga setelah *stock split* (1:5) saham yang telah dibeli kembali dicatat sebesar 1.108.590.000 lembar dengan harga perolehan rata rata persahamnya Rp 2.182.

Pada tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2019, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 32f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 143.415.500 lembar dengan harga pada saat grant adalah Rp3.630 harga atau setara Rp520.598.265.000 (nilai penuh) harga perolehan (Rp 2.182 per lembar saham) Rp312.933.098.043 (nilai penuh) selisihnya dicatat sebagai Agio sebesar Rp207.665.166.957 (nilai penuh).

Pada tanggal 25-28 Februari 2020, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 32f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 231.111.000 lembar saham dengan rincian Lanjutan program pertama (Mesop/ESA 1) sebesar 4.396.700 lembar saham dengan harga grant Rp.3.630 atau setara Rp 13.193.235.000 (nilai penuh) serta program kedua (ESA 2) sebesar 226.714.300 lembar dengan harga grant Rp4.410 (nilai penuh) atau setara Rp 999.810.063.000 (nilai penuh) sehingga total 231.111.000 lembar saham harga perolehan Rp2.182 atau setara total Rp 504.284.970.744 (nilai penuh) selisihnya dicatat dalam agio sebesar Rp 511.485.113.256 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

BRI melalui surat No. R.154-DIR/ALM/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp3.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S.47/PB.31/2020 tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000 melalui surat No. B.427-DIR/SKP/03/2020 tanggal 13 Maret 2020. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34. Saat ini sisa *treasury stock* menjadi 750.463.500 lembar saham.

e. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kantor Wilayah	19	19
Kantor Audit Intern Pusat	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	19	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	461	461
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	5	5
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri	608	608
Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri	3	3
Kantor Kas	547	952
BRI Unit	5.382	5.382
Teras dan Teras Keliling	2.056	2.182
Teras Kapal	4	4

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 8 (delapan) entitas anak yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama dan PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur).

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan kepala audit intern wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI dan entitas anak masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	61.531	61.768
Entitas Anak	5.497	5.345
	67.028	67.113

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 September 2019, adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komisaris Utama/Komisaris	:	Kartika Wirjoatmodjo	Andrinof A.Chaniago
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Ari Kuncoro	Wahyu Kuncoro
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Zulnahar Usman	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa*)	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono	-
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari	Loeke Larasati Agoestina

*) Disetujui dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen yang berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021.

Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 September 2019, adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Direktur Utama	:	Sunarso	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto	Catur Budi Harto
Direktur	:	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo
Direktur	:	Priyastomo	Priyastomo
Direktur	:	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur	:	Handayani	Handayani
Direktur	:	Supari	Supari
Direktur	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	:	Agus Sudiarto	Agus Sudiarto
Direktur	:	Agus Noorsanto	Agus Noorsanto
Direktur	:	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur	:	Wisto Prihadi*)	Azizatun Azhimah

*) Dikuatkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 548-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Dewan Komisaris No. B. 120-KOM/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 675-DIR/KHC/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan Surat Dewan Komisaris No. B. 236-KOM/09/2019 tanggal 11 September 2019, adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ketua	:	Hendrikus Ivo	A. Fuad Rahmany
Anggota	:	Ari Kuncoro	Hendrikus Ivo
Anggota	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota	:	R. Widyo Pramono	A. Sonny Keraf
Anggota	:	Pamuji Gesang Raharjo	Pamuji Gesang Raharjo
Anggota	:	Sunuaji Noor Widiyanto	Sunuaji Noor Widiyanto
Anggota	:	Handayani Wibowo	Handayani Wibowo
Anggota	:	Sahat Pardede	-

Sekretaris Perusahaan BRI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Aestika Oryza Gunarto, sesuai dengan Surat No. R.453-DIR/HCB/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Hari Purnomo, sesuai dengan Surat No. R. 397-DIR/KHC/07/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Hari Siaga Amijarso, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. R. 401-DIR/KHC/07/2019 tanggal 15 Juli 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS)

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan *(spin-off)* atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.

2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.

3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRIS antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp7,5 triliun terdiri atas 15 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan perubahan nama dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018. Akta tersebut juga mencantumkan persetujuan pemegang saham antara lain:

1. Rencana Bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

2. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

3. Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan, dengan jumlah maksimal 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat terakhir yang disampaikan ke OJK No. S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Penawaran umum perdana saham BRIS (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI pada tanggal 9 Mei 2018. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan, maka sebanyak 97.161.135 lembar saham BRIS yang dimiliki oleh BRI tidak dicatatkan di Bursa, sehingga total saham BRIS yang dicatatkan di Bursa adalah 9.618.952.363 lembar saham. Setelah IPO BRIS, berdasarkan surat No. DE/V/18-2545 tanggal 24 Mei 2018 dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan BRI atas saham BRIS adalah sebesar 73,00%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRIsyariah Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan masa jabatan Pengurus Perseroan dan beberapa penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan) (catatan 53).

Struktur kepemilikan saham BRIS pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari BRI sebesar 71,64%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 8,25% dan masyarakat (publik) sebesar 20,11%.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 57.938.459 dan Rp43.165.484 atau 3,83% dan 3,05% dari total aset konsolidasian.

Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.347.121 dan Rp3.376.294 atau 3,53% dan 2,77% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRIS berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dan memiliki 71 kantor cabang dan 224 kantor cabang pembantu.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk (“Bank Agro”) untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham Bank Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 per lembar (Rupiah penuh) dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar, sehingga meningkatkan modal saham Bank sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahu mengenai Efektifnya PUT VIII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,10%, Dapenbun 5,00% dan publik 7,90%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Anggaran Dasar BRI Agro telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 4 Mei 2020, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076778.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020.

Total aset BRI Agro pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp27.966.393 dan Rp27.145.044 atau 1,85% dan 1,92% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.928.438 dan Rp2.054.867 atau 1,57% dan 1,69% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Gedung BRI Agro, Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta, dan memiliki 18 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp8.481 dan Rp7.070 atau 0,0006% dan 0,0005% dari total aset konsolidasian.

Sesuai dengan ijin usaha resmi dari Regulator Hong Kong sebagai *Money Service Operator* (MSO), ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan layanan remitansi untuk pekerja migran Indonesia serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan rekening BRI yang dimiliki oleh nasabah BRI yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Shop 3 G/F, 24-36 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki 5 (lima) kantor cabang yang tersebar di wilayah Causeway Bay, Mongkok, Yuen Long dan Tsuen Wan.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (“BRI Life”) untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.627.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 18 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dan Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, serta perubahan susunan Dewan Komisaris ("Keputusan Sirkuler Pemegang Saham") tanggal 28 Agustus 2020. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0142583.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 31 Agustus 2020 serta diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. AHU-AH.01.03-0376495 tanggal 31 Agustus 2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Life pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp13.122.095 dan Rp 11.101.981 atau 0,87% dan 0,78% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp5.897.959 dan Rp5.182.891 atau 4,79% dan 4,25% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 6 kantor CCC (Customer Care Center) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 29 kantor CC (Customer Care).

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini diselesaikan pada tanggal 30 September 2016, berdasarkan akta No. 75 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Lain-lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BRI Multifinance Indonesia No. 237 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023113.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 April 2019, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0223685 tanggal 29 April 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2019, Tambahan Berita Negara No. 35668/2019, antara lain berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan BRI Finance dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan tindak lanjut atas arahan dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 November 2020, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0188874.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0406497 tanggal 11 November 2020, antara lain mengatur tentang perubahan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor BRI Finance.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.055.885 dan Rp4.616.468 atau 0,27% dan 0,33% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp479.376 dan Rp454.217 atau 0,39% dan 0,37% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Gedung Lippo Kuningan, lantai GF, 10 dan 11, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan dan memiliki 12 cabang dan 14 kantor pemasaran.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura (”Sarana NTT Ventura”) dengan PT Bahana Artha Ventura (”BAV”) dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama (“BRI Ventures”), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang menjadi di kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019, sehubungan dengan perubahan nama tersebut, BRI Ventures telah memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir terkait dengan perubahan Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Februari 2020. Keputusan ini telah dicatat dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 12 Februari 2020 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0128050 tanggal 6 Maret 2020.

Pada Anggaran Dasar PT BRI Ventura Investama yang dimuat dalam Akta No.18 tanggal 22 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, SH, Notaris di Kupang dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-693.HT.01.01.TH.98 tanggal 10 Pebruari 1998 dan perubahannya yang terakhir yang dimuat dalam Akta No. 24 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0402552 tanggal 27 Oktober 2020, terdapat pengangkatan direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Ventures adalah menyelenggarakan usaha modal ventura termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventures pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.822.744 dan Rp1.514.486 atau 0,12% dan 0,11% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRI Ventures berlokasi di District 8 Office SCBD, Prosperity Tower Lantai 16 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas)

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar BRIDS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn, No. 1 tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 141 tanggal 26 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), perubahan alamat kantor BRIDS, serta perubahan susunan Dewan Komisaris. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0100724.AH.01.02.Tahun 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0367703 tanggal 03 Desember 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRIDS adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas) (lanjutan)

Sebagai bagian dari perijinan yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

Total aset BRIDS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.095.479 dan Rp1.082.544 atau 0,07% dan 0,08% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRIDS berlokasi di Gedung BRI II Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 12 Gerai dan 3 kemitraan.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Pada tanggal 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (“PPJBSB”) dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (”BRI Insurance”) menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1.041.000.000.000 (Rupiah penuh) dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham BRI Insurance dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Anggaran Dasar BRI Insurance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Tri Wahyuwidayati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan dilakukannya perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia (”BRI Insurance”). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Insurance adalah melaksanakan kegiatan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian non konvensional, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

Perusahaan memperoleh izin usaha di bidang asuransi kerugian pada tanggal 26 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.-128/KM.13/1989. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-105/NB.11/2020 tanggal 6 Maret 2020, BRI Insurance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang asuransi umum atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang selanjutnya berubah nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (lanjutan)

BRI Insurance mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-006/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Insurance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.048.872 dan Rp2.581.543 atau 0,20% dan 0,18% dari total aset konsolidasian.

Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp778.805 dan Rp1.688.524 atau 0,63% dan 1,33% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Insurance berlokasi di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prapatan Raya No.18, Jakarta Selatan dan memiliki 22 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, 8 kantor perwakilan *marketing*, 2 kantor perwakilan *marketing* syariah, 45 *marketing channel* dan 12 *marketing office* syariah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Amandemen 2015), ”Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan”.

BRIS (entitas anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 tentang “Akuntansi *Murabahah*”, PSAK No. 104 tentang “Akuntansi *Istishna*”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi *Mudharabah*”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi *Musyarakah*” dan PSAK No.107 tentang “Akuntansi *Ijarah*” yang menggantikan PSAK No. 59 tentang “Akuntansi Perbankan Syariah” yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk”, PSAK No. 111 tentang “Akuntansi *Wa’d”* dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian , yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam grup kecuali entitas anak dan kantor cabang tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Hongkong. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 ”Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas. Berdasarkan PSAK No. 38 tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung dalam sepengendalian.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, obligasi rekapitalisasi pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, Bank dan entitas anak menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrument terkait. Berikut klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen utang, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan/kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan;
- Aset keuangan, dalam hal ini Instrumen ekuitas, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan/kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan; atau
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank dan entitas anak mengklasifikasi dan mengukur instrumen derivatif dan portofolio *trading* pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Bank dan entitas anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

Pada saat pengakuan awal, Bank dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

<u>Penilaian model bisnis</u>

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

a. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank dan entitas anak;
b. Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
c. Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank dan entitas anak mempertimbangkan:

a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
b. Fitur *leverage*;
c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilias keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui labar rugi terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- Kontrak jaminan keuangan;
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar; atau
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
b. Kredit yang diberikan dan piutang;
c. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
d. Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
b. Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

a. Yang dimaksudkan oleh BRI dan entitas anak untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
b. Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
c. Dalam hal BRI dan entitas anak mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI dan entitas anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Investasi tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

BRI dan entitas anak pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
b. Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
c. Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Saat ini BRI tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajarnya dan perubahan atas nilai wajar tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya dan perubahan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2) BRI dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement*); dan antara (a) BRI dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Bank dan entitas anak melepaskan aset keuangan, seperti kredit yang diberikan, ketika syarat dan kondisi telah direnegosiasi hingga secara substansial, kredit yang diberikan tersebut menjadi baru, dengan perbedaan akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan, jika kerugian penurunan nilai belum dicatat. Kredit yang diberikan tersebut akan dilkasifikasikan sebagai *Stage* 1 untuk penilaian *Expected Credit Losses* (ECL), kecuali kredit yang diberikan tersebut dianggap aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI*)*.

Jika modifikasi tidak akan menghasilkan arus kas yang secara sustansi berbeda, maka modifikasi tidak akan berujung pada pelepasan aset. Berdasarkan perbedaan arus kas yang didiskonto pada *Effective Interest Rate* (EIR) awal, Bank akan mencatat keuntungan atau kerugian akibat modifikasi, sampai dengan jumlah kerugian penurunan nilai yang belum diakui.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Mulai 1 Januari 2020, akumulasi keuntungan/kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Bank dan entitas anak untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan lainnya atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

BRI dan entitas anak tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh BRI dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

BRI dan entitas anak tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. Terjadi setelah BRI dan entitas anak memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BRI dan entitas anak telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau;
c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI dan entitas anak untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 41).

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110, entitas anak BRIS menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 110, entitas anak BRIS menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

1) Secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
2) Suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak atau induk;
5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 45 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
b. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu nilai wajar. Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi; atau
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Berdasarkan proses di atas, Bank dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage* 1, *Stage* 2, *Stage* 3 dan POCI, sebagai berikut:

- *Stage* 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam *stage* 1 termasuk fasiltas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *stage* 2.

- *Stage* 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank dan entitas anak merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage* 2 juga mencakup fasilitas dimana risiko kedit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage* 3.

- *Stage* 3: mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. Bank dan entitas anak mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI) (lanjutan)

Berdasarkan proses di atas, Bank dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage* 1, *Stage* 2, *Stage* 3 dan POCI, sebagai berikut (lanjutan):

- POCI Aset POCI adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian risiko kredit pada saat pengakuan awal. Aset tersebut dicatat pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan pendapatan bunga akan diakui selanjutnya berdasarkan metode suku bunga efektif yang disesuaikan. Cadangan ECL hanya dicatat atau dilepaskan jika ada perubahan selanjutnya pada kerugian kredit ekspektasian.

Terdapat kritera kualitatif dan kuantitif untuk memastikan aset keuangan tercakup dalam *stage* tertentu yang telah diformalkan di dalam Surat Edaran Bank.

Bank dan entitas anak menghitung penurunan nilai melalui dua metode, yaitu penurunan nilai secara individual atau kolektif. Perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan, yaitu dengan total eksposur aset keuangan di atas Rp5.000.000.000 (nilai penuh) dan pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Selain itu, perhitungan penurunan nilai akan dilakukan secara kolektif.

Penurunan Nilai Individual

Metode perhitungan penurunan nilai secara individual akan mempertimbangkan 3 (tiga) skenario kemungkinan pengembalian, yaitu: (i) skenario dasar (Base), (ii) skenario buruk (Bad), dan (iii) skenario terburuk (Worst). Pembuatan skenario dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) dan mempertimbangkan *confidence level* yang menggambarkan kondisi industri dan perusahaan terkait. Nantinya ECL yang dihasilkan oleh masing-masing skenario akan dirata-ratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

Penurunan nilai kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

Bank dan entitas anak menggunakan model (i) *Skalar Bayesian*, (ii) *Credit Index* dan (iii) *Vasicek* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

Bank dan entitas anak menggunakan metode (i) *Historical*, (ii) *Diminish Balance* dan (iii) *Value to Loan* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat direcover oleh Bank terhadap debitur default. LGD biasa dihitung dengan 1-*Recovery Rate*. *Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian dari kewajiban yang telah default. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah EIR awal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI) (lanjutan)

Penurunan nilai kolektif (lanjutan)

EAD merupakan estimasi nilai buku pada saat terjadi gagal bayar, dengan mempertimbangkan arus kas instumen keuangan terkait, serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. EAD juga mempertimbangkan jadwal pembayaran dan amortisasi serta perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang terjadinya kegagalan bayar. Pemodelan EAD akan dilakukan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan terkait, yang dibagi ke dalam beberapa kategori: (i) kredit angsuran (ii) kredit *revolving*, (iii) *trade finance* (iv) *treasury*.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan Bank untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan Bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal/normal, baik/*good*, dan buruk/*bad*). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (*secured*), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi Bank dan entitas anak.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspekstasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Bank menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Bank dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), BRI dan entitas anak menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
    1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
    2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

BRI dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika BRI dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI dan entitas anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

BRI dan entitas anak menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai; atau
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI dan entitas anak melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai dengan ketentuan BRI dan entitas anak dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai ketentuan BRI dan entitas anak yang direstrukturisasi.

BRI dan entitas anak menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai dengan ketentuan BRI dan entitas anak dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang memiliki nilai tidak signifikan sesuai ketentuan BRI.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (probability of default). Kredit yang mempunyai data dan informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan internal BRI dan entitas anak, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada pihak eksternal maupun internal BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

BRI dan entitas anak menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI dan entitas anak menggunakan rata-rata bergerak (moving average) data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss of given default* (LGD).

BRI dan entitas anak menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, BRI dan entitas anak dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralized financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai untuk Entitas Syariah

Entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah (BRIS) menerapkan POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang ”Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No. 12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang ”Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang ”Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a) 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen utang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
b) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
c) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
d) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility, Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money), deposito berjangka, dan *banker’s acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, wesel tagih, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes, U.S.Treasury Bonds, Singapore Government Securities, Negotiable Certificate of Deposits, Monetary Authority of Singapore* (MAS) *bills* dan *credit linked notes* serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sejak 1 Januari 2020, Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2020, Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)

Penilaian Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. BRI tidak mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, BRI dan entitas anak telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.
2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Sebelum 1 Januari 2020, Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan entitas anak.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Piutang dan pembiayaan syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna.*

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

l. Piutang sewa pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Piutang sewa pembiayaan diakui sebesar investasi bersih yang merupakan nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga efektif.

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 71. Sebelum 1 Januari 2020, dicatat sesuai PSAK No. 55 dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5
Satelit	15
Main System	5
Non Main System	3

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 17).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun “Aset Tetap” yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap”. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sejak 1 Januari 2020 BRI dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait, dengan 2 pengecualian yaitu aset pendasar bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, BRI dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BRI dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
  a. BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
  b. BRI dan entitas anak mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BRI dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

a. Pembayaran lunas dimuka.
b. Pembayaran angsuran tetap.
c. Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counter part*.

BRI dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga inkremental sewa mengacu pada *cost corporate bond* Bank dan tingkat suku bunga pinjaman entitas anak.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. BRI dan entitas anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai “rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun “Aset Lain-lain”) diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI dan entitas anak mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method*).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI dan entitas anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai sarana perintah pembayaran yang telah disepakati. Giro *mudharabah* dicatat sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh BRI, BRI Agro dan BRI Finance adalah Obligasi, *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan *Medium Term Notes* (MTN). Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), sedangkan BRIS (entitas anak) pengukuran biaya perolehan diamortisasi dengan mengunakan metode garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ab. Pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode margin efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, BRIS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

ac. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (*withdrawal*) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi, dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred but not reported* (IBNR)).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life dan BRI Insurance mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life dan BRI Insurance atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life dan BRI Insurance mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi, dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life dan BRI Insurance tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life dan BRI Insurance mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain manfaat dana tambahan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit.*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iv) Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.
(v) Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.
(vi) Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes.*

ag. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk BRI dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Laba per lembar saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Dolar Amerika Serikat	14.050,00	13.882,50
1 Pound Sterling Inggris	19.012,46	18.238,14
1 Yen Jepang	135,97	127,81
1 Euro Eropa	17.234,43	15.570,61
1 Dolar Hong Kong	1.812,30	1.782,75
1 Riyal Arab Saudi	3.744,50	3.701,00
1 Dolar Singapura	10.606,18	10.315,05
1 Ringgit Malaysia	3.481,17	3.391,77
1 Dolar Australia	10.752,47	9.725,39
1 Renminbi	2.150,26	1.994,18
1 Baht Thailand	468,10	465,16
1 Franc Swiss	15.900,87	14.336,99
1 Dolar Kanada	10.980,86	10.639,97
1 Dolar Brunei Darussalam	10.213,36	10.290,96
1 Kroner Denmark	2.316,42	2.083,37
1 Won Korea Selatan	12,94	12,02
1 Dolar Selandia Baru	10.087,90	9.335,29
1 Kina Papua Nugini	3.951,60	4.047,54
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.825,06	3.779,66
1 Kroner Swedia	1.713,65	1.487,05
1 Kroner Norwegia	1.635,74	1.579,16
1 Rupee India	191,65	194,74
1 Peso Filipina	292,47	274,09
1 Rupee Pakistan	1,99	1,99
1 Dolar Taiwan	499,77	464,19
1 Dong Vietnam	0,61	0,60

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 3 (tiga) Kantor Cabang di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun entitas anak, kantor cabang dan perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai “Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”.

aj. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).

Sejak 1 Januari 2020, derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari kontrak utama non derivatif yang merupakan aset keuangan/liabilitas keuangan, Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan secara keseluruhan berdasarkan model bisnis dan jangka waktu kontraktualnya sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.c. Sebelum 1 Januari 2020, instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif yang bukan merupakan aset/liabilitas keuangan dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria tertentu terpenuhi.

ak. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai “Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan” dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika BRI dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

al. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste.

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa BRI dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas terkait.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

an. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ao. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

a. PSAK No. 62, ”Kontrak Asuransi”, Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK No. 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*).
b. PSAK No. 71, ”Instrumen Keuangan”, mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
c. Amandemen PSAK No. 71, ”Instrumen Keuangan”, fitur pembayaran di muka dengan kompensasi negatif. Amandemen ini mengklarifikasikan bahwa aset keuangan melewati kriteria ”semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang” terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.
d. PSAK No. 72, ”Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15, merupakan standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

   Dalam hal kaitannya dengan bisnis Bank, PSAK No. 72 yang menggantikan PSAK No. 23: “Pendapatan” tidak memberikan dampak finansial yang signifikan. PSAK No. 72 memiliki aturan yang lebih rinci dalam hal pengakuan pendapatan. Terdapat 5 (lima) langkah yang harus diteliti agar Bank dapat mengakui pendapatan untuk setiap jenis kontrak dengan pelanggan.

   1. Para pihak menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.
   2. Hak masing-masing pihak dapat diidentifikasi.
   3. Jangka waktu pembayaran dapat diidentifikasi.
   4. Kontrak memiliki substansi komersial.
   5. Kolektibilitas imbalan kemungkinan besar terjadi (*probable*).

e. PSAK No. 73, ”Sewa”, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan menyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.
f. PSAK No. 15, ”Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”, mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ao. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu (lanjutan):

g. PSAK No. 1 ”Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK No. 25 ”Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”: Definisi material. Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Penerapan PSAK diatas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dan PSAK No. 73: Sewa sebagai berikut:

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Bank telah mengadopsi PSAK No. 71: Instrumen Keuangan yang disahkan pada 26 Juli 2017 dan amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang disahkan pada 29 Desember 2017 dengan tanggal penerapan awal adalah 1 Januari 2020. PSAK No. 71 ini secara signifikan mengubah PSAK No. 55: Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengakuan, terutama persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

Ringkasan utama atas dampak adopsi PSAK No. 71 terhadap kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

PSAK No. 71 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model. Klasifikasi aset keuangan secara prinsip dapat dibagi menjadi 3, yaitu: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi. PSAK No. 71 mengeliminasi klasifikasi berdasarkan PSAK No. 55 berikut: kredit yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Dalam PSAK No. 71, kontrak utama pada derivatif melekat yang masuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 tidak dipisahkan dan dianalisis secara keseluruhan untuk menentukan klasifikasinya.

Secara garis besar, PSAK No. 71 mempertahankan persyaratan PSAK No. 55 perihal klasifikasi liabilitas keuangan. Namun demikian, dalam PSAK No. 71 perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada umumnya disajikan sebagai berikut:

- Nilai yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan
- Jumlah sisa yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan disajikan dalam laba rugi.

Dalam PSAK No. 55, semua perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ao. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK No. 71 memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss impairment model*) yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini mensyaratkan setiap tanggal pelaporan Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung.

Model kerugian kredit ekspektasian ini juga diterapkan pada komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tertentu, serta tidak berlaku untuk instrumen ekuitas.

Transisi

Perubahan kebijakan akuntansi karena adopsi PSAK No. 71 telah diterapkan secara retrospektif, dengan pengecualian sebagai berikut:

- Periode komparatif tidak disajikan kembali.
  Selisih antara nilai tercatat aset keuangan sebagai dampak penerapan PSAK No. 71 diakui dalam saldo laba per 1 Januari 2020. Dengan demikian, periode tahun 2019 tidak mencerminkan persyaratan PSAK No. 71, sehingga tidak komparatif dengan periode tahun 2020.
- Penilaian berikut ini dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020):
  - Penentuan model bisnis
  - Menetapkan suatu investasi dalam instrumen ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- Jika risiko kredit dari instrumen keuangan tersebut dinilai rendah, maka Bank mengasumsikan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak tanggal pengakuan awal.

PSAK No. 73: Sewa

Bank telah mengadopsi persyaratan PSAK No. 73. Sewa mulai 1 Januari 2020 secara retrospektif dengan dampak kumulatif sesuai dengan PSAK 73 pada Lampiran C.07. Berdasarkan opsi penerapan tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyajikan kembali dampak yang timbul akibat diterapkannya PSAK 73. Sewa yang diterapkan sebelum tanggal penerapan diungkapkan sebesar kumulatif dari sisa sewa per tanggal penerapan.

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa dalam menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

Perseroan mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan dan mempunyai nilai pendasar aset sewa lebih dari Rp 75.000.000 (Rupiah penuh) Selain dari hal tersebut sewa diakui sebagai sewa bernilai rendah atau berjangka waktu pendek yang nantinya akan diakui sebagai biaya pada periode pelaporan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		31.178.212		28.967.663
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	31.599.011	443.966	38.659.607	536.692
Dolar Singapura	14.765.055	156.601	14.446.667	149.018
Riyal Arab Saudi	27.324.311	102.319	64.385.031	238.289
Dolar Taiwan	180.423.440	90.169	5.748.940	2.669
Euro Eropa	2.836.914	48.893	6.010.554	93.588
Dolar Australia	3.628.475	39.015	7.716.345	75.044
Ringgit Malaysia	9.755.822	33.962	17.058.205	57.858
Yen Jepang	161.285.585	21.929	168.673.282	21.558
Dirham Uni Emirat Arab	2.573.096	9.842	2.907.791	10.990
Dolar Hong kong	4.902.304	8.884	7.404.852	13.201
Baht Thailand	11.053.645	5.174	4.977.105	2.315
Dolar Brunei Darussalam	482.763	4.931	277.784	2.859
Pound Sterling Inggris	229.201	4.358	266.491	4.860
Franc Swiss	204.369	3.250	236.599	3.392
Renminbi	1.472.480	3.166	6.738.484	13.438
Dolar Selandia Baru	262.053	2.643	914.288	8.535
Dong Vietnam	2.227.982.164	1.357	2.807.198.164	1.682
Dolar Kanada	103.155	1.133	209.410	2.228
Peso Filipina	1.936.110	566	22.218.090	6.090
Kina Papua Nugini	142.050	561	1.617.425	6.590
Won Korea Selatan	39.247.287	508	51.380.287	618
Rupee India	649.827	125	191.514	37
		983.352		1.251.551
Total		**32.161.564**		**30.219.214**

Saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp6.041.368 dan ASD819.580 (angka penuh) pada tanggal 31 Desember 2020 serta Rp5.903.614 dan ASD1.083.520 (angka penuh) pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		43.139.976		56.731.791
Dolar Amerika Serikat	597.223.683	8.390.993	1.057.781.932	14.684.658
Total		**51.530.969**		**71.416.449**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar sebesar Rp1.084.299 dan Rp1.327.895.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, GWM dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/30/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah lima kali melalui PADG No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018, PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang perubahan atas PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020. Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas masing-masing ditentukan sebesar sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
- GWM Primer	3,00%	6,00%
(i) GWM secara harian*)	0,00	3,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,00	3,00
- PLM (d/h GWM Sekunder)	6,00	4,00
Mata uang asing	4,00%	8,00%
(i) GWM secara harian	2,00	6,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,00	2,00

*) Bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada PADG No. 22/04/PADG/2020 pasal dua ayat tiga sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. PLM adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank.

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Giro RIM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia yang sebesar 14%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
- GWM Primer*)	3,19%	6,15%
(i) GWM secara harian*)	0,00	3,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,19	3,15
- PLM (d/h GWM Sekunder)	16,51	6,56
Mata uang asing	4,01%	8,07%
(i) GWM secara harian	2,00	6,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,01	2,07

*) Setelah dikurangi insentif sesuai PADG No. 22/04/PADG.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut di atas.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		250.733		79.631
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	355.121.110	4.989.452	416.568.081	5.783.006
Dolar Singapura	84.695.915	898.300	33.444.275	344.979
Euro Eropa	50.845.490	876.293	67.574.983	1.052.184
Yen Jepang	4.218.275.442	573.559	7.324.874.646	936.192
Renminbi	166.762.336	358.582	587.436.318	1.171.454
Dolar Australia	29.495.659	317.151	15.516.206	150.901
Pound Sterling Inggris	10.960.757	208.391	8.535.934	155.680
Dolar Hong Kong	107.852.226	195.460	58.930.624	105.058
Arab Emirate Dirham	27.548.333	105.374	28.210.759	106.627
Franc Swiss	5.366.022	85.324	8.010.187	114.842
Krona Swedia	48.791.612	83.612	1.490.505	2.216
Riyal Arab Saudi	17.272.344	64.676	6.570.287	24.317
Dolar Selandia Baru	3.117.449	31.449	2.493.547	23.278
Dolar Kanada	590.529	6.485	2.053.956	21.854
Krona Norwegia	2.877.408	4.707	2.931.467	4.629
Ringgit Malaysia	176.978	616	265.949	902
Baht Thailand	1.010.568	473	736.037	342
		8.799.904		**9.998.461**
		9.050.637		**10.078.092**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah		47.969		33.706
Mata uang asing				
Dolar Hong Kong	24.569.597	44.527	19.510.538	34.782
Dolar Amerika Serikat	800.378	11.245	6.566.219	91.156
		55.772		125.938
		103.741		159.644
Total		9.154.378		10.237.736
Cadangan kerugian penurunan nilai		(93.843)		-
Total - Bersih		**9.060.535**		**10.237.736**

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	150.182	9.453
PT Bank CIMB Niaga Tbk	38.163	46.102
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	20.743	1.011
PT Bank MNC Internasional Tbk	16.090	153
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.239	1.078
Lainnya	20.316	21.834
	250.733	79.631
Mata uang asing		
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	2.925.377	3.478.400
Standard Chartered Bank	1.764.602	1.472.362
Bank of America	576.623	659.651
MUFG Bank, Ltd.	528.333	653.011
Citibank N.A.	429.023	315.288
Bank of China, Ltd	338.481	1.051.061
Banco Central de Timor Leste	287.472	48.568
Lainnya	1.949.993	2.320.120
	8.799.904	9.998.461
	9.050.637	10.078.092

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.585	8.831
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.112	23.342
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.936	1.322
PT Bank Syariah Mandiri	329	206
PT Bank BNI Syariah	7	5
	47.969	33.706
Mata uang asing		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.042	40.054
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.730	85.884
	55.772	125.938
	103.741	159.644
Total	9.154.378	10.237.736
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.843)	-
Bersih	**9.060.535**	**10.237.736**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua giro pada bank lain diklasifikasikan “Lancar”.

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah	0,18%	0,18%
Mata uang asing	0,10	1,52

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif.

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	31 Desember 2020			
	Stage 1- **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2-*** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3-*** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Nilai tercatat awal	10.237.736	-	-	10.237.736
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.083.358)	-	-	(1.083.358)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	**9.154.378**	**-**	**-**	**9.154.378**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2-*** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3-*** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	24
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	24	-	-	24
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	93.819	-	-	93.819
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**93.843**	**-**	**-**	**93.843**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat giro pada bank lain yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 31 Desember 2020 giro pada bank lain mengalami penurunan nilai secara kolektif sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2020, dan tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019, karena Manajemen berkeyakinan bahwa giro pada bank lain dapat ditagih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia				
Term Deposit		5.697.835		22.996.890
Deposit Facility Syariah		500.000		2.023.000
Deposit Facility		683.682		38.290.994
		6.881.517		63.310.884
Inter-bank call money				
PT BPD Jawa Tengah		300.000		
PT Bank Riau Kepri		150.000		50.000
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		125.000		125.000
PT BPD Sumatera Selatan		100.000		-
PT BPD Sulawesi Tenggara		50.000		20.000
PT Standard Chartered Bank Indonesia		-		150.000
PT Bank Mega Indonesia Tbk		-		400.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		-		400.000
PT BPD Jawa Timur Tbk		-		300.000
PT Bumi Putera BOT Finance		-		250.000
PT Bank DKI		-		150.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		100.000
PT Bank HSBC Indonesia		-		100.000
PT Bank CTBC Indonesia		-		60.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia		-		60.000
PT Bank MNC Internasional Tbk		-		55.000
PT Bank Permata Tbk		-		50.000
		725.000		2.270.000
Deposito Berjangka				
PT Maybank Indonesia Tbk		61.500		131.500
PT Bank Permata Tbk		40.000		155.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		35.000		115.635
PT Bank DKI		15.500		124.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		15.000		-
PT Bank Riau Kepri		7.000		244.000
PT Bank Bukopin Tbk		3.500		50.100
PT BPD Kalimantan Barat		3.000		-
PT BPD Sumatera Barat		2.700		180.000
PT BPD Sulawesi Tengah		1.300		100.000
PT Bank Bukopin Syariah Tbk		1.100		3.450
PT BPR Bina Dana Swadaya		1.000		-
PT BPD Aceh Syariah		500		-
PT BPD Jabar Banten Syariah		500		-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		300		300
PT Bank OCBC NISP Tbk		-		99.500
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo		-		334.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		77.000
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		-		200.000
PT Bank Sahabat Sampoerna		-		2.000
PT BPD Jawa Timur Tbk		-		340.000
PT BPD Sumatera Selatan		-		315.000
PT BPD Sulawesi Tenggara		-		234.000
PT BPD Jawa Tengah		-		200.000
PT BPD Jambi		-		100.000
PT BPD Kaltim dan Kaltara		-		65.000
PT BPD Lampung		-		50.000
PT Bank Danamon Syariah		-		40.010
PT Bank Pan Indonesia Tbk		-		30.000
PT BPD Kalimantan Selatan		-		30.000
PT Bank Jatim		-		7.000
PT Bank Ganesha Tbk		-		2.000
PT BPR Bringin Dana Swadaya		-		1.000
		187.900		3.230.495

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
Deposit on Call				
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		50.000
PT Bank Capital Indonesia		-		12.750
		-		62.750
Penempatan Lainnya				
(Banker's Acceptance)				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		-		582.911
		-		582.911
		7.794.417		69.457.040
Dolar Amerika Serikat				
Bank Indonesia				
Term Deposit	3.494.833.594	49.102.411	2.647.634.864	37.158.383
Inter-bank call money				
The Bank of New York Mellon Corporation	186.700.000	2.623.135	108.500.000	1.506.251
Federal Reserve Bank	181.955.872	2.556.480	114.648.160	1.591.603
Citibank, N.A	112.100.000	1.575.005	130.590.000	1.812.916
Wells Fargo Bank, N.A	52.900.000	743.245	137.800.000	1.913.009
TD Bank, N.A	4.954.759	69.614	20.057.393	278.447
JP Morgan Chase Bank, N.A	4.190.000	58.870	3.090.000	42.897
PT Bank BNP Paribas Indonesia	4.043.737	56.815	1.773.098	24.615
PT Bank Pan Indonesia Tbk		-	15.000.000	208.238
PT BPD Kaltim		-	10.000.000	138.825
ING Bank N.V		-	260.000	3.609
		7.683.164		7.520.410
Deposito berjangka				
U.S. Bankcorp	4.226.636	59.384	87.854	1.220
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	2.900.000	40.745		-
TD Bank, N.A.	488.943	6.870	335.143	4.652
		106.999		5.872
Penempatan lainnya				
(Banker's Acceptance)				
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.000.000	281.000	20.000.000	277.650
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.350.000	61.118		-
PT Bank Shinhan Indonesia		-	10.000.000	138.825
PT Bank CIMB Niaga Tbk		-	8.000.000	111.060
		342.118		527.535
Dolar Singapore				
Inter-bank call money				
UOB Singapore	799.174	8.476		-
		8.476		-
		57.243.168		45.212.200
		65.037.585		114.669.240
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Deposit on Call				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.000		-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		-		4.200
		3.000		4.200

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
Deposito berjangka				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		271.750		641.850
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		113.000		121.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		42.100		13.600
PT Bank Syariah Mandiri		12.000		80.250
PT Bank BNI Syariah		6.500		5.250
		445.350		862.450
		448.350		866.650
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.000.000	1.053.750	65.000.000	902.362
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-	30.000.000	416.475
		1.053.750		1.318.837
		1.502.100		2.185.487
Total		**66.539.685**		**116.854.727**
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18.070)		-
Bersih		**66.521.615**		**116.854.727**

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	7.789.417	68.473.629
> 1 bulan - 3 bulan	5.000	250.500
> 3 bulan - 1 tahun	-	732.911
	7.794.417	69.457.040
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	48.533.997	35.340.464
> 1 bulan - 3 bulan	8.428.171	9.410.261
> 3 bulan - 1 tahun	281.000	461.475
	57.243.168	45.212.200
	65.037.585	114.669.240

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	448.350	795.650
> 1 bulan - 3 bulan	-	71.000
	448.350	866.650
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	843.000	416.474
> 1 bulan - 3 bulan	-	902.363
> 3 bulan - 1 tahun	210.750	-
	1.053.750	1.318.837
	1.502.100	2.185.487
Total	**66.539.685**	**116.854.727**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.070)	-
Bersih	**66.521.615**	**116.854.727**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan “Lancar”.

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Penempatan pada Bank Indonesia	3,21%	4,87%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	3,46	5,28
Dolar Amerika Serikat		
Penempatan pada Bank Indonesia	0,08%	1,75%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	0,72	1,89

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif.

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Nilai tercatat awal	116.854.727	-	-	116.854.727
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	66.539.685	-	-	66.539.685
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(116.854.727)	-	-	(116.854.727)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	**66.539.685**	**-**	**-**	**66.539.685**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	668
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	668	-	-	668
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	18.070	-	-	18.070
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(668)	-	-	(668)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**18.070**	-	-	**18.070**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 31 Desember 2020 penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya mengalami penurunan secara kolektif sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2020 sedangkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain dapat ditagih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Reksadana		3.279.238
Negotiable Certificate of Deposit		49.419
Obligasi Subordinasi		48.313
Obligasi		18.511
Lainnya		86.443
		3.481.924
Dolar Amerika Serikat		
Reksadana	332.234.586	4.667.896
U.S. Treasury Bond	1.054.531	14.816
Lainnya	4.229.395	59.423
		4.742.135
Dolar Singapura		
Singapore Government Securities (SIGB)	1.000.000	10.606
		10.606
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		18.358.072
Reksadana		336.835
Obligasi		300.911
Lainnya		163.721
		19.159.539
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	11.108.388	156.073
Obligasi	4.915.950	69.069
		225.142
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.708.198	46.674
		46.674
		27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Obligasi		2.925.963
Negotiable Certificate of Deposit		582.047
Reksadana		473.676
Obligasi Subordinasi		196.344
Lainnya		153.767
		4.331.797
Dolar Amerika Serikat		
Sertifikat Bank Indonesia	759.730.066	10.674.207
U.S. Treasury Bonds	55.409.192	778.499
U.S Treasury Bills	14.999.734	210.746
Obligasi	13.478.482	189.373
		11.852.825

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)		
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar Singapura		
Monetary Authority of Singapore (MAS) *Bills*	76.980.563	816.470
Singapore Government Securities (SIGB)	37.928.360	402.275
		1.218.745
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		109.882.540
Obligasi		10.449.529
Medium-Term Note		341.167
Negotiable Certificate of Deposits		98.415
Lainnya		141.189
		120.912.840
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.440.535.854	48.339.529
Obligasi	140.936.158	1.980.153
		50.319.682
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah Indonesia	52.804.334	910.053
		910.053
		189.545.942
Biaya perolehan diamortisasi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Obligasi		406.922
Medium-Term Note		50.000
Obligasi Subordinasi		35.065
Lainnya		5.698
		497.685
Dolar Amerika Serikat		
Lainnya	193.461.866	2.718.139
		2.718.139
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		78.609.483
Obligasi		1.366.498
Medium-Term Note		236.000
		80.211.981

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.854.581.018	26.056.863
Obligasi	34.487.241	484.546
		26.541.409
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah Indonesia	25.209.935	434.479
		434.479
		110.403.693
Total		327.615.655
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(348.941)
Bersih		**327.266.714**

	31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sukuk Bank Indonesia		1.819.017
Reksadana		1.741.692
Sertifikat Bank Indonesia		1.437.944
Negotiable Certificate of Deposit		669.875
Obligasi		139.962
Obligasi Subordinasi		49.174
Lainnya		108.359
		5.966.023
Dolar Amerika Serikat		
Sertifikat Bank Indonesia	39.509.711	548.494
U.S. *Treasury Bond*	8.940.154	124.112
Reksadana	590.098	8.192
		680.798
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		9.413.001
Obligasi		726.990
Negotiable Certificate of Deposit		133.444
Reksadana		45.272
Surat Berharga Komersial		28.321
Lainnya		82.674
		10.429.702

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	38.785.882	538.445
Obligasi	4.784.250	66.417
		604.862
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.969.800	30.671
		635.533
		17.712.056
Tersedia untuk dijual		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Obligasi		3.855.542
Sertifikat Bank Indonesia		3.276.144
Reksadana		1.501.437
Negotiable Certificate of Deposit		743.037
Obligasi Subordinasi		343.801
Medium-Term Note		115.449
Lainnya		162.480
		9.997.890
Dolar Amerika Serikat		
Sertifikat Bank Indonesia	304.791.444	4.231.267
U.S. Treasury Bonds	31.726.634	440.445
Obligasi	21.869.444	303.603
Reksadana	20.106.477	279.128
		5.254.443
Dolar Singapura		
Monetary Authority of Singapore (MAS) *Bills*	78.345.580	808.138
Singapore Government Securities (SIGB)	18.541.440	191.256
		999.394
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		69.868.034
Obligasi		10.081.693
Medium-Term Note		323.199
Negotiable Certificate of Deposit		218.411
Reksadana		147.691
Surat Berharga Komersial		18.881
Lainnya		184.303
		80.842.212

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	**Ekuivalen Rp**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.800.850.639	25.000.309
Obligasi	82.438.776	1.144.456
		26.144.765
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah	58.766.330	915.028
		124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sertifikat Bank Indonesia Syariah		1.250.000
Sertifikat Bank Indonesia		488.601
Obligasi		441.169
Negotiable Certificate of Deposit		150.305
Medium-Term Note		50.000
Obligasi Subordinasi		35.999
		2.416.074
Dolar Amerika Serikat		
Lainnya	261.111.092	3.624.875
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah Indonesia		34.551.317
Obligasi		2.553.928
Medium-Term Note		11.000
		37.116.245
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah Indonesia	701.551.026	9.739.282
Obligasi	34.063.825	472.891
Lainnya	15.001.675	208.261
		10.420.434
Euro Eropa		
Obligasi Pemerintah Indonesia	25.529.821	397.515
		53.975.143
Total		195.840.931
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(758)
Bersih		**195.840.173**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

Atas hal tersebut di atas, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 manajemen BRI Life telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp758.

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	7.824.478	15.963.913
> 1 bulan - 3 bulan	5.698	-
> 3 bulan - 1 tahun	312.536	1.685.825
> 1 tahun	148.694	730.249
	8.311.406	18.379.987
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	19.043.814	6.934.635
> 1 bulan - 3 bulan	444.151	3.040.881
> 3 bulan - 1 tahun	1.054.485	583.994
	20.542.450	10.559.510
	28.853.856	28.939.497
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	140.072.379	91.271.914
> 1 bulan - 3 bulan	322.090	2.094.823
> 3 bulan - 1 tahun	9.556.408	4.769.493
> 1 tahun	70.353.483	30.251.929
	220.284.360	128.388.159
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	51.501.551	27.695.327
> 1 bulan - 3 bulan	168.648	495.779
> 3 bulan - 1 tahun	1.400.796	208.260
> 1 tahun	25.406.444	10.113.909
	78.477.439	38.513.275
	298.761.799	166.901.434
Total	327.615.655	195.840.931
Dikurangi		
cadangan kerugian penurunan nilai	(348.941)	(758)
Bersih	**327.266.714**	**195.840.173**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds, U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi	
Rupiah	
Surat Perbendaharaan Negara	11.586.330
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	2.996.361
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	2.187.408
Obligasi Pemerintah Sukuk	1.274.953
Obligasi Republik Indonesia	313.020
	18.358.072
Mata uang asing	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	78.425
Obligasi Pemerintah Sukuk	77.648
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	46.674
U.S. Treasury Bonds	14.816
Singapore Government Securities (SIGB)	10.606
	228.169
	18.586.241
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
Rupiah	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	71.274.544
Obligasi Pemerintah Sukuk	33.314.783
Obligasi Republik Indonesia	1.891.155
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.782.623
Surat Perbendaharaan Negara	1.619.435
	109.882.540
Mata uang asing	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	28.602.080
Obligasi Pemerintah Sukuk	19.737.449
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	910.053
U.S. Treasury Bonds	778.499
Singapore Government Securities (SIGB)	402.275
U.S. Treasury Bills	210.746
	50.641.102
	160.523.642

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds, U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Biaya perolehan diamortisasi	
Rupiah	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	53.497.079
Obligasi Pemerintah Sukuk	25.007.050
Obligasi Republik Indonesia	70.983
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	34.371
	78.609.483
Mata uang asing	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	14.264.437
Obligasi Pemerintah Sukuk	11.792.426
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	434.479
	26.491.342
	105.100.825
Total	**284.210.708**

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Nilai wajar melalui laba rugi	
Rupiah	
Surat Perbendaharaan Negara	5.591.810
Obligasi Pemerintah Indonesia *Fixed Rate*	1.617.310
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.468.558
Obligasi Pemerintah Sukuk	624.733
Obligasi Republik Indonesia	110.590
	9.413.001
Mata uang asing	
Obligasi Republik Indonesia	295.438
Obligasi Pemerintah Sukuk	170.679
U.S. *Treasury Bonds*	124.112
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	72.329
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	30.671
	693.229
	10.106.230

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds, U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual	
Rupiah	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	49.826.527
Obligasi Pemerintah Sukuk	15.122.425
Surat Perbendaharaan Negara	3.290.571
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.457.555
Obligasi Republik Indonesia	170.956
	69.868.034
Mata uang asing	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	19.032.525
Obligasi Pemerintah Sukuk	5.967.784
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	915.028
U.S. *Treasury Bonds*	440.445
Singapore Government Securities (SIGB)	191.256
	26.547.038
	96.415.072
Dimiliki hingga jatuh tempo	
Rupiah	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	21.398.411
Obligasi Pemerintah Sukuk	13.048.369
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	104.537
	34.551.317
Mata uang asing	
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* Dolar Amerika Serikat	5.132.995
Obligasi Pemerintah Sukuk	4.606.287
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	397.515
	10.136.797
	44.688.114
Total	**151.209.416**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Rupiah		
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*		
FR0034	12,80	15 Juni 2021
FR0035	12,90	15 Juni 2022
FR0037	12,00	15 September 2026
FR0039	11,75	15 Agustus 2023
FR0040	11,00	15 September 2025
FR0042	10,25	15 Juli 2027
FR0043	10,25	15 Juli 2022
FR0044	10,00	15 September 2024
FR0045	9,75	15 Mei 2037
FR0046	9,50	15 Juli 2023
FR0047	10,00	15 Februari 2028
FR0050	10,50	15 Juli 2038
FR0052	10,50	15 Agustus 2030
FR0053	8,25	15 Juli 2021
FR0054	9,50	15 Juli 2031
FR0056	8,38	15 September 2026
FR0057	9,50	15 Mei 2041
FR0058	8,25	15 Juni 2032
FR0059	7,00	15 Mei 2027
FR0061	7,00	15 Mei 2022
FR0062	6,38	15 April 2042
FR0063	5,63	15 Mei 2023
FR0064	6,13	15 Mei 2028
FR0065	6,63	15 Mei 2033
FR0067	8,75	15 Februari 2044
FR0068	8,38	15 Maret 2034
FR0070	8,38	15 Maret 2024
FR0071	9,00	15 Maret 2029
FR0072	8,25	15 Mei 2036
FR0073	8,75	15 Mei 2031
FR0074	7,50	15 Agustus 2032
FR0075	7,50	15 Mei 2038
FR0076	7,38	15 Mei 2048
FR0077	8,13	15 Mei 2024
FR0078	8,25	15 Mei 2029
FR0079	8,38	15 April 2039
FR0080	7,50	15 Juni 2035
FR0081	6,50	15 Juni 2025
FR0082	7,00	15 September 2030
FR0083	7,50	15 April 2040
FR0084	7,25	15 Februari 2026
FR0085	7,75	15 April 2031
FR0086	5,50	15 April 2026
FR0087	6,50	15 Februari 2031

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Pemerintah Sukuk		
IFR0006	10,25	15 Maret 2030
IFR0007	10,25	15 Januari 2025
IFR0010	10,00	15 Februari 2036
PBS002	5,45	15 Januari 2022
PBS003	6,00	15 Januari 2027
PBS004	6,10	15 Februari 2037
PBS005	6,75	15 April 2043
PBS007	9,00	15 September 2040
PBS011	8,75	15 Agustus 2023
PBS012	8,88	15 November 2031
PBS014	6,50	15 Mei 2021
PBS015	8,00	15 Juli 2047
PBS017	6,13	15 Oktober 2025
PBS018	7,63	15 Mei 2028
PBS019	8,25	15 September 2023
PBS020	9,00	15 Oktober 2027
PBS021	8,50	15 November 2026
PBS022	8,63	15 April 2034
PBS023	8,13	15 Mei 2023
PBS024	8,38	15 Mei 2032
PBS025	8,38	15 Mei 2033
PBS026	6,63	15 Oktober 2024
PBS027	6,50	15 Mei 2023
PBS028	7,76	15 Oktober 2046
SR010	5,90	10 Maret 2021
SR011	8,05	10 Maret 2022
SR012	6,30	10 Maret 2023
SR013	6,05	10 September 2023
Obligasi Republik Indonesia		
ORI015	8,25	15 Oktober 2021
ORI016	6,80	15 Oktober 2022
ORI017	6,40	15 Juli 2023
ORI018	5,70	15 Oktober 2023
Mata uang asing		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*		
Dolar Amerika Serikat		
RI0122	3,70	8 Januari 2022
RI0123	2,95	11 Januari 2023
RI0124	5,88	15 Januari 2024
RI0125	4,13	15 Januari 2025
RI0126	4,75	8 Januari 2026
RI0127	4,35	8 Januari 2027
RI0127A	4,35	19 Januari 2027

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Mata uang asing (lanjutan)		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate* (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)		
RI0128	3,50	11 Januari 2028
RI0142	5,25	17 Januari 2042
RI0144	6,75	15 Januari 2044
RI0145	5,13	15 Januari 2045
RI0146	5,95	8 Januari 2046
RI0147	5,25	8 Januari 2047
RI0148	4,35	11 Januari 2048
RI0224	4,45	11 Februari 2024
RI0229	4,75	11 Februari 2029
RI0230	2,85	14 Februari 2030
RI0237	6,63	17 Februari 2037
RI0238	7,75	17 Januari 2038
RI0249	5,35	11 Februari 2049
RI0250	3,50	14 Februari 2050
RI0422	3,75	25 April 2022
RI0423	3,38	15 April 2023
RI0428	4,10	24 April 2028
RI0443	4,63	15 April 2043
RI0470	4,45	15 April 2070
RI0521	4,88	5 Mei 2021
RI0727	3,85	18 Juli 2027
RI0747	4,75	18 Juli 2047
RI0822	3,70	8 Januari 2022
RI0827	3,85	18 Juli 2027
RI0929	3,40	18 September 2029
RI1023	5,38	17 Oktober 2023
RI1030	3,85	15 Oktober 2030
RI1035	8,50	12 Oktober 2035
RI1049	3,70	30 Oktober 2049
RI1050	4,20	15 Oktober 2050
RI1124	4,45	11 Februari 2024
RI1129	4,75	11 Februari 2029
USDFR0002	4,05	24 Juni 2026
Obligasi Pemerintah Sukuk		
INDOIS 21	3,40	31 Maret 2021
INDOIS 21A	3,40	29 Maret 2021
INDOIS 22	3,40	21 November 2022
INDOIS 22A	3,40	29 Maret 2022
INDOIS 23	3,75	1 Maret 2023
INDOIS 24	4,35	10 September 2024
INDOIS 24A	3,90	20 Agustus 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 25A	2,30	23 Juni 2025
INDOIS 26	4,55	29 Maret 2026
INDOIS 27	4,15	29 Maret 2027
INDOIS 28	4,40	1 Maret 2028
INDOIS 29	4,45	20 Februari 2029

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Mata uang asing (lanjutan)		
Obligasi Pemerintah Sukuk (lanjutan)		
INDOIS 29 A	3,40	18 September 2029
INDOIS 30	2,80	23 Juni 2030
INDOIS 30 A	2,85	14 Februari 2030
INDOIS 30 B	3,85	15 Oktober 2030
INDOIS 49	3,70	30 Oktober 2049
INDOIS 49 A	5,35	11 Februari 2049
INDOIS 50	3,80	23 Juni 2050
INDOIS 50 A	3,50	14 Februari 2050
Obligasi Pemerintah Indonesia Euro Eropa		
RI0227	0,90	14 Februari 2027
RI1031	1,40	30 Oktober 2031
RIEUR0623	2,63	14 Juni 2023
RIEUR0721	2,68	8 Juli 2021
RIEUR0724	2,15	18 Juli 2024
RIEUR0725	3,38	30 Juli 2025
U.S. Treasury Bonds	Beragam	Beragam
U.S Treasury Bills	Beragam	Beragam
Singapore Government Securities		
SIGB 0525	2,38	1 Juni 2025
SIGB 0626	2,13	1 Juni 2026
SIGB 1125	0,50	01 November 2025

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain” berkisar dari 94,00% sampai dengan 157,20% pada tanggal 31 Desember 2020 dan nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual” berkisar dari 82,97% sampai dengan 150,46% pada tanggal 31 Desember 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Indosat Tbk	10.592
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.137
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.782
	18.511
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	100.656
PT Pupuk Indonesia (Persero)	55.123
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	55.033
PT Pegadaian (Persero)	25.046
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	22.626
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.696
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	16.776
PT Timah (Persero) Tbk	4.955
	300.911
Mata Uang Asing	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	54.020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.049
	69.069
	388.491
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	600.216
PT Astra Sedaya Finance	441.156
PT Bank CIMB Niaga Tbk	433.518
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	195.552
PT BCA Finance	160.760
PT Federal International Finance	150.976
PT Bank Pan Indonesia Tbk	129.998
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	123.051
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	100.808
PT BFI Finance Indonesia Tbk	91.384
Lainnya	498.544
	2.925.963

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)	
Pihak ketiga (lanjutan)	
Mata Uang Asing	
Bank of America	9.452
Wells Fargo & Company	8.670
Citigroup, Inc.	8.173
JP Morgan Chase Bank, N.A	7.878
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	7.144
The Royal Bank of Canada	5.954
Verizon Communications, Inc.	5.910
Stanley Black & Decker, Inc.	5.642
Enterprise Products Operating, LLC	5.546
PNC Financial Services Group, Inc	5.543
Lainnya	119.461
	189.373
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.392.283
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.133.196
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.044.633
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	872.833
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	800.687
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	713.650
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	589.026
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	553.208
PT Pegadaian (Persero)	502.217
PT Angkasa Pura I (Persero)	316.107
Lainnya	2.531.689
	10.449.529
Mata Uang Asing	
PT Pertamina (Persero)	717.857
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	334.488
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	319.186
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	315.232
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	138.858
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	136.860
PT Hutama Karya (Persero)	17.672
	1.980.153
	15.545.018

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Biaya perolehan diamortisasi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	185.105
PT Indosat Tbk	92.960
PT Indonesia Infrastructure Finance	70.000
PT Global Mediacom Tbk	25.000
PT BPD Sumatera Barat	10.000
PT Bank CIMB Niaga	10.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance Tbk	5.030
PT Bank DKI	4.028
PT XL Axiata Indonesia Tbk	2.025
PT Bank UOB Indonesia	2.016
Lainnya	758
	406.922
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	378.571
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	261.649
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	223.426
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	200.257
PT Angkasa Pura I (Persero)	100.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	80.001
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk	35.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	30.489
PT Sarana Multi Infrastructure (Persero)	30.000
PT Angkasa Pura II (Persero)	10.021
Lainnya	17.084
	1.366.498
Mata Uang Asing	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	204.778
PT Pertamina (Persero)	164.199
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	56.058
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	37.196
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	22.315
	484.546
	2.257.966
Total	**18.191.475**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	55.223
PT Indosat Tbk	15.277
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	14.944
PT Indonesia Infrastructure Finance	14.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10.307
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	10.098
PT Astra Sedaya Finance	10.016
PT Medco Energi Internasional Tbk	7.335
PT Medco Power Indonesia	2.762
	139.962
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	223.179
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	125.252
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	106.941
PT Angkasa Pura II (Persero)	83.468
PT Pupuk Indonesia (Persero)	70.638
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	32.303
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	29.742
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25.328
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.261
PT Bank Mandiri Taspen	9.998
Lainnya	4.880
	726.990
Mata Uang Asing	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	62.627
PT Pertamina (Persero)	3.790
	66.417
	933.369

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	636.633
PT Bank CIMB Niaga Tbk	454.568
PT Bank Pan Indonesia Tbk	346.105
PT Astra Sedaya Finance	289.226
PT Indosat Tbk	264.071
PT BCA Finance	254.773
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	193.013
PT BFI Finance Indonesia Tbk	185.654
PT Bank OCBC NISP Tbk	184.509
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	182.088
Lainnya	864.902
	3.855.542
Mata uang asing	
Oversea-Chinese Banking Corporation	59.095
Alibaba Group Holding Ltd.	72.984
Bank of America	10.558
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	8.515
Citigroup, Inc.	8.050
Wells Fargo & Company	7.615
Province of Quebec	6.944
The Royal Bank of Canada	6.730
Enterprise Products Operating, LLC	6.205
Verizon Communication, Inc.	6.067
Lainnya	110.840
	303.603
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.342.851
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.259.616
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.229.646
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	919.669
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	916.224
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	449.691
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	444.208
PT Pegadaian (Persero)	404.757
PT Mandiri Tunas Finance	368.310
PT Angkasa Pura I (Persero)	332.113
Lainnya	2.414.608
	10.081.693

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual (lanjutan)	
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)	
Mata uang asing	
PT Pertamina (Persero)	620.514
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	286.301
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	111.585
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	82.696
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28.645
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	14.715
	1.144.456
	15.385.294
Dimiliki hingga jatuh tempo	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	185.226
PT Indosat Tbk	93.266
PT Indonesia Infrastructure Finance	70.000
PT Global Mediacom Tbk	26.895
PT BPD Jawa Tengah	25.000
PT Bank UOB Indonesia	10.024
PT BPD Jambi	10.000
PT BPD Sumatera Barat	10.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000
PT Great River International Tbk	758
	441.169
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	900.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	371.352
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	275.019
PT Pegadaian (Persero)	249.054
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	236.503
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	153.375
PT Angkasa Pura I (Persero)	100.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	75.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	57.160
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk	35.000
Lainnya	101.465
	2.553.928

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)	
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)	
Mata Uang Asing	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	213.610
PT Pertamina (Persero)	145.426
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	55.244
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	36.468
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	22.143
	472.891
	3.467.988
Total	**19.786.651**

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT AKR Corporindo Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri C	9,00	7 Juli 2024
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016		
Seri C	10,25	2 Maret 2021
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017		
Seri C	8,90	22 Maret 2022
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017		
Seri C	8,40	14 Juli 2022
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018		
Seri C	7,17	21 Maret 2021
Seri D	7,50	21 Maret 2023
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri C	8,50	16 Agustus 2021
Seri D	9,00	16 Agustus 2022
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019		
Seri B	8,60	16 April 2022
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019		
Seri B	7,80	4 Oktober 2022
Seri C	8,10	4 Oktober 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Astra Sedaya Finance		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017		
Seri C	8,75	3 Maret 2022
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	7,65	2 November 2022
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri B	7,50	25 Mei 2021
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri B	8,80	13 Februari 2022
Seri C	9,20	13 Februari 2024
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019		
Seri B	7,70	23 Oktober 2022
Seri C	7,95	23 Oktober 2024
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2020		
Seri B	7,00	27 Maret 2023
PT Bank Bukopin Tbk		
EBA Kelas 1A	9,25	4 September 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016		
Seri C	8,25	3 November 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017		
Seri C	8,15	23 Agustus 2022
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017		
Seri C	7,75	2 November 2022
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	8,80	20 September 2023
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	7,80	19 Desember 2024
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri B	7,55	19 Desember 2022
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I		
Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,25	15 November 2021
Tahap II Tahun 2019 Seri B	7,90	21 Agustus 2022
Tahap II Tahun 2019 Seri C	8,25	21 Agustus 2024
Tahap III Tahun 2020 Seri A	5,80	7 April 2021
Tahap III Tahun 2020 Seri B	7,00	27 Maret 2023
PT Bank Danamon Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,55	24 Mei 2022
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017		
Seri A	8,00	11 Juli 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	7,15	15 Maret 2023
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri B	8,50	3 Juli 2022
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019		
Seri A	7,55	26 November 2022
Seri B	7,75	26 November 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018		
Seri B	6,90	10 April 2021
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,15	28 Juni 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	27 Oktober 2021
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	7,60	27 Februari 2023
PT BPD Sumatera Barat		
Sukuk *Mudharabah* II Tahun 2015	10,99	8 Januari 2021
PT Bank DKI		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	9,25	30 Juni 2021
PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	10,40	28 Desember 2021
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	8,15	6 Desember 2022
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019		
Seri A	8,25	18 Oktober 2022
Seri B	8,50	18 Oktober 2024
PT Bank QNB Indonesia Tbk		
Berkelanjutan Tahap I Tahun 2019	9,50	5 Juli 2022
PT BCA Finance		
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri C	7,80	5 November 2022
PT BFI Finance Indonesia Tbk		
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri B	7,75	26 Juni 2021
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri B	10,50	22 Februari 2022
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	9,10	12 Desember 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri C	9,00	1 Maret 2025
PT Federal International Finance		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018		
Seri B	7,45	11 April 2021
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019		
Seri B	8,80	12 Maret 2022
PT Global Mediacom Tbk		
Tahun 2017 Seri A	11,50	17 Juli 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri A	11,50	7 Juli 2022
PT Great River International Tbk		
I Tahun 2003	12,55	13 Oktober 2008
PT Indomobil Finance Indonesia		
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri C	8,15	15 Februari 2023
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018		
Seri B	8,20	18 Mei 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Indonesia Infrastructure Finance		
Tahap I Tahun 2016		
Seri B	8,70	19 Juli 2021
Seri C	9,00	19 Juli 2023
Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,75	18 Maret 2022
Tahap II Tahun 2020		
Seri A	5,00	28 Oktober 2021
Seri B	6,65	21 Oktober 2023
PT Indosat Tbk		
Indosat VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	27 Juni 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	10,50	12 Desember 2021
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	8 Desember 2025
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	8 Desember 2025
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri E	9,25	31 Mei 2027
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	9 November 2027
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018		
Seri B	7,40	3 Mei 2021
Seri C	7,65	3 Mei 2023
Seri E	8,70	3 Mei 2028
Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	27 Juni 2022
PT Jakarta Lingkar Baratsatu		
Obligasi I Tahun 2018 Seri A	9,75	20 September 2021
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper		
Sukuk Mudharabah I Tahun 2018 Seri A	10,00	10 Oktober 2021
PT Maybank Indonesia Finance		
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016 Seri B	8,80	3 November 2021
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,90	15 November 2022
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	7,75	17 Mei 2021
PT Medco Energi Internasional Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	11,30	15 Juli 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	11,30	30 September 2021
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri C	11,30	14 Juni 2022
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018		
Seri A	8,75	29 Maret 2021
Seri B	9,15	29 Maret 2023
PT Medco Power Indonesia		
Sukuk *Wakalah* II Tahun 2019 Seri A	10,00	23 Mei 2022

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020		
Seri A	8,50	3 April 2023
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,25	1 Juli 2021
PT Bank UOB Indonesia		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri C	8,25	25 November 2021
PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance Tbk		
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2018		
Seri B	8,60	8 Juni 2021
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri B	9,15	29 Mei 2021
PT XL Axiata Tbk		
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	9,10	16 Oktober 2021
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Seri B	8,65	8 Februari 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri B	9,10	16 Oktober 2021
Dolar Amerika Serikat		
Oversea-Chinese Banking Corporation	4,25	19 Juni 2024
Abbot Laboratories	3,40	30 November 2023
Alibaba Group Holding Ltd.	3,60	28 November 2024
Amazon.com, Inc.	3,15	22 Agustus 2027
Amgen, Inc.	2,20	21 Februari 2027
Anthem, Inc.	3,65	1 Desember 2027
Apple, Inc.	3,20	11 Mei 2027
AT&T, Inc.	4,25	1 Maret 2027
The Bank of Nova Scotia		
Tahun 2022	2,70	7 Maret 2022
Tahun 2025	4,50	16 Desember 2025
Truist Financial Corporation		
Tahun 2023	2,20	16 Maret 2023
Tahun 2025	3,63	16 Desember 2025
Berkshire Hathaway, Inc.		
Tahun 2023	2,75	15 Maret 2023
Tahun 2030	1,85	12 Maret 2030
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	3,68	22 Februari 2027
Bank of America		
Tahun 2023	3,00	20 Desember 2023
Tahun 2023	3,30	11 Januari 2023
Tahun 2026	3,50	19 April 2026
Tahun 2031	2,50	13 Februari 2031
Bank of New York Mellon	1,60	24 April 2025
B.P Capital	3,28	19 September 2027
Bristol Myers Squibb	3,40	26 Juli 2029
The Canadian Imperial Bank of Commerce		
Tahun 2022	2,55	16 Juni 2022
Tahun 2024	3,10	2 April 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)		
JPMorgan Chase Bank, N.A		
Tahun 2025	3,22	1 Maret 2025
Tahun 2026	2,01	13 Maret 2026
Tahun 2029	4,45	5 Desember 2029
Chevron Corporation	2,95	16 Mei 2026
Citigroup, Inc.		
Tahun 2024	3,75	16 Juni 2024
Tahun 2028	3,52	27 Oktober 2028
Tahun 2031	2,67	29 Januari 2031
The Coca Cola Company	2,13	6 September 2029
Comcast Corporation		
Tahun 2023	2,85	15 Januari 2023
Tahun 2026	3,15	1 Maret 2026
CVS Health Corporation		
Tahun 2022	2,75	1 Desember 2022
Tahun 2027	3,63	1 April 2027
Duke Energy Corporation	2,45	1 Februari 2030
Enbridge, Inc.	3,70	15 Juli 2027
Enterprise Products Operating LLC		
Tahun 2023	3,35	15 Maret 2023
Tahun 2028	4,15	16 Oktober 2028
Equinor ASA	2,88	06 April 2025
Exxon Corporation	3,04	1 Maret 2026
The Federal Home Loan Mortgage Co.	2,36	13 Januari 2022
Goldman Sachs		
Tahun 2021	3,00	25 Oktober 2021
Tahun 2024	4,00	3 Maret 2024
The Home Depot, Inc.	2,50	15 April 2027
Kimberly- Clark Corporation	3,10	26 Maret 2030
Kinder Morgan, Inc.	4,15	1 Februari 2024
Manulife Financial Corporation	4,15	4 Maret 2026
McDonald's Corporation	3,30	1 Juli 2025
Merck & Co., Inc.	2,75	10 Februari 2025
Microsoft Corporation	3,30	6 Februari 2027
Norfolk Southern Corporation	2,90	15 Juni 2026
Oracle Corporation	3,25	15 November 2027
Pacific Corporation	2,95	1 Februari 2022
PepsiCo, Inc.		
Tahun 2022	3,10	17 Juli 2022
Tahun 2029	2,63	29 Juli 2029
Phillips 66 Company	4,30	1 April 2022
PNC Finansial Services Group, Inc.		
Tahun 2025	2,95	23 Februari 2025
Tahun 2030	2,55	22 Januari 2030
The Procter & Gamble Company	3,00	25 Maret 2030
Prologis, Inc.	2,25	15 April 2030
Province of Quebec	2,75	25 Agustus 2021
Rogers Communications, Inc.	4,10	1 Oktober 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)		
The Royal Bank of Canada		
Tahun 2022	2,75	1 Februari 2022
Tahun 2024	2,55	16 Juli 2024
Tahun 2026	4,65	27 Januari 2026
Shell International Finance BV	3,25	11 Mei 2025
Stanley Black & Decker, Inc.		
Tahun 2022	2,75	19 Mei 2022
Tahun 2024	3,70	23 Oktober 2024
Tahun 2027	3,63	20 Januari 2027
Warner Media, LLC	3,55	1 Juni 2024
TC Energy Corporation	4,25	15 Mei 2028
United Technologies Corporation	3,95	16 Agustus 2025
United Bancorp, Inc.	3,15	27 April 2027
Ventas, Inc.	3,00	15 Januari 2030
Verizon Communications, Inc.		
Tahun 2025	3,38	20 Februari 2025
Tahun 2028	4,33	21 September 2028
Walmart, Inc.	3,05	8 Juli 2026
Wells Fargo & Company		
Tahun 2022	3,50	8 Maret 2022
Tahun 2026	2,16	11 Februari 2026
Tahun 2029	4,15	24 Januari 2029
Welltower, Inc.	3,10	15 Januari 2030
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	9,25	22 Juni 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019		
Seri B	9,75	25 Juni 2024
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahun 2011		
Seri B	9,05	14 Desember 2021
PT Angkasa Pura I (Persero)		
Berkelanjutan I Tahun 2016		
Seri C	8,55	22 November 2026
Sukuk Ijarah Angkasa Pura I Tahun 2016		
Seri A	8,10	22 November 2021
PT Angkasa Pura II (Persero)		
Berkelanjutan I Tahun 2016		
Seri A	8,60	30 Juni 2021
Seri C	9,00	30 Juni 2026
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	8,65	12 Desember 2021
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018		
Seri B	8,95	12 Desember 2026

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri A	7,95	30 September 2021
Seri B	8,50	30 September 2023
Seri C	8,65	30 September 2026
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017		
Seri A	8,00	15 Juni 2022
Seri B	8,50	15 Juni 2024
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018		
Seri A	8,50	21 September 2023
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020		
Seri A	7,75	12 Mei 2025
PT Bank Mandiri Taspen		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019		
Seri A	7,90	26 November 2022
Seri B	8,20	26 November 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,00	11 Juli 2022
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
Tahap XV Tahun 2011	9,50	28 Juni 2021
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	7,90	5 Juni 2022
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	27 Maret 2023
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015		
Seri C	10,00	8 Juli 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016		
Seri B	8,75	30 Agustus 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri B	8,50	13 Juli 2022
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri B	8,75	28 Juni 2022
Seri C	9,00	28 Juni 2024
PT Hutama Karya (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	8,55	21 Desember 2026
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	8,07	6 Juni 2027
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017		
Seri A	7,80	26 September 2022
PT Kereta Api Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan II Tahun 2017		
Seri A	7,75	21 November 2022
Seri B	8,25	21 November 2024
Berkelanjutan II Tahun 2019		
Seri A	7,75	13 Desember 2024
Seri B	8,20	13 Desember 2026
PT Mandiri Tunas Finance		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016		
Seri B	9,25	1 Juni 2021
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019		
Seri A	9,40	8 Januari 2022
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri A	8,90	26 Juli 2022
Seri B	9,50	26 Juli 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016		
Seri C	9,60	19 Februari 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016		
Seri C	8,70	8 Juni 2021
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016		
Seri C	8,20	22 November 2021
Seri D	8,50	22 November 2023
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	8,90	23 Februari 2023
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017		
Seri B	7,90	15 Agustus 2022
Seri C	8,25	15 Agustus 2024
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018		
Seri B	6,70	14 Februari 2023
Seri C	6,90	14 Februari 2025
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri C	8,30	6 Juni 2025
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018		
Seri B	7,50	5 September 2021
Seri C	8,40	5 September 2023
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri B	8,75	8 November 2021
Seri D	9,75	8 November 2025
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019		
Seri B	8,40	23 April 2022
Seri C	8,90	23 April 2024
Seri E	9,50	23 April 2029
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019		
Seri B	8,45	9 Juli 2022
Seri C	8,70	9 Juli 2024
Seri D	9,20	9 Juli 2026
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019		
Seri D	8,50	3 September 2026
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019		
Seri C	8,10	6 Desember 2026
Seri D	8,50	29 Oktober 2026
Seri E	8,75	29 Oktober 2029
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	8,75	8 November 2021
Sukuk *Mudharabah* I Tahap III Tahun 2019	8,40	23 April 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Pegadaian (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011		
Seri C	9,00	11 Oktober 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri C	7,70	3 Oktober 2022
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri B	6,90	16 Maret 2021
Seri C	7,10	16 Maret 2023
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020		
Seri A	6,90	23 Mei 2021
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)		
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016		
Seri B	9,00	21 Juni 2021
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Tahap III Tahun 2019 Seri A	8,50	19 Februari 2022
Tahap III Tahun 2019 Seri B	9,10	19 Februari 2024
Tahap VIII Tahun 2006 Seri B	13,75	21 Juni 2021
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	10,90	10 Juli 2022
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	10,40	8 Juli 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013		
Seri B	8,25	5 Juli 2023
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013		
Seri B	9,60	10 Desember 2023
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017		
Seri C	8,20	3 November 2027
Seri D	8,70	3 November 2032
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018		
Seri C	7,25	22 Februari 2028
Seri E	8,75	22 Februari 2038
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri B	9,00	10 Oktober 2025
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019		
Seri A	8,50	19 Februari 2022
Seri B	9,10	19 Februari 2024
Seri D	9,60	19 Februari 2029
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019		
Seri A	8,00	1 Agustus 2024
Seri B	8,50	1 Agustus 2026
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019		
Seri A	7,90	1 Oktober 2024
Seri B	8,40	1 Oktober 2026
Seri D	9,40	1 Oktober 2034
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020		
Seri A	7,20	18 Februari 2027
Seri B	7,70	18 Februari 2030
Seri C	8,00	18 Februari 2035
Seri D	8,70	18 Februari 2040
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2020		
Seri A	7,92	6 Mei 2023

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)		
Sukuk *Ijarah* Tahap V Tahun 2010		
Seri B	10,40	8 Juli 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II		
Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I		
Tahun 2017 Seri A	7,70	11 Juli 2022
Tahun 2017 Seri B	8,50	11 Juli 2027
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap II		
Tahun 2017 Seri C	8,70	3 November 2032
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III		
Tahun 2018 Seri A	6,50	22 Februari 2023
Tahun 2018 Seri B	7,25	22 Februari 2028
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap II		
Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap III		
Tahun 2018 Seri A	8,50	19 Februari 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap V		
Tahun 2018 Seri A	7,90	1 Oktober 2024
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap IV		
Tahun 2019 Seri B	8,50	1 Agustus 2026
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap VI		
Tahun 2020 Seri C	8,75	18 Februari 2035
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019		
Seri A	8,24	27 November 2022
Seri B	8,25	27 November 2024
PT Pembangunan Perumahan Properti (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	9,00	6 Juli 2021
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	11,15	22 Februari 2022
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019	11,00	19 Juli 2022
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017		
Seri B	9,25	12 Juli 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018		
Seri A	8,00	13 April 2021
Seri B	8,50	13 April 2023
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri A	9,50	28 Mei 2022
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri A	8,40	28 November 2022
PT Pupuk Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	8,60	12 Juli 2024
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017		
Seri B	7,90	9 November 2022

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	8,60	27 September 2021
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri B	6,85	20 Februari 2021
Seri C	6,95	20 Februari 2023
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2018		
Seri B	6,95	18 Mei 2021
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019		
Seri B	7,50	12 Februari 2022
Seri C	9,25	12 Februari 2024
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019		
Seri B	8,80	22 Maret 2022
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2019		
Seri B	8,50	4 Juli 2022
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019		
Seri A	7,80	28 Agustus 2022
Seri B	8,10	28 Agustus 2024
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020		
Seri B	7,50	18 Februari 2025
EBA SP SMF BTN05 Kelas A Seri A1	8,50	7 Mei 2032
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri B	8,20	18 November 2021
Berkelanjutan I Tahap II tahun 2017		
Seri C	7,60	15 November 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	7,55	6 Juli 2021
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019		
Seri B	8,50	25 Juni 2022
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019		
Seri B	7,75	30 Oktober 2022
Seri C	8,30	30 Oktober 2024
Seri D	7,95	30 Oktober 2026
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019		
Seri B	8,10	28 Agustus 2024
Sukuk *Mudharabah* I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	8,55	28 Agustus 2026
PT Semen Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,60	20 Juni 2022
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	9,00	28 Mei 2024
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015		
Seri A	9,93	23 Juni 2022
Seri B	10,25	23 Juni 2025
Seri D	11,00	23 Juni 2045

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Timah (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	8,75	28 September 2022
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	8,50	15 Agustus 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	8,75	15 Agustus 2024
PT Waskita Karya (Persero)		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,50	28 September 2021
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017		
Seri B	9,00	21 Februari 2022
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri B	8,50	6 Oktober 2022
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri A	7,75	23 Februari 2021
Seri B	8,25	23 Februari 2023
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019		
Seri A	9,00	16 Mei 2022
Seri B	9,75	16 Mei 2024
PT Waskita Karya Beton Precast (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I 2019	9,95	5 Juli 2022
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	9,75	30 Oktober 2022
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk		
Surat Berharga *Perpetual* I Tahun 2018	10,50	28 Desember 2021
Mata Uang Asing		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Tahun 2024	3,75	11 April 2024
Tahun 2025	4,75	13 Mei 2025
PT Hutama Karya (Persero) Tbk		
Tahun 2030	3,75	11 Mei 2030
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)		
Tahun 2023	4,50	2 Mei 2023
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024
PT Pertamina (Persero)		
Tahun 2021	5,25	23 Mei 2021
Tahun 2022	4,88	3 Mei 2022
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023
Tahun 2029	3,16	23 Juli 2029
Tahun 2030	3,10	21 Januari 2030
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Tahun 2021	5,50	22 November 2021
Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027
Tahun 2028	5,45	21 Mei 2028
Tahun 2029	5,38	25 Januari 2029
Tahun 2030	3,40	5 Februari 2030
Tahun 2050	4,00	30 Juni 2050

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT AKR Corporindo Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri C	idAA-	-
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
PT Astra Sedaya Finance		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri B	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2020		
Seri B	idAAA	-
PT Bank Bukopin Tbk		
EBA Kelas 1A	idAAA(sf)	idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)		
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I		
Tahap I Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	-
Tahap II Tahun 2019 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Tahap II Tahun 2019 Seri C	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Tahap III Tahun 2020 Seri A	idAAA(sy)	-
Tahap III Tahun 2020 Seri B	idAAA(sy)	-
PT Bank Danamon Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019		
Seri B	AAA(idn)	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017		
Seri A	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019		
Seri A	idAAA(idn)	idAAA
Seri B	idAAA(idn)	idAAA
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	idAA	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	idAA	idAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	idAA	idAA
PT BPD Sumatera Barat		
Sukuk *Mudharabah* II Tahun 2015	idA(sy)	idA(sy)
PT Bank DKI		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	idAA-	-
PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018		
Seri A	idA+	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idAA-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019		
Seri A	idAA-	idAA-
Seri B	idAA-	idAA-
PT Bank QNB Indonesia Tbk		
Berkelanjutan Tahap I Tahun 2019	idAAA(idn)	-
PT BCA Finance		
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri C	idAAA	idAAA
PT BFI Finance Indonesia Tbk		
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri B	A+(idn)	A+(idn)
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri B	A+(idn)	A+(idn)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idAA-	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri C	idAA-	-
PT Federal International Finance		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018		
Seri B	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019		
Seri B	idAAA	-
PT Global Mediacom Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri A	idA+	idA+
PT Great River International Tbk		
I Tahun 2003	D	D
PT Indomobil Finance Indonesia		
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri C	idA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018		
Seri B	idA	-
PT Indonesia Infrastructure Finance		
Tahap I Tahun 2016		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	-
Tahap I Tahun 2019 Seri B	idAAA	-
Tahap II Tahun 2020		
Seri A	idAAA	-
Seri B	idAAA	-
PT Indosat Tbk		
Indosat VIII Tahun 2012 Seri B	idAAA	idAAA
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015		
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017		
Seri E	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017		
Seri E	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018		
Seri B	idAAA	-
Seri C	idAAA	idAAA
Seri E	idAAA	idAAA
Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B	idAAA	idAAA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Jakarta Lingkar Baratsatu		
Obligasi I Tahun 2018		
Seri A	idA+	-
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper		
Sukuk Mudharabah I Tahun 2018		
Seri A	idA+(sy)	-
PT Maybank Indonesia Finance		
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016		
Seri B	AA+(idn)	-
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017		
Seri B	AA+(idn)	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018		
Seri A	AA+(idn)	-
PT Medco Energi Internasional Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016		
Seri B	idA+	idA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016		
Seri B	idA+	-
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017		
Seri C	idA+	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018		
Seri A	idA+	-
Seri B	idA+	-
PT Medco Power Indonesia		
Sukuk *Wakalah* II Tahun 2019		
Seri A	idA(sy)	idA(sy)
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020		
Seri A	idA+	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	AA-(idn)	-
PT Bank UOB Indonesia		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri C	AAA(idn)	-
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk		
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2018		
Seri B	idAA-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri B	idAA-	-
PT XL Axiata Tbk		
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	AAA(idn)	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Seri B	AAA(idn)	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri B	AAA(idn)	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata Uang Asing		
Oversea-Chinese Banking Corporation	A3**)	A3**)
Abbot Laboratories	A3**)	-
Alibaba Group Holding Ltd.	A1**)	A1**)
Amazon.com, Inc.	A2**)	-
Amgen, Inc.	Baa1**)	-
Anthem, Inc.	Baa2**)	-
Apple, Inc.	Aa1**)	-
AT&T, Inc.	Baa2**)	-
The Bank of Nova Scotia		
Tahun 2022	Aa2**)	-
Tahun 2025	Baa1**)	-
Truist Financial Corporation		
Tahun 2023	A3**)	-
Tahun 2025	A3	-
Berkshire Hathaway, Inc.		
Tahun 2023	Aa2**)	-
Tahun 2030	Aa2**)	-
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	A1**)	-
Bank of America		
Tahun 2023	A2**)	A2**)
Tahun 2023	A2**)	A2**)
Tahun 2026	A2**)	A2**)
Tahun 2031	A2**)	-
Bank of New York Mellon	A1**)	-
B.P Capital	A1**)	-
Bristol Myers Squibb	A2**)	-
The Canadian Imperial Bank of Commerce		
Tahun 2022	Aa2**)	-
Tahun 2024	A2**)	-
JP Morgan Chase Bank, N.A		
Tahun 2025	A2**)	-
Tahun 2026	A2**)	-
Tahun 2029	A2**)	-
Chevron Corporation	Aa2**)	-
Citigroup, Inc.		
Tahun 2024	A3**)	A3**)
Tahun 2028	A3**)	A3**)
Tahun 2031	A3**)	-
The Coca Cola Company	A3**)	-
Comcast Corporation		
Tahun 2023	A3**)	-
Tahun 2026	A3**)	-
CVS Health Corporation		
Tahun 2022	Baa2**)	-
Tahun 2027	Baa2**)	-
Duke Energy Corporation	-Aa2**)	-
Enbridge, Inc.	Baa2**)	-
Enterprise Products Operating LLC		
Tahun 2023	Baa1**)	Baa1**)
Tahun 2028	Baa1**)	Baa1**)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata Uang Asing (lanjutan)		
Equinor ASA	Aa2**)	-
Exxon Corporation	Aa1**)	-
The Federal Home Loan Mortgage Co.	Aaa**)	Aaa**)
Goldman Sachs		
Tahun 2021	A3**)	-
Tahun 2024	A3**)	-
The Home Depot, Inc.	A2**)	-
Kimberly - Clark Corporation	A2**)	-
Kinder Morgan, Inc.	Baa2**)	-
Manulife Financial Corporation	A-**)	-
McDonald's Corporation	Baa1**)	-
Merck & Co., Inc.	A1**)	-
Microsoft Corporation	Aaa**)	-
Norfolk Southern Corporation	Baa1**)	-
Oracle Corporation	A3***)	-
Pacific Corporation	A1**)	-
PepsiCo, Inc.		
Tahun 2022	A1**)	-
Tahun 2029	A1**)	-
Phillips 66 Company	A3**)	-
PNC Financial Services Group, Inc.		
Tahun 2025	A2**)	-
Tahun 2030	A3**)	-
The Procter & Gamble Company	Aa3**)	-
Prologis, Inc.	A3**)	-
Province of Quebec	Aa2**)	Aa2**)
Rogers Communications, Inc.	Baa1**)	-
The Royal Bank of Canada		
Tahun 2022	Aa2**)	Aa2**)
Tahun 2024	Aa2**)	Aa2**)
Tahun 2026	Aa2**)	Aa2**)
Shell International Finance BV	As2**)	-
Stanley Black & Decker, Inc.		
Tahun 2022	A3*+**)	-
Tahun 2024	A3*+**)	-
Tahun 2027	A3*+**)	-
Warner Media, LLC	A-**)	-
TC Energy Corporation	Baa1**)	-
United Technologies Corporation	Baa1**)	-
United Bancorp, Inc.	A1**)	-
Ventas, Inc.	Baa1**)	-
Verizon Communications, Inc.		
Tahun 2025	Baa1**)	Baa1**)
Tahun 2028	Baa1**)	Baa1**)
Walmart, Inc.	Aa2**)	-
Wells Fargo & Company		
Tahun 2022	A2**)	A2**)
Tahun 2026	A2**)	-
Tahun 2029	A2**)	A2**)
Welltower, Inc.	Baa1**)	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	idA-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019		
Seri B	idA-	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahun 2011		
Seri B	idA	idA
PT Angkasa Pura I (Persero)		
Berkelanjutan I Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Sukuk *Ijarah* Angkasa Pura I Tahun 2016		
Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)
PT Angkasa Pura II (Persero)		
Berkelanjutan I Tahun 2016		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018		
Seri B	idAAA	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018		
Seri A	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020		
Seri A	idAAA	-
PT Bank Mandiri Taspen		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019		
Seri A	AA(idn)	-
Seri B	AA(Idn)	idAA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	idAAA	idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
Tahap XV Tahun 2011	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015		
Seri C	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016		
Seri B	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri B	idAA+	idAA+
Seri C	idAA+	idAA+

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Hutama Karya (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	idAAA(gg)	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	idAAA(gg)	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017		
Seri A	idAAA(gg)	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan II Tahun 2017		
Seri A	idA-	-
Seri B	idA-	-
Berkelanjutan II Tahun 2019		
Seri A	idA-	idAAA
Seri B	idA-	-
PT Mandiri Tunas Finance		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016		
Seri B	idAA+	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019		
Seri A	idAA+	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idAA+	idAA+
Seri B	idAA+	idAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018		
Seri C	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019		
Seri B	idAAA	-
Seri C	idAAA	-
Seri E	idAAA	idAAA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (lanjutan)		
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019		
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	-
Seri E	idAAA	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Mudharabah I Tahap III Tahun 2019	idAAA(sy)	idAAA(sy)
PT Pegadaian (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020		
Seri A	idAAA	-
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)		
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016		
Seri B	idAA-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Tahap III Tahun 2019 Seri A	idAAA	idAAA
Tahap III Tahun 2019 Seri B	idAAA	idAAA
Tahap VIII Tahun 2006 Seri B	idAAA	idAAA
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	idAAA	idAAA
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018		
Seri C	idAAA	idAAA
Seri E	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)		
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020		
Seri A	idAAA	-
Seri B	idAAA	-
Seri C	idAAA	-
Seri D	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2020		
Seri A	idAAA	-
Sukuk Ijarah Tahap V Tahun 2010		
Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I		
Tahun 2017 Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Tahun 2017 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	idAAA(sy)	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III		
Tahun 2018 Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2018 Seri A	idAAA(sy)	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B	idAAA(sy)	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri C	idAAA(sy)	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idA+	idA+
Seri B	idA+	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Pembangunan Perumahan Properti (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	BBB-(idn)	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	BBB-(idn)	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019	BBB-(idn)	-
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idA+	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018		
Seri A	idA+	-
Seri B	idA+	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019		
Seri A	idA+	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idA+	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017		
Seri B	idAAA	idAAA
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018		
Seri B	-	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2018		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020		
Seri B	idAAA	-
EBA SP SMF BTN05 Kelas A Seri A1	idAAA	idAAA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Rupiah (lanjutan)		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II tahun 2017		
Seri C	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018		
Seri A	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Seri C	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019		
Seri B	idAAA	idAAA
Sukuk *Mudharabah* I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)
PT Semen Indonesia (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	idAA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idAA	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015		
Seri A	idAAA	idAAA
Seri B	idAAA	idAAA
Seri D	idAAA	idAAA
PT Timah (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019		
Seri A	idA	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	idA(sy)	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	idBBB+	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017		
Seri B	idBBB+	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017		
Seri B	idBBB+	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018		
Seri A	B-(idn)	-
Seri B	B-(idn)	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019		
Seri A	B-(idn)	-
Seri B	B-(idn)	-
PT Waskita Karya Beton Precast (Persero)		
Berkelanjutan I Tahap I 2019	CC(idn)	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	BB(idn)	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk		
Surat Berharga *Perpetual* I Tahun 2018	idA-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat*)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Mata Uang Asing		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Tahun 2024	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2025	BBB-***)	-
PT Hutama Karya (Persero) Tbk		
Tahun 2024	BBB-***)	-
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		
Tahun 2025	BBB***)	BBB***)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)		
Tahun 2023	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2024	BBB-***)	BBB-***)
PT Pertamina (Persero)		
Tahun 2021	BBB***)	BBB***)
Tahun 2022	BBB***)	BBB***)
Tahun 2023	BBB***)	BBB***)
Tahun 2029	BBB***)	BBB***)
Tahun 2030	BBB***)	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		
Tahun 2024	BBB-***)	BBB-***)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Tahun 2021	BBB***)	BBB***)
Tahun 2027	BBB***)	BBB***)
Tahun 2028	BBB***)	BBB***)
Tahun 2029	BBB***)	BBB***)
Tahun 2030	BBB***)	BBB***)
Tahun 2050	BBB***)	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard and Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Schroder Investment Management Indonesia	2.128.820
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	452.225
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	326.742
PT Aberdeen Standard Investment Indonesia	106.283
PT Sucorinvest Asset Management	61.705
PT Ashmore Asset Management Indonesia	58.046
PT Panin Asset Management	42.502
PT Samuel Aset Manajemen	28.544
PT Mega Capital Investama	20.781
PT BNP Paribas Investment Partners	15.758
Lainnya	37.832
	3.279.238
Dolar Amerika Serikat	
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	2.112.386
PT Ashmore Asset Management Indonesia	1.406.892
BNP Paribas Asset Management	714.162
PT Schroder Investment Management Indonesia	434.456
	4.667.896
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Danareksa Investment Management	170.890
PT Bahana TCW Investment Management	131.442
PT Mandiri Manajemen Investasi	34.503
	336.835
	8.283.969
Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Trimegah Asset Management	473.676
	473.676
Total	**8.757.645**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	31 Desember 2019
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Schroder Investment Management Indonesia	1.680.740
PT Trimegah Asset Management	22.357
PT Insight Investments Management	18.855
PT BNP Paribas Investment Partners	9.888
PT Avrist Asset Management	9.852
	1.741.692
Dolar Amerika Serikat	
PT Schroder Investment Management Indonesia	8.192
	1.749.884
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT Bahana TCW Investment Management	33.500
PT Mandiri Manajemen Investasi	11.772
	45.272
	1.795.156
Tersedia untuk dijual	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Trimegah Asset Management	465.212
PT EMCO Asset Management	262.709
PT Samuel Aset Manajemen	193.632
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia	100.300
PT Sucorinvest Asset Management	99.941
PT Insight Investments Management	95.122
PT Syailendra Capital	65.983
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	62.778
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	52.297
PT Panin Asset Management	48.143
Lainnya	55.320
	1.501.437
Dolar Amerika Serikat	
PT Schroder Investment Management Indonesia	139.916
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	139.212
	279.128

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual (lanjutan)	
Pihak berelasi (Catatan 45)	
Rupiah	
PT BNI Asset Management	76.287
PT Mandiri Manajemen Investasi	71.404
	147.691
	1.928.256
Total	**3.723.412**

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
Tahun 2020 Seri C	50.000	4,28	8 Apr 2021	49.419
				49.419
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Commonwealth				
VII Tahap I Tahun 2020	190.000	5,94	29 Jan 2021	189.435
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.				
V Tahap II Tahun 2020 Seri C	200.000	5,26	22 Juli 2021	194.876
V Tahap I Tahun 2020 Seri D	150.000	5,70	18 Feb 2021	149.160
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
XII Tahun 2020 Seri C	50.000	5,12	13 Agu 2021	48.576
				582.047
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
Tahap I Tahun 2020 Seri D	100.000	5,80	7 Mei 2021	98.415
				98.415
Total				680.462
				729.881

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2019
Nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Commonwealth				
VI Tahap II Tahun 2019 Seri A	50.000	5,54	20 Mar 2020	49.364
VI Tahap II Tahun 2019 Seri B	80.000	5,59	22 Sep 2020	76.463
PT Bank DKI				
I Tahun 2019 Seri B	100.000	6,95	8 Des 2020	94.429
PT BPD Jawa Tengah				
Tahun 2019 Seri B	100.000	6,70	15 Mei 2020	97.798
Tahun 2019 Seri A	100.000	6,97	13 Nov 2020	94.668
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.				
IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	100.000	6,20	14 Ags 2020	96.258
IV Tahap V Tahun 2019 Seri C	100.000	6,10	6 Nov 2020	94.788
PT Bank Mizuho Indonesia				
Tahun VII Tahun 2018	70.000	6,05	26 Nov 2020	66.107
				669.875
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
II Tahun 2019 Seri D	36.000	6,47	2 Jul 2020	34.916
III Tahun 2019 Seri B	100.000	5,55	1 Apr 2020	98.528
				133.444
				803.319
Tersedia untuk dijual				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Commonwealth				
VI Tahap I 2019	50.000	7,88	8 Apr 2020	49.209
VI Tahap II 2019 Seri B	50.000	6,65	22 Sep 2020	47.789
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.				
IV Tahap V Tahun 2019 Seri C	100.000	6,10	6 Nov 2020	94.788
IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	200.000	6,95	14 Ags 2020	192.517
PT Bank Mizuho Indonesia				
Tahap IV Tahun 2018	50.000	6,05	26 Nov 2020	47.219
PT Bank KEB Hana Indonesia				
V Tahun 2019	50.000	6,89	17 Sep 2020	47.834
PT BPD Sulawesi Barat				
II Tahun 2019 Seri B	30.000	6,97	15 Des 2020	28.293
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara				
I Tahun 2019	45.000	8,80	5 Mar 2020	44.536
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk				
IV Tahap II Tahun 2019	50.000	7,84	2 Jul 2020	48.494

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				
Pihak ketiga (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
IX Tahun 2019 Seri B	50.000	6,95	6 Sep 2020	47.929
PT Bank DKI				
I Tahun 2019 Seri B	100.000	6,95	8 Des 2020	94.429
				743.037
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
I Tahun 2019 Seri D	28.000	7,77	1 April 2020	27.574
III Tahun 2019 Seri D	200.000	6,70	1 Okt 2020	190.837
				218.411
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT BPD Jawa Tengah				
Tahun 2018 Seri A	60.000	6,97	13 Nov 2020	56.520
PT Bank DKI				
I Seri B	100.000	6,95	13 Des 2020	93.785
				150.305
Total				**1.915.072**

d.5. Obligasi Subordinasi

	Nilai wajar/ Nilai Tercatat 31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Seri I Tahun 2016	33.170
PT Bank Central Asia Tbk	
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15.143
	48.313

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Permata Tbk	
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	36.685
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	40.183
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	30.855
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	24.312
PT Bank Central Asia Tbk	
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	4.979
PT Bank UOB Indonesia	
Seri I Tahun 2014	28.641
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	21.059
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Seri I Tahun 2016	9.630
	196.344
Biaya Perolehan Diamortisasi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Subordinasi I 2015	35.065
Total	**279.722**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Nilai wajar melalui laba rugi	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Tahap I Tahun 2016	33.051
PT Bank Central Asia Tbk	
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	14.669
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Seri II Tahun 2010	1.454
	49.174
Tersedia untuk dijual	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Permata Tbk	
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013	5.261
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	37.579
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	39.234
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Seri II Tahun 2010	134.639
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	31.706
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	24.169
PT Bank UOB Indonesia	
Seri I Tahun 2014	29.522
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	20.771
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Seri I Tahun 2016	9.596
PT Bank Bukopin Tbk	
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015	2.533
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	3.940
PT Bank Central Asia Tbk	
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	4.851
	343.801
Dimiliki hingga jatuh tempo	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT BPD Jawa Tengah	
Tahap I Tahun 2015	35.999
	35.999
Total	**428.974**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
Seri II Tahun 2010	10,85	23 Des 2020	-	AA(idn)
PT Bank KEB Hana Indonesia				
Seri I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Central Asia Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018				
Seri A	7,75	5 Jul 2025	idAA	AA(idn)
Seri B	8,00	5 Jul 2030	idAA	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	11,35	8 Jul 2021	AA(idn)	AA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Jun 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Permata Tbk				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013	12,00	24 Des 2020	-	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	11,75	24 Okt 2021	idAA	idAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Mar 2024	idA+	idA+
PT Bank UOB Indonesia				
I Tahun 2014	11,35	28 Mei 2021	AA(idn)	AA(idn)
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Bukopin Tbk				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015	11,00	30 Jun 2022	-	BBB(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,00	31 Jan 2024	-	BBB(idn)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah				
Subordinasi I 2015	12,25	18 Des 2022	idA	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

d.6. *Medium-Term Note* (MTN)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat
				31 Desember 2020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk				
Tahap I Tahun 2018 Seri C	100.000	8,35*)	4 Sep 2021	101.645
Perum Perumnas				
Tahap III Seri A Tahun 2018	60.000	10,75*)	10 Des 2021	61.542
PT Kimia Farma (Persero) Tbk				
Tahap II Tahun 2018	36.000	7,75*)	15 Mar 2021	36.380
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)				
Tahap X Tahun 2020	40.000	5,25*)	5 Des 2021	40.351
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk				
Tahap I Tahun 2018	100.000	10.50*)	28 Des 2021	101.249
				341.167

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. *Medium-Term Note* (MTN) (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2020
Biaya perolehan diamortisasi				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk				
Seri VII Tahun 2018	50.000	10,25*)	20 Apr 2021	50.000
				50.000
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Pegadaian (Persero)	200.000	7,00*)	6 Mar 2021	200.000
PT Bio Farma (Persero)	25.000	8,75*)	24 Ags 2021	25.000
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)				
VIII Tahun 2019	10.000	11,00*)	26 Jun 2024	10.000
VIII Seri B	1.000	11,00*)	31 Okt 2024	1.000
				236.000
				286.000
Total				**627.167**

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
I Tahun 2019	115.000	8,15*)	6 Mar 2020	115.449
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk				
Tahap I Tahun 2018 Seri B	65.000	7,07*)	4 Sep 2020	65.838
Tahap I Tahun 2018 Seri C	100.000	8,12*)	4 Sep 2021	102.570
PT Kimia Farma (Persero) Tbk				
Tahap I Tahun 2017	57.000	8,10*)	15 Sep 2020	57.359
Tahap II Tahun 2018	36.000	7,75*)	15 Mar 2021	36.328
Perum Perumnas				
Tahap III Seri A Tahun 2018	60.000	10,75*)	10 Des 2021	61.104
				323.199
				438.648

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. *Medium-Term Note* (MTN) (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat 31 Desember 2019
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk				
Seri VII Tahun 2018	50.000	10,25*)	20 April 2021	50.000
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)				
VIII Tahun 2019	10.000	11,00*)	26 Jun 2024	10.000
VII Seri B	1.000	11,00*)	31 Okt 2024	1.000
				11.000
				61.000
Total				**499.648**

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali.

e) Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah	6,90%	7,46%
Dolar Amerika Serikat	4,09	4,17
Euro Eropa	2,79	2,85
Dolar Singapura	1,33	1,90

g) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam “Nilai Wajar melalui Laba Rugi” sebesar Rp342.351 dan Rp80.980 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang dilaporkan dalam akun “Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek” di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp2.860.653 dan Rp1.839.341 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang dilaporkan dalam akun “Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah neto” di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

i) Efek-efek sejumlah nominal Rp33.906.302 dan Rp48.539.991 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24).

j) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1-** Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	***Stage* 2-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	***Stage* 3-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Nilai tercatat awal	124.153.732	-	-	124.153.732
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.315.721)	-	-	(5.315.721)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	115.615.007	-	-	115.615.007
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(46.132.091)	-	-	(46.132.091)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.225.015	-	-	1.225.015
Nilai tercatat akhir	**189.545.942**	**-**	**-**	**189.545.942**

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1-** Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	***Stage* 2-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	***Stage* 3-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	53.974.385	-	758	53.975.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	60.243.498	-	-	60.243.498
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.970.110)	-	-	(3.970.110)
Penghapusbukuan				
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	155.162	-	-	155.162
Nilai tercatat akhir	**110.402.935**	**-**	**758**	**110.403.693**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	111.385
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	111.385	-	-	111.385
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	491.402	-	-	491.402
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	510.852	-	-	510.852
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.281)	-	-	(30.281)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(103.512)	-	-	(103.512)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir*)	979.846	-	-	979.846

*) Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	758
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	43.093
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	43.093	-	758	43.851
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	99.772	-	-	99.772
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	103.696	-	-	103.696
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.888)	-	-	(1.888)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	103.510	-	-	103.510
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	348.183	-	758	348.941

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Wesel Tagih		6.211.397		3.740.156
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		3.956.830		3.362.976
Wesel Ekspor		2.416.160		3.244.802
Tagihan Lainnya		412.784		565.482
		12.997.171		10.913.416
Mata uang asing				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat	870.862	12.236	1.195.050	16.590
Euro Eropa	3.021	51		-
Renminbi	2.006.235	4.314		-
		16.601		16.590
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	358.324.560	5.029.255	306.931.212	4.260.973
Renminbi	255.016.373	548.350	18.195.016	2.325
		5.577.605		4.263.298
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	458.587.573	6.442.962	303.229.301	4.209.581
Euro Eropa	1.769.995	30.505	613.581	9.554
Renminbi	30.432.774	65.437	15.864.856	31.637
Yen Jepang		-	174.341.222	22.283
		6.538.904		4.273.055
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	40.228.362	565.208	62.177.125	863.173
Euro Eropa	1.914.500	32.995	2.980.000	46.400
Dolar Singapura	1.209.427	12.827	1.134.222	11.700
Yen Jepang	90.011.140	12.238	36.615.000	4.680
Renminbi	1.750.000	3.763	3.973.250	7.923
		627.031		933.876
		12.760.141		9.486.819
		25.757.312		20.400.235
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Wesel Ekspor		1.362		5.994
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		313.852		3.472.960
Wesel Tagih		235.310		3.406.600
Tagihan Lainnya		112.818		1.851.090
		663.342		8.736.644
Mata uang asing				
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat		-	53.771.939	746.489
Euro Eropa		-	4.718.418	73.469
		-		819.958

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)				
Mata uang asing (lanjutan)				
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	7.271.280	102.161	81.771	1.135
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	56.995.915	800.793	217.985.486	3.026.184
Euro Eropa	11.887.485	204.874	82.492.599	1.284.460
Pound Sterling Inggris	342.956	6.520	2.413.767	44.023
Dolar Singapura	2.619.639	36.322	225.907	2.330
Franc Swiss	105.664	1.680	176.449	2.530
		1.050.189		4.359.527
		1.152.350		4.360.662
		1.815.692		13.917.264
Total		**27.573.004**		**34.317.499**
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.326.190)		(132.241)
Bersih		**26.246.814**		**34.185.258**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal 31 Desember 2020, semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan "Lancar", kecuali senilai Rp65.867 dengan kolektibilitas "Kurang Lancar".

Pada tanggal 31 Desember 2019, semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan "Lancar", kecuali senilai Rp1.078 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" dan Rp2.817 dengan kolektibilitas "Kurang Lancar".

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	6.257.818	4.866.611
> 1 bulan - 3 bulan	10.562.414	7.465.986
> 3 bulan - 1 tahun	8.937.080	8.067.638
	25.757.312	20.400.235
Pihak berelasi (Catatan 45)		
≤ 1 bulan	539.838	2.213.007
> 1 bulan - 3 bulan	630.024	2.121.449
> 3 bulan - 1 tahun	645.830	9.582.808
	1.815.692	13.917.264
Total	27.573.004	34.317.499
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.326.190)	(132.241)
Bersih	**26.246.814**	**34.185.258**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Nilai tercatat awal	30.292.051	4.003.283	22.165	34.317.499
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	-
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(702)	523	-	(179)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.327.636	4.217.422	-	27.545.058
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.291.441)	(4.003.331)	(22.165)	(34.316.937)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	68	-	68
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	27.495	-	-	27.495
Nilai tercatat akhir	**23.355.039**	**4.217.965**	**-**	**27.573.004**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Saldo awal tahun	-	-	-	132.241
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	2.628.902
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	427.853	2.311.525	21.765	2.761.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	110.510	26.997	-	137.507
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.066.011	233.182		1.299.193
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(534.934)	(2.311.525)	(21.765)	(2.868.224)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(3.429)	-	-	(3.429)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.066.011**	**260.179**	**-**	**1.326.190**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya:

	31 Desember 2019
Saldo awal	91.932
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 35)	40.309
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-
Saldo akhir	132.241

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, BRI menerima obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sejumlah nominal Rp29.149.000 yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000, yang seluruhnya merupakan obligasi tingkat bunga tetap (Catatan 1b). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-84/MK.01/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang "Pelaksanaan Konversi Obligasi Seri FR Menjadi Obligasi Seri VR", pada tanggal 26 Maret 2002 BRI telah menukarkan sebagian Obligasi Pemerintah tingkat bunga tetap dengan Obligasi Pemerintah tingkat bunga variabel.

a) Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo:

	Nilai Wajar/ Nilai Tercatat
	31 Desember 2019
Tersedia untuk dijual	
≤ 1 bulan	30.306
	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	
> 3 bulan - 1 tahun	1.100.000
	1.100.000
Total	**1.130.306**

b) Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Nilai Tercatat/ Nilai Wajar 31 Desember 2019
Tersedia untuk Dijual			
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	30.306
			30.306
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	1.100.000
			1.100.000
Total			**1.130.306**

c) Informasi Signifikan Lainnya:

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Nilai pasar untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan "Tersedia untuk dijual" adalah 99,97% pada tanggal 31 Desember 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0077	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	25.505.387	25.513.358
VR0042	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	14.302.191	14.305.171
VR0035	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	1.337.042	1.337.600
VR0043	3,75	30 Des 2020	6 Jan 2021	1.328.726	1.329.002
FR0079	3,84	30 Sep 2020	4 Jan 2021	527.602	532.779
VR0039	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	381.011	381.130
FR0078	3,96	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.366
FR0078	3,94	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.349
FR0046	5,15	17 Jan 2020	15 Jan 2021	248.200	260.591
FR0074	3,97	4 Sep 2020	3 Sep 2021	255.897	259.227
VR0036	3,90	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	241.028
VR0036	3,86	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	240.997
FR0083	4,59	12 Jun 2020	11 Jun 2021	234.431	240.469
FR0080	4,57	12 Jun 2020	12 Mar 2021	233.556	239.545
FR0068	3,57	16 Des 2020	17 Mar 2021	112.674	112.841
FR0078	3,55	7 Sep 2020	4 Jan 2021	109.125	109.384
FR0072	3,57	8 Sep 2020	9 Mar 2021	107.856	108.102
FR0072	3,83	4 Nov 2020	3 Feb 2021	106.840	107.488
FR0082	3,55	16 Des 2020	13 Jan 2021	100.963	101.113
FR0087	3,55	8 Des 2020	5 Jan 2021	99.919	100.146
VR0037	3,84	27 Okt 2020	26 Jan 2021	95.789	96.453
FR0052	3,55	4 Des 2020	4 Jan 2021	63.408	63.576
FR0071	3,55	2 Des 2020	4 Jan 2021	57.330	57.494
FR0068	3,55	14 Des 2019	11 Jan 2021	56.066	56.160
FR0058	3,57	2 Des 2020	3 Mar 2021	55.341	55.500
FR0080	3,84	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.590
FR0080	3,82	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.588
FR0087	3,65	4 Des 2020	3 Sep 2021	49.827	49.963
FR0076	3,60	25 Nov 2020	24 Feb 2021	48.481	48.656
FR0073	3,60	4 Des 2020	4 Jun 2021	36.919	37.019
FR0080	4,60	9 Apr 2020	07 Jun 2021	754	779
PT BPD Maluku dan Maluku Utara					
Obligasi Pemerintah					
FR0084	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	48.859	48.906
FR0087	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	140.063	140.198
Total				**46.756.681**	**46.818.568**

	31 Desember 2019				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0063	5,04	17 Des 19	14 Jan 20	7.709.270	7.724.380
FR0077	5,06	17 Des 19	17 Mar 20	3.063.470	3.069.498
FR0063	5,02	20 Des 19	3 Jan 20	931.289	932.717
FR0065	5,04	5 Des 19	2 Jan 20	874.280	877.462
FR0064	5,04	20 Des 19	17 Jan 20	443.180	443.862

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2019				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
Bank Indonesia (lanjutan)					
Obligasi Pemerintah (lanjutan)					
FR0065	5,06	20 Des 19	20 Mar 20	432.370	433.038
FR0070	5,01	31 Des 19	14 Jan 20	312.756	312.756
FR0068	5,04	12 Des 19	9 Jan 20	310.439	311.265
FR0077	5,05	26 Nov 19	25 Feb 20	304.376	305.870
FR0061	5,04	31 Des 19	28 Jan 20	293.558	293.558
FR0061	5,04	11 Des 19	8 Jan 20	292.221	293.039
FR0061	5,01	26 Des 19	9 Jan 20	292.691	292.894
FR0063	5,04	10 Des 19	7 Jan 20	279.670	280.492
FR0077	5,33	16 Okt 19	15 Jan 20	125.660	127.074
FR0077	5,06	26 Nov 19	25 Feb 20	202.917	203.915
FR0079	5,09	22 Nov 19	20 Mei 20	102.938	103.506
FR0079	5,09	6 Des 19	5 Jun 20	102.727	103.090
FR0078	5,33	16 Okt 19	15 Jan 20	83.774	84.716
FR0079	5,19	13 Des 19	11 Des 20	51.203	51.336
FR0061	5,13	13 Des 19	11 Sep 20	48.681	48.806
SPN12200410	5,00	26 Des 19	2 Jan 20	2.799.210	2.801.154
SPN12201106	5,09	15 Nov 19	14 Feb 20	542.427	545.955
SPN12201009	5,00	31 Des 19	7 Jan 20	273.186	273.186
PT BPD Maluku dan Maluku Utara					
Obligasi Pemerintah					
FR0077	5,20	23 Des 19	6 Jan 20	47.756	47.811
PT BPD Jawa Tengah					
Obligasi Pemerintah					
FR0065	5,10	23 Des 19	2 Jan 20	749.053	749.159
FR0064	5,10	30 Des 19	2 Jan 20	325.612	325.658
				20.994.714	21.036.197
Dolar Amerika Serikat					
ING Bank N.V.					
Obligasi Pemerintah					
RI0822	2,01	11 Des 19	6 Jan 20	520.760	521.343
SNI0323	2,01	11 Des 19	6 Jan 20	145.489	145.651
				666.249	666.994
				21.660.963	21.703.191
Pihak berelasi (Catatan 45)					
Rupiah					
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)					
Obligasi Pemerintah					
FR0059	6,59	28 Agu 19	19 Feb 20	351.324	359.364
FR0074	6,59	30 Agu 19	21 Feb 20	249.555	255.174
FR0061	6,59	29 Agu 19	21 Feb 20	81.328	83.174
FR0061	6,59	29 Agu 19	20 Feb 20	60.751	62.130
FR0065	6,59	30 Agu 19	20 Feb 20	45.806	46.838
FR0061	6,59	29 Agu 19	19 Feb 20	44.094	45.094
FR0068	6,59	30 Agu 19	20 Feb 20	13.128	13.424
FR0063	6,59	29 Agu 19	20 Feb 20	7.954	8.135
FR0044	6,59	29 Agu 19	20 Feb 20	5.593	5.720
				859.533	879.053
Total				**22.520.496**	**22.582.244**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

b) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali				
Nilai tercatat awal	22.582.244	-	-	22.582.244
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan Kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	197.245.886	-	-	197.245.886
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(173.009.562)	-	-	(173.009.562)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	**46.818.568**	**-**	**-**	**46.818.568**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	1
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	1	-	-	1
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1)	-	-	(1)
Penghapusbukuan				
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**-**	**-**	**-**	**-**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	
Transaksi	**Tagihan derivatif**	**Liabilitas derivatif**
Swap mata uang asing	1.177.679	195.687
Swap mata uang dan suku bunga	144.151	14.421
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	142.912	35.799
Swap suku bunga	110.358	158.856
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	1.559	1.160
Option mata uang	-	1.851
Total	**1.576.659**	**407.774**

	31 Desember 2019	
Transaksi	**Tagihan derivatif**	**Liabilitas derivatif**
Swap mata uang asing	139.081	34.341
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	21.975	21.943
Swap suku bunga	19.264	74.114
Option saham	17.306	-
Option mata uang	9.092	21.424
Swap mata uang dan suku bunga	3.151	32.338
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	527	445
Total	**210.396**	**184.605**

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Swap mata uang dan suku bunga		
Rupiah	3.827.625	-
Dolar Amerika Serikat	-	111.458.000
Swap suku bunga		
Dolar Amerika Serikat	731.572.074	441.572.073
Option saham		
Rupiah	-	17.306
Option mata uang		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	-	190.626.196
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	41.707.102	640.127.645
Euro Eropa	-	2.000.000
Pound Sterling Inggris	-	4.000.000
Dolar Selandia Baru	-	1.000.000
Spot mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	16.000.000	3.000.000
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	27.143.607	29.150.000

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Forward mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	232.569.444	71.782.079
Renminbi	2.800.000	-
Euro Eropa	-	3.806.914
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	843.687.353	210.025.464
Euro Eropa	62.964	-
Dolar Australia	-	50.143
Swap mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	170.114.774	170.241.135
Dolar Australia	-	50.000
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	2.808.686.838	1.435.993.512
Euro Eropa	190.000.000	53.213.329
Pound Sterling Inggris	9.200.000	10.000.000
Dolar Australia	-	3.000.000

Para pihak yang melakukan kontrak derivatif dalam bentuk *swap* suku bunga ataupun *swap* mata uang dan suku bunga dengan BRI berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau bunga mengambang (*floating rate*) antara lain LIBOR 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan ditambah dengan marjin tertentu.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Kupedes	351.337.166	307.717.343
Modal kerja	160.260.667	157.280.773
Konsumsi	143.781.795	140.783.704
Investasi	60.447.524	62.735.396
Program	35.879.902	35.139.821
Sindikasi	485.119	606.930
	752.192.173	704.263.967
Mata uang asing		
Investasi	40.761.907	38.079.976
Modal kerja	30.017.025	30.662.859
Konsumsi	802.927	839.482
Sindikasi	924.464	812.255
	72.506.323	70.394.572
	824.698.496	774.658.539

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Investasi	37.083.948	44.273.596
Modal kerja	25.624.320	41.123.158
Sindikasi	3.953.066	4.989.605
Karyawan kunci	186.633	22.847
Konsumsi	3.317	960
	66.851.284	90.410.166
Mata uang asing		
Modal kerja	5.765.444	10.133.668
Investasi	2.142.983	2.228.820
	7.908.427	12.362.488
	74.759.711	102.772.654
Total	**899.458.207**	**877.431.193**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(65.165.002)	(38.363.840)
Bersih	**834.293.205**	**839.067.353**

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		819.043.457		794.674.133
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	5.717.364.006	80.328.965	5.946.335.164	82.549.997
Dolar Singapura	6.516.568	69.116	18.947.828	195.448
Yen Jepang	90.909.084	12.360	90.876.476	11.615
Euro Eropa	250.010	4.309		-
		80.414.750		82.757.060
Total		**899.458.207**		**877.431.193**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(65.165.002)		(38.363.840)
Bersih		**834.293.205**		**839.067.353**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	289.833.592	273.382.521
Pertanian	100.923.232	88.019.439
Perindustrian	47.500.427	35.394.385
Jasa dunia usaha	40.672.940	38.225.264
Konstruksi	18.740.830	20.272.747
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	11.060.454	11.709.242
Jasa pelayanan sosial	5.699.714	10.689.178
Listrik, gas dan air	4.459.079	2.632.523
Pertambangan	2.354.278	3.988.819
Lain-lain	230.947.627	219.949.849
	752.192.173	704.263.967
Mata uang asing		
Perindustrian	26.184.147	25.389.715
Listrik, gas dan air	14.907.363	10.344.163
Pertanian	12.995.793	15.775.631
Pertambangan	4.861.825	4.684.343
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.078.573	4.652.808
Konstruksi	3.673.480	3.697.854
Jasa dunia usaha	3.707.144	3.408.835
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	887.115	1.350.059
Jasa pelayanan sosial	349.487	190.096
Lain-lain	861.396	901.068
	72.506.323	70.394.572
	824.698.496	774.658.539
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Listrik, gas dan air	16.128.026	26.009.009
Konstruksi	16.233.554	15.087.950
Perindustrian	7.781.515	9.763.102
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	7.677.961	6.338.133
Pertanian	6.725.037	7.510.746
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.014.905	16.477.443
Jasa dunia usaha	5.263.900	4.904.395
Pertambangan	505.214	592.653
Jasa pelayanan sosial	331.222	3.702.928
Lain-lain	189.950	23.807
	66.851.284	90.410.166
Mata uang asing		
Perindustrian	3.687.097	1.646.608
Jasa dunia usaha	1.998.026	733.039
Listrik, gas dan air	1.032.396	466.917
Jasa pelayanan sosial	1.112.644	1.761.903
Pertambangan	78.264	7.754.021
	7.908.427	12.362.488
	74.759.711	102.772.654
Total	**899.458.207**	**877.431.193**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(65.165.002)	(38.363.840)
Bersih	**834.293.205**	**839.067.353**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	15.675.083	22.998.164
> 1 bulan - 3 bulan	28.271.014	33.389.203
> 3 bulan - 1 tahun	137.370.976	95.818.374
> 1 tahun - 2 tahun	107.394.811	212.855.436
> 2 tahun - 5 tahun	249.061.795	131.427.104
> 5 tahun	214.418.494	207.775.686
	752.192.173	704.263.967
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	3.288.919	6.211.997
> 1 bulan - 3 bulan	3.383.986	2.127.349
> 3 bulan - 1 tahun	15.369.159	9.507.224
> 1 tahun - 2 tahun	5.606.542	14.306.607
> 2 tahun - 5 tahun	20.579.596	16.336.905
> 5 tahun	24.278.121	21.904.490
	72.506.323	70.394.572
	824.698.496	774.658.539
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	4.686.688	9.970.354
> 1 bulan - 3 bulan	8.769.472	18.073.172
> 3 bulan - 1 tahun	5.827.999	2.270.891
> 1 tahun - 2 tahun	3.266.801	10.727.209
> 2 tahun - 5 tahun	7.725.408	6.464.047
> 5 tahun	36.574.916	42.904.493
	66.851.284	90.410.166
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	2.057	24.193
> 1 bulan - 3 bulan	413.920	7.789.566
> 3 bulan - 1 tahun	1.106.582	2.166.267
> 1 tahun - 2 tahun	287.818	667.675
> 2 tahun - 5 tahun	2.004.088	1.247.870
> 5 tahun	4.093.962	466.917
	7.908.427	12.362.488
	74.759.711	102.772.654
Total	**899.458.207**	**877.431.193**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(65.165.002)	(38.363.840)
Bersih	**834.293.205**	**839.067.353**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Individual	61.073.398	38.017.682
Kolektif		
Lancar	807.915.251	802.402.488
Dalam perhatian khusus	18.934.167	25.510.533
Kurang lancar	1.234.299	2.359.753
Diragukan	1.697.336	2.518.424
Macet	8.603.756	6.622.313
	838.384.809	839.413.511
Total	899.458.207	877.431.193
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(29.101.946)	(16.860.013)
Kolektif	(36.063.056)	(21.503.827)
	(65.165.002)	(38.363.840)
Bersih	**834.293.205**	**839.067.353**

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Mikro	377.642.132	329.535.811
Ritel	337.141.342	336.148.459
Korporasi	37.408.699	38.579.697
	752.192.173	704.263.967
Mata uang asing		
Korporasi	58.406.031	54.485.406
Ritel	14.100.292	15.909.166
	72.506.323	70.394.572
	824.698.496	774.658.539
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Korporasi	63.873.229	84.168.630
Ritel	2.978.055	6.241.536
	66.851.284	90.410.166

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45) (lanjutan)		
Mata uang asing		
Korporasi	7.908.427	12.362.488
	7.908.427	12.362.488
	74.759.711	102.772.654
Total	**899.458.207**	**877.431.193**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(65.165.002)	(38.363.840)
Bersih	**834.293.205**	**839.067.353**

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bunga Kontrak		
Rupiah	10,40%	11,64%
Mata uang asing	3,80	4,27
Bunga Efektif		
Rupiah	12,49%	13,38%
Mata uang asing	3,97	4,36

2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 20, 21 dan 22).

3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.

4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.

5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit dengan sasaran usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp61.909.777 dan Rp61.915.310 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 55% sampai dengan 77% dan 39% sampai dengan 77% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 25% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga berkisar 4,5% sampai dengan 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp3.161.845 dan Rp2.055.609 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 18).

9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 45) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	16.182.590	25.998.611
Perum BULOG	5.841.839	14.919.169
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.800.000	1.718.181
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.617.195	602.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.414.805	694.125
PT Kereta Api (Persero)	2.355.585	1.795.405
PT Pegadaian (Persero)	2.120.147	2.751.793
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.031.937	2.122.094
PT Trans Jabar Tol	1.848.697	2.141.861
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.813.992	20.824
Lain-lain	34.546.291	49.985.744
Total	**74.573.078**	**102.749.807**

10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp42.644.077 dan Rp51.867.610. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (BRI Entitas Induk dan BRI Agro) akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counterclynical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp194.879.073 dengan skema perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penundaan pokok dan penundaan bunga.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

11) Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, BRI menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) Tangguh dengan total penyaluran sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.786.012.

12) Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 98/PMK.08/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi, total penyaluran Kredit Modal Kerja yang telah menerima pinjaman untuk debitur korporasi di BRI sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp200.000.

13) Dalam rangka implementasi Progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 138/PM.05/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko RI) No. 8 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonominian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, total debitur BRI yang mendapatkan subsidi bunga sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 8.906.873 debitur dan besaran subsidi bunga yang diterima oleh debitur BRI terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebesar Rp4.743.511.

14) BRI mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menyalurkan kredit segmen UMKM yang berasal dari penempatan dana pemerintah sesuai PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (Catatan 22) sebesar Rp65.627.822 untuk Tahap I (25 Juni 2020 sampai dengan 24 September 2020) dan sebesar Rp78.145.378 untuk Tahap II (25 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020).

15) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kepada Bank Indonesia (OJK), BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

16) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pertanian	18.865.269	15.859.453
Perdagangan, perhotelan dan restoran	14.453.523	11.360.517
Perindustrian	13.816.620	11.879.996
Konstruksi	7.820.702	1.995.762
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	3.817.321	1.359.475
Jasa dunia usaha	3.506.565	1.491.252
Pertambangan	3.498.272	2.246.320
Listrik, gas dan air	2.944.416	731.965
Jasa pelayanan sosial	543.874	506.719
Lain-lain	3.342.227	2.086.713
Total	72.608.789	49.518.172
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(35.390.134)	(19.504.591)
Bersih	**37.218.655**	**30.013.581**

17) Rasio-rasio

a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI (entitas induk) berdasarkan peraturan terkait adalah sebesar 2,94% dan 2,62% masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sedangkan rasio NPL neto BRI (entitas induk) adalah sebesar 0,80% dan 1,04% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah sebesar 53,00% dan 48,43% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Nilai tercatat awal	781.901.970	73.887.478	21.641.745	877.431.193
Pengalihan ke				
Stage 1	19.772.305	(19.285.712)	(486.593)	-
Stage 2	(19.204.620)	19.893.341	(688.721)	-
Stage 3	(4.783.707)	(7.453.662)	12.237.369	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(86.023.131)	(2.945.176)	4.520.157	(84.448.150)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	306.406.952	34.396.541	4.753.687	345.557.180
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(205.812.504)	(13.292.957)	(4.310.299)	(223.415.760)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.809.437)	(14.243.859)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.499.164)	27.820	48.947	(1.422.397)
Nilai tercatat akhir	**790.417.318**	**83.134.034**	**25.906.855**	**899.458.207**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Saldo awal tahun	-	-	-	38.363.840
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	12.124.615
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	15.575.981	17.480.159	17.432.315	50.488.455
Pengalihan ke				
Stage 1	2.064.161	(1.746.657)	(317.504)	-
Stage 2	(544.581)	981.973	(437.392)	-
Stage 3	(137.238)	(2.914.060)	3.051.298	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	207.434	5.762.912	10.531.033	16.501.379
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.856.322	8.262.293	3.499.225	22.617.840
Aset Keuangan yang dihentikan Pengakuannya	(3.821.785)	(3.005.945)	(3.332.820)	(10.160.550)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.809.437)	(14.243.859)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(64.849)	12.588	13.998	(38.263)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**23.794.662**	**22.739.624**	**18.630.716**	**65.165.002**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan:

	31 Desember 2019
Saldo awal	34.926.050
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 35)	20.810.248
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(17.006.364)
Selisih kurs	(366.094)
Saldo akhir	**38.363.840**

Termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (entitas induk) adalah cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana sesuai penetapan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.217.393 dan Rp1.354.379 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 2e).

Jumlah minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (OJK) (Catatan 2e) adalah sebesar Rp31.802.386 dan Rp27.409.053 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kredit yang diberikan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

a) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Lancar	32.543.250	19.474.961
Dalam Perhatian Khusus	1.379.217	758.984
Kurang Lancar	316.679	195.421
Diragukan	107.503	76.703
Macet	770.167	1.061.273
	35.116.816	21.567.342
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Lancar	3.798.857	4.183.648
Dalam perhatian khusus	-	3.442
Diragukan	-	815
Macet	-	10.950
	3.798.857	4.198.855
Total	**38.915.673**	**25.766.197**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.489)	(745.029)
Bersih	**37.466.184**	**25.021.168**

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	545.014	417.276
> 1 bulan - 3 bulan	1.401.070	676.901
> 3 bulan - 1 tahun	3.519.932	2.459.441
> 1 tahun - 2 tahun	3.268.502	1.981.410
> 2 tahun - 5 tahun	12.086.284	8.095.420
> 5 tahun	14.296.014	7.936.894
	35.116.816	21.567.342

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	1.183.543	435.686
> 1 bulan - 3 bulan	265.583	1.215.211
> 3 bulan - 1 tahun	54.178	192.078
> 1 tahun - 2 tahun	156.963	247.099
> 2 tahun - 5 tahun	94.278	356.841
> 5 tahun	2.044.312	1.751.940
	3.798.857	4.198.855
Total	**38.915.673**	**25.766.197**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.489)	(745.029)
Bersih	**37.466.184**	**25.021.168**

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercylical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp7.504.101.

Pendapatan piutang *murabahah* yang belum diakui pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.292.665 dan Rp5.199.426.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	745.029	497.141
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 35)	1.288.086	682.820
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	66.748	59.005
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(650.374)	(493.937)
Saldo akhir	**1.449.489**	**745.029**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan pembiayaan syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas piutang dan pembiayaan konsumen berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan properti lainnya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang dan pembiayaan syariah yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

a) Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Piutang sewa pembiayaan-bruto	4.185.436	4.703.181
Nilai sisa yang terjamin	1.981.977	2.575.844
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(607.364)	(586.009)
Simpanan jaminan	(1.981.978)	(2.575.844)
	3.578.071	4.117.172
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Piutang sewa pembiayaan-bruto	48.241	80.772
Nilai sisa yang terjamin	1.677	6.565
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(7.088)	(6.348)
Simpanan jaminan	(1.677)	(6.565)
	41.153	74.424
Total	**3.619.224**	**4.191.596**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(213.060)	(87.500)
Bersih	**3.406.164**	**4.104.096**

b) Piutang sewa pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 tahun	1.505.414	366.664
> 1 tahun - 2 tahun	884.059	1.152.391
> 2 tahun - 5 tahun	830.009	2.118.519
	3.219.482	3.637.574
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 tahun	201.549	51.412
> 1 tahun - 2 tahun	109.166	127.101
> 2 tahun - 5 tahun	47.874	301.085
	358.589	479.598
	3.578.071	4.117.172

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

b) Piutang sewa pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 tahun	23.927	30.857
> 1 tahun - 2 tahun	16.279	24.545
> 2 tahun - 5 tahun	947	19.022
	41.153	74.424
Total	**3.619.224**	**4.191.596**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(213.060)	(87.500)
Bersih	**3.406.164**	**4.104.096**

c) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Piutang Sewa Pembiayaan				
Nilai tercatat awal	4.026.491	59.873	105.232	4.191.596
Pengalihan ke				
Stage 1	38.913	(31.851)	(7.062)	-
Stage 2	(81.147)	108.466	(27.319)	-
Stage 3	(140.359)	(14.652)	155.011	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian				
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	992.010	15.842	13.873	1.021.725
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.487.748)	(27.229)	(38.130)	(1.553.107)
Penghapusbukuan	(4.249)	(854)	(14.098)	(19.201)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(22.508)	-	719	(21.789)
Nilai tercatat akhir	**3.321.403**	**109.595**	**188.226**	**3.619.224**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

c) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Piutang Sewa Pembiayaan				
Saldo awal tahun	-	-	-	87.500
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	22.529
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	2.755	19.639	87.635	110.029
Pengalihan ke				
Stage 1	32.099	(13.566)	(18.533)	-
Stage 2	(4.434)	20.596	(16.162)	-
Stage 3	(2.399)	(4.500)	6.899	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(10.559)	9.766	70.162	69.369
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	32.133	5.615	23.029	60.777
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.638)	(784)	(15.144)	(18.566)
Penghapusbukuan	(2.152)	(614)	(6.101)	(8.867)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(84)	-	402	318
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**44.721**	**36.152**	**132.187**	**213.060**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan:

	31 Desember 2019
Saldo awal	88.000
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 35)	63.251
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(62.839)
Selisih kurs	(912)
Saldo akhir	**87.500**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		3.789.849		6.579.401
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	77.786.022	1.092.894	123.214.660	1.710.528
Euro Eropa	7.155.614	123.323	6.443.155	101.705
Yen Jepang	209.237.191	28.449	60.413.207	7.721
Renminbi	4.073.580	8.759	1.180.318	2.354
Pound Sterling Inggris	36.705	698		-
Dolar Singapura	36.236	384		-
		1.254.507		1.822.308
		5.044.356		8.401.709
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
L/C Impor dan SKBDN		1.548.475		763.441
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	14.634.549	205.615	12.903.095	179.127
Yen Jepang	138.000.000	18.763		-
Euro Eropa	13.168	227	65.669	1.023
Dolar Singapura		-	73.997	763
		224.605		180.913
		1.773.080		944.354
Total		**6.817.436**		**9.346.063**
Cadangan kerugian penurunan nilai		(546.260)		-
Bersih		**6.271.176**		**9.346.063**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai “Lancar”, kecuali senilai Rp500.603 dengan kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus” untuk 31 Desember 2020 serta Rp3.412 dengan kolektibilitas “Macet” untuk 31 Desember 2019.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	2.166	2.616
> 1 bulan - 3 bulan	2.319.770	2.551.641
> 3 bulan - 1 tahun	2.722.420	5.847.452
	5.044.356	8.401.709

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 45)		
> 1 bulan - 3 bulan	850.673	556.645
> 3 bulan - 1 tahun	922.407	387.709
	1.773.080	944.354
Total	**6.817.436**	**9.346.063**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(546.260)	-
Bersih	**6.271.176**	**9.346.063**

d) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Tagihan Akseptasi				
Nilai tercatat awal	9.344.682	-	-	9.344.682
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	1.381	-	-	1.381
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.262.967	500.603	-	6.763.570
Aset Keuangan yang dihentikan Pengakuannya	(9.344.682)	-	-	(9.344.682)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	10.173	-	-	10.173
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	42.312	-	-	42.312
Nilai tercatat akhir	**6.316.833**	**500.603**	**-**	**6.817.436**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 53)	-	-	-	140.746
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	140.746	-	-	140.746
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	415	-	-	415
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau Dibeli	239.521	306.106	-	545.627
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(140.135)	-	-	(140.135)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(393)	-	-	(393)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**240.154**	**306.106**	**-**	**546.260**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2020 telah memadai dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2019 tidak diperlukan.

16. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2020			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 45)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	8.239	380.198
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	3.071	74.396
			443.284	11.310	454.594
Metode Nilai Wajar					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	13,22			565.245
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	4,01			146.457
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	3,67			120.480

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

		31 Desember 2020			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Nilai Wajar (lanjutan)					
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,63			78.560
Nium Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,29			48.255
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,88			31.437
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	2,44			28.580
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	8,01			7.970
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			221
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,80			135
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			2.091
					1.035.206
Total					1.489.800
Cadangan kerugian penurunan nilai					-
Bersih					**1.489.800**

		31 Desember 2019			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 45)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	5.811	377.770
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	2.880	74.205
			443.284	8.691	451.975

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

		31 Desember 2019			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Biaya					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	13,69			250.000
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,79			28.111
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97			7.978
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga keuangan nonbank	8,00			536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			220
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00			200
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,80			135
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana olahraga	0,64			50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8,33			50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75			35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana olahraga	0,24			25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Nonbank	0,03			20
PT Danareksa Finance	Lembaga keuangan	0,01			1
					293.379
Total					745.354
Cadangan kerugian penurunan nilai					(50)
Bersih					**745.304**

Pada tanggal 31 Desember 2020, semua penyertaan diklasifikasikan “Lancar”, sedangkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, semua penyertaan diklasifikasikan “Lancar” kecuali penyertaan yang dilakukan PT BRI Ventura Investama (entitas anak) pada PT Kendari Expressindo Bahari yang diklasifikasikan “Macet” dan telah dilakukan pencadangan penuh sebesar Rp50 sejak tahun 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penerimaan deviden adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
BRI		
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	-	362
PT Danareksa Investment Management	5.530	5.495
Entitas anak		
BRI Agro		
BPR Cinta Manis Agroloka	6	6
BPR Bungamayang Agroloka	5	6
PT Aplikanusa Lintasarta	11	27
Danareksa Sekuritas		
PT Pemeringkat Efek Indonesia	1.008	857
BRINS		
PT Reasuransi Maipark	24	-
Lain-lain	85	-
Total	**6.669**	**6.753**

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah cadangan kerugian nilai atas penyertaan saham yang dibentuk adalah RpNihil dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham yang dibentuk telah memadai.

17. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

	31 Desember 2020				
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi*)**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan					
Hak atas tanah	21.123.087	285.463	33.418	897	21.376.029
Bangunan	4.951.375	1.149.313	62.602	86.261	6.124.347
Kendaraan bermotor	2.378.102	115.583	119.229	-	2.374.456
Komputer dan mesin	9.660.755	573.132	103.482	41	10.130.446
Perlengkapan kantor	1.980.108	260.200	59.853	(41)	2.180.414
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	697.405	759.189	2.909	(86.261)	1.367.424
	44.075.680	3.142.880	381.493	897	46.837.964
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	2.041.008	499.491	26.659	-	2.513.840
Kendaraan bermotor	2.115.204	140.776	117.491	-	2.138.489
Komputer dan mesin	6.379.234	1.235.054	78.043	-	7.536.245
Perlengkapan kantor	1.541.912	180.688	43.040	-	1.679.560
Satelit	565.693	218.977	-	-	784.670
	12.643.051	2.274.986	265.233	-	14.652.804
Nilai buku - Bersih	**31.432.629**				**32.185.160**

*) Termasuk reklasifikasi tanah dari aset terbengkalai

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2019				
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi*)**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan					
Hak atas tanah	17.300.589	3.870.064	48.460	894	21.123.087
Bangunan	4.959.992	286.426	21.250	(273.793)	4.951.375
Kendaraan bermotor	2.284.879	115.754	22.531	-	2.378.102
Komputer dan mesin	8.286.786	1.413.248	39.279	-	9.660.755
Perlengkapan kantor	1.808.142	215.046	43.080	-	1.980.108
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	-	423.612	-	273.793	697.405
	37.925.236	6.324.150	174.600	894	44.075.680
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	1.785.676	257.157	1.825	-	2.041.008
Kendaraan bermotor	1.955.595	180.307	20.698	-	2.115.204
Komputer dan mesin	5.516.494	902.805	40.065	-	6.379.234
Perlengkapan kantor	1.405.897	174.382	38.367	-	1.541.912
Satelit	346.715	218.978	-	-	565.693
	11.010.377	1.733.629	100.955	-	12.643.051
Nilai buku - Bersih	**26.914.859**				**31.432.629**

*) Termasuk reklasifikasi tanah dari aset terbengkalai

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 termasuk juga nilai aset hak guna BRI dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal 1 Januari 2020	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir 31 Desember 2020**
Biaya Perolehan				
Hak guna tanah	32.123	1.295	33.418	-
Bangunan	407.761	432.621	26.469	813.913
Kendaraan bermotor	10.253	64.305	3.000	71.558
Komputer dan mesin	6.991	2.385	7.181	2.195
Perlengkapan kantor	15.252	19.221	16.853	17.620
	472.380	519.827	86.921	905.286
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	224.779	20.044	204.735
Kendaraan bermotor	-	25.174	1.803	23.371
Komputer dan mesin	-	979	190	789
Perlengkapan kantor	-	9.036	1.601	7.435
	-	**259.968**	**23.638**	**236.330**
Nilai buku - Bersih	**472.380**			**668.956**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Beban penyusutan Aset hak guna	**Beban bunga atas liabilitas sewa**	**Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek**
Hak guna tanah	-	-	193
Bangunan	224.779	6.750	190.637
Kendaraan bermotor	25.174	3.152	56.981
Komputer dan Mesin	979	103	15.376
Perlengkapan kantor	9.036	819	32.772
Total	**259.968**	**10.824**	**295.959**

Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki BRI adalah 2 (dua) tahun.

BRI juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. BRI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp2.274.986 dan Rp1.733.629 masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 37).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalisme, *force majeur* dan lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (pihak berelasi - Catatan 45) dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp14.361.967 dan Rp14.291.901 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar ASD176.000.000 (angka penuh) dan ASD192.000.000 (angka penuh) masing-masing polis asuransi tersebut berakhir pada tanggal 19 Juni 2021 dan 19 Juni 2020.

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI, adalah masing-masing sebesar Rp8.622.771 dan Rp7.743.856 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 1 April 2016, BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran hak atas tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” bagian 27 huruf e, dengan mempertimbangkan nilai buku tanah yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2016, maka pada tanggal 1 April 2019, BRI dan entitas anak telah melakukan penilaian kembali atas tanah hanya untuk memenuhi ketentuan Bapepam LK tersebut dan bukan untuk tujuan perpajakan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan laporan No. 00286/2.0160-00/PI/07/0218/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp8.285.841 ditandatangani oleh Nanang Rahayu.
2. KJPP Immanuel, Johnny & Rekan dengan laporan No. 00021T-W/PA/IMM-VI/2019 000101-104/0064-00/PI/07/0184/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp4.588.664 ditandatangani oleh Immanuel H. Sitompul.
3. KJPP Aksa Nelson & Rekan dengan laporan No. 00211/2.0026-00/PI/07/0179/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.630.648 ditandatangani oleh Aksa Nurdin.
4. KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dengan laporan No. 00233/2.0051-00/PI/07/0152/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.588.322 ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro.
5. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan dengan laporan No. 00056/2.0014-00/PI/07/0080/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp417.084 ditandatangani oleh Okky Danuza.
6. KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan dengan laporan No. 00078-81/2.0124.00/PI/07/0257/1V/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.825.260 ditandatangani oleh Setiawan.
7. KJPP Iwan Bachron & Rekan dengan laporan No. 000298/2.0047-05/PI/08/0500/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp101.851 ditandatangani oleh Bunga Budiarti.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah sebesar Rp3.310.210 dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap” dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.411.813, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp101.603, diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing adalah sebesar Rp3.864.762 dan Rp3.611.820.

Rincian aset dalam penyelesaian, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Akumulasi biaya	**Persentase penyelesaian**	**Tanggal estimasi penyelesaian**
Menara BRI Gatot Subroto	581.807	56,82%	30 Juni 2021
Gedung TI Tabanan	57.950	95,00%	28 Februari 2021
Gedung Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati	43.300	80,00%	31 Maret 2021
Lain-lain	684.367	Beragam	Beragam
Total	**1.367.424**		

	31 Desember 2019		
	Akumulasi biaya	**Persentase penyelesaian**	**Tanggal estimasi penyelesaian**
Menara BRI Gatot Subroto	400.860	47,39%	5 Maret 2021
Gedung TI Tabanan	57.950	95,00%	31 Januari 2020
Lain-lain	238.595	beragam	beragam
Total	**697.405**		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selain yang disebutkan di atas dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

18. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	4.180.805	1.197.686
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	3.870.918	2.215.420
Biaya dibayar di muka	3.255.686	2.584.867
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 12f)	3.161.845	2.055.609
Piutang bunga:		
Efek-efek	2.581.705	1.385.919
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	13.875
Lain-lain	43.973	102.980
Aset reasuransi	1.383.245	1.136.849
Aset *Ijarah*	1.094.012	1.597.231
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	371.577	248.037
Persekot intern	386.457	314.316
Persediaan kantor	272.336	278.242
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	250.444	163.981
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah	89.907	61.870
Estimasi tagihan pajak	72.647	129.309
Piutang premi	71.467	193.573
Agunan yang diambil alih	67.211	65.104
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	59.993	86.007
Uang muka pajak	22.720	1.678.510
Lain-lain	4.921.468	3.422.977
	26.158.416	18.932.362
Mata uang asing		
Piutang Bunga:		
Efek-efek	939.757	405.285
Lainnya	54.437	65.380
Lain-lain	157.707	684.715
	1.151.901	1.155.380
Total	27.310.317	20.087.742
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(114.361)	(263.316)
Bersih	**27.195.956**	**19.824.426**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Titipan *advance payment*	4.323.171	2.390.341
Titipan ATM dan kartu kredit	649.981	92.068
Titipan setoran pajak	581.816	614.123
Titipan asuransi	166.245	172.414
Titipan kerjasama pihak ketiga	81.020	91.363
Titipan pinjaman kelolaan	63.836	129.494
Titipan setoran kliring	29.952	30.224
Titipan pengiriman uang	22.009	22.169
Penampungan dana bantuan sosial	7.561	7.588
Lain-lain	5.055.436	3.569.637
	10.981.027	7.119.421
Mata uang asing		
Titipan *advance payment*	164.517	75.525
Titipan setoran pajak	27.015	37.775
Titipan ATM dan kartu kredit	335	120
Lain-lain	673.016	316.471
	864.883	429.891
Total	**11.845.910**	**7.549.312**

20. GIRO

Giro terdiri atas:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		93.121.787		94.213.418
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	2.275.152.143	31.965.888	1.791.170.525	24.865.925
Dolar Singapura	173.906.682	1.844.486	32.035.467	330.447
Renminbi	77.911.961	167.531	25.014.864	49.884
Euro Eropa	7.972.675	137.405	63.590.469	990.142
Dolar Australia	2.003.355	21.541	938.028	9.123
Yen Jepang	58.215.378	7.915	162.560.057	20.777
Dirham Uni Emirat Arab	1.675.059	6.407	30.025	113
Pound Sterling Inggris	268.771	5.110	8.855	161
Dolar Hong Kong	832.026	1.508	2.117.497	3.775
Ringgit Malaysia	2.904	10		-
Riyal Arab Saudi		-	697	3
		34.157.801		26.270.350
		127.279.588		120.483.768
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah		32.451.555		25.708.146
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	1.797.654.233	25.257.042	1.433.788.505	19.905.665
Euro Eropa	5.156.992	88.878	127.503.515	1.985.307
Yen Jepang	545.478.053	74.166	5.815.265.960	743.249
		25.420.086		22.634.221
		57.871.641		48.342.367
Total		**185.151.229**		**168.826.135**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. GIRO (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah	2,85%	3,17%
Mata uang asing	0,96	0,54

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp4.070.930 dan Rp901.523 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

21. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Simpedes		285.960.307		247.723.324
Britama		159.291.579		143.989.658
Lain-lain		11.811.994		11.369.573
		457.063.880		403.082.555
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	164.691.567	2.313.917	134.469.831	1.866.777
Yen Jepang	1.866.515.375	253.781	10.302.845	1.317
Dolar Singapura	7.239.262	76.781	7.483.754	77.195
Euro Eropa	2.106.284	36.301	2.586.917	40.280
Renminbi	10.340.053	22.234	30.373.854	60.571
Pound Sterling Inggris	703.622	13.378	805.413	14.689
Dolar Australia	1.085.297	11.670	1.053.637	10.247
Riyal Arab Saudi	333.869	1.250	35.553	132
Dolar Hong Kong	51.351	93	12.423	22
Dirham Uni Emirat Arab	7.475	29	7.610	23
		2.729.434		2.071.253
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat		-	27.024	375
		2.729.434		2.071.628
		459.793.314		405.154.183
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Britama		310.246		179.771
Simpedes		12.281		35
Lain-lain		318.854		9.988
		641.381		189.794
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	1.342.362	18.860		-
Pound Sterling Inggris	1.193	23		-
Dolar Singapura	888	9		-
Renminbi	571	1	691	1
Dolar Australia		-	192	2
Euro Eropa		-	6.003	93
		18.893		96
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat		-	800.756	11.116
Dolar Singapura		-	28.485	294
		18.893		11.506
		660.274		201.300
Total		**460.453.588**		**405.355.483**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. TABUNGAN (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah	0,69%	0,85%
Mata uang asing	0,31	0,37

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp126.223 dan Rp97.356 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

22. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		291.983.683		264.159.347
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	3.869.574.677	54.367.525	4.298.213.762	60.593.647
Dolar Singapura	146.201.170	1.550.636	31.602.312	325.979
Renminbi	265.834.697	571.612	6.261.891	12.487
Dolar Australia	28.948.083	311.263	25.786.449	250.783
Euro Eropa	12.488.168	215.226	6.089.425	94.816
Pound Sterling Inggris	1.314.370	24.989	1.801.080	32.848
Yen Jepang	22.694.000	3.086	9.957.500	1.273
Riyal Arab Saudi	5.001	19		-
Franc Swiss		-	98.435	1.411
		57.044.356		61.313.244
		349.028.039		325.472.591
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah		42.349.414		58.269.545
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	2.484.394.914	34.905.750	2.116.001.446	29.375.808
Euro Eropa	6.649.000	114.592	6.694.290	104.234
Dolar Singapura	165.508	1.755		-
Yen Jepang		-	10.956.500	1.400
Pound Sterling Inggris		-	4.126	75
		35.022.097		29.481.517
		77.371.511		87.751.062
Total		**426.399.550**		**413.223.653**

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deposits on call	14.656.454	11.503.294
Deposito		
1 bulan	105.524.880	145.564.465
3 bulan	126.359.394	86.529.286
6 bulan	21.335.653	14.502.228
12 bulan	12.391.875	4.974.516
Lebih dari 12 bulan	11.715.427	1.085.558
	291.983.683	264.159.347

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
Deposits on call	6.721.836	6.146.307
Deposito		
1 bulan	15.552.082	18.787.941
3 bulan	9.877.749	9.477.673
6 bulan	7.114.117	9.355.188
12 bulan	17.505.065	16.772.051
Lebih dari 12 bulan	273.507	774.084
	57.044.356	61.313.244
	349.028.039	325.472.591
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Deposits on call	5.298.872	4.153.045
Deposito		
1 bulan	18.880.984	18.344.766
3 bulan	15.654.291	11.695.650
6 bulan	1.079.504	519.383
12 bulan	1.435.763	6.112.201
Lebih dari 12 bulan	-	17.444.500
	42.349.414	58.269.545
Mata uang asing		
Deposits on call	835.828	1.264.270
Deposito		
1 bulan	13.410.028	21.323.553
3 bulan	7.990.114	6.081.265
6 bulan	10.866.152	492.701
12 bulan	1.257.681	319.728
Lebih dari 12 bulan	662.294	-
	35.022.097	29.481.517
	77.371.511	87.751.062
Total	**426.399.550**	**413.223.653**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah	5,61%	6,71%
Mata uang asing	2,24	2,54

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah sebesar Rp460.958 dan Rp233.197 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, selama tahun 2020 telah dilakukan penempatan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Periode penempatan dana tahap I sebesar Rp1.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 3,42% dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 25 September 2020.
- Periode penempatan dana tahap II sebesar Rp6.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 2,84% dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021.

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call		13.616.500		8.507.000
Inter-bank call money		4.715.000		2.486.648
Deposito berjangka		506.000		1.042.058
Giro		348.000		297.280
Tabungan		30.720		9.148
		19.216.220		12.342.134
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	141.000.000	1.981.050	304.000.000	4.220.280
Deposito berjangka	30.000.000	421.500	30.000.000	416.476
Giro	23.442.800	329.371	17.463.600	242.438
		2.731.921		4.879.194
Dolar Singapore				
Inter-bank call money	52.413.600	555.908		-
		555.908		-
		22.504.049		17.221.328
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Giro		152.327		16.876
Inter-bank call money		-		640.000
		152.327		656.876
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	80.400.000	1.129.620	6.600.000	91.625
		1.281.947		748.501
Total		**23.785.996**		**17.969.829**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah		Dolar Amerika Serikat	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Inter-bank call money	3,77%	7,40%	0,07%	0,02%
Deposits on call	4,46	5,88	-	-
Deposito Berjangka	4,64	6,00	0,39	0,32
Giro	1,33	1,44	0,02	0,07
Tabungan	1,64	1,48	-	-

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	13.616.500	-	-	13.616.500
Inter-bank call money	4.715.000	-	-	4.715.000
Deposito berjangka	478.000	28.000	-	506.000
Giro	348.000	-	-	348.000
Tabungan	30.720	-	-	30.720
	19.188.220	28.000	-	19.216.220
Mata Uang Asing				
Inter-bank call money	2.536.958	-	-	2.536.958
Deposito berjangka	-	421.500	-	421.500
Giro	329.371	-	-	329.371
	2.866.329	421.500	-	3.287.829
	22.054.549	449.500	-	22.504.049
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Giro	152.327	-	-	152.327
Mata Uang Asing				
Inter-bank call money	1.129.620	-	-	1.129.620
	1.281.947	-	-	1.281.947
Total	**23.336.496**	**449.500**	**-**	**23.785.996**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2019			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	8.507.000	-	-	8.507.000
Inter-bank call money	2.486.648	-	-	2.486.648
Giro	297.280	-	-	297.280
Deposito berjangka	42.108	999.950	-	1.042.058
Tabungan	9.148	-	-	9.148
	11.342.184	999.950	-	12.342.134
Mata Uang Asing				
Inter-bank call money	3.179.093	1.041.187	-	4.220.280
Deposito berjangka	416.476	-	-	416.476
Giro	242.438	-	-	242.438
	3.838.007	1.041.187	-	4.879.194
	15.180.191	2.041.137	-	17.221.328
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Inter-bank call money	640.000	-	-	640.000
Giro	16.876	-	-	16.876
	656.876	-	-	656.876
Mata Uang Asing				
Inter-bank call money	91.625	-	-	91.625
	748.501	-	-	748.501
Total	**15.928.692**	**2.041.137**	**-**	**17.969.829**

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	31 Desember 2020				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0084	28 Des 2020	04 Jan 2021	2.500.000	5.288.593	5.290.355
FR0086	30 Des 2020	06 Jan 2021	2.500.000	5.065.403	5.065.965
FR0053	19 Des 2020	05 Jan 2021	2.500.000	4.993.115	4.994.225
FR0086	29 Des 2020	29 Jan 2021	2.500.000	2.295.707	2.296.198
FR0061	14 Des 2020	14 Jan 2021	2.000.000	1.881.568	1.884.944
FR0087	17 Des 2020	15 Jan 2021	1.869.300	1.869.300	1.872.062
FR0053	14 Des 2020	14 Jan 2021	1.000.000	928.450	930.116
FR0086	21 Des 2020	21 Jan 2021	1.000.000	915.750	916.717
FR0086	28 Des 2020	11 Jan 2021	1.000.000	911.235	911.523
FR0086	23 Des 2020	22 Jan 2021	908.999	908.999	909.769
FR0063	16 Des 2020	15 Jan 2021	750.000	696.279	697.382

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
Bank lain (lanjutan)					
Obligasi Pemerintah (lanjutan)					
FR0084	28 Des 2020	25 Jan 2021	500.000	529.038	529.217
FR0084	28 Des 2020	11 Jan 2021	500.000	529.038	529.216
FR0053	07 Mei 2019	15 Jul 2021	550.000	519.218	519.218
FR0087	16 Des 2020	15 Jan 2021	500.000	465.256	465.992
FR0086	18 Des 2020	18 Jan 2021	458.889	458.889	459.519
FR0086	18 Des 2020	08 Jan 2021	458.889	458.889	459.511
FR0063	07 Nov 2017	15 Jun 2021	500.000	446.090	446.090
FR0053	06 Sep 2016	15 Mei 2023	450.000	437.025	437.025
FR0053	09 Sep 2016	15 Jul 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Feb 2017	15 Jul 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	06 Sep 2016	15 Jul 2021	300.000	344.315	344.315
FR0034	07 Mei 2019	15 Jun 2021	300.000	313.520	314.480
FR0061	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0086	28 Des 2020	06 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
FR0086	28 Des 2020	07 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
FR0073	16 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	213.904	214.238
FR0053	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.673	185.987
FR0086	30 Des 2020	14 Jan 2021	200.000	183.769	183.788
FR0086	29 Des 2020	12 Jan 2021	200.000	183.657	183.695
FR0086	28 Des 2020	05 Jan 2021	200.000	182.247	182.305
			25.864.077	32.829.079	32.848.178
Mata uang asing					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	30 Des 2020	30 Mar 2021	1.475.250	1.404.438	1.404.456
FRI0124	28 Des 2020	29 Mar 2021	1.475.250	1.387.208	1.387.260
FR0061	03 Jun 2020	15 Mei 2022	842.000	703.226	703.226
RI0126	23 Des 2020	23 Mar 2021	702.500	669.101	669.168
FR0043	14 Jan 2019	15 Jul 2022	500.000	447.038	447.038
RI0126	28 Des 2020	28 Jan 2021	351.250	380.765	380.774
RI0521	29 Des 2020	29 Mar 2021	351.250	326.603	326.610
RI0124	30 Des 2020	30 Mar 2021	210.750	225.349	225.351
RI0521	25 Nov 2020	25 Jan 2021	140.500	136.373	136.430
RI0230	30 Des 2020	23 Jun 2021	140.500	130.090	130.092
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	114.023	114.023
SIGB 0625	11 Des 2020	11 Feb 2021	106.062	112.635	112.654
RI10223	23 Okt 2020	13 Okt 2021	98.350	105.662	105.786
US TREASURY 0526	30 Des 2020	29 Jan 2021	70.250	74.676	74.677
RI0423	23 Okt 2020	13 Okt 2021	70.250	70.742	70.824
RI0428	30 Des 2020	23 Jun 2021	70.250	69.738	69.740
US TREASURY 0623	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.987	69.008
US TREASURY 0523	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.708	68.729
US TREASURY 0623	30 Des 2020	29 Jan 2021	56.200	56.341	56.341
			6.951.112	6.551.703	6.552.187
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 27	18 Des 2020	19 Jan 2021	351.250	368.607	368.640
INDOIS 22	23 Okt 2020	13 Okt 2021	56.200	55.513	55.578
			407.450	424.120	424.218
			7.358.562	6.975.823	6.976.405

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak berelasi (Catatan 45)					
Rupiah					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	17 Des 2020	15 Jan 2021	483.663	467.324	468.015
FR0063	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.760	186.074
			683.663	653.084	654.089
Total			**33.906.302**	**40.457.986**	**40.478.672**

	31 Desember 2019				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0081	23 Des 2019	6 Jan 2020	3.500.000	3.322.730	3.326.629
FR0081	27 Des 2019	10 Jan 2020	3.100.000	2.949.443	2.951.172
FR0061	30 Des 2019	13 Jan 2020	3.000.000	2.934.310	2.934.740
FR0061	23 Des 2019	20 Jan 2020	2.500.000	2.435.320	2.438.177
FR0061	31 Des 2019	14 Jan 2020	1.000.000	2.021.050	2.021.050
FR0063	27 Des 2019	3 Jan 2020	500.000	1.966.830	1.967.977
FR0081	18 Des 2019	15 Jan 2020	2.000.000	1.892.090	1.895.698
FR0063	27 Des 2019	24 Jan 2020	2.000.000	1.870.865	1.871.965
FR0063	27 Des 2019	27 Mar 2020	2.000.000	1.870.860	1.871.964
FR0064	30 Des 2019	6 Jan 2020	2.000.000	1.787.480	1.787.741
FR0061	23 Des 2019	23 Mar 2020	1.000.000	974.128	975.275
FR0082	30 Des 2019	30 Mar 2020	1.000.000	959.925	960.066
FR0059	31 Des 2019	7 Jan 2020	1.000.000	954.366	954.366
FR0081	18 Des 2019	2 Jan 2020	1.000.000	946.043	947.843
FR0063	31 Des 2019	7 Jan 2020	1.000.000	936.699	936.699
FR0063	26 Des 2019	23 Jan 2020	1.000.000	934.186	934.872
FR0064	31 Des 2019	7 Jan 2020	1.000.000	894.380	894.380
FR0053	7 Mei 2019	15 Jul 2021	550.000	519.218	519.218
FR0053	31 Des 2019	31 Mar 2020	500.000	511.454	511.454
FR0074	31 Des 2019	28 Jan 2020	500.000	485.623	485.623
FR0059	30 Des 2019	27 Jan 2020	500.000	476.547	476.617
FR0081	18 Des 2019	18 Mar 2020	500.000	473.022	473.927
FR0056	30 Des 2019	30 Jan 2020	465.000	448.842	448.910
FR0063	7 Nov 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0053	6 Sep 2016	15 Jul 2021	450.000	437.025	437.025
FR0053	9 Sep 2016	15 Jul 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Feb 2017	15 Jul 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	06 Sep 2016	15 Jun 2021	300.000	344.315	344.315
FR0034	07 Mei 2019	15 Jun 2021	300.000	313.520	313.520
FR0061	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0056	30 Des 2019	28 Jan 2020	315.000	304.054	304.100
FR0056	30 Des 2019	29 Jan 2020	315.000	304.054	304.100
FR0063	26 Des 2019	9 Jan 2020	200.000	176.590	176.717
FR0031	7 Mei 2019	15 Nov 2020	150.000	150.264	157.566
FR0074	20 Des 2019	20 Jan 2020	100.000	88.650	88.796
FR0074	23 Des 2013	6 Jan 2020	50.000	44.408	44.458
			35.513.000	36.251.793	36.280.462

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2019				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
Bank lain					
Sukuk Berharga Syariah Negara					
PBS016 SL	20 Des 2019	3 Jan 2020	3.000.000	2.862.070	2.866.679
PBS006 SL	20 Des 2019	17 Jan 2020	2.000.000	1.952.416	1.955.566
PBS014 SL	26 Des 2019	26 Mar 2020	750.000	1.490.974	1.492.073
PBS014 SL	20 Des 2019	17 Jan 2020	1.000.000	948.110	949.640
PBS0002 SL	20 Des 2019	20 Mar 2020	1.000.000	942.469	943.995
PBS0002 SL	20 Des 2019	17 Jan 2020	1.000.000	942.469	943.990
PBS0002 SL	26 Des 2019	23 Jan 2020	250.000	489.087	489.446
PBS016	28 Okt 2019	27 Jan 2020	150.000	141.720	143.075
			9.150.000	9.769.315	9.784.464
			44.663.000	46.021.108	46.064.926
Dolar Amerika Serikat					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0043	14 Jan 2019	15 Jul 2022	500.000	560.986	561.064
RI1023	20 Des 2019	20 Mar 2020	416.475	418.532	418.832
RI0124	20 Des 2019	13 Nov 2020	424.805	416.707	417.019
RI1023	23 Des 2019	23 Mar 2020	428.275	415.985	416.207
RI0521	27 Des 2019	27 Mar 2020	416.475	391.320	391.426
RI0423	27 Des 2019	27 Mar 2020	416.475	388.696	388.806
RI0124	19 Des 2019	30 Mar 2020	277.650	289.275	289.487
RI0521	22 Nov 2019	22 Jan 2020	208.238	195.342	195.784
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	147.093	147.093
RI0929	30 Des 2019	30 Mar 2020	138.825	125.165	125.174
UST-121	24 Jun 2019	24 Jan 2020	97.178	97.243	98.460
RI1124	30 Des 2019	30 Mar 2020	83.295	77.446	77.452
RI0124	27 Des 2019	27 Mar 2020	69.413	72.478	72.497
RI0924	27 Des 2019	27 Mar 2020	69.413	68.433	68.451
RI0422	27 Des 2019	27 Mar 2020	69.413	65.061	65.078
RI0929	31 Des 2019	30 Mar 2020	69.413	62.576	62.576
USD-22	24 Jun 2019	24 Jan 2020	41.648	42.080	42.606
			3.876.991	3.834.418	3.838.012
Total			**48.539.991**	**49.855.526**	**49.902.938**

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Obligasi Berkelanjutan I BRI		
Tahap I Tahun 2015		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.078 pada tanggal 31 Desember 2019	-	1.395.705
Tahap II Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp53 dan Rp569 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.647.705	2.642.129

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)		
Tahap III Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp54 dan Rp181 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	681.740	681.409
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.287 dan Rp2.661 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.944.204	2.945.123
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.206 dan Rp1.174 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.224.294	3.947.686
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.793 dan Rp2.045 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	4.146.745	5.127.498
Tahap IV Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.611 dan Rp1.687 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.430.539	2.430.633
Negotiable Certificate Deposits Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp22.984 pada tanggal 31 Desember 2020	827.016	-
Obligasi Berkelanjutan III BRI		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp5.421 dan Rp7.778 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	4.218.115	4.956.017
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp351 dan Rp789 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	218.051	478.833
MTN I BRI Finance Tahun 2019		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp436 dan Rp1.040 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	158.497	208.511
	20.496.906	24.813.544

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dolar Amerika Serikat		
Senior Unsecured Notes Due 2023 (*Global Bond* BRI) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp27.504 dan Rp36.290 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	6.997.936	6.904.960
Senior Unsecured Notes Due 2024 (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp30.752 dan Rp38.917 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	6.994.249	6.902.333
	13.992.185	13.807.293
Total	**34.489.091**	**38.620.837**

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp70.079 dan Rp31.212.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 19 Januari 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)

Pada tanggal 4 Mei 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000, Rp925.000, Rp1.420.000, Rp808.000, Rp1.018.500, Rp1.212.000 dan Rp2.437.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B dan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000, Rp.964.000, Rp1.131.000 dan Rp1.743.500 dan Rp980.500 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 7 November 2019, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan III BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dengan nilai Rp737.850 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi I BRI Agro dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* AA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro adalah BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Obligasi I BRI Agro Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp261.000 telah dilunasi oleh BRI Agro pada tanggal jatuh temponya.

e) *Senior Unsecured Notes Due 2023* (*Global Bond* BRI)

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, *Senior Unsecured Notes Due 2023* (*Global Bond* BRI) Tahun 2018 memperoleh *rating* Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

f) *Senior Unsecured Notes Due 2024* (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019)

Pada tanggal 28 Maret 2019, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

f) *Senior Unsecured Notes Due 2024* (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, *Senior Unsecured Notes Due 2024* (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) memperoleh *rating* BAA2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

g) MTN I BRI Finance Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, BRI Finance menerbitkan MTN I BRI Finance Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp300.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 13 Maret 2020. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA-.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, MTN I BRI Finance Tahun 2019 memperoleh peringkat AA- dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing rasio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000 juta, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

h) *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juni 2020, BRI menerbitkan *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut :

- Seri A : Nilai pokok sebesar Rp630.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.
- Seri B : Nilai pokok sebesar Rp520.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,30% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.
- Seri C : Nilai pokok sebesar Rp850.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021.

Penerimaan neto dari penerbitan NCD BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Seri A dan B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp630.000 dan Rp520.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.656	15.958
Pinjaman lainnya	12.273	12.304
Pinjaman lainnya	249.630	150.000
	277.559	178.262
Mata uang asing		
Pinjaman sindikasi *club loan* setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	20.908.211	7.822.864
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	492.892	589.260
Pinjaman dari China Development Bank Corporation setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	10.787.896
Pinjaman lainnya	13.402.921	10.465.510
	34.804.024	29.665.530
	35.081.583	29.843.792
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
Pinjaman dari		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	852.352	777.979
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.731	300.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.319	-
	887.402	1.077.979
Total	**35.968.985**	**30.921.771**

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	71	85
> 3 bulan - 1 tahun	256.092	156.763
> 1 tahun - 5 tahun	7.802	7.802
> 5 tahun	13.594	13.612
	277.559	178.262

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	3.792.929	-
> 1 bulan - 3 bulan	4.080.807	3.104.493
> 3 bulan - 1 tahun	14.786.730	7.829.682
> 1 tahun - 5 tahun	12.143.558	7.357.234
> 5 tahun	-	11.374.121
	34.804.024	29.665.530
	35.081.583	29.843.792
Pihak berelasi (Catatan 45)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	852.352	777.979
> 3 bulan - 1 tahun	17.731	300.000
> 5 tahun	17.319	-
	887.402	1.077.979
Total	**35.968.985**	**30.921.771**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan*

Pada tanggal 30 September 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (*agent*), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Bank of America N.A., sebesar ASD50.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
   - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000,
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
   - BNP Paribas sebesar ASD20.000.000,

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi *club loan* (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (*agent*), yang terbagi atas (lanjutan):

a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah (lanjutan):
   - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000, dan
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000.
b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
   - BNP Paribas sebesar ASD30.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000,
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000,
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD15.000.000.
c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000,
   - DBS Bank Ltd., sebesar ASD10.000.000,
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000, dan
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* BRI. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi *club loan* (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa c*lub loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (agent), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
   - Commerzbank AG, sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD10.000.000,
   - PT Bank HSBC Indonesia, sebesar ASD10.000.000,
   - Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD55.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD22.500.000,
   - Wells Fargo Bank, N.A., cabang London sebesar ASD52.500.000.

b. Fasilitas B sebesar ASD235.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Cathay United Bank, sebesar ASD30.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD10.000.000,
   - Commerzbank AG, sebesar ASD30.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD30.000.000,
   - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD20.000.000,
   - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD32.500.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD32.500.000.

c. Fasilitas C sebesar ASD265.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Cathay United Bank, sebesar ASD20.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Hong Kong sebesar ASD20.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD36.000.000,
   - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
   - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
   - Standard Chartered Bank, cabang Singapura ASD63.500.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD25.000.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD20.500.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* BRI. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi *club loan* (lanjutan)

Pada tanggal 14 Agustus 2020, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh Citicorp International Limited (agent), penarikan yang telah dilakukan terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - MUFG Bank Ltd sebesar ASD32.000.000,
   - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD86.000.000,
   - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000,
   - CTBC Bank Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000,
   - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD22.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD20.000.000.

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* sebesar ASD800.000.000 (angka penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (agent), sebagai berikut:

a. Fasilitas A sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - MUFG Bank Ltd sebesar ASD48.000.000,
   - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD129.000.000,
   - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD30.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
   - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD33.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD27.000.000,
   - Wells Fargo Bank, sebesar ASD900.000,
   - The Hyakugo Bank, Ltd., sebesar ASD600.000,
   - PT Bank Permata Tbk, sebesar ASD600.000,
   - DZ Bank AG, Deutsche Zentral, sebesar ASD900.000.

b. Fasilitas B sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD20.000.000,
   - BNP Paribas, cabang Singapura sebesar ASD50,000,000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD10,000,000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
   - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD70.000.000.

c. Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - China Development Bank, sebesar ASD150.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
   - Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebesar ASD50.000.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000,
   - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

c) Pinjaman dari China Development Bank Corporation

Pada tanggal 16 September 2015, BRI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari China Development Bank Corporation untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche* A senilai ASD700.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar ASD223.953.383 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar ASD476.046.617 (angka penuh). Pinjaman ini telah dilunasi oleh BRI tanggal 28 Februari 2020.
- Fasilitas *Tranche* B senilai RMB1.906.080.000 (ekuivalen ASD300.000.000) (angka penuh), dengan suku bunga SHIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar RMB609.818.661 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar RMB1.296.261.339 (angka penuh). Pinjaman ini telah dilunasi oleh BRI tanggal 28 Februari 2020.

Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025 (telah dilunasi oleh BRI tanggal 28 Februari 2020). Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche* A, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD46.666.667 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche* B, jumlah angsuran pokok adalah sebesar RMB127.072.000 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%,
- Rasio modal inti utama (Core Tier 1) minimum 5%,
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 6,5%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%,
- Rasio *Return on Assets* (ROA) minimum 0,6%.

d) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche Banque Publique d'Investissement (*BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas *Tranche Hermes* senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman dari BNP Paribas (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche BPI*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

e) Pinjaman bilateral

Pinjaman dari Bank of America

Pada tanggal 2 Desember 2018, BRI (Kantor Cabang Singapura) dan Bank of America menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI Kantor Cabang Singapura. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

f) Pinjaman lainnya

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia		12.273		12.304
PT Bank Victoria Internasional		249.630		150.000
		261.903		162.304
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
BNP Paribas	159.453.336	2.240.319	70.565.146	979.621
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	145.100.000	2.039.486	50.000.000	694.125
The Bank of New York Mellon	100.000.000	1.405.000	75.000.000	1.041.188
UOB Singapore	55.000.000	772.750		-
Wells Fargo Bank, N.A.	50.000.000	702.500	75.000.000	1.041.188
Bank of Montreal	50.000.000	702.500	100.000.000	1.388.250
Citibank, N.A	50.000.000	702.500		-
PT Bank UOB	50.000.000	702.500		-
MUFG Singapore	50.000.000	702.500		-
Standard Chartered Bank	45.000.000	632.250		-
PT Bank CTBC Indonesia	22.416.682	316.188	28.000.000	388.710
JP Morgan	10.238.969	143.858		-
PT Bank BPTN Tbk	9.870.000	139.216	10.000.000	138.825
DBS Bank		-	136.298.348	1.892.160
PT Bank Sumitomo Mitsui		-	9.000.000	124.943
Bank of America, N.A.		-	50.000.000	694.125
United Overseas Bank		-	50.000.000	694.125
Co Bank USA		-	100.000.000	1.388.250
		11.201.567		10.465.510
Dolar Singapura				
Wells Fargo Bank, N.A.	104.438.000	1.107.688		-
Chinatrust Commercial Bank Singapore Branch	66.100.000	701.068		-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	37.016.000	392.598		-
		2.201.354		-
		13.402.921		10.465.510
Total		**13.664.824**		**10.627.814**

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah marjin tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI dan entitas anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	1.796.137	-
Garansi yang diterbitkan	935.042	316.749
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	105.426	135.313
Mata uang asing		
Garansi yang diterbitkan	633.465	157.431
Fasilitas kredit yang belum ditarik	101.696	-
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	109.943	-
Total	**3.681.709**	**609.493**

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Garansi yang diterbitkan		11.789.349		7.613.617
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.261.016		1.033.124
		13.050.365		8.646.741
Mata uang asing				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	624.841.365	8.779.022	913.222.229	12.677.808
Euro Eropa	105.080.484	1.811.002	65.933.199	1.026.620
Dolar Australia	49.045	527		-
Ringgit Malaysia		-	147.970	1.526
		10.590.551		13.705.954
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	143.235.231	2.012.455	119.324.459	1.656.522
Euro Eropa	8.691.602	149.795	16.113.985	250.905
Renminbi	86.683.075	186.391	52.156.933	104.010
Yen Jepang	698.184	94.929	105.297.059	13.458
Pound Sterling Inggris	838.999	15.951	29.249	533
Dolar Singapura	1.401.751	14.867	400.561	4.132
Ringgit Malaysia		317		-
Dolar Australia		-	278.000	2.704
Franc Swiss		-	611.800	8.771
		2.474.705		2.041.035
		13.065.256		15.746.989
		26.115.621		24.393.730

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik) (lanjutan):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah				
Garansi yang diterbitkan		12.253.235		11.801.291
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.332.481		805.645
		13.585.716		12.606.936
Mata uang asing				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	653.483.434	9.181.442	806.266.176	11.192.990
Yen Jepang	3.057.747.792	415.747	2.678.962.922	342.398
Ringgit Malaysia	98.782.000	343.877	87.500.000	296.780
Euro Eropa	4.653.595	80.202	1.752.890	27.294
Baht Thailand	49.744.000	23.285	124.360.000	57.847
Dolar Kanada	620.000	6.808	1.240.000	13.194
		10.051.361		11.930.503
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	257.485.694	3.617.674	156.824.774	2.177.120
Euro Eropa	12.096.427	208.475	17.383.431	270.671
Yen Jepang	514.612.202	69.968	905.416.752	115.721
Pound Sterling Inggris	396.139	7.532	886.342	16.165
Dolar Singapura	220.504	2.339		-
		3.905.988		2.579.677
		13.957.349		14.510.180
		27.543.065		27.117.116
Total		53.658.686		51.510.846
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.783.876)		(609.493)
Bersih		**51.874.810**		**50.901.353**

c) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Lancar	177.122.324	178.319.908
Dalam perhatian khusus	860.669	2.801.148
Kurang lancar	30.199	273.028
Diragukan	753.424	4.267
Macet	68.761	168.625
Total	178.835.377	181.566.976
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.681.709)	(609.493)
Bersih	**175.153.668**	**180.957.483**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2020			
	Stage1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	6.297.120	157.646	-	6.454.766
Nilai tercatat awal dengan prinsip Syariah	4.715	-	-	4.715
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.029.897)	-	-	(1.029.897)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	10.496.419	372.705	4.396	10.873.520
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(7.257.499)	(157.646)	-	(7.415.145)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	76.495	-	-	76.495
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	9.736	-	-	9.736
Nilai tercatat akhir	**8.597.089**	**372.705**	**4.396**	**8.974.190**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	135.313
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	34.803
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	22.917	147.199	-	170.116
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(7.107)	-	-	(7.107)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	77.224	18.421	4.396	100.041
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(16.918)	(31.230)	-	(48.148)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	211	256	-	467
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**76.327**	**134.646**	**4.396**	**215.369**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1-** Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	***Stage* 2-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	***Stage* 3-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	43.952.185	789.582	103.666	44.845.433
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	205.932	-	-	205.932
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	50.049	1.622.054	-	1.672.103
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	20.319.890	-	-	20.319.890
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(22.853.295)	(896.841)	(102.367)	(23.852.503)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.330.699	-	-	1.330.699
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	162.942	-	-	162.942
Nilai tercatat akhir	**43.168.402**	**1.514.795**	**1.299**	**44.684.496**

	31 Desember 2020			
	***Stage* 1-** Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	***Stage* 2-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	***Stage* 3-** Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	472.244
Saldo awal tahun dengan prinsip syariah	-	-	-	1.936
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	393.390
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	186.453	577.451	103.666	867.570
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(105.935)	(21.301)	-	(127.236)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.542.653	396.989	-	1.939.642
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(463.057)	(47.277)	(102.367)	(612.701)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(238.746)	(261.686)	-	(500.432)
Mutasi kerugian kredit ekspektasian dengan prinsip syariah	1.664	-	-	1.664
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**923.032**	**644.176**	**1.299**	**1.568.507**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	91.702.174	39.578.171	65.279	131.345.624
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	145.544
Pengalihan ke				
Stage 1	1.763.691	(1.723.453)	(40.238)	-
Stage 2	(1.015.757)	1.046.973	(31.216)	-
Stage 3	(215.615)	(126.872)	342.487	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.864.242)	(981.600)	(13.273)	(2.859.115)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	19.715.413	1.357.890	520.174	21.593.477
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(4.579.841)	(22.347.746)	(140.751)	(27.068.338)
Penghapusbukuan	(10.817)	(171.570)	(163.163)	(345.550)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.890.132	2.007	2	1.892.141
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	472.908
Nilai tercatat akhir	**107.385.138**	**16.633.800**	**539.301**	**125.176.691**

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Saldo awal tahun dengan prinsip syariah	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 52)	-	-	-	1.084.883
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	435.781	516.097	133.005	1.084.883
Pengalihan ke				
Stage 1	43.602	(37.871)	(5.731)	-
Stage 2	(7.669)	16.507	(8.838)	-
Stage 3	(1.813)	(4.601)	6.414	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(91.044)	169.782	32.281	111.019
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	977.562	326.046	292.297	1.595.905
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(591.133)	-	(302.641)	(893.774)
Penghapusbukuan	(298)	(1.031)	(3.769)	(5.098)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	4.855	42	1	4.898
Mutasi kerugian kredit ekspektasian dengan prinsip syariah	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**769.843**	**984.971**	**143.019**	**1.897.833**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2019
Saldo awal tahun	1.222
Penyisihan (pembalikan) beban estimasi kerugian selama tahun berjalan	608.271
Saldo akhir	609.493

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara kolektif dan individual dengan menggunakan bukti objektif.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.600 dan Rp1.936 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memadai.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Cadangan Bonus dan Insentif	3.505.408	5.129.483
Cadangan atas program imbalan jangka panjang bagi pekerja (Catatan 43)	6.552.009	5.532.798
Cadangan khusus PHK (Qonun)	339.784	-
Total	**10.397.201**	**10.662.281**

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja meliputi program pensiun imbalan pasti, program tunjangan hari tua dan program imbalan jangka panjang lain (Program penghargaan tanda jasa, cuti besar, BPJS kesehatan pasca kerja dan manfaat lain dana manfaat tambahan) sesuai dengan kebijakan BRI dan entitas anak yang dihitung sesuai dengan perhitungan aktuaris independen.

29. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
Liabilitas manfaat polis masa depan	6.530.727	5.865.551
Liabilitas kontrak investasi	3.145.743	1.691.392
Premi yang belum merupakan pendapatan	1.213.923	1.469.235
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 46b)	1.141.920	1.145.664
Utang bunga	1.078.530	1.471.486
Estimasi liabilitas klaim	268.710	217.763
Bagi hasil yang masih harus dibayar	178.087	36.878
Utang reasuransi	155.609	89.573

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Liabilitas lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga (lanjutan)		
Rupiah (lanjtuan)		
Dana *syirkah* temporer	153.260	97.125
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	140.036	149.992
Liabilitas kartu kredit	105.606	57.942
Pendapatan diterima di muka	47.610	290.981
Cadangan pajak hadiah simpedes	22.139	24.549
Setoran jaminan	16.128	17.215
Lain-lain	4.671.479	5.814.160
	18.869.507	18.439.506
Mata uang asing		
Utang bunga	367.850	549.507
Pendapatan diterima di muka	202.819	66.829
Lain-lain	612.123	303.765
	1.182.792	920.101
Total	**20.052.299**	**19.359.607**

30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I	964.505	965.116
Pinjaman *two-step loan*	3.175	3.334
Obligasi Subordinasi III	497.712	496.916
Total	**1.465.392**	**1.465.366**

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I

Pada tanggal 17 November 2016, BRIS menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dengan pendapatan bagi hasil yang diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini diperingkat oleh Fitch Ratings dengan peringkat A+(idn).

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya, dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat masing-masing A(idn) dan A+(idn) dari Fitch Ratings. Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pembatasan dan kewajiban BRIS atas Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRIS, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik BRIS kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik BRIS berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan BRIS atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh BRIS dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger bank syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal “Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri”.

b. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,00% dan 2,03% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

c. Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* AA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Subordinasi III tahun 2018 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
> 1 tahun - 5 tahun	1.462.217	1.462.032
> 5 tahun	3.175	3.334
Total	**1.465.392**	**1.465.366**

31. OPSI SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Maret 2016, pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan saham BRI dari hasil pembelian kembali yang disimpan dalam saham tresuri untuk program kepemilikan saham manajemen dan pekerja.

Tujuan program ini untuk mendorong kepemilikan saham BRI oleh peserta program, menyelaraskan tujuan BRI dengan tujuan peserta program yang merupakan manajemen dan pekerja BRI, serta meningkatkan kinerjanya.

BRI menerbitkan program MESOP pada tanggal 15 Mei 2020 (tanggal pemberian) sejumlah 194.008.300 lembar saham dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

a. Tahap I sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.
b. Tahap II sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Masa berlaku opsi sejak tanggal pendistribusian sampai dengan 31 Oktober 2021. Setelah tanggal tersebut, seluruh hak opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur.

Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima MESOP adalah direksi, dewan komisaris kecuali komisaris independen dan karyawan tetap dengan mengacu kepada masa kerja, penilaian kinerja, kelompok jabatan dan jabatan.

Perhitungan, metode dan asumsi mengenai MESOP diperoleh dari laporan aktuaris independen, Willis Towers Watson pada tanggal 6 Agustus 2020.

Beban kompensasi yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian sehubungan dengan opsi saham tahap I dan Tahap II untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp33.466 dan Rp22.370 yang dikreditkan ke opsi saham di ekuitas.

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "*Black-scholes*", dengan asumsi utama sebagai berikut:

	MESOP Tahap 1	MESOP Tahap 2
Periode *vesting* (dalam bulan)	5,5	12,5
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	345	382
Volatilitas harga saham	58,46%	43,85%
Suku bunga bebas risiko	5,23	5,56
Tingkat dividen	5,10	5,10

Sisa umur dari opsi saham Tahap I dan II pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah 0,8 tahun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	**300.000.000.000**		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Dewan Komisaris:				
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	816.300	50	40.815.000	0,00
- Hadiyanto	625.800	50	31.290.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	1.008.000	50	50.400.000	0,00
- Catur Budi Harto	329.200	50	16.460.000	0,00
- Haru Koesmahargyo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Priyastomo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	1.819.400	50	90.970.000	0,00
- Indra Utoyo	1.726.400	50	86.320.000	0,00
- Handayani	1.602.500	50	80.125.000	0,00
- Supari	1.242.300	50	62.115.000	0,00
- Agus Noorsanto	380.800	50	19.040.000	0,00
- Herdy Rosadi Harman	311.900	50	15.595.000	0,00
- Agus Sudiarto	294.600	50	14.730.000	0,00
Masyarakat	52.581.518.100	50	2.629.075.905.000	42,64%
	122.595.346.500		**6.129.767.325.000**	**99,39%**
Saham treasuri (Catatan 1d)	750.463.500		37.523.175.000	0,61
Total	**123.345.810.000**		**6.167.290.500.000**	**100,00%**

	31 Desember 2019			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	**300.000.000.000**		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna				
Negara Republik Indonesia	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Dewan Komisaris:				
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	386.700	50	19.335.000	0,00
- Hadiyanto	201.200	50	10.060.000	0,00
Direksi:				
- Haru Koesmahargyo	944.400	50	47.220.000	0,00
- Priyastomo	944.400	50	47.220.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	928.200	50	46.410.000	0,00
- Indra Utoyo	835.200	50	41.760.000	0,00
- Handayani	522.300	50	26.115.000	0,00
- Supari	351.100	50	17.555.000	0,00
- Agus Noorsanto	46.800	50	2.340.000	0,00
- Azizatun Azhimah	25.100	50	1.255.000	0,00
Masyarakat	52.375.450.100	50	2.618.772.505.000	42,47%
	122.380.635.500		**6.119.031.775.000**	**99,22%**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2019			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh (lanjutan)				
Saham treasuri (Catatan 1d)	965.174.500	50	48.258.725.000	0,78
Total	**123.345.810.000**		**6.167.290.500.000**	**100,00%**

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2019	208.331
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2020	510.819
Total	**3.411.813**

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah”, Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun “Tambahan Modal Disetor” bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasikan ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	**589.762**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan* (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sepengendali

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan kepemilikan saham PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f), dan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Sekuritas), sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventures	3.090	2.424	666
Jumlah	**449.978**	**368.783**	**81.195**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS (lanjutan)

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ai). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 18 Februari 2020 dan 15 Mei 2019 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan	
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Konsolidasian	20.623.565	16.175.565

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang ”Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”.

f. Saham bonus BRI

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI dan entitas anak memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja (Employee Stock Allocation (ESA)). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direksi No. 751-DIR/KHC/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Implementasi *Management and Employee Stock Ownership Program* kepada 50.775 pekerja sebanyak 143.415.500 lembar saham.

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 2 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat No. B.442-DIR/HCS/03/2020 kepada 173 pekerja sebanyak 4.396.700 lembar saham.

Sesuai surat Direksi No. B.03-DIR/HCS/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, BRI kembali melaksanakan program ESA II yang didistribusikan kepada 54.527 pekerja yaitu sebanyak 226.714.300 lembar saham. ESA III dan ESA IV yang masing-masing didistribusikan kepada 57.111 pekerja dan masing-masing sebanyak 261.177.000 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. EKUITAS (lanjutan)

f. Saham bonus BRI (lanjutan)

Nilai wajar dari ESA II BRI pada saat pemberian adalah sebesar Rp995.148 yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. BRI telah melaksanakan pembayaran atas ESA II di 25 Februari 2020.

Nilai wajar dari ESA III dan ESA IV pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2020 masing-masing sebesar Rp953.005 dan Rp930.721. Nilai wajar ESA III dan ESA IV diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA III dan ESA IV yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp764.083 dan Rp464.722.

Program ESA III dan ESA IV masing-masing akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2021 dan akan dibayarkan dengan saham BRI.

33. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Rupiah		
Kredit yang diberikan		
Mikro	50.706.613	57.606.380
Ritel	37.052.147	34.429.849
Korporasi	6.602.198	7.356.986
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	599.221	113.895
Obligasi	41.253	10.737
Negotiable Certificate of Deposit	400	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	5.149.623	-
Obligasi	656.994	-
Negotiable Certificate of Deposit	71.002	-
Medium-Term Note	29.365	-
Sertifikat Bank Indonesia	2.306	-
Tersedia untuk dijual		
Obligasi Pemerintah	-	5.115.748
Obligasi	-	99.798
Sertifikat Bank Indonesia	-	632.795
Negotiable Certificate of Deposit	-	80.647
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	41.073
Reksadana	-	23.051
Medium-Term Note	-	47.508

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Rupiah (lanjutan)		
Efek-efek (lanjutan)		
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	3.101.370	-
Obligasi	180.222	-
Sertifikat Bank Indonesia	11.314	-
Negotiable Certificate of Deposit	9.610	-
Medium-Term Note	6.335	-
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi Pemerintah	-	1.949.414
Obligasi	-	66.001
Sertifikat Bank Indonesia	-	19.446
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	54
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Biaya perolehan diamortisasi	20.994	-
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	75.694
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
Deposit Facility/Term Deposit	595.656	345.737
Inter-bank call money	40.923	322.000
Lain-lain	231.890	383.553
Giro pada Bank Indonesia	2.292	249
Lain-lain	2.326.172	1.641.919
	107.437.900	110.362.534
Mata uang asing		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	2.387.848	4.685.632
Ritel	495.299	687.480
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	18.508	8.155
Obligasi	2.687	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	56
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	1.027.971	-
Obligasi	81.452	-
Sertifikat Bank Indonesia	112.445	-
Tersedia untuk dijual		
Obligasi Pemerintah	-	890.670
Obligasi	-	36.167
Sertifikat Bank Indonesia	-	25.616

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Mata uang asing (lanjutan)		
Efek-efek (lanjutan)		
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	520.101	-
Obligasi	21.802	-
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi Pemerintah	-	437.275
Obligasi	-	1.917
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
Deposit Facility/Term Deposit	148.517	8.071
Inter-bank call money	77.028	171.026
Lain-lain	110.297	-
Giro pada Bank Indonesia	33	-
Lain-lain	142.199	1.065.130
	5.146.187	8.017.195
	112.584.087	118.379.729
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
Murabahah	2.184.363	1.468.365
Musyarakah	1.316.952	901.987
Lain-lain	847.110	1.006.195
Total Pendapatan Syariah	4.348.425	3.376.547
Total	**116.932.512**	**121.756.276**

34. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Rupiah		
Deposito berjangka	19.570.294	19.840.268
Giro	3.001.817	3.261.339
Tabungan	2.832.365	3.166.511
Surat berharga yang diterbitkan	1.920.006	1.927.915
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	676.803	900.351
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	413.391	739.577
Pinjaman yang diterima	194.695	219.196
Pinjaman Subordinasi	47.184	-
Lain-lain	3.303.076	3.610.791
	31.959.631	33.665.948

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Akun ini merupakan beban bunga atas (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Mata uang asing		
Deposito berjangka	2.113.824	2.197.462
Pinjaman yang diterima	661.356	1.220.259
Giro	479.900	185.485
Surat berharga yang diterbitkan	630.847	552.676
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	195.938	448.180
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.416	42.632
Tabungan	7.044	6.742
Lain-lain	101.815	352.454
	4.231.140	5.005.890
	36.190.771	38.671.838
Beban syariah terdiri atas:		
Deposito *mudharabah*	1.289.073	1.197.310
Lain-lain	242.751	179.823
Total Beban Syariah	1.531.824	1.377.133
Total	**37.722.595**	**40.048.971**

35. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Kredit yang diberikan (Catatan 12f)	28.958.669	20.810.248
Piutang dan pembiayaan Syariah (Catatan 13b)	1.288.086	682.820
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 14c)	111.580	63.251
Efek-efek (Catatan 7j)	1.173.553	-
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya (Catatan 8d)	(1.431.524)	-
Tagihan Akseptasi (Catatan 15d)	405.907	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10b)	(1)	-
Giro pada Bank lain (Catatan 5e)	93.819	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 6e)	17.402	-
Total	**30.617.491**	**21.556.319**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Gaji, upah dan tunjangan	14.065.172	13.447.778
Bonus, insentif dan tantiem	4.274.212	6.200.458
Biaya kompensasi saham (Catatan 31 dan 32f)	2.279.789	118.456
Program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 43e)	906.326	30.966
Iuran Jamsostek	833.207	361.379
Tunjangan kesehatan	393.390	869.557
Pendidikan dan pelatihan	365.787	724.583
Pensiun imbalan pasti (Catatan 43a dan 43e)	365.455	432.692
Pensiun iuran pasti (Catatan 43c)	352.766	326.235
Cuti besar (Catatan 43e)	305.765	552.180
Penghargaan tanda jasa (Catatan 43e)	234.875	272.389
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 43d)	177.916	350.909
Lain-lain	1.765.131	555.694
Total	**26.319.791**	**24.243.276**

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp120.259 dan Rp130.565 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp43.748 dan Rp41.313 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 45).

Jumlah tantiem, bonus dan insentif Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah sebesar Rp497.502 dan Rp560.721 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 45).

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Jasa *outsourcing*	3.709.819	3.274.117
Penyusutan aset tetap (Catatan 17)	2.274.986	1.733.629
E-Channel	1.842.475	1.442.004
Barang dan jasa pihak ketiga	1.664.179	1.055.932
Sewa	1.517.417	1.928.242
Perbaikan dan pemeliharaan	1.330.132	1.311.163
Transportasi	755.141	969.408
Listrik dan air	635.943	620.185
Percetakan dan benda pos	439.343	306.842
Jasa profesional	387.818	291.150
Peralatan kantor	372.601	319.923

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Rincian akun ini adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Komunikasi	154.259	148.600
Instalasi komputer	74.721	41.042
Penelitian dan pengembangan produk	23.670	29.715
Lain-lain	2.087.340	1.894.800
Total	**17.269.844**	**15.366.752**

38. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	35.214	141
Pendapatan sewa	4.927	14.109
Sumbangan	(9.257)	(11.500)
Corporate Social Responsibility	(30.074)	(23.937)
Biaya bina lingkungan	(179.226)	-
Lain-lain - neto	129.098	(46.693)
Total	**(49.318)**	**(67.880)**

39. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
BRI (entitas induk)		
Pajak penghasilan		
Pasal 25	-	2.329
Pasal 29	1.064.461	2.098
	1.064.461	4.427
Entitas anak		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	25.350	18.408
Pasal 22	24	107
Pasal 23	1.505	5.150
Pasal 25	7.532	-
Pasal 26	9	-
Pasal 29	248.688	113.651
Pasal 4 ayat 2	41.637	38.524
Pajak Pertambahan Nilai	11.432	5.176
	336.177	181.016
Total	**1.400.638**	**185.443**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
BRI (entitas induk)		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	7.611.026	8.751.799
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	-	-
Beban/(manfaat) pajak penghasilan tangguhan	196.782	169.408
	7.807.808	8.921.207
Entitas anak		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	343.097	226.551
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	11.177	4.909
(Manfaat) pajak penghasilan tangguhan	(97.629)	(202.439)
	256.645	29.021
Total	**8.064.453**	**8.950.228**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	26.724.846	43.364.053
Bagian laba entitas anak	(563.735)	(414.161)
Laba sebelum beban pajak BRI (entitas induk)	26.161.111	42.949.892
Perbedaan temporer:		
Cadangan kerugian aset produktif	8.827.772	(440.781)
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.548.413	607.557
Pembentukan penyisihan beban pegawai	(1.936.490)	(183.301)
Pembayaran *benefit* karyawan berbasis saham	1.262.845	(403.538)
Penyusutan aset tetap	47.234	(213.454)
(Kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(87.225)	(44.115)
	9.662.549	(677.632)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Perbedaan permanen:		
Promosi	1.846.027	2.017.960
Hadiah non undian	531.512	387.251
Perjalanan dan santunan	354.245	288.057
Humas	300.243	322.037
Representasi dan sumbangan	176.566	182.052
Pembinaan jasmani dan rohani	40.737	54.112
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(88.040)	(6.528)
Bagian laba entitas asosiasi	(8.148)	(12.593)
Lain-lain	1.081.230	(1.745.611)
	4.234.372	1.486.737
Taksiran penghasilan kena pajak	**40.058.032**	**43.758.997**
Entitas induk		
Beban pajak-kini	(7.611.026)	(8.751.799)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	6.504.817	8.724.637
Kredit pajak luar negeri	41.748	25.064
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29	**(1.064.461)**	**(2.098)**
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama catatan tahun berjalan	22.720	1.678.510
Entitas anak		
Beban pajak-kini	(343.097)	(276.518)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	103.864	187.998
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29*) - neto	**(239.233)**	**(88.520)**

*) Pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk estimasi tagihan pajak penghasilan sebesar dan Rp25.131.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	26.724.846	43.364.053
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	5.094.633	8.693.518
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan		
BRI	804.531	297.347
Entitas anak	(49.039)	(40.637)
Pengaruh penurunan tarif pajak	2.214.328	-
	8.064.453	**8.950.228**

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2020 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan BRI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemeriksaan tahun pajak 2015

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00006/206/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran sebesar Rp489.749 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp235.080 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/201/15/093/18 dan 00003/243/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp26.353 dan Rp1.167 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp12.650 dan Rp560 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00013/203/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp7.783 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp3.736 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp534 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp256 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00066/207/15/093/18, 00067/207/15/093/18, 00068/207/15/093/18, 00069/207/15/093/18, 00070/207/15/093/18, 00071/207/15/093/18, 00072/207/15/093/18, 00073/207/15/093/18, 00074/207/15/093/18, 00075/207/15/093/18, 00076/207/15/093/18, dan 00077/207/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masing-masing sebesar Rp160 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp77 dan telah disetujui oleh BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2015 (lanjutan)

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 00041/107/15/093/18, 00042/107/15/093/18, 00043/107/15/093/18, 00044/107/15/093/18, 00045/107/15/093/18, 00046/107/15/093/18, 00047/107/15/093/18, 00048/107/15/093/18, 00049/107/15/093/18, 00050/107/15/093/18, 00051/107/15/093/18, dan 00052/107/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp66, Rp46, Rp86, Rp55, Rp73, Rp70, Rp51, Rp67, Rp55, Rp54, Rp43 dan Rp108 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/277/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.121 beserta dengan sanksi administrasinya sebesar Rp538 dan telah disetujui oleh BRI.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan cadangan pajak untuk tahun-tahun 2016 - 2020 yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Entitas Induk		
(Pembalikan) cadangan kerugian aset produktif	(633.222)	(110.195)
Pembentukan cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	93.668	151.889
Pembentukan/(pembalikan) penyisihan beban pegawai	82.364	(45.825)
(Keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(14.828)	(11.029)
Pembayaran *benefit* karyawan berbasis saham	212.940	(100.885)
Penyusutan aset tetap	62.296	(53.363)
	(196.782)	(169.408)
Entitas anak	97.629	202.439
Total	**(99.153)**	**33.031**

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun “aset pajak tangguhan”) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Entitas induk		
Cadangan kerugian aset produktif*)	6.035.360	2.987.445
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi*)	623.550	151.889
Penyisihan beban pegawai	1.463.322	1.380.958
Penyusutan aset tetap	(107.288)	(169.584)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	296.183	(66.195)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Entitas induk (lanjutan)		
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(26.245)	(11.417)
Pembayaran *benefit* karyawan berbasis saham	218.388	5.448
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(898.168)	(255.526)
	7.605.102	4.023.018
Entitas anak	708.443	518.280
Total	**8.313.545**	**4.541.298**

*) Termasuk dampak penerapan awal PSAK 71 yang dibebankan ke saldo laba 1 Januari 2020 untuk cadangan kerugian aset produktif dan cadangan estimasi komitmen dan kontinjensi masing-masing sebesar Rp3.681.137 dan Rp377.993.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020.

Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2020-0282 tanggal 8 Januari 2021 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2020, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25% untuk tahun 2018 dan 2019.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2020-0147 tanggal 6 Januari 2020 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.1-2 tanggal 3 Januari 2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2019), semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

40. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan *Internal Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap menperhatikan prinsip kehati-hatian.

Manajemen Risiko Kredit

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL).

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya.

   Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

   Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember 2020		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	46.756.681	61.887
	31 Desember 2019		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	22.520.496	61.748

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya. (lanjutan)

   Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:
   1. *Secured loans*
   2. *Unsecured loans*

   Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

   a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
   b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
   c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

   Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

   Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

   Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans,* tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

   Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2020							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	8.201.321	1.680	66	6.629	253	7.387	937.042	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	66.502.919	17.900	1.835	1.356	3.100	9.075	3.500	66.539.685
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	27.666.020	-	-	-	-	-	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	177.631.965	-	-	-	-	-	11.913.977	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	107.679.856	-	-	-	-	-	2.723.837	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	21.887.866	825.026	217.788	921.541	1.407.817	2.218.397	94.569	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	30.784.349	39.669.772	64.515.810	54.571.523	71.801.130	116.299.548	-	377.642.132
Ritel	98.761.708	24.846.548	37.790.804	44.162.935	54.519.359	93.180.749	957.586	354.219.689
Korporasi	121.152.740	10.103.872	3.436.499	5.152.959	12.931.601	4.355.262	10.463.453	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	9.077.999	3.852.646	2.675.118	3.320.262	15.055.087	4.934.561	-	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	1.130.127	917.082	287.264	410.643	425.240	448.868	-	3.619.224
Tagihan akseptasi	5.724.790	537.162	77.519	252.610	225.355	-	-	6.817.436
Penyertaan saham*)	1.035.207	-	-	-	-	-	-	1.035.207
Aset lain-lain**)	10.296.454	49.513	37.687	59.098	143.016	69.487	15.546.836	26.202.091
Total	**787.459.517**	**80.821.201**	**109.040.390**	**108.859.556**	**156.511.958**	**221.523.334**	**42.640.800**	**1.506.856.756**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(69.160.855)
Bersih								**1.437.695.901**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.980.956	2.784.047	1.063	662.244	1.459.418	86.462	-	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	35.346.682	2.343.702	789.155	1.034.316	2.006.160	3.164.481	-	44.684.496
Total	**39.327.638**	**5.127.749**	**790.218**	**1.696.560**	**3.465.578**	**3.250.943**	**-**	**53.658.686**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								**51.874.810**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2019							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	-	-	-	-	-	-	71.416.449
Giro pada Bank lain	9.599.836	6.996	297	1.527	174	1.071	627.835	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	105.121.462	227.000	200.000	647.000	1.273.000	912.825	8.473.440	116.854.727
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	17.712.056	-	-	-	-	-	-	17.712.056
Tersedia untuk dijual	115.533.272	-	-	-	-	-	8.620.460	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	52.727.611	-	-	-	-	-	1.247.532	53.975.143
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	24.463.234	4.012.200	227.532	1.081.660	385.082	2.440.318	1.707.473	34.317.499
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	30.306	-	-	-	-	-	-	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	-	-	-	-	-	-	22.582.244
Tagihan derivatif	210.396	-	-	-	-	-	-	210.396
Kredit yang diberikan								
Mikro	27.102.319	31.736.498	54.508.279	44.500.298	68.245.559	103.442.858	-	329.535.811
Ritel	101.323.286	25.943.929	38.025.012	42.022.840	59.542.775	90.453.115	988.204	358.299.161
Korporasi	137.097.423	10.562.753	2.917.011	5.896.052	16.600.597	5.864.731	10.657.654	189.596.221
Piutang dan pembiayaan syariah	2.390.865	2.102.395	13.290.954	1.657.946	2.985.369	3.338.668	-	25.766.197
Piutang sewa pembiayaan	1.778.508	891.028	217.640	445.752	374.400	484.268	-	4.191.596
Tagihan akseptasi	8.994.159	88.637	77.342	105.501	57.296	23.128	-	9.346.063
Penyertaan saham*)	293.379	-	-	-	-	-	-	293.379
Aset lain-lain**)	3.415.887	452.824	285.943	208.645	255.429	801.333	481.006	5.901.067
Total	**702.892.692**	**76.024.260**	**109.750.010**	**96.567.221**	**149.719.681**	**207.762.315**	**32.803.604**	**1.375.519.783**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(39.329.418)
Bersih								**1.336.190.365**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.594.747	947.103	6.058	595.620	1.127.754	188.199	-	6.459.481
Garansi yang diterbitkan	36.261.121	3.711.319	530.841	642.611	1.674.848	2.230.625	-	45.051.365
Total	**39.855.868**	**4.658.422**	**536.899**	**1.238.231**	**2.802.602**	**2.418.824**	**-**	**51.510.846**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(609.493)
Bersih								**50.901.353**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember 2020							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	-	9.154.378	-	-	-	-	-	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	55.983.929	10.555.756	-	-	-	-	-	66.539.685
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	18.575.636	8.570.911	-	60.078	-	119.645	339.750	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.197.849	10.975.012	-	517.953	-	2.940.380	3.914.748	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	105.100.849	3.544.179	11.000	75.000	-	990.298	682.367	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.782.970	-	55.250	12.940.357	212.171	887.213	11.695.043	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	1.576.659	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	67.504.500	27.772.846	159.725.383	27.132.382	95.507.021	377.642.132
Ritel	-	420.250	22.084.410	20.700.294	128.759.972	12.361.178	169.893.585	354.219.689
Korporasi	82.797	2.120.147	31.054.552	36.570.772	11.290.133	9.855.574	76.622.411	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	-	75.180	3.770.249	3.453.591	8.182.701	1.580.982	21.852.970	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	-	227.270	68.387	583.887	555.131	379.753	1.804.796	3.619.224
Tagihan akseptasi	1.659.002	-	-	65.401	1.017	20.000	5.072.016	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	14.179	-	-	-	-	1.021.028	1.035.207
Aset lain-lain**)	3.349.799	109.055	-	1.071.776	-	156.882	21.514.579	26.202.091
Total	**456.082.368**	**47.342.976**	**124.548.348**	**103.811.955**	**308.726.508**	**56.424.287**	**409.920.314**	**1.506.856.756**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(69.160.855)
Bersih								**1.437.695.901**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.611.858	-	-	170.961	3.869	1.379	4.186.123	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	17.144.401	284	563.200	1.570.424	305.548	131.872	24.968.767	44.684.496
Total	**21.756.259**	**284**	**563.200**	**1.741.385**	**309.417**	**133.251**	**29.154.890**	**53.658.686**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								**51.874.810**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

	31 Desember 2019							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	-	-	-	-	-	-	71.416.449
Giro pada bank lain	-	10.237.736	-	-	-	-	-	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	100.469.268	16.385.459	-	-	-	-	-	116.854.727
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	13.911.684	3.145.937	-	70.638	-	219.003	364.794	17.712.056
Tersedia untuk dijual	104.730.621	13.026.171	-	206.562	72.984	3.109.495	3.007.899	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	46.426.715	4.876.549	11.000	1.043.687	-	1.060.730	556.462	53.975.143
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13.936.552	12.982	7.116	11.484.827	936.393	2.523.685	5.415.944	34.317.499
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	30.306	-	-	-	-	-	-	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	-	-	-	-	-	-	22.582.244
Tagihan derivatif	-	210.396	-	-	-	-	-	210.396
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	52.606.039	16.897.481	143.921.277	24.178.405	91.932.609	329.535.811
Ritel	-	3.918.015	21.734.305	17.630.749	128.283.472	22.832.549	163.900.071	358.299.161
Korporasi	124.195	2.751.793	36.965.472	37.665.580	22.308.023	260.579	89.520.579	189.596.221
Piutang dan pembiayaan syariah	-	1.251.829	-	2.813.631	-	300.431	21.400.306	25.766.197
Piutang sewa pembiayaan	-	215.837	78.441	630.446	783.127	403.580	2.080.165	4.191.596
Tagihan akseptasi	944.354	1.381	70.036	4.102.018	50.343	3.963.385	214.546	9.346.063
Penyertaan saham*)	-	14.723	-	-	-	-	278.656	293.379
Aset lain-lain**)	1.650.516	523.303	-	847.483	-	320.778	2.558.987	5.901.067
Total	**377.322.904**	**56.572.111**	**111.472.409**	**93.393.102**	**296.355.619**	**59.172.620**	**381.231.018**	**1.375.519.783**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(39.329.418)
Bersih								**1.336.190.365**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.562.246	4.715	-	273.003	3.037	1.346	3.615.134	6.459.481
Garansi yang diterbitkan	20.788.230	866	556.515	1.051.390	248.387	93.842	22.312.135	45.051.365
Total	**23.350.476**	**5.581**	**556.515**	**1.324.393**	**251.424**	**95.188**	**25.927.269**	**51.510.846**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(609.493)
Bersih								**50.901.353**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Giro pada bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif, sedangkan tanggal 31 Desember 2019 aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai baik secara individual dan kolektif

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif, sedangkan tanggal 31 Desember 2019 aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai baik secara individual dan kolektif

c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh efek-efek diklasifikasikan “Lancar”, kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan “Macet” yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

d. Piutang sewa pembiayaan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Mengalami penurunan nilai	188.226	144.320
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	109.595	78.169
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	3.321.403	3.969.107
	3.619.224	4.191.596
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(213.060)	(87.500)
Total	**3.406.164**	**4.104.096**

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	163.908.099	110.067.665	9.222.345	14.231.370	297.429.479
Pertanian	73.636.779	16.927.192	2.060.920	16.897.255	109.522.146
Perindustrian	36.507.839	11.676.410	1.640.743	6.761.985	56.586.977
Jasa dunia usaha	29.574.829	13.943.230	1.176.694	3.506.634	48.201.387
Konstruksi	30.259.390	4.233.431	240.850	7.828.544	42.562.215
Listrik, gas dan air	19.702.738	2.112.042	33.044	954.341	22.802.165
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	12.928.540	4.779.216	629.292	4.017.269	22.354.317

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan)

   e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

   Per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah (lanjutan)					
Jasa pelayanan sosial	3.279.131	2.093.247	275.769	906.276	6.554.423
Pertambangan	3.462.082	878.113	58.750	918.308	5.317.253
Lain-lain	222.812.619	15.507.275	4.936.286	3.372.588	246.628.768
	596.072.046	182.217.821	20.274.693	59.394.570	857.959.130
Mata uang asing					
Perindustrian	22.395.817	21.365	12.360	7.441.701	29.871.243
Pertanian	10.992.105	-	-	2.003.688	12.995.793
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.820.819	6.227	14.442	237.085	4.078.573
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	717.064	29.551	-	140.500	887.115
Listrik, gas dan air	13.948.658	-	-	1.991.101	15.939.759
Jasa pelayanan sosial	1.462.131	-	-	-	1.462.131
Pertambangan	2.356.956	2.402	-	2.580.731	4.940.089
Konstruksi	3.669.656	1.686	-	2.138	3.673.480
Jasa dunia usaha	5.697.699	-	-	7.471	5.705.170
Lain-lain	845.356	-	11.889	4.152	861.397
	65.906.261	61.231	38.691	14.408.567	80.414.750
Total	**661.978.307**	**182.279.052**	**20.313.384**	**73.803.137**	**938.373.880**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(66.614.491)
Bersih					**871.759.389**

	31 Desember 2019				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan Restoran	253.627.281	13.284.048	13.377.630	11.289.368	291.578.327
Pertanian	79.022.898	2.010.593	2.473.827	14.386.808	97.894.126
Perindustrian	40.346.285	1.057.405	1.506.251	2.317.143	45.227.084
Jasa dunia usaha	37.530.077	635.989	906.988	6.171.352	45.244.406
Listrik. gas dan air	31.054.422	78.375	44.924	101.324	31.279.045
Konstruksi	36.602.061	657.397	703.392	2.289.458	40.252.308
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	18.869.213	366.335	542.294	1.844.228	21.622.070
Jasa pelayanan sosial	13.295.862	366.167	252.199	507.656	14.421.884
Pertambangan	3.303.642	317.806	144.739	805.012	4.571.199
Lain-lain	218.119.344	3.068.306	4.847.745	2.314.446	228.349.841
	731.771.085	21.842.421	24.799.989	42.026.795	820.440.290

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2019				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	21.325.744	-	-	5.710.619	27.036.363
Pertanian	14.610.149	-	50.165	1.582.234	16.242.548
Perdagangan, perhotelan dan restoran	9.697.158	-	-	647.005	10.344.163
Listrik, gas dan air	4.528.755	-	8.884	115.169	4.652.808
Jasa pelayanan sosial	1.350.059	-	-	-	1.350.059
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.294.338	-	1.405.000	739.026	12.438.364
Pertambangan	1.951.999	-	-	-	1.951.999
Jasa dunia usaha	4.130.000	-	-	11.874	4.141.874
Konstruksi	3.667.036	-	2.037	28.781	3.697.854
Lain-lain	892.314	-	6.884	1.870	901.068
	72.447.552	-	1.472.970	8.836.578	82.757.100
Total	**804.218.637**	**21.842.421**	**26.272.959**	**50.863.373**	**903.197.390**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(39.108.869)
Bersih					**864.088.521**

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 aset keuangan ini mengalami penurunan nilai baik secara individu dan kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif dan individual sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual dan kolektif.

h. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif, kecuali transaksi dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan nilai sebesar Rp879.053.

i. Aset lain-lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan)

   j. Rekening administratif

   Per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rupiah		
Garansi yang diterbitkan	24.042.584	19.414.908
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.593.497	1.838.769
	26.636.081	21.253.677
Mata uang asing		
Garansi yang diterbitkan	20.641.912	25.636.457
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.380.693	4.620.712
	27.022.605	30.257.169
	53.658.686	51.510.846
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.783.876)	(609.493)
Total	**51.874.810**	**50.901.353**

4. Kualitas aset keuangan

   Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	8.741.212	413.166	-	-	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	66.539.685	-	-	-	66.539.685
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	27.514.581	151.439	-	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	189.545.942	-	-	-	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	109.911.692	491.243	-	758	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan					
Mikro	274.708.931	90.438.104	9.366.739	3.128.358	377.642.132
Ritel	234.974.111	84.188.435	9.567.427	25.489.716	354.219.689
Korporasi	123.396.105	209.567	-	43.990.714	167.596.386

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*. (lanjutan)

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset (lanjutan)					
Piutang dan pembiayaan syariah	28.899.160	7.442.946	1.379.218	1.194.349	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	2.317.690	1.003.713	109.595	188.226	3.619.224
Tagihan akseptasi	6.817.436	-	-	-	6.817.436
Penyertaan saham*)	1.035.207	-	-	-	1.035.207
Aset lain-lain**)	24.558.172	1.643.919	-	-	26.202.091
Total	**1.226.456.124**	**185.982.532**	**20.422.979**	**73.992.121**	**1.506.856.756**

	31 Desember 2019				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	-	-	-	71.416.449
Giro pada bank lain	9.491.685	746.051	-	-	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	116.854.727	-	-	-	116.854.727
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	17.645.639	66.417	-	-	17.712.056
Tersedia untuk dijual	122.590.185	1.563.547	-	-	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.476.494	497.891	-	758	53.975.143
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	34.317.499	-	-	-	34.317.499
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	30.306	-	-	-	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.100.000	-	-	-	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	21.703.191	-	-	879.053	22.582.244
Tagihan derivatif	210.396	-	-	-	210.396
Kredit yang diberikan					
Mikro	307.233.793	7.058.432	11.438.216	3.805.370	329.535.811
Ritel	316.436.726	13.749.966	12.238.825	15.873.644	358.299.161
Korporasi	157.923.532	-	1.833.491	29.839.198	189.596.221
Piutang dan pembiayaan syariah	22.624.586	1.034.023	762.426	1.345.162	25.766.197
Piutang sewa pembiayaan	4.004.787	-	78.168	108.641	4.191.596
Tagihan akseptasi	9.346.063	-	-	-	9.346.063
Penyertaan saham*)	293.379	-	-	-	293.379
Aset lain-lain**)	5.740.819	160.248	-	-	5.901.067
Total	**1.272.440.256**	**24.876.575**	**26.351.126**	**51.851.826**	**1.375.519.783**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*)

   a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.

   b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.

   c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.

   d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan rating minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's), atau A3 (Moody's).

   e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

2. Tingkat Standar (*Standard Grade*)

   a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.

   b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.

   c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.

   d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).

   e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:
1. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
2. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank juga menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:
1. Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
2. Indikator kualitatif
3. Tertunggak lebih dari 30 hari.

b. *Credit Risk Grades*

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

c. Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan bervariasi untuk setiap portofolio dan termasuk perubahan kuantitatif pada PD dan faktor kualitatif, termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan.

Risiko kredit dari eksposur tertentu dianggap telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika, berdasarkan permodelan kuantitatif Bank, *probability of default* (PD) atas umur tersisa telah meningkat signifikan.

Bank juga dapat menggunakan penilaian dari analis kredit dan, jika mungkin, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa mungkin eksposur telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasi hal tersebut dan pengaruhnya mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis kuantitatif secara tepat waktu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

e. Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

f. Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari kelompok usahanya; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada kelompok usahanya.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:
- Kualitatif - seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif - seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (base case) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (output) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (base case) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2020	2021
Pertumbuhan PDB	dasar -0,89% Kisaran antara -1,21 hingga -0,59%	dasar 4,58% Kisaran antara 3,98 hingga 5,18%
Tingkat Konsumsi	dasar 1,97% Kisaran antara -1,38 hingga 2,87%	dasar 5,48% Kisaran antara 1,12 hingga 5,67%
Tingkat Investasi	dasar 6,71% Kisaran antara 0,97 hingga 7,17%	dasar 6,83% Kisaran antara 0,95 hingga 7,25%

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo.

5. Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2020			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.813.046	2.629.162	1.924.531	9.366.739
Ritel	5.214.733	2.332.029	2.020.665	9.567.427
Piutang dan pembiayaan syariah	912.212	264.890	202.115	1.379.217
Piutang sewa pembiayaan	41.123	56.141	12.331	109.595
Total	**10.981.114**	**5.282.222**	**4.159.642**	**20.422.978**

	31 Desember 2019			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.722.477	2.863.391	3.852.349	11.438.217
Ritel	5.901.474	2.847.528	3.489.823	12.238.825
Korporasi	1.420.008	413.483	-	1.833.491
Piutang dan pembiayaan syariah	378.123	178.141	206.162	762.426
Piutang sewa pembiayaan	22.830	36.335	19.002	78.167
Total	**12.444.912**	**6.338.878**	**7.567.336**	**26.351.126**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

31 Desember 2020

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	32.161.564	-	-	-	-	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	51.530.969	-	-	-	-
Giro pada bank lain	9.154.378	9.154.378	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(93.843)	-	-	-	-	(93.843)
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	66.539.685	57.614.764	8.433.171	491.750	-	-
Cadangan kerugian	(18.070)	-	-	-	-	(18.070)
Efek-efek	327.615.655	218.442.222	940.587	12.324.225	95.908.621	-
Cadangan kerugian	(348.941)	-	-	-	-	(348.941)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	6.797.656	11.192.438	9.582.910	-	-
Cadangan kerugian	(1.326.190)	-	-	-	-	(1.326.190)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	44.433.840	1.259.335	1.125.393	-	-
Tagihan Derivatif	1.576.659	608.655	621.679	135.996	210.329	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

	31 Desember 2020					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset (lanjutan)						
Kredit yang diberikan						
Mikro	377.642.132	3.793.736	7.954.228	40.686.582	325.207.586	-
Ritel	354.219.689	11.443.327	20.564.387	97.680.377	224.531.598	-
Korporasi	167.596.386	8.415.684	12.319.777	21.307.757	125.553.168	-
Cadangan kerugian	(65.165.002)	-	-	-	-	(65.165.002)
Piutang dan pembiayaan syariah	38.915.673	1.728.557	1.666.653	3.574.110	31.946.353	-
Cadangan kerugian	(1.449.489)	-	-	-	-	(1.449.489)
Piutang sewa pembiayaan	3.619.224	41.251	42.680	486.485	3.048.808	-
Cadangan kerugian	(213.060)	-	-	-	-	(213.060)
Tagihan akseptasi	6.817.436	2.166	3.170.443	3.644.827	-	-
Cadangan kerugian	(546.260)	-	-	-	-	(546.260)
Penyertaan saham*)	1.035.207	-	-	-	-	1.035.207
Aset lain-lain**)	26.202.091	452.394	2.635.364	2.061.124	188.692	20.864.517
	1.469.857.465	**414.459.599**	**70.800.742**	**193.101.536**	**806.595.155**	**(15.099.567)**
Liabilitas						
Liabilitas segera	11.845.910	11.845.910	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	185.151.229	185.151.229	-	-	-	-
Giro *Wadiah*	6.303.202	6.303.202	-	-	-	-
Giro *Mudharabah*	1.623.563	1.623.563	-	-	-	-
Tabungan	460.453.588	460.453.588	-	-	-	-
Tabungan *Wadiah*	9.247.604	9.247.604	-	-	-	-
Tabungan *Mudharabah*	6.147.015	6.147.015	-	-	-	-
Deposito berjangka	426.399.550	245.018.175	124.908.581	48.032.767	8.440.027	-
Deposito berjangka *Mudharabah*	25.776.398	18.322.475	6.722.692	731.231	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.996	23.336.496	449.500	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.478.672	31.380.589	4.263.236	2.819.748	2.015.099	-
Liabilitas derivatif	407.774	102.160	136.061	26.960	142.593	-
Liabilitas akseptasi	6.817.436	1.858.280	3.235.446	1.723.710	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	34.489.091	-	2.823.443	1.720.897	29.944.751	-
Pinjaman yang diterima	35.968.985	4.102.324	4.080.807	15.060.553	12.725.301	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.392	1.465.392	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain***)	9.054.084	1.349.947	485.666	818.382	6.101.205	298.884
	1.285.415.489	**1.007.707.949**	**147.105.432**	**70.934.248**	**59.368.976**	**298.884**
Perbedaan Jatuh Tempo	**184.441.976**	**(593.248.350)**	**(76.304.690)**	**122.167.288**	**747.226.179**	**(15.398.451)**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

31 Desember 2019

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	30.219.214	-	-	-	-	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	71.416.449	-	-	-	-
Giro pada bank lain	10.237.736	10.237.736	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	116.854.727	74.896.410	41.958.317	-	-	-
Efek-efek	195.840.931	141.865.789	5.631.483	7.247.572	41.096.087	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	34.317.499	7.079.618	9.587.435	17.650.446	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	1.130.306	30.306	-	1.100.000	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	16.838.178	5.437.329	306.737	-	-
Tagihan Derivatif	210.396	114.208	51.155	25.770	19.263	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	329.535.811	4.220.012	7.896.459	37.667.210	279.752.130	-
Ritel	358.299.161	21.055.804	25.823.013	45.635.510	265.784.834	-
Korporasi	189.596.221	13.928.892	27.659.818	26.460.036	121.547.475	-
Cadangan kerugian	(38.363.840)	-	-	-	-	(38.363.840)
Piutang dan pembiayaan syariah	25.766.197	852.962	1.892.112	2.651.519	20.369.604	-
Cadangan kerugian	(745.029)	-	-	-	-	(745.029)
Piutang sewa pembiayaan	4.191.596	218.581	331.389	1.366.947	2.274.679	-
Cadangan kerugian	(87.500)	-	-	-	-	(87.500)
Tagihan akseptasi	9.346.063	2.616	3.108.286	6.235.161	78.829	-
Penyertaan saham*)	293.379	-	-	-	-	293.379
Aset lain-lain**)	5.901.067	500.232	2.306.920	917.831	146.734	2.029.350
	1.366.541.870	**363.257.793**	**131.683.716**	**146.164.739**	**732.090.806**	**(6.655.184)**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

	31 Desember 2019					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Liabilitas						
Liabilitas segera	7.549.312	7.549.312	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	168.826.135	168.826.135	-	-	-	-
Giro *Wadiah*	2.020.866	2.020.866	-	-	-	-
Giro *Mudharabah*	4.080.803	4.080.803				
Tabungan	405.355.483	405.355.483	-	-	-	-
Tabungan *Wadiah*	6.951.688	6.951.688				
Tabungan *Mudharabah*	2.025.354	2.025.354				
Deposito berjangka	413.223.653	228.618.343	114.696.005	50.605.163	19.304.142	-
Deposito berjangka *Mudharabah*	18.712.677	59.043	466.940	4.990.707	13.195.987	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	17.969.829	15.928.692	2.041.137	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	49.902.938	35.877.876	8.538.598	1.640.805	3.845.659	-
Liabilitas derivatif	184.605	28.523	48.326	33.641	74.115	-
Liabilitas akseptasi	9.346.063	1.759.387	3.283.408	4.224.439	78.829	-
Surat berharga yang diterbitkan	38.620.837	-	-	2.686.847	35.933.990	-
Pinjaman yang diterima	30.921.771	778.064	3.104.493	8.286.445	18.752.769	
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.366	-	-	-	1.465.366	-
Liabilitas lain-lain*)	8.183.212	1.236.065	638.633	747.578	5.358.002	202.934
	1.185.340.592	**881.095.634**	**132.817.540**	**73.215.625**	**98.008.959**	**202.934**
Perbedaan Jatuh Tempo	**181.201.278**	**(517.837.841)**	**(1.133.824)**	**72.949.114**	**634.081.347**	**(6.858.118)**

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (*Value-at-Risk*) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar.

1. *Value-at-Risk* (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model *internal* untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio trading berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2020 dan 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

	31 Desember 2020	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	7.549,36	19.796,99
Tertinggi	13.946,91	29.419,18
Terendah	134,90	14.237,66

	31 Desember 2019	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	46.903,71	39.642,57
Tertinggi	92.187,93	72.630,74
Terendah	211,91	6.374,02

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

BRI telah mengembangkan metodologi pengukuran dampak pengaruh pergerakan suku bunga dalam banking book melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Posisi Desember 2020, secara individu BRI mempunyai nilai Δ EVE (Economic Value of Equity) sebesar 7,53% (perbandingan terhadap modal Tier 1).

Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	Rupiah (%)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Aset		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	3,34	5,08
Efek-efek	6,90	7,46
Kredit yang diberikan	10,40	11,64
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	6,74
Piutang sewa pembiayaan	18,53	13,42
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	2,85	3,17
Tabungan	0,69	0,85
Deposito	5,61	6,71
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	3,17	4,44
Pinjaman yang diterima	0,02	0,02
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,85	4,87
Surat berharga yang diterbitkan	8,12	8,20

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

	Valas (%)	
	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Aset		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,40	1,82
Efek-efek	2,74	2,97
Kredit yang diberikan	3,80	4,27
Piutang sewa pembiayaan	5,63	6,13
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	0,96	0,54
Tabungan	0,31	0,37
Deposito	2,24	2,54
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	0,16	0,14
Pinjaman yang diterima	1,30	3,34
Surat berharga yang diterbitkan	4,29	4,29

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book* (tidak diaudit), dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

31 Desember 2020	
Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
+/- 1 %	+/- 1.929.169

31 Desember 2019	
Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
+/- 1 %	+/- 1.627.306

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit):

31 Desember 2020

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	32.161.564	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	6.749.966	-	-	95.674	2.308.738	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	57.614.764	8.924.921	-	-	-	66.539.685
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	27.666.020	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	189.545.942	-	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	110.403.693	-	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.693.175	1.125.393	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	-	-	-	1.567.659	1.567.659
Kredit yang diberikan						
Mikro	11.747.964	64.883.617	-	301.010.551	-	377.642.132
Ritel	32.007.715	172.870.293	50.002.634	99.339.047	-	354.219.689
Korporasi	20.735.461	146.860.925	-	-	-	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	-	-	-	-	38.915.673	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	22.834	111.590	415.550	3.067.748	1.502	3.619.224
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.035.207	1.035.207
Aset lain-lain**)	1.576.987	-	-	-	24.625.104	26.202.091
	255.252.839	**394.776.739**	**50.418.184**	**731.128.675**	**107.432.883**	**1.539.009.320**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2020						
	Suku bunga mengambang					
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	11.845.910	11.845.910
Simpanan nasabah						
Giro	-	-	-	185.151.229	-	185.151.229
Giro *Wadiah*	-	-	-	-	6.303.202	6.303.202
Giro *Mudharabah*	-	-	-	-	1.623.563	1.623.563
Tabungan	213.506.040	-	-	246.947.548	-	460.453.588
Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	9.247.604	9.247.604
Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	6.147.015	6.147.015
Deposito berjangka	369.926.756	48.032.767	8.440.027	-	-	426.399.550
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	-	-	-	25.776.398	25.776.398
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.996	-	-	-	-	23.785.996
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	35.643.825	2.819.748	2.015.099	-	-	40.478.672
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	34.489.091	-	34.489.091
Pinjaman yang diterima	8.200.862	15.042.822	12.725.301	-	-	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	500.887	964.505	1.465.392
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	9.054.084	9.054.084
	651.063.479	**65.895.337**	**23.180.427**	**467.088.755**	**78.187.491**	**1.285.415.489**
Perbedaan (*gap*) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(395.810.640)**	**328.881.402**	**27.237.757**	**264.039.920**	**29.245.392**	**253.593.831**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *Tabarru'* dan dana *Syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2019

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	30.219.214	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	-	-	-	-	71.416.449
Giro pada Bank lain	8.163.340	-	-	66.631	2.007.765	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	74.896.410	41.958.317	-	-	-	116.854.727
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	17.712.056	-	17.712.056
Tersedia untuk dijual	-	-	-	124.153.732	-	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	53.975.143	-	53.975.143
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	34.317.499	-	-	-	-	34.317.499
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	30.306	-	-	-	-	30.306
Dimiliki hingga jatuh Tempo	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.275.508	306.736	-	-	-	22.582.244
Tagihan derivatif	-	-	-	-	210.396	210.396
Kredit yang diberikan						
Mikro	11.832.932	36.294.498	-	281.408.381	-	329.535.811
Ritel	91.603.270	121.009.964	46.417.803	99.268.124	-	358.299.161
Korporasi	41.588.711	148.007.510	-	-	-	189.596.221
Piutang dan pembiayaan syariah	-	-	-	-	25.766.197	25.766.197
Piutang sewa pembiayaan	549.969	1.366.947	2.274.680	-	-	4.191.596
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	9.346.063	9.346.063
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	293.379	293.379
Aset lain-lain**)	3.438	-	-	-	5.897.629	5.901.067
	357.777.832	**348.943.972**	**48.692.483**	**576.584.067**	**73.740.643**	**1.405.738.997**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2019

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	7.549.312	7.549.312
Simpanan nasabah						
Giro	106.920.462	-	-	61.905.673	-	168.826.135
Giro *Wadiah*	-	-	-	-	2.020.866	2.020.866
Giro *Mudharabah*	-	-	-	-	4.080.803	4.080.803
Tabungan	188.896.000	-	-	216.459.483	-	405.355.483
Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	6.951.688	6.951.688
Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	2.025.354	2.025.354
Deposito berjangka	329.124.847	64.794.664	19.304.142	-	-	413.223.653
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	-	-	-	18.712.677	18.712.677
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	15.928.692	2.041.137	-	-	-	17.969.829
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	44.416.474	1.640.805	3.845.659	-	-	49.902.938
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	184.605	184.605
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	9.346.063	9.346.063
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	38.620.837	-	38.620.837
Pinjaman yang diterima	4.894.519	5.333.099	20.694.153			30.921.771
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	500.250	965.116	1.465.366
Liabilitas lain-lain*)	-	-	-	-	8.183.212	8.183.212
	690.180.994	**73.809.705**	**43.843.954**	**317.486.243**	**60.019.696**	**1.185.340.592**
Perbedaan (*gap*) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(332.403.162)**	**275.134.267**	**4.848.529**	**259.097.824**	**13.720.947**	**220.398.405**

*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, per mata uang, sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
Mata Uang	**Aset**	**Liabilitas**	**PDN**
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	268.939.015	267.729.710	1.209.305
Dolar Singapura	13.361.892	13.785.073	423.181
Yen Jepang	909.294	888.710	20.584
Pound Sterling Inggris	213.020	219.389	6.369
Dolar Australia	354.057	344.763	9.294
Euro Eropa	4.068.561	4.046.125	22.436
Renminbi	1.025.266	1.019.655	5.611
Dolar Kanada	7.635	40.090	32.455
Lain-lain	728.317	503.740	224.577
			1.953.812
Modal (Catatan 49a)			183.337.537
Rasio PDN			**1,07%**

	31 Desember 2019		
Mata Uang	**Aset**	**Liabilitas**	**PDN**
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	219.266.206	221.562.192	2.295.986
Dolar Singapura	10.602.860	10.686.133	83.273
Yen Jepang	1.057.995	843.438	214.557
Pound Sterling Inggris	202.091	230.539	28.448
Dolar Australia	222.729	301.232	78.503
Euro Eropa	4.388.079	4.121.644	266.435
Renminbi	3.240.454	3.274.614	34.160
Dolar Kanada	24.029	1	24.028
Lain-lain	972.453	334.862	637.591
			3.662.981
Modal (Catatan 49a)			195.986.650
Rasio PDN			**1,87%**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penerapan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/*Desk*), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Satuan kerja manajemen risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Di samping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi *anti fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Pasar mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulanan bersama Divisi/*Desk* dan unit kerja terkait.

Audit Intern selaku *third line of defence* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Audit Intern Wilayah BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal pada manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (BRI OPRA) yang mencakup modul *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI)/*Loss Even Database (LED)*, Forum MR dan Maturitas. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional telah dikinikan dalam Surat Edaran No. S.17-DIR/MOP/03/2020.

Upaya pemahaman manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

1. *Risk Control and Self Assessment* (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan *Loss Event Database* (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasiskan pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai dari tahun 2007 disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type*/kategori kejadian dan dilihat dari dimensi frekuesi kejadian dan *severity/loss.*

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework.*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Kantor Wilayah yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. *Business Continuity Management* (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.26-DIR/DMR/12/2016.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER Plan) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritikal. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER Plan dan BC Plan dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. *Business Continuity Management* (BCM) (lanjutan)

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI. Ketentuan mengenai tanggap darurat bencana di tempat kerja dirumuskan melalui Surat Edaran No. 110-DIR/MOP/12/2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB yang dimaksud.

Digital and Operational Risk Management Division dan Pasar bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.89-DIR/MOP/11/2017.

8. Penerapan Strategi Anti *Fraud* BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap pencegahan agar kejadian *fraud* dapat diminimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut BRI telah mengembangkan alat sebagai *early warning system*. Manajemen BRI telah berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap *fraud* (*zero tolerance*). Sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*, Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI secara berkala menandatangani Komitmen *Anti Fraud* sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* yang diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.18-DIR/MOP/03/2020.

Dampak penyebaran virus Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang berat terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 tercatat -5,32% dan sedikit membaik di triwulan III-2020 dengan tumbuh -3,49%. Hampir seluruh sektor perekonomian turut terkena dampak baik sektor riil maupun sektor keuangan. Di sektor riil, ketidakpastian penyebaran pandemi dan pembatasan mobilitas telah menyebabkan permintaan agregat lemah sebagaimana terlihat dalam beberapa indikator. ***Satu,*** turunnya konsumsi masyarakat akibat dua hal, yakni penundaan belanja barang dan jasa oleh konsumen dan pelemahan daya beli; ***dua***, penurunan nilai investasi; dan ***tiga***, perlambatan ekspor akibat melemahnya permintaan global dan penurunan impor karena turunnya permintaan domestik. Di sektor keuangan, dinamika global, kekuatiran investor terhadap penyebaran dan penanganan Covid-19 serta terhadap proyeksi ekonomi Indonesia juga telah menyebabkan modal keluar menuju destinasi aman *(safe haven)*, kinerja pasar saham dan eksposur modal asing di pasar obligasi turun, sehingga nilai Rupiah terdepresiasi terhadap Dollar AS.

Sektor perbankan dan kinerja BRI turut terkena dampak dari peningkatan risiko kredit akibat menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya serta menurunnya permintaan kredit secara nasional. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan melemah, pada November 2020 tercatat -1,4%.

Dilatarbelakangi oleh situasi makro yang demikian, pemulihan ekonomi dan kinerja perusahaan akan sangat bergantung dari perkembangan kasus Covid-19 dan penanganannya. Diperkirakan bahwa ketidakpastian masih sangat tinggi di masa yang akan datang. Kondisi ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan rentang yang cukup lebar dan cenderung menurun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Perusahaan telah mengevaluasi dampak dari Covid-19 dan mengidentifikasi dampak terhadap laporan keuangan perusahaan. Indikator makro ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan terus dimonitor secara intensif. Perusahaan juga melakukan *monitoring* terhadap kinerja debitur yang sedang mendapatkan fasilitas restrukturisasi dan proyeksi pasca kebijakan relaksasi dari regulator.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan *People's First*

a. Penerapan protokol Kesehatan dan keamanan;
   1. Pelaksanaan disinfeksi dan sterilisasi lingkungan kerja;
   2. Vaksinasi bagi pekerja; dan
   3. Penyediaan alat-alat penunjang bagi pekerja dalam rangka antisipasi persebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker, dan vitamin

b. Kebijakan *Work from Home*
   1. Pembatasan jam kerja operasional;
   2. *Work From Home* (WFH); dan
   3. Penyediaan *flexible office space*

c. Optimalisasi Inisiatif Digital
   1. Aplikasi *digital office;*
   2. Aplikasi digital *loan processing;* dan
   3. *Dashboard monitoring* harian Melakukan langkah-langkah antisipatif melalui restrukturisasi pada sektor yang terdampak apabila terdapat gejala penurunan *cash flow*.

2. Strategi pertumbuhan bisnis yang *sustainable*

a. Loan portfolio
   1. Pertumbuhan bisnis secara selektif
   2. Program restrukturisasi
   3. Program relaksasi pinjaman

b. Liquidity and market activities
   1. Menjaga GWM, *secondary reserve, loan to deposit ratio*, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)
   2. Menjaga posisi devisa netto pada *long position*
   3. Menjaga *cash ratio*

3. Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap praktik bisnis BRI.

Perusahaan juga telah merespon dan mengimplementasikan peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah dan pihak regulator sebagai berikut:

1. **POJK No. 11/2020** Kebijakan relaksasi penetapan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.
2. **Perppu 1 / 2020** Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
3. **Permenko 8 / 2020** Perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak Covid-19 (termasuk di dalamnya ketentuan subsidi bunga).
4. **PP No. 23 / 2020** Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Direvisi Melalui PP 43).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut (lanjutan):

3. Good Corporate Governance (lanjutan)

Perusahaan juga telah merespon dan mengimplementasikan peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah dan pihak regulator sebagai berikut (lanjutan):

5. **PMK No.71/2020** Program Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan untuk Kredit UMKM.
6. **PP 33 / 2020** Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam melaksanakan langkah-langkah Penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
7. **PMK No.85 /** 2020 Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit UMKM dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PEN (Mencabut PMK 65).
8. **PMK No.98 / 2020** Tata Cara Penjaminan Untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN.
9. **PP No.43 / 2020** Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN.
10. **PMK No.104 / 2020** Penempatan Dana Pemerintah ke Bank Mitra (Mencabut PMK 64 and PMK 70).

Arah Kebijakan Bank

Disrupsi pandemi Covid-19 telah secara nyata berpengaruh pada seluruh aktivitas perekonomian nasional, termasuk bisnis industri perbankan. BRI sebagai entitas bisnis milik negara memiliki peran untuk turut menopang ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas perbankan yang diberikan. BRI telah melakukan *review* atas rencana bisnis yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengakomodasi potensi gangguan lebih lanjut dari pandemi Covid-19.

BRI menempatkan kesehatan dan keselamatan manusia, baik karyawan maupun pelanggan, sebagai prioritas utama. Serangkaian kebijakan telah dibuat untuk mendukung hal ini, di antaranya protokol kesehatan dan keselamatan bagi pekerja BRI seperti pembagian pelindung diri berupa masker, face shield, hand sanitizer, pembagian insentif vitamin, hingga implementasi *flexy working* untuk mengurangi konsentrasi massa di dalam ruangan kantor. Sebagai pusat kendali dan informasi selama pandemi, BRI memiliki *Banking Command Center* untuk memonitor perkembangan terkini terkait Covid-19 dan dampaknya terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan.

Ragam strategi bisnis dipersiapkan secara cermat dengan tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang Perusahaan dengan tetap fokus pada pilar-pilar pertumbuhan *Corporate Plan* 2018-2022 yaitu segmen mikro, kecil, menengah, konsumer, korporasi dan sinergi Perusahaan Anak. Transformasi digital yang tengah dilakukan BRI tetap berjalan sesuai cita-cita yang diharapkan. Pengembangan sistem untuk meningkatkan keandalan *mobile - digital banking services* terus diupayakan sehingga pada masa pandemi ini nasabah tetap dapat menikmati layanan perbankan BRI secara optimal dari mana saja tanpa terbatas tempat dan waktu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Arah Kebijakan Bank (lanjutan)

Guna menjaga peluang tercapainya aspirasi sebagai *The Most Valuable Bank in Southeast Asia & Home to the Best Talent* di tahun 2022, maka garis besar arah kebijakan BRI di masa pandemi Covid-19 ini adalah sebagai berikut:

1. *Asset Quality*, fokus menjaga kualitas. Gangguan terhadap bisnis Debitur direspons segera dengan kebijakan yang tepat baik melalui restrukturisasi maupun penyelesaian untuk menghindari risiko kerugian yang lebih buruk.
2. *Operational Efficiency*, fokus pada *cost saving activity*. Perilaku hemat atas pengeluaran non bisnis yang dapat ditekan seminimal mungkin namun tidak berpotensi menimbulkan gangguan layanan dan operasional diterapkan di seluruh level unit kerja BRI. Efisiensi juga diupayakan dengan melakukan *re-engineering* proses bisnis dengan pendekatan digitalisasi yang memungkinkan beragam *project* dapat diselesaikan dengan lebih hemat sumber daya.
3. *Selective Growth*, fokus pada pertumbuhan yang berkualitas. Ekspansi bisnis di masa pandemi dilakukan secara cermat dan selektif. Fokus pada optimalisasi potensi bisnis yang spesifik dan strategis dengan tingkat risiko yang rendah terutama daerah non Zona Merah untuk menjaga kinerja bisnis BRI secara nasional.

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	**Nilai Wajar**
Aset		
Kas	32.161.564	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	51.530.969
Giro pada bank lain	9.060.535	9.060.535
Penempatan pada bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	66.521.615	66.521.615
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi	27.666.020	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	189.545.942	189.545.942
Biaya perolehan diamortisasi	110.054.752	118.327.334
Wesel Ekspor dan tagihan lainnya	26.246.814	26.246.814
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	1.576.659
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	871.759.389	855.687.745
Piutang sewa pembiayaan	3.406.164	4.409.062
Tagihan akseptasi	6.271.176	6.271.176
Penyertaan saham *)	1.035.206	1.035.206
Aset lain-lain **)	26.202.091	26.202.091
Total	**1.469.857.464**	**1.463.061.300**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	**Nilai Wajar**
Liabilitas		
Liabilitas segera	11.845.910	11.845.910
Simpanan nasabah ***)		
Giro	191.454.431	191.454.431
Tabungan	469.701.192	469.701.192
Deposito berjangka	426.399.550	426.399.550
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		
Giro	829.698	829.698
Tabungan	30.720	30.720
Deposito berjangka dan *on call*	14.544.000	14.544.000
Inter-bank call money	8.381.578	8.381.578
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.478.672	40.478.672
Liabilitas derivatif	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	6.817.437	6.817.437
Surat berharga yang diterbitkan	34.489.091	35.911.853
Pinjaman yang diterima	35.968.985	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.392	1.479.040
Liabilitas lain-lain ****)	9.054.084	9.054.084
Total	**1.251.868.514**	**1.253.304.924**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.
****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

	31 Desember 2019	
	Nilai Tercatat	**Nilai Wajar**
Aset		
Kas	30.219.214	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	71.416.449	71.416.499
Giro pada bank lain	10.237.736	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	116.854.727	116.854.727
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi	17.712.056	17.712.056
Tersedia untuk dijual	124.153.732	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.974.385	55.962.246
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	34.185.258	34.185.258
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Tersedia untuk dijual	30.306	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.100.000	1.099.670
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	22.582.244
Tagihan derivatif	210.396	210.396
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	864.088.521	844.750.736
Piutang sewa pembiayaan	4.104.096	3.682.306
Tagihan akseptasi	9.346.063	9.346.063
Penyertaan saham *)	293.329	293.329
Aset lain-lain **)	5.901.067	5.901.067
Total	**1.366.409.579**	**1.348.637.585**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	31 Desember 2019	
	Nilai Tercatat	**Nilai Wajar**
Liabilitas		
Liabilitas segera	7.549.312	7.549.312
Simpanan nasabah ***)		
Giro	170.847.001	170.847.001
Tabungan	412.307.171	412.307.171
Deposito berjangka	413.223.653	413.223.653
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya		
Giro	556.594	556.594
Tabungan	9.148	9.148
Deposito berjangka dan on call	9.965.534	9.965.534
Inter-bank call money	7.438.553	7.438.553
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	49.902.938	49.902.938
Liabilitas derivatif	184.605	184.605
Liabilitas akseptasi	6.817.436	6.817.436
Surat berharga yang diterbitkan	34.489.091	35.911.853
Pinjaman yang diterima	35.968.985	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.392	1.479.040
Liabilitas lain-lain ****)	9.054.084	9.054.084
Total	**1.159.779.497**	**1.161.215.907**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.
****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

a) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan dan liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

   Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

   Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

   Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kredit yang diberikan dan Piutang dan Pembiayaan Syariah

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Portofolio piutang dan pembiayaan syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang Sewa Pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2020			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	18.560.819	18.560.819	-	-
Singapore Government Securities (SIGB)	10.606	10.606	-	-
Reksadana	8.283.969	8.283.969	-	-
Obligasi	388.491	388.491	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	49.419	49.419	-	-
U.S Treasury Bonds	14.816	14.816	-	-
Obligasi Subordinasi	48.313	48.313	-	-
Sukuk Bank Indonesia	49.419	49.419	-	-
Lainnya	223.145	223.145	-	-
Tagihan derivatif	1.576.659	-	1.576.659	-
	29.205.656	27.628.997	1.576.659	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset keuangan (lanjutan)				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	159.132.122	159.132.122	-	-
Obligasi	15.545.018	15.545.018	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	10.674.207	10.674.207	-	-
Reksadana	473.676	473.676	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	680.462	680.462	-	-
MAS Bills	816.470	816.470	-	-
U.S Treasury Bonds	778.499	778.499	-	-
U.S Treasury Bills	210.746	210.746	-	-
Obligasi Subordinasi	196.344	196.344	-	-
Medium-Term Note	341.167	341.167	-	-
Singapore Government Securities (SIGB)	402.275	402.275	-	-
Lainnya	294.956	294.956	-	-
	189.545.942	189.545.942	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	112.701.400	112.701.400	-	-
Obligasi	2.716.319	2.716.319	-	-
Obligasi Subordinasi	37.587	37.587	-	-
Medium-Term Note	114.299	114.299	-	-
Tagihan *Risk Participation*	2.723.817	2.723.817	-	-
Treasury Bill	33.892	33.892	-	-
	118.327.314	118.327.314	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	855.687.745	-	793.504.738	62.183.007
Piutang sewa pembiayaan	3.171.883	-	-	3.171.883
	858.859.628	-	793.504.738	65.354.890
Total aset keuangan	**1.195.938.540**	**335.502.253**	**795.081.397**	**65.354.890**
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	407.774	-	407.774	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	35.911.853	35.911.853	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.474.755	1.474.755	-	-
	37.386.608	37.386.608	-	-
Total liabilitas keuangan	**37.794.382**	**37.386.608**	**407.774**	**-**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2019			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	10.106.230	10.106.230	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.986.438	1.986.438	-	-
Sukuk Bank Indonesia	1.819.017	1.819.017	-	-
Reksadana	1.795.156	1.795.156	-	-
Obligasi	933.369	933.369	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	803.319	803.319	-	-
Tagihan derivatif	210.396	-	210.396	-
Obligasi Subordinasi	49.174	49.174	-	-
Surat Berharga Komersial	28.321	28.321	-	-
Lainnya	191.032	191.032	-	-
	17.922.452	17.712.056	210.396	-
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	96.223.816	96.223.816	-	-
Obligasi	15.385.294	15.385.294	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	7.507.411	7.507.411	-	-
Reksadana	1.928.256	1.928.256	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	961.448	961.448	-	-
MAS Bills	808.138	808.138	-	-
Medium-Term Note	438.648	438.648	-	-
Obligasi Subordinasi	343.801	343.801	-	-
Singapore Government Securities	191.256	191.256	-	-
Surat Berharga Komersial	18.881	18.881	-	-
Lainnya	346.783	346.783	-	-
	124.153.732	124.153.732	-	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	44.688.114	44.688.114	-	-
Obligasi	3.467.988	3.467.988	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	1.099.670	1.099.670	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	1.250.000	1.250.000	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	488.601	488.601	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	150.305	150.305	-	-
Medium-Term Note	61.600	61.600	-	-
Obligasi Subordinasi	35.999	35.999	-	-
Lainnya	3.833.136	3.833.136	-	-
	55.075.413	55.075.413	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	844.750.736	-	823.178.354	21.572.382
Piutang sewa pembiayaan	3.682.306	-	-	3.682.306
	848.433.042	-	823.178.354	25.254.688
Total aset keuangan	**1.045.584.639**	**196.941.201**	**823.388.750**	**25.254.688**
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	184.605	-	184.605	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	39.467.559	39.467.559	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.400	1.465.400	-	-
	40.932.959	40.932.959	-	-
Total liabilitas keuangan	**41.117.564**	**40.923.959**	**184.605**	**-**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. INFORMASI SEGMEN

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a.

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank BRISyariah Tbk	Perbankan Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit)

	Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga dan premi - neto	35.234.044	27.969.778	4.685.993	7.257.183	4.944.570	80.091.568
Pendapatan operasional lainnya	9.074.782	12.020.213	3.583.072	3.752.066	1.033.706	29.463.839
Total pendapatan	44.308.826	39.989.991	8.269.065	11.009.249	5.978.276	109.555.407
Beban operasional lainnya	(19.658.307)	(18.911.219)	(3.129.596)	(4.697.136)	(3.535.101)	(49.931.359)
Beban CKPN	(12.370.463)	(12.654.674)	(3.488.650)	(2.475.351)	(1.860.746)	(32.849.884)
Total beban	(32.028.770)	(31.565.893)	(6.618.246)	(7.172.487)	(5.395.847)	(82.781.243)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(38.614)	37.234	(30.077)	833	(18.694)	(49.318)
Laba sebelum beban pajak	12.241.442	8.461.332	1.620.742	3.837.595	563.735	26.724.846
Beban pajak	(3.653.469)	(2.525.292)	(483.712)	(1.145.335)	(256.645)	(8.064.453)
Laba tahun berjalan	**8.587.973**	**5.936.040**	**1.137.030**	**2.692.260**	**307.090**	**18.660.393**
Aset segmen						
Kredit	351.356.224	360.333.387	168.985.146	-	61.318.347	941.993.104
CKPN	(17.107.904)	(18.587.559)	(28.433.803)	-	(2.698.285)	(66.827.551)
Non kredit	-	-	-	599.948.908	30.709.926	630.658.834
CKPN Non Kredit	-	-	-	(2.314.494)	(18.810)	(2.333.304)
	334.248.320	**341.745.828**	**140.551.343**	**597.634.414**	**89.311.178**	**1.503.491.083**
Liabilitas segmen						
Pendanaan	335.422.171	410.298.277	306.943.422	-	34.891.303	1.087.555.173
Non pendanaan	-	-	-	174.762.035	16.029.068	190.791.103
	335.422.171	**410.298.277**	**306.943.422**	**174.762.035**	**50.920.371**	**1.278.346.276**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit)

	Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga dan premi - neto	41.796.678	27.839.259	4.710.388	4.213.978	4.157.730	82.718.033
Pendapatan operasional lainnya	9.524.891	10.619.792	3.356.078	4.050.875	887.494	28.439.130
Total pendapatan	51.321.569	38.459.051	8.066.466	8.264.853	5.045.224	111.157.163
Beban operasional lainnya	(17.750.715)	(18.142.869)	(2.883.539)	(3.005.352)	(3.183.150)	(44.965.625)
Beban CKPN	(10.027.710)	(5.875.145)	(4.533.679)	(870.873)	(1.452.198)	(22.759.605)
Total beban	(27.778.425)	(24.018.014)	(7.417.218)	(3.876.225)	(4.635.348)	(67.725.230)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(14.836)	(35.079)	(16.911)	(5.339)	4.285	(67.880)
Laba sebelum beban pajak	23.528.308	14.405.958	632.337	4.383.289	414.161	43.364.053
Beban pajak	(4.887.111)	(2.992.290)	(131.344)	(910.462)	(29.021)	(8.950.228)
Laba tahun berjalan	**18.641.197**	**11.413.668**	**500.993**	**3.472.827**	**385.140**	**34.413.825**
Aset segmen						
Kredit	329.535.811	338.932.020	191.090.463	-	47.830.692	907.388.986
CKPN	(15.213.236)	(5.817.423)	(16.507.275)	-	(1.658.435)	(39.196.369)
Non kredit	-	-	-	517.034.482	26.990.443	544.024.925
	314.322.575	**333.114.597**	**174.583.188**	**517.034.482**	**73.162.700**	**1.412.217.542**
Liabilitas segmen						
Pendanaan	296.563.187	374.453.208	298.733.611	-	26.627.819	996.377.825
Non pendanaan	-	-	-	169.662.392	17.115.453	186.777.845
	296.563.187	**374.453.208**	**298.733.611**	**169.662.392**	**43.743.272**	**1.183.155.670**

c. Segmen Geografi

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografi:

	Total pendapatan	
	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
Keterangan	**2020**	**2019**
Indonesia	108.764.439	110.410.941
Amerika Serikat	510.377	459.455
Singapura	170.540	187.122
Timor Leste	101.482	91.853
Hong Kong	8.569	7.792
Total	**109.555.407**	**111.157.163**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

c. Segmen Geografi (lanjutan)

	Laba sebelum beban pajak	
	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
Keterangan	**2020**	**2019**
Indonesia	26.261.275	41.887.290
Amerika Serikat	275.445	1.278.949
Singapura	124.907	137.178
Timor Leste	62.597	60.258
Hong Kong	622	378
Total	**26.724.846**	**43.364.053**

	Total Aset	
Keterangan	**31 Desember 2020**	**31 Desember 2019**
Indonesia	1.470.892.695	1.383.810.745
Amerika Serikat	19.708.131	17.707.316
Singapura	11.695.606	9.611.498
Timor Leste	1.186.169	1.080.914
Hong Kong	8.482	7.069
Total	**1.503.491.083**	**1.412.217.542**

	Total Liabilitas	
Keterangan	**31 Desember 2020**	**31 Desember 2019**
Indonesia	1.246.806.862	1.155.406.326
Amerika Serikat	18.970.475	17.219.729
Singapura	11.500.136	9.604.413
Timor Leste	1.067.486	924.766
Hong Kong	1.317	436
Total	**1.278.346.276**	**1.183.155.670**

43. PROGRAM BAGI PEKERJA

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja terdiri atas:

	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Program pensiun imbalan pasti	987.014	1.213.949
Program pemutusan hubungan kerja	918.734	754.471
Program penghargaan tanda jasa	1.431.862	1.328.634
Program cuti besar	2.174.576	2.146.923
Program BPJS kesehatan pasca kerja	774.578	22.737
Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan	265.245	66.084
Total (catatan 28)	**6.552.009**	**5.532.798**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

Penilaian aktuaria atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut:

		Tanggal Laporan	
Entitas	**Aktuaria Independen**	**31 Desember 2020**	**31 Desember 2019**
Entitas induk	KKA Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria)	15 Januari 2021	3 Januari 2020
Entitas anak			
PT Bank BRISyariah Tbk	KKA Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria)	4 Januari 2021	2 Januari 2020
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	KKA Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria)	4 Januari 2021	2 Januari 2020
PT Asuransi BRI Life	PT Padma Radya Aktuaria	4 Januari 2021	2 Januari 2020
PT BRI Multifinance Indonesia	PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa	8 Januari 2021	20 Januari 2020
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa	22 Januari 2021	10 Januari 2020
PT BRI Ventura Investama	KKA Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria)	4 Januari 2021	10 Januari 2020
PT BRI Asuransi Indonesia	PT Dayamandiri Dharmakonsilindo	3 Januari 2021	13 Januari 2020

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 42,96% dari penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	**31 Desember 2019**
Tingkat diskonto	7,70%	8,20%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti awal tahun	18.794.249	15.544.197
Beban bunga	1.499.133	1.276.564
Biaya jasa kini	330.869	288.758
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(1.024.290)	(982.764)
Kerugian (keuntungan) aktuaria	1.071.067	2.667.494
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti akhir tahun	**20.671.028**	**18.794.249**

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai wajar aset program awal tahun	17.580.301	15.583.904
Hasil pengembangan riil	1.164.900	1.643.197
Pembayaran iuran-iuran (contributions) pemberi kerja	1.894.813	1.266.112
Pembayaran iuran-iuran (contributions) peserta program	68.290	69.852
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(1.024.290)	(982.764)
Total aset program	**19.684.014**	**17.580.301**

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	1.213.949	-
Beban program pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 36)	342.140	212.218
Pembayaran iuran tahun berjalan	(1.894.813)	(1.266.112)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti - neto	1.325.738	2.267.843
Saldo akhir (catatan 28)	**987.014**	**1.213.949**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	650.398	(1.617.445)
Kerugian (keuntungan)	1.071.067	2.667.494
Imbal hasil atas aset program	254.671	(356.608)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto (aset)	-	(43.043)
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	**1.976.136**	**650.398**

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	330.869	288.758
Iuran peserta program	(68.290)	(69.852)
Beban bunga - neto	79.561	(6.688)
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 36)	**342.140**	**212.218**

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuaria atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,20%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai wajar aset	4.929.907	4.234.797
Nilai kini liabilitas THT	(2.672.216)	(2.182.112)
Surplus	**2.257.691**	**2.052.685**

Mutasi atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	-	-
Beban THT	138.778	104.570
Pengukuran kembali liabilitas THT - neto	(21.690)	6.276
Pembayaran iuran periode berjalan	(117.088)	(110.846)
Saldo akhir liabilitas	**-**	**-**

Pengukuran kembali atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	299.809	293.533
Kerugian (keuntungan) aktuaria	286.505	74.201
Imbal hasil atas (aset) liabilitas program	(346.934)	106.203
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	38.738	(174.128)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas THT - neto	**278.118**	**299.809**

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	201.631	157.704
Iuran peserta program	(55.849)	(52.870)
Beban bunga - neto	(7.004)	(264)
Beban THT	**138.778**	**104.570**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (entitas induk)

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp351.955 dan Rp325.460 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 36). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) BRI Agro (entitas anak)

BRI Agro menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi BRI Agro untuk dana pensiun adalah sebesar 87,8% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing karyawan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebesar Rp811 dan Rp775 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 36).

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan PHK dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuaria atas kewajiban perseroan yang berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,60%	8,20%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,50 - 7,80%	7,50 - 8,20%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00 - 10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999	TMI 2019 TMI 2011 dan TMI-II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10% dari tingkat kematian	5,00 - 10% dari tingkat kematian

Mutasi atas liabilitas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	754.471	1.442.491
Beban PHK (Catatan 36)	177.916	350.909
Pembayaran manfaat aktual	(136.932)	(124.650)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) PHK - neto	127.666	(908.458)
Iuran yang dibayarkan	(3.617)	(5.586)
Biaya terminasi	(770)	(235)
Saldo akhir (Catatan 28)	**918.734**	**754.471**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	(1.205.929)	(288.978)
Keuntungan aktuaria	131.811	(916.951)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	**(1.074.118)**	**(1.205.929)**

Perhitungan beban program PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	112.802	226.043
Beban bunga	56.528	129.084
Beban Pesangon	14	-
Beban jasa lalu	1.630	(4.719)
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	443	266
Pembayaran biaya terminasi	295	235
Selisih imbalan kerja yang dicatat pada beban	6.204	-
Beban PHK (Catatan 36)	**177.916**	**350.909**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI dan entitas anak juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode Projected Unit Credit serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,30%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode Projected Unit Credit serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	7,75 - 8,10%	6,20 – 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 10,00	7,00 - 10,00
Tingkat kenaikan harga emas	8,00 (BRI Agro)	5,00 (BRI Agro)
Tingkat kematian	TMI II 1999 dan TM IV 2019	TMI 2011 dan TMI-II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi untuk liabilitas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal liabilitas	1.328.634	1.130.266
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 36)	234.875	272.389
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(131.647)	(74.021)
Liabilitas penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**1.431.862**	**1.328.634**

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	117.843	100.621
Beban bunga	102.605	99.476
Biaya jasa lalu	4.131	-
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui	10.296	72.292
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 36)	**234.875**	**272.389**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,90%	7,90%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	4,90 - 7,50%	6,20 - 7,60%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00 - 10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999	TMI 2019 TMI 2011 dan TMI-II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi liabilitas atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal liabilitas	2.146.923	1.859.323
Beban cuti besar (Catatan 36)	305.765	552.180
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(278.112)	(264.580)
Liabilitas cuti besar (Catatan 28)	**2.174.576**	**2.146.923**

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	277.073	277.793
Beban bunga	158.405	161.910
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui	(130.113)	112.247
Biaya jasa lalu	400	230
Beban cuti besar (Catatan 36)	**305.765**	**552.180**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

Perhitungan aktuaria atas program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi (entitas induk) sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,10%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	4,88	4,88
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	2.242.107	944.018
Nilai wajar aset	(1.467.529)	(921.281)
Defisit	**774.578**	**22.737**

Mutasi liabilitas atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal liabilitas	22.737	-
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 36)	906.326	30.966
Pembayaran iuran periode berjalan	(570.082)	-
Pengukuran kembali liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS	415.597	(8.229)
Liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 28)	**774.578**	**22.737**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	(19.994)	(11.765)
Kerugian (keuntungan) aktuaria	335.603	70.102
Imbal hasil atas aset program	79.994	54.665
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas	-	(132.996)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto	**395.603**	**(19.994)**

Beban program kesehatan pasca kerja di BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa kini	50.531	29.675
Beban bunga - neto	(21.247)	1.291
Biaya jasa lalu	877.042	-
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 36)	**906.326**	**30.966**

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana manfaat tambahan BRI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,70%	8,20%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI 2019	10% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini liabilitas awal tahun	1.893.175	1.539.054
Biaya bunga	145.101	123.409
Biaya jasa kini	18.071	17.609
Biaya jasa lalu	-	205.448
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(247.304)	(157.400)
(Keuntungan) kerugian aktuaria	189.820	165.055
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**1.998.863**	**1.893.175**

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai wajar aset program awal tahun	1.827.092	1.642.904
Pembayaran imbalan kerja (*benefit paid*)	(247.304)	(157.400)
Hasil pengembangan riil	149.547	262.476
Pembayaran iuran-iuran (*contributions*) pemberi kerja	4.285	79.112
Total aset program	**1.733.620**	**1.827.092**

Mutasi atas kewajiban program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	66.084	-
Beban (pendapatan) program manfaat lain dana manfaat tambahan - neto	23.315	220.474
Pengukuran kembali liabilitas (aset) - neto	180.131	(75.278)
Pembayaran iuran-iuran (*contributions*) pemberi kerja	(4.285)	(79.112)
Saldo akhir (Catatan 28)	**265.245**	**66.084**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	28.571	103.850
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	189.820	165.055
Imbal hasil atas aset program	(9.689)	(127.761)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas/(aset)	-	(112.573)
Jumlah pengukuran kembali atas (aset) liabilitas imbalan pasti - neto	**208.702**	**28.571**

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya jasa lalu	-	205.448
Biaya jasa kini	18.072	17.609
Bunga - neto	5.243	(2.583)
Beban (pendapatan) program manfaat lain dana manfaat tambahan (Catatan 36)	**23.315**	**220.474**

f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) :

(i) Program pensiun imbalan pasti

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(509.615)
Penurunan	(1%)	570.339

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(i) Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)

	31 Desember 2020
	Analisa iuran
Jatuh tempo	
< 1 tahun	313.033
1 - < 2 tahun	284.962
2 - < 3 tahun	281.411
3 - < 4 tahun	276.288
4 - < 5 tahun	269.731
> 5 tahun	811.185

(ii) Program tunjangan hari tua

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	1%	(217.042)
Penurunan	(1%)	250.687

	31 Desember 2020
	Analisa Iuran
Jatuh tempo	
< 1 tahun	160.660
1 - < 2 tahun	118.883
2 - < 3 tahun	123.256
3 - < 4 tahun	120.447
4 - < 5 tahun	117.896
> 5 tahun	2.031.073

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	1%	(347.202)
Penurunan	(1%)	455.622

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

	31 Desember 2020
	Analisa Iuran
Jatuh tempo	
< 1 tahun	94.360
1 - < 2 tahun	98.986
2 - < 3 tahun	103.970
3 - < 4 tahun	108.924
4 - < 5 tahun	114.058
> 5 tahun	3.464.172

(iv) Cadangan penghargaan tanda jasa

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	1%	(133.063)
Penurunan	(1%)	154.967

	31 Desember 2020
	Analisa nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Jatuh tempo	
< 1 tahun	89.521
1 - < 2 tahun	86.669
2 - < 3 tahun	53.155
3 - < 4 tahun	52.553
4 - < 5 tahun	72.089
> 5 tahun	1.055.471

(v) Cuti besar

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	1%	(136.108)
Penurunan	(1%)	153.998

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(v) Cuti besar

	31 Desember 2020
	Analisa nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Jatuh tempo	
< 1 tahun	296.462
1 - < 2 tahun	168.277
2 - < 3 tahun	128.931
3 - < 4 tahun	139.280
4 - < 5 tahun	161.658
> 5 tahun	1.195.996

44. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komitmen		
Tagihan komitmen		
Pembelian *spot* dan berjangka mata uang asing	3.078.534	5.455.188
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	124.558.239	131.345.624
Penjualan *spot* dan berjangka mata uang asing	55.418.797	33.296.005
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 27d)	8.974.190	6.459.481
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	618.452	145.544
	189.569.678	171.246.654
Komitmen - neto	**(186.491.144)**	**(165.791.466)**
Kontinjensi		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	144.901	126.871
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27d) dalam bentuk:		
Garansi bank	35.931.693	29.202.927
Stand by L/C	8.752.803	15.848.438
	44.684.496	45.051.365
Kontinjensi - neto	**(44.539.595)**	**(44.924.494)**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Karyawan Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Piutang dan pembiayaan syariah, Kredit yang diberikan
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Asuransi Tugu Pratama	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Asuransi atas aset tetap
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Semen Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Citra Waspphutowa	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan akseptasi
PT Hakaaston	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang Sewa Pembiayaan
PT PP Urban	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
PT Kimia Farma Apotek	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, Tagihan Akseptasi
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Petrosida Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Hutama Karya Infrastruktur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang Sewa Pembiayaan
PT Hutama Karya (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang Sewa Pembiayaan
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	59.627	48.885
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37.842	109.226
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.936	1.322
PT Bank Syariah Mandiri	329	206
PT Bank BNI Syariah	7	5
	103.741	159.644
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.098.850	915.962
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	271.750	646.050
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	113.000	537.975
PT Bank Syariah Mandiri	12.000	80.250
PT Bank BNI Syariah	6.500	5.250
	1.502.100	2.185.487
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	282.793.766	150.422.931
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.144.783	1.960.662
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.455.261	1.496.994
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.374.914	941.815
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.003.488	984.227
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	937.076	1.205.420
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	899.103	1.025.067
PT Pertamina (Persero)	882.056	769.730
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	871.371	1.387.364
PT Pegadaian (Persero)	731.285	648.751
Lainnya	5.668.696	6.058.473
	298.761.799	166.901.434
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (Catatan 8)		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	824.381	4.003.016
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	388.003	1.084.203
PT Waskita Beton Precast Tbk	121.022	153.922
PT Pupuk Kalimantan Timur	101.324	-
PT PP Presisi Tbk	90.658	14.827
PT Pindad (Persero)	78.889	-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	63.244	1.887
PT Angkasa Pura I (Persero)	47.329	1.696
PT PP Urban	37.324	-
PT Wijaya Karya Industri Energi	12.230	8.898
Lainnya	51.288	8.648.815
	1.815.692	13.917.264

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset (lanjutan)		
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (Catatan 9)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	-	1.130.306
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)		
PT Asuransi Jiwasraya	-	879.053
Kredit yang diberikan (Catatan 12)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	16.182.590	25.998.611
Perum BULOG	5.841.839	14.919.169
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.800.000	1.718.181
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.617.195	602.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.414.805	694.125
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.355.585	1.795.405
PT Pegadaian (Persero)	2.120.147	2.751.793
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.031.937	2.122.094
PT Trans Jabar Tol	1.848.697	2.141.861
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.813.992	20.824
Karyawan Kunci	186.633	22.847
Lain-lain	34.546.291	49.985.744
	74.759.711	102.772.654
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 13)		
PT Angkasa Pura I (Persero)	1.000.000	1.000.000
PT Pegadaian (Persero)	558.387	700.000
PT Waskita Beton Precast Tbk	470.000	512.000
PT Semen Indonesia Tbk	341.088	382.979
PT Citra Waspphutowa	324.529	248.537
PT Kimia Farma Apotek	270.000	300.000
PT Jasa Marga JalanLayang Cikampek	180.255	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	101.276	-
PT Cimanggis Cibitung Tollways	98.773	59.601
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	84.919	58.549
Karyawan kunci	8.274	8.126
Lainnya	361.356	929.063
	3.798.857	4.198.855
Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 14)		
PT Hutama Karya (Persero)	24.478	27.305
PT Hutama Karya Infrastruktur	13.667	13.644
PT Hakaaston	3.008	33.475
	41.153	74.424

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset (lanjutan)		
Tagihan Akseptasi (Catatan 15)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	683.041	191.130
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	500.603	-
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	286.331	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	92.157	209.586
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	38.271	114.745
PT Wijaya Karya Industri Energi	36.389	3.421
PT Pindad (Persero)	33.119	86.794
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	21.921	-
PT Petrosida Gresik	21.702	-
PT Pertamina Patra Niaga	20.507	294.920
Lainnya	39.039	43.758
	1.773.080	944.354
Penyertaan saham (Catatan 16)		
PT Fintek Karya Nusantara	565.245	250.000
PT Danareksa Investment Management	380.198	377.770
PT Bahana Artha Ventura	74.396	74.205
	1.019.839	701.975
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**383.575.972**	**293.865.450**
Total aset konsolidasian	**1.511.804.628**	**1.416.758.840**
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	25,37%	20,74%
Liabilitas		
Giro (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	57.426.534	48.339.192
Karyawan kunci	17.430	3.175
Lain-lain	427.677	-
	57.871.641	48.342.367
Tabungan (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	158.893	31.894
Karyawan kunci	221.796	169.406
Lain-lain	279.585	-
	660.274	201.300
Deposito Berjangka (Catatan 22)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	75.966.314	87.612.226
Karyawan kunci	176.670	138.836
Lain-lain	1.228.527	-
	77.371.511	87.751.062

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas (lanjutan)		
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 23)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.281.947	748.501
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	654.089	-
Pinjaman yang Diterima (Catatan 26)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	887.402	1.077.979
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 43)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	745.340	478.745
Nilai kini kewajiban PHK	117.881	42.141
Nilai kini kewajiban THT	173.811	100.676
Nilai kini kewajiban cuti besar	79.271	61.234
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	61.502	47.988
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	19.544	-
Nilai kini kewajiban BPJS	28.964	-
	1.226.313	730.784
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	**139.953.177**	**138.851.993**
Total liabilitas konsolidasian	**1.278.346.726**	**1.183.155.670**
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	10,95%	11,74%
Dana Syirkah Temporer		
Entitas, Lembaga Pemerintah dan karyawan kunci	6.613.045	5.983.080
Persentase terhadap total dana syirkah temporer	19.71%	24,11%

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27b)		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.172.180	4.520.182
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.662.833	2.733.225
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.613.297	2.436.348
PT Pertamina (Persero)	1.571.164	2.075.352
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.545.340	1.742.053
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.058.282	462.592
PT Pertamina Hulu Rokan	702.500	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	661.492	619.287
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	611.405	857.493
PT Telekomunikasi Seluler (Persero) Tbk	590.219	551.234
Lain-lain	5.115.884	7.734.028
	22.304.596	**23.731.794**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih Berjalan dalam rangka impor (Catatan 27b)		
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.812.164	192.681
PT Pertamina (Persero)	633.404	285.603
PT Pindad (Persero)	541.172	481.772
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	522.705	336.570
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	428.660	425.826
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	299.607	173.668
PT Petrokimia Gresik	236.615	529.539
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	148.556	32.074
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	134.566	53.513
PT Pertamina Patra Niaga	91.416	42.141
Lain-lain	389.604	831.935
	5.238.469	**3.385.322**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 36)		
Gaji dan tunjangan Direksi	120.259	130.565
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	43.748	41.313
Total	**164.007**	**171.878**
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci (Catatan 36)		
Tantiem Direksi	229.540	322.049
Tantiem Dewan Komisaris	103.580	113.419
Bonus dan insentif karyawan kunci	164.382	125.253
Total	**497.502**	**560.721**

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset		
Giro pada Bank lain	0,007%	0,011%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,099	0,154
Efek-efek	19,762	11,781
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,120	0,982
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,000	0,080
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	0,000	0,062
Kredit yang diberikan	4,946	7,254
Piutang dan pembiayaan syariah	0,251	0,296
Piutang sewa pembiayaan	0,003	0,005
Tagihan akseptasi	0,117	0,067
Penyertaan saham	0,067	0,050
Total	**25,372%**	**20,742%**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas		
Giro	4,527%	4,086%
Tabungan	0,052	0,017
Deposito berjangka	6,052	7,416
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,100	0,063
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,051	-
Pinjaman yang diterima	0,069	0,091
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan kunci	0,096	0,062
Total	**10,947%**	**11,735%**

46. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

1) Pada tanggal 20 Oktober 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi dan PT Datindo Infonet Prima sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* CRM RBB Tahun 2020 (Zona 1, 2 dan 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp682.328 dan Rp308.396.

2) Pada tanggal 8 Oktober 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Sewa Saluran Komunikasi untuk Kebutuhan Penggantian Perangkat BRISPOT bagi Pejabat Kredit Lini Bisnis Mikro dengan nilai kontrak Rp260.899.

3) Pada tanggal 19 Juni 2020, telah ditandatangani Conditional Shares Subcription Agreement (CSSA) antara BRI, FWD Financial Services Pte.Ltd. (FWD) dan BRI Life untuk kerjasama strategis jangka panjang. Sesuai CSSA FWD akan melakukan tambahan modal melalui saham baru yang diterbitkan BRI Life sehingga menjadi pemegang minoritas, sedangkan BRI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dari BRI Life. Saat ini transaksi sedang dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4) Pada tanggal 19 Juni 2020, telah ditandatangani Conditional Shares Subcription Agreement (CSSA) antara BRI, FWD Financial Services Pte.Ltd. (FWD) dan BRI Life untuk kerjasama strategis jangka panjang. Sesuai CSSA FWD akan melakukan tambahan modal melalui saham baru yang diterbitkan BRI Life sehingga menjadi pemegang minoritas, sedangkan BRI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dari BRI Life. Saat ini transaksi sedang dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5) Pada tanggal 15 Juni 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp181.776.

6) Pada tanggal 27 November 2019, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Managed Service CRM EBB Tahun 2019 dan Replacement berserta Perangkat Pendukungnya untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp399.299.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

7) Pada tanggal 4 November 2019, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Unit Kerja Mikro BRI untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp110.453.

8) Pada tanggal 8 Agustus 2019, BRI mengadakan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp67.004.

9) Pada tanggal 8 Februari 2019, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 2, 3 dan 4) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp211.104.

10) Pada tanggal 7 Februari 2019, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Managed Service Offsite Data Center (ODC), Data Center (DC) GTI Ragunan dan Tabanan Tahap I untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp149.500.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun “Liabilitas Lain-lain”) untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp Rp1.149.920 dan Rp1.145.664 (Catatan 29). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

47. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Selanjutnya, Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum", Program penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005 untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan pasal 29 bahwa Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,50% dan 6,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,00% dan 1,75%.

48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

a. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 *Business Combinations: Definition of Business* merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board* (IASB) dan US *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.
b. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2". Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.
c. PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 (lanjutan):

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022:

a. Amendemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”. Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
b. Amendemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian “10 per sen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”. Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

a. Amendemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”, efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

a. PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

49. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (buffer) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan surat OJK No.S.11/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 pembentukan modal penyangga (buffer) berupa *Capital Conservation Buffer ditiadakan* sampai dengan 31 Maret 2021, sehingga modal penyangga (buffer) *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing sebesar 0,00% dan 2,50%.

Berdasarkan profil risiko BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan BRI terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	174.297.803	187.012.209
Modal Pelengkap (Tier 2)	9.039.734	8.974.441
Total Modal	**183.337.537**	**195.986.650**
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit*)	702.318.932	689.093.355
ATMR untuk Risiko Pasar**)	4.705.830	13.712.721
ATMR untuk Risiko Operasional***)	182.571.933	166.214.312
Total ATMR	**889.596.695**	**869.020.388**
Rasio CAR		
Rasio CET 1	19,59%	21,52%
Rasio Tier 1	19,59	21,52
Rasio Tier 2	1,02	1,03
Rasio Total	20,61	22,55
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00

*) Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.
**) Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.
***) Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio NPL BRI adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian (BRI, BRI Agro dan BRI Syariah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio NPL - kotor	2,99%	2,80%
Rasio NPL - neto	0,87	1,19

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (safe keeping services) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (settlement handling);
- Jasa penagihan penghasilan (income collection), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (reporting services);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

BRI memiliki 384 (tiga ratus delapan puluh empat) dan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp440.482.007 dan Rp385.432.544 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pemantau

BRI memiliki 49 (empat puluh sembilan) dan 48 (empat puluh delapan) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah obligasi yang diwaliamanati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp 83.480.339 dan Rp81.987.158 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar
- Layanan Jasa Agen Peminjaman
- Layanan Jasa Agen Investasi
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non Trust) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

Nilai proyek kelolaan Jasa *Trust* BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp139.644.120 dan Rp134.607.276 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

f. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Agen Sindikasi untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan *Syndication & Financial Services Division* dan Jasa Lembaga Keuangan yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*
- Agen Fasilitas
- Agen Jaminan
- Agen Penampungan

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek adalah sebesar Rp464.327.597 dan Rp427.813.243, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba tahun berjalan per lembar saham dasar untuk BRI (entitas induk) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	18.654.753	122.564.847.240	152
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	750.463.400	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	**18.654.753**	**123.315.310.640**	**151**

	31 Desember 2019		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	34.372.609	122.334.571.581	281
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	6.887.200	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	**34.372.609**	**122.341.458.781**	**281**

51. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2019	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2020
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	30.921.771	17.129.066	(12.193.257)	111.405	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.366	-	-	26	1.465.392
Surat berharga yang diterbitkan	38.620.837	1.998.840	(6.292.850)	162.264	34.489.091
Total	**71.007.974**	**19.127.906**	**(18.486.107)**	**273.695**	**71.923.468**

	31 Desember 2018	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2019
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	40.457.429	2.939.798	(12.532.787)	57.331	30.921.771
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.473.515	-	-	(8.149)	1.465.366
Surat berharga yang diterbitkan	31.190.216	12.102.950	(4.419.500)	(252.829)	38.620.837
Total	**73.121.160**	**15.042.748**	**(16.952.287)**	**(203.647)**	**71.007.974**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73

PSAK 71

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset Keuangan				
Kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	30.219.214	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	71.416.449	71.416.449
Giro pada Bank lain	Pinjaman yang diterbitkan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	10.237.736	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	Pinjaman yang diterbitkan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	116.854.727	116.854.727
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	17.712.056	17.712.056
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif Lain	124.153.732	124.153.732
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	53.975.143	53.975.143
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	34.317.499	34.317.499
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif Lain	30.306	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	1.100.000	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	22.582.244	22.582.244
Tagihan derivatif	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	210.396	210.396
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	903.197.390	903.197.390

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset Keuangan (lanjutan)				
Piutang sewa pembiayaan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	4.191.596	4.191.596
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	9.346.063	9.346.063
Penyertaan saham	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif lain	754.354	754.354
Aset lain-lain	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	20.265.162	20.265.162
Liabilitas Keuangan				
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	7.549.312	7.549.312
Simpanan Nasabah				
Giro	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	170.847.001	170.847.001
Tabungan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	412.307.171	412.307.171
Deposito berjangka	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	413.223.653	413.223.653
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	556.594	556.594
Tabungan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.148	9.148
Deposito berjangka dan *on call*	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.965.534	9.965.534
Inter-bank call money	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	7.438.553	7.438.553

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Liabilitas Keuangan (lanjutan)				
Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	49.902.938	49.902.938
Liabilitas derivatif	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	184.605	184.605
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.346.063	9.346.063
Surat berharga yang diterbitkan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	38.620.837	38.620.837
Pinjaman yang diterima	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	30.921.771	30.921.771
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	609.493	609.493
Pinjaman Subordinasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	1.465.366	1.465.366
Liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	19.359.607	19.359.607

Aset keuangan instrumen ekuitas yang dimiliki untuk tujuan strategis telah diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal. PSAK 71, menghapus ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukan rekonsiliasi nilai tercatat menurut PSAK 55 dan nilai tercatat menurut PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

Catatan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 31 Desember 2019	Reklasifikasi	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset				
Giro pada Bank lain	10.237.736	-	(24)	10.237.712
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	116.854.727	-	(668)	116.854.059
Efek-efek - neto	195.840.173	-	(43.093)	195.797.080
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - neto	34.185.258	-	(2.628.902)	31.556.356
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.582.244	-	(1)	22.582.243
Kredit yang diberikan - neto	839.067.353		(12.124.615)	826.942.738
Piutang sewa pembiayaan - neto	4.104.096	-	(22.529)	4.081.567
Tagihan akseptasi	9.346.063	-	(140.746)	9.205.317
Aktiva pajak tangguhan	4.541.298	-	4.146.260	8.687.558
Liabilitas				
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	609.493	-	1.513.075	2.122.568
Ekuitas				
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	111.385	111.385
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	-	-	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	178.304.746	-	(12.386.452)	165.918.294
Kepentingan non pengendali	2.460.903	-	(52.327)	2.408.576

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Berikut ini penyajian dampak atas perubahan dari "incurred loss approach" menjadi "kerugian kredit ekspektasian" untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

	1 Januari 2020							
	Cadangan kerugian Penurunan nilai menurut PSAK 55			Kerugian penurunan nilai ekspektasian menurut PSAK 71				
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif	Cadangan kerugian penurunan nilai individual	Total	*Stage* 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Total	Kenaikan/ (penurunan)
Instrumen Keuangan								
Giro pada bank lain	-	-	-	24	-	-	24	24
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	-	-	-	668	-	-	668	668
Efek-efek	-	758	758	154.478	-	758	155.236	154.478
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	132.241	-	132.241	427.853	2.311.525	21.765	2.761.143	2.628.902
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1	-	-	1	1
Kredit yang diberikan	21.503.827	16.860.013	38.363.840	15.575.981	17.480.159	17.432.315	50.488.455	12.124.615
Piutang sewa pembiayaan	19.396	68.104	87.500	2.963	19.847	87.219	110.029	22.529
Tagihan akseptasi	-	-	-	140.746	-	-	140.746	140.746
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	135.313	135.313	22.917	147.199	-	170.116	34.803
Garansi yang diterbitkan	-	472.244	472.244	184.517	577.451	103.666	865.634	393.390
Fasilitas kredit yang belum digunakan	-	-	-	435.780	516.097	133.006	1.084.883	1.084.883
Total	21.655.464	17.536.432	39.191.896	16.945.928	21.052.278	17.778.729	55.776.935	16.585.039

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

	1 Januari 2020		
	Sebelum Reklasifikasi	**Reklasifikasi**	**Setelah reklasifikasi**
Laporan Posisi Keuangan			
Aset lain-lain			
Biaya dibayar dimuka	2.584.867	(426.217)	2.158.650
Aset tetap - Aset guna usaha setelah akumulasi penyusutan	-	472.380	472.380
Liabilitas lain-lain			
Liabilitas sewa	-	46.163	46.163

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

53. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Perubahan Pengurus BRI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI (entitas induk) pada tanggal 21 Januari 2021, pemegang saham menyetujui perubahan pengurus, adalah sebagai berikut:

- Menguatkan pemberhentian dengan hormat Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan, terhitung sejak tanggal 11 November 2020.
- Memberhentikan dengan hormat Priyastomo sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah, Herdy Rosadi Harman sebagai Direktur *Human Capital* dan Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
- Mengangkat Agus Winardono sebagai Direktur *Human Capital*, Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Jaringan & Layanan, Amam Sukriyanto sebagai Direktur Bisnis Kecil & Menengah dan Viviana Dyah Ayu Retno K. sebagai Direktur Keuangan, serta pengalihan tugas Ahmad Solichin Lutfiyanto menjadi Direktur Kepatuhan.

Penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity) dan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bank Peserta Penggabungan mengumumkan *Merger Plan* dimana komposi Pemegang Saham (dengan asumsi tidak ada MESOP BRIS dieksekusi) adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah penuh)	Persentase
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.378	10.452.609.689.000	51,2%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4%
DPLK BRI - Saham Syariah	841.296.000	420.648.000.000	2,1%
PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0%
PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0%
Publik	1.782.055.843	891.027.921.500	4,3%
	40.846.813.743	20.423.406.871.500	100%

Komposisi pemegang saham di atas adalah komposisi pemegang saham per tanggal 30 September 2020 dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham minoritas Bank yang menerima penggabungan yang menggunakan haknya untuk meminta BRI dan/atau Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI untuk membeli saham-saham mereka dan belum ada Opsi MESOP BRIS yang di-*exercise.*

Pernyataan penggabungan usaha BRIS, BSM dan BNIS telah disetujui oleh OJK pasar modal dan OJK perbankan masing-masing melalui surat No.S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021. Penggabungan usaha tersebut direncanakan akan berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2021 dan bank hasil penggabungan usaha akan menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham pengendali dari BSI sehingga laporan keuangan BSI akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri sejak tanggal efektif penggabungan usaha.

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET		
Kas	31.020.724	29.931.216
Giro pada Bank Indonesia	49.690.493	68.808.255
Giro pada Bank lain	9.591.417	9.833.906
Cadangan kerugian penurunan nilai	(92.690)	-
	9.498.727	9.833.906
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	64.941.821	114.412.698
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.998)	-
	64.932.823	114.412.698
Efek-efek	300.759.740	172.098.241
Cadangan kerugian penurunan nilai	(340.375)	-
	300.419.365	172.098.241
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	27.521.765	34.317.498
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.326.171)	(132.241)
	26.195.594	34.185.257
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	1.130.306
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	43.770.835	20.313.264
Tagihan Derivatif	1.576.659	193.091
Kredit yang Diberikan	880.674.757	859.558.294
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.129.266)	(37.537.934)
	816.545.491	822.020.360
Tagihan Akseptasi	6.773.743	9.344.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	(546.260)	-
	6.227.483	9.344.682
Penyertaan Saham	12.566.424	12.369.341
Aset Tetap		
Biaya perolehan	44.189.284	41.942.453
Akumulasi penyusutan	(13.659.238)	(11.876.990)
Nilai buku - neto	30.530.046	30.065.463
Aset Pajak Tangguhan - neto	7.605.102	4.023.018
Aset Lain-lain - neto	21.205.241	14.348.762
TOTAL ASET	**1.421.785.007**	**1.343.077.860**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	11.392.992	7.403.164
Simpanan Nasabah		
Giro	183.002.153	167.842.557
Tabungan	459.148.270	404.360.261
Deposito Berjangka	410.513.447	397.547.188
Total Simpanan Nasabah	1.052.663.870	969.750.006
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	25.318.719	17.871.591
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	40.478.672	49.902.938
Liabilitas Derivatif	397.088	167.858
Liabilitas Akseptasi	6.773.743	9.344.684
Utang Pajak	1.064.461	4.427
Surat Berharga yang Diterbitkan	34.450.311	38.316.131
Pinjaman yang Diterima	34.163.564	29.161.136
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	3.667.943	607.557
Liabilitas Imbalan Kerja	9.926.146	10.279.487
Liabilitas Lain-lain	6.627.509	6.103.169
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	500.887	500.250
TOTAL LIABILITAS	**1.227.425.905**	**1.139.412.398**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	3.493.008	2.981.523
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	16.864.083	16.864.083
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(54.510)	(14.868)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	4.385.145	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	935.856	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	-	726.681
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.446.069)	198.584
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(1.649.076)	(2.106.014)
Opsi Saham	55.836	-
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.228.805	21.796
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	161.356.048	175.803.701
Total Saldo Laba	164.378.733	178.826.386
TOTAL EKUITAS	**194.359.102**	**203.665.462**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.421.785.007**	**1.343.077.860**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	109.958.749	115.638.720
Beban Bunga	(34.811.751)	(37.078.417)
Pendapatan Bunga - neto	75.146.998	78.560.303
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	15.183.058	14.293.382
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	7.161.452	6.997.193
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.252.339	153.436
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2.513.408	1.497.980
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	285.367	45.669
Lain-lain	2.034.509	4.563.976
Total Pendapatan Operasional lainnya	28.430.133	27.551.636
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(28.714.311)	(20.436.534)
Beban penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	(2.155.970)	(607.557)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan	(118.857)	(263.316)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(24.980.447)	(22.976.364)
Umum dan administrasi	(16.107.140)	(14.403.614)
Lain-lain	(5.308.671)	(4.402.497)
Total Beban Operasional lainnya	(46.396.258)	(41.782.475)
LABA OPERASIONAL	**26.191.735**	**43.022.057**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	**(30.624)**	**(72.165)**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**26.161.111**	**42.949.892**
BEBAN PAJAK	**(7.807.808)**	**(8.921.207)**
LABA TAHUN BERJALAN	**18.353.303**	**34.028.685**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.007.031)	(1.259.693)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	362.378	314.923
Surplus revaluasi aset tetap	-	3.039.391
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(39.642)	(64.088)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.314.399	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	824.471	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	3.528.225
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(655.935)	(882.056)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	**2.798.640**	**4.676.702**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**21.151.943**	**38.705.387**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
Dasar (dalam Rupiah penuh)	150	278
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	149	278

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
									Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	**6.167.291**	**2.773.858**	**49.220**	**(1.919.488)**	**1.143.354**	**(2.418.948)**	**425.334**	**13.824.692**	**3.022.685**	**157.950.582**	**181.018.580**
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.028.685	34.028.685
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(64.088)	2.646.169	(944.770)	-	-	3.039.391	-	-	4.676.702
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(64.088)	2.646.169	(944.770)	-	-	3.039.391	-	34.028.685	38.705.387
Pembagian laba											
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.175.566)	(16.175.566)
Saham bonus	-	207.665	-	-	-	312.934	(403.538)	-	-	-	117.061
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	**6.167.291**	**2.981.523**	**(14.868)**	**726.681**	**198.584**	**(2.106.014)**	**21.796**	**16.864.083**	**3.022.685**	**175.803.701**	**203.665.462**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi saham kepada karyawan	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	**6.167.291**	**2.981.523**	**-**	**(14.868)**	**726.681**	**198.584**	**(2.106.014)**	**21.796**	**16.864.083**	**3.022.685**	**175.803.701**	**203.665.462**
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No.71	-	-	111.385	-	-	-	-	-	-	-	(12.177.391)	(12.066.006)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	6.167.291	2.981.523	111.385	(14.868)	726.681	198.584	(2.106.014)	21.796	16.864.083	3.022.685	163.626.310	191.599.456
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.353.303	18.353.303
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	824.471	(39.642)	3.658.464	(1.644.653)	-	-	-	-	-	2.798.640
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	824.471	(39.642)	3.658.464	(1.644.653)	-	-	-	-	18.353.303	21.151.943
Pembagian laba deviden	-	-		-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(20.623.565)
Opsi saham	-	-		-	-	-	-	55.836	-	-	-	55.836
Saham bonus	-	511.485		-	-	-	456.938	1.207.009	-	-	-	2.175.432
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	**6.167.291**	**3.493.008**	**935.856**	**(54.510)**	**4.385.145**	**(1.446.069)**	**(1.649.076)**	**1.284.641**	**16.864.083**	**3.022.685**	**161.356.048**	**194.359.102**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga	106.487.228	115.348.258
Pembayaran bunga	(34.811.751)	(37.072.284)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	7.161.451	6.997.193
Pendapatan operasional lainnya	23.830.524	23.231.392
Beban operasional lainnya	(45.869.753)	(42.530.808)
(Beban) pendapatan non operasional - neto	(65.389)	(72.277)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(4.851.126)	(9.169.310)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**51.881.184**	**56.732.164**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	44.146	(2.490.453)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(12.741.315)	(9.428.101)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	6.354.998	(6.172.212)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(23.457.571)	(10.916.711)
Kredit yang diberikan	(34.775.080)	(72.226.224)
Aset lain-lain	(7.682.868)	4.878.698
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	3.989.828	(929.618)
Simpanan:		
Giro	15.159.596	(8.561.949)
Tabungan	54.788.009	25.451.424
Deposito berjangka	12.966.259	54.827.966
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	7.447.128	8.767.217
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(9.424.266)	12.523.543
Liabilitas lain-lain	275.477	(2.418.989)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan operasi	**64.825.525**	**50.036.755**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember	
	2020	**2019**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penerimaan dividen	38.052	158.485
Penyertaan saham	(263.582)	(2.641.000)
Perolehan aset tetap	(2.101.581)	(3.147.990)
Hasil penjualan aset tetap	34.766	114
Penurunan/(kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamprtisasi	(109.015.200)	-
Penurunan/(kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	(2.409.640)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	**(111.307.545)**	**(8.040.031)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
(Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima	4.966.785	(10.269.104)
Pembagian laba untuk dividen	(20.623.565)	(16.175.565)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	1.998.840	11.570.946
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(6.031.850)	(4.401.000)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	**(19.689.790)**	**(19.274.723)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(66.171.810)**	**22.722.001**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	**(354.303)**	**(160.252)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**229.425.776**	**206.864.027**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**162.899.663**	**229.425.776**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	31.020.724	29.931.216
Giro pada Bank Indonesia	49.690.493	68.808.255
Giro pada bank lain	9.591.417	9.833.906
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	61.922.822	111.358.550
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	10.674.207	9.493.849
Total Kas dan Setara Kas	**162.899.663**	**229.425.776**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank BRIsyariah Tbk	2.981.171	71,64%	2.981.171	73,00%
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	3.454.636	87,10	3.454.636	87,10
BRI Remittance Co. Limited	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	91,00	1.626.643	91,00
PT BRI Multifinance Indonesia	1.055.003	99,88	860.003	99,78
PT Danareksa Sekuritas	446.888	67,00	446.888	67,00
PT BRI Ventura Investama	1.503.090	99,97	1.503.090	99,97
PT BRI Asuransi Indonesia	1.041.000	90,00	1.041.000	90,00

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73

PSAK 71

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset Keuangan				
Kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	29.931.216	29.931.216
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	68.808.255	68.808.255

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset Keuangan (lanjutan)				
Giro pada Bank lain	Pinjaman yang diterbitkan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	9.833.906	9.833.906
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	Pinjaman yang diterbitkan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	114.412.698	114.412.698
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	12.725.189	12.725.189
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif Lain	117.600.575	117.600.575
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	41.772.477	41.772.477
Wesel ekspor dan Tagihan lainnya	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	34.317.498	34.317.498
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif Lainnya	30.306	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	1.100.000	1.100.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya yang diamortisasi	20.313.264	20.313.264
Tagihan derivatif	Nilai wajar melalui laporan Laba rugi	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	193.091	193.091
Kredit yang diberikan	Pinjaman yang diberikan	Biaya yang diamortisasi	859.558.294	859.558.294
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan Dan piutang	Biaya yang diamortisasi	9.344.682	9.344.682
Penyertaan saham	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif Lain	12.369.341	12.369.341
Aset lain-lain	Dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya yang diamortisasi	14.417.501	14.417.501

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Liabilitas Keuangan				
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	7.403.164	7.403.164
Simpanan Nasabah				
Giro	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	167.842.557	167.842.557
Tabungan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	404.360.261	404.360.261
Deposito berjangka	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	397.547.188	397.547.188
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	882.107	882.107
Tabungan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.154	9.154
Deposito berjangka dan *on call*	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.953.426	9.953.426
Inter-bank call money	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	7.026.904	7.026.904
Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	49.902.938	49.902.938
Liabilitas derivatif	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	167.858	167.858
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	9.344.684	9.344.684
Surat berharga yang diterbitkan	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	38.316.131	38.316.131

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Nilai tercatat Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Liabilitas Keuangan (lanjutan)				
Pinjaman yang diterima	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	29.161.136	29.161.136
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	607.557	607.557
Pinjaman Subordinasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	500.250	500.250
Liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	Liabilitas keuangan dengan biaya yang diamortisasi	6.103.169	6.103.169

Aset keuangan instrumen ekuitas yang dimiliki untuk tujuan strategis telah diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal. PSAK 71, menghapus ini.

Tabel dibawah ini menunjukan rekonsiliasi nilai tercatat menurut PSAK 55 dan nilai tercatat menurut PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

Catatan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 31 Desember 2019	Reklasifikasi	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset				
Giro pada Bank lain - neto	9.833.906	-	(24)	9.833.882
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - neto	114.412.698	-	(668)	114.412.030
Efek-efek - neto	172.098.241	-	(43.093)	172.055.148
Wsel Ekspor dan Tagihan Lainnya - neto	34.185.257	-	(2.628.902)	31.556.355
Efek-efek yang dibeli dengan janji Dijual kembali - neto	20.313.264	-	(1)	20.313.263

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukan rekonsiliasi nilai tercatat menurut PSAK 55 dan nilai tercatat menurut PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (lanjutan):

Catatan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 31 Desember 2019	Reklasifikasi	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset (lanjutan)				
Kredit yang diberikan - neto	822.020.360	-	(11.799.728)	810.220.632
Tagihan akseptasi - neto	9.344.682	-	(140.746)	9.203.936
Aset pajak tangguhan	4.023.018	-	4.059.130	8.082.148
Liabilitas				
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	607.557	-	1.511.974	2.119.531
Ekuitas				
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	111.385	111.385
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	-	-	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	175.803.701	-	(12.177.391)	163.626.310

Berikut ini menyajikan dampak atas perubahan dari "*incurred loss approach*" menjadi "kerugian kredit ekspektasian" untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

	1 Januari 2020							
	Cadangan kerugian Penurunan nilai menurut PSAK 55			Kerugian penurunan nilai ekspektasian menurut PSAK 71				
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif	Cadangan kerugian penurunan nilai individual	Total	*Stage* 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Total	Kenaikan
Giro pada bank lain	-	-	-	24	-	-	24	24
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	-	-	-	668	-	-	668	668
Efek-efek	-	-	-	154.478	-	-	154.478	154.478
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	132.241	-	132.241	427.453	2.311.525	22.165	2.761.143	2.628.902
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1	-	-	1	1
Kredit yang diberikan	21.304.221	16.233.713	37.537.934	15.516.398	16.759.868	17.061.396	49.337.662	11.799.728
Tagihan akseptasi	-	-	-	140.746	-	-	140.746	140.746
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	135.313	135.313	22.118	147.199	-	169.317	34.004
Garansi yang diterbitkan	-	472.244	472.244	184.214	577.451	103.666	865.331	393.087
Fasilitas kredit yang belum digunakan	-	-	-	435.780	516.097	133.006	1.084.883	1.084.883
Total	21.436.462	16.841.270	38.277.732	16.881.880	20.312.140	17.320.233	54.514.253	16.236.521

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI AWAL PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

	1 Januari 2020		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk			
Aset lain-lain			
Biaya dibayar dimuka	2.584.867	(426.217)	2.158.650
Aset tetap - Aset guna usaha setelah akumulasi penyusutan	-	472.380	472.380
Liabilitas lain-lain			
Liabilitas sewa	-	46.163	46.163

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/ *Partnership and Community Development Program* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended with independent auditors' report

Model 54

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon : 5751502, 5751504, 5751506, 5751507, 5751508, 5751510
Facsimile : 2500126, Kawat : KANPUSBRI
Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS OF THE PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED

Nomor: B.313 -DIR/SKP/02/2021
Nomor: B. 314 -DIR/SSM/02/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :		*We, the undersigned :*
Nama	**Supari**	*Name*
Jabatan	Direktur Bisnis Mikro/*Director of Micro Business* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Title*
Alamat Kantor	Gedung BRI I Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*
Nama	**Aestika Oryza Gunarto**	*Name*
Jabatan	*Executive Vice President Corporate Secretary Division* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Title*
Alamat Kantor	Gedung BRI I Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*
Nama	**Priyadi**	*Name*
Jabatan	*Executive Vice President Small Sales Management* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Title*
Alamat Kantor	Gedung BRI II Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;*
2. *The Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability and based on the Circular Letter of Ministry of State Owned Enterprises No.SE-02/MBU/WK/2012 dated February 23, 2012 Concerning Guidance of Accounting Standards for Partnership and Community Development Program;*
3. *a. All information in the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;
4. *We are responsible for the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Februari 2021/*February 19, 2021*

METERAI TEMPEL
AP4EFAJX042183460

Supari	Aestika Oryza Gunarto	Priyadi
Direktur/ *Director*	*Executive Vice President*	*Executive Vice President*

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ *Pages*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1276	*Statement of Financial Position*
Laporan Aktivitas	1277	*Statement of Activities*
Laporan Arus Kas	1278	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	1279-1313	*Notes to the Financial Statements*
Lampiran 1 - Laporan penyaluran dana program bina lingkungan	1314-1315	*Appendix 1 - Statement of community development program funds distribution*
Lampiran 2 - Laporan kualitas piutang pinjaman menurut wilayah dan sektor ekonomi program kemitraan	1316-1335	*Appendix 2 - Statement of loan receivables partnership program's collectibility classified by regional and economic sector*

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021

Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021

Management of Partnership and Community Development Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

We have audited the accompanying financial statements of Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Building a better working world

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Partnership and Community Development Program of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of December 31, 2020, and its activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/*Public Accountant Registration No. AP.1681*

19 Februari 2021/*February 19, 2021*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
ASET				***ASSETS***
Kas pada Bank	251.415.252.491	2b,2p, 4,22	255.222.568.633	*Cash in Bank*
Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN“) pembina lain/ lembaga penyalur (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp63.172.130.839 dan Rp30.297.225.852 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	2.302.869.161	2c,2d,2p 5,22	35.677.774.148	*Receivables from other fostering State-Owned Enterprises (“SOE“)/distributing partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp63,172,130,839 and Rp30,297,225,852 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)*
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp72.444.310.853 dan Rp47.377.850.524 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	276.592.781.850	2c,2d,6	405.400.884.072	*Loan receivables from foster partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp72,444,310,853 and Rp47,377,850,524 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)*
Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima	1.412.596.849	2j,7	1.568.522.509	*Accrued loan administration services income*
Piutang lain-lain (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp14.826.471.403 dan Rp15.634.047.189 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	700.000.070	2c,2p,8, 20,21,22	527.424.213	*Other receivables (net of allowance for impairment losses amounting to Rp14,826,471,403 and Rp15,634,047,189 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp71.089.105 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-	2e,9	-	*Fixed assets (net of accumulated depreciation amounting to Rp71,089,105 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)*
JUMLAH ASET	**532.423.500.421**		**698.397.173.575**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN ASET NETO				***LIABILITIES AND NET ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Beban yang masih harus dibayar	-	2f,2p 10,22	48.083.619.330	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-		159.440.534	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**-**		**48.243.059.864**	***TOTAL LIABILITIES***
ASET NETO				***NET ASSETS***
Aset neto tidak terikat	532.423.500.421	2g,11	650.154.113.711	*Unrestricted net assets*
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	**532.423.500.421**		**698.397.173.575**	***TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF ACTIVITIES
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2020	**Catatan/ *Notes***	**2019**	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT				***CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS***
PENDAPATAN				***REVENUE***
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	20.535.818.297	2j,14	13.878.007.903	*Loan administration services income*
Pendapatan bunga	3.550.464.967	2i,2p 13,22	6.224.222.289	*Interest income*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	807.575.787	21	-	*Reversal for impairment losses of other receivables expenses*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	-	2n,5	4.102.097.514	*Reversal for impairment losses on receivables from other fostering SOE expenses*
Pendapatan lain-lain	228.436.818	2l,15	145.581.175	*Other income*
JUMLAH PENDAPATAN	**25.122.295.869**		**24.349.908.881**	***TOTAL REVENUE***
BEBAN				***EXPENSES***
Penyaluran dana program bina lingkungan	84.911.543.843	2o,17	226.583.858.920	*Community development program funds distribution*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	32.874.904.987	2n,5	-	*Allowance for impairment losses on receivable from other fostering SOE expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman	25.066.460.329	2n,6d	7.565.978.290	*Allowance for impairment losses of loan receivables expenses*
Hibah dana program kemitraan kepada BUMN khusus	-	2o,2p 19,22	50.000.000.000	*Partnership program funding grant to special SOE*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	-	20	15.634.047.189	*Allowance for impairment losses of other receivables expenses*
Dana pembinaan kemitraan	-	2m,16	322.580.915	*Fostering partnership funds*
JUMLAH BEBAN	**142.852.909.159**		**300.106.465.314**	***TOTAL EXPENSES***
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	**(117.730.613.290)**	11	**(275.756.556.433)**	***DECREASE IN UNRESTRICTED NET ASSETS***
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN	**650.154.113.711**	11	**925.910.670.144**	***UNRESTRICTED NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR***
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN	**532.423.500.421**	11	**650.154.113.711**	***UNRESTRICTED NET ASSETS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2020	**Catatan/ *Notes***	**2019**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan	252.282.641.893		283.795.651.205	*Collection of foster partners loan receivables*
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	20.691.743.957		14.834.221.982	*Loan administration services income*
Pendapatan bunga	3.550.464.967	13	6.224.222.289	*Interest income*
Pengembalian dari BUMN pembina lain	500.000.000	5	525.000.000	*Repayment from other Fostering SOE*
Penyaluran piutang pinjaman mitra binaan	(149.171.000.070)		(281.689.198.514)	*Loan receivables from foster partners distribution*
Hibah dana program kemitraan kepada BUMN khusus	-	19	(50.000.000.000)	*Partnership program funding grant to special SOE*
Penyaluran dana pembinaan kemitraan	-	16	(322.580.915)	*Fostering partnership distribution fund*
Penyaluran dana program bina lingkungan	(132.995.163.173)		(219.661.082.955)	*Community development program funds distribution*
Lain-lain	1.333.996.284		485.322.709	*Other*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(3.807.316.142)**		**(245.808.444.199)**	***Net Cash Used in Operating Activities***
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	**(3.807.316.142)**		**(245.808.444.199)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**255.222.568.633**		**501.031.012.832**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**251.415.252.491**	4	**255.222.568.633**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), selanjutnya disebut "PKBL BRI" berdiri dan beroperasi sejak tahun 1990 dengan nama Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989, jo No. 306/KMK.013/1991 tanggal 20 Maret 1991, jo No. 368/KMK.013/1991 tanggal 19 April 1991 yang ditinjau kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini merupakan kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh BUMN dengan maksud agar BUMN disamping menjalankan operasional bisnisnya, juga melaksanakan tugas sosial sebagai pembina usaha kecil koperasi berupa akses permodalan dan pendampingan, sehingga pada akhirnya bisa mandiri atau akses pembebanan komersial/perbankan.

Peraturan tersebut selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, kemudian di amandemen berturut-turut oleh PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang berlaku untuk tahun buku 2013. Peraturan selanjutnya yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang mengatur penghentian pelaksanaan kegiatan BUMN peduli mulai tahun 2013.

1. GENERAL DESCRIPTION

a. Establishment and General Information

Partnership and Community Development Program (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), hereinafter referred to as "PKBL BRI" was established and started its operations in 1990 with the name Entrepreneur Small Economy and Cooperative Coaching (PPELK) according to the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 dated November 11, 1989, in conjunction with No. 306/KMK.013/1991 dated March 20, 1991, in conjunction with No. 368/KMK.013/1991 dated April 19, 1991 which was revisited with the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 316/KMK.016/1994 dated June 27, 1994 regarding the Fostering Guidelines for Small Businesses and Cooperatives through the utilization of funds from the profit of the State-Owned Enterprises (SOEs). This activity is a government policy that is implemented by all SOEs with the intention that in addition to conducting its business operations, SOEs, also carry out social duties as a foster for small business cooperatives in the form of access to capital and mentoring, so that they in the end can be independent or commercial loading access/banking.

The regulation was subsequently amended by Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program and the Circular Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 regarding the Implementation Guidelines of Partnership Program for SOEs with Small Business and Community Development Program. The regulation was later amended by the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, subsequently amended successively by PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 regarding amendments to the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2007, which applies to the fiscal year 2013. The subsequent regulations issued is the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013 governing the termination of the SOEs care activities which began in 2013.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Peraturan Kementerian diatas, terakhir kembali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 antara lain, mengatur tentang sumber dana Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal (masing-masing) 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, menyatakan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/DS.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 3 Juli 2015 Kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/07/2015 yang menggantikan PER-07/MBU/05/2015.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-03/MBU/12/2016 yang merupakan perubahan atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Pada tanggal 5 Juli 2017 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-02/MBU/7/2017 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Terakhir, pada tanggal 2 April 2020 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-02/MBU/04/2020 yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Ministry Regulation above, last amended by the Minister of SOEs' Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 among others, regulates the funding sources of the Partnership and Community Development Program derived from the company's budget that is calculated as expense, maximum (each) of 2% from the previous year's net income.

Based on Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 dated May 22, 2015 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with small business and community development program, it is stated that the previous regulations, which are the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012, No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013, No. PER-07/MBU/2013 dated June 27, 2013, No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 and the Letter of Deputy for Restructuring and SOEs Strategic Planning No. S-92/DS.MBU/2013 dated April 3, 2013 are revoked and declared invalid.

On July 3, 2015, the Ministry of State-Owned Enterprises issued the Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 which replaced PER-07/MBU/05/2015.

On December 19, 2016, the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 which is an amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

On July 5, 2017, the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 which is a second amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

Latest, on April 2, 2020, the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 which is a third amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN Pembina.

Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dilakukan PKBL BRI meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan (PK) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:

   a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

   b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

   c) Beban pembinaan:
      1) untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
      2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
      3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

Partnership Program for SOEs' and with small business, hereinafter called Partnership Program (PK) is a program to improve the ability of Small Business to be resilient and independent through the utilization of funds that are part of the profits of Fostering SOEs.

Community Development Program (BL) is SOE's community program whose objective is to empower the social condition of the community's business.

b. Primary Activities

The primary activities of PKBL BRI include the following:

1. Partnership Program (PK) includes the distribution of funds in the form of:

   a) Loans to finance working capital and/or purchasing of fixed asset in order to increase production and sales;

   b) Additional loan distribution to finance the short-term funding, to fulfill orders from business partner of the Foster Partners;

   c) Fostering Expenses:
      1) to finance education, training, internship, marketing, promotion, and other matters related to improving the productivity of the Foster Partners and for assessment/research related to the Partnership Program;
      2) Fostering Expenses are grant and with the maximum amount of 20% (twenty percent) of Partnership Program funds disbursed in the current year;
      3) Fostering Expenses can only be given to or for the benefit of the Foster Partners.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan Utama (lanjutan)

Kegiatan utama yang dilakukan PKBL BRI meliputi kegiatan sebagai berikut: (lanjutan)

2. Program Bina Lingkungan (BL) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:

   a) Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
   b) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
   c) Bantuan peningkatan kesehatan;
   d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
   e) Bantuan sarana ibadah;
   f) Bantuan pelestarian alam;
   g) Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
      1) Elektrifikasi;
      2) Penyediaan sarana air bersih;
      3) Penyediaan sarana sanitasi;
      4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi dan usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
      5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
      6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
      7) Bantuan peralatan usaha.

3. Melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran dana PKBL di unit kerja BRI dan pengawasan kegiatan usaha Mitra Binaan;

4. Melakukan pelaporan kegiatan PKBL.

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

b. Primary Activities (continued)

The primary activities of PKBL BRI include the following: (continued)

2. Community Development Program (BL) includes the distribution of funds in the form of:

   a) Aid for natural and non-natural disaster, include disaster caused by pluge;
   b) Aid for education, can be training, education facility and infrastructure;
   c) Aid for health improvement;
   d) Aid for development of public facilities and/or infrastructures;
   e) Aid for worship facilities;
   f) Aid for nature preservation;
   g) Aid for social assistance for poverty alleviation, including:
      1) Electrification;
      2) Providing facilities for clean water;
      3) Providing sanitation facilities;
      4) Educational assistance, training, internship, promotion and other assistance related to improving the economic independence of small businesses other than Partnership Program Foster Partners;
      5) Housing reparation for people living in poverty;
      6) Assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
      7) Assistance in the form of business equipment.

3. Monitoring of PKBL funds distribution in BRI working unit activities and the monitoring of Foster Partners' business activities;

4. Reporting PKBL activities.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Sumber Dana

Sumber dana PKBL BRI berasal dari:

1. Penyisihan sebagian laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Saldo dana PKBL BRI yang berasal dari penyisihan sebagian laba PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
3. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil Program Kemitraan, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PKBL;
4. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

d. Susunan Pengelola

Pengelola PKBL BRI dilakukan oleh *Small Sales Management Division* dan *Corporate Secretary Division*.

Pada tahun 2019, Pengelola PKBL dilakukan oleh Divisi Bisnis Program dan Kemitraan dan Divisi Sekretariat Perusahaan.

Susunan Pengelola PKBL BRI untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2. GENERAL DESCRIPTION (continued)

c. Funding Resources

Source of PKBL BRI's funding is derived from:

1. *Provision of net income of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and/or budget which was calculated as expense in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;*
2. *The PKBL funds balance that is derived from provision of the profits of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk allocated until the end of 2012;*
3. *Administrative services from Partnership Program loan/margin/profit-sharing, time deposits interest and/or current account services from PKBL funds;*
4. *Partnership Program funds handed over from other SOEs, if any.*

d. Management Structure

PKBL management performed by Small Sales Management Division and Corporate Secretary Division.

In 2019, PKBL management performed by Program and Partnership Business Division and Corporate Secretary Division.

Management structure of PKBL BRI for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2020	**2019**	
Direktur Bisnis Mikro	Supari	Supari	*Director of Micro Business*
Executive Vice President Small Sales Management Division (Dahulu Kepala Divisi Bisnis Program dan Kemitraan)	Priyadi	Djoko Purwanto	*Executive Vice President of Small Sales Management Division (Formerly Division Head of Program and Partnership)*
Vice President Small Sales Management Division	Arie Susmiyanti	-	*Vice President of Small Sales Management Division*
Assistant Vice President Small Sales Management Division (Dahulu Kepala Bagian PK dan Pengawasan LKM)	M. Abdi Rahman	M. Abdi Rahman	*Assistant Vice President of Small Sales Management Division (Formerly Group Head of Partnership Loan and MFI Supervision)*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

d. Susunan Pengelola (lanjutan)

d. Management Structure (continued)

Susunan Pengelola PKBL BRI untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Management structure of PKBL BRI for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*,		
	2020	**2019**	
Executive Vice President Corporate Secretary Division (Dahulu Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan)	Aestika Oryza Gunarto	Hari Purnomo	*Executive Vice President of Corporate Secretary Division (Formerly Division Head of Corporate Secretary)*
Vice President Corporate Social Responsibility & Community Development	Zainuddin Thalib Burutu	Zainuddin Thalib Burutu	*Vice President Corporate Social Responsibility & Community Development*

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari BRI sehingga masalah penetapan Imbalan Kerja (PSAK No. 24) dilaksanakan oleh dan menjadi beban BRI.

All employees are employees who earn salaries and other benefits from BRI so that the application of Employee Benefits (SFAS No. 24) is implemented by and charged to BRI.

Pemotongan dan penyetoran atas PPh Pasal 21 atas pegawai BRI yang ditempatkan di PKBL BRI dilakukan oleh BRI.

Withholding and deposit of Income Tax Article 21 of BRI employees placed in PKBL BRI is conducted by BRI.

e. Unit Kerja Penyalur PKBL BRI

e. Distributor Working Units PKBL BRI

Unit PKBL BRI terdiri atas 2 (dua) divisi yaitu:

1. *Small Sales Management Division* berlokasi di Gedung BRI II Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana pinjaman kemitraan.

2. *Corporate Secretary Division* berlokasi di Gedung BRI I Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana Bina Lingkungan.

PKBL BRI units consist of 2 (two) division:

1. *Small Sales Management Division located in BRI II Building 28th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as the distributor of partnership receivable funds.*

2. *Corporate Secretary Division located at BRI I Building 15th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as the distributor of Community Development funds.*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

e. Unit Kerja Penyalur PKBL BRI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 penyaluran dana PKBL BRI dilakukan di unit kerja BRI dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

e. Distributor Working Units PKBL BRI (continued)

As of December 31, 2020 and 2019 the distribution of funds of PKBL BRI conducted by BRI working unit are detailed as follows (unaudited):

No.	Unit Kerja	Jumlah Kantor Cabang/ *Total Branches*		Jumlah Kantor Cabang Pembantu/ *Total Sub Branches*		*Working Units*	*No.*
		2020	2019	2020	2019		
1.	Kantor Wilayah Aceh	11	11	15	15	*Aceh Regional Office*	*1.*
2.	Kantor Wilayah Medan	24	24	34	34	*Medan Regional Office*	*2.*
3.	Kantor Wilayah Padang	14	14	8	8	*Padang Regional Office*	*3.*
4.	Kantor Wilayah Pekanbaru	22	22	20	20	*Pekanbaru Regional Office*	*4.*
5.	Kantor Wilayah Palembang	21	21	29	29	*Palembang Regional Office*	*5.*
6.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 1	25	25	54	54	*DKI Jakarta 1 Regional Office*	*6.*
7.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 2	31	31	69	69	*DKI Jakarta 2 Regional Office*	*7.*
8.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 3	36	36	55	55	*DKI Jakarta 3 Regional Office*	*8.*
9.	Kantor Wilayah Bandung	30	30	45	45	*Bandung Regional Office*	*9.*
10.	Kantor Wilayah Semarang	22	22	38	38	*Semarang Regional Office*	*10.*
11.	Kantor Wilayah Yogyakarta	33	33	34	34	*Yogyakarta Regional Office*	*11.*
12.	Kantor Wilayah Surabaya	25	25	39	39	*Surabaya Regional Office*	*12.*
13.	Kantor Wilayah Malang	24	24	36	36	*Malang Regional Office*	*13.*
14.	Kantor Wilayah Denpasar	31	31	27	27	*Denpasar Regional Office*	*14.*
15.	Kantor Wilayah Banjarmasin	31	31	31	31	*Banjarmasin Regional Office*	*15.*
16.	Kantor Wilayah Makassar	36	36	28	28	*Makassar Regional Office*	*16.*
17.	Kantor Wilayah Manado	18	18	17	17	*Manado Regional Office*	*17.*
18.	Kantor Wilayah Jayapura	13	13	13	13	*Jayapura Regional Office*	*18.*
19.	Kantor Wilayah Bandar Lampung	14	14	16	16	*Bandar Lampung Regional Office*	*19.*
	Jumlah	**461**	**461**	**608**	**608**	**Total**	

Unit Kerja penyalur meliputi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di bawah kelolaan masing-masing Kantor Wilayah BRI.

Distributor Working Units include Branches and Sub-Branches each managed by BRI Regional Office.

f. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BRI pada tanggal 19 Februari 2021.

f. Authorization of the Issuance of Financial Statements

The financial statements were completed and authorized for issuance by PKBL BRI management on February 19, 2021.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia, dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas, bank dan semua investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, setelah dikurangi cerukan, dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies adopted in preparing the financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements were prepared in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) as issued by The Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants, and considered Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") Circular No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 Concerning Guidance of Accounting Standards for Partnership Program and Community Development.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for certain accounts prepared based on other measurement as explained in related accounting policy.

The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents during the year classified by operating, investing and financing activities, which is prepared using the direct method.

The currency used in the presentation of the financial statements is the Indonesian rupiah.

b. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, bank and all short-term investment with maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, after netted for overdraft, not pledged as collateral, and also not restricted in use.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Piutang

Piutang pinjaman Mitra Binaan merupakan pinjaman yang disalurkan oleh PKBL lewat unit kerja penyalur PKBL kepada Mitra Binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina Lain/Lembaga Penyalur Lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Lembaga Penyalur lain sebagai bentuk sinergi antar unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Piutang kepada BUMN Pembina merupakan alokasi dana dari BUMN Pembina untuk Program Bina Lingkungan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Piutang selain dijelaskan di atas disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada akun Piutang Lain-lain.

Penggolongan kualitas piutang kemitraan ditetapkan sebagai berikut:

a) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

b) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Receivables

Foster Partners loan receivables are loans distributed by PKBL through PKBL working units to Foster Partners according to applicable regulations. Foster partners loan receivables are recognized when the loans are disbursed to foster partners and are measured and recorded at the net amount after deducting allowance for impairment losses.

Receivables from other Fostering SOEs Distribution Partners represent loans given to Partnership and Community Development Program (PKBL) units/other distributing Partners as a form of synergy among Partnership and Community Development Program units.

Receivables from Fostering SOE are funds allocation for Community Development Program which are decided in the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Loans other than those described above are presented in the Other Receivables account in the Statement of Financial Position.

The classifications of partnership receivables based on collectibillity are as follows:

a) Current, if the principal installment and administration service income payment are paid on time or those whose late payments of principal and/or administration service are paid at the latest 30 (thirty) days from the agreed payment date;

b) Substandard, if the late payments of principal and/or administration service income payment are between 30 (thirty) days and 180 (one hundred eighty) days from the agreed payment date;

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Piutang (lanjutan)

Penggolongan kualitas piutang kemitraan ditetapkan sebagai berikut: (lanjutan)

3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cadangan atas estimasi kerugian terhadap piutang yang mungkin tidak tertagih di masa yang akan datang.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang ada (minimal 2 tahun) sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain dihitung secara individual.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan digunakan dalam operasi PKBL BRI serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Receivables (continued)

The classifications of partnership receivables based on collectibillity are as follows: (continued)

c) Doubtful, if the late payments of principal and/or administration service income payment are between 180 (one hundred and eighty) days and 270 (two hundred and seventy) days from the agreed payment date;

4. Loss, if the late payments of principal and/or administration service income payment are over 270 (two hundred and seventy) days from the agreed payment date.

d. Allowance for Impairment Losses on Receivables

Allowance for impairment losses on receivables is the provision for estimated losses that may become uncollectible receivables in the future.

Allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is calculated collectively based on specific percentage of available historical collectibility rate (minimum 2 years of historical data) while allowance for impairment losses on receivables to other Fostering SOEs Distribution Partners is calculated individually.

e. Fixed Assets

Fixed assets are tangible assets acquired off-the-shelf or are built for use in PKBL operations and have a useful life of more than one year.

Fixed assets are recognized at their historical costs less accumulated depreciation.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Fixed Assets (continued)

Fixed assets except for land are depreciated using straight-line method based on the estimated useful life as follows:

Jenis Aset Tetap	Tarif Penyusutan/tahun/ *Depreciation Rate/year*	Masa Manfaat/ *Useful Life*	*Fixed Asset Type*
Inventaris dan Peralatan	25%	4	*Premises and Equipment*

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan, dikapitalisasi ke akun aset tetap yang bersangkutan. Jika aset tetap dihentikan pengakuannya, PKBL BRI harus menentukan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dengan menghitung perbedaan, antara hasil penjualan neto (jika ada) dan jumlah tercatatnya.

Repairs and maintenance expense are charged as incurred while, significant amount of renewal and addition is capitalized to relevant fixed assets account. If the fixed asset is derecognized, PKBL BRI should determine the gain or loss arising from the derecognition of fixed assets by calculating the difference between the net sale proceeds (if any) and the carrying amount.

f. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar PKBL BRI karena telah diterimanya jasa atau prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi karena pembayarannya akan jatuh tempo pada periode berikutnya.

f. Accrued Expenses

Accrued expenses are expenses that have to be paid by PKBL BRI as the service have been received in the current period but have not been paid for at the end of current accounting period because payment will be due in the next period.

g. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANT diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) dan Aset Neto Terikat Permanen (ANTP).

g. Net Assets

Net assets are assets less liabilities. Net assets are classified as Restricted Net Assets (ANT) and Unrestricted Net Assets (ANTT).

ANT are resources which are restricted for a specific purpose or cannot be used for normal operating activities. ANT is classified into Temporary-Restricted Net Assets (ANTT) and Permanent-Restricted Net Assets (ANTP).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Neto (lanjutan)

Termasuk dalam pembatasan temporer adalah penyisihan dana BUMN Peduli yaitu dana program bina lingkungan yang disisihkan PKBL BRI untuk program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang berasal dari saldo awal kas dana program bina lingkungan, pengembalian dana bina lingkungan yang gagal terealisasi dan alokasi laba BRI untuk program bina lingkungan.

ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) - Berakhir Pemenuhan Program

ANTT - berakhir pemenuhan program adalah dana aset neto terikat - alokasi BUMN peduli yang menurut ketentuan telah digunakan dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan BUMN Peduli (telah dipenuhi pembatasan programnya). Akun ini merupakan kontra akun ANTT - terbebaskan.

i. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penempatan dana PKBL pada rekening giro bank. Pendapatan bunga disajikan setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening.

j. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Net Assets (continued)

Temporary restriction consists of provision for SOEs Care fund which is a community development fund that is set aside by PKBL BRI for Community Development program of SOEs Care and that is derived from the beginning balance of the cash funds of Community Development program, the refund from community development which fails to be realized and the allocation of BRI profit for community development program.

ANTT are resources whose usage are unrestricted for a specific purpose.

h. Temporary Restricted Net Assets - Ending Realization Program

ANTT - ending realization program is restricted net assets fund - allocation of SOE Care according to the provisions which have been used in the implementation of community development program of SOEs Care (program restrictions have been met). This account is the contra of ANTT account - released.

i. Interest Income

Interest income is the income generated from PKBL fund placement on current account. Interest income presented after being deducted with final tax and administrative cost.

j. Loan Administration Services Income

Loan administration services income is service income from partnership program funds which is distributed to Foster Partner. Loan administration services income is measured and recognized based on the values that have matured according to the contract. Loan administration services income is only recognised using accrual basis for loan with current and substandard collectibility.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pendapatan dari BUMN Pembina

Pendapatan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang berasal dari alokasi dana yang ditetapkan oleh RUPS untuk dana PKBL.

Alokasi dana dari BUMN pembina diakui pada saat ditetapkan oleh RUPS dan diukur serta dicatat sebesar jumlah dana yang dialokasikan untuk PKBL sesuai dengan keputusan RUPS.

l. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi dari pendapatan di atas. Pendapatan ini diakui menggunakan basis akrual.

m. Dana Pembinaan Kemitraan (Hibah)

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BRI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu Mitra Binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada Mitra Binaan. Beban diakui pada saat dana disalurkan.

n. Beban (Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban (pendapatan) yang timbul akibat pembentukan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

o. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dan Beban Lainnya

Beban ini diakui sesuai dengan basis akrual. Beban ini akan diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian, dan pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Revenue from Fostering SOE

Revenue from fostering SOE is an income from allocation of fund which is set by GMS for PKBL funds.

Allocation of fund from fostering SOEs is recognized when decided by GMS and it is measured and recorded at the amount of funds allocated in accordance with the GMS's decision.

l. Other Income

Other income is an income that cannot be classified according to the classification of income stated above. The income is recognized on an accrual basis.

m. Fostering Partnership Funds (Grant)

Fostering partnership funds (Grant) is a form through which Partnership Program is implemented. The grant, which is PKBL distribution fund is distributed through several programs designed to help the Foster Partner to expand its business with the maximum amount of 20% of current year partnership program funds and is only given to Foster Partners. The expenses are recognized when the funds are distributed.

n. Allowance (Reversal) for Impairment Losses on Loan Receivables Expenses

Allowance (reversal) for impairment losses on loan receivables expenses is an expense (income) that arises from the allowance (reversal) for impairment losses on loan receivables which may become uncollectible.

o. Community Development Program Funds Distribution and Other Expenses

These expenses are recognized on an accrual basis. These expenses will be recognized when a transaction or event occurs, and simultaneously with the recognition of an increase in liabilities or a decrease in assets.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

PKBL BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

a) pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;

b) entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas;

c) personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat);

d) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Transaction with Related Parties

PKBL BRI engage in transactions with related parties as defined in SAK-ETAP on "Related Party Disclosures", defined as:

a) parties that have control, jointly control or significant influence over the entity;

b) subsidiaries, joint venture, associate entities of the entity;

c) key management personnel of the entity and its parent entity (in aggregate);

d) parties with other special relationships;

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BRI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang telah terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, disyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BRI dalam Laporan Aktivitas.

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 12, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

3. ACCOUNTING JUDGMENT, ESTIMATION AND ASSUMPTION

a. Judgment

In the implementation process of PKBL BRI's accounting policies, Management has prepared these judgments, apart from estimation and assumption, which have significant impact to the amounts recognized in the financial statements:

The implementation of PER-09/MBU/07/2015

In relation to the implementation of PER-09/MBU/07/2015 as disclosed in Note 1a, it is required that the operational expenses of Partnership and Community Development Program be recognized by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Fostering SOE.

Therefore, such expense was not recorded by PKBL BRI in the Statement of Activities.

In accordance with Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") that was held on December 14, 2015 as disclosed in Note 12, it was stated that PER-09/MBU/07/2015 was enacted in 2016.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Implementasi PER-03/MBU/12/2016

Sesuai dengan RUPS Tahunan yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 mengukuhkan pemberlakuan PER-03/MBU/12/2016.

Implementasi PER-02/MBU/7/2017

Sesuai dengan RUPS Tahunan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 mengukuhkan pemberlakuan PER-02/MBU/7/2017.

Implementasi PER-02/MBU/04/2020

Sesuai dengan Surat No. SE.36-DIR/SKP/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 mengukuhkan pemberlakuan PER-02/MBU/04/2020.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BRI mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BRI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

3. ACCOUNTING JUDGMENT, ESTIMATION AND ASSUMPTION (continued)

a. Judgment (continued)

The implementation of PER-03/MBU/12/2016

In accordance with Annual GMS that was held on March 15, 2017, it confirmed enactment of PER-03/MBU/12/2016.

The implementation of PER-02/MBU/7/2017

In accordance with Annual GMS that was held on March 22, 2018, it confirmed enactment of PER-02/MBU/7/2017.

The implementation of PER-02/MBU/04/2020

In accordance with Letter No. SE.36-DIR/SKP/07/2020 dated July 24, 2020, it confirmed enactment of PER-02/MBU/04/2020.

Allowance for impairment losses on loan receivables

If there is an objective evidence that impairment losses has been incurred on loan to foster partners, PKBL BRI estimates an allowance for impairment losses of those loans specifically identified as possibly uncollectible. The level of allowance is examined by Management based on several factors influencing the receivables collectibility.

If there is an objective evidence that impairment losses has been incurred on Loan to other Fostering SOEs, the level of allowance for impairment losses of those loans is evaluated by the Management on the basis of an adverse event which has occurred after the initial recognition and impact on the future cash flows that can be reliably estimated.

PKBL BRI uses judgments based on available facts and circumstances, including but not limited to, PKBL BRI's period of relationship with Foster Partners and fostering partnerhip's loan status based on collectibility of loans.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi

PKBL BRI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat cadangan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Dalam kasus ini, PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui cadangan spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BRI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa yang akan datang.

PKBL BRI juga meneliti cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Cadangan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang ada (minimal dua tahun). Cadangan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

3. ACCOUNTING JUDGMENT, ESTIMATION AND ASSUMPTION (continued)

b. Estimation and Assumption

PKBL BRI continually assesses the existence of objective evidence that the receivables are impaired at the end of each reporting period. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of said receivables.

In this case, PKBL BRI uses judgment based on the best facts available to recognize a specific allowance (individual) against the due amount to lower PKBL BRI's receivables to the expected collectible amount.

Allowance for impairment losses on loans receivables from other Fostering SOE are calculated based on the estimated losses that cannot be collected individually based on the estimated future cash flows.

PKBL BRI also assesses the allowance for impairment losses collectively towards credit risks of Foster Partners which are grouped based on the same credit risk, regardless whether an allowance has not been specifically identified, have a higher risk of uncollectibility compared to loan given to Foster Partners. Allowance for impairment losses on loan is measured based on the evaluation of current value and historical rate of loan collectibility. Allowance for impairment losses on loan receivables is recognised based on the estimation of uncollectible amount which is done collectively based on a specific percentage (two years minimum) of historical rate of loan collectibility. This allowance is adjusted periodically to reflect actual result and estimation.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

4. KAS PADA BANK

Kas pada Bank merupakan penempatan dana PKBL pada rekening giro di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

4. CASH IN BANK

Cash in Bank is PKBL fund placement in the following current accounts of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Program Kemitraan			***Partnership Program***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	172.154.940.442	67.171.176.628	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	61.092.164.584	39.598.359.701	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	5.047.511.919	5.007.196.592	*PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	5.027.485.909	3.388.229.998	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	4.090.978.433	4.058.303.101	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	3.820.530.904	3.784.299.617	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	181.640.300	329.717.039	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational*
	251.415.252.491	123.337.282.676	
Bina Lingkungan			***Community Development***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	-	131.120.380.811	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	-	764.905.146	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI*
	-	131.885.285.957	
Jumlah	**251.415.252.491**	**255.222.568.633**	***Total***

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro adalah 1,90% dan 2% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The annual average interest rates for current account are 1.90% and 2% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR

Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS

Receivables from other Fostering SOE/Distributing Partners as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
PKBL PT Perkebunan Nusantara IX	65.475.000.000	65.975.000.000	*PKBL PT Perkebunan Nusantara IX*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur	(63.172.130.839)	(30.297.225.852)	*Less: allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/ distributing partners*
Neto	**2.302.869.161**	**35.677.774.148**	***Net***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur adalah sebagai berikut:

5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS (continued)

Movements in allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/distributing partners are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
Saldo awal tahun	30.297.225.852	34.399.323.366	***Beginning balance***
Pembentukan/(pembalikan) cadangan selama tahun berjalan	32.874.904.987	(4.102.097.514)	*Allowance/(reversal) for impairment losses during the year*
Saldo akhir tahun	**63.172.130.839**	**30.297.225.852**	***Ending balance***

PT Perkebunan Nusantara IX

Berdasarkan Persetujuan Kredit No. B.171-DIR/PRG/03/2013 dan No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tanggal 11 Maret 2013, PKBL BRI menyalurkan pinjaman kemitraan sebesar Rp75.000.000.000 yang diperuntukkan kepada petani/kelompok petani untuk budidaya tanaman tebu untuk masa tanam 2013/2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun dan memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2015.

Pada tanggal 10 November 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan tersebut sampai dengan Desember 2015, yang disetujui oleh PKBL BRI pada tanggal 17 Februari 2015.

Pada tanggal 8 Januari 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan kembali permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan Desember 2019.

Pada tanggal 4 April 2017, dilakukan pembahasan antara PKBL BRI dengan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan triwulan keempat 2020 dengan jumlah pembayaran cicilan setiap bulan yang sudah ditentukan diawal. Terdapat pembayaran pokok di bulan April dan Oktober 2017 sebesar Rp3.499.995.000.

PT Perkebunan Nusantara IX

Based on Credit Agreement No. B.171-DIR/PRG/03/2013 and No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dated March 11, 2013, PKBL BRI grants partnership loan amounting to Rp75,000,000,000 for farmers/farmers group for cultivation of sugar cane for 2013/2014 planting season with a fixed annual interest rate of 6% for 24 (twenty four) months that would mature on March 11, 2015.

On November 10, 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) proposed extending the partnership of loan repayment until December 2015, which was approved by PKBL BRI dated February 17, 2015.

On January 8, 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) reproposed extending the partnership of loan repayment until December 2019.

On April 4, 2017, a discussion was held between PKBL BRI and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) which resulted in an agreement to re-extend the term of repayment of the partnership loan up to the fourth quarter of 2020 with the amount of monthly installment payment determined at the earliest. There have been payments of principal in April and October 2017 amounting to Rp3,499,995,000.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara IX (lanjutan)

Pada tahun 2018, dilakukan kembali restrukturisasi PTPN IX yang merupakan program strategis *Holding* PTPN (PTPN III). Kewajiban pembayaran pinjaman kemitraan PTPN IX telah masuk menjadi program restrukturisasi PTPN IX, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tahun 2027. Telah terdapat pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp525.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS (continued)

PT Perkebunan Nusantara IX (continued)

In 2018, a restructuring of PTPN IX was held as PTPN Holding's (PTPN III) strategic program. PTPN IX's partnership loans installment obligation was included in PTPN IX's restructuring program, with a period extension until 2027 and an annual payment schedule that was decided on the agreement. There have been payment of principal until December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp500,000,000 and Rp525,000,000, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables from the other fostering SOE/distributing partners is adequate to cover losses from uncollectible receivables.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Berdasarkan Kantor Wilayah

6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS

a. By Regional Offices

Kantor Wilayah	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	*Regional Offices*
Yogyakarta	35.843.103.256	50.296.760.202	*Yogyakarta*
Malang	34.681.015.982	39.586.815.557	*Malang*
Denpasar	31.426.573.722	40.598.132.478	*Denpasar*
Bandung	30.180.446.237	35.034.949.009	*Bandung*
Makassar	29.490.611.023	37.735.361.227	*Makassar*
Surabaya	22.332.462.644	28.196.660.193	*Surabaya*
Semarang	20.482.225.632	27.279.647.976	*Semarang*
Manado	18.654.163.178	24.503.544.451	*Manado*
Banjarmasin	16.440.806.970	22.686.169.349	*Banjarmasin*
Bandar Lampung	14.559.254.550	17.987.938.481	*Bandar Lampung*
Palembang	14.418.055.097	21.937.257.746	*Palembang*
DKI Jakarta 3	14.267.845.237	13.902.381.519	*DKI Jakarta 3*
DKI Jakarta 2	13.714.138.289	16.312.211.390	*DKI Jakarta 2*
Medan	13.570.874.759	20.007.426.447	*Medan*
Pekanbaru	10.417.753.635	13.508.015.947	*Pekanbaru*
Padang	8.723.919.100	12.275.064.688	*Padang*
Jayapura	8.023.218.189	10.009.706.400	*Jayapura*
Banda Aceh	6.577.099.112	13.656.776.847	*Banda Aceh*
DKI Jakarta 1	5.233.526.091	7.263.914.689	*DKI Jakarta 1*
Jumlah	**349.037.092.703**	**452.778.734.596**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(72.444.310.853)	(47.377.850.524)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**276.592.781.850**	**405.400.884.072**	***Net***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

b. By Economic Sector

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Pertanian	194.113.565.273	158.182.746.784	*Agriculture*
Perdagangan, restoran dan hotel	122.449.266.044	237.848.391.773	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa lainnya	15.315.413.848	26.692.703.287	*Other services*
Industri pengolahan	12.235.941.132	20.659.363.700	*Processing industries*
Sosial masyarakat	3.214.729.107	6.048.065.521	*Community services*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.262.898.449	2.611.642.352	*Transportation, warehousing and communications*
Listrik, gas dan air	289.180.266	444.423.795	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	90.635.284	159.634.636	*Construction*
Pertambangan	65.463.300	131.762.748	*Mining*
Jumlah	**349.037.092.703**	**452.778.734.596**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(72.444.310.853)	(47.377.850.524)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**276.592.781.850**	**405.400.884.072**	***Net***

c. Berdasarkan Kualitas Piutang Pinjaman

c. Loan Receivables By Collectibility

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan			***Loan Receivables from Foster Partners***
Lancar	248.361.890.017	392.929.655.867	*Current*
Kurang Lancar	20.573.764.338	11.311.812.898	*Substandard*
Diragukan	15.347.755.862	3.389.248.426	*Doubtful*
Macet	64.753.682.486	45.148.017.405	*Loss*
Jumlah	**349.037.092.703**	**452.778.734.596**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(72.444.310.853)	(47.377.850.524)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**276.592.781.850**	**405.400.884.072**	***Net***

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

d. Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables from Foster Partners

Movements in allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Saldo awal tahun	47.377.850.524	39.811.872.234	***Beginning balance***
Pembentukan cadangan selama tahun berjalan	25.066.460.329	7.565.978.290	*Allowance for impairment during the year*
Saldo akhir tahun	**72.444.310.853**	**47.377.850.524**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan (lanjutan)

Alokasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)

d. Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables from Foster Partners (continued)

Allocation of allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2020			
	Saldo Piutang Pinjaman/ *Loan Receivables Balance*	**Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai/ *Accumulated allowance for impairment losses***	**Neto/*Net***	
Lancar	248.361.890.017	(1.545.045.901)	246.816.844.116	*Current*
Kurang lancar	20.573.764.338	(2.010.978.129)	18.562.786.209	*Substandard*
Diragukan	15.347.755.862	(4.134.604.337)	11.213.151.525	*Doubtful*
Macet	64.753.682.486	(64.753.682.486)	-	*Loss*
Jumlah	**349.037.092.703**	**(72.444.310.853)**	**276.592.781.850**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2019			
	Saldo Piutang Pinjaman/ *Loan Receivables Balance*	**Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai/ *Accumulated allowance for impairment losses***	**Neto/*Net***	
Lancar	392.929.655.867	(657.129.035)	392.272.526.832	*Current*
Kurang lancar	11.311.812.898	(793.838.828)	10.517.974.070	*Substandard*
Diragukan	3.389.248.426	(778.865.256)	2.610.383.170	*Doubtful*
Macet	45.148.017.405	(45.148.017.405)	-	*Loss*
Jumlah	**452.778.734.596**	**(47.377.850.524)**	**405.400.884.072**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the balance of allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is adequate to cover losses from uncollectible loan.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

7. ACCRUED LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME

Accrued loan administration services income by regional offices are as follows:

Kantor Wilayah	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	*Regional Offices*
Malang	195.645.267	175.123.476	*Malang*
Yogyakarta	159.983.927	308.391.060	*Yogyakarta*
Denpasar	128.863.113	140.242.682	*Denpasar*
Makassar	120.780.576	107.864.505	*Makassar*
Bandung	106.947.189	117.963.917	*Bandung*
Semarang	105.801.527	116.486.775	*Semarang*
Surabaya	90.437.769	97.834.263	*Surabaya*
Bandar Lampung	85.601.667	90.239.152	*Bandar Lampung*
Manado	69.782.854	60.789.358	*Manado*
Banjarmasin	52.009.219	72.110.522	*Banjarmasin*
Palembang	50.309.966	46.260.995	*Palembang*
Medan	47.030.766	52.105.900	*Medan*
DKI Jakarta 2	43.296.292	31.221.204	*DKI Jakarta 2*
DKI Jakarta 3	31.177.643	25.451.733	*DKI Jakarta 3*
Pekanbaru	26.897.736	28.439.399	*Pekanbaru*
Jayapura	25.542.812	22.695.511	*Jayapura*
DKI Jakarta 1	25.496.041	15.344.892	*DKI Jakarta 1*
Banda Aceh	24.748.661	35.989.258	*Banda Aceh*
Padang	22.243.824	23.967.907	*Padang*
Jumlah	**1.412.596.849**	**1.568.522.509**	***Total***

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp700.000.070 dan Rp527.424.213 terdiri atas alokasi dana pinjaman kemitraan dari PKBL BRI kepada Unit Kerja (cabang) Penyalur PKBL BRI tetapi belum disalurkan kepada Mitra Binaan sampai dengan akhir periode pelaporan.

8. OTHER RECEIVABLES

Other receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp700,000,070 and Rp527,424,213 respectively, consist of allocated funds of partnership loan from PKBL BRI to PKBL BRI distributor working unit (branches) but not yet distributed to foster partner until the end of the reporting period.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

9. ASET TETAP

Aset tetap adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS

Fixed assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2020				
	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2020	Mutasi/*Movement*		Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2020	
		Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*		
Harga Perolehan					*Acquisition Cost*
Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	*Premises and equipment*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Inventaris dan peralatan	(71.089.105)	-	-	(71.089.105)	*Premises and equipment*
Nilai Buku Neto	**-**			**-**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2019				
	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2019	Mutasi/*Movement*		Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2019	
		Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*		
Harga Perolehan					*Acquisition Cost*
Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	*Premises and equipment*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Inventaris dan peralatan	(71.089.105)	-	-	(71.089.105)	*Premises and equipment*
Nilai Buku Neto	**-**			**-**	***Net Book Value***

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai buku aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment of the net book value of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019.

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp48.083.619.330, yang terdiri atas bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Unit Kerja (cabang) BRI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BRI.

10. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses as of December 31, 2020 and 2019 amounted to RpNil and Rp48,083,619,330 respectively, which consist of community development that have been or are being performed by the BRI working unit (branches) but not yet reimbursed by PKBL BRI Unit.

11. ASET NETO

Aset Neto Tidak Terikat

11. NET ASSETS

Unrestricted Net Assets

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Saldo awal tahun	650.154.113.711	925.910.670.144	***Beginning balance***
Penurunan Aset Neto Tidak Terikat	(117.730.613.290)	(275.756.556.433)	*Decrease in Unrestricted Net Assets*
Saldo akhir tahun	**532.423.500.421**	**650.154.113.711**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

12. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA

Pada tahun 2015, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, yang menyatakan bahwa dana PKBL bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

Alokasi dana pada tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 19 tanggal 18 Februari 2020 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH, dinyatakan tidak ada pembentukan biaya untuk PKBL untuk tahun 2020.

Tahun 2019

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 40 tanggal 15 Mei 2019 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH, dinyatakan tidak ada pembentukan biaya untuk PKBL untuk tahun 2019.

12. ALLOCATION OF FUND FROM FOSTERING SOE

In 2015, Ministry of SOEs' issued Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 which stated that PKBL fund derived from the provision of net income after tax which is set by GMS/Ministry's Approval of Annual Report of Fostering SOEs is at maximum of 4% (four percent) from the prior year's net profit after tax.

In 2016, Ministry of SOEs' recently issued Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 on December 19, 2016. This new regulation further adds the source through which PKBL fund can be derived, that is from Fostering SOE's budget expenditure or expense.

Allocation of fund in 2020 and 2019 are as follows:

Year 2020

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 19 dated February 18, 2020 that was legalised by Notary and Land Registar Fathiah Helmi, SH, it was stated that there was no expense created for PKBL BRI for 2020.

Year 2019

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 40 dated May 15, 2019 that was legalised by Notary and Land Registar Fathiah Helmi, SH, it was stated that there was no expense created for PKBL BRI for 2019.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

13. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga dari jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

13. INTEREST INCOME

Interest income from current account for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ ***For the years ended December 31,***		
	2020	**2019**	
Program Kemitraan			***Partnership Program***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	2.010.777.401	607.751.146	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	1.004.894.907	957.130.428	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	50.394.159	60.962.785	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	40.844.166	49.409.975	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	38.092.215	378.705.804	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	36.823.387	145.594.203	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	2.404.078	4.014.316	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational*
	3.184.230.313	2.203.568.657	
Bina Lingkungan			***Community Development***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	1.301.508.314	5.284.610.046	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	6.799.276	9.312.745	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	-	377.989.566	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan*
	1.308.307.590	5.671.912.357	
Jumlah	**4.492.537.903**	**7.875.481.014**	***Total***

Penyajian pendapatan bunga pada Laporan Aktivitas adalah neto, setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening yaitu sebesar Rp942.072.936 dan Rp1.651.258.725 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Presentation of interest income in the Statement of Activities is net, after deducting final tax and administrative expense amounting to Rp942,072,936 and Rp1,651,258,725, for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME

Loan administration services income of Partnership Program for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Kantor Wilayah	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the years ended December 31,* 2020	2019	*Regional Offices*
Yogyakarta	2.827.900.675	994.365.415	*Yogyakarta*
Denpasar	1.822.492.580	1.167.944.277	*Denpasar*
Makassar	1.752.790.531	1.220.087.913	*Makassar*
Surabaya	1.665.416.778	531.194.970	*Surabaya*
Semarang	1.661.926.993	631.348.602	*Semarang*
Bandung	1.409.664.351	832.570.830	*Bandung*
Malang	1.197.559.562	1.851.821.707	*Malang*
Palembang	1.178.294.954	585.430.047	*Palembang*
Manado	1.017.993.838	529.716.460	*Manado*
Bandar Lampung	914.467.422	606.362.985	*Bandar Lampung*
Banjarmasin	820.706.628	972.527.612	*Banjarmasin*
Medan	767.162.940	836.261.822	*Medan*
Pekanbaru	680.646.289	342.024.559	*Pekanbaru*
Padang	611.967.983	253.636.556	*Padang*
Banda Aceh	606.652.324	316.601.978	*Banda Aceh*
DKI Jakarta 2	588.022.514	807.580.906	*DKI Jakarta 2*
Jayapura	454.182.892	258.181.148	*Jayapura*
DKI Jakarta 3	424.565.432	658.169.240	*DKI Jakarta 3*
DKI Jakarta 1	133.403.611	482.180.876	*DKI Jakarta 1*
Jumlah	**20.535.818.297**	**13.878.007.903**	***Total***

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan PER-02/MBU/07/2017 dimana PKBL BRI menerbitkan Surat No. B.136.e-PPK/KPL/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, distribusi/komposisi bunga Pinjaman Kemitraan sebesar 3% flat per tahun.

Based on the Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 and the latest amendment was made pursuant to PER-02/MBU/07/2017 where PKBL BRI issued Letter No. B.136.e-PPK/KPL/08/2017 dated August 18, 2017, the distribution/composition of the Partnership Loan interest was 3% flat per annum.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

15. PENDAPATAN LAIN-LAIN

15. OTHER INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,*		
	2020	**2019**	
Pengembalian kelebihan dana bina lingkungan	63.200.000	145.581.175	*Return of excess fund from community development*
Lain-lain	165.236.818	-	*Others*
Jumlah	**228.436.818**	**145.581.175**	***Total***

16. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

Dana pembinaan kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp322.580.915 digunakan masing-masing untuk kegiatan pelatihan mitra binaan dan penyelenggaraan pameran atas usaha Mitra Binaan.

16. FOSTERING PARTNERSHIP FUNDS

Fostering partnership funds for the year ended December 31, 2020 and 2019 which amounted to RpNil and Rp322,580,915, respectively, were used for training the foster partners and the business exhibitions of foster partners.

17. PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana program bina lingkungan adalah sebagai berikut:

17. COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION

Community development program funds distribution are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,*		
	2020	**2019**	
Bantuan bencana alam dan bencana non alam	31.444.737.808	6.336.123.862	*Aid for natural and non-natural disaster*
Bantuan peningkatan kesehatan	16.794.697.201	44.759.761.982	*Aid for health improvement*
Bantuan sarana ibadah	12.305.077.929	43.785.086.953	*Aid for worship facilities*
Bantuan pendidikan	11.836.079.479	70.191.707.124	*Aid for education*
Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan	10.540.426.582	31.342.001.612	*Aid for social assistance for poverty alleviation*
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	1.855.524.844	29.302.833.387	*Aid for development of public facilities and/or infrastructures*
Bantuan pelestarian alam	135.000.000	866.344.000	*Aid for nature preservation*
Jumlah	**84.911.543.843**	**226.583.858.920**	***Total***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

18. PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH BUMN PEMBINA

Program BL selain menyalurkan saldo awal dana yang berasal dari alokasi sisa laba BUMN Pembina dari tahun-tahun sebelumnya juga mengelola penyaluran program bantuan BUMN Pembina selama tahun berjalan.

Selain penyaluran program BL yang dicatat sebagai biaya pada laporan keuangan PKBL sebagaimana diungkapkan pada Catatan 17, terdapat Penyaluran Program BL oleh BUMN Pembina yang sumber dananya berasal dari anggaran BUMN Pembina dan dicatat sebagai biaya pada laporan keuangan BUMN Pembina.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, sumber dana BL dapat berasal dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina dan untuk Persero Terbuka, dana tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pada tahun 2020, penetapan besaran dana dari BUMN Pembina didasarkan pada Anggaran Dana BL sesuai Usulan Rencana Kerja dan Anggaran *Corporate Secretary Division* Tahun 2020 yang telah disetujui sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. R.40-KOM/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan No. 424-DIR/AMK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dimana telah dianggarkan sebesar Rp185.000.000.000. Dari anggaran tersebut disalurkan sebesar Rp179.225.470.899. Selama tahun 2020 telah disalurkan Program BL sebesar Rp264.137.014.742 dimana sebesar Rp179.225.470.899 berasal dari anggaran BUMN Pembina tahun 2020 dan sebesar Rp84.911.543.843 berasal dari saldo kas di bank Program BL (Catatan 17).

Penyaluran dana program BL oleh BUMN Pembina adalah sebagai berikut:

18. COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION FROM FOSTERING SOE

The BL program other than to distribute beginning balance of remaining profit Fostering SOE from previous years also manages distribution for aid program Fostering SOE during the year.

Besides the distribution of the BL program which is recorded as expense in the PKBL's financial statement disclosed in note 17, there is the distribution of the BL program by Fostering SOE which source of funds come from Fostering SOE budget and recorded as expense in the Fostering SOE's financial statement.

Based on the Ministry of State-Owned Enterprises issued the Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016, the BL's source of fund derived from the budget which was calculated as expense in Fostering SOE and for the public company, these funds are determined by the board of commissioners.

On 2020, the determination of the funds from Fostering SOE is based on the BL budget according to the Corporate Secretary Division Work Plan and Budget's Year 2020 which has been approved as stated in Decision Letter No. R.40-KOM/06/2020 dated June 24, 2020 and No. 424-DIR/AMK/06/2020 dated June 29, 2020, which has been budgeted amounted to Rp185,000,000,000. From those budget distributed amounted to Rp179,225,470,899. During 2020, BL program has distributed Rp264,137,014,742 which Rp179,225,470,899 from the Fostering SOE's budget for the year 2020 and Rp84,911,543,843 from BL Program's cash in bank balances (Note 17).

BL program funds distribution from Fostering SOE are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2020	
Bantuan pendidikan	40.770.537.390	*Aid for education*
Bantuan bencana alam dan bencana non alam	38.264.220.558	*Aid for natural and non-natural disaster*
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	30.309.326.579	*Aid for development of public facilities and/or infrastructures*
Bantuan peningkatan kesehatan	29.112.188.534	*Aid for health improvement*
Bantuan sarana ibadah	22.642.846.466	*Aid for worship facilities*
Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan	13.828.899.647	*Aid for social assistance for poverty alleviation*
Bantuan pelestarian alam	4.297.451.725	*Aid for nature preservation*
	179.225.470.899	

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

19. HIBAH DANA PROGRAM KEMITRAAN KEPADA BUMN KHUSUS

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No: PER-02/MBU/7/2017 dinyatakan bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN Khusus dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM) sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri BUMN pada Surat No: S-822/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Pada tanggal 26 Desember 2018, merujuk Surat Nomor: B-2127-DIR/BKC/12/2018, BUMN Pembina mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana program kemitraan kepada PT PNM selaku BUMN khusus melalui mekanisme hibah sebesar Rp50 miliar kepada Dewan Komisaris.

Pada tanggal 12 Februari 2019, merujuk Surat Nomor: R.06-KOM/02/2019, Dewan Komisaris pada prinsipnya mendukung kebijakan Kementerian BUMN terkait dengan penyaluran dana PK melalui BUMN khusus sebesar Rp50 miliar dan meminta Direksi untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri BUMN.

Pada tanggal 6 Maret 2019, merujuk Surat Nomor: B-354-DIR/BKC/03/2019, BUMN Pembina mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana program kemitraan melalui BUMN khusus kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pada tanggal 5 April 2019, merujuk Surat Menteri BUMN No. S-209/MBU/04/2019 tentang Penyaluran Dana PK melalui BUMN Khusus yang didalamnya berisi tentang persetujuan Menteri atas Penyaluran Dana PK BRI kepada PT PNM sebesar Rp50 miliar.

Pada tanggal 20 Mei 2019 dilakukan penandatanganan Hibah Penyaluran Dana PK kepada PT PNM sebesar Rp50 miliar sesuai dengan Akta Hibah No.70 yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, S.H., notaris di Jakarta dan pelaksanaan hibah dilakukan pada 10 Juli 2019.

Pada tahun 2020, tidak terdapat hibah penyaluran dana PK kepada BUMN Khusus.

19. PARTNERSHIP PROGRAM FUNDING GRANT TO SPECIAL SOE

In accordance with SOE Minister Regulation No: PER-02/MBU/7/2017, it was stated that to accelerate and increase professionalism in the development and empowerment of micro and small economies, Fostering SOE can provide non interest bearing loans or Partnership Program funding grants to Special SOE, in this matter is PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM), as determined by the Minister of SOE on Letter No: S-822/MBU/12/2018 dated December 13, 2018.

On December 26, 2018, referring to Letter Number: B-2127-DIR/BKC/12/2018, the Fostering SOE submitted an application for approval of the partnership program fund distribution to PT PNM as a special SOE through a grant mechanism of Rp50 billion to the Board of Commissioners.

On February 12, 2019, referring to Letter Number: R.06-KOM/02/2019, the Board of Commissioners principally supported the policy of the Ministry of SOE related to the distribution of PK funds through a special SOE amounting to Rp50 billion and asked the Directors to submit an application for approval to the Minister of SOE.

On March 6, 2019, referring to Letter Number: B-354-DIR/BKC/03/2019, the Fostering SOE submitted an application for approval of the distribution of partnership program funds through special SOEs to the Minister of State-Owned Enterprises.

On April 5, 2019, referring to Minister of SOE on Letter No. S-209/MBU/04/2019 *about Fund Distribution to Special SOE, there is an approval by Minister about fund distribution to PT PNM amounted Rp50 billion.*

On May 20, 2019 an agreement about fund distribution to PT PNM was signed amounting to Rp50 billion based on Notarial Deed of Grant No.70 in the presence of Hadijah, S.H., a notary in Jakarta and the grant was distributed on July 10, 2019.

For the year 2020, there was no partnership program funding grant to Special SOE.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

20. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG LAIN-LAIN

Beban cadangan kerugian penuruan nilai piutang lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp15.634.047.189.

Beban cadangan kerugian penuruan nilai piutang lain-lain adalah beban yang timbul untuk mencadangkan piutang lain-lain yang belum terselesaikan lebih dari 1 (satu) tahun.

20. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON OTHER RECEIVABLES EXPENSES

Allowance for impairment losses on other receivables expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019, amounting to RpNil and Rp15,634,047,189, respectively.

Allowance for impairment losses on other receivables expenses are expenses incurred to provide allowance for other receivables that are not yet settled for more than 1 (one) year.

21. PEMBALIKAN PIUTANG LAIN-LAIN

Pembalikan piutang lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp807.575.787 dan RpNihil.

21. REVERSAL OF OTHER RECEIVABLE

Reversal of other receivable expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019, amounted to Rp807,575,787 and RpNil, respectively.

22. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak-pihak berelasi

22. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

a. Type of relationships and transactions with related parties

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Transactions with related parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN Pembina/*Fostering SOE*	Kas pada Bank, piutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan pendapatan bunga/ *Cash in Bank, other receivables, accrued expenses, and interest income*
PT Perkebunan Nusantara IX	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Common control through central government*	Piutang kepada BUMN Pembina lain/ *Receivables from other fostering SOE*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Common control through central government*	Hibah dana program kemitraan kepada BUMN khusus/ *Partnership program funding grant to special SOE*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

22. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

22. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi

b. Details of transaction balances with related parties

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Aset			***Asset***
Kas pada Bank	251.415.252.491	255.222.568.633	*Cash in Bank*
Piutang kepada BUMN pembina lain /lembaga penyalur - bersih	2.302.869.161	35.677.774.148	*Receivables from other fostering SOE/distributing partners - net*
Piutang lain-lain	700.000.070	527.424.213	*Other receivables*
Jumlah	**254.418.121.722**	**291.427.766.994**	***Total***
Jumlah aset	**532.423.500.421**	**698.397.173.575**	***Total assets***
Persentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	**47,78%**	**41,73%**	***Percentage of total assets to related party of total assets***
Liabilitas			***Liability***
Beban yang masih harus dibayar	-	48.083.619.330	*Accrued Expenses*
Jumlah Liabilitas	**-**	**48.243.059.864**	***Total liability***
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	**-**	**99,67%**	***Percentage of total liabilities to related party of total liabilities***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan			***Revenue***
Pendapatan bunga	3.550.464.967	6.224.222.289	*Interest Income*
Jumlah pendapatan	**25.122.295.869**	**24.349.908.881**	***Total revenue***
Persentase jumlah pendapatan dari pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	**14,13%**	**25,56%**	***Percentage of total revenue from related party of total revenues***
Beban			***Expenses***
Hibah dana program kemitraan kepada BUMN khusus	-	50.000.000.000	*Partnership program funding grant to special SOE*
Jumlah beban	**142.852.909.159**	**300.106.465.314**	***Total expenses***
Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	**-**	**16,66%**	***Percentage of total expense to related party of total expenses***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

23. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA

Kep.100/MBU/2002

Program Kemitraan

a. Penilaian Efektivitas

Penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas pinjaman modal kerja. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri atas saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga dari program kemitraan.

Tabel skor tingkat penyerapan dana (tidak diaudit)

23. RESTRICTED FUND USAGE

Kep.100/MBU/2002

Partnership Program

a. Effectivity Performance

The performance evaluation of partnership and community development program is based on the Minister of SOE Decree No. Kep.100/ MBU/ 2002 dated June 4, 2002 regarding The Effectiveness Indicator of Partnership Program Loan Distribution and the Collectibility of the Loan Repayments.

The effectiveness of loan distribution is calculated by dividing the amount of distributed funds by the amount of the utilizable funds. Amount of distributed funds represents all current year funds distribution to small enterprise businesses and cooperation. The funds are distributed as working capital loans. Utilizable funds is calculated by adding the beginning balance with loan repayments (principal and the interest repayments) and with interest income from partnership program.

Score of funds absorption table (unaudited)

Penyerapan %	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80	*% of absorption*
Skor	3	2	1	0	*Score*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2020	
Distribusi dana		***Fund distribution***
Jumlah dana yang disalurkan:		*Distribution of Funds:*
Piutang pinjaman mitra binaan	149.171.000.070	*Loan receivables from foster partner distribution*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

23. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

Kep.100/MBU/2002 (lanjutan)

Program Kemitraan (lanjutan)

a. Penilaian Efektivitas (lanjutan)

23. RESTRICTED FUND USAGE (continued)

Kep.100/MBU/2002 (continued)

Partnership Program (continued)

a. Effectivity Performance (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2020	
Dana yang tersedia		***Fund available***
Saldo awal kas Program Kemitraan (Catatan 4)	123.337.282.676	*Cash of Partnership Program Beginning balance (Note 4)*
Pengembalian Piutang Pinjaman Mitra Binaan	252.282.641.893	*Collection of Foster Partners Loan Receivables*
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	20.691.743.957	*Loan Administration Service Income*
Pengembalian dari BUMN pembina lain (Catatan 5)	500.000.000	*Repayments from other fostering SOE (Note 5)*
	396.811.668.526	
Tingkat efektivitas penyaluran (persentase distribusi dana terhadap dana yang tersedia)	**37,59%**	***Level of the effectiveness of the loan distribution (percentage fund distribution to fund available)***
Skor tingkat efektivitas penyaluran pinjaman	**0**	***Score of level of the effectiveness of the loan distribution***

b. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Indikator lain dalam penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang memberikan indikasi adanya kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), diragukan (25%) dan macet (0%).

b. Collectibility level of the Loan Distribution

Another performance indicator of partnership and community development program is the collectibility of repayments which indicates the probability of a loan to be fully paid. The collectibility level is calculated by comparing the weighted average collectibility funds with distributed funds. Weighted average collectibility funds is the result of multiplying the collectibility weightage with the balance of each quality of the loan (e.g: current: 100%, substandard: 75%, doubtful: 25% and loss: 0%)

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

23. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

Kep.100/MBU/2002 (lanjutan)

Program Kemitraan (lanjutan)

b. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman (lanjutan)

Tabel skor tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman (tidak diaudit)

23. RESTRICTED FUND USAGE (continued)

Kep.100/MBU/2002 (continued)

Partnership Program (continued)

b. Collectibility level of the Loan Distribution (continued)

Score of repayments collectibility level table (unaudited)

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10	*% of Collectibility Level*
Skor	**3**	**2**	**1**	**0**	***Score***

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Weighted average amount of the collectibility of the loan as of December 31, 2019 is as follows:

Kualitas Pinjaman	Saldo pinjaman (Catatan 6)/ *Loan balance (Note 6)*	%	Jumlah rata-rata tertimbang (Tidak diaudit)/ *Weighted Average Amount (Unaudited)*	*Loan Quality*
Lancar	248.361.890.017	100%	248.361.890.017	*Current*
Kurang Lancar	20.573.764.338	75%	15.430.323.253	*Substandard*
Diragukan	15.347.755.862	25%	3.836.938.966	*Doubtful*
Macet	64.753.682.486	0%	-	*Loss*
Jumlah	**349.037.092.703**		**267.629.152.236**	***Total***
Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman (persentase jumlah rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap saldo pinjaman yang disalurkan)		**76,68%**		***Loan repayment collectibility level (percentage of weighted average loan collectibility to loan distribution)***
Nilai tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman		**3**		***Score of repayments collectibility level***

PER-03/MBU/12/2016

Program Kemitraan

Persentase dana pembinaan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan

Berdasarkan PER-09/MBU//07/2015 pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa besarnya dana pembinaan kemitraan yang terdiri atas biaya pendidikan, pemasaran, promosi dan hal lain-lain besarnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Dana pembinaan menjadi bagian dari program bina lingkungan.

PER-03/MBU/12/2016

Partnership Program

The percentage of fostering partnership funds to current year funds distribution for partnership program

Based on PER-09/MBU/07/2015 art 9 paragraph 4 specified that the amount of fostering partnership funds which consists of education, marketing, promotion expense, etc is 20% (twenty percent) at maximum of the partnership program distribution during the year. Development funds is part of community development program.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

23. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

PER-03/MBU/12/2016 (lanjutan)

Program Kemitraan (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2016, PER-09/MBU/07/2015 direvisi dengan PER-03/MBU/12/2016, dimana beban pembinaan kemitraan menjadi bagian dari realisasi program kemitraan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 9 ayat 1c, efektif 19 Desember 2016.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persentase beban dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

23. RESTRICTED FUND USAGE (continued)

PER-03/MBU/12//2016 (continued)

Partnership Program (continued)

As of December 19, 2016, PER-09/MBU/07/2015 revised with PER-03/MBU/12/2016, which stipulates that fostering partnership expense is a part of partnership program as stated in Art 9 paragraph 1c, effective December 19, 2016.

For the year ended December 31, 2020, the percentage of fostering partnership funds to current year partnership program funds distribution is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2020	
Dana pembinaan kemitraan (Catatan 16)	-	*Fostering partnership funds (Note 16)*
Dana program kemitraan yang disalurkan		*Partnership program funds distribution*
Piutang pinjaman mitra binaan	149.171.000.070	*Loan receivables from foster partners*
Persentase dana pembinaan kemitraan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan	**-**	***Percentage of fostering partnership funds to partnership program funds distribution***

Lampiran/*Appendix* 1

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2020 (Tidak Diaudit)

Statement of Community Development Program Funds Distribution Year 2020 (Unaudited)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Offices*	Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum/ *Aid for Development of Public Facilities and/or Infrastructures*	Bantuan Bencana Alam dan Bencana Non Alam/ *Aid for Natural and Non-Natural Disaster*	Bantuan Pendidikan/ *Aid for Education*	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ *Aid for Health Improvement*	Bantuan Sarana Ibadah/ *Aid for Worship Facilities*	Bantuan Pelestarian Alam/ *Aid for Nature Preservation*	Bantuan Sosial Kemasyarakat-an untuk Pengentasan Kemiskinan/ *Aid for Social Assistance for Poverty Alleviation*	Jumlah/ *Total*
1	Banda Aceh	236.012.400	1.165.861.745	1.765.621.911	1.742.273.170	2.649.437.799	-	708.232.460	8.267.439.485
2	Bandar Lampung	763.459.538	1.212.031.490	413.917.641	1.569.945.445	835.589.883	-	855.196.733	5.650.140.730
3	Bandung	2.843.385.747	5.847.160.643	6.137.226.754	4.913.742.601	3.081.893.355	806.710.000	2.823.952.160	26.454.071.260
4	Banjarmasin	1.243.682.412	2.070.703.762	3.128.943.628	3.037.057.133	1.822.827.572	500.000.000	756.602.000	12.559.816.507
5	Denpasar	6.071.986.327	3.984.480.986	2.216.313.406	1.625.320.834	2.189.523.081	492.759.000	2.888.424.500	19.468.808.134
6	DKI Jakarta 1	690.491.707	3.634.744.868	697.918.918	1.243.001.006	2.191.445.371	-	824.513.970	9.282.115.840
7	DKI Jakarta 2	1.441.413.864	2.759.156.479	1.846.418.096	1.723.256.614	1.679.959.622	-	122.462.030	9.572.666.705
8	DKI Jakarta 3	1.969.068.320	5.157.202.417	2.666.636.249	3.241.042.040	1.153.766.534	-	603.343.879	14.791.059.439
9	Jayapura	1.464.938.194	1.071.216.051	1.055.265.073	3.638.003.705	1.098.627.090	-	842.918.200	9.170.968.313
10	Kantor Pusat	150.000.000	10.453.329.036	5.612.950.000	730.963.500	145.120.043	-	2.728.197.832	19.820.560.411
11	Makassar	1.365.203.635	3.909.358.879	1.381.980.930	1.137.430.830	3.182.129.635	20.000.000	2.075.000	10.998.178.909
12	Malang	2.428.303.349	5.552.680.135	6.163.501.520	2.999.173.042	1.849.047.026	115.000.000	3.001.676.218	22.109.381.290
13	Manado	1.972.012.261	2.743.472.624	2.352.344.545	1.306.648.025	3.570.265.200	499.137.093	1.312.899.083	13.756.778.831
14	Medan	485.537.323	2.756.260.101	1.417.908.879	3.982.860.260	2.040.281.366	-	235.764.651	10.918.612.580
15	Padang	1.285.953.276	1.728.097.468	1.235.900.000	447.970.286	991.232.391	499.246.575	868.733.618	7.057.133.614
16	Palembang	2.028.137.880	2.163.308.704	2.833.118.227	2.999.654.407	1.759.348.471	500.000.000	965.743.589	13.249.311.278
17	Pekanbaru	1.255.630.463	1.932.310.748	1.421.605.230	998.741.354	625.570.187	-	710.010.677	6.943.868.659
18	Semarang	1.765.640.635	3.908.869.802	3.311.434.598	1.101.850.949	1.079.451.452	500.000.000	923.715.074	12.590.962.510
19	Surabaya	1.270.306.645	2.034.555.735	1.593.013.514	4.078.720.908	843.302.823	-	575.215.000	10.395.114.625
20	Yogyakarta	1.433.687.447	5.624.156.693	5.354.597.750	3.389.229.626	2.159.105.494	499.599.057	2.619.649.555	21.080.025.622
	Jumlah/ *Total*	**32.164.851.423**	**69.708.958.366**	**52.606.616.869**	**45.906.885.735**	**34.947.924.395**	**4.432.451.725**	**24.369.326.229**	**264.137.014.742**

Lampiran/*Appendix* 1

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2019 (Tidak Diaudit)

Statement of Community Development Program Funds Distribution Year 2019 (Unaudited)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Offices*	Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum/ *Aid for Development of Public Facilities and/or Infrastructures*	Bantuan Bencana Alam dan Bencana Non Alam/ *Aid for Natural and Non-Natural Disaster*	Bantuan Pendidikan/ *Aid for Education*	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ *Aid for Health Improvement*	Bantuan Sarana Ibadah/ *Aid for Worship Facilities*	Bantuan Pelestarian Alam/ *Aid for Nature Preservation*	Bantuan Sosial Kemasyarakat-an untuk Pengentasan Kemiskinan/ *Aid for Social Assistance for Poverty Alleviation*	Jumlah/ *Total*
1	Banda Aceh	967.012.600	-	2.192.133.560	791.453.200	2.372.060.701	-	850.038.011	7.172.698.072
2	Bandar Lampung	1.145.928.850	237.914.208	1.304.503.665	822.082.800	1.413.899.679	-	485.680.000	5.410.009.202
3	Bandung	4.440.165.621	185.440.000	8.111.360.920	7.785.465.125	2.511.848.200	181.300.000	3.506.578.746	26.722.158.612
4	Banjarmasin	1.272.565.750	47.956.620	1.444.563.940	6.067.430.814	1.840.300.000	-	684.347.000	11.357.164.124
5	Denpasar	1.568.763.702	692.448.036	4.150.287.500	1.789.421.755	3.648.697.320	41.250.000	1.286.729.950	13.177.598.263
6	DKI Jakarta 1	300.497.500	63.597.250	1.043.695.880	2.317.471.326	3.966.757.680	26.500.000	1.114.203.220	8.832.722.856
7	DKI Jakarta 2	640.372.000	-	4.430.021.570	3.290.032.600	3.268.822.826	-	1.098.920.905	12.728.169.901
8	DKI Jakarta 3	1.054.554.825	1.511.325.099	2.440.872.648	1.269.666.200	3.541.668.900	-	826.584.217	10.644.671.889
9	Jayapura	587.585.344	50.000.000	944.295.000	1.640.220.000	983.800.000	-	1.550.470.500	5.756.370.844
10	Kantor Pusat	42.157.000	2.030.517.300	12.550.286.200	2.750.367.500	855.985.847	-	9.088.621.266	27.317.935.113
11	Makassar	60.000.000	426.217.000	1.036.557.184	264.000.000	733.800.000	165.000.000	2.772.096.100	5.457.670.284
12	Malang	1.806.518.136	105.789.654	7.012.450.460	4.982.924.675	2.518.688.920	-	914.301.608	17.340.673.453
13	Manado	73.504.200	332.323.000	1.512.697.300	827.564.100	2.927.208.300	-	522.765.900	6.196.062.800
14	Medan	1.958.760.985	89.300.000	1.772.529.280	1.599.126.881	1.579.380.759	-	101.795.000	7.100.892.905
15	Padang	1.339.689.564	109.207.500	2.760.372.080	777.391.000	1.054.217.500	-	542.011.700	6.582.889.344
16	Palembang	2.427.866.173	-	1.730.344.042	1.292.035.000	1.699.774.449	198.500.000	999.763.480	8.348.283.144
17	Pekanbaru	702.202.000	110.692.000	1.782.439.969	1.232.560.800	1.702.337.850	-	1.216.165.000	6.746.397.619
18	Semarang	746.856.525	61.223.745	6.264.989.320	1.547.320.796	2.724.932.500	-	1.639.610.714	12.984.933.600
19	Surabaya	2.055.748.773	102.313.200	4.475.107.412	1.393.417.710	2.607.804.560	-	1.225.238.870	11.859.630.525
20	Yogyakarta	6.112.083.839	179.859.250	3.232.199.194	2.319.809.700	1.833.100.962	253.794.000	916.079.425	14.846.926.370
	Jumlah/ *Total*	**29.302.833.387**	**6.336.123.862**	**70.191.707.124**	**44.759.761.982**	**43.785.086.953**	**866.344.000**	**31.342.001.612**	**226.583.858.920**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurant and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
1	**Banda Aceh**										
	Lancar/ *Current*	41.603.400	126.492.410	-	-	-	996.839.488	1.255.792.668	-	45.832.700	2.466.560.666
	Kurang Lancar/ *Substandard*	4.849.995	19.445.600	-	-	-	303.120.850	331.290.100	35.232.048	45.139.100	739.077.693
	Diragukan/ *Doubtful*	-	99.675.000	-	-	-	196.007.507	110.416.800	-	-	406.099.307
	Macet/ *Loss*	156.696.667	131.032.145	-	-	16.300.000	1.941.280.351	681.354.483	-	38.697.800	2.965.361.446
	Sub jumlah/ *Sub total*	**203.150.062**	**376.645.155**	**-**	**-**	**16.300.000**	**3.437.248.196**	**2.378.854.051**	**35.232.048**	**129.669.600**	**6.577.099.112**
2	**Bandar Lampung**										
	Lancar/ *Current*	366.534.694	290.307.438	-	110.130.167	-	3.380.255.852	6.378.619.125	-	67.715.600	10.593.562.876
	Kurang Lancar/ *Substandard*	117.450.570	27.084.100	-	-	-	270.760.463	1.036.742.044	-	-	1.452.037.177
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	330.713.558	274.272.808	-	-	604.986.366
	Macet/ *Loss*	57.132.200	55.331.267	-	-	-	932.632.271	829.532.393	-	34.040.000	1.908.668.131
	Sub jumlah/ *Sub total*	**541.117.464**	**372.722.805**	**-**	**110.130.167**	**-**	**4.914.362.144**	**8.519.166.370**	**-**	**101.755.600**	**14.559.254.550**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
3	**Bandung**										
	Lancar/ *Current*	779.367.182	502.301.298	-	-	21.727.900	5.613.419.171	13.526.315.014	-	126.390.600	20.569.521.165
	Kurang Lancar/ *Substandard*	120.833.536	106.831.400	-	-	-	790.280.915	611.955.871	-	28.366.500	1.658.268.222
	Diragukan/ *Doubtful*	58.333.600	77.304.400	-	-	-	884.379.103	281.311.600	-	-	1.301.328.703
	Macet/ *Loss*	275.312.654	351.976.699	-	-	-	2.786.985.195	3.107.886.034	-	129.167.565	6.651.328.147
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.233.846.972**	**1.038.413.797**	**-**	**-**	**21.727.900**	**10.075.064.384**	**17.527.468.519**	**-**	**283.924.665**	**30.180.446.237**
4	**Banjarmasin**										
	Lancar/ *Current*	80.142.200	376.051.007	-	33.315.161	63.348.691	3.486.254.596	7.190.201.131	-	167.782.076	11.397.094.862
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	31.412.500	-	-	35.417.300	195.177.132	332.513.966	-	-	594.520.898
	Diragukan/ *Doubtful*	-	33.860.000	-	-	-	258.687.959	177.871.888	-	29.121.500	499.541.347
	Macet/ *Loss*	75.341.800	363.861.988	-	-	-	2.496.008.089	968.305.786	-	46.132.200	3.949.649.863
	Sub jumlah/ *Sub total*	**155.484.000**	**805.185.495**	**-**	**33.315.161**	**98.765.991**	**6.436.127.776**	**8.668.892.771**	**-**	**243.035.776**	**16.440.806.970**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
5	**Denpasar**										
	Lancar/ *Current*	911.763.438	848.760.578	-	25.000.800	212.201.413	6.134.231.819	14.005.266.283	15.277.500	61.326.058	22.213.827.889
	Kurang Lancar/ *Substandard*	60.321.300	11.699.700	-	-	57.511.371	491.661.718	931.488.312	-	-	1.552.682.401
	Diragukan/ *Doubtful*	97.859.300	89.257.549	-	-	-	325.927.943	243.495.269	-	-	756.540.061
	Macet/ *Loss*	168.999.734	173.617.575	-	-	14.442.800	1.740.109.097	4.806.354.165	-	-	6.903.523.371
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.238.943.772**	**1.123.335.402**	**-**	**25.000.800**	**284.155.584**	**8.691.930.577**	**19.986.604.029**	**15.277.500**	**61.326.058**	**31.426.573.722**
6	**DKI Jakarta 1**										
	Lancar/ *Current*	-	281.790.192	-	-	-	1.475.607.584	1.669.070.029	-	87.501.000	3.513.968.805
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	44.731.944	-	-	-	195.261.220	66.666.800	-	-	306.659.964
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	261.199.194	16.666.400	-	-	277.865.594
	Macet/ *Loss*	1.257.201	166.728.233	-	-	-	875.992.394	91.053.900	-	-	1.135.031.728
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.257.201**	**493.250.369**	**-**	**-**	**-**	**2.808.060.392**	**1.843.457.129**	**-**	**87.501.000**	**5.233.526.091**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Industries*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
7	**DKI Jakarta 2**										
	Lancar/ *Current*	159.378.043	467.793.040	-	16.666.676	13.313.997	2.986.567.287	5.872.787.428	-	208.229.279	9.724.735.750
	Kurang Lancar/ *Substandard*	23.189.300	257.614.324	-	-	-	422.227.102	490.922.602	-	-	1.193.953.328
	Diragukan/ *Doubtful*	85.125.000	75.689.450	-	-	-	183.398.852	169.017.267	-	-	513.230.569
	Macet/ *Loss*	86.375.954	240.716.733	-	-	3.434.767	1.537.761.021	361.463.537	-	52.466.630	2.282.218.642
	Sub jumlah/ *Sub total*	**354.068.297**	**1.041.813.547**	**-**	**16.666.676**	**16.748.764**	**5.129.954.262**	**6.894.190.834**	**-**	**260.695.909**	**13.714.138.289**
8	**DKI Jakarta 3**										
	Lancar/ *Current*	213.839.388	455.346.648	-	-	-	3.104.007.691	7.033.407.787	-	165.858.150	10.972.459.664
	Kurang Lancar/ *Substandard*	35.028.300	14.130.967	-	-	-	184.242.842	161.448.461	-	-	394.850.570
	Diragukan/ *Doubtful*	47.159.200	16.667.600	-	-	-	279.607.220	-	-	-	343.434.020
	Macet/ *Loss*	125.437.880	678.187.344	-	-	-	1.548.895.771	204.579.988	-	-	2.557.100.983
	Sub jumlah/ *Sub total*	**421.464.768**	**1.164.332.559**	**-**	**-**	**-**	**5.116.753.524**	**7.399.436.236**	**-**	**165.858.150**	**14.267.845.237**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
9	**Jayapura**										
	Lancar/ *Current*	91.251.081	160.813.467	62.510.500	-	9.374.500	1.611.107.177	3.286.626.062	-	62.725.998	5.284.408.785
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	1.137.100	-	-	58.572.800	218.731.238	179.158.100	-	-	457.599.238
	Diragukan/ *Doubtful*	47.917.100	-	-	-	47.917.100	57.316.700	100.833.300	-	-	253.984.200
	Macet/ *Loss*	128.449.833	483.548.134	-	-	49.414.034	1.243.124.795	108.945.167	-	13.744.003	2.027.225.966
	Sub jumlah/ *Sub total*	**267.618.014**	**645.498.701**	**62.510.500**	**-**	**165.278.434**	**3.130.279.910**	**3.675.562.629**	**-**	**76.470.001**	**8.023.218.189**
10	**Makassar**										
	Lancar/ *Current*	518.432.660	706.896.970	-	23.610.900	14.582.100	7.503.892.240	10.971.922.094	14.953.752	92.606.081	19.846.896.797
	Kurang Lancar/ *Substandard*	123.422.971	43.751.484	-	-	-	993.820.554	1.231.447.783	-	-	2.392.442.792
	Diragukan/ *Doubtful*	74.815.372	242.130.253	-	-	-	742.843.896	591.262.620	-	-	1.651.052.141
	Macet/ *Loss*	367.021.803	473.238.808	28.124.784	-	72.977.500	2.961.533.345	1.645.047.466	-	52.275.587	5.600.219.293
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.083.692.806**	**1.466.017.515**	**28.124.784**	**23.610.900**	**87.559.600**	**12.202.090.035**	**14.439.679.963**	**14.953.752**	**144.881.668**	**29.490.611.023**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
11	**Malang**										
	Lancar/ *Current*	848.282.750	396.618.854	-	-	120.828.445	5.737.594.556	22.262.913.204	-	202.220.473	29.568.458.282
	Kurang Lancar/ *Substandard*	135.577.997	60.834.400	-	-	-	371.117.770	471.009.762	-	27.216.826	1.065.756.755
	Diragukan/ *Doubtful*	197.442.600	23.066.700	-	-	-	462.201.338	510.996.909	-	22.700.800	1.216.408.347
	Macet/ *Loss*	61.024.141	57.815.450	-	-	10.000.000	900.688.157	1.800.864.850	-	-	2.830.392.598
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.242.327.488**	**538.335.404**	**-**	**-**	**130.828.445**	**7.471.601.821**	**25.045.784.725**	**-**	**252.138.099**	**34.681.015.982**
12	**Manado**										
	Lancar/ *Current*	54.303.200	182.081.170	-	-	97.354.505	2.894.257.729	6.877.245.756	-	50.210.700	10.155.453.060
	Kurang Lancar/ *Substandard*	42.983.000	57.999.603	-	-	-	741.784.823	736.487.796	-	-	1.579.255.222
	Diragukan/ *Doubtful*	37.131.500	58.354.500	-	-	-	826.813.032	555.575.200	-	11.665.700	1.489.539.932
	Macet/ *Loss*	356.287.822	593.110.102	-	-	4.932.218	3.173.778.490	1.244.647.432	-	57.158.900	5.429.914.964
	Sub jumlah/ *Sub total*	**490.705.522**	**891.545.375**	**-**	**-**	**102.286.723**	**7.636.634.074**	**9.413.956.184**	**-**	**119.035.300**	**18.654.163.178**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
13	**Medan**										
	Lancar/ *Current*	232.221.719	509.688.416	-	22.917.500	33.335.200	3.576.506.090	5.608.632.330	-	-	9.983.301.255
	Kurang Lancar/ *Substandard*	10.860.800	109.511.030	-	-	-	391.872.682	166.647.032	-	41.667.200	720.558.744
	Diragukan/ *Doubtful*	32.958.096	133.590.906	-	-	-	152.502.596	238.879.508	-	-	557.931.106
	Macet/ *Loss*	119.084.744	175.653.400	-	-	-	1.242.160.752	625.456.892	-	146.727.866	2.309.083.654
	Sub jumlah/ *Sub total*	**395.125.359**	**928.443.752**	**-**	**22.917.500**	**33.335.200**	**5.363.042.120**	**6.639.615.762**	**-**	**188.395.066**	**13.570.874.759**
14	**Padang**										
	Lancar/ *Current*	234.219.646	81.943.908	-	26.388.700	-	1.745.733.899	3.286.606.159	-	59.376.600	5.434.268.912
	Kurang Lancar/ *Substandard*	29.999.800	-	-	-	-	270.930.069	290.038.836	-	-	590.968.705
	Diragukan/ *Doubtful*	111.465.566	62.445.076	-	-	-	211.624.200	37.500.600	-	-	423.035.442
	Macet/ *Loss*	206.955.358	230.279.117	-	-	-	1.122.254.430	716.157.136	-	-	2.275.646.041
	Sub jumlah/ *Sub total*	**582.640.370**	**374.668.101**	**-**	**26.388.700**	**-**	**3.350.542.598**	**4.330.302.731**	**-**	**59.376.600**	**8.723.919.100**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
15	**Palembang**										
	Lancar/ *Current*	246.623.122	430.132.071	-	-	-	3.612.614.278	5.932.403.825	-	171.114.354	10.392.887.650
	Kurang Lancar/ *Substandard*	36.903.300	46.971.237	-	-	-	370.099.832	201.369.225	-	-	655.343.594
	Diragukan/ *Doubtful*	44.793.867	144.808.020	-	27.816.662	-	238.927.354	35.300.200	-	-	491.646.103
	Macet/ *Loss*	596.650.394	252.361.866	-	-	-	1.535.631.292	471.923.298	-	21.610.900	2.878.177.750
	Sub jumlah/ *Sub total*	**924.970.683**	**874.273.194**	**-**	**27.816.662**	**-**	**5.757.272.756**	**6.640.996.548**	**-**	**192.725.254**	**14.418.055.097**
16	**Pekanbaru**										
	Lancar/ *Current*	157.640.400	287.260.087	-	-	-	2.355.645.405	5.340.038.685	-	56.234.555	8.196.819.132
	Kurang Lancar/ *Substandard*	40.282.400	123.386.132	-	-	-	102.615.140	201.250.116	-	-	467.533.788
	Diragukan/ *Doubtful*	-	17.500.500	-	-	-	263.116.578	189.436.734	-	-	470.053.812
	Macet/ *Loss*	5.100.360	100.312.133	-	-	-	868.154.081	293.113.129	-	16.667.200	1.283.346.903
	Sub jumlah/ *Sub total*	**203.023.160**	**528.458.852**	**-**	**-**	**-**	**3.589.531.204**	**6.023.838.664**	**-**	**72.901.755**	**10.417.753.635**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
17	**Semarang**										
	Lancar/ *Current*	348.789.040	338.422.459	-	3.333.700	-	5.577.787.845	10.517.383.640	-	159.712.766	16.945.429.450
	Kurang Lancar/ *Substandard*	10.416.246	33.334.000	-	-	-	306.347.810	460.616.358	-	-	810.714.414
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	29.133.400	397.902.252	339.884.892	-	-	766.920.544
	Macet/ *Loss*	123.344.763	195.251.601	-	-	-	932.068.618	708.496.242	-	-	1.959.161.224
	Sub jumlah/ *Sub total*	**482.550.049**	**567.008.060**	**-**	**3.333.700**	**29.133.400**	**7.214.106.525**	**12.026.381.132**	**-**	**159.712.766**	**20.482.225.632**
18	**Surabaya**										
	Lancar/ *Current*	483.539.564	372.368.400	-	-	83.333.800	5.040.910.461	9.560.523.191	-	161.743.400	15.702.418.816
	Kurang Lancar/ *Substandard*	131.252.300	50.455.300	-	-	70.762.600	759.171.075	555.676.632	-	25.001.822	1.592.319.729
	Diragukan/ *Doubtful*	26.343.500	-	-	-	-	436.764.784	529.570.974	-	29.409.335	1.022.088.593
	Macet/ *Loss*	389.116.767	255.216.410	-	-	-	2.323.448.679	1.010.603.750	-	37.249.900	4.015.635.506
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.030.252.131**	**678.040.110**	**-**	**-**	**154.096.400**	**8.560.294.999**	**11.656.374.547**	**-**	**253.404.457**	**22.332.462.644**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2020 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2020 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
19	**Yogyakarta**										
	Lancar/ *Current*	668.255.212	657.223.356	-	-	52.220.008	6.363.737.234	17.501.017.891	-	157.362.500	25.399.816.201
	Kurang Lancar/ *Substandard*	118.900.200	135.798.882	-	-	54.128.500	761.535.884	1.278.857.638	-	-	2.349.221.104
	Diragukan/ *Doubtful*	120.575.070	176.040.300	-	-	16.333.500	964.285.792	918.216.830	-	106.618.183	2.302.069.675
	Macet/ *Loss*	475.972.532	438.363.117	-	-	-	3.474.809.837	1.304.910.090	-	97.940.700	5.791.996.276
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.383.703.014**	**1.407.425.655**	**-**	**-**	**122.682.008**	**11.564.368.747**	**21.003.002.449**	**-**	**361.921.383**	**35.843.103.256**
	Jumlah/*Total*	**12.235.941.132**	**15.315.413.848**	**90.635.284**	**289.180.266**	**1.262.898.449**	**122.449.266.044**	**194.113.565.273**	**65.463.300**	**3.214.729.107**	**349.037.092.703**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurant and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
1	**Banda Aceh**										
	Lancar/ *Current*	384.121.940	449.018.706	-	22.917.932	-	5.273.517.995	4.308.381.118	56.067.048	318.587.606	10.812.612.345
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	27.084.100	-	-	-	424.562.796	312.502.416	-	33.141.000	797.290.312
	Diragukan/ *Doubtful*	60.412.500	-	-	-	-	29.900.000	28.317.000	-	-	118.629.500
	Macet/ *Loss*	56.250.300	131.032.145	-	-	54.800.200	1.504.018.678	176.586.567	-	5.556.800	1.928.244.690
	Sub jumlah/ *Sub total*	**500.784.740**	**607.134.951**	**-**	**22.917.932**	**54.800.200**	**7.231.999.469**	**4.825.787.101**	**56.067.048**	**357.285.406**	**13.656.776.847**
2	**Bandar Lampung**										
	Lancar/ *Current*	736.050.194	808.814.069	-	33.320.834	-	8.486.168.104	6.054.675.176	-	108.751.800	16.227.780.177
	Kurang Lancar/ *Substandard*	22.222.000	30.000.000	-	-	-	233.937.000	348.383.956	-	-	634.542.956
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	20.890.200	-	-	20.890.200
	Macet/ *Loss*	32.982.200	14.609.667	-	-	-	459.959.400	563.133.881	-	34.040.000	1.104.725.148
	Sub jumlah/ *Sub total*	**791.254.394**	**853.423.736**	**-**	**33.320.834**	**-**	**9.180.064.504**	**6.987.083.213**	**-**	**142.791.800**	**17.987.938.481**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
3	**Bandung**										
	Lancar/ *Current*	1.389.758.408	1.154.785.088	-	-	37.499.900	15.515.291.983	10.973.758.925	-	218.056.200	29.289.150.504
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	83.838.700	-	-	-	489.351.036	233.207.100	-	50.000.000	856.396.836
	Diragukan/ *Doubtful*	-	15.202.407	-	-	-	37.393.000	18.750.000	-	-	71.345.407
	Macet/ *Loss*	230.770.987	268.132.968	-	-	-	1.736.082.608	2.453.902.134	-	129.167.565	4.818.056.262
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.620.529.395**	**1.521.959.163**	**-**	**-**	**37.499.900**	**17.778.118.627**	**13.679.618.159**	**-**	**397.223.765**	**35.034.949.009**
4	**Banjarmasin**										
	Lancar/ *Current*	359.694.271	992.271.097	21.390.000	58.323.161	264.983.987	9.829.969.290	6.923.518.286	-	476.203.926	18.926.354.018
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	20.693.919	-	-	-	401.709.821	138.074.711	-	-	560.478.451
	Diragukan/ *Doubtful*	-	46.422.500	-	-	-	161.436.350	124.848.305	-	-	332.707.155
	Macet/ *Loss*	75.341.800	265.278.469	-	-	-	1.799.645.875	680.231.381	-	46.132.200	2.866.629.725
	Sub jumlah/ *Sub total*	**435.036.071**	**1.324.665.985**	**21.390.000**	**58.323.161**	**264.983.987**	**12.192.761.336**	**7.866.672.683**	**-**	**522.336.126**	**22.686.169.349**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
5	**Denpasar**										
	Lancar/ *Current*	2.228.068.663	1.966.261.516	42.681.452	50.000.400	519.307.591	16.391.279.903	12.930.040.904	31.944.300	195.319.358	34.354.904.087
	Kurang Lancar/ *Substandard*	27.083.341	-	-	-	-	238.380.571	197.623.969	-	-	463.087.881
	Diragukan/ *Doubtful*	-	43.625.000	-	-	-	161.887.069	49.356.593	-	-	254.868.662
	Macet/ *Loss*	69.600.422	102.197.832	-	-	14.442.800	873.778.091	4.465.252.703	-	-	5.525.271.848
	Sub jumlah/ *Sub total*	**2.324.752.426**	**2.112.084.348**	**42.681.452**	**50.000.400**	**533.750.391**	**17.665.325.634**	**17.642.274.169**	**31.944.300**	**195.319.358**	**40.598.132.478**
6	**DKI Jakarta 1**										
	Lancar/ *Current*	-	674.875.659	-	-	-	4.805.207.745	528.922.350	-	137.501.000	6.146.506.754
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	76.821.400	-	-	-	337.539.002	-	-	-	414.360.402
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	138.649.900	-	-	-	138.649.900
	Macet/ *Loss*	1.257.201	89.906.833	-	-	-	382.179.699	91.053.900	-	-	564.397.633
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.257.201**	**841.603.892**	**-**	**-**	**-**	**5.663.576.346**	**619.976.250**	**-**	**137.501.000**	**7.263.914.689**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Industries*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
7	**DKI Jakarta 2**										
	Lancar/ *Current*	551.110.120	2.020.754.396	-	41.666.672	33.313.989	8.049.503.766	3.136.772.480	-	329.156.175	14.162.277.598
	Kurang Lancar/ *Substandard*	42.200.000	-	-	-	-	110.589.413	-	-	5.832.600	158.622.013
	Diragukan/ *Doubtful*	-	47.542.100	-	-	-	85.897.989	73.292.300	-	29.232.200	235.964.589
	Macet/ *Loss*	47.975.954	199.191.933	-	-	3.434.767	1.208.678.569	250.230.037	-	45.835.930	1.755.347.190
	Sub jumlah/ *Sub total*	**641.286.074**	**2.267.488.429**	**-**	**41.666.672**	**36.748.756**	**9.454.669.737**	**3.460.294.817**	**-**	**410.056.905**	**16.312.211.390**
8	**DKI Jakarta 3**										
	Lancar/ *Current*	464.982.087	1.194.129.186	-	-	22.917.932	6.787.201.732	2.827.880.139	-	317.716.256	11.614.827.332
	Kurang Lancar/ *Substandard*	7.776.800	-	-	-	-	212.197.313	-	-	-	219.974.113
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	87.105.680	678.187.344		-	-	1.102.707.054	199.579.996	-	-	2.067.580.074
	Sub jumlah/ *Sub total*	**559.864.567**	**1.872.316.530**	**-**	**-**	**22.917.932**	**8.102.106.099**	**3.027.460.135**	**-**	**317.716.256**	**13.902.381.519**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
9	**Jayapura**										
	Lancar/ *Current*	302.084.437	466.283.067	-	-	84.365.083	4.392.421.572	2.745.902.373	-	99.740.577	8.090.797.109
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	68.750.100	-	-	-	117.923.534	13.889.600	-	-	200.563.234
	Diragukan/ *Doubtful*	51.944.400	-	-	-	-	-	-	-	-	51.944.400
	Macet/ *Loss*	76.505.433	354.657.634	-	-	49.414.034	1.063.135.386	108.945.167	-	13.744.003	1.666.401.657
	Sub jumlah/ *Sub total*	**430.534.270**	**889.690.801**	**-**	**-**	**133.779.117**	**5.573.480.492**	**2.868.737.140**	**-**	**113.484.580**	**10.009.706.400**
10	**Makassar**										
	Lancar/ *Current*	1.194.700.544	2.168.850.287	35.792.284	65.278.500	179.449.290	20.244.336.881	8.279.456.730	43.751.400	406.134.552	32.617.750.468
	Kurang Lancar/ *Substandard*	164.802.579	173.577.100	-	-	-	786.396.326	114.015.400	-	-	1.238.791.405
	Diragukan/ *Doubtful*	5.379.959	-	-	-	-	264.047.235	181.247.600	-	-	450.674.794
	Macet/ *Loss*	252.840.124	241.972.408	-	-	72.977.500	1.692.528.579	1.115.550.362	-	52.275.587	3.428.144.560
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.617.723.206**	**2.584.399.795**	**35.792.284**	**65.278.500**	**252.426.790**	**22.987.309.021**	**9.690.270.092**	**43.751.400**	**458.410.139**	**37.735.361.227**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
11	**Malang**										
	Lancar/ *Current*	2.073.402.352	949.860.315	31.438.200	-	272.196.627	15.731.886.099	17.634.266.808	-	359.949.538	37.052.999.939
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	237.338.900	37.875.000	-	-	275.213.900
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	40.900.000	-	-	40.900.000
	Macet/ *Loss*	85.237.041	26.564.750	-	-	10.000.000	600.519.981	1.495.379.946	-	-	2.217.701.718
	Sub jumlah/ *Sub total*	**2.158.639.393**	**976.425.065**	**31.438.200**	**-**	**282.196.627**	**16.569.744.980**	**19.208.421.754**	**-**	**359.949.538**	**39.586.815.557**
12	**Manado**										
	Lancar/ *Current*	340.152.610	811.162.918	-	-	225.885.775	10.876.735.104	7.023.928.893	-	142.299.500	19.420.164.800
	Kurang Lancar/ *Substandard*	72.910.417	162.492.531	-	-	-	661.964.472	229.060.284	-	-	1.126.427.704
	Diragukan/ *Doubtful*	110.040.900	16.353.402	-	-	-	109.240.932	-	-	37.075.000	272.710.234
	Macet/ *Loss*	194.584.205	466.688.968	-	-	-	2.119.866.392	883.018.248	-	20.083.900	3.684.241.713
	Sub jumlah/ *Sub total*	**717.688.132**	**1.456.697.819**	**-**	**-**	**225.885.775**	**13.767.806.900**	**8.136.007.425**	**-**	**199.458.400**	**24.503.544.451**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
13	**Medan**										
	Lancar/ *Current*	653.817.832	1.430.243.974	-	47.917.100	99.984.671	9.588.545.694	5.721.737.249	-	137.996.000	17.680.242.520
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	56.398.500	-	-	-	401.696.083	361.951.255	-	-	820.045.838
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	148.128.377	113.700.000	-	-	261.828.377
	Macet/ *Loss*	132.729.744	154.694.400	-	-	-	542.838.546	268.319.156	-	146.727.866	1.245.309.712
	Sub jumlah/ *Sub total*	**786.547.576**	**1.641.336.874**	**-**	**47.917.100**	**99.984.671**	**10.681.208.700**	**6.465.707.660**	**-**	**284.723.866**	**20.007.426.447**
14	**Padang**										
	Lancar/ *Current*	1.084.550.165	304.027.314	-	43.055.500	15.555.800	6.096.837.818	2.356.665.867	-	163.534.523	10.064.226.987
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	105.325.750	-	-	-	266.628.755	37.499.756	-	-	409.454.261
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	44.144.535	-	-	-	44.144.535
	Macet/ *Loss*	142.853.446	127.303.367	-	-	-	770.882.112	716.199.980	-	-	1.757.238.905
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.227.403.611**	**536.656.431**	**-**	**43.055.500**	**15.555.800**	**7.178.493.220**	**3.110.365.603**	**-**	**163.534.523**	**12.275.064.688**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
15	**Palembang**										
	Lancar/ *Current*	595.968.167	1.416.270.333	-	39.999.996	26.388.700	10.935.611.039	5.643.972.674	-	374.907.791	19.033.118.700
	Kurang Lancar/ *Substandard*	81.485.267	128.794.351	-	-	-	460.865.098	28.564.000	-	-	699.708.716
	Diragukan/ *Doubtful*	81.195.600	-	-	-	-	156.668.110	29.700.100	-	-	267.563.810
	Macet/ *Loss*	480.101.866	133.310.966	-	-	-	927.451.590	396.002.098	-	-	1.936.866.520
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.238.750.900**	**1.678.375.650**	**-**	**39.999.996**	**26.388.700**	**12.480.595.837**	**6.098.238.872**	**-**	**374.907.791**	**21.937.257.746**
16	**Pekanbaru**										
	Lancar/ *Current*	255.278.700	756.461.338	-	-	31.250.000	5.722.822.379	5.604.296.385	-	152.067.155	12.522.175.957
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	70.000.000	-	-	-	122.361.600	80.509.992	-	-	272.871.592
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	39.583.900	-	-	-	39.583.900
	Macet/ *Loss*	5.100.360	57.962.133	-	-	-	535.109.115	75.212.890	-	-	673.384.498
	Sub jumlah/ *Sub total*	**260.379.060**	**884.423.471**	**-**	**-**	**31.250.000**	**6.419.876.994**	**5.760.019.267**	**-**	**152.067.155**	**13.508.015.947**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
17	**Semarang**										
	Lancar/ *Current*	1.068.980.346	868.488.418	-	16.666.900	60.418.202	13.439.132.047	9.415.571.292	-	457.736.759	25.326.993.964
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	16.440.700	-	-	-	424.349.729	120.371.159	-	-	561.161.588
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	168.480.200	-	-	-	168.480.200
	Macet/ *Loss*	82.511.463	222.730.601	-	-	-	463.637.545	454.132.615	-	-	1.223.012.224
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.151.491.809**	**1.107.659.719**	**-**	**16.666.900**	**60.418.202**	**14.495.599.521**	**9.990.075.066**	**-**	**457.736.759**	**27.279.647.976**
18	**Surabaya**										
	Lancar/ *Current*	1.263.025.403	984.417.513	-	-	322.640.500	14.056.718.287	7.389.491.108	-	397.226.722	24.413.519.533
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	64.787.310	-	-	-	573.206.443	93.771.667	-	-	731.765.420
	Diragukan/ *Doubtful*	24.749.800	-	-	-	-	73.467.700	-	-	-	98.217.500
	Macet/ *Loss*	374.216.967	142.749.400	-	-	-	1.668.289.534	730.651.939	-	37.249.900	2.953.157.740
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.661.992.170**	**1.191.954.223**	**-**	**-**	**322.640.500**	**16.371.681.964**	**8.213.914.714**	**-**	**434.476.622**	**28.196.660.193**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR EKONOMI PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi Program Kemitraan Tahun 2019 (Tidak Diaudit) (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2019 (Unaudited) (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
19	**Yogyakarta**										
	Lancar/ *Current*	2.207.638.673	1.882.546.071	28.332.700	25.276.800	210.415.004	20.927.206.689	19.395.234.006	-	496.603.132	45.173.253.075
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	32.509.850	-	-	-	471.885.019	335.550.207	-	31.111.200	871.056.276
	Diragukan/ *Doubtful*	74.998.400	45.625.400	-	-	-	302.821.578	96.699.885	-	-	520.145.263
	Macet/ *Loss*	250.811.632	383.725.084	-	-	-	2.352.059.106	704.338.566	-	41.371.200	3.732.305.588
	Sub jumlah/ *Sub total*	**2.533.448.705**	**2.344.406.405**	**28.332.700**	**25.276.800**	**210.415.004**	**24.053.972.392**	**20.531.822.664**	**-**	**569.085.532**	**50.296.760.202**
	Jumlah/*Total*	**20.659.363.700**	**26.692.703.287**	**159.634.636**	**444.423.795**	**2.611.642.352**	**237.848.391.773**	**158.182.746.784**	**131.762.748**	**6.048.065.521**	**452.778.734.596**

2020 LAPORAN TAHUNAN

125 Tahun
BRI Menyelamatkan UMKM
Mengubah Kesulitan Menjadi Ketangguhan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
Tel. : (62-21) 251 0244, 251 0254
Fax. : (62-21) 250 0065, 250 0077
Website : www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI 1 lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
Tel. : (62-21) 575 1966
Fax. : (62-21) 570 0916